

BERAKSELERASI MEMPERKUAT KONTRIBUSI BAGI NEGERI

Accelerating to Strengthen Contribution for the Nation



2022

Laporan Tahunan dan Keberlanjutan
Annual and Sustainability Report

2022

Berakselerasi Memperkuat Kontribusi bagi Negeri

Accelerating to Strengthen Contribution for the Nation



PENJELASAN TEMA

Theme Explanation

Berakselerasi Memperkuat Kontribusi bagi Negeri

Accelerating to Strengthen Contribution for the Nation

Seiring pemulihan situasi ekonomi dari dampak pandemi Covid-19, KAI terus memperkuat kontribusi pada sektor transportasi negeri. Hal tersebut terwujud melalui pengembangan usaha dan operasional selama 2022, yang secara mendasar mampu mendorong daya adaptasi KAI dalam menghadapi dinamika industri. Lebih dari itu, kontribusi KAI juga tercermin melalui peningkatan kinerja keberlanjutan yang terlaksana selama 2022, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sebagai upaya berkelanjutan dalam menghadirkan dukungan kuat bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sampai akhir 2022, KAI menerapkan sejumlah langkah strategis mencakup segmen angkutan penumpang dan barang. Pada angkutan penumpang, KAI menerapkan pencegahan penularan Covid-19 sesuai kebijakan Pemerintah, sebagai upaya menyeluruh dalam memberi rasa aman bagi seluruh pelanggan. KAI juga telah menerapkan sejumlah upaya pemasaran, baik secara *online* maupun *offline*, hingga melakukan *reclass*, *rerouting*, dan menghadirkan perjalanan KA tambahan. Kemudian, pada angkutan barang, KAI telah menerapkan sejumlah upaya yang diarahkan guna percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, optimalisasi sarana dan kegiatan pemasaran, hingga menerapkan upaya efisiensi pola operasi untuk meningkatkan volume angkutan, baik pada wilayah Jawa maupun Sumatra.

Penguatan kontribusi KAI antara lain ditunjukkan melalui peningkatan kualitas operasional, baik pada aspek keselamatan, ketepatan waktu, kenyamanan, dan daya tarik perjalanan. Pada 2022, KAI berhasil meningkatkan keandalan melalui kinerja pelayanan dan keselamatan, dengan merealisasikan penurunan kecelakaan dan keterlambatan, baik pada KA penumpang maupun KA barang. Peningkatan kenyamanan dan daya tarik perjalanan KA juga tercermin melalui hadirnya KA Luxury dan KA Panoramic pada 2022.

Atas pencapaian yang diraih pada 2022, kami optimistis kontribusi KAI dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan seiring kelanjutan laju pembangunan negeri. Kami optimistis, KAI akan tumbuh lebih kuat sebagai pengelola moda transportasi berkelas dunia, seiring pencapaian visi untuk hadir menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia.

As the economic situation recovers from the impact of the Covid-19 pandemic, KAI continues to strengthen its contribution to the country's transportation sector. This was realized through business and operational development throughout 2022, which is fundamentally able to encourage KAI's adaptability in dealing with industrial dynamics. Moreover, KAI's contribution is also reflected in the improvement in sustainability performance that was carried out in 2022, covering economic, social, and environmental aspects, as an ongoing effort to provide strong support for achieving sustainable development goals in Indonesia.

As of the end of 2022, KAI was implementing various strategic steps covering the passenger and goods transportation segments. In passenger transportation, KAI implemented prevention of Covid-19 transmission according to Government policy, as a comprehensive effort to provide a sense of security for all customers. KAI has also implemented a number of marketing efforts, both online and offline, to reclassing, rerouting, and presenting additional train trips. Then, in the transportation of goods, KAI implemented numerous efforts aimed at accelerating the development of supporting infrastructure, optimizing marketing facilities and activities, as well as implementing operational pattern efficiency efforts to increase transportation volume, both in Java and Sumatra.

Strengthening of KAI's contribution, among others, is shown through operational quality improvement, both in the aspects of safety, punctuality, comfort, and travel attractiveness. In 2022, KAI succeeded in increasing reliability through service and safety performance, by realizing a reduction in accidents and delays, both on passenger and freight trains. The increased comfort and attractiveness of train travel is also reflected in the presence of the Luxury KA and the Panoramic KA in 2022.

For the performance achieved in 2022, we are optimistic that KAI's contribution can be maintained and continuously improved in line with the country's continued development. We are optimistic that KAI will grow stronger as a world-class mode of transportation operator, in line with achieving its vision to be present as the best transportation ecosystem solution for Indonesia.

KESINAMBUNGAN TEMA

Theme Continuity



2021

Semangat Bangkit Untuk Melayani Lebih Cepat dan Lebih Baik

The Spirit of Rising to Serve Faster and Better

Tahun 2021 menjadi tahun ditanamkan semangat pemulihan dari dampak pandemi COVID-19. Sinyal pemulihan ekonomi dapat terlihat dari Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur global yang berada pada zona ekspansif. Dalam menyambut sinyal tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membangun strategi-strategi khusus yang dilakukan dalam upaya untuk bangkit dan kembali normal di masa Pandemi COVID-19 dengan tetap mengutamakan visi, misi serta nilai-nilai KAI.

Perseroan melakukan berbagai inisiatif dan hal-hal baru seperti perbaikan layanan tempuh kereta api (KA Argo Bromo Anggrek (Gambir – Surabaya Pasar Turi PP), Argo Wilis (Bandung – Surabaya Gubeng PP), Argo Lawu (Gambir – Solo Balapan PP), Argo Dwipangga (Gambir – Solo Balapan PP), dan Taksaka (Gambir – Yogyakarta PP)), penambahan frekuensi perjalanan kereta api, penerapan *dynamic pricing*, penggunaan model skema tarif untuk angkutan sesuai dengan *cluster* kereta api unggulan, non-unggulan dan kereta api perintis. Untuk peningkatan pelayanan kepada penumpang kereta api juga dilakukan dengan menghadirkan wifi gratis dalam KA Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, Argo Dwipangga, Argo Wilis, Taksaka, dan Argo Parahyangan serta layanan *Live Cooking* di atas KA Argo Bromo Anggrek, KA Argo Lawu, Argo Dwipangga, Taksaka, dan Argo Wilis. KAI juga menghadirkan layanan *first mile-last mile*, layanan dompet digital KAI Pay, dan layanan *top up* dan tagihan di KAI Access.

Berbagai langkah terus diupayakan yang mengarah pada keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan dan kenyamanan seperti menjaga kehandalan sarana dan prasarana, peningkatan jaminan keselamatan, implementasi sistem manajemen berbasis pelanggan (*customer driven*) melanjutkan penataan SDM, intensifikasi pasar yang sudah ada, pengembangan sistem

2021 was the year to instill the spirit of recovery from the impact of the COVID-19 pandemic. Signals of economic recovery could be seen from the global manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI), which was in the expansion zone. In welcoming this signal, PT Kereta Api Indonesia (Persero) or KAI developed special strategies carried out in an effort to rise and return to normal during the COVID-19 pandemic while still prioritizing KAI's vision, mission and values.

The Company carried out various initiatives and new things such as improving rail travel services (KA Argo Bromo Anggrek (Gambir – Surabaya Pasar Turi PP), Argo Wilis (Bandung – Surabaya Gubeng PP), Argo Lawu (Gambir – Solo Balapan PP), Argo Dwipangga (Gambir – Solo Balapan PP), and Taksaka (Gambir – Yogyakarta PP)), increasing the frequency of train trips, implementing dynamic pricing, using a tariff scheme model for transportation in accordance with the superior, non-seeded and pioneer train clusters. To improve service to train passengers, it was also carried out by providing free wifi on Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, Argo Dwipangga, Argo Wilis, Taksaka, and Argo Parahyangan trains as well as Live Cooking services on Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, Argo Dwipangga, Taksaka, and Argo Wilis. KAI also offers first mile-last mile services, KAI Pay digital wallet services, and top up and billing services at KAI Access.

Various steps were continuously pursued that lead to safety, punctuality, service and comfort such as maintaining the reliability of facilities and infrastructure, increasing safety assurance, implementing a customer-driven management system (customer driven), continuing HR management, intensifying existing markets, developing an integrated information system,

KESINAMBUNGAN TEMA Theme Continuity

informasi yang terpadu, dan peningkatan peran bisnis non angkutan melalui penertiban aset serta pengelolaan aset secara optimal dan profesional.

Kontribusi Perseroan lainnya ditunjukkan dengan mengawal jalannya Proyek Strategis Nasional berbasis perkeretaapian yaitu LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dengan dijadikannya KAI sebagai pimpinan konsorsium BUMN atas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung serta dikucurkannya dana PMN oleh Pemerintah kepada perseroan untuk pembiayaan kedua proyek tersebut, kita semakin optimis bahwa Indonesia akan segera memiliki moda transportasi tambahan untuk menunjang terciptanya ekosistem transportasi yang baik.

and increasing the role of non-transportation businesses through asset control and optimal and professional asset management.

The Company's other contribution could be shown by overseeing the implementation of the National Strategic Projects based on the railway, namely the Jabodebek LRT and the Jakarta-Bandung high-speed train. With the appointment of KAI as the head of the SOE consortium for the Jakarta Bandung High Speed Rail project and the Government's disbursement of PMN funds to the company to finance the two projects, we were increasingly optimistic that Indonesia could soon have additional modes of transportation to support the creation of a good transportation ecosystem.



2020

Adaptif, Solutif, Kolaboratif Untuk Indonesia

Adaptive, Solutive, Collaboration for Indonesia

Perubahan adalah hal pasti. Kita hanya perlu menerimanya dengan pikiran terbuka. Pada tahun 2020 KAI memasuki era baru yang diwujudkan melalui visi Menjadi Solusi Ekosistem Transportasi Terbaik untuk Indonesia. Perseroan juga mengubah budaya dan logo perusahaan. Seluruh pembaruan ini merupakan upaya kami untuk terus beradaptasi dengan zaman, sehingga pelanggan senantiasa dapat menikmati peningkatan layanan. Kondisi yang menantang tidak menghalangi kami untuk menciptakan momentum penyegaran, melainkan menjadi fondasi untuk bertahan dan berkembang di masa mendatang.

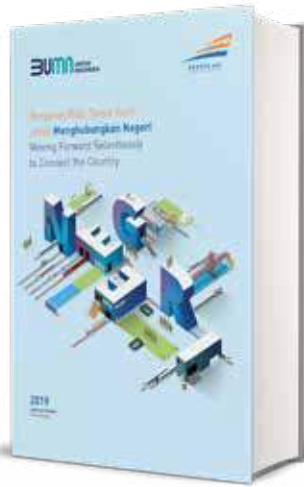
Semangat ini kami tampilkan melalui desain sampul muka yang mengusung pendekatan fotografi. Foto kereta KAI yang sedang berjalan dalam kecepatan tinggi menjadi fokus, merepresentasikan KAI sebagai sosok perusahaan yang dinamis dan dapat beradaptasi dengan cepat untuk menghadapi tantangan di tahun 2020.

Change is a sure thing. We just need to accept it with an open mind. In 2020 KAI has entered a new era which is manifested through the vision of Becoming the Best Transportation Ecosystem Solution for Indonesia. The Company also changed its company culture and logo. All of these updates are our efforts to continue to adapt to the times, hence the customers is able to always enjoy the improvement of our service. The challenging conditions did not prevent us from creating momentum for refreshment, but rather became the foundation for survival and enhancement in the future.

We show this spirit through the face cover design that carries a photographic approach. Photo of the KAI train running at high speed is the focus, represent KAI as a dynamic company figure and can adapt quickly to face challenges in 2020.

KESINAMBUNGAN TEMA

Theme Continuity



2019

Bergerak Maju Tanpa Henti Untuk Menghubungkan Negeri

Moving Forward Relentlessly to Connect the Country

Di tahun 2019 PT Kereta Api Indonesia (Persero) berhasil menorehkan berbagai peningkatan, baik dari segi layanan, maupun dari angka pendapatan. Komitmen Perseroan untuk terus melaju di jalur yang tepat dan tiada henti menghubungkan negeri berhasil dipertahankan dan menghasilkan torehan-torehan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan. Peningkatan layanan perjalanan kereta api berupa kesesuaian jadwal keberangkatan dan penyempurnaan fasilitas di stasiun-stasiun milik KAI juga berhasil dilakukan sebagai bentuk upaya Perseroan untuk menunjukkan komitmen kami. Upaya tersebut tidak akan berhenti dilakukan oleh PT KAI untuk terus mencapai kesuksesan di masa yang akan datang.

In 2019, KAI achieved many improvements, from services segments, to the Company's revenue. The Company commitment to be always on the right track and relentlessly connecting the Country successfully retained and remarked by our best achievements for the Company and for all the stakeholders. Service improvements as the timely train departure schedules and facility improvements on all KAI's train station sites were already accomplished as the Company hard work to show our commitment. Such achievement will be relentlessly retained by KAI to achieve a successful future.



KEKUATAN BISNIS KAI

KAI Business Advantage

KAI terus beroperasi sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi di Indonesia dengan kekuatan bisnis sebagai berikut:

1. Satu-satunya Perseroan BUMN di bidang kereta api di Indonesia.
2. Sebagian besar lini bisnis anak perusahaan membawa keunggulan strategis untuk KAI.
3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan bisnis dan operasi kereta api yang telah dibangun selama beberapa dekade.
4. Telah menjadi operator untuk infrastruktur eksisting (jaringan kereta sepanjang utara dan selatan Pulau Jawa serta sisi utara, barat, dan selatan Pulau Sumatera).
5. Memiliki aset lahan yang sangat luas dan sebagian besar terletak di lokasi strategis.
6. Infrastruktur tetap dirawat dengan baik dan bukan merupakan penyebab utama dari gangguan yang tidak terduga.
7. Peningkatan pada aspek keselamatan yang diindikasikan dari tren positif dari penurunan jumlah kecelakaan dalam 5 (lima) tahun terakhir.
8. Memiliki dukungan dana dari Pemerintah untuk pemeliharaan dan operasi kereta api.
9. Adanya pembiayaan yang kuat.
10. Memiliki jumlah tenaga kerja yang besar.
11. Memiliki 2 (dua) lini bisnis utama, yaitu angkutan penumpang namun juga angkutan barang sehingga tidak bergantung pada satu lini bisnis.

KAI continues to operate as a transportation service provider in Indonesia with the following business advantages:

1. The only state-owned company in the railway sector in Indonesia.
2. Most of the subsidiaries' business lines bring strategic advantages to KAI.
3. Having the knowledge and skills in running a railroad business and operation for decades.
4. Becoming an operator for the existing infrastructure (railway network along the north and south of Java Island as well as the north, west and south sides of Sumatra Island).
5. Having a very large land assets, and most of them are located in strategic locations.
6. The infrastructure remains well maintained and poses no threat from unforeseen disturbances.
7. Improvements in safety aspects indicated by the positive trend of decreasing the number of accidents in the last five years.
8. Having financial support from the government for the maintenance and operation of the railway.
9. Having strong financing.
10. Having a large workforce.
11. Having two main business lines, namely passenger transportation and cargo transportation, so it does not depend on one line of business.



KONTRIBUSI TERBAIK KAI BAGI PEMULIHAN EKONOMI NEGERI

KAI's Best Contribution for the Country's Economic Recovery

Tahun 2022 adalah tahun ketika pandemi Covid-19 masih berlangsung. Akan tetapi, dunia serta Indonesia telah beradaptasi dengan situasi tersebut. Tema HUT Republik Indonesia yang ke-77, yaitu "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat", merupakan titik tolak bagi KAI untuk bangkit lebih cepat dan melayani lebih baik. KAI memiliki semangat untuk bangkit dan memperkuat kontribusi sebagai penyokong perekonomian negeri, yang terwujud melalui sejumlah hal berikut:

The year 2022 was the year when the Covid-19 pandemic was still ongoing. However, the world and Indonesia have adapted to this situation. The theme of the 77th Anniversary of the Republic of Indonesia, namely "Recover Faster, Rise Stronger", was a starting point for KAI to rise faster and serve better. KAI had a passion to rise and strengthen its contribution as a supporter of the country's economy, which was realized through a number of things as follows:



KAI telah mengoperasikan kembali beberapa Kereta Api (KA) serta melakukan peningkatan layanan pada sejumlah KA. Reaktivasi dan peningkatan layanan tersebut diharapkan dapat menarik masyarakat untuk kembali berwisata dan bepergian, yang akhirnya ikut mendorong pemulihan ekonomi daerah.

KAI reactivated a number of trains (KA) as well as improving services on a number of trains. It was hoped that the reactivation and improvement of these services would attract people to return to traveling, which in turn would contribute to the regional economic recovery.

Beberapa KA yang dioperasikan kembali oleh KAI pada 2022:

- KA Garut - Cibatuu.
- KA Pangrango (St. Bogor Paledang - St. Sukabumi).
- KA Wisata Makltam (Sawahlunto - MuaroKalaban, Sumatra Barat)

Several trains reactivated by KAI in 2022 were:

- Garut - Cibatuu Railway.
- Pangrango Train (St. Bogor Paledang - St. Sukabumi).
- Makltam Tourism Train (Sawahlunto - Muaro Kalaban, West Sumatra)

Peningkatan layanan KAI tahun 2022:

- Mempercepat waktu tempuh 10 perjalanan KA jarak jauh (KA Argo Sindoro (Gambir - Semarang Tawang pp), KA Argo Muria (Gambir - Semarang Tawang pp), KA Bima (Gambir - Surabaya Gubeng pp), KA Sembrani (Gambir - Surabaya Pasarturi pp), KA Turangga (Bandung - Surabaya Gubeng pp)).
- Hype Trip KA Taksaka (Yogyakarta - Gambir pp).
- Fitur *Entertainment on Board* (EoB) pada KAI Access, KA Taksaka (Yogyakarta - Gambir pp).
- *Soft-launching* Kereta Panoramic pada 24 Desember 2022 - 8 Januari 2023, KA Taksaka Tambahan (Gambir - Yogyakarta pp)

The improvement of KAI services in 2022 were:

- Speed up the travel time of 10 long-distance train trips (Argo Sindoro Train (Gambir - Semarang Tawang return trip), Argo Muria Train (Gambir - Semarang Tawang return trip), Bima Train (Gambir - Surabaya Gubeng return trip), Sembrani Train (Gambir - Surabaya Pasarturi return trip), Turangga Train (Bandung - Surabaya Gubeng return trip)).
- Hype Trip KA Taksaka (Yogyakarta - Gambir return trip).
- Entertainment on Board (EoB) feature on KAI Access, KA Taksaka (Yogyakarta - Gambir return trip).
- *Soft-launching* of the Panoramic Train on December 24, 2022 - January 8, 2023, Additional Taksaka Train (Gambir - Yogyakarta return trip)

KONTRIBUSI TERBAIK KAI BAGI PEMULIHAN EKONOMI NEGERI KAI's Best Contribution for the Country's Economic Recovery



Setelah Pemerintah mulai memperbolehkan masyarakat untuk kembali bepergian, KAI menggelar travel fair/promo/expo untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan tiket dengan harga kompetitif. Selain itu, KAI juga memfasilitasi pelaksanaan program mudik gratis pada momen Idulfitri. KAI meyakini, seiring pemulihan mobilitas masyarakat, perekonomian negeri akan tumbuh lebih baik.

After the Government started allowing the public to return to traveling, KAI held a travel fair/promo/expo to make it easier for the public to get tickets at competitive prices. In addition, KAI also facilitated the implementation of the free homecoming program at the moment of Idul Fitri. KAI believed that as people's mobility recovers, the country's economy would grow better.

Travel fair/promo/expo KAI di tahun 2022:

- "KAI Access Online Travel Fair", tanggal 27-29 Maret 2022.
- "Mudik Aman Mudik Sehat Bersama BUMN 2022", 27 April 2022.
- "Mudik Gratis Pemprov Jateng", 29 April 2022.
- "Promo Merdeka", 7-17 Agustus 2022.
- "KAI Expo 2022: Adaptive in Collaboration", 17-18 September 2022.
- "KAI Access 12.12 Online Promo", 12 Desember 2022.

KAI's travel fair/promo/expo in 2022 were:

- "KAI Access Online Travel Fair", March 27-29, 2022.
- "Safe Homecoming and Healthy Homecoming with SOEs 2022", April 27, 2022.
- "Central Java Provincial Government Free Homecoming", April 29, 2022.
- "Independence Promo", August 7-17, 2022.
- "KAI Expo 2022: Adaptive in Collaboration", September 17-18, 2022.
- "KAI Access 12.12 Online Promo", December 12, 2022.



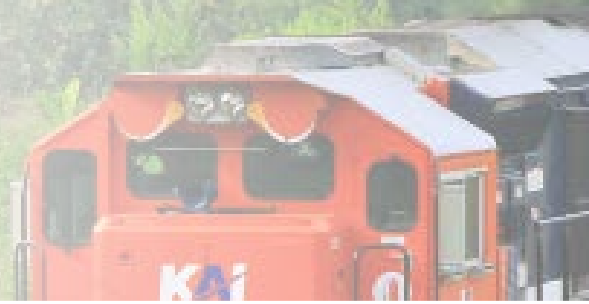
KAI terus memperkuat layanan terbaik untuk angkutan barang, sebagai kontribusi dalam mengurangi beban kepadatan di jalan raya serta mengurangi emisi karbon. Selain itu, KAI juga terus mempererat kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan BUMN dan regulator terkait, sesuai *core value* "Kolaboratif" di dalam AKHLAK.

KAI continued to strengthen the best service for freight transportation, as a contribution to reducing road congestion and reducing carbon emissions. In addition, KAI also continued to strengthen collaboration with state-owned companies and related regulators, according to the "Collaborative" core value in AKHLAK.

- Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KAI, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dan PT Pos Indonesia (Persero) dalam "Sinergi Logistik BUMN", guna mengintegrasikan infrastruktur dan layanan logistik.
- Peningkatan kinerja angkutan barang sebesar 14,4% pada triwulan I (yoy), 15% pada semester I (yoy), dan 14,1% pada periode Januari-November (yoy), sebagai hasil kontribusi KAI bagi sektor logistik nasional.
- *Focus Group Discussion* (FGD) "Kajian Teknik Optimalisasi Konsumsi Bahan Bakar Minyak dan Pelumas pada Sarana di KAI" bersama BPH Migas, sebagai upaya mempererat kolaborasi antara KAI sebagai operator dan BPH Migas sebagai regulator.
- Signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between KAI, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), and PT Pos Indonesia (Persero) on "SOE Logistics Synergy", to integrate infrastructure and logistics services.
- Improved freight transport performance by 14.4% in the first quarter (yoy), 15% in the first semester (yoy), and 14.1% in the January–November (yoy) period, as a result of KAI's contribution to the national logistics sector.
- Focus Group Discussion (FGD) "Technical Study of Optimizing Consumption of Fuel Oil and Lubricants at KAI Facilities" with BPH Migas, as an effort to strengthen collaboration between KAI as operator and BPH Migas as regulator.

Daftar Isi

Table of Contents



1	Penjelasan Tema Theme Explanation
2	Kesinambungan Tema Theme Continuity
5	Kekuatan Bisnis KAI KAI Business Advantage
6	Kontribusi Terbaik KAI Bagi Pemulihan Ekonomi Negeri KAI's Best Contribution for the Country's Economic Recovery
10	Jejak Langkah Milestones

Kilas Kinerja

Performance Highlights

14	Pencapaian Kinerja KAI Tahun 2022 KAI Performance Achievement in 2022
15	Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Data Highlights
17	Informasi Harga Saham Information on Share Price
18	Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi Information on Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds
19	Informasi Sumber Pendanaan Lainnya Other Funding Sources Information
20	Peristiwa Penting Significant Events

Laporan Manajemen

Management Report

30	Laporan Direksi Board of Directors Report
62	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report

Profil Perusahaan

Company Profile

84	Identitas Perseroan Corporate Identity
86	Nama dan Alamat Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Name and Address of Branch Office or Representative Office
87	Brand Perusahaan Corporate Brand
88	Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of the Company
90	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Culture
92	Kegiatan Usaha Business Activities
99	Daftar Keanggotaan Asosiasi Association Membership List
100	Peta Wilayah Operasional Operational Area

102	Struktur Organisasi Organization Structure
104	Profil Direksi Board of Directors Profile
116	Hubungan Afiliasi Anggota Direksi Affiliation of the Board of Directors
118	Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya Changes in Composition of the Board of Directors and the Reason
119	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile
130	Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris Affiliation of the Board of Commissioners
131	Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya Change in Board of Commissioners Composition and the Reasons
132	Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang Terjadi Setelah Tahun Buku Berakhir Changes in the Composition of the Board of Commissioners and/or Board of Directors after the End of Financial Year
133	Profil dan Pengembangan Kompetensi Pegawai Employee Profile and Competence Development
140	Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition
141	Pemegang Saham Utama dan Pengendali Major and Controlling Shareholders
142	Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama List of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures
143	Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure
144	Kronologi Penerbitan Saham Share Listing Chronology
145	Kronologi Penerbitan Obligasi Bond Listing Chronology
146	Kronologi Penerbitan Sukuk Sukuk Issuance Chronology
146	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya Other Securities Listing Chronology
147	Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) Dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Information on Public Accounting Service (AP) and Public Accounting Firm (KAP)
147	Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Perusahaan Supporting Institutions and/or Profession
150	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications
164	Informasi yang Tersedia Pada Situs Web Perusahaan Information on the Company's Website

Tinjauan Fungsi Pendukung Bisnis

Overview of Business Support Units

168	Sumber Daya Manusia Human Capital
190	Teknologi Informasi Information Technology

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

206	Tinjauan Perekonomian Economics Review
237	Tinjauan Keuangan Financial Review
238	Kinerja Keuangan Financial Performance
258	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income Statements
266	Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Statement of Cash Flows
269	Kemampuan Membayar Utang Dan Kolektibilitas Piutang Ability to Pay Debt and Debt Collectibility
272	Struktur Modal Capital Structure
274	Ikatan Material Atas Investasi Barang Modal Material Commitments for Capital Expenditure
275	Investasi Barang Modal Capital Expenditure Investment
118	Investasi Barang Modal Capital Goods Investment
276	Informasi Keuangan yang Telah Dilaporkan yang Mengandung Kejadian yang Sifatnya Luar Biasa dan Jarang Terjadi Financial Information Reported that Contains Extraordinary and Rare Events
276	Komponen-Komponen Substansi dari Pendapatan dan Beban Lainnya Substance Components of Other Income and Expenses
276	Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan atau Pendapatan Bersih Perseroan The Impact of Changes in Prices on the Company's Sales or Net Income
276	Peningkatan/ Penurunan Material dari Penjualan/ Pendapatan Bersih Material Increase/Decrease from Net Sales/Income
276	Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts After the Accountant's Report Date

JEJAK LANGKAH

Milestones

17 Juni / June 17

Namlooze Venooschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NV NISM) membuka jalur kereta api Semarang- Surakarta.

Naamloze Vennootschap Spoorweg Nederlandsch Indische Maatschappij (NV NISM) opened the Semarang Surakarta railway track.

Verenigde Spoorwegenbedrijf mengembangkan jalur kereta api di Pulau Jawa, Deli Spoorwegen Maatschappij membangun jaringan kereta api di Sumatera, dan Staat Spoorwegen mengembangkan transportasi kereta api di Batavia.

Verenigde Spoorwegenbedrijf developed railway track in Java Island, Deli Spoorwegen Maatschappij built railway track in Sumatera, while Staat Spoorwegen developed built railway track in Batavia.

24 Desember / December 24

StaatSpoorwegen mengoperasikan kereta listrik rute Tanjung Priok- Meester Cornelis (Jatinegara) di Batavia, dilanjutkan dengan rute Batavia-Zootenberg (Bogor).

StaatSpoorwegen operated electrictrain for TanjungPriokMeester Cornelis (Jatinegara) route in Batavia, followed by Batavia-Zootenberg (Bogor) route.x

1864

1880

1924

- **November** KAI resmi mencatatkan penerbitan Obligasi I PT Kereta Api Indonesia Tahun 2017 senilai Rp2 triliun di Bursa Efek Indonesia.
- **Desember** KAI melakukan uji coba pengoperasian berpenumpang KA Bandara Soekarno-Hatta dengan tarif khusus.
- **November**, KAI officially issued PT Kereta Api Indonesia Bonds I of 2017 valued Rp2 trillion at Indonesia Stock Exchange.
- **December**, KAI conducted trial with passengers for Soekarno Hatta Airport Train with special tariff.

- **Februari** Penerapan Sistem *Check-in & Boarding Pass*.
- **Juni** Pengoperasian Stasiun JICT, Tanjung Priok
- **February**, Implementation of Check-in & Boarding Pass System.
- **June**, Operations of JICT Station, Tanjung Priok

- **13 Maret** Peluncuran vending machine pembelian tiket KA dengan nama E-Kiosk.
- **4 Desember** Menjalankan KA Kertajaya Rangkaian Panjang yang merupakan KA Penumpang terpanjang dengan 14 kereta penumpang.
- **13 Desember** KAI meluncurkan Rail Clinic, kereta kesehatan pertama di Indonesia.
- **March 13**, The launching of train ticket purchase vending machine named E-Kiosk.
- **December 4**, Operation of Kertajaya Train Long Rollingstock as the longest Passenger Train with 14 passenger trains.
- **December 13**, KAI launched Rail Clinic, the first medical train in Indonesia.

27 Maret / March 27

- Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan KA Bandara pertama di Indonesia di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara. / President of RI, Susilo Bambang Yudhoyono inaugurated the first Airport Train in Indonesia at Kualanamu International Airport, North Sumatera.
- Peluncuran aplikasi KAI Access. / The launching of KAI Access application.

2017

2016

2015

2014

- **Mei** KAI meluncurkan KA Bandara Minangkabau
- **Juni** Peluncuran KA Luxury Class Sleeper Train
- **Agustus** Pengoperasian LRT pertama di Indonesia, yaitu LRT Sumatera Selatan
- **May**, KAI launched Minangkabau Airport Train
- **June**, Launching of KA Luxury Class Sleeper Train
- **August**, Operations of the first LRT in Indonesia, LRT South Sumatera.

- **April** KAI resmikan fasilitas *co-working space* di stasiun-stasiun besar dan lokomotif ber-AC.
- **Mei** KAI operasikan KA Bandara New Yogyakarta International Airport di Kulonprogo.
- **November** KAI mengumumkan rencananya untuk menerbitkan obligasi melalui Penawaran Umum Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 senilai Rp2 triliun.
- **Desember** KAI operasikan KA Bandara Adi Soemarmo, Solo.

- **April**, KAI officially announced the *co-working space* facilities in big train stations, and also announced the locomotive with air conditioner installed in it.
- **May**, KAI operated New Yogyakarta International Airport train at Kulonprogo.
- **November**, KAI announced its plan to issue the bonds through Public Offering Bonds II Kereta Api Indonesia 2019 valued Rp2 trillion.
- **December**, KAI operated Adi Soemarmo Solo Airport train.

2018

2019

- **Februari** KAI bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil untuk verifikasi pelanggan kereta api.
- **Maret** Jalur Kereta Api Garut - Cibatu Kembali Beroperasi.
- **Juli** KAI menerbitkan obligasi dan sukuk senilai Rp3 triliun untuk meningkatkan pelayanan angkutan penumpang dan barang.
- **September** KAI terapkan teknologi *face recognition* yang membuat boarding penumpang cukup dengan pindai wajah.
- **Desember** KAI mengoperasikan kembali KA Wisata Makltam.

- **February** KAI cooperates with the Directorate General of Population and Civil Registration (Ditjen Dukcapil) to verify railroad customers.
- **March** Garut-Cibatu Railway Returned to Operation.
- **July** KAI issued bonds and sukuk worth Rp3 trillion to improve passenger and goods transportation services.
- **September** KAI applied face recognition technology which allowed boarding passengers to simply scan their faces.
- **December** KAI resumed the operation of Makltam Tourism Train.

2022



01

Kilas Kinerja 2022

2022 Performance Highlight



PENCAPAIAN KINERJA KAI TAHUN 2022

KAI Performance Achievement in 2022

Aset / Assets

meningkat sebesar
increased by

↑ **14,03%**

menjadi Rp71,581 triliun
to Rp71.34 trillion

Ekuitas / Equity

meningkat sebesar
increased by

↑ **24,50%**

menjadi RpRp29,08 triliun
to RpRp29.08 trillion

EBITDA / EBITDA

meningkat sebesar
increased by

↑ **178,03%**

menjadi Rp4,53 triliun
to Rp4.53 trillion

Angkutan Penumpang / Passenger Transportation

meningkat sebesar
increased by

↑ **84,06%**

menjadi 284.448.804 orang
to 284,448,804 people

Angkutan Barang / Freight Transportation

meningkat sebesar
increased by

↑ **15,41%**

menjadi 58.006.880 ton
to 58,006,880 tons

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Key Financial Data Highlights

IKHTISAR KEUANGAN DAN RASIO KEUANGAN

Dalam ribuan rupiah

FINANCIAL HIGHLIGHTS AND FINANCIAL RATIO

in thousands of Rupiah

Uraian / Description	2022	2021	2020	2019	2018
POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS					
Aset / Assets					
Aset Lancar / Current Assets	15.337.947.951	9.706.681.516	9.164.500.411	6.898.723.626	8.905.372.126
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	56.243.281.772	53.062.145.256	44.042.568.591	38.006.823.815	30.090.387.283
Jumlah Aset / Total Assets	71.581.229.723	62.768.826.772	53.207.069.002	44.905.547.441	38.995.759.409
Liabilitas dan Ekuitas / Liabilities and Equity					
Liabilitas Jangka Pendek/ Current Liabilities	9.958.123.860	9.574.299.758	9.281.616.345	8.113.387.632	7.251.783.978
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	32.542.921.558	29.782.786.689	26.885.473.155	16.986.535.346	13.443.919.704
Liabilitas / Liabilities	42.501.045.418	39.118.737.129	36.167.089.500	25.099.922.978	20.695.703.682
Ekuitas / Equity	29.080.184.305	23.411.740.325	17.039.979.502	19.805.624.463	18.300.055.727
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	71.581.229.723	62.768.826.772	53.207.069.002	44.905.547.441	38.995.759.409
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian Lain-Lain / Consolidated Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income					
Pendapatan / Revenue	25.577.639.010	17.916.775.924	18.074.850.763	26.251.715.281	26.864.014.499
Beban Pokok Pendapatan / Cost of Revenue	(18.540.861.021)	(15.149.306.550)	(16.910.622.755)	(19.691.312.573)	(21.104.966.384)
Laba Bruto / Gross Profit	7.036.777.989	2.767.469.374	1.164.228.008	6.560.402.708	5.759.048.115
Beban Usaha / Operating Expense	(3.664.532.070)	(2.543.050.490)	(2.171.302.020)	(3.369.615.906)	2.757.384.701
Laba (Rugi) Usaha / Operating Profit (Loss)	3.372.245.919	224.418.884	(1.007.074.012)	3.190.786.802	3.001.663.414
Laba (Rugi) Sebelum Pajak / Profit (Loss) Before Tax	2.210.588.300	(546.980.526)	(2.220.294.721)	2.550.447.808	1.949.185.917
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto / Income Tax Benefit (Expense) - Net	(524.599.080)	121.784.883	484.057.029	(575.400.273)	(413.603.333)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Profit (Loss) for the Year	1.685.989.220	(425.195.643)	(1.736.237.692)	1.975.047.535	1.535.582.583
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif / Comprehensive Profit (Loss)	2.266.829.777	(547.800.883)	(2.847.961.917)	1.803.119.229	1.771.663.128
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada: / Total Profit (Loss) for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk / Owner of Parent Entity	1.782.040.477	(362.460.073)	(1.691.730.010)	2.023.013.519	1.555.220.621
Kepentingan Non-Pengendali / Non-Controlling Interest	(96.051.257)	(62.735.570)	(44.507.682)	(47.965.984)	(19.638.037)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada: / Total Comprehensive Profit (Loss) for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk / Owner of Parent Entity	2.362.914.534	(485.036.924)	(2.803.523.568)	1.851.156.649	1.791.214.900
Kepentingan Non-Pengendali / Non-Controlling Interest	(96.084.757)	(62.763.959)	(44.438.349)	(48.037.420)	(19.551.773)
Laba (Rugi) per Saham Dasar / Basic Earnings (Loss) per Share	93	(29)	(138)	165	172

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Key Financial Data Highlights

Uraian / Description	2022	2021	2020	2019	2018
Rasio Keuangan (%) / Financial Ratio (%)					
Return on Equity (ROE)	11,92	(3,10)	(170,61)	30,0	19,08
Return on Investment (ROI)	7,64	3,86	(1,48)	12,51	11,86
Return on Asset (ROA)	2,49	(0,58)	(3,18)	4,51	3,99
Rasio Kas / Cash Ratio	57,20	39,78	71,21	47,66	39,26
Rasio Lancar / Current Ratio	154,02	101,38	98,74	85,03	123,43
Collection Period (hari) / Collection Period (days)	22,35	26,1	11,39	13,03	15,40
Perputaran Persediaan (hari) / Inventory Turnover (days)	18,20	21,0	23,10	17,26	16,86
Perputaran Total Aset (%) / Total Asset Turnover (%)	38,34	30,94	42,14	67,54	67,58
EBITDA Margin / EBITDA Margin	19,74	10,5	(3,6)	19,02	18,24
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas (%) / Debt to Equity Ratio (%)	102,23	168,11	148,7	78,54	66,34
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset (%) / Liabilities to Total Asset Ratio (%)	59,37	62,70	67,97	55,89	53,07
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan (%) / Profit (Loss) to Income Ratio (%)	7,76	(2,37)	(9,61)	7,52	5,72

IKHTISAR OPERASIONAL

OPERATIONAL PERFORMANCE

Uraian / Description	2022	2021	2020	2019	2018
Jasa Angkutan / Transport Service					
Angkutan Penumpang (dalam orang) / Passenger Transport (in person)	284.448.804	154.537.582	186.832.349	429.259.565	423.846.557
Angkutan Barang (dalam ton) / Freight (in tons)	58.006.880	50.261.778	45.125.346	47.621.203	45.236.309
Pendukung Angkutan KA (dalam Rp-ribu) / KA Transport Support (in thousand Rupiah)	713.611.039	668.715.439	661.780.925	940.498.373	823.500.413
Non-Angkutan (dalam Rp-ribu) / Non- Transport Services (in thousand Rupiah)	1.575.688.038	1.138.798.353	1.163.317.509	1.793.728.369	1.096.177.133
Kompensasi Pemerintah (dalam Rp-ribu) / Government Compensation (in thousand Rupiah)	3.880.245.033	3.907.491.084	3.422.301.613	3.271.013.258	3.391.843.818
Konstruksi (dalam Rp-ribu) / Construction (in thousand Rupiah)	2.610.567.346	2.387.245.804	3.661.476.790	3.733.437.598	6.910.490.198

INFORMASI HARGA SAHAM

Information on Share Price

Modal ditempatkan dan disetor penuh tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebanyak 19.168.743 dan 19.168.743 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- per saham, sehingga total modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp19.168.743.000.000,- dan Rp19.168.743.000.000,-.

Sampai dengan 31 Desember 2022, KAI belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi harga saham, kapitalisasi pasar saham, dan volume perdagangan saham. Sedangkan informasi modal saham selama dua tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

Issued and fully paid capital as of December 31, 2022 and 2021 amounted to 19,168,743 and 19,168,743 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share, so the total issued and fully paid capital amounted to Rp19,168,743,000,000,- and Rp19,168,743,000,000.

As of December 31, 2022, KAI has not yet become a company that has listed its shares on the stock exchange. Thus, there is no information on share prices, share market capitalization, and share trading volume. Meanwhile, information on share capital for the last two years is presented as follows:

Harga Saham Perusahaan

Dalam ribuan rupiah

Company Share Price

in thousands of rupiah

Uraian / Description	2022	2021
Modal Saham Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham / Nominal Value Share Capital Rp1,000,000 per Share Modal Dasar Sebesar 40.000.000 Saham / Authorized Capital 40,000,000 Shares Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh masing-masing per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar 19.168.743 dan 19.168.743 saham / Issued and Fully Paid up Capital as of December 31, 2022 and 2021 amounted to 19,168,743 and 19,168,743 shares, respectively.	19.168.743.000	19.168.743.000

AKSI KORPORASI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia dan surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-12/MBU/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Perseo), RUPS menyetujui penambahan modal yang ditempatkan dan disetor pada Perseroan sebesar Rp3.200.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus miliar rupiah) sehingga modal ditempatkan disetor yang semula Rp19.168.743.000.000,- (sembilan belas triliun seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah) menjadi sebesar Rp22.368.743.000.000,- (dua puluh dua triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah).

Saat ini dana PMN masih berada di rekening PT KAI sehubungan dengan PT KAI belum mendapatkan persetujuan RUPS. Dana PMN akan disetorkan kepada PT PSBI dan dilanjutkan kepada PT KCIC sebagai tambahan setoran modal kepada PT PSBI (porsi *equity* Konsorsium BUMN Indonesia) sebagai pemenuhan *cost overrun* proyek KCJB pada PT KCIC.

CORPORATE ACTION

Based on Government Regulation Number 62 of 2022 concerning the Addition of the Republic of Indonesia's Equity Participation into the Share Capital of the Company (Persero) PT Kereta Api Indonesia and the letter of the Minister of State-Owned Enterprises Number S-12/MBU/01/2023 dated January 10, 2023 regarding Approval of Amendments to the Articles of Association of PT Kereta Api Indonesia (Perseo), the GMS approved the additional issued and paid-up capital of the Company in the amount of Rp3,200,000,000.000,- (three trillion two hundred billion rupiah) so that the issued and paid-up capital which was originally Rp19,168,743,000,000,- (Nineteen trillion one hundred sixty eight billion seven hundred forty three million rupiahs) became Rp22,368,743,000,000 (twenty two trillion three hundred sixty eight billion seven hundred forty three million rupiahs).

Currently, PMN funds was still in PT KAI's account as PT KAI has not yet obtained the approval of the GMS. PMN funds will be deposited to PT PSBI and continued to PT KCIC as an additional capital deposit to PT PSBI (the equity portion of the Indonesian BUMN Consortium) to fulfill the cost overrun of the KCJB project to PT KCIC.

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK, DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI

Information on Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds

INFORMASI OBLIGASI

BOND INFORMATION

No.	Uraian / Description	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik / Electronic Bond Distribution Date	Tenor / Tenor	Mata Uang / Currency	Jumlah Obligasi / Total Bonds	Harga Penawaran / Offering Price	Tanggal Jatuh Tempo / Due Date	Tingkat Suku Bunga / Interest Rate	Status Pembayaran / Payment Status	Peringkat / Rating		Wali Amanat / Trustee
										2022	2021	
1.	Obligasi I Seri A Tahun 2017 / Bond I Series A Year 2017	21 November 2017 / November 21, 2017	5	IDR	1.000.000.000.000,00	100% dari nilai pokok obligasi / 100% of the principle value of the bonds	21 November 2022 / November 21, 2022	7,75% per tahun / 7.75% per year	Lunas / Paid	idAA+	idAA+	PT Bank Mega
2.	Obligasi I Seri B Tahun 2017 / Bond I Series B Year 2017	21 November 2017 / November 21, 2017	7	IDR	1.000.000.000.000,00	100% dari nilai pokok obligasi / 100% of the principle value of the bonds	21 November 2024 / November 21, 2024	8,25% per tahun / 8.25% per year	Belum lunas / Not paid off yet	idAA+	idAA+	PT Bank Mega
3.	Obligasi II Seri A Tahun 2019 / Bond II Series A Year 2019	13 Desember 2019 / December 13, 2019	5	IDR	900.000.000.000,00	100% dari nilai pokok obligasi / 100% of the principle value of the bonds	13 Desember 2024 / December 13, 2024	7,75% per tahun / 7.75% per year	Belum lunas / Not paid off yet	idAA+	idAA+	PT Bank Mega
4.	Obligasi II Seri B Tahun 2019 / Bond II Series B Year 2019	13 Desember 2019 / December 13, 2019	7	IDR	1.100.000.000.000,00	100% dari nilai pokok obligasi / 100% of the principle value of the bonds	13 Desember 2026 / December 13, 2026	8,20% per tahun / 8.20% per year	Belum lunas / Not paid off yet	idAA+	idAA+	PT Bank Mega
5.	Obligasi Berkelanjutan I KAI Tahap I Seri A Tahun 2022 / KAI Sustainable Bonds I Phase I Series A Year 2022	5 Agustus 2022 / August 5, 2022	5	IDR	634.000.000.000,00	100% dari nilai pokok obligasi / 100% of the principle value of the bonds	5 Agustus 2027 / August 5, 2027	7,10% per tahun / 7.10% per year	Belum lunas / Not paid off yet	idAA+	-	PT Bank Mega
6.	Obligasi Berkelanjutan I KAI Tahap I Seri B Tahun 2022 / KAI Sustainable Bonds I Phase I Series B Year 2022	5 Agustus 2022 / August 5, 2022	7	IDR	866.000.000.000,00	100% dari nilai pokok obligasi / 100% of the principle value of the bonds	5 Agustus 2029 / August 5, 2029	8,00% per tahun / 8.00% per year	Belum lunas / Not paid off yet	idAA+(sy)	-	PT Bank Mega

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK, DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI

Information on Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds

INFORMASI SUKUK

Pada tahun 2022, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I KAI Tahap I Tahun 2022 Seri A dan Seri B yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK tanggal 29 Juli 2022. Perincian mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

SUKUK INFORMATION

In 2022, the Company issued a Sustainable Sukuk Ijarah I KAI Phase I 2022 Series A and Series B which received an effective statement from OJK on July 29, 2022. The details regarding this matter are as follows:

No.	Uraian / Description	Tanggal distribusi / Distribution date	Tenor / Tenor	Mata Uang / Currency	Jumlah Obligasi / Total Bonds	Harga Penawaran / Offering Price	Tanggal Jatuh Tempo / Due Date	Status Pembayaran / Payment Status	Status Pembayaran / Payment Status	Peringkat / Rating		Wali Amatan / Trustee
										2022	2021	
1.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I KAI Tahap I Seri A Tahun 2022 / Sustainable Sukuk Ijarah I KAI Phase I 2022 Series A 2022	5 Agustus 2022 / August 5, 2022	5	IDR	117.350.000.000,00	100% dari jumlah pokok obligasi / 100% of the principal amount of the bonds	5 Agustus 2027 / August 5, 2027	Equivalent 7,10% per tahun / Equivalent of 7.10% per year	Belum lunas / Not paid off yet	idAA+	-	PT Bank Mega
2.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I KAI Tahap I Seri B Tahun 2022 / Sustainable Sukuk Ijarah I KAI Phase I 2022 Series B 2022	5 Agustus 2022 / August 5, 2022	7	IDR	382.650.000.000,00	100% dari jumlah pokok obligasi / 100% of the principal amount of the bonds	5 Agustus 2029 / August 5, 2029	Equivalent 7,10% per tahun / Equivalent of 7.10% per year	Belum lunas / Not paid off yet	idAA+(sy)	-	PT Bank Mega

OBLIGASI KONVERSI

Sampai dengan 31 Desember 2022, KAI tidak pernah menerbitkan obligasi konversi.

CONVERTIBLE BOND

As of December 31, 2022, KAI has not issued convertible bonds.

INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Other Funding Sources Information

Sampai dengan 31 Desember 2022, KAI tidak memiliki sumber pendanaan selain yang telah disebutkan.

As of December 31, 2022, KAI has no other funding sources.

PERISTIWA PENTING

Significant Events



2 Februari 2022

February 2, 2022



3 Februari 2022

February 3, 2022

Sinergi KAI dan DAMRI untuk Permudah Masyarakat Bertransportasi Antarmoda

KAI bekerja sama dengan Perum DAMRI untuk menghadirkan layanan antarmoda Kereta Api Jarak Jauh dengan Bus DAMRI. Pelanggan KA Jarak Jauh dapat memesan tiket Bus DAMRI untuk menuju stasiun keberangkatan maupun dari stasiun kedatangan ke tujuan yang diinginkan melalui aplikasi KAI Access. Peluncuran fitur E-Moda KAI Access kerjasama KAI dan DAMRI dilakukan oleh Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dan Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Perum DAMRI Sandry Pasambuna di Stasiun Gambir pada Rabu (02/2).

KAI and DAMRI Synergy to Facilitate Intermodal Transportation

KAI worked with Perum DAMRI to provide intermodal services for Long Distance Trains with DAMRI Buses. Long Distance Train customers could order DAMRI Bus tickets to go to the departure station or from the arrival station to the desired destination through the KAI Access application. The launch of the KAI Access E-Moda feature in collaboration with KAI and DAMRI was carried out by the President Director of KAI Didiek Hartantyo and the Director of Commercial and Business Development of Perum DAMRI Sandry Pasambuna at Gambir Station on Wednesday (02/2).

KAI Bekerja Sama dengan Ditjen Dukcapil untuk Verifikasi Pelanggan Kereta Api

KAI menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas KAI. Penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dan Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Akhmad Sudirman Tavipiyono di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu (2/2).


KAI Cooperates with the Directorate General of Population and Civil Registration (Ditjen Dukcapil) to Verify Railroad Customers

KAI signed a Cooperation Agreement with the Directorate General of Population Affairs and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia concerning Utilization of Population Identification Numbers, Population Data, and Electronic Identity Cards within KAI's Scope of Duties. The signing of the PKS was carried out by the President Director of KAI Didiek Hartantyo and the Director of Facilitation for Utilization of Population Data and Documents Akhmad Sudirman Tavipiyono at Gambir Station, Jakarta, Wednesday (2/2).

PERISTIWA PENTING

Significant Events



 **24 Maret 2022**
March 24, 2022

Jalur Kereta Api Garut - Cibatu Kembali Beroperasi

Jalur KA Garut - Cibatu kembali dioperasikan KAI setelah diresmikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir didampingi Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dan Bupati Garut Rudy Gunawan, serta di Stasiun Garut, Kamis (24/3).

Garut-Cibatu Railway Resumed Its Operation

The Garut - Cibatu railroad line is back in operation by KAI after it was inaugurated by the Minister of Transportation Budi Karya Sumadi and the Minister of BUMN Erick Thohir accompanied by the President Director of KAI Didiek Hartantyo and the Regent of Garut Rudy Gunawan, as well as at Garut Station, Thursday (24/3).



 **3 Mei 2022**
May 3, 2022

Perubahan Operasi KRL untuk Tingkatkan Keselamatan dan Pelayanan

KAI menegaskan bahwa perubahan pola operasi perjalanan KRL yang dimulai sejak Sabtu (28/5) bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan pelayanan perjalanan KRL Jabodetabek. Perubahan pola operasi tersebut dilakukan dengan adanya pelaksanaan *Switch Over* (SO) ke-5 atau SO5 di Stasiun Manggarai oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Untuk memastikan pelayanan KRL berjalan dengan baik, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo turun langsung ke Stasiun Manggarai pada Senin (30/5) atau hari ke-3 penerapan SO 5 Stasiun Manggarai.

Changes in KRL Operations to Improve Safety and Service

KAI emphasized that the change in the pattern of KRL trip operations which began on Saturday (28/5) aims to improve the safety and service of Jabodetabek KRL trips. The change in operating pattern was carried out with the implementation of the 5th Switch Over (SO) or SO5 at Manggarai Station by the Directorate General of Railways of the Ministry of Transportation. To ensure KRL services run well, KAI President Director Didiek Hartantyo went down directly to Manggarai Station on Monday (30/5) or the 3rd day of implementation of SO 5 Manggarai Station.

PERISTIWA PENTING

Significant Events



14 Juli 2022
July 14, 2022

Tingkatkan Pelayanan Angkutan Penumpang dan Barang, KAI Terbitkan Obligasi dan Sukuk Senilai Rp3T

KAI mengumumkan rencananya untuk menerbitkan obligasi melalui instrumen obligasi dan sukuk dengan skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) pada 14 Juli 2022. Penjamin Pelaksana Emisi dalam obligasi ini yaitu Mandiri Sekuritas, CIMB Sekuritas, dan BRI Danareksa Sekuritas. Total Nilai Emisi obligasi dan Sukuk ini adalah sebanyak-banyaknya Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) dengan tenor obligasi 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun.

To Improve Passenger and Goods Transportation Services, KAI Issues Bonds and Sukuk Worth Rp3T

KAI announced its plan to issue bonds through bond and sukuk instruments under the Sustainable Public Offering (PUB) scheme on July 14, 2022. The underwriters for this bond are Mandiri Sekuritas, CIMB Sekuritas, and BRI Danareksa Sekuritas. The total issuance value of these bonds and Sukuk is a maximum of Rp3,000,000,000,000,- (three trillion rupiahs) with a bond tenor of 3 years, 5 years and 7 years.



12 September 2022
September 12, 2022

Sambut HUT ke-77 KAI, Perjalanan Kereta Api Lebih Cepat dan Lebih Singkat

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mempercepat waktu tempuh 10 perjalanan Kereta Api Jarak Jauh mulai keberangkatan Rabu 28 September 2022. KA-KA yang mengalami percepatan waktu tempuh yaitu KA Argo Sindoro (Gambir - Semarang Tawang pp), KA Argo Muria (Gambir - Semarang Tawang pp), KA Bima (Gambir - Surabaya Gubeng pp), KA Sembrani (Gambir - Surabaya Pasarturi pp), dan KA Turangga (Bandung - Surabaya Gubeng pp).

Celebrate KAI's 77th Anniversary, Faster and Shorter Train Trips

PT Kereta Api Indonesia (Persero) accelerated the travel time of 10 Long Distance Train trips starting Wednesday, September 28, 2022. The trains that were experiencing accelerated travel time were Argo Sindoro train (Gambir - Semarang Tawang pp), Argo Muria train (Gambir - Semarang Tawang pp), Bima train (Gambir - Surabaya Gubeng pp), Sembrani train (Gambir - Surabaya Pasarturi pp), and Turangga train (Bandung - Surabaya Gubeng pp).

PERISTIWA PENTING

Significant Events



 **23 September 2022**
September 23, 2022

Sambut HUT Ke-77, KAI Hadirkan *Hype Trip* KA Taksaka bagi Kaum Milenial

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan fasilitas dan pelayanan yang berbeda pada KA Taksaka (Yogyakarta-Gambir pp) bertajuk *Hype Trip: Traveling Feel More Fun*. *Hype Trip* merupakan perjalanan kereta api yang memberikan kesan kekinian kepada para pelanggan. Mulai keberangkatan 23 September, perjalanan Taksaka akan mendapatkan nuansa dan fasilitas yang berbeda mulai dari menu makanan, fasilitas permainan, seragam kru, hingga *livery* dengan *vibes* milenial.

Welcoming the 77th Anniversary, KAI Presents the Taksaka Train *Hype Trip* for Millennials

PT Kereta Api Indonesia (Persero) presents different facilities and services on the Taksaka Train (Yogyakarta-Gambir pp) entitled *Hype Trip: Traveling Feel More Fun*. *Hype Trip* is a train trip that gives a contemporary impression to customers. Starting from September 23, Taksaka's trip will get a different nuance and facilities, starting from the food menu, game facilities, crew uniforms, to *livery* with millennial *vibes*.



 **26 September 2022**
September 26, 2022

Transisi ke EBT, KAI Resmikan Pemasangan Solar Panel di Stasiun dan Perkantoran

KAI telah memasang panel surya pada Stasiun Gambir dengan daya 40,5 kWp dan gedung Jakarta Railway Center dengan daya 40 kWp. Pemasangan solar panel ini merupakan upaya transisi energi yang dilakukan KAI dengan menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk suplai energi listrik di berbagai aset KAI.

Transitioning to EBT, KAI Inaugurates Solar Panel Installation at Stations and Offices

KAI has installed solar panels at Gambir Station with a power of 40.5 kWp and the Jakarta Railway Center building with a power of 40 kWp. The installation of this solar panel is an energy transition effort carried out by KAI by using New, Renewable Energy (EBT) to supply electrical energy in various KAI assets.

PERISTIWA PENTING

Significant Events



28 September 2022

September 28, 2022



6 Oktober 2022

October 6, 2022

Terapkan Face Recognition, Boarding Kini Cukup Pindai Wajah

Sejak 28 September lalu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mulai mengujicobakan fasilitas *Face Recognition Boarding Gate* di Stasiun Bandung. Hadirnya *Face Recognition Boarding Gate* tersebut bertujuan untuk mempermudah pelanggan KA Jarak Jauh yang ingin naik kereta api, tanpa perlu repot-repot menunjukkan berbagai dokumen seperti *boarding pass* fisik, *e-boarding pass*, KTP, ataupun dokumen vaksinasi.

Through Face Recognition, Boarding Can Be Done With Face Scan

Since last September 28, PT Kereta Api Indonesia (Persero) has started testing the *Face Recognition Boarding Gate* facility at Bandung Station. The presence of the *Face Recognition Boarding Gate* aims to make it easier for Long Distance Train customers who want to take the train, without the hassle of showing various documents such as physical boarding passes, e-boarding passes, KTPs, or vaccination documents.

KAI Hadirkan Fitur Baru "Entertainment on Board" di KAI Access

KAI menghadirkan fitur baru pada KAI Access yaitu menu *Entertainment on Board* (EoB). EoB merupakan menu yang menampilkan berbagai hiburan yang dapat diakses melalui jaringan wifi khusus selama dalam perjalanan. Saat ini layanan EoB sudah dapat dinikmati pada perjalanan Kereta Api Taksaka (Gambir – Yogyakarta pp). Fitur *Entertainment on Board* ini juga memiliki keunggulan di mana dapat diakses oleh pelanggan tanpa perlu menggunakan kuota internet.

KAI Presents a New Feature "Entertainment on Board" at KAI Access

KAI presents a new feature on KAI Access, namely the *Entertainment on Board* (EoB) menu. EoB is a menu that displays a variety of entertainment that can be accessed through a special wifi network while traveling. Currently, EoB services can be enjoyed on Taksaka Train trips (Gambir – Yogyakarta pp). The *Entertainment on Board* feature also has the advantage that it can be accessed by customers without the need to use internet quota.

PERISTIWA PENTING

Significant Events



 **11 November 2022**
November 11, 2022

KAI Luncurkan Film Dokumenter “Bergerak dengan Bahagia, Bergerak untuk Indonesia”

Film dokumenter KAI berjudul “Bergerak dengan Bahagia, Bergerak untuk Indonesia” bergenre *Traveler Report* dengan target penonton komunitas pencinta kereta api, komunitas film, dan *stakeholders* KAI. Film berdurasi 51 menit ini bercerita tentang evaluasi dan inovasi KAI untuk semakin meningkatkan pelayanannya dari tahun ke tahun. Dari upaya mewujudkan komitmennya tersebut, KAI akhirnya berhasil menciptakan layanan transportasi seperti yang ada sekarang ini. KAI memproduksi film tersebut dalam rangka HUT ke-77 KAI pada akhir September lalu, serta menyemarakkan perhelatan G20. Melalui film tersebut, KAI mengajak masyarakat untuk semakin mencintai transportasi kereta api kemudian beralih menggunakan transportasi umum untuk bermobilitas.

KAI Launches a Documentary Film “Moving Happily, Moving for Indonesia”

KAI’s documentary film entitled “Moving with Happiness, Moving for Indonesia” is of the *Traveler Report* genre with the target audience being the train lover community, the film community, and KAI *stakeholders*. This 51-minute film tells the story of KAI’s evaluation and innovation to further improve its services from year to year. From efforts to realize this commitment, KAI has finally succeeded in creating transportation services as they are today. KAI produced the film in the context of KAI’s 77th anniversary at the end of last September, as well as enlivening the G20 event. Through the film, KAI invited the public to love rail transportation more and then switch to using public transportation for mobility.



 **20 Desember 2022**
December 20, 2022

KA Wisata Mak Itam kembali beroperasi

KA Wisata Mak Itam di Sawahlunto kembali dioperasikan setelah sebelumnya berhenti beroperasi sejak tahun 2014. Pengoperasian kembali KA Wisata Mak Itam tersebut dapat terlaksana setelah adanya kolaborasi antar BUMN yaitu KAI, Biofarma, Pupuk Indonesia, dan Semen Indonesia. Peresmian pengoperasian kembali KA Wisata Mak Itam di jalur kereta api Sawahlunto – Muaro Kalaban, Sumatera Barat, dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy, Wali Kota Sawahlunto Deri Asta, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Deputy Bidang SDM & TI Kementerian BUMN Teddy Barata.

The Makltam Tourism Train resumed its operation

The Makltam Tourism Train in Sawahlunto is back in operation after previously stopping operations in 2014. The Makltam Tourism Train is re-operating after collaboration between SOEs, namely KAI, Biofarma, Pupuk Indonesia, and Semen Indonesia. The inauguration of the reopening of the Makltam Tourism Train on Sawahlunto - Muaro Kalaban railroad, West Sumatra, was carried out by the Minister of BUMN Erick Thohir, Deputy Governor of West Sumatra Audy Joinaldy, Mayor of Sawahlunto Deri Asta, Member of Commission VI of the Republic of Indonesia DPR Andre Rosiade, Deputy for HR & IT Ministry of BUMN Teddy Barata.

PERISTIWA PENTING

Significant Events



22 Desember 2022
December 22, 2022

Peluncuran seragam baru frontliner KAI karya Anne Avantie

Seragam baru dengan label Seragam Cinta Indonesia ini memadupadankan batik bermotif Burung Sawunggaling, Parang, dan Truntum, serta warna dominan biru tua.

The launch of the new KAI frontliner uniform by Anne Avantie

The new uniform with the label Seragam Cinta Indonesia combines batik with the Sawunggaling Bird, Parang and Truntum motifs, and the dominant color is dark blue.



24 Desember 2022
December 24, 2022

Kereta Panoramic beroperasi perdana

Soft-launching operasional Kereta Panoramic pada 24 Desember 2022 yang akan dirangkaikan pada perjalanan KA Taksaka Tambahan (Gambir - Yogyakarta pp). KA Taksaka Tambahan dengan Kereta Panoramic akan beroperasi pada 24 Desember 2022 s.d 8 Januari 2023. Fasilitas pada Kereta Panoramic meliputi kursi yang nyaman, tirai jendela yang dapat dikendalikan secara remote, toilet yang luas dan terdapat sensor otomatis, televisi di dinding ujung kereta, serta rak bagasi khusus di ujung kereta. Pelanggan Kereta Panoramic juga mendapat layanan khusus berupa *snack*, makanan, minuman, dan selimut secara cuma-cuma.

The Panoramic Train operated for the first time

The operational *soft-launching* of the Panoramic Train on December 24, 2022 which was connected to the Additional Taksaka Train trip (Gambir - Yogyakarta pp). Additional Taksaka Trains with Panoramic Trains operated from December 24, 2022 to January 8, 2023. Facilities on the Panoramic Train included comfortable seats, window blinds that could be controlled remotely, spacious toilets and automatic sensors, televisions on the end walls of the train, and special baggage racks at the end of the train. Panoramic Train customers also received special services in the form of free snacks, food, drinks and blankets.





02

Laporan Manajemen Management Report



LAPORAN DIREKSI

Board Of Directors Report

Sebagai entitas BUMN yang memiliki amanat untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, Perseroan secara konsisten berupaya menjalankan aktivitas operasional dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan (*sustainability*).

As a State-Owned Enterprise (SOE) mandated to support the government's efforts to achieve sustainable development in line with the Sustainable Development Goals which are one of the global agendas, the Company strives to consistently carry out operational activities by prioritizing the principle of sustainability.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga PT Kereta Api Indonesia (Persero) berhasil melalui tahun 2022 dengan kinerja Perseroan yang memuaskan, setelah terpukul akibat pandemi Covid-19. Tahun 2022 menjadi masa *recovery* bagi KAI. KAI mulai bangkit dari krisis melalui penerapan transformasi digital.

KAI memperoleh banyak pelajaran berharga dari pandemi, salah satunya adalah beradaptasi dengan teknologi secara cepat. Melalui transformasi digital yang dilakukan oleh Perseroan, KAI bertekad untuk membangun kereta api dengan standar kelas dunia. Maka, untuk menjalankan transformasi digital ini, kami dibantu oleh konsultan nomor satu dunia. Pada transformasi digital ini, ada 5 (lima) aspek yang di-*upgrade* secara khusus di KAI yaitu angkutan penumpang, angkutan barang, *rolling stock*, *procurement*, dan *operational excellence* serta di bidang *infrastructure maintenance*.

Lebih lanjut, saat ini Perseroan melihat pelanggan KAI 80% adalah generasi Y dan Z, sehingga Perseroan dituntut untuk terus berinovasi antara lain dengan memanfaatkan penggunaan *Artificial Intelligence* dan *database*. Oleh karena itu, kemampuan untuk berinovasi dan bertransformasi menjadi salah satu kunci kami untuk dapat beradaptasi dan

We express our praise and gratitude to the Almighty God for His blessings in enabling thus enabling PT Kereta Api Indonesia (Persero) to overcome 2022 with satisfactory performance, after the adverse impact of the Covid-19 pandemic. In 2022, KAI experienced its recovery as it began to overcome the crisis through digital transformation.

KAI received many valuable lessons from the pandemic, one of which is switch adaptation to technology. Through digital transformation, KAI is determined to develop trains with world-class standards. Thus, this digital transformation is also supported with assistance of the world's number one consultant. There are 5 (five) aspects that are specifically upgraded at KAI for digital transformation, namely passenger transportation, freight transportation, rolling stock, procurement, and operational excellence as well infrastructure maintenance.

In addition, the Company is well aware that 80% of KAI's customers are generations Y and Z. Thus, the Company must strive to carry out innovations through the use of Artificial Intelligence and databases. Our ability to carry out innovation and transformation is crucial for the Company to adapt and remain relevant to any possible conditions, so that railway

LAPORAN DIREKSI
Board Of Directors Report

DIDIEK HARTANTYO

Direktur Utama
President Director



tetap relevan dengan kondisi apapun yang terjadi, sehingga kereta api akan tetap sesuai dengan zamannya. KAI akan terus bertekad untuk tidak berhenti berinovasi sehingga melalui upaya ini Perseroan dapat terus tumbuh dan memberikan layanan transportasi yang terbaik untuk masyarakat.

Selanjutnya, perkenankan kami untuk menyampaikan Laporan Tahunan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban keterbukaan informasi kepada seluruh pemegang saham, pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya. Laporan Tahunan ini menyampaikan hasil kinerja Perseroan, analisis prospek perusahaan, pengembangan implementasi penerapan tata kelola perusahaan, dan penilaian kinerja komite-komite di bawah Direksi.

ANALISIS ATAS KINERJA PERUSAHAAN

Analysis of Company Performance

Tahun 2022 dunia masih dibayangi oleh pandemi Covid-19 sehingga hal ini memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dunia maupun nasional. Di samping itu, konflik geopolitik turut memperburuk ekonomi dunia. Hal ini dapat terlihat adanya pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh sebagian besar negara termasuk di negara-negara maju, sehingga turut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi global, meskipun pengetatan kebijakan moneter ini diperlukan untuk stabilisasi harga.

Melansir dari *World Economic Outlook* yang rilis pada April 2023, *International Monetary Fund* (IMF) melaporkan realisasi pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,4% pada 2022. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di tahun 2022 tumbuh 2,1% *year-on-year* (yoy), Tiongkok tumbuh 3,0% (yoy), Jepang tumbuh 1,0% (yoy), Korea Selatan tumbuh 2,6% (yoy), serta Singapura tumbuh 3,8% (yoy).

Sejalan dengan perekonomian global, perekonomian Indonesia di tahun 2022 berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat tumbuh 5,31%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,69%. Laju pemulihan yang sangat kuat di tahun 2022 tersebut menjadi pijakan yang kokoh bagi perekonomian nasional untuk menghadapi tantangan jangka pendek, sekaligus untuk melanjutkan agenda pembangunan jangka menengah-panjang.

conditions shall stay up to date. KAI strives to keep innovating so that these efforts will encourage the Company to be able continue to grow and provide the best transportation services for the public.

Furthermore, please allow us to submit this Annual Report as a form of accountability for information disclosure to all shareholders, stakeholders and the public in general. This Annual Report presents the results of the Company's performance, analysis of the company's prospects, development of the implementation of corporate governance, and performance evaluation of the committees under the Board of Directors.

In 2022 the world was still overshadowed by the Covid-19 pandemic, which had an impact on world and national economic growth. In addition, geopolitical conflicts also exacerbated the world economy. This could be seen from the tightening of monetary policy by most countries, including developed countries, which contributed to the slowdown in global economic growth, even though this monetary policy tightening was necessary for price stabilization.

According to the *World Economic Outlook* released in April 2023, the *International Monetary Fund* (IMF) reported global economic growth realization of 3.4%. Meanwhile, based on data from the Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia/National Development Planning Agency (Bappenas), United States economic growth in 2022 grew by 2.1% *year-on-year* (yoy), China grew by 3.0% (yoy), Japan grew by 1.0% (yoy), South Korea grew by 2.6% (yoy), and Singapore grew by 3.8% (yoy).

In line with the global economy, the Indonesian economy in 2022 based on data compiled by the Statistics Indonesia (BPS) recorded growth of 5.31%, higher than the achievement in 2021 which experienced a growth contraction of 3.69%. The very strong pace of recovery in 2022 became a solid foundation for the national economy to face short-term challenges, as well as to continue the medium-long term development agenda.

Perkembangan kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga sejalan dengan pertumbuhan signifikan pada pendapatan negara, dan belanja negara yang meningkat. Pendapatan negara dan hibah meningkat 30,6% (yoy) menjadi sebesar Rp2.626,4 triliun atau mencapai 115,9% dari pagu APBN 2022. Kinerja tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan dalam negeri, penerimaan perpajakan, dan PNB. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp3.090,8 triliun atau tumbuh 10,9% (yoy). Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 114,1% dari APBN, sementara TKD mencapai 101,4%.

Lebih lanjut, terkait kinerja operasional KAI, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari–Desember 2022, jumlah penumpang mencapai 284,4 juta orang atau naik 84,1% dibanding periode yang sama di tahun 2021. Jumlah barang yang diangkut kereta api juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 15,41% menjadi 58,01 juta ton. Meningkatnya angkutan barang KAI pada 2022 antara lain didorong oleh adanya penambahan gerbong barang serta perjalanan kereta api barang. Angkutan barang KAI masih diandalkan perusahaan-perusahaan di saat angkutan penumpang terus tumbuh secara bertahap saat kondisi pandemi melandai.

Di tahun 2022, KAI berupaya untuk melakukan *recovery* yang lebih cepat. KAI bertekad untuk mengembangkan portofolio bisnis yang lebih luas. Visi KAI adalah menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Artinya, untuk berkembang, KAI harus berkolaborasi dengan moda transportasi lain. Untuk itulah, KAI membangun ekosistem, seperti di angkutan penumpang, KAI berkolaborasi dengan moda transportasi lain. KAI membangun *first mile* dan *last mile*, contohnya KAI Access yang bisa digunakan untuk memesan taksi Blue Bird, sehingga penumpang dari rumah ke stasiun bisa menggunakan taksi. Kolaborasi KAI juga dilakukan dengan pihak lain, seperti Damri. KAI tidak hanya membangun ekosistem pada sektor angkutan penumpang tetapi juga di sektor angkutan barang, yang dilakukan melalui kolaborasi dengan Pelindo, sehingga dapat masuk ke berbagai pelabuhan dan kawasan.

Selama ini, KAI memiliki 2 (dua) pilar utama yang menyokong pendapatan yakni angkutan penumpang dan angkutan barang. Namun, saat ini pilar ketiga sedang dikembangkan, yakni optimalisasi aset. KAI mengoptimalkan aset-aset yang ada di stasiun ataupun aset-aset kereta api yang tersebar di berbagai daerah. Itulah sebabnya, KAI mulai melakukan penataan dan optimalisasi kawasan ritel di berbagai stasiun.

The development in Indonesia's fiscal condition was maintained in line with significant growth in state revenues and increased state spending. The state revenues and grants increased by 30.6% (yoy) to Rp2,626.4 trillion or 115.9% of the ceiling in the 2022 State Budget. This performance was driven by increased domestic revenues, tax revenues and PNB. Meanwhile, state spending reached Rp3,090.8 trillion or grew by 10.9% (yoy). Realization of central government spending reached 114.1% of the State Budget, while TKD reached 101.4%.

Furthermore, regarding KAI's operational performance, according to the Statistics Indonesia (BPS) records, in January–December 2022, the number of passengers reached 284.4 million people, an increase of 84.1% compared to the same period in 2021. The amount of goods transported by trains also experienced an increase of 15.41% to 58.01 million tons. The increase in KAI's freight transport in 2022 was driven by, among other things, the addition of freight cars and freight train trips. KAI's freight transport companies were still relied on while passenger transport continued to grow gradually when the pandemic condition declined.

In 2022, KAI strived to carry out a swift recovery. KAI is determined to realize an expanded business portfolio. With its vision to become the best transportation ecosystem solution for Indonesia, KAI's development must also involve other modes of transportation. Therefore, KAI ecosystem developments such as in passenger transportation is carried out with other modes of transportation. KAI also provides first mile and last mile services, e.g., KAI Access which can be used to order Blue Bird taxis to facilitate passengers ordering taxis from home to the train stations. KAI also collaborates with other parties, such as Damri. In addition to passenger transport, KAI also carried out collaboration the freight transport with Pelindo in facilitating easy access to various ports and areas.

Currently, KAI has 2 (two) main pillars that support revenue generation, namely passenger transportation and freight transportation. However, a third pillar of asset optimization is being developed. KAI optimizes existing assets at stations or railroad assets spread across various regions. This encourages KAI to start organizing and optimizing retail areas at various stations.

Meskipun kondisi sudah mulai membaik, Perseroan tetap harus waspada terhadap segala risiko yang mungkin dapat terjadi. Untuk itu, Direksi telah menetapkan strategi Perseroan dan kebijakan strategis sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2022 serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dengan uraian sebagai berikut:

Angkutan Penumpang

1. KAI melakukan berbagai upaya untuk beradaptasi dengan pemulihan kondisi pandemi, sebagai berikut:
 - a. Melakukan prosedur sesuai kebijakan Pemerintah, mencakup (1) Pemeriksaan suhu tubuh, ketersediaan *hand sanitizer*, dan kebijakan lainnya yang memitigasi penyebaran Covid-19 di lingkungan stasiun dan KA, serta (2) Penyemprotan disinfektan secara rutin pada KA;
 - b. Pemberian *healthy kit* berupa masker dan tisu antiseptik untuk penumpang jarak sedang dan jarak jauh;
 - c. Penyediaan jasa *rapid test* antigen di beberapa stasiun bagi pengguna jasa angkutan kereta api dengan harga terjangkau sesuai dengan persyaratan perjalanan dari Pemerintah sampai dengan Agustus 2022.
2. Menyelenggarakan *event offline* kembali sesuai dengan protokol kesehatan selain tentunya kegiatan promosi menggunakan media sosial dan *website* perusahaan yang bertujuan untuk menginformasikan serta mengingatkan kepada pengguna jasa.
3. *Reclass*, *rerouting*, dan perjalanan kereta KA tambahan dengan melakukan penambahan atau menjalankan sebagian KA yang okupansinya tinggi baik KA Reguler, KA fakultatif, KA tambahan dan penambahan stamformasi rangkaian KA pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022.
4. Menerapkan inovasi yang guna meningkatkan pendapatan angkutan penumpang.

Angkutan Barang

1. Menerapkan upaya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, optimalisasi sarana dan kegiatan pemasaran, baik pada angkutan barang wilayah Jawa maupun Sumatra.
2. Menerapkan upaya efisiensi pola operasi untuk peningkatan volume angkutan, baik pada angkutan barang wilayah Jawa maupun Sumatra.

Even though conditions have started to improve, the Company must remain vigilant against all risks that may occur. For this reason, the Board of Directors has determined the Company's strategy and strategic policies in accordance with the 2022 Work Plan and Corporate Budget (RKAP) and the Company's Long Term Plan (RJPP), with the following description:

Passenger Transportation

1. KAI made various efforts to adapt to the pandemic recovery conditions as follows:
 - a. Carried out procedures according to Government policies, including (1) Checking body temperature, availability of hand sanitizers, and other policies that mitigate the spread of Covid-19 in trains and stations environments, and (2) Routinely spraying disinfectants on trains;
 - b. Provision of healthy kits in the form of masks and antiseptic wipes for medium and long distance passengers;
 - c. Provision of rapid antigen test services at several stations for users of rail transportation services at affordable prices in accordance with travel requirements from the Government until August 2022.
2. Held offline events in accordance with health protocols apart from of course promotional activities using social media and company websites that aim to inform and remind service users.
3. Reclassing, rerouting, and additional train trips by adding or running some of the trains with high occupancy, both Regular trains, optional trains, additional trains and addition of train sets stamformation from January to December 2022.
4. Implementing innovations to increase passenger transportation revenue.

Freight Transport

1. Implement efforts to accelerate the development of supporting infrastructure, optimize marketing facilities and activities, both in the transportation of goods in Java and Sumatra.
2. Implement operational pattern efficiency efforts to increase transport volume, both in the transportation of goods in Java and Sumatra.

Untuk menciptakan kinerja yang optimal, Direksi turut terlibat dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perseroan. Direksi memimpin langsung penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang mencakup kebijakan dan strategi Perusahaan. Keterlibatan Direksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program RKAP berjalan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan, yang dilakukan melalui *monitoring* dan evaluasi.

Penerapan strategi yang berjalan baik di sepanjang tahun 2022 membuahkan hasil yang memuaskan. Di tahun 2022, kinerja Perseroan diakui telah memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target RKAP 2022. Total Aset KAI tahun 2022, berhasil memenuhi target dengan pencapaian 95% dengan realisasi sebesar Rp71,58 triliun. Hal ini terjadi seiring dengan pencapaian aset lancar yang mencapai 234% serta pencapaian aset tidak lancar mencapai 82% terhadap target. Dari sisi ekuitas, KAI juga berhasil memenuhi 106% terhadap target dengan realisasi sebesar Rp29,08 triliun. Tahun 2022 KAI membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp1,69 triliun, lebih tinggi dibandingkan target pada RKAP 2022 dengan persentase 1.625%.

Sementara itu, capaian target volume angkutan penumpang tahun 2022 adalah sejumlah 284.448.804 orang, berada di atas target RKAP 2022 dengan persentase 104%. Secara spesifik, KA Utama Kelas Ekonomi dan KA Lokal Ekonomi berkontribusi secara dominan dengan persentase masing-masing 164% dan 99% dari target, dengan realisasi masing-masing mencapai 19.338.612 dan 252.572.288 orang. Angkutan penumpang lain, yaitu KA Utama Kelas Eksekutif dan KA Utama Kelas Bisnis mampu melampaui target dengan persentase 187% dan 159%, dengan realisasi jumlah penumpang masing-masing 11.522.349 dan 1.015.555 orang.

Dari sisi angkutan barang, KAI mencatatkan realisasi volume angkutan mencapai 58.006.880 ton, memenuhi 96% terhadap target. Angkutan batu bara berkontribusi secara paling dominan dengan realisasi 45.428.564 ton, atau memenuhi 97% terhadap target. Adapun, angkutan barang lain yaitu angkutan peti kemas dan BBM berhasil memenuhi target dengan persentase masing-masing 105% dan 104%, dengan realisasi volume barang mencapai 4.802.436 dan 2.554.062 ton. Selain itu, KAI merealisasikan volume angkutan semen mencapai 3.856.140 ton atau memenuhi 72% dari target serta General Cargo dan Barang Hantaran Potongan (BHP) mencapai 208.980 ton atau memenuhi 79% dari target.

To create an optimal performance, the Board of Directors is involved in formulating the Company's strategy and strategic policies. The Board of Directors directly leads the preparation of the Company's Budget Work Plan (RKAP) which includes Company policies and strategies. The involvement of the Board of Directors aims to ensure that the RKAP program runs according to the established strategy, which is carried out through monitoring and evaluation.

The well-implemented strategies throughout 2022 produced satisfying results. In 2022, the Company's performance has met the expectations of stakeholders as seen from the achievement of the 2022 RKAP target. KAI's total assets in 2022 have succeeded in meeting the target with an achievement of 95% with a realization of Rp71.58 trillion. This occurred in line with the achievement of current assets which reached 234% and the achievement of non-current assets which reached 82% of the target. From the equity aspect, KAI also succeeded in meeting 106% of the target with a realization of Rp29.08 trillion. In 2022 KAI's profit for the year amounted to Rp1.69 trillion, higher than the target in the 2022 RKAP with a percentage of 1,625%.

Meanwhile, the achievement of the target volume of passenger transport in 2022 was 284,448,804 people, which was above the 2022 RKAP target with a percentage of 104%. Specifically, the Main Economy Class Trains and Local Economy Trains contributed dominantly with a percentage of 164% and 99% respectively of the target, with realization reaching 19,338,612 and 252,572,288 people respectively. Other passenger transportation, namely the Main Executive Class Train and the Main Business Class Train were able to exceed the target with a percentage of 187% and 159%, with the realization of the number of passengers 11,522,349 and 1,015,555 people, respectively.

In terms of freight transportation, the realization of the volume of transportation reached 58,006,880 tons, fulfilling 96% of the target. Coal transport contributed the most dominantly with the realization of 45,428,564 tons, or fulfilled 97% of the target. Meanwhile, other goods transportation, namely container transportation and fuel, managed to meet the target with respective percentages of 105% and 104%, with realized volumes of goods reaching 4,802,436 and 2,554,062 tons. In addition, realization of cement transportation volume reached 3,856,140 tons or fulfilled 72% of the target and General Cargo and Delivery Goods Unit (BHP) reached 208,980 tons or fulfilled 79% of the target.

Pada kinerja keuangan, KAI berhasil membukukan tingkat perolehan laba yang baik di 2022. Pendapatan KAI pada 2022 adalah sejumlah Rp25,58 triliun atau memenuhi 111% dari target, dengan realisasi beban usaha sejumlah Rp22,21 triliun atau memenuhi 102% dari target, seiring pemulihan aktivitas operasi kereta api di tengah perbaikan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Atas jumlah tersebut, KAI berhasil mencatatkan realisasi laba usaha sejumlah Rp3,37 triliun atau memenuhi 237% terhadap target di dalam RKAP 2022.

In terms of financial performance, KAI has managed to record a good profit rate in 2022. KAI's revenue in 2022 amounted to Rp25.58 trillion or fulfilled 111% of the target, with realized operating expenses of Rp22.21 trillion or fulfilled 102% of the target, along with the train operation activity recovery in the midst of improved Covid-19 pandemic situation in Indonesia. For this amount, KAI managed to record a realized operating profit of Rp3.37 trillion or fulfilled 237% of the target in the 2022 RKAP.

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PERUSAHAAN

Constraints Faced by The Company

Dalam menjalankan bisnis, setiap perusahaan pada umumnya dihadapkan dengan berbagai kendala dan tantangan. Hal yang sama juga dialami oleh KAI. Kegiatan bisnis yang dijalankan oleh Perseroan tidak terlepas dari kendala-kendala antara lain, tuntutan untuk beradaptasi dengan cepat sesuai kebutuhan masyarakat, yang juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kemudian, Perseroan juga menghadapi tantangan berupa kehadiran pilihan transportasi lain, seperti moda bus melalui jalur tol Transjawa dengan kualitas layanan dan kecepatan waktu tempuh yang bersaing dengan moda kereta api.

In running a business, every company generally faces various obstacles and challenges. KAI also experiences the same thing. The business activities carried out by the Company are inseparable from the constraints, among others demand of swift adaptation according to the needs of the public, which was also influenced by changes in the public restriction policy. The Company also faced challenges in the form of other transportation options, such as the bus through the Transjawa toll road with competitive service quality and travel time speeds with rail.

Sebagai solusinya, Perseroan menerapkan penyempurnaan layanan berupa percepatan waktu tempuh terhadap 5 perjalanan kereta pada 2021, serta menambah percepatan pada 10 perjalanan kereta pada 2022, antara lain KA Argo Sindoro (Gambir-Semarang Tawang pp), KA Argo Muria (Gambir-Semarang Tawang pp), KA Bima (Gambir-Surabaya Gubeng pp), KA Sembrani (Gambir-Surabaya Pasarturi pp), dan KA Turangga (Bandung-Surabaya Gubeng pp). Selain itu, Perseroan juga melakukan peremajaan kereta untuk menarik pelanggan yang mayoritas berasal dari generasi muda, agar lebih nyaman khususnya pada perjalanan jarak jauh.

In facing such challenges, the Company improved its service through accelerating travel time for 5 train trips in 2021 and 10 train trips in 2022, including the Argo Sindoro train (Gambir-Semarang Tawang round trip), Argo Muria train (Gambir-Semarang Tawang round trip), Bima train (Gambir-Surabaya Gubeng round trip), Sembrani train (Gambir-Surabaya Pasarturi round trip), and Turangga train (Bandung-Surabaya Gubeng round trip). In addition, the Company also updates its trains to attract customers, which are dominated by young people, in increasing comfort, especially on long-distance trips.

Direksi memahami bahwa dalam menghadapi tantangan-tantangan usaha, Perseroan harus melakukan inovasi secara lebih kreatif. Hal tersebut antara lain terwujud melalui hadirnya Taksaka Hype Trip, sebagai upaya untuk menghadirkan pengalaman perjalanan dan pelayanan sesuai harapan pelanggan. Terkait hal itu, pada 2022, Perseroan juga menghadirkan perjalanan dengan *panoramic view*, yang

The Board of Directors is aware that creative innovations are necessary to overcome various challenges. This was realized, among others, through Taksaka Hype Trip to meet customer expectations of travel and service experience. In this regard, the Company also launched trains panoramic view windows in 2022, which are expected to maximize passenger experience. It is expected that with great experience on board, customers

diharapkan dapat memaksimalkan pengalaman pengguna kereta. Pengalaman pengguna yang maksimal diharapkan menghadirkan animo yang mendorong pelanggan untuk membagikan cerita perjalanannya melalui media sosial.

Walaupun kinerja layanan Perseroan menunjukkan peningkatan kinerja layanan, Perseroan belum dapat mewujudkan nihil kecelakaan. Untuk itu, Perseroan telah mewujudkan toleransi *safety/accident rate* dengan peningkatan keselamatan yang berfokus pada pencegahan kecelakaan secara proaktif melalui program-program keselamatan berbasis sistem manajemen keselamatan perkeretaapian.

will be encouraged to share their travel stories via social media.

Despite the increase in increase in service performance, the Company has not been able to achieve zero accident rate. To that end, the Company realized a *safety/accident rate* tolerance by increasing safety focusing on proactively preventing accidents through safety programs based on the railway safety management system.

ANALISIS PROSPEK USAHA

Business Prospect Analysis

Berdasarkan data Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Prakiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pascapenghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menguatnya pertumbuhan ekonomi didukung oleh hampir seluruh komponen PDB dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,48% (yoy) sejalan meningkatnya mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, serta berlanjutnya penyaluran bantuan sosial. Seiring dengan itu, ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 14,93% (yoy), didorong oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Pertumbuhan investasi nonbangunan juga tetap tinggi sejalan dengan kinerja ekspor, meskipun pertumbuhan investasi secara keseluruhan sedikit tertahan pada 3,33% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih rendah.

Pertumbuhan ekonomi yang menguat di 2023 berdampak terhadap prospek bisnis Perusahaan. Tahun 2023 KAI menargetkan dapat mengangkut 63 juta ton barang atau naik 8% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp58 juta ton. Untuk itu, dari sisi angkutan barang, KAI akan terus berinovasi agar dapat meningkatkan volume dan kinerja angkutan barang menggunakan kereta api. Selain itu, KAI akan meningkatkan kapasitas angkutan, baik dari sisi tambahan alat produksi maupun peningkatan waktu peredaran gerbong.

Based on data from Bank Indonesia, economic growth in 2023 is predicted to remain strong in the range of 4.5-5.3%, driven by increased domestic demand, both household consumption and investment. This prediction is in line with the increase in community mobility after the abolition of the Imposition of Restrictions on Community Activities (PPKM) policy, improved business prospects, increased inflows of Foreign Investment (PMA), and the continued completion of National Strategic Projects (PSN).

The strengthening economic growth was supported by almost all components of GDP from the expenditure side. Household consumption grew by 4.48% (yoy) in line with increased mobility of the people, including Christmas and New Year's National Religious Holidays (HBKN) celebrations, as well as continued distribution of social assistance. Along with that, exports continued to grow high at 14.93% (yoy), driven by strong demand from major trading partners. Non-construction investment growth also remained high in line with export performance, although overall investment growth was slightly restrained at 3.33% (yoy) due to low construction investment.

Strong economic growth in 2023 has an impact on the Company's business prospects. In 2023 KAI sets a target to transport 63 million tons of goods, an increase of 8% compared to 2022, which was Rp58 million tons. For this reason, in terms of freight transportation, KAI will continue to innovate in order to increase the volume and performance of freight transportation by rail. In addition, KAI will increase transportation capacity, both in terms of additional production equipment and increasing the circulation time of the carriages.

KAI sebagai penyelenggara jasa angkutan barang melayani berbagai komoditi angkutan barang seperti peti kemas, batu bara, semen, BBM, CPO, pupuk, retail, dan lainnya. Angkutan barang kereta api memiliki berbagai keunggulan seperti ketepatan waktu, keamanan, kapasitas besar, bebas pungutan liar, dan dikelola oleh SDM yang profesional, sehingga masih menjadi pilihan utama dalam jasa angkutan barang.

Dalam menyusun prospek usaha, Direksi mempertimbangkan tren positif produksi angkutan barang hingga 2022. Komoditas angkutan batu bara masih menjadi penyumbang terbesar angkutan barang dengan persentase 78,32% dari keseluruhan pendapatan angkutan barang KAI. Selain itu, peningkatan diikuti pada angkutan peti kemas yang naik 716.000 ton atau naik 17% dibanding tahun lalu dari 4,1 juta ton menjadi 4,8 juta ton. Tren positif juga terjadi pada komoditi lain seperti BBM, semen, retail, dan lainnya.

Di tahun 2023 Pemerintah telah menetapkan target produksi batu bara mencapai 694 juta ton dengan proyeksi kebutuhan domestik sebesar 177 juta ton, dan 518 juta ton untuk ekspor. Target produksi 2023 lebih tinggi 31 juta ton dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 663 juta ton. Hal ini tentu menjadi peluang emas bagi Perseroan karena akan terdapat peningkatan permintaan jasa transportasi kereta api terutama angkutan barang pada tahun 2023, dibandingkan tahun 2022. Untuk itu, Perseroan telah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung atau optimalisasi maupun efektivitas dalam pengoperasionalan kereta api angkutan batu bara.

KAI optimis dapat meraih sejumlah peluang untuk tumbuh meraih pendapatan yang berkualitas. Peluang tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan kebutuhan layanan angkutan.
2. Tingginya tingkat kemacetan di jalan tol dan pelabuhan dapat meningkatkan kebutuhan akan layanan angkutan kereta, misalnya Tanjung Priok dapat meningkatkan permintaan untuk angkutan barang (perpindahan dari truk ke kereta).
3. Permintaan untuk transportasi yang ramah lingkungan.
4. Permintaan publik yang besar terhadap moda transportasi yang lebih murah, serta memberikan kinerja dan layanan yang lebih baik.
5. Dukungan Pemerintah daerah di Sumatera Selatan terkait penggunaan angkutan kereta untuk transportasi batu bara.
6. Batu bara masih menjadi sumber energi utama dalam bauran energi nasional dalam jangka pendek/menengah.

KAI as the provider of freight transportation services serves various goods transportation commodities such as containers, coal, cement, fuel, CPO, fertilizer, retail, and others. Railway freight transportation has various advantages such as timeliness, security, large capacity, free of illegal fees, and is managed by professional human resources, so that it is still the main choice in freight transportation services.

In preparing the business outlook, the Board of Directors takes into account the positive growth of freight production in 2022. The coal transportation commodity is still the largest contributor to freight transportation with a percentage of 78.32% from KAI's total freight transportation revenue. In addition, the increase was followed by container transport which rose to 716,000 tons, up by 17% compared to last year from 4.1 million tons to 4.8 million tons. The positive trend also occurred in other commodities such as fuel, cement, retail, and others.

In 2023 the government has set a coal production target of 694 million tons with a projected domestic demand of 177 million tons and 518 million tons for export. The 2023 production target is 31 million tons higher than the previous year which reached 663 million tons. This is certainly a golden opportunity for the Company because there will be an increase in demand for rail transportation services, especially freight transport in 2023, compared to 2022. For this reason, the Company has prepared supporting facilities and infrastructure or optimization and effectiveness in the operation of coal transportation trains.

KAI is optimistic that it can seize a number of opportunities to grow to achieve quality revenue. These opportunities include the following:

1. Economic growth that can increase the need for transportation services.
2. High levels of congestion on toll roads and ports can increase the need for rail transport services, for example Tanjung Priok can increase demand for freight transport (moving from trucks to trains).
3. The demand for environmentally friendly transportation.
4. Huge public demand for cheaper modes of transportation, and provide better performance and services.
5. Support from the regional government in South Sumatra regarding the use of rail transportation for coal transportation.
6. Coal still becomes the main energy source in the national energy mix in the short/medium term.

7. Bisnis angkutan barang KAI sebaiknya dapat memanfaatkan peningkatan impor karena meningkatnya permintaan konsumen domestik dan peningkatan perdagangan antara Indonesia dan negara-negara berkembang di Asia.
8. Potensi pertumbuhan industri konstruksi yang akan meningkatkan permintaan bisnis angkutan barang untuk semen dan bahan-bahan bangunan.
9. Potensi pasar angkutan retail yang tinggi didorong oleh pertumbuhan pasar *e-commerce* di Indonesia.
10. Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat digunakan sebagai metode bagi KAI untuk menjadi lebih proaktif dalam pembangunan infrastruktur perkeretaapian/transportasi.
11. Integrasi dengan moda transportasi lainnya.
12. Meningkatkan keamanan pelanggan dan karyawan dengan penggunaan teknologi.
13. Penggunaan teknologi baru untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. KAI telah memiliki OCC (*Operation Control Centre*) Manggarai yang merupakan terbesar dan tercanggih di Asia Tenggara memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan mengedepankan berbagai sistem *interlocking*.
14. Pembaruan aset melalui kombinasi penggunaan kembali lokomotif dan pengadaan kapasitas baru.
15. Melakukan pemeliharaan prediktif untuk menurunkan biaya.
16. Ketersediaan pinjaman dari bank untuk meningkatkan investasi di dalam Perseroan.
17. Potensi adanya kerja sama pengembangan infrastruktur dan perluasan bisnis transportasi multimoda dengan pihak swasta dan Pemerintah Daerah.
18. Pergeseran cara kerja menjadi *remote working* dan transformasi digital dapat berpotensi menekan biaya.
19. Dukungan keuangan pemerintah (contohnya Dana Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk pembiayaan operasional Perseroan yang terdampak oleh pandemi.
20. Penyediaan alat pelindung/protokol kesehatan serta layanan tes cepat di stasiun dengan harga terjangkau berpotensi mengembalikan kepercayaan konsumen dalam menggunakan KA sebagai moda transportasi.

Mengacu pada asumsi-asumsi yang telah dijabarkan di atas disertai adanya berbagai peluang, Perseroan optimis dapat menjawab tantangan yang terjadi sekaligus meningkatkan kinerjanya secara optimal dalam mencapai target yang ditetapkan. Dapat disimpulkan, KAI memiliki prospek usaha yang sangat baik karena KAI memiliki sejumlah kekuatan yaitu:

Referring to the assumptions described above along with various opportunities, the Company is optimistic that it can respond to the challenges that occur while simultaneously improving its performance optimally in achieving the set targets. It can be concluded that KAI has very good business prospects because it has a number of strengths, namely:

1. Satu-satunya Perseroan BUMN di bidang kereta api di Indonesia.
2. Sebagian besar lini bisnis anak perusahaan membawa keunggulan strategis untuk KAI.
3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan bisnis dan operasi kereta api yang telah dibangun selama beberapa dekade.
4. Telah menjadi operator untuk infrastruktur eksisting (jaringan kereta sepanjang utara dan selatan Pulau Jawa serta sisi utara, barat, dan selatan Pulau Sumatera).
5. Memiliki aset lahan yang sangat luas dan sebagian besar terletak di lokasi strategis.
6. Infrastruktur tetap dirawat dengan baik dan bukan merupakan ancaman dari gangguan yang tak terduga.
7. Peningkatan pada aspek keselamatan yang diindikasikan dari tren positif dari penurunan jumlah kecelakaan dalam lima tahun terakhir.
8. Memiliki dukungan dana dari pemerintah untuk pemeliharaan dan operasi kereta api.
9. Adanya pembiayaan yang kuat.
10. Memiliki jumlah tenaga kerja yang besar.
11. Memiliki dua lini bisnis utama, yaitu angkutan penumpang angkutan barang sehingga tidak bergantung pada satu lini bisnis.

Sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), tahun 2023 Perseroan akan memasuki tahun ekspansif antara lain melalui talenta yang unggul. Tahun 2023 merupakan tahun yang penting bagi KAI karena Proyek Strategis Nasional (PSN) Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) ditargetkan akan selesai dan mulai beroperasi. Seluruh proses transformasi digital yang tengah berjalan juga diharapkan mampu menghadirkan timbal balik yang positif pada 2023, sehingga mendorong Perseroan untuk dapat menghadirkan layanan secara optimal melalui keberadaan sistem yang lebih cepat dan andal.

Lebih dari itu, Perseroan berencana untuk meningkatkan kontribusi bagi upaya pelestarian lingkungan hidup, antara lain melalui pemasangan panel surya dengan target 40 stasiun. Perseroan memiliki komitmen untuk melanjutkan penghijauan pada area operasional dengan program penanaman 1 juta pohon, yang diharapkan mampu berperan dalam menjaga oksigen pada tingkat yang baik.

KAI berupaya terus berinovasi mencanangkan transformasi digital guna meningkatkan layanan termasuk meningkatkan volume dan kinerja angkutan barang menggunakan kereta api.

1. The only rail SOE in Indonesia.
2. Most of the subsidiaries' business lines brought strategic advantages to KAI.
3. Having the knowledge and skills in running a railroad business and operation built for decades.
4. Becoming an operator for the existing infrastructure (railway network along the north and south of Java Island as well as the north, west and south sides of Sumatra Island).
5. Having a very large land assets and most of them were located in strategic locations.
6. Infrastructure remained well maintained and was not a major cause of unforeseen disruptions.
7. Improvements in safety aspects were indicated by the positive trend of decreasing the number of accidents in the last five years.
8. Having financial support from the government for the maintenance and operation of the railway.
9. There was strong financing.
10. Having a large workforce.
11. Having two main business lines, namely passenger transportation but also cargo transportation, so it did not depend on one line of business.

In accordance with the Company's Long-Term Plan (RJPP), in 2023 the Company will enter an expansive year, among others through excellent talent. 2023 serves as an important year for KAI as the Jakarta Bandung Fast Train (KCJB) National Strategic Project (PSN) is targeted to be completed and started operating. The ongoing digital transformation process is also expected to bring positive results in 2023, thus encouraging the Company in providing optimal services through faster and more reliable system.

In addition, the Company plans to increase its contribution in environmental conservation, including by installing solar panels with a target of 40 stations. The Company is committed to continuing afforestation around its operational areas through 1 million tree-planting program, which is expected to support the realization of decent level of oxygen.

KAI strives to continue to innovate in launching digital transformation to improve services, including increasing the volume and performance of freight transportation by

Perseroan akan terus mengembangkan sarana dan prasarana angkutan barang serta mencari potensi komoditas dan relasi angkutan barang baru untuk mencapai target volume sebesar 105 juta ton di 2027.

rail. The Company will continue to develop facilities and infrastructure for goods transportation and look for potential new commodities and freight relations to achieve a volume target of 105 million tons in 2027.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance Implementation

Perseroan menyadari, untuk dapat menjaga keberlanjutan bisnis, KAI harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aspek bisnis dan operasional yang mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Penerapan GCG secara konsisten dapat memperkuat pondasi dan posisi Perseroan sehingga dapat tetap kuat menghadapi persaingan usaha serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya perusahaan, meningkatkan nilai Perusahaan dalam jangka panjang dan kepercayaan para *stakeholders*.

Implementasi GCG yang dilakukan Perseroan melalui pemenuhan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pemenuhan kepentingan pemegang saham, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, serta pengungkapan informasi dan transparansi, hingga internalisasi dan evaluasi atas kemajuan penerapan prinsip GCG di lingkup Perusahaan.

KAI menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), salah satunya dengan menetapkan pedoman perilaku yang berisi uraian perilaku yang harus dipatuhi dan dijalankan Insan KAI yaitu Komisaris, Direksi dan pekerja dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya. Pedoman Perilaku (*code of conduct*) adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari, untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan. KAI menjalankan bisnisnya secara etis dan mematuhi semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan bisnis, etika dan integritas harus mendasari semua hubungan Perseroan, termasuk dengan pelanggan, penyedia barang dan jasa, pekerja dan *stakeholders* lainnya.

Perusahaan berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan GCG. Untuk itu, sebagai salah satu upaya dalam mengukur atau memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan GCG, Perseroan melakukan GCG Assessment. Kriteria assessment

The Company realizes that to be able to maintain business continuity, KAI must apply the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every aspect of business and operations which refer to 5 (five) basic principles namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. Consistent implementation of GCG can strengthen the Company's foundation and position so that it can remain strong in facing business competition and can increase effectiveness and efficiency in managing company resources, increase the long-term value of the Company and the trust of stakeholders.

GCG implementation is carried out by the Company through compliance with applicable laws and regulations, fulfillment of shareholder interests, duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors, as well as disclosure of information and transparency, to internalization and evaluation of the progress of implementing GCG principles within the Company.

KAI runs its business in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), one of which is by establishing a code of conduct which contains a description of the behavior that KAI's personnel must comply with and carry out, namely Commissioners, Directors and employees in carrying out their responsibilities and authorities. The Code of Conduct is a guideline for attitudes, behavior and actions in carrying out tasks and daily life interactions, to realize the Company's vision and mission. KAI conducts its business ethically and complies with all applicable laws and regulations. In conducting business, ethics and integrity must underlie all of the Company's relationships, including those with customers, providers of goods and services, employees and other stakeholders.

The Company seeks to optimize the implementation of GCG. For this reason, as an effort to measure or map the company's condition in implementing GCG, the Company conducts a GCG Assessment. The assessment criteria for the implementation

untuk penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG/ *Good Corporate Governance*) di KAI mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Di tahun 2022 KAI telah melaksanakan *Assessment* GCG dengan pencapaian Skor **92,424** dengan kategori "**Sangat Baik**". Kualitas dan konsistensi implementasi GCG terukur melalui pelaksanaan penerapan GCG serta proses evaluasi berkala (*Assessment* oleh Pihak BPKP Jawa Barat dan *Self Assessment* oleh Internal Perusahaan). Pelaksanaan evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, BAB XII (Pengukuran Terhadap Penerapan GCG, pasal 44 ayat 1: BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk:

- a. Penilaian (*Assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;
- b. Evaluasi (*review*) yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Penerapan GCG tahun 2022 merupakan tahun pelaksanaan evaluasi berkala. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sebagai pihak assessor dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN (Pasal 44 ayat 6).

Perseroan di telah melakukan *Assessment* Penerapan GCG tahun 2022 dengan perolehan Skor 92,424, meningkat 0,745 poin terhadap capaian Skor 2021 yang sebesar 91,679. Adapun Aspek Penilaian *Assessment* Penerapan GCG Tahun 2022 memiliki perincian sebagai berikut:

- Aspek I (Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Yang Baik): skor 6,905/capaian 98,641%.
- Aspek II (Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal): skor 8,315/capaian 92,387%.
- Aspek III (Dewan Komisaris): skor 31,683/capaian 90,525%.

of Good Corporate Governance (GCG) at KAI refer to the Decree of the Secretary of the Ministry of BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

In 2022 KAI has carried out a GCG Assessment with a score of **92.424** in the "**Excellent**" category. Measurable quality and consistency of GCG implementation through the implementation of GCG implementation and periodic evaluation processes (*Assessment* by the West Java BPKP and *Self Assessment* by the Company's Internal). The implementation of the evaluation is in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, CHAPTER XII (Measurement of the Implementation of GCG, article 44 paragraph 1: BUMN is required to carry out measurement of GCG implementation in the form of:

- a. Assessment, namely a program to identify the implementation of GCG in SOEs through measuring the implementation and implementation of GCG in SOEs which is carried out periodically every 2 (two) years;
- b. Evaluation (*review*), which is a program to describe the follow-up to the implementation and implementation of GCG in SOEs carried out in the following year after the assessment as referred to in letter a, which includes evaluation of the results of the assessment and follow-up on recommendations for improvement.

The 2022 GCG implementation is assessed by the representative of West Java Province BPKP as the assessor with the indicators/parameters set by the Secretary of the Ministry of SOEs (Article 44 paragraph 6).

The Company has conducted the 2022 GCG assessment a score of 92.424, an increase of 0.745 points of the 2021 Score achievement which reached 91.679. The 2022 GCG Implementation Self Assessment Assessment Aspect has the following details:

- Aspect I (Commitment to the Implementation of Good Governance) : score of 6.905/achievement of 98.641%
- Aspect II (Shareholders and GMS/Capital Owners): score of 8.315/achievement of 92.387%.
- Aspect III (Board of Commissioners): score of 31.683/achievement of 90.525%

- Aspek IV (Direksi): skor 32,719/capaian 90,627%.
- Aspek V (Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi): skor 8,802/capaian 97,796%.
- Aspek VI (Faktor lainnya): skor 5,000
- Aspect IV (Board of Directors): score of 32,719/achievement of 90.627%.
- Aspect V (Disclosure and Information Transparency): score of 8.802/achievement of 97.796%.
- Aspect VI (other factors): score of 5,000.

Mengacu pada hasil *assessment* tersebut, pada tahun 2022 telah dilakukan tindak lanjut atas Rekomendasi Assessment GCG Tahun 2021 oleh BPKP Provinsi Jawa Barat dengan perincian dari 60 Rekomendasi, sebanyak 60 (100%) rekomendasi telah ditindaklanjuti.

Based on the results of the assessment, in 2022 a follow-up on the 2021 GCG Assessment Recommendations by the West Java Province BPKP has been carried out with details of 60 recommendations, 60 (100%) recommendations have been followed up.

Di sisi lain, Perseroan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sebagai wujud pelaksanaan komitmen Perseroan dalam penerapan GCG. Kepatuhan LHKPN Periodik 2021 per tanggal 31 Maret 2022 diketahui kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 100% (total 1.106 orang).

On the other hand, the Company coordinated the management and administration of the State Organizing Assets Report (LHKPN) as a realization of its commitment in GCG implementation. For compliance with the 2021 Periodic LHKPN as of March 31, 2022, the compliance with the submission of LHKPN was 100% (a total of 1.116 people).

KAI sebagai perusahaan BUMN mendukung penuh kebijakan dan program Pemerintah dalam memberantas korupsi di tanah air. Untuk itu, berkomitmen kuat untuk menjunjung prinsip transparansi dan melaksanakan etika bisnis dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bersih, dan bebas dari korupsi. Secara giat Perseroan melakukan pembinaan terhadap seluruh pegawai agar senantiasa menjunjung tinggi nilai integritas dalam bekerja. Selanjutnya, Perseroan juga mengenalkan budaya kerja berintegritas bagi seluruh individu.

KAI as a state-owned company fully supports the Government's policies and programs in eradicating corruption in the country. For this reason, he is firmly committed to upholding the principle of transparency and implementing business ethics in order to realize a clean, corruption-free company management. The Company actively fosters all employees so that they always uphold the value of integrity at work. Furthermore, the Company also introduces a work culture with integrity for all individuals.

Dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi Perseroan melakukan sejumlah upaya, di antaranya membentuk organisasi Satuan Pengawasan Internal, *Whistleblowing System* (WBS), Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), dan Unit Pengelola Pelaporan Harta Kekayaan. Di samping itu, untuk memperkuat penerapan GCG, KAI memiliki pedoman Pengendalian Gratifikasi yang bertujuan untuk memberikan pedoman, pemahaman, dan sikap yang sama terhadap praktik-praktik Gratifikasi di lingkungan Perseroan. Selain itu juga bertujuan untuk mencegah insan Perseroan terlibat dalam praktik gratifikasi yang dianggap suap sekaligus bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam mengidentifikasi dan memetakan kerawanan penerimaan Gratifikasi di lingkungan Perseroan berdasarkan data pelaporan Gratifikasi. KAI menetapkan kebijakan bahwa setiap bentuk gratifikasi yang diterima maupun ditolak, wajib disampaikan dan dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan yang berlaku.

In an effort to eradicate and prevent corruption the Company has made a number of efforts, including forming an organization of the Internal Audit Unit, Whistleblowing System (WBS), Gratification Control Unit (UPG), and Wealth Reporting Management Unit. In addition, to strengthen the implementation of GCG, KAI has guidelines for Gratification Control which aim to provide guidelines, understanding and the same attitude towards Gratification practices within the Company. In addition, it also aims to prevent the Company's personnel from being involved in gratification practices which are considered bribes as well as aiming to provide guidance in identifying and mapping the vulnerability of receiving Gratification within the Company based on Gratification reporting data. KAI establishes a policy that every form of gratuity received or rejected must be submitted and reported to the Gratification Control Unit (UPG). Violations will be subject to sanctions in accordance with applicable laws and regulations and Company regulations.

KAI terus berupaya untuk mengoptimalkan implementasi GCG. Untuk itu, Perseroan terus-menerus memperbaiki dan memutakhirkan peraturan terkait sesuai perkembangan Perseroan, menjamin dan memastikan kepatuhan terhadap aturan, tatakelola dan kinerja perusahaan dengan pengawasan atau kontrol melalui audit SPI, ISO, Assessment GCG, dan Audit Keuangan oleh Auditor Independen dan Penjatuhan hukuman yang tegas atas bukti pelanggaran disiplin dan korupsi.

Untuk terus meningkatkan pemahaman akan pentingnya GCG, KAI membentuk fungsi pembinaan GCG di bawah VP *Quality Assurance* dan GCG yang secara khusus menangani dan memantau kegiatan penerapan GCG di KAI. KAI pun menjalin kerja sama dengan instansi KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk memberantas praktik korupsi. KAI menggandeng KPK tidak hanya dalam rangka pengawasan aset-aset milik BUMN. Namun, dalam perkembangannya, KAI dan KPK berkomitmen mewujudkan BUMN yang bersih dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. KAI akan aktif mendukung program pemerintah dalam memberantas praktik korupsi.

Di samping itu, Perseroan juga telah menerapkan Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*). Laporan yang masuk akan dikelola unit pengelola WBS yaitu Unit *Corporate Secretary* dan Unit *Quality Assurance and Good Corporate Governance* yang terdiri atas penelaah WBS, petugas verifikasi WBS dan petugas administrasi WBS. Sebagai upaya untuk memaksimalkan penerapan WBS di lingkungan Perseroan, melakukan peningkatan pemahaman dan kepedulian pegawai untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui WBS sehingga dapat mewujudkan pengelolaan bisnis yang bersih dan berintegritas. Secara berkala melakukan sosialisasi *Whistleblowing System* kepada seluruh pegawai dan kepada mitra kerja di Lingkungan Perseroan.

Dalam hal pemegang saham dan RUPS, RUPS Perseroan memiliki kewenangan yang dapat tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Dalam RUPS, Pemegang Saham berhak mendapatkan informasi berkaitan dengan Perseroan dari Dewan Komisaris dan atau Direksi sepanjang sejalan dengan kepentingan Perseroan. RUPS mempunyai wewenang untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS juga memiliki wewenang untuk memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan

KAI continues to strive to optimize GCG implementation. For this reason, the Company continuously improves and updates related regulations according to the development of the Company, guarantees and ensures compliance with rules, governance and company performance with supervision or control through SPI audits, ISO, GCG Assessment, and Financial Audits by Independent Auditors and Sentences firm on evidence of disciplinary violations and corruption.

In further improving the understanding of GCG, KAI has established a GCG coaching function under the VP *Quality Assurance* and GCG which specifically handles and monitors GCG implementation activities at KAI. KAI also cooperates with the Corruption Eradication Commission, the Police and the Attorney General's Office to eradicate corrupt practices. KAI is collaborating with the KPK not only in the context of monitoring BUMN-owned assets. However, in its development, KAI and KPK are committed to realizing a clean SOE and improving services to the community. KAI will actively support government programs in eradicating corrupt practices.

In addition, the Company has also implemented a Whistleblowing System (WBS). Incoming reports will be managed by the WBS management unit, namely the Corporate Secretary Unit and the Quality Assurance and Good Corporate Governance Unit which consists of WBS reviewers, WBS verification officers and WBS administration officers. As an effort to maximize the implementation of the WBS within the Company, increase employee understanding and concern for reporting violations through the WBS so as to realize clean and integrity business management. Periodically conduct socialization of the Whistleblowing System to all employees and partners within the Company.

In relation to the shareholders and the GMS, the GMS of the Company had not given authority to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits specified in the Law and/or the articles of association. In the GMS, Shareholders were entitled to obtain information relating to the Company from the Board of Commissioners and/or the Board of Directors as long as it was in line with the interests of the Company. The GMS had the authority to appoint and dismiss the Board of Directors and Board of Commissioners. The GMS also had the authority to make decisions necessary to safeguard the long-term and short-term business interests of the Company in accordance with the laws and regulations

dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Penyelenggaraan RUPS Tahunan (RUPST) mencakup RUPS mengenai laporan tahunan dan perhitungan tahunan, yang diadakan paling lambat bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan. Dalam RUPST, Perseroan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan. Diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang bersangkutan). Sementara RUPS Luar Biasa (RUPSLB) diselenggarakan bila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.

Di tahun 2022, RUPST pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan telah dilaksanakan tepat waktu yaitu pada 29 Januari 2022. Pelaksanaan Tahunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan (Persero) tahun buku 2021 juga telah dilaksanakan tepat waktu yaitu pada 19 Mei 2022.

Dalam hal tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menjalankan tugasnya dengan mengacu pada *Board Manual*. Adapun tanggung jawab Dewan Komisaris yakni melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris selalu menghindari adanya benturan kepentingan, antara lain dengan:

- a. Membuat kebijakan mengenai potensi benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
- b. Menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap Dewan Komisaris dan menyampaikannya kepada RUPS; dan

and the Company's Articles of Association and to approve the Annual Report including the ratification of the Financial Statements in accordance with the laws and regulations and the Company's Articles of Association.

The Company's GMS consists of the Annual GMS and the Extraordinary GMS. Implementation of the Annual GMS (AGMS) includes GMS regarding annual reports and annual calculations, which are held no later than June after the close of the relevant financial year. In the AGMS, the Company approves the Company's Work Plan and Budget. The AGMS is held no later than 30 (thirty) days after the current budget year (the working plan and budget year of the Company concerned). While the Extraordinary GMS (EGMS) is held when deemed necessary by the Board of Directors and/or Board of Commissioners and/or Shareholders.

In 2022, the AGMS ratification of the Company's Work Plan and Budget has been carried out on time, namely on January 29, 2022. The implementation of the Annual Corporate Financial Responsibility Report (Persero) for the 2021 fiscal year has also been carried out on time, namely on May 19, 2022.

In terms of the responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners carries out their duties with reference to the Board Manual. The responsibility of the Board of Commissioners is to supervise management policies, the general management of both the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors. The Board of Commissioners also provides advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long-Term Plan, Work Plan and Company's Budget as well as the provisions of the Articles of Association and General Meeting of Shareholders, as well as applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and Company goals.

In carrying out its duties, the Board of Commissioners avoided conflicts of interest by:

- a. Making policies regarding potential conflicts of interest that might interfere with the performance of the duties of the Board of Commissioners;
- b. Signing a statement that there was no conflict of interest and stating in writing matters that had the potential to cause a conflict of interest to the Board of Commissioners and submitting it to the GMS; and

c. Melaporkan kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan untuk di catat dalam Daftar Khusus mengenai kepemilikan saham Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada perusahaan dan perusahaan lain.

Sementara itu, terkait komposisi Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen adalah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Pada akhir Desember 2022, jumlah anggota Komisaris Independen sebanyak 4 (empat) orang dari 9 (sembilan) orang Komisaris atau sebanyak 44,44%. Dengan demikian, jumlah Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibantu oleh komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris yakni Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Pada pelaksanaan tugasnya, Komite Audit memonitor kinerja Audit Internal, Auditor Independen dalam melakukan audit laporan keuangan, menelaah laporan Perseroan kepada pihak luar, dan sistem pengendalian intern.

Di samping itu, Komite Audit juga berperan membantu Dewan Komisaris dalam tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) memonitor berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan, yang meliputi aspek strategi, sistem, serta kebijakan manajemen risiko Perusahaan, sampai dengan melakukan identifikasi risiko yang dihadapi KAI, dan merekomendasikan langkah mitigasi risiko tersebut. Sementara Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan fungsinya membantu Dewan Komisaris dalam review atas kebijakan talenta perusahaan, evaluasi terhadap calon pengurus baik perusahaan maupun anak perusahaan, dan juga memberikan masukan dan rekomendasi terhadap remunerasi pengurus perusahaan.

Untuk mencapai target Perseroan, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Rapat dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Dewan Komisaris dapat

c. Reporting to the Company through the Corporate Secretary to be recorded in the Special Register regarding share ownership of the Board of Commissioners and/or their families in other companies.

Regarding the composition of the Board of Commissioners, the number of Independent Commissioners consisted of at least 20% (twenty percent) of the total members of the Board of Commissioners. At the end of December 2022, the number of Independent Commissioners was 4 (four) out of 9 (nine) Commissioners or 44.44%. Thus, the number of Independent Commissioners complied with the stipulated provisions.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners was assisted by committees under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee and the Nomination and Remuneration Committee. The Audit Committee monitored the performance of the Internal Audit, the Independent Auditor in auditing the financial statements, reviews the Company's reports to external parties, and the internal control system.

In addition, the Audit Committee also assisted the Board of Commissioners in other tasks assigned by the Board of Commissioners. The Risk Management Monitoring Committee (KPMR) monitored various risks faced by the Company, including aspects of the Company's strategy, system, and risk management policies, as well as identifying the risks faced by KAI, and recommending risk mitigation measures. Meanwhile, the Nomination and Remuneration Committee assisted the Board of Commissioners in reviewing the company's talent policy, evaluating prospective management for both companies and subsidiaries, and also providing input and recommendations on the remuneration of company management.

To meet the Company's targets, the Board of Commissioners held effective Board of Commissioners meetings and attended the meetings in accordance with the provisions of the legislation. The Board of Commissioners' meeting consisted of the Internal Meeting of the Board of Commissioners and the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Meetings of the Board of Commissioners had to be held periodically, at least once a month, and in such meetings the Board of Commissioners might invite

mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Selain itu, ada pula Rapat Dewan Komisaris dan komite-komite Dewan Komisaris yang merupakan Rapat Dewan Komisaris dalam rangka membahas laporan-laporan periodik komite. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi merupakan rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi dan/atau dapat juga dilakukan atas usulan Direksi berikut agenda yang akan dibahas dalam rapat. Hingga akhir tahun 2022, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dan Rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 21 (dua puluh satu) kali.

Untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas wawasan, Dewan Komisaris telah menjalankan Program Peningkatan Perseroan memandang, peningkatan kapabilitas merupakan salah satu program penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business*, bisnis penunjang Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program Peningkatan Kapabilitas yang diikuti antara lain dalam bentuk, Program Seminar, *Workshop*, *Training*, *In House Training*, Studi Banding dan program lainnya.

Lebih lanjut, terkait tanggung jawab Direksi, Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/ atau Keputusan RUPS. Pembidangan tugas Direksi adalah sebagai berikut.

Direktur Utama mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.
2. Menandatangani surat atas nama Direksi kepada RUPS, Dewan Komisaris dan/atau pihak lain.

the Board of Directors. The Board of Commissioners could hold meetings at any time at the request of 1 (one) or several members of the Board of Commissioners, at the request of the Board of Directors, or at the written request of 1 (one) or several Shareholders representing at least 1/10 (one tenth) of the total number of shareholders, shares with voting rights, by stating the matters to be discussed.

In addition, there were meetings of the Board of Commissioners and the committees of the Board of Commissioners as the meetings of the Board of Commissioners in order to discuss the periodic reports of the committees. The meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors was a meeting of the Board of Commissioners that invited the Board of Directors and/or could also be held at the proposal of the Board of Directors and the agenda to be discussed in the meeting. Throughout 2022, the Board of Commissioners held 23 (twenty three) Internal Meetings of the Board of Commissioners, and 21 (twenty one) joint meetings with the Board of Directors.

To improve its competence and expand its knowledge, the Board of Commissioners conducted an Improvement Program. The Company was of the opinion that, the capability improvement program was one of the important programs so that the Board of Commissioners could always update information about the latest developments of the core business, the Company's supporting businesses and the prevailing laws and regulations. Capability Improvement Programs could be in the form of Seminar, Workshop, Training, In House Training, Comparative Studies and other programs.

Furthermore, in relation to the responsibilities of the Board of Directors, the Board of Directors was tasked with carrying out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company and representing the Company both inside and outside the court on all matters and all events with restrictions as stipulated in the regulations, legislation, articles of association and/or GMS resolutions. The duties of the Board of Directors included as follows.

The President Director owned the following duties:

1. Determining the management policy of the Company.
2. Signing a letter on behalf of the Board of Directors to the GMS, the Board of Commissioners and/or other parties.

3. Menandatangani Peraturan Direksi, Keputusan Direksi, Instruksi Direksi, Surat Edaran Direksi, dan/atau Maklumat Direksi untuk dan atas nama Direksi, terhadap hal yang menyangkut hubungan kerja lintas Direktorat.
4. Menandatangani nota kesepahaman/nota kesepakatan/*Memorandum of Understanding* (MoU) antara Perseroan dengan pihak lain dengan lingkup menyangkut tugas dan wewenang beberapa anggota Direksi.
5. Menandatangani perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain, dengan lingkup perjanjiannya menyangkut tugas dan wewenang beberapa anggota Direksi.
6. Memimpin Rapat Direksi.
7. Mewakili Direksi sebagai pemegang saham pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
8. Melaksanakan diskresi yang menyangkut tugas dan wewenang beberapa anggota Direksi.
9. Menandatangani segala bentuk dokumen dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain sepanjang untuk keperluan kepengurusan Perseroan.

Direktur Niaga mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan terkait fungsi perusahaan jasa angkutan penumpang dan barang yang terdiri dari *marketing planning, marketing research, marketing communication, product development, sales for corporate/retail customer, customer relationship management (customer care customer retention, call center)*, dan pengendalian kinerja pelayanan.
2. Komersialisasi aset produksi dan non-produksi di wilayah Jawa dan Sumatera.
3. Komersialisasi aset berupa benda dan bangunan cagar budaya peninggalan sejarah perkeretaapian Indonesia.
4. Melakukan pembinaan terhadap para *Corporate Deputy Director* dan *Vice President* di bawahnya.

Direktur Operasi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penetapan program/kebijakan operasi lalu lintas perjalanan kereta api meliputi: perencanaan perjalanan kereta api dan perencanaan operasi sarana kereta api.
2. Penetapan program/kebijakan operasi sarana kereta api meliputi: pengendalian perjalanan kereta api, pengendalian operasi sarana kereta api, dan evaluasi kinerjanya serta evaluasi kinerja perjalanan kereta api.

3. Signing the Board of Directors' Regulations, Board of Directors' Decisions, Board of Directors' Instructions, Board of Directors' Circular Letters, and/or Board of Directors' Notices for and on behalf of the Board of Directors, on matters relating to cross-Directorate working relationships.
4. Signing a Memorandum of Understanding (MoU) between the Company and other parties with the scope regarding the duties and authorities of several members of the Board of Directors.
5. Signing an agreement between the Company and other parties, with the scope of the agreement regarding the duties and authorities of several members of the Board of Directors.
6. Chairing the Board of Directors Meeting.
7. Representing the Board of Directors as shareholder in subsidiaries and/or joint ventures.
8. Exercising discretion regarding the duties and authorities of several members of the Board of Directors.
9. Signing all forms of documents and/or take other actions as long as it is for the purposes of the management of the Company.

The Managing Director of Commerce owned the following duties:

1. Determination of policies related to the business function of passenger and goods transportation services consisting of marketing planning, marketing research, marketing communication, product development, sales for corporate/retail customers, customer relationship management (customer care, customer retention, call centers), and controlling service performance.
2. Commercialization of production and non-production assets in Java and Sumatra.
3. Commercialization of assets in the form of objects and buildings of cultural heritage heritage of Indonesian railway history.
4. Providing guidance to the Corporate Deputy Directors and Vice Presidents under them.

The Managing Director of Operation had the following duties:

1. Determination of the program/policy of rail travel traffic operations including: planning of train travel and planning of rail facilities operation.
2. The determination of the program/policy for the operation of rail facilities including: controlling train travel, controlling the operation of rail facilities, and evaluating its performance as well as evaluating the performance of train travel.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Penetapan program/kebijakan pembinaan dan pengendalian petugas operasi prasarana kereta api meliputi: perencanaan dan evaluasi petugas operasi prasarana stasiun kereta api serta pembinaan dan pengendalian petugas operasi prasarana stasiun kereta api. 4. Penetapan program/kebijakan awak kereta api meliputi perencanaan awak kereta api, pengendalian dan evaluasi awak kereta api. 5. Perumusan dan penyusunan program/kebijakan pembinaan dan konseling petugas operasi prasarana stasiun kereta api dan awak kereta api. 6. Pengendalian operasi kereta api secara terpusat dan terpadu di seluruh lintas Sumatera Selatan. 7. Mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengkonsolidasikan unit organisasi di bawahnya. | <ol style="list-style-type: none"> 3. The establishment of programs/policies for the development and control of railway infrastructure operations officers including: planning and evaluation of railway station infrastructure operations officers as well as coaching and controlling railway station infrastructure operations officers. 4. The determination of the train crew program/policy including: the planning of the train crew, the control and evaluation of the train crew. 5. Formulation and preparation of programs/policies for coaching and counseling train station infrastructure operations officers and train crews. 6. Centralized and integrated control of train operations throughout South Sumatra. 7. Coordinating, integrating, and consolidating organizational units under it. |
|---|--|

Direktur Pengelolaan Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penetapan program/kebijakan pengelolaan teknik prasarana secara terpusat.
2. Penetapan program/kebijakan fungsi penjagaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap aset produksi berupa prasarana kereta api.
3. Pemenuhan persyaratan teknis pengembangan dan penyusunan desain/spesifikasi teknis prasarana dan koordinasi teknis di bidang pengembangan yang relevan dengan pihak luar.
4. Pengendalian terhadap serah terima proyek pemerintah dan investasi bidang prasarana.

The Managing Director of Infrastructure had the following duties:

1. Determination of the program/policy for centralized technical management of infrastructure.
2. Determination of programs/policies for the function of guarding, controlling, and evaluating production assets in the form of railway infrastructure.
3. Fulfillment of technical requirements for the development and preparation of technical designs/specifications for infrastructure and technical coordination in relevant development fields with external parties.
4. Controlling over the handover of government projects and investment in infrastructure.

Direktur Pengelolaan Sarana mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan teknik sarana perkeretaapian secara terpusat yang mencakup penyelenggaraan fungsi pembangunan dan perawatan sarana perkeretaapian.
2. Menyelenggarakan rekayasa teknik sarana perkeretaapian.
3. Menyelenggarakan penjagaan aset produksi meliputi pendataan, pencatatan, dan validasi data aset produksi pendukung perawatan sarana perkeretaapian.
4. Menyelenggarakan serah terima proyek pemerintah dan investasi bidang sarana perkeretaapian.
5. Mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengkonsolidasikan satuan organisasi di bawahnya termasuk Unit Pelaksana Teknis Balai Yasa Sarana.

The Managing Director of Rolling Stock had the following duties:

1. Organizing the technical management of railway facilities in a centralized manner including the implementation of the function of construction and maintenance of railway facilities.
2. Carrying out engineering maintenance of railway facilities.
3. Carrying out maintenance of production assets including data collection, recording, and validation of production asset data supporting the maintenance of railway facilities.
4. Organizing the handover of government projects and investment in railway facilities.
5. Coordinating, integrating, and consolidating the organizational units under it, including the Balai Yasa Sarana Technical Implementation Unit.

Direktur Keselamatan dan Keamanan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membuat kebijakan dan perencanaan strategis terkait sistem manajemen keselamatan.
2. Membuat kebijakan dan perencanaan strategis terkait pengamanan dan penertiban di atas kereta api, di lingkungan stasiun, dan objek vital Perseroan.
3. Membuat kebijakan dan perencanaan strategis terkait Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L).
4. Membuat kebijakan dan perencanaan strategis terkait perumusan dan penyusunan standarisasi keselamatan dan keamanan yang meliputi standar mutu keselamatan dan keamanan, operasi keselamatan dan keamanan, evaluasi dan inspeksi implementasi operasi keselamatan dan keamanan.
5. Mengendalikan dan mengevaluasi keselamatan, pengamanan dan penertiban di atas kereta api, di lingkungan stasiun, dan objek vital Perseroan, dan K3L secara berkelanjutan.
6. Membuat kebijakan dan perencanaan strategis terkait penjagaan, penertiban, pensertifikatan aset *nonrailway*.

Direktur SDM dan Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengembangan Operasi.
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia secara terintegrasi.
3. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan sertifikasi/pengujian SDM.
4. Pengelolaan layanan kesehatan.
5. Pembinaan pengelolaan kegiatan kerumahtanggaan dan umum.

Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mengembangkan bisnis sesuai strategi Perseroan secara terpusat meliputi perencanaan investasi, pengembangan dan pemantauan proyek-proyek termasuk proyek perkeretaapian dan non perkeretaapian.
2. Merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan investasi strategis proyek-proyek baru dan proyek nasional perkeretaapian termasuk proyek Instruksi dari Kementerian.
3. Memantau kinerja proyek-proyek baru dan proyek-proyek strategis nasional perkeretaapian termasuk proyek Instruksi dari Kementerian.
4. Menyelenggarakan perumusan dan penyusunan program perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, pengendalian, evaluasi pengadaan serta pemantauan terhadap pengelolaan sediaan dan pergudangan.

The Managing Director of Safety and Security had the following duties:

1. Making policies and strategic planning related to safety management system.
2. Making policies and strategic planning related to security and control on trains, in the station environment, and vital objects of the Company.
3. Making policies and strategic planning related to Occupational Health and Safety (K3L).
4. Making policies and strategic plans related to the formulation and preparation of safety and security standards including safety and security quality standards, safety and security operations, evaluation and inspection of the implementation of safety and security operations.
5. Controlling and evaluating safety, security and order on the train, in the station environment, and the Company's vital objects, and OHS on an ongoing basis.
6. Making policies and strategic planning related to safeguarding, controlling, and certifying non-railway assets.

The Managing Director of Human Capital and General Affairs had the following duties:

1. Operations Development.
2. Integrated Human Resource Management.
3. Management of education and training and implementation of HR certification/testing.
4. Health care management.
5. Fostering the management of household and general activities.

The Managing Director of Strategic Planning and Business Development had the following duties:

1. Centrally planning and developing business according to the Company's strategy including investment planning, development and monitoring of projects including rail and non-railway projects.
2. Planning, controlling and evaluating strategic investment activities for new projects and national railway projects including Instruction projects from the Ministry.
3. Monitoring the performance of new projects and national strategic railway projects including the Instruction project from the Ministry.
4. Organizing the formulation and preparation of procurement planning programs, procurement implementation, control, evaluation of procurement and monitoring of inventory and warehousing management.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Membuat kebijakan dan perencanaan terkait pengelolaan administrasi dokumen-dokumen aset baik dokumen kepemilikan aset maupun permasalahan hukum. 6. Membuat kebijakan dan perencanaan strategis penataan ruang kawasan dan desain arsitektur bangunan stasiun dan non stasiun. 7. Membuat kebijakan dan perencanaan strategis terkait pelestarian, pengembangan, perbaikan, pemeliharaan, pemugaran serta penataan bangunan cagar budaya dan non cagar budaya. 8. Menyusun perencanaan strategis terkait bisnis pemanfaatan tata ruang yang bersinergi dengan jaringan angkutan kereta api. | <ol style="list-style-type: none"> 5. Making policies and plans related to the administrative management of asset documents, both asset ownership documents and legal issues. 6. Making policies and strategic planning of regional spatial planning and architectural design of station and non-station buildings. 7. Making policies and strategic planning related to the preservation, development, repair, maintenance, restoration and arrangement of cultural and non-cultural heritage buildings. 8. Developing strategic planning related to the business of utilizing spatial planning in synergy with the rail transport network. |
|---|--|

Tugas Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko:

The Managing Director of Finance and Risk Management had the following duties:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan strategi dan kebijakan terkait penyelenggaraan fungsi pengelolaan keuangan secara terpusat. 2. Menetapkan strategi kebijakan terkait pengelolaan <i>Public Service Obligation</i> (PSO), <i>Infrastructure Maintenance & Operation</i> (IMO) dan <i>Track Access Charge</i> (TAC). 3. Menetapkan strategi dan kebijakan terkait pengelolaan layanan sistem informasi dan data <i>enterprise</i>. 4. Menetapkan strategi dan kebijakan terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta pergudangan. 5. Menetapkan strategi dan kebijakan terkait pengelolaan risiko usaha Perseroan secara terpadu. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Establish strategies and policies related to the implementation of a centralized financial management function. 2. Establish a policy strategy related to the management of Public Service Obligations (PSO), Infrastructure Maintenance & Operation (IMO) and Track Access Charge (TAC). 3. Establish strategies and policies relate to the management of enterprise data and information system services. 4. Establish strategies and policies related to the management of procurement of goods and services as well as warehousing. 5. Establish strategies and policies related to the integrated management of the Company's business risks. |
|--|---|

Untuk mengetahui perkembangan penerapan strategi Perseroan, Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi dan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Direksi harus melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan sesuai rencana rapat yang disusun mengacu pada rencana kerja anggaran tahunan. Sepanjang tahun 2022, Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali dan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris sebanyak 21 (dua puluh satu) kali.

To find out the progress of implementing the Company's strategy, the Board of Directors held Board of Directors Meetings and Joint Meetings with the Board of Commissioners in accordance with the statutory provisions. The Board of Directors had to hold regular meetings at least 1 (one) time a month according to the meeting plan drawn up referring to the annual budget work plan. Throughout 2022, the Board of Directors held 39 (thirty nine) Board of Directors Meetings and 21 (twenty one) Joint Meetings with the Board of Commissioners.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, yang memiliki fungsi memperlancar hubungan antar Organ Perusahaan, hubungan antara Perseroan dengan *stakeholders* serta dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dilakukan dengan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan, khususnya bagi BUMN

In carrying out their duties, the Board of Directors was assisted by the Corporate Secretary, who had the function of facilitating relations between Company Organs, the relationship between the Company and stakeholders and the fulfillment of the provisions of the applicable laws and regulations. The implementation of the Corporate Secretary function was carried out by appointing a Corporate Secretary,

dengan sifat khusus. Sekretaris Perusahaan, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Fungsi Sekretaris Perusahaan dipimpin oleh seorang *Executive Vice President (EVP) Corporate Secretary* yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Selain dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, Direksi juga dibantu oleh komite-komite. Adapun Komite-komite di bawah Direksi yaitu:

1. Komite Evaluasi Jabatan.

Merupakan komite yang dibentuk guna mendukung penyederhanaan struktur remunerasi yang berkeadilan sesuai bobot jabatan dan berbasis kinerja. Diperlukan evaluasi jabatan untuk menghasilkan sistem penilaian (*grading system*) sesuai dengan organisasi terkini yang pelaksanaannya melibatkan konsultan eksternal.

2. Komite Verifikasi Kinerja Pekerja.

Komite ini dibentuk guna mendukung percepatan progres verifikasi kinerja pekerja dan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja pekerja.

3. Komite Keselamatan Tingkat Pusat.

Adalah komite yang mengatur mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Keselamatan bertanggung jawab kepada Direktur Utama

4. Komite Teknologi Informasi.

Adalah komite yang dibentuk untuk mendukung strategi bisnis perusahaan dalam pengembangan perusahaan. Diperlukan adanya Kerjasama dan koordinasi seluruh bagian KAI agar pengembangan teknologi informasi dapat selaras dengan kebutuhan bisnis.

5. Komite Penyelesaian dan Tindak Lanjut Hasil Investigasi dan Hasil CO/Pemeriksaan Daerah atas Kejadian Kecelakaan KA.

Komite ini bertugas menindaklanjuti hasil investigasi dan CO atas terjadinya kecelakaan KA, menetapkan pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan penyebab yang tertulis di dalam hasil investigasi/CO, menetapkan sanksi, dan menetapkan penghargaan kepada pegawai/masyarakat yang dinilai telah ikut mencegah atau melakukan upaya sehingga kecelakaan KA dapat dihindari. Hasil kerja anggota komite ini dilaporkan kepada Direktur Utama.

especially for SOEs with special characteristics. Corporate Secretary was appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners. The Corporate Secretary function was led by an Executive Vice President (EVP) Corporate Secretary appointed by and reported directly to the President Director.

Apart from being assisted by the Corporate Secretary, the Board of Directors was also assisted by committees. The Committees under the Board of Directors were:

1. Job Evaluation Committee

A committee formed to support the simplification of a just remuneration structure according to the weight of the position and based on performance. Job evaluation was required to produce a grading system in accordance with the latest organization of which implementation involved external consultants.

2. Worker Performance Verification Committee

This committee was formed to support the acceleration of the progress of employee performance verification and to realize the implementation of the employee performance management system.

3. Central Level Safety Committee

This committee regulated the Railway Safety Management System. In carrying out its duties, the Safety Committee was responsible to the President Director

4. Information Technology Committee

This committee was formed to support the company's business strategy in company development. Cooperation and coordination of all parts of KAI was required so that the development of information technology could be in line with business needs.

5. Committee for the Settlement and Follow-up of Investigation Results and CO/Regional Inspection Results on KA Accidents

This committee was tasked with following up on the results of investigations and CO on the occurrence of train accidents, assigning responsible officials according to the causes written in the results of the investigations/CO, setting sanctions, and setting awards to employees/communities considered to have participated in preventing or making efforts so that accidents could be avoided. The results of the work of these committee members were reported to the President Director.

6. Komite Eksekutif.

Adalah komite yang dibentuk untuk mengantisipasi perkembangan dan tuntutan perusahaan di masa depan, sehingga perlu dipersiapkan kader pimpinan yang kompeten. Komite Eksekutif bertugas untuk merumuskan, mengelola, dan melaksanakan, serta mempersiapkan kaderisasi pimpinan masa yang akan datang. Selain itu, juga membahas hal-hal strategis perusahaan.

Terkait penilaian kinerja komite di bawah Direksi, prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi melalui rapat secara berkala dengan menilai berdasarkan pelaksanaan tugas masing-masing Komite di bawah Direksi. Sepanjang tahun 2022, Direksi menilai bahwa Komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Lebih lanjut, sebagai bentuk keterbukaan informasi dan transparansi sekaligus juga sebagai upaya memberikan kemudahan pelayanan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*), Perseroan telah menyediakan berbagai fasilitas informasi yang berbasis teknologi informasi yang bisa diakses masyarakat dengan mudah, murah, dan cepat. Perseroan secara konsisten menyampaikan berbagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat melalui portal publik website Kementerian BUMN dengan alamat www.bumn.go.id dan website Perseroan dengan alamat www.kai.id. Perseroan memberikan informasi dan data-data terbaru, berita, siaran pers, artikel, informasi lowongan kerja, lelang, keterbukaan informasi publik, heritage, CSR hubungan investor, GCG, dan prestasi. Pada website Perseroan juga terdapat akses untuk pemesanan tiket dalam rangka memudahkan publik dalam mengakses layanan kereta api.

Perseroan juga menyediakan media dalam bentuk lain guna menyampaikan informasi yakni siaran pers, media sosial, serta aplikasi KAI untuk memberikan kemudahan kepada penumpang untuk mengakses informasi dan data perusahaan. Selain aplikasi KAI, Perseroan juga memiliki aplikasi *Mobile KAI Access* dan Aplikasi *Mobile PPIID KAI* yang memiliki fitur yang lebih banyak yang merupakan salah satu komitmen KAI dalam melaksanakan dan mengelola keterbukaan informasi publik sebaik mungkin. Hal ini bertujuan untuk mengelola informasi dan dokumentasi yang bertugas membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi seputar KAI.

6. Executive Committee

This committee was formed to anticipate future developments and demands of the company, so it was necessary to prepare competent leadership cadres. The Executive Committee was tasked with formulating, managing, and implementing, as well as preparing future leadership cadres. In addition, it also discussed the company's strategic matters.

For the performance assessment of the committees under the Board of Directors, the procedures for evaluating the performance of the Committees under the Board of Directors were carried out by the Board of Directors through assessing based the performance of the duties of each Committee under the Board of Directors. During 2022, the Board of Directors considered that the Committees under the Board of Directors carried out their duties and responsibilities well.

Furthermore, as a form of information disclosure and transparency as well as an effort to provide easy service to stakeholders, the Company has provided various information technology-based information facilities that can be accessed by the public easily, cheaply, and quickly. The Company consistently conveys various information that is beneficial to the community through the public portal website of the Ministry of SOEs at the address www.bumn.go.id and the Company's website at www.kai.id. The company provides the latest information and data, news, press releases, articles, information on job vacancies, auctions, public information disclosure, heritage, CSR investor relations, GCG, and achievements. There is also an access to ticket reservations in order to make it easier for the public to access train services on the Company's website.

The Company also provides media in other forms to convey information, namely press releases, social media, and the KAI application to make it easy for passengers to access company information and data. In addition to the KAI application, the Company also has the KAI Access Mobile application and the KAI PPIID Mobile Application which have more features which are one of KAI's commitments in implementing and managing public information disclosure as best as possible. This aims to manage information and documentation whose job is to assist the public in obtaining information about KAI.

Bentuk keterbukaan informasi yang dilakukan Perseroan juga disampaikan melalui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara berdampingan. Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas, yakni terdapat tahun Laporan Tahunan dan identitas perusahaan. Laporan Tahunan disajikan dalam website Perusahaan dan dapat diunduh. KAI juga telah menyajikan informasi keuangan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku. Dalam Laporan Tahunan juga telah memuat antara lain, informasi saham; informasi obligasi; Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi; profil perusahaan secara lengkap; Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan; pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta Laporan Keuangan.

The Company also disclosed important information through the Annual Report and Financial Statements. The annual report was presented in Indonesian and English side by side. The annual report clearly stated the identity of the company, namely the year of the Annual Report and the identity of the company. The Annual Report was presented on the Company's website and could be downloaded. KAI also presented financial information in the form of comparisons for 5 (five) financial years. The Annual Report also contained share information; bond information; Report of the Board of Commissioners and Report of the Board of Directors; complete company profile; Management Discussion and Analysis on Company Performance; disclosure of Good Corporate Governance practices and Financial Statements.

PELAKSANAAN KINERJA KEBERLANJUTAN [D.1]

Sustainability Performance Implementation

Sebagai entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki amanat untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi salah satu agenda global, Perseroan secara konsisten berupaya untuk menjalankan aktivitas operasional dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Upaya tersebut kemudian dituangkan ke dalam pelaksanaan kinerja keberlanjutan.

Agar tujuan dari pelaksanaan kinerja keberlanjutan dapat tercapai, KAI telah menyusun strategi keberlanjutan yang berfokus pada keseimbangan aspek Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial. Selain itu, penerapan tata kelola keberlanjutan yang menjadi sarana untuk mengakomodasi harapan dan keinginan para pemangku kepentingan turut mendorong kelancaran pelaksanaan kinerja keberlanjutan.

Pada aspek Ekonomi, KAI pada tahun 2022 menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I. Dana dari penawaran umum tersebut digunakan untuk pembayaran utang pokok Obligasi I Seri A KAI tahun 2017, pengadaan prasarana pengembangan Sumatra bagian Selatan, dan pengadaan sarana KA Bandara Internasional Adi Soemarmo.

As a State-Owned Enterprise (SOE) mandated to support the government's efforts to achieve sustainable development in line with the Sustainable Development Goals which are one of the global agendas, the Company strives to consistently carry out operational activities by prioritizing the principle of sustainability. These efforts are carried out through the implementation of sustainability performance.

In achieving the objectives of sustainability performance implementation, KAI has developed sustainability strategy that focuses on balancing economic, environmental, and social aspects. In addition, the implementation of sustainable governance which is a means to meet the expectations and hopes of the stakeholders also encourages the smooth implementation of sustainability performance.

On the economic aspect, KAI in 2022 issued the Kereta Api Indonesia Shelf-Registration Bonds Phase I and Kereta Api Indonesia Shelf-Registration Sukuk Ijarah Phase I. Proceeds from the public offering were used to pay the principal debt of KAI's 2017 Series A Bonds, procure infrastructure for the development of Southern Sumatra, and railway facilities procurement for the Adi Soemarmo International Airport.

Bagi KAI, penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan memiliki keunggulan, salah satunya adanya keleluasaan untuk menerbitkan obligasi dan sukuk dalam waktu 2 tahun dengan cukup hanya 1 kali meminta izin pernyataan efektif. Selain itu, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perseroan dalam melakukan penawaran umum tersebut juga lebih fleksibel, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan keuangan Perseroan.

Pada aspek Lingkungan Hidup, KAI berupaya untuk mengonversikan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai sumber energi untuk mengoperasikan armada kereta api dengan bahan bakar terbarukan berupa biodiesel B30 yang 30% bahan bakunya berasal dari minyak sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO). Bahan bakar tersebut termasuk dalam bahan bakar terbarukan, sehingga ketersediaan pasokan masa depan lebih terjamin dan harga cenderung lebih stabil. Di samping itu, pada tahun 2022 KAI juga melakukan uji coba pengoperasian kereta pembangkit berbahan bakar LNG yang mampu meningkatkan efisiensi pada sistem *Diesel Dual Fuel* (DDF) hingga 37% dan *Diesel Engine Generator* (DEG) hingga 35%.

KAI juga menyadari bahwa perubahan iklim saat ini menjadi semakin nyata dan berdampak signifikan terhadap kelangsungan alam dan manusia di masa depan. Oleh sebab itu, Perseroan berupaya untuk meminimalisasi dampak perubahan iklim melalui program dekarbonisasi. Program tersebut juga menjadi salah satu kontribusi Perseroan dalam mewujudkan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu bentuk implementasi program dekarbonisasi adalah transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau Solar Panel di Stasiun Gambir, Gedung Jakarta Railway Center, dan Stasiun Batang.

Pada aspek Sosial, KAI terus berupaya untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api. Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan untuk mencapai komitmen tersebut antara lain membangun kesadaran dan memperkuat fondasi budaya keselamatan, keamanan, dan kesehatan di lingkungan KAI hingga meningkatkan keandalan sarana dan standarisasi prasarana perkeretaapian.

KAI juga rutin melakukan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat, memetakan daerah-daerah yang rawan bencana alam dan rawan kejadian upaya mencelakakan perjalanan kereta api, serta berkoordinasi dan berkolaborasi dengan *stakeholder* terkait untuk meminimalisasi dan mencegah terjadinya aktivitas yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi perjalanan kereta api.

The issuance of shelf-registration bonds and sukuk has a number of advantages for KAI, one of which is the flexibility to issue bonds and sukuk within 2 years with only one request for an effective permit. With the more flexible requirements that must be met by the Company in conducting the public offering, the Company was able to increase the effectiveness and efficiency of its financial management process.

On the environmental aspect, KAI strives to carry out fuel oil (BBM) conversion as an energy source to operate the train fleet with renewable fuel in the form of biodiesel B30 in which 30% of its raw material is derived from Crude Palm Oil (CPO). This fuel is considered as renewable fuel, making a more guaranteed future supplies is more guaranteed and stable prices. In 2022 KAI also conducted a trial run of an LNG-fueled generator train which can increase the efficiency of the Diesel Dual Fuel (DDF) system by up to 37% and the Diesel Engine Generator (DEG) by up to 35%.

KAI is also aware of the real impact of climate change with significant impact on the sustainability of nature and humans in the future. Thus, the Company strives to minimize the impact of climate change through decarbonization program. This program is one of the Company's contributions in realizing environmental sustainability. The decarbonization program is implemented through, among others, transition to New and Renewable Energy (NRE) with the use of Solar Power Plant (PLTS) or Solar Panels at Gambir Station, the Jakarta Railway Center Building and Stasiun Batang.

On the social aspect, KAI continues to strive to realize the safety and security of train travel. The strategic measures taken to achieve this commitment include building awareness and strengthening the foundations of a culture of safety, security and health at KAI as well as increasing the reliability of facilities and standardizing railway infrastructure.

KAI also regularly carries out safety outreach to the public, maps areas that are prone to natural disasters and prone to incidents of rail accidents, as well as coordinates and collaborates with relevant stakeholders to minimize and prevent activities with potential to cause harm to train travel.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan bagi para pelanggan, KAI mengencangkan transformasi digital. Pada tahun 2022, Perseroan melakukan uji coba fasilitas *face recognition boarding gate* di Stasiun Bandung untuk mempermudah pelanggan Kereta Api Jarak Jauh yang ingin naik kereta api, tanpa perlu repot-repot menunjukkan berbagai dokumen seperti *boarding pass* fisik, *e-boarding pass*, KTP, ataupun dokumen vaksinasi.

Selain itu, KAI juga terus berupaya memperbaiki prasarana perkeretaapian, di antaranya dengan membangun jalur ganda kereta api, meningkatkan kualitas material jalan rel, meng-upgrade sistem persinyalan, merekayasa geometri lengkung, serta memperbaiki kualitas perawatan jalan rel dan jembatan dalam upaya mempersingkat waktu tempuh perjalanan kereta api.

KAI juga turut berkontribusi dalam mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang dilakukan dalam bentuk program Bina Lingkungan yang berfokus pada penyaluran bantuan pendidikan, bantuan pelestarian alam, bantuan sarana ibadah, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sosial kemasyarakatan, serta bantuan korban bencana alam dan non alam; program Kemitraan yang berfokus pada pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK); dan program *Community Relations* yang berfokus untuk memberikan sosialisasi kepada beberapa *stakeholder* terkait hal-hal yang berhubungan dengan perkeretaapian, seperti keamanan perjalanan kereta api serta anti pelecehan dan kekerasan terhadap wanita.

Melalui pelaksanaan kinerja keberlanjutan yang telah disebutkan di atas, KAI optimis mampu memberikan pelayanan optimal bagi para pelanggan, memenuhi harapan dan keinginan dari para pemangku kepentingan, sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

In an effort to improve services to customers, KAI is intensifying digital transformation. In 2022, the Company tested the face recognition boarding gate facility at Bandung Station to facilitate Long Distance Train customers in taking trains without the hassle of showing various documents such as physical boarding passes, e-boarding passes, ID cards, or vaccination document.

In addition, KAI continues to improve railway infrastructure, including by building double track railroads, improving the quality of rail materials, upgrading signaling systems, engineering curved geometries, and improving the quality of rail and bridge maintenance in an effort to shorten rail travel time.

KAI also contributes to encouraging the realization of sustainable development through the Social and Environmental Responsibility (TJSL) program, which is carried out in the form of Community Development program that focuses on distributing educational assistance, natural conservation assistance, worship facilities assistance, infrastructure development assistance and/ or public facilities, social assistance, as well as aid for victims of natural and non-natural disasters; Partnership program that focuses on the development of Micro and Small Enterprises (MSE); and Community Relations program which focuses on providing outreach to several stakeholders on matters related to railways, such as safety for rail travel and anti-harassment and violence against women.

Through the aforementioned sustainability performance implementation, KAI is optimistic to be able to provide optimal service for its customers, fulfill the expectations and hopes of stakeholders, as well as encourage the realization of sustainable development.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Changes In the Composition of the Members of The Board of Directors

Komposisi Direksi periode 1 Januari-31 Maret 2022 sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 8 (delapan) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat KAI. Komposisi Direksi dapat dilihat di bawah ini.

The composition of the Board of Directors for the period of January 1 - March 31, 2022 consisted of 9 (nine members, consisting of 1 (one) President Director and 8 (eight) Directors. All members of the Board of Directors were domiciled in the working area of the KAI Head Office. The composition of the Board of Directors can be seen below.

Nama / Name	Jabatan / Position
Didiek Hartantyo	Direktur Utama / President Director
Dadan Rudiansyah	Direktur Niaga / Managing Director of Commerce
Heru Kuswanto	Direktur Operasi / Managing Director of Operation
Awan Hermawan Purwadinata	Direktur Pengelolaan Prasarana / Managing Director of Infrastructure
Eko Purwanto	Direktur Pengelolaan Sarana / Managing Director of Rolling Stock
John Robertho	Direktur Keselamatan dan Keamanan / Managing Director of Safety and Security
Agung Yunanto	Direktur SDM dan Umum / Managing Director of Human Capital & General Affairs
Jeffrie N. Korompis	Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha / Managing Director of Strategic Planning and Business Development
Salusra Wijaya	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Managing Director of Finance and Risk Management

PERIODE 31 MARET - 26 OKTOBER 2022

Pada tanggal 31 Maret 2022 terdapat perubahan komposisi Direksi. Perubahan komposisi Direksi tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. SK-89/MBU/03/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia tanggal 31 Maret 2022. Berdasarkan surat keputusan tersebut, komposisi Direksi periode 31 Maret-26 Oktober 2022 adalah sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 8 (delapan) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat KAI. Komposisi Direksi dapat dilihat di bawah ini.

PERIOD MARCH 31 - OCTOBER 26, 2022

On March 31, 2022, there was a change in the composition of the Board of Directors. The change in the composition of the Board of Directors was in accordance with the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of the Company (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. SK-89/MBU/03/2022 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Kereta Api Indonesia dated March 31, 2022. Based on the decree, the composition of the Board of Directors for the period of March 31 - October 26, 2022 was 9 (nine members, consisting of 1 (one) President Director and 8 (eight) Directors. All members of the Board of Directors were domiciled in the working area of the KAI Head Office. The composition of the Board of Directors can be seen below.

Nama / Name	Jabatan / Position
Didiek Hartantyo	Direktur Utama / President Director
Hadis Surya Palapa	Direktur Niaga / Managing Director of Commerce
Awan Hermawan Purwadinata	Direktur Operasi / Managing Director of Operation
Heru Kuswanto	Direktur Pengelolaan Prasarana / Managing Director of Infrastructure
Eko Purwanto	Direktur Pengelolaan Sarana / Managing Director of Rolling Stock
John Robertho	Direktur Keselamatan dan Keamanan / Managing Director of Safety and Security
Suparno	Direktur SDM dan Umum / Managing Director of Human Capital & General Affairs
Sandry Pasambuna	Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha / Managing Director of Strategic Planning and Business Development
Salusra Wijaya	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Managing Director of Finance and Risk Management

PERIODE 26 OKTOBER - 31 DESEMBER 2022

Pada tanggal 26 Oktober 2022, terdapat perubahan komposisi Direksi yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Kereta Api Indonesia Nomor SK-240/MBU/10/2022 tentang Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia tanggal 26 Oktober 2022, dengan alasan penataan susunan anggota Direksi. Berdasarkan surat keputusan tersebut, komposisi Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan 8 (delapan) orang Direktur, yang seluruhnya berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat KAI. Komposisi Direksi pada periode tersebut adalah sebagai berikut:

PERIOD OF OCTOBER 26 – DECEMBER 31, 2022

On March 31, 2022, there was a change in the composition of the Board of Directors. The change in the composition of the Board of Directors was in accordance with the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of the Company (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 240/MBU/10/2022 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Kereta Api Indonesia dated October 26, 2022 for the organization of Board of Directors membership composition Based on the decree, the composition of the Board of Directors consisted of 1 (one) President Director and 8 (eight) Directors. All members of the Board of Directors were domiciled in the working area of the KAI Head Office. The composition of the Board of Directors in the period can be seen below.

Nama / Name	Jabatan / Position
Didiek Hartantyo	Direktur Utama / President Director
Hadis Surya Palapa	Direktur Niaga / Managing Director of Commerce
Awan Hermawan Purwadinata	Direktur Operasi / Managing Director of Operation
Heru Kuswanto	Direktur Pengelolaan Prasarana / Managing Director of Infrastructure
Eko Purwanto	Direktur Pengelolaan Sarana / Managing Director of Rolling Stock
Sandry Pasambuna	Direktur Keselamatan dan Keamanan / Managing Director of Safety and Security
Suparno	Direktur SDM dan Umum / Managing Director of Human Capital & General Affairs
John Robertho	Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha / Managing Director of Strategic Planning and Business Development
Salusra Wijaya	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Managing Director of Finance and Risk Management

PENUTUP

Closing

Direksi mengucapkan terima kasih dan rasa hormat atas kepercayaan, komitmen, kerja keras, loyalitas, dan kerja sama yang telah ditunjukkan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama kepada seluruh manajemen dan karyawan yang telah berjuang sehingga Perseroan mampu memperoleh kinerja yang baik di tahun 2022.

Direksi juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris karena telah memberikan nasihat dan pengawasan sehingga pengelolaan operasi dan bisnis Perseroan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Semoga perjalanan di tahun 2022 dapat dijadikan evaluasi bagi seluruh jajaran dan mampu menginspirasi seluruh pihak untuk dapat terus mengoptimalkan kemampuannya dan menjadi modal Perusahaan untuk dapat tumbuh hingga ke masa-masa yang akan datang.

The Board of Directors hereby expressed its gratitude and respect for the trust, commitment, hard work, loyalty and cooperation that has been shown from all stakeholders, especially to all management and employees who have performed their best so that the Company was able to achieve good performance in 2022.

The Board of Directors also expressed its highest gratitude and appreciation to the Board of Commissioners for providing advice and supervision so that the management of the Company's operations and business could meet the set targets. We hope that the journey in 2022 could be used as an evaluation for all levels and inspired all parties to be able to continue to optimize their abilities and became the Company's capital to be able to grow into the future.

Bandung, Agustus 2023 / August, 2023

Atas Nama Direksi, /

On Behalf of the Board of Directors,



DIDIEK HARTANTYO

Direktur Utama
President Director

DIREKSI

Board Of Directors

1.	Didiek Hartantyo	Direktur Utama / President Director
2.	Hadis Surya Palapa	Direktur Niaga / Managing Director of Commerce
3.	Awan Hermawan Purwadinata	Direktur Operasi / Managing Director of Operation
4.	Heru Kuswanto	Direktur Pengelolaan Prasarana / Managing Director of Infrastructure



5.	Sandry Pasambuna	Direktur Keselamatan dan Keamanan / Managing Director of Safety and Security
6.	Suparno	Direktur SDM dan Umum / Managing Director of Human Capital & General Affairs
7.	John Robertho	Direktur Perencanaan Strategis Dan Pengembangan Usaha / Managing Director of Strategic Planning and Business Development
8.	Salusra Wijaya	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Managing Director of Finance and Risk Management



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Report

Dewan Komisaris mengapresiasi kerja keras Direksi yang telah berhasil menerapkan strategi dan kebijakan strategis secara tepat sehingga mampu membawa Perseroan bangkit dari masa pandemi Covid-19.

The Board of Commissioners appreciates the hard work of the Board of Directors who have succeeded in implementing the right strategies and strategic policies so as to be able to bring the Company back from the crisis.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Kami menghaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatNya, sehingga di tahun 2022 PT Kereta Api Indonesia (Persero) mampu bangkit melawan krisis. Sebagai *holding* BUMN yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api, KAI bersama entitas anak senantiasa berupaya memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan layanan transportasi perkeretaapian di Indonesia yang dapat menunjang terciptanya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu, Perseroan terus melakukan pengembangan sistem transportasi perkeretaapian di Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan zaman, serta berupaya untuk melengkapi dan mengintegrasikan sistem perkeretaapian dengan transportasi moda lainnya seperti moda transportasi udara, moda transportasi darat, dan moda transportasi laut. KAI bertekad kuat untuk terus bergerak cepat agar dapat memberikan layanan terintegrasi, aman, nyaman, andal, dan terjangkau.

Laporan Tahunan tahun buku 2022 yang kami sampaikan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja Perusahaan di sepanjang tahun 2022. Pada laporan ini kami menyampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris dalam pengelolaan Perusahaan untuk tahun buku 2022, serta pencapaian Perseroan di tahun 2022.

We express our gratitude to the Almighty God for His blessings which enabled PT Kereta Api Indonesia (Persero) to rise against the crisis in 2022. As a SOE holding that provides rail transportation services, KAI and its subsidiaries always strive to fulfill their responsibility to provide rail transportation services in Indonesia that can support the creation of people's economic growth. For this reason, the Company continues to develop the rail transportation system in Indonesia to suit the needs of the times, and strives to complement and integrate the rail system with other modes of transportation such as air transportation, land transportation, and sea transportation. KAI is determined to continue to move quickly in order to provide integrated, safe, comfortable, reliable and affordable services.

We hope that the Annual Report for the 2022 fiscal year will be able to provide a comprehensive picture of the Company's performance throughout 2022. In this report we present the Board of Commissioners' monitoring and advisory report on the management of the Company for the 2022 financial year, as well as the Company's achievements in 2022.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Report

SAID AQIL SIROJ

Komisaris Utama / Komisaris Independen
President Commissioner / Independent Commissioner



FREKUENSI PEMBERIAN NASIHAT

Advice Giving Frequency

Di sepanjang tahun 2022 Dewan Komisaris telah menjalankan fungsinya melakukan pengawasan terhadap kinerja Perseroan dan memberikan arahan, saran, dan nasihat secara berkala kepada Direksi melalui rapat rutin, di antaranya rapat internal Dewan Komisaris, termasuk rapat Dewan Komisaris dengan mengikutsertakan Direksi. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dilakukan untuk membahas permasalahan Perseroan yang memerlukan pengawasan dan penasihat Dewan Komisaris. Hingga akhir tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali rapat gabungan bersama Direksi. Di samping itu, Dewan Komisaris juga turun langsung ke wilayah kerja/operasional untuk meninjau pelaksanaan strategi Perseroan. Sepanjang tahun 2022 Dewan Komisaris telah melakukan 12 (dua belas) kali kunjungan kerja ke berbagai wilayah kerja KAI.

Throughout 2022, the Board of Commissioners carried out its function of supervising the Company's performance and providing regular direction, advice and advice to the Board of Directors through regular meetings, including internal meetings of the Board of Commissioners, including Board of Commissioners meetings involving the Board of Directors. Joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors were held to discuss Company issues that required the oversight and advice of the Commissioner. Until the end of 2022, the Board of Commissioners held a total of 21 (twenty one) joint meetings with the Board of Directors. In addition, the Board of Commissioners also went directly to the work/operational areas to review the implementation of the Company's strategy. Throughout 2022, the Board of Commissioners conducted 12 (twelve) work visits to various KAI work areas.

PENGAWASAN TERHADAP PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Supervision of Strategy Formulation and Implementation

Sesuai dengan fungsinya, di sepanjang tahun 2022 Dewan Komisaris telah menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya melakukan pengawasan terhadap perumusan strategi dan implementasi strategi Perseroan agar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan. Di samping itu, Dewan Komisaris juga telah memberikan pengawasan dan pemberian nasihat atas pelaksanaan kebijakan strategis yang dijalankan, yang meliputi:

1. Kebijakan rancangan SPI.
2. Kebijakan manajemen risiko.
3. Kebijakan sistem teknologi informasi.
4. Kebijakan akuntansi dan penyusunan LK.
5. Kebijakan pengelolaan SDM.
6. Kebijakan pengadaan barang dan jasa.
7. Kebijakan mutu dan pelayanan.
8. Kepatuhan perusahaan terhadap UU, Anggaran Dasar, perjanjian dan komitmen.
9. Transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dekom dan RUPS.
10. Kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.
11. Kebijakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola.

In accordance with its function, throughout 2022, the Board of Commissioners carried out its duties, obligations and responsibilities to supervise the strategy formulation and implementation of the Company's strategy so that it complied with applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association. In carrying out its duties, the Board of Commissioners supervised the preparation of the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Annual Company Work Plan and Budget (RKAP). In addition, the Board of Commissioners has provided direction and advice on the implementation of strategic policies, which included:

1. SPI draft policy.
2. Risk management policy.
3. Information technology system policy.
4. Accounting and FS preparation policy.
5. HC management policy.
6. Goods and services procurement policy.
7. Quality and service policy.
8. Company compliance with laws, articles of association, agreements and commitments.
9. Transactions or actions within the scope of authority of the Board of Commissioners and GMS.
10. Subsidiary/joint venture management policy.
11. GCG principle implementation policy.

PANDANGAN ATAS KINERJA DIREKSI

View on the Performance of The Board of Directors

Pencapaian positif di tahun 2022 merupakan kerja keras dari jajaran manajemen dan seluruh insan Perseroan. Oleh sebab itu, Dewan Komisaris menilai seluruh jajaran Direksi telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dewan Komisaris mengapresiasi kerja keras Direksi yang telah berhasil menerapkan strategi dan kebijakan strategis secara tepat sehingga mampu membawa Perseroan bangkit dari masa pandemi Covid-19.

Dalam menilai kinerja Direksi, Dewan Komisaris menggunakan pertimbangan berdasarkan sejumlah aspek. Aspek tersebut antara lain, kondisi perekonomian, capaian kinerja yaitu kinerja operasional dan kinerja keuangan. Dari segi ekonomi, di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi global masih menunjukkan perlambatan dikarenakan pandemi Covid-19 yang masih terjadi dan konflik Rusia-Ukraina. Kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian pasar keuangan global. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2022 mencapai 3,4%. Harga-harga komoditas, khususnya energi dan pangan juga cenderung tinggi dan menjadi sangat volatile yang menyebabkan tekanan inflasi tinggi semakin persisten di berbagai negara. Sementara itu, tingkat inflasi di Indonesia masih terkendali pada level 5,42% (yoy) per November 2022.

IMF mengingatkan bahwa perekonomian global mengalami sejumlah tantangan pada tahun 2022 dan 2023. Mulai dari inflasi lebih tinggi dari yang terlihat di beberapa dekade, ketatnya kondisi keuangan di sebagian besar wilayah, perang Rusia ke Ukraina, dan pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Lebih lanjut, IMF mengingatkan masa depan ekonomi global bertumpu pada keberhasilan kalibrasi kebijakan moneter, situasi perang di Ukraina, dan kemungkinan gangguan dari sisi penawaran terkait pandemi Covid-19 yang lebih lanjut, termasuk di Tiongkok. IMF memaparkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Amerika Serikat mengalami kontraksi pada semester I/2022, pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa juga berkontraksi pada kuartal II/2022. Selain itu, Tiongkok masih terbelenggu kebijakan *zero covid policy* dan krisis di sektor properti. Kondisi itu mengakibatkan sepertiga ekonomi dunia menghadapi pertumbuhan negatif selama 2 (dua) kuartal berturut-turut. IMF juga mengungkapkan bahwa lonjakan harga energi dan harga pangan di tahun 2022 kemungkinan dapat menyebabkan inflasi bertahan lebih lama.

The positive achievements in 2022 were the hard work of the management and all of the Company's employees. Therefore, the Board of Commissioners considers that all members of the Board of Directors have carried out their duties properly. The Board of Commissioners appreciates the hard work of the Board of Directors who have succeeded in implementing the right strategies and strategic policies so as to be able to bring the Company back from the Covid-19 pandemic.

In assessing the performance of the Board of Directors, the Board of Commissioners uses considerations based on a number of aspects. These aspects include economic conditions, performance achievements, namely operational performance and financial performance. From an economic perspective, in 2022 the global economic growth still showed a slowdown due to the ongoing Covid-19 pandemic and the Russia-Ukraine conflict. These conditions created uncertainty in global financial markets. The International Monetary Fund (IMF) projected global economic growth in 2022 to reach 3.4%. Commodity prices, particularly energy and food, also tended to be high and became highly volatile which resulted in increasingly persistent high inflationary pressures in various countries. Meanwhile, the inflation rate in Indonesia was still under control at 5.42% (yoy) as of November 2022.

IMF reminded that the global economy will experience a number of challenges in 2022 and 2023. Starting from higher inflation than seen in decades, tight financial conditions in most regions, Russia's war against Ukraine, and the prolonged Covid-19 pandemic. Furthermore, IMF reminded that the future of the global economy rested on the success of monetary policy calibration, the war situation in Ukraine, and the possibility of disruption from the supply side related to the further Covid-19 pandemic, including in Tiongkok. IMF explained that the gross domestic product (GDP) of the United States experienced a contraction in the first half of 2022, and the economic growth in the European region also contracted in the second quarter of 2022. Apart from that, Tiongkok was still under the enforcement of zero covid policy and the crisis in the property sector. This condition resulted in a third of the world's economy facing negative growth for 2 (two) consecutive quarters. IMF also revealed that spikes in energy and food prices in 2022 caused the inflation to last longer.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penguatan dan Indonesia dihadapkan peluang yang sangat kecil terhadap resesi jika dibanding negara lain. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, keberlanjutan perbaikan dalam pemulihan ekonomi Indonesia setelah pandemi terus berlangsung dan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,01%. Pada sisi konsumsi, Indeks Keyakinan Konsumen serta penjualan ritel terus tumbuh dan menjadi insentif bagi industri untuk meningkatkan produksi. Hal ini terlihat dari *Purchasing Managers Index* (PMI) yang terus mencatatkan ekspansi selama 11 bulan beruntun sejak September 2021 dan pada Juli 2022 tercatat 51,3. Di saat yang sama, di tengah kenaikan inflasi global, inflasi Indonesia per Juli 2022 sebesar 4,94% juga relatif terkendali.

Dari sisi eksternal, Indonesia memiliki ketahanan yang terjaga dengan baik dan semakin solid, didukung neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus selama 25 bulan berturut-turut. Bahkan pada periode Januari-Juni 2022, surplus Indonesia telah mencapai US\$24,8 miliar atau dua kali lipat dari surplus pada periode sama tahun lalu.

Dilansir dari laporan Kementerian Perindustrian, industri pengolahan nonmigas mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,83% pada triwulan III tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu di angka 4,12%. Ini menandakan bahwa aktivitas sektor manufaktur di tanah air masih bergeliat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Pertumbuhan ekonomi nasional yang mulai membaik didorong oleh sinergi kesehatan dan kebijakan ekonomi yang mampu mendorong peningkatan konsumsi, investasi, dan ekspor.

Dari sisi sektor transportasi kereta api, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatatkan volume pelanggan KA Penumpang pada 2022 yaitu 284,45 juta pelanggan, naik 84,06% dibanding pada 2021 yang sejumlah 154,54 juta pelanggan. Volume pelanggan KA Penumpang pada 2022 didominasi oleh pelanggan KA Lokal Ekonomi dengan jumlah mencapai 252,57 juta pelanggan. Kenaikan ini ditunjang oleh meredanya pandemi Covid-19, tingkat vaksinasi yang semakin membaik, dan relaksasi persyaratan perjalanan di awal tahun 2022.

Kinerja angkutan penumpang KAI grup pada 2022 mengalami *recovery* yang signifikan. Tren positif ini menunjukkan mulai meningkatnya mobilitas masyarakat serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap angkutan kereta api.

Meanwhile, national economic growth has strengthened and Indonesia is facing a very small chance of a recession when compared to other countries. According to data from the Coordinating Ministry for the Economy, continued improvements in Indonesia's economic recovery after the pandemic were continuing and showing positive growth. This was evidenced by the national economic growth rate which reached 5.01%. On the consumption side, the Consumer Confidence Index and retail sales continued to grow and became an incentive for the industry to increase production. This can be seen from the *Purchasing Managers Index* (PMI), which continued to record an expansion for 11 consecutive months since September 2021 and in July 2022 it was recorded at 51.3. At the same time, amid rising global inflation, Indonesia's inflation as of July 2022 of 4.94% was also relatively under control.

From the external side, Indonesia has a well-maintained and increasingly solid resilience, supported by a trade balance that continues to record a surplus for 25 consecutive months. Even in the January-June 2022 period, Indonesia's surplus reached USD24.8 billion or double the surplus in the same period last year.

Based on the report from the Ministry of Industry, the non-oil and gas processing industry recorded a growth of 4.83% in the third quarter of 2022, higher than the same period last year at 4.12%. This indicates that the activity of the manufacturing sector in Indonesia was still thriving amidst uncertain global economic conditions. The national economic growth which was starting to improve was driven by the synergy of health and economic policies that were able to encourage increased consumption, investment and exports.

In terms of the rail transportation sector, PT Kereta Api Indonesia (Persero) recorded the volume of passenger train customers in 2022, namely 284.45 million customers, an increase of 84.06% compared to 2021 which amounted to 154.54 million customers. The volume of passenger train customers in 2022 is dominated by Local Economy train customers with a total of 252.57 million customers. This increase was supported by the easing of the Covid-19 pandemic, improving vaccination rates, and relaxation of travel requirements in early 2022.

Meanwhile, the performance of the KAI group's passenger transport in 2022 experienced a significant recovery. This positive trend shows that the people's mobility is starting to increase and people's trust in rail transportation is rising.

Di tahun 2022 KAI juga terus memperluas layanan dengan mengoperasikan kembali jalur KA Garut - Cibatubaru pada 24 Maret 2022. Dalam reaktivasi jalur sepanjang 19 km tersebut, juga dioperasikan kembali 3 stasiun yaitu Stasiun Garut, Wanaraja, dan Pasirjengkol.

Pada periode Semester I 2022 pula, KAI kembali menyelenggarakan Angkutan Lebaran, setelah 2 tahun vakum akibat kasus pandemi Covid-19 masih tinggi. Volume pelanggan pada Angkutan Lebaran 2022 mencapai 4,42 juta pelanggan. Pencapaian luar biasa tersebut telah mendekati pencapaian Angkutan Lebaran di tahun 2019 sebanyak 6,84 juta pelanggan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pelanggan, KAI terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain bekerja sama dengan Perum DAMRI untuk menghadirkan layanan antarmoda Kereta Api Jarak Jauh dengan Bus DAMRI. Melalui kerja sama ini pelanggan KA Jarak Jauh dapat memesan tiket Bus DAMRI untuk menuju stasiun keberangkatan maupun dari stasiun kedatangan ke tujuan yang diinginkan melalui aplikasi KAI Access. Selain itu, KAI bersama dengan Transjakarta melakukan kolaborasi strategis yang meliputi sistem integrasi antarmoda, pengembangan usaha transportasi terpadu, dan pengembangan kawasan berorientasi transit.

Di masa pandemi, KAI selalu konsisten mematuhi aturan pemerintah terkait perjalanan menggunakan kereta api di tengah regulasi transportasi kereta api di tengah pandemi sangat dinamis. Mulai 17 Juli 2022, KAI menerapkan aturan yang menyesuaikan terbitnya SE Kementerian Perhubungan Nomor 72 Tahun 2022. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pelanggan di masa pandemi, KAI menghadirkan layanan vaksinasi gratis di berbagai stasiun. KAI optimis bahwa adanya kebijakan ini tidak menyurutkan minat masyarakat untuk bepergian dengan kereta api yang selalu mengedepankan protokol kesehatan.

Melihat perjalanan bisnis Perseroan di tahun 2022, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi mampu menghadapi tantangan dan peluang yang terjadi karena dapat mencatatkan kinerja yang memuaskan. Hal tersebut terlihat pada realisasi angkutan KA penumpang yang mencapai 284.448.804 orang, atau meningkat 84% dari realisasi pada 2021. Adapun, total volume angkutan barang di tahun 2022 mencapai 58.006.880 ton, naik 15,41% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 50.261.778 ton.

In 2022, KAI continued to expand its services by re-operating the Garut - Cibatubaru train line on March 24, 2022. In reactivation of the 19 km line, 3 stations were operated again, namely Garut, Wanaraja and Pasirjengkol Stations.

In the first semester of 2022, KAI held Eid Transport again after 2 years of hiatus due to the high number of cases of the Covid-19 pandemic. Customer volume for the 2022 Lebaran Transport reached 4.42 million customers. This extraordinary achievement approached the achievement of Eid Transport in 2019 of 6.84 million customers.

In order to improve service to customers, KAI continues to collaborate with various parties, including working with Perum DAMRI to provide intermodal services for Long Distance Trains and DAMRI Buses. Through this collaboration, Long Distance Train customers can order DAMRI Bus tickets to go to the departure station or from the arrival station to the desired destination through the KAI Access application. In addition, KAI and Transjakarta are conducting a strategic collaboration which includes an intermodal integration system, developing an integrated transportation business, and developing transit-oriented areas.

During the pandemic, KAI consistently complied with government regulations regarding travel by train amid the dynamic regulations on rail transportation in the midst of a pandemic. Starting from July 17, 2022, KAI implemented rules that adjust the issuance of SE Ministry of Transportation Number 72 of 2022. In order to improve its services to customers during the pandemic, KAI provided free vaccination services at various stations. KAI was optimistic that this policy would not discourage people from traveling by train which always prioritized health protocols.

Looking at the Company's business journey in 2022, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors was able to face the challenges and opportunities that occurred as they recorded satisfying performance. This can be seen in the realization of passenger train transportation which reached 284,448,804 people, or an 84% increase from the realization in 2021. Meanwhile, the total volume of freight transport in 2022 reached 58,006,880 tons, an increase of 15.41% compared to 2021 at 50,261,778 tons.

Dari keuangan, KAI mampu mencatatkan kinerja yang baik pada 2022. Aset tahun 2022 mencapai Rp71,58 triliun, naik 14,13% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp62,72 triliun. Ekuitas tahun 2022 adalah mencapai Rp29,08 triliun atau meningkat 23,23% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp23,59 triliun. Pada sisi profitabilitas, laba usaha KAI pada 2022 adalah mencapai Rp3,37 triliun, naik 1.402,66% atau Rp3,15 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp224,42 miliar.

From finance aspect, KAI managed to record good performance in 2022. Total assets in 2022 reached Rp71.58 trillion, an increase of 14.13% compared to 2021 which reached Rp62.72 trillion. Equity in 2022 was recorded at Rp29.08 trillion, an increase of 23.23% compared to 2021 at Rp23.59 trillion. On the profitability aspect, KAI's operating profit in 2022 reached Rp3.37 trillion, an increase of 1,402.66% or Rp3.15 trillion compared to 2021 at Rp224.42 billion.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

View on Business Prospects Developed by The Board of Directors

Melansir dari laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang rilis pada Januari 2023, menyatakan bahwa perekonomian global diproyeksikan melambat dari sekitar 3,0% pada 2022 menjadi 1,9 persen pada 2023, menandai salah satu tingkat pertumbuhan terendah dalam beberapa dekade terakhir, menurut laporan PBB yang diluncurkan pada Rabu, 25 Januari 2023. Sementara itu, pertumbuhan global pada 2024 diperkirakan akan meningkat secara moderat menjadi 2,7% pada 2024, karena beberapa hambatan ekonomi makro diperkirakan akan mulai mereda di tahun 2024.

The United Nations (UN) report released in January 2023 stated that the global economy is projected to slow down from around 3.0% in 2022 to 1.9 percent in 2023, marking one of the lowest growth rates in recent decades, according to the UN report launched on Wednesday, 25 January 2023. Meanwhile, the global growth in 2024 is expected to increase moderately to 2.7% in 2024, as some macroeconomic headwinds are expected to begin to ease in 2024.

Pada laporan tersebut disampaikan juga bahwa momentum pertumbuhan melemah secara signifikan di Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan negara majulainnya pada 2022, berdampak buruk pada ekonomi global lainnya melalui sejumlah saluran. Di AS, Produk Domestik Bruto (PDB) diproyeksikan tumbuh hanya 0,4% persen pada 2023. Sementara pertumbuhan Cina diproyeksikan akan meningkat secara moderat pada 2023. Pemerintah Cina yang menyesuaikan kebijakan Covid pada akhir 2022 serta melonggarkan kebijakan moneter dan fiskal, menciptakan pertumbuhan ekonomi dan diperkirakan akan meningkat menjadi 4,8% pada 2023.

The report also stated that growth momentum weakened significantly in the United States (US), the European Union, and other developed countries in 2022, having an adverse impact on other global economies through a number of channels. In the US, the Gross Domestic Product (GDP) is projected to grow by only 0.4% percent in 2023. Meanwhile China's growth is projected to increase moderately in 2023. The Chinese government adjusted its Covid policy in late 2022 and relaxed monetary and fiscal policies, creating economic growth which was expected to increase to 4.8% in 2023.

Di tengah gejolak ekonomi global, ekonomi Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan prospek yang baik. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3% dan akan terus meningkat menjadi 4,7-5,5% pada 2024 didukung oleh konsumsi swasta, investasi dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan menurun dan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023, seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (*imported inflation*) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang *front loaded, pre-emptive, dan forward looking*.

In the midst of global economic turmoil, the Indonesian economy continues to show resilience and good prospects. Bank Indonesia predicts Indonesia's economic growth in 2023 will remain strong in the range of 4.5-5.3% and will continue to increase to 4.7-5.5% in 2024, supported by private consumption, investment and continued positive export performance amid economic growth global slowdown. Consumer Price Index (CPI) inflation is predicted to decline and return to the target of 3.0±1% in 2023 and 2.5±1% in 2024, with core inflation set to return earlier in the first half of 2023, as price inflation remains under control imports (imported inflation) with a stable Rupiah exchange rate and a front-loaded, pre-emptive, and forward-looking monetary policy response.

Dari sisi angkutan barang, KAI masih menjadi pilihan sehingga ini menjadi peluang emas bagi prospek usaha Perseroan. Di tahun 2023 KAI menargetkan dapat melayani 45,5 juta pelanggan. Di mana okupansi pelanggan di 2023 tersebut, diprediksi akan meningkat 36% dibanding realisasi jumlah penumpang pada 2022. Di tahun 2023 ini, KAI akan melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan.

Selain itu, KAI sebagai penyelenggara jasa angkutan barang yang mengangkut bermacam komoditas, di antaranya, peti kemas, angkutan perkebunan, semen, BBM dan batu bara, dipastikan masih memiliki peluang yang menjanjikan di tahun 2023. Hal ini disebabkan di tahun 2023 Pemerintah menargetkan produksi batubara mencapai 695 juta ton dengan proyeksi kebutuhan domestik sebesar 177 juta ton, dan 518 juta ton untuk ekspor. Target tersebut lebih tinggi 31 juta ton dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 663 juta ton.

Batu bara hingga kini masih menjadi sumber energi utama dalam bauran energi nasional dalam jangka pendek/ menengah. Oleh sebab itu, dibutuhkan infrastruktur pendukung yaitu transportasi untuk mengangkut batubara. Pemerintah memberikan dukungan terkait penggunaan angkutan kereta untuk transportasi batu bara sehingga dapat memudahkan pengangkutan batubara keluar dari wilayah produksi untuk tujuan ekspor maupun domestik.

Kondisi ini menguntungkan bisnis Perseroan karena akan terdapat peningkatan permintaan jasa transportasi kereta api terutama angkutan barang pada tahun 2023. Melihat peluang-peluang yang ada, Dewan Komisaris optimis dan berkeyakinan bahwa Perseroan akan dapat memanfaatkan peluang yang ada sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan di tahun mendatang sekaligus juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

In terms of freight transportation, KAI is still the choice, which is a golden opportunity for the Company's business prospects. In 2023 KAI targets to be able to serve 45.5 million customers. The customer occupancy in 2023 is predicted to increase by 36% compared to the actual number of passengers in 2022. In 2023, KAI will carry out various innovations to improve service to customers.

In addition, KAI as a provider of goods transportation services that transport various commodities, including containers, plantation transportation, cement, fuel and coal, is certain to still have promising opportunities in 2023. This is due to the fact that in 2023 the government is targeting coal production reached 695 million tons with a projected domestic demand of 177 million tons, and 518 million tons for export. The target is 31 million tons higher than the previous year which reached 663 million tons.

Coal is still the main energy source in the national energy mix in the short/medium term. Therefore, supporting infrastructure is needed, namely transportation to transport coal. The government provides support regarding the use of rail transportation for coal transportation so that it can facilitate the transportation of coal out of production areas for export and domestic purposes.

This condition benefits the Company's business because there will be an increase in demand for rail transportation services, especially freight transportation in 2023. Seeing the opportunities that exist, the Board of Commissioners is optimistic and believes that the Company will be able to take advantage of existing opportunities so that it can improve financial performance in the coming year as well as can support national economic growth.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Views on The Implementation of Corporate Governance

Perseroan berkomitmen kuat untuk menerapkan tata kelola yang baik/*Good Corporate Governance* (GCG) yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan melakukan upaya ini, Perseroan dapat mewujudkan bisnis yang berkelanjutan. Perseroan meyakini, dengan penerapan GCG di setiap lini bisnis dapat menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

The Company is strongly committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) which refers to the applicable laws and regulations. By making these efforts, the Company can realize a sustainable business. The Company believes that the implementation of GCG in every line of business can create added values for all interested parties (*stakeholders*).



Di samping itu, melalui penerapan GCG, Perseroan dapat mengontrol dan memastikan bahwa praktik-praktik usaha yang dijalankan telah berjalan secara sehat dan berintegritas. Berdasarkan pengamatan Dewan Komisaris, implementasi GCG yang telah dijalankan oleh Perseroan telah membawa dampak positif. Untuk itu, Dewan Komisaris senantiasa mendukung jajaran Direksi untuk selalu melakukan penyempurnaan terhadap implementasi GCG. Bahkan, Dewan Komisaris mendukung penerapan *Environmental, Social, and Governance* atau ESG. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah menerapkan GCG dengan efektif dan konsisten di 2022. Hal ini dapat terlihat pada komponen-komponen sebagai berikut.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Penerapan sistem manajemen risiko yang efektif dan efisien dapat membantu perusahaan dalam melakukan mitigasi mulai dari asesmen, pengawasan, hingga tindakan pengendalian risiko bisnis perusahaan. Berangkat dari pemahaman tersebut, Dewan Komisaris memberikan dukungan penuh terhadap penerapan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan. Perseroan menerapkan sistem manajemen risiko yang mengacu pada ISO 31000:2018 *Risk Management - Guidelines* sehingga Perseroan mampu menangkap peluang-peluang usaha dan mengelola risiko dengan pelaksanaan mitigasi risiko yang efektif. Tahapan proses manajemen risiko yang dilakukan mengacu pada ISO 31000:2018 terdiri dari:

In addition, through the implementation of GCG, the Company can control and ensure that its business practices are carried out in a healthy and ethical manner. Based on the observations of the Board of Commissioners, the implementation of GCG that has been carried out by the Company has had a positive impact. For this reason, the Board of Commissioners always supports the Board of Directors to always make improvements to GCG implementation. In fact, the Board of Commissioners supports the implementation of Environmental, Social, and Governance or ESG. The Board of Commissioners believes that the Board of Directors has implemented GCG effectively and consistently in 2022. This can be seen in the following components.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

Implementation of an effective and efficient risk management system can assist the company in carrying out mitigation starting from assessment, supervision, to the company's business risk control measures. Departing from this understanding, the Board of Commissioners provides full support for the implementation of risk management within the Company. The Company implements a risk management system that refers to ISO 31000:2018 Risk Management - Guidelines so that the Company is able to seize business opportunities and manage risks by implementing effective risk mitigation. The stages of the risk management process carried out refer to ISO 31000:2018 consisting of:



1. Komunikasi dan konsultasi
2. Penetapan ruang lingkup, konteks, dan kriteria
3. Asesmen risiko meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko
4. Perlakuan risiko (mitigasi risiko)
5. Monitoring dan review
6. Pencatatan dan pelaporan

Proses manajemen risiko yang dijalankan oleh Perseroan merupakan rangkaian siklus yang diawali dari kegiatan komunikasi dan konsultasi untuk mendapatkan informasi terbaik yang tersedia sebagai dasar dalam melakukan penentuan konteks dan asesmen risiko. Selanjutnya, berdasarkan data dan informasi terbaik yang tersedia, Unit Manajemen Risiko mengidentifikasi terhadap potensi-potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian strategi dan tujuan Perseroan termasuk tujuan setiap paket investasi yang tertuang dalam RKAP. Data dan informasi terbaik yang tersedia untuk kegiatan asesmen risiko diperoleh dari proposal, *project minicharter*, justifikasi kebutuhan barang dan jasa, RAB, spesifikasi teknis, kajian finansial, studi kelayakan bisnis, dan kajian *highest and best use*, serta dari kegiatan survei lapangan ke lokasi objek-objek investasi.

1. Communication and consulting
2. Determination of scope, context, and criteria
3. Risk assessment includes risk identification, risk analysis, and risk evaluation
4. Risk treatment (risk mitigation)
5. Monitoring and review
6. Recording and reporting

The risk management process carried out by the Company is a series of cycles that begin with communication and consulting activities to obtain the best available information as a basis for determining the context and risk assessment. Furthermore, based on the best available data and information, the Risk Management Unit identifies potential risks that may affect the achievement of the Company's strategy and objectives, including the objectives of each investment package contained in the RKAP. The best available data and information for risk assessment activities are obtained from proposals, project mini charters, justification of the need for goods and services, RAB, technical specifications, financial studies, business feasibility studies, and studies of the highest and best use, as well as from field survey activities to the locations of objects. investment object.

Untuk mengoptimalkan penerapan manajemen risiko, secara berkala Unit Manajemen Risiko melakukan kegiatan asesmen risiko berdasarkan usulan investasi RKAP dan Non RKAP termasuk di dalamnya asesmen risiko atas permintaan khusus dari direktorat tertentu (*user*). Perseroan melakukan penerapan risiko investasi dalam rangka menjamin penciptaan nilai (*create value*) dari kegiatan investasi perusahaan dengan tingkat pengembalian investasi yang layak dan profitabilitas yang meningkat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis perusahaan. Di tahun 2022, Unit Manajemen Risiko telah menjalankan asesmen risiko tidak hanya terbatas pada investasi saja tetapi juga melakukan asesmen risiko di luar investasi.

Merujuk hasil identifikasi dan analisis risiko terhadap 15 risiko utama Perusahaan, di sepanjang tahun 2022 telah dilakukan monitoring risiko utama Perusahaan yang dilakukan baik melalui pengisian form tindak lanjut mitigasi risiko maupun dengan cara memantau secara langsung ke para Risk Taking Unit (RTU). Berdasarkan asesmen risiko yang telah dilakukan pada tahun 2022, Unit Manajemen Risiko mengidentifikasi sebanyak 15 (lima belas) risiko dengan 1 (satu) risiko dengan level aktual ekstrem, 4 (empat) risiko dengan level aktual tinggi, 5 (lima) risiko dengan level aktual sedang, dan 5 (lima) risiko dengan level aktual rendah.

Mengacu pada ISO 31000:2018, pengelolaan risiko Perseroan akan dapat berjalan efektif jika dilakukan oleh seluruh unit bisnis atau yang disebut sebagai manajemen risiko terpadu (*Enterprise Risk Management/ERM*). Untuk itu, dalam rangka penerapan ERM, Perseroan telah menerapkan aplikasi SMARTKA untuk memfasilitasi pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Risiko Terpadu. Keberadaan aplikasi SMARTKA guna mendukung pengelolaan risiko di seluruh unit bisnis/unit kerja (*risk entity*) melalui pelaksanaan *Risk Control and Self Assessment (RCSA)*.

Mengacu pada hasil penilaian yang dilakukan bersama antara Unit Internal Kontrol (SPI) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi KAI telah memperoleh pencapaian *Risk Maturity Index (RMI)* sebesar 2,727 atau berada pada level 2 (*repeatable*) menuju level 3 (*defined*).

To optimize the implementation of risk management on a regular basis, the Risk Management Unit conducts risk assessment activities based on the RKAP and Non-RKAP investment proposals including risk assessments at special requests from certain directorates (*users*). The Company implements investment risk in order to guarantee value creation from the company's investment activities with a decent rate of return on investment and increased profitability so that it is expected to increase its business growth. In 2022, the Risk Management Unit carried out risk assessments not only limited to investments but also risk assessments outside of investments.

Referring to the results of risk identification and analysis to 15 key risk of the Company, risk monitoring has been carried out in 2022 through filling out risk mitigation follow-up forms from investment packages and monitoring directly to the Risk Taking Units (RTU). Based on the 2022 risk assessment, the Risk Management Unit identified a total of 15 (fifteen) risks with 1 (one) risk in the extreme level, 4 (four) risks in the high level, 5 (five) risks in the medium level, and 5 (five) risks in the low level.

Referring to ISO 31000:2018, the Company's risk management will be able to run effectively if it is carried out by all business units or what is known as integrated risk management (*Enterprise Risk Management/ERM*). For this reason, in the context of implementing ERM, the Company has implemented the SMARTKA application to facilitate the implementation of the Integrated Risk Management System. The existence of the SMARTKA application to support risk management in all business units/work units (*risk entities*) through the implementation of *Risk Control and Self Assessment (RCSA)*.

Referring to the results of the assessment by the Internal Audit Unit (SPI) with the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) that the Maturity Level of Implementation of the Integrated Risk Management System KAI has achieved a *Risk Maturity Index (RMI)* of 2.727 from a scale of 4, which at the level 2 (*repeatable*) towards level 3 (*defined*).

Di sisi lain, Perseroan telah menggunakan indikator kinerja Efektivitas *Monitoring* dan Pengendalian Risiko Utama Perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam melakukan pelaksanaan mitigasi risiko utama. Dari 15 risiko utama perusahaan dengan 27 penanganan mitigasi risiko yang direkomendasikan. Dewan Komisaris menilai bahwa di sepanjang tahun 2022 penerapan sistem manajemen risiko di Perseroan telah berjalan dengan baik.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Untuk mewujudkan kegiatan operasional yang sehat, aman, dan berintegritas, Perseroan menerapkan Sistem Pengendalian Internal. Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang andal dan efektif. Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan sistem pengendalian internal di Perseroan di sepanjang tahun 2022 telah berjalan dengan baik.

Penerapan Sistem pengendalian internal KAI terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Kegiatan Pemantauan. Masing-masing komponen tersebut terdiri dari beberapa prinsip dan *point of focus* yang dirancang dan dilaksanakan untuk dapat memenuhi tujuan implementasi sistem pengendalian internal.

Perseroan menggunakan Kerangka Kerja Pengendalian Internal yang Terintegrasi (*Internal Control-Integrated Framework*) oleh The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) sebagai kerangka konseptual dalam pengembangan pengendalian internal di lingkungan Perseroan. Oleh karena itu, Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan Perseroan telah sejalan dengan yang dikembangkan oleh COSO, yang meliputi 5 (lima) komponen, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Kegiatan Pemantauan.

Penerapan sistem pengendalian internal Perseroan menjadi tanggung jawab Direksi. Untuk menguji dan menilai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal, Perseroan melakukan penilaian mandiri terhadap penerapan sistem pengendalian internal. Penilaian ini dapat memberikan keyakinan bahwa seluruh tujuan kegiatan Perseroan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan yang ditargetkan.

On the other hand, the Company has used performance indicators of the Company's Main Risk Monitoring and Control Effectiveness to measure the company's performance in carrying out key risk mitigation. Of the 15 main company risks with 27 recommended risk mitigation measures. The Board of Commissioners considers that throughout 2022 the implementation of the risk management system in the Company has been going well.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

To realize operational activities that are healthy, safe and with integrity, the Company implements an Internal Control System. The Company is committed to implementing a reliable and effective Internal Control System. The Board of Commissioners believes that the implementation of the internal control system in the Company throughout 2022 has been going well.

KAI's internal control system implementation consists of 5 (five) components, namely Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring Activities. Each of these components consists of several principles and points of focus that are designed and implemented in order to fulfill the objectives of implementing the internal control system.

The Company uses the Internal Control-Integrated Framework by The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) as a conceptual framework in developing internal control within the Company. Therefore, the Internal Control System implemented by the Company is in line with that developed by COSO, which includes 5 (five) components, namely Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring Activities.

The implementation of the Company's internal control system is the responsibility of the Board of Directors. To test and assess the effectiveness of the implementation of the internal control system, the Company conducts an independent assessment of the implementation of the internal control system. This assessment can provide confidence that all of the objectives of the Company's activities can run well, according to the target.

Perseroan melakukan penilaian mandiri penerapan sistem pengendalian internal dilakukan secara berkala. SPI melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan secara menyeluruh untuk mendukung asersi Direksi atas efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan. Mengacu pada evaluasi yang telah dijalankan, Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2022 sistem pengendalian internal di KAI telah berjalan dengan baik.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sebagai wujud komitmen Perusahaan terhadap implementasi tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), KAI menerapkan Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System/WBS*) yang bertujuan untuk:

1. Membangun dan menerapkan WBS untuk mempermudah Perseroan dalam menangani laporan-laporan pelanggaran sekaligus melindungi kerahasiaan identitas Pelapor serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya.
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini atas kemungkinan terjadinya dampak buruk akibat suatu pelanggaran.
3. Memperkuat upaya preventif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak reputasi Perseroan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dan menjaga serta melindungi aset dan/atau kepentingan Perseroan.
4. Meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada Pelapor dalam rangka pencegahan dan penyelesaian pelanggaran di lingkungan internal Perseroan.
5. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran sebagai dampak dari pengawasan oleh semua pihak.
6. Meningkatkan reputasi Perseroan.

Sebagai Perusahaan BUMN, KAI menjunjung tinggi etika, transparansi, dan integritas dalam kegiatan operasional dan hubungan dengan semua pemangku kepentingan. Hal ini dibuktikan oleh upaya Perseroan yang turut mendukung Pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu, Perseroan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta 26 BUMN lainnya.

The Company conducts self-assessment of the implementation of the internal control system on a regular basis. SPI evaluates the adequacy and effectiveness of the Company's internal control system as a whole to support the Board of Directors' assertion on the effectiveness of the implemented internal control system. Referring to the evaluation that has been carried out, the Board of Commissioners considers that during 2022 the internal control system at KAI has been running well.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

As a form of the Company's commitment to the implementation of Good Corporate Governance, KAI implements the Guidelines for Handling Complaints (*Whistleblowing System/WBS*) which aims to:

1. Develop and implement WBS to make it easier for the Company to handle reports of violations while protecting the confidentiality of the Whistleblower's identity and maintaining this information in a special archive guaranteed to be safe.
2. Availability of an early detection mechanism for the possibility of adverse effects due to a violation.
3. Strengthen preventive efforts and encourage reporting on matters that could cause financial losses, including things that could damage the Company's reputation in order to provide excellent service to customers and maintain and protect the assets and/or interests of the Company.
4. Improve the supervisory system providing protection to the Whistleblower in the context of preventing and resolving violations within the Company's internal environment.
5. The emergence of reluctance to commit violations as a result of supervision by all parties.
6. Improve the reputation of the Company.

As a state-owned company, KAI upholds ethics, transparency and integrity in operational activities and relationships with all stakeholders. This is proven by the Company's efforts to support the Government in eradicating corruption. For this reason, the Company and the Corruption Eradication Commission (KPK) have signed a Complaint Handling Cooperation Agreement (PKS) in Efforts to Eradicate Corruption Crimes together with the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) and 26 other SOEs.

Untuk lingkup PKS meliputi penyusunan dan/atau penguatan aturan internal Perseroan terkait penanganan pengaduan, komitmen pengelolaan penanganan pengaduan, penanganan pengaduan melalui aplikasi, koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan serta pertukaran data dan/ atau informasi.

KAI mendorong seluruh Insan Perseroan dan/atau masyarakat untuk menyampaikan Pengaduan atas tindakan yang dilakukan oleh Insan Perseroan bila terdapat dugaan:

1. Tindak pidana Korupsi, yang meliputi kerugian keuangan Perseroan, pemberian suap, penerimaan suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan/atau gratifikasi.
2. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
3. Pelanggaran pedoman perilaku dan/atau pelanggaran kode etik Perusahaan.
4. Pelanggaran disiplin Pekerja.

Pihak pengelola laporan pengaduan adalah unit pengelola WBS yaitu Unit *Corporate Secretary* dan Unit *Quality Assurance and Good Corporate Governance* yang terdiri atas penelaah WBS, petugas verifikasi WBS, dan petugas administrasi WBS. Proses pengelolaan laporan meliputi beberapa tahap. Setelah menerima laporan pengaduan, unit pengelola WBS melakukan administrasi, verifikasi dan peninjauan. Selanjutnya, peninjauan tersebut disampaikan kepada Direktur Utama sebagai Penanggung Jawab WBS. Berdasarkan hasil peninjauan, penanggung jawab pengelola WBS akan meminta Kepala Satuan Pengawas Intern untuk melakukan audit investigatif. Bila berdasarkan hasil audit investigatif ditemukan adanya dugaan penyimpangan dan/ atau pelanggaran, penanggung jawab WBS akan meneruskan hasil audit investigatif kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin pekerja.

Laporan pengaduan dan hasil investigasi akan didokumentasikan oleh petugas *database* WBS. Selanjutnya, Dewan Komisaris berperan menelaah laporan pengaduan WBS dalam hal terlapor merupakan Direksi. Di sepanjang tahun 2022 Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan WBS di Perseroan telah berjalan dengan baik.

The scope of PKS includes preparing and/or strengthening the Company's internal rules regarding complaint handling, commitment to managing complaints, handling complaints through applications, coordination and joint activities for handling complaints and exchanging data and/or information.

KAI encourages all Company Personnels and/or the public to submit Complaints regarding actions taken by Company Personnel if there is an allegation of:

1. Corruption crime, including the Company's financial losses, giving bribes, accepting bribes, embezzlement in office, extortion, fraudulent acts, conflicts of interest and/or gratuities.
2. Other crimes related to corruption.
3. Violation of the code of conduct and/or violation of the Company's code of ethics.
4. Worker discipline violations.

The management of complaint reports is the WBS management unit, namely the Corporate Secretary Unit and the Quality Assurance and Good Corporate Governance Unit which consists of WBS reviewers, WBS verification officers, and WBS administration officers. The report management process includes several stages. After receiving the complaint report, the WBS management unit carries out administration, verification and review. Furthermore, the review is submitted to the President Director as the Party in Charge of WBS. Based on the results of the review, the party in charge of WBS will ask the Internal Audit Unit Head to conduct an investigative audit. If based on the results of the investigative audit it is found that there are allegations of irregularities and/or violations, the person in charge of the WBS will forward the results of the investigative audit to the official authorized to impose disciplinary punishment on workers.

Complaint reports and investigation results will be documented by the WBS database officer. Furthermore, the Board of Commissioners plays a role in reviewing WBS complaint reports in the event that the reported party is a member of the Board of Directors. Throughout 2022, the Board of Commissioners was of the view that the implementation of the WBS in the Company has been going well.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Untuk menunjang kinerja pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris menilai komite-komite tersebut di sepanjang tahun 2022 telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengawasi aspek-aspek operasional dan strategis Perseroan dengan sangat baik.

Penilaian kinerja Komite dilakukan secara rutin dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan Dewan Komisaris. Kriteria yang digunakan dalam penilaian yakni seberapa jauh kinerja yang dijalankan telah sesuai dengan harapan atau sebaliknya. Dalam melakukan penilaian, penilai memberikan justifikasi atas penilaian yang diberikan. Dengan demikian, akuntabilitas dari tiap penilaian dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya penilaian/evaluasi terhadap setiap organ pendukung, dapat mengukur tingkat efektivitas sehingga dapat memberikan input terhadap setiap anggota organ. Adapun Komite Audit dalam pelaksanaan tugasnya memonitor kinerja Audit Internal, Auditor Independen dalam melakukan audit laporan keuangan, menelaah laporan Perseroan kepada pihak luar, dan sistem pengendalian intern. Di samping itu Komite Audit juga membantu Dewan Komisaris dalam tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sementara Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) mengawasi berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan, yang meliputi aspek strategi, sistem, serta kebijakan manajemen risiko Perusahaan, hingga melakukan identifikasi risiko yang dihadapi KAI, dan merekomendasikan langkah mitigasi risiko tersebut.

Sedangkan Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan reviu atas kebijakan talenta perusahaan, evaluasi terhadap calon pengurus baik perusahaan maupun anak perusahaan, dan juga memberikan masukan dan rekomendasi terhadap remunerasi pengurus perusahaan.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

To support supervisory performance, the Board of Commissioners is assisted by the committees under the Board of Commissioners, which consist of the Audit Committee, the Risk Management Monitoring Committee and the Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners considered that throughout 2022 these committees have carried out their duties and responsibilities to oversee the Company's operational and strategic aspects very well.

Committee performance evaluation is carried out routinely using the method determined by the Board of Commissioners. The criteria used in the assessment are how far the performance has met expectations or vice versa. In conducting the assessment, the appraiser provides justification for the assessment given. Thus, the accountability of each assessment can be accounted for.

With an assessment/evaluation of each supporting organ, it can measure the level of effectiveness so that it can provide input to each member of the organ. The Audit Committee carries out its duties by monitoring the performance of the Internal Audit, the Independent Auditor in auditing financial reports, reviewing the Company's reports to outsiders, and the internal control system. In addition, the Audit Committee also assists the Board of Commissioners in other tasks assigned by the Board of Commissioners.

Meanwhile, the Risk Management Monitoring Committee (KPMR) oversees various risks faced by the Company, which include aspects of the Company's risk management strategies, systems and policies, to identify the risks faced by KAI, and recommend steps to mitigate these risks.

The Nomination and Remuneration Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in reviewing the company's talent policy, evaluating prospective managers for both the company and its subsidiaries, and also providing input and recommendations on the remuneration of company management.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Changes in Board of Commissioners' Composition

PERIODE 1 JANUARI-15 AGUSTUS 2022

Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari-15 Agustus 2022 sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan Komisaris Independen dan 7 (tujuh) orang Komisaris/Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat KAI. Komposisi Dewan Komisaris dapat dilihat di bawah ini.

Nama / Name	Jabatan / Position
Said Aqil Siroj	Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner/Independent Commissioner
Rochadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Riza Primadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Endang Tirtana	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Freddy Harris	Komisaris / Commissioner
Cris Kuntadi	Komisaris / Commissioner
Diah Natalisa	Komisaris / Commissioner
Chairul Anwar	Komisaris / Commissioner

PERIODE 15 AGUSTUS 2022

Pada tanggal 15 Agustus 2022 terjadi perubahan komposisi susunan keanggotaan Dewan Komisaris, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-173/MBU/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang mengangkat Bapak Johan Bakti Porsea Sirait sebagai Komisaris, menggantikan Bapak Cris Kuntadi. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Cris Kuntadi atas kontribusinya terhadap Perseroan.

Atas perubahan tersebut, komposisi Dewan Komisaris pada 15 Agustus 2022 sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan Komisaris Independen, 7 (tujuh) orang Komisaris/Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat KAI.

PERIOD OF JANUARY 1 - AUGUST 15, 2022

The composition of the Board of Commissioners for the period of January 1 - August 15, 2022 was 8 (eight) members, consisting of 1(one)President Commissioner and Independent Commissioner and 7 (seven) Commissioners/Independent Commissioners.

All members of the Board of Commissioners are domiciled in the working area of the KAI Head Office. The composition of the Board of Commissioners can be seen below.

PERIOD OF AUGUST 15, 2022

On August 15, 2022 there was a change in the composition of the membership of the Board of Commissioners based on the Decree of the Minister of SOE No. 173/MBU/08/2022 dated August 15, 2022 for the appointment of Johan Bakti Porsea Sirait in replacing Mr. Cris Kuntadi. We express our gratitude to Mr. Cris Kuntadi for his contribution to the Company.

For such changes, the composition of the Board of Commissioners on August 15, 2022 was 8 (eight) members, consisting of 1(one)President Commissioner and Independent Commissioner and 7 (seven) Commissioners/Independent Commissioners. All members of the Board of Commissioners are domiciled in the working area of the KAI Head Office.

PERIODE 15 AGUSTUS-20 SEPTEMBER 2022

Pada 15 Agustus 2022 terjadi perubahan komposisi berikutnya pada susunan Dewan Komisaris, yang dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-174/MBU/08/2022. Berdasarkan perubahan tersebut, Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 8 (delapan) anggota Dewan Komisaris, dengan 1 (satu) orang Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen dan 7 (tujuh) orang Komisaris/Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tersebut berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat KAI, dengan penjelasan komposisi sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position
Said Aqil Siroj	Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner/Independent Commissioner
Rochadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Riza Primadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Endang Tirtana	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Sri Paduka Mangkoenagoro X	Komisaris / Commissioner
Johan Bakti Porsea Sirait	Komisaris / Commissioner
Diah Natalisa	Komisaris / Commissioner
Chairul Anwar	Komisaris / Commissioner

PERIODE 20 SEPTEMBER-31 DESEMBER 2022

Pada 20 September 2022 terjadi perubahan komposisi pada susunan Dewan Komisaris, yang dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-207/MBU/09/2022. Berdasarkan perubahan tersebut, Bapak Mohamad Risal Wasal diangkat sebagai Komisaris Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris terdiri dari 9 (sembilan) anggota, dengan 1 (satu) orang Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen dan 8 (delapan) orang Komisaris/Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tersebut berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat KAI, dengan penjelasan komposisi sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position
Said Aqil Siroj	Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner/Independent Commissioner
Rochadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Riza Primadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Endang Tirtana	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Sri Paduka Mangkoenagoro X	Komisaris / Commissioner
Johan Bakti Porsea Sirait	Komisaris / Commissioner
Diah Natalisa	Komisaris / Commissioner
Chairul Anwar	Komisaris / Commissioner
Mohamad Risal Wasal	Komisaris / Commissioner

PERIOD OF AUGUST 15-SEPTEMBER 20 2022

On August 15, 2022 there was another change in the composition of the Board of Commissioners, based on the Decree of the Minister of SOE No. SK-174/MBU/08/2022. For such changes, the Company's Board of Commissioners consisted of 8 (eight) members, with 1 (one) President Commissioner cum Independent Commissioner and 7 (seven) Commissioners/Independent Commissioners. All members of the Board of Commissioners are domiciled in the working area of the KAI Head Office, with the following composition:

PERIOD OF SEPTEMBER 20- DECEMBER 31, 2022

On September 20, 2022 there was a change in the composition of the Board of Commissioners, based on the Decree of the Minister of SOE No. SK-207/MBU/09/2022. Based on these changes, Mr. Mohamad Risal Wasal was appointed as a Commissioner of the Company, so that the composition of the Board of Commissioners consists of 9 (nine) members, with 1 (one) President Commissioner cum Independent Commissioner and 8 (eight) Commissioners/Independent Commissioners. All members of the Board of Commissioners are domiciled in the working area of the KAI Head Office, with the following composition:

PENUTUP

Closing

Kami menyampaikan rasa terima kasih yang besar atas kepercayaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga PT Kereta Api Indonesia (Perseroa) dapat melewati masa krisis. Kami juga mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Direksi, jajaran manajemen, karyawan, seluruh Insan Perseroan, serta pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dan mendukung Perseroan untuk dapat terus tumbuh dan menjaga kelangsungan bisnis di sepanjang tahun 2022. Dewan Komisaris optimistis pencapaian yang diperoleh di tahun 2022 dapat menjadi pemacu tekad dan semangat untuk dapat menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia.

We express our gratitude for the trust of the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) so that PT Kereta Api Indonesia (Perseroa) can get through this crisis. We also express our highest gratitude and appreciation to all Directors, management, employees, all Company personnel, and stakeholders who have contributed and supported the Company to continue to grow and maintain business continuity throughout 2022. The Board of Commissioners is optimistic that the great achievement in 2022 shall encourage the determination and enthusiasm to be the best transportation ecosystem solution for Indonesia.

Bandung, Agustus 2023 / August, 2023
Atas Nama Dewan Komisaris, /
On Behalf of the Board of Commissioners,



SAID AQIL SIROJ

Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Independer Commissioner

DEWAN KOMISARIS

Board Of Commissioners

1.	Said Aqil Siroj	Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner/Independent Commissioner
2.	Rochadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner
3.	Riza Primadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner
4.	Endang Tirtana	Komisaris Independen / Independent Commissioner
5.	Johan Sirait	Komisaris Independen / Independent Commissioner



DEWAN KOMISARIS

Board Of Commissioners

6.	Diah Natalisa	Komisaris / Commissioner
7.	Chairul Anwar	Komisaris / Commissioner
8.	Sri Paduka Mangkoenagoro X	Komisaris / Commissioner
9.	Mohamad Risal Wasal	Komisaris / Commissioner





03

Profil Perusahaan Company Profile



IDENTITAS PERSEROAN

Corporate Identity



Nama Perusahaan [GRI 102-1]

Company's Name

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)



Nama Panggilan

Nickname

KAI



Status

Status

Badan Usaha Milik Negara (Persero) / State-Owned Enterprise (Persero)



Tanggal Pendirian

Date of Establishment

28 September 1945 / September 28, 1945



Jumlah Pegawai [GRI 2-7]

Total Employees

27.359 orang per 31 Desember 2022* / 27,359 employees as of December 31, 2022*



Alamat Kantor Pusat [OJK C.2, GRI 2-1]

Head Office Address

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Bandung 40117
PO Box 1163 Bandung 40000



Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Asdo Artriviyanto

Executive Vice President Corporate Secretary /
Executive Vice President Corporate Secretary

*) Jumlah pegawai KAI induk / Number of main KAI employees

IDENTITAS PERSEROAN

Corporate Identity



Bidang Usaha [OJK C.4, GRI 2-1]

Line of Business

Bidang Transportasi / Transportation Sector



Dasar Hukum Pendirian [GRI 2-5]

Legal Basis of Establishment

Maklumat Kementerian Perhubungan No. 1/
KA Tahun 1946 / Decree of the Ministry of
Transportation No. 1/KA of 1946



Kepemilikan Saham [GRI 2-5]

Share Ownership

100% Pemerintah Republik Indonesia / 100%
owned by the Government of the Republic of
Indonesia



Alamat Kontak [GRI 2-5]

Contact Address

Telp: (022) 4230031, 4230039, 4230054

Fax: (022) 4203342 ext. 10039

E-mail : dokumen@kai.id

Media Sosial

FB : Kereta Api Kita, KAI121

Twitter : @Kereta Apikita, @kai121

Instagram : @Kereta Apikita, @kai121_

Youtube : Kereta Api Kita

Tiktok : @kai121_



Situs Web

Website

www.kai.id



NAMA DAN ALAMAT KANTOR CABANG ATAU KANTOR PERWAKILAN

[OJK C.2]

NAME AND ADDRESS OF BRANCH OFFICE OR REPRESENTATIVE OFFICE

- **Daerah Operasi 1 Jakarta:** Stasiun Cikini, Jl Pegangsaan Timur No. 6 , Kec Menteng Jakarta Pusat. **Telp** : (022) 4230031 **Email untuk Surat Dinas** : dokumen.do1@kai.id **Web** : www.kai.id
- **Daerah Operasi 2 Bandung:** Jl. Stasiun Selatan No. 25, Bandung 40181 **Telp** : (022) 4230031 **Email untuk Surat Dinas** : dokumen.do2@kai.id **Web** : www.kai.id
- **Daerah Operasi 3 Cirebon:** Jl. Siliwangi No. 82 Kecamatan Kejaksan Cirebon Jawa Barat 45124 **Telp** : (022) 4230031 **Email untuk Surat Dinas** : dokumen.do3@kai.id **Web** : www.kai.id
- **Daerah Operasi 4 Semarang:** Jl. M.H Thamrin No. 3 Semarang, 50132 **Telp** : (022) 4230031 **Email untuk Surat Dinas** : dokumen.do4@kai.id **Web** : www.kai.id
- **Daerah Operasi 5 Purwokerto:** Jl. Jenderal Soedirman No. 209, Brubahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah – 53141 **Telp** : (022) 4230031 **Email untuk Surat Dinas** : dokumen.do5@kai.id **Web** : www.kai.id
- **Daerah Operasi 6 Yogyakarta:** Jl. Lempuyangan No. 1 Danurejan Tegalpanggung Yogyakarta 55213 **Telp** : (022) 4230031 **Email untuk Surat Dinas** : humasda6@kai.id **Web** : www.kai.id
- **Daerah Operasi 7 Madiun:** Jl. Kopol Sunaryo No. 14, Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Madiun, 63122 **Telp** : (022) 4230031 **Email untuk Surat Dinas** : dokumen.do7@kai.id **Web** : www.kai.id
- **Daerah Operasi 8 Surabaya:** Jl. Gubeng Masjid No. 1, Surabaya 60131 **Telp** : (022) 4230031 **Email untuk Surat Dinas** : dokumen.do8@kai.id **Web** : www.kai.id
- **Daerah Operasi 9 Jember:** Jl. Dahlia No. 2 Kecamatan Patrang, Jember 68118 **Telp** : (022) 4230031 **Email untuk Surat Dinas** : dokumen.do9@kai.id **Web** : www.kai.id
- **Divisi Regional 1 Sumatera Utara:** Jl. Prof.HM.Yamin, SH No. 14 Medan, 20231 **Telp** : (022) 4230031 **Email untuk Surat Dinas** : dokumen.dv1@kai.id **Web** : www.kai.id
- **Sub Divisi Regional 1.1 Aceh:** Jl. Iskandar Muda No. 2 Sukaramai Kec Baiturrahman Kota Banda Aceh. **Telp** : (022)4230031 **Email untuk Surat Dinas** : sekretaris.sdv11@kai.id **Web** : www.kai.id
- **Divisi Regional 2 Sumatera Barat:** Jl. Stasiun No. 1, Kec. Padang Timur, Kel. Sawahan Timur, Padang, 25121 **Telp** : (022) 4230031 **Email untuk Surat Dinas** : dokumen.dv2@kai.id **Web** : www.kai.id
- **Divisi Regional 3 Palembang:** Jl. Jend Achmad Yani 13 Ulu No. 541, Palembang 30258 **Telp** : (022) 4230031 **Email untuk Surat Dinas** : dokumen.dv3@kai.id **Web** : www.kai.id
- **Divisi Regional 4 Tanjungkarang:** Jl. Teuku umar No. 23 Bandar Lampung 35111 **Telp** : (022) 4230031 **Email untuk Surat Dinas** : dokumen.divre4@kai.id **Web** : www.kai.id
- **Balai Yasa Manggarai:** Jl. Bukit Duri Utara No. 1 Jakarta Selatan 12850 **Telp** : (022) 4230031 **Email untuk Surat Dinas** : dokumen.bymri@kai.id **Web** : www.kai.id
- **Balai Yasa Tegal** Jl. Semeru: No. 5, slerok, Tegal Timur, Tegal 52125 **Telp** : 0283 353056 **Telp**: (022) 4230031 **Email untuk Surat Dinas** : dokumen.bytg@kai.id **Web** : www.kai.id
- **Balai Yasa Yogyakarta:** Jl. Kusbini No. 1 Yogyakarta **Telp** : (022) 4230031 **Email untuk Surat Dinas** : dokumen.byyk@kai.id **Web**: www.kai.id
- **Balai Yasa Surabaya Gubeng:** Jl. Tapak Siring No. 5 Surabaya, 60131 **Telp** : (022) 4230031 **Email untuk Surat Dinas** : dokumen.bysgu@kai.id **Web** : www.kai.id
- **Balai Yasa Lahat:** Jl. Inspektur Yazid No. 1 Lahat, 31417 **Telp** : (022) 4230031 **Email untuk Surat Dinas** : dokumen.bylt@kai.id **Web** : www.kai.id
- **Balai Yasa Pulubrayan:** Jl. Bengkel Pulubrayan, Medan 20239 **Telp** : (022) 4230031 **Email untuk Surat Dinas** : dokumen.bypub@kai.id **Web**: www.kai.id
- **Balai Yasa Jembatan:** Jl. Kiaracandong No. 92, Bandung 40272 **Telp** : (022) 4230031 **Email** : dokumen@kai.id **Web** : www.kai.id
- **Balai Yasa Mekanik:** Jl. Kosambi No. 2, Cirebon Prujakan **Telp** : (022) 4230031 **Email** : dokumen@kai.id **Web** : www.kai.id

BRAND PERUSAHAAN

Corporate Brand



BENTUK

Terinspirasi dari bentuk REL KERETA yang digambarkan dengan garis menyambung ke atas pada huruf A, KAI diharapkan terus maju dan menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik yang terintegrasi, terpercaya, bersinergi, dan kelak dapat menghubungkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Dengan menggunakan *typeface italic* yang dinamis dan di modifikasi pada huruf A menggambarkan karakter KAI yaitu progresif, berpikiran terbuka, dan terpercaya. Grafik yang tegas namun ramah dengan perbedaan warna pada huruf diharapkan dapat mencerminkan hubungan yang harmonis dan kompeten antara KAI dan seluruh pemangku kepentingan.

WARNA

Perpaduan antara warna biru tua yang menunjang stabilitas, profesionalisme, amanah dan kepercayaan diri, yang ditambah dengan aksen warna oranye, yang menunjukkan antusiasme, kreativitas, tekad, kesuksesan dan kebahagiaan.

DESIGN

Inspired by the shape of RAIL which is depicted with a line connecting upwards in the letter A, KAI is expected to continue to advance and become a transportation ecosystem solution that is integrated, reliable, synergistic, and can one day connect Indonesia from Sabang to Merauke.

By using a dynamic italic typeface and modified in the letter A which describes the character of KAI, namely progressive, open-minded, and trusted. The graphic is firm but with different colors in the letters is expected to reflect a harmonious and competent relationship between KAI and all stakeholders.

COLOR

The combination of dark blue that supports stability, professionalism, trustworthy and confidence, coupled with orange accents, which shows enthusiasm, creativity, determination, success and happiness.

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Brief History of the Company

Sejarah perkeretaapian di Nusantara telah dimulai sejak tahun 1854 ketika *Namlooze Venootschap Nederlanche Indische Spoorweg Maatschappij* membangun jalan kereta api pertama dari Semarang ke Surakarta, Jawa Tengah. Setelah itu, 3 (tiga) perusahaan Belanda yang lain yaitu *Staat Spoorwegen*, *Verenigde Spoorwegenbedrijf*, dan *Deli Spoorwegen Maatschappij* ikut membangun jalur-jalur kereta api yang berlokasi baik di Jawa maupun luar Jawa.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) didirikan pada tanggal 28 September 1945 sebagai Djawatan Kereta Api Repoeblik Indonesia (DKARI) setelah para pejuang kemerdekaan bergerak cepat melakukan pengambilalihan kantor pusat kereta api di Bandung dari penguasaan Jepang. Pada awal tahun 1946, dikeluarkan Maklumat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI) No. 1/KA yang secara resmi mengakhiri DKARI dengan Ir. Djuanda dan Mr. Soewahjo Soemodilogo diangkat sebagai Kepala dan Wakil Kepala DKARI pada struktur organisasinya.

Setelah resmi beroperasi, DKARI mengalami perubahan seiring pengambilalihan aset-aset pemerintah Hindia Belanda melalui perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) menjadi Djawatan Kereta Api (DKA) per tahun 1950. DKA kembali berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) pada 25 Mei 1963 menjadi Perusahaan Nasional Kereta Api (PNKA) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 1963. Dengan perubahan tersebut, PNKA memperkenalkan logo Wahana Daya Pertiwi yang mengekspresikan transformasi perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi yang andal bagi kesejahteraan tanah air. PNKA kemudian berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) pada tahun 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 1971.

The history of railways in the archipelago began in 1854 when *Namlooze Venootschap Nederlanche Indische Spoorweg Maatschappij* built the first railroad from Semarang to Surakarta, Central Java. After that, 3 (three) other Dutch companies, namely *Staat Spoorwegen*, *Verenigde Spoorwegenbedrijf*, and *Deli Spoorwegen Maatschappij*, took part in building railroad lines located both in Java and outside Java.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) was established on September 28, 1945 as the Railway Department of the Republic of Indonesia (DKARI) after the freedom fighters moved quickly to take over the railway headquarters in Bandung from Japanese occupation. In early 1946, Declaration of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia (RI) No. 1/KA was issued which officially passed DKARI with Ir. Juanda and Mr. Soewahjo Soemodilogo was appointed as Head and Deputy Head of DKARI in its organizational structure.

After officially operating, DKARI underwent changes following the takeover of Dutch East Indies government assets through the Dutch - Indonesian Round Table Conference (KMB) agreement to become the Railways Department (DKA) in 1950. Then, DKA changed to the State Railway Company (PNKA) on May 25, 1963 based on Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 22 of 1963. With these changes, PNKA introduced the Wahana Daya Pertiwi logo which expresses the transformation of Indonesian railways as a reliable means of transportation for the welfare of the homeland. PNKA then changed to the Railway Department Company (PJKA) in 1971 based on Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 61 of 1971.

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Brief History of the Company

Sebagai upaya peningkatan layanan jasa angkutan, PJKA diubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) pada tahun 1999, untuk kemudian diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tahun 1998 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1998.

As an effort to improve transportation services, PJKA was changed to the Railway Public Corporation (Perumka) in 1999, which was then changed to a Limited Liability Company under the name PT Kereta Api Indonesia (Persero) in 1998 based on Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 19 of 1998.

Hingga kini, KAI mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, dengan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang dicatat dalam Akta No. 278 tanggal 31 Desember 2021. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-01.03-0494898 tanggal 31 Desember 2021.

As of today, KAI's Articles of Association has undergone several amendments with the last amendment made based on the Decree of the State Minister for State-Owned Enterprises (SOE) as the Company's General Meeting of Shareholders which is recorded in Deed No. 278 dated December 31, 2021. The deed of amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights in Decree No. AHU-01.03-0494898 on December 31, 2021.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA

Sejak awal didirikan, KAI telah mengalami beberapa kali perubahan nama dengan perincian sebagai berikut:

INFORMATION ON NAME CHANGE

Since its establishment, KAI has undergone several name changes as follows:

Tahun / Year	Nama Perusahaan / Company Name	Dasar Hukum / Legal Basis	Tanggal Berlaku / Effective Date
1945-1950	Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI)	Maklumat Kementerian Perhubungan No. 1/KA Tahun 1946 / Declaration of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia (RI) No. 1/KA of 1946	-
1950-1963	Djawatan Kereta Api (DKA)	Keputusan Menteri Perhubungan Tenaga dan Pekerjaan Umum RI No. 2 Tahun 1950 / Decree of the Minister of Transportation and Public Works of the Republic of Indonesia No. 2 of 1950	-
1963-1971	Perusahaan Nasional Kereta Api (PNKA)	Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 1963 / Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 22 of 1963	25 Mei 1963 / May 25, 1963
1971-1991	Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)	Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 1971 / Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 61 of 1971	15 September 1971 / September 15, 1971
1991-1998	Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA)	Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 1990 / Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 57 of 1990	30 Oktober 1990 / October 30, 1990
1998-saat ini	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1998 / Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 19 of 1998	3 Februari 1998 / February 3, 1998

VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Vision, Mission, and Corporate Culture

VISI

Vision

“Menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia.

To be the best transportation ecosystem solution for Indonesia.

”

MISI

Mission

- | | |
|---|---|
| 1. Untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. | 1. To provide a safe, efficient, digital-based, fast-growing transportation system to meet customer needs. |
| 2. Untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. | 2. To develop integrated mass transportation solutions through investments in human resources, infrastructure and technology. |
| 3. Untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur-infrastruktur penting terkait transportasi. | 3. To advance national development through partnerships with stakeholders, including initiating and implementing the development of important infrastructure related to transportation. |

Review Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

KAI secara berkala melakukan *review* terhadap visi dan misi Perseroan, sebagai upaya memastikan kesesuaian visi dan misi dengan perkembangan industri dan bisnis yang dijalankan. Visi dan misi yang berlaku pada tahun 2022 telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi KAI melalui Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2019. Untuk tahun 2022, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan peninjauan kembali dan berpendapat bahwa visi dan misi KAI masih relevan dengan perkembangan industri dan bisnis yang dijalankan.

Review of Vision and Mission by the Board of Commissioners and Board of Directors

KAI periodically reviews the Company's vision and mission as an effort to ensure the conformity of the vision and mission with the development of the industry and business being carried out. The vision and mission implemented in 2022 have been discussed and approved by the Board of Commissioners and Board of Directors of KAI through the Coordination Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2019. For 2022, the Board of Commissioners and Board of Directors have reviewed the vision and mission and are of the opinion that KAI's vision and mission are still relevant with the development of the industry and business being carried out.

VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN Vision, Mission, and Corporate Culture

BUDAYA PERSEROAN:

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), KAI menerapkan budaya Perseroan berupa *core values* “AKHLAK” sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020. *Core values* “AKHLAK” dijelaskan sebagai berikut:

CORPORATE CULTURE:

As a State-Owned Enterprise (BUMN), KAI implements “AKHLAK” core values as its corporate culture in accordance with the Decree of the Minister of SOENo. SE-7/MBU/07/2020. The core values of “AKHLAK” are explained as follows:

AKHLAK



- A** Memegang Teguh Kepercayaan yang Diberikan.
1. Memenuhi janji dan komitmen.
 2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.
 3. Berpegang teguh pada nilai, moral, dan etik.

AMANAH TRUSTWORTHY

- MUpholding the Trust Given
1. Keeping Promises and Commitments
 2. Responsible for Duties, Decisions and Actions Undertaken
 3. Upholding Moral & Ethical Values



- K** Terus Belajar dan Mengembangkan Kapabilitas.
1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
 2. Membantu orang lain belajar.
 3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

KOMPETEN COMPETENT

- Keep Learning and Developing Capabilities
1. Improve Self Competency to Respond to Changing Challenges
 2. Helping Others to Learn
 3. Complete Tasks with the Best Quality



- H** Saling Peduli dan Menghargai Perbedaan.
1. Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya.
 2. Suka menolong orang lain.
 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

HARMONIS HARMONIOUS

- Caring for Each Other and Respecting Differences
1. Appreciate Everyone Regardless of Background
 2. Fond of Helping Others
 3. Building a Conducive Work Environment



- L** Berdedikasi dan Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara.
1. Menjaga nama baik sesama pegawai, pimpinan, BUMN, dan Negara.
 2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
 3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

LOYAL LOYAL

- Dedicating and Prioritizing the Interests of the Nation and the Country
1. Maintaining the Good Name of Fellow Employees, Leaders, SOE and the State
 2. Willing to Sacrifice to Achieve Greater Goals
 3. Obeying the Leader, as long as not in conflict with the law and ethics



- A** Terus Berinovasi dan Antusias dalam Menggerakkan ataupun Menghadapi Perubahan.
1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
 2. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
 3. Bertindak proaktif.

ADAPTIF ADAPTIVE

- Keep innovating and Being Enthusiastic in Driving or Facing Changes
1. Able to Adapt Quickly to Be Better
 2. Perform Continuous Improvements by Following Technology Developments
 3. Proactive



- K** Membangun Kerja Sama yang Sinergis.
1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

KOLABORATIF COLLABORATIVE

- Building Synergistic Teamwork
1. Provide Opportunities for Various Parties to Contribute
 2. Open for Collaboration to Generate Added Value
 3. Mobilize the Utilization of Various Resources for Common Goals

KEGIATAN USAHA

Business Activities



KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR DAN YANG DIJALANKAN

Hingga 31 Desember 2022, KAI telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, dengan perubahan terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dinyatakan dalam Akta No. 278 tanggal 31 Desember 2021, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor AHU-AH.01.03-0494898 tanggal 31 Desember 2021.

Mengacu pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha KAI telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu:
 - a. Melakukan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengusaha prasarana perkeretaapian yang mencakup pada kegiatan:
 - 1) Konstruksi Gedung lainnya:

BUSINESS ACTIVITIES ACCORDING TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND PERFORMED

As of December 31, 2022, KAI has undergone several amendments to the Articles of Association, with the latest amendment based on the Statement of Decree of the State Minister for State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Kereta Api Indonesia (Persero) which is stated in Deed No. 278 dated December 31, 2021, whose notification report has been received and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights as stated in Letter No. AHU-AH.01.03-0494898 dated December 31, 2021.

Referring to Article 3 of the Company's Articles of Association, the aims and objectives and business activities of KAI have been adjusted to the latest Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI) with the following details:

1. To achieve the aims and objectives, the Company may carry out the following business activities:
 - a. Carry out the operation of the railway infrastructure which includes the construction, operation, maintenance, and exploitation of railway infrastructure that covers:
 - 1) Other Building Construction;



Perseroan merupakan BUMN yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. Seiring perkembangan dinamika dunia usaha dan perkembangan pasar, Perseroan juga menyelenggarakan kegiatan usaha penunjang lain dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.

The Company is a state-owned enterprise that provides, regulates, and manages railway transportation services in Indonesia. Along with dynamics in the development of the business world and market developments, the Company also organizes other supporting business activities by utilizing its resources.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 2) Konstruksi jalan rel; 3) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i>, dan <i>Underpass</i>; 4) Konstruksi Terowongan; 5) Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi; 6) Instalasi Listrik; 7) Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api; 8) Aktivitas Stasiun Kereta Api. | <ul style="list-style-type: none"> 2) Railroad construction; 3) Bridges, Overpasses, Fly Overs and Underpasses Civilian Building Construction; 4) Tunnel Construction; 5) Telecommunication Civilian Building Construction for Transportation Infrastructure; 6) Electricity Installation; 7) Railway Signal and Telecommunication Installation; 8) Train Station Activities. |
| <ul style="list-style-type: none"> b. Melakukan Penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang meliputi pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan sarana perkeretaapian yang mencakup pada kegiatan usaha: <ul style="list-style-type: none"> 1) Reparasi lokomotif dan gerbong kereta; 2) Angkutan jalan rel untuk penumpang; 3) Angkutan jalan rel untuk barang; 4) Angkutan jalan rel perkotaan; 5) Angkutan jalan rel wisata. | <ul style="list-style-type: none"> b. Carry out the operation of rolling stock which include procurement, operation, maintenance, and exploitation of rolling stock which include the following business activities: <ul style="list-style-type: none"> 1) Repair of locomotives and railcar; 2) Railroad transportation for passengers; 3) Railroad transportation for goods; 4) Urban rail transportation; 5) Tourist rail transport. |
| <ul style="list-style-type: none"> c. Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya. | <ul style="list-style-type: none"> c. Wholesale of land transportation equipment (not cars, motorcycles, and the likes), spare parts, and equipment. |
| <ul style="list-style-type: none"> d. Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (<i>scrap</i>). | <ul style="list-style-type: none"> d. Wholesale trade of used goods and scraps. |
| <ul style="list-style-type: none"> e. Aktivitas konsultasi transportasi. | <ul style="list-style-type: none"> e. Transportation consulting activities. |

KEGIATAN USAHA

Business Activities

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> f. Aktivitas konsultan manajemen lainnya. g. Kegiatan penunjang pendidikan. h. Penanganan kargo (bongkar muat barang). i. Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD). j. Angkutan multimoda. k. Aktivitas agen perjalanan lainnya. l. Pendidikan lainnya swasta. m. Pendidikan kesehatan swasta. n. Pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian. o. Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. p. Usaha jasa pertambangan. q. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa. r. Kerjasama peningkatan akses stasiun kereta api yang bersinggungan dengan lahan milik pihak lain untuk dikembangkan dengan konsep terhubung dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan dan mendukung peningkatan pelayanan penumpang. <p>2. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada point 1, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pergudangan dan penyimpanan. b. Aktivitas <i>cold storage</i>. c. Aktivitas <i>bounded warehousing</i> atau wilayah kawasan berikat. d. Pergudangan dan penyimpanan lainnya. e. Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut. f. Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau. g. Angkutan melalui saluran pipa. h. Konstruksi sentral telekomunikasi. i. Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya. j. Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri. k. Aktivitas pengolahan data. l. Portal web dan/atau <i>platform</i> digital dengan tujuan komersial. m. Konstruksi Gedung Hunian. n. Konstruksi Gedung Perkantoran. o. Konstruksi Gedung Perbelanjaan. p. Konstruksi Gedung Penginapan. q. Instalasi Mekanikal. | <ul style="list-style-type: none"> f. Other management consulting activities. g. Educational support activities. h. Cargo handling (unloading goods). i. Rail Freight Expedition and Land Transport Expedition Activities (EMKA&EAD). j. Multimodal transportation. k. Other travel agency activities. l. Other private education. m. Private health education. n. Education and training in the railway sector. o. Other mining and excavation support activities. p. Mining services business. q. Owned or leased real estate. r. Cooperation to increase access to train stations that intersect with land owned by other parties to be developed with a connected concept to increase added value for the Company and support the improvement of passenger services. <p>2. In addition to the core business activities as referred to in point 1, the Company may carry out business activities in order to optimize the utilization of its resources for:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Warehousing and storage. b. Cold storage activities. c. Bounded warehousing activities or bonded zone areas. d. Warehousing and other storage. e. Marine port service activities. f. River and lake port service activities. g. Transport by pipeline. h. Central telecommunications construction. i. Construction of irrigation networks, communications, and other waste. j. Telecommunications activities specifically for own use. k. Data processing activities. l. Web portals and/or digital platforms for commercial purposes. m. Residential Building Construction. n. Office Building Construction. o. Shopping Building Construction. p. Lodging Building Construction. q. Mechanical Installation. |
|---|---|

KEGIATAN USAHA Business Activities

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> r. Instalasi konstruksi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. s. Periklanan. t. Aktivitas klinik swasta. u. Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi. v. Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotek. w. Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan. x. Konstruksi gedung kesehatan. y. Penyiapan lahan. z. Museum yang dikelola swasta. aa. Aktivitas biro perjalanan wisata. ab. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan lain dalam rangka mengembangkan proses bisnis Perseroan. | <ul style="list-style-type: none"> r. Other construction installations not classified elsewhere. s. Advertising. t. Private clinic activities. u. Health service activities carried out by health workers other than doctors and dentists. v. Retail trade in pharmaceutical goods and drugs for humans in pharmacies. w. Health support service activities. x. Health building construction. y. Land preparation. z. Privately run museum. aa. Travel agency activities. ab. Conducting equity participation in other companies to develop the Company's business processes. |
|---|--|

Sesuai maksud dan tujuan Perseroan, kegiatan usaha KAI adalah beroperasi di bidang transportasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

PRODUK DAN JASA [OJK C.4, GRI 2-1]

Perseroan merupakan BUMN yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. Seiring perkembangan dinamika dunia usaha dan perkembangan pasar, Perseroan juga menyelenggarakan kegiatan usaha penunjang lain dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.

Lebih lanjut, kegiatan usaha KAI dibagi ke dalam beberapa segmen usaha yang menjadi sumber-sumber pendapatan bagi Perseroan. Segmen usaha tersebut adalah angkutan penumpang, angkutan barang, pendukung angkutan kereta api, pendapatan non-angkutan dan subsidi Pemerintah yang terdiri dari PSO, IMO, dan Perintis.

In accordance with the aims and objectives of the Company, KAI's business activities are to operate in the transportation sector, as well as optimizing the utilization of the Company's resources to produce high quality and highly competitive goods and/or services to obtain/pursue profits in order to increase the value of the Company by implementing the principles limited company principle.

PRODUCTS AND SERVICES [OJK C.4, GRI 2-1]

The Company is a state-owned enterprise that provides, regulates, and manages railway transportation services in Indonesia. Along with dynamics in the development of the business world and market developments, the Company also organizes other supporting business activities by utilizing its resources.

Furthermore, KAI's business activities are divided into several business segments which are sources of income for the Company. These business segments are passenger transportation, freight transportation, railway transportation support, non-transport revenue, and government subsidies consisting of PSO, IMO and Pioneers.

KEGIATAN USAHA

Business Activities

Angkutan Penumpang

Kereta

Sebagai perusahaan yang mengelola perkeretaapian di Indonesia, KAI banyak mengoperasikan KA penumpang, baik KA Utama (Komersial dan Non-Komersial), maupun KA lokal di Jawa dan Sumatera, yang terdiri dari:

- KA Eksekutif
- KA Bisnis
- KA Campuran (Eksekutif, Bisnis, dan Ekonomi)
- KA Ekonomi
- KA Lokal
- KRL *Commuter Line*
- KA Bandara

Pengoperasian layanan KA penumpang, selain dilakukan oleh KAI sebagai induk perusahaan, juga dilaksanakan oleh anak perusahaan yakni PT Kereta *Commuter* Indonesia, PT Railink, serta PT Kereta Api Pariwisata.

PT Kereta *Commuter* Indonesia (KAI *Commuter*) atau yang lebih dikenal dengan KAI *Commuter*, merupakan anak perusahaan KAI yang dipercaya untuk mengelola KRL *Commuter Line* Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sejak 1 Oktober 2020, KAI menugaskan KAI *Commuter* untuk mengoperasikan kereta api lokal di wilayah Daop 1 Jakarta.

Seiring berlakunya Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) Tahun 2021 per 1 Maret 2021, KAI *Commuter* mengoperasikan KRL di luar wilayah Jabodetabek yaitu KRL relasi Yogyakarta-Solo Balapan pp menggantikan KA Prambanan Ekspres. Ekspansi KAI *Commuter* tidak berhenti di 2 wilayah tersebut, pada April 2022, KA Lokal di Wilayah 2 Bandung dan Wilayah 8 Surabaya dengan izin operasi di November semakin memperluas Wilayah operasi KAI *Commuter*. Di akhir tahun 2022 KAI *Commuter* diberikan tugas untuk mengoperasikan Kereta Bandara.

Pasca *Switch Over* (SO) 5 Manggarai pola operasi di Wilayah Jabodetabek menyalami perubahan, yang mana untuk lintas Bogor-Depok-Cibinong perjalanan hanya ke Jakarta Kota, sedangkan lintas Cikarang-Bekasi perjalanan terbagi atas full racket (Cikarang-Bekasi-MRI-Kp. Bandan kembali ke Cikarang-Bekasi dan Cikarang-Bekasi-Ps.Senen-Manggarai kembali ke Cikarang-Bekasi). Untuk *half racket* (Cikarang-

Passenger Transportation

Train

As a company that manages railways in Indonesia, KAI operates a lot of passenger trains, both Main Trains (Commercial and Non-Commercial), as well as local trains in Java and Sumatera, which consist of:

- Executive Train
- Business Train
- Mixed Train (Executive, Business, and Economics)
- Economy Train
- Local Train
- KRL *Commuter Line*
- Airport Train

Apart from being carried out by KAI as the holding company, the operation of passenger train services is also carried out by its subsidiaries, namely PT Kereta *Commuter* Indonesia, PT Railink, and PT Kereta Api Pariwisata.

PT Kereta *Commuter* Indonesia (KAI *Commuter*), more commonly known as KAI *Commuter*, is a subsidiary of KAI which is entrusted with managing the Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (Jabodetabek) KRL *Commuter Lines*. Since October 1, 2020, KAI has assigned KAI *Commuter* to operate local trains in the Daop 1 Jakarta.

In line with the implementation of Train Travel Chart (Gapeka) as of March 1, 2021, KAI *Commuter* operates KRL outside the Jabodetabek area, namely the Yogyakarta-Solo Balapan pp KRL replacing the Prambanan Express Train. The KAI *Commuter* expansion does not stop in these 2 areas. On April 2022, local trains in Region 2 Bandung and Region 8 Surabaya with operating permits in November were increasingly expanding the KAI *Commuter* operating area. At the end of 2022, KAI *Commuter* was given the task of operating the Airport Train.

After *Switch Over* (SO) 5 Manggarai the operating pattern in the Jabodetabek area has changed, where for the Bogor-Depok-Cibinong route, trips only go to Jakarta Kota, while the Cikarang-Bekasi route is divided into full rackets (Cikarang-Bekasi-MRI-Kp.Bandan back to Cikarang -Bekasi and Cikarang-Bekasi-Ps. Senen-Manggarai back to Cikarang-Bekasi). For the *half racket* (Cikarang-Bekasi only goes to Kp.

KEGIATAN USAHA Business Activities

Bekasi hanya sampai Kp. Bandan/Angke-Manggarai kembali ke Cikarang-Bekasi), untuk lintas Tanah Abang-Rangkas Bitung dan lintas Duri-Tangerang masih tetap sama.

PT Railink (KAI Bandara) merupakan anak perusahaan KAI yang menghadirkan layanan transportasi publik berbasis "railway" berupa Kereta Api Bandara. Sejak didirikan pada 28 September 2006, KAI Bandara mengoperasikan KA Bandara Kualanamu sebagai KA Bandara pertama di Indonesia pada 25 Juli 2013. KAI Bandara mendatangkan 4 (empat) rangkaian kereta eksklusif dan modern yang berstandar internasional dengan rute Stasiun Medan - Stasiun Kualanamu (PP). Pada 28 September 2022 KAI Bandara Kualanamu membuka layanan baru di Stasiun Bandar Khalipah Medan, sehingga rute perjalanan menjadi Stasiun Medan- Stasiun Bandar Khalipah - Stasiun Kualanamu (PP).

Pada tanggal 26 Desember 2017, KAI Bandara menambah perjalanan KA Bandara Soekarno Hatta (Basoetta). KA Basoetta diresmikan pada 2 Januari 2018 dengan rute Stasiun BNI City - Stasiun Duri- Stasiun Batucepet- Stasiun Bandara Soekarno Hatta. Tahun 2019 KA Bandara Soekarno-Hatta menambah stasiun layanan baru yaitu Stasiun Manggarai. Total jarak yang ditempuh KAI Bandara Soekarno Hatta 36,3 KM dengan waktu tempuh sekitar 50 menit. Dalam kondisi normal KAI Bandara melayani 70 KA dalam sehari dengan kapasitas angkut 19.040 per hari, dan untuk mendukung rencana produksi tersebut, KAI Bandara telah membeli 10 trainset KRL.

Mulai 1 April tahun 2022, KAI Bandara mendapatkan penugasan sebagai penyedia layanan dan system pembelian tiket di Kereta Api Bandara Yogyakarta International Airport. KAI Bandara YIA melayani tiga stasiun yaitu stasiun Yogyakarta, Wates, dan YIA. Pada November 2022 KAI Bandara mendapatkan izin operasi untuk menjadi operator penuh KA Bandara Yogyakarta.

Kemudian, KAI Wisata dijalankan oleh PT Kereta Api Pariwisata yang menawarkan produk jasa/layanan meliputi paket perjalanan wisata untuk individu ataupun korporasi, dengan menggunakan kereta api sebagai transportasi utama. Sejumlah yang disewakan antara lain Kereta Istimewa, Kereta Wisata Bali, Kereta Wisata Imperial, Kereta Wisata Jawa, Kereta Wisata Nusantara, Kereta Wisata Priority, Kereta Wisata Retro, Kereta Wisata Sumatera, dan Kereta Wisata Toraja.

Bandan/Angke-Manggarai back to Cikarang-Bekasi), for the Tanah Abang-Rangkas Bitung route and the Duri-Tangerang route it is still the same.

PT Railink (KAI Bandara) is a subsidiary of KAI that provides railway-based public transportation services in the form of the Airport Train. Since its establishment on September 28, 2006, KAI Bandara operates the Kualanamu Airport Train as the first Airport Train in Indonesia on July 25, 2013. Airport Train brought in 4 (four) series of exclusive and modern international standard trains with the Medan Station - Kualanamu Station (PP) route. On September 28, 2022, Kualanamu Airport Train opened a new service at Medan Bandar Khalipah Station, so the travel route became Medan Station - Bandar Khalipah Station - Kualanamu Station (PP).

On December 26, 2017, the Airport Train added a trip to the Soekarno Hatta Airport Train (Basoetta). The Basoetta train was inaugurated on January 2, 2018 with the route BNI City Station - Duri Station - Batucepet Station - Soekarno Hatta Airport Station. In 2019 the Soekarno-Hatta Airport Train added a new service station, namely Manggarai Station. The total distance traveled by Soekarno Hatta Airport Train is 36.3 KM and takes around 50 minutes. Under normal conditions, the Airport Train serves 70 trains a day with a transport capacity of 19,040 per day, and to support the production plan, the Airport Train has purchased 10 KRL train sets.

Starting on April 1, 2022, Airport Train has been assigned as a service provider and ticket purchasing system at the Yogyakarta International Airport Railway. YIA Airport Train serves three stations namely Yogyakarta, Wates, and YIA stations. In November 2022, KAI Airport obtained an operating permit to become the full operator of the Yogyakarta Airport Train.

Then, PT Kereta Api Wisata, a subsidiary of PT KAI, runs KAI Wisata that offers services including tour travel packages for individuals or corporations using the train as the main transportation. A number of special train services for rent include Special Train, Bali Tourist Train, Imperial Tourist Train, Java Tourist Train, Nusantara Tourist Train, Priority Tourist Train, Retro Tourist Train, Sumatra Tourist Train, and Toraja Tourist Train.

KEGIATAN USAHA

Business Activities

KAI Wisata juga dipercaya untuk mengelola aset KAI yaitu Lawang Sewu dan Museum Ambarawa. Di samping itu, KAI Wisata memiliki lini bisnis pendukung seperti pengurusan dokumen perjalanan, *Executive Anggrek Lounge*, Keagenan Tiket, MICE, Paket *Tour*, Penyedia Jasa SDM, *Shower n Locker*, serta Umrah dan Haji.

Restorasi

Setiap rangkaian kereta api milik KAI dilengkapi dengan kereta yang berfungsi sebagai restorasi, atau gerbong restoran. Restorasi pada rangkaian kereta api tersebut menyediakan layanan makan dan minum bagi pelanggan selama perjalanan. PT Reska Multi Usaha (KAI Services) merupakan anak perusahaan yang melaksanakan hingga menunjang kebijakan dan program KAI selaku perusahaan induk pada usaha restoran kereta api serta usaha terkait lainnya.

Bidang usaha KAI Services terbagi ke dalam 3 (tiga) *core business*, yaitu:

- **On Board Services**
Terdiri dari *restaurant on train dan on train cleaning*.
- **Integrated Facility Service**
Terdiri dari *security, parking, cleaning service, juga outsourcing*.
- **Commercial Services**
Terdiri dari *café, catering, dan general services*.

Angkutan Barang

Selain angkutan penumpang, Perseroan juga menyediakan jasa angkutan barang yang terdiri dari angkutan batu bara, semen, BBM, peti kemas, curah dan perkebunan, serta general cargo dan BHP. Untuk layanan angkutan barang, KAI melalui anak perusahaannya, PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) yang bergerak di Badan Usaha Angkutan Multimoda, juga melakukan usaha di bidang layanan distribusi logistik dengan berbagai produk diantaranya KALOG Express untuk layanan kurir dan kargo, KALOG Plus untuk mengakomodir kebutuhan pengiriman barang dalam jumlah yang lebih besar, serta layanan penunjang untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan logistik yang beragam seperti Less than container load, Freight Forwarding, depot/warehousing dan kegiatan ketertinalan lainnya. Selain itu, KAI Logistik juga menghadirkan KALOG Pro untuk segmentasi logistik business to business dengan menawarkan keunggulan dan pelayanan

KAI Wisata is also entrusted with managing KAI's assets, namely LawangSewu and the Ambarawa Museum. In addition, KAI Wisata has supporting business lines such as travel document management, Executive Anggrek Lounge, Ticket Agency, MICE, Tour Packages, HR Service Providers, Shower n Locker, as well as Umrah and Hajj.

Restoration

Each multiple units owned by KAI is equipped with a railcar that functions as a restoration, or a restaurant car. The restoration of the train series provides food and beverage services for customers during the trip. PT Reska Multi Usaha (KAI Services) is a subsidiary that implements and supports KAI's policies and programs as the parent company in the railroad restaurant business and other related businesses.

Business sector of KAI Services is divided into 3 (three) core businesses, namely:

- **On Board Services**
Consists of on train restaurant and on train cleaning.
- **Integrated Facility Service**
Consists of security, parking, cleaning service, also outsourcing.
- **Commercial Services**
Consists of cafe, catering, and general services.

Goods Transportation

In addition to passenger transportation, the Company also provides goods transportation services consisting of coal, cement, fuel, container, bulk and plantation transportation, as well as general cargo and BHP. For freight transport services, KAI through its subsidiary, PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) which operates in the Multimoda Transportation Business Entity, also conducts business in the field of logistics distribution services with various products including KALOG Express for courier and cargo services, KALOG Plus for accommodate the need for shipping goods in larger quantities, as well as support services to ensure the fulfillment of diverse logistics needs such as less than container load, freight forwarding, depot/warehousing and other terminal activities. In addition, KAI Logistik also presents KALOG Pro for business to business logistics segmentation by offering excellence and excellent service and providing one stop solution/end to end

KEGIATAN USAHA Business Activities

prima serta menyediakan layanan one stop solution/end to end services guna mewujudkan layanan total logistics solution seperti layanan angkutan multi commodity, ketertinalan dan penanganan batu bara.

KAI Logistik memiliki orientasi pengembangan bisnis sebagai penyedia jasa layanan distribusi logistik secara total (*Total Logistics Solution*) melalui “*End-to-End Services*” atau sebagai *SCM Service Provider* dengan dukungan teknologi informasi. Untuk memfasilitasi layanan logistik secara terpadu, KAI Logistik telah membangun sejumlah infrastruktur jasa logistik, antara lain terminal kereta api di pulau Jawa serta fasilitas dan infrastruktur yang dimodernisasi untuk penanganan batubara di Sumatra Selatan.

services to realize total logistics solution services such as multi-commodity transportation services, terminals and coal handling.

KAI Logistik has a business development orientation as a Total Logistics Solution provider through “*End-to-End Services*” or as a *SCM Service Provider* with information technology support. To facilitate integrated logistics services, KAI Logistik has built a number of logistics service infrastructures, including train terminals in Java and modernized facilities and infrastructures for coal handling in South Sumatra.

DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI [OJK C.5, GRI 2-28] Association Membership List

KAI bergabung dan berperan aktif melalui keanggotaan asosiasi atau lembaga yang relevan dengan bisnis utama yang dijalankan. Hal tersebut dilakukan agar KAI dapat terus mengikuti dan terlibat dalam perkembangan, isu, atau topik terbaru, di samping saling memberi saran/masukan hingga bertukar informasi dengan perusahaan lain demi kemajuan bersama.

Untuk tahun 2022, KAI tercatat sebagai anggota pada asosiasi/perhimpunan/lembaga Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bandung. Keanggotaan KAI tersebut memiliki arti strategis dalam menyelaraskan bisnis Perseroan dengan perkembangan dunia industri terkini. Melalui keanggotaan tersebut, KAI juga dapat ikut berkontribusi dengan membagi pengetahuan dan pengalaman kepada anggota lain.

KAI joins and plays an active role through membership in associations or institutions that are relevant to its core business. This is done so that KAI can continue to follow and be involved in the latest developments, issues or topics, in addition to giving each other suggestions/inputs and exchanging information with other companies for mutual progress.

For 2022, KAI was listed as a member of the association/ association/institution of the Bandung City Chamber of Commerce and Industry (KADIN). The membership of KAI has a strategic meaning in aligning the Company’s business with the latest developments in the industrial world. Through this membership, KAI can also contribute by sharing knowledge and experience with other members.

Nama Asosiasi / Name of Association	Alamat / Address	Status Perusahaan / Status
Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Bandung / Bandung City Chamber of Commerce and Industry (KADIN)	Jl. Talaga Bodas No 31 Bandung 40262	Anggota / Member

PETA WILAYAH OPERASIONAL [OJK C.3, GRI 102-4, 102-6]

Operational Area

Per 31 Desember 2022, KAI memiliki 1 (satu) Kantor Pusat, 9 (sembilan) Daerah Operasi, 4 (empat) Divisi Regional, 1 (satu) Sub Divisi Regional dan 8 (delapan) Balai Yasa.

As of December 31, 2022, KAI has 1 (one) Head Office, 9 (nine) Operational Areas, 4 (four) Regional Divisions, 1 (one) Regional Sub-Division and 8 (eight) Balai Yasa.

Tabel Jaringan Kantor Tahun Selama 5 Tahun Terakhir

Table of Office Network in the Last 5 Years

Jenis Kantor / Type of Office	2022	2021	2020	2019	2018
Kantor Pusat / Head Office	1	1	1	1	1
Daerah Operasi (Daop) / Operation Area	9	9	9	9	9
Divisi Regional (Divre) / Regional Division	4	4	4	4	4
Sub Divisi Regional (Subdivre) / Regional Sub-Division	1	1	1	1	1
Balai Yasa / Balai Yasa	8	8	8	8	8



PETA WILAYAH OPERASIONAL

Operational Area

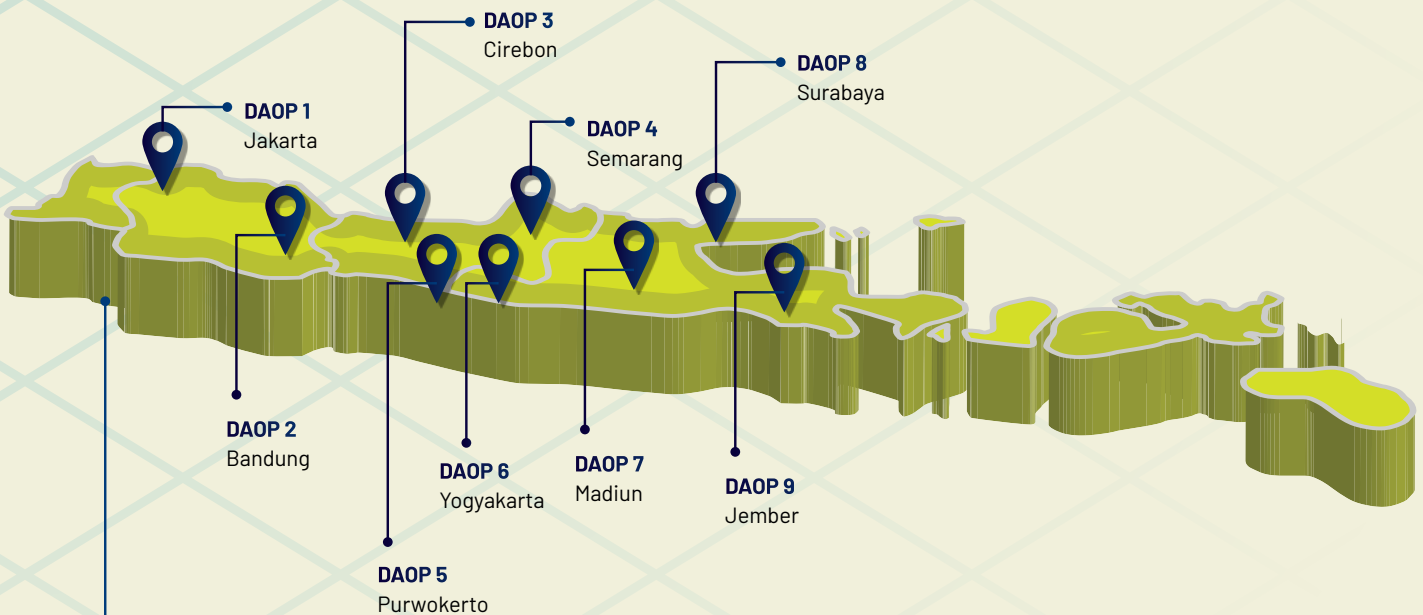
Wilayah operasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencakup Pulau Sumatera dan Jawa. Wilayah kerja di Pulau Jawa dibagi berdasarkan Daerah Operasi (Daop), sedangkan wilayah kerja di Sumatera dibagi berdasarkan Divisi Regional (Divre).

The operation area of PT Kereta Api Indonesia (Persero) covers the islands of Sumatra and Java. The working area in Java is divided based on the Operational Area (Daop), while the work area in Sumatra is divided based on the Regional Division (Divre).

Jaringan Kantor per Wilayah

Office Network per Area

Wilayah / Area	Kantor Pusat / Head Office	Daerah Operasi / Operation Area	Divisi Regional / Regional Division	Sub Divisi Regional / Regional Sub-Division	Balai Yasa / BalaiYasa
Jawa	1	9	-	-	6
Sumatera	-	-	4	1	2

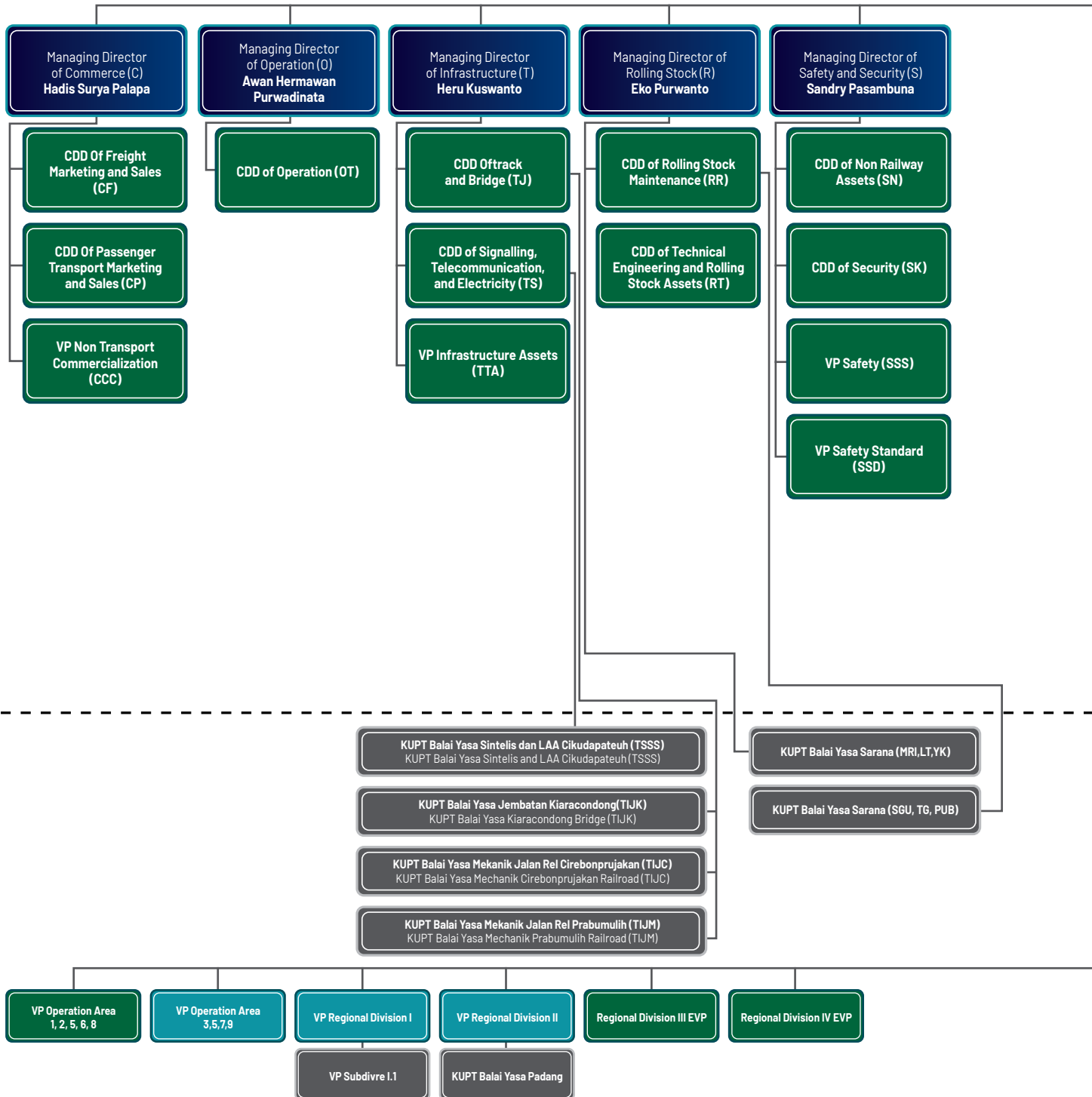


STRUKTUR ORGANISASI [GRI 102-18]

Organization Structure

Berikut struktur organisasi KAI per 31 Desember 2022.

The following is the organizational structure of KAI as of December 31, 2022.

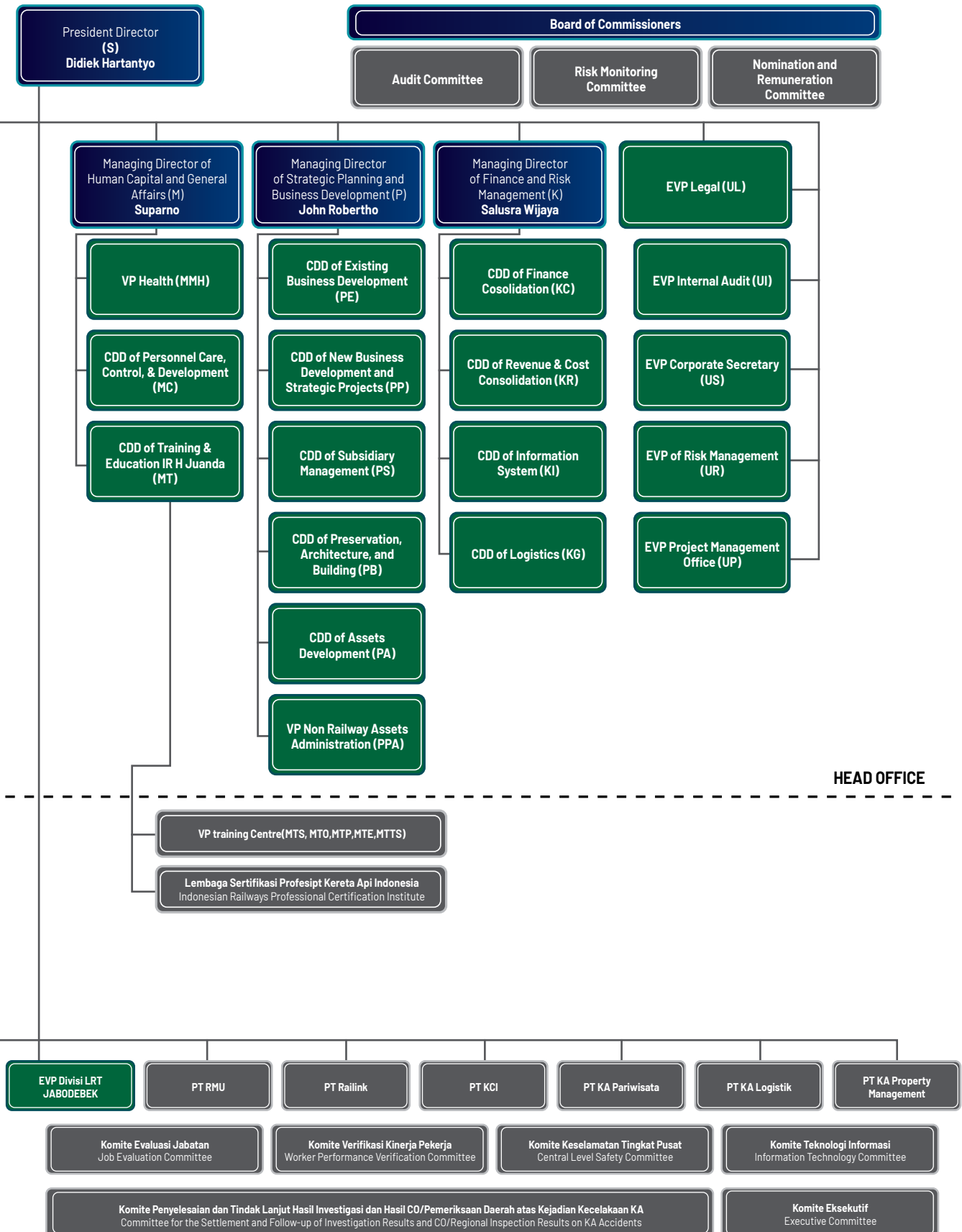


Keterangan : Nama anggota Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi disampaikan pada bagian Tata Kelola Perusahaan.

Note : The names of the members of the Board of Commissioners' Committee and the Board of Directors' Committee are submitted to the Corporate Governance section.

STRUKTUR ORGANISASI

Organization Structure



HEAD OFFICE

PROFIL DIREKSI

Board of Directors Profile



DIDIEK HARTANTYO
Direktur Utama
President Director

Periode Menjabat / Term of Office	2021-2026 (Periode Kedua) / 2021-2026 (Second Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Jakarta, 6 September 1961 / Jakarta, September 6, 1961
Usia / Age	61 tahun / 61 years old

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	<ul style="list-style-type: none"> • Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-142/MBU/05/2020 tanggal 8 Mei 2020. / Appointed for the first time as President Director of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on the Decree of the Minister of SOE No. SK142/MBU/05/2020 dated May 8, 2020. • Diangkat kembali sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-28/MBU/01/2021 tanggal 25 Januari 2021. / Reappointed as President Director of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on the Decree of Minister of SOE No. SK-28/MBU/01/2021 dated January 25, 2021.
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Komisaris utama di PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) (2020-2025) / President Commissioner at PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) (2020-2025)
Sertifikasi / Certification	Belum memiliki sertifikasi / None
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- Master degree dari Daniel School of Business, University of Denver, Amerika Serikat (1995). / Master's Degree from Daniel School of Business, University of Denver, US (1995).
- Sarjana bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Sebelas Maret (1985). / Bachelor's Degree in Management Economics from Universitas SebelasMaret (1985).

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2020-sekarang). / President Director at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2020-present).
- Direktur Keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2016-2020). / Director of Finance at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2016-2020)
- Group Head Corporate Banking II, Bank Mandiri (2011-2016). / Group Head Corporate Banking II at Bank Mandiri (2011-2016)
- Group Head Financial Institutions, Bank Mandiri (2010-2011). / Group Head Financial Institutions at Bank Mandiri (2010-2011).

PROFIL DIREKSI

Board of Directors Profile



HADIS SURYA PALAPA
Direktur Niaga
Managing Director of Commerce

Periode Menjabat / Term of Office	2022-2027 (Periode Pertama) / 2022-2027 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Tangerang
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Yogyakarta, 12 Januari 1965 / Yogyakarta, January 12, 1965
Usia / Age	58 tahun / 58 years old
Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-89/ MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022. / Appointed for the first time as Managing Director of Commerce at PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on the Decree of the Minister of SOE No. SK-89/MBU/03/2022 dated March 31, 2022.

Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Komisaris Utama PT Kereta Commuter Indonesia (2022-2027) / President Commissioner at PT Kereta Commuter Indonesia (2022-2027)
Sertifikasi / Certification	Belum memiliki sertifikasi / None
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- Magister Administrasi Bisnis dari Brunel University di London (2007) / Master's Degree in Business Administration from Brunel University, London (2007)

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2022-sekarang) / Director of Commerce at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2022-present).
- Direktur Operasi PT Bukit Asam Tbk (2020-2021) / Director of Operation at PT Bukit Asam Tbk (2020-2021).
- Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk (2018-2020) / Corporate Secretary at PT Bukit Asam Tbk (2018-2020).
- General Manager Pelabuhan Tarahan (2018-2020) / General Manager at Tarahan Port (2018-2020).
- Direktur Utama PT Satria Bahana Sarana (2016-2017) / President Director at PT Satria Bahana Sarana (2016-2017).
- *Project Manager* Pembangunan Infrastruktur Penanganan Batu Bara (2015-2016) / *Project Manager* for Coal Handling Infrastructure Development (2015-2016).
- *Site Manager* Pembangunan Dermaga, *Coal Handling Facilities* dan Kantor Terpadu (2010-2015) / *Site Manager* of Wharf Development, Coal Handling Facilities and Integrated Office (2010-2015).
- *Project Manager* Pembangunan *Barge Loading Conveyor* (2009-2010) / *Project Manager* for Barge Loading Conveyor Development (2009-2010).
- *Analisis Bisnis* (2005-2009) / *Business Analyst* (2005-2009).

PROFIL DIREKSI

Board of Directors Profile



AWAN HERMAWAN PURWADINATA
Direktur Operasi
Managing Director of Operation

Periode Menjabat / Term of Office	2022-2027 (Periode Pertama) / 2022-2027 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Bandung
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Bandung, 30 April 1966 / Bandung, April 30, 1966
Usia / Age	57 tahun / 57 years old
Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	<ul style="list-style-type: none"> • Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Pengelolaan Prasarana PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK321/MBU/12/2019 tanggal 16 Desember 2019. / Appointed for the first time as Director of Infrastructure Management of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on the Decree of the Minister of SOE No. SK321/MBU/12/2019 dated December 16, 2019. • Diangkat menjadi Direktur Operasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri No. SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022. / Appointed as Managing Director of Operation of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on Ministerial Decree No. SK-89/MBU/03/2022 dated March 31, 2022.

Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Komisaris Utama PT KA Logistik (2020-2025) / President Commissioner of PT KA Logistik (2020-2025)
Sertifikasi / Certification	Belum memiliki sertifikasi / None
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- Master bidang Teknik Perkeretaapian Institut Teknologi Bandung (2000) / Master in Railway Engineering from Institut Teknologi Bandung (2000).
- Sarjana bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Nasional Bandung (1995) / Bachelor's degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Nasional Bandung (1995).

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Direktur Operasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2022-Sekarang) / Managing Director of Operation at PT Kereta Api Indonesia (2022-Present)
- Direktur Pengelolaan Prasarana PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2020-2022) / Director of Infrastructure at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2020-2022)
- *Executive Vice President Track and Bridge* PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2014) / *Executive Vice President Track and Bridge* at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2014)
- *Direktur Operasi* PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2019) / *Director of Operation* at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2019).
- *Corporate Deputy Director of Infrastructure Maintenance and Infrastructure Assets* Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2016-2019) / *Corporate Deputy Director of Infrastructure Maintenance and Infrastructure Assets* at PT Kereta Api Indonesia (Persero) Head Office (2016-2019).
- *Executive Vice President Freight Marketing & Sales* PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2015-2016) / *Executive Vice President of Freight Marketing & Sales* at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2015-2016).
- *Deputy EVP II Daerah Operasi 1 Jakarta Bidang Pelayanan dan Komersial* PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2015) / *Deputy EVP II Operation Area 1 Jakarta for Services and Commercial Affairs* at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2015).
- *Executive Vice President Divisi Regional III Sumatera Selatan* PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2014-2015) / *Executive Vice President of Regional Division III South Sumatra* at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2014-2015)

PROFIL DIREKSI

Board of Directors Profile



HERU KUSWANTO
Direktur Pengelolaan Prasarana
Managing Director of Infrastructure

Periode Menjabat / Term of Office	2022-2027 (Periode Pertama) / 2022-2027 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Grobogan, 18 Agustus 1971 / Grobogan, August 18, 1971
Usia / Age	51 tahun / 51 years old
Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	<ul style="list-style-type: none"> • Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Operasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-48/MBU/02/2021 tanggal 16 Februari 2021. / Appointed for the first time as Director of Operation of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on the Decree of the Minister of SOE No. SK-48/MBU/02/2021 dated February 16, 2021. • Diangkat menjadi Direktur Pengelola Prasarana PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri No. SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 / Appointed as Managing Director of Infrastructure Management of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on Ministerial Decree No. SK-89/MBU/03/2022 dated March 31, 2022.

Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Komisaris Utama PT KA Pariwisata (2022-2027) / President Commissioner at PT KA Pariwisata (2022-2027)
Sertifikasi / Certification	Belum memiliki sertifikasi / None
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- Sarjana bidang Manajemen dari Universitas Gajah Mada (1999) / Bachelor's Degree in Management from Universitas Gajah Mada (1999).

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Direktur Pengelolaan Prasarana PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2022-Sekarang) / Managing Director of Infrastructure Management at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2022-Present)
- Direktur Operasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2020-2022) / Director of Operation at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2020-2022)
- *Corporate Deputy Director of Assets Development* PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2020-2021) / *Corporate Deputy Director of Assets Development* at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2020-2021).
- *Corporate Deputy Director of New Business Development* PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2019-2020) / *Corporate Deputy Director of New Business Development* of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2019-2020).
- *Plt. Executive Vice President National and Corporate Strategic Projects* PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2019) / *Act. Executive Vice President* of National and Corporate Strategic Projects of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2019).
- *Direktur Utama* PT Railink (2015-2019) / *President Director* of PT Railink (2015-2019).
- *Vice President Sub Divre III.2 Tanjungkarang* PT Kereta Api Indonesia (Persero) (kini *Divre IV Tanjungkarang*) (2013-2015) / *Vice President* of Sub Division III.2 Tanjungkarang PT Kereta Api Indonesia (Persero) (now *Division IV Tanjungkarang*) (2013-2015).
- *Senior Manager Operasi 1 Jakarta* PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2011-2012) / *Senior Manager* of Operation 1 Jakarta at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2011-2012).

PROFIL DIREKSI

Board of Directors Profile



EKO PURWANTO
Direktur Pengelolaan Sarana
Managing Director of Rolling Stock

Periode Menjabat / Term of Office	2021-2026 (Periode Pertama) / 2021-2026 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Magetan, 10 Februari 1971 / Magetan, February 10, 1971
Usia / Age	52 tahun / 52 years old
Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Pengelolaan Sarana PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-48/MBU/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 / Appointed for the first time as Managing Director of Rolling Stock at PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on the Decree of the Minister of SOE No. SK-48/MBU/02/2021 dated February 16, 2021.

Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Komisaris Utama PT KA Properti Manajemen (2022-2027) / President Commissioner at PT KA Properti Manajemen (2022-2027)
Sertifikasi / Certification	Belum memiliki sertifikasi / None
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

Sarjana bidang Mesin Kapal dari Universitas Hang Tuah (1996) / Bachelor in Ship Engineering from Universitas Hang Tuah (1996).

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Direktur Pengelolaan Sarana PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2021-2023) / Managing Director of Rolling Stock PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2021-2023).
- *Executive Vice President* Daerah Operasi 1 Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2020-2021) / Executive Vice President of Operation Area 1 Jakarta at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2020-2021).
- *Executive Vice President* Daerah Operasi 6 Yogyakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2018-2020) / Executive Vice President of Operation Area 6 Yogyakarta at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2018-2020).
- *Corporate Deputy Director of Rollingstock* PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017-2018) / Corporate Deputy Director of Rollingstock at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017-2018).
- *Executive Vice President* UPT Balai Yasa Yogyakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2015-2017) / Executive Vice President of UPT Balai Yasa Yogyakarta at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2015-2017).
- *Executive Vice President* UPT Balai Yasa Lahat PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2013-2015) / Executive Vice President of UPT Balai Yasa Lahat at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2013-2015).
- *General Manager* Balai Yasa Lahat PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2013) / General Manager of Balai Yasa Lahat PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2013).
- *Senior Manager* Sarana Daerah Operasi I Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2012-2013) / Senior Manager of Operation Area I Jakarta Facilities at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2012-2013).

PROFIL DIREKSI

Board of Directors Profile



SANDRY PASAMBUNA

- **Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha (31 Maret - 26 Oktober 2022) / Managing Director of Strategic Planning and Business Development (March 31 - October 26, 2022)**
- **Direktur Keselamatan dan Keamanan (26 Oktober-31 Desember 2022) / Managing Director of Safety and Security (October 26 - December 31, 2022)**

Periode Menjabat / Term of Office	2022-2027 (Periode Pertama) / 2022-2027 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Kotamobagu, 8 Agustus 1967 / Kotamobagu, August 8, 1967
Usia / Age	55 tahun / 55 years old
Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	<ul style="list-style-type: none"> • Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 / Appointed for the first time as Managing Director of Strategic Planning and Business Development of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on the Decree of the Minister of SOE No. SK-89/MBU/03/2022 dated March 31, 2022. • Diangkat sebagai Direktur Keselamatan dan Keamanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-240/MBU/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 / Appointed as Managing Director of Safety and Security of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on Decree of the Minister of SOE No. SK-240/MBU/10/2022 dated October 26, 2022.

Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Plt. Komisaris PT Kereta Commuter Indonesia (2023-2028) / Acting Commissioner of PT Kereta Commuter Indonesia (2023-2028)
Sertifikasi / Certification	Belum memiliki sertifikasi / None
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- Magister Teknik Perminyakan UPN Veteran Yogyakarta (2020) / Master in Petroleum Engineering UPN Veteran Yogyakarta (2020).
- Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Sam Ratulangi Manado (2020) / Engineer Profession Study Program at Universitas Sam Ratulangi Manado (2020)
- Environmental Policy and Management, The Van Hall Institute, Belanda (2002) / Environmental Policy and Management The Van Hall Institute, Netherlands (2002)
- Insinyur dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Sam Ratulangi Manado (1995) / Engineer from the Faculty of Civil Engineering, Universitas Sam Ratulangi Manado (1995).

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Direktur Keselamatan dan Keamanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2022-sekarang) / Managing Director of Safety and Security at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2022-present)
- Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2022). / Managing Director of Strategic Planning and Business Development at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2022).
- Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Perum DAMRI (2020-2022) / Director of Commercial and Business Development at Perum DAMRI (2020-2022)
- *Head of Project Delivery* di PHE-WMO dan *Commissioning & Quality Control Manager* di PHE-ONWJ (2011-2020) / *Head of Project Delivery* at PHE-WMO and *Commissioning & Quality Control Manager* at PHE-ONWJ (2011 - 2020).
- Project SPA (Single Point Accountability) and Project Manager di KODECO Energy Co.LTD (2010-2011) / Project SPA (Single Point Accountability) and Project Manager at KODECO Energy Co.LTD (2010 - 2011).
- Sr. Construction Spt. Di Mobil Cepu Limited (Exxon Mobil Oil Indonesia) (2008 - 2010) / Sr. Construction Spt. At Mobil Cepu Limited (Exxon Mobil Oil Indonesia) (2008 - 2010).
- Sr. Construction Spt./CSR (Company Site Representative) Total E&P Indonesia (2003 - 2008) / Sr. Construction Spt./CSR (Company Site Representative) Total E&P Indonesia (2003 - 2008).
- *Construction Supervisor, Production Supervisor di Cement Bag Making & Cement Dispatch Plant* pada PT Semen Bosowa (1995 - 2000) / *Construction Supervisor, Production Supervisor at Cement Bag Making & Cement Dispatch Plant* at PT Semen Bosowa (1995 - 2000).

PROFIL DIREKSI

Board of Directors Profile



SUPARNO
Direktur SDM dan Umum
Managing Director of Human Capital and
General Affairs

Periode Menjabat / Term of Office	2022-2027 (Periode Pertama) / 2022-2027 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Bandung
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Sragen , 25 Februari 1967 / Sragen, February 25, 1967
Usia / Age	56 tahun / 56 years old

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur SDM dan Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 / Appointed for the first time as Director of HR and General Affairs of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on Decree of the Minister of SOENo. SK-89/MBU/03/2022 dated March 31, 2022.
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Komisaris Utama PT Reska Multi Usaha (2022-2027) / President Commissioner of PT Reska Multi Usaha (2022-2027)
Sertifikasi / Certification	Belum memiliki sertifikasi / None
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- Master bidang Teknik Perkeretaapian dari Institut Teknologi Bandung (2001). / Master's Degree in Railway Engineering from Institut Teknologi Bandung (2001).
- Sarjana bidang Teknik Sipil dari Universitas Negeri Sebelas Maret (1993) / Bachelor's Degree in Civil Engineering from Universitas Negeri Sebelas Maret (1993)

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Direktur SDM dan Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2022-sekarang) / Director of HR and General Affairs of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2022-present)
- Corporate Deputy Director of Logistic (2022) / Corporate Deputy Director of Logistic (2022)
- Vice President Facility and Bridge (2020) / Vice President Facility and Bridge (2020)
- Vice President Pengadaan Barang dan jasa (2019-2020) / Vice President of Goods and Service Procurement (2019-2020)
- Vice President IT Planning and Governance (2018) / Vice President IT Planning and Governance (2018)

PROFIL DIREKSI

Board of Directors Profile



JOHN ROBERTHO

- Direktur Keselamatan dan Keamanan (1 Januari-26 Oktober 2022) / Managing Director of Safety and Security (January 1 – October 26, 2022)
- Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha (26 Oktober-31 Desember 2022) / Managing Director of Strategic Planning and Business Development (October 26 – December 31, 2022)

Periode Menjabat / Term of Office	2019-2024 (Periode Pertama) / 2019-2024 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Yogyakarta
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Martebing, 23 April 1963 / Martebing, April 23, 1963
Usia / Age	60 tahun / 60 years old

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-240/MBU/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 / Appointed for the first time as Managing Director of Strategic Planning and Business Development at PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on Decree of the Minister of SOE No. SK-240/MBU/10/2022 dated October 26, 2022
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Komisaris PT KA Commuter Indonesia (2020-2023) / Commissioner of PT KA Commuter Indonesia (2020-2023)
Sertifikasi / Certification	Belum memiliki sertifikasi / None
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- Sarjana bidang Teknik Mesin dari Universitas HKBP Nommensen (1989) / Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from Universitas HKBP Nommensen (1989)

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2022-sekarang) / Managing Director of Strategic Planning and Business Development at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2022-present)
- Direktur Keselamatan dan Keamanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2019-2022) / Director of Safety and Security at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2019-2022)
- Pelaksana Tugas Direktur Teknik PT KCI (2019) / Act. Director of Engineering at PT KCI (2019)
- Executive Vice President Divisi Light Rail Transit Jabodetabek (2017-2019) / Executive Vice President of Jabodetabek Light Rail Transit Division (2017-2019)
- Corporate Deputy Director of Freight Marketing and Sales, PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017) / Corporate Deputy Director of Freight Marketing and Sales at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017)
- Executive Vice President Daerah Operasi I Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2016-2017) / Executive Vice President of Operation Area I Jakarta at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2016-2017)
- Direktur Teknik KAI Commuter Jabotabek (2014-2016) / Director of Engineering at KAI Commuter Jabotabek (2014-2016)

PROFIL DIREKSI

Board of Directors Profile



SALUSRA WIJAYA
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Managing Director of Finance and Risk Management

Periode Menjabat / Term of Office	2020-2025 (Periode Pertama) / 2020-2025 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Padang, 19 April 1963 / Padang, April 19, 1963
Usia / Age	60 tahun / 60 years old

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-236/MBU/07/2020 tanggal 14 Juli 2020 / Appointed for the first time as Managing Director of Finance and Risk Management of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on Decree of the Minister of SOE No. SK-236/MBU/07/2020 dated July 14, 2020
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Komisaris Utama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (2021-2026) / President Commissioner of PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (2021-2026)
Sertifikasi / Certification	Penasihat Investasi diterbitkan oleh Bapepam, Komite Profesi Standar Pasar Modal (1995) / Investment Advisor issued by Bapepam, Capital Market Standard Profession Committee (1995)
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- MBA in International Banking & Finance di Birmingham Business School, University of Birmingham, Inggris (1997) / MBA in International Banking & Finance from Birmingham Business School, University of Birmingham, UK (1997)
- Sarjana bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia (1988) / Bachelor's Degree in Accounting from Universitas Indonesia (1988)

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Kereta Api Indonesia (Persero)(2020-sekarang) / Director of Finance and Risk Management at PT Kereta Api Indonesia (Persero)(2020-present)
- Finance & Human Resources Director di PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT Pelindo II Group)(2019-2020) / Finance & Human Resources Director at PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT Pelindo II Group)(2019-2020)
- President Director PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (PT Pelindo II Group)(2018-2019) / President Director of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (PT Pelindo II Group)(2018-2019)

PROFIL DIREKSI

Board of Directors Profile



JEFFRIE N. KOROMPIS*
Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha
Managing Director of Strategic Planning and Business
Development

Periode Menjabat / Term of Office	2020-2022 (Periode Pertama) / 2020-2022 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Tomohon, 2 Juni 1967 / Tomohon, June 2, 1967
Usia / Age	56 tahun / 56 years old

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-142/MBU/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 / Appointed for the first time as Managing Director of Strategic Planning and Business Development of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on Decree of the Minister of SOENo. SK-142/MBU/05/2020 dated May 8, 2020
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Komisaris PT KCIC (2021-2022) / Commissioner at PT KCIC (2021-2022)
Sertifikasi / Certification	Belum memiliki sertifikasi / None
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- MA in Management dari Macquarie Graduate School of Management Macquarie University, Sydney, Australia (1994) / MA in Management from Macquarie Graduate School of Management Macquarie University, Sydney, Australia (1994)
- Sarjana bidang Manajemen dari Universitas Advent Klabat Manado (1990) / Bachelor's Degree in Management from Universitas Advent Klabat Manado (1990)

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2020-2022) / Director of Strategic Planning and Business Development at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2020-2022)
- Chief Country Representatives NATIXIS (2019-2020)
- Chief Country Representatives Societe Generale (2013-2019)

*) Menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai dengan 31 Maret 2022 / Served as Director of the Company to March 31, 2022

PROFIL DIREKSI

Board of Directors Profile



AGUNG YUNANTO*
Direktur SDM dan Umum
Managing Director of Human Capital and General Affairs

Periode Menjabat / Term of Office	2020-2022 (Periode Pertama) / 2020-2022 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Bekasi
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Bandung, 7 Mei 1962 / Bandung, May 7, 1962
Usia / Age	61 tahun / 61 years old

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur SDM dan Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-142/MBU/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 / Appointed for the first time as Managing Director of Human Capital and General Affairs of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on Decree of the Minister of SOENo. SK-142/MBU/05/2020 dated May 8, 2020
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Komisaris Utama PT Reska Multi Usaha (2020-2022) / President Commissioner of PT Reska Multi Usaha (2020-2022)
Sertifikasi / Certification	Belum memiliki sertifikasi / None
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- Master bidang General Management dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Monash University, Australia (1999) / Master in General Management from Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Monash University, Australia (1999)
- Sarjana bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1987) / Bachelor's Degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung (1987)

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2019-2022) / Director of Human Capital and General Affairs at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2019-2022)
- Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2017-2020) / Director of Human Capital and Legal at PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2017-2020)
- Direktur Human Capital dan Pengembangan Usaha PT Wijaya Karya Beton, Tbk. (2017) / Director of Human Capital and Business Development at PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017)

*) Menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai dengan 31 Maret 2022 / Served as Director of the Company to March 31, 2022

PROFIL DIREKSI

Board of Directors Profile



DADAN RUDIANDIYAH*
Direktur Niaga
Managing Director of Commerce

Periode Menjabat / Term of Office	2021-2022 (Periode Pertama) / 2021-2022 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Bekasi
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Tasikmalaya, 3 Desember 1972 / Tasikmalaya, December 3, 1972
Usia / Age	50 tahun / 50 years old

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-48/MBU/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 / Appointed for the first time as Managing Director of Commerce of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on Decree of the Minister of SOENo. SK-48/MBU/02/2021 dated February 16, 2021
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Komisaris Utama KAI Commuter (2021-2022) / President Commissioner of KAI Commuter (2021-2022)
Sertifikasi / Certification	Belum memiliki sertifikasi / None
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- Sarjana bidang Hukum Perdata dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (1996) / Bachelor's Degree in Civil Law from Sekolah Tinggi Hukum Bandung (1996).

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2020-2022) / Director of Commerce at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2020-2022)
- *Executive Vice President Corporate Secretary* PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2020-2021) / *Executive Vice President Corporate Secretary* of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2020-2021).
- *Executive Vice President Daerah Operasi 1 Jakarta* PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017-2020) / *Executive Vice President Operation Area 1 Jakarta* PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017-2020)
- *Corporate Deputy Director of Non Railway Assets* PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017) / *Corporate Deputy Director of Non Railway Assets* of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017)
- *Executive Vice President Daerah Operasi 8 Surabaya* PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017) / *Executive Vice President Operation Area 8 Surabaya* PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017)
- *Executive Vice President Legal* PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2013-2017) / *Executive Vice President Legal* at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2013-2017)
- *VP Litigasi* PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2010-2013) / *VP Litigation* of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2010-2013).

*) Menjabat sebagai Direktur Perseroan pada 1 Januari-31 Maret 2022 / Served as Director from January 1 - March 31, 2022

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DIREKSI

Affiliation of the Board of Directors

KAI memastikan bahwa masing-masing anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, baik berupa hubungan keuangan maupun keluarga, dengan anggota Dewan Komisaris, sesama anggota Direksi, ataupun pemegang saham dan pengendali Perseroan. Selain itu, anggota Direksi juga dipastikan tidak memiliki hubungan kepengurusan dalam bentuk apa pun yang dapat mengganggu independensi dan/atau berpotensi menghadirkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

KAI menjamin bahwa seluruh anggota Direksi dapat senantiasa bertindak independen dan terbebas dari intervensi. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menjamin terjaganya objektivitas Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perseroan.

KAI ensures that each member of the Board of Directors has no affiliation, either financial or familial, with members of the Board of Commissioners, fellow members of the Board of Directors, or shareholders and controllers of the Company. In addition, members of the Board of Directors are also ensured that they do not have any form of management relationship that may interfere with independence and/or have the potential to present a conflict of interest in carrying out their respective duties and responsibilities.

KAI ensures that all members of the Board of Directors can always act independently and are free from interference. This is carried out in order to ensure the objectivity of the Board of Directors is maintained in carrying out their duties and responsibilities in managing the Company.

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI TAHUN 2022

AFFILIATION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2022

Nama / Name	Jabatan/ Position	Hubungan Keuangan Dengan / Financial Relation with						Hubungan Keluarga Dengan / Familial Relation with						Hubungan Kepengurusan / Managerial Relation	
		Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Direksi / Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali / Controlling Shareholders		Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Direksi / Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali / Controlling Shareholders			
		Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Didiek Hartantyo	Direktur Utama / President Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Hadis Surya Palapa	Direktur Niaga / Managing Director of Commerce	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Awan Hermawan Purwadinata	Direktur Operasi / Managing Director of Operation	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Heru Kuswanto	Direktur Pengelola Prasarana / Managing Director of Infrastructure	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Eko Purwanto	Direktur Pengelolaan Sarana / Managing Director of Rolling Stock	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
John Robertho	Direktur Keselamatan dan Keamanan / Managing Director of Safety and Security	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DIREKSI

Affiliation of the Board of Directors

Nama / Name	Jabatan/ Position	Hubungan Keuangan Dengan / Financial Relation with						Hubungan Keluarga Dengan / Familial Relation with						Hubungan Kepengurusan / Managerial Relation	
		Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Direksi / Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali / Controlling Shareholders		Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Direksi / Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali / Controlling Shareholders			
		Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Suparno	Direktur SDM dan Umum / Managing Director of Human Capital and General Affairs	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sandry Pasambuna	Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha / Managing Director of Strategic Planning and Business Development	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Salusra Wijaya	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Managing Director of Finance and Risk Management	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Jeffrie N. Korompis	Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha / Managing Director of Strategic Planning and Business Development	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Agung Yunanto	Direktur SDM dan Umum / Managing Director of Human Capital and General Affairs	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Dadan Rudiansyah	Direktur Niaga / Managing Director of Commerce	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Changes in Composition of the Board of Directors and the Reason

Di tahun 2022, komposisi Direksi Perseroan mengalami 2 (dua) perubahan yang dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perseroan Nomor SK-89/MBU/03/2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia tanggal 31 Maret 2022 serta Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perseroan Nomor SK-240/MBU/10/2022 tentang Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia tanggal 26 Oktober 2022, dengan alasan penataan susunan anggota Direksi. Atas perubahan tersebut, komposisi Direksi pada 31 Desember 2022 terdiri atas 9 (sembilan) anggota, yang seluruhnya telah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) oleh Kementerian BUMN.

In 2022, the composition of the Company's Board of Directors underwent 2 (two) changes which were made based on the Decree of the Minister of SOE as the Company's GMS Number SK-89/MBU/03/2022 concerning Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company of PT Kereta Api Indonesia (Persero) dated March 31, 2022 and Decree of the Minister of SOE as the GMS of the Company Number SK-240/MBU/10/2022 concerning the Transfer of Duties of Members of the Board of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) dated October 26, 2022, due to the organization of composition of the Board of Directors. Due to this change, the composition of the Board of Directors as of December 31, 2022 consisted of 9 (nine) members, all of whom have passed the Fit and Proper Test (UKK) by the Ministry of SOE.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI TAHUN 2022

CHANGE IN THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION IN 2022

	1 Januari-31 Maret 2022 / January 1- March 31, 2022	31 Maret-26 Oktober 2022 / March 31 - October 26, 2022	26 Oktober-31 Desember 2022 / October 26 - December 31, 2022
Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN No. SK-48/MBU/02/2021 / Decree of the Minister of SOE No. SK-48/MBU/02/2021	Keputusan Menteri BUMN No. SK-89/MBU/03/2022 / Decree of the Minister of SOE No. SK-89/MBU/03/2022	Keputusan Menteri BUMN No. SK-240/MBU/10/2022 / Decree of the Minister of SOE No. SK-240/MBU/10/2022
Direktur Utama / President Director	Didiek Hartantyo	Didiek Hartantyo	Didiek Hartantyo
Direktur Niaga / Managing Director of Commerce	Dadan Rudiansyah	Hadis Surya Palapa	Hadis Surya Palapa
Direktur Operasi / Managing Director of Operation	Heru Kuswanto	Awan Hermawan Purwadinata	Awan Hermawan Purwadinata
Direktur Pengelolaan Prasarana / Managing Director of Infrastructure	Awan Hermawan Purwadinata	Heru Kuswanto	Heru Kuswanto
Direktur Pengelolaan Sarana / Managing Director of Rolling Stock	Eko Purwanto	Eko Purwanto	Eko Purwanto
Direktur Keselamatan dan Keamanan / Managing Director of Safety and Security	John Robertho	John Robertho	Sandry Pasambuna
Direktur SDM dan Umum / Managing Director of Human Capital and General Affairs	Agung Yunanto	Suparno	Suparno
Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha / Managing Director of Strategic Planning and Business Development	Jeffrie N. Korompis	Sandry Pasambuna	John Robertho
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Managing Director of Finance and Risk Management	Salusra Wijaya	Salusra Wijaya	Salusra Wijaya

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Profile



SAID AOIL SIROJ
Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

Periode Menjabat / Term of Office	2021-2026 (Periode Pertama) / 2021 - 2026 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Cirebon, 3 Juli 1953 / Cirebon, July 3, 1953
Usia / Age	69 tahun / 69 years old
Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-64/MBU/03/2021 tanggal 3 Maret 2021 / Appointed for the first time as President Commissioner/Independent Commissioner of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on Decree of the Minister of SOE No. SK-64/MBU/03/2021 dated March 3, 2021
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> Vice President Religions for Peace (2019-sekarang) / Vice President Religions for Peace (2019-present) Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Kereta Api Indonesia (Persero). / Head of Nomination and Remuneration Committee at PT Kereta Api Indonesia (Persero). Anggota BPIP (Badan Pengkajian Ideologi Pancasila) RI (2017 - Sekarang) / Member of the Indonesian National Institute for the Study of Ideology (BPIP) (2017-Present) Pengasuh Ponpes Luhur Al Tsaqafah, Ciganjur, Jagakarsa - Jakarta Selatan (2013 - Sekarang) / Caretaker of Luhur Al Tsaqafah Islamic Boarding School, Ciganjur, Jagakarsa - South Jakarta (2013-Present). Penasihat Dosen Mata Kuliah MKDU UBAYA Surabaya (1998-sekarang) / Advisor to MKDUUBAYACourse Lecturers in Surabaya (1998-present). Dosen Pasca Sarjana UI, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Univ Islam Malang (1995-sekarang) / Postgraduate Lecturer at UI, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta and Universitas Islam Malang (1995-present)

Sertifikasi / Certification	Onboarding Commissioner of State-Owned Enterprise Program (2022)
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- Doktor bidang Aqidah/Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dari Universitas Ummal-Qura Mekkah (1994). / Doctoral Degree in Aqidah/ Islamic Philosophy, Ushuluddin Faculty, Umm al-Qura University, Mecca (1994).
- Master bidang Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dari Universitas Ummal-Qura Mekkah (1987) / Master's Degree in Comparative Religion, Faculty of Ushuluddin, Umm alQura University, Mecca (1987).
- Sarjana bidang Ushuluddin dan Dakwah Fakultas Syari'ah dari Universitas King Abdul Aziz cabang Mekkah (1982) / Bachelor's Degree in Ushuluddin and Da'wah, Faculty of Sharia, King Abdul Aziz University, Mecca branch (1982)

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2021-sekarang). / President Commissioner/Independent Commissioner at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2021-present)
- Vice President Religions for Peace (2019-sekarang) / Vice President Religions for Peace (2019-present).
- Anggota BPIP (Badan Pengkajian Ideologi Pancasila) RI (2017-sekarang) / Member of the Indonesian National Institute for the Study of Ideology (BPIP) (2017 - Present).
- Ketua Umum PBNU (2010 - 2021) / General Chairperson of PBNU (2010 - 2021).
- Komisaris Independen PT Rumah Sakit Pelabuhan (Pelindo II Group) (2019-2020) / Independent Commissioner at PT Rumah Sakit Pelabuhan (Pelindo II Group) (2019 - 2020)
- Komisaris Independen PT Pelabuhan Tanjung Priok (Pelindo II Group) (2012-2019) / Independent Commissioner at PT Pelabuhan Tanjung Priok (Pelindo II Group) (2012 - 2019).
- Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (2012-2015) / Chairman of the Board of Trustees of the University of Indonesia (2012 - 2015)
- Guru Besar Bidang Tasawuf IAIN Sunan Ampel - Surabaya (2014) / Professor of Sufism IAIN Sunan Ampel - Surabaya (2014)

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Profile



ROCHADI
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode Menjabat / Term of Office	2021-2026 (Periode Pertama) / 2021-2026 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Bandung
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Jakarta, 1 Juni 1962 / Jakarta, June 1, 1962
Usia / Age	60 tahun / 60 years old
Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-64/MBU/03/2021 tanggal 3 Maret 2021 / Appointed for the first time as Independent Commissioner of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on the Decree of the Minister of SOENo. SK-64/MBU/03/2021 dated March 3, 2021.

Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Anggota Komite Audit PT Kereta Api Indonesia (Persero)(2021-Sekarang) / Member of Audit Committee at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2021-Present)
Sertifikasi / Certification	Onboarding Commissioner of State-Owned Enterprise Program (2021)
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- Seskoad (2000). / Seskoad (2000).
- Suslapa II (1995) / Suslapa II (1995)
- Suslapa I (1991) / Suslapa I (1991)
- Sussarcab Infanteri (1986) / Sussarcab Infantry (1986)
- Akademi Militer (1986) / Military Academy (1986)

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero)(2021-sekarang). / Independent Commissioner of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2021-present).
- Dankoopssus TNI (2019) / DankoopssusTNI (2019).
- Direktur A Bais TNI (2018) / Director of A BaisTNI (2018).
- Danpusdikter Pusterad (2016) / DanpusdikterPusterad (2016).
- Paban Sahli Kasad Bidang Orkes Sahli Kasad (2015) / Paban Sahli Kasad Orchestra Head Sahli Kasad (2015).
- Irdam III/SLW (2014) / Irdam III/SLW (2014).
- Danrem 044/Gapo Dam II/SWJ (2013) / Danrem 044/Gapo Dam II/SWJ (2013).
- Danbrigif 19/KT Dam XII/TPR (2010) / Danbrigif 19/KT Dam XII/TPR (2010)
- Aster Kasdam III/SIW (2011) / Aster Kasdam III/SLW (2011).
- Waasops Kasdam III/SLW (2007) / WaasopsKasdam III/SLW (2007).
- Dandim 0616/Indramayu (2003) / Dandim 0616/Indramayu (2003)

PROFIL DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners Profile



RIZA PRIMADI
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode Menjabat / Term of Office	2021-2026 (Periode Pertama) / 2021-2026 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Probolinggo, 7 September 1961 / Probolinggo, September 7, 1961
Usia / Age	61 tahun / 61 years old
Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-64/MBU/03/2021 tanggal 3 Maret 2021 / Appointed for the first time as Independent Commissioner of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on the Decree of the Minister of SOE No. SK-64/MBU/03/2021 dated March 3, 2021.

Rangkap Jabatan / Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> CEO PT ContentCreative Indonesia (2010-sekarang) / CEO at PT Content Creative Indonesia (2010-present) Ketua Komite Audit PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2021-2023) / Head of Audit Committee at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2021-2023)
Sertifikasi / Certification	<ul style="list-style-type: none"> Business Analytics, Judge Business School, University of Cambridge, UK (2020) Data Analytics, Sloane School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA (2020) Audit Committees in a New Era of Governance, Harvard Business School, USA (2022) Data Analysis for Management, The London School of Economics and Political Science, UK (2022)
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- Transitional Democracy 2000 (Chevening Awards), University of Birmingham, UK, (2000).
- Post Graduate in Science Communications, University of London, Birbeck College (1994)
- Sarjana Sains bidang Matematika dan IPA dari Universitas Indonesia (1986) / Bachelor of Science in Mathematics and Natural Sciences from Universitas Indonesia (1986).

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2021-sekarang) / Independent Commissioner of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2021-present).
- Staf Khusus Menteri BUMN (2015-2017) / Special Staff of the Minister of SOE
- News Advisor, Astro Awani Malaysia (2009-2010) / News Advisor Astro Awani Malaysia (2009-2010).
- News Director, PT Adi KaryaVisi (2005-2008) / News Director of PT Adi KaryaVisi (2005-2008).
- News and Corporate Affairs Director, Trans TV (2000-2005) / News and Corporate Affairs Director Trans TV (2000-2005).
- Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI (1988-2008) / Lecturer of the Department of Communication Science, FISIP UI (1988-2008).

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Profile



ENDANG TIRTANA
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode Menjabat / Term of Office	2021-2026 (Periode Pertama) / 2021-2026 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Padang Balai, 9 April 1981 / Padang Balai, April 9, 1981
Usia / Age	41 tahun / 41 years old
Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK417/MBU/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 / Appointed for the first time as Independent Commissioner of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on the Decree of the Minister of SOE No. SK417/MBU/12/2021 dated December 29, 2021.

Rangkap Jabatan / Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Indonesian Watch for Democracy (2017-Sekarang) / Director of Indonesian Watch for Democracy (2017-Present). Peneliti Senior Maarif Institute For Culture And Humanity (2019 - Sekarang) / Senior Researcher at Maarif Institute for Culture and Humanity (2019-Present).
Sertifikasi / Certification	Belum memiliki sertifikasi / None
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- Magister bidang Ilmu Administrasi dari Universitas Krisnadwipayana Jawa Barat (2021) / Master in Administrative Science from Universitas Krisnadwipayana, West Java (2021).
- Sarjana bidang Aqidah Filsafat dari Institut Agama Islam Negeri Padang (IAIN)(2000) / Bachelor of Aqidah Philosophy from Padang State Islamic Institute (IAIN)(2000).

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero)(2021-sekarang) / Independent Commissioner at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2021-present).
- Komisaris Independen PT Semen Baturaja (2020-2021) / Independent Commissioner at PT Semen Baturaja (2020-2021).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (2010-2015) / Muhammadiyah Central Leadership, Institute of Wisdom and Public Policy (2010-2015).

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Profile



CRIS KUNTADI*
Komisaris
Commissioner

Periode Menjabat / Term of Office	2021-2026 (Periode Pertama) / 2021-2026 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Banyumas, 24 Juni 1969 / Banyumas, June 24, 1969
Usia / Age	53 tahun / 53 years old
Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-64/MBU/03/2021 tanggal 3 Maret 2021 / Appointed for the first time as Independent Commissioner of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on the Decree of the Minister of SOE No. SK-64/MBU/03/2021 dated March 3, 2021.
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	-

*) Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada 1 Januari-15 Agustus 2022 / Served as a Commissioner from January 1 to August 15, 2022

Sertifikasi / Certification

- *Certified Human Resources Manager (CHRM)* dari Lembaga Sertifikasi Profesi CHRM, 2021 / Certified Human Resources Manager (CHRM) from the CHRM Professional Certification Institute (2021)
- *ASEAN Chartered Professional Accountant (ACPA)* dari ASEAN CPA Coordinating Committee (ACPACC) (2019) / ASEAN Chartered Professional Accountant (ACPA) from the ASEAN CPA Coordinating Committee (ACPACC) (2019)
- *Certified Forensic Auditor (CFrA)* dari Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensic, 2017 / Certified Forensic Auditor (CFrA) from the Forensic Auditor Professional Certification Institute (2017)
- *Certified International Public Sector Accounting Standard (CIPSAS)* dari Association of Certified Chartered Accountant (ACCA), 2017 / Certified International Public Sector Accounting Standard (CIPSAS) from the Association of Certified Chartered Accountants (ACCA) (2017)
- *Chartered Global Management Accountant (CGMA)* dari CIMA, 2015 / Chartered Global Management Accountant (CGMA) from CIMA (2015)
- *Fellow Chartered Management Accountant (FCMA)* dari Chartered Institute of Management Accountant (CIMA), 2015 / Fellow Chartered Management Accountant (FCMA) from the Chartered Institute of Management Accountant (CIMA) (2015)
- *Qualified Internal Auditor (QIA)* dari YPIA, 2014 / Qualified Internal Auditor (QIA) from YPIA (2014)
- *Chartered Accountant (CA)* dari Ikatan Akuntan Indonesia (2012) / Chartered Accountant (CA) from the Indonesian Institute of Accountants (2012)
- *Certified Public Accountant (CPA)* dari IAPI, 2004 / Certified Public Accountant (CPA) from IAPI (2004)

Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares

Tidak memiliki / None

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- Doktor bidang Business Administration, Management, and Operation di Universitas Brawijaya Malang (2009). / Doctoral Degree in Business Administration, Management, and Operation from Universitas Brawijaya, Malang (2009).
- Magister bidang Manajemen dari Universitas Gadjah Mada dan Erasmus Universiteit Rotterdam (2000). / Master's Degree in Management from Universitas Gadjah Mada and Erasmus Universiteit Rotterdam (2000).
- Profesi Akuntan dari Universitas Indonesia (1996). / Professional Accountant from Universitas Indonesia (1996).
- Sarjana bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia (1996). / Bachelor's degree in Accounting from Universitas Indonesia (1996).

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Widyaiswara Ahli Utama (2021-sekarang) / Widyaiswara Principal Expert (2021-Present).
- Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017-2022) / Member of the Risk Management Monitoring Committee of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017-2022)
- Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017-2022) / Commissioner of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017-2022)
- Staf Ahli Menteri Perhubungan (2017-2021) / Expert Staff of the Minister of Transportation (2017-2021).
- Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016-2017) / Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016-2017)
- Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (2015-2017) / Inspector General of the Ministry of Transportation (2015-2017).
- Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah (2014) / Head of BPK Representative for Central Java Province (2014).
- Kepala Pusdiklat BPK (2010-2014) / Head of the BPK Training Center (2010-2014).

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Profile



FREDDY HARRIS*
Komisaris
Commissioner

Periode Menjabat / Term of Office	2017 - 2022 (Periode Pertama) / 2017-2022 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Jakarta, 18 November 1966 / Jakarta, November 18, 1966
Usia / Age	56 tahun / 56 years old
Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perseroan No. SK-232/MBU/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 / Appointed for the first time as Commissioner of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on the Decree of the Minister of SOE as the Company's GMS No. SK-232/MBU/10/2017 dated October 27, 2017.

Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak memiliki / None
Sertifikasi / Certification	Belum memiliki sertifikasi / None
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- Doktor bidang Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (2007) / Doctor's Degree in Law from Universitas Indonesia (2007).
- Diploma Accredited Cyber Crime Studies dari STMIK Perbanas (2004) / Diploma in Accredited Cyber Crime Studies from STMIK Perbanas (2004).
- Master of Laws (LL.M.), Rijksuniversiteit Groningen, Belanda (1998) / Master of Laws (LL.M.), Rijksuniversiteit Groningen The Netherlands (1998).
- Sarjana bidang Hukum dari Universitas Indonesia (1992) / Bachelor's degree in Law from Universitas Indonesia (1992).

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (2021-sekarang) / Dean of the Faculty of Law, Universitas Esa Unggul (2021-present).
- Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017-2022) / Head of Risk Management Monitoring Committee of PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017-2022) / Commissioner of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017-2022)
- Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham tahun (2016-2017) / Director General of General Legal Administration of the Ministry of Law and Human Rights (2016-2017).
- Direktur Teknologi Informasi Dijen HKI, Depkum HAM tahun (2008-2010) / Director of Information Technology at the Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights (2008-2010).

*) Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada 1 Januari-15 Agustus 2022 / Served as a Commissioner from January 1 to August 15, 2022

PROFIL DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners Profile



DIAH NATALISA
Komisaris
Commissioner

Periode Menjabat / Term of Office	2021-2026 (Periode Pertama) / 2021-2026 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Palembang, 15 November 1963 / Palembang, November 15, 1963
Usia / Age	59 tahun / 59 years old
Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perseroan No. SK-64/MBU/03/2021 tanggal 3 Maret 2021 / Appointed for the first time as Commissioner of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on the Decree of the Minister of SOE as the Company's GMS No. SK-64/MBU/03/2021 dated March 3, 2021.
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> Komite Nominasi dan Remunerasi (2021-2023). / Nomination and Remuneration Committee (2021-2023) Deputi Bidang Pelayanan Publik (2016-sekarang) / Deputy for Public Service of the Ministry of PAN and RB (2016-present). Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (2008-sekarang) / Professor of Management Science at the Faculty of Economics, Universitas Sriwijaya (2008-present).

Sertifikasi / Certification	<ul style="list-style-type: none"> Public Administration Programme for Senior Government Officials from Indonesia - BAPPENAS and Nanyang Technological University Singapore, Singapura, 2021. / Public Administration Program for Senior Government Officials from Indonesia-BAPPENAS and Nanyang Technological University Singapore, Singapore (2021). Asia Leader Connect 2016, Temasek Foundation-Singapore, 2016 / Asia Leader Connect 2016, Temasek Foundation-Singapore (2016). English as A Second Language, University of Kentucky -USA, 1990 / English as a Second Language, University of Kentucky-USA (1990). Lead Auditor Course/Environmental Management System, TQS International Selangor- Kuala Lumpur, 2008 / Lead Auditor Course/Environmental Management System, TQS International Selangor-Kuala Lumpur (2008). Good Corporate Governance Course, SIDA/ Gothenburg-Swednia, 2004 / Good Corporate Governance Course, SIDA/Gothenburg-Sweden (2004).
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi dari Universitas Airlangga (1999) / Doctoral Degree in Economics Study Program from Universitas Airlangga (1999).
- Master bidang Manajemen dari University of Kentucky (1992) / Master's Degree in Management from University of Kentucky (1992)
- Sarjana bidang Manajemendari Universitas Sriwijaya (1987) / Bachelor's Degree in Management from Universitas Sriwijaya (1987).

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2021-sekarang) / Commissioner of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2021-present)
- Komisaris PT Jamkrindo (2017-2021) / Commissioner of PT Jamkrindo (2017-2021)
- Koordinator Kopertis Wilayah II Sumbagsel-Kemendikbud RI (2008-2016) / Coordinator of Kopertis Region II Sumbagsel-Kemendikbud RI (2008-2016).
- Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Sriwijaya (2000-2008) / Head of the Master of Management Study Program, Universitas Sriwijaya (2000-2008).

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Profile



CHAIRUL ANWAR
Komisaris
Commissioner

Periode Menjabat / Term of Office	2021-2026 (Periode Pertama) / 2021-2026 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Jakarta, 5 Mei 1961 / Jakarta, May 5, 1961
Usia / Age	61 tahun / 61 years old
Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perseroan No. SK-64/MBU/03/2021 tanggal 3 Maret 2021 / Appointed for the first time as Commissioner of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on the Decree of the Minister of SOEs the Company's GMS No. SK-64/MBU/03/2021 dated March 3, 2021.

Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko KAI (2021-2023) / Member of Risk Management Monitoring Committee of KAI (2021-2023)
Sertifikasi / Certification	Belum memiliki sertifikasi / None
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- Lemhannas RI (2013) / Lemhannas RI (2013)
- Sespatri Polri (2009) / Sespatri Polri (2009)
- Sespimpol (2001) / Sespimpol (2001)
- PTIK (1995) / PTIK (1995)
- Akpol (1986) / Police Academy (1986)

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2021-sekarang). / Commissioner at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2021-present).
- Komisaris PT Angkasa Pura Solusi (2020-2021) / Commissioner at PT Angkasa Pura Solusi (2020-2021)
- Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (2019) / Chief Executive of the Task Force for Handling Overseas Refugees (2019).
- Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa (2013-2016) / Assistant Deputy for Coordination of Handling of Transnational Crimes and Extraordinary Crimes (2013-2016).
- Penyidik Utama Tk. I DIT III (2010) / DIT III Level I Principal Investigator (2010).
- Analis Kebijakan Dittipidum (2013) / Dittipidum Policy Analyst (2013).
- Penyidik Utama Tk. I Rowassidik (2011) / Rowassidik Level I Principal Investigator (2011).

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Profile



SRI PADUKA MANGKOENAGORO X*
Komisaris
Commissioner

Periode Menjabat / Term of Office	2022-2027 (Periode Pertama) / 2022-2027 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Surakarta, 29 Maret 1997 / Surakarta, March 29, 1997
Usia / Age	25 tahun / 25 years old
Dasar Pangkat / Basis of Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perseroan No. SK-174/MBU/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 / Appointed for the first time as Commissioner of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on the Decree of the Minister of SOEas the Company's GMS No. SK-174/MBU/08/2022 dated August 15, 2022

Rangkap Jabatan / Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Penasehat KADIN Kota Surakarta (Januari 2023-sekarang) / Surakarta City Chamber of Commerce Advisory Council (January 2023-present) Pengageng Puro Mangkunegaran, Surakarta (2022-sekarang) / Pengageng Puro Mangkunegaran, Surakarta (2022-present) Dewan Pembina Indonesia Wellness Institute (Oktober 2022-sekarang) / Board of Trustees of Indonesia Wellness Institute (October 2022-present) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Kereta Api Indonesia (Persero)(2021-sekarang) / Nomination and Remuneration Committee Member of PT Kereta Api Indonesia (Persero)(2021-present)
Sertifikasi / Certification	<ul style="list-style-type: none"> Onboarding Commissioner of State-Owned Enterprise Program - Nov 2022 Associate of the Chartered Institute of Arbitrators 2017 - present (Passed course and examination to obtain certification as associate) Pendidikan Khusus Profesi Advokat - August 2019 (Passed course and eligible for examination) / Special Education for Advocacy Profession - August 2019 (Passed course and eligible for examination)
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- Sarjana Hukum, Universitas Indonesia (2019) / Bachelor's Degree in Law from Universitas Indonesia (2019)

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero)(2022-sekarang) / Commissioner of PT Kereta Api Indonesia (Persero)(2022 - present)
- Associate, Hendra Soenardi Law Firm (Oktober 2019 - Januari 2022) / Associate, Hendra Soenardi Law Firm (October 2019 - January 2022)
- Trainee Associate, Hendra Soenardi Law Firm (Mei-Oktober 2019) / Trainee Associate, Hendra Soenardi Law Firm (May-October 2019)
- Sekolah Cita Buana, Photography Teacher (2018-2019)
- Harika Event, Vice-Head of Media and Publication (2017-2018)

*) Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada 15 Agustus-31 Desember 2022 / Served as Commissioner from August 15 - December 31, 2022

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Profile



MOHAMAD RISAL WASAL*
Komisaris
Commissioner

Periode Menjabat / Term of Office	2022-2027 (Periode Pertama) / 2022-2027 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Jakarta, 8 Juni 1967 / Jakarta, June 8, 1967
Usia / Age	55 tahun / 55 years old

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perseroan No. SK-207/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022 / Appointed for the first time as Commissioner of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on the Decree of the Minister of SOEas the Company's GMS No. SK-207/MBU/09/2022 dated September 20, 2022
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan (2022- Sekarang) / Director General of Railways, Ministry of Transportation (2022-Present) Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2022-Sekarang) / Member of the Risk Management Monitoring Committee of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2022-Present)
Sertifikasi / Certification	Onboarding Commissioner of State-Owned Enterprise Program (November 2022)
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- Pascasarjana (S2), Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Jakarta (2000) / Postgraduate Degree from Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Jakarta (2000)
- Diploma (D4), Sekolah Tinggi Transportasi Darat (1997) / Diploma (D4) degree from Sekolah Tinggi Transportasi Darat (1997)

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Kementerian Perhubungan (2021-sekarang) / Director of Railway Transportation and Traffic, Ministry of Transportation (2021-present)
- Direktur Sarana Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan (2020-2021) / Director of Road Transportation Facilities, Ministry of Transportation (2020-2021)
- Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan (2019-2020) / Director of Road Transportation Infrastructure, Ministry of Transportation (2019-2020)
- Direktur Pembinaan Keselamatan Kementerian Perhubungan (2018-2019) / Director of Safety Development, Ministry of Transportation (2018-2019)

*) Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada 20 September-31 Desember 2022 / Served as Commissioner from September 20 - December 31, 2022

PROFIL DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners Profile



JOHAN SIRAIT*
Komisaris
Commissioner

Periode Menjabat / Term of Office	2017 - 2022 (Periode Pertama) / 2017-2022 (First Period)
Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir / Place, Date of Birth	Jakarta, 14 April 1976 / Jakarta, April 14, 1976
Usia / Age	46 tahun / 46 years old

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perseroan No. SK-173/MBU/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 / Appointed for the first time as Commissioner of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on the Decree of the Minister of SOE as the Company's GMS No. SK-173/MBU/08/2022 dated August 15, 2022
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Audit PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2022-Sekarang) / Member of Audit Committee of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2022 - Present) • <i>Commissioner</i> PT Menara Medika Pratama (2009-Sekarang) / Commissioner of PT Menara Medika Pratama (2009 - Present)
Sertifikasi / Certification	<i>Onboarding Commissioner of State-Owned Enterprise Program (November 2022)</i>
Kepemilikan Saham KAI / Ownership of KAI Shares	Tidak memiliki / None
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. / No affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Majority and Controlling Shareholders.

Riwayat Pendidikan / Education

- Sarjana Hukum, Universitas Atma Jaya (1996) / Bachelor's Degree in Laws from Universitas Atma Jaya (1996)

Riwayat Pekerjaan / Career History

- Co-Founder & Commissioner PT Menara Medika Pratama (2009-sekarang) / Co-Founder & Commissioner at PT Menara Medika Pratama (2009-present)

*) Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada 15 Agustus-31 Desember 2022 / Served as Commissioner from August 15 - December 31, 2022

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Affiliation of the Board of Commissioners

KAI telah memastikan bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, baik berupa hubungan keuangan maupun keluarga, dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, ataupun pemegang saham dan pengendali Perseroan. Selain itu, anggota Dewan Komisaris juga dipastikan tidak memiliki hubungan kepengurusan dalam bentuk apa pun yang dapat mengganggu independensi dan/atau berpotensi menghadirkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

KAI menjamin bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris dapat senantiasa bertindak independen dan terbebas dari intervensi. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menjamin terjaganya independensi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai organ pengawas dalam tata kelola Perseroan.

KAI has ensured that each member of the Board of Commissioners has no affiliation, either financial or familial, with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or shareholders and controllers of the Company. In addition, members of the Board of Commissioners are also ensured that they do not have a managerial relation of any kind that could interfere with independence and/or have the potential to present a conflict of interest in carrying out their respective duties and responsibilities.

KAI ensures that all members of the Board of Commissioners can always act independently and are free from interference. This is carried out in order to ensure the independence of the Board of Commissioners is maintained in carrying out its duties and responsibilities as a supervisory organ in the management of the Company.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

AFFILIATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Nama / Name	Jabatan/ Position	Hubungan Keuangan Dengan / Financial Relation with						Hubungan Keluarga Dengan / Familial Relation with						Hubungan Kepengurusan / Managerial Relation	
		Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Direksi / Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali / Controlling Shareholders		Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Direksi / Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali / Controlling Shareholders			
		Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Said Aqil Siroj	Komisaris Utama/ Komisaris Independen / President Commissioner/ Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Rochadi	Komisaris Independen/ Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Riza Primadi	Komisaris Independen/ Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Endang Tirtana	Komisaris Independen/ Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Cris Kuntadi*	Komisaris / Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Freddy Harris*	Komisaris / Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Diah Natalisa	Komisaris / Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Chairul Anwar	Komisaris / Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sri Paduka Mangkoenagoro X	Komisaris / Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Mohamad Risal Wasal	Komisaris / Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

*)Sudah tidak menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada 31 Desember 2022

*) No longer serving as Commissioner since December 31, 2022

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Change in Board of Commissioners Composition and the Reasons

Pada tahun 2022, komposisi Dewan Komisaris Perseroan mengalami 3 (tiga) kali perubahan yang dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perseroan No. SK-173/MBU/08/2022 dan No. SK-174/MBU/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 serta Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perseroan No. SK-240/MBU/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022, dengan alasan penataan susunan anggota Dewan Komisaris. Atas perubahan tersebut, komposisi Dewan Komisaris pada 31 Desember 2022 terdiri atas 9 (sembilan) anggota, yang seluruhnya telah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) oleh Kementerian BUMN.

There were 3 (three) changes in the Board of Commissioners composition in 2022 that were made based on the Decree of the Minister of SOE as the Company's GMS No. SK-173/MBU/08/2022 and No. SK-174/MBU/08/2022 dated August 15, 2022 and Decree of the Minister of SOE as the Company's GMS No. SK-240/MBU/10/2022 dated October 26, 2022, due to the organization of composition of the Board of Commissioners. Due to this change, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2022 consisted of 9 (nine) members, all of whom have passed the Fit and Proper Test (UKK) by the Ministry of SOE.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2022

CHANGE IN THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION IN 2022

	1 Januari- 15 Agustus 2022 / January 1 - August 15, 2022	15 Agustus 2022 / August 15, 2022	15 Agustus-20 September 2022 / August 15 - September 20, 2022	20 September-31 Desember 2022 / September 20 - December 31, 2022
Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN No. SK-64/ MBU/03/2021 / Decree of the Minister of SOE No. SK-64/ MBU/03/2021	Keputusan Menteri BUMN No. SK-173/MBU/08/2022 / Decree of the Ministry of SOE No. SK-173/ MBU/08/2022	Keputusan Menteri BUMN No. SK-174/MBU/08/2022 / Decree of the Minister of SOE No. SK-174/ MBU/08/2022	Keputusan Menteri BUMN No. SK-207/MBU/09/2022 / Decree of the Minister of SOE No. SK-207/ MBU/09/2022
Komisaris Utama dan Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	Said Aqil Siroj	Said Aqil Siroj	Said Aqil Siroj	Said Aqil Siroj
Komisaris Independen / Independent Commissioner	Rochadi	Rochadi	Rochadi	Rochadi
Komisaris Independen / Independent Commissioner	Riza Primadi	Riza Primadi	Riza Primadi	Riza Primadi
Komisaris Independen / Independent Commissioner	Endang Tirtana	Endang Tirtana	Endang Tirtana	Endang Tirtana
Komisaris / Commissioner	Freddy Harris	Freddy Harris	Sri Paduka Mangkoenagoro X	Sri Paduka Mangkoenagoro X
Komisaris / Commissioner	Cris Kuntadi	Johan Bakti Porsea Sirait	Johan Bakti Porsea Sirait	Johan Bakti Porsea Sirait
Komisaris / Commissioner	Diah Natalisa	Diah Natalisa	Diah Natalisa	Diah Natalisa
Komisaris / Commissioner	Chairul Anwar	Chairul Anwar	Chairul Anwar	Chairul Anwar
Komisaris / Commissioner	-	-	-	Mohamad Risal Wasal

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU DIREKSI YANG TERJADI SETELAH TAHUN BUKU BERAKHIR

Changes in the Composition of the Board of Commissioners and/or Board of Directors after the End of Financial Year

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Sejak 31 Desember 2022 hingga tanggal penyampaian Laporan Tahunan, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris KAI.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada 15 Februari 2023, terdapat perubahan komposisi Direksi KAI dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Eko Purwanto telah diangkat sebagai Direktur Utama PT Industri Kereta Api (Persero), sehingga jabatan yang bersangkutan sebagai Direktur Pengelolaan Sarana di PT Kereta Api Indonesia (Persero) berakhir sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (30), ayat (31), dan ayat (34) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 65 tanggal 09 Agustus 2008 Jo. Pasal 17 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER - 11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-7/MBU/09/2022.

Atas perubahan tersebut, komposisi Direksi KAI per 15 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

Komposisi Direksi KAI per 15 Februari 2023

Jabatan / Position	Nama Pejabat / Executive's Name
Direktur Utama / President Director	Didiek Hartantyo
Direktur Niaga / Managing Director of Commerce	Hadis Surya Palapa
Direktur Operasi / Managing Director of Operation	Awan Hermawan Purwadinata
Direktur Pengelolaan Prasarana / Managing Director of Infrastructure	Heru Kuswanto
Direktur Pengelolaan Sarana / Managing Director of Rolling Stock	-
Direktur Keselamatan dan Keamanan / Managing Director of Safety and Security	Sandry Pasambuna
Direktur SDM dan Umum / Managing Director of Human Capital and General Affairs	Suparno
Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha / Managing Director of Strategic Planning and Business Development	John Robertho
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Managing Director of Finance and Risk Management	Salusra Wijaya

CHANGE IN THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

Since December 31, 2022 until the date of submission of the Annual Report, there has been no change in the composition of KAI's Board of Commissioners.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

On February 15, 2023, there was a change in the composition of the KAI Board of Directors with the following explanation:

1. That Mr. Eko Purwanto has been appointed as President Director of PT Industri Kereta Api (Persero), so that his position as Director of Facilities Management at PT Kereta Api Indonesia (Persero) ended in accordance with the provisions of Article 10 paragraph (30), paragraph (31) and paragraph (34). The Company's Articles of Association as stated in Deed Number 65 dated August 9, 2008 Jo. Article 17 paragraph (4), paragraph (5), and paragraph (7) Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER - 11/MBU/07/2021 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises as has been amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-7/MBU/09/2022.

Based on such change, the KAI Board of Directors composition on February 15, 2023 is as follows:

KAI Board of Directors Composition as of February 15, 2023

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Employee Profile and Competence Development

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam satuan orang

Total Employees by Gender

in person

Jenis Kelamin / Gender	2022	2021
Pria / Male	25.895	25.450
Wanita / Female	1.470	1.447
Jumlah / Total	27.365	26.897

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

Dalam satuan orang

Total Employees by Position

in person

Level Jabatan / Position	2022	2021
Executive Vice President	32	33
Vice President/General Manager	131	129
Senior Manager	52	47
Manager	588	580
Junior Manager	873	856
Assistant Manager	1.096	1.103
Sr. Supervisor	859	862
Supervisor	1.162	1.171
Junior Supervisor	1.039	1.035
Pelaksana / Officer	20.741	21.074
Calon Pekerja / Prospective Employee	784	0
CDT	2	3
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Staf-PKWT) / Fixed Time Employment Agreement (Staff-PKWT)	6	4
Jumlah / Total	27.365	26.897

Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

Dalam satuan orang

Total Employees by Age Range

in person

Jenis Kelamin / Gender	2022	2021
< 30 tahun / <30 years old	7.624	27.665
31-40 tahun / 31-40 years old	11.054	9.989
41-50 tahun / 41-50 years old	6.225	6.424
51-55 > tahun / 51-55> years old	2.462	2.485
Jumlah / Total	27.365	26.897

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Employee Profile and Competence Development

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dalam satuan orang

Total Employees by Education

in person

Tingkat Pendidikan / Education	2022	2021
Golongan I / Group I	367	442
SLTP / Junior High School	576	680
SLTA / Senior High School	23.532	23.065
Diploma (D3) / Associate Degree	1.000	815
Sarjana / Bachelor's Degree	1.824	1.834
Pascasarjana (S2) / Master's Degree	60	61
Pascasarjana (S3) / Doctoral Degree	-	-
Jumlah / Total	27.365	26.897

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Ketenagakerjaan

Dalam satuan orang

Total Employees by Employment Status

in person

Status Ketenagakerjaan / Employment Status	2022	2021
Eks-PNS / Ex Civil Servant	194	301
Eks-Perum / Ex Perum	9.835	10.263
Persero	17.330	16.329
PKWT	6	-
Jumlah / Total	27.365	26.897

Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

Dalam satuan orang

Total Employment by Years of Service

in person

Masa Kerja / Years of Service	2022	2021
<10 tahun / <10 years	10.358	10.187
10 tahun / 10 years	10.073	10.621
15 tahun / 15 years	2.078	758
20 tahun / 20 years	892	1.917
25 tahun / 25 years	3.512	2.807
30 tahun / 30 years	422	598
>35 tahun / >35 years	24	9
Jumlah / Total	27.365	26.897

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Employee Profile and Competence Development

Jumlah Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja

Dalam satuan orang

Total Employees by Operational Area

in person

Wilayan Kerja / Operational Area	2022	2021
Kantor Pusat / Head Office	1.866	1.932
DAOP I Jakarta	3.044	3.063
DAOP II Bandung	1.887	1.849
DAOP III Cirebon	1.334	1.344
DAOP IV Semarang	1.811	1.842
DAOP V Purwokerto	1.788	1.957
DAOP VI Yogyakarta	1.939	1.957
DAOP VII Madiun	1.265	1.285
DAOP VIII Surabaya	2.381	2.420
DAOP IX Jember	984	1.014
DIVRE I Sumatera Utara	1.411	1.412
SUBDIVRE I.1 Aceh	17	17
DIVRE II Sumatera Barat	541	564
DIVRE III Palembang	2.880	2.570
DIVRE IV Tanjungkarang	2.080	1.934
Balai Yasa Manggarai	322	335
Balai Yasa Tegal	255	260
Balai Yasa Yogyakarta	377	386
Balai Yasa Surabaya Gubeng	265	275
Balai Yasa Lahat	335	327
Balai Yasa Pulubrayan	95	103
LRT Jabodebek	482	199
Jumlah / Total	27.365	26.897

Jumlah Pegawai Berdasarkan Direktorat

Dalam satuan orang

Total Employees by Directorate

in person

Direktorat / Directorate	2022	2021
Direktorat Utama / Main Directorate	675	675
Direktorat Niaga / Directorate of Commerce	1.483	1.498
Direktorat Operasi / Directorate of Operation	9.429	9.156
Direktorat Pengelolaan Prasarana / Directorate of Infrastructure	5.932	5.659
Direktorat Pengelolaan Sarana / Directorate of Rolling Stocks	5.817	5.689

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Employee Profile and Competence Development

Direktorat / Directorate	2022	2021
Direktorat Keselamatan dan Keamanan / Directorate of Safety and Security	1.616	1.696
Direktorat SDM dan Umum / Directorate of HC and General Affairs	987	1.025
Direktorat Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha / Directorate of Strategic Planning and Business Development	345	362
Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko / Directorate of Finance and Risk Management	1.075	1.137
Jumlah / Total	27.365	26.897

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Secara periodik, KAI memiliki dan menjalankan program pengembangan kompetensi bagi pegawai sebagai upaya berkesinambungan guna mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung pengembangan daya saing Perseroan di tengah dinamika industri dan pasar. Program pengembangan kompetensi KAI pada dasarnya direncanakan dan dijalankan sesuai rencana jangka panjang untuk tahun 2000-2024 serta visi dan misi Perseroan. Lebih dari itu, program pengembangan kompetensi juga dijalankan sebagai upaya berkesinambungan dalam mengakomodasi kapasitas baru Perseroan, seiring pengembangan organisasi dan pengembangan usaha yang terus dilakukan.

KAI menjamin bahwa program pengembangan kompetensi diberikan secara terbuka bagi pegawai, tanpa praktik diskriminasi dalam bentuk apa pun. Tiap-tiap pegawai KAI telah mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengikuti program pengembangan kompetensi, khususnya pada penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2022.

Learning Development System and Program

Selama tahun 2022, KAI melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai dengan mengacu pada *Learning Development System and Program* yang telah disesuaikan dengan kompetensi baru KAI. Uraian mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelatihan / Training Type	Tujuan Pelatihan / Training Purpose
1	CORE	Program pengembangan utama untuk membentuk karakter seluruh insan KAI yang Kolaboratif, Inovatif, dan Proaktif / The main development program is to shape the character of all KAI personnel who are Collaborative, Innovative and Proactive
2	BASIC	Program pengembangan untuk membekali pekerja terkait dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seluruh insan KAI (Integritas, Adiguna Layanan, Mengutamakan Keselamatan) / Development program to equip workers related to basic competencies that must be owned by all KAI personnel (Integrity, Service Excellence, Prioritizing Safety)

EMPLOYEE COMPETENCE DEVELOPMENT

Competence Development Policy

Periodically, KAI has and runs competency development programs for employees as a continuous effort to prepare Human Resources (HR) to support the development of the Company's competitiveness amid dynamics in industry and market. KAI's competency development program is basically planned and executed according to the long-term plan for 2000-2024 as well as the Company's vision and mission. Moreover, competency development programs are also carried out as a continuous effort to accommodate the Company's new capacity, in line with ongoing organizational development and business development.

KAI ensures that competency development programs are provided openly to employees, without discriminatory practices of any kind. Each KAI employee has had equal opportunities to take part in competency development programs, especially in the implementation of activities to be carried out for 2022.

Learning Development System and Program

During 2022, KAI carried out employee competency development with reference to the Learning Development System and Program which has been adapted to KAI's new competencies. The description regarding this matter is as follows:

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Employee Profile and Competence Development

No.	Jenis Pelatihan / Training Type	Tujuan Pelatihan / Training Purpose
3	TECHNICAL	Program pengembangan untuk meningkatkan keahlian melalui pemenuhan kompetensi teknik Railway dan ekosistemnya / Development program to increase expertise through fulfilling Railway technical competence and its ecosystem
4	MANAGEMENT	Program pengembangan untuk memaksimalkan fungsi jabatan melalui pemenuhan kompetensi yang mendukung fungsi pekerjaannya atau jabatan / Development program to maximize the function of the position through the fulfillment of competencies that support the function of the job or position
5	BUSINESS	Program pengembangan untuk mendukung bisnis perusahaan dalam mewujudkan visi misi perusahaan melalui pemenuhan kompetensi teknik terkait bisnis / Development program to support the company's business in realizing the company's vision and mission by fulfilling business-related technical competencies
6	DIGITAL	Program pengembangan dalam menghadapi tantangan di era digitalisasi melalui pemenuhan kompetensi digitalisasi / Development program in facing challenges in the digitalization era by fulfilling digitalization competencies
7	LEADERSHIP	Program pengembangan untuk menyiapkan pimpinan perusahaan yang bisa bersaing dengan BUMN lain melalui pemenuhan kompetensi leadership bagi para pimpinan / Development program to prepare company leaders who can compete with other SOEs by fulfilling leadership competencies for leaders

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan

Untuk tahun 2022, KAI telah melaksanakan sejumlah kegiatan pengembangan kompetensi, dengan perincian pelaksanaan berdasarkan level jabatan pegawai sebagai berikut:

Competency Development Based on Position Level

KAI has carried out a number of competency development activities in 2022 with details of implementation based on employee position levels as follows:

No	Level Jabatan / Position Level	Jumlah Pegawai / Total Employees	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan / Total Employees participating in the training							Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan / Percentage of participation for each position level	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan / Percentage of participation for each training type					
			Basic	Technical	Management	Business	Digital	Leadership	Jumlah		Basic	Technical	Management	Business	Digital	Leadership
1.	Pelaksana / Officer	21514	113	2894	382	0	0	0	3389	15.75	0.52	13.45	1.77	0	0	0
2.	Junior Supervisor - Senior Supervisor	3319	42	275	354	0	0	0	671	20.21	1.26	8.28	10.66	0	0	0
3.	Asisten Manager - Junior Manager	2131	120	95	398	0	5	0	618	29.00	5.63	4.45	18.67	0	0.23	0
4.	Manager - Senior Manager	761	16	6	23	18	0	0	63	8.27	2.10	0.78	3.02	2.36	0	0
5.	General Manager - Vice President	188	0	2	4	15	0	20	41	21.80	0	1.06	2.12	7.97	0	10.63
6.	Executive Vice President - Corporate Deputy Director	45	0	0	3	4	0	19	26	57.78	0	0	6.67	8.89	0	42.22

Keterangan: Pegawai yang telah mengikuti pelatihan di tahun 2022 merupakan pekerja yang diprogramkan untuk mengikuti pelatihan pada tahun 2022. Terdapat sejumlah pegawai lainnya yang sudah mendapatkan pelatihan yang sama pada tahun sebelumnya, di samping terdapat sebagian pegawai yang akan diprogramkan untuk mengikuti pelatihan di tahun mendatang. / **Note:** Employees who have attended training in 2022 are employees who are programmed to attend training in 2022. There are a number of other employees who have received the same training in the previous year, in addition there are employees who will be programmed to attend training in the coming year.

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Employee Profile and Competence Development

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Perseroan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengembangan kompetensi secara berkala, sebagai upaya terus-menerus dalam mengembangkan kualitas dan efektivitas program. Evaluasi pelaksanaan program dilaksanakan terhadap peserta, dengan penilaian yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu kepuasan *trainer*, kepuasan program/materi pelatihan, serta kepuasan fasilitas penilaian.

Perincian hasil evaluasi yang telah dilaksanakan untuk tahun 2022 dapat dilihat melalui sejumlah tabel berikut:

1. Kepuasan *Trainer*

No.	Nama BPL / BPL Name	Kepuasan Terhadap <i>Trainer</i> / Satisfaction with <i>Trainer</i>	
		2022	2021
1	Balai Pelatihan Teknik Traksi / Traction Engineering Training Center	3,54	3,46
2	Balai Pelatihan Teknik Perkeretaapian / Railway Engineering Training Center	3,60	3,52
3	Balai Pelatihan Operasional & Pemasaran / Operational & Marketing Training Center	3,58	3,49
4	Balai Pelatihan Sintelis / Syntelist Training Center	3,68	3,6
5	Balai Pelatihan Sriwijaya / Sriwijaya Training Center	3,64	3,41
6	MTNT (Pelatihan <i>Nonrailways</i>) / MTNT (Nonrailways Training)	3,41	3,43
Rata-rata / Average		3,58	3,49

Evaluation of Competency Development Implementation

The Company regularly evaluates the implementation of the competency development program as a continuous effort to improve the quality and effectiveness of the program. Evaluation of program is carried out on participants with assessments divided into 3 (three) categories, namely *trainer* satisfaction, program/training material satisfaction, and assessment facility satisfaction.

Details of the evaluation results that have been carried out for 2022 can be seen in the following table:

1. *Trainer* Satisfaction

2. Kepuasan Program/Materi Pelatihan

No.	Nama BPL / BPL Name	Kepuasan Terhadap Program/Materi Pelatihan / Satisfaction with Training Material/Program	
		2022	2021
1	Balai Pelatihan Teknik Traksi / Traction Engineering Training Center	3,47	3,39
2	Balai Pelatihan Teknik Perkeretaapian / Railway Engineering Training Center	3,56	3,47
3	Balai Pelatihan Operasional & Pemasaran / Operational & Marketing Training Center	3,48	3,38
4	Balai Pelatihan Sintelis / Syntelist Training Center	3,60	3,5
5	Balai Pelatihan Sriwijaya / Sriwijaya Training Center	3,64	3,43
6	MTNT (Pelatihan <i>Nonrailways</i>) / MTNT (Nonrailways Training)	3,34	3,3
Rata-rata / Average		3,52	3,33

2. Program Satisfaction/Training Materials

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Employee Profile and Competence Development

3. Kepuasan Fasilitas Pelatihan

3. Training Facility Satisfaction

No.	Nama BPL / BPL Name	Kepuasan Fasilitas Pelatihan / Training Facility Satisfaction	
		2022	2021
1	Balai Pelatihan Teknik Traksi / Traction Engineering Training Center	3,45	3,37
2	Balai Pelatihan Teknik Perkeretaapian / Railway Engineering Training Center	3,51	3,41
3	Balai Pelatihan Operasional & Pemasaran / Operational & Marketing Training Center	3,46	3,29
4	Balai Pelatihan Sintelis / Syntelist Training Center	3,54	3,47
5	Balai Pelatihan Sriwijaya / Sriwijaya Training Center	3,63	3,41
6	MTNT (Pelatihan Nonrailways) / MTNT (Nonrailways Training)	3,35	3,29
Rata-rata / Average		3,49	3,37

Biaya Pengembangan Kompetensi

Untuk tahun 2022, KAI menganggarkan biaya program pengembangan kompetensi sejumlah Rp34.553.559.000,- atau mencapai 107% dibanding anggaran pada tahun sebelumnya. Dari biaya yang dianggarkan untuk tahun 2022, KAI merealisasikan biaya pengembangan kompetensi sejumlah Rp26.399.080.000,- atau mencapai 117% dibanding realisasi pada tahun sebelumnya, serta memenuhi 76,40% dari biaya yang dianggarkan.

Competence Development Cost

For 2022, KAI budgeted a competency development program cost of Rp34,553,559,000, or reaching 107% compared to the budget in the previous year. Of the budgeted costs for 2022, KAI realized competency development costs of Rp26,399,080,000, - or reached 117% compared to the realization in the previous year, and fulfilled 76.40% of the budgeted costs.

No.	Pos RKA / RKA Post	Program Biaya / Cost Program			Realisasi Biaya / Cost Realization		
		2022	2021	Persentase / Percentage	2022	2021	Persentase / Percentage
1.	Pendidikan / Education	Rp34.553.559.000,-	Rp32.180.439.683,-	107%	Rp 26.399.080.000,-	Rp22.426.285.607,-	117%

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

Saham KAI sepenuhnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, pada 1 Januari 2022 dan 31 Desember 2022, tidak terdapat kepemilikan saham KAI oleh institusi lokal, kepemilikan institusi asing, kepemilikan individu lokal, dan kepemilikan individu asing.

100% of KAI shares are owned by the Republic of Indonesia. Therefore, there was no share ownership of KAI shares by local institutions, foreign institution, local individual ownership, and foreign individual ownership as of January 1 and December 31, 2022.

Komposisi Pemegang Saham KAI Tahun 2022

KAI's Shareholder Composition in 2022

Pemegang Saham / Shareholder	Jumlah Saham (lembar) / Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	
		1 Januari 2022 / January 1, 2022	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Pemerintah Republik Indonesia / Government of the Republic of Indonesia	19.168.743	100%	100%

KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

Hingga 31 Desember 2022, KAI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai komposisi 20 (dua puluh) pemegang saham terbesar untuk disajikan pada bagian ini.

COMPOSITION OF TOP-20 SHAREHOLDERS

As of December 31, 2022, KAI is a State-Owned Enterprise whose shares are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, there is no information regarding the composition of the top 20 (twenty) shareholders.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM 5% ATAU LEBIH

Hingga 31 Desember 2022, KAI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Atas hal tersebut, informasi mengenai komposisi pemegang saham Perseroan dengan persentase 5% atau lebih telah disajikan pada bagian Komposisi Pemegang Saham.

COMPOSITION OF SHAREHOLDER WITH 5% OR MORE SHARES

As of December 31, 2022, KAI is a State-Owned Enterprise whose shares are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. For this reason, information regarding the composition of the Company's shareholders with a percentage of 5% or more has been presented in the Shareholders Composition section.

KOMPOSISI KELOMPOK PEMEGANG SAHAM KURANG DARI 5%

Hingga 31 Desember 2022, KAI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Atas hal tersebut, informasi mengenai komposisi pemegang saham Perseroan dengan persentase kurang dari 5% telah disajikan pada bagian Komposisi Pemegang Saham.

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS GROUP OF LESS THAN 5%

As of December 31, 2022, KAI is a State-Owned Enterprise whose shares are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. For this reason, information regarding the composition of the Company's shareholders with a percentage of less than 5% has been presented in the Shareholders Composition section.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Composition

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM BERDASARKAN JENIS DAN KEWARGANEGARAAN INVESTOR

Hingga 31 Desember 2022, KAI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terperinci mengenai kepemilikan saham Perseroan oleh insitusi ataupun individu baik lokal maupun asing.

KEPEMILIKAN SAHAM OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU DIREKSI

Hingga 31 Desember 2022, KAI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang memiliki saham KAI, baik berupa kepemilikan langsung maupun tidak langsung.

COMPOSITION OF SHARE OWNERSHIP BASED ON INVESTOR TYPE AND NATIONALITY

As of December 31, 2022, KAI is a State-Owned Enterprise whose shares are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, there is no detailed information regarding the ownership of the Company's shares by local or foreign institutions or individuals.

SHARE OWNERSHIP BY MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND/OR BOARD OF DIRECTORS

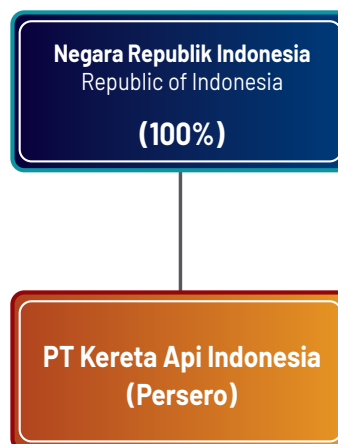
As of December 31, 2022, KAI is a State-Owned Enterprise whose shares are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, there are no members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who own KAI shares, either in the form of direct or indirect ownership.

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Major and Controlling Shareholders

Hingga 31 Desember 2022, saham KAI secara seluruhnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Atas hal tersebut, pemegang saham utama dan pengendali Perseroan adalah Pemerintah Republik Indonesia. Tidak terdapat pemegang saham utama dan pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, serta tidak terdapat pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.

As of December 31, 2022, KAI shares are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. In this regard, the main and controlling shareholder of the Company is the Government of the Republic of Indonesia. There are no major shareholders and indirect controllers, up to individual owners, and there are no shareholders acting on behalf of other shareholders.



DAFTAR ENTITAS ANAK, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN VENTURA BERSAMA

List of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

ENTITAS ANAK

SUBSIDIARIES

Nama / Name	Bidang Usaha / Line of Business	Domisili / Domicile	Alamat / Address	Kepemilikan Saham / Share Ownership		Tahun Pendirian / Year of Establishment	Status Operasi / Operational Status	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Rp-ribu) / Total Assets Before Elimination (in thousands of rupiah)	
				2022	2021			2022	2021
PT Reska Multi Usaha (RMU)/KAI Services	Restoran Kereta Api / Railway Restaurant	Jakarta	Stasiun Mangga Besar, Lantai Dasar, Jalan Karanganyar No. 1, Mangga Besar, Jakarta Pusat 10740.	99,74%	99,74%	2003	Beroperasi / Operating	482.887.390	380.692.101
PT Railink (Railink)/ KAI Bandara	Transportasi Kereta Api Bandara / Airport Railway Transportation	Jakarta	Stasiun Sudirman Baru/ Stasiun BNI City, Lt. 2 Tanah Abang, Jakarta Pusat	60,00%	60,00%	2005	Beroperasi / Operating	564.519.459	1.000.068.687
PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)/ KAI Commuter	Transportasi Kereta Commuter / Commuter Railway Transportation	Jakarta	Stasiun Juanda, Jl. Ir. H. Juanda I - Jakarta Pusat 10120	99,78%	99,78%	2008	Beroperasi / Operating	3.278.464.511	2.304.822.460
PT KA Logistik (KALOG)/KAI Logistik	Distribusi Logistik Berbasis Kereta Api / Railway-based Logistics Distribution	Jakarta	Stasiun Gondangdia, Lantai Dasar, Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 11A Jakarta Pusat 10340.	99,30%	99,30%	2009	Beroperasi / Operating	847.167.021	807.879.730
PT KA Properti Manajemen (KAPM)/ KAI Properti	Pengelolaan Aset Properti Perkeretaapian / Railway Property Asset Management	Jakarta	Stasiun Sawah Besar, Lantai Dasar, Jalan KH. Samanhudi, Jakarta Pusat 10710	99,63%	99,63%	2009	Beroperasi / Operating	905.134.224	908.690.000
PT KA Pariwisata (KAWIS)/ KAI Wisata	Pariwisata Kereta Api / Railway Tourism	Jakarta	Stasiun Gondangdia, Pintu Selatan - Lt. Dasar Jl Srikaya 1, Kelurahan Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat 10340	99,90%	99,90%	2009	Beroperasi / Operating	152.859.992	96.339.586

PERUSAHAAN ASOSIASI

ASSOCIATES

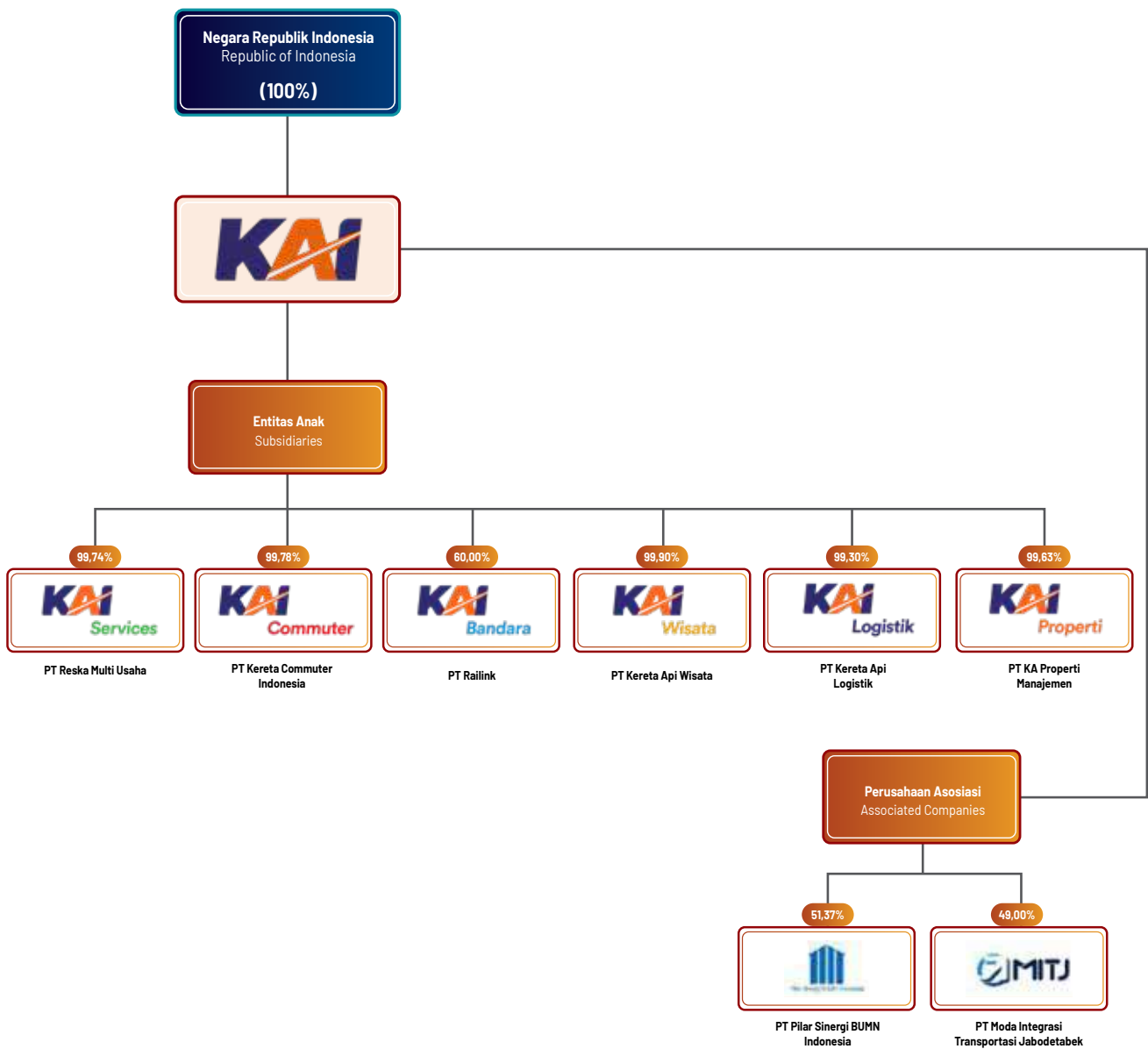
Nama / Name	Bidang Usaha / Line of Business	Domisili / Domicile	Kepemilikan Saham / Share Ownership		Tahun Pendirian / Year of Establishment	Status Operasi / Operational Status	Jumlah Aset (dalam Rp-ribu) / Total Assets (in thousands of rupiah)	
			2022	2021			2022	2021
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Transportasi Kereta Cepat / High-speed Railway Transportation	Jakarta	51,37%	25,00%	2015	Beroperasi / Operating	21.462.201.000	21.539.853.000
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	Mengelola Moda Transportasi di Jakarta - Bogor - Depok - Tangerang - Bekasi / Managing Transportation Mode in Jakarta - Bogor - Depok - Tangerang - Bekasi	Jakarta	49,00%	49,00%	2020	Beroperasi / Operating	81.877.958	59.417.249

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

Company Group Structure

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022, KAI beroperasi dengan struktur grup yang dijelaskan melalui bagan berikut:

For the period ended on December 31, 2022, KAI operated with group structure as explained in chart below:



*) Sampai dengan tahun 2022, KAI tidak memiliki Entitas Induk, Joint Venture dan Special Purpose Vehicle (SPV).

As of 2022, KAI did not have Holding Company, Joint Venture, and Special Purpose Vehicle (SPV).

KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM

Share Listing Chronology

Sampai dengan 31 Desember 2022, KAI tidak mencatatkan saham pada bursa efek mana pun. Dengan demikian, tidak terdapat informasi tentang tindakan korporasi (*corporate action*), harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi, dan nama bursa tempat saham Perseroan dicatatkan.

As of December 31, 2022, KAI did not list shares on any stock exchange. Thus, there is no information regarding corporate actions, the share offering price for each corporate action, the number of listed shares after each corporate action, and the name of the stock exchange where the Company's shares are listed.

Perseroan melakukan pencatatan modal yang ditempatkan dan disetor penuh dengan kronologi sebagai berikut:

The Company records issued and fully paid capital with the following chronology:

Tanggal Penerbitan / Issuance Date	Jumlah Saham/ Lembar / Total Shares/Shares	Nominal/ Lembar (Rp) / Nominal/ Shares (Rp)	Total (Rp) / Total (Rp)	Akta / Deed
2008	2.470.000	1.000.000	2.470.000.000.000	Akta No. 65 tanggal 9 Agustus 2008 dari Notaris Surjadi Jasin, S.H., / Deed No. 65 dated August 9, 2008 from Notary SurjadiJasin, S.H.
2012	3.296.547	1.000.000	3.296.547.000.000	Akta No. 139 tanggal 31 Desember 2012 dari Surjadi Jasin, S.H., / Deed No. 139 dated December 31, 2012 from Notary SurjadiJasin, S.H.
2016	5.296.547	1.000.000	5.296.547.000.000	Akta No. 42 tanggal 23 Mei 2016 dari Surjadi Jasin, S.H., / Deed No. 42 dated May 23, 2016 from Notary SurjadiJasin, S.H.
2017	6.668.743	1.000.000	6.668.743.000.000	Akta No. 1 tanggal 3 April 2017 dari Dr. Darwin Ginting, S.H., M.H., / Deed No. 1 dated April 3, 2017 from Dr. Darwin Ginting, S.H., M.H.,
2018	8.668.743	1.000.000	8.668.743.000.000	Akta No. 34 tanggal 15 Februari 2018 dari Surjadi Jasin, S.H., / Deed No. 34 dated February 15, 2018 from SurjadiJasin, S.H.
2018	12.268.743	1.000.000	12.268.743.000.000	Akta No. 293 tanggal 27 Oktober 2018 dari Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H. / Deed No. 293 dated October 27, 2018 from Notary Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H.
2021	19.168.743	1.000.000	19.168.743.000.000	Akta No. 278 tanggal 31 Desember 2021 dari Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H. / Deed No. 278 dated December 31, 2021 from Notary Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H.
2022	19.168.743	1.000.000	19.168.743.000.000*	Akta No. 122 tanggal 11 Januari 2023 dari Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H. / Deed No. 122 dated January 11, 2023 from Notary Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H.

Keterangan: *Akta atas setoran modal tahun 2022 baru terbit di tahun 2023 sehingga total saham di akhir 2022 tidak ada perubahan / Note: *Deed of paid-up capital in 2022 will only be published in 2023 so there will be no change in the total shares at the end of 2022

KRONOLOGI PENERBITAN OBLIGASI

Bond Listing Chronology

Pada 13 November 2017, Perseroan telah mendapatkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-438/D.04/2017 atas Penawaran perdana penerbitan Obligasi I Kereta Api Indonesia tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000 dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 November 2017.

Pada tanggal 6 Desember 2019, Perseroan telah mendapatkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-189/D.04/2019 atas Penawaran umum penerbitan Obligasi II Kereta Api Indonesia tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000,- dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Desember 2019.

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perseroan telah mendapatkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-148/D.04/2022 atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022, dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2022 sesuai Surat BEI Nomor: S-06451/BEI-PP3/08-2022.

On November 13, 2017, the Company received an effective statement letter from the Financial Services Authority (OJK) No. S-438/D.04/2017 for the Initial Offering of KeretaApiIndonesia Bonds I in 2017 with a principal amount of Rp2,000,000,000 and was listed on the Indonesia Stock Exchange on November 21, 2017.

On December 6, 2019, the Company received an effective statement letter from the Financial Services Authority (OJK) No: S-189/D.04/2019 for the public offering of the 2019 KeretaApi Indonesia Bond II with a principal amount of Rp2,000,000,000 and has been listed on the Indonesia Stock Exchange on December 16, 2019.

On July 29, 2022, the Company received an effective statement letter from the Financial Service Authority (OJK) No: S-189/D.04/2019 for the Sustainable Public Offering of Kereta Api Indonesia Sustainable Bonds I Phase I Year 2022 and has been listed on the Indonesia Stock Exchange on August 3, 2022 pursuant to IDX Letter No: S-06451/BEI-PP3/08-2022.

Kronologi Penerbitan Obligasi Perusahaan

Bond Listing Chronology

No.	Uraian / Description	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik / Electronic Bond Distribution Date	Tenor / Tenor	Mata Uang / Currency	Jumlah Obligasi / Total Bonds	Harga Penawaran / Offering Price	Tanggal Jatuh Tempo / Due Date	Tingkat Suku Bunga / Interest Rate	Status Pembayaran / Payment Status	Peringkat / Rating		Wali Amanat / Trustee
										2022	2021	
1.	Obligasi I Seri A Tahun 2017 / Series A Bond I Year 2017	21 November 2017 / November 21, 2017	5	IDR	1.000.000.000.000,00	100% dari nilai pokok obligasi / 100% of principal value of bonds	21 November 2022 / November 21, 2022	7,75% per tahun / 7.75% per year	Lunas / Fully paid	idAA+	idAA+	PT Bank Mega Tbk
2.	Obligasi I Seri B Tahun 2017 / Series B Bond I Year 2017	21 November 2017 / November 21, 2017	7	IDR	1.000.000.000.000,00	100% dari nilai pokok obligasi / 100% of principal value of bonds	21 November 2024 / November 21, 2024	8,25% per tahun / 8.25% per year	Belum lunas / Not paid off yet	idAA+	idAA+	PT Bank Mega Tbk
3.	Obligasi II Seri A Tahun 2019 / Series A Bond II year 2019	13 Desember 2019 / December 13, 2019	5	IDR	900.000.000.000,00	100% dari nilai pokok obligasi / 100% of principal value of bonds	13 Desember 2024 / December 13, 2024	7,75% per tahun / 7.75% per year	Belum lunas / Not paid off yet	idAA+	idAA+	PT Bank Mega Tbk
4.	Obligasi II Seri B Tahun 2019 / Series B Bond II Year 2019	13 Desember 2019 / December 13, 2019	7	IDR	1.100.000.000.000,00	100% dari nilai pokok obligasi / 100% of principal value of bonds	13 Desember 2026 / December 13, 2026	8,20% per tahun / 8.20% per year	Belum lunas / Not paid off yet	idAA+	idAA+	PT Bank Mega Tbk
5.	Obligasi Berkelanjutan I KAI Tahap I Seri A / Sustainable Bonds I KAI Phase I Series A	5 Agustus 2022 / August 5, 2022	5	IDR	634.000.000.000,00	100% dari nilai pokok obligasi / 100% of principal value of bonds	5 Agustus 2027 / August 5, 2027	7,10% per tahun / 7.10% per year	Belum lunas / Not paid off yet	idAA+	-	PT Bank Mega Tbk
6.	Obligasi Berkelanjutan I KAI Tahap I Seri B / Sustainable Bonds I KAI Phase I Series B	5 Agustus 2022 / August 5, 2022	7	IDR	866.000.000.000,00	100% dari nilai pokok obligasi / 100% of principal value of bonds	5 Agustus 2029 / August 5, 2029	8,00% per tahun / 8.00% per year	Belum lunas / Not paid off yet	idAA+(sy)	-	PT Bank Mega Tbk

KRONOLOGI PENERBITAN SUKUK

Sukuk Issuance Chronology

Pada 29 Juli 2022, Perseroan telah mendapatkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-148/D.04/2022 atas penawaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000,- dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2022 sesuai Surat BEI Nomor: S-06451/BEI.PP3/08-2022 .

On July 29, 2022, the company received an effective statement letter from the Financial Services Authority (OJK) Number: S-148/D.04/2022 for the offer of Kereta Api Indonesia Phase I Year 2022 Sustainable Sukuk Ijarah with a principal amount of Rp2,000,000 .000,- and was listed on the Indonesia Stock Exchange on August 3, 2022 according to IDX Letter Number: S-06451/BEI.PP3/08-2022.

Kronologi Penerbitan Sukuk Perusahaan

Company Sukuk Issuance Chronology

No.	Uraian / Description	Tanggal distribusi / Distribution Date	Tenor / Tenor	Mata Uang / Currency	Jumlah / Total	Harga Penawaran / Offering Price	Tanggal Jatuh Tempo / Due Date	Tingkat Suku Bunga / Interest Rate	Status Pembayaran / Payment Status	Peringkat / Rating		Wali Amanat / Trustee
										2022	2021	
1.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I KAI Tahap I Seri A Tahun 2022 / Sustainable Sukuk Ijarah I KAI Phase I Series A of 2022	5 Agustus 2022 / August 5, 2022	5	IDR	117.350.000.000,00	100% dari jumlah pokok obligasi / 100% of principal value of bonds	5 Agustus 2027 / August 5, 2027	Equivalen 7,10% per tahun / Equivalent of 7.10% per year	Belum lunas / Not paid off yet	idAA+	-	PT Bank Mega Tbk
2.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I KAI Tahap I Seri B Tahun 2022 / Sustainable Sukuk Ijarah I KAI Phase I Series B of 2022	5 Agustus 2022 / August 5, 2022	7	IDR	382.650.000.000,00	100% dari jumlah pokok obligasi / 100% of principal value of bonds	5 Agustus 2029 / August 5, 2029	Equivalen 8,00% per tahun / Equivalent of 8.00% per year	Belum lunas / Not paid off yet	idAA+(sy)	-	PT Bank Mega Tbk

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA

Other Securities Listing Chronology

Selama tahun 2022, KAI tidak melakukan penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya.

KAI did not issue other securities throughout 2022.

INFORMASI PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK (AP) DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

Information on Public Accounting Service (AP) and Public Accounting Firm (KAP)

Nama KAP / KAP Name	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Jaringan Asosiasi / Association Network	RSM Indonesia
Alamat KAP / KAP Address	Gedung Plaza Asia, Lantai 10-11, Jl. Jenderal Sudirman Kav.59 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Nama AP / AP Name	Dedy Sukrisnadi
Periode Penugasan / Assignment Period	2022
Jasa yang Diberikan / Services Rendered	Audit Tahun Buku 2022 / 2022 Fiscal Year Audit
Jasa Non-Audit yang Diberikan / Non-Audit Services Rendered	-
Biaya Audit / Audit Fee	Rp3.614.000.000,00
Biaya Non-Audit / Non-Audit Fee	-

LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN

Supporting Institutions and/or Profession

Wali Amanat Obligasi

Bonds Trustee

Nama / Name	PT Bank Mega Tbk
Alamat / Address	Menara Bank Mega Jl. Kapten Tendean Kav 12-14 A Jakarta 12790

Lembaga Pemeringkat Efek

Securities Rating Agency

Nama / Name	PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Alamat / Address	Equity Power Lt. 30 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190

Pengelola Informasi Perdagangan dan Pencatatan Saham

Share Listing and Trading information Management

Nama / Name	PT Bursa Efek Indonesia
Alamat / Address	Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta - 12190

LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN

Supporting Institutions and/or Profession

Biro Administrasi Efek

Share Registrar

Nama / Name	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Alamat / Address	Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 1 Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia

Konsultan Hukum

Legal Consultant

Nama / Name	Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR)
Alamat / Address	Graha CIMB Niaga, 24th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190

Notaris

Notary

Nama / Name	Fathiah Helmi, S.H.
Alamat / Address	Graha Irama Lt. 6 Suite C Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1 & 2 Kuningan, Jakarta 12950

Tim Ahli Syariah

Sharia Expert Team

Nama / Name	Tim Ahli Syariah / Sharia Expert Team
Alamat / Address	Jakarta



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications



PENGHARGAAN

AWARDS

No.	Nama Penghargaan / Award's Name	Acara / Event	Pemberi Penghargaan / Awarding Body	Tempat dan Tanggal / Place and Date
1	Indonesia Trusted Company	Indonesia Good Corporate Governance Award 2022	SWA Media	Jakarta, 20 Desember 2022 / Jakarta, December 20, 2022
2	Konsumen Pengguna Terbaik / Best User Consumer	Penghargaan BPH MIGAS 2022 / BPH MIGAS 2022 Award	BPH MIGAS	Jakarta, 16 Desember 2022 / Jakarta, December 16, 2022
3	Peringkat 1 Pada Kategori BUMN Badan Publik Informatif / Ranked 1st in the SOE Category Informative Public Agency	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 / 2022 Public Information Disclosure Award	Komisilnformasi Pusat RI / Central Information Commission of Indonesia	Jakarta, 14 Desember 2022 / Jakarta, December 14, 2022
4	Entrepreneurial Marketing Company Award 2022	The 8th Asean Marketing Summit	Philip Kotler center for asean marketing (PK-CAM)	Jakarta, 7 Desember 2022 / Jakarta, December 7, 2022
5	Mindful Company Award 2022	ALIVE Fest 2022	The Golden Space Indonesia dan MarkPlus	Multifucation Hall Plaza Indonesia Jakarta, 2 Desember 2022 / Multifucation Hall Plaza Indonesia Jakarta, December 2, 2022
6	PT KAI (Persero) sebagai The Best Human Capital Team Of The Year (Transportation Industries) / PT KAI (Persero) as The Best Human Capital Team of the Year (Transportation Industries)	Human Capital & Performance Awards 2022	Human Capital & Performance	Jakarta, 30 November 2022 / Jakarta, November 30, 2022
7	Ida Hidayati sebagai The Best Human Capital Future Leader Of The Year (Transportation Industries) / Ida Hidayati as The Best Human Capital Future Leader of the Year (Transportation Industries)	Human Capital & Performance Awards 2022	Human Capital & Performance	Jakarta, 30 November 2022 / Jakarta, November 30, 2022
8	Didiek Hartantyo sebagai The Best Chief Executive Officer Of The Year (Transportation Industries) / Didiek Hartyanto as The Best Chief Executive Officer of the Year (Transportation Industries)	Human Capital & Performance Awards 2022	Human Capital & Performance	Jakarta, 30 November 2022 / Jakarta, November 30, 2022
9	Emas / Gold	SNI Award	Badan Standarisasi Nasional (BSN) / National Standardization Agency (BSN)	Jakarta, 30 November 2022 / Jakarta, November 30, 2022
10	Juara 1 Drumline Battle Challenge Class / 1 st Place in Drumline Battle Challenge Class	Kejuaraan Indonesia Drum Corps Championship 2022 / Indonesia Drum Corps Championship 2022	Indonesia Drum Corps Association	Bandung, 27 November 2022 / Bandung, November 27, 2022
11	Juara 2 Flag ensemble / 2 nd Place of Flag Ensemble	Kejuaraan Indonesia Drum Corps Championship 2022 / Indonesia Drum Corps Championship 2022	Indonesia Drum Corps Association	Bandung, 27 November 2022 / Bandung, November 27, 2022
12	Juara 3 Solo Pit a.n Salma Aliyah / 3 rd Place of Solo Pit on behalf of Salma Aliyah	Kejuaraan Indonesia Drum Corps Championship 2022 / Indonesia Drum Corps Championship 2022	Indonesia Drum Corps Association	Bandung, 27 November 2022 / Bandung, November 27, 2022

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications

No.	Nama Penghargaan / Award's Name	Acara / Event	Pemberi Penghargaan / Awarding Body	Tempat dan Tanggal / Place and Date
13	Juara 3 Solo drumset a.n Mohammad ridzalfakhri / 3 rd Place of Solo Drum Set on behalf of Mohammad Ridzal Fakhri	Kejuaraan Indonesia Drum Corps Championship 2022 / Indonesia Drum Corps Championship 2022	Indonesia Drum Corps Association	Bandung, 27 November 2022 / Bandung, November 27, 2022
14	Best musical performance Challenge Class	Kejuaraan Indonesia Drum Corps Championship 2022 / Indonesia Drum Corps Championship 2022	Indonesia Drum Corps Association	Bandung, 27 November 2022 / Bandung, November 27, 2022
15	Juara 1 Solo Baritone Euphonium Open a.n Ariq Fadhila Azhar / 1 st Place of Solo Baritone Euphonium Open on behalf of Ariq Fadhila Azhar	Asian Music Games 2022	Asian Marching Band Confederation	Bandung, 27 November 2022 / Bandung, November 27, 2022
16	Juara 1 Solo Marimba a.n Putri Nazwa Salsabil / 1 st Place of Solo Marimba on behalf of Putri Nazwa Salsabil	Asian Music Games 2022	Asian Marching Band Confederation	Bandung, 27 November 2022 / Bandung, November 27, 2022
17	Juara 2 Solo Marimba a.n Naila Fitrianti / 2 nd Place of Solo Marimba on behalf of Naila Fitrianti	Asian Music Games 2022	Asian Marching Band Confederation	Bandung, 27 November 2022 / Bandung, November 27, 2022
18	Juara 2 Ensemble Brass Open / 2 nd Place of Ensemble Brass Open	Asian Music Games 2022	Asian Marching Band Confederation	Bandung, 27 November 2022 / Bandung, November 27, 2022
19	Platinum kategori Business Contribution / Platinum for Business Contribution Category	Contact Center Asia Pacific (CC APAC) 2022	The Best Contact Center Indonesia 2022	Jakarta, 25 November 2022 / Jakarta, November 25, 2022
20	Diamond untuk GKM The Crows Daop 5 Purwokerto / Diamond for GKM The Crows Daop 5 Purwokerto	Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXVI di Tahun 2022 / The XXVI National Quality and Productivity Work Gathering (TKMPN) in 2022	Wahana Kendali Mutu (WKM) dan Asosiasi Manajemen Mutu & Produktivitas Indonesia (AMMPI) / The Quality Control Forum (WKM) and the Indonesian Quality & Productivity Management Association (AMMPI)	Lombok, 21-25 November 2022 / Lombok, 21-25 November 2022
21	Diamond untuk SS Febrian Kusuma Wardana Daop 5 Purwokerto / Diamond for SS Febrian Kusuma Wardana Daop 5 Purwokerto	Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXVI di Tahun 2022 / The XXVI National Quality and Productivity Work Gathering (TKMPN) in 2022	Wahana Kendali Mutu (WKM) dan Asosiasi Manajemen Mutu & Produktivitas Indonesia (AMMPI) / The Quality Control Forum (WKM) and the Indonesian Quality & Productivity Management Association (AMMPI)	Lombok, 21-25 November 2022 / Lombok, 21-25 November 2022
22	Diamond untuk PKM WFMS Balai Yasa Surabaya Gubeng / Diamond of PKM WFMS Balai Yasa Surabaya Gubeng	Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXVI di Tahun 2022 / The XXVI National Quality and Productivity Work Gathering (TKMPN) in 2022	Wahana Kendali Mutu (WKM) dan Asosiasi Manajemen Mutu & Produktivitas Indonesia (AMMPI) / The Quality Control Forum (WKM) and the Indonesian Quality & Productivity Management Association (AMMPI)	Lombok, 21-25 November 2022 / Lombok, 21-25 November 2022
23	Platinum untuk SS BOSMAN Balai Yasa Yogyakarta / Platinum for SS BOSMAN Balai Yasa Yogyakarta	Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXVI di Tahun 2022 / The XXVI National Quality and Productivity Work Gathering (TKMPN) in 2022	Wahana Kendali Mutu (WKM) dan Asosiasi Manajemen Mutu & Produktivitas Indonesia (AMMPI) / The Quality Control Forum (WKM) and the Indonesian Quality & Productivity Management Association (AMMPI)	Lombok, 21-25 November 2022 / Lombok, 21-25 November 2022
24	Platinum untuk GKM PEDAS Kantor Pusat / Platinum for GKM PEDAS Head Office	Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXVI di Tahun 2022 / The XXVI National Quality and Productivity Work Gathering (TKMPN) in 2022	Wahana Kendali Mutu (WKM) dan Asosiasi Manajemen Mutu & Produktivitas Indonesia (AMMPI) / The Quality Control Forum (WKM) and the Indonesian Quality & Productivity Management Association (AMMPI)	Lombok, 21-25 November 2022 / Lombok, 21-25 November 2022
25	Platinum untuk PKM SUPER NET IoT Kantor Pusat / Platinum for PKM SUPER NET IoT Head Office	Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXVI di Tahun 2022 / The XXVI National Quality and Productivity Work Gathering (TKMPN) in 2022	Wahana Kendali Mutu (WKM) dan Asosiasi Manajemen Mutu & Produktivitas Indonesia (AMMPI) / The Quality Control Forum (WKM) and the Indonesian Quality & Productivity Management Association (AMMPI)	Lombok, 21-25 November 2022 / Lombok, 21-25 November 2022
26	Platinum untuk GKM Vaksin Blowster Balai Yasa Lahat / Platinum for GKM Vaksin Blowster Balai Yasa Lahat	Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXVI di Tahun 2022 / The XXVI National Quality and Productivity Work Gathering (TKMPN) in 2022	Wahana Kendali Mutu (WKM) dan Asosiasi Manajemen Mutu & Produktivitas Indonesia (AMMPI) / The Quality Control Forum (WKM) and the Indonesian Quality & Productivity Management Association (AMMPI)	Lombok, 21-25 November 2022 / Lombok, 21-25 November 2022

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications

No.	Nama Penghargaan / Award's Name	Acara / Event	Pemberi Penghargaan / Awarding Body	Tempat dan Tanggal / Place and Date
27	Platinum untuk SS WCS SYSTEM Daop 4 Semarang / Platinum for SS WCS SYSTEM Daop 4 Semarang	Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXVI di Tahun 2022 / The XXVI National Quality and Productivity Work Gathering (TKMPN) in 2022	Wahana Kendali Mutu (WKM) dan Asosiasi Manajemen Mutu & Produktivitas Indonesia (AMMPI) / The Quality Control Forum (WKM) and the Indonesian Quality & Productivity Management Association (AMMPI)	Lombok, 21-25 November 2022 / Lombok, 21-25 November 2022
28	Platinum untuk SS SELOTIK STL TNK Divre IV Tanjungkarang / Platinum for SS SELOTIK STL TNK Divre IV Tanjungkarang	Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXVI di Tahun 2022 / The XXVI National Quality and Productivity Work Gathering (TKMPN) in 2022	Wahana Kendali Mutu (WKM) dan Asosiasi Manajemen Mutu & Produktivitas Indonesia (AMMPI) / The Quality Control Forum (WKM) and the Indonesian Quality & Productivity Management Association (AMMPI)	Lombok, 21-25 November 2022 / Lombok, 21-25 November 2022
29	Platinum untuk SS JJ Daop 1 Jakarta / Platinum for SS JJ Daop 1 Jakarta	Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXVI di Tahun 2022 / The XXVI National Quality and Productivity Work Gathering (TKMPN) in 2022	Wahana Kendali Mutu (WKM) dan Asosiasi Manajemen Mutu & Produktivitas Indonesia (AMMPI) / The Quality Control Forum (WKM) and the Indonesian Quality & Productivity Management Association (AMMPI)	Lombok, 21-25 November 2022 / Lombok, 21-25 November 2022
30	Platinum untuk SS KUAH Balai Yasa Manggarai / Platinum for SS KUAH Balai Yasa Manggarai	Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXVI di Tahun 2022 / The XXVI National Quality and Productivity Work Gathering (TKMPN) in 2022	Wahana Kendali Mutu (WKM) dan Asosiasi Manajemen Mutu & Produktivitas Indonesia (AMMPI) / The Quality Control Forum (WKM) and the Indonesian Quality & Productivity Management Association (AMMPI)	Lombok, 21-25 November 2022 / Lombok, 21-25 November 2022
31	Gold untuk SS SBS TOOLS Divre III Palembang / Gold for SS SBS TOOLS Divre III Palembang	Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXVI di Tahun 2022 / The XXVI National Quality and Productivity Work Gathering (TKMPN) in 2022	Wahana Kendali Mutu (WKM) dan Asosiasi Manajemen Mutu & Produktivitas Indonesia (AMMPI) / The Quality Control Forum (WKM) and the Indonesian Quality & Productivity Management Association (AMMPI)	Lombok, 21-25 November 2022 / Lombok, 21-25 November 2022
32	Gold GKM WORKSHOP SINTEL Daop 6 Yogyakarta / Gold for GKM WORKSHOP SINTEL Daop 6 Yogyakarta	Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXVI di Tahun 2022 / The XXVI National Quality and Productivity Work Gathering (TKMPN) in 2022	Wahana Kendali Mutu (WKM) dan Asosiasi Manajemen Mutu & Produktivitas Indonesia (AMMPI) / The Quality Control Forum (WKM) and the Indonesian Quality & Productivity Management Association (AMMPI)	Lombok, 21-25 November 2022 / Lombok, 21-25 November 2022
33	Bronze Winner Kategori Pelayanan Informasi Publik, Sub-Kategori Laporan Pelayanan Informasi Publik. / Bronze Winner in the Public Information Services Category, Reports on Public Information Services Sub-Category.	Anugerah Humas Indonesia 2022 / Indonesian Public Relations Award 2022	Humas Indonesia / Indonesian Public Relation	Malang, 28 Oktober 2022 / Malang, October 28, 2022
34	Bronze Winner Kategori Kanal Digital, Sub-Kategori Website / Bronze Winner in Digital Channel Category, Website Sub-Category	Anugerah Humas Indonesia 2022 / Indonesian Public Relations Award 2022	Humas Indonesia / Indonesian Public Relation	Malang, 28 Oktober 2022 / Malang, October 28, 2022
35	Bronze Winner Kategori Kanal Digital, Sub-Kategori Media Sosial Instagram. / Bronze Winner for Digital Channel Category, Instagram Social Media Sub-Category.	Anugerah Humas Indonesia 2022 / Indonesian Public Relations Award 2022	Humas Indonesia / Indonesian Public Relation	Malang, 28 Oktober 2022 / Malang, October 28, 2022
36	Bronze Winner Kategori Media Internal, Sub-Kategori Video Profile. / Bronze Winner Internal Media Category, Video Profile Sub-Category.	Anugerah Humas Indonesia 2022 / Indonesian Public Relations Award 2022	Humas Indonesia / Indonesian Public Relation	Malang, 28 Oktober 2022 / Malang, October 28, 2022
37	Kategori Public Transportation -Most Popular Brand (Best Brand Awareness) -Best Brand Image / Category Public Transportation -Most Popular Brand (Best Brand Awareness) -Best Brand Image	BUMN Awards 2022	The Economics	Jakarta, 27 Oktober 2022 / Jakarta, October 27, 2022
38	Kategori Public Transportation Best Video Company Profile / Category Public Transportation Best Video Company Profile	BUMN Awards 2022	The Economics	Jakarta, 27 Oktober 2022 / Jakarta, October 27, 2022
39	Penghargaan untuk Kategori Sektor Perhubungan dan Transportasi / Award for the Transportation and Transportation Sector Category	Anugerah Cinta Indonesia 2022 / Indonesian Love Award 2022	Republika	Jakarta, 27 Oktober 2022 / Jakarta, October 27, 2022

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications

No.	Nama Penghargaan / Award's Name	Acara / Event	Pemberi Penghargaan / Awarding Body	Tempat dan Tanggal / Place and Date
40	Pemenang Penghargaan Kategori Pelayanan Prima Madya / Winner of the Prima Madya Service Category Award	Anugerah Penghargaan Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi / Transportation Sector Public Service Unit Excellent Service Award	Kementerian Perhubungan / Ministry of Transportation	Jakarta, 27 Oktober 2022 / Jakarta, October 27, 2022
41	Pemenang Penghargaan Kategori Pelayanan Prima Utama / Winner of the Main Excellence Service Category Award	Anugerah Penghargaan Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi / Transportation Sector Public Service Unit Excellent Service Award	Kementerian Perhubungan / Ministry of Transportation	Jakarta, 26 Oktober 2022 / Jakarta, October 26, 2022
42	Pemenang Penghargaan Kategori Pelayanan Prima Utama / Winner of the Main Excellence Service Category Award	Anugerah Penghargaan Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi / Transportation Sector Public Service Unit Excellent Service Award	Kementerian Perhubungan / Ministry of Transportation	Jakarta, 26 Oktober 2022 / Jakarta, October 26, 2022
43	Pemenang Kategori Pelayanan Prima Pratama / Winner of the Prima Pratama Service Category	Anugerah Penghargaan Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi / Transportation Sector Public Service Unit Excellent Service Award	Kementerian Perhubungan / Ministry of Transportation	Jakarta, 26 Oktober 2022 / Jakarta, October 26, 2022
44	Pemenang Bintang 5 The Best Innovation Award (LRT) / 5 Star Winner of The Best Innovation Award (LRT)	Indonesia Safety Excellence Award (ISEA) 2022	Indonesia Safety Excellence	Bandung, 20 Oktober 2022 / Bandung, October 20, 2022
45	Pemenang Bintang 5 The Best Leadership on Safety Culture (LRT) / 5-Star Winner of The Best Leadership on Safety Culture (LRT)	Indonesia Safety Excellence Award (ISEA) 2022	Indonesia Safety Excellence	Bandung, 20 Oktober 2022 / Bandung, October 20, 2022
46	Pemenang Bintang 5 untuk The Best Safety in Digital (LRT) / 5-Star Winner for The Best Safety in Digital (LRT)	Indonesia Safety Excellence Award (ISEA) 2022	Indonesia Safety Excellence	Bandung, 20 Oktober 2022 / Bandung, October 20, 2022
47	Juara 1 Ensemble Color Guard / 1 st Place of Ensemble Color Guard	Kejuaraan MBA Virtual Week tahun 2022 / MBA Virtual Week Championship 2022	Marching Band Art Competition (YMAC) 2022	Yogyakarta, 7 Oktober 2022 / Yogyakarta, October 7, 2022
48	Juara 1 Ensemble Brass / 1 st Place of Brass Ensemble	Kejuaraan MBA Virtual Week tahun 2022 / MBA Virtual Week Championship 2022	Marching Band Art Competition (YMAC) 2022	Yogyakarta, 7 Oktober 2022 / Yogyakarta, October 7, 2022
49	Juara 1 Solo Battery a.n. Arcel Calaudio Simpati / 1 st Place of Solo Battery on behalf of Arcel Calaudio Simpati	Kejuaraan MBA Virtual Week tahun 2022 / MBA Virtual Week Championship 2022	Marching Band Art Competition (YMAC) 2022	Yogyakarta, 7 Oktober 2022 / Yogyakarta, October 7, 2022
50	Juara 2 Solo Pit a.n Putri Nazwa Salsabila / 2 nd Place of Solo Pit on behalf of Putri Nazwa Salsabila	Kejuaraan MBA Virtual Week tahun 2022 / MBA Virtual Week Championship 2022	Marching Band Art Competition (YMAC) 2022	Yogyakarta, 7 Oktober 2022 / Yogyakarta, October 7, 2022
51	Juara 2 Solo Brass a.n Ariq Fadhilah Azhar / 2 nd Place of Solo Brass on behalf of Ariq Fadhilah Azhar	Kejuaraan MBA Virtual Week tahun 2022 / MBA Virtual Week Championship 2022	Marching Band Art Competition (YMAC) 2022	Yogyakarta, 7 Oktober 2022 / Yogyakarta, October 7, 2022
52	Juara 3 Solo Battery a.n. Hasan Najib Inayatulloh / 3 rd Place of Solo Battery on behalf of Hasan Najib Inayatulloh	Kejuaraan MBA Virtual Week tahun 2022 / MBA Virtual Week Championship 2022	Marching Band Art Competition (YMAC) 2022	Yogyakarta, 7 Oktober 2022 / Yogyakarta, October 7, 2022
53	Juara 3 Solo Pit a.n Naila FiitriantiAgriana Putri / 3 rd Place of Solo Pit on behalf of Naila Fiitrianti Agriana Putri	Kejuaraan MBA Virtual Week tahun 2022 / MBA Virtual Week Championship 2022	Marching Band Art Competition (YMAC) 2022	Yogyakarta, 7 Oktober 2022 / Yogyakarta, October 7, 2022
54	Divre I SU Terima Penghargaan dari MURI / Divre I SU Received an Award from MURI	Divre I SU Sosialisasi Keselamatan di Lintasan Sebidang Kereta Api Serentak 77 Lokasi Terbanyak / Divre I SU Dissemination of Safety on the Same-Rail Tracks Simultaneously in 77 Most Locations	Museum Rekor Dunia Indonesia / Indonesian World Record Museum	Medan, 2 Oktober 2022 / Medan, October 2, 2022
55	Peserta Terkreatif Lomba Berbalas Pantun / The Most Creative Participant of the Pantun Reciprocal Contest	Lomba Berbalas Pantun Tingkat Nasional 2022 Piala Menteri BUMN / National Level Pantun Competition 2022 SOE Minister Cup	Balai Pustaka	Jakarta, 26 September 2022 / Jakarta, September 26, 2022

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications

No.	Nama Penghargaan / Award's Name	Acara / Event	Pemberi Penghargaan / Awarding Body	Tempat dan Tanggal / Place and Date
56	6 Bronze Award Dari Kategori The Best Agent Digital, The Best Agent English, The Best Supervisor, Best of The Best Team Leader, The Best Customer Service dan The Best Team Leader Inbound. / 6 Bronze Awards from the categories of The Best Digital Agent, The Best Agent English, The Best Supervisor, Best of The Best Team Leader, The Best Customer Service and The Best Inbound Team Leader.	The Best Contact Center Indonesia 2022	Asosiasi Praktisi Contact Center ICCA (Indonesia Contact Center Association)	Jakarta, 22 September 2022 / Jakarta, September 22, 2022
57	Peringkat 5 Dalam Kategori Top 10 Winners / 5 th Place in Top 10 Winners Category	The Best Contact Center Indonesia 2022	Asosiasi Praktisi Contact Center ICCA (Indonesia Contact Center Association)	Jakarta, 22 September 2022 / Jakarta, September 22, 2022
58	5 Gold Awards Melalui Kategori The Best Agent Inbound, The Best Leader Inbound, The Best Employee Engagement, The Best People Development, The Best CC Operations / 5 Gold Awards Through The Best Agent Inbound, The Best Leader Inbound, The Best Employee Engagement, The Best People Development, The Best CC Operations	The Best Contact Center Indonesia 2022	Asosiasi Praktisi Contact Center ICCA (Indonesia Contact Center Association)	Jakarta, 22 September 2022 / Jakarta, September 22, 2022
59	3 Silver Award Dengan Kategori The Best Digital Media, Best of The Best Agent Digital, The Best Team Leader Customer Service / 3 Silver Awards in the categories The Best Digital Media, Best of The Best Digital Agent, The Best Team Leader Customer Service	The Best Contact Center Indonesia 2022	Asosiasi Praktisi Contact Center ICCA (Indonesia Contact Center Association)	Jakarta, 22 September 2022 / Jakarta, September 22, 2022
60	3 Platinum Awards dari Kategori The Best Quality Assurance, The Best Business Contribution, The Best Teamwork Scheduling Team / 3 Platinum Awards from The Best Quality Assurance, The Best Business Contribution, The Best Teamwork Scheduling Team categories	The Best Contact Center Indonesia 2022	Asosiasi Praktisi Contact Center ICCA (Indonesia Contact Center Association)	Jakarta, 22 September 2022 / Jakarta, September 22, 2022
61	Perusahaan Dengan Pelayanan Terbaik (Daop 9 Jember) / Company with the Best Service (Daop 9 Jember)	Konsisten Dalam Menjadi Perusahaan Dengan Pelayanan Terbaik Dimasa Pandemi Covid 19 / Consistent in Becoming a Company with the Best Service During the Covid-19 Pandemic	Media Radar	Jember, 14 September 2022 / Jember, September 14, 2022
62	Juara 2 BUMN Logistics Cluster Basket Ball Cup 2022 / 2 nd Place of BUMN Logistics Cluster Basket Ball Cup 2022	BUMN Logistics Cluster Basket Ball Cup 2022	Badan Usaha Milik Negara Cluster Logistics / Logistic Clusters of State-Owned Enterprises	Bandung, 10 September 2022 / Bandung, September 10, 2022
63	Corporate Reputation Award 2022	Indonesian Public Relations Summit 2022 dengan tema "Rebuilding with Reputation" / Indonesian Public Relations Summit 2022 with the theme "Rebuilding with Reputation"	The Economics	Jakarta, 29 Juli 2022 / Jakarta, July 29, 2022
64	Indonesian Most Prominent Public Relations (PR) Persons 2022 (VP Public Relations)	Indonesian Public Relations Summit 2022 dengan tema "Rebuilding with Reputation" / Indonesian Public Relations Summit 2022 with the theme "Rebuilding with Reputation"	The Economics	Jakarta, 29 Juli 2022 / Jakarta, July 29, 2022
65	The Best Leadership Development Focus on Human Capital (D6)	Human Capital on Resilience Excellence Award 2022	First Indonesia Magazine	Jakarta, 29 Juli 2022 / Jakarta, July 29, 2022
66	The Best HR in Crisis Management and Recovery	Human Capital on Resilience Excellence Award 2022	First Indonesia Magazine	Jakarta, 29 Juli 2022 / Jakarta, July 29, 2022
67	The Best Employer Branding	Human Capital on Resilience Excellence Award 2022	First Indonesia Magazine	Jakarta, 29 Juli 2022 / Jakarta, July 29, 2022
68	The Best HR Support on Business Transformation	Human Capital on Resilience Excellence Award 2022	First Indonesia Magazine	Jakarta, 29 Juli 2022 / Jakarta, July 29, 2022
69	KAI Sebagai BUMN Peraih AKHLAK Award 2022 Klaster Jasa Logistik / KAI As an SOE that Won the AKHLAK Award 2022 Logistics Services Cluster	AKHLAK Award 2	Kementerian BUMN / Ministry of SOE	Jakarta, 5 Juli 2022 / Jakarta, July 5, 2022

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications

No.	Nama Penghargaan / Award's Name	Acara / Event	Pemberi Penghargaan / Awarding Body	Tempat dan Tanggal / Place and Date
70	Juara 1 Individual Snare Drum divisi Senior / 1st place Individual Snare Drum Senior division	Langgam Indonesia XXXIV/2022	Unit Kegiatan Mahasiswa Marching Band Universitas Udayana Denpasar, Bali / Marching Band Student Activity Unit at Udayana University, Denpasar, Bali	Bali, 1-3 Juli 2022 / Bali, July 1-3, 2022
71	Juara 1 Individual Snare Drum divisi Open / 1st Place Individual Snare Drum Open division	Langgam Indonesia XXXIV/2022	Unit Kegiatan Mahasiswa Marching Band Universitas Udayana Denpasar, Bali / Marching Band Student Activity Unit at Udayana University, Denpasar, Bali	Online, 1-3 Juli 2022 / Online, July 1-3, 2022
72	Juara 1 Individual Multi Tom Divisi Open / 1st Place Individual Multi Tom Open Division	Langgam Indonesia XXXIV/2022	Unit Kegiatan Mahasiswa Marching Band Universitas Udayana Denpasar, Bali / Marching Band Student Activity Unit at Udayana University, Denpasar, Bali	Online, 1-3 Juli 2022 / Online, July 1-3, 2022
73	Gold Champion in Corporate Social Responsibility Program BUMN / BUMD Non Tbk	Anugerah Bisnis Indonesia Corporate Responsibility Awards tahun 2022 (BISRA)	BISRA 2022	Jakarta, 30 Juni 2022 / Jakarta, June 30, 2022
74	Pencapaian Optimal Dalam Penyelenggaraan Angkutan Mudik Lebaran 2022 / Optimal Achievements in Organizing Eid Mudik Transportation 2022	Penghargaan Penyelenggaraan Angkutan Mudik Aman dan Sehat / Award for Safe and Healthy Homecoming Transportation	Kementerian Perhubungan / Ministry of Transportation	Jakarta, 27 Juni 2022 / Jakarta, June 27, 2022
75	Penghargaan untuk Kategori Perlindungan Konsumen di Masa Pandemi / Award for the Consumer Protection Category during the Pandemic	Editor Choice Award	Harian Pagi Tribun Jawa Barat	Bandung, 23 Mei 2022 / Bandung, May 23, 2022
76	Indonesia Council for Small Business (ICSB) Presidential Award	The 10th Jakarta Marketing Week (JMW)	Indonesia Council for Small Business (ICSB)	Jakarta, 20 Mei 2022 / Jakarta, May 20, 2022
77	The Most Promising Company In Strategic Marketing kategori Silver Perusahaan BUMN / The Most Promising Company In Strategic Marketing for Silver SOE Company category	BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2022	MarkPlus Inc	Jakarta, 18 Mei 2022 / Jakarta, May 18, 2022
78	Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) 2022 Divisi Regional II Sumatera Barat / Zero Accident Award 2022 Regional Division II West Sumatra	Melaksanakan Program K3 Sehingga Mencapai 638.072 Jam Kerja Tanpa Kecelakaan Kerja / Implementing the OHS Program to Achieve 638,072 Work Hours Without Work Accidents	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia / Minister of Manpower of the Republic of Indonesia	Jakarta, 13 Mei 2022 / Jakarta, May 13, 2022
79	BEST CEO In Rail Transportation Category	Indonesia Best 50 CEO Awards 2022 3rd Anniversary	The Economics	Jakarta, 20 April 2022 / Jakarta, April 20, 2022
80	Gold Winner kategori BUMN Mobile Application untuk KAI Access / Gold Winner of SOE Mobile Application for KAI Access category	Youth Choice Award (YCA) 2022	Marketeers	Jakarta, 26 Maret 2022 / Jakarta, March 26, 2022
81	Bronze winner untuk kategori BUMN Sub Kategori Aplikasi / Bronze winner for the BUMN category, Application Sub Category	PR Indonesia Awards (PRIA) 2022	PR Indonesia	Semarang, 25 Maret 2022 / Semarang, March 25, 2022
82	Bronze winner untuk kategori BUMN Sub Kategori E-Magazine / Bronze winner for the BUMN category, the E-Magazine Sub Category	PR Indonesia Awards (PRIA) 2022	PR Indonesia	Semarang, 25 Maret 2022 / Semarang, March 25, 2022
83	Bronze winner untuk kategori BUMN Sub Kategori Video Profil KAI Saya KAI / Bronze winner for the BUMN category, KAI Video Profile Sub Category, I am KAI	PR Indonesia Awards (PRIA) 2022	PR Indonesia	Semarang, 25 Maret 2022 / Semarang, March 25, 2022
84	Silver winner untuk kategori BUMN Sub Kategori Video Profil KAI Pay / Silver winner for the BUMN category, KAI Pay Video Profile Sub Category	PR Indonesia Awards (PRIA) 2022	PR Indonesia	Semarang, 25 Maret 2022 / Semarang, March 25, 2022
85	Bronze winner untuk kategori BUMN Sub Kategori Media Sosial / Bronze winner for the BUMN category, Social Media Sub Category	PR Indonesia Awards (PRIA) 2022	PR Indonesia	Semarang, 25 Maret 2022 / Semarang, March 25, 2022
86	BEST OF THE BEST kategori Communication / BEST OF THE BEST Communication Category	BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit 2022	Kementerian BUMN / Ministry of SOE	Jakarta, 23 Maret 2022 / Jakarta, March 23, 2022

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications

No.	Nama Penghargaan / Award's Name	Acara / Event	Pemberi Penghargaan / Awarding Body	Tempat dan Tanggal / Place and Date
87	Juara 1 kategori Social Media & Corporate Campaign utk program kampanye "Vaksin dulu, Naik Kereta Api kemudian" / 1st place in the category of Social Media & Corporate Campaign for the campaign program "Vaccinate First, Take the Train Later"	BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit 2022	Kementerian BUMN / Ministry of SOE	Jakarta, 23 Maret 2022 / Jakarta, March 23, 2022
88	Juara 1 kategori Keterbukaan Informasi Publik / 1st winner in the category of Public Information Disclosure	BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit 2022	Kementerian BUMN / Ministry of SOE	Jakarta, 23 Maret 2022 / Jakarta, March 23, 2022
89	Juara 1 kategori Content Creator atas nama Mochamad Khafid M. dgn konten berjudul "Kerennya Bekerja di PT KAI" / 1st place in the Content Creator category on behalf of Mochamad Khafid M. with content entitled "It's Cool to Work at PT KAI"	BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit 2022	Kementerian BUMN / Ministry of SOE	Jakarta, 23 Maret 2022 / Jakarta, March 23, 2022
90	Juara 2 untuk kategori Community Involvement & Development Program - Kesehatan pd program "KAI Railclinic" / 2nd place in the Community Involvement & Development Program - Health category in the "KAI Rail Clinic" program	BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit 2022	Kementerian BUMN / Ministry of SOE	Jakarta, 23 Maret 2022 / Jakarta, March 23, 2022
91	Juara 3 kategori Content Creator atas nama Febrina Kusuma W. dgn konten berjudul "Bakti KAI pada Pendidikan" / 3rd place in the Content Creator category on behalf of Febrina Kusuma W. with content entitled "KAI's Service to Education"	BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit 2022	Kementerian BUMN / Ministry of SOE	Jakarta, 23 Maret 2022 / Jakarta, March 23, 2022

SERTIFIKASI

CERTIFICATION

Nama Sertifikat / Certificate Name	Unit / Unit	Dikeluarkan Oleh / Certified by	Masa Berlaku / Validity Period
Kantor Pusat / Head Office			
ISO 37001:2016	Quality Assurance & GCG (ISO)	PT TUV NORD Indonesia	24 Juli 2020 - 23 Juli 2023 / July 24, 2020 - July 23, 2023
ISO 37001:2016	Pengadaan Barang & Jasa (KLU) / Goods and Services Procurement (KLU)	PT Sucofindo (Persero)	22 September 2020 - 21 September 2023 / September 22, 2020 - September 21, 2023
ISO 9001:2015	Corporate Document Management (USD)	PT SAI Global	30 Desember 2020 - 21 Juni 2023 / December 30, 2020 - June 21, 2023
ISO 9001:2015	Contact Center 121	PT SAI Global	9 Juni 2021 - 10 Juni 2024 / June 9, 2021 - June 10, 2024
ISO 9001:2015	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ir. H. Djuanda / Ir. H. Djuanda Education and Training Center	PT Bureau Veritas Indonesia	7 Juli 2021 - 7 Juli 2024 / July 7, 2021 - July 7, 2024
ISO 9001:2015	Balai Pelatihan Opsar Agus Suroto / Opsar Agus Suroto Training Center	PT Bureau Veritas Indonesia	7 Juli 2021 - 7 Juli 2024 / July 7, 2021 - July 7, 2024
ISO 9001:2015	Balai Pelatihan Sintelis / Sintelis Training Center	PT Bureau Veritas Indonesia	7 Juli 2021 - 7 Juli 2024 / July 7, 2021 - July 7, 2024
ISO 9001:2015	Balai Pelatihan Teknik Perkeretaapian Sofyan Hadi / Sofyan Hadi Railway Engineering Training Center	PT Bureau Veritas Indonesia	7 Juli 2021 - 7 Juli 2024 / July 7, 2021 - July 7, 2024
ISO 9001:2015	Balai Pelatihan Teknik Traksi Darman Prasetyo / Darman Prasetyo Traction Engineering Training Center	PT Bureau Veritas Indonesia	7 Juli 2021 - 7 Juli 2024 / July 7, 2021 - July 7, 2024
ISO 9001:2015	Balai Pelatihan Sriwijaya Ascep Sunarto / Sriwijaya Ascep Sunarto Training Center	PT Bureau Veritas Indonesia	7 Juli 2021 - 7 Juli 2024 / July 7, 2021 - July 7, 2024
Safeguard Label 2021	Kantor Pusat / Head Office	PT Bureau Veritas Indonesia	10 Desember 2021 - 15 Mei 2022 / December 10, 2021 - May 15, 2022
ISO 27001:2013	Kantor Pusat / Head Office	BSI	17 Mei 2019 - 16 Mei 2022 / May 17, 2019 - May 16, 2022

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications

Nama Sertifikat / Certificate Name	Unit / Unit	Dikeluarkan Oleh / Certified by	Masa Berlaku / Validity Period
ISO 37001:2016	Kantor Pusat Bandung / Bandung Head Office	PT TUV NORD Indonesia	5 September 2022 - 4 September 2025 / September 5, 2022 - September 4, 2025
Balai Yasa Sarana			
ISO 27001:2013	Balai Yasa Manggarai	CBQA Global	17 Mei 2022 - 16 Mei 2025 / May 17, 2022 - May 16, 2025
ISO 27001:2013	Balai Yasa Tegal	CBQA Global	17 Mei 2022 - 16 Mei 2025 / May 17, 2022 - May 16, 2025
ISO 27001:2013	Balai Yasa Yogyakarta	CBQA Global	17 Mei 2022 - 16 Mei 2025 / May 17, 2022 - May 16, 2025
ISO 27001:2013	Balai Yasa Surabaya Gubeng	CBQA Global	17 Mei 2022 - 16 Mei 2025 / May 17, 2022 - May 16, 2025
ISO 27001:2013	Balai Yasa Lahat	CBQA Global	17 Mei 2022 - 16 Mei 2025 / May 17, 2022 - May 16, 2025
ISO 27001:2013	Balai YasaPulubrayan	CBQA Global	17 Mei 2022 - 16 Mei 2025 / May 17, 2022 - May 16, 2025
ISO 9001:2015	Balai Yasa Manggarai	PT TUV NORD Indonesia	10 Mei 2020 -9 Mei 2023 / May 10, 2020 - May 9, 2023
ISO 9001:2015	Balai Yasa Tegal	PT TUV NORD Indonesia	24 Mei 2020 -23 Mei 2023 / May 24, 2020 - May 23, 2023
ISO 9001:2015	Balai Yasa Yogyakarta	PT TUV NORD Indonesia	22 Mei 2020 -21 Mei 2023 / May 22, 2020 - May 21, 2023
ISO 9001:2015	Balai Yasa Surabaya Gubeng	PT TUV NORD Indonesia	22 Mei 2020 -21 Mei 2023 / May 22, 2020 - May 21, 2023
ISO 9001:2015	Balai Yasa Lahat	PT TUV NORD Indonesia	27 April 2020 -26 April 2023 / April 27, 2020 - April 26, 2023
ISO 9001:2015	Balai YasaPulubrayan	PT TUV NORD Indonesia	29 Mei 2020 -28 Mei 2023 / May 29, 2020 - May 28, 2023
ISO 14001:2015	Balai Yasa Yogyakarta	PT Sucofindo (Persero)	28 September 2020 -27 September 2023 / September 28, 2020 - September 27, 2023
ISO 37001:2016	Balai Yasa Manggarai	PT TUV NORD Indonesia	7September 2022 - 6September 2025 / September 7, 2022 - September 6, 2025
SMK3	Balai Yasa Surabaya Gubeng	Kementerian Ketenagakerjaan RI / Ministry of Manpower of Republic of Indonesia	17 September 2020 -16 September 2023 / September 17, 2020 - September 16, 2023
SMK3	Balai Yasa Yogyakarta	Kementerian Ketenagakerjaan RI / Ministry of Manpower of Republic of Indonesia	17 September 2020 -16 September 2023 / September 17, 2020 - September 16, 2023
SMK3	Balai Yasa Tegal	Kementerian Ketenagakerjaan RI / Ministry of Manpower of Republic of Indonesia	22 April 2021 -21 April 2024 / April 22, 2021 - April 21, 2024
Balai Yasa Prasarana			
ISO 9001:2015	Balai Yasa Mekanik Cirebon Prujakan	PT TUV NORD Indonesia	23 Desember 2019 - 22 Desember 2025 / December 23, 2019 - December 22, 2025
ISO 9001:2015	Balai Yasa Jembatan Kiaracandong	PT TUV NORD Indonesia	31 Desember 2019 - 30 Desember 2025 / December 31, 2019 - December 30, 2025
ISO 14001:2015	Balai Yasa Mekanik Cirebon Prujakan	PT Sucofindo (Persero)	30 November 2022-5 November 2025 / November 30, 2022 - November 5, 2025
DAOP/DIVRE			
ISO 27001:2013	Daerah Operasi 1 Jakarta / Operational Area 1 Jakarta	CBQA Global	17 Mei 2022 - 16 Mei 2025 / May 17, 2022 - May 16, 2025
ISO 27001:2013	Daerah Operasi 2 Bandung / Operational Area 2 Bandung	CBQA Global	17 Mei 2022 - 16 Mei 2025 / May 17, 2022 - May 16, 2025

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications

Nama Sertifikat / Certificate Name	Unit / Unit	Dikeluarkan Oleh / Certified by	Masa Berlaku / Validity Period
ISO 27001:2013	Daerah Operasi 3 Cirebon / Operational Area 3 Cirebon	CBQA Global	17 Mei 2022 – 16 Mei 2025 / May 17, 2022 – May 16, 2025
ISO 27001:2013	Daerah Operasi 4 Semarang / Operational Area 4 Semarang	CBQA Global	17 Mei 2022 – 16 Mei 2025 / May 17, 2022 – May 16, 2025
ISO 27001:2013	Daerah Operasi 5 Purwokerto / Operational Area 5 Purwokerto	CBQA Global	17 Mei 2022 – 16 Mei 2025 / May 17, 2022 – May 16, 2025
ISO 27001:2013	Daerah Operasi 6 Yogyakarta / Operational Area 6 Yogyakarta	CBQA Global	17 Mei 2022 – 16 Mei 2025 / May 17, 2022 – May 16, 2025
ISO 27001:2013	Daerah Operasi 7 Madiun / Operational Area 7 Madiun	CBQA Global	17 Mei 2022 – 16 Mei 2025 / May 17, 2022 – May 16, 2025
ISO 27001:2013	Daerah Operasi 8 Surabaya / Operational Area 8, Surabaya	CBQA Global	17 Mei 2022 – 16 Mei 2025 / May 17, 2022 – May 16, 2025
ISO 27001:2013	Daerah Operasi 9 Jember / Operational Area 9 Jember	CBQA Global	17 Mei 2022 – 16 Mei 2025 / May 17, 2022 – May 16, 2025
ISO 27001:2013	Divisi Regional I Sumatera Utara / Regional Division I North Sumatra	CBQA Global	17 Mei 2022 – 16 Mei 2025 / May 17, 2022 – May 16, 2025
ISO 27001:2013	Divisi Regional II Sumatera Barat / Regional Division II West Sumatra	CBQA Global	17 Mei 2022 – 16 Mei 2025 / May 17, 2022 – May 16, 2025
ISO 27001:2013	Divisi Regional III Sumatera Selatan / Regional Division III South Sumatra	CBQA Global	17 Mei 2022 – 16 Mei 2025 / May 17, 2022 – May 16, 2025
ISO 27001:2013	Divisi Regional IV Tanjung Karang / Regional Division IV Tanjung Karang	CBQA Global	17 Mei 2022 – 16 Mei 2025 / May 17, 2022 – May 16, 2025
ISO 9001:2015	Daerah Operasi 1 Jakarta / Operation Area 1 Jakarta	PT BureauVeritas Indonesia	11 Desember 2019 – 19 Januari 2023 / December 11, 2019 – January 19, 2023
ISO 9001:2015	Daerah Operasi 2 Bandung / Operation Area 2 Bandung	PT BureauVeritas Indonesia	11 Desember 2019 – 23 Januari 2023 / December 11, 2019 – January 23, 2023
ISO 9001:2015	Daerah Operasi 3 Cirebon / Operation Area 3 Cirebon	PT BureauVeritas Indonesia	11 Desember 2019 – 23 Januari 2023 / December 11, 2019 – January 23, 2023
ISO 9001:2015	Daerah Operasi 4 Semarang / Operation Area 4 Semarang	PT BureauVeritas Indonesia	11 Desember 2019 – 23 Januari 2023 / December 11, 2019 – January 23, 2023
ISO 9001:2015	Daerah Operasi 5 Purwokerto / Operation Area 5 Purwokerto	PT BureauVeritas Indonesia	11 Desember 2019 – 19 Januari 2023 / December 11, 2019 – January 19, 2023
ISO 9001:2015	Daerah Operasi 6 Yogyakarta / Operation Area 6 Yogyakarta	PT BureauVeritas Indonesia	11 Desember 2019 – 22 Januari 2023 / December 11, 2019 – January 22, 2023
ISO 9001:2015	Daerah Operasi 7 Madiun / Operation Area 7 Madiun	PT BureauVeritas Indonesia	11 Desember 2019 – 18 Januari 2023 / December 11, 2019 – January 18, 2023
ISO 9001:2015	Daerah Operasi 8 Surabaya / Operation Area 8 Surabaya	PT BureauVeritas Indonesia	11 Desember 2019 – 19 Januari 2023 / December 11, 2019 – January 19, 2023
ISO 9001:2015	Daerah Operasi 9 Jember / Operation Area 9 Jember	PT BureauVeritas Indonesia	11 Desember 2019 – 18 Januari 2023 / December 11, 2019 – January 18, 2023
ISO 9001:2015	Divisi Regional I Sumatera Utara / Regional Division I North Sumatra	PT BureauVeritas Indonesia	11 Desember 2019 – 23 Januari 2023 / December 11, 2019 – January 23, 2023
ISO 9001:2015	Divisi Regional II Sumatera Barat / Regional Division II West Sumatra	PT BureauVeritas Indonesia	11 Desember 2019 – 12 Januari 2023 / December 11, 2019 – January 12, 2023
ISO 9001:2015	Divisi Regional III Sumatera Selatan / Regional Division III South Sumatra	PT BureauVeritas Indonesia	11 Desember 2019 – 23 Januari 2023 / December 11, 2019 – January 23, 2023
ISO 9001:2015	Divisi Regional IV Tanjung Karang / Regional Division IV Tanjung Karang	PT BureauVeritas Indonesia	11 Desember 2019 – 18 Januari 2023 / December 11, 2019 – January 18, 2023
ISO 14001:2015	Daerah Operasi 3 Cirebon / Operational Area 3 Cirebon	PT Sucofindo (Persero)	2 Desember 2022 – 1 Desember 2025 / December 2, 2022 – December 1, 2025

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications

Nama Sertifikat / Certificate Name	Unit / Unit	Dikeluarkan Oleh / Certified by	Masa Berlaku / Validity Period
ISO 37001:2016	Daerah Operasi 3 Cirebon / Operational Area 3 Cirebon	PT TUV NORD Indonesia	7 September 2022 - 6 September 2025 / September 7, 2022 - September 6, 2022
ISO 37001:2016	Divisi Regional III Palembang / Regional Divisio III Palembang	PT TUV NORD Indonesia	7 September 2022 - 6 September 2025 / September 7, 2022 - September 6, 2025
Safeguard Label 2021	Stasiun Gambir / Gambir Station	PT Bureau Veritas Indonesia	6 Desember 2021 - 26 Mei 2022 / December 6, 2021 - May 26, 2022
Safeguard Label 2021	Stasiun Pasar Senen / Pasar Senen Station	PT Bureau Veritas Indonesia	6 Desember 2021 - 26 Mei 2022 / December 6, 2021 - May 26, 2022
Safeguard Label 2021	Stasiun Bandung / Bandung Station	PT Bureau Veritas Indonesia	10 Desember 2021 - 24 Mei 2022 / December 10, 2021 - May 24, 2022
Safeguard Label 2021	Stasiun Kiaracondong / Kiaracondong Station	PT Bureau Veritas Indonesia	6 Desember 2021 - 23 Mei 2022 / December 6, 2021 - May 23, 2022
Safeguard Label 2021	Stasiun Cirebon / Cirebon Station	PT Bureau Veritas Indonesia	10 Desember 2021 - 22 Mei 2022 / December 10, 2021 - May 22, 2022
Safeguard Label 2021	Stasiun Cirebon Prujakan / Cirebon Prujakan Station	PT Bureau Veritas Indonesia	19 November 2021 - 16 Mei 2022 / November 19, 2021 - May 16, 2022
Safeguard Label 2021	Stasiun Semarang Poncol / Semarang Poncol Station	PT Bureau Veritas Indonesia	6 Desember 2021 - 6 Juni 2022 / December 6, 2021 - June 6, 2022
Safeguard Label 2021	Stasiun Semarang Tawang / Semarang Tawang Station	PT Bureau Veritas Indonesia	10 Desember 2021 - 6 Juni 2022 / December 10, 2021 - June 6, 2022
Safeguard Label 2021	Stasiun Tegal / Tegal Station	PT Bureau Veritas Indonesia	10 Desember 2021 - 15 Mei 2022 / December 10, 2021 - May 15, 2022
Safeguard Label 2021	Stasiun Kutoarjo / Kutoarjo Station	PT Bureau Veritas Indonesia	10 Desember 2021 - 15 Mei 2022 / December 10, 2021 - May 15, 2022
Safeguard Label 2021	Stasiun Purwokerto / Purwokerto Station	PT Bureau Veritas Indonesia	10 Desember 2021 - 15 Mei 2022 / December 10, 2021 - May 15, 2022
Safeguard Label 2021	Stasiun Lempuyangan / Lempuyangan Station	PT Bureau Veritas Indonesia	6 Desember 2021 - 22 Mei 2022 / December 6, 2021 - May 22, 2022
Safeguard Label 2021	Stasiun Solo Balapan / Solo Balapan Station	PT Bureau Veritas Indonesia	6 Desember 2021 - 22 Mei 2022 / December 6, 2021 - May 22, 2022
Safeguard Label 2021	Stasiun Yogyakarta / Yogyakarta Station	PT Bureau Veritas Indonesia	10 Desember 2021 - 6 Juni 2022 / December 10, 2021 - June 6, 2022
Safeguard Label 2021	Stasiun Madiun / Madiun Station	PT Bureau Veritas Indonesia	6 Desember 2021 - 19 Mei 2022 / December 6, 2021 - May 19, 2022
Safeguard Label 2021	Stasiun Malang / Malang Station	PT Bureau Veritas Indonesia	4 Desember 2021 - 18 Mei 2022 / December 4, 2021 - May 18, 2021
Safeguard Label 2021	Stasiun Surabaya Gubeng / Surabaya Gubeng Station	PT Bureau Veritas Indonesia	22 November 2021 - 18 Mei 2022 / November 22, 2021 - May 18, 2022
Safeguard Label 2021	Stasiun Surabaya Pasar Turi / Surabaya Pasar Turi Station	PT Bureau Veritas Indonesia	10 Desember 2021 - 6 Juni 2022 / December 10, 2021 - June 6, 2022
Safeguard Label 2021	Stasiun Jember / Jember Station	PT Bureau Veritas Indonesia	10 Desember 2021 - 16 Mei 2022 / December 10, 2021 - May 16, 2022
Safeguard Label 2021	Stasiun Medan / Medan Station	PT Bureau Veritas Indonesia	10 Desember 2021 - 23 Mei 2022 / December 10, 2021 - May 23, 2022
Safeguard Label 2021	Stasiun Kertapati / Kertapati Station	PT Bureau Veritas Indonesia	9 Desember 2021 - 22 Mei 2022 / December 9, 2021 - May 22, 2022
Safeguard Label 2021	Stasiun Tanjung Karang / Tanjung Karang Station	PT Bureau Veritas Indonesia	10 Desember 2021 - 23 Mei 2022 / December 10, 2021 - May 23, 2022

INFORMASI YANG TERSEDIA PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

Information on the Company's Website



KAI berkomitmen untuk senantiasa menerapkan pemenuhan terhadap prinsip transparansi sesuai peraturan perundang-undangan serta standar penerapan yang berlaku, mencakup standar pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 08/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Komitmen KAI terhadap penerapan pemenuhan prinsip transparansi tersebut dilaksanakan sebagai upaya dalam memberikan kemudahan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengakses informasi yang aktual dan relevan terkait Perseroan.

KAI is committed to always complying with the principle of transparency in accordance with laws and regulations and applicable standards, including the standards in Financial Services Authority Regulation No. 08/POJK.04/2015 on Websites of Issuer or Public Company. KAI's commitment to the implementation of compliance with the principle of transparency is carried out as an effort to provide convenience for all stakeholders in accessing actual and relevant information regarding the Company.

INFORMASI YANG TERSEDIA PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

Information on the Company's Website

Terkait hal tersebut, terdapat sejumlah informasi yang secara khusus telah termuat di dalam situs web resmi KAI (<https://www.kai.id/>) sesuai kewajiban penyampaian dalam peraturan dan standar yang diacu, sebagai berikut:

- Informasi umum terkait Perseroan.
- Informasi terkait keterbukaan informasi publik.
- Informasi tata kelola perusahaan.
- Informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Keseluruhan informasi yang telah tersedia pada situs web KAI terdiri dari pokok-pokok bahasan dengan perincian sebagai berikut:

1. TENTANG KAMI

a. Profil Perseroan

- Sekilas KAI (Sejarah/Visi dan Misi/Logo dan Budaya Perusahaan/Penghargaan).
- Organisasi (Profil Komisaris & Direksi/Anak Perusahaan dan *Joint Venture*/Struktur Organisasi).

b. Kontak Kami

2. PUBLIKASI

3. KARIER

Lowongan, Pengumuman, Job Profile, Panduan dan Registrasi.

4. LELANG

5. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Maklumat, Regulasi, Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi Publik, Evaluasi & Laporan.

6. HERITAGE

Sejarah Perkeretaapian, Aset Bersejarah, Museum, Galeri, Referensi.

7. CSR

Tentang CSR, Kebijakan CSR, Ketentuan & Persyaratan, Program CSR.

8. HUBUNGAN INVESTOR

Laporan perusahaan, informasi saham dan obligasi, dan RUPS.

9. GCG

Tentang GCG, *Board Manual*, Pedoman Perilaku, Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing System*, LHKPN, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

In this regard, there is a number of specific information that has been contained on the official KAI website (<https://www.kai.id/>) in accordance with the submission obligations in the referenced regulations and standards, as follows:

- General information about the Company.
- Information related to public information disclosure.
- Corporate governance information.
- Corporate social responsibility information.

The entire information available on the KAI website consists of the following details:

1. ABOUT US

a. Company Profile

- Overview of KAI (History/Vision and Mission/Logo and Corporate Culture/Awards).
- Organization (Profiles of Commissioners & Directors/Subsidiaries and Joint Ventures/Organizational Structure).

b. Contact us

2. PUBLICATIONS

3. CAREER

Vacancies, Announcements, Job Profiles, Guidelines and Registration.

4. AUCTION

5. DISCLOSURE OF PUBLIC INFORMATION

Notices, Regulations, Public Information Services, List of Public Information, Evaluations & Reports.

6. HERITAGE

Railway History, Historic Assets, Museums, Galleries, Reference.

7. CSR

About CSR, CSR Policy, Terms & Conditions, CSR Program.

8. INVESTOR RELATIONS

Company reports, stock and bond information, and GMS.

9. GCG

About GCG, Board Manual, Code of Conduct, Gratuity Control, Whistleblowing System, LHKPN, and Anti-Bribery Management System.



04

Tinjauan Fungsi Pendukung Bisnis

Overview of Business Support Units



SUMBER DAYA MANUSIA

Human Capital



Perseroan memahami, di tengah dinamika perubahan yang semakin cepat, diperlukan daya adaptasi yang semakin kuat. Daya adaptasi tersebut, secara mendasar, ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai *human capital* yang dikelola oleh Perseroan. Kualitas SDM yang baik akan mendukung daya adaptasi Perseroan, untuk dapat tetap memberikan kontribusi maksimal bagi segenap unsur pemangku kepentingan. Dengan pemahaman tersebut, KAI memiliki komitmen yang kuat untuk dapat menerapkan pengelolaan dan pengembangan SDM sesuai praktik-praktik penerapan terbaik dan pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KAI melakukan pengelolaan human capital melalui keberadaan Direktorat SDM dan Umum. Struktur organisasi Direktorat SDM dan Umum ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KEP.U/KO.104/I/1/KA-2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat SDM dan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Direksi No.

The Company understands that amidst the increasingly rapid dynamics, stronger adaptability is necessary. This adaptability, fundamentally, is determined by the quality of Human Capital (HC) managed by the Company. Quality human capital shall support the Company's adaptability to be able to keep providing maximum contribution to all elements of stakeholders. With this understanding, KAI has a strong commitment to be able to implement HC management and development in accordance with best practices and compliance with applicable laws and regulations.

KAI manages human capital through the Directorate of HC and General Affairs. The organizational structure of the Directorate of Human Capital and General Affairs is determined based on the Regulation of the Board of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KEP.U/KO.104/I/1/KA-2017 on Organization and Administration of the Directorate of HC and General Affairs, as amended several times with the latest

SUMBER DAYA MANUSIA Human Capital

“

Perseroan memahami, di tengah dinamika perubahan yang semakin cepat, diperlukan daya adaptasi yang semakin kuat. Daya adaptasi tersebut, secara mendasar, ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai *human capital* yang dikelola oleh Perseroan.

The Company understands that amidst the increasingly rapid dynamics, stronger adaptability is necessary. This adaptability, fundamentally, is determined by the quality of Human Capital (HC) managed by the Company. ”

PER.U/KO.104/XI/1/KA-2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi No. KEP.U/KO.104/II/1/KA-2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat SDM dan Umum, serta Peraturan Direksi No. PER.U/KO.104/III/4/KA-2019 tentang Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Sertifikasi Profesi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

amendment based on Regulation of the Board of Directors No. PER.U/KO.104/XI/1/KA-2020 on the Second Amendment to Decree of the Board of Directors No. KEP.U/KO.104/II/1/KA-2017 on the Organization and Administration of the Directorate of HC and General Affairs, as well as Regulation of the Board of Directors No. PER.U/KO.104/III/4/KA-2019 on the Organization and Administration of the PT Kereta Api Indonesia (Persero) Professional Certification Agency.

Sesuai ketentuan tersebut struktur pengelola *human capital* KAI dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

In accordance with this stipulation, the structure of KAI's human capital management can be seen in the following chart:

STRUKTUR PENGELOLA HUMAN CAPITAL

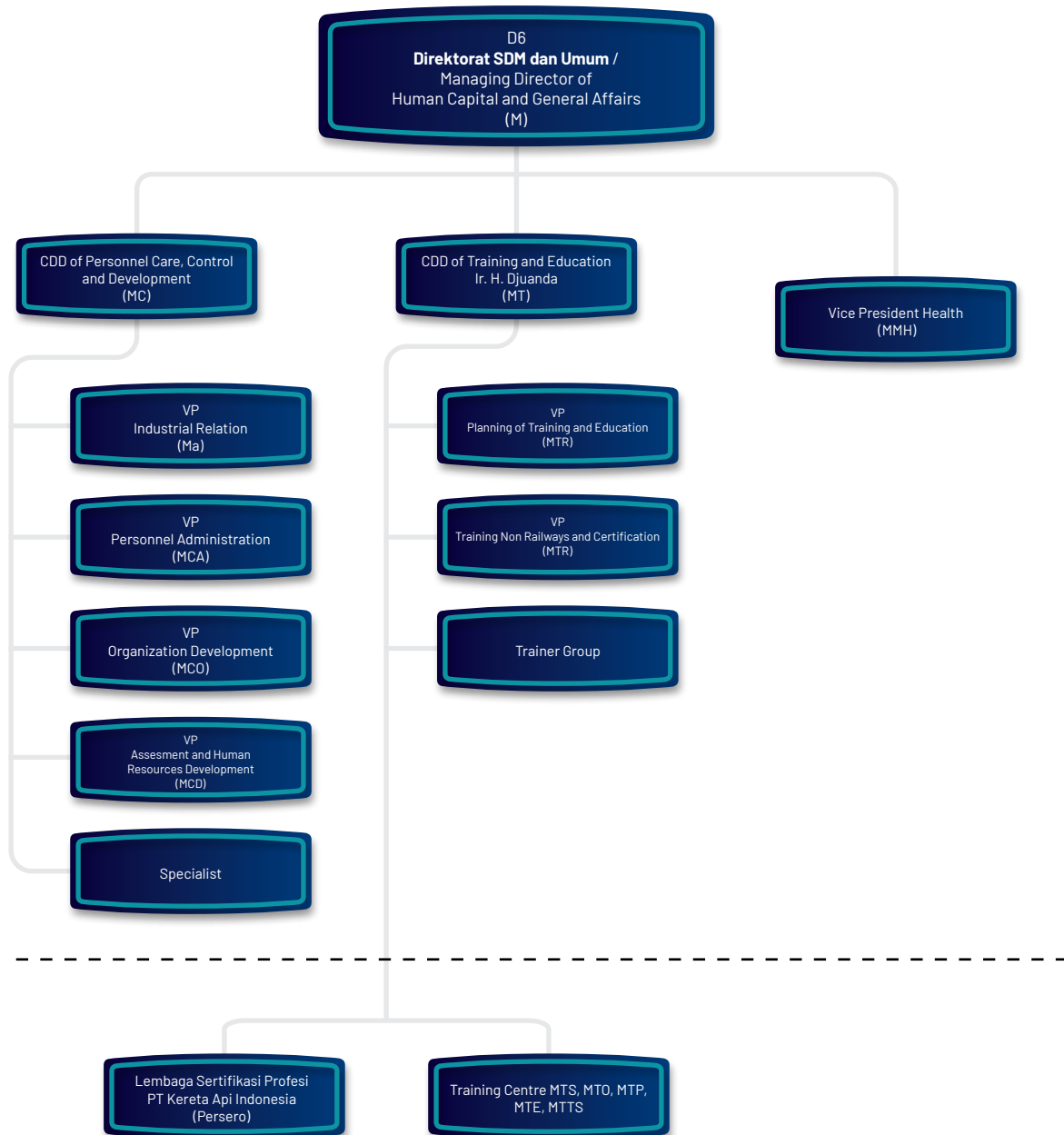
Human Capital Management Structure

KAI melakukan pengelolaan *human capital* melalui keberadaan Direktorat SDM dan Umum. Struktur organisasi Direktorat SDM dan Umum ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi

KAI manages human capital through the Directorate of HC and General Affairs. The organizational structure of the Directorate of Human Capital and General Affairs is determined based

PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. PER.U/K0.104/II/5/KA-2019 tanggal 13 Februari 2019, dengan uraian sebagai berikut:

on the Regulation of the Board of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. PER.U/K0.104/II/5/KA-2019 dated February 13, 2019, with the following description:



Direktorat SDM dan Umum mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab menyusun strategi/kebijakan serta pembinaan dan pengendalian di bidang:

1. Pengembangan Organisasi.
2. Pengelolaan sumber daya manusia secara terintegrasi.
3. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan sertifikasi/pengujian SDM.
4. Pengelolaan layanan kesehatan.
5. Pembinaan pengelolaan kegiatan kerumahtanggaan umum.

The Directorate of HC and General Affairs has the main duties and responsibilities of formulating strategies/policies as well as guidance and control in the areas of:

1. Organization Development.
2. Integrated human capital management.
3. Management of education and training as well as holding of HC certification/testing.
4. Management of health services.
5. Guidance on the management of general household activities.

Uraian *jobdesk* dari Direktorat SDM dan Umum adalah sebagai berikut:

Job description of the Directorate of HC and General Affairs is as follows:

D6	<p>Managing Director of Human Capital and General Affairs mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab menyusun strategi/kebijakan serta pembinaan dan pengendalian di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Organisasi; 2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia secara terintegrasi; 3. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan sertifikasi/pengujian SDM; 4. Pengelolaan layanan kesehatan; dan 5. Pembinaan pengelolaan kegiatan kerumah tangga dan umum. 	<p>The Managing Director of Human Capital and General Affairs has the main duties and responsibilities of formulating strategies/policies as well development and control in the fields of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organization Development; 2. Integrated Human capital Management; 3. Management of education and training and implementation of HC certification/testing; 4. Management of health services; And 5. Guidance on the management of household and general activities.
MC	<p>Corporate Deputy Director of Personnel Care, Control and Development (MC) mempunyai tugas dan tanggung jawab atas perencanaan, evaluasi dan pengendalian atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Regulasi terkait SDM lainnya; 2. Program pemberian <i>Compensation & Benefit</i> kepada Pekerja serta penjagaan biaya Pekerja; 3. Program <i>Employee Engagement</i> (Layanan Informasi SDM/SDM Helpdesk, Survei Kepuasan, <i>Reward & Punishment</i>, dan lainnya); 4. Pengelolaan Hubungan Industrial, baik internal maupun eksternal; 5. Perencanaan dan pembinaan pengelolaan kegiatan umum dan kerumah tangga; 6. Program Pengadaan Pekerja serta <i>Induction Program</i>; 7. Pengelolaan administrasi SDM (Penggajian, Penghitungan PSAK 24, Mutasi, Pemberhentian, dan Sistem Informasi SDM); 8. Program analisis beban kerja, formasi SDM dan proses bisnis serta pengembangan organisasi Perseroan; 9. Proses asesmen dan konseling, pembuatan profil kompetensi dan penilaian kinerja/kompetensi pekerja; pengembangan kompetensi serta pengembangan karier pekerja. 	<p>The Corporate Deputy Director of Personnel Care, Control and Development (MC) has the duties and responsibilities for planning, evaluating and controlling:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparation of Collective Labor Agreements (CLA) and other HC-related regulations; 2. Program for providing Compensation & Benefit to Workers and guarding Workers' costs; 3. Employee Engagement Program (HC Information Services/HC Helpdesk, Satisfaction Survey, Reward & Punishment, etc.); 4. Management of Industrial Relations, both internal and external; 5. Planning and fostering the management of general and household activities; 6. Worker Procurement Program and Induction Program; 7. HC administration management (Payroll, Calculation of PSAK 24, Transfers, Dismissal, and HC Information System); 8. Workload analysis program, HC formation and business processes as well as company organizational development; 9. Assessment and counseling process, competency profiling and employee performance/competency assessment; competency development and employee career development.
MT	<p>Corporate Deputy Director of Training and Education Ir. H. Djuanda (MT) mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab merencanakan program, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan, memelihara fasilitas, menyusun standardisasi, kualitas dan sertifikasi/pengujian SDM sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta pembinaan terhadap <i>Training Center</i>, serta melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan Lembaga Sertifikasi Profesi PT Kereta Api Indonesia (Persero).</p>	<p>The Corporate Deputy Director of Training and Education Ir. H. Djuanda (MT) had the main duties and responsibilities of planning programs, controlling and evaluating the implementation and results of education and training, maintaining facilities, compiling standardization, quality and certification/testing of human resources in accordance with company needs as well as fostering the Training Center, as well as managing administration and finance of PT Kereta Api Indonesia (Persero) Professional Certification Institute.</p>
MMH	<p>Vice President Health (MMH), mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab atas tercapainya Visi dan Misi Perseroan yang diselenggarakan melalui pengelolaan dan pengendalian kesehatan, yaitu mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target produksi dan efisiensi biaya; 2. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (<i>quality improvement</i>) pengelolaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kerja secara berkelanjutan; 3. Optimalisasi sumber daya Perseroan dan terjaganya perimbangan alokasi sumber daya; 4. Terkoordinasinya seluruh aktivitas pelayanan kesehatan dan kesehatan kerja, di lingkungan KAI; 5. Memastikan bahwa semua risiko pada proses bisnis di dalam lingkup Sub Direktorat Pengelolaan dan Pengendalian Kesehatan diidentifikasi, diukur (<i>assessed</i>), dievaluasi, direspons/dimitigasi, dikontrol, dan dipantau dengan semestinya secara berkelanjutan; 6. Terselenggaranya pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan pekerja (termasuk Pekerja Kontrak Magang), pensiunan, dan keluarga dengan baik; 7. Terselenggaranya kegiatan kesehatan kerja Perseroan dengan baik; 8. Terselenggaranya Program Pelayanan Kesehatan Bakti Sosial dengan Kereta Sehat (<i>Rail Clinic</i>) serta mengkoordinasikan penanganan korban kecelakaan kereta api dan pelayanan pos kesehatan penumpang; dan 9. Perencanaan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, bimbingan dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas adanya kejadian luar biasa penyakit menular, wabah, epidemi, dan/atau pandemi secara sistematis, terarah, dan terukur untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan bagi kegiatan usaha Perseroan dan pekerja. 	<p>The Vice President Health (MMH) has the main duties and responsibilities for the achievement of the Company's Vision and Mission carried out through health management and control, which includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Production targets and cost efficiency; 2. Implementation of a quality improvement process in the management of health and occupational health services in a sustainable manner; 3. Optimizing company resources and maintaining a balanced allocation of resources; 4. Coordination of all occupational health and health service activities within KAI; 5. Ensuring that all risks to business processes within the Sub-Directorate of Health Management and Control were identified, assessed, evaluated, responded to / mitigated, controlled and properly monitored on an ongoing basis; 6. Proper management of the health care insurance for workers (including Intern Contract Workers), retirees and their families; 7. The Company's occupational health activities were well organized; 8. Implementation of the Social Service Health Service Program with Healthy Trains (Rail Clinic) as well as coordinating the handling of train accident victims and passenger health post services; and 9. Planning and coordinating the implementation of policies, drafting norms, standards, procedures, guidance and supervision, as well as monitoring, evaluating, and reporting on the occurrence of extraordinary occurrences of infectious diseases, outbreaks, epidemics, and/or pandemics in a systematic, directed, and measurable manner to minimize the impact arising from the company's business activities and workers.

STRATEGI MANAJEMEN HUMAN CAPITAL

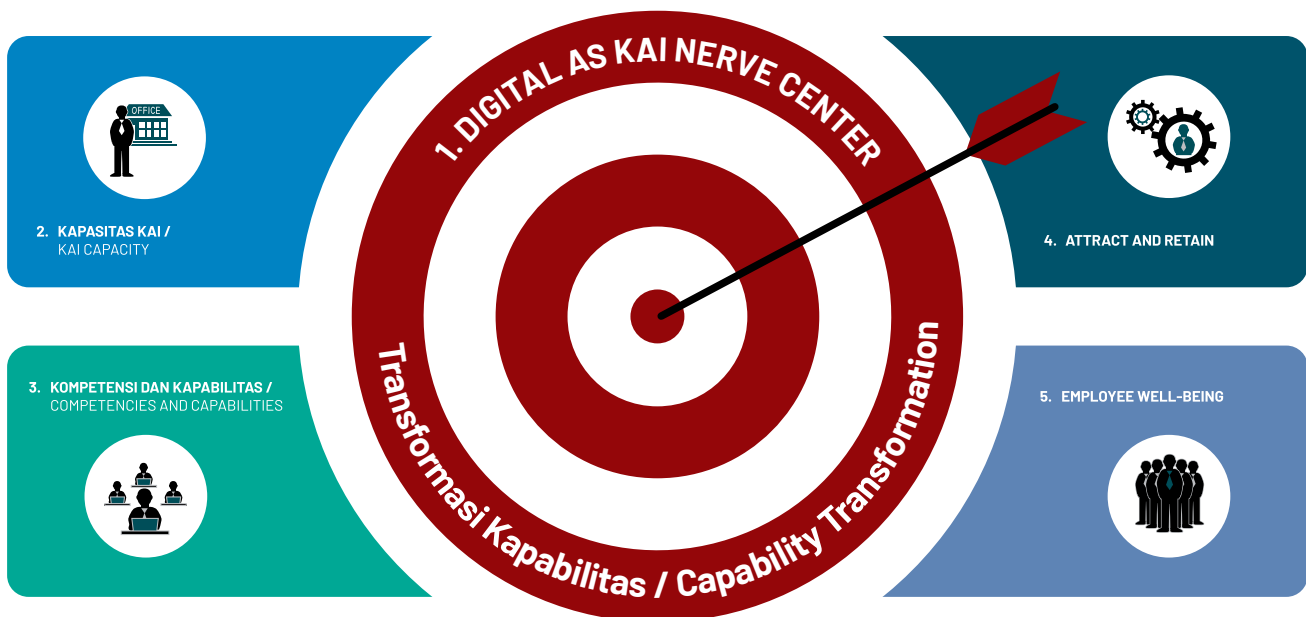
Human Capital Management Strategy

Untuk tahun 2022, Perseroan menerapkan strategi pengelolaan manajemen *human capital* pada lingkup Grup KAI dengan penjabaran inisiatif strategis dan sasaran strategis sebagai berikut:

In 2022, the Company implemented human capital management strategy at KAI Group with an elaboration of strategic initiatives and strategic objectives as follows:

Strategi Manajemen Human Capital

Human Capital Management Strategy



Strategi Manajemen Human Capital / Human Capital Management Strategy	
Inisiatif dan Sasaran Strategis / Strategic Targets and Initiatives	<p>1. Organisasi: <i>Transformation Office, Digital Center of Excellence, dan Restrukturisasi Organisasi IT.</i> / Organization: Office Transformation, Digital Center of Excellence, and IT Organizational Restructuring.</p> <p>2. Rekrutmen dan Placement, untuk <i>Digital Center of Excellence, Transformation Office dan IT.</i> / Recruitment and Placement, for Digital Center of Excellence, Transformation Office and IT.</p> <p>3. Digital Capability: Terlaksananya program pengembangan digital (mindset, teknis IT dan bisnis). / Digital Capability: Implementation of digital development programs (mindset, technical IT and business).</p> <p>4. Technical dan Management Capability: terlaksananya program pengembangan <i>Academy (Passenger, Freight, Rollingstock, Infrastructure, Procurement, Asset Management, Property).</i> / Technical and Management Capability: implementation of Academy development programs (Passenger, Freight, Rollingstock, Infrastructure, Procurement, Asset Management, Properties).</p> <p>5. Digital Leadership: Terlaksana program pengembangan untuk 10 – 100 – 1000. / Digital Leadership: Implemented a development program for 10 – 100 – 1000.</p>
Uraian / Description	Inisiatif dan Sasaran Strategis / Strategic Targets and Initiatives
Kapasitas KAI / KAI Capacity	<p>1. Restrukturisasi Organisasi: terbentuknya organisasi <i>Asset / Organizational Restructuring: the establishment of an Asset Management, Transformation Office, Digital Center of Excellence, dan Organisasi IT.</i> / Management organization, a Transformation Office, a Digital Center of Excellence and an IT Organization.</p> <p>3. Rekrut 1.974 orang <i>Fresh Graduate dan Pro-Hired.</i> / Recruitment of 1,974 Fresh Graduates and Pro Hired people.</p> <p>4. <i>Succession rate: terpenuhinya kebutuhan SDM dan calon pengganti sesuai dengan yang ada: 100%.</i> / Succession rate: the fulfillment of human resource needs and potential replacements according to existing ones: 100%.</p> <p>5. Pembentukan <i>Assessment Center</i> pada 28 September 2022 / Establishment of Assessment Center on September 28, 2022</p>

Uraian / Description	Inisiatif dan Sasaran Strategis / Strategic Targets and Initiatives
Kompetensi dan Kapabilitas KAI / KAI Competencies and Capabilities	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya <i>Talent</i> BOD BUMN/Kluster: 24,49% dari Jumlah BOD-1. / Availability of SOE/Cluster BOD Talent: 24.49% of total BOD-1. Tersedianya <i>Talent</i> Perempuan: 3,02% dari jumlah <i>Nominated Talent</i> BOD-1 sampai dengan BOD-4. / Availability of Female Talent: 3.02% of the total <i>Nominated Talent</i> BOD-1 to BOD-4. Tersedianya <i>Talent</i> Milenial: 10,83% dari jumlah <i>Nominated Talent</i> BOD-1 sampai dengan BOD-4. / Availability of Millennial Talent: 10.83% of the total <i>Nominated Talent</i> BOD-1 to BOD-4. Terlaksananya Program Pengembangan sesuai dengan <i>Learning and Development System</i>: / Implementation of the Development Program in accordance with the Learning and Development System: <ol style="list-style-type: none"> Bagi <i>Talent</i>: <i>On Boarding, Equipping dan Developing</i> (69 orang). / For Talent: Onboarding, Equipping, and Developing (69 people). Diklat <i>mandatory</i> untuk mendukung persyaratan sertifikasi (KAI, KCJB & LRT). / Mandatory training to support certification requirements (KAI, KCJB & LRT). Pengembangan Talenta Digital bagi 10, 100 & 1000 Talenta untuk mendukung transformasi digital. / Digital Talent Development for 10, 100 and 1000 Talents to support digital transformation. Terlaksananya Sertifikasi Pegawai sesuai dengan keahlian yang dipersyaratkan regulasi termasuk KJB & LRT: / Implementation of Employee Certification in accordance with the expertise required by regulations including KJB & LRT: <ol style="list-style-type: none"> Pemberkasan (7.463 orang) / Filing (7,463 people) Sertifikasi (7.463 orang) / Certification (7,463 people) Terlaksananya Program Beasiswa S1 dan S2 di dalam dan di luar negeri: / Implementation of domestic and overseas Bachelor and Masters Scholarship Programs: <ol style="list-style-type: none"> S1 dalam negeri (10 orang) / Domestic Bachelors (10 people) S2 dalam negeri (33 orang) / Masters Bachelors (33 people) S2 luar negeri (2 orang) / Overseas Masters (2 people) Terbentuknya <i>Safety Academy</i> untuk mendukung peningkatan budaya <i>Safety</i> / Establishment of Safety Academy to support the improvement of Safety culture
Attract and Retain	<ol style="list-style-type: none"> Tercapainya <i>Engagement level</i> yang lebih tinggi dari rata-rata perusahaan di Indonesia. / Achievement of an engagement level higher than the average company in Indonesia. Tercapainya AKHLAK <i>Culture Health Index</i> (ACHI) melebihi rata-rata BUMN. / Achievement of AKHLAK Culture Health Index (ACHI) higher than the average of SOEs. Tingkat <i>turn over fungsi strategis</i> (Komersial, ASP, IT) < 3% / Turnover rate of strategic function (Commercial, ASP, IT) < 3% Diterapkan <i>Performance Based Remuneration and Human Experience Management</i> pada Triwulan IV. / Implementation of Performance Based Remuneration & Human Experience Management in Q4. Terlaksananya perbaikan 15 Griya Karya di TW III, dan diterapkan standarisasi Fasilitas dan Pelayanan Griya Karya, Mess dan Wisma setara standar hotel bintang 3. / Implementation of repairs to 15 Griya Karya in Q3, and standardization of Facilities and Services for Griya Karya, Mess & Wisma equivalent to 3 star hotel standards. Pengaturan Pola Dinas para pegawai operasional untuk meningkatkan kinerja operasi kereta api. / Setting the pattern of service for operational employees to improve the performance of train operations.
Well Being dan Kesehatan / Well-Being and Health	<ol style="list-style-type: none"> Vaksinasi Tahap ke 3 untuk <i>Key Management</i> dan Pegawai Prioritas dan Non-Prioritas Pelayanan Publik. / Vaksinasi Tahap ke 3 untuk <i>Key Management</i> dan Pegawai Prioritas dan Non-Prioritas Pelayanan Publik. <i>Medical Check Up</i> 100% bagi seluruh pegawai. / <i>Medical Check Up</i> 100% bagi seluruh pegawai. Peningkatan Kategori Hijau <i>Body Mass Index</i> pegawai KAI dari 45,99% ke 50%. / Peningkatan Kategori Hijau <i>Body Mass Index</i> pegawai KAI dari 45,99% ke 50%. Tersedianya Digitalisasi Sistem Pemantauan dan pelayanan Kesehatan dengan platform kepegawaian (Raileo), <i>telemedicine</i>. / Tersedianya Digitalisasi Sistem Pemantauan dan pelayanan Kesehatan dengan platform kepegawaian (Raileo), <i>telemedicine</i>. <i>Well being</i>: Terselenggarakan kerja sama dengan ahli gizi dalam membentuk pedoman well being KAI dan internalisasinya. / <i>Well being</i>: Terselenggarakan kerja sama dengan ahli gizi dalam membentuk pedoman well being KAI dan internalisasinya. Terselenggaranya program <i>Counselling</i> secara <i>online</i> dan <i>offline</i> bekerja sama dengan institusi/ahli di bidang <i>counselling</i>. / Terselenggaranya program <i>Counselling</i> secara <i>online</i> dan <i>offline</i> bekerja sama dengan institusi/ahli di bidang <i>counselling</i>.

MANAJEMEN HUMAN CAPITAL

Human Capital Management

KAI menerapkan sistem manajemen *human capital* secara menyeluruh, mencakup rekrutmen, pengembangan kompetensi, pengembangan karier, penilaian kinerja, kebijakan remunerasi, hingga program pensiun. Penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REKRUTMEN

Rekrutmen merupakan proses seleksi dan pemilihan pegawai berdasarkan kebutuhan Perseroan dalam mengisi formasi jabatan di dalam struktur organisasi. Secara mendasar, hal tersebut dilakukan sebagai upaya Perseroan dalam berinvestasi dan melakukan pengembangan sarana-prasarana perkeretaapian.

KAI implements a comprehensive human capital management system covering recruitment, competency development, career development, performance assessment, remuneration policies, and pension program with the following description:

RECRUITMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

Recruitment is a process of selecting and appointing employees based on the needs of the Company in filling position formations within the organizational structure. Fundamentally, this is an effort by the Company to invest in and develop railway infrastructure.

Perseroan mengatur pelaksanaan rekrutmen pegawai melalui prosedur internal yang terdapat di dalam Peraturan Direksi Nomor PER.U/KH.102/VII/1/KA-2017 tanggal 14 Juli 2017, yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Direksi dengan Nomor PER.U/ KH.102/IX/1/KA2017 tanggal 20 September 2017. Prosedur internal tersebut telah diperbarui kembali melalui Peraturan Direksi dengan Nomor PER.U/KH.102/V/1/KA-2021 tanggal 07 Mei 2021.

Rekrutmen pegawai dilakukan melalui media KAI, yaitu situs web <https://recruitment.kai.id/>, yang telah memuat sejumlah informasi penunjang seperti informasi lowongan, pengumuman rekrutmen, registrasi, seleksi, pengumuman kelulusan, dan *job description*.

Rekrutmen Pegawai Tahun 2022

Pada tahun 2022, Perseroan telah melakukan rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan SDM untuk tahun 2023. Penjelasan mengenai kebijakan rekrutmen yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rekrutmen Internal

Rekrutmen internal dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan Direktorat Operasi, Direktorat Sarana, dan Direktorat Prasarana, yaitu guna mendukung kelancaran operasional perjalanan kereta api dan pelaksanaan rekrutmen internal dapat meminimalisasi biaya pelaksanaan rekrutmen dan meminimalisasi adanya kerumunan.

2. Rekrutmen Eksternal

Rekrutmen eksternal dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja yang tidak dapat terpenuhi secara optimal dari rekrutmen internal serta memenuhi kebutuhan Direktorat lainnya. Pelaksanaan rekrutmen dimulai pada triwulan I tahun 2022 pada saat tren penyebaran Covid-19 di Indonesia mulai melandai, serta program vaksinasi sudah cukup tinggi di kota-kota besar di Indonesia. Pelaksanaan seleksi rekrutmen dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Dari sejumlah 27.359* pegawai yang dimiliki pada posisi 31 Desember 2022, KAI merekrut sejumlah 1.190 pegawai baru pada tahun 2022, yang merupakan jumlah yang diperoleh dari proses rekrutmen eksternal/internal. Informasi mengenai pegawai yang baru direkrut berdasarkan pengelompokan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

The Company regulates the implementation of employee recruitment through internal procedures contained in Board of Directors Regulation No. PER.U/KH.102/VII/1/KA-2017 dated July 14, 2017, which has been amended through Board of Directors Regulation No. PER.U/KH. 102/IX/1/KA2017 dated September 20, 2017. The internal procedure has been renewed through the Board of Directors Regulation No. PER.U/KH.102/V/1/KA-2021 dated May 07, 2021.

Employee recruitment is carried out through KAI media, namely the website <https://recruitment.kai.id/>, which contains a number of supporting information such as job vacancy, recruitment announcements, registration, selection, announcements for acceptance, and job description.

Employee Recruitment in 2022

In 2022, the Company has conducted recruitment to meet HC needs for 2023. An explanation of the recruitment policy carried out is as follows:

1. Internal Recruitment

Internal recruitment is carried out to fulfill the needs of the Directorate of Operations, Directorate of Rolling Stock, and Directorate of Infrastructure, namely to support the smooth operation of train travel and the implementation of internal recruitment can minimize the costs of carrying out recruitment and minimize crowds.

2. External Recruitment

External recruitment is carried out to meet the needs of workers who cannot be met optimally from internal recruitment as well as to meet the needs of other directorates. The recruitment process began in quarter I of 2022 along with the declining Covid-19 cases in Indonesia and increasing vaccination programs in big cities in Indonesia. Recruitment is carried out by strictly implementing health protocols.

Of the 27,359* employees as of December 31, 2022, KAI recruited 1,190 new employees in 2022, which is the number obtained from the external/internal recruitment. Information on newly recruited employees based on education level can be seen in the following table:

Rekrutmen Pegawai KAI Berdasarkan Tingkat Pendidikan

KAI Employee Recruitment by Education Level

Tingkat Pendidikan / Education Level	Jumlah / Total
SLTA / High School Diploma	944 pegawai / employees
Diploma (D3) / Associate Degree	196 pegawai / employees
Diploma (D4)/Sarjana (S1) / Bachelor's Degree	50 pegawai / employees
Pascasarjana (S2) / Master's Degree	-

*) Tidak Termasuk PKWT, External Employee dan Pekerja Perusahaan di Anak Perusahaan/Instansi Lain. / *) Excludes PKWT, External Employees, and Company Employees at Subsidiaries/ Other Agencies.

Seluruh pegawai yang bergabung berdasarkan rekrutmen tahun 2022 telah ditempatkan pada sejumlah Direktorat KAI, dengan perincian sebagai berikut:

All employees recruited in 2022 have been assigned in a number of KAI Directorates, with the following details:

Penempatan Pegawai yang Direkrut pada Direktorat KAI

Assignment of Recruited Employees at the KAI Directorate

Direktorat / Directorate	Jumlah / Total
Direktorat Utama / Main Directorate	2 orang / people
Direktorat Niaga / Directorate of Commerce	127 orang / people
Direktorat Operasi / Directorate of Operations	382 orang / people
Direktorat Pengelolaan Prasarana / Directorate of Infrastructure	420 orang / people
Direktorat Pengelolaan Sarana / Directorate of Rolling Stock	252 orang / people
Direktorat Keselamatan dan Keamanan / Directorate of Safety and Security	1 orang / people
Direktorat SDM dan Umum / Directorate of Human Capital & General Affairs	2 orang / people
Direktorat Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha / Directorate of Strategic Planning and Business Development	1 orang / people
Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko / Directorate of Finance and Risk Management	3 orang / people
Jumlah / Total	1.190 orang / people

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Seiring perkembangan peran SDM dan perubahan tantangan yang dihadapi, Perseroan telah melakukan penyesuaian terhadap model kompetensi yang diterapkan bagi pegawai KAI. Hal tersebut secara mendasar dilakukan guna mendukung tercapainya visi dan misi Perseroan, sejalan dengan pencapaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2020-2024. Lebih dari itu, penyesuaian model kompetensi dilakukan untuk mengakomodasi kapabilitas baru di dalam struktur organisasi Perseroan.

Model Kompetensi KAI tersebut diberlakukan berdasarkan Peraturan Direksi PER.U/KH.503/IX/1/KA-2021 tentang Kamus dan Profil Kompetensi.

COMPETENCY DEVELOPMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

In line with the development of the role of HC and the dynamic challenges faced, the Company has made adjustments to the competency model that is applied to KAI employees. This is fundamentally done to support the achievement of the Company's vision and mission, in line with the achievement of the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2020-2024. Moreover, competency model adjustments were made to accommodate new capabilities in the Company's organizational structure.

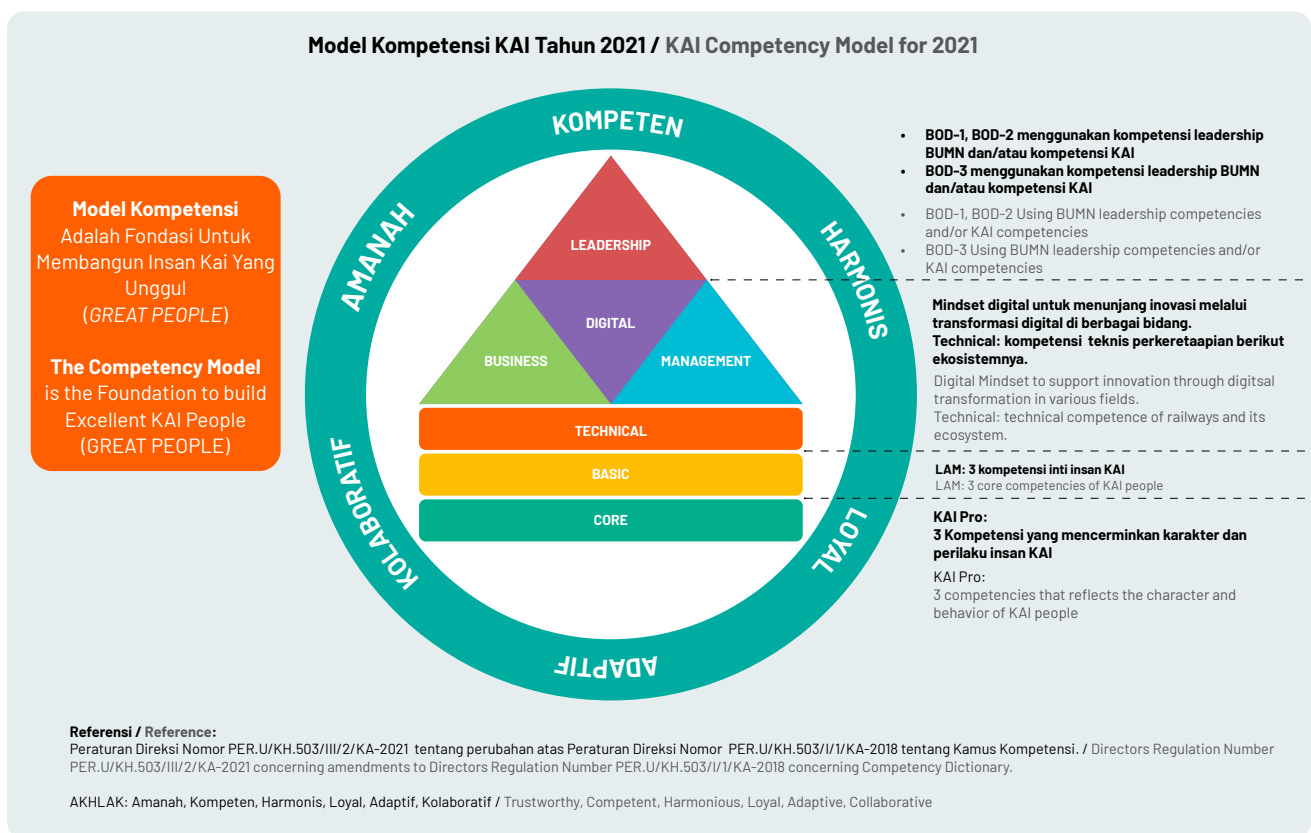
The KAI Competency Model is implemented based on Board of Directors Regulation PER.U/KH.503/IX/1/KA-2021 on Competence Profile and Dictionary.

Lebih lanjut, Model Kompetensi KAI terdiri atas kompetensi yang bersifat non-teknis (*soft-competency*) dan teknis (*hard-competency*). Kompetensi non-teknis mengacu pada kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, mengelola hubungan antar-manusia, serta membangun interaksi dengan orang lain, terdiri dari *Basic*, *Core* dan *Leadership*. Adapun, kompetensi teknis merupakan keterampilan teknis yang melekat atau dibutuhkan untuk profesi/posisi tertentu, terdiri dari *Technical*, *Bussiness*, *Digital* dan *Management*.

Furthermore, KAI's Competency Model consists of non-technical (*soft-competency*) and technical (*hard-competency*) competencies. Non-technical competence refers to competencies that are closely related to the ability to manage work processes, manage human relations, and build interactions with other people, consisting of Basic, Core, and Leadership. Meanwhile, technical competencies are technical skills that are inherent or required for certain professions/positions, consisting of Technical, Business, Digital and Management.

Penjelasan mengenai Model Kompetensi KAI dapat dilihat melalui ilustrasi berikut:

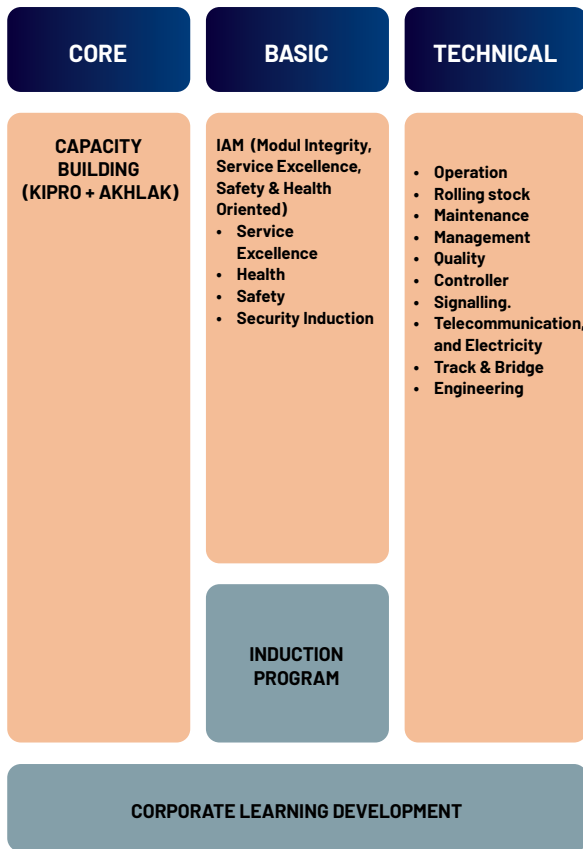
An explanation of the KAI Competency Model can be seen in the following illustration:



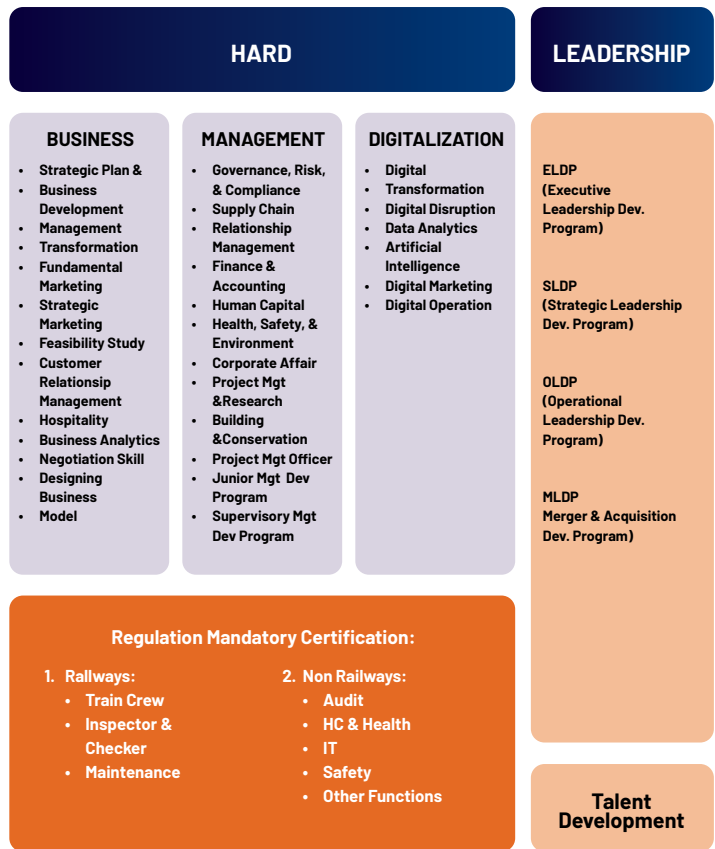
Model kompetensi tersebut menjadi dasar untuk penyusunan profil kompetensi jabatan, dimana setiap profil kompetensi jabatan terdiri dari 7 bagian kompetensi, yaitu *Core*, *Basic*, *Technical*, *Bussiness*, *Digital*, *Management* dan *Leadership*.

This competency model forms the basis for preparing job competency profiles, where each job competency profile consists of 7 competency sections, namely Core, Basic, Technical, Business, Digital, Management and Leadership.

Learning Development System and Program



Learning Development System and Program



KAI Value: Amanah - Kompeten-Harmonis-Loyal-Adaptif-Kolaboratif
KAI Value: Trustworthy - Competent - Harmony - Loyal - Adaptive - Collaborative

“LEARNING DEVELOPMENT SYSTEM AND PROGRAM”

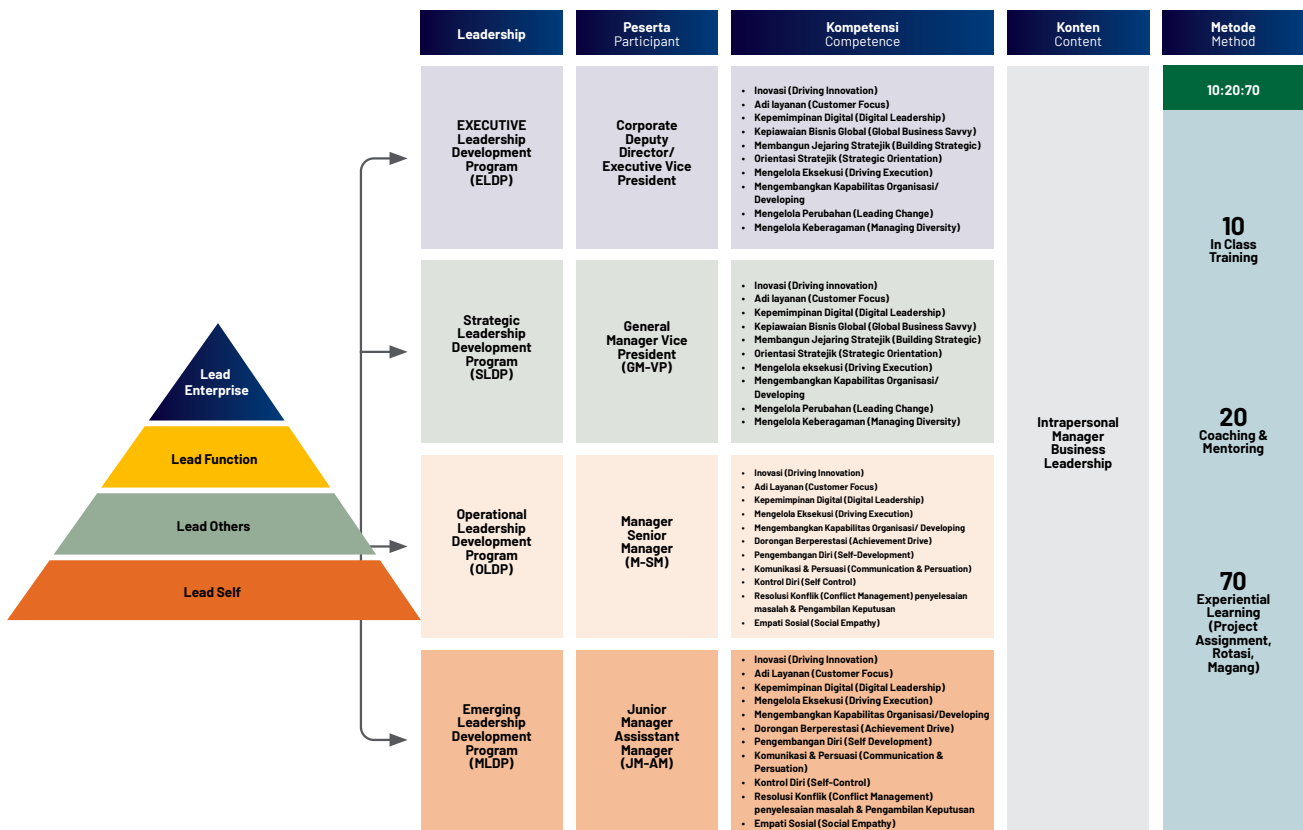
- **Core**, merupakan program pengembangan utama untuk membentuk karakter seluruh insan KAI yang kolaboratif, inovatif, dan proaktif.
- **Basic**, merupakan program pengembangan untuk membekali pekerja terkait dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seluruh insan KAI (Integritas, Adiguna Layanan, Mengutamakan Keselamatan).
- **Technical**, merupakan program pengembangan untuk meningkatkan keahlian melalui pemenuhan kompetensi teknik *railway* dan ekosistemnya.
- **Hard Business**, merupakan program pengembangan untuk mendukung bisnis Perseroan dalam mewujudkan visi misi Perseroan melalui pemenuhan kompetensi teknik terkait bisnis.
- **Hard Management**, merupakan program pengembangan untuk memaksimalkan fungsi jabatan melalui pemenuhan kompetensi yang mendukung fungsi pekerjaannya atau jabatan.

“LEARNING DEVELOPMENT SYSTEM AND PROGRAM”

- **Core** is the main development program to shape the character of all KAI personnel who are collaborative, innovative, and proactive,
- **Basic** is a development program to equip workers with the basic competencies that all KAI personnel must possess (Integrity, Service Excellence, Safety Oriented).
- **Technical** is a development program to improve expertise through fulfilling the competences of railway engineering and its ecosystem.
- **Hard Business** is a development program to support the company’s business in realizing the company’s vision and mission through the fulfillment of business-related technical competencies.
- **Hard Management** is a development program to maximize the function of the position through the fulfillment of competencies that support the job function or position.

- **Hard Digital**, merupakan program pengembangan dalam menghadapi tantangan di era digitalisasi melalui pemenuhan kompetensi digitalisasi.
- **Leadership**, merupakan program pengembangan untuk menyiapkan pimpinan Perseroan yang bisa bersaing dengan BUMN lain melalui pemenuhan kompetensi *leadership* bagi para pimpinan.

- **Hard Digital** is a development program in facing challenges in the digitalization era by fulfilling digitalization competencies.
- **Leadership** is a development program to prepare company leaders who can compete with other SOEs by fulfilling leadership competencies for leaders.



KAI menerapkan model pengembangan yang dilakukan baik secara individual maupun kelompok. Secara individual, pegawai diberikan program pengembangan sesuai **Prinsip 70:20:10**, dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Prinsip 70**, kepada pekerja setiap tahun akan dilakukan rotasi dan diberikan *project assignment* khusus.
- **Prinsip 20**, kepada pekerja akan diberikan pendampingan dari *coach* internal dan eksternal.
- **Prinsip 10**, kepada pekerja akan diberikan pelatihan dan pengembangan sesuai *Learning Development System* di atas.

Adapun, secara kelompok, pegawai mendapatkan program pengembangan terintegrasi sesuai Model Kompetensi KAI.

KAI applies a development model that is carried out both individually and in groups. Individually, employees are given a development program according to Principle 70:20:10, with the following explanation:

- **Principle 70**, employees will be rotated every year and given special project assignments.
- **Principle 20**, employees will be provided with assistance from internal and external coaches.
- **Principle 10**, employees will be given training and development according to the Learning Development System above.

Meanwhile, as a group, employees receive an integrated development program according to the KAI Competency Model.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KARIER [GRI 103-2]

KAI memahami bahwa pegawai merupakan aset yang paling berharga sekaligus mitra strategis bagi keseluruhan upaya pengelolaan dan pengembangan bisnis. Pegawai yang ditempatkan pada posisi yang tidak tepat, cenderung akan menghadapi hambatan yang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang. Hal tersebut merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi Perseroan.

Atas dasar pemahaman itu, KAI menyusun dan menerapkan pola pengembangan karier yang didasarkan pada kompetensi pegawai. Masing-masing pegawai dipastikan mendapat kesempatan yang luas untuk dapat berkarya pada berbagai jabatan dan posisi, melalui jalur promosi berupa pola dan jalur karier. KAI menerapkan pengembangan karier bagi pegawai secara objektif, berdasarkan kompetensi masing-masing pegawai. Dengan penerapan itu, organisasi KAI diharapkan akan terisi oleh pegawai-pegawai dengan kompetensi yang sesuai, yaitu memenuhi persyaratan kompetensi jabatan.

KAI menerapkan pola karier yang jelas dan sistematis bagi seluruh pegawai. Melalui pola karier tersebut, Perseroan memetakan urutan posisi/jabatan yang harus dilalui oleh masing-masing pegawai untuk mencapai tingkat jabatan tertentu di dalam organisasi KAI. Pola karier KAI disusun berdasarkan profil kompetensi posisi (*position competency profile*) yang perlu dimiliki seseorang untuk menduduki suatu posisi tertentu.

Terkait hal tersebut, KAI memahami bahwa setiap individu memiliki minat dan kemampuan yang berbeda-beda. Selain itu, KAI juga memahami bahwa jaminan bagi tersedianya kesempatan yang terbuka dan setara untuk mengembangkan karier akan menghasilkan prestasi kerja yang optimal pada pegawai. Atas pemahaman tersebut, KAI menerapkan pola karier utama yang terbagi ke dalam 2 (dua) jalur karier yang bersifat paralel, yaitu jalur karier jalur karier profesional (fungsional) dan struktural (manajerial).

Jalur karier fungsional/keahlian mengacu pada jalur karier yang menunjang pengembangan kualifikasi individu yang bertanggung jawab melaksanakan jabatan spesialis, administratif, dan teknikal. Karenanya, masing-masing posisi pada jalur karier ini memfasilitasi pengembangan karier pegawai pada jabatan spesialis, administratif, dan teknikal. Adapun, jalur karier struktural merupakan jalur karier yang

CAREER DEVELOPMENT POLICY AND IMPLEMENTATION [GRI 103-2]

KAI regards employees as the most valuable assets as well as strategic partners for the entire business management and development efforts. Employees in inappropriate positions tend to face greater obstacles to grow and develop which is an unfavorable condition for the Company.

Therefore, KAI develops and implements a career development pattern based on employee competence. Each employee is ensured to have broad opportunities to be able to work in various positions and positions, through promotion channels in the form of patterns and career paths. KAI implements career development for employees objectively, based on the competence of each employee. With this implementation, it is hoped that the KAI organization will be filled with employees with the appropriate competencies, namely meeting the job competency requirements.

KAI applies a clear and systematic career pattern for all employees. Through this career pattern, the Company maps out the sequence of positions/positions that must be passed by each employee to reach a certain level of position within the KAI organization. KAI's career pattern is arranged based on the position competency profile (*position competencies profile*) that a person needs to have to occupy a certain position.

In this regard, KAI understands that each individual has different interests and abilities. KAI also understands that guarantees for the availability of open and equal opportunities for career development to realize optimal work performance for employees. Based on this understanding, KAI applies the main career pattern which is divided into 2 (two) parallel career paths, namely professional (functional) and structural (managerial) career paths.

Functional/expertise career paths refer to career paths that support the development of the qualifications of individuals who are responsible for carrying out specialist, administrative and technical positions. Hence, each position on this career path facilitates the career development of employees in specialist, administrative, and technical positions. Meanwhile, the structural career path is a career path that supports

menunjang pengembangan untuk memenuhi kebutuhan KAI dalam mempersiapkan pemimpin di dalam organisasi. Posisi pada jalur karier ini memfasilitasi pengembangan karier pegawai pada semua jabatan struktural.

Pola karier dan jalur karier KAI disusun berdasarkan *Job Family*, sesuai *Job Grade*, *Job Class*, dan *Job Classification*. *Job Family* terbagi menjadi 9 (sembilan) dengan penjelasan sebagai berikut:

Job Family KAI

No.	Job Family	Deskripsi / Description	Sub-Job Family
1	Komersial dan Pelayanan (Commercial & Services)	Pekerjaan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pendapatan Perseroan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pemasaran, penjualan dan pelayanan baik angkutan penumpang (ekonomi, bisnis dan eksekutif) maupun angkutan barang serta pengusahaan asset. / Works related to efforts to increase the Company's revenue starting from planning, implementing, evaluating marketing, selling and servicing both passenger transportation (economic, business and executive) as well as freight transportation and asset management.	<ul style="list-style-type: none"> Assets Commercialization; Transport Marketing and Sales; Services.
2	Operasi (Operation)	Pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan pengoperasian sarana dan prasarana KA angkutan barang dan penumpang agar perjalanan KA aman dan target pendapatan Perseroan tercapai. / Works related to planning, controlling and operating the facilities and infrastructure of freight and passenger trains so that train trips are safe and the Company's revenue targets are achieved.	<ul style="list-style-type: none"> Rolling Stock Operation; Infrastructure Operation.
3	Perawatan (Maintenance)	Pekerjaan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pemeliharaan dan perbaikan sarana kereta api (lokomotif, kereta, gerbong), prasarana kereta api (jalan rel dan jembatan, sinyal telekomunikasi dan listrik aliran atas), tanah dan bangunan berikut fasilitas pendukungnya. / Works related to the planning, implementation and evaluation of the maintenance and repair of rolling stock (locomotives, trains, carriages), railway infrastructure (railways and bridges, telecommunication signals and overhead electricity), land and buildings including their supporting facilities.	<ul style="list-style-type: none"> Signal, Telecommunication and Electricity; Track and Bridge; Rolling Stock; Building.
4	Keuangan (Financial)	Pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan keuangan Perseroan, mulai dari perencanaan keuangan, pendanaan, investasi jangka pendek dan jangka panjang, pencatatan, pengalokasian, pengelolaan kas, pengendalian dan pendayagunaan keuangan; / Works related to the Company's financial management, starting from financial planning, funding, short- and long-term investments, recording, allocation, cash management as well as controlling and utilizing of finances;	-
5	Logistik (Logistics)	Pekerjaan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pengadaan barang dan jasa berupa sarana-prasarana kereta api, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi dan barang/jasa lainnya, serta, penyimpanan, pendistribusian dan pengendalian persediaan di gudang. / Works related to planning, implementing, controlling and evaluating the procurement of goods and services in the form of railway infrastructure, construction services, consulting services and other goods/services, as well as storage, distribution and inventory control in warehouses.	<ul style="list-style-type: none"> Procurement; Warehousing.
6	Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Capital Management)	Pekerjaan yang terkait pengelolaan pekerja, mulai dari proses perencanaan, seleksi dan penerimaan, pengembangan sampai dengan pemberhentian pekerja. / Works related to employee management, starting from the process of planning, selection and acceptance, development, and termination of employment.	<ul style="list-style-type: none"> Human Capital Planning and Operation; Human Capital Development.
7	Kepatuhan, Risiko & Tata Kelola (Governance, Risk & Compliance)	Pekerjaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap aspek legal dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yang menyangkut pada tindakan-tindakan hukum Perseroan pada proses perikatan bisnis, pemberian pertimbangan dan bantuan penyelesaian masalah hukum serta pengendalian atas risiko bisnis, pelaksanaan audit internal dan pengelolaan sistem manajemen mutu. / Works related to compliance with legal aspects and good corporate governance (GCG) relating to the company's legal actions in the business engagement process, providing consideration and assistance in solving legal problems and control over business risk, implementation of internal audit and management of quality management system.	<ul style="list-style-type: none"> Legal; Safety; Risk Management, Audit, Quality Assurance; Asset Management.

development to meet KAI's needs in preparing leaders within the organization. Positions on this career path facilitate the career development of employees in all structural positions.

KAI's career patterns and career paths are arranged based on Job Family, according to Job Grade, Job Class, and Job Classification. The Job Family consists of 9 (nine) groups with the following explanation:

KAI Job Family

No.	Job Family	Deskripsi / Description	Sub-Job Family
8	Umum (General Affair)	Pekerjaan yang terkait dengan memelihara hubungan dan komunikasi Perseroan dengan berbagai pihak baik eksternal maupun internal, serta memastikan reputasi Perseroan dengan segala kepentingan dan hak-haknya terjaga dengan baik. / Works related to maintaining company relationships and communications with various external and internal parties, as well as ensuring the company's reputation with all its interests and rights are well maintained.	<ul style="list-style-type: none"> • Public Relation; • Health; • Security; • General Facilities; • Documents.
9	Teknologi Informasi (Information Technology)	Pekerjaan yang terkait dengan merencanakan, merancang, mendesain, menjalankan mengevaluasi, memelihara, menjaga perangkat dan sistem teknologi informasi agar berfungsi secara optimal bagi kelancaran proses bisnis Perseroan./ Works related to planning, designing, designing, evaluating, maintaining, maintaining information technology devices and systems to function optimally for the smooth running of the Company's business processes.	<ul style="list-style-type: none"> • IT Planning; • IT Operation; • IT Development.

Selain itu, KAI juga memberikan kesempatan mengembangkan karier melalui Program Pengembangan Non-Training, antara lain:

1. Tugas Belajar

Program Beasiswa diberikan kepada Pekerja melalui seleksi internal dan eksternal, di dalam, dan luar negeri

2. Talent Secondment

Program magang di Kementerian BUMN melalui seleksi internal dan eksternal

3. Job Assignment

Tugas yang diberikan kepada Pekerja berupa penyelesaian studi kasus dengan topik tertentu atau penyelesaian suatu masalah atau proyek tertentu yang selanjutnya dibuat dalam bentuk laporan dan dipresentasikan

4. Coaching & Mentoring

Diarahkan untuk meningkatkan kinerja, menggali potensi dan mengidentifikasi langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Pekerja

5. Sharing Session

Program pengembangan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk untuk bidang tertentu dengan tujuan menambah wawasan pekerja

6. Benchmarking

Bertujuan untuk mencari perbandingan terhadap suatu program kerja ataupun hal lain dari instansi lain yang dipilih yang bisa diterapkan di perusahaan

KAI also provides career development opportunities through the Non-Training Development Program, including:

1. Study Task

Scholarship Program is given to workers through internal and external selection, domestically and overseas.

2. Talent Secondment

Internship program at the Ministry of SOE through internal and external selection.

3. Job Assignments

Tasks given to employees are in the form of completing case studies with a certain topic or solving a particular problem or project which is then made in the form of a report and presented.

4. Coaching & Mentoring

Directed to improve performance, explore potential, and identify corrective steps that need to be taken by employees.

5. Sharing Sessions

Development program by presenting competent resource persons for certain fields with the aim of broadening employee knowledge.

6. Benchmarking

Aims to find a comparison of a work program or other things from other selected agencies that can be implemented in the Company.

PENILAIAN KINERJA

Sistem Penilaian Kinerja merupakan alat evaluasi pencapaian target dan tujuan yang harus dicapai, baik oleh seluruh pegawai maupun satuan kerja. Sistem Penilaian Kinerja disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang perusahaan, sesuai *Key Performance Indicators* (KPI)/*Performance Indicators* (PI) Korporat. Penerapan Sistem Penilaian Kinerja dilakukan dalam rangka menyelaraskan pencapaian kinerja pekerja terhadap sasaran kinerja Perseroan melalui optimalisasi sumber daya manusia.

PERFORMANCE ASSESSMENT

The Performance Assessment System is an evaluation tool for achieving targets and goals that must be completed by all employees and work units that are prepared based on the company's long-term vision, mission, and goals and under Key Performance Indicators (KPI)/Corporate Performance Indicators (PI) to harmonize the achievement of employee performance towards the company's performance targets through the optimization of human capital.

Tujuan Penilaian Kinerja

KAI menerapkan Sistem Penilaian Kinerja dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

a. Performance Review

Tujuan strategis, yaitu melihat pencapaian kinerja pada level individu, unit kerja dan organisasi terhadap sasaran kinerja Perseroan.

b. Potential Review

Sebagai bahan evaluasi *feedback* kinerja, yaitu sebagai sarana untuk meninjau potensi individu, unit kerja maupun organisasi untuk tujuan pengembangan.

c. Reward and Punishment

Bahwa hasil penilaian kinerja menjadi informasi yang valid bagi pemberian *reward and punishment*, serta keputusan MSDM lainnya seperti:

1. Pertimbangan promosi, rotasi, maupun demosi pekerja.
2. Sebagai salah satu variabel perhitungan *Talent Management*.
3. Pertimbangan pemberian tunjangan tidak tetap, bonus tahunan, dan lain-lain.

Sistem Penilaian Kinerja diterapkan untuk mengukur pencapaian pegawai terhadap target individu yang merupakan *cascading*/turunan dari target atasannya, agar terjadi keselarasan antara tujuan Perseroan dengan tujuan unit-unit kerja. Sasaran strategis pada tingkat Perseroan dijabarkan secara lebih terperinci ke tingkat divisi hingga ke tingkat individu.

Terdapat 3 (tiga) hasil yang akan diperoleh melalui Sistem Penilaian Kinerja, sebagai berikut:

- a. **Nilai Kerja Pekerja (NKP)**, yaitu hasil penilaian pencapaian kinerja pekerja pada satu posisi atau lebih dalam satu tahun anggaran (Penilaian yang menjadi tanggung jawab Pekerja).
- b. **Nilai Kerja jabatan (NKJ)**, yaitu hasil penilaian pencapaian kinerja suatu jabatan dalam satu tahun anggaran (unit kerja).
- c. **Nilai Kerja Individu (NKI)**, yaitu komposisi penilaian KPI perusahaan, KPI satuan organisasi, KPI individu.

Performance Assessment Objectives

KAI implements a Performance Assessment System with the following objectives:

a. Performance Review

Strategic objectives, namely to see the achievement of performance at the individual, work unit and organizational level against the Company's performance targets.

b. Potential Review

Performance feedback evaluation material, namely as a means to review the potential of individuals, work units and organizations for development purposes.

c. Rewards and Punishment

That the results of performance assessment become valid information for giving rewards and punishment, as well as other HCM decisions such as:

1. Consideration of promotion, rotation and demotion of employees.
2. As one of the variables for Talent Management.
3. Consideration of providing non-permanent allowances, annual bonuses, etc.

The Performance Assessment System is implemented to measure employee achievement against individual targets which are *cascading* /derivative of the targets of their superiors, so that there is harmony between the Company's objectives and the objectives of the work units. The strategic objectives at the Company level are described in more detail down to the division level down to the individual level.

There are 3 (three) results that will be obtained through the Performance Assessment System, as follows:

- a. **Employee Work Value (NKP)**, namely the result of assessing the achievement of employee performance in one position or more in one fiscal year (assessment that is the responsibility of the employee).
- b. **Position Work Value (NKJ)**, namely the result of evaluating the performance achievement of a position in one fiscal year (work unit).
- c. **Individual Work Value (NKI)**, namely the composition of company KPI assessments, organizational unit KPIs, individual KPIs.

Siklus Manajemen Kinerja

KAI menerapkan Siklus Manajemen Kinerja yang terdiri dari:

1. Tahap Perencanaan.
2. Tahap Penilaian, terbagi menjadi:
 - Penilaian Kinerja Sementara/Mutasi yang disertai *Performance Coaching*.
 - Penilaian kinerja mutasi (periode setelah perencanaan dan sebelum penilaian akhir).
 - Penilaian Kinerja Akhir.

Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan/pengisian target KPI/PI dilakukan oleh pegawai selain pelaksana yang berkedudukan di Kantor Pusat berdasarkan *cascading* dari atasan. Kemudian, dalam perencanaan KPI/PI, koordinasi perencanaan/pengisian KPI/PI Daerah dikoordinasikan oleh Pembina di Kantor Pusat. Hal itu dilakukan dengan tujuan adanya standarisasi KPI/PI bagi pegawai dengan jabatan yang sama di daerah. PI pegawai merupakan *cascading*/turunan dari target KPI/PI atasannya, guna menjaga keselarasan antara tujuan Perseroan dengan tujuan unit-unit kerjanya.

Tahap Penilaian

Tahap penilaian dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau setiap kali terjadi mutasi pada tahun berjalan. Atasan langsung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemantauan kinerja pekerja yang menjadi bawahannya. Evaluasi kinerja dilakukan dalam bentuk pengisian catatan dari atasan setiap selesai melakukan penilaian sementara/mutasi, agar dapat mencapai target pada akhir tahun.

Penilaian NKP maupun NKJ dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja individu atau jabatan pegawai selama satu tahun penuh. Terkait hal itu, KAI telah membentuk tim Komite Verifikasi Kinerja Pekerja (KVKP) untuk memvalidasi data perencanaan dan penilaian KPI, dalam hal ini adalah pegawai yang secara langsung bertanggung jawab kepada Direksi atau Kepala Daerah.

Selain penilaian kinerja, Perseroan juga menerapkan penilaian kompetensi pegawai. Penilaian kompetensi dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kepribadian, serta sikap mental yang dibutuhkan dalam suatu posisi jabatan, sehingga pemegang jabatan dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan memenuhi tujuan organisasi.

Performance Management Cycle

KAI implements a Performance Management Cycle consisting of:

1. Planning Stage.
2. Assessment Stage, divided into:
 - Temporary/Rotation Performance Assessment accompanied by Performance Coaching.
 - Evaluation of rotation performance (period after planning and before final assessment).
 - Final Performance Assessment.

Planning Stage

The planning/filling stage of KPI/PI targets is carried out by workers other than executors who are domiciled at the Head Office based on cascading from their superiors, while for Regional KPI/PIs in KPI/PI planning is coordinated by the supervisor at the Head Office with the aim of standardizing KPI/PI for workers with same position in the region. PI of workers is a cascading/derivative of the target KPI/PI of their superiors so that there is harmony between the objectives of the company and the goals of its work units.

Assessment Stage

The assessment stage is carried out at least twice a year and/or every time there is a mutation in the current year. Supervisors are directly responsible for monitoring the performance of employees who are subordinates to them. Performance evaluation is carried out in the form of filling in the records of the employees after each interim/mutation assessment is completed in order to achieve the target at the end of the year.

The assessment of NKP and NKJ is carried out based on individual performance achievements or employee positions for a full year. In this regard, KAI has established a Employee Performance Verification Committee (KVKP) team to validate KPI planning and assessment data, in this case employees who are directly responsible to the Board of Directors or Regional Heads.

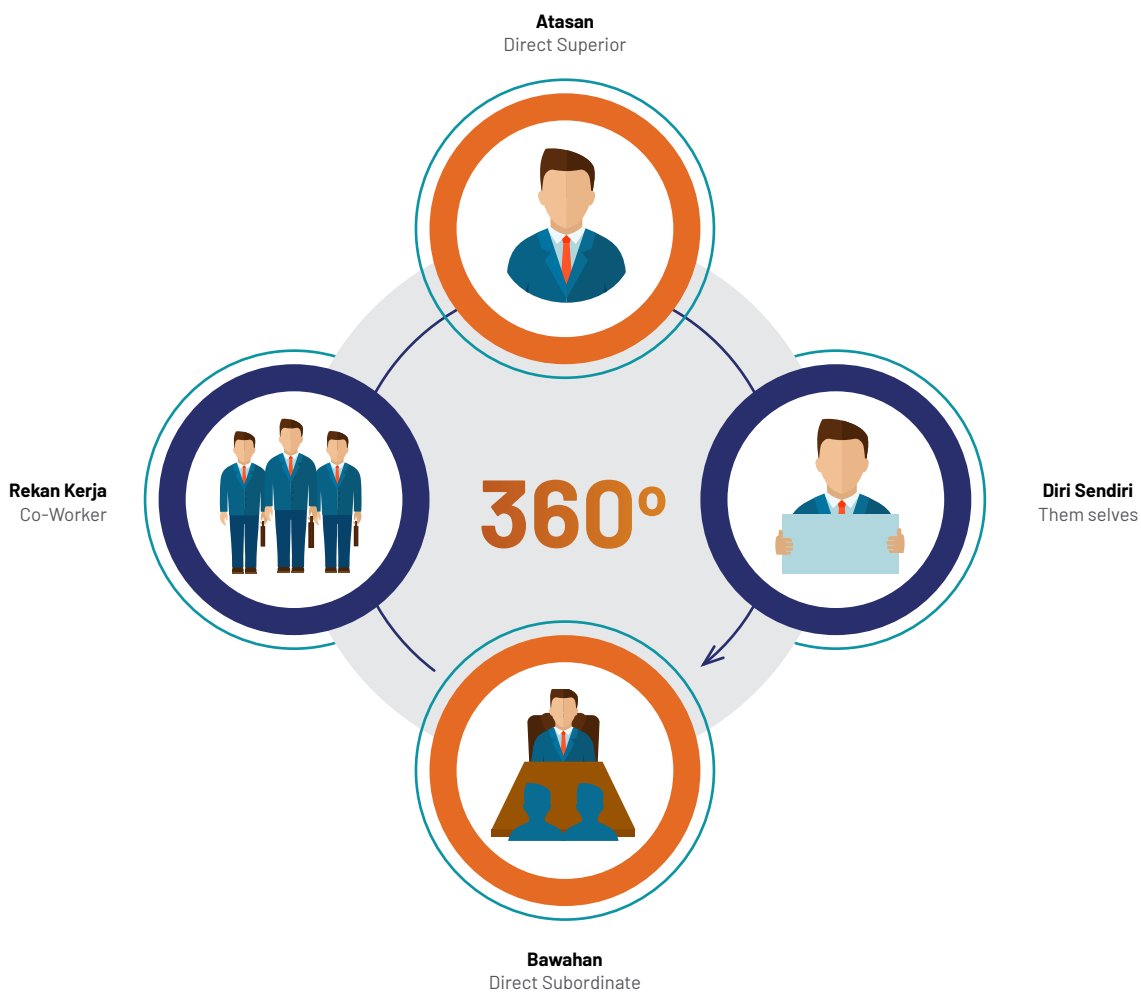
Aside from performance assessment, the Company also implements employee competency assessment. Competency assessment is carried out to determine the level of knowledge, abilities, skills, personality, and mental attitude required in a position, so that the incumbent can carry out their duties effectively and meet organizational objectives.

Untuk mengurangi faktor subjektivitas, penilaian kompetensi dilakukan dengan menggunakan metode multirater 360°, yaitu setiap pegawai dinilai oleh atasan langsung, rekan kerja, bawahan langsung, dan diri sendiri. Hasil penilaian kinerja dan kompetensi berdasarkan metode tersebut merupakan bahan pertimbangan bagi penyusunan rencana pengembangan pegawai, yang memuat di antaranya perbaikan kinerja, penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karier, efisiensi penempatan staf, dan umpan balik yang objektif bagi bawahan dan atasan.

To reduce subjectivity, competency assessment is carried out using the 360°, multirater method in which each employee is assessed by direct superiors, colleagues, direct subordinates and themselves. The results of performance and competency assessments become input for employee development plans, including performance improvements, compensation adjustments, placement decisions, training and development needs, career planning and development, staff placement efficiency, and objective feedback for subordinates and superiors.

Metode Multirater 360°

Multirater 360° Method



KEBIJAKAN REMUNERASI [GRI 2-19]

KAI menerapkan kebijakan remunerasi yang memuat ketentuan terkait struktur dan besaran penghasilan dan tunjangan bagi pegawai. Penghasilan pegawai yang diberikan oleh KAI terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pendapatan upah dan pendapatan non-upah. Terkait hal itu, KAI memberikan penghasilan dan tunjangan kepada pegawai, pegawai perbantuan, pegawai yang diperbantukan, hingga calon pegawai.

REMUNERATION POLICY [GRI 2-19]

KAI implements a remuneration policy that regulates the structure and amount of income and benefits for employees. Employee income provided by KAI is divided into 2 (two), namely wage and non-wage. In this regard, KAI provides income and benefits to employees, assisted employees, seconded employees, and prospective employees.

Struktur dan skala upah disusun dengan memperhatikan masa kerja golongan, jabatan, pendidikan, dan kompetensi dari pegawai. Atas dasar itu, KAI menerapkan klasifikasi penghasilan pegawai dengan penjelasan sebagai berikut:

Pendapatan Upah

1. Upah pokok.
2. Tunjangan tetap.
3. Tunjangan tidak tetap.

Pendapatan Non-Upah

1. Imbalan Kerja Keberhasilan Kinerja;
2. Tunjangan Cuti;
3. Emolumen;
4. Insentif;
5. Tunjangan Operasional Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
6. Premi Awak Sarana Perkeretaapian;
7. Premi Operasional Non-Awak Kereta Api;
8. Premi Pemeliharaan Sarana Perkeretaapian;
9. Premi Pemeliharaan Prasarana Perkeretaapian;
10. Bonus Berupa Imbalan Kerja Keberhasilan Kinerja; dan
11. Uang Pengganti Fasilitas Kerja, yang terdiri dari atas:
 - a. Perjalanan Dinas.
 - b. Fasilitas Mutasi.
 - c. Tunjangan Pakaian Dinas.

PROGRAM PENSIUN [GRI 201-3]

Perseroan telah mengikutsertakan pegawai dalam seluruh program jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan program pascakerja. Adapun, program pasca-kerja dikelola oleh:

1. PT Taspen (Persero) untuk program pensiun bulanan bagi Pekerja Eks-PNS Dephub, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007;
2. PT IFG Life untuk Pendanaan Hari Tua bagi Pekerja Eks Perum;
3. PT IFG Life untuk program Pasca Kerja Bagi Pekerja Persero;
4. PT Asuransi Jiwa Taspen untuk program Tabungan Hari Tua; dan
5. PT Asuransi Jiwa Taspen untuk program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pensiunan Pekerja Eks-Perum dan Pekerja Persero.

The structure and scale of wages are prepared by taking into account work period, position, education, and competence of employees. On that basis, KAI applies an employee salary classification with the following explanation:

Wage

1. Basic wage.
2. Fixed allowances.
3. Non-permanent benefits.

Non-Wage

1. Rewards of Performance Achievement
2. Leave Allowances;
3. Emoluments;
4. Incentives;
5. Operational Allowances for Eid al-Fitr, Christmas, and New Year Transportation Services;
6. Railway Facility Crew Premium;
7. Railway Non-Crew Operational Premium;
8. Railway Facility Maintenance Premium;
9. Railway Infrastructure Maintenance Premium;
10. Bonuses in the form of Work Rewards for Performance Success; and
11. Work Facility Compensation Money, which consists of:
 - a. Business Trip
 - b. Rotation Facility
 - c. Office Uniform

PENSION PROGRAM [GRI 201-3]

The Company has enrolled its employees in the labor social security program is managed by the Employment Social Security Administration Agency (BPJS Ketenagakerjaan). Meanwhile, the post-employment program is managed by:

1. PT Taspen (Persero) for the monthly pension program for former civil servants in the Department of Transportation in accordance with Government Regulation No. 64 of 2007;
2. PT IFG Life for the Retirement Insurance program for Former Perum Employees;
3. PT IFG Life for the Post-Employment Program for Persero Employees;
4. PT Asuransi Jiwa Taspen for the Retirement Savings program; and
5. PT Asuransi Jiwa Taspen for the Healthcare Insurance program for Retired Former Perum Employees and Persero Employees.

HUMAN CAPITAL SYSTEM AND INFRASTRUCTURE

Human Capital System and Infrastructure

KAI menerapkan *Human Capital System and Infrastructure* dengan penjabaran sebagai berikut:

KAI implements a *Human Capital System and Infrastructure* with the following description:

HUMAN CAPITAL SYSTEM AND INFRASTRUCTURE



INTERNALISASI BUDAYA PERUSAHAAN

Internalization of Corporate Culture

Pada 2022, KAI melakukan beberapa program internalisasi Budaya Perusahaan "AKHLAK", yang merupakan rangkaian program internalisasi berkelanjutan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Program Sosialisasi Budaya

- Sosialisasi melalui media *Banner E-Office*, dilaksanakan setiap bulan selama satu tahun.
- Sosialisasi melalui *Pop Up E-Office*, dilaksanakan seminggu sekali selama satu tahun.
- Sosialisasi melalui *Banner Email Corporate*, dilaksanakan seminggu sekali selama satu tahun.
- Sosialisasi melalui *Millis Broadcast* dilaksanakan dua kali dalam seminggu selama satu tahun.
- Sosialisasi melalui majalah *Kontak*, dilaksanakan setiap bulan selama satu tahun.
- Sosialisasi pada kegiatan *Morning Booster*, dilaksanakan setiap hari kecuali hari Minggu dalam satu tahun.
- Sosialisasi menggunakan spanduk tematik yang dilaksanakan empat kali dalam setahun.

2. Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Budaya melalui Event Perusahaan

- *Workshop "Find The Big Why"* pada rapat kerja perusahaan.
- *Focus Group Discussion (FGD)* penyusunan *Culture Acton Plan*.
- Pelaksanaan *BoC/BoD Retreat*.
- Budaya dalam HUT KA.

3. Kegiatan pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan

- Pelatihan kepada *Culture Agent* KAI, di antaranya *Change Champion, Change Agent, Culture Booster*.
- Program "*Living the Grand Why*" untuk seluruh pegawai.

In 2022, KAI carried out several "AKHLAK" Corporate Culture internalization programs, which are a series of ongoing internalization programs, with the following details:

1. Cultural Dissemination Program

- Dissemination through E-Office Banners, held every month for one year.
- Dissemination through E-Office Pop Up, held once a week for one year.
- Dissemination through Corporate E-mail Banners, held once a week for one year.
- Dissemination through Millis Broadcast, held twice a week for one year.
- Dissemination through the *Kontak* magazine, held every month for one year.
- Dissemination on *Morning Booster* activities, held every day except Sunday in one year.
- Dissemination using thematic banners which is held four times a year.

2. Cultural Development and Implementation Activities through Company Events

- *Workshop "Find The Big Why"* at company work meetings.
- *Focus Group Discussion (FGD)* for preparing the *Culture Action Plan*.
- Implementation of *BoC/BoD Retreat*.
- Culture in KA Anniversary.

3. Competency development activities through training

- Training for *Culture Agents* KAI, including *Change Champion, Change Agent, Culture Booster*.
- "*Living the Grand Why*" program for all employees.

Selain program berkelanjutan tahunan, KAI juga mengadakan beberapa program baru pada 2022, di antaranya:

1. Melakukan sosialisasi secara tatap muka langsung terhadap program-program Budaya;
2. Adanya program *culture inpection* ke Daop, Divre, Balaiyasa dan anak perusahaan;
3. Pelaksanaan *Mandatory Culture Program* (SPOOR, BESTIE, RAIL) yang dijalankan oleh seluruh kedudukan;
4. Penyelenggaraan event *KAI Culture Fun Day*;
5. Penyelenggaraan event *Millennials Summit*.

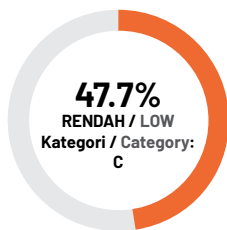
KAI melakukan survei *Integrated Culture Assessment* dalam rangka mengukur indeks tingkat kesehatan budaya perusahaan, yang menghasilkan Total Indeks Kesehatan Organisasi (*Total Corporate Culture Health Index*). Perincian mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

In addition to the annual sustainable program, KAI also held several new programs in 2022, as follows:

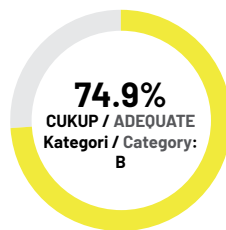
1. Conducted face-to-face dissemination of cultural programs;
2. Culture inspection program for Daop, Divre, Balaiyasa and subsidiaries;
3. Implementation of the *Mandatory Culture Program* (SPOOR, BESTIE, RAIL) carried out by all positions.
4. Organizing the *KAI Culture Fun Day* event
5. Organizing the *Millennials Summit* event

KAI conducted an *Integrated Culture Assessment* survey in order to measure the corporate culture health level index, which resulted in the Total Corporate Culture Health Index. The details regarding this matter are as follows:

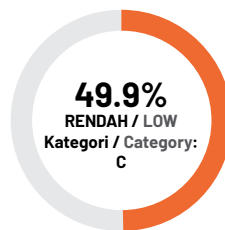
EXECUTIVE SUMMARY AKHLAK CULTURE HEALT INDEX KAI TAHUN 2022



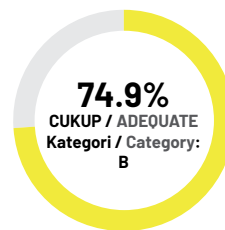
1. INDEKS IMPLEMENTASI AKHLAK / IMPLEMENTATION INDEX MONTHS



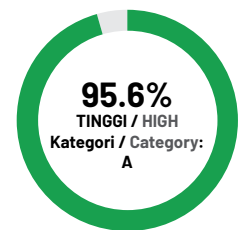
2. INDEKS KESEIMBANGAN / BALANCE INDEX



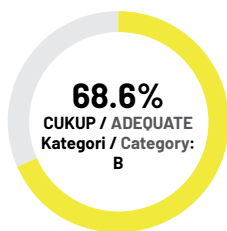
3. INDEKS KESELARASAN NILAI PRIBADI DAN ORGANISASI / INDEX HARMONY OF PERSONAL AND ORGANIZATIONAL VALUES



4. INDEKS KESELARASAN BUDAYA SAAT INI DAN DIHARAPKAN / INDEX OF CURRENT AND EXPECTED CULTURAL ATTENTION



5. INDEKS ENERGI POSITIF / POSITIVE ENERGY INDEX



6. TOTAL INDEKS KESEHATAN BUDAYA ORGANISASI / TOTAL INDEX CULTURAL HEALTH ORGANIZATION

KATEGORI / CATEGORY	RANGE INDEKS / INDEX RANGE	DESKRIPSI / DESCRIPTION
A TINGGI / HIGH	75% - 100%	Budaya organisasi sehat dan produktif / Healthy and productive organizational culture
B CUKUP / ADEQUATE	50% - 74.9%	Budaya organisasi cukup sehat, namun masih ada beberapa hal yg perlu diperbaiki / The organizational culture is quite healthy, but there are still some things that need to be improved
C RENDAH / LOW	25% - 49.9%	Budaya organisasi tidak sehat dan memiliki isu-isu signifikan yang harus diperbaiki segera / The organizational culture is unhealthy and has significant issues that need to be fixed immediately
D SANGAT RENDAH / VERY LOW	0% - 24.9%	Budaya organisasi sangat tidak sehat, memerlukan perubahan signifikan untuk menghindari kegagalan organisasi / Organizational culture is very unhealthy, requiring significant changes to avoid organizational failure

Kategori / Category	Rentang Indeks / Index Range	Deskripsi / Description
Tinggi / High	75-100%	Budaya organisasi sehat dan produktif. / Healthy and productive organizational culture
Cukup / Sufficient	50-74,9%	Budaya organisasi cukup sehat, namun memiliki beberapa isu yang harus diperbaiki. / The organizational culture is quite healthy, but has several issues that need to be fixed.
Rendah / Low	25-49,9%	Budaya organisasi tidak sehat dan memiliki isu-isu signifikan yang harus diperbaiki segera. / The organizational culture is unhealthy and has significant issues that need to be fixed immediately.
Sangat Rendah / Very Low	0-24,9%	Budaya organisasi sangat tidak sehat, memerlukan perubahan signifikan untuk menghindari kegagalan organisasi. / Organizational culture is very unhealthy, requiring significant changes to avoid organizational failure.

RENCANA KERJA HUMAN CAPITAL 2023

Human Capital Work Plan for 2023

STRATEGI MANAJEMEN HUMAN CAPITAL 2023

Untuk tahun 2023, Direktorat SDM & Umum KAI telah menetapkan strategi manajemen *human capital*, dengan penjabaran inisiatif dan sasaran strategis sebagai berikut:

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT STRATEGY FOR 2023

For 2023, the HC & General Directorate of KAI has established a human capital management strategy with an elaboration of strategic initiatives and goals as follows:

Sasaran dan Inisiatif strategis Direktorat SDM & Umum 2023

Strategic Objectives and Initiatives of the HC & General Affairs Directorate for 2023

Uraian / Description	Inisiatif dan Sasaran Strategis / Strategic Objectives and Initiatives
Kapasitas KAI / KAI Capacity	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produktivitas pekerja melalui HC <i>digital transformation</i>. / Increasing worker productivity through HC digital transformation. 2. Integrasi sistem HC KAI Group guna mewujudkan <i>Agile Organization (AO)</i>. / Integration of the KAI Group HC system to create an Agile Organization (AO).
Kompetensi dan Kapabilitas KAI / KAI Competencies and Capabilities	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai <i>Center of Excellence (CoE)</i> / Making the Education and Training Center as Center of Excellence (CoE) 2. Pengembangan dan ketersediaan kandidat <i>talent</i> perempuan, muda, talent BOD-1 untuk BUMN dan <i>digital talent</i> / Development and availability of female and young talent candidates, BOD-1 talent for SOEs and digital talent
Attract and Retain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Human Experience Management (HXM) dengan peningkatan kepuasan pekerja. / Human Experience Management (HXM) with increased worker satisfaction. 2. Membangun kebijakan talent development & career path system kluster logistik transportasi angkutan darat. / Building talent development policies & career path systems for land transportation logistics clusters.
Well Being and Health	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka peningkatan kepuasan pekerja dan peningkatan pendapatan klinik. / Improving the Quality of Health Services in order to increase worker satisfaction and increase clinic income. 2. Digitalisasi pengembangan sistem informasi kesehatan yang fokus pada layanan telemedicine dan E-Claim. / Digitizing the development of a health information system that focuses on telemedicine and E-Claim services.

TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology



KAI telah menetapkan visi perusahaan untuk “Menjadi Solusi Ekosistem Terbaik di Indonesia”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, KAI telah menetapkan sejumlah strategi yang diharapkan mendorong peningkatan kualitas layanan bagi pelanggan, operasional bisnis internal perusahaan, serta perluasan kerja sama kemitraan yang sinergis. Selain itu, KAI secara konsisten terus mengusahakan inovasi dan pengembangan bisnis untuk mendukung pertumbuhan dan ketahanan bisnis perusahaan.

Dalam rangka melaksanakan strategi-strategi tersebut, KAI membutuhkan dukungan Teknologi Informasi (TI). Hingga kini, seiring arus digitalisasi di tengah masyarakat, keberadaan fungsi TI merupakan tuntutan yang secara mutlak harus dipenuhi oleh masing-masing perusahaan. Hal tersebut dilakukan antara lain guna menghadapi perkembangan situasi bisnis masa kini hingga masa mendatang, mencakup tantangan-tantangan yang mungkin hadir secara tidak terduga.

KAI has set a corporate vision to “Become the Best Ecosystem Solution in Indonesia”. In order to achieve this vision, KAI has established a number of strategies that are expected to encourage increased service quality for customers, internal business operations, and expansion of synergistic partnerships. In addition, KAI consistently strives for business innovation and development to support the growth and resilience of the Company’s business.

In implementing these strategies, KAI requires the support of Information Technology (IT). With the current flow of digitalization in society, each company must be equipped of an IT function. This is carried out, among others, in order to deal with developments in the current and future business situation, including unexpected challenges.

“

Dalam rangka melaksanakan strategi-strategi tersebut, KAI membutuhkan dukungan Teknologi Informasi (TI). Hingga kini, seiring arus digitalisasi di tengah masyarakat, keberadaan fungsi TI merupakan tuntutan yang secara mutlak harus dipenuhi oleh masing-masing perusahaan.

In implementing these strategies, KAI requires the support of Information Technology (IT). With the current flow of digitalization in society, each company must be equipped of an IT function.

”

Meski demikian, KAI memahami bahwa penggunaan TI tidak hanya menghadirkan nilai manfaat tetapi juga menghadirkan risiko yang perlu diantisipasi secara serius. Atas pemahaman tersebut, KAI membutuhkan penerapan Tata Kelola TI yang baik. Sehingga, nilai manfaat dari penggunaan TI dapat diperoleh secara optimal, dan pada saat yang sama, risiko-risiko yang ditimbulkan dapat dikelola secara optimal.

Sampai dengan tahun 2022, KAI telah menerapkan pengelolaan TI secara baik dengan dukungan infrastruktur dan Tata Kelola Teknologi Informasi yang kuat.

However, KAI is aware that the benefits of IT also come with risks that must be seriously anticipated. Based on this understanding, KAI prioritizes the implementation of good IT Governance in obtaining optimal benefits from the use of IT while also optimally managing the risks.

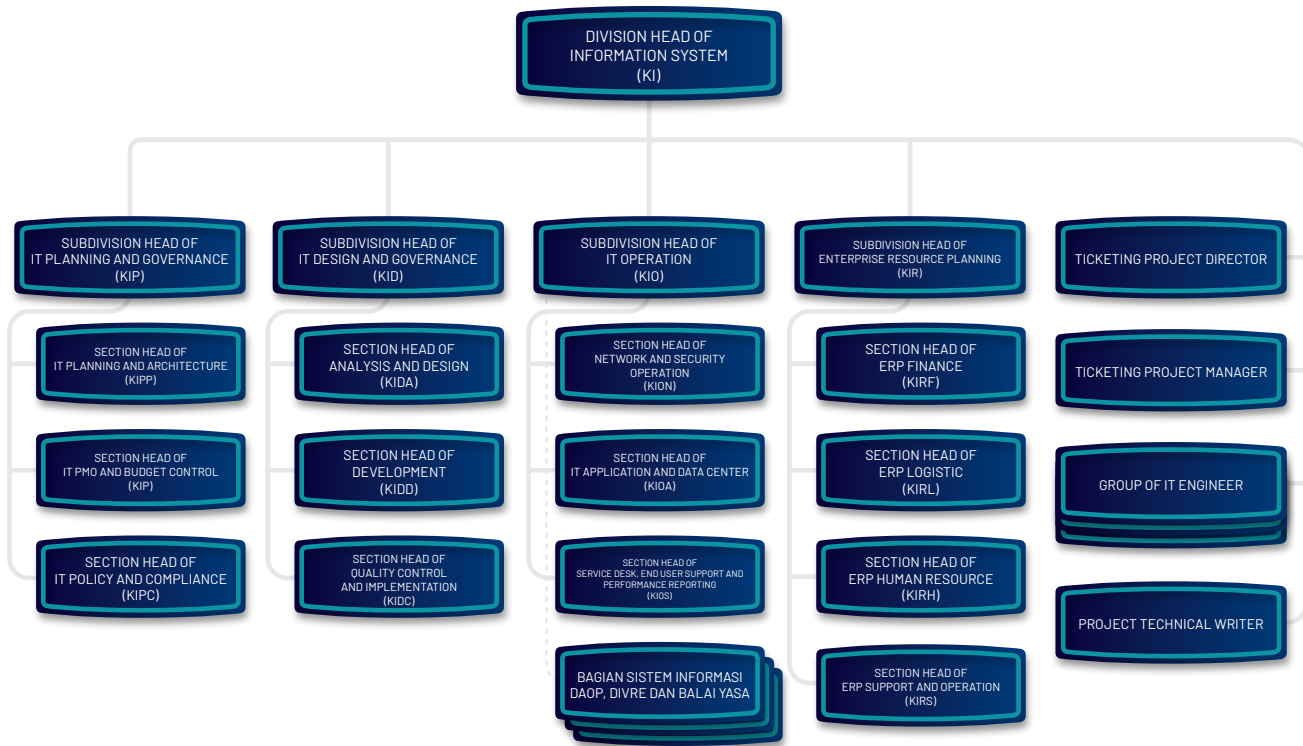
As of 2022, KAI has implemented good IT management with the support of infrastructure and strong Information Technology Governance.

PROFIL DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology Directorate Profile

Keberadaan Unit Sistem Informasi diatur berdasarkan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KO.104/I/3/KA-2022 tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko, dengan penjabaran sebagai berikut:

The Information System Unit is regulated based on the Regulation of the Board of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. PER.U/KO.104/I/3/KA-2022 concerning the Organization and Procedures of the Directorate of Finance and Risk Management, with the following elaboration:



Unit Information System adalah satuan organisasi di bawah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Division Head of Information System yang mempunyai tugas:

- Menetapkan perencanaan dan melakukan pengendalian terkait tata kelola, pengembangan, layanan dan operasional sistem informasi;
- Menetapkan perencanaan dan melakukan pengendalian terkait pengembangan teknologi data dan sistem tiket;
- Menyelenggarakan pembinaan sistem informasi di Anak Perusahaan agar selaras dengan arah pengembangan sistem informasi yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Division of Information System membawahi Subdivision of IT Planning and Governance, Subdivision of IT Design and Development, Subdivision of IT Operation, Subdivision of Enterprise Resource Planning dan Ticketing Project Director. Selain itu, terdapat perwakilan unit sistem informasi di daerah meliputi Daerah Operasi, Divisi Regional, dan Balai Yasa.

The Information System Unit is an organizational unit under the Managing Director of Finance and Risk Management led by the Division Head of Information System which has the following duties:

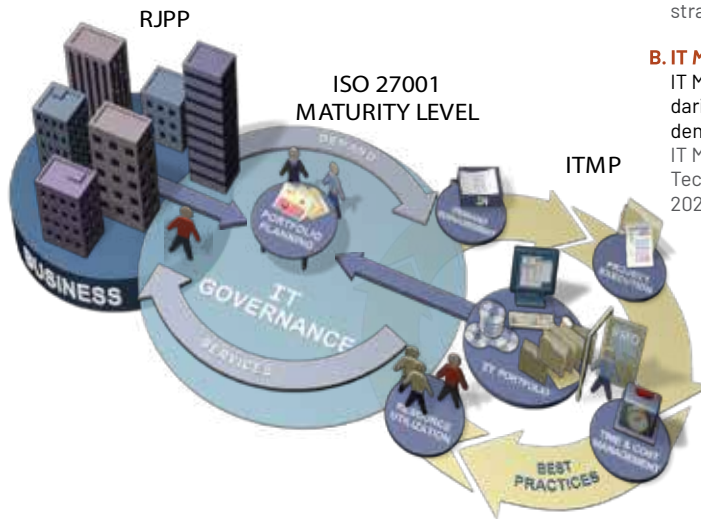
- Preparing plans and carrying out controls related to governance, development, services, and operations of information systems;
- Preparing plans and carrying out controls related to the development of data technology and ticketing systems;
- Organizing information system development in Subsidiaries to be in line with the direction of information system development set by the Company.

The Division of Information System oversees the Subdivision of IT Planning and Governance, Subdivision of IT Design and Development, Subdivision of IT Operation, Subdivision of Enterprise Resource Planning and Ticketing Project Director. In addition, there are representatives of information system units in the regions including Operational Areas, Regional Divisions, and Balai Yasa.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology Governance

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE



A. Rencana Jangka Panjang Perusahaan / Company Long Term Plan

Rencana jangka Panjang Perusahaan periode 2020-2024 meliputi strategy bisnis Perusahaan guna mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan termasuk di dalamnya strategy terkait Teknologi Informasi. / The Company's Long-term Plan for the 2020-2024 period covers the Company's business strategy to realize the Vision and Mission, including strategies related to Information Technology

B. IT Master Plan

IT Master Plan Teknologi Informasi merupakan penjabaran dari RJPP untuk program strategis Teknologi Informasi sesuai dengan periode RJPP 2020-2024. / The Information Technology IT Master Plan is an elaboration of the RJPP for the Information Technology strategic program in accordance with the 2020-2024 RJPP period.

C. IT Governance

IT Governance untuk mendukung proses bisnis Teknologi Informasi, dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan framework COBIT, ISO 27001, TOGAF serta best practice lainnya. ISO 27001 dan Maturity Level Tata Kelola Teknologi Informasi. / IT Governance to support Information Technology business processes, with policies set based on the COBIT framework, ISO 27001, TOGAF and other best practices. ISO 27001 and Information Technology Governance Maturity Level.

A. Rencana Jangka Panjang Perusahaan

Rencana Jangka Panjang Perusahaan periode 2020-2024 meliputi strategi bisnis perusahaan, guna mewujudkan visi dan misi Perseroan termasuk strategi terkait Teknologi Informasi.

B. IT Master Plan

IT Master Plan Teknologi Informasi merupakan penjabaran dari RJPP untuk program strategis Teknologi Informasi sesuai dengan periode RJPP 2020-2024.

C. IT Governance

IT Governance untuk mendukung proses bisnis Teknologi Informasi, dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan framework COBIT, ISO 27001, TOGAF serta best practice lainnya ISO 27001 dan Maturity Level diterapkan sebagai evaluasi dalam pelaksanaan tata kelola Teknologi Informasi.

A. Company Long Term Plan

The Company's Long Term Plan for the 2020-2024 period includes the Company's business strategy, in realizing the Company's vision and mission, including strategies related to Information Technology.

B. IT Master Plan

IT Master Plan is an elaboration of the RJPP for the Information Technology strategic program in accordance with the 2020-2024 RJPP period.

C. IT Governance

IT Governance to support Information Technology business processes, with policies set based on the COBIT framework, ISO 27001, TOGAF and other best practices as well as Maturity Level for evaluation in the implementation of Information Technology governance.

Dengan tata kelola Teknologi Informasi yang baik, Teknologi Informasi perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal guna mendukung proses bisnis Perseroan.

With good Information Technology governance, the Company's Information Technology is expected to provide maximum contribution to support the Company's business processes.

VISI DAN MISI TI

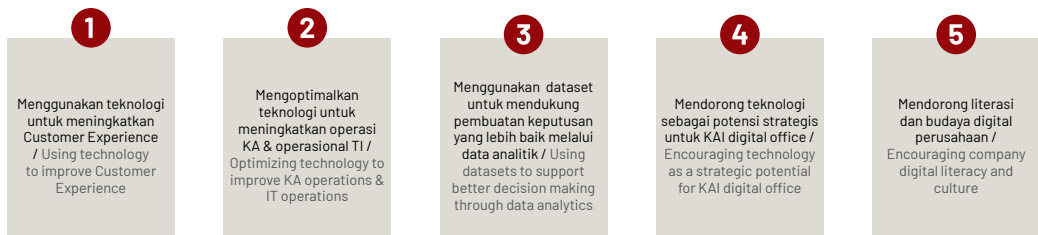
IT Vision and Mission

Implementasi teknologi secara keseluruhan dan *Enterprise Architecture* untuk 5 tahun ke depan akan didorong oleh tujuan strategis dari 5 teknologi di bawah ini, yaitu memberikan *Customer Experience* yang lebih baik dan meningkatkan *keunggulan operasional* / Overall technology implementation and Enterprise Architecture for the next 5 years will be driven by the strategic goals of the 5 technologies below, namely providing a better Customer Experience and increasing operational excellence

Visi / Vision

"Mengaktifkan peningkatan layanan, keselamatan, dan efisiensi yang berkelanjutan melalui dorongan pengembangan teknologi" / "Enabling continuous improvements of service, safety, and efficiency by driving technology development"

Strategi Teknologi KAI / KAI Technology Strategy



Kemampuan yang dibutuhkan untuk mewujudkan strategi / Skills needed to implement the strategies

- Customer Centric
- Pengembangan Teknologi / Technology Development
- Proactive Stakeholder Management



Pengembangan internal untuk mendukung strategi / Internal development to support strategy



MASTERPLAN TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology Masterplan

Sebagai entitas BUMN, Perseroan diwajibkan untuk memiliki Masterplan TI berjangka waktu yang di-review secara periodik. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2018. Lebih dari itu, keberadaan Masterplan TI selaras dengan ketentuan di dalam Surat Kementerian BUMN Nomor S-949/MBU/10/2020 perihal tindak lanjut Aspirasi Pemegang Saham (APS) terkait Teknologi dan Teknologi Informasi Tahun 2021 khusus bidang Teknologi Informasi.

As a State-Owned Enterprise, the Company is required to have a IT Masterplan within a specific timeframe which is reviewed periodically. This is based on the Minister of SOE Regulation No. PER-02/MBU/2013 concerning Guidelines for the Preparation of Information Technology Management for State-Owned Enterprises and its amendments through the Minister of SOE Regulation No. PER-03/MBU/02/2018. Furthermore, the IT Masterplan is in line with the provisions in the Letter of the Ministry of SOE No. S-949/MBU/10/2020 concerning follow-up of Shareholders Aspirations (APS) related to Technology and Information Technology of 2021 specifically in the Information Technology sector.

Perseroan menetapkan Masterplan TI 2020-2024 sebagai rencana strategis pengembangan Teknologi Informasi untuk periode 2020 sampai dengan 2024, yang diterapkan selaras dengan RJPP Perusahaan 2020-2024. Masterplan TI 2020-2024 dijabarkan menjadi sejumlah aspek implementasi, sebagai berikut:

1. **Business & IT Assessment**, meliputi arahan strategis bisnis baik internal maupun eksternal serta gambaran kondisi TI eksisting;
2. **Penyelarasan bisnis dan IT**, meliputi penyelarasan strategi bisnis maupun fungsional bisnis dengan Teknologi Informasi;
3. **IT Maturity**, meliputi pengukuran kematangan tata Kelola Teknologi Informasi berdasarkan framework COBIT maupun Gartner;
4. **Desain Enterprise Architecture**, meliputi penggambaran Teknologi Informasi ke dalam arsitektur baik dari segi aplikasi, teknologi, maupun tata Kelola Teknologi Informasi;
5. **Analisis Kesenjangan**, merupakan GAP Assesment dari segi aplikasi, infrastruktur maupun tata Kelola Teknologi Informasi;
6. **Potensi Inisiatif**, meliputi inisiatif segi aplikasi, infrastruktur maupun tata Kelola Teknologi Informasi;
7. **Analisis Prioritas dan Portofolio**, meliputi penentuan prioritas inisiatif beserta rencana implementasi tahun 2020-2024;
8. **Roadmap Digitalisasi Teknologi Informasi**, meliputi program digitalisasi tahun 2020-2024 sesuai dengan inisiatif IT Master Plan;
9. Resume estimasi biaya implementasi dan kebutuhan tenaga ahli tahun 2020-2024 baik dari segi aplikasi, teknologi, maupun tata Kelola Teknologi Informasi

Dengan adanya dokumen Masterplan TI 2020-2024, pengembangan TI KAI dapat lebih terarah, selaras dengan strategi bisnis perusahaan, serta menghadirkan *benefit* sesuai harapan. Atas dasar tersebut, agar Masterplan TI 2020-2024 dapat diimplementasikan dengan baik, komitmen dari seluruh unsur Perseroan mencakup manajemen sangat diperlukan.

Penerapan inisiatif TI secara menyeluruh telah berperan penting sebagai sistem pendukung bagi Perseroan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, sesuai RJPP lingkup Teknologi. Inisiatif TI KAI diterapkan sesuai Masterplan TI 2020-2024, mencakup inisiatif infrastruktur dan tata kelola, dengan jumlah sebagai berikut:

The Company sets the IT Masterplan 2020-2024 as a strategic plan for the development of Information Technology for the period 2020 to 2024, which is implemented in line with the Company's 2020-2024 RJPP. The 2020-2024 IT Master Plan is broken down into a number of implementation aspects, as follows:

1. **Business & IT Assessment**, namely strategic business directions both internally and externally as well as an overview of existing IT conditions;
2. **Alignment of business and IT**, namely alignment of business strategy and business functions with Information Technology;
3. **IT Maturity**, namely measurement of the maturity of Information Technology Governance based on the COBIT and Gartner frameworks;
4. **Enterprise Architecture Design**, namely the reflection of Information Technology into the architecture in terms of application, technology, and Information Technology governance;
5. **Gap Analysis**, namely GAP Assessment in terms of application, infrastructure, and governance of Information Technology;
6. **Potential Initiatives**, namely initiatives in terms of application, infrastructure, and governance Information Technology;
7. **Priority and Portfolio Analysis**, namely prioritizing initiatives and implementation plans for 2020-2024;
8. **Information Technology Digitization Roadmap**, namely the 2020-2024 digitization program in accordance with the IT Master Plan initiative;
9. Summary of estimated implementation costs and the need for experts in 2020-2024 in terms of application, technology, and Information Technology governance

With the 2020-2024 IT Masterplan, KAI's IT development can be more focused, aligned with the Company's business strategy, and provide benefits according to expectations. For the IT Masterplan 2020-2024 to be properly implemented, commitment from all elements of the Company including management is needed.

Comprehensive implementation of IT initiatives plays an important role as a support system for the Company in implementing business strategies, according to the RJPP Technology scope. KAI's IT initiatives are implemented according to the TI Masterplan 2020-2024, covering infrastructure and governance initiatives, with the following number:

Jumlah Inisiatif TI sesuai Masterplan TI 2020-2024

Total of IT Initiatives according to the 2020-2024 IT Master Plan

Jenis Inisiatif / Initiative Type	Jumlah / Total	
	2022	2023
Aplikasi / Application	16	14
Infrastruktur / Infrastructure	9	4
Governance	5	4

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology Infrastructure

KAI menerapkan Infrastruktur TI untuk mendukung layanan Teknologi Informasi, melalui Unit Sistem Informasi sebagai pihak pengelola. Infrastruktur TI KAI dijelaskan sebagai berikut:

KAI implements IT Infrastructure to support Information Technology services, through the Information System Unit as the party in charge. KAI's IT infrastructure is described as follows:

Infrastruktur Teknologi Informasi KAI

KAI Information Technology Infrastructure

End User Infrastructure

- Internal User
- Passenger Experience
- Proteksi End Point
- Safety & Security

End User Infrastructure

- Manajemen akses user untuk penggunaan perangkat pribadi (BYOD).
- Pengembangan infrastruktur perlu terus diselaraskan dengan perkembangan kebutuhan perangkat *passenger experience*.
- Sudah terdapat proteksi pada perangkat *End-Point* (misalnya : antivirus).
- *Safety & Security* pada area end user saat ini sudah cukup memadai.

End User Infrastructure

- User access management for personal device use or Bring Your Own Device (BYOD).
- Infrastructure development needs to be continuously aligned with the development needs of passenger experience devices.
- Protection already implemented on End-Point devices (eg: antivirus).
- Safety & Security in the end user area is currently sufficient.

Network Infrastructure

- Availability
- Scalability
- Quality of Service
- Security
- Manageability

Network Infrastructure

- Sudah terdapat redundansi koneksi dan protokol dinamis.
- Desain arsitektur sudah memadai untuk mendukung kebutuhan pengembangan kedepan.
- Terdapat perangkat dan fungsi pemantauan dan pendeteksian ancaman keamanan.
- Terdapat *system software* untuk pemantauan aktifitas dan kinerja elemen dan fungsi jaringan.

Network Infrastructure

- Redundancy of connections and dynamic protocols.
- The architectural design is sufficient to support future development needs.
- Availability of devices and functions for monitoring and detecting security threats.
- Availability of software system for monitoring the activity and performance of network elements and functions.

Server Infrastructure

- Availability
- Scalability
- Quality of Service
- Security
- Manageability

Server Infrastructure

- Terdapat backup sistem server.
- Penyediaan kapasitas yang mudah dengan virtualisasi.
- Kinerja sistem yang sudah memadai.
- Proteksi keamanan mencukupi pada lingkungan sistem server.
- Kemudahan pengelolaan sumber daya komputasi.

Server Infrastructure

- Availability of server backup system.
- Easy capacity provisioning with virtualization.
- Adequate system performance.
- Sufficient security protection on server system environment.
- Ease of management of processing resources.

DC & DRC Infrastructure

- DC & DRC Architecture
- DC & DRC Building Facilities

DC & DRC Infrastructure

- Elemen utama pada arsitektur *Data Center* sudah lengkap.
- Fasilitas bangunan sudah lengkap dan memadai, namun tidak cukup untuk kebutuhan pengembangan ke depan.

DC & DRC Infrastructure

- Complete main elements of the Data Center architecture.
- Complete and adequate building facilities, but not sufficient for future development needs.

Management Infrastructure

- Main & support management system
- Organizational and operational functions

Management Infrastructure

- Sistem untuk pemantauan dan pengelolaan infrastruktur sudah memadai.
- Sudah terdapat organisasi dan sistem OSM yang memadai untuk mengelola kinerja dan keamanan infrastruktur.
- Saat ini belum ada otomatisasi proses operasional I&O untuk *service delivery*.
- Belum optimalnya I&O untuk mendefinisikan, me-monitor dan melaporkan matriks serta KPI secara real-time untuk *performance monitoring* dan kebutuhan *action plan*.

Management Infrastructure

- Adequate system for fostering and managing infrastructure.
- Sufficient OSM organizations and systems to manage performance and security infrastructure.
- No operational I&O automation process for service delivery as of to date.
- Inadequate I&O to define, monitor and report real-time matrices and KPIs for performance monitoring and action plan needs.

A. Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC)

Infrastruktur *Data Center* KAI dikelola oleh Unit Sistem Informasi, terdiri dari perangkat keras berupa perangkat jaringan, *server* dan *storage*. Implementasi Infrastruktur *Data Center* ditujukan agar mampu mengakomodasi berbagai aplikasi bisnis. *Data Center* di Kantor Pusat terhubung dengan *Disaster Recovery Center*.

Disaster Recovery Center merupakan salah satu bentuk *business continuity* sebagai *backup server* dari *Data Center*, dengan *Backbone* yang menghubungkan *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* menggunakan fasilitas *remote copy* antar *storage*. Strategi *backup* ke *data center* menggunakan teknologi virtualisasi berdasar *criticality* layanan (aplikasi) dengan pertimbangan intensitas interaksi dengan pelanggan, dampak langsung terhadap pendapatan serta tipe lingkup proses bisnis yang didukung.

B. Infrastruktur Jaringan

Infrastruktur Jaringan KAI dikelola oleh Unit Sistem Informasi, terdiri dari Intranet untuk konektivitas di dalam area Perseroan dan Internet untuk konektivitas publik.

- Intranet untuk jaringan internal Perseroan terdiri dari *Multiprotocol Label Switching (MPLS)*, *Metronet*, *Fiber Optik*, *Virtual Private Network (VPN)* serta *Access Point Network (APN)*.
- Internet untuk jaringan keluar Perseroan terdiri dari Internet dan IP transit.

IT GOVERNANCE

Perseroan telah menetapkan pedoman tata kelola TI melalui dokumen-dokumen sebagai berikut:

A. IT Governance

Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.003/IX/4/KA-2011 tanggal 28 September 2011 tentang Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi (*IT Governance*). Kebijakan tersebut merupakan dasar pengelolaan TI yang memberikan kerangka pengaturan kepada seluruh unit yang terkait dengan penyelenggaraan TI untuk dapat melaksanakan kebijakan umum pengelolaan TI KAI.

B. IT Policy

Perseroan menetapkan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi melalui Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KK.101/VIII/1/KA-2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi. Kebijakan dan prosedur tersebut diperlukan sebagai pedoman untuk

A. Data Center and Disaster Recovery Center (DRC)

Data Center Infrastructure is managed by the Information System Unit, consisting of hardware in the form of network devices, servers and storage. Implementation of Data Center Infrastructure is intended to be able to accommodate various business applications. The Data Center at Head Office is connected to Disaster Recovery Center.

Disaster Recovery Center is a form of business continuity as a backup server from Data Center, with Backbone connecting Data Center and Disaster Recovery Center using remote facilities copy between storage. The backup strategy to the data center uses virtualization technology based on service (application) criticality with consideration of the intensity of interaction with customers, the direct impact on revenue and the type of scope of business processes supported.

B. Network Infrastructure

KAI's Network Infrastructure is managed by the Information Systems Unit, consisting of an Intranet for connectivity within the Company's area and the Internet for public connectivity.

- Intranet for the Company's internal network consisting of Multiprotocol Label Switching (MPLS), Metronet, Optical Fiber, Virtual Private Network (VPN) and Access Point Network (APN).
- Internet for the Company's external network consisting of Internet and IP transit.

IT GOVERNANCE

The Company has established IT governance guidelines through the following documents:

A. IT Governance

Board of Directors Decree No. KEP.U/OT.003/IX/4/KA-2011 dated September 28, 2011 concerning General Information Technology Governance Policy (*IT Governance*). This policy is the basis for IT management which provides a regulatory framework for all units related to IT operations to be able to implement KAI's general IT management policies.

B. IT Policy

The Company established information technology policies and procedures through the Decree of the Board of Directors No. KEP.U/KK.101/VIII/1/KA-2016 dated August 2, 2016 concerning Information Technology Policies and Procedures. These policies and procedures were needed

memastikan bahwa aktivitas operasional TI KAI berjalan efektif dan digunakan secara benar. Kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi diperlukan agar tersedia standarisasi dalam pengelolaan TI guna menjamin terpenuhinya tata kelola teknologi informasi yang baik, kebutuhan pengendalian informasi, pengelolaan risiko TI, kualitas layanan TI, dan kinerja TI sesuai dengan harapan.

C. Kebijakan dan Prosedur untuk implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Unit Sistem Informasi menetapkan dokumen sebagai pedoman dalam pengelolaan TI berupa Kebijakan dan Prosedur Prosedur, Pedoman, Instruksi Kerja serta Formulir yang di-review secara berkala sesuai dengan perkembangan TI.

Penerapan tata kelola TI KAI mencakup dilakukannya pengukuran efektivitas melalui asesmen maupun sertifikasi, antara lain:

1. ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Dalam penyelenggaraan tata kelola IT, keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting. Kinerja tata kelola IT akan terganggu jika informasi perusahaan mengalami masalah keamanan terkait aspek *Confidentiality*, *Integrity*, dan *Availability*, yang dikenal dengan istilah "CIA". Dalam kurun waktu 2013-2022, kegiatan terkait ISO 27001 adalah sebagai berikut:

as guidelines and to ensure that IT operations in the Company were effective and used properly. Information technology policies and procedures were needed to provide standardization in IT management that ensured good information technology governance, information control needs, IT risk management, IT service quality, and ensuring IT performance in order to be in line with expectations.

C. Policies and Procedures for the implementation of the Information Security Management System

The Information System Unit established documents as guidelines for IT management in the form of Policies and Procedures, Guidelines, Work Instructions and Forms reviewed regularly in accordance with IT developments.

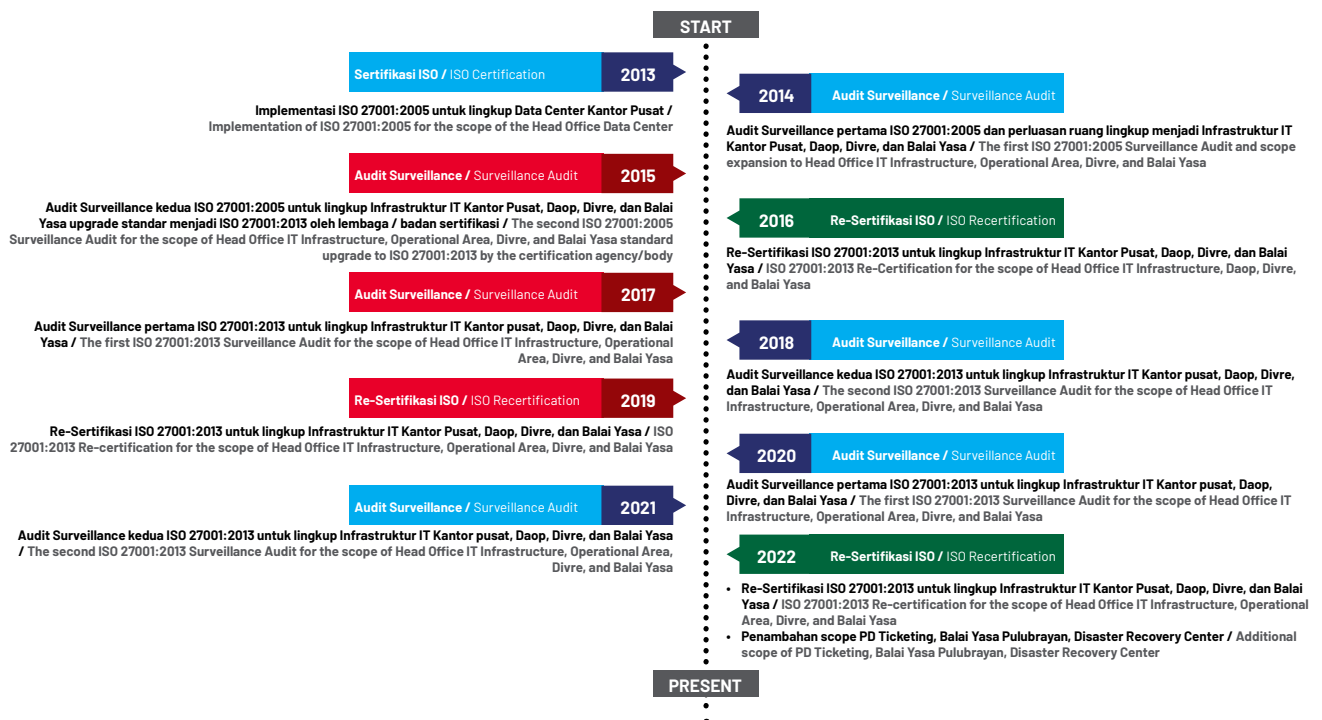
KAI's IT governance implementation includes measuring effectiveness through assessment and certification, including:

1. ISO 27001 Information Security Management System

In implementing IT governance, information security is a crucial aspect. Security issues related to aspects of Confidentiality, Integrity and Availability, or "CIA" could bring disruption in the IT governance. In the 2013-2022 period, activities related to ISO 27001 are as follows:

IMPLEMENTASI ISO 27001:2013 / IMPLEMENTATION OF ISO 27001:2013

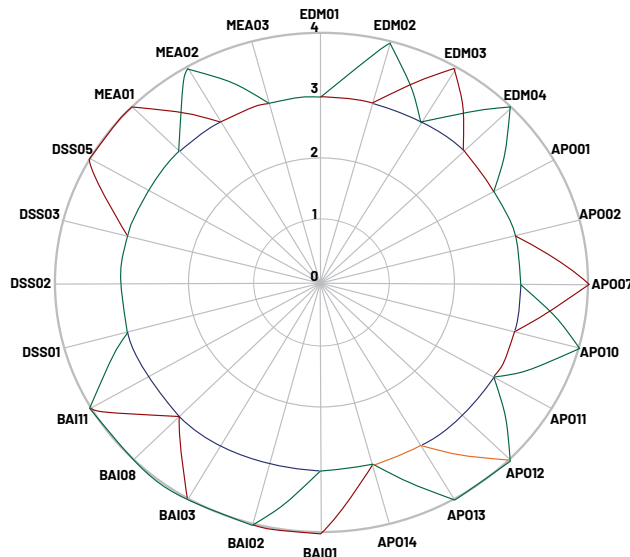
Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) / Information Security Management System (SMKI)



Untuk tahun 2022, KAI telah melakukan Asesmen *IT Maturity Level* berdasarkan COBIT 2019 dengan skor *IT Maturity Level* tahun 2022 sebesar **3.42**. Perincian mengenai hasil Asesmen *IT Maturity Level* tahun 2022 adalah sebagai berikut:

For 2022, KAI has conducted an Assessment of *IT Maturity Level* based on COBIT 2019 with an *IT score* of 2022 of 3.42. Details regarding the results of the Assessment *IT Maturity Level* year 2022 is as follows:

Hasil Assessment *IT Maturity Level* Tahun 2022 dengan Framework COBIT 2019 PT Kereta Api Indonesia / The results of the 2022 *IT Maturity Level* Assessment with PT Kereta Api Indonesia's 2019 COBIT Framework



IT Maturity Tahun 2022: 3.42

- Target BUMN / SOE targets
- Target KAI / KAI targets
- Capability Target 2022 / Capability Targets 2022
- Capability Tahun 2022 / Capability Year 2022

Focus Area KAI: 24 GAMO
Maturity Target KBUMN: 3.00
Maturity Target KAI: 3.38
Maturity Target 2022: 3.38
Hasil Maturity Tahun 2021: 3.25

KAI Focus Areas: 24 GAMO
SOE Maturity Target: 3,00
KAI Target Maturity: 3,38
Maturity Target 2022: 3,38
2021 Maturity Result: 3,25

PROGRAM STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI 2022

Information Technology Strategic Program of 2022

Program strategis Teknologi Informasi tahun 2022 berdasarkan IT Plan 2020-2022 yang selaras dengan program strategis RJPP Perseroan adalah sebagai berikut:

The Information Technology strategic program of 2022 based on the 2020-2022 IT Plan which is in line with the Company's RJPP strategic program is as follows:



Dukungan Implementasi Transformasi Digital / Digital Transformation Implementation Support

Mempersiapkan infrastruktur IT baik *Software* maupun *Hardware* untuk keperluan Implementasi Transformasi Digital

- Pengembangan IoT
- Penyediaan Cloud
- Menyusun dan implementasi Data Governance & Management
- Menyusun Struktur Organisasi IT bersinergi dengan *Human Capital*
- Membangun kapabilitas Leadership di KAI bersinergi dengan *Human Capital*

Preparing IT infrastructure, both *Software* and *Hardware* for the purposes of Digital Transformation Implementation

- IoT Development
- Cloud Provision
- Preparing and implementing Data Governance & Management
- Developing an IT Organizational Structure in synergy with *Human Capital*
- Building Leadership capabilities at KAI in synergy with *Human Capital*



Implementasi Big Data Tahap 3 / Big Data Implementation Stage 3

- Penetapan Usecase Aspek HR, Pemeliharaan & Logistik
- Development Aspek HR
- Development Pemeliharaan & Logistik

- Determination of Usecase of HR Aspects, Maintenance & Logistics
- HR Aspect Development
- Maintenance & Logistics Development



Digitalisasi Sarana / Digitization of Facilities

- Validasi task list, checklist dan kebutuhan material pemeliharaan
- Konfigurasi berupa pembacaan unit measure dengan *variable* tertentu
- Konfigurasi/pengembangan untuk Predictive Maintenance, kualitas Menyusun dan implementasi Data Governance & Management

- Validation of task lists, checklists, and maintenance material requirements
- Configuration in the form of reading units of measure with certain variables
- Configuration/development for Predictive Maintenance, quality of preparation and implementation of Data Governance & Management



Pengembangan Aplikasi CRM / CRM Application Development

- Pengembangan Tahap 1:
 - Implementasi Helpdesk Tools CRM,
 - Integrasi SSO, HRIS Kepegawaian, RTS, Omnichannel: Facebook, Instagram, Whatsapp
- Pengembangan Tahap 2:
 - Modul Pustaldyan, Knowledge Base, QA Assesment, Integrasi FASE 2: Integrasi dengan modul operation, aplikasi CSP, FMC, Railqueue, Aset, Integrasi melalui API untuk pengembalian data dari aplikasi ketiga, Integrasi Omnichannel Twitter, Enhancement Helpdesk: Handling Keluhan Pembayaran via Bank/Payment Gateway
- Pengembangan Tahap 3: Pengembangan Chatbot NPL based dan chatbot untuk open channel

- Stage 1 Development:
 - CRM Tools Helpdesk Implementation,
 - SSO Integration, Personnel HRIS, RTS, Omnichannel: Facebook, Instagram, Whatsapp
- Stage 2 Development:
 - Pustaldyan Module, Knowledge Base, QA Assessment, Integration PHASE 2: Integration with operation modules, CSP application, FMC, Railqueue, Asset, Integration via API for returning data from third-party applications, Omnichannel Twitter Integration, Helpdesk Enhancement: Handling Payment Complaints via Bank/ Payment Gateways
- Stage 3 Development: Development of NPL-based chatbots and chatbots for open channels



Pengembangan Train Management System (Railways Management System) / Development of Train Management System (Railways Management System)

Implementasi Train Management System modul:

- Implementasi Management Sistem & Master Data
- Implementasi WKP, Perjalanan KA (Perka), Gapeka Online
- Pengendalian Perka
- Evaluasi Perka

- Implementation of the Train Management System module:
 - Implementation of System Management & Master Data
 - Implementation of WKP, Train Travel (Perka), Gapeka Online
 - Train Travel Control
 - Train Traver Evaluation

DUKUNGAN BAGI TRANSFORMASI DIGITAL KAI

Support for KAI's Digital Transformation

Sebagai langkah proaktif di era disrupsi sekaligus sebagai upaya agar segera bangkit dari dampak pandemi Covid-19, Direksi telah memutuskan untuk mengubah arah navigasi KAI menuju haluan baru melalui Transformasi Digital. Dengan penuh keyakinan dan semangat yang tinggi, KAI akan melakukan transformasi pada 3 (tiga) bidang, yaitu Bisnis, Teknologi dan Organisasi.

Inisiatif Transformasi Digital yang menjadi satu kesatuan dengan RJPP 2020-2024 dapat menjadi platform perubahan bagi KAI sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh pemangku kepentingan. KAI telah berhasil menyelesaikan tahap pertama Transformasi Digital melalui *Diagnostic Phase* pada tahun 2021, dengan menghasilkan *Strategic Priorities* yang perlu dieksekusi secara bertahap dan berkelanjutan hingga tahun 2024.

Dimulainya Implementasi Transformasi Digital KAI ditandai dengan diselenggarakannya acara *Kick Off* Transformasi Digital pada tanggal 31 Agustus 2022 di Pusat Pelatihan dan Pendidikan Ir. H. Djuanda, dengan diikuti oleh Direksi, Komisaris, serta >1.000 pegawai melalui Zoom dan Youtube Channel. Hingga 31 Desember 2022, Implementasi Transformasi Digital KAI telah menghasilkan pencapaian dalam beberapa bidang.

As a proactive step in the era of disruption as well as an effort to accelerate the recovery of the Covid-19 pandemic impact, the Board of Board of Directors has decided to change KAI's navigation direction towards a new direction through Digital Transformation. With full confidence and high enthusiasm, KAI will carry out transformations in 3 (three) fields, namely Business, Technology and Organization.

The Digital Transformation Initiative, which is an integral part of the 2020-2024 RJPP serve as a platform for change of KAI for all stakeholders to obtain direct benefits. KAI has successfully completed the first phase of Digital Transformation through *Diagnostics Phase* in 2021 by determining *Strategic Priorities* that need to be executed gradually and continuously until 2024.

The start of KAI's Digital Transformation was marked by the *Kick Off* of Digital Transformation on August 31, 2022 at the Ir. H. Djuanda Training and Education Center attended by the Board of Directors, Board of Commissioners, and more than 1,000 employees via Zoom and Youtube Channel. As of December 31, 2022, KAI's Digital Transformation has recorded achievements in several fields.



RENCANA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2023

Information Technology Development Plan and Strategy for 2023

Berdasarkan Masterplan TI 2020-2024 yang selaras dengan program strategis pada RJPP Perseroan, program strategis Teknologi Informasi KAI tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Based on the IT Masterplan 2020-2024 in line with the strategic program in the Company's RJPP, KAI's 2023 Information Technology strategic program is as follows:

RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM TAHAP 2
Modul pengendalian Perka Pengembangan Starlink

RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM PHASE 2
Starlink Development Train Travel Control Module

MASTER DATA MANAGEMENT SYSTEM
Pengembangan berdasarkan area *Data Governance* termasuk penyediaan infrastruktur dan SDM

MASTER DATA MANAGEMENT SYSTEM
Development based on the area of *Data Governance*, including the provision of infrastructure and human resources

**NON-TRANSPORT BUSINESS PLANNING & ASSET
COMMERCIALIZATION MANAGEMENT SYSTEM**

**OPTIMALISASI SALES MANAGEMENT SYSTEM
(KAI ACCESS)**

OPTIMIZATION OF SALES MANAGEMENT SYSTEM
(KAI ACCESS)

PENINGKATAN KAPASITAS INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE CAPACITY INCREASE





05

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis



TINJAUAN PEREKONOMIAN

Economics Review

Sepanjang tahun 2022, ekonomi global mengalami perlambatan akibat tingginya inflasi dan respons dari sisi moneter. Menurut Laporan *World Economic Outlook* Januari 2023 yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF), penurunan ekonomi global dari level 6% pada tahun 2021 menjadi hanya 3,2% pada tahun 2022 (*year on year/yo*y). Perlambatan tersebut merupakan titik terendah sejak tahun 2001, di luar krisis keuangan global dan fase pandemi Covid-19.

Perlambatan tersebut salah satunya disebabkan oleh konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang menimbulkan peningkatan risiko global, terutama krisis pangan, energi, dan pupuk. Selain itu, adanya peningkatan inflasi di banyak negara maju sebagai akibat dari pengetatan kebijakan moneter dan peningkatan suku bunga, menyebabkan tingginya arus modal keluar dan melemahnya mata uang di banyak negara berkembang.

In 2022, the global economy experienced a slowdown due to a high inflation rate and the response from monetary policies. According to the January 2023 *World Economic Outlook* Report released by the International Monetary Fund (IMF), the global economy declined from 6% in 2021 to 3.2% in 2022 (*year on year/yo*y). This slowdown reached the lowest point since 2001 due to causes other than the global financial crisis and COVID-19.

One of the reasons for the slowdown was the Russo-Ukrainian geopolitical conflict that increased global risks, especially in food, energy, and fertilizer crises. In addition, the rising inflation in many developed countries, resulting from the tightening monetary policy and increasing interest rates, caused high capital outflows and weakening currencies in many developing countries.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis

“

Pada posisi 31 Desember 2022, nilai aset Perseroan adalah sejumlah Rp71,58 triliun atau meningkat sebesar 14,13% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp62,77 triliun. Peningkatan tersebut dikontribusikan oleh peningkatan komponen dana dibatasi penggunaannya sebesar 104,13% dibanding tahun sebelumnya.

Assets in December 31, 2022 reached Rp71.58 trillion, an increase of 14.13% compared to 2021 at Rp62.77 trillion. This increase was due to an increase in the restricted funds component by 104.13% compared to the previous year. ”

Meski kondisi makroekonomi global mengalami ketidakpastian, namun perekonomian nasional justru mampu menunjukkan resiliensi dan pulih lebih cepat sepanjang tahun buku. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70%. Menurut *press release* yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, angka pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2014.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87%, yang dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan seiring dengan adanya pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi di tahun 2022 berasal dari industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 1,17% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB).

Despite the global macroeconomic uncertainties, the national economy was able to demonstrate resilience and quick recovery throughout the fiscal year. According to the data from Statistics Indonesia, the economy of Indonesia grew by 5.31% in 2022, an increase compared to that of 2021 at 3.70%. Based on the press release by the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, it was the highest growth recorded since 2014.

In terms of productions, the highest growth occurred in the Transportation and Warehousing Business Sector of 19.87%, which was influenced by increased community mobility and tourist visits in line with the easing of the Community Activity Restrictions (PPKM) policy. The highest source of Indonesia's economic growth in 2022 will come from the manufacturing industry which contributes 1.17% to the total Gross Domestic Product (GDP).

Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28%. Peningkatan aktivitas ekspor didorong oleh *windfall* komoditas unggulan, sedangkan kenaikan impor didorong oleh peningkatan impor barang modal dan bahan baku. Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mengalami pertumbuhan positif, menjadi kontributor utama terhadap PDB menurut pengeluaran masing-masing sebesar 51,65% dan 29,83%.

Indikator sektor eksternal Indonesia juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali selama tahun 2022, tercermin dari surplus transaksi berjalan, perbaikan defisit transaksi modal dan finansial, cadangan devisa yang terus meningkat, ekspor impor yang masih positif meski melambat, *yield* obligasi Pemerintah yang melandai, nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat, dan rasio Utang Luar Negeri Indonesia terhadap PDB dalam level aman.

Membbaiknya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tekanan kondisi global ditopang oleh fundamental ekonomi yang kuat sehingga mampu mendorong ketahanan aktivitas ekonomi dan industri serta meningkatnya mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, serta berlanjutnya penyaluran bantuan sosial. Selain itu, bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil pemerintah, salah satunya melalui Program Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), juga berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional.

Sumber:

1. *World Economic Outlook* Januari 2023 yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF)
2. *Press Release* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia "Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Capai 5,31%, Tertinggi Sejak 2014". Diakses pada <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4904/pertumbuhan-ekonomi-tahun-2022-capai-531-tertinggi-sejak-2014>

TINJAUAN OPERASIONAL

Strategi Perseroan

KAI menerapkan sejumlah langkah strategis guna mengoptimalkan kinerja angkutan penumpang dan barang pada 2022, sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2022 serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Penjabaran mengenai strategi KAI pada angkutan penumpang dan barang di 2022 adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the highest growth in terms of expenditure was achieved by the Goods and Services Export Component of 16.28%. Such an increase was driven by the windfall of superior commodities. Meanwhile, the increase in imports was driven by the increase in the import of capital goods and raw materials. Household Consumption and Gross Fixed Capital Formation (PMTB), which experienced positive growth, were the main contributors to GDP according to the expenditure of 51.65% and 29.83%, respectively.

Indonesia's external sector indicators also show relatively good and controlled conditions in 2022, reflected in the current account surplus, improvement in the capital and financial account deficit, increasing foreign exchange reserves, positive exports and imports despite slowing, sloping government bond yields, the rupiah exchange rate and the strengthening Composite Stock Price Index (IHSG), and the ratio of Indonesia's Foreign Debt to GDP at a safe level.

Improvement in the economic growth rate of Indonesia amid the pressures of global conditions was supported by the solid economic foundations that encouraged the resilience of economic and industrial activities and increased community mobility, including Christmas and New Year as National Religious Holidays (HBKN) celebrations, as well as the continued distribution of social assistance. In addition, various constructive policies and strategies adopted by the government, such as the COVID-19 and the National Economic Recovery Programs (PC-PEN), have been the key to success in stimulating national economic growth.

Source:

1. January 2023 World Economic Outlook released by International Monetary Fund (IMF)
2. Press Release of the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia "Economic Growth in 2022 Reaches 5.31%, the Highest Since 2014". Accessed at <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4904/pertumbuhan-ekonomi-tahun-2022-capai-531-tertinggi-sejak-2014>

OPERATION OVERVIEW

Company's Strategy

KAI implemented a number of strategies to optimize the performance of passenger and goods transportation in 2022, in accordance with the 2022 Work Plan and Corporate Budget (RKAP) and the Company's Long-Term Plan (RJPP). Such strategies are described as follows:

Angkutan Penumpang

1. Pada 2022, seiring pandemi Covid-19 yang berangsur-angsur mengalami penurunan, KAI melakukan berbagai upaya untuk beradaptasi dengan pemulihan kondisi pandemi yang masih terjadi di tahun 2022, sebagai berikut:
 - a. Mendukung Pemerintah dalam penanganan Covid-19 dengan melakukan prosedur sebagai berikut:
 - Pemeriksaan suhu tubuh, ketersediaan *hand sanitizer*, dan kebijakan lainnya yang memitigasi penyebaran Covid-19 di lingkungan stasiun dan KA;
 - Penyemprotan disinfektan secara rutin pada KA.
 - b. Pemberian *healthy kit* berupa masker dan tisu antiseptik untuk penumpang jarak sedang dan jarak jauh;
 - c. Penyediaan jasa *rapid test* antigen di beberapa stasiun bagi pengguna jasa angkutan kereta api dengan harga terjangkau sesuai dengan persyaratan perjalanan dari Pemerintah sampai dengan Agustus 2022 yang kemudian ditiadakan sesuai syarat perjalanan dari Pemerintah.
2. Seiring dengan menurunnya kasus pandemi Covid-19, KAI mulai menyelenggarakan *event offline* kembali sesuai dengan protokol kesehatan selain tentunya kegiatan promosi menggunakan media sosial dan website perusahaan yang bertujuan untuk menginformasikan serta mengingatkan kepada pengguna jasa.
3. *Reclass*, *rerouting*, dan perjalanan kereta KA tambahan dengan melakukan penambahan atau menjalankan sebagian KA yang okupansinya tinggi baik KA Reguler, KA fakultatif, KA tambahan dan penambahan stamformasi rangkaian KA pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022. Penambahan perjalanan KA, antara lain:
 - a. KA Cikuray relasi Garut-Pasarsenen PP mulai 24 Maret 2022;
 - b. KA Tegal Bahari relasi Tegal-Pasarsenen PP mulai tanggal 26 Maret 2022;
 - c. KA Joglosemarkerto relasi Yogya-Cilacap PP mulai tanggal 25 Maret 2022;
 - d. KA Kamandaka relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Cilacap PP mulai tanggal 11 Maret 2022;
 - e. KA Ambarawa 2 relasi Surabaya Pasar Turi – Semarang Poncol PP mulai tanggal 1 April 2022;

Passenger Transportation

1. In line with the declining number of COVID-19 cases in 2022, KAI carried out several efforts to adapt with the recovery from the impact of the ongoing pandemic in 2022, as follows:
 - a. Supporting the Government in COVID-19 management by adopting procedures as follows:
 - Checking body temperature, availability of hand sanitizers, and other policies that mitigate the spread of COVID-19 in station and train environments;
 - Regular disinfection of trains.
 - b. Providing healthy kit such as masks and antiseptic tissues for medium and long-distance passengers;
 - c. Providing rapid antigen test services at several stations for users of rail transportation services at affordable prices in accordance with travel requirements from the Government until August 2022, which were lifted according to travel requirements from the Government.
2. In line with the declining number of COVID-19 cases, KAI started to hold offline events following the health protocols in addition to promotional activities through social the Company's social media accounts and website to inform and remind the customers.
3. Reclassing, rerouting, and providing additional train by adding or operating some trains with high-occupancy, both Regular trains, optional trains, additional trains, and additional train series stamformation from January to December 2022. The additional trips include:
 - a. KA Cikuray relasi Garut-Pasarsenen PP starting March 24, 2022;
 - b. KA Tegal Bahari relasi Tegal-Pasarsenen PP starting March 26, 2022;
 - c. KA Joglosemarkerto Yogya-Cilacap PP route starting March 25 2022;
 - d. KA Kamandaka Semarang Tawang Bank Jateng – Cilacap PP route starting March 11, 2022;
 - e. KA Ambarawa 2 Surabaya Pasar Turi – Semarang Poncol PP route starting April 1, 2022;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> d. KA Blambangan Ekspres relasi Semarangtawang Bank Jateng - Ketapang PP mulai tanggal 3 Desember 2022; e. KA Baturraden Ekspres relasi Purwokerto-Kroya-Bandung PP mulai tanggal 21 Desember 2022; f. KA Luxury pada KA Argo Parahyangan mulai tanggal 18 Juni 2022; g. KA Panoramic pada KA Taksaka mulai tanggal 24 Desember 2022. <p>4. Menerapkan inovasi yang guna meningkatkan pendapatan angkutan penumpang, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Implementasi <i>Face Recognition Boarding Gate</i> di Stasiun Bandung; b. Penambahan fitur <i>connecting train</i> pada pada aplikasi KAI Access; c. Penambahan jumlah pemesanan 1 kode booking 10 penumpang; d. Integrasi antar-moda untuk pemesanan Layanan Bus DAMRI di KAI Access secara <i>First Miles</i> dan <i>Last Miles</i> beserta pembayarannya; e. Melakukan Investasi di bidang Sarana dan Prasarana; f. Pembuatan <i>skybridge</i> dan selasar Stasiun Purwokerto. g. Investasi Pengembangan Angkutan Jabodetabek, yaitu perpanjangan peron dan overcaping stasiun untuk mengakomodasi panjang rangkaian KRL SF 12; h. Mengalihkan pengelolaan KA Lokal ke KCI dan KA Bandara YIA ke Railink mulai 01 April 2023; i. Melakukan penjualan unit bisnis KA Bandara dari Railink ke KCI; j. Penambahan metode pembayaran di KAI Access yaitu dengan OVO dan <i>Virtual Account</i> BCA. k. Penambahan layanan di KAI Pay untuk menerima pembayaran dari QRIS. l. Penambahan Fitur <i>Entertainment on Board</i> di KAI Access. | <ul style="list-style-type: none"> d. KA Blambangan Ekspres, Semarangtawang Bank Jateng - Ketapang PP route starting December 3, 2022; e. KA Baturraden Ekspres Purwokerto-Kroya-Bandung PP route starting December 21, 2022; f. Luxury train on KA Argo Parahyangan starting June 18, 2022; g. Panoramic train on Taksaka train starting December 24, 2022. <p>4. Innovating to increase the passenger transportation income, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Implementation of <i>Face Recognition Boarding Gate</i> at Bandung Station; b. Adding the <i>connecting train</i> feature to the KAI Access application; c. Adding the number of bookings 1 booking code for 10 passengers; d. Intermodal integration for ordering DAMRI Bus Services at KAI Access for <i>First Miles</i> and <i>Last Miles</i> along with payment; e. Investing in Facilities and Infrastructure; f. Construction of a <i>skybridge</i> and passageway for Purwokerto Station. g. Jabodetabek Transportation Development Investment, namely platform extension and station overcaping to accommodate the length of the SF 12 KRL series; h. Transfer the management of Local Trains to KCI and YIA Airport Trains to Railink starting April 1, 2023.; i. Selling the Airport Train business unit from Railink to KCI. j. Additional payment methods at KAI Access, namely OVO and BCA <i>Virtual Accounts</i>. k. Adding services at KAI Pay to receive payments from QRIS. l. Adding <i>Entertainment on Board</i> feature to KAI Access. |
|--|---|

Angkutan Barang

1. Menerapkan upaya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, optimalisasi sarana dan kegiatan pemasaran, baik pada angkutan barang wilayah Jawa maupun Sumatra.
2. Menerapkan upaya efisiensi pola operasi untuk peningkatan volume angkutan, baik pada angkutan barang wilayah Jawa maupun Sumatra.

Goods Transportation

1. Implementing efforts to accelerate the development of supporting infrastructure, optimize marketing facilities and activities, both in the transportation of goods in Java and Sumatra.
2. Implementing operational pattern efficiency efforts to increase transport volume, both in the Java and Sumatra region of goods transport.

ASPEK PEMASARAN

Strategi Pemasaran

Pada tahun 2022, mempertimbangkan pemulihan situasi pandemi Covid-19, KAI menyelenggarakan sejumlah strategi pemasaran berupa event hingga kegiatan promosi melalui platform media sosial dan situs web Perseroan. Perincian kegiatan pemasaran KAI untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. *Online Travel Fair KAI Access* (Promo tarif)
2. Promo Tarif KA Ciremai & KA Harina (Promo tarif)
3. KA Argo Parahyangan Luxury (Sosialisasi)
4. Promo Merdeka (Promo tarif)
5. KAI Expo 2022 (Promo tarif)
6. Program BPTV bekerja sama dengan hotel
7. GoVember Promo Tarif Argo Cheribon (Promo tarif)
8. Promo HUT Tulungagung (Promo tarif)
9. Sosialisasi tarif khusus (Sosialisasi)
10. Sosialisasi *Panoramic Train* (Sosialisasi)
11. Promo 12.12 (Promo tarif)
12. KAI Pay Loyal Gift (Loyalty Program)
13. *Loyal Customer Gift* (Loyalty Program)
14. *KAI Access Ramadan Festive 2022*
15. Kegiatan *Traveling By Train*
16. *Launching KA Taksaka Hype Trip*
17. Promo tiket KA "Promo Merdeka"
18. Event bersepeda "KAI100K"

Seiring hal itu, pada tahun 2022, KAI juga menerapkan upaya peningkatan pendapatan angkutan barang melalui strategi pemasaran sebagai berikut:

1. Penyiapan sarana dan prasarana jangka panjang dan jangka pendek;
2. Penggunaan GD 54 untuk angkutan *mothercoil* dan penambahan volume angkut CRC;
3. Kenaikan tarif di hampir semua komoditi;
4. Pengembangan jasa gudang atau terminal berbasis rel.

PANGSA PASAR

Berdasarkan segmentasi pasar dan *channel* pembelian tiket, target pasar pengguna jasa kereta api terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. **Onliner**, yaitu pelanggan yang melakukan pembelian lewat *channel* non-stasiun.
2. **Conservative and service oriented**, yaitu pelanggan yang melakukan pembelian lewat *channel* pembelian di stasiun.

MARKETING ASPECT

Marketing Strategy

In 2022, considering the recovery from the Covid-19 pandemic situation, KAI implemented a number of marketing strategies in the form of events to promotional activities through the Company's social media platforms and website. Details of KAI's marketing activities for 2022 are as follows:

1. Online Travel Fair KAI Access (Fare promo)
2. KA Ciremai and KA Harina Fare Promo (Fare promo)
3. KA Argo Parahyangan Luxury (Dissemination)
4. Merdeka promo (Fare promo)
5. KAI Expo 2022 (Fare promo)
6. BPTV Program, collaborating with hotels
7. Argo Cheribon Fare Promo GoVember (Fare promo)
8. Tulungagung City Anniversary Promo (Fare promo)
9. Special fare dissemination (Dissemination)
10. Panoramic Train dissemination (Dissemination)
11. 12.12 Promo (Fare promo)
12. KAI Pay Loyal Gift (Loyalty Program)
13. Loyal Customer Gift (Loyalty Program)
14. KAI Access Ramadan Festive 2022
15. Traveling By Train event
16. Launching of KA Taksaka Hype Trip
17. "Promo Merdeka" train ticket promotion
18. "KAI100K" cycling event

In line with that, in 2022, KAI strove to increase freight transport revenue through the following marketing strategy:

1. Setting up the long-term and short-term facilities and infrastructure;
2. Use of GD 54 for mothercoil transportation and increase in the CRC transport volume;
3. Increase in tariff in most commodities;
4. Development of the services of warehouse and railway-based terminal.

MARKET SHARE

Based on market segmentation and purchasing channels, the target market for rail service users is divided into 2 (two) categories:

1. **Onliner**, namely customers who make purchases through non-station channels.
2. **Conservative and service-oriented**, namely customers who purchase through station channels.

Proporsi penumpang *onliner* KAI hingga 31 Desember 2022 memperlihatkan adanya peningkatan seiring dengan semakin banyaknya pilihan aplikasi pemesanan tiket secara *online*. KAI melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan proporsi penumpang *onliner* dengan menawarkan berbagai *benefit* dan kemudahan.

Hingga akhir tahun 2022, pangsa pasar angkutan barang KAI terdiri dari:

- Perusahaan produsen seperti semen, BBM dan batu bara.
- Perusahaan perkebunan seperti CPO dan latex.
- Perusahaan logistik seperti peti kemas dan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Perusahaan-perusahaan tersebut telah memanfaatkan kereta api dikarenakan daya angkut kereta api yang besar dan tingkat ketepatan waktu saat pengiriman barang.

Pada lingkup nasional, jalur kereta api KAI tersedia di Pulau Jawa dan Sumatera. Pangsa pasar kereta api pada industri transportasi Indonesia berdasarkan jumlah penumpang dan jumlah barang di wilayah Jawa dan Sumatera adalah sebagai berikut:

Pangsa Pasar Kereta Api KAI 2022

Uraian / Description	Keterangan / Detail	Jan-Des 2022 / Jan-Dec 2022	Jan-Des 2021 / Jan-Dec 2021	Perubahan / Changes
Jumlah Penumpang (ribu orang) / Number of Passengers (thousands of people)	Wilayah Jawa dan Sumatera / Java and Sumatra Region	347.498	194.827	152.671
	KAI	284.449	154.538	129.911
	Pangsa Pasar (%) / Market Share (%)	81,86%	79,32%	2,54%
Jumlah Barang (ribu ton)* / Number of Goods (thousands of tons)*	Wilayah Jawa dan Sumatera / Java and Sumatra Region	382.552	366.662	15.890
	KAI	58.007	50.262	7.745
	Pangsa Pasar (%) / Market Share (%)	15,16%	13,71%	1,46%

*) Terdiri atas muatan barang pada kereta api dan angkutan laut. / Consists of cargo of goods on rail and sea transportation

Keterangan : Data publik yang tersedia

Sumber : Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional Desember 2022, Berita Resmi Statistik (BRS) No. 13/02/Th. XXVI, 1 Februari 2022, Badan Pusat Statistik (BPS).

The proportion of online passengers until December 31, 2022 shows an increase in line with the increasing number of online ticket booking applications. KAI has implemented various strategies to increase the proportion of online passengers by offering various benefits and conveniences.

As of the end of 2022, the market share of KAI's freight transport is:

- Producer companies such as cement, fuel, and coal.
- Plantation companies such as CPO and latex.
- Logistics companies such as containers and Hazardous and Toxic Substances (B3).

The above companies utilized trains due to the large carrying capacity, and trains could guarantee the delivery time of goods.

Nationally, the railway line was available on the island of Java and Sumatera. The following was the train market share in the Indonesian transportation industry based on the number of passengers and the number of goods in the Java and Sumatera regions:

KAI Rail Market Share in 2022

Remarks : Public data available

Source : Development of Tourism and National Transportation December 2022, Official Statistics News (BRS) No. 13/02/Th. XXVI, 1 February 2022, Central Bureau of Statistics (BPS).

Pangsa pasar KAI berdasarkan jumlah penumpang pada tahun 2022 adalah sebesar 81,86%, meningkat 2,54% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 79,32%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh:

1. Pelonggaran aturan perjalanan menggunakan kereta api oleh pemerintah.
2. Pemberlakuan kapasitas tempat duduk normal menjadi 100% untuk KA Jarak Jauh per 9 Maret 2022, dan kapasitas lokal normal 150% per tanggal 18 Mei 2022.

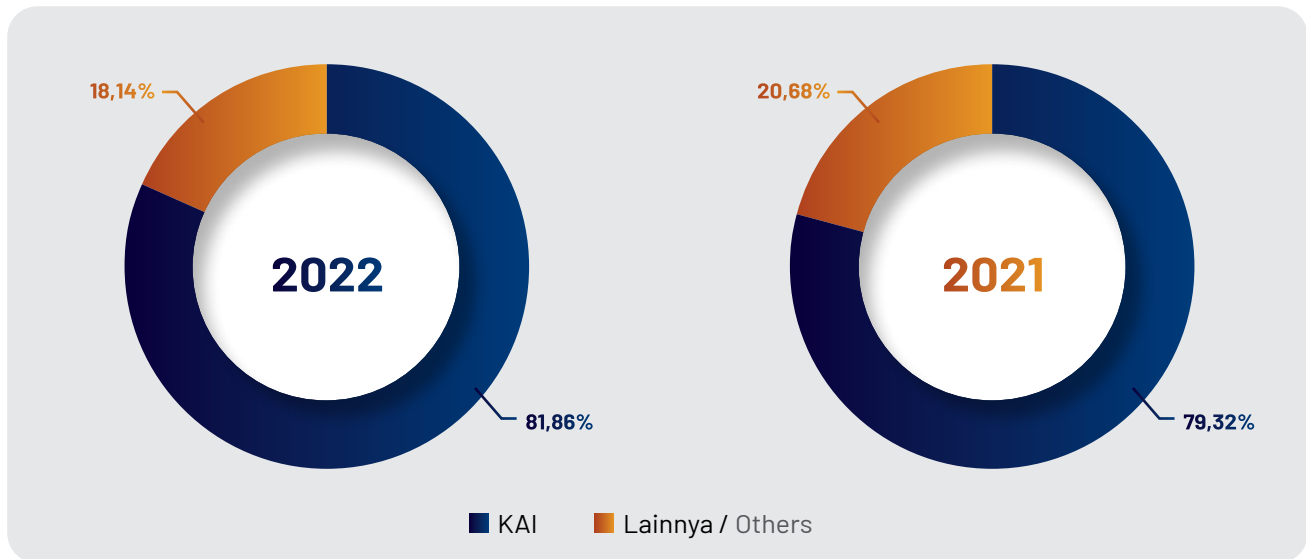
KAI's market share based on the number of passengers as of October 2022 was 81.86%, an increase of 2.54% compared to the previous year at 79.32%. The increase was mainly due to:

1. Relaxation of the regulations on travelling by train by the government.
2. Implementation of normal seat capacity to 100% for Long Distance Trains as of March 9, 2022, and normal local capacity of 150% as of May 18, 2022.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 3. Dijalankankan angkutan Lebaran 2022 dan angkutan Nataru 2022 (dengan penyesuaian syarat dan ketentuan perjalanan menggunakan KA oleh pemerintah). 4. Penambahan stamformasi dan frekuensi perjalanan KA disesuaikan dengan permintaan pasar. 5. Perjalanan beberapa KA baru di 2022. | <ul style="list-style-type: none"> 3. Operations of the 2022 Eid transportation and 2022 Christmas and New Year transportation (with adjustments to the terms and conditions for travel using trains by the government) 4. The addition of stamformation and frequency of train trips is adjusted to market demand 5. The journey of several new trains in 2022. |
|---|---|

Pangsa Pasar Berdasarkan Jumlah Penumpang

Market Share by Number of Passengers

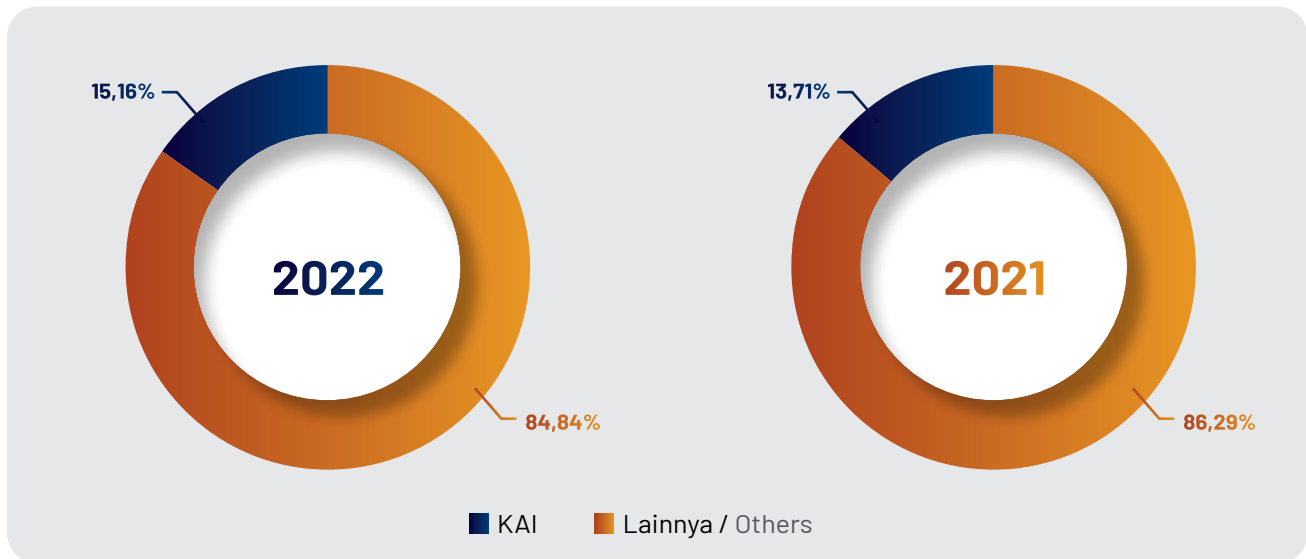


Pangsa pasar KAI berdasarkan jumlah barang pada tahun 2022 adalah sebesar 15,16%, meningkat 1,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 13,71%. Pangsa pasar berdasarkan jumlah barang untuk tahun 2022 tersebut dikarenakan penambahan sarana sebanyak 225 gerbong KKBW sehingga menyebabkan peningkatan volume angkutan batu bara sebesar 18%. Angkutan Petikemas meningkat 17%, selain karena adanya mitra baru juga karena permintaan penambahan perjalanan KA. Angkutan BBM naik 8% karena (1) adanya permintaan penambahan perjalanan KA untuk memasok kebutuhan BBM di area pemasaran masing-masing dan (2) adanya tambahan angkutan Kereta B di KA-KA penumpang, sehingga angkutan retail/hantaran naik 68%.

KAI's market share based on the number of goods in 2022 was 15.16%, an increase of 1.46% compared to the previous year at 13.71%. The market share based on the number of goods in 2022 was due to the addition of 225 KKBW carriages, causing an increase in the volume of coal transportation by 18%. Container transportation increased by 17%, in addition to the presence of new partners, as well as requests for additional train trips. Fuel transportation increased by 8% due to (1) requests for additional train trips to supply fuel needs in their respective marketing areas and (2) additional Train B transportation on passenger trains, so retail/delivery transportation increased by 68%.

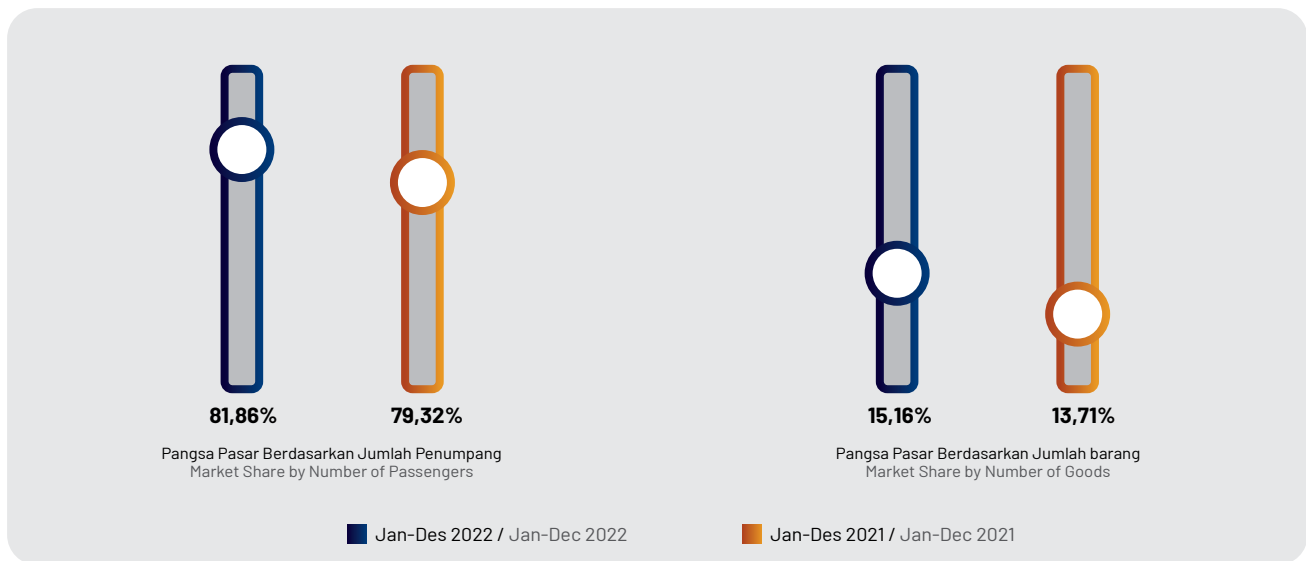
Pangsa Pasar Berdasarkan Jumlah Barang

Market Share by Number of Goods



Pangsa Pasar Berdasarkan Jumlah Penumpang dan Jumlah Barang

Market Share Based on Number of Passengers and Number of Goods



Penetrasi Pasar

Pada tahun 2022, KAI menerapkan strategi penetrasi pasar pada angkutan penumpang dengan melakukan komunikasi kepada calon pengguna jasa berupa penyampaian informasi produk melalui media sosial KAI maupun website dan aplikasi KAI Access. Selain dilakukan melalui media-media tersebut, KAI menerapkan strategi penetrasi pasar melalui *direct marketing* kepada *customer*. Pada tahun 2022, mempertimbangkan pemulihan situasi pandemi Covid-19, KAI menyelenggarakan strategi pemasaran berupa penyelenggaraan *event* dan kegiatan promosi.

Market Penetration

In 2022, KAI implemented a market penetration strategy for passenger transportation by communicating with potential service users in the form of delivering product information through KAI's social media as well as the KAI Access website and application. In addition to utilizing these media, KAI implemented a market penetration strategy through direct marketing to customers. In 2022, by considering the recovery from the impact of COVID-19, KAI conducted a marketing strategy in the form of organizing events and promotional activities.

Secara mendasar, penetrasi pasar KAI dilaksanakan dengan bertujuan untuk menginformasikan dan mengingatkan pengguna jasa terkait perkembangan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai syarat naik kereta api serta informasi layanan terbaru dari KAI.

Penetrasi pasar KAI untuk tahun 2022 terbagi ke dalam 2 (dua), sebagai berikut:

1. Above the Line (ATL)

- Sosialisasi dan materi promosi terkait dengan informasi KAI dilaksanakan melalui media digital (*socmed*). Hal ini memanfaatkan *high traffic platform* yang bisa langsung berinteraksi dengan target *audience* melalui sosial media internal KAI.
- Membuat video (liputan khusus, *launching* fitur KAI Access, maupun inovasi terbaru dari KAI) yang bisa disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial dan dapat ditayangkan di stasiun maupun di atas kereta.

2. Below the Line (BTL)

Melakukan aktivasi maupun sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan KAI sebagai *corporate* maupun meningkatkan *brand image* KAI melalui *event* yang dijalankan dengan menyasar kaum milenial (kegiatan *Traveling by Train*), meningkatkan *engagement* KAI dengan pelanggan dengan kegiatan Sapa Pelanggan; *surprise gift* bagi pelanggan yang loyal; *member* KAI Access; serta melakukan *sponsorship* untuk menambah aktivasi bagi pengguna KAI Access.

Sampai dengan akhir 2022, angkutan barang KAI telah menghadirkan layanan tambahan yaitu dengan menyediakan jasa sewa kontainer angkutan batu bara dan jasa bongkar muat yang dilakukan oleh anak perusahaan yaitu PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik). Selain itu, KAI melakukan pembangunan terminal baru guna menambah lokasi muat dan bongkar angkutan batu bara dan juga mempermudah mitra untuk melakukan pengangkutan dengan kereta api. Dalam bisnis retail, pada tahun 2022, KAI telah menyelesaikan uji coba pengembangan usaha dengan skema pengelolaan bisnis retail yang dilakukan oleh KAI Logistik dengan nama KAI Logistik Express dengan target pasar dan komoditas angkutan sama dengan Rail Express.

Fundamentally, KAI's market penetration is carried out with the aim of informing and reminding service users regarding the development of the provisions that apply as requirements for train rides as well as the latest service information from KAI.

KAI's market penetration in 2022 was divided into 2 (two) categories as follows:

1. Above the Line (ATL)

- Socialization and promotional materials related to KAI information are carried out through digital media (social media). This utilizes a high-traffic platform that can directly interact with the target audience through KAI's internal social media.
- Making videos (special coverage, launching the KAI Access feature, as well as the latest innovations from KAI) that can be conveyed to the public through social media and can be broadcast at stations or on trains.

2. Below the Line (BTL)

Conducting activation and dissemination to the public related to KAI as a corporate as well as improving KAI's brand image through events targeting millennials (*Traveling by Train* activities), increasing KAI's engagement with customers with Sapa Pelanggan (Greet the Customers) activities; surprise gift for loyal customers; KAI Access members; as well as sponsorship to increase activation for KAI Access users.

By the end of 2022, KAI freight transportation provided additional services, namely coal transportation container rental services and loading and unloading services carried out by its subsidiary, PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik). In addition, KAI is building a new terminal to add locations for loading and unloading coal transportation and making it easier for partners to carry out vehicles by train. In the retail business in 2022, KAI completed business development trials with a retail business management scheme carried out by KAI Logistik under the name KAI Logistik Express with the same target market and transportation commodities as Rail Express.

Sementara itu dari aspek komersialisasi nonangkutan, tahun 2022 menjadi pencapaian tertinggi untuk komersialisasi non-angkutan dalam 5 tahun terakhir melalui upaya Pembentukan tim optimalisasi aset, Membangun kerjasama dengan para stakeholders antara lain Kementerian BUMN, DJKA, Kejaksaan, POLRI, Pemda/Pemkot dan lainnya.

Integrasi dan Aliansi

Pada angkutan penumpang, KAI telah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk memaksimalkan saluran penjualan dengan sasaran untuk mencapai perluasan penjualan di *channel Business to Business (B2B)* dan *e-commerce*. Strategi yang dilakukan adalah dengan standardisasi kerja sama mitra B2B dan kerja sama dengan beberapa mitra untuk meningkatkan layanan di KAI Access sehingga dapat memberikan nilai tambah. Di samping itu, KAI menjalin kerja sama intermoda untuk layanan first mile dan last mile untuk memberikan layanan lebih kepada pelanggan.

Pada angkutan barang, KAI menjalin kerja sama dengan pelaku bisnis logistik maupun pemilik barang untuk menciptakan sistem logistik yang efektif dan efisien. Kerja sama tersebut di antaranya:

- a. Kerja sama jasa pengangkutan barang komoditi batu bara, peti kemas, semen, BBM/ BBK Pertamina, CPO, Pupuk, Pulp, dan angkutan barang paketan pada kereta bagasi.
- b. Kerja sama non-angkutan kereta api membuat kesepakatan kerja sama dengan anak perusahaan KAI Logistik untuk menangani Lo-Lo dan sinergis BUMN melalui penandatanganan MOU untuk meningkatkan konektivitas angkutan barang dengan kereta api dengan Pelindo dan PTPN III.

Dalam komersial non-angkutan menghasilkan *revenue stream* baru atas kegiatan bongkar muat batu bara baru melalui kolaborasi dengan unit angkutan barang dengan nilai Rp9 miliar dan pengembangan Aplikasi KAI Access (Asuransi, First Mile Last Mile Blue Bird dan DAMRI, iklan, Payment Point Online Banking/PPOB).

Strategi Harga

Dalam menetapkan strategi harga pada segmen angkutan penumpang, guna mendapatkan margin berdasarkan biaya operasional, KAI menerapkan strategi penentuan tarif manual sebagai berikut:

1. *Setting* tarif masih pada *range* TBA (Tarif Batas Atas)–TBB (Tarif Batas Bawah).

Meanwhile, the non-transport commercialization front accomplished its highest achievement in the last 5 years in 2022, through the establishment of asset optimization team and cooperation with stakeholders such as the Ministry of SOEs, DJKA, Attorney, POLRI, Regional/Municipal Governments, and others.

Integration and Alliance

In passenger transportation, KAI cooperates with third parties to maximize sales channels to achieve sales expansion in Business to Business (B2B) and e-commerce channels. The strategy taken is the standardization of B2B partner cooperation and cooperation with several partners to improve KAI Access services to generate added value. In addition, KAI also establishes an intermodal cooperation for first mile and last mile services to provide more service to the customers.

In freight transportation, KAI cooperates with logistics business players and goods owners to create an effective and efficient logistics system. These collaborations include:

- a. Collaboration on services for the transportation of coal, containers, cement, Pertamina BBM/BBK, CPO, Fertilizers, Pulp, and packaged goods transportation on luggage carts.
- b. Non-railway cooperation agreement resulted in cooperation agreement with KAI Logistik subsidiary company to handle Lo-Lo and SOE synergy through the signing of the MOU to increase freight transport connectivity by rail with Pelindo and PTPN III.

Non-transport commercial generated new revenue streams for new coal loading and unloading activities through collaboration with freight transport units amounting to Rp9 billion and KAI Access Application Development (Insurance, First Mile Last Mile Blue Bird, and DAMRI, advertisements, as well as Payment Point Online Banking/PPOB).

Pricing Strategy

To determine the pricing strategy in the passenger transport segment, In order to get a margin based on operational costs, KAI applied the manual pricing strategy as follows:

1. Price setting remains in the TBA (Upper Limit Price)– TBB (Lower Limit Price) range.

2. Penyesuaian tarif pada masa *low* dan *peak season*.
3. Penerapan tarif promo pada masa- masa tertentu.
4. Promosi tarif khusus.
5. Memberikan potongan harga tiket bagi lansia, wartawan dan berbagai instansi lainnya yang sudah bekerja sama dengan Perusahaan (TNI, POLRI, LVRI, Alumni dan Civitas Universitas).

Untuk strategi harga pada angkutan barang, KAI telah menerapkan sejumlah hal sebagai berikut:

1. Kenaikan tarif batu bara PT Bukit Asam Tbk.
2. Kenaikan tarif batu bara swasta.
3. Kenaikan tarif di hampir semua komoditi.

Kemudian, untuk mempertahankan pendapatan dari non-angkutan, KAI menetapkan kebijakan harga selama tahun 2022 dengan cara Penggunaan tarif normal tanpa adanya relaksasi yang terdampak pandemi Covid-19.

Service Excellence

Untuk tahun 2022, KAI telah menerapkan strategi dalam meningkatkan kualitas layanan angkutan penumpang dengan perincian sebagai berikut:

1. Percepatan waktu tempuh KA pada beberapa KA unggulan sehingga mempercepat waktu tempuh perjalanan KA.
2. Pemasangan wi-fi pada beberapa KA unggulan, penumpang bisa menggunakan layanan internet selama dalam perjalanan.
3. Penggantian kursi kereta pada beberapa kereta K1 lama dengan kursi standar kereta K1 stainless steel dan beberapa kereta ekonomi dengan standar kursi kereta ekonomi *stainless steel*.
4. Peremajaan kereta dan desain kereta baru dengan fitur yang lebih *personalized* untuk meningkatkan *brand image* dan kualitas pelayanan.
5. Modifikasi toilet pada kereta lama guna meningkatkan kualitas pelayanan.
6. Penambahan layanan kereta Panoramic yang dirangkaikan pada KA.
7. Membangun *customer experience* dengan peningkatan layanan *face to face*, via *call* atau *text* terintegrasi melalui sistem CRM, memberikan pelayanan yang lebih personal kepada pelanggan disesuaikan dengan nilai tambah yang diberikan kepada pelanggan, serta menerapkan program *membership & mileage*.

2. Price adjustment during low and peak seasons.
3. Promo price determination at certain times.
4. Special price promotion.
5. Providing discounted ticket price for elderlies, journalists, and other agencies cooperating with the Company (Indonesian Armed Forces, Indonesian Police, Indonesian Veterans, as well as University Members and Alumni).

For the pricing strategy for freight transportation, KAI implements the following:

1. Increase in PT Bukit Asam Tbk coal price.
2. Increase in private coal price.
3. Increase of price in most commodities.

To maintain revenue from non-transportation, KAI determines a price policy for 2022 by applying the normal price without relaxation impacted by COVID-19:

Service Excellence

For 2022, KAI implemented a strategy to improve the quality of passenger transportation services with the following details:

1. Accelerating train travel time on several leading trains to speed up train travel time.
2. Installing wi-fi on several featured trains, so passengers can use internet services on their trip.
3. Replacing some old K1 train seats with stainless steel standard K1 train seats and some economy trains with stainless steel economy standard seats.
4. Restoring trains and design new trains with more personalized features to improve brand image and service quality.
5. Modification of toilets on old trains to improve service quality.
6. Adding Panoramic train services to the train.
7. Building a customer experience by improving face to face services, via call or text integrated through the CRM system, providing more personalized service to customers according to the added value provided to customers, and implementing a membership & mileage program.

Pada segmen angkutan barang, untuk tahun 2022, KAI menerapkan strategi untuk memenuhi harapan pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan dengan perincian sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan sarana melalui pengoperasian 36 lok cc 205 dan 225 GD 54 ton.
2. Peningkatan kapasitas terminal melalui pengoperasian CY Serdang dan Sukacinta, Pemasangan alat timbang di Banjarsari & Muaralawai.
3. Peningkatan jaminan kepastian bisnis melalui kontrak jangka panjang.
4. Melaksanakan *gathering* dengan PT. Bukit Asam dan Mitra angkutan Batu Bara Swasta.

Selain itu, sebagai upaya untuk mempertahankan pendapatan dari non-angkutan, KAI menetapkan kebijakan Pembentukan Tim Optimalisasi Aset serta Membangun Kerja Sama dengan para *Stakeholders* antara lain Kementerian BUMN, DJKA, Kejaksaan, POLRI, Pemda/Pemkot dan lainnya.

Belanja Pemasaran

Untuk tahun 2022, KAI telah merealisasikan beban pemasaran segmen angkutan penumpang sejumlah Rp8.877.391.177,-, meningkat dibanding realisasi pada tahun 2021 yang sejumlah Rp5.568.549.249,-. Secara terperinci, realisasi tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. *Valentrain* (Sapa Pelanggan).
2. *Online Travel Fair KAI Access* (Promo tarif).
3. Promo Tarif KA Ciremai & KA Harina (Promo tarif).
4. KA Argo Parahyangan Luxury (Sosialisasi).
5. Promo Merdeka (Promo tarif).
6. KAI 100K Prambanan.
7. *Launching KA Hype Trip*.
8. KAI Expo 2022 (Promo tarif).
9. Program BPTV bekerja sama dengan hotel.
10. GoVember Promo Tarif Argo Cheribon (Promo tarif).
11. *Launching Blambangan Ekspres*.
12. Promo HUT Tulungagung (Promo tarif).
13. *Traveling by Train*.
14. Sosialisasi tarif khusus (Sosialisasi).
15. Sosialisasi Panoramic Train (Sosialisasi).
16. Promo 12.12 (Promo tarif).
17. KAI Pay Loyal Gift (Loyalty Program).
18. *Launching intermodal KAI x Damri*.
19. Loyal Customer Gift (Loyalty Program).
20. KAI Access *Imlek Gift* (Sapa Pelanggan)
21. Peresmian stasiun dan reaktivasi jalur lintas KA Garut Cibatuu.
22. *Marketeers Xfest 2022 (sponsorship)*.

In the freight transportation segment for 2022, KAI implemented a strategy to meet customer expectations and increase customer loyalty with the following details:

1. Meeting the need for facilities through the operation of 36 lok cc 205 and 225 GD 54 tons.
2. Increasing terminal capacity through the operation of CY Serdang and Sukacinta, Installing weighing equipment in Banjarsari & Muaralawai.
3. Increasing business certainty guarantees through long-term contracts.
4. Conducting a *gathering* with PT. Bukit Asam and Private Coal Transportation Partners.

Furthermore, to maintain revenue from non-transportation sector, KAI established the policy of the Establishment of Asset Optimization Team and Collaborating with Stakeholders such as the Ministry of SOEs, DJKA, Attorney, POLRI, Regional/ Municipal Governments, and others.

Marketing Expense

For 2022, KAI realized the marketing expense of the passenger transport segment amounting to Rp8,877,391,177, an increase compared to the realization in 2021 amounting to Rp5,568,549,249. In detail, the realization is used for the following activities:

1. *Valentrain* (Sapa Pelanggan/Greet the Customers);
2. KAI Access Online Travel Fair (Fare promo).
3. KA Ciremai & KAI Harina Fare promo (Fare promo)
4. Luxury KA Argo Parahyangan (Dissemination)
5. Merdeka Promo (Fare promo)
6. KAI 100K Prambanan.
7. KA Hype Trip Launching.
8. KAI Expo 2022 (Fare promo).
9. BPTV Program, collaborating with hotels.
10. Argo Cheribon Fare Promo GoVember (Fare promo).
11. Blambangan Express Launching.
12. Tulungagung City Anniversary Promo (Fare promo).
13. *Traveling by Train*.
14. Special fare dissemination (Dissemination).
15. Panoramic Train Dissemination (Dissemination).
16. 12.12 Promo (Fare promo).
17. KAI Pay Loyal Gift (Loyalty Program).
18. KAI x Damri intermodal launching.
19. Loyal Customer Gift (Loyalty Program).
20. KAI Access *Imlek Gift* (Sapa Pelanggan/Greet the Customers)
21. Station inauguration and reactivation of Garut-Cibatu railway line.
22. *Marketeers Xfest 2022 (sponsorship)*.

- | | |
|--|--|
| 23. Presstour FORWAPAREKRAF (<i>sponsorship</i>). | 23. FORWAPAREKRAF Presstour (<i>sponsorship</i>). |
| 24. KAI Access Ramadan Festive 2022. | 24. KAI Access Ramadan Festive 2022. |
| 25. Gift Hari Kartini (Sapa Pelanggan). | 25. Kartini Day Gift (Sapa Pelanggan/Greet the Customers). |
| 26. Gift Hari Konsumen (Sapa Pelanggan). | 26. Consumers Day Gift (Sapa Pelanggan/Greet the Customers). |
| 27. Gift Hari Kebangkitan Nasional (Sapa Pelanggan). | 27. National Awakening Day Gift (Sapa Pelanggan/Greet the Customers). |
| 28. Gift Hari Pancasila (Sapa Pelanggan). | 28. Pancasila Sanctity Day (Sapa Pelanggan/Greet the Customers). |
| 29. Coast to Coast Night Trail Ultra (<i>sponsorship</i>). | 29. Coast to Coast Night Trail Ultra (<i>sponsorship</i>). |
| 30. Prambanan Jazz Festival (<i>sponsorship</i>). | 30. Prambanan Jazz Festival (<i>sponsorship</i>). |
| 31. Dalawampu Afeloniya (<i>sponsorship</i>). | 31. Dalawampu Afeloniya (<i>sponsorship</i>). |
| 32. Guest House Losmen Reborn (<i>barter promotion</i>). | 32. Losmen Guest House Reborn (<i>barter promotion</i>). |
| 33. Trip Talent X-Factor By Train (<i>barter promotion</i>). | 33. X-Factor Talent Trip by Train (<i>barter promotion</i>). |
| 34. Gift Hari Anak (Sapa Pelanggan). | 34. Children's Day Gift (Sapa Pelanggan/Greet the Customers). |
| 35. Film semi documenter SMA Tarakanita (<i>barter promotion</i>). | 35. Semidocumentary film of SMA Tarakanita (<i>barter promotion</i>). |
| 36. Gift Hari Pelanggan (Sapa Pelanggan). | 36. Customers Day Gift (Sapa Pelanggan/Greet the Customers). |
| 37. Jogja Coffee Week (<i>sponsorship</i>). | 37. Jogja Coffee Week (<i>sponsorship</i>). |
| 38. Solo Batik Fest (<i>sponsorship</i>). | 38. Solo Batik Fest (<i>sponsorship</i>). |
| 39. Tau Tau Festival (<i>sponsorship</i>). | 39. Tau Tau Festival (<i>sponsorship</i>). |
| 40. Gift HUT KAI (Sapa Pelanggan). | 40. KAI Anniversary Gift (Sapa Pelanggan/Greet the Customers). |
| 41. Basketball Tournament PT POS (<i>sponsorship</i>). | 41. Basketball Tournament of PT POS (<i>sponsorship</i>). |
| 42. Gift Sumpah Pemuda (Sapa Pelanggan). | 42. The Youth Pledge Gift (Sapa Pelanggan (Greet the Customers). |
| 43. Mandira Festival (<i>sponsorship</i>). | 43. Mandira Festival (<i>sponsorship</i>). |
| 44. Markplus Conference 2022 (<i>sponsorship</i>). | 44. 2022 Markplus Conference (<i>sponsorship</i>). |
| 45. Gift Natal & Tahun Baru 2022 (Sapa Pelanggan). | 45. 2022 Christmas and New Year Gift (Sapa Pelanggan/Greet the Customers). |
| 46. Sponsorship HUT Damri | 46. Damri Anniversary Sponsorship |

Realisasi tersebut secara umum digunakan untuk mengikuti kegiatan pameran, penyelenggaraan event KAI dan mengikuti event nasional. Terkait hal itu, KAI berusaha melakukan efisiensi beban pemasaran atas angkutan serta pendukung unit komersial dan pekerjaan masih dalam progres atas kegiatan promosi.

Sementara itu, KAI merealisasikan beban pemasaran khusus segmen angkutan barang untuk tahun 2022 sejumlah Rp2.083,8 miliar, meningkat dari realisasi untuk tahun 2021 yang sejumlah Rp526,5 juta. Realisasi tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan, antara lain: Pembinaan Tim Marketing Kantor Pusat dan Daerah, Pembuatan Souvenir Promosi, Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan Angkutan Barang, serta Pelaksanaan Proses Verifikasi Mitra Angkutan Baru.

It was realized by participating in exhibition activities, organizing KAI events and participating in national events. As such, KAI tried to make marketing expenses efficient for transportation as well as supporting commercial units and work was still in progress on promotional activities.

Meanwhile, KAI realized special marketing expenses for the freight transport segment for 2022 amounting to Rp2,083.8 million, an increase compared to that of 2021 at Rp526.5 million. The realization was used to carry out activities, including: Development of Headquarters and Regional Office Marketing Teams, Making Promotional Souvenirs, Conducting Goods Transportation Customer Satisfaction Surveys, as well as Implementing the Verification Process for New Transport Partners.

Realisasi beban pemasaran untuk non-angkutan KAI untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp10,5 miliar, meningkat dari realisasi untuk tahun 2021 yang sejumlah Rp8,6 miliar.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Penjelasan Segmen Usaha

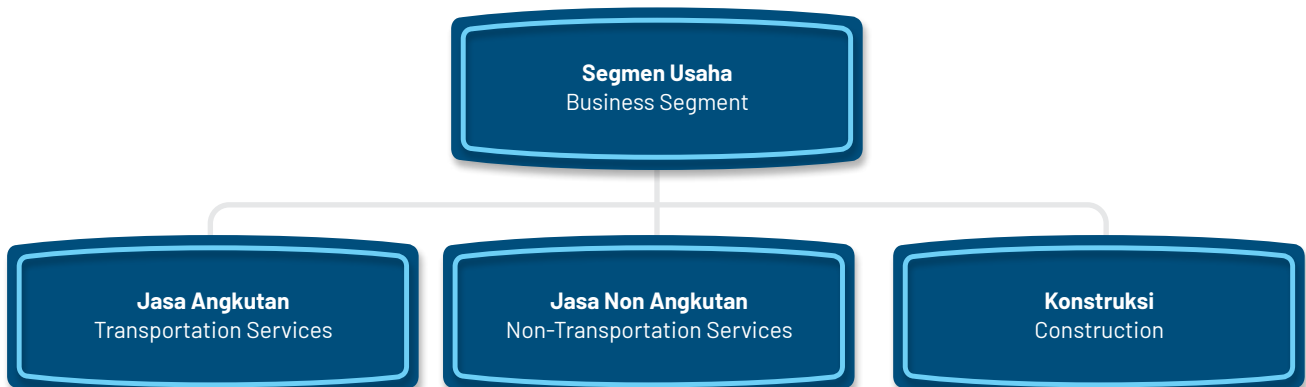
Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya.

Segmentasi usaha ditentukan berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Grup. Secara lebih lanjut, segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- Yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama).
- Hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya.
- Dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Segmen usaha KAI ditentukan berdasarkan kriteria dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia, yaitu PSAK 5 tentang Segmen Operasi, terdiri atas Jasa Angkutan, Jasa Non-Angkutan, dan Konstruksi.

Segmen Usaha KAI



The realization of marketing expenses for KAI's non-transportation services for 2022 was Rp10.5 billion, an increase compared to that of 2021 at Rp8.6 billion.

OVERVIEW OF OPERATIONS PER BUSINESS SEGMENT

Business Segment Explanation

The Group presented operating segments based on financial information used by operational decision makers in assessing segment performance and determining the allocation of its resources.

Business segmentation is based on the activities of each operating activity of legal entities within the Group. An operating segment was a component of an entity:

- That was seen in business activities that earned revenues and incurred expenses (including revenues and expenses related to transactions with other components of the same entity).
- Its operating results were regularly reviewed by the chief operating officer to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance.
- And separable financial information is available.

The business segment is based on the criteria in the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) applicable in Indonesia, namely PSAK 5 concerning Operating Segments. KAI's Business Segment consists of Transportation Services, Non-Transportation Services and Construction.

KAI's Business Segment

Produktivitas Segmen Usaha

Jasa Angkutan

Segmen jasa angkutan meliputi Angkutan Kereta Api (KA) Penumpang dan Angkutan Barang. Angkutan Kereta Api (KA) Penumpang Kinerja angkutan penumpang yang dicatatkan KAI untuk tahun 2021 dan 2022 disajikan sebagai berikut:

Kinerja Angkutan KA Penumpang

Dalam satuan orang

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
KA Utama Kelas Eksekutif / Main Train-Executive Class	11.522.349	3.663.244	7.859.105	214,54%
KA Utama Kelas Bisnis / Main Train-Business Class	1.015.555	245.415	770.140	313,81%
KA Utama Kelas Ekonomi / Main Train-Economy Class	19.338.612	6.645.308	12.693.304	191,01%
Sub-Jumlah 1 / Sub-Total 1	31.876.516	10.553.657	21.332.549	202,03%
KA Lokal Ekonomi / Local Train-Economy Class	252.572.288	143.983.615	108.588.673	75,42%
Sub-Jumlah 2 / Sub-Total 2	252.572.288	143.983.615	108.588.673	75,42%
Jumlah / Total	284.448.804	154.537.582	129.911.222	84,06%

Untuk tahun 2022, total volume penumpang KA Penumpang KAI mencapai 284.448.804 orang, meningkat 84,06% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 154.537.582 orang. Peningkatan tersebut terutama dikontribusikan oleh adanya tambahan ketersediaan KA guna memenuhi permintaan masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan kereta api untuk bepergian pada hari libur serta adanya kelonggaran aturan protokol kesehatan dari Pemerintah untuk bepergian menggunakan jasa angkutan kereta api dan adanya peningkatan volume penumpang terutama KA utama.

KA Utama Kelas Eksekutif

Volume penumpang KA Utama Kelas Eksekutif KAI untuk tahun 2022 adalah sejumlah 11.522.349 orang, meningkat 214,54% dibanding tahun 2021 yang sejumlah 3.663.244 orang. Peningkatan tersebut disebabkan oleh okupansi penumpang yang sudah mulai bertambah dan terdapat tambahan ketersediaan KA guna memenuhi permintaan masyarakat sebagai pengguna jasa kereta api untuk bepergian pada masa liburan serta adanya kelonggaran aturan protokol kesehatan dari Pemerintah untuk bepergian menggunakan jasa angkutan kereta api, banyaknya pengguna kereta api yang sudah melakukan vaksin sebagai syarat naik kereta api sesuai dengan aturan yang ditetapkan Pemerintah untuk bepergian di masa pandemi Covid-19.

Business Segment Productivity

Transportation Services

The transportation service segment includes Passenger Rail Transport (KA) and Goods Transportation. The performance of passenger transportation recorded by KAI in 2021 and 2022 is as follows:

Passenger Rail Transport Performance

In people

In 2022, the total volume of KAI's Passenger Train passengers reached 284,448 passengers, an increase of 84.06% compared to 2021 at 154,537,582 passengers. The increase was mainly due to the additional availability of trains to meet the demand of the public as users of rail transportation services to travel on holidays and the relaxation of health protocol regulations from the Government for traveling using rail transportation services and an increase in passenger volume, especially on main trains.

Main Train – Executive Class

In 2022, the passenger volume of the KAI's Main Train Executive Class reached 11,522,349 passengers, an increase of 214.54% compared to 2021 at 3,663,244 passengers. This increase was due to the increase in passenger occupancy and the additional availability of trains to meet the demand of the public as users of rail services to travel during the holidays and the relaxation of health protocol regulations from the Government for traveling using rail transportation services, the large number of vaccinated train users as a condition for traveling by train in accordance with the rules set by the Government for traveling during the COVID-19 pandemic.

KA Utama Kelas Bisnis

Volume penumpang KA Utama Kelas Bisnis KAI untuk tahun 2022 adalah sejumlah 1.015.555 orang, meningkat 313,81% dibanding tahun 2021 yang sejumlah 245.415 orang. Peningkatan tersebut disebabkan oleh terdapat KA tambahan sesuai dengan tingkat permintaan dan okupansi pengguna KA dan menurunnya tren kasus Covid-19.

KA Utama Kelas Ekonomi

Untuk tahun 2022, volume penumpang KA Utama Kelas Ekonomi KAI adalah sejumlah 19.338.612 orang, meningkat 191,01% dibanding tahun 2021 yang sejumlah 6.645.308 orang. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan KA sehubungan berkurangnya lonjakan kasus Covid-19 serta kelonggaran aturan protokol kesehatan untuk bepergian menggunakan jasa angkutan KA.

KA Lokal Ekonomi

Volume penumpang KA Lokal Ekonomi KAI untuk tahun 2022 adalah mencapai 252.572.288 orang, meningkat 75,42% dibanding tahun 2021 yang sejumlah 143.983.615 orang. Peningkatan tersebut disebabkan oleh belum kembalinya minat penumpang KA Lokal Ekonomi untuk menggunakan jasa layanan angkutan kereta api dan sebagian penumpang beralih menggunakan KA kelas Bisnis. Namun, volume penumpang KRL sudah mengalami peningkatan seiring dengan kegiatan perkantoran dan kegiatan masyarakat lainnya yang sudah berangsur normal. Dari pendapatannya tidak tercapai dikarenakan belum terealisasinya kenaikan tarif KRL yang diprogramkan mulai TW I tahun 2022.

Angkutan Barang

KAI mencatatkan kinerja angkutan barang untuk tahun 2021 dan 2022, sebagai berikut:

Kinerja Angkutan Barang

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Batu Bara / Coal	45.428.564	38.358.972	7.069.592	18,43%
Peti Kemas / Container	4.802.436	4.102.948	699.488	17,05%
BBM / Fuel	2.554.062	2.356.428	197.634	8,39%
Semen / Cement	3.856.140	4.165.974	-309.834	-7,44%
General Cargo dan Barang Hantaran Potongan (BHP) / General Cargo and Delivery Goods Unit (BHP)	208.980	124.336	84.644	68,08%
Lainnya / Others	1.156.699	1.153.120	3.579	0,31%
Jumlah / Total	58.006.880	50.261.778	7.745.102	15,41%

Main Train – Business Class

KAI recorded 1,015,555 passengers for its Main Train's Business Class in 2022, an increase of 313.81% compared to 2021 at 245.415 passengers. This increase was due to the additional trains following the demand and occupancy of train users and the declining number of COVID-19 cases.

Main Train – Economy Class

In 2022, KAI recorded 19,338,612 passengers for its Main Train's Economy Class, an increase of 191.01% compared to 2021 at 6,645,308 passengers. Such an increase was due to the addition of trains due to the declining number of COVID-19 cases and the relaxation of the health protocols for travels by rail transportation services.

Local Train – Economy Class

In 2022, the volume of KAI Local Economy Train passengers reached 252,572,288 passengers, an increase of 75.42% compared to 2021 at 143,983,615 passengers. This increase was due to the non-returned interest of Local Economy Train passengers to use rail transportation services and some passengers switched to using Business class trains. However, the volume of KRL passengers has increased in line with office activities and other community activities which are getting back to normal. The revenue was not achieved due to the fact that the KRL fare increase was not realized which was planned to start in Q1 2022.

Freight Transport

The performance of freight transportation recorded by KAI in 2021 and 2022 is as follows:

Freight Transportation Performance

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Batu Bara / Coal	45.428.564	38.358.972	7.069.592	18,43%
Peti Kemas / Container	4.802.436	4.102.948	699.488	17,05%
BBM / Fuel	2.554.062	2.356.428	197.634	8,39%
Semen / Cement	3.856.140	4.165.974	-309.834	-7,44%
General Cargo dan Barang Hantaran Potongan (BHP) / General Cargo and Delivery Goods Unit (BHP)	208.980	124.336	84.644	68,08%
Lainnya / Others	1.156.699	1.153.120	3.579	0,31%
Jumlah / Total	58.006.880	50.261.778	7.745.102	15,41%

Untuk tahun 2022, total volume angkutan barang KAI tercatat mencapai 58.006.880 ton, meningkat 15,41% dibanding tahun 2021 yang sejumlah 50.261.778 ton. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan angkutan batu bara dikarenakan penambahan sarana sebanyak 225 gerbong KKWB sehingga terjadi peningkatan volume dari angkutan batu bara PT BA tujuan Tarahan sebanyak 17% (Th 2022 total volume 23,4 juta ton, Th 2021 total volume 20 juta ton) dan Non-PT BA (Swasta) sebanyak 29% (Th 2022 total volume 16,2 juta ton, Th 2021 total volume 12,6 juta ton). Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan mitra baru. Kemudian, angkutan petikemas meningkat 17% (Th 2023 total volume 4,8 juta ton, Th 2021 total volume 4,1 juta ton), selain adanya mitra baru juga adanya permintaan peningkatan hari operasi. Untuk angkutan BBM, terdapat kenaikan 8% (Th 2022 total volume 2,6 juta ton, Th 2021 2,4 juta ton) dan angkutan general cargo/hantaran meningkat 68% (Th 2022 total volume 209 ribu ton, Th 2021 total volume 124 ribu ton).

Batu Bara

Volume angkutan batu bara KAI untuk tahun 2022 adalah mencapai 45.428.564 ton, meningkat 18,43% dibandingkan tahun 2021 sebesar 38.358.972 ton. Peningkatan realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 itu disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

1. Kegiatan proses bongkar muat tidak maksimal akibat gangguan RCD (*Rotary Car Dumper*) dan TLS (*Train Loading Station*).
2. Tidak beroperasinya sebagian dari RCD atau TLS dalam waktu tertentu karena jadwal rawatan dan overhaul;
3. *Loading* batu bara lambat akibat hujan deras sehingga proses isi material di bunker terhambat;
4. Kegiatan *loading* terhambat akibat adanya gangguan listrik dan mekanik;
5. *Afron Feeder* (AF) lambat bongkar karena tunggu perbaikan dan material lengket;
6. Stok Buffer kurang maksimal dikarenakan hujan dan licin di area Container Yard (CY) dan tambang;
7. Aktivitas pemeliharaan dan perbaikan prasarana jalan rel (*window time*) sehingga kegiatan proses pergerakan muat bongkar terhenti sementara;
8. Tunggu antrean bongkar yang cukup lama dikarenakan masih terdapat KA yang sedang melakukan proses bongkar;
9. Tunggu material Batubara karena proses loading di TLS lambat;
10. Perjalanan KA terhambat akibat terjadinya Kecelakaan Kereta Api (KKA);

In 2022 the total volume of load transportation reached 58,006,880 tons, an increase of 15.41% compared to 2021 at 50,261,778 tons. The increase mainly due to an increase in coal transportation due to the addition of 225 KKWB carriages, resulting in an increase in the volume of PT BA's coal transportation to Tarahan by 17% (2022 total volume of 23.4 million tons, 2021 total volume of 20 million tons). and Non-PT BA (Private) as much as 29% (In 2022 total volume of 16.2 million tons, In 2021 total volume of 12.6 million tons). This increase was due to an increase in new partners. Meanwhile, container transportation increased by 17% (2023 total volume of 4.8 million tons, 2021 total volume of 4.1 million tons), apart from the presence of new partners there was also a request for an increase in operating days. For fuel transportation, there was an increase of 8% (2022 total volume of 2.6 million tons, 2021 2.4 million tons) and general cargo/delivery transportation increased 68% (2022 total volume of 209 thousand tons, 2021 total volume of 124 thousand tons).

Coal

The volume of coal transportation in 2022 reached 45,428,564 tons, an increase of 18.43% compared to 2021 at 38,358,972 tons. The increase in the realization of 2022 when compared to the realization of 2021 was due to several things, including:

1. The loading and unloading process activities are not optimal due to RCD (*Rotary Car Dumper*) and TLS (*Train Loading Station*) disturbances.
2. Part of the RCD or TLS is not operating for a certain time due to maintenance and overhaul schedules;
3. Loading of coal is slow due to heavy rain so that the process of filling material in the bunker is hampered;
4. Loading activities are hampered due to electrical and mechanical disturbances;
5. *Afron Feeder* (AF) is slow to unload due to waiting for repairs and sticky material;
6. Buffer stock is less than optimal due to rain and slippery conditions in the Container Yard (CY) and mine areas;
7. Railroad infrastructure maintenance and repair activities (*window time*) so that loading and unloading movement activities temporarily stop;
8. Wait for the unloading queue which is quite long because there are still trains that are carrying out the unloading process;
9. Wait for the coal material because the loading process at TLS is slow;
10. Train trips are hampered due to a train accident (KKA);

11. Proses loading lambat akibat gangguan alat bongkar muat (*Gantry Crane*) dan *Reach Staker* (RS).

Peti Kemas

Volume angkutan peti kemas KAI untuk tahun 2022 adalah mencapai 4.802.436 ton, peningkatan 17,05% dibandingkan tahun 2021 sebesar 4.102.948 ton. Peningkatan tersebut disebabkan oleh sejumlah hal, sebagai berikut:

1. Masih terdapat program angkutan yang belum berjalan disebabkan tidak adanya kesepakatan tarif angkutan;
2. Dalam satu rangkaian KA (Kereta Api), angkutan kontainer isi tidak maksimal;
3. Tarif yang belum kompetitif dibanding dengan *trucking* serta angkutan container belum dapat *door to door* (dengan Kereta api membutuhkan *double handling*);
4. Kegiatan bongkar muat belum lancar akibat infrastruktur (keadaan jalan CY) rusak sehingga mobilitas alat-alat bongkar muat terhambat;
5. Hari Operasi (HO) perjalanan KA yang telah diprogramkan belum sesuai dengan realisasinya seperti dalam seminggu program berjalannya 7 hari, realisasi berjalan 5 sd 6 hari;
6. Adanya mitra yang mengajukan pemberhentian kontrak angkutan;
7. Terdapat diskon tarif sebesar 50% yang diberikan kepada customer apabila angkutannya telah mencapai target minum.

BBM

Volume angkutan BBM KAI untuk tahun 2022 adalah mencapai 2.554.062 ton, meningkat 8,39% dibanding tahun 2021 yang sebesar 2.356.428 ton. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan perjalanan KA disesuaikan dengan DO (*Delivery Order*) pihak PT Pertamina yang disampaikan ke PT KAI dan adanya peningkatan tarif untuk beberapa relasi angkutan BBM.

Semen

Untuk tahun 2022, volume angkutan semen KAI adalah sejumlah 3.856.140 ton, menurun 7,44% dibandingkan tahun 2021 sebesar 4.165.974 ton. Penurunan realisasi tahun 2022 dibanding realisasi tahun 2020 disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

1. Masih belum meningkatnya permintaan pasar sehingga masih banyaknya stok semen yang tersisa di gudang;

11. The loading process is slow due to interference from loading and unloading equipment (*Gantry Crane*) and *Reach Stakeker* (RS).

Container

The volume of container transportation in 2022 reached 4,802,436 tons, an increase of 17.05% compared to 2021 at 4,102,948 tons. The increase was due to the following matters:

1. There are still transportation programs that have not yet been implemented due to the absence of an agreement on transportation rates;
2. In a series of trains (Railway), the transportation of filled containers is not optimal;
3. Fares that are not yet competitive compared to trucking and container transportation do not yet get door to door (by train requires double handling);
4. Loading and unloading activities have not been smooth due to damaged infrastructure (CY road conditions) so that the mobility of loading and unloading equipment is hampered;
5. Operational Days (HO) of train trips that have been programmed are not in accordance with the realization as in a week the program runs 7 days, realization runs 5 to 6 days;
6. There are partners who propose to terminate the transportation contract;
7. There is a discount rate of 50% which is given to the customer if the transportation has reached the drinking target.

Fuel

The volume of fuel transportation in 2022 reached 2,554,062 tons, an increase of 8.39% compared to 2021 at 2,356,428 tons. The increase was due to an increase in train trips adjusted to PT Pertamina's DO (*Delivery Order*) which was submitted to PT KAI and an increase in fares for several fuel transportation relations.

Cement

The volume of cement transportation in 2022 reached 3,856,140 tons, a decrease of 7.44% compared to 2021 at 4,165,974 tons. The decrease in the realization of 2022 when compared to the realization of 2021 was caused by several things, including:

1. There was no increase in market demand so that there is still a large stock of cement remaining in the warehouse;

2. Permintaan pembatalan perjalanan ke relasi tertentu, seperti tujuan ke Brumbung, Semarang Poncol, Lempuyangan, Purwokerto, Cirebon dan Kalimas disebabkan penurunan dratis serapan semen Wilayah Jateng Jaktim, stok semen digudang masih tinggi dan peningkatan harga jual semen akibat dampak kenaikan harga batu bara;
3. Permintaan rangkaian gerbong (SF) isi tidak maksimal (program SF 18 GD isi, yang berjalan 13 GD isi);
4. Permintaan penurunan target angkutan;
5. Program angkutan baru belum berjalan akibat belum tercapainya kesepakatan kerja sama.

General Cargo dan Barang Hantaran Potongan (BHP)

Volume angkutan *general cargo* dan BHP KAI untuk tahun 2022 adalah mencapai 208.980 ton, meningkat 68,08% dibandingkan tahun 2021 sebesar 124.336 ton. Peningkatan realisasi 2022 dibandingkan realisasi tahun 2021 disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

1. Layanan Angkutan BHP belum kompetitif karena belum melayani pengantaran barang *door to door*;
2. Pemberlakuan tarif berdasarkan kontrak kapasitas muat Kereta B.

Lainnya

Angkutan barang lainnya terdiri dari angkutan curah, perkebunan, pupuk, Satker, serta angkutan dari Bank Indonesia yang bersifat insidental. Angkutan tersebut berjalan sesuai dengan kebutuhan, termasuk di dalamnya KA angkutan dinas.

Volume angkutan lainnya KAI untuk tahun 2022 adalah mencapai 1.156.699 ton, meningkat 0,31% dibandingkan tahun 2021 sebesar 1.153.120 ton. Peningkatan tersebut disebabkan:

1. Angkutan Barang perkebunan (CPO, Lateks, Pulp): angkutan CPO dari beberapa perkebunan masih belum maksimal, angkutannya tergantung pada *delivery order* dari mitra sehingga tidak dapat memaksimalkan sarana yang tersedia. Pembatasan pemasaran (diprioritaskan untuk pemasaran domestik/bukan untuk ekspor) sehingga angkutan yang digunakan menggunakan truk.
2. Sedangkan angkutan lainnya mencapai target karena Angkutan Satker, Dinas, dan Bank Indonesia angkutannya bersifat insidental, berjalan sesuai dengan permintaan, pihak PT KAI menyediakan sarana yang sesuai dengan jenis angkutannya.

General Cargo and Delivery Goods Unit (BHP)

The volume of general cargo and BHP transportation in 2022 reached 208,980 tons, an increase of 68.08% compared to 2021 at 124,336 tons. The increase in the realization of 2022 when compared to the realization of 2021 was caused by several things, including:

1. BHP's transportation services are not competitive because they do not provide door to door delivery of goods;
2. Application of fares based on the load capacity contract for Train B.

Others

Other goods transportation consisting of bulk transportation, plantations, fertilizers, Satker and transportation from Bank Indonesia which were incidental in nature, and the transportation run according to needs, including official transportation trains.

Other transportation volumes in 2022 reached 1,156,699 tons, increased by 0.31% compared to 2021 of 1,153,120 tons. The increase was due to:

1. Transportation of plantation goods (CPO, Latex, Pulp): the transportation of CPO from several plantations is still not optimal, the transportation depends on delivery orders from partners so that the available facilities cannot be maximized. Restrictions on marketing (prioritized for domestic marketing/not for export) so that trucks are used for transportation.
2. Meanwhile, other transportation reached the target because the transportation of Satker, Service, and Bank Indonesia was incidental, operated according to request, PT KAI provided facilities according to the type of transportation.

Jasa Non-Angkutan

Segmen jasa non-angkutan KAI meliputi beberapa komponen, yaitu pendapatan optimalisasi aset, pekerjaan pihak ketiga dan lainnya. Penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Optimalisasi Aset**
 Merupakan pendapatan sewa menyewa properti di dalam dan di luar stasiun. Pendapatan ini meliputi sewa sarana, sewa lahan parkir, sewa bufet/kios stasiun, sewa gudang/ruang stasiun, sewa rumah peristirahatan, sewa mes dan wisma, sewa rumah perusahaan, sewa bangunan, dan sewa tanah.
- Pekerjaan Pihak Ketiga**
 Merupakan pendapatan dari penjualan jasa teknis. Pendapatan ini meliputi perawatan kereta makan, perawatan rangka dasar, dan pendapatan penjualan jasa pekerjaan teknis.
- Pendapatan Non-Angkutan Lainnya**
 Meliputi periklanan/*advertising*, percetakan, kesehatan medis, pengembalian kas TGR.

KAI mencatatkan kinerja jasa non-angkutan untuk tahun 2021 dan 2022, sebagai berikut:

Kinerja Jasa Non-Angkutan KAI

Dalam ribuan rupiah

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Pendapatan optimalisasi aset / Asset Optimization Revenue	630.197.305	448.525.147	181.672.158	40,50%
Pekerjaan pihak ketiga / Third Party Work	541.324.100	372.359.208	168.964.892	45,38%
Lainnya / Others	404.166.635	313.315.996	90.850.639	29,00%
Jumlah / Total	1.575.688.040	1.134.200.351	441.487.689	38,93%

Peningkatan jumlah jasa non-angkutan KAI sebesar 32,93% terutama disebabkan adanya pendapatan utilitas dan mulai membaiknya kondisi ekonomi pasca-pandemi Covid-19. Selain itu, terdapat akuisisi mitra baru dan pengembangan kerja sama dengan mitra eksisting yang berdampak pada peningkatan pendapatan non-angkutan.

Konstruksi

Segmen konstruksi KAI meliputi pendapatan atas jasa konsesi dalam proyek pembangunan prasarana Light Rail Transit (LRT). Pengakuan pendapatan konstruksi didasarkan pada ISAK 16 Perjanjian Konsesi Jasa, yang pada tahun 2021 dan 2022 KAI mengakui pendapatan atas hak konsesi pengelolaan

Non-Transportation Service

The non-transportation service segment includes asset optimization revenue, third party works and others. The details of each segment are as follows:

- Asset Optimization Revenue**
 Represents rental income for property inside and outside the station. This income includes rental of facilities, rental of parking lots, rental of station buffets/kiosks, rental of warehouse/station space, rental of rest houses, rental of mess and guest houses, rental of company houses, rental of buildings, and land rent.
- Third Party Works**
 Represents income from sales of technical services. This income includes meal carriage maintenance, basic frame maintenance, and sales of technical work service revenues.
- Other Non-Transportation Income**
 Covering advertising/*advertising*, printing, medical health, TGR cash refund.

The performance of non-transportation services recorded by KAI in 2021 and 2022 is as follows.

Non-Transportation Service Performance of KAI

In millions of rupiah

KAI's 32.93% increase in non-transportation services was mainly due to utility income and the improving conomic conditions after the COVID-19 pandemic. In addition, there were acquisitions of new partners and development of cooperation with existing partners which have an impact on increasing non-transport revenue.

Construction

KAI's construction segment includes revenues from concession services in Light Rail Transit (LRT) infrastructure development projects. Recognition of construction revenue is based on ISAK 16 Service Concession Agreement, wherein 2021 and 2022 the Company recognizes revenue from

LRT Jabodebek. Pengakuan pendapatan didasarkan pada jumlah yang dibayarkan pada kontraktor LRT di setiap tahunnya. KAI menetapkan kebijakan *zero margin* atas pencatatan pendapatan konstruksi dengan nilai pendapatan atas hak yang diperoleh dari Pemerintah sama dengan beban yang dibayarkan pada kontraktor. Dengan demikian, secara keseluruhan nilai pendapatan konstruksi tidak berpengaruh pada laba/rugi Perseroan.

KAI mencatatkan kinerja konstruksi untuk tahun 2021 dan 2022, sebagai berikut:

Kinerja Konstruksi KAI

Dalam ribuan rupiah

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Pendapatan konstruksi / Construction Revenue	2.610.567.346	2.387.245.804	223.321.542	9,35%

Realisasi pendapatan konstruksi KAI untuk tahun 2022 adalah sejumlah Rp2,61 triliun, meningkat 9,35% dibanding tahun 2021 yang mencapai Rp2,39 triliun. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya realisasi pembayaran proyek LRT Jabodebek dibandingkan dengan tahun 2021.

Sarana Produksi

Untuk mendukung usaha Perseroan, KAI memiliki beragam sarana atau alat produksi seperti lokomotif, KRDE/I, KRL, kereta dan gerbong. Uraian mengenai sarana produksi KAI untuk tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sarana Produksi KAI

Dalam satuan unit

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Lokomotif / Locomotive				
Realisasi Siap Operasi (SO) Lokomotif / Ready To Operate (SO) Locomotive	467	444	23	5,18%
Kereta Rel Diesel (KRD) / Diesel Train (KRD)	83	129	-46	-35,66%
Kereta Rel Listrik (KRL) / Electric Train (KRL)				
Realisasi Siap Operasi (SO) KRL / Ready To Operate (SO) KRL	1.064	1.060	4	0,38%
Kereta / Train				
Realisasi Siap Operasi (SO) kereta / Ready to Operate (SO) Train	1.692	1.622	70	4,32%
Gerbong / Wagon				
Realisasi Siap Operasi (SO) gerbong / Ready To Operate (SO) Wagon	7.570	6.970	600	8,61%
Jumlah / Total	10.876	10.225	651	6,37%

concession rights for the Jabodebek LRT management. Revenue recognition is based on the amount paid to the LRT contractor each year. The Company has set a zero margin policy for recording construction revenues where the value of revenue from rights obtained from the Government is the same as the expenses paid to contractors, so that the overall value of construction income does not affect the Company's profit/loss.

The construction performance recorded by KAI in 2021 and 2022 is as follows.

KAI Construction Performance

In millions of rupiah

Realization of construction revenue in 2022 reached Rp2.61 trillion, increased by 9.35% compared to 2021 at Rp2.39 trillion. This increase was due to the increase in the realization of Jabodebek LRT project payment compared to that of 2021.

Production Rolling Stock

To support the Company's business, KAI has various production facilities or equipment such as locomotives, KRDE/I, KRL, trains and carriages. Descriptions of production facilities in 2021 and 2022 can be seen in the following table:

KAI Production Rolling Stock

In unit

Lokomotif

Realisasi Siap Operasi (SO) lokomotif untuk tahun 2021 adalah sejumlah 467 unit, meningkat 5,18% dibanding tahun 2021 yang sejumlah 444 unit. Peningkatan ini disebabkan waktu perawatan lokomotif di balai yasa yang relatif lebih cepat sehingga menambah sarana Siap Operasi untuk mendukung operasional angkutan tahun 2022.

Kereta Rel Diesel (KRD)

Realisasi Siap Operasi (SO) KRD untuk tahun 2022 adalah sejumlah 83 unit, menurun 35,66% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 129 unit. Penurunan tersebut dikarenakan adanya beberapa sarana KRD yang dimodifikasi untuk mendukung operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung, pada tahun 2022, proses modifikasi tersebut belum selesai.

Kereta Rel Listrik (KRL)

Realisasi Siap Operasi (SO) KRL untuk tahun 2022 adalah sejumlah 1.064 unit, meningkat 0,38% dibandingkan tahun 2021 yang sejumlah 1.060 unit. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya program penggantian keping roda untuk beberapa trainset KRL.

Kereta

Untuk tahun 2022, realisasi Siap Operasi (SO) KAI adalah sejumlah 1.692 unit, meningkat 4,32% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 1.622 unit. Peningkatan tersebut disebabkan karena waktu perawatan Depot yang relatif lebih cepat sehingga berkurangnya kereta-kereta Tidak Siap Operasi (TSO) di Depot dan beberapa kereta komersial yang sudah konservasi menjadi siap operasi kembali.

Gerbong

Realisasi Siap Operasi (SO) gerbong KAI untuk tahun 2022 adalah sejumlah 7.570 unit, meningkat 8,61% dibanding tahun 2021 yang sebesar 6.970 unit. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan investasi 480 gerbong atas pengadaan tahun 2021 serta perawatan di depo dan balai yasa tidak mengalami gangguan atau hambatan sehingga SO Gerbong lebih banyak.

Locomotive

The realization of ready-to-operate (SO) locomotives in 2022 was 467 units, an increase of 5.18% compared to 2021 at 444 units. This increase was due to the relatively faster maintenance time for the locomotives at Balai Yasa, thereby adding Ready-to-Operate facilities to support transportation operations in 2022.

Diesel Train (KRD)

The realization of ready for operation (SO) KRD in 2022 was 83 units, decreased by 35.66% compared to 2021 at 129 units. This decrease was due to several modified KRD facilities to support the operations of the Jakarta-Bandung Fast Train, in 2022, the modification process has not been completed.

Electric Train (KRL)

The realization of ready-to-operate (SO) KRL in 2022 was 1,064 units, an increase of 0.38% compared to 2021 at 1,060 units. The increase was due to the wheel replacement program for several KRL train sets.

Train

The realization of ready-to-operate (SO) trains in 2022 was 1,692 units, increased by 4.32% compared to 2021 at 1,622 units. The increase was due to the relatively faster Depot maintenance time so that the Not Ready to Operate (TSO) trains at the Depot were reduced and several commercial trains that had been conserved were ready to operate again.

Carriage

The realization of ready-to-operate (SO) carriages in 2022 was 7,570 units, an increase of 8.61% compared to 2021 at 6,970 units. This increase was due to the additional investment of 480 carriages for the 2021 procurement and maintenance at depots and yasa centers did not experience disturbances or obstacles so there were more SO Carts.

Produksi Kilometer

Realisasi produksi kilometer KAI untuk tahun 2021-2022 disajikan sebagai berikut:

Kilometer Production

KAI's Kilometer production realization for 2021-2022 is presented as follows.

Produksi Kilometer KAI

KAI Kilometer Production

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Kilometer Angkutan Penumpang (Km-Pnp) / Passenger Transport Kilometers (Km-Pnp)				
KA Utama Kelas Eksekutif / Main Train-Executive Class	3.869.323	1.469.231	2.400.092	163,36%
KA Utama Kelas Bisnis / Main Train-Business Class	339.952	92.510	247.442	267,48%
KA Utama Kelas Ekonomi / Main Train-Economy Class	5.782.145	2.120.341	3.661.804	172,70%
Sub-Jumlah 1 / Sub-Total 1	9.991.420	3.682.082	6.309.338	171,35%
KA Lokal Ekonomi / Local Train-Economy Class	9.274.555	5.254.654	4.019.901	76,50%
Sub-Jumlah 2 / Sub-Total 2	9.274.555	5.254.654	4.019.901	76,50%
Jumlah / Total	19.265.975	8.936.736	10.329.239	115,58%
Kilometer Angkutan Barang (Km-Ton) / Goods Transport Kilometers (Km-Ton)				
Batu Bara / Coal	13.024.741	11.163.104	1.861.637	16,68%
Peti kemas / Container	2.949.228	2.534.225	415.003	16,38%
BBM / Fuel	403.376	374.010	29.366	7,85%
Semen / Cement	609.529	723.289	-113.760	-15,73%
General Cargo dan BHP / General Cargo and BHP	127.648	79.927	47.721	59,71%
Lain-lain / Others	230.536	274.425	-43.889	-15,99%
Jumlah / Total	17.345.057	15.148.980	2.196.077	14,50%
Kilometer Kereta Api (Km-Ka) / Train Kilometers (Km-Ka)				
Kilometer KA Penumpang / Passenger Train Kilometers	44.261	38.571	5.690	14,75%
Kilometer KA Barang / Freight Train Kilometers	17.053	17.052	1	0,01%
Kilometer KA Dinas / Private Train Kilometers	1.230	1.139	91	7,99%
Jumlah / Total	62.545	56.762	5.783	10,19%
Kilometer Lokomotif (Km) / Locomotive Kilometer (Km)				
Kilometer Lokomotif Diesel / Diesel Locomotive Kilometers	59.701	43.665	16.036	36,73%
Kilometer Kereta Rel Diesel (KRD) / Diesel Train (KRD) Kilometers	8.593	5.135	3.458	67,34%
Kilometer Kereta Rel Listrik (KRL) / Electric Train Listrik (KRL) Kilometers	145.745	148.803	-3.058	-2,06%
Jumlah / Total	214.039	197.603	16.436	8,32%
Kilometer Tempat Duduk (Km) / Seating Kilometers (Km)				
Jumlah / Total	38.215.020	36.360.121	1.854.899	5,10%
Kilometer Kereta (Km) / Train Kilometers (Km)				
Jumlah / Total	326.368	213.152	113.216	53,12%
Kilometer Gerbong (Km) / Wagon Kilometers (Km)				
Jumlah / Total	602.478	648.153	-45.675	-7,05%

Kilometer Angkutan Penumpang

Kilometer angkutan penumpang untuk tahun 2022 adalah mencapai 19.265.975 Km-pnp, meningkat 115,58% dari tahun 2021 yang mencapai 8.936.736 Km-pnp. Realisasi tersebut dikarenakan volume KA jarak jauh sudah mencapai target, adanya beberapa KA tambahan dan KLB rombongan untuk perjalanan jarak jauh serta adanya penambahan stamformasi kereta kelas bisnis dan campuran yang meningkatkan KM Penumpang dan volume penumpang.

Kilometer Angkutan Barang

Kilometer angkutan barang untuk tahun 2022 adalah sejumlah 17.345.057 Km-Ton, meningkat 14,50% dari tahun 2021 yang sejumlah 15.148.980 Km-Ton. Realisasi tersebut disebabkan oleh:

1. Kegiatan proses bongkar muat tidak maksimal akibat gangguan RCD dan TLS;
2. *Afron Feeder* (AF) lambat bongkar karena tunggu perbaikan dan material lengket;
3. Permintaan berdasarkan *Delivery Order* (DO) dari Pertamina yang menyesuaikan dengan daya serap pasar di masing-masing wilayah pemasarannya;
4. Permintaan pembatalan perjalanan KA dan realisasi perjalanan belum sesuai dengan yang diprogramkan berjalan lima hari dalam satu minggu, realisasi hanya berjalan dua hari dalam satu minggu;
5. Permintaan pembatalan perjalanan ke relasi tertentu, seperti tujuan ke Brumbung, Semarang Poncol, Lempuyangan dan Cirebon karena permintaan pasar menurun;
6. Permintaan rangkaian gerbong (SF) isi tidak maksimal (program SF 18 GD isi, yang berjalan 13 GD isi);
7. Pembatalan perjalanan KA, terutama angkutan kereta barang (Kereta B) yang dirangkaikan ke KA Penumpang terkait pandemi Covid-19;
8. Angkutan CPO dari beberapa perkebunan masih belum maksimal, Angkutannya tergantung pada *Delivery Order* (DO) dari mitra sehingga tidak dapat memaksimalkan sarana yang tersedia.

Kilometer Kereta Api

Kilometer kereta api untuk tahun 2022 adalah mencapai 62.545 Km-Ka, meningkat 10,19% dari tahun 2021 yang mencapai 56.762 Km-Ka. Realisasi tersebut dikontribusikan oleh:

1. Adanya beberapa penambahan perjalanan KA tambahan pada KA penumpang.

Passenger Train Kilometer

Passenger transport Kilometers in 2022 reached 19,265,975 Km-pnp, increased by 115.58% compared to 2021 at 8,936,736 Km-pnp. This realization was due to the volume of long-distance trains that had reached the target, the presence of several additional trains and group outbreaks for long-distance travel as well as the addition of business and mixed class train stamformation which increased passenger KM and passenger volume.

Freight Kilometer

Kilometers of load transportation in 2022 reached 17,345,057 Km-Ton, increased by 14.50% compared to 2021 at 15,148,980 Km-Ton. Such a realization was due to:

1. The loading and unloading process activities are not optimal due to RCD and TLS disturbances;
2. *Afron Feeder* (AF) is slow to unload due to waiting for repairs and sticky material;
3. Requests based on *Delivery Orders* (DO) from Pertamina which adjust to market absorption in each of its marketing areas;
4. Requests for cancellation of train trips and realization of trips have not been in accordance with what was programmed to run five days a week, realization only runs two days a week;
5. Requests for cancellation of trips to certain relationships, such as destinations to Brumbung, Semarang Poncol, Lempuyangan and Cirebon due to declining market demand;
6. The request for a series of wagons (SF) is not optimal (the SF 18 GD program is running 13 GD contents);
7. Cancellation of train trips, especially freight train transportation (Train B) which is coupled to Passenger Trains due to the Covid-19 pandemic;
8. The transportation of CPO from several plantations is still not optimal. The transportation depends on *Delivery Orders* (DO) from partners so that the available facilities cannot be maximized.

Train Kilometer

Train Kilometers in 2022 reached 62,545 Km-Ka, an increase of 10.19% compared to 2021 at 56,762 Km-Ka. Such a realization was due to:

1. There are several additions to additional train trips for passenger trains.

2. Adanya pembatalan beberapa angkutan peti kemas, semen, BBM, CPO dan beberapa angkutan tergantung pada Delivery Order dari mitra pada KA barang.
3. Adanya penambahan beberapa KLB rombongan, KLB balas dan angkutan rel pada KA dinas.

Kilometer Lokomotif

Kilometer lokomotif KAI untuk tahun 2022 mencapai 214.039 km, meningkat 8,32% dari tahun 2021 yang mencapai 197.603 km. Peningkatan tersebut dikontribusikan oleh peningkatan kilometer Kereta Lokomotif Diesel sejumlah 16.036 km, atau 36,7% dari tahun 2021. Secara lebih lanjut, hal tersebut disebabkan:

1. Pembatalan sebagian besar beberapa perjalanan KA Penumpang Jarak Jauh, pembatalan beberapa KA penumpang lokal imbas Covid-19 dan beberapa pembatalan KA barang Jawa Sumatera.
2. Adanya penambahan beberapa perjalanan pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru 2022.
3. Pada semester I masih terdapat pembatasan jam operasional KRL dan pembatasan jumlah penumpang.

Kilometer Tempat Duduk

Kilometer tempat duduk KAI tahun 2022 mencapai 38.215.020 km, meningkat 5,10% dari tahun 2021 yang mencapai 36.360.121 km. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan beberapa KLB rombongan, penambahan SF pada beberapa KA kelas bisnis campuran.

Kilometer Kereta

Kilometer kereta KAI untuk tahun 2022 adalah mencapai 326.368 km, meningkat 53,12% dari tahun 2021 yang mencapai 213.152 km. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan beberapa KA kelas eksekutif terutama pada saat angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2022.

Kilometer Gerbong

Kilometer gerbong KAI untuk tahun 2022 adalah mencapai 602.478 km, menurun 7,05% dari tahun 2021 yang mencapai 648.153 km. Penurunan tersebut dikarenakan terdapat pembatalan beberapa KA barang Jawa dan Sumatra dan sejalan dengan tidak terpenuhinya volume barang secara keseluruhan imbas pandemi Covid-19.

2. The cancellation of several container, cement, fuel, CPO and some transportation depended on Delivery Orders from partners on freight trains.
3. The addition of several group outbreaks, ballast outbreaks and rail transport on official trains.

Locomotive Kilometer

The locomotive Kilometers in 2022 reached 214,039 km, increased by 8.32% compared to 2021 at 197,603 km. This increase was due to an increase in Diesel Locomotive Train kilometers of 16,036 km, or 36.7% from 2021. Furthermore, it was caused by:

1. The cancellation of several long-distance passenger train trips, the cancellation of several local passenger trains due to Covid-19 and the cancellation of several Java-Sumatra freight trains.
2. The addition of several trips during the 2022 Christmas and New Year Transport.
3. In the first semester there were still restrictions on KRL operating hours and restrictions on the number of passengers.

Seating Kilometer

Seating Kilometers in 2022 reached 38,215,020 km, increased by 5.10% compared to 2021 at 36,360,121 km. This increase was due to the addition of several KLB groups, the addition of SF to several business class trains

Train Kilometer

Train Kilometers in 2022 reached 326,368 km, an increase of 53.12% compared to 2021 at 213,152 km. This increase was due to the addition of several executive class trains, especially during Eid, Christmas and New Year 2022 transportation.

Carriage Kilometer

Carriage Kilometers in 2022 reached 602,478 km, decreased by 7.05% compared to 2021 at 648,153 km. The decrease was due to the cancellation of several freight trains for Java and Sumatra and in line with the overall volume of goods that was not fulfilled due to the COVID-19 pandemic.

Kinerja Pelayanan dan Keselamatan

Realisasi kinerja pelayanan dan keselamatan KAI untuk tahun 2022-2021 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Service and Safety Performance

The realization of service and safety performance in 2022-2021 can be described as follows:

Kinerja Pelayanan dan Keselamatan KAI

KAI Service and Safety Performance

Uraian / Description	2022		2021	Rasio (%) / Ratio (%)	
	Toleransi / Tolerance	Fakta / Fact	Fakta / Fact	(5)=(3)-(4)/(4)	(6)=(3)/(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)/(4)	(6)=(3)/(2)
Waktu Peredaran Gerbong (WPG)*) / Wagon Circulation Time (WPG)*)					
Realisasi waktu peredaran gerbong (hari) / Realization of wagon circulation time (day)	2,17	1,79	2,01	(11,0)	82,5
Lokomotif Mogok / Locomotive Breakdown					
Realisasi frekuensi lokomotif mogok (kejadian) / Realization of locomotive breakdown frequency (event)	516	158	168	(6,0)	30,6
Kecelakaan KA / Train Accident					
Jumlah kecelakaan (kejadian) / Total accident (incident)	7	10	18	(44,4)	142,9
Rata-rata Kelambatan KA (menit)**) / Average Train Delay (minute)**)					
KA Penumpang / Passenger Train					
Berangkat / Departure	0,66	0,17	0,12	48,4	26,0
Datang / Arrival	6,97	(0,08)	0,91	(109,3)	(1,2)
KA Barang / Freight Train					
Berangkat / Departure	15,02	(64,39)	(30,23)	113,0	(428,6)
Datang / Arrival	30,74	(70,53)	(44,82)	57,3	(229,4)
Rata-Rata Ketepatan KA (%) / Average Train Accuracy (%)***)					
KA Penumpang / Passenger Train					
Berangkat / Departure	98,56	99,71	99,71	0,0	101,2
Datang / Arrival	76,16	93,42	92,68	0,8	122,7
KA Barang / Freight Train					
Berangkat / Departure	84,04	90,74	89,45	1,4	108,0
Datang / Arrival	72,46	87,93	86,56	1,6	121,3

Keterangan: / Remark:

*) : Untuk bagian ini, semakin tinggi fakta menunjukkan kinerja yang menurun. / For this part, the higher the fact the lower the performance

**): Fakta dengan nilai negatif menunjukkan waktu KA berangkat dan datang lebih awal dari waktu, yang ditetapkan. Persentase kurang dari 100% menunjukkan kinerja yang meningkat/ lebih baik, lebih dari 100% menunjukkan kinerja yang menurun. / Facts with negative values indicate the time the train departs and arrives earlier than the specified time. Percentage less than 100% indicates increased/better performance, more than 100% indicates decreased performance

***): Nilai fakta mendekati 100% menunjukkan kinerja meningkat/lebih baik. / The fact value close to 100% indicates improved/better performance.

Waktu Peredaran Gerbong (WPG)

KAI merealisasikan waktu peredaran gerbong rata-rata 1,79 hari atau mencapai 82,5% terhadap toleransi yang 2,17 hari. Fakta di bawah toleransi tersebut menandakan kinerja operasi yang baik. Realisasi tersebut antara lain disebabkan terpenuhinya gerbong SO untuk memenuhi stamformasi KA barang atas permintaan customer serta berkurangnya kelambatan KA barang.

Wagon Circulation Time (WPG)

The realization of the average wagon circulation time was 1.79 days or 82.5% of the tolerance, which was 2.17days. The fact below the tolerance indicates good operating performance. This realization was partly due to the fulfillment of SO carriages to meet the freight train stamformation at the customer's request and the reduced delays of freight trains.

Lokomotif Mogok

Realisasi frekuensi lokomotif mogok untuk tahun 2022 terdapat 158 kejadian atau mencapai 30,6% terhadap normal kendalanya (toleransi) yang sebanyak 516 kejadian. Realisasi lokomotif mogok tersebut tercapai di bawah toleransi, menunjukkan keandalan operasional yang baik. Realisasi tersebut antara lain disebabkan karena peningkatan frekuensi perawatan lokomotif yang dilakukan secara berkala dan optimal serta adanya kontrak kerja sama spare part perawatan sarana dengan pabrik.

Kecelakaan KA

Selama periode tahun 2022, terjadi sejumlah 10 kali kejadian kecelakaan kereta api yang terdiri dari 8 kejadian KA Anjlok, 1 kejadian tabrakan antar KA, 1 kejadian KA terguling. Detail kecelakaan KA per Daop/Divre yakni di Daop 1 Jakarta 2 kejadian, Daop 2 Bandung 1 kejadian, Daop 8 Surabaya 1 kejadian, Divre III Palembang 3 kejadian dan Divre IV Tanjung Karang 3 kejadian.

Rata-Rata Kelambatan KA Penumpang

Selama periode tahun 2022, KA penumpang berangkat mengalami rata-rata kelambatan 0,17 menit dari toleransi 0,66 menit, dan KA penumpang datang mengalami rata-rata datang lebih cepat 0,08 menit dari toleransi 6,97 menit. Realisasi tersebut dikarenakan adanya peningkatan pengawasan program KA berangkat dan datang tepat waktu, serta berkurangnya gangguan sarana dan prasarana, sehingga KA penumpang kelas eksekutif dapat berangkat dan datang tepat waktu.

KA Barang

Selama periode tahun 2022, KA barang mengalami rata-rata berangkat lebih cepat (64,39) menit dari toleransi kelambatan 15,02 menit dan KA barang rata-rata datang lebih cepat (70,53) menit dari toleransi 30,74 menit. Realisasi tersebut dikarenakan adanya koordinasi dan pengawasan SOP Bongkar/Muat Angkutan barang antara unit Operasi dan Komersial guna menekan andil kelambatan yang diakibatkan oleh faktor tunggu bongkar/muat Angkutan barang, serta taktis dalam pengaturan penyusulan/persilangan. Nilai negatif menggambarkan KA berangkat dan datang lebih awal dari toleransi yang ditetapkan sehingga nilainya negatif.

Locomotive Breakdown

The realization of the frequency of locomotives breakdown in 2022 was 158 incidents or 30.6% of the normal control (tolerance) of 516 incidents. The actual breakdown of the locomotive was achieved under tolerance, indicating good operational reliability. This realization was partly due to an increase in the frequency of locomotive maintenance which was carried out periodically and optimally as well as the existence of a cooperation contract for facility maintenance spare parts with the manufacturer.

Train Accident

Throughout 2022, there were 10 train accidents, consisting of 8 train derailments, 1 collision between trains, and 1 overturned train incident. Details of train accidents per Daop/Divre namely in Daop 1 Jakarta 2 incidents, Daop 2 Bandung 1 incident, Daop 8 Surabaya 1 incident, Divre III Palembang 3 incidents and Divre IV Tanjung Karang 3 incidents.

Average Train Delay Passenger Train

In 2022, departing passenger trains experienced an average delay of 0.17 minutes from a tolerance of 0.66 minutes, and arriving passenger trains experienced an average arrival of 0.08 minutes from a tolerance of 6.97 minutes. This was due to increased supervision of the train program leaving and arriving on time, as well as reduced disruption to facilities and infrastructure, so that executive class passenger trains could depart and arrive on time.

Freight Train

Throughout 2022, freight trains departed on average (64.39) minutes faster than the tolerance for a delay of 15.02 minutes and freight trains arrived faster (70.53) minutes than the tolerance of 30.74 minutes. This realization was due to the coordination and supervision of the SOP for loading/unloading of goods transportation between the Operations and Commercial units in order to reduce the share of delays caused by waiting factors for loading/unloading of goods transportation, as well as tactics in arranging follow-up/crossovers. Negative values describe trains departing and arriving earlier than the specified tolerance, so the value is negative.

Rata-Rata Ketepatan KA (%)

KA Penumpang

Untuk tahun 2022, realisasi KA Penumpang berangkat adalah 99,71% dari toleransi 98,56%, dan realisasi KA Penumpang datang adalah 93,42% dari toleransi 76,16%. Realisasi tersebut antara lain dikarenakan adanya peningkatan pengawasan program KA berangkat dan datang tepat waktu, serta berkurangnya gangguan sarana dan prasarana, sehingga KA penumpang kelas eksekutif dapat berangkat dan datang tepat waktu.

KA Barang

Untuk tahun 2022, realisasi ketepatan KA Barang berangkat adalah 90,74% dari toleransi 84,04%, dan realisasi KA Barang datang adalah 87,93% dari toleransi 72,46%. Realisasi persentase ketepatan KA barang berangkat dan datang di atas anggaran menunjukkan kinerja yang baik, antara lain disebabkan oleh koordinasi dan pengawasan SOP Bongkar/Muat Angkutan barang antara unit Operasi dan Komersial guna menekan andil kelambatan yang diakibatkan oleh faktor tunggu bongkar/muat Angkutan barang, serta taktis dalam pengaturan penyusulan/persilangan.

Kecepatan Tempuh KA

Total kecepatan tempuh KA untuk tahun 2022 mencapai 5.855,14 Km-sp, meningkat 0,74% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 5.812,30 Km-sp. Peningkatan tersebut dikontribusikan oleh peningkatan prasarana khususnya di Jawa pada tahun 2022, seperti perubahan dan peningkatan infrastruktur jalur ganda lintas selatan yang kemudian mengurangi waktu tunggu karena persilangan dan penyusulan. Selain itu, terdapat peningkatan kecepatan maksimum prasarana di wilayah Daop 1 jak, Daop 4 Sm, Daop 5 Pwt, Daop 7 Mn, Divre I Sumud dan Divre III, yang diikuti oleh peningkatan kecepatan sarana KA selama tahun 2022.

Kecepatan Tempuh KA

Dalam satuan Km-sp

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Kategori 1 (100-120 km/jam) / Category 1 (100-120 km/hour)	2.996,35	2.635,30	361	13,70%
Kategori 2 (80-99 km/jam) / Category 2 (80-99 km/hour)	2.473,24	2.585,09	-112	-4,33%
Kategori 3 (60-79 km/jam) / Category 3 (60-79 km/hour)	350,17	514,64	-164	-31,96%
Kategori 4 (<60 km/jam) / Category 4 (<60 km/hour)	35,38	77,27	-42	-54,21%
Total Kecepatan Tempuh KA (Km-sp) / Total Train Speed (Km-sp)	5.855,14	5.812,30	43	0,74%

Average Train Accuracy (%)

Passenger Train

For 2022, the realization of departing passenger trains is 99.71% of the tolerance of 98.56%, and the realization of arriving passenger trains is 93.42% of the tolerance of 76.16%. This realization was due, among other things, to increased supervision of the program for trains departing and arriving on time, as well as reduced disturbances to facilities and infrastructure, so that executive class passenger trains could depart and arrive on time.

Freight Train

The realization of the accuracy of the departing freight train in 2022 is 90.74% of the tolerance of 84.04%, and the realization of the arrival of the goods train is 87.93% of the tolerance of 72.46%. Realization of the accuracy of the percentage of departure and arrival of freight trains above the budget showed good performance, partly due to coordination and supervision of the SOP for loading/unloading of goods between Operations and Commercial units in order to reduce the share of delays caused by factors waiting for loading/unloading of goods, as well as tactical in follow-up/crossover settings.

Train Speed

The total travel speed of the train in 2022 reached 5,855.14 Km-sp, an increase of 0.74% compared to 2021 at 5,812.30 Km-sp. The increase was due to infrastructure improvements, especially in Java in 2022, such as changes and improvements to the double track infrastructure across the south which then reduces waiting times due to crossings and overtaking. In addition, there is an increase in the maximum speed of infrastructure in the Daop 1 jak, Daop 4 Sm, Daop 5 Pwt, Daop 7 Mn, Divre I North Sumatra and Divre III areas, followed by an increase in the speed of railroad facilities in 2022.

Train Speed

In Km-sp units

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha

Pendapatan dan profitabilitas menurut segmen usaha KAI untuk tahun 2022 disajikan melalui tabel sebagai berikut:

Business Segment Revenue and Profitability

Revenue and profitability by KAI business segment for 2022 are presented as follows:

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha KAI

Dalam ribuan rupiah

KAI Business Segment Revenue and Profitability

In millions of rupiah

Uraian / Description	2022					
	Jasa Angkutan / Transport Services	Jasa Non- Angkutan / Non-Transport Services	Konstruksi / Construction	Jumlah / Total	Eliminasi / Elimination	Konsolidasi / Consolidation
Pendapatan Usaha / Operating Revenue	21.391.383.626	1.575.688.038	2.610.567.346	25.577.639.010	-	25.577.639.010
Antar Segmen / Among Segments	881.656.106	2.006.026.431	-	2.887.682.537	(2.887.682.537)	-
Jumlah pendapatan / Total Income	22.273.039.732	3.581.714.469	2.610.567.346	28.465.321.547	2.887.682.537	25.577.639.010
Beban Operasi / Operating Expenses	(17.523.648.358)	(2.071.177.387)	(2.610.567.346)	(22.205.393.091)	-	(22.205.393.091)
Antar Segmen / Among Segments	(1.832.875.857)	(1.054.806.680)	-	2.887.682.537	2.887.682.537	-
Jumlah Beban / Total Expense	(19.356.524.215)	(3.125.984.067)	(2.610.567.346)	(25.093.075.628)	2.887.682.537	(22.205.393.091)
Hasil Segmen / Segment Results	2.916.515.517	455.730.402	-	3.372.245.919	-	3.372.245.919
Pendapatan (Beban) yang tidak dapat Dialokasikan / Unallocated Income (Expense)						
Pendapatan Keuangan / Financial Income	-	-	-	-	-	139.514.944
Beban Keuangan / Financial Expenses	-	-	-	-	-	(980.572.153)
Bagian Rugi Bersih Ventura / Share of Venture Net Loss	-	-	-	-	-	(267.504.227)
Selisih Kurs / Exchange Rate Difference	-	-	-	-	-	42.673.710
Lain-lain - Neto / Others - Net	-	-	-	-	-	(95.769.893)
Manfaat (Beban) Pajak - Neto / Tax Benefit (Expense) - Net	-	-	-	-	-	(524.599.080)
Laba setelah Pajak Penghasilan / Profit after Income Tax	-	-	-	-	-	1.685.989.220
Kepentingan Non Pengendali / Non- Controlling Interest	-	-	-	-	-	96.051.257
Laba Diatribusikan Pemilik Induk / Profit Attributed to Parent	-	-	-	-	-	1.782.040.477
Rugi Komprehensif Diatribusikan Pemilik Induk / Comprehensive Loss Attributed to Parent	-	-	-	-	-	2.362.914.534
Laporan Posisi Keuangan / Statements of Financial Position						
Aset Segmen / Segment Asset	46.416.809.741	905.134.224	26.875.623.658	74.197.567.623	(2.616.337.900)	71.581.229.723
Liabilitas Segmen / Segment Liability	29.258.185.381	418.522.863	14.342.928.979	44.019.637.223	1.518.591.805)	42.501.045.418

Uraian / Description	2021*)					
	Jasa Angkutan / Transport Services	Jasa Non- Angkutan / Non-Transport Services	Konstruksi / Construction	Jumlah / Total	Eliminasi / Elimination	Konsolidasi / Consolidation
Pendapatan Usaha / Operating Revenue	14.395.329.768	1.134.200.352	2.387.245.804	17.916.775.924	-	17.916.775.924
Antar Segmen / Among Segments	843.714.815	1.121.736.698	-	1.965.451.513	(1.965.451.513)	-
Jumlah pendapatan / Total Income	15.239.044.583	2.255.937.050	2.387.245.804	19.882.227.437	(1.965.451.513)	17.916.775.924
Beban Operasi / Operating Expenses	(13.474.622.480)	(1.830.488.756)	(2.387.245.804)	(17.692.357.040)	-	(17.692.357.040)
Antar Segmen / Among Segments	(1.562.734.591)	(402.716.922)	-	(1.965.451.513)	1.965.451.513	-
Jumlah Beban / Total Expense	(15.037.357.071)	(2.233.205.678)	(2.387.245.804)	(19.657.808.553)	1.965.451.513	(17.692.357.040)
Hasil Segmen / Segment Results	201.687.512	22.731.372	-	224.418.884	-	224.418.884
Pendapatan (Beban) yang tidak dapat Dialokasikan / Unallocated Income (Expense)						
Pendapatan Keuangan / Financial Income	-	-	-	-	-	108.444.334
Beban Keuangan / Financial Expenses	-	-	-	-	-	(900.712.325)
Bagian Rugi Bersih Ventura / Share of Venture Net Loss	-	-	-	-	-	(9.495.748)
Selisih Kurs / Exchange Rate Difference	-	-	-	-	-	(567.340)
Lain-lain - Neto / Others - Net	-	-	-	-	-	30.931.669
Manfaat (Beban) Pajak - Neto / Tax Benefit (Expense) - Net	-	-	-	-	-	121.784.883
Laba setelah Pajak Penghasilan / Profit after Income Tax	-	-	-	-	-	(425.195.643)
Kepentingan Non Pengendali / Non- Controlling Interest	-	-	-	-	-	62.735.570
Laba Diatribusikan Pemilik Induk / Profit Attributed to Parent	-	-	-	-	-	(362.460.073)
Rugi Komprehensif Diatribusikan Pemilik Induk / Comprehensive Loss Attributed to Parent	-	-	-	-	-	(485.036.924)
Laporan Posisi Keuangan / Statements of Financial Position						
Aset Segmen / Segment Asset	40.023.647.395	908.690.000	23.777.203.269	64.709.540.664	(1.993.150.743)	62.716.389.921
Liabilitas Segmen / Segment Liability	28.080.645.019	478.778.144	11.460.520.378	40.019.943.541	(901.206.412)	39.118.737.129

*) Disajikan kembali. / Restated.

Pendapatan segmen usaha untuk tahun 2022 adalah sejumlah Rp25,58 triliun, meningkat 42,75% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp17,92 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh Peningkatan tersebut disebabkan oleh (1) volume dan okupansi angkutan penumpang yang sudah mulai bertambah, (2) tambahan ketersediaan KA guna memenuhi permintaan masyarakat di masa angkutan lebaran dan libur panjang, (3) kelonggaran aturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta (4) peningkatan volume tonase dan perbaikan tarif angkutan barang tahun 2022.

Dari sisi profitabilitas, KAI mencatatkan perolehan laba setelah pajak penghasilan untuk tahun 2022 sejumlah Rp1,69 triliun, meningkat 493,02% dibanding tahun 2021 yang rugi sejumlah Rp0,43 triliun. Perolehan profitabilitas tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan penumpang yang sangat signifikan, seiring kebijakan pemerintah yang melonggarkan aturan untuk bepergian menggunakan jasa kereta api.

TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review

Berikut ini merupakan tinjauan keuangan konsolidasian KAI yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2022, yang juga telah disertakan di dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan konsolidasian KAI untuk tahun 2022 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan mendapat opini "wajar, dalam semua hal yang material", serta disusun sesuai Standar Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Tinjauan keuangan berikut ini memuat posisi keuangan konsolidasian PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan entitas anaknya, kinerja keuangan, serta arus kas konsolidasian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Revenues from the business segment in 2022 amounted to Rp25.58 trillion, an increase of 42.75% compared to 2021 at Rp17.92 trillion. The increase was caused by (1) the volume and occupancy of passenger transport which has started to increase, (2) the additional availability of trains to meet public demand during the Eid and long holiday transportation period, (3) relaxation of health protocol rules by the government, and (4) increase in tonnage volume and improvement in freight rates in 2022.

In terms of profitability, KAI recorded the profitability (loss) after income tax in 2022 amounting to Rp1.69 trillion, increased by 493.02% compared to 2021 at Rp0.43 trillion. The gain in profitability was due to a very significant increase in passenger income, in line with the government's policy of relaxing the rules for traveling by train services.

The following is KAI's consolidated financial review prepared based on the Financial Statements for the period ending on December 31, 2021 and 2022, which have also been included in this Annual Report. KAI's consolidated Financial Statements for 2022 have been audited by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan and received "Unqualified" opinion, prepared in accordance with the applicable Financial Standards in Indonesia.

The following financial review contains the consolidated financial position of PT Kereta Api Indonesia (Persero) and its subsidiaries, financial performance and consolidated cash flows for the period ending December 31, 2022.

KINERJA KEUANGAN

Financial Performance

Kinerja keuangan KAI terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta Laporan Arus Kas Konsolidasian, dengan pembahasan sebagai berikut:

KAI's financial performance consists of the performance of the Consolidated Statements of Financial Position, Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income Statements and Consolidated Statements of Cash Flows are presented as follows.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian KAI / KAI Consolidated Statements of Financial Position				
Dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain / In thousand rupiah, unless stated otherwise				
Uraian / Description	2022	2021*	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Aset / Assets				
Aset Lancar / Current Assets				
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents	5.695.720.193	3.808.203.932	1.887.516.261	49,56%
Dana Dibatasi Penggunaannya / Restricted Funds	5.610.385.976	2.748.463.918	2.861.922.058	104,13%
Piutang Usaha / Trade Receivable				
Pihak Berelasi / Related Parties	934.629.745	678.094.695	256.535.050	37,83%
Pihak Ketiga / Third Parties	471.708.322	397.003.778	74.704.544	18,82%
Piutang Lain-lain / Other Receivables	90.003.063	74.670.546	15.332.517	20,53%
Persediaan / Inventories	1.145.313.941	893.780.639	251.533.302	28,14%
Pendapatan Masih Akan Diterima / Accrued Income	939.616.971	239.054.610	700.562.361	293,06%
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka / Advances and Prepaid Expenses	120.303.174	278.955.141	-158.651.967	-56,87%
Pajak Dibayar di Muka / Prepaid Taxes	303.896.017	572.701.539	-268.805.522	-46,94%
Aset Lancar Lainnya / Other Current Assets	26.370.549	15.752.718	10.617.831	67,40%
Jumlah Aset Lancar / Total Current Assets	15.337.947.951	9.706.681.516	5.631.266.435	58,01%
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets				
Piutang Lain-lain / Other Receivables	-	-	-	-
Uang Muka Jangka Panjang / Long-Term Prepaid	20.640.157	6.772.694.898	-6.752.054.741	-99,70%
Investasi Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	6.315.362.037	108.436.459	6.206.925.578	5724,02%
Investasi Jangka Panjang / Long-Term Investment	24.176.000	54.853.000	-30.677.000	-55,93%
Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets	1.432.778.568	1.993.302.912	-560.524.344	-28,12%
Aset Tetap / Fixed Assets				
Properti Investasi / Investment Properties	126.085.555	96.379.618	29.705.937	30,82%
Hak Pengoperasian Aset Prasarana / Infrastructure Assets Operating Rights	23.736.944.016	20.503.150.402	3.233.793.614	15,77%
Aset Tak Berwujud / Intangible Assets	422.760.902	366.773.277	55.987.625	15,26%
Aset Hak Guna / Right of Use Asset	53.116.074	67.419.354	-14.303.280	-21,22%
Aset Tidak Lancar Lainnya / Other Non-Current Assets	186.725.566	185.736.405	989.161	0,53%
Jumlah Aset Tidak Lancar / Total Non-Current Assets	56.243.281.772	53.009.708.405	3.233.573.367	6,10%
Jumlah Aset / Total Assets	71.581.229.723	62.716.389.921	8.864.839.802	14,13%

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian KAI / KAI Consolidated Statements of Financial Position
Dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain / In thousand rupiah, unless stated otherwise

Uraian / Description	2022	2021*	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Liabilitas dan Ekuitas / Liabilities and Equity				
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities				
Utang Usaha / Trade Payables				
Pihak Berelasi / Related Parties	880.714.681	473.426.130	407.288.551	86,03%
Pihak Ketiga / Third Parties	1.578.171.487	1.192.602.860	385.568.627	32,33%
Beban AkruaI dan Provisi / Accrued Expenses	1.572.961.926	1.431.722.644	141.239.282	9,86%
Utang Pajak / Taxes Payable	309.332.730	339.548.542	-30.215.812	-8,90%
Liabilitas Sewa / Lease Liabilities	16.563.637	29.372.889	-12.809.252	-43,61%
Pendapatan Diterima di Muka / Unearned Income	1.144.639.451	832.780.956	311.858.495	37,45%
Liabilitas Imbalan Kerja / Employee Benefits Liability	962.743.057	586.133.884	376.609.173	64,25%
Pinjaman Bank Jangka Pendek / Short Term Bank Loans	1.760.000.000	2.659.962.173	-899.962.173	-33,83%
Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun / Current Maturities of Long-Term Loans				
Pinjaman Jangka Panjang / Long Term Loans	1.196.958.601	934.991.570	261.967.031	28,02%
Pinjaman Program PEN / PEN Program Loans	437.500.000	-	437.500.000	-
Utang Obligasi / Bonds Payable	-	999.447.166	-999.447.166	-
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya / Other Current Liabilities	98.538.290	94.310.944	4.227.346	4,48%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Total Current Liabilities	9.958.123.860	9.574.299.758	383.824.102	4,01%
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities				
Liabilitas Sewa / Lease Liabilities	44.599.263	52.772.546	-8.173.283	-15,49%
Pendapatan Diterima di Muka / Unearned Revenue	837.174.293	776.100.393	61.073.900	7,87%
Liabilitas Imbalan Kerja / Long-Term Employee Benefits Liabilities	5.197.151.974	5.581.424.489	-384.272.515	-6,88%
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun / Long-Term Liabilities After Deducting the Maturity Portion in One Year				
Pinjaman Jangka Panjang / Long-Term Loans	18.282.631.817	16.501.746.512	1.780.885.305	10,79%
Pinjaman Program PEN / PEN Program Loan	3.062.500.000	3.500.000.000	-437.500.000	-12,50%
Utang Obligasi / Bonds Payable	4.490.760.381	2.993.800.573	1.496.959.808	50,00%
Sukuk	498.307.111	-	498.307.111	-
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya / Other Non-Current Liabilities	129.796.719	138.592.858	-8.796.139	-6,35%
Liabilitas Jangka Panjang / Total Non-Current Liabilities	32.542.921.558	29.544.437.371	2.998.484.187	10,15%
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	42.501.045.418	39.118.737.129	3.382.308.289	8,65%
Ekuitas / Equity				
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Entitas Induk / Equity Attributable to Owners of the Parent				
Modal Saham Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham Modal Dasar Sebesar 40.000.000 Saham / Share Capital Nominal Value Rp1,000 (Full Rupiah) per Share Authorized Capital of 40,000,000 Shares				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh masing-masing per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar 19.168.743 serta per 1 Januari 2021/31 Desember 2020 sebesar 12.268.743 saham / Issued and Fully Paid-up Capital as of December 31, 2022 and 2021 reached 19,168,743 and 12,268,743 shares as of January 1, 2021/ December 31, 2020	19.168.743.000	19.168.743.000	-	0,00%

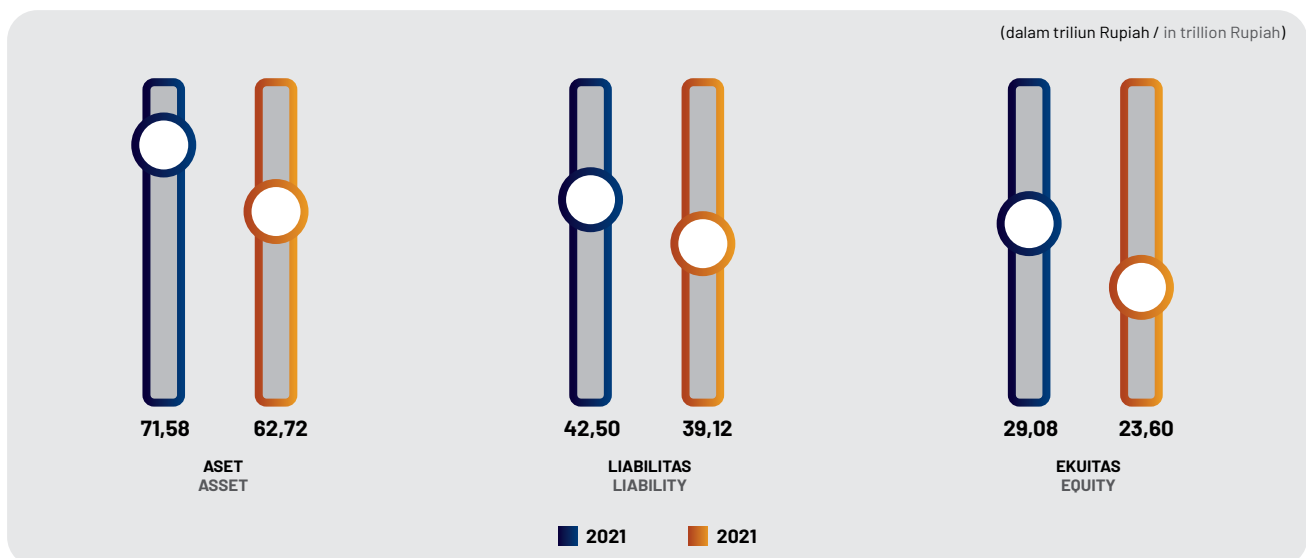
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian KAI / KAI Consolidated Statements of Financial Position
 Dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain / In thousand rupiah, unless stated otherwise

Uraian / Description	2022	2021*	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Tambahan Penyertaan Modal Negara / Additional State Equity Participation	3.200.000.000	-	3.200.000.000	-
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	486.081	486.081	-	0,00%
Saldo Laba / Retained Earnings	7.679.086.294	5.897.045.817	1.782.040.477	30,22%
Komponen Ekuitas Lainnya / Components of Equity				
Akumulasi Rugi Aktuarial atas Imbalan Kerja / Accumulated Actuarial Loss on Employee Benefits	(1.037.483.391)	(1.618.357.448)	580.874.057	-35,89%
Selisih Likuidasi / Difference Liquidity	968.135	968.135	-	0,00%
Selisih Perubahan Ekuitas Entitas Anak / Difference in Changes in Equity of Subsidiaries	(24.069.720)	-	-24.069.720	-
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / Equity Attributable to Owners of the Parent Entity	28.987.730.399	23.448.885.585	5.538.844.814	23,62%
Kepentingan NonPengendali / Non-Controlling Interests	92.453.906	148.767.207	-56.313.301	-37,85%
Jumlah Ekuitas / Total Equity	29.080.184.305	23.597.652.792	5.482.531.513	23,23%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	71.581.229.723	62.716.389.921	8.864.839.802	14,13%

*) Disajikan kembali. / Restated.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian KAI

KAI Consolidated Statement of Financial Position



ASET

Pada posisi 31 Desember 2022, nilai aset Perseroan adalah sejumlah Rp71,58 triliun atau meningkat sebesar 14,13% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp62,77 triliun. Peningkatan tersebut dikontribusikan oleh peningkatan komponen dana dibatasi penggunaannya sebesar 104,13% dibanding tahun sebelumnya. Secara umum, peningkatan nilai aset tersebut disebabkan oleh penempatan dana yang bersumber dari PMN yang diperoleh pada akhir tahun 2022.

ASSETS

Assets in December 31, 2022 reached Rp71.58 trillion, an increase of 14.13% compared to 2021 at Rp62.77 trillion. This increase was due to an increase in the restricted funds component by 104.13% compared to the previous year. In general, the increase in asset value was due to the placement of funds sourced from PMN obtained at the end of 2022.

Peningkatan tersebut memberi dampak bagi kondisi keuangan Perseroan berupa meningkatnya rasio lancar sebesar 51,92% dibandingkan tahun 2021

Aset Lancar

Nilai aset lancar Perseroan pada 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp15,34 triliun atau meningkat sebesar 58,01% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp9,71 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penempatan dana yang bersumber dari PMN yang diperoleh pada akhir tahun 2022.

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas Perseroan pada 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp5,70 triliun atau meningkat sebesar 49,56% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp3,81 triliun. Peningkatan kas dan setara kas tersebut disebabkan oleh meningkatnya penerimaan pendapatan dari pelanggan dan penerimaan dari restitusi pajak dari pemerintah.

Dana Dibatasi Penggunaannya

Perseroan mencatatkan nilai dana dibatasi penggunaannya untuk tahun 2022 sejumlah Rp5,61 triliun, meningkat 104,13% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp2,75 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penerimaan tambahan penyertaan modal negara sebesar Rp3,20 triliun untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

The increase affected the Company's financial condition such as an increase in the current ratio of 51.92% compared to 2021.

Current Assets

The Company's current assets in December 31, 2022 reached Rp15.34 trillion, an increase of 58.01% compared to 2021 at Rp9.71 trillion. The increase/decrease was due to the placement of funds sourced from PMN obtained at the end of 2022.

Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in December 31, 2022 reached Rp5.70 trillion or increased by 49.56% compared to 2021 at Rp3.81 trillion. The increase in cash and cash equivalents was due to an increase in revenue receipts from customers and receipts from tax refunds from the government.

Restricted Funds

The Company recorded a restricted funds in 2022 amounting to Rp5.61 trillion, increased by 104.13% compared with the previous year of Rp2.75 trillion. The increase/decrease was due to the receipt of additional state equity participation of Rp3.20 trillion for the Jakarta-Bandung fast train project.

Dana Dibatasi Penggunaannya / Restricted Funds dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Pihak Berelasi / Related Party	5.590.894.318	2.744.384.445	2.846.509.873	103,72%
Pihak Ketiga / Third Party				
PT Bank Central Asia Tbk	19.491.658	5.249.392	14.242.266	271,31%
Jumlah / Total	5.610.385.976	2.749.633.837	2.860.752.139	104,04%
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Less: Allowance for Impairment Losses	-	(1.169.919)	1.169.919	-
Neto / Net	5.610.385.976	2.748.463.918	2.861.922.058	104,13%

Piutang Usaha

Piutang usaha Perseroan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp1,41 triliun atau meningkat sebesar 30,81% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp1,08 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan angkutan barang terutama angkutan barang batu bara.

Trade Receivables

Trade receivables in December 31, 2021 reached Rp1.41 trillion, an increase of 30.81% compared to 2021 at Rp1.08 trillion. The increase was due to an increase in revenue from freight transport, especially coal freight.

Piutang Usaha KAI / KAI Trade Receivables
 dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Pihak Berelasi / Related Party	934.629.745	678.094.695	256.535.050	37,83%
Pihak Ketiga / Third Party	471.708.322	397.003.778	74.704.544	18,82%
Piutang Usaha / Trade Receivables	1.406.338.067	1.075.098.473	331.239.594	30,81%

Piutang Lain-Lain

Piutang lain-lain Perseroan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp90,03 miliar, meningkat 20,53% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp74,67 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan transaksi diluar bisnis utama Perseroan.

Other Receivables

The Company's other receivables in December 31, 2022 reached Rp90.03 billion, an increase of 20.53% compared to 2021 at Rp74.67 billion. The increase was due to an increase in transactions outside the Company's main business.

Piutang Lain-Lain
 dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Pihak Berelasi / Related Party	-	-	-	-
Pihak Ketiga / Third Party	90.003.063	74.670.546	15.332.517	20,53%
Piutang lain-lain / Other Receivables	90.003.063	74.670.546	15.332.517	20,53%

Persediaan

Perseroan mencatatkan nilai persediaan untuk tahun 2022 sejumlah Rp1,15 triliun atau meningkat 28,14% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp893,78 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya material perawatan sarana dan prasarana yang sudah disiapkan pada akhir tahun guna untuk pelaksanaan perawatan di awal tahun depan.

Inventories

The Company recorded an inventory value for 2022 of Rp1.15 trillion or increased by 28.14% compared to the previous year which amounted to Rp893.78 billion. This increase was due to the availability of materials for maintenance of facilities and infrastructure that had been prepared at the end of the year to carry out maintenance early next year.

Persediaan / Inventories
 dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Suku Cadang Sarana / Facility Parts	1.065.426.895	902.493.791	162.933.104	18,05%
Suku Cadang Prasarana / Infrastructure Spare Parts	223.925.849	156.223.105	67.702.744	43,34%
Lain-lain / Others	23.090.194	14.137.585	8.952.609	63,32%
Jumlah / Total	1.312.442.938	1.072.854.481	239.588.457	22,33%
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Less: Allowance for Impairment Losses	(167.128.997)	(179.073.842)	11.944.845	-6,67%
Neto / Net	1.145.313.941	893.780.639	251.533.302	28,14%

Pendapatan Masih Akan Diterima

Pendapatan masih akan diterima Perseroan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp939,62 miliar, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp239,05 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh akrual pendapatan atas kenaikan tarif batu bara yang tagihannya belum terealisasi di tahun 2022

Receivable Revenues

The Company's receivable revenues on December 31, 2022 amounted to Rp939.62 billion, an increase compared to the previous year at Rp239.05 billion. The increase was mainly due to the accrual of revenue from the increase in coal tariffs whose bills have not been realized in 2022.

Pendapatan Masih Akan Diterima / Receivable Revenue dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Pihak Berelasi / Related Party	719.566.683	86.194.122	633.372.561	734,82%
Pihak Ketiga / Third Party	220.050.288	152.860.488	67.189.800	43,95%
Pendapatan Masih akan Diterima / Receivable Revenue	939.616.971	239.054.610	700.562.361	293,06%

Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

Uang muka dan biaya dibayar di muka Perseroan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp120,30 miliar, menurun dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp278,96 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh pengakuan biaya atas beban asuransi yang masa berlaku kontraknya akan berakhir.

Advances and Prepaid Expenses

The Company's advances and prepaid expenses as of December 31, 2022 amounted to Rp120.30 billion, a decrease compared to the previous year at Rp278.96 billion. The decrease was due to the recognition of costs for insurance expenses whose contract validity period will expire.

Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka / Advances and Prepaid Expenses dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Biaya Dibayar di Muka / Prepaid Expenses	62.652.603	204.129.707	-141.477.104	-69,31%
Uang Muka Pihak Ketiga / Third Party Advances	53.798.799	74.767.155	-20.968.356	-28,04%
Uang Muka Dinas / Service Advance	3.851.772	58.279	3.793.493	6509,19%
Jumlah / Total	120.303.174	278.955.141	-158.651.967	-56,87%

Pajak Dibayar Di Muka

Untuk tahun 2022, Perseroan mencatatkan pajak dibayar di muka sejumlah Rp308,90 miliar atau menurun dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp572,70 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pembayaran restitusi pajak oleh pemerintah di tahun 2022.

Prepaid Taxes

For 2022, the Company recorded prepaid taxes in the amount of Rp308.90 billion or a decrease compared to the previous year at Rp572.70 billion. The decrease was primarily due to the payment of tax refunds by the government in 2022.

Secara terperinci, komponen pajak dibayar di muka Perseroan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

In detail, the prepaid tax component of the Company can be seen in the following table:

Pajak Dibayar di Muka / Prepaid Taxes dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Perusahaan / Company				
Pajak penghasilan / Income tax				
Pasal 28a: / Article 28a:				
2022	98.709.717	-	98.709.717	-
2021	67.009.624	65.563.063	1.446.561	2,21%
2020	-	236.879.766	-236.879.766	-
Pajak pertambahan nilai / Value-added tax	103.540.737	114.791.811	-11.251.074	-9,80%
Sub-Jumlah / Subtotal	269.260.078	417.234.640	-147.974.562	-35,47%
Entitas anak / Subsidiaries				
Pajak penghasilan / Income tax				
Pasal 28a: / Article 28a:				
2021	9.873.157	9.762.961	110.196	1,13%
2020	-	9.116.997	-9.116.997	-
Pajak pertambahan nilai / Value-added tax	24.762.782	136.586.941	-111.824.159	-81,87%
Sub-Jumlah / Subtotal	34.635.939	155.466.899	-120.830.960	-77,72%
Jumlah / Total	303.896.017	572.701.539	-268.805.522	-46,94%

Aset Lancar Lainnya

Aset lancar lainnya Perseroan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp26,37 miliar, meningkat 67,40% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp15,75 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penempatan dana penyertaan modal negara atas proyek LRT belum dapat terserap.

Aset Tidak Lancar

Pada posisi 31 Desember 2022, aset tidak lancar Perseroan adalah sejumlah Rp56,24 triliun atau meningkat 6,10% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp53,06 triliun. Peningkatan tersebut terutama dikontribusikan oleh beberapa pekerjaan atas pengadaan proyek LRT sudah terealisasi di tahun 2022

Investasi Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Investasi entitas asosiasi dan ventura bersama Perseroan untuk tahun 2022 adalah sejumlah Rp6,32 triliun, meningkat 5724,02% dibanding tahun 2021 yang sejumlah Rp108,44 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan setoran modal ke pihak ventura bersama yaitu PT PSBI.

Other Current Assets

The Company's other current assets as of December 31, 2022 amounted to Rp26.37 billion, an increase by 67.40% compared to the previous year at Rp15.75 billion. The increase was due to the placement of state equity funds for the LRT project which had not been absorbed.

Non-Current Assets

As of December 31, 2022, the Company's non-current assets amounted to Rp56.24 trillion or increased by 6.10% compared to the previous year at Rp53.06 trillion. This increase was mainly due to several works on the procurement of the LRT project that had been realized in 2022.

Investment in Associates and Joint Ventures

Investments in associates and joint ventures of the Company for 2022 amounted to Rp6.32 trillion, increased by 5724.02% compared to 2021 at Rp108.44 billion. The increase was primarily due to the addition of paid-in capital to a joint venture, namely PT PSBI.

Investasi Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures
dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Entitas Asosiasi / Associates				
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	17.307.401	21.561.289	-4.253.888	-19,73%
PT BPRS Baiturridha Pusaka	8.204.532	6.802.910	1.401.622	20,60%
Ventura Bersama / Joint Ventures				
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	6.208.789.974	-	6.208.789.974	-
KSO Bumi Kalog	59.698.827	59.430.042	268.785	0,45%
KSO B Kalog	16.175.849	-	16.175.849	-
KSO PT KAPM - PT Mega Dasa Semesta	5.185.454	5.183.767	1.687	0,03%
Jumlah / Total	6.315.362.037	108.436.459	6.206.925.578	5724,02%

Investasi Jangka Panjang

Perseroan mencatatkan investasi jangka panjang untuk tahun 2022 sejumlah Rp24,18 miliar atau menurun 55,93% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp54,85 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan nilai wajar investasi yang dilakukan valuasi kembali oleh laporan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Long-Term Investment

The Company recorded a long-term investment for 2022 in the amount of Rp24.18 billion or a decrease by 55.93% compared to the previous year at Rp54.85 billion. The decrease was primarily due to decrease in the fair value of investments that are re-valued by the Public Appraisal Services Office (KJPP) report.

Investasi Jangka Panjang / Long-Term Investment
dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
PT Fintek Karya Nusantara				
Saldo Awal Investasi / Initial Investment Balance	54.853.000	53.080.000	1.773.000	3,34%
Perubahan Nilai Wajar / Fair Value Change	(30.677.000)	1.773.000	-32.450.000	-1830,23%
Saldo Akhir Investasi / Investment Balance	24.176.000	54.853.000	-30.677.000	-55,93%

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan Perseroan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp1,43 triliun, menurun 28,12% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp2,05 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya akumulasi rugi fiskal.

Deferred Tax Assets

The Company's deferred tax assets as of December 31, 2022 amounted to Rp1.43 trillion, decreased by 28.12% compared to the previous year at Rp2.05 trillion. The decrease was due to the decrease in accumulated tax losses.

Aset Tetap

Pada posisi 31 Desember 2022, aset tetap Perseroan adalah sejumlah Rp23,92 triliun atau meningkat sebesar 4,65% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp22,86 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya pembelian atau pengadaan aset tetap berupa sarana, prasarana dan fasilitas.

Fixed Assets

As of December 31, 2022, the Company's fixed assets amounted to Rp23.92 trillion or increased by 4.65% compared to the previous year at Rp22.86 trillion. The increase was due to the purchase or procurement of fixed assets such as facilities and infrastructure.

Secara terperinci, komponen aset tetap Perseroan adalah sebagai berikut:

In detail, the components of the Company's fixed assets are as follows:

Aset Tetap KAI / KAI Fixed Assets dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Saldo Akhir Biaya Perolehan / Ending Acquisition Cost				
Sarana: / Means:				
Lokomotif / Locomotive	9.443.910.756	8.762.204.836	681.705.920	7,78%
Kereta / Train	9.278.367.313	9.113.501.783	164.865.530	1,81%
Gerbong / Wagon	4.400.467.290	3.671.667.328	728.799.962	19,85%
Prasarana: / Infrastructure				
Tanah / Land	135.630.829	122.526.652	13.104.177	10,69%
Bangunan / Building	2.513.361.125	2.472.230.979	41.130.146	1,66%
Prasarana dan Instalasi / Infrastructure and Installation	1.358.156.655	1.279.588.125	78.568.530	6,14%
Fasilitas: / Facilities				
Mesin dan Peralatan / Machinery and Equipment	2.406.317.362	1.983.575.299	422.742.063	21,31%
Kendaraan / Vehicle	69.741.506	63.966.839	5.774.667	9,03%
Inventaris / Inventory	169.834.925	147.229.193	22.605.732	15,35%
Aset Tetap dalam Penyelesaian / Fixed Assets in Construction	3.923.275.870	3.700.669.588	222.606.282	6,02%
Jumlah / Total	33.699.063.631	31.317.160.622	2.381.903.009	7,61%
Akumulasi Penyusutan / Accumulated Depreciation	9.623.053.037	8.407.840.126	1.215.212.911	14,45%
Penurunan Nilai Aset Tetap / Impairment of Fixed Assets	151.317.697	48.358.416	102.959.281	212,91%
Nilai Tercatat / Carrying Value	23.924.692.897	22.860.962.080	1.063.730.817	4,65%

Properti Investasi

Properti investasi Perseroan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp126,09 miliar, meningkat sebesar 30,82% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp96,38 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembahan aset yang dikomersialkan oleh Perseroan.

Investment Properties

The Company's investment properties as of December 31, 2022 amounted to Rp126.09 billion, an increase of 30.82% compared to the previous year at Rp96.38 billion. The increase was primarily due to additional assets commercialized by the Company.

Properti Investasi / Investment Properties dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Saldo Akhir Biaya Perolehan / Ending Acquisition Cost				
Tanah / Land	8.278.976	21.383.153	-13.104.177	-61,28%
Bangunan / Building	178.681.326	125.449.261	53.232.065	42,43%
Jumlah / Total	186.960.302	146.832.414	40.127.888	27,33%
Akumulasi Penyusutan / Accumulated Depreciation	60.874.747	50.452.796	10.421.951	20,66%
Nilai Tercatat / Recorded Value	126.085.555	96.379.618	29.705.937	30,82%

Hak Pengoperasian Aset Prasarana

Perseroan membukukan hak pengoperasian aset prasarana untuk tahun 2022 sejumlah Rp23,74 triliun, atau meningkat sebesar 15,77% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp20,50 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh beberapa pekerjaan atas pengadaan proyek LRT sudah terealisasi di tahun 2022.

Operating Rights For Infrastructure Assets

The Company recorded the operating rights for infrastructure assets for 2022 in the amount of Rp23.74 trillion, or an increase of 15.77% compared to the previous year at Rp20.50 trillion. The increase was primarily due to several works on the procurement of the LRT project were realized in 2022.

Hak Pengoperasian Aset Prasarana / Operating Rights For Infrastructure Assets dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Saldo Akhir Biaya Perolehan / Ending Acquisition Cost				
Hak Pengoperasian / Operating Rights				
Aset Prasarana - Konsesi / Infrastructure Assets - Concession	2.414.560.954	2.414.560.954	-	0,00%
Non-Konsesi / Non-Concession	2.061.358.529	2.061.358.529	-	0,00%
Pekerjaan dalam Proses Konstruksi / Work in Construction				
Konsesi / Concession	19.041.688.791	16.366.186.678	2.675.502.113	16,35%
Non-Konsesi / Non-Concession	1.287.455.656	543.712.862	743.742.794	136,79%
Jumlah / Total	24.805.063.930	21.385.819.023	3.419.244.907	15,99%
Akumulasi Penyusutan / Accumulated Depreciation	1.068.119.914	882.668.621	185.451.293	21,01%
Nilai Tercatat / Recorded Value	23.736.944.016	20.503.150.402	3.233.793.614	15,77%

Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud Perseroan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp422,76 miliar, meningkat sebesar 15,26% dibanding tahun 2022 yang sejumlah Rp366,77 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh sebagian pekerjaan pensertifikatan aset sudah selesai di tahun 2022.

Intangible Assets

The Company's intangible assets as of December 31, 2022 amounted to Rp422.76 billion, increased by 15.26% compared to 2022 at Rp366.77 billion. The increase was primarily due to some of the asset certification work were completed in 2022.

Komponen aset tak berwujud KAI untuk tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

KAI's intangible asset components for 2021-2022 are as follows:

Aset Tak Berwujud / Intangible Assets dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Saldo Akhir Biaya Perolehan / Ending Acquisition Cost				
Sertifikat Tanah / Land Certificate	402.149.859	331.136.238	71.013.621	21,45%
Piranti Lunak / Software	264.330.197	251.878.751	12.451.446	4,94%
Aset dalam Penyelesaian / Assets in Progress	76.845.930	64.393.646	12.452.284	19,34%
Jumlah / Total	743.325.986	647.408.635	95.917.351	14,82%
Akumulasi penyusutan / Accumulated depreciation	320.565.084	280.635.358	39.929.726	14,23%
Nilai Tercatat / Recorded Value	422.760.902	366.773.277	55.987.625	15,26%

Aset Hak Guna

Aset hak guna Perseroan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp53,12 miliar, menurun sebesar 21,22% dari tahun sebelumnya yang sejumlah Rp67,42 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya masa kontrak atas sewa kendaraan yang sudah selesai.

Komponen aset hak guna KAI untuk tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Right to Use Assets

The Company's right to use assets as of December 31, 2022 amounted to Rp53.12 billion, decreased by 21.22% from the previous year at Rp67.42 billion. The decrease was due to the contract period for vehicle rental that had been completed.

KAI's right to use assets components for 2021-2022 can be seen in the following table:

Aset Hak Guna / Right to Use Assets dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Saldo Akhir Biaya Perolehan / Ending Acquisition Cost				
Prasarana: / Infrastructure				
Tanah / Land	6.198.766	6.115.014	83.752	1,37%
Bangunan / Building	18.787.043	17.700.543	1.086.500	6,14%
Instalasi Bergerak / Mobile Installation	35.048.185	25.183.819	9.864.366	39,17%
Fasilitas: / Facilities				
Kendaraan / Vehicle	4.378.159	14.408.147	-10.029.988	-69,61%
Inventaris / Inventory	63.467.867	63.467.867	-	0,00%
Jumlah / Total	127.880.020	126.875.390	1.004.630	0,79%
Akumulasi Penyusutan / Accumulated Depreciation	74.763.946	59.456.036	15.307.910	25,75%
Nilai Tercatat / Recorded Value	53.116.074	67.419.354	-14.303.280	-21,22%

Aset Tidak Lancar Lainnya

Pada 31 Desember 2022, Perseroan membukukan aset tidak lancar lainnya sejumlah Rp186,73 miliar atau meningkat sebesar 0,53% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp185,74 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan selisih kurs pada jaminan kontrak valas.

Secara terperinci, komponen aset tidak lancar lainnya untuk tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

Other Non-Current Assets

On December 31, 2022, the Company posted other non-current assets in the amount of Rp186.73 billion or increased by 0.53% compared to the previous year at Rp185.74 billion. The increase was primarily due to an increase in exchange rate differences on foreign currency contract guarantees.

In detail, other components of non-current assets for 2021-2022 are as follows:

Aset Tidak Lancar Lainnya / Other Non-Current Assets dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Aset Non-Keuangan / Non-Financial Assets				
Aset Diberhentikan Operasi / Assets Discontinued	268.605.543	267.343.465	1.262.078	0,47%
Persediaan Scrap / Scrap Supplies	31.443.812	31.443.812	-	0,00%
Aset Lain-lain / Other Assets	-	30.555.196	-30.555.196	-
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Less: Allowance for Impairment Losses	(300.049.355)	(329.342.473)	29.293.118	-8,89%
Aset Non-Keuangan - Neto / Non-Financial Assets - Net	-	-	-	-

Aset Tidak Lancar Lainnya / Other Non-Current Assets dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Aset Keuangan / Financial Assets				
Dana Pensiun Pegawai / Employee Pension Fund	76.394.632	88.598.426	-12.203.794	-13,77%
Dana Kesehatan Pegawai / Employee Health Fund	53.402.087	49.994.432	3.407.655	6,82%
Aset Keuangan Lainnya / Other Financial Assets	56.928.847	47.720.711	9.208.136	19,30%
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Less: Allowance for Impairment Losses	-	(577.164)	577.164	-
Aset Keuangan - Neto / Financial Assets - Net	186.725.566	185.736.405	989.161	0,53%
Neto / Net	186.725.566	185.736.405	989.161	0,53%

LIABILITAS

Pada posisi 31 Desember 2022, liabilitas Perseroan adalah sejumlah Rp42,50 triliun atau meningkat sebesar 8,65% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp39,12 triliun. Peningkatan tersebut dikontribusikan oleh peningkatan komponen Utang Obligasi dan Sukuk sebesar 66,65% dibanding tahun sebelumnya. Secara umum, peningkatan liabilitas tersebut disebabkan oleh penerbitan Obligasi dan Sukuk

Penjelasan masing-masing komponen liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp9,96 triliun, atau meningkat sebesar 4,01% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp Rp9,57 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kewajiban jangka pendek perusahaan atas kembali beroperasi normalnya aktivitas Perseroan.

Secara umum, peningkatan liabilitas jangka pendek tersebut memberi dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan berupa menurunnya likuiditas Perseroan.

Utang Usaha

Utang usaha Perseroan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp2,46 triliun atau meningkat sebesar 47,59% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp1,67 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh belum dilakukan pembayaran atas penggunaan prasarana (TAC).

LIABILITIES

As of December 31, 2022, the Company's liabilities amounted to Rp42.50 trillion or increased by 8.65% compared to the previous year at Rp39.12 trillion. The increase was due to an increase in the Bonds and Sukuk Payable components by 66.65% compared to the previous year. In general, the increase in liabilities was due to the issuance of Bonds and Sukuk.

Explanation of each component of the Company's liabilities is as follows:

Current Liabilities

The Company's current liabilities as of December 31, 2022 amounted to Rp9.96 trillion, or increased by 4.01% compared to the previous year at Rp9.57 trillion. The increase was due to the increase in the Company's short-term obligations to return to the Company's normal operations.

In general, the increase in current liabilities has an impact on the Company's financial condition in the form of the decrease in the Company's liquidity.

Accounts Payable

The Company's accounts payables as of December 31, 2022 amounted to Rp2.46 trillion or increased by 47.59% compared to the previous year at Rp1.67 trillion. This increase was mainly due to the non-payment for the use of infrastructure (TAC).

Utang Usaha / Accounts Payable
dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Pihak Berelasi / Related Party	880.714.681	473.426.130	407.288.551	86,03%
Pihak Ketiga / Third Party	1.578.171.487	1.192.602.860	385.568.627	32,33%
Utang Usaha / Accounts Payable	2.458.886.168	1.666.028.990	792.857.178	47,59%

Beban AkruaI dan Provisi

Pada posisi 31 Desember 2022, Perseroan membukukan beban akrual dan provisi sejumlah Rp1,57 triliun, meningkat sebesar 9,86% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp1,43 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pengakuan biaya atas kurang bayar BBM dari hasil rekonsiliasi dengan pemasok.

Komponen beban akrual dan provisi KAI tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Trade Payables and Provision

As of December 31, 2022, the Company posted trade payables and provisions in the amount of Rp1.57 trillion, increased by 9.86% compared to the previous year which amounted to Rp1.43 trillion. The increase was primarily due to the recognition of costs for underpayments of fuel from the results of reconciliation with suppliers.

KAI's components of trade payables and provisions for 2021-2022 can be seen in the table below:

Beban AkruaI dan Provisi / Trade Payables and Provisions
dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Beban AkruaI / Trade Payables				
Biaya Operasi Langsung / Direct Operating Cost	672.586.876	685.255.908	-12.669.032	-1,85%
Biaya Umum dan Administrasi / General and Administrative Fees	579.407.094	453.801.794	125.605.300	27,68%
Biaya Operasi Tidak Langsung / Indirect Operating Cost	320.967.956	292.664.942	28.303.014	9,67%
Jumlah Beban AkruaI / Total Trade Payables	1.572.961.926	1.431.722.644	141.239.282	9,86%
Provisi / Provision	672.586.876	685.255.908	-12.669.032	-1,85%
Jumlah / Total	579.407.094	453.801.794	125.605.300	27,68%

Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp309,33 miliar, menurun sebesar 8,90% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp339,55 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pembayaran atas pajak penghasilan badan.

Tax Payable

The Company's tax payable as of December 31, 2022 amounted to Rp309.33 billion, decreased by 8.90% compared to the previous year at Rp339.55 billion. The decrease was primarily due to the payment of corporate income tax.

Utang Pajak / Tax Payable dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Perusahaan / Company				
Pajak penghasilan / Income tax				
Pasal 21 / Article 21	64.991.629	31.505.527	33.486.102	106,29%
Pasal 22 / Article 22	5.868.954	2.195.091	3.673.863	167,37%
Pasal 23 / Article 23	21.845.785	7.738.113	14.107.672	182,31%
Pasal 4 (2) / Article 4 (2)	12.367.793	46.228.694	-33.860.901	-73,25%
Pajak pertambahan nilai / Value-added tax	141.624.718	135.943.997	5.680.721	4,18%
Sub-Jumlah / Sub Total	246.698.879	223.611.422	23.087.457	10,32%
Entitas anak / Subsidiaries				
Pajak penghasilan / Income tax				
Pasal 21 / Article 21	21.409.723	13.328.064	8.081.659	60,64%
Pasal 23 / Article 23	1.552.318	1.304.706	247.612	18,98%
Pasal 25 / Article 25	701.651	179.334	522.317	291,25%
Pasal 29 / Article 29	32.771.764	94.824.441	-62.052.677	-65,44%
Pasal 4 (2) / Article 4 (2)	3.264.006	2.688.724	575.282	21,40%
Pajak pertambahan nilai / Value-added tax	2.934.389	3.611.851	-677.462	-18,76%
Sub-Jumlah / Sub Total	62.633.851	115.937.120	-53.303.269	-45,98%
Jumlah / Total	309.332.730	339.548.542	-30.215.812	-8,90%

Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa Perseroan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp16,56 miliar, menurun sebesar 43,61% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp29,37 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh beberapa transaksi sewa gudang, kantor dan kendaraan yang masa berakhir kontrak nya pada tahun 2022 sudah berakhir.

Lease Liability

The Company's lease liability as of December 31, 2022 amounted to Rp16.56 billion, decreased by 43.61% compared to the previous year at Rp29.37 billion. The decrease was primarily due to several warehouse, office and vehicle rental transactions whose contracts expired in 2022.

Pendapatan Diterima di Muka

Pada posisi 31 Desember 2022, Perseroan membukukan pendapatan diterima di muka sejumlah Rp1,14 miliar atau meningkat sebesar 37,45% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp832,78 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume angkutan penumpang.

Unearned Revenue

As of December 31, 2022, the Company posted unearned revenue of Rp1.14 billion, an increase by 37.45% compared to the previous year which amounted to Rp832.78 billion. The increase was primarily due to the increase in the passenger transportation volume.

Pendapatan Diterima di Muka / Unearned Revenue dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun / Maturity in One Year				
Non Angkutan / Non-Transportation	653.712.500	448.374.220	205.338.280	45,80%
Angkutan Penumpang / Passenger Transportation	445.814.913	358.775.110	87.039.803	24,26%
Angkutan Barang / Load	45.112.038	25.631.626	19.480.412	76,00%
Jumlah / Total	1.144.639.451	832.780.956	311.858.495	37,45%
Jangka Panjang Lebih dari Satu Tahun / Long-Term, More than One Year				
Non Angkutan / Non-Transportation	837.174.293	776.100.393	61.073.900	7,87%

Pinjaman Bank Jangka Pendek

Pinjaman bank jangka pendek Perseroan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp1,76 triliun, menurun sebesar 33,83% dibandingkan tahun sebelumnya yang sejumlah Rp2,66 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan pinjaman yang dilakukan oleh Perseroan.

Short-Term Bank Loan

The Company's short-term bank loans as of December 31, 2022 amounted to Rp1.76 trillion, a decrease of 33.83% compared to the previous year at Rp2.66 trillion. The decrease was primarily due to repayment of loans by the Company.

Pinjaman Bank Jangka Pendek / Short-Term Bank Loan dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Pihak Berelasi / Related Party	760.000.000	709.962.173	50.037.827	7,05%
Pihak Ketiga / Third Party				
PT Bank HSBC Indonesia	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%
PT Bank Central Asia Tbk	-	950.000.000	-950.000.000	-
Sub-Jumlah / Sub-Total	1.000.000.000	1.950.000.000	-950.000.000	-48,72%
Jumlah / Total	1.760.000.000	2.659.962.173	-899.962.173	-33,83%

Pinjaman Jangka Panjang

Perseroan membukukan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun pada posisi 31 Desember 2022 sejumlah Rp18,28 triliun, meningkat sebesar 10,79% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp16,50 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh Perseroan melakukan pencairan pinjaman untuk kebutuhan proyek investasi LRT.

Long-Term Loans

The Company posted long-term loans maturing in one year at December 31, 2022 in the amount of Rp18.28 trillion, an increase of 10.79% compared to the previous year at Rp16.50 trillion. The increase was due to the disbursement of loans for the needs of LRT investment projects by the Company.

Pinjaman Jangka Panjang / Long-Term Loans dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Pihak Berelasi / Related Parties	11.855.551.877	10.779.296.195	1.076.255.682	9,98%
Pihak Ketiga / Third-Party				
PT Bank Central Asia Tbk	3.187.005.145	2.939.959.037	247.046.108	8,40%
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.020.370.749	1.606.521.251	413.849.498	25,76%
PT Bank KEB Hana Indonesia	465.046.975	369.787.500	95.259.475	25,76%
PT Bank DKI	465.046.975	369.787.500	95.259.475	25,76%
PT Bank Mega Tbk	465.046.975	369.787.500	95.259.475	25,76%
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	286.151.843	-	286.151.843	-
Export-Import Bank of United States	277.446.558	409.939.099	-132.492.541	-32,32%
PT Bank Shinhan	232.523.488	184.893.750	47.629.738	25,76%
PT BPD Sumatera Utara	225.399.833	36.978.750	188.421.083	509,54%
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd	-	369.787.500	-369.787.500	
Sub-Jumlah / Sub-Total	7.624.038.541	6.657.441.887	966.596.654	14,52%
Jumlah / Total	19.479.590.418	17.436.738.082	2.042.852.336	11,72%
Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun / Long-Term Loans Maturing in One Year				
Pihak Berelasi / Related Parties	805.012.927	609.910.535	195.102.392	31,99%
Pihak Ketiga / Third-Party				
PT Bank Central Asia Tbk	217.450.982	166.803.390	50.647.592	30,36%
Export-Import Bank of United States	174.494.692	158.277.645	16.217.047	10,25%
Jumlah Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun / Total Long-Term Loans Maturing in One Year	1.196.958.601	934.991.570	261.967.031	28,02%
Bagian Jangka Panjang / Long-Term	18.282.631.817	16.501.746.512	1.780.885.305	10,79%

Utang Obligasi

Pada posisi 31 Desember 2022, utang obligasi yang jatuh tempo dalam satu tahun Perseroan adalah nihil atau menurun dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp999,45 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran pokok obligasi I seri A tahun 2017.

Bonds Maturing in One Year

As of December 31, 2022, the Company's bonds maturing in one year were nil or decreased compared to the previous year at Rp999.45 billion. The decrease was mainly due to the payment of the principal of bonds I series A in 2017.

Utang Obligasi / Bonds dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Obligasi I Kereta Kereta Api Indonesia: / Kereta Api Indonesia Bond I Series A:				
Seri A / Series A	-	1.000.000.000	-1.000.000.000	-
Seri B / Series B	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%
Sub-Jumlah / Sub-Total	1.000.000.000	2.000.000.000	-1.000.000.000	-50,00%

Utang Obligasi / Bonds dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Obligasi II Kereta Kereta Api Indonesia: / Kereta Api Indonesia Bond II				
Seri A / Series A	900.000.000	900.000.000	-	0,00%
Seri B / Series B	1.100.000.000	1.100.000.000	-	0,00%
Sub-Jumlah / Sub-Total	2.000.000.000	2.000.000.000	-	0,00%
Obligasi Berkelanjutan I Kereta Kereta Api Indonesia Api Indonesia Tahun 2022: / Kereta Apii Indonesia Sustainable Bonds in 2022:				
Seri A / Series A	634.000.000	-	634.000.000	-
Seri B / Series B	866.000.000	-	866.000.000	-
Sub-Jumlah / Sub-Total	1.500.000.000	-	1.500.000.000	-
Jumlah / Total	4.500.000.000	4.000.000.000	500.000.000	12,50%
Biaya Penerbitan Obligasi yang belum Diamortisasi / Unamortized Bond Issuance Costs	(9.239.619)	(6.752.261)	-2.487.358	36,84%
Jumlah Utang Obligasi / Total Bonds	4.490.760.381	3.993.247.739	497.512.642	12,46%
Bagian Utang Obligasi yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun / Share of Bonds Payable with Maturity Within One Year				
Obligasi I Kereta Api Indonesia / Kereta Api Indonesia Bonds I				
Seri A / Series A	-	1.000.000.000	-1.000.000.000	-
Biaya Penerbitan Obligasi yang belum Diamortisasi / Unamortized Bond Issuance Costs	-	(552.834)	552.834	-
Jumlah Bagian Obligasi yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun / Share of Bonds Payable with Maturity Within One Year	-	999.447.166	-999.447.166	-
Utang Obligasi Bagian Jangka Panjang / Long-Term Bonds	4.490.760.381	2.993.800.573	1.496.959.808	50,00%

Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Perseroan membukukan liabilitas jangka pendek lainnya pada posisi 31 Desember 2022 sejumlah Rp98.53miliar, meningkat sebesar 4,48% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp94,31 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kekurangan uang muka dinas yang belum dibayarkan kepada pegawai.

Other Current Liabilities

The Company posted other current liabilities on December 31, 2022 in the amount of Rp98.53 billion, increased by 4.48% compared to the previous year which amounted to Rp94.31 billion. The increase was due to a shortage of service advances that had not been paid to employees.

Liabilitas Jangka Pendek Lainnya / Other Current Liabilities dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Titipan Pegawai / Employee Deposit	56.416.887	49.951.092	6.465.795	12,94%
Uang Jaminan / Bail	5.538.030	2.275.634	3.262.396	143,36%
Lain-lain / Others	36.583.373	42.084.218	-5.500.845	-13,07%
Jumlah / Total	98.538.290	94.310.944	4.227.346	4,48%

Liabilitas Jangka Panjang

Pada posisi 31 Desember 2022, Perseroan membukukan liabilitas jangka panjang sejumlah Rp32,54 triliun atau meningkat sebesar 10,15% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp29,78 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh terserapnya pinjaman investasi perusahaan yang digunakan untuk pengembangan bisnis.

Secara umum, peningkatan liabilitas jangka panjang tersebut memberi dampak bagi kondisi keuangan Perseroan berupa menurunnya likuiditas Perseroan.

Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa Perseroan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp44,60 miliar, menurun dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp52,77 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh kontrak sewa atas gedung, kantor, dan kendaraan yang masa sewanya sudah berakhir.

Pendapatan Diterima Di Muka

Perseroan membukukan pendapatan diterima di muka pada posisi 31 Desember 2022 sejumlah Rp837,17 miliar, meningkat sebesar 7,87% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp776,10 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya sewa atas aset tanah dan bangunan.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja Perseroan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp5,20 triliun, menurun sebesar 10,70% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp5,82 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh terdapat perubahan regulasi atas pengatribusian imbalan pada periode jasa.

Long-Term Liabilities

As of December 31, 2022, the Company posted long-term liabilities of Rp32.54 trillion or increased by 10.15% compared to the previous year at Rp29.78 trillion. The increase was primarily due to the absorption of the Company's investment loans used for business development.

In general, the increase in long-term liabilities has an impact on the Company's financial condition in the form of the decrease in the Company's liquidity.

Lease Liability

The Company's lease liability as of December 31, 2022 amounted to Rp44.60 billion, decreased compared to the previous year at Rp52.77 billion. The decrease was due to rental contracts for buildings, offices and vehicles whose lease terms had expired.

Unearned Revenue

The company posted an unearned revenue as of December 31, 2022 in the amount of Rp837.17 billion, an increase of 7.87% compared to the previous year at Rp776.10 billion. The increase was primarily due to an increase in rent on land and building assets.

Employee Benefit Liabilities

The Company's employee benefit liabilities as of December 31, 2022 amounted to Rp5.20 trillion, decreased by 10.70% compared to the previous year which amounted to Rp5.82 trillion. The decrease was primarily due to changes in regulations regarding the attribution of compensation during the service period.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang / Employee Benefit Liabilities
dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Program Pensiun Eks PNS / Former Civil Servant Retirement Program	1.098.808.740	1.167.401.051	-68.592.311	-5,88%
Program Pensiun Eks Perum dan Persero / Ex Perum and Persero Pension Program	4.037.598.131	4.337.122.922	-299.524.791	-6,91%
Imbalan Kerja Lain / Other Work Benefits	60.745.103	76.900.516	-16.155.413	-21,01%
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang / Total Employee Benefit Liabilities	5.197.151.974	5.819.773.807	-622.621.833	-10,70%

Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Pinjaman Jangka Panjang

Perseroan mencatatkan pinjaman jangka panjang pada posisi 31 Desember 2022 sejumlah Rp18,28 triliun, meningkat sebesar 10,79% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp16,50 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pencairan pinjaman untuk kebutuhan pembangunan proyek LRT.

Pinjaman Program PEN

Pinjaman Program PEN Perseroan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp3,06 triliun, menurun 12,50% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp3,50 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi pinjaman jangka panjang ke jangka pendek sebesar Rp437,50 miliar.

Terkait hal tersebut, Perseroan menandatangani perjanjian kredit pada tahun 2020.

Utang Obligasi

Perseroan mencatatkan utang obligasi setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun pada posisi 31 Desember 2022 sejumlah Rp4,49 triliun, meningkat sebesar 50% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp2,99 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi berkelanjutan I.

Sukuk

Perseroan mencatatkan sukuk pada posisi 31 Desember 2022 sejumlah Rp498,31 miliar, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penerbitan sukuk.

Liabilitas Jangka Panjang Lainnya

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp129,80 miliar, menurun sebesar 6,35% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp138,59 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh belum terealisasi pembayaran atas kewajiban perseroan kepada PT IFG, PT Taspen dan BPJS selaku pengelola dana pensiun Perseroan.

Long-Term Liabilities After Deducting the Maturity Share in One Year

Long-Term Loans

The Company recorded long-term loans on December 31, 2022 in the amount of Rp18.28 trillion, an increase of 10.79% compared to the previous year at Rp16.50 trillion. This increase was mainly due to the disbursement of loans for the needs of the LRT project development.

PEN Program Loans

The Company's PEN Program loans as of December 31, 2022 amounted to Rp3.06 trillion, a decrease of 12.50% compared to the previous year at Rp3.50 trillion. The decrease was primarily due to the reclassification of long-term loans to short-term loans amounting to Rp437.50 billion.

In relation to that, the Company signed an agreement of credit in 2020.

Bonds Payable

The Company recorded bonds payable after deducting the maturity share in one year at December 31, 2022 in the amount of Rp4.49 trillion, an increase of 50% compared to the previous year at Rp2.99 trillion. This increase was mainly due to the issuance of the continuous bond I.

Sukuk

The Company recorded sukuk on December 31, 2022 in the amount of Rp498.31 billion, an increase compared to the previous year which was nil. This increase was mainly due to the issuance of sukuk.

Other Non-Current Liabilities

The Company's non-current liabilities as of December 31, 2022 amounted to Rp129.80 billion, decreased by 6.35% compared to the previous year at Rp138.59 billion. The decrease was primarily due to the unrealized payment of the company's obligations to PT IFG, PT Taspen and BPJS as the manager of the Company's pension fund.

Komponen liabilitas jangka panjang lainnya Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut:

The components of the Company's other non-current liabilities can be seen in the following table:

Liabilitas Jangka Panjang Lainnya / Other Non-Current Liabilities dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Saldo Akhir Titipan Dana Iuran Pensiun / Final Balance of Pension Contribution Fund	76.394.632	88.598.426	-12.203.794	-13,77%
Titipan Dana Kesehatan Pegawai / Employee Health Fund Deposit	53.402.087	49.994.432	3.407.655	6,82%
Jumlah / Total	129.796.719	138.592.858	-8.796.139	-6,35%

EKUITAS

Ekuitas Perseroan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp29,08 triliun, meningkat 23,23% dibanding posisi 31 Desember 2021 yang sejumlah Rp23,60 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh tambahan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp3,2 triliun. Secara umum, peningkatan ekuitas tersebut memberi dampak bagi Perseroan berupa penambahan modal untuk proyek penugasan pemerintah.

EQUITY

The Company's equity as of December 31, 2022 was Rp29.08 trillion, increased by 23.23% compared to December 31, 2021 at Rp23.60 trillion. This increase was due to additional State Equity Participation of Rp3.2 trillion. In general, the increase in equity has had an impact on the Company in the form of additional capital for government assignment projects.

Penjelasan masing-masing komponen ekuitas Perseroan (seluruhnya milik pemerintah Republik Indonesia) adalah sebagai berikut:

Explanation of each component of the Company's equity (wholly owned by the government of the Republic of Indonesia) is as follows:

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp19,17 triliun, atau berjumlah sama dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp19,17 triliun. Hal tersebut terutama disebabkan oleh belum adanya penambahan modal yang diberikan Pemerintah untuk Perseroan.

Issued and Fully Paid Capital

The Company's issued and fully paid capital as of December 31, 2022 was in the amount of Rp19.17 trillion, or equal to the previous year at Rp19.17 trillion. This was primarily due to the absence of additional capital provided by the Government for the Company.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / Issued and Fully Paid Capital dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Saldo Awal Tahun / Beginning of Year Balance	19.168.743.000	12.268.743.000	6.900.000.000	56,24%
Penambahan Modal Disetor / Additional Paid-In Capital	-	6.900.000.000	-6.900.000.000	-
Jumlah / Total	19.168.743.000	19.168.743.000	-	0,00%

Saldo Laba

Saldo laba Perseroan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp7,68 triliun, meningkat sebesar 34,17% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp5,72 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kinerja laba perseroan pada tahun 2022.

Profit Balance

The Company's profit balance as of December 31, 2022 amounted to Rp7.68 trillion, increased by 34.17% compared to the previous year at Rp5.72 trillion. This increase was mainly due to the increase in the Company's profit performance in 2022.

Komponen saldo laba Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut:

The Company's profit balance components can be seen in the table below:

Saldo Laba / Profit Balance dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021*	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Ditentukan Penggunaannya (Cadangan Wajib dan Umum) / Appropriated (Mandatory and General Reserves)	7.694.357.800	7.694.357.800	-	0,00%
Belum Ditentukan Penggunaannya / Unappropriated	(189.072.579)	(1.971.113.056)	1.782.040.477	-90,41%
Dampak Penerapan Awal PSAK 71 / Impact of Early Implementation of PSAK 71	173.801.073	-	173.801.073	-
Jumlah / Total	7.679.086.294	5.723.244.744	1.955.841.550	34,17%

*) Disajikan kembali. / Restated.

Komponen Ekuitas Lainnya

Perseroan mencatatkan komponen ekuitas lainnya pada posisi 31 Desember 2022 sejumlah Rp(1.04) triliun, menurun dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp(1,63) triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pengukuran kembali kewajiban imbalan pasca kerja oleh aktuarial.

Other Equities

The Company recorded other equities as of December 31, 2022 in the amount of Rp(1.04) trillion, a decrease compared to the previous year at Rp1.63 trillion. The decrease was primarily due to the actuarial remeasurement of post-employment benefit obligations.

Komponen Ekuitas Lainnya / Other Equities dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021*	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Akumulasi Rugi Aktuarial atas Imbalan Kerja / Accumulated Actuarial Loss on Employee Benefits	(1.037.483.391)	(1.618.357.448)	580.874.057	-36,37%
Selisih Likuidasi / Liquidation Difference	968.135	968.135	-	0,00%
Tambahan Modal Disetor atas Pengampunan Pajak / Additional Paid-in Capital for Tax Amnesty	486.081	486.081	-	0,00%
Jumlah / Total	(1.036.029.175)	(1.617.003.232)	592.985.451	-36,40%

*) Disajikan kembali. / Restated.

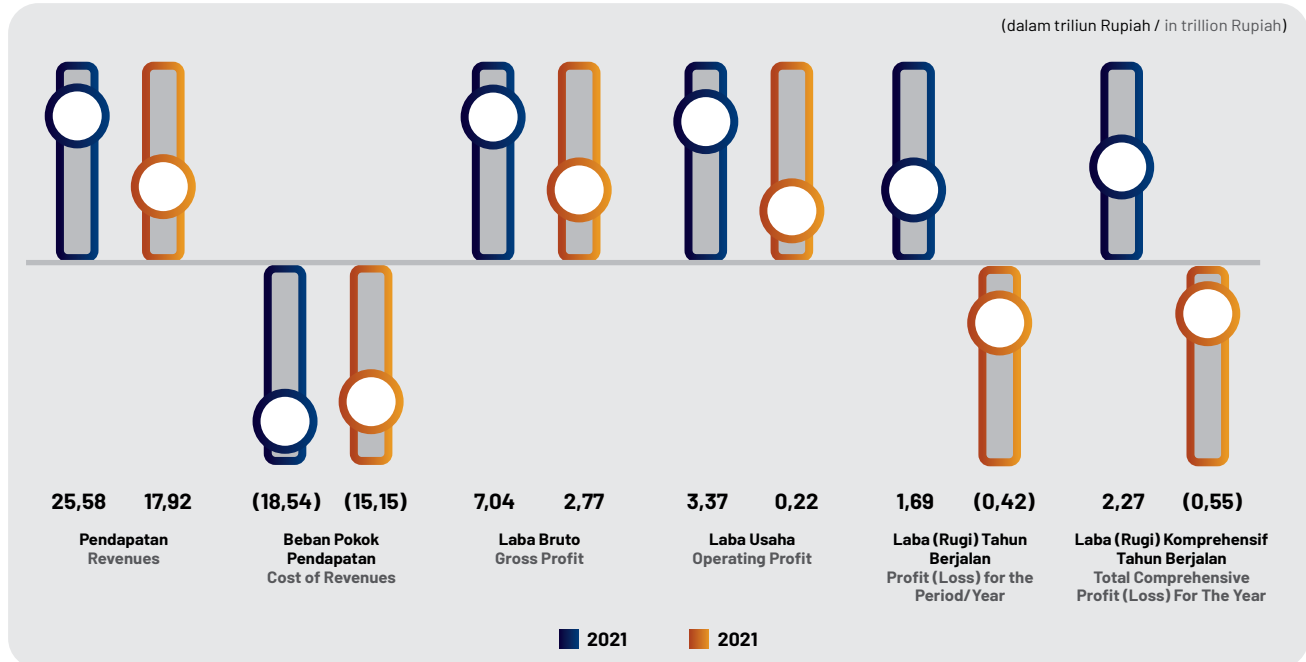
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income Statements

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian / Consolidated Profit Or Loss and Other Comprehensive Income Statements dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Pendapatan / Revenues				
Pendapatan Angkutan dan Usaha Lainnya / Transportation and Other Operating Revenues	22.967.071.664	15.529.530.120	7.437.541.544	47,89%
Pendapatan Konstruksi / Construction Revenue	2.610.567.346	2.387.245.804	223.321.542	9,35%
Jumlah Pendapatan / Total Revenues	25.577.639.010	17.916.775.924	7.660.863.086	42,76%

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian /
Consolidated Profit Or Loss and Other Comprehensive Income Statements
dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Beban Pokok Pendapatan / Cost of Revenues				
Beban Angkutan dan Usaha Lainnya / Transportation and Other Operating Costs	(15.930.293.675)	(12.762.060.746)	-3.168.232.929	24,83%
Beban Konstruksi / Construction Cost	(2.610.567.346)	(2.387.245.804)	-223.321.542	9,35%
Jumlah Beban Pokok Pendapatan / Total Cost of Revenues	(18.540.861.021)	(15.149.306.550)	-3.391.554.471	22,39%
Laba Bruto / Gross Profit	7.036.777.989	2.767.469.374	4.269.308.615	154,27%
Beban Usaha / Operating Expenses	(3.664.532.070)	(2.543.050.490)	-1.121.481.580	44,10%
Laba Usaha / Operating Profit	3.372.245.919	224.418.884	3.147.827.035	1402,66%
Penghasilan Keuangan / Finance Income	139.514.944	108.444.334	31.070.610	28,65%
Bagian Rugi Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Equity in Net Income of Associates and Joint Ventures	(267.504.227)	(9.495.748)	-258.008.479	2717,09%
Beban Keuangan / Finance Cost	(980.572.153)	(900.712.325)	-79.859.828	8,87%
Selisih Kurs / Foreign Exchanges	42.673.710	(567.340)	43.241.050	-7621,72%
Keuntungan (Kerugian) Lain-lain - Bersih / Other Gains (Losses) - Net	(95.769.893)	30.931.669	-126.701.562	-409,62%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak / Profit (Loss) Before Tax	2.210.588.300	(546.980.526)	2.757.568.826	-504,14%
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Bersih / Income Tax Benefit (Expense) - Net	(524.599.080)	121.784.883	-646.383.963	-530,76%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Profit (Loss) for the Period/Year	1.685.989.220	(425.195.643)	2.111.184.863	-496,52%
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income				
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain yang Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi pada Periode Berikutnya: / Other Comprehensive Income (Loss) Not Reclassified to Profit or Loss in the Next Period:				
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti / Remeasurement of Defined Benefit Liability	746.347.332	(156.953.700)	903.301.032	-575,52%
Efek Pajak Penghasilan Terkait / Income Tax Effect	(165.506.775)	34.348.460	-199.855.235	-581,85%
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Lain - Setelah Pajak / Total Other Comprehensive Profit (Loss) - Net of Tax	580.840.557	(122.605.240)	703.445.797	-573,75%
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Profit (Loss) For The Year	2.266.829.777	(547.800.883)	2.814.630.660	-513,81%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: / Profit (Loss) for the Year Attributable To:				
Pemilik Entitas Induk / Owner of the Parent Entity	1.782.040.477	(362.460.073)	2.144.500.550	-591,65%
Kepentingan Non-Pengendali / Non-Controlling Interest	(96.051.257)	(62.735.570)	-33.315.687	53,10%
Jumlah / Total	1.685.989.220	(425.195.643)	2.111.184.863	-496,52%
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada: / Total Comprehensive Profit (Loss) Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk / Owner of the Parent Entity	2.362.914.534	(485.036.924)	2.847.951.458	-587,16%
Kepentingan Non-pengendali / Non-Controlling Interest	(96.084.757)	(62.763.959)	-33.320.798	53,09%
Jumlah / Total	2.266.829.777	(547.800.883)	2.814.630.660	-513,81%
Laba (Rugi) per Saham Dasar / Basic Profit (Loss) per Share	93	(29)	122	-420,69%

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income Statements

Pendapatan

Pendapatan Perseroan untuk tahun 2022 adalah sejumlah Rp25,58 triliun, meningkat sebesar 42,76% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp17,92 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan angkutan penumpang.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun 2022 adalah sejumlah Rp18,54 triliun, meningkat sebesar 22,39% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp15,15 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban pegawai, beban BBM, beban perawatan, dan beban penggunaan prasarana (TAC).

Laba Bruto

Laba bruto Perseroan untuk tahun 2022 adalah sejumlah Rp7,04 triliun, meningkat sebesar 154,27% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp2,77 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan angkutan dan usaha lainnya yang sejalan dengan beban pokok pendapatannya.

Revenue

The Company's revenue for 2022 was Rp25.58 trillion, an increase of 42.76% compared to the previous year which amounted to Rp17.92 trillion. The increase was primarily due to the increase in the passenger transportation revenue.

Cost of Revenue

The Company's cost of revenue for 2022 was Rp18.54 trillion, an increase of 22.39% compared to the previous year which was Rp15.15 trillion. The increase was primarily due to an increase in personnel expenses, fuel expenses, maintenance expenses and infrastructure usage expenses (TAC).

Gross Profit

The Company's gross profit for 2022 was Rp7.04 trillion, an increase of 154.27% compared to the previous year at Rp2.77 trillion. The increase was primarily due to an increase in revenue from transportation and other businesses which was in line with the cost of revenue.

Komponen laba bruto Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut:

The components of the Company's gross profit can be seen in the following table:

Laba Bruto / Gross Profit dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Jumlah Pendapatan / Total Income	25.577.639.010	17.916.775.924	7.660.863.086	42,76%
Jumlah Beban Pokok Pendapatan / Total Cost of Revenue	(18.540.861.021)	(15.149.306.550)	-3.391.554.471	22,39%
Laba Bruto / Gross Profit	7.036.777.989	2.767.469.374	4.269.308.615	154,27%

Beban Usaha

Beban usaha Perseroan untuk tahun 2022 adalah sejumlah Rp3,66 triliun, meningkat sebesar 44,10% dibanding tahun sebelumnya yang sejumlah Rp2,54 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban umum dan administrasi dan terdapat pemulihan cadangan penurunan nilai piutang.

Operating Expenses

The Company's operating expenses for 2022 amounted to Rp3.66 trillion, increased by 44.10% compared to the previous year which amounted to Rp2.54 trillion. The increase was primarily due to an increase in general and administrative expenses and there was a recovery of allowance for impairment of receivables.

Komponen beban usaha Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut:

The components of the Company's operating expenses can be seen in the following table:

Beban Usaha / Operating Expenses dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Pegawai / Employee	2.466.173.859	1.882.682.855	583.491.004	30,99%
Kerumahtanggaan / Household	252.746.617	104.768.528	147.978.089	141,24%
Pemasaran / Marketing	177.515.152	48.653.540	128.861.612	264,86%
Pendidikan dan Pelatihan / Education and Training	142.533.291	51.717.214	90.816.077	175,60%
Penyusutan Fasilitas / Penyusutan Fasilitas / Facility Depreciation	129.430.614	122.039.053	7.391.561	6,06%
Penurunan nilai/ (Pemulihan) Aset Tetap / Impairment/(Recovery) of Fixed Assets	102.959.281	(58.451.223)	161.410.504	-276,15%
Administrasi / Administration	81.671.962	69.694.425	11.977.537	17,19%
Pajak Bumi dan Bangunan / Land and Building Tax (PBB)	78.113.981	73.858.785	4.255.196	5,76%
Rapat/Akomodasi / Meeting/Accommodation	74.638.524	32.373.994	42.264.530	130,55%
Konsultan, Penelitian dan Pengembangan / Consultants, Research and Development	62.078.041	54.173.555	7.904.486	14,59%
Inventaris / Inventories	50.002.559	28.151.818	21.850.741	77,62%
Perjalanan Dinas / Business Trip	44.116.746	14.096.328	30.020.418	212,97%
Asuransi / Insurance	32.068.195	31.115.342	952.853	3,06%
Listrik, Air dan Telepon / Electricity, Water and Telephone	22.669.682	19.172.067	3.497.615	18,24%
(Pemulihan) Penurunan Nilai Aset Keuangan / (Recovery) Impairment of Financial Assets	(52.186.434)	69.004.209	-121.190.643	-175,63%
Jumlah / Total	3.664.532.070	2.543.050.490	1.121.481.580	44,10%

Laba Usaha

Laba usaha Perseroan untuk tahun 2022 adalah sejumlah Rp3,37 miliar, meningkat 1402,66% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sejumlah Rp224,42 miliar. Peningkatan tersebut terutama dikontribusikan oleh peningkatan pendapatan angkutan penumpang dan barang.

Operating Profit

The Company's operating profit for 2022 was Rp3.37 billion, increased by 1402.66% compared to 2021 at Rp224.42 billion. The increase was mainly contributed by the increase in revenue of passenger and freight transportation.

Laba (Rugi) Usaha / Operating Profit (Loss) dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Laba Bruto / Gross Profit	7.036.777.989	2.767.469.374	4.269.308.615	154,27%
Beban Usaha / Operating Profit	(3.664.532.070)	(2.543.050.490)	-1.121.481.580	44,10%
Laba Usaha / Operating Profit	3.372.245.919	224.418.884	3.147.827.035	1402,66%

Penghasilan Keuangan

Penghasilan keuangan Perseroan untuk tahun 2022 adalah sejumlah Rp139,51 miliar, meningkat 28,65% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp108,44 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas.

Financial Income

The Company's financial income for 2022 was Rp139.51 billion, increased by 28.65% compared to 2021 at Rp108.44 billion. The increase was primarily due to the increase in cash and cash equivalent.

Penghasilan Keuangan / Financial Income dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Jasa Giro / Current Account Service	106.536.898	87.372.974	19.163.924	21,93%
Penyesuaian Nilai Kini PEN / PEN Current Value Adjustment	17.662.552	11.134.069	6.528.483	58,64%
Deposito Berjangka / Timed Deposit	15.315.494	9.937.291	5.378.203	54,12%
Jumlah / Total	139.514.944	108.444.334	31.070.610	28,65%

Bagian Rugi Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Bagian rugi bersih entitas asosiasi dan ventura bersama untuk tahun 2022 adalah mencapai Rp267,50 triliun, meningkat 2717,09% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp9,50 miliar. Peningkatan tersebut terutama dikontribusikan oleh serap rugi atas investasi pada perusahaan ventura bersama.

The Share of Net Loss of Associates and Joint Ventures

The share of net loss of associates and joint ventures for 2022 was Rp267.50 trillion, increased by 2717.09% compared to 2021 at Rp9.50 trillion. This increase was primarily due to absorption of losses on investments in joint venture companies.

Bagian Laba (Rugi) Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Share of Net Profit (Loss) of Associates and Joint Ventures
dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Entitas Asosiasi / Associate Entities				
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	(9.153.887)	(10.959.876)	1.805.989	-16,48%
PT BPRS Baiturridha Pusaka	2.089.885	1.278.427	811.458	63,47%
Ventura Bersama / Joint Ventures				
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)	(261.428.094)	-	-261.428.094	-
KSO Bumi Kalog	268.785	230.567	38.218	16,58%
KSO B Kalog	717.398	179.277	538.121	300,16%
KSO PT KAPM - PT PPBM (PT Pacific Prima Buana Mas)	-	-	-	-
KSO PT KAPM - PT Mega Dasa Semesta	1.686	(224.143)	225.829	-100,75%
KSO PT KAPM - PT Mahakarya Properti	-	-	-	-
Jumlah / Total	(267.504.227)	(9.495.748)	-258.008.479	2717,09%

Beban Keuangan

Beban keuangan Perseroan untuk tahun 2022 adalah mencapai Rp980,57 miliar, meningkat 8,87% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp900,71 miliar. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan suku bunga.

Selisih Kurs

Selisih kurs tahun Perseroan untuk tahun 2022 adalah mencapai Rp42,67 miliar, meningkat 7621,72% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp567,34 juta. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh surplus aset keuangan yang dimiliki Perseroan.

Keuntungan (Kerugian) Lain-Lain - Bersih

Keuntungan lain-lain bersih Perseroan untuk tahun 2022 adalah mencapai Rp95,77 miliar, meningkat 409,62% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencatatkan kerugian lain-lain bersih mencapai Rp30,93 miliar. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh akrual atas kewajiban kontijensi Perseroan.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Laba (Rugi) sebelum pajak untuk tahun 2022 adalah sejumlah Rp2,21 triliun, meningkat 504,14% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp546,98 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja Perseroan.

Financial Expenses

The Company's financial expenses for 2022 was Rp980.57 billion, increased by 8.87% compared to 2021 at Rp900.71 billion. The increase was due to the increase in interest rates.

Exchange Rate Difference

The Company's annual exchange rate difference for 2022 was Rp42.67 billion, increased by 7621.72% compared to 2021 at Rp567.34 billion. The increase was due to surplus of financial assets owned by the Company.

Other Net Gain (Loss)

The Company's other net gain for 2022 reached Rp95.77 billion, increased by 409.62% compared to 2021 at Rp30.93 billion. The increase was influenced by accruals for the Company's contingent liabilities.

Profit (Loss) Before Tax

Profit (Loss) before tax for 2022 was Rp2.21 trillion, increased by 504.14% compared to 2021 at Rp546.98 billion. It was influenced by the improved Company's performance.

Rugi Sebelum Pajak / Loss Before Tax
 dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Laba (Rugi) Usaha / Operating Profit (Loss)	3.372.245.919	224.418.884	3.147.827.035	1402,66%
Penghasilan Keuangan / Financial Income	139.514.944	108.444.334	31.070.610	28,65%
Bagian Rugi Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Share of Net Loss of Associates and Joint Ventures	(267.504.227)	(9.495.748)	-258.008.479	2717,09%
Beban Keuangan / Financial Burden	(980.572.153)	(900.712.325)	-79.859.828	8,87%
Selisih Kurs / Exchange Rate Defference	42.673.710	(567.340)	43.241.050	-7621,72%
Keuntungan (Kerugian) Lain-lain - Bersih / Other Gains (Losses) - Net	(95.769.893)	30.931.669	-126.701.562	-409,62%
Rugi Sebelum Pajak / Loss Before Tax	2.210.588.300	(546.980.526)	2.757.568.826	-504,14%

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Bersih

Manfaat pajak penghasilan - bersih Perseroan tahun 2021 mencapai minus Rp524,60 miliar, menurun 530,76% dibandingkan dengan beban pajak penghasilan - bersih tahun 2021 yang mencapai Rp121,78 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari berkurangnya akumulasi rugi fiskal.

Income Tax Benefits (Expense) - Net

Income tax benefits - net of the Company in 2022 reached minus Rp524.60 billion, decreased by 530.76% compared to 2021 at Rp121.78 billion. The increase mainly came from reduced accumulated tax losses.

Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan - Bersih / Income Tax Expense (Benefits) - Net
 dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Konsolidasian: / Consolidation:				
Beban Pajak Kini: / Current Tax Burden:				
Tahun Berjalan / Current Year	129.815.754	143.642.469	-13.826.715	-9,63%
Penyesuaian / Adjustment	234.243	5.510.562	-5.276.319	-95,75%
Manfaat Pajak Tangguhan / Deferred Tax Benefits	395.017.569	(270.937.914)	665.955.483	-245,80%
Efek Perubahan Tarif Pajak / Effects of Changes in Tax Rates	-	-	-	-
Jumlah / Total	524.599.080	(121.784.883)	646.383.963	-530,76%

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan untuk tahun 2022 mencapai Rp1,69 miliar, meningkat 496,52% dibandingkan dengan rugi tahun berjalan tahun 2021 yang mencapai Rp425,20 miliar. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja Perseroan.

The Current Year's Profit (Loss)

The current year's profit for 2022 reached Rp1.69 billion, increased by 496.52% compared to 2021 at Rp425.20 billion. The increase was influenced by the improved Company's performance.

Rugi Tahun Berjalan / Current Year's Loss
 dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Laba (Rugi) Sebelum Pajak / Profit (Loss) Before Tax	2.210.588.300	(546.980.526)	2.757.568.826	-504,14%
Beban Manfaat (Manfaat/Beban) Pajak Penghasilan - Bersih / Income Tax Benefits Expense (Expense/Benefits) - Net	(524.599.080)	121.784.883	-646.383.963	-530,76%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Current Year's Profit (Loss)	1.685.989.220	(425.195.643)	2.111.184.863	-496,52%

Laba (Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak

Laba (Rugi) komprehensif lain setelah pajak untuk tahun 2022 adalah sejumlah Rp580,84 miliar, meningkat 573,75% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai minus Rp122,61 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja Perseroan.

Other Comprehensive Profit (Loss) After Tax

Other comprehensive profit (loss) after tax for 2022 was Rp580.84 billion, increased by 573.75% compared to 2021 at minus Rp122.61 billion. It was influenced by the improved Company's performance.

Rugi Komprehensif Lain Setelah Pajak / Other Comprehensive Loss After dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain yang Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi pada Periode Berikutnya: / Other Comprehensive Income (Loss) Not Reclassified to Profit or Loss in the Next Period:				
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti / Remeasurement of Defined Benefit Liability	746.347.332	(156.953.700)	903.301.032	-575,52%
Efek Pajak Penghasilan Terkait / Effects of Related Income Tax	(165.506.775)	34.348.460	-199.855.235	-581,85%
Jumlah Rugi Komprehensif Lain - Setelah Pajak / Other Comprehensive Loss After Tax	580.840.557	(122.605.240)	703.445.797	-573,75%

Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan

Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun 2022 mencapai Rp1,78 miliar, meningkat 591,65% dibandingkan rugi pada tahun 2021 yang sejumlah Rp362,46 triliun. Sementara itu, rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali tahun 2022 adalah mencapai Rp96,05 miliar, meningkat 53,10% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp62,74 miliar.

Attributable Profit (Loss) for the Year

Loss for the year attributable to owners of the parent entity for 2022 reached Rp1.78 billion, increased by 591.65% compared to 2021 at Rp362.46 trillion. Meanwhile, the loss for the year attributable to non-controlling interests in 2022 reached Rp96.05 billion, increased by 53.10% compared to 2021 at Rp62.74 billion.

Rugi Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan / Attributable Loss for the Year dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: / Income (Loss) for the Year Attributable To:				
Pemilik Entitas Induk / Parent Entity Owner	1.782.040.477	(362.460.073)	2.144.500.550	-591,65%
Kepentingan Non Pengendali / Non-Controlling Interest	(96.051.257)	(62.735.570)	-33.315.687	53,10%
Jumlah / Total	1.685.989.220	(425.195.643)	2.111.184.863	-496,52%

Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan

Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun 2022 mencapai Rp2,36 miliar, meningkat 587,16% dibandingkan dengan rugi tahun 2021 yang mencapai Rp485,04 miliar. Sementara itu, rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali tahun 2022 mencapai Rp96,08 miliar, meningkat 53,09% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp62,76 miliar.

Attributable Comprehensive Loss for the Year

Comprehensive profit attributable to owners of the parent entity for 2022 reached Rp2.36 billion, increased by 587.16% compared to 2021 at Rp485.04 billion. Meanwhile, the comprehensive loss attributable to non-controlling interests in 2022 reached Rp96.008 billion, increased by 53.09% compared to 2021 at Rp62.76 billion.

Rugi Komprehensif yang Dapat Diatribusikan / Attributable Comprehensive Loss
 dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Jumlah Rugi Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada: / Total Comprehensive Loss for the Year Attributable To:				
Pemilik Entitas Induk / Parent Entity Owner	2.362.914.534	(485.036.924)	2.847.951.458	-587,16%
Kepentingan Non Pengendali / Non-Controlling Interest	(96.084.757)	(62.763.959)	-33.320.798	53,09%
Jumlah / Total	2.266.829.777	(547.800.883)	2.814.630.660	-513,81%

Laba (Rugi) Per Saham Dasar

Rugi per saham dasar Perseroan tahun untuk 2022 mencapai Rp93 ribu, meningkat 420,69% dibandingkan dengan rugi per saham dasar tahun 2021 yang mencapai Rp29 ribu. Perubahan tersebut terutama berasal dari peningkatan laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang sebesar 591,65%.

Basic Income (Loss) per Share

The Company's basic loss per share for 2022 reached Rp93 thousand, an increase of 420.69% compared 2021 at Rp29 thousand. The change mainly came from an increase in profit (loss) for the year attributable to owners of the parent entity which amounted to 591.65%.

Rugi Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan / Attributable Loss for the Year
 dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Laba (Rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Income (Loss) for the year attributable to parent entity	1.782.040.477	(362.460.073)	2.144.500.550	-591,65%
Rata-rata tertimbang saham beredar / Weighted average shares outstanding	19.168.743	12.287.647	6.881.096	56,00%
Rugi per Saham Dasar / Basic Loss per Share	93	(29)	122	-420,69%

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Consolidated Statement of Cash Flows

Laporan Arus Kas / Statement of Cash Flow
 dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah

Uraian / Description	2022	2021*	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Arus Kas dari Aktivitas Operasi / Cash Flows From Operating Activities				
Penerimaan Kas dari Pelanggan / Cash Receipts from Customer	18.291.269.386	10.843.449.947	7.447.819.439	68,68%
Pembayaran kepada Pemasok / Payments to Suppliers	(9.701.299.798)	(7.995.549.108)	-1.705.750.690	21,33%
Pembayaran kepada Karyawan / Payment to Employees	(6.469.435.899)	(4.810.626.189)	-1.658.809.710	34,48%
Penerimaan dari Pemerintah / Receipts from Government	4.043.803.506	4.034.214.207	9.589.299	0,24%
Pembayaran kepada Pemerintah / Payment to Government	(221.003.573)	(414.889.721)	193.886.148	-46,73%
Penerimaan Bunga / Interest Income	139.527.011	102.331.945	37.195.066	36,35%
Penerimaan Kas dari Restitusi Pajak / Cash Receipts from Tax Restitution	240.700.252	11.693.921	229.006.331	1958,34%
Pembayaran Pajak Penghasilan / Payment of Income Tax	(261.362.844)	(177.840.535)	-83.522.309	46,96%

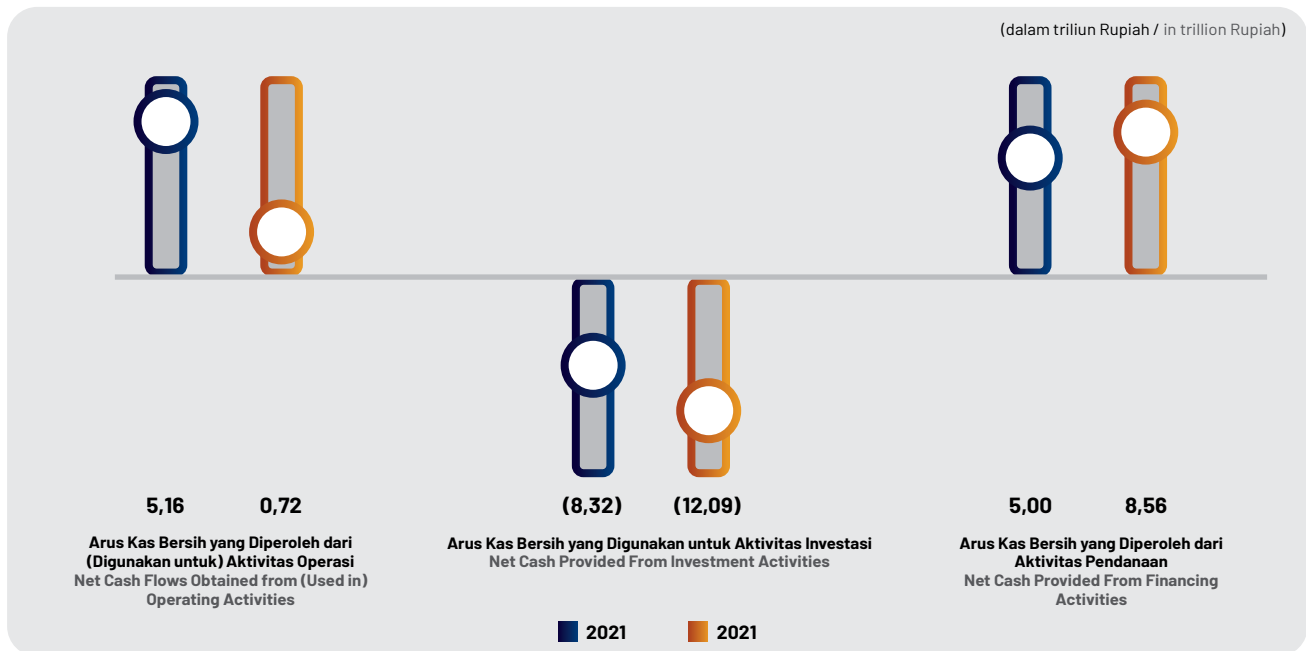
Laporan Arus Kas / Statement of Cash Flow
dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah

Uraian / Description	2022	2021*	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Pembayaran Beban Keuangan / Payment of Finance Cost	(900.937.342)	(869.512.150)	-31.425.192	3,61%
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi / Net Cash Flows Obtained from (Used in) Operating Activities	5.161.260.699	723.272.317	4.437.988.382	613,60%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi / Cash Flows from Investment Activities				
Perolehan Aset Tetap / Acquisition of Fixed Assets	(2.666.090.431)	(2.510.730.937)	-155.359.494	6,19%
Perolehan Hak Pengoperasian Aset Prasarana / Acquisitions of Infrastructure Assets	(2.708.416.050)	(2.490.943.964)	-217.472.086	8,73%
Penambahan Aset Tak berwujud / Addition of Intangible Assets	(79.721.528)	(57.402.693)	-22.318.835	38,88%
Penempatan Uang Muka Setoran Modal / Placement of Capital Deposit Advances	(791.878.657)	(4.453.650.790)	3.661.772.133	-82,22%
Penempatan Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment Placement In Associates and Joint Ventures	(4.900.000)	(4.276.046)	-623.954	14,59%
Penerimaan Bunga Pinjaman dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Receipt of Loan Interest from Associated Entities and Joint Ventures	791.878.657	-	791.878.657	-
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Dividend Receipt from Associates and Joint Ventures	688.262	1.642.492	-954.230	-58,10%
Penempatan Dana Dibatasi Penggunaannya / Placement of Restricted Fund	(2.860.752.138)	(2.625.063.819)	-235.688.319	8,98%
Penarikan Dana Dibatasi Penggunaannya / Withdrawal of Restricted Fund	-	53.723.485	-53.723.485	-
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi / Net Cash Provided From Investment Activities	(8.319.191.885)	(12.086.702.272)	3.767.510.387	-31,17%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan / Cash Flow from Financing Activities				
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek / Short Term Proceeds From Bank Loan	13.706.510.355	6.902.258.308	6.804.252.047	98,58%
Penerimaan Pinjaman Bank / Long Term Proceeds From Bank Loan	2.654.659.751	2.806.736.985	-152.077.234	-5,42%
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek / Short Term Payment of Bank Loans	(14.606.472.528)	(7.657.502.999)	-6.948.969.529	90,75%
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Panjang / Long Term Payment of Bank Loans	(941.505.589)	(381.327.501)	-560.178.088	146,90%
Pembayaran Liabilitas Sewa / Payment of Lease Liabilities	(37.190.355)	(26.886.581)	-10.303.774	38,32%
Penerimaan Obligasi / Bonds Proceeds	1.500.000.000	-	1.500.000.000	-
Penerimaan Sukuk / Sukuk Proceeds	500.000.000	-	500.000.000	-
Pembayaran Obligasi / Bonds Payment	(1.000.000.000)	-	-1.000.000.000	-
Pembayaran Biaya Emisi Obligasi / Payment of Bond Issuance Fees	(5.041.083)	-	-5.041.083	-
Pembayaran Biaya Emisi Sukuk / Payment of Sukuk Issuance Fees	(1.785.917)	-	-1.785.917	-
Penerimaan Penyertaan Modal Negara / Proceeds of State Equity Participation	3.200.000.000	6.900.000.000	-3.700.000.000	-53,62%
Penerimaan Pinjaman Kepentingan Nonpengendali / Proceeds of Non-controlling Interest Loans	33.897.363	-	33.897.363	-
Tambahan Setoran Modal Kepentingan Nonpengendali / Capital Addition of Non-Controlling Interest	-	19.760.000	-19.760.000	-
Pembayaran Dividen Entitas Anak / Payments of Subsidiary Dividend	(298.264)	(198.294)	-99.970	50,42%

Laporan Arus Kas / Statement of Cash Flow
 dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah

Uraian / Description	2022	2021*	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan / Net Cash Provided From Financing Activities	5.002.773.733	8.562.839.918	-3.560.066.185	-41,58%
Penurunan (Kenaikan) Bersih Kas dan Setara Kas / Decrease (Increase) Cash and Cash Equivalents	1.844.842.547	(2.800.590.037)	4.645.432.584	-165,87%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun / Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	3.808.203.932	6.609.296.498	-2.801.092.566	-42,38%
Selisih Kurs Kas dan Setara Kas / Foreign Exchange Rate Cash and Cash Equivalents	42.673.714	(567.340)	43.241.054	-7621,72%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun / Cash and Cash Equivalents at the End of Year	5.695.720.193	3.808.139.121	1.887.581.072	49,57%
Rekonsiliasi Jumlah Kas dan Setara Kas / Reconciliation of Total Cash and Cash Equivalent				
Jumlah yang Dilaporkan pada Laporan Arus Kas / Amounts Reported on the Statement of Cash Flows	5.695.720.193	3.808.139.121	1.887.581.072	49,57%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kas dan Setara Kas / Allowance for Impairment Losses on Cash and Cash Equivalents	-	64.811	-64.811	-
Jumlah yang Dilaporkan pada Laporan Posisi Keuangan / Amount as Reported in Statement of Financial Position	5.695.720.193	3.808.203.932	1.887.516.261	49,56%

*) Disajikan kembali. / Restated.

Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statement of Cash Flows

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun 2022 adalah sejumlah Rp5,16 miliar, meningkat 613,60% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sejumlah Rp732,27 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan dan penerimaan atas restitusi pajak dari pemerintah.

Cash Flow from Operating Activities

The Company's net cash flow from operating activities for 2022 amounted to Rp5.16 billion, increased by 613.60% compared to 2021 at Rp732.27 billion. This was due to an increase in cash receipts from customers and receipts of tax refunds from the government.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun 2022 mencapai Rp8,31 triliun, menurun 31,17% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp12,09 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pekerjaan investasi yang masih dalam tahap pengerjaan.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun 2022 adalah sejumlah Rp5,00 triliun, menurun 41,58% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp8,56 triliun. Hal ini disebabkan adanya pembayaran pokok pinjaman jangka pendek dan terdapat pembayaran pokok obligasi I seri A.

Cash Flow from Investment Activities

The Company's net cash flow from investment activities for 2022 reached Rp8.31 trillion, decreased by 31.17% compared to 2021 at Rp12.09 trillion. This was due to the investment work that is still under construction.

Cash Flow from Financing Activities

The Company's net cash flow from financing activities for 2022 was Rp5.00 trillion, decreased by 41.58% compared to 2021 at Rp8.56 trillion. This was due to the payment of short-term loan principal and the principal payment of bonds I series A.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Ability to Pay Debt and Debt Collectibility

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar utang dapat dilihat melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan KAI dalam memenuhi liabilitas jangka pendek antara lain dapat diukur melalui rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan cara membandingkan kas yang dimiliki dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas)

Tingkat kemampuan KAI dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dapat diukur dari tingkat likuiditas yang dimiliki. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas adalah rasio lancar yang membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas lancar.

Ability to Pay Debt

The ability to pay debts could be seen through the liquidity ratio and solvency ratio. Liquidity ratios that show KAI's ability to meet short-term liabilities since it could be measured through cash ratios and current ratios. The cash ratio was calculated by comparing the cash on hand with the total current liabilities, while the current ratio was calculated by comparing the total current assets with the total current liabilities.

Ability to Pay Short-Term Debt (Liquidity)

The level of KAI's ability to fulfill obligations that had to be fulfilled immediately could be measured by the level of liquidity it has. The indicator used to measure the level of liquidity was the current ratio which compares current assets with current liabilities of KAI.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek / Ability to Pay Short-Term Debt
Dalam persen/ in percentage

Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan 2021- 2022/ Growth in 2021-2022
Rasio kas / Cash ratio	57,20	39,78	17,42%
Rasio lancar / Current ratio	154,02	101,38	52,64%

Pada 2022, rasio kas KAI adalah sebesar 57,20%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 39,78%. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya penerimaan pendapatan dari pelanggan dan restitusi pajak dari pemerintah.

In 2022, KAI recorded cash ratio of 57.20%, increased compared to 2021 at 39.78%. This was due to increased revenue receipts from customers and tax refunds from the government.

Pada 2022, rasio lancar KAI adalah sebesar 154,02%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 101,38%. Hal tersebut disebabkan oleh penerimaan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

In 2022, KAI recorded current ratio of 154.02%, increased compared to 2021 at 101.38%. This was due to the receipt of additional State Capital Investment (PMN) for the Jakarta-Bandung Fast Train (KCJB) project.

Dalam rangka mengelola risiko likuiditas, Perseroan berupaya untuk menjaga kecukupan kas dan setara kas serta memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

In order to manage liquidity risk, the Company strives to maintain sufficient cash and cash equivalent and monitor cash flow forecasts and actual cash flows as well as adjust the maturity profile of financial assets and liabilities.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas)

Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan KAI dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.

Ability to Pay Long-Term Debt (Solvability)

The solvency ratio was a ratio that showed KAI's ability to pay its long-term obligations.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang / Ability to Pay Long-Term Debt			
Dalam persen/ in percentage			
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan 2021-2022/ Growth in 2021-2022
<i>Return on Equity (ROE)</i>	11,90	(3,10)	15%
<i>Return on Investment (ROI)</i>	7,60	3,19	4,41%
<i>Return on Asset (ROA)</i>	2,49	(0,58)	3,07%

Pada tahun 2022, ROE KAI adalah sebesar 11,90%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar minus 3,10%. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya kinerja Perseroan sehingga laba setelah pajak Perseroan meningkat.

In 2022, KAI recorded ROE of 11.90%, an increase compared to minus 3.10% in 2021. This was due to the improvement of the Company's performance that resulted in the increase of the Company's profit after tax.

Pada tahun 2022, ROI KAI adalah sebesar 7,60%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3,19%. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya kinerja Perseroan sehingga terjadi kenaikan EBIT.

In 2022, KAI recorded ROI of 7.60%, increased compared to 2021 at 3.19%. This was due to the improvement of the Company's performance that resulted in the increase of EBIT.

Pada tahun 2022, ROA KAI adalah sebesar 2,49%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar minus 0,58%. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya kinerja Perseroan sehingga laba setelah pajak Perseroan meningkat.

In 2022, KAI recorded ROA of 2.49%, increased compared to minus 0.58% in 2021. This was caused by the improvement of the Company's performance that resulted in the increase of the Company's profit after tax.

Kemampuan Membayar Utang dari Efek-Efek yang Diterbitkan

Kualitas efek sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan penerbit efek dalam membayar efeknya pada saat jatuh tempo dan kemampuannya membayar bunga atau kupon selama jangka waktu penerbitan efek tersebut. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas Perusahaan adalah hasil peringkat yang ditentukan oleh Lembaga Pemeringkat Independen.

Ability to Pay Debt From Securities Issued

The quality of securities is largely determined by the ability of the issuing company to pay for the securities at maturity and their ability to pay interest or coupons during the issuance period of the securities. One of the indicators that can be used to determine the quality of the Company is the rating result determined by the Independent Rating Agency.

Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), pada posisi 31 Desember 2022 Perseroan memperoleh peringkat $_{id}AA+$ (*Double A Plus, Negative Outlook*) untuk Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017, Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2019, dan Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022, serta peringkat $_{id}AA+(sy)$ (*Double A Plus Syariah, Negative Outlook*) untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022. Peringkat tersebut menunjukkan bahwa Perseroan memiliki kemampuan emiten untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan emiten lainnya di Indonesia adalah sangat kuat. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

Based on the results of the rating conducted by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), on December 31, 2022 the Company received an $_{id}AA+$ rating (*Double A Plus, Negative Outlook*) for Kereta Api Indonesia Bonds I Year 2017, Kereta Api Indonesia Bonds I Year 2019, and Continuing Bonds I Kereta Api Indonesia Phase I Year 2022, as well as $_{id}AA+(sy)$ (*Double A Plus Syariah, Negative Outlook*) rating for Kereta Api Indonesia Sustainable Sukuk Ijarah I Phase I Year 2022. The rating indicated that the Company had the issuer's ability to meet long-term financial commitments of the debt securities, compared to other issuers in Indonesia, was very strong. The plus sign (+) indicated that the rating given was relatively strong and above the average for the category concerned.

Kemampuan Membayar Utang dari Efek-Efek yang Diterbitkan / Ability to Pay Debt from Securities Issued		
Uraian / Description	Peringkat / Rating	
	2022	2021
Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri A / Bond I Kereta Api Indonesia 2017 Series A	$_{id}AA+$	$_{id}AA+$
Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B / Bond I Kereta Api Indonesia 2017 Series B	$_{id}AA+$	$_{id}AA+$
Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A / Bond II Kereta Api Indonesia 2019 Series A	$_{id}AA+$	$_{id}AA+$
Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri B / Bond II Kereta Api Indonesia 2019 Series B	$_{id}AA+$	$_{id}AA+$
Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A / Kereta Api Indonesia Sustainable Bonds I Phase I 2022 Series A	$_{id}AA+$	
Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri B / Kereta Api Indonesia Sustainable Bonds I Phase I 2022 Series B	$_{id}AA+$	
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A / Kereta Api Indonesia Sustainable Sukuk Ijarah I Phase I 2022 Series A	$_{id}AA+(sy)$	
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri B / Kereta Api Indonesia Sustainable Sukuk Ijarah I Phase I 2022 Series B	$_{id}AA+(sy)$	

Kolektibilitas Piutang

Untuk menjaga modal kerjanya pada tingkat yang aman, pengelolaan piutang Perseroan merupakan salah satu elemen yang penting. *Collection period* mengukur waktu yang dibutuhkan Perseroan untuk menerima pembayaran atas tagihan dari suatu usaha. Semakin rendah *collection period* semakin baik.

Skor tertinggi diperuntukkan untuk kinerja dengan *collection period* sama atau kurang dari 60 hari. *Collection period* tahun 2022 mencapai 22,30 hari, menurun dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 25,27 hari. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan.

Receivable Collectibility

To maintain working capital at a safe level, the management of the Company's receivables is an important element. Collection period measures the time it took the Company to receive payment for invoices from a business. The lower the collection period the better.

The highest score is for performance with a collection period equal to or less than 60 days. The collection period in 2022 reached 22.30 days, decreased compared to 2021 which reached 25.27 days. This was due to an increase in acceptance of receivables from customers.

Dengan penurunan *collection period* tersebut, manajemen berpendapat bahwa tingkat kolektibilitas Perseroan menjadi semakin baik pada 2022.

With the decrease in the collection period, the Management believes that the Company's collectability level improved in 2022.

Daftar Umur Piutang / Receivable Age List dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan 2021-2022 / Growth in 2021-2022	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Berdasarkan umur: / By age:				
0 - 30 hari / 0 - 30 days	1.190.788.301	834.132.042	356.656.259	42,76%
31 - 90 hari / 31 - 90 days	113.776.059	203.487.603	-89.711.544	-44,09%
91 - 360 hari / 91 - 360 days	103.240.557	99.884.863	3.355.694	3,36%
> 360 hari / > 360 days	264.576.910	242.917.453	21.659.457	8,92%
Jumlah / Total	1.672.381.827	1.380.421.961	291.959.866	21,15%
Dikurangi: / Less				
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment Losses	(266.043.760)	(305.323.488)	39.279.728	-12,86%
Neto / Net	1.406.338.067	1.075.098.473	331.239.594	30,81%

STRUKTUR MODAL

Capital Structure

Perincian Struktur Modal

Struktur modal adalah perbandingan antara modal asing atau utang jangka panjang (*long-term liabilities*) dan modal sendiri. Struktur modal KAI terdiri dari pinjaman, yang meliputi pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun, utang obligasi yang jatuh tempo dalam satu tahun, pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pinjaman jangka panjang, dan utang obligasi. Rincian struktur modal KAI pada tahun 2022 dan perbandingannya dengan tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Details of Capital Structure

Capital structure is a comparison between foreign capital or long-term liabilities and own capital. KAI's capital structure consists of loans, which include short-term loans, long-term loans that mature within one year, bonds payable that mature within one year, National Economic Recovery Program (PEN) loans, long-term loans, and bonds payable. Details of KAI's capital structure in 2022 and its comparison with 2021 are presented in the following table:

Perincian Struktur Modal / Details of Capital Structure dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan 2021-2022 / Growth in 2021-2022	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Pinjaman / Liabilities				
Pinjaman Jangka Pendek / Current Liabilities	1.760.000.000	2.659.962.173	-899.962.173	-33,83%
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun / Non-Current Liabilities with Maturity within One Year				
Pinjaman Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	1.196.958.601	934.991.570	261.967.031	28,02%
Pinjaman Program PEN / PEN Program Loans	437.500.000	-	437.500.000	-
Utang Obligasi / Bonds Payable	-	999.447.166	-999.447.166	-

Perincian Struktur Modal / Details of Capital Structure dalam ribuan rupiah / in thousand rupiah				
Uraian / Description	2022	2021	Pertumbuhan 2021-2022 / Growth in 2021-2022	
			Nominal / Nominal	Presentase / Percentage
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun / Long-Term Liabilities After Deducting The Maturity Portion Within One Year				
Pinjaman Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	18.282.631.817	16.501.746.512	1.780.885.305	10,79%
Pinjaman Program PEN / PEN Program Loans	3.062.500.000	3.500.000.000	-437.500.000	-12,50%
Utang Obligasi / Bonds Payable	4.490.760.381	2.993.800.573	1.496.959.808	50,00%
Sukuk	498.307.111	-	498.307.111	-
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	29.728.657.910	27.589.947.994	2.138.709.916	7,75%
Jumlah Ekuitas / Total Equity	29.080.184.305	23.411.740.325	5.668.443.980	24,21%
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas / Loan to Equity Ratio	102,23%	148,70%		

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Dalam mengelola permodalannya, Perseroan senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko.

Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 169 Tahun 2015 Pasal 2 Ayat 1, perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar 4:1 atau maksimal 400%. Manajemen menilai bahwa struktur modal Perseroan di tahun 2022 semakin baik dengan menurunnya Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

KAI menetapkan sejumlah rasio modal sesuai proporsi terhadap risiko. Perseroan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi, kebutuhan modal masa depan, profitabilitas baik masa sekarang maupun yang akan datang, perkiraan arus kas operasi, estimasi belanja modal, proyeksi peluang investasi yang strategis, dan karakteristik risiko aset yang mendasari.

Di samping itu, kebijakan Manajemen atas struktur modal juga didasarkan pada Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Republik

Management Policy on Capital Structure

In managing its capital, KAI always maintain business continuity and maximize benefits for shareholders and other stakeholders, and to provide adequate returns to shareholders by determining prices for products and services that are commensurate with risk level.

The Company actively and regularly reviews and manages its capital to ensure optimal capital structure and returns for shareholders by considering the efficient use of capital based on operating cash flows and capital expenditures, as well as considering future capital requirements.

Based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 169 of 2015 Article 2 Paragraph 1, the ratio between debt and capital is set at a maximum of 4:1 or a maximum of 400%. Management assessed that the Company's capital structure in 2022 was better with the decrease in Loan to Equity Ratio.

Basis for Capital Structure Policy Selection

KAI determines a number of capital ratios according to the proportion to risk. The Company manages the capital structure and makes adjustments by taking into account changes in economic conditions, future capital requirements, current and future profitability, estimated operating cash flows, estimated capital expenditures, projected strategic investment opportunities, and the risk characteristics of the underlying assets.

In addition, Management's policy on capital structure is also based on Article 18 paragraph 1 of the Law of the Republic

Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan keputusan tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan. Adapun dasar perhitungan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 169 Tahun 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

of Indonesia Number 36 of 2008 concerning the Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax, which states that the Minister of Finance has the authority to issue decisions regarding the size of the ratio between debt and company capital that can be justified for the purpose of calculating Income Tax. The basis for calculating the size of the comparison between the company's debt and capital refers to the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 169 of 2015 concerning Determining the Amount of Comparison between Company Debt and Capital for the Purposes of Income Tax Calculation.

IKATAN MATERIAL ATAS INVESTASI BARANG MODAL

Material Commitments for Capital Expenditure

Nama Pihak yang Melakukan Ikatan

The Name of Commitment Executor

No.	Nama Perusahaan / Company Name	Jenis / Type	Bentuk Kerja Sama / Cooperation
1.	PT Industri Kereta Api (Persero)	BUMN / SOE	Pengadaan pembelian sarana perkeretaapian / Procurement of purchases of railway facilities
2.	PT Adhi Karya Tbk	BUMN / SOE	Perjanjian untuk prasarana LRT Jabodebek / Procurement of purchases of railway facilities
3.	Progress Rail Locomotif Inc	Swasta / Private	Pengadaan pembelian Lokomotif CC205. / Procurement of purchase of CC205 Locomotive.

Tujuan Ikatan

KAI membutuhkan investasi, baik di bidang sarana, prasarana, maupun fasilitas dengan menjalin kerja sama dengan beberapa pihak yang telah disebutkan di atas untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Investasi dititikberatkan untuk pengembangan angkutan barang baik di Jawa maupun Sumatra, selain secara bertahap memperbaiki kereta penumpang jarak jauh. ikatan material termasuk perjanjian-perjanjian pengadaan sarana, prasarana dan fasilitas yang dilakukan KAI dan entitas anak.

Purpose of the Commitment

KAI requires investment, both in the field of facilities, infrastructure and facilities by collaborating with several parties mentioned above to achieve the performance targets. Investments are focused on the development of freight transport in both Java and Sumatra, in addition to gradually updating long-distance passenger trains. Material commitments including agreements for procurement of facilities, infrastructure and facilities carried out by KAI and its subsidiaries.

Sumber Dana dan Mata Uang yang Menjadi Denominasi

Sumber dana yang digunakan untuk memenuhi ikatan di atas berasal dari sumber internal maupun eksternal KAI. Adapun, mata uang yang menjadi denominasi adalah rupiah.

Source of Funds and Currency Denomination

The source of funds used to fulfill the above commitment comes from KAI's internal and external sources. The currency that is denominated is rupiah.

Langkah yang Direncanakan untuk Melindungi Risiko dari Posisi Mata Uang Asing

Perseroan menanggung risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi dan saldo yang didenominasi dalam mata uang selain Rupiah. Mata uang yang menimbulkan risiko ini adalah terutama Dolar AS. Risiko nilai tukar mata uang asing dikelola sebaik mungkin dengan lindung nilai alami, yaitu dengan menyeimbangkan nilai kekayaan dan kewajiban masing-masing mata uang.

Planned Measures to Protect the Risks of Foreign Currency Positions

The Company bears the risk of foreign exchange rates on transactions and balances denominated in currencies other than Rupiah. The currency that poses this risk is primarily the US Dollar. Foreign currency exchange risk is best managed by natural hedging, namely by balancing the assets and liabilities of each currency.

Untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko fluktuasi kurs terhadap Dolar AS, Perseroan mengusahakan, untuk memastikan bahwa sebagian besar pembelian dan penjualan dilakukan dalam mata uang yang sama serta dilakukan pada saat yang hampir bersamaan dan mengimplementasikan kebijakan di mana utang dalam mata uang asing yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha dilakukan dalam mata uang yang sama (lindung nilai alami). Manajemen juga memantau untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan semaksimal mungkin.

Selain itu, KAI memantau secara ketat atas fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perseroan pada waktu yang tepat.

To anticipate and reduce the risk of fluctuations in the exchange rate against the US Dollar, the Company strives to ensure that most purchases and sales are made in the same currency and are carried out at almost the same time and implement a policy whereby debt in foreign currency used to finance business activities held in the same currency (natural hedge). Management also monitors to ensure that the policy is implemented to the fullest extent possible.

In addition, KAI closely monitors fluctuations in foreign currency exchange rates, so that it can take the most profitable steps for the Company at the right time.

INVESTASI BARANG MODAL

Capital Expenditure Investment

Investasi barang modal (*capital expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau untuk menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa yang akan datang.

Capital expenditure is an activity of disbursing funds used to purchase a number of fixed assets or to increase the value of fixed assets which are expected to provide value in the future.

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

dalam ribuan rupiah

Types and Investment Value of Capital Goods

in thousand rupiah

Jenis Barang Modal / Type of Capital Goods	Nilai Investasi / Investment Value		Perubahan / Changes	
	2022	2021	Nominal	Persentase / Percentage
Sarana / Facilities				
Lokomotif / Locomotive	578.661.640	1.154.425.515	-575.763.875	-49,87
Kereta / Train	166.049.585	-	166.049.585	-
Gerbong / Wagon	629.851.194	-	629.851.194	-
Prasarana / Infrastructure				
Tanah / Land	-	-	-	-
Bangunan / Building	32.951.717	5.664.386	27.287.331	481,74
Prasarana dan Instalasi / Infrastructure and Installation	17.016.806	9.165.749	7.851.057	85,66
Fasilitas / Facilities				
Mesin dan Peralatan / Machinery and Equipment	373.285.448	208.615.187	164.670.261	78,93
Kendaraan / Vehicle	4.903.269	3.046.774	1.856.495	60,93
Inventaris / Inventory	6.677.713	5.834.259	843.454	14,46
Aset Tetap dalam Penyelesaian / Fixed Assets in Construction	1.000.846.786	1.226.695.676	-225.848.890	-18,41
Jumlah / Total	2.810.244.158	2.613.447.546	196.796.612	7,53

INFORMASI KEUANGAN YANG TELAH DILAPORKAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Financial Information Reported that Contains Extraordinary and Rare Events

Sepanjang tahun 2022, KAI tidak memiliki informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.

Throughout 2022, KAI did not have financial information that has been reported containing extraordinary and rare events.

KOMPONEN-KOMPONEN SUBSTANSI DARI PENDAPATAN DAN BEBAN LAINNYA

Substance Components of Other Income and Expenses

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat komponen-komponen dari pendapatan dan beban lainnya yang nilainya sama atau lebih 20% dari total nilai pendapatan dan beban lainnya.

Throughout 2022, there were no components of other income and expenses whose value was equal to or more than 20% of the total value of other income and expenses.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH PERSEROAN

The Impact of Changes in Prices on the Company's Sales or Net Income

Sepanjang tahun 2022, KAI tidak terkena dampak yang signifikan terhadap perubahan harga penjualan atau pendapatan bersih.

Throughout 2022, KAI was not affected significantly by changes in sales prices or net income.

PENINGKATAN/PENURUNAN MATERIAL DARI PENJUALAN/PENDAPATAN BERSIH

Material Increase/Decrease from Net Sales/Income

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat peningkatan/penurunan material dari penjualan/pendapatan bersih.

Throughout 2022, there was no material increase/decrease in sales/net income.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Material Information and Facts After the Accountant's Report Date

Terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan, dengan perincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Akta Perusahaan No. 122 tanggal 11 Januari 2023 dibuat oleh Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H. Notaris di Bandung dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0008225, penyertaan modal negara tanggal 31 Desember 2022

Material information and facts that occurred after the date of the accountant's report are described as follows:

- Based on Company Deed No. 122 dated January 11, 2023 made by Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H. Notary in Bandung and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights with Decree No. AHU-AH.01.03-0008225, state equity participation on December 31, 2022 amounting to Rp3,200,000,000 has

sebesar Rp3.200.000.000 telah disahkan menjadi setoran modal sehingga jumlah saham ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi 22.368.743 saham atau setara dengan Rp22.368.743.000

been approved as a capital injection so that the number of shares issued and paid up by the Company becomes 22,368,743 shares or equivalent to Rp22,368,743,000

- Pada tanggal 08 Februari 2023, Perusahaan dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk menandatangani berita acara kesepakatan No.KL.707/II/9/KA-2023 tentang penetapan tarif angkutan batu bara relasi Tanjung Enim Baru-Tarahan dan relasi Tanjung Enim Baru-Kertapati untuk periode tahun 2023 sampai 2027.
- Pada tanggal 15 Februari 2023, Direktur Pengelolaan Sarana Perusahaan Sdr. Eko Purwanto telah berakhir sesuai ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-7/MBU/09/2022.
- Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Line No (15) 43 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 08 Maret 2023 untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 24 Februari 2024.
- Pada tanggal 10 Maret 2023, Perusahaan memberikan penyertaan modal kepada PT PSBI sebesar Rp2.030.804.000 yang bersumber dari PMN TA 2022 dengan skema Uang Muka Setoran Modal (UMSM) dalam rangka pendanaan tahap pertama cost overrun proyek KCJB.
- Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak No. S-00163/RIKSIS/KPP.1904/2023 tanggal 21 Maret 2023 dan surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar No. 00022/406/21/093/23 tanggal 17 April 2023 atas hasil pemeriksaan pajak badan tahun 2021 sebagai berikut:
 1. Akumulasi rugi fiskal tahun 2021 adalah sebesar Rp990.200.401.926,-;
 2. Lebih bayar PPh Badan tahun 2021 sebesar Rp67.009.623.947,-.
- Pada 12 April 2023, Obligasi I seri B, Obligasi II seri A dan B serta Obligasi Berkelanjutan I Perusahaan mendapatkan peringkat "AAA" dari PEFINDO untuk periode 11 April 2023 hingga 1 April 2024.
- On February 8, 2023, the Company and PT Bukit Asam (Persero)Tbk signed the minutes of agreement No.KL.707/II/9/KA-2023 regarding the determination of coal transportation rates for the Tanjung Enim Baru-Tarahan and Tanjung Enim Baru relations -Kertapati for the period 2023 to 2027.
- On February 15, 2023, Director of Company Facility Management, Mr. Eko Purwanto has ended in accordance with the provisions of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-11/MBU/07/2021 concerning Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of Directors of State-Owned Enterprises as amended by Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER- 7/MBU/09/2022.
- The Company has signed a Working Capital Credit Agreement Amendment Agreement Line No (15) 43 with PT Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk. on March 8, 2023 to extend the term of the loan until February 24, 2024.
- On March 10, 2023, the Company provided equity participation to PT PSBI in the amount of Rp2,030,804,000 sourced from PMN FY 2022 with the Capital Deposit Advance (UMSM) scheme in the framework of funding the first phase of the KCJB project overrun cost.
- The Company received Tax Audit Result Notification Letter No. S-00163/RIKSIS/KPP.1904/2023 dated 21 March 2023 and Tax Overpayment Assessment Letter No. 00022/406/21/093/23 dated April 17, 2023 on the results of the 2021 corporate tax audit as follows:
 1. The accumulated fiscal loss for 2021 is Rp990,200,401,926,-;
 2. Overpayment of Corporate Income Tax in 2021 amounting to Rp67,009,623,947,-.
- On April 12, 2023, Bonds I series B, Bonds II series A and B and the Company's Continuing Bonds I received an "AAA" rating from PEFINDO for the period April 11, 2023 to April 1, 2024.

- Pada 12 April 2023, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Perusahaan mendapatkan peringkat “AAA” dari PEFINDO untuk periode 11 April 2023 hingga 1 April 2024.
- Perusahaan telah mengangkat Sdr. Raden Agus Dwinanto Budiadji ditugaskan sebagai Plt. Executive Vice President of Corporate Secretary menggantikan Sdr. Emanuel Kurniawan Kriswijayanto selaku Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) Executive Vice President of Corporate Secretary, efektif sejak 18 April 2023 sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor: SK.U/KH.608/IV/1/ SAP/KA-2023 tanggal 18 April 2023.
- Anggaran Dasar Railink telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah menurut Keputusan Para Pemegang Saham yang telah disahkan dengan Akta Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., No. 5 tanggal 27 Januari 2023 mengenai Perubahan Modal Dasar dan Modal Disetor kepada Railink. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan
- Perubahan Anggaran Dasar dengan Surat Keputusan No. AHU-0006548.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023.
- Modal dasar Railink sebesar Rp879.400.000, ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 879.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 per saham atau sebesar Rp879.400.000 dengan komposisi sebagai berikut:
 1. Perusahaan memiliki 60,00% atau sebanyak 527.640 saham dengan nilai sebesar Rp527.640.000.
 2. PT Angkasa Pura II (Persero) memiliki 40,00% atau sebanyak 351.760 saham dengan nilai sebesar Rp351.760.000.
- On April 12, 2023, the Company’s Continuing Sukuk Ijarah I received an “AAA” rating from PEFINDO for the period April 11, 2023 to April 1, 2024.
- The Company has appointed Mr. Raden Agus Dwinanto Budiadji was assigned as Plt. Executive Vice President of Corporate Secretary replacing Mr. Emanuel Kurniawan Kriswijayanto as the Officer in Charge (PYMT) Executive Vice President of Corporate Secretary, effective April 18, 2023 as stated in Decree No. SK.U/KH.608/IV/1/SAP/KA-2023 dated April 18, 2023 .
- Railink’s Articles of Association have been amended several times, the latest amendment being according to the Resolution of the Shareholders which was ratified by Deed of Notary Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., No. 5 dated January 27, 2023 concerning Changes in Authorized Capital and Paid-up Capital to Railink. This deed of amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights based on the Approval Decree
- Amendments to the Articles of Association with Decree No. AHU-0006548.AH.01.02.Tahun 2023 dated January 31, 2023.
- Railink’s authorized capital of Rp879,400,000, issued and fully paid up to 879,400 shares with a nominal value of Rp1,000 per share or Rp879,400,000 with the following composition:
 1. The Company owns 60.00% or 527,640 shares with a value of Rp527,640,000.
 2. PT Angkasa Pura II (Persero) owns 40.00% or 351,760 shares with a value of Rp351,760,000.

PROSPEK USAHA KE DEPAN

Future Business Prospects

Proyeksi Makroekonomi

Berdasarkan Laporan *World Economic Outlook* (WEO) yang dirilis oleh *International Monetary Fund* (IMF) edisi Januari 2023, tingkat pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 diestimasikan mencapai 2,9%. Bahkan, Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul “*Is a Global Recession Imminent?*” memprediksi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global pada tahun 2023 mendatang.

Macro-economy Projections

Based on the *World Economic Outlook* (WEO) Report released by the January 2023 edition of the *International Monetary Fund* (IMF), the global economic growth rate for 2023 is estimated to reach 2.9%. In fact, the World Bank in its report entitled “*Is a Global Recession Imminent?*” predicts the possibility of a global economic recession in 2023.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui *press release* berjudul “Perekonomian dunia diprediksi akan dihantam resesi tahun 2023, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur?” telah melakukan analisis terkait beberapa faktor pemicu resesi ekonomi global di tahun depan, antara lain:

1. Pandemi Covid-19

Walaupun sudah mulai mereda dan banyak negara yang telah membebaskan warganya untuk beraktivitas seperti biasa, namun banyak negara masih melakukan pemulihan atas aktivitas ekonomi yang sempat kontraksi selama pandemi berlangsung. Pada saat bersamaan, banyak negara juga melakukan proteksi atas hasil pangan untuk mengantisipasi wabah Covid-19 yang berkepanjangan dan berakibat pada meningkatnya harga pangan karena kurangnya suplai.

2. Perang Rusia-Ukraina

Perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak bulan Februari lalu, telah menghilangkan PDB global hingga USD2,8 triliun. Perang Rusia-Ukraina mengganggu rantai pasok global sehingga menimbulkan krisis, terutama di sektor pangan dan energi, yang pada akhirnya mengakselerasi laju inflasi. Perang Rusia-Ukraina merupakan faktor utama penyebab terjadinya resesi ekonomi global yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023 mendatang.

3. Tingginya tingkat infasi

Dalam laporan WEO edisi Oktober 2022, IMF memproyeksikan laju inflasi global akan menurun pada tahun 2023 hingga 6,5 persen. Inflasi Indonesia menurut Bank Indonesia diproyeksikan akan ikut menurun dan kembali ke dalam sasaran $3,0 \pm 1$ persen pada tahun 2023. Menyikapi hal ini, beberapa negara sudah menarik insentif moneter dan fiskalnya sebagai upaya mengatasi risiko dari inflasi yang terus meningkat.

4. Kenaikan suku bunga acuan

Bank sentral di seluruh dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga acuan sejak semester kedua tahun ini, seperti Bank of England dan the Federal Reserve (The Fed). Tekanan inflasi di negara Barat dan AS membuat bank sentral terus menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Demikian halnya kenaikan suku bunga acuan di negara-negara anggota G20 seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan secara bersamaan yang dilakukan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat menyebabkan terjadinya resesi ekonomi global.

The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia through a *press release* entitled “The world economy is predicted to be hit by a recession in 2023, what about infrastructure development?” has conducted an analysis of several factors triggering a global economic recession in the next year, including:

1. Covid-19 Pandemic

Even though it has started to subside and many countries have freed their citizens to carry out their activities as usual, many countries are still recovering from economic activity that had contracted during the pandemic. At the same time, many countries are also protecting food yields to anticipate a prolonged Covid-19 outbreak which will result in rising food prices due to a lack of supply.

2. Russo-Ukrainian War

The Russo-Ukrainian war, which has been going on since last February, has eliminated global GDP by up to USD 2.8 trillion. The Russo-Ukrainian war disrupted global supply chains, causing crises, especially in the food and energy sectors, which in turn accelerated the rate of inflation. The Russo-Ukrainian War is the main factor causing the global economic recession which is predicted to occur in 2023.

3. High inflation rate

In the October 2022 edition of the WEO report, the IMF projected that the global inflation rate would decline in 2023 to 6.5 percent. According to Bank Indonesia, Indonesia’s inflation is projected to also decline and return to the target of 3.0 ± 1 percent in 2023. In response to this, several countries have withdrawn their monetary and fiscal incentives as an effort to overcome risks from rising inflation.

4. Increase in benchmark interest rate

Central banks around the world have simultaneously raised their benchmark interest rates since the second half of this year, such as the Bank of England and the Federal Reserve (The Fed). Inflationary pressure in Western countries and the US forced the central bank to continue raising its benchmark interest rate to control inflation. Likewise, the increase in benchmark interest rates in G20 member countries such as Brazil, India and Indonesia. The increase in benchmark interest rates simultaneously by central banks around the world will have an impact on economic growth and can cause a global economic recession.

5. Penurunan permintaan global

Permintaan global yang mengalami penurunan akibat lesunya daya beli berdampak pada menurunnya aktivitas produksi. Hal ini menunjukkan kelesuan ekonomi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara global akan berkontraksi.

Dari beberapa faktor pemicu diatas, resesi ekonomi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Selain karena meningkatnya harga-harga secara tajam sehingga menyebabkan ekonomi menjadi stagnan atau dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi, resesi ekonomi juga bisa terjadi karena turunnya harga-harga atau deflasi.

Meski demikian, kondisi perekonomian Indonesia diprediksi masih kuat menghadapi gejolak ekonomi global yang mengarah pada resesi ekonomi. Bank Indonesia (BI) melalui *press release* berjudul "Bank Indonesia Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5,3% dan Inflasi Akan Kembali ke Dalam Sasaran 3,0±1% pada Tahun 2023" memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia yang solid pada 2023 pada kisaran 4,5-5,3%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh peningkatan konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

Pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi Covid-19 oleh pemerintah pada akhir tahun 2022 menyebabkan tingkat mobilitas masyarakat semakin meningkat, yang secara tidak langsung akan berdampak juga pada aktivitas perekonomian yang semakin membaik. Menurut Supply Chain Indonesia (SCI), kontribusi lapangan usaha atau sektor transportasi dan pergudangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan menembus angka Rp1.090,2 triliun pada tahun 2023 mendatang. Pertumbuhan tersebut selain disebabkan oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang berdampak positif pada kinerja industri transportasi, juga dipengaruhi oleh pulihnya aktivitas industri dan perdagangan yang berdampak positif pada arus perpindahan barang dan rantai pasokan.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan menurun dan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023, seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (*imported inflation*) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang *front loaded, pre-emptive*, dan *forward looking*. Koordinasi kebijakan yang erat dengan

5. Decline in global demand

Global demand, which experienced a decline due to sluggish purchasing power, resulted in a decline in production activity. This shows the economic sluggishness and causes global economic growth to contract.

From the triggering factors above, an economic recession can lead to a simultaneous decline in all economic activities such as employment, investment, and company profits. Aside from the sharp rise in prices causing the economy to stagnate or in a process known as stagflation, an economic recession can also occur due to falling prices or deflation.

Nevertheless, Indonesia's economic condition is predicted to remain strong in the face of global economic turmoil which leads to an economic recession. Bank Indonesia (BI) through a press release entitled "Bank Indonesia Projects 4.5-5.3% Economic Growth and Inflation Will Return to the 3.0 ± 1% Target in 2023" projects Indonesia's solid national economic growth in 2023 on range of 4.5-5.3%. The projected economic growth is supported by increased private consumption, investment, and continued positive export performance amidst slowing global economic growth.

The government's revocation of the Community Activity Restrictions (PPKM) policy related to the Covid-19 pandemic by the government at the end of 2022 has caused the level of community mobility to increase, which will indirectly have an impact on improving economic activity. According to Supply Chain Indonesia (SCI), the contribution of the business sector or the transportation and warehousing sector to the Gross Domestic Product (GDP) will exceed Rp1,090.2 trillions in 2023. The transportation industry was also affected by the recovery in industrial and trade activities which had a positive impact on the movement of goods and the supply chain.

Consumer Price Index (CPI) inflation is expected to decline and return to the target of 3.0 ± 1% in 2023, with core inflation returning earlier in the first half of 2023, along with imported inflation in the Rupiah exchange rate. stability and a front-loaded, pre-emptive and forward-looking monetary policy response. Close policy coordination with the Central and Regional Governments through the Central and Regional

Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi. Sinergi dan inovasi merupakan kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2023 dan 2024 yang akan melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi.

Sementara itu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, pemerintah memperkirakan *lifting* minyak akan mencapai 660 ribu barel per hari (bph). Adanya ancaman resesi global turut memproyeksikan penurunan harga minyak mentah Amerika Serikat yang rata-rata mencapai USD84,84 per barel pada tahun 2023. Sedangkan harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berkisar pada USD90 per barel.

Dalam rangka menjaga ketahanan perekonomian Indonesia, pemerintah menekankan sinergi dan inovasi sebagai kunci untuk menghadapi gejolak global. Optimisme terhadap pemulihan ekonomi perlu terus diperkuat dengan tetap mewaspadaai risiko dari ketidakpastian global, termasuk risiko stagflasi (perlambatan ekonomi dan inflasi tinggi), bahkan resesi (resesi ekonomi dan inflasi tinggi). Hal ini mengingatkan risiko koreksi pertumbuhan ekonomi dunia dan berbagai negara dapat terjadi apabila tingginya fragmentasi politik dan ekonomi terus berlanjut, serta pengetatan kebijakan moneter memerlukan waktu yang lebih lama untuk mampu menurunkan inflasi di masing-masing negara.

Stabilitas eksternal akan tetap terjaga, transaksi berjalan diperkirakan berada pada kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB pada tahun 2023, sementara neraca modal dan finansial surplus didukung PMA dan investasi portofolio. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga baik dari sisi permodalan, risiko kredit, dan likuiditas. Pertumbuhan kredit akan tumbuh pada kisaran 10-12% pada tahun 2023 dan 2024. Ekonomi dan keuangan digital juga akan meningkat pada tahun 2023 dengan nilai transaksi *e-commerce* diperkirakan mencapai Rp572 triliun, uang elektronik Rp508 triliun, dan *digital banking* lebih dari Rp67 ribu.

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2023 akan terus diarahkan sebagai bagian dari bauran kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang akan melambat dan risiko terjadinya resesi di beberapa negara. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2023 akan terus difokuskan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*).

Inflation Control Teams (TPIP and TPID) and the National Movement for Food Inflation Control (GNPIP) contributed strongly to controlled inflation. Synergy and innovation are the keys to the prospects for Indonesia's economic performance in 2023 and 2024 which will continue economic resilience and revival.

Meanwhile, in the 2023 State Revenue and Expenditure Budget Draft, the government estimates that oil lifting will reach 660 thousand barrels per day (bpd). The threat of a global recession also projects a decline in the price of United States crude oil, which will average USD 84.84 per barrel in 2023. Meanwhile, the price of Indonesian crude oil is estimated to be around USD90 per barrel.

In order to maintain the resilience of the Indonesian economy, the government emphasizes synergy and innovation as the keys to dealing with global turmoil. Optimism for economic recovery needs to be strengthened while remaining aware of risks from global uncertainty, including the risk of stagflation (economic slowdown and high inflation), and even deflation (economic recession and high inflation). This is due to the risk that a correction in world economic growth and that of various countries could occur if high political and economic fragmentation continues, and that monetary policy tightening would take longer to reduce inflation in each country.

External stability will be maintained, the current account is predicted to be in the range of a surplus of 0.4% to a deficit of 0.4% of GDP in 2023, while the capital and financial account surplus is supported by FDI and portfolio investment. The resilience of the financial system is maintained both in terms of capital, credit risk and liquidity. Credit growth will grow in the range of 10-12% in 2023 and 2024. The digital economy and finance will also increase in 2023 with the value of *e-commerce* transactions estimated at Rp572 trillions, electronic money of Rp508 trillions, and digital banking of more than Rp67 thousands.

Bank Indonesia's policy mix in 2023 will continue to be directed as part of the national policy mix to strengthen resilience, recovery and revival of the Indonesian economy amidst global economic conditions that will slow down and the risk of recession in several countries. Bank Indonesia's monetary policy in 2023 will continue to be focused on maintaining stability (*pro-stability*). In addition, Bank Indonesia has also

Selain itu, Bank Indonesia juga telah menyusun 4 (empat) kebijakan lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (*pro-growth*).

formulated 4 (four) other policies, namely macroprudential policies, payment system policies, financial market deepening policies, and green and inclusive financial economic policies as part of a joint effort to accelerate national economic recovery (*pro-growth*).

Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2023

Bank Indonesia Policy in 2023

1.	<p>Kebijakan Moneter / Monetary Policy Berfokus pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi agar kembali ke sasaran lebih awal dan melanjutkan respons kebijakan suku bunga secara konsisten melalui kalibrasi secara terukur (<i>well-calibrated</i>), perencanaan yang matang (<i>well-planned</i>), dan dikomunikasikan secara transparan (<i>well-communicated</i>). / Focusing on stabilizing Rupiah exchange rate and controlling inflation to return to the earlier targets and continue to respond consistently to interest rate policy through measurable calibration (<i>well-calibrated</i>), thorough planning (<i>well-planned</i>), and transparent communication (<i>well-communicated</i>).</p>
2.	<p>Kebijakan Makroprudensial / Macroprudential Policy Berfokus untuk melanjutkan pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau. / Focusing on continuing macroprudential policy easing to encourage banking credit and financing to priority sectors and MSMEs in order to accelerate national economic recovery, while maintaining financial system stability and developing green economic and financial inclusion.</p>
3.	<p>Kebijakan Sistem Pembayaran / Payment System Policy Berfokus pada digitalisasi sistem pembayaran berdasarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang satu bahasa, satu bangsa dan satu nusa, terus didorong untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerja sama sistem pembayaran antarnegara, serta tahapan pengembangan Digital Rupiah. / Focusing on digitizing the payment system based on the 2025 Indonesian Payment System Blueprint (BSPI) which is one language, one nation and one archipelago, continues to be encouraged to accelerate digital economic and financial integration, payment system cooperation between countries, as well as the stages of Digital Rupiah development.</p>
4.	<p>Kebijakan Pendalaman Pasar Uang / Money Market Deepening Policy Berfokus pada akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan, pembangunan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan, termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan. / Focusing on accelerating the deepening of the money market and foreign exchange market according to the 2025 Money Market Development Blueprint (BPPU) is also being pursued to strengthen operational effectiveness and policy transmission, develop a modern and international-standard money market, and develop financing instruments, including the development of sustainable finance.</p>
5.	<p>Kebijakan Ekonomi-Kuangan Inklusif dan Hijau / Inclusive and Green Economic-Financial Policy Berfokus pada perluasan program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan syariah, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor. / Focusing on expanding inclusive economic-financial development programs for MSMEs and the Islamic financial economy, including digitalization and expanding access to domestic and export markets.</p>

Dalam rangka menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19, pemerintah tetap berupaya untuk meneruskan akselerasi pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi, memperlancar mobilitas penduduk, barang dan jasa, juga memperlancar perdagangan antar daerah.

In order to drive the wheels of national economic growth after the Covid-19 pandemic, the government continues to strive to continue accelerating infrastructure development that has been carried out in recent years in order to encourage increased productivity of factors of production, facilitate population mobility, goods and services, as well as facilitate inter-regional trade.

Di tengah ancaman resesi global di tahun depan, diperlukan kebijakan dan langkah antisipatif yang dapat terus mendorong perekonomian nasional, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan kemampuan fiskal yang terbatas terutama di negara berkembang, maka pembiayaan infrastruktur memerlukan terobosan inovasi investasi infrastruktur untuk memenuhi pendanaan infrastruktur dan mengatasi *gap* kebutuhan infrastruktur berkelanjutan.

Amid the threat of a global recession next year, policies and anticipatory steps are needed that can continue to boost the national economy, including in terms of infrastructure development in Indonesia. With limited fiscal capacity, especially in developing countries, infrastructure financing requires breakthroughs in infrastructure investment innovations to meet infrastructure funding and address gaps in sustainable infrastructure needs.

Salah satu inovasi yang dilakukan saat ini adalah melalui investasi infrastruktur berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek *Environment, Social, dan Governance* dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, diharapkan infrastruktur ke depan tidak hanya berperan sebagai penggerak roda perekonomian, tetapi juga mampu memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan lingkungan dan masyarakat Indonesia di masa depan.

Strategi Tahun 2023

Berdasarkan asumsi proyeksi makroekonomi di atas, KAI telah menetapkan strategi untuk tahun 2023 mendatang. Strategi tersebut berfokus pada:

1. Meningkatkan peran angkutan barang dalam logistik nasional dan peran angkutan penumpang pasca-pandemi Covid-19, serta menyusun *roadmap* pengembangan pengelolaan aset;
2. Mengoptimalkan operasi layanan kereta api yang terintegrasi dengan peningkatan kapasitas angkut serta penambahan frekuensi KA dan pengurangan waktu tempuh perjalanan kereta api dengan menerapkan basis digitalisasi;
3. Mendukung peningkatan angkutan penumpang dan angkutan barang dengan menghilangkan *backlog*, peningkatan kecepatan lintas, peningkatan performa dan kualitas sarana dan prasarana serta inovasi berkelanjutan dengan penerapan proses digitalisasi dalam perawatan dalam mendukung efisiensi biaya;
4. Meningkatkan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api melalui penguatan kultur dan budaya;
5. Meningkatkan kompetensi SDM untuk menghadapi perubahan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai;
6. Melakukan kajian pengembangan bisnis dan implementasinya seta menjalin kerja samanya dengan seluruh stakeholders untuk mendukung pendapatan;
7. Melakukan kajian pengembangan bisnis dan implementasinya seta menjalin kerjasamanya dengan seluruh *stakeholders* untuk mendukung pendapatan.

One of the innovations being made at this time is through sustainable infrastructure investment that takes into account environmental, social and governance aspects in the implementation of infrastructure development. Thus, it is hoped that in the future infrastructure will not only act as a driving force for the economy, but also be able to provide positive benefits for the sustainability of the environment and the people of Indonesia in the future.

Strategies in 2023

Based on the macroeconomic projection assumptions above, KAI has set a strategy for the upcoming 2023. The strategy focuses on:

1. Increasing the role of freight transport in national logistics and the role of post-COVID-19 passenger transportation, as well as preparing a roadmap for the development of asset management;
2. Optimizing integrated rail service operations by increasing transport capacity as well as increasing train frequency and reducing train travel time by implementing a digitalization basis;
3. Supporting the improvement of passenger and freight transportation by eliminating backlogs, increasing traffic speeds, improving the performance and quality of facilities and infrastructure as well as continuous innovation by implementing the digitization process in maintenance to support cost efficiency;
4. Improving the safety and security of train travel through strengthening culture and culture;
5. Improving HR competencies to deal with changes and improve employee welfare;
6. Reviewing business development and its implementation as well as establishing cooperation with all stakeholders to support revenue;
7. Conducting business development studies and their implementation as well as establish cooperation with all stakeholders to support revenue.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2022 SERTA PROYEKSI TAHUN 2023

Comparison of Targets and Realization in 2022 and Projection for 2023

Perbandingan Target dan Realisasi serta Proyeksi Keuangan / Comparison of Targets and Realization and Financial Projection				
Dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain / In thousand Rupiah, unless stated otherwise				
Uraian / Description	Target 2022 / Targets in 2022	Realisasi 2022 / Realization in 2022	Pencapaian terhadap Target (%) / Achievement to Target (%)	Proyeksi 2023 / Projection in 2023
Posisi Keuangan / Financial Position				
Aset lancar / Current asset	6.567.967.495	15.337.947.951	134%	10.631.487.787
Aset tidak lancar / Non-current asset	68.790.586.819	56.243.281.772	82%	84.302.068.664
Total aset / Total assets	75.358.554.314	71.581.229.723	95%	94.933.556.451
Liabilitas jangka pendek / Short-term liabilities	10.081.278.679	9.958.123.860	99%	9.267.946.586
Liabilitas Liabilitas jangka panjang / Long-term liabilities	37.729.265.183	32.542.921.558	78%	52.605.204.922
Total liabilitas / Total liabilities	47.810.543.861	42.501.045.418	89%	61.873.151.507
Total ekuitas / Total equity	27.548.010.453	29.080.184.305	106%	33.060.404.944
Laba Rugi / Profit or Loss				
Pendapatan / Income	23.122.834.784	25.577.639.010	111%	28.020.594.170
Beban usaha / Operating expense	21.701.067.568	22.205.393.091	102%	24.100.520.639
Laba (rugi) usaha / Operating profit (loss)	1.421.767.214	3.372.245.919	237%	3.920.073.531
Laba (rugi) tahun berjalan / Profit (loss) for the year	103.739.264	1.685.989.220	1.625%	1.735.899.562
Rasio Keuangan (%) / Financial Ratio (%)				
Rasio kas / Cash ratio	30,58%	57,20%	187,05%	45,46%
Rasio lancar / Current ratio	65,15%	154,02%	236,41%	115,00%
Return on Equity (ROE)	0,40%	11,92%	1741,52%	5,65%
Return on Investment (ROI)	6,37%	7,64%	120,05%	6,23%

Perbandingan Target dan Realisasi serta Proyeksi Aset

Pada tahun 2022, realisasi total aset KAI adalah sebesar Rp71,58 triliun, setara 94,99% dari target RKAP 2022 sebesar Rp75,36 triliun. Hal tersebut terutama disebabkan oleh belum terealisasinya beberapa proyek investasi aset sarana dan prasarana seiring rendahnya serapan investasi.

Untuk tahun 2023, Perseroan memproyeksikan total aset sebesar Rp94,934 miliar, meningkat 33% dari realisasi tahun 2022, dengan pertimbangan perkembangan proyek LRT, pengembangan angkutan di Sumatera Bagian Selatan, dan upaya pembaruan sarana perkeretaapian.

Comparison of Targets and Realization and Assets Projection

In 2022, KAI realized total assets of Rp71.58 trillion or equivalent to 94.99% of the 2022 RKAP target of Rp75.36 trillion. This was primarily due to the non-realization of several investment projects for facilities and infrastructure assets in line with the low absorption of investment.

For 2023, the Company projects a total asset of Rp94,934 billion, an increase of 33% of the realization in 2022, taking into account the development of the LRT project, development of transportation in Southern Sumatra, and efforts to renew railway facilities.

Perbandingan Target dan Realisasi serta Proyeksi Liabilitas

Pada tahun 2022, realisasi total liabilitas sebesar Rp42,50 triliun, setara 88,89% dari target RKAP 2022 sebesar Rp47,81 triliun. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan kas akhir tahun yang cukup banyak sehingga perusahaan mengoptimalkan dana tersebut dengan melakukan pelunasan kewajiban jangka pendeknya dan belum terealisasinya pencairan investasi yang bersumber dari pinjaman Jangka panjang yaitu pendanaan LRT dan mulainya pembayaran pokok pinjaman obligasi.

Untuk tahun 2023, Perseroan memproyeksikan total liabilitas sebesar Rp61.873 miliar, lebih tinggi 46% dari realisasi tahun 2022, terutama dipengaruhi realisasi kredit sindikasi untuk proyek LRT Jabodebek sesuai dengan kemajuan pekerjaan.

Perbandingan Target dan Realisasi serta Proyeksi Ekuitas

Pada tahun 2022, realisasi total ekuitas sebesar Rp29,08 triliun, setara 105,56% dari target RKAP 2022 sebesar Rp27,55 triliun. Hal tersebut terutama disebabkan oleh ketercapaian laba bersih tahun berjalan dari anggaran yang ditetapkan.

Untuk tahun 2023, Perseroan memproyeksikan total ekuitas sebesar Rp33.060 miliar, lebih tinggi 14% dari realisasi tahun 2022, dengan pertimbangan adanya capaian laba tahun 2023 yang memberikan kontribusi bagi ekuitas KAI.

Perbandingan Target dan Realisasi serta Proyeksi Pendapatan

Pada tahun 2022, realisasi pendapatan sebesar Rp25,58 triliun, lebih tinggi 25% dari target RKAP 2022 sebesar Rp23,11 triliun. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan Perseroan.

Untuk tahun 2023, Perseroan memproyeksikan total pendapatan sebesar Rp28.020 miliar, lebih tinggi 10% dari realisasi tahun 2022, dengan pertimbangan pertumbuhan angkutan penumpang setelah melalui masa pandemi dan keberlanjutan pertumbuhan angkutan barang terutama di Sumatera Bagian Selatan.

Perbandingan Target dan Realisasi serta Proyeksi Laba/Rugi

Pada tahun 2022, realisasi laba/rugi tahun berjalan sebesar Rp1,68 triliun, setara 1.625,22% dari target RKAP 2022 sebesar Rp103,74 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan Perseroan.

Comparison of Targets and Realization and Liabilities Projection

In 2022, the realization of total liabilities is Rp42.50 trillion, equivalent to 88.89% of the 2022 RKAP target of Rp47.81 trillion. This was mainly due to quite a lot of cash receipts at the end of the year so that the company optimized these funds by paying off its short-term obligations and the unrealized disbursement of investments originating from long-term loans, namely LRT funding and the start of payment of the bond loan principal.

For 2023, the Company projects a total liability of Rp61,873 billion, an increase of 46% compared to the realization in 2022. It was mainly due to realization of syndicated credit for the Jabodebek LRT project in accordance with the progress of the work.

Comparison of Targets and Realization and Equity Projection

In 2022, the realization of total equity is Rp29.08 trillion, equivalent to 105.56% of the 2022 RKAP target of Rp27.55 trillion. This was mainly due to the achievement of the current year's net profit from the stipulated budget.

For 2023, the Company projects a total equity of Rp33,060 billion, 14% higher than the realization in 2022, taking into account the achievement of profits in 2023 which will contribute to KAI's equity

Comparison of Targets and Realization and Revenue Projection

In 2022, the realization of revenue was Rp25.58 trillion, 25% higher than the 2022 RKAP target of Rp23.11 trillion. This was mainly caused by the increase in the Company's income.

For 2023, the Company projects a total revenue of Rp28.020 billion, 10% higher than the realization in 2022, taking into account growth in passenger transport after going through the pandemic and continued growth in freight transport, especially in Southern Sumatra.

Comparison of Targets and Realization and Profit/Loss Projection

In 2022, actual profit for the year amounted to Rp25.58 billion, 25% higher than the 2022 RKAP target of Rp20.51 billion. This was mainly due to the increase in the Company's revenue.

Untuk tahun 2023, Perseroan memproyeksikan laba/rugi tahun berjalan sebesar Rp1.736 miliar, lebih tinggi 3% dari realisasi tahun 2022, dengan pertimbangan pertumbuhan pendapatan memberikan kontribusi utama.

For 2023, the Company projects a profit/loss for the year of Rp1,736 billion, 3% higher than the realization in 2022, considering that revenue growth made the main contribution.

Perbandingan Target dan Realisasi serta Proyeksi ROI

Pada tahun 2022, realisasi ROI sebesar 7,64%, setara 119,94% dari target RKAP 2022 sebesar 6,37%. Hal tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang diperoleh Perseroan.

Comparison of Targets and Realization and ROI Projection

In 2022, ROI was realized at 7.64% or equivalent to 119.94% of the 2022 RKAP target of 6.37%. This was mainly due to the increase in the Company's revenue.

Untuk tahun 2023, Perseroan memproyeksikan ROI sebesar 6,23%, 19% di bawah realisasi tahun 2022, dengan pertimbangan operasional atas proyek LRT Jabodebek yang belum setahun penuh.

For 2023, the Company projects a ROI of 6.23%, 19% lower than the realization in 2022, taking into account the Jabodebek LRT project that has not been operational in one full year.

Perbandingan Target dan Realisasi serta Proyeksi Produksi

Comparison of Targets and Realization and Production Projection

Uraian / Description	Target 2022 / Target in 2022	Realisasi 2022 / Realization in 2022	Pencapaian terhadap Target (%) / Achievement to Target (%)	Proyeksi 2023 / Projection in 2023
Angkutan Penumpang (dalam Orang) / Passenger Transport (in Person)				
KA Utama Kelas Eksekutif / Main Train-Executive Class	6.174.794	11.522.349	187%	12.530.734
KA Utama Kelas Bisnis / Main Train-Business Class	651.833	1.015.555	156%	1.603.872
KA Utama Kelas Ekonomi / Main Train-Economy Class	11.800.472	19.338.613	164%	26.000.349
KA Lokal Ekonomi / Local Train-Executive Class	255.810.075	252.572.288	99%	5.907.973
Volume Angkutan Penumpang / Passenger Transport Volume	274.437.174	284.448.804	104%	46.042.928
Angkutan KA Barang (dalam Ton) / Freight Train Transport (in Ton)				
Batu Bara / Coal	46.746.436	45.428.564	97%	50.584.451
Peti Kemas / Container	4.557.840	4.802.436	105%	5.016.630
BBM / Fuel	2.462.700	2.554.062	104%	2.458.200
Semen / Cement	5.348.400	3.856.140	72%	3.774.072
General Cargo dan Barang Hantaran Potongan (BHP) / General Cargo and Delivery Goods Unit (BHP)	264.480	208.980	79%	368.300
Lainnya / Others	866.550	1.156.699	133%	859.950
Volume Angkutan KA Barang / Freight Train Transport Volume	60.246.406	58.006.880	96%	63.061.603

Perbandingan Target dan Realisasi serta Proyeksi Volume Angkutan Penumpang

Pada tahun 2022, realisasi volume angkutan penumpang sebanyak 284.448.804 orang, di atas 104% dari target RKAP 2022 sebanyak 274.437.174 orang.

Comparison of Targets and Realization and Projection of Passenger Transport Volume

In 2022, the actual volume of passenger transportation was 284,448,804 people, 104% above the 2022 RKAP target of 274,437,174 people.

Hal tersebut terutama disebabkan oleh:

1. Pelonggaran aturan perjalanan menggunakan kereta api oleh Pemerintah
2. Pemberlakuan kapasitas TD normal menjadi 100% untuk KA Jarak Jauh per 9 Maret 2022, dan kapasitas lokal normal 150% per tanggal 18 Mei 2022
3. Dijalankannya angkutan Lebaran 2022 dan angkutan Nataru 2022 (dengan penyesuaian syarat dan ketentuan perjalanan menggunakan KA oleh pemerintah)
4. Penambahan stamformasi & frekuensi perjalanan KA disesuaikan dengan permintaan pasar
5. Perjalanan beberapa KA Baru di 2022 antara lain:
 - a. KA Cikuray relasi Garut-Pasarsenen PP mulai 24 Maret 2022;
 - b. KA Tegal Bahari relasi Tegal-Pasarsenen PP mulai tanggal 26 Maret 2022;
 - c. KA Joglosemarkerto relasi Yogyakarta-Cilacap PP mulai 25 Maret 2022;
 - d. KA Blambangan Ekspres relasi Semarang-Ketapang PP mulai tanggal 3 Desember 2022;
 - e. KA Baturraden Ekspres relasi Purwokerto-Kroya-Bandung PP mulai tanggal 21 Desember 2022;
 - f. KA Luxury pada KA Argo Parahyangan mulai 18 Juni 2022;
 - g. KA Panoramic pada KA Taksaka mulai tanggal 24 Desember 2022.

Untuk tahun 2023, Perseroan memproyeksikan volume angkutan penumpang sebanyak 46.042.928 orang, lebih rendah 14% dari realisasi tahun 2022 (total KA Utama sebanyak 40.134.955 orang, di atas 33% dari realisasi 2022 sebanyak 30.284.368 orang, KA Lokal sebanyak 5.907.973 orang di bawah 75% dari realisasi 2022 sebanyak 23.536.595 orang). Penetapan target KA Lokal Tahun 2023 tersebut disebabkan adanya pengalihan pengelolaan KA Lokal Daop 2, 8 dan beberapa KA Lokal Daop 1, 4 ke PT KCI per 9 November 2022 serta pengelolaan KA Bandara YIA ke PT Railink per 1 November 2022. Untuk KA Utama, ditargetkan di atas realisasi tahun 2022 dengan selisih 33%, dengan pertimbangan:

- a. Pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,9%;
- b. Tidak ada aturan pembatasan perjalanan menggunakan KA;
- c. Angkutan lebaran normal tanpa pembatasan;
- d. Dijalannya angkutan natal & tahun baru normal tanpa pembatasan;
- e. Terdapat penambahan/kedatangan 6 sarana KA Luxury dan dijalankan mulai 1 September 2023;
- f. Optimalisasi rangkaian dan maksimalisasi frekuensi perjalanan KA.

This was primarily due to:

1. Relaxation of the rules for traveling by train by the Government
2. Implementation of normal TD capacity to 100% for Long Distance Trains as of March 9, 2022, and normal local capacity of 150% as of May 18, 2022
3. Eid 2022 transportation and 2022 Christmas and New Year transportation operations (with adjustments to the terms and conditions for train travels by the government)
4. Additional train travel information and frequency according to market demand
5. Several new train journeys in 2022 include:
 - a. KA Cikuray Garut-Pasarsenen PP route starting March 24, 2022;
 - b. KA Tegal Bahari Tegal-Pasarsenen PP route starting March 26, 2022;
 - c. KA Joglosemarkerto Yogyakarta-Cilacap PP route starting March 25, 2022;
 - d. KA Blambangan Ekspres, Semarang-Ketapang PP route starting December 3, 2022;
 - e. KA Baturraden Ekspres Purwokerto-Kroya-Bandung PP route starting December 21, 2022;
 - f. KA Luxury on KA Argo Parahyangan starting June 18, 2022;
 - g. KA Panoramic on Taksaka train starting December 24, 2022.

For 2023, the Company projects a passenger transport volume of 46,042,928 people, 14% lower than the realization in 2022 (total Main Trains of 40,134,955 people, 33% higher than the 2022 realization of 30,284,368 people, Local Trains of 5,907,973 people, 75% lower than the 2022 realization of 23,536,595 people). The determination of the local railway target for 2023 is due to the transfer of the management of local trains Daop 2, 8 and several local trains Daop 1, 4 to PT KCI as of November 9, 2022 and the management of the YIA Airport train to PT Railink as of November 1, 2022. For the main train, it is targeted above the realization in 2022 with a difference of 33%, taking into account:

- a. Economic growth by 5.3% -5.9%;
- b. No restrictions on traveling by train;
- c. Normal Eid transportation without restrictions;
- d. Normal Christmas & New Year transportation is carried out without restrictions;
- e. There are additions/arrivals of 6 luxury train facilities and will start from 1 September 2023;
- f. Optimizing the circuit and maximizing the frequency of train trips.

Perbandingan Target dan Realisasi serta Proyeksi Volume Angkutan KA Barang

Pada tahun 2022, realisasi volume angkutan KA barang adalah sebesar 58.006.880 ton, lebih rendah 4% dari target RKAP 2022 yang sebesar 60.246.406 ton. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kinerja di angkutan semen dan terdapat beberapa kejadian KKA, NKKA di Sumbagsel, serta curah hujan yang terus menerus yang menyebabkan berkurangnya volume angkutan di tahun 2022. Selain itu, terdapat rawatan dan gangguan alat muat bongkar RCD dan TLS, permintaan pembatalan perjalanan kereta api, dan permintaan pengurangan rangkaian dari yang telah diprogramkan.

Untuk tahun 2023, Perseroan memproyeksikan volume angkutan KA barang sebesar 63.061.603 ton, lebih tinggi 9% dari realisasi tahun 2022, dengan pertimbangan adanya beberapa rencana angkutan baru seperti Apical, angkutan baru CPO di Sumatra Barat, serta rencana untuk memaksimalkan KKBW yang ada di Sumbagsel. Selain itu, realisasi 2023 diproyeksikan akan dipengaruhi oleh adanya mitra baru yang melakukan kontrak kerja sama angkutan dengan PT KAI seperti pada angkutan batu bara di Sumatera Selatan. Selain itu, diproyeksikan dipengaruhi adanya permintaan peningkatan hari operasi pada angkutan petikemas yang semula berjalan dua hari sekali menjadi 5 kali dalam seminggu serta permintaan angkutan barang bagasi di KA-KA penumpang baru pada angkutan *general cargo*.

Comparison of Targets and Realization and Projection of Freight Train Transport Volume

In 2022, the actual volume of freight train transportation is 58,006,880 tons, 4% lower than the 2022 RKAP target of 60,246,406 tons. This was mainly due to a decrease in performance in cement transportation and there were several KKA and NKKA incidents in Sumbagsel, as well as continuous rainfall which caused a reduction in transport volume in 2022. In addition, there was maintenance and disruption of the RCD and TLS loading and unloading equipment, demand cancellation of train trips, and requests for a reduction in the series from what was programmed.

For 2023, the Company projects a volume of freight train transportation of 63,061,603 tons, 9% higher than the realization in 2022, taking into account several new transportation plans such as Apical, new CPO transportation in West Sumatra, as well as plans to maximize existing KKBW in South Sumatra. In addition, the 2023 realization is projected to be influenced by the presence of new partners who enter into transportation cooperation contracts with PT KAI, such as coal transportation in South Sumatra. In addition, it is projected to be influenced by the demand for an increase in operating days for container transportation, which originally ran every other day to 5 times a week, as well as the demand for luggage transportation on new passenger trains on general cargo transportation.

KEBIJAKAN, PENGUMUMAN, DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Dividend Policy, Announcement, and Payment

Dalam pembayaran dividen, KAI melakukan pembayaran berdasarkan keputusan RUPS, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 dan 2021, Perseroan tidak mendistribusikan dividen kepada para pemegang saham, karena pada tahun-tahun buku tersebut KAI masih mengalami kerugian sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

In paying dividends, KAI makes payments based on GMS decisions, compliance with laws and regulations and other factors deemed relevant. Based on the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2020 and 2021 Fiscal Years, the Company did not distribute dividends to shareholders, due to the losses experienced by KAI as the impact from the COVID-19 pandemic.

PEMBAYARAN PAJAK [GRI 207-4]

Tax Payment

Pemenuhan kewajiban perpajakan KAI tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.243 miliar, dengan perincian sebagai berikut: Fulfillment of KAI's 2022 tax obligations was realized in the amount of Rp2,243 billion, with the following details:

Nilai Pembayaran Pajak / Tax Payment Value dalam Rupiah / in Rupiah		
No.	Jenis Pajak / Tax Type	Nilai Pajak / Tax Value
1.	PPN / Value-Added Tax	1.602.836.412
2.	PPh Pasal 21 / Income Tax Article 21	279.004.783
3.	PPh Pasal 22 / Income Tax Article 22	40.845.280
4.	PPh Pasal 23 / Income Tax Article 23	112.137.766
5.	PPh Pasal Final 4 Ayat 2 / Income Tax Final Article 4 Paragraph 2	130.730.753
6.	PBB	78.113.641
Total		2.243.668.635

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Realization of Use of Public Offering Proceeds

Pada tahun 2022, Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I. Berikut ini merupakan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum selama tahun 2022:

In 2022, the Company conducted a Public Offering of Kereta Api Indonesia Sustainable Bonds I Phase I and Kereta Api Indonesia Sustainable Sukuk Ijarah I Phase I. The following is a report on the realization of the use of proceeds from the public offering during 2022:

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 / Realization of Use of Public Offering Proceeds of Kereta Api Indonesia Sustainable Bonds I Phase I 2022 dalam jutaan rupiah / in million Rupiah		
Jenis Penawaran Umum / Type of Public Offering	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I / Public Offering of Kereta Api Indonesia Sustainable Bond I Phase I	
Tanggal Efektif / Effective Date	29 Juli 2022 / July 29, 2022	
Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum / Realized Value of Public Offering Proceeds	Jumlah Hasil Penawaran Umum / Public Offering Proceeds Amount	1.500.000,00
	Biaya Penawaran Umum / Public Offering Cost	5.459,45
	Hasil Realisasi Bersih / Net Realization Result	1.494.540,55
Rencana Penggunaan Dana / Plan for Use of Funds	Pembayaran Utang Pokok Obligasi I Seri A KAI Tahun 2017 (66,19%) / Principal Payment of KAI Series A Bonds I Year 2017 (66.19%)	1.000.000,00
	Pengadaan Prasarana Pengembangan Sumatra Bagian Selatan (33,09%) / Procurement of Infrastructure Development of Southern Sumatra (33.09%)	494.540,55
Total Rencana Penggunaan Dana / Total Funds Usage Plan		1.494.540,55
Realisasi Penggunaan Dana / Funds Usage Realization	Pembayaran Utang Pokok Obligasi I Seri A KAI Tahun 2017 (66,19%) / Principal Payment of KAI Series A Bonds I Year 2017 (66.19%)	1.000.000,00
	Pengadaan Prasarana Pengembangan Sumatra Bagian Selatan (33,09%) / Procurement of Infrastructure Development of Southern Sumatra (33.09%)	436.465,17
	Total Realisasi Penggunaan Dana / Total Funds Usage Realization	1.436.465,17
Sisa Dana Hasil Penawaran Umum / Remaining Public Offering Proceeds		58.075,38

Rincian Biaya Penawaran Umum Obligasi
Details of the Bonds Public Offering Fee

No.	Rincian / Details	Prospektus / Prospectus	Realisasi / Realization
a.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek / Underwriter	0,12610%	0,12610%
b.	Profesi Penunjang Pasar Modal / Capital Market Supporting Profession	0,06568%	0,06568%
c.	Lembaga Penunjang Pasar Modal / Capital Market Supporting Institution	0,04977%	0,04977%
d.	Biaya Pendaftaran / Registration Fee	0,05749%	0,05749%
e.	Lain-lain / Others	0,06494%	0,06494%

Pembayaran Utang Pokok Obligasi I Seri A KAI Tahun 2017
Payment of KAI Series A Bonds I Year 2017

dalam jutaan Rupiah

in million Rupiah

No.	Rincian / Details	Rencana / Plan	Realisasi / Realization	Sisa / Residual	Keterangan / Description
a.	Pembayaran Utang Pokok Obligasi I Seri A KAI Tahun 2017 / Payment of KAI Series A Bonds I Year 2017	1.000.000,00	1.000.000,00	-	

Pengadaan Prasarana Pengembangan Sumatra Bagian Selatan
Procurement of Infrastructure Development of Southern Sumatra

dalam jutaan Rupiah

in million Rupiah

No.	Rincian / Details	Rencana / Plan	Realisasi / Realization	Sisa / Residual	Keterangan / Description
a.	Pengadaan Prasarana Pengembangan Sumatra Bagian Selatan / Procurement of Infrastructure Development of Southern Sumatra	494.540,55	436.465,17	58.075,38	

Penempatan Dana Hasil Penawaran Umum
Placement of Public Offering Proceeds

dalam jutaan Rupiah

in million Rupiah

No.	Nama Bank / Bank Name	Jenis Simpanan / Deposit Type	Jumlah / Total	Tingkat Suku Bunga (p.a.) / Interest Rate (p.a.)	Periode / Period	Hubungan Afiliasi / Affiliation
a.	Bank BRI	Grio / Giro	58.075,38	2,30%	Per 31 Desember 2022 / As of December 31, 2022	Terafiliasi / Affiliated

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 /
Realization of Use of Public Offering Proceeds of Kereta Api Indonesia Sustainable Sukuk Ijarah I Phase I 2022

dalam jutaan rupiah / in million Rupiah

Jenis Penawaran Umum / Type of Public Offering	Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I / Public Offering of Kereta Api Indonesia Sustainable Sukuk Ijarah I Phase I	
Tanggal Efektif / Effective Date	29 Juli 2022 / July 29, 2022	
Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum / Realized Value of Public Offering Proceeds	Jumlah Hasil Penawaran Umum / Public Offering Proceeds Amount	500.000,00
	Biaya Penawaran Umum / Public Offering Cost	1.930,82
	Hasil Realisasi Bersih / Net Realization Result	498.069,18
Rencana Penggunaan Dana / Plan for Use of Funds	Pengadaan Prasarana Pengembangan Sumatra Bagian Selatan (78%) / Procurement of Infrastructure Development of Southern Sumatra (78%)	388.493,96
	Pengadaan Sarana KA Bandara Internasional Adi Soemarmo (22%) / Procurement of Adi Soemarmo International Airport Railroad Facilities (22%)	109.575,22
	Total Rencana Penggunaan Dana / Total Funds Usage Plan	498.069,18

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 /
Realization of Use of Public Offering Proceeds of Kereta Api Indonesia Sustainable Sukuk Ijarah I Phase I 2022
dalam jutaan rupiah / in million Rupiah

Jenis Penawaran Umum / Type of Public Offering	Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I / Public Offering of Kereta Api Indonesia Sustainable Sukuk Ijarah I Phase I	
Realisasi Penggunaan Dana / Funds Usage Realization	Pengadaan Prasarana Pengembangan Sumatra Bagian Selatan (78%) / Procurement of Infrastructure Development of Southern Sumatra (78%)	-
	Pengadaan Sarana KA Bandara Internasional Adi Soemarmo (22%) / Procurement of Adi Soemarmo International Airport Railroad Facilities (22%)	-
	Total Realisasi Penggunaan Dana / Total Funds Usage Realization	-
Sisa Dana Hasil Penawaran Umum / Remaining Public Offering Proceeds		498.069,18

Rincian Biaya Penawaran Umum Obligasi

Details of Bond Public Offering Fees

No.	Rincian / Details	Prospektus / Prospectus	Realisasi / Realization
a.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek / Underwriter	0,12610%	0,12610%
b.	Profesi Penunjang Pasar Modal / Capital Market Supporting Profession	0,09604%	0,09604%
c.	Lembaga Penunjang Pasar Modal / Capital Market Supporting Institution	0,06161%	0,06161%
d.	Biaya Pendaftaran / Registration Fee	0,03749%	0,03749%
e.	Lain-lain / Others	0,06494%	0,06494%

Pengadaan Prasarana Pengembangan Sumatra Bagian Selatan

Procurement of Infrastructure Development of Southern Sumatra

dalam jutaan Rupiah

in million Rupiah

No.	Rincian / Details	Rencana / Plan	Realisasi / Realization	Sisa / Residual	Keterangan / Description
a.	Pengadaan Prasarana Pengembangan Sumatra Bagian Selatan / Procurement of Infrastructure Development of Southern Sumatra	388.493,96	-	388.493,96	

Pengadaan Sarana KA Bandara Internasional Adi Soemarmo

Procurement of Adi Soemarmo International Airport Railroad Facilities

dalam jutaan Rupiah

in million Rupiah

No.	Rincian / Details	Rencana / Plan	Realisasi / Realization	Sisa / Residual	Keterangan / Description
a.	Pengadaan Sarana KA Bandara Internasional Adi Soemarmo / Procurement of Adi Soemarmo International Airport Railroad Facilities	109.575,22	-	109.575,22	

Penempatan Dana Hasil Penawaran Umum

Placement of Public Offering Proceeds

dalam jutaan Rupiah

in million Rupiah

No.	Nama Bank / Bank Name	Jenis Simpanan / Deposit Type	Jumlah / Total	Tingkat Suku Bunga (p.a.) / Interest Rate (p.a.)	Periode / Period	Hubungan Afiliasi / Affiliation
a.	Bank BSI	Giro / Giro	498.069,18	2,79%	Per 31 Desember 2022 / As of December 31, 2022	Terafiliasi / Affiliated

INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Material Information related to Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring

INVESTASI

Investment

Uraian / Description	2022	2021
Investasi Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investments in Associates and Joint Ventures		
Entitas Asosiasi / Associates		
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	17.307.401	21.561.289
PT BPRS Baiturridha Pusaka	8.204.532	6.802.910
Ventura Bersama / Joint Venture		
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	6.208.789.974	-
KSO Bumi Kalog	59.698.827	59.430.042
KSO B Kalog	16.175.849	15.458.451
KSO PT KAPM - PT Mega Dasa Semesta	5.185.454	5.183.767
Jumlah / Total	6.315.362.037	108.436.459

EKSPANSI

Perseroan tidak melakukan aktivitas ekspansi pada 2022. Atas hal tersebut, tidak terdapat informasi mengenai ekspansi Perseroan untuk disajikan di dalam bagian ini.

EXPANSION

The Company did not carry out expansion activities in 2022. For this reason, there is no information regarding the Company's expansion to be presented in this section.

DIVESTASI

Perseroan tidak melakukan aktivitas divestasi pada 2022. Atas hal tersebut, tidak terdapat informasi mengenai divestasi usaha Perseroan untuk disajikan di dalam bagian ini.

DIVESTMENT

The Company did not carry out divestment activities in 2022. For this reason, there is no information regarding the divestment of the Company's business to be presented in this section.

PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA

Perseroan tidak melakukan penggabungan/peleburan usaha pada 2022. Atas hal tersebut, tidak terdapat informasi mengenai aktivitas penggabungan/peleburan usaha Perseroan untuk disajikan di dalam bagian ini.

BUSINESS MERGER/CONSOLIDATION

The Company did not carry out a business merger/consolidation in 2022. For this reason, there is no information regarding the Company's business merger/consolidation activities to be presented in this section.

AKUISISI

Perseroan tidak melakukan akuisisi pada 2022. Atas hal tersebut, tidak terdapat informasi mengenai aktivitas akuisisi Perseroan untuk disajikan di dalam bagian ini.

ACQUISITION

The Company did not make any acquisitions in 2022. For this reason, there is no information regarding the Company's acquisition activities to be presented in this section.

RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Perseroan tidak melakukan aktivitas restrukturisasi utang/modal pada 2022. Atas hal tersebut, tidak terdapat informasi mengenai aktivitas restrukturisasi utang/modal Perseroan untuk disajikan di dalam bagian ini.

DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

The Company did not carry out debt/capital restructuring activities in 2022. For this reason, there is no information regarding the Company's debt/capital restructuring activities to be presented in this section.

INFORMASI MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU DENGAN PIHAK AFILIASI

Material Information related to Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or with Affiliated Parties

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali yang dapat merugikan Perusahaan Terbuka dimaksud.

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

Transaksi Material dengan Pihak Afiliasi

Perseroan merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, sehingga dalam menjalankan operasinya, Perseroan berhubungan dan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Mengenai hubungan tersebut, tidak terdapat perbedaan syarat dan kondisi atas transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, a Material Transaction is any transaction made by a public company or a controlled company that meets a transaction value limit equal to 20% (twenty percent) or more than public company equity.

Conflict of Interest Transaction

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, a Conflict of Interest is the difference between the economic interests of a public company and the personal economic interests of Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, Major Shareholders, or Controlling may harm the Public Company in question.

Throughout 2022, there were no transactions that met the category of conflict of interest transactions.

Affiliated Transaction

The Company is part of a business group, so that in carrying out its operations, the Company relates and conducts transactions with related parties. Regarding this relationship, there are no differences in terms and conditions for transactions made with third parties.

A related party is a person or entity related to the reporting entity:

- a) A person or close family member has a relationship with the reporting entity if that person:
 - i. Have control or joint control over the reporting entity;
 - ii. Have significant influence over the reporting entity; or
 - iii. Become a key management personnel of the reporting entity or the parent of the reporting entity.

- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.
- b) An entity is related to a reporting entity if it satisfies any of the following:
- i. The entity and the reporting entity are members of the same business group (meaning that the parent, subsidiary, and subsequent subsidiaries are related to the other entity);
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - iii. The two entities are joint ventures of the same third party;
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the program, the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
 - vi. An entity that is controlled or jointly controlled by the person identified in (a);
 - vii. The person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).; or
 - viii. An entity, or a member of a group of which the entity is part of the group, provides key management personnel services to the Group or to a parent of the reporting entity.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional. Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara BUMN sebagai kuasa pemegang saham. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Laporan Keuangan.

Government-related entities are entities that are controlled, jointly controlled, or influenced by the government. Government refers to government agencies and similar bodies both locally, nationally and internationally. Entities related to the Government can be entities that are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance which is the shareholder of the entity, or entities controlled by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises as the shareholder's proxy. All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the Financial Statements.

Nama Pihak dan Sifat Hubungan Berelasi dan Realisasi Transaksi

Perseroan melakukan sejumlah transaksi dengan pihak berelasi, dengan penjelasan sifat hubungan sebagai berikut:

- a) Pemerintahan Republik Indonesia diwakili oleh Menteri BUMN merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN lain memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
- b) Perusahaan menempatkan dan meminjam dana pada bank-bank yang dimiliki Pemerintah dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
- c) Perusahaan yang menandatangani perjanjian dalam rangka usaha, dengan BUMN-BUMN lain merupakan entitas anak BUMN serta badan-badan lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang.
- d) Memiliki anggota pengurus yang sama dengan entitas anak, yaitu Direksi Perusahaan yang juga merupakan Komisaris pada entitas anak.
- e) Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Grup.

Daftar pihak berelasi beserta pengungkapan sifat hubungan dan sifat relasi dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Name of Parties, Nature of Related Relationship and Transaction Realization

The Company conducted a number of transactions with related parties, with the following description of the nature of the relationship:

- a) The Government of the Republic of Indonesia was represented by the Minister of SOEs who were shareholders of the Company and other SOEs had an affiliated relationship through the capital investment of the Government of the Republic of Indonesia.
- b) The Company placed and borrowed funds from Government-owned banks with normal terms and interest rates as applicable to third party customers.
- c) Companies signing agreements in the context of business, with other SOEs were subsidiaries of SOEs and authorized government agencies.
- d) Having the same board members as the subsidiary, namely the Company's Board of Directors who was also a Commissioner of the subsidiary.
- e) The Board of Commissioners and the Board of Directors are the Group's key management personnel.

The list of related parties and disclosure of the nature of the relationship and the nature of the relationship can be seen in the following table:

Pihak Berelasi / Related Parties	Hubungan / Relations	Jenis Transaksi / Transaction Type
Pemerintah Republik Indonesia / Government of the Republic of Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Hak Konsesi atas Prasarana Kereta Api, Pemberian Pinjaman Jangka Panjang PEN, dan Perpajakan / Concession Rights on Railway Infrastructure, PEN Long Term Loans, and Taxation
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan Dana atas Penyelenggaraan angkutan PSO, Perintis, dan Perawatan IMO, Pembayaran Bunga, dan Pembayaran TAC / Receipt of Funds for Organizing PSO Transportation, Pioneering, and IMO Maintenance, Interest Payments, and TAC Payments
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Fasilitas Kredit Modal Kerja, Fasilitas Kredit Sindikasi / Placement of Current Accounts, Time Deposits, Restricted Funds, Working Capital Credit Facilities, Syndicated Credit Facilities
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Fasilitas Kredit Modal Kerja, Fasilitas Kredit Sindikasi, Persewaan Lahan/ Biaya Keuangan, Pendapatan Bunga, Pendapatan Sewa, Dana Pensiun, dan Dana Kesehatan Pegawai / Placement of Current Accounts, Time Deposits, Restricted Funds, Working Capital Credit Facilities, Syndicated Credit Facilities, Land Rental/ Finance Fees, Interest Income, Rental Income, Pension Funds, and Employee Health Funds
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Fasilitas Kredit Modal Kerja, Fasilitas Kredit Sindikasi, Persewaan Lahan, Biaya Keuangan, Asuransi Pegawai, Pendapatan Bunga, Pendapatan Sewa dan Dana Pensiun / Placement of Current Accounts, Time Deposits, Restricted Funds, Working Capital Credit Facilities, Syndicated Credit Facilities, Land Rentals, Finance Fees, Employee Insurance, Interest Income, Rental Income and Pension Funds
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Hak Konsesi atas Prasarana Kereta Api, Pemberian Pinjaman Jangka Panjang PEN, dan Perpajakan / Placement of Current Accounts, Time Deposits, Concession Rights on Railway Infrastructure, Long-Term PEN Loans, and Taxation
PT BPRS Baiturridha Pusaka	Entitas Asosiasi / Associates	Penempatan Giro dan Deposito Berjangka / Placement of Current Accounts and Time Deposits
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Jasa Pendukung / Revenue from Transportation Services and Support Services

Pihak Berelasi / Related Parties	Hubungan / Relations	Jenis Transaksi / Transaction Type
PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Pembelian Bahan Bakar Minyak dan Jasa Pendukungnya, Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Sewa Lahan / Purchase of fuel oil and its supporting services, receipts from transportation services and land leases
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Jasa Pendukung / Revenue from Transportation Services and Support Services
PT Industri Kereta Api (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Pembelian Aset Sarana, Pembelian Suku Cadang, Jasa Perawatan Sarana, Penerimaan Jasa Teknis Sarana, dan Jasa Angkutan / Purchase of Facility Assets, Purchase of Spare Parts, Facility Maintenance Services, Receipt of Facility Technical Services, and Transportation Services
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Persewaan Lahan / Land Rentals
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Jasa Pendukung / Revenue from Transportation Services and Support Services
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Jasa Pendukung / Revenue from Transportation Services and Support Services
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Persewaan Lahan / Land Rentals
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Persewaan Lahan, Pembayaran Listrik Operasional dan Listrik Aliran Atas / Land Rentals, Payment for Operational Electricity and Overflow Electricity
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Jasa Pendukung / Revenue from Transportation Services and Support Services
PT Biofarma (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan dari Persewaan Lahan / Proceeds from Land Rentals
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Kontraktor dalam Pembangunan Proyek LRT Jabodebek / Contractors in the Jabodebek LRT Project Development
PT Aviata Pariwisata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Pembayaran Persewaan Lahan dan Utilitas Bandara / Land Rentals Payment and Airport Utilities
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Pembayaran Jasa Konsultasi / Payment for Consulting Services
PT Barata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Pembelian Suku Cadang Sarana / Purchase of Facility Spare Parts
PT LEN Industri (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Pembelian Suku Cadang Prasarana / Purchase of Infrastructure Spare Parts
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Pembayaran Tiket Pesawat / Airplane Ticket Payment
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Fasilitas Kredit Sindikasi dan Biaya Keuangan / Syndicated Credit Facility and Finance Fees
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Fasilitas Kredit Sindikasi dan Biaya Keuangan / Syndicated Credit Facility and Finance Fees
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Fasilitas Pinjaman Subordinasi dan Biaya Keuangan / Subordinated Loan Facility and Finance Fees
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan dari Pekerjaan Alih Daya / Acceptance from Outsourced Work
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Asuransi Pegawai / Employee Insurance
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Ventura Bersama / Joint Venture	Piutang Lain-lain / Other Receivables
PT Danareksa (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Pembayaran Jasa Percetakan / Payment for Printing Services
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Pembayaran Jasa Telekomunikasi / Telecommunications Service Payments
Perum PPD	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia / Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan Jasa Angkutan / Proceeds of Transportation Services

Realisasi Transaksi dengan Pihak Berelasi

Aset dari Pihak Berelasi

dalam ribuan rupiah

Uraian / Description	2022		2021	
	Nominal / Nominal	Persentase terhadap Total Aset / Percentage to Total Assets	Nominal / Nominal	Persentase terhadap Total Aset / Percentage to Total Assets
Bank (Rupiah)	4.894.631.652	6,83%	2.564.298.785	4,09%
Deposito (Rupiah) / Deposit (Rupiah)	398.510.000	0,56%	1.097.991.668	1,75%
Dana Dibatasi Penggunaannya / Restricted Use Funds	5.590.894.318	7,81%	2.744.384.445	4,37%
Piutang Usaha – Bersih / Accounts Receivable – Net	934.629.745	1,30%	678.094.695	1,08%
Piutang Lain-lain – Bersih / Other Receivables – Net	-	0,00%	-	0,00%
Pendapatan Masih Akan Diterima – Bersih / Receivables Revenue – Net	719.566.683	1,01%	86.194.122	0,14%
Jumlah / Total	12.538.232.398	17,52%	7.170.963.715	11,42%

Realization of Transaction with Related Parties

Assets from Related Parties

in thousand Rupiah

Liabilitas dari Pihak Berelasi

dalam ribuan rupiah

Uraian / Description	2022		2021	
	Nominal / Nominal	Persentase terhadap Total Liabilitas / Percentage to Total Liabilities	Nominal / Nominal	Persentase terhadap Total Liabilitas / Percentage to Total Liabilities
Utang usaha / Trade Payables	880.714.681	1,05%	473.426.130	1,20%
Pinjaman Jangka Pendek / Short Term Loans	760.000.000	1,78%	709.962.173	1,80%
Pinjaman Program PEN / PEN Program Loan	3.500.000.000	8,25%	3.500.000.000	8,89%
Pinjaman Jangka Panjang / Long Term Loans	11.855.551.877	27,89%	10.779.296.195	27,39%
Jumlah / Total	16.996.266.558	39,99%	15.462.684.498	39,29%

Liabilities from Related Parties

in thousand Rupiah

Pendapatan dari Pihak Berelasi

dalam ribuan rupiah

Uraian / Description	2022		2021	
	Nominal / Nominal	Persentase terhadap Total Pendapatan / Percentage to Total Income	Nominal / Nominal	Persentase terhadap Total Pendapatan / Percentage to Total Income
Jumlah Pendapatan / Total Income	11.295.833.314	48,89%	9.376.839.396	52,34%

Revenue from Related Parties

in thousand Rupiah

Beban dari Pihak Berelasi

dalam ribuan rupiah

Uraian / Description	2022		2021	
	Nominal / Nominal	Persentase terhadap Total Beban Pokok Pendapatan / Percentage to Total Cost of Revenue	Nominal / Nominal	Persentase terhadap Total Beban Pokok Pendapatan / Percentage to Total Cost of Revenue
Jumlah Beban / Total Expenses	4.482.452.966	19,33%	2.277.032.422	15,03%

Expenses from Related Parties

in thousand Rupiah

Uraian / Description	2022		2021	
	Nominal / Nominal	Persentase terhadap Total Beban Pokok Pendapatan / Percentage to Total Cost of Revenue	Nominal / Nominal	Persentase terhadap Total Beban Pokok Pendapatan / Percentage to Total Cost of Revenue
Jumlah Beban / Total Expenses	4.482.452.966	19,33%	2.277.032.422	15,03%

Kompensasi Manajemen Kunci

dalam ribuan rupiah

Uraian / Description	2022	2021
Direksi / Board of Directors	75.731.798	45.040.187
Dewan Komisaris / Board of Commissioners	30.984.481	19.232.797

Key Management Compensation

in thousand Rupiah

Uraian / Description	2022	2021
Direksi / Board of Directors	75.731.798	45.040.187
Dewan Komisaris / Board of Commissioners	30.984.481	19.232.797

Perincian nama pihak terkait realisasi (nilai) transaksi pihak berelasi disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2022 No. 39 sebagaimana yang terlampir pada Laporan Tahunan ini.

Details of the names of parties related to the realization (value) of related party transactions are presented in the Notes to the Consolidated Financial Statements of PT Kereta Api Indonesia (Persero) Year 2022 No. 39 as attached to this Annual Report.

Kewajaran Transaksi dan Alasan Dilakukan Transaksi

Transaksi pihak berelasi terjadi karena adanya kebutuhan usaha KAI. Transaksi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, persyaratan tersebut dapat sama atau tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak ketiga (*arm's length*). Kewajaran transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan secara wajar sesuai peraturan perundang-undangan. Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan laporan keuangan konsolidasian.

Fairness and Reason for Conducting the Transaction

Related party transactions occurred because of the business needs of KAI. Transactions were carried out based on terms agreed by both parties, these terms may or may not be the same as other transactions conducted with third parties (*arm's length*). The fairness of transactions with related parties had been carried out fairly in accordance with the laws and regulations. All significant transactions with related parties had been disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

Kebijakan Manajemen Review Transaksi dan Pemenuhan Peraturan Terkait

Seluruh transaksi telah melalui mekanisme *review* sesuai dengan jenis transaksi. Setiap transaksi dilakukan analisis kelayakan transaksi. KAI senantiasa berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang prudent dan seluruh transaksi telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Review Mechanism Policy on Transactions and Compliance with Related Rules

All transactions went through a review mechanism according to the type of transaction. Each transaction was subjected to a feasibility analysis of the transaction. KAI was always committed to running a prudent business, all transactions had complied with the prevailing rules and regulations.

Pengungkapan Transaksi Afiliasi pada Laporan Keuangan

Transaksi afiliasi Perseroan diungkapkan di dalam Laporan Keuangan PT KAI (Persero) dan Entitas Anak tahun buku 2022 pada catatan 41.

Disclosure of Affiliated Transaction on Financial Statements

Affiliated transactions of the Company were disclosed in Financial Statements of PT KAI (Persero) and Subsidiaries for 2022 Fiscal Year on note 41.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAK TERHADAP PERSEROAN

Amendments in Legislations and Impact on the Company

Selama tahun 2022, terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja KAI, dengan uraian sebagai berikut:

During 2022, there were changes in laws and regulations that have a significant effect on KAI's performance, with the following description:

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Perseroan / Amendments in Legislations and Impact on the Company				
No.	Nama Peraturan / Regulation Name	Pokok Peraturan / Regulation Principal	Informasi Penyesuaian yang Dilakukan oleh KAI / Adjustment Information Conducted by KAI	Dampak terhadap KAI / Impact on KAI
1.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan / Regulation of the Minister of Finance No. 138/PMK.02/2021 Types and Tariffs for Volatile Non-Tax State Revenues and Urgent Needs Applicable to the Ministry of Transportation	Pada KAI, aturan ini berpengaruh signifikan terhadap besaran <i>Track Access Charges</i> yang harus dibayarkan oleh KAI kepada Pemerintah / At KAI, this rule has a significant effect on the amount of <i>Track Access Charges</i> that must be paid by KAI to the Government	KAI melakukan koordinasi dengan kementerian dan pihak-pihak penentu kebijakan terkait agar ada keringanan atas <i>Track Access Charges</i> yang harus dibayarkan oleh KAI atas pemberlakuan peraturan baru tersebut / KAI coordinates with the ministries and related policy-making parties so that there is relief from the <i>Track Access Charges</i> that must be paid by KAI upon the implementation of the new regulation.	Penyelesaian Laporan Keuangan <i>Audited</i> dan Laporan Tahunan tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena KAI menunggu kepastian keringanan yang diberikan oleh Pemerintah atas pemberlakuan aturan baru tersebut. / Completion of the Audited Financial Statements and Annual Report could not be completed on time because KAI was waiting for confirmation of the relief provided by the Government for the implementation of the new regulations.
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 / Government Regulation Number 9 of 2022 dated February 9, 2022	Penyesuaian Tarif dan penambahan golongan tarif baru PPh Final atas Jasa Konstruksi / Tariff adjustment and addition of a new Final Income Tax rate class for Construction Services	Implementasi perubahan tarif pemotongan PPh Final atas jasa konstruksi / Implementation of changes to Final PPh withholding rates for construction services	Perubahan tarif pemotongan Pajak PPh Final atas Jasa Konstruksi / Changes in the Final Income Tax withholding rate for Construction Services
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022 / Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 55 of 2022 dated 20 December 2022	Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan terutama mengenai PPh atas Imbalan Natura/ Kenikmatan: / Adjustments to Regulations in the Field of Income Tax, especially regarding PPh on Natura/Enjoyment Rewards: <ul style="list-style-type: none"> Pemotongan pajak penghasilan atas naturan dan/atau kenikmatan berlaku surut sejak 1 Januari 2022, dalam hal belum dipotong wajib dihitung dan dibayarkan sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam SPT Tahunan Tahun 2022. / Withholding income tax on in-kind and/or enjoyment applies retroactively from January 1, 2022, in the event that it has not been deducted, it must be calculated and paid on its own and reported by the recipient in the 2022 Annual SPT. Kewajiban pemotongan oleh perusahaan mulai berlaku untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023. / The withholding obligation by the Company starts to apply to income received or accrued from January 1, 2023. 	Penambahan komponen penghasilan berupa natura dan kenikmatan yang merupakan objek PPh Pasal 21 / Additional components of income in the form of in-kind and enjoyment which are objects of Income Tax Article 21	Kenaikan PPh 21 / Income tax 21 increase

**Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Perseroan /
Amendments in Legislations and Impact on the Company**

No.	Nama Peraturan / Regulation Name	Pokok Peraturan / Regulation Principal	Informasi Penyesuaian yang Dilakukan oleh KAI / Adjustment Information Conducted by KAI	Dampak terhadap KAI / Impact on KAI
4.	Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi / Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection	Mengatur perlindungan data pribadi mulai dari jenis, hak, pemorsesan, kewajiban pengendali data, transfer data, sanksi administratif kelembagaan sampai dengan ketentuan pidana. / Regulate personal data protection ranging from types, rights, processing, data controller obligations, data transfer, institutional administrative sanctions to criminal provisions.	Saat ini sedang dalam proses untuk mematuhi UU 27/2022 dan dalam tahap penyusunan produk hukum perusahaan. / Currently in the process of complying with Law 27/2022 and in the stage of compiling company law products.	PT KAI selaku pengendali data pribadi sehingga wajib mematuhi ketentuan dalam UU 27/2022. / PT KAI as the controller of personal data is therefore obliged to comply with the provisions in Law 27/2022.
5.	Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara / Government Regulation no. 23 of 2022 concerning Amendments to Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises	Mengatur tata kelola pengangkatan dan pemberhentian serta tanggung jawab pribadi Dekom dan Direksi / Regulate the governance of the appointment and dismissal as well as the personal responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors	Ketentuan mengenai karyawan BUMN yang diangkat menjadi anggota direksi telah diterapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2022-2024 / Provisions regarding SOE employees who are appointed as members of the board of directors have been implemented in the 2022-2024 Collective Labor Agreement	<p>a. Larangan Direksi dan Dewan Komisaris untuk menjadi kepala/wakil kepala pemerintah daerah, bahkan jika sudah dalam proses mencalonkan jabatan tersebut. / Prohibition of the Board of Directors and the Board of Commissioners from becoming the head/deputy head of the regional government, even if they are already in the process of nominating the position.</p> <p>b. Anggota Direksi dan Komisaris saat ini dapat diberhentikan dengan alasan apapun yang dianggap tepat oleh RUPS/Menteri dan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan BUMN yang bersangkutan. / Current members of the Board of Directors and Commissioners can be dismissed for any reason deemed appropriate by the GMS/Minister and which are related to the aims and objectives of the SOE concerned.</p> <p>c. Anggota Direksi dan Komisaris, dapat dikecualikan dari tanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita BUMN selama mereka dapat membuktikan tidak mempunyai kepentingan pribadi dan telah menjalankan tugas dengan itikad baik. / Members of the Board of Directors and Commissioners may be exempted from personal responsibility for losses suffered by SOEs as long as they can prove that they have no personal interest and have carried out their duties in good faith.</p> <p>d. Pekerja PT KAI yang telah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun baik pada saat diangkat menjadi anggota Direksi maupun setelah diangkat menjadi anggota Direksi, Pekerja pensiun sebagai Pekerja dengan pangkat tertinggi dan hak pensiun tertinggi sesuai ketentuan di Perusahaan. / PT KAI employees who have reached the age of 50 (fifty) years both at the time of appointment as members of the Board of Directors and after being appointed as members of the Board of Directors, retired workers as employees with the highest rank and highest pension rights in accordance with the provisions of the Company.</p> <p>e. Dalam hal Pekerja PT KAI diangkat menjadi direksi pada BUMN lain, dapat meminta pensiun setelah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, baik saat pengangkatan maupun setelah menjabat, dengan pangkat dan hak pensiun sesuai ketentuan di Perusahaan. / In the event that PT KAI workers are appointed as directors of other BUMNs, they may ask for retirement after reaching the age of 50 (fifty) years, both at the time of appointment and after serving, with rank and retirement rights according to the provisions in the Company.</p> <p>Selama Pekerja PT KAI diangkat sebagai anggota Direksi atau direksi pada BUMN lain dan belum pensiun, kepangkatan Pekerja PKWTT berjalan sesuai ketentuan di Perusahaan. / As long as PT KAI workers are appointed as members of the Board of Directors or directors of other SOEs and have not retired, the rank of PKWTT worker goes according to the provisions in the company.</p>

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Perseroan /
Amendments in Legislations and Impact on the Company

No.	Nama Peraturan / Regulation Name	Pokok Peraturan / Regulation Principal	Informasi Penyesuaian yang Dilakukan oleh KAI / Adjustment Information Conducted by KAI	Dampak terhadap KAI / Impact on KAI
6.	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara / Minister of State Owned Enterprises Regulation No. PER-5/MBU/09/2022 concerning Implementation of Risk Management in State-Owned Enterprises	Mengatur penerapan manajemen risiko yang efektif, taksonomi risiko, dan kategori BUMN serta kewajiban penyampaian laporan risiko. / Regulates the implementation of effective risk management, risk taxonomy, and BUMN categories as well as the obligation to submit risk reports.	Sebagian ketentuan dalam Permen dimaksud telah diakomodir dalam Peraturan Direksi Nomor PER.U/KL.104/I/1/KA-2021 Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terpadu (Enterprise Risk Management). Saat ini telah dilakukan proses penyesuaian produk hukum perusahaan sehubungan dengan telah terbit Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023. / Some of the provisions in the said Ministerial Regulation have been accommodated in Directors Regulation Number PER.U/KL.104/I/1/KA-2021 Guidelines for Implementing Integrated Risk Management (Enterprise Risk Management). Currently, the process of adjusting the company's legal products has been carried out in connection with the issuance of the Minister of BUMN Regulation Number PER-02/MBU/03/2023.	Wajib untuk: / Mandatory for: a. menerapkan manajemen risiko yang efektif; / implement effective risk management; b. memiliki taksonomi risiko; / have a risk taxonomy; c. menetapkan kategori BUMN; / determine the category of BUMN; menetapkan pedoman internal, struktur organisasi, fungsi dan organ manajemen. / establish internal guidelines, organizational structure, functions and management organs.
7.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis / Regulation of the Minister of Health No. 24 of 2022 concerning Medical Records	Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (misalnya rumah sakit, apotek, klinik, dll.), termasuk fasilitas yang memberikan layanan telemedisin, wajib menyimpan rekam medis elektronik, yang dilakukan sejak pasien masuk hingga pulang, dirujuk, atau meninggal dunia. / All health service facilities (eg hospitals, pharmacies, clinics, etc.), including facilities that provide telemedicine services, are required to keep electronic medical records, which are carried out from the time the patient enters until he returns, is referred, or passed away.	Untuk saat ini rekam medis secara elektronik telah diselenggarakan oleh PT KAI melalui aplikasi Sikeska. / Currently, PT KAI has organized electronic medical records through the Sikeska application.	PT KAI yang memiliki klinik termasuk subyek yang harus menyelenggarakan rekam medis elektronik paling lambat 31 Desember 2023, hal ini telah dipenuhi. / PT KAI, which has a clinic, is one of the subjects who must organize electronic medical records no later than December 31, 2023, this has been fulfilled.
8.	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-7/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara / Minister of State Owned Enterprises Regulation No. PER-7/MBU/09/2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-11/MBU/07/2021 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Directors of State-Owned Enterprises	Menambahkan beberapa ketentuan baru mengenai pengangkatan Direksi BUMN yang meliputi: / Added several new provisions regarding the appointment of the Board of Directors of SOE which include: a. Pelaksanaan Pemeriksaan Rekam Jejak Calon Direksi; / Implementation of Track Record Examination of Candidates for the Board of Directors; b. Pengangkatan Calon Direksi oleh Komite Suksesi; dan / Appointment of Candidates for the Board of Directors by the Succession Committee; And c. Pengangkatan karyawan BUMN sebagai anggota Direksi. / Appointment of SOE employees as members of the Board of Directors.	Telah diterapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2022-2024 / It has been implemented in the 2022-2024 Collective Labor Agreement	a. Pekerja PT KAI yang telah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun baik pada saat diangkat menjadi anggota Direksi maupun setelah diangkat menjadi anggota Direksi, Pekerja pensiun sebagai Pekerja dengan pangkat tertinggi dan hak pensiun tertinggi sesuai ketentuan di Perusahaan. / PT KAI employees who have reached the age of 50 (fifty) years both at the time of appointment as members of the Board of Directors and after being appointed as members of the Board of Directors, retired workers as employees with the highest rank and highest pension rights in accordance with the provisions of the Company. b. Dalam hal Pekerja PT KAI diangkat menjadi direksi pada BUMN lain, dapat meminta pensiun setelah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, baik saat pengangkatan maupun setelah menjabat, dengan pangkat dan hak pensiun sesuai ketentuan di Perusahaan. / In the event that PT KAI workers are appointed as directors of other BUMNs, they may ask for retirement after reaching the age of 50 (fifty) years, both at the time of appointment and after serving, with rank and retirement rights according to the provisions in the Company. Selama Pekerja PT KAI diangkat sebagai anggota Direksi atau direksi pada BUMN lain dan belum pensiun, kepangkatan Pekerja PKWTT berjalan sesuai ketentuan di Perusahaan / As long as PT KAI employees are appointed as members of the Board of Directors or directors of other SOEs and have not retired, the rank of PKWTT worker goes according to the provisions of the company.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Amendment in Accounting Policy

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amendemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2022.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tanggahan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal; dan
- Revisi PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

Standar baru yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi.

Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar tersebut.

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and adjustments to standards, as well as interpretations of standards but are not yet effective for the period starting January 1, 2022

Amendments to standards that are effective for periods beginning on or after January 1, 2023, early application is permitted, namely:

- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;
- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding the Classification of Liabilities as Short Term or Long Term;
- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;
- Amendments to PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors Regarding the Definitions of Accounting Estimates;
- Amendments to PSAK 46: Income Tax regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; And
- Revised PSAK 107: Accounting for Ijarah.

The new standards that are effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption permitted are:

- PSAK 74: Insurance Contract.

Amendments to PSAK 74: Insurance Contracts regarding Early Adoption of PSAK 74 and PSAK 71 – Comparative Information.

As of the authorization of the financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Business Continuity Information

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Manajemen KAI mengidentifikasi hal-hal yang memiliki potensi untuk memberi pengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Potensi PT KAI sebagai Pimpinan Konsorsium tidak dapat memenuhi seluruh beban *cost overrun* sponsor Indonesia sesuai *facility agreement*;
2. Potensi tidak diperolehnya PMN Rp1 triliun untuk Pemenuhan biaya tambahan (*cost overrun*) untuk Proyek KCJB;
3. PT KAI masih menanggung beban biaya pengelolaan penyelenggaraan angkutan KA LRT tahun 2023;
4. Potensi risiko terjadinya anjlokkan KA di jalur angkutan batu bara Sumbagsel;
5. Potensi Ketidakmampuan mitra/klien PT BA maupun Swasta dalam memenuhi target kapasitas angkut yang telah disepakati;
6. Potensi adanya penumpukan batu bara di Stockpile Bongkaran untuk angkutan batu bara Kertapati;
7. Potensi risiko kenaikan biaya TAC pada RKAP 2023;
8. Potensi risiko adanya permintaan setoran modal dari MITJ untuk menutup *cash deficiency* KCI;
9. Potensi peningkatan Biaya Operasi (BIOP) KA Angkutan Batubara;
10. Potensi biaya tambahan untuk BBM di luar biaya yang dianggarkan pada RKAP 2023.

Assessment Manajemen terhadap Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Dengan mempertimbangkan sejumlah hal yang telah diuraikan di atas, manajemen KAI melakukan *assessment* terhadap masing-masing perihal yang teridentifikasi, dengan pengungkapan sebagai berikut:

1. Memastikan penjaminan pemerintah atas pinjaman sebesar 60% dari 75% nilai *cost overrun* dengan melakukan koordinasi intensif dengan Komite Kereta Cepat;
2. Apabila CDB tidak memberikan pinjaman, maka dimintakan usulan PMN kepada pemerintah dengan porsi Indonesia USD870 juta atau setara sebesar Rp12,8 triliun (kurs RKAP 2023 Rp14.800,-);

Things that Potentially Influence Significantly on Business Continuity

KAI's management identifies matters that have the potential to significantly influence the continuity of the Company's business, with the following details:

1. The potential for PT KAI as the Consortium Leader cannot fulfill all of the cost overrun costs of the Indonesian sponsor according to the facility agreement;
2. The potential for not obtaining PMN of Rp1 trillion for meeting additional costs (cost overrun) for the KCJB Project;
3. PT KAI still bears the burden of managing the costs of organizing the 2023 LRT train transportation;
4. The potential risk of a train derailment on Southern Sumatra coal transportation route;
5. Potential inability of partners/clients of PT BA and the private sector to meet the agreed transport capacity targets;
6. The potential for coal accumulation in the Bongkaran Stockpile for Kertapati coal transportation;
7. Potential risk of increasing TAC costs in the 2023 RKAP;
8. Potential risk of requesting a capital deposit from MITJ to cover KCI's cash deficiency;
9. Potential increase in Coal Transport Railway Operational Costs (BIOP);
10. Potential additional costs for fuel beyond the costs budgeted in the 2023 RKAP.

Management Assessment of Things that Potentially Influence Significantly on Business Continuity

Taking into account a number of matters described above, KAI's management conducted an assessment of each identified matter, with the following disclosures:

1. Ensuring government guarantees for loans of 60% of the 75% value of the cost overrun by carrying out intensive coordination with the High Speed Rail Committee;
2. If the CDB does not provide a loan, then the government is asking for PMN proposals with an Indonesian portion of USD 870 million or the equivalent of IDR 12.8 trillion (the 2023 RKAP exchange rate is Rp14,800);

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Dokumen usulan PMN Rp1 triliun harus ditambahkan justifikasi bahwa PMN tersebut dapat digunakan untuk mengurangi cost overrun porsi pinjaman sponsor Indonesia 75% dari nilai <i>cost overrun</i> semula Rp9,6 triliun menjadi Rp8,6 triliun; 4. Melakukan sosialisasi dan promosi terhadap calon penumpang LRT dan melakukan negoisasi dengan pemerintah agar subsidi sarana dapat dipenuhi dalam anggaran tahun 2023 atau maksimal dapat dipenuhi awal tahun 2024; 5. Perlu dipastikan bahwa pekerjaan <i>reinvestment</i> di jalur angkutan batu bara sumbagsel tetap dilakukan untuk mendukung opsi alternatif target volume angkutan yang akan dipilih dan untuk menjamin kelancaran operasional perjalanan angkutan batu bara di Sumbagsel; 6. Perlu dipastikan bahwa pekerjaan <i>reinvestment</i> di jalur angkutan batu bara Sumbagsel tetap dilakukan untuk mendukung opsi alternatif target volume angkutan yang akan dipilih dan untuk menjamin kelancaran operasional perjalanan angkutan batu bara di Sumbagsel; 7. Perlu ada koordinasi dan negosiasi dengan instansi terkait di Pemprov Sumbagsel yang menangani lalulintas Sungai Musi, untuk dapat diberikan penambahan slot angkutan batu bara, termasuk melibatkan pihak mitra; 8. Meminta kepada Kemenhub untuk tetap menerapkan PP 15 tahun 2016 sebagai dasar perhitungan TAC dan apabila Kemenhub akan memberlakukan PMK No 138/PMK.02/2021, maka perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan/DJKA agar dibuat Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur terkait besaran Satuan Biaya Penggunaan Prasarana KA di bawah nilai yang ditetapkan pada PMK No 138/PMK.02/2021; | <ol style="list-style-type: none"> 3. The Rp1 trillion PMN proposal document must add justification that the PMN can be used to reduce the cost overrun portion of Indonesia's sponsor loans by 75% of the initial cost overrun value of Rp9.6 trillion to Rp8.6 trillion; 4. Conduct socialization and promotion of prospective LRT passengers and negotiate with the government so that facility subsidies can be met in the 2023 budget or can be fulfilled at the beginning of 2024; 5. It is necessary to ensure that reinvestment work on the South Sumatran coal transportation route is still being carried out to support alternative options for the selected transport volume target and to ensure the smooth operation of coal transportation trips in South Sumatra; 6. It is necessary to ensure that reinvestment work on the Sumbagsel coal transportation route is still being carried out to support alternative options for the selected transport volume target and to ensure the smooth operation of coal transportation trips in South Sumatra; 7. There needs to be coordination and negotiation with related agencies in the South Sumatra Provincial Government which handles Musi River traffic, so that additional coal transportation slots can be given, including involving partners; 8. Request the Ministry of Transportation to continue implementing PP 15 of 2016 as the basis for calculating the TAC and if the Ministry of Transportation will enact PMK No 138/PMK.02/2021, it is necessary to coordinate with the Ministry of Transportation/DJKA so that a Minister of Transportation Regulation is made which regulates unit size The fee for using the railway infrastructure is below the value specified in PMK No 138/PMK.02/2021; |
|---|--|

9. Mengupayakan skema PSO yang sesuai dengan kondisi KCI setelah pemisahan sebagai anak perusahaan BUMD yaitu melalui Dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI;
 10. Penyesuaian tarif angkutan batu bara dan peningkatan pendapatan melalui fuel surcharge kepada Mitra Angkutan Batu bara;
 11. Perlu diantisipasi alokasi atau dicadangkan biaya untuk meng-cover adanya kenaikan BBM;
9. Strive for a PSO scheme that is in accordance with KCI conditions after separation as a Regional-Owned Enterprises subsidiary, namely through the Central Government Special Allocation Fund to the DKI Provincial Government;
 10. Adjustment of coal transportation rates and increase in revenue through fuel surcharges for coal transportation partners;
 11. It is necessary to anticipate the allocation or reserves of costs to cover an increase in fuel prices;

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Assessment

Manajemen menggunakan asumsi makro-ekonomi untuk melakukan *assessment* pengaruh perubahan kondisi perekonomian terhadap kelangsungan bisnis KAI. Pada 2022, RKAP disusun masih pada masa pandemi Covid-19 sehingga perubahan-perubahan yang terjadi masih di dalam koridor-koridor asumsi yang telah ditetapkan oleh manajemen. Hal tersebut tidak berbeda signifikan dengan pada 2021, dengan tahun tersebut merupakan puncak dari pandemi sehingga manajemen secara rutin melakukan *stress test* untuk menyesuaikan asumsi awal dengan perubahan kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Assumptions Used by Management in Conducting Assessments

Management uses macro-economic assumptions to assess the effect of changing economic conditions on KAI's business continuity. In 2022, the RKAP was prepared during the COVID-19 pandemic so that the changes that occurred were still within the corridors of assumptions set by management. This is not significantly different from 2021, with that year being the peak of the pandemic so management routinely conducts stress tests to adjust initial assumptions with changes in economic conditions due to the COVID-19 pandemic.



06

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance



KAI memahami, di tengah perkembangan kebutuhan transportasi dan dinamika industri, pencapaian pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan merupakan sesuatu yang secara mendasar penting untuk diwujudkan. KAI memiliki harapan besar untuk tumbuh sebagai operator transportasi berstandar internasional, seiring pengelolaan hubungan baik dengan segenap pemangku kepentingan sebagai aspek fundamental bagi Perseroan. Dengan pemahaman dan harapan tersebut, KAI berkomitmen untuk secara konsisten melaksanakan pengelolaan aktivitas operasional dan bisnis sesuai praktik-praktik terbaik (*best practices*) penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

Sebagai entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), KAI melaksanakan praktik GCG sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan *Core Values* AKHLAK sesuai Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020, yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Selain itu, penerapan GCG KAI dilaksanakan searah dengan pencapaian visi Perseroan untuk tumbuh sebagai solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Akhirnya, penerapan GCG KAI memiliki orientasi jangka panjang berupa penciptaan nilai tambah bagi seluruh unsur pemangku

KAI is aware on the fundamental importance of achieving sound and sustainable business growth in the midst of developments in transportation needs and industrial dynamics. KAI has great hopes to grow as an international standard transportation operator, while also managing good relations with all stakeholders as a fundamental aspect for the Company. With this understanding and expectation, KAI is committed to consistently managing operational and business activities according to implementation of best practices of Good corporate Governance (GCG) principles.

As a State-Owned Enterprise (SOE), KAI implements GCG practices as an integral part of the AKHLAK Core Values according to SOE Minister Circular Letter No. SE-7/MBU/07/2020, which consists of Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative. In addition, the implementation of KAI's GCG is in line with achievement of the Company's vision to grow as the best transportation ecosystem solution for Indonesia. Ultimately, KAI's GCG implementation has a long-term orientation in the form of creating added value for all elements of stakeholders,

TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance

“

Sebagai entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), KAI melaksanakan praktik GCG sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Core Values AKHLAK sesuai Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020, yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

As a State-Owned Enterprise (SOE), KAI implements GCG practices as an integral part of the AKHLAK Core Values according to SOE Minister Circular Letter No. SE-7/MBU/07/2020, which consists of Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative. ”

kepentingan, mencakup pelanggan, pemegang saham, regulator, pegawai, mitra usaha, hingga masyarakat secara luas.

including customers, shareholders, regulators, employees, business partners, and the general public.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Basis of Good Corporate Governance Implementation

Penerapan GCG KAI didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan perincian sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
4. Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012, tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

KAI's GCG implementation is based on a number of applicable laws and regulations, as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises (BUMN).
3. SOE Minister Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Good Corporate Governance implementation in State-Owned Enterprises (SOEs), as amended by the SOE Minister Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012.
4. Copy of Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises.

Lebih dari itu, penerapan GCG KAI juga mengacu kepada praktik-praktik terbaik yang berlaku, mencakup standar penerapan sebagai berikut:

1. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG);
2. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*; serta
3. Pedoman tata kelola perusahaan yang ditetapkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).

In addition, KAI's GCG implementation also refers to applicable best practices, including the following implementation standards:

1. Indonesian GCG General Guidelines by the National Committee on Governance Policy (KNKG);
2. ASEAN Corporate Governance scorecards; and
3. Guidelines for corporate governance stipulated through the Financial Services Authority Regulation (POJK) and Financial Services Authority Regulation Circular Letter (SEOJK).

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance Mechanism

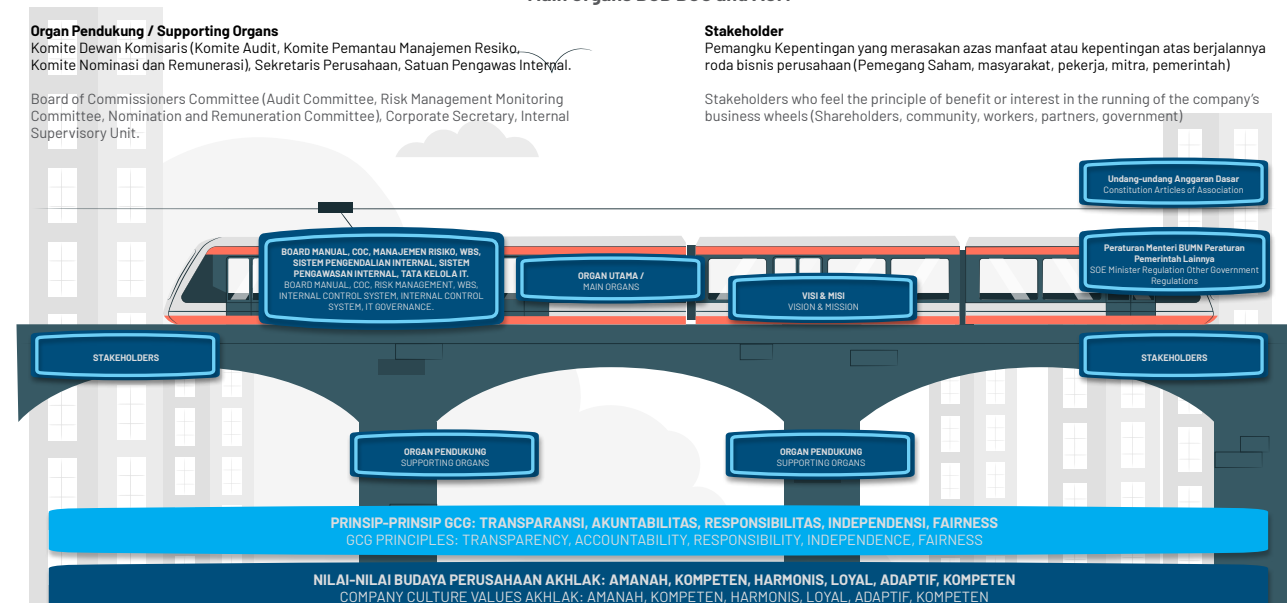
KAI menerapkan tata kelola perusahaan melalui mekanisme yang terdiri atas 2 (dua) komponen utama, yaitu struktur serta *soft-structure*. Struktur tata kelola KAI terdiri dari sejumlah organ utama dan pendukung, sedangkan *soft-structure* tata kelola KAI terdiri atas sejumlah peraturan internal yang berlaku sebagai acuan penerapan GCG bagi masing-masing organ di dalam struktur tata kelola.

KAI implements corporate governance through a mechanism consisting of 2 (two) main components, namely structure and *soft-structure*. KAI's governance structure consists of a number of main and supporting organs, while the *soft-structure* KAI's governance consists of a number of internal regulations that apply as a reference for the implementation of GCG for each organ in the governance structure.

Mekanisme tata kelola KAI diterapkan sebagai upaya berkelanjutan dalam rangka menghasilkan *governance outcome* bagi seluruh pemangku kepentingan, dengan *core values* AKHLAK dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness/TARIF*) berlaku sebagai landasan.

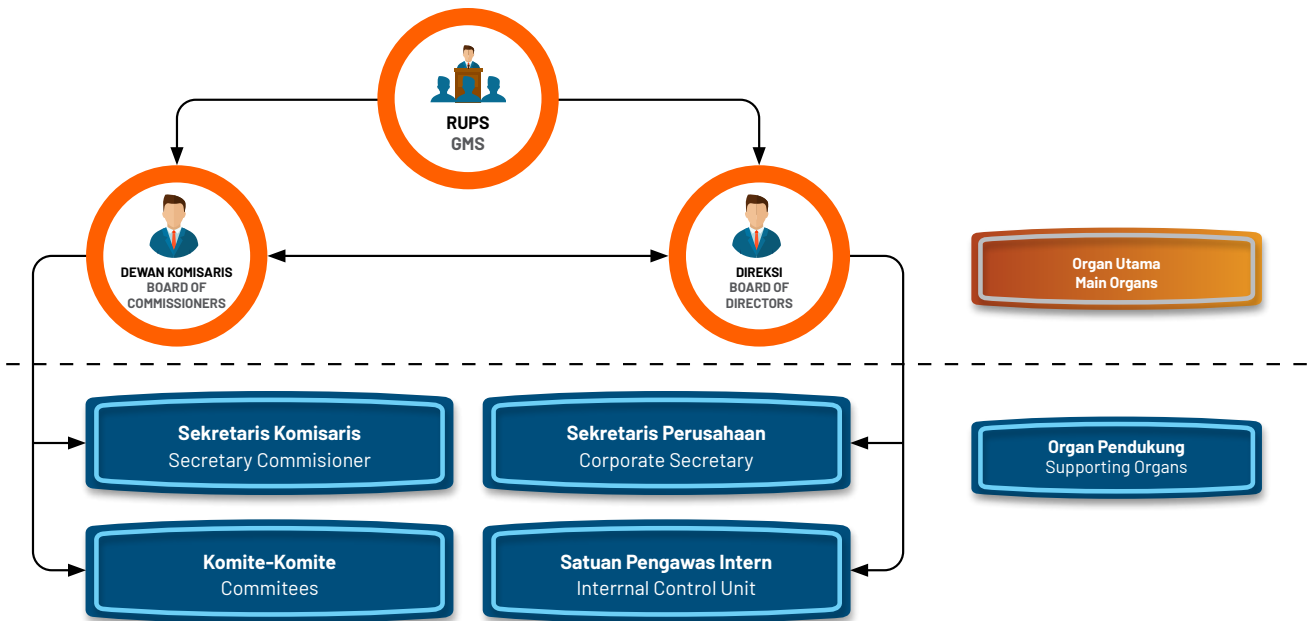
KAI's governance mechanism is implemented as a sustainable effort in order to produce *governance outcome* for all stakeholders, with AKHLAK core values and the principles of good corporate governance (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness/ TARIF*) as a foundation.

Organ Utama BOD BOC dan RUPS Main Organs BOD BOC and AGM



STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur tata kelola KAI terdiri atas sejumlah organ utama dan pendukung GCG. Organ-organ utama di dalam struktur tata kelola KAI terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Adapun, organ-organ pendukung terdiri dari Sekretaris Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Komite-Komite, serta Satuan Pengawas Internal.



CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

KAI's governance structure consists of a number of GCG main and supporting organs. The main organs in KAI's governance structure consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors. Meanwhile, the supporting organs consist of Secretary to the Board of Commissioners, Corporate Secretary, Committees, and Internal Audit Unit.

SOFT-STRUCTURE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Soft-structure tata kelola KAI terdiri atas sejumlah peraturan internal yang berlaku sebagai acuan bagi masing-masing organ di dalam struktur tata kelola. Soft-structure tata kelola KAI untuk periode penerapan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Board Manual Nomor: 04/CH/KOM/III/2017 dan KEP.U/KO.101/III/15/KA-2017 tentang Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT Kereta Api Indonesia (Persero).
3. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik diatur dalam Peraturan Direksi PER.U/KC.202/XII/L/KA-2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).
4. Pedoman Perilaku diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: PER.U/KC.202/III/1/KA-2022 tentang Pedoman Perilaku di PT Kereta Api Indonesia (Persero).
5. Pedoman Pengelolaan Whistleblowing System diatur dalam Peraturan Direksi nomor: PER.U/KL.I04/XI/I/KA-2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System).

CORPORATE GOVERNANCE SOFT-STRUCTURE

KAI's governance soft-structure consists of a number of internal regulations as a reference for each organ in the governance structure. KAI's governance soft-structure for the 2022 implementation period is as follows:

1. Articles of Association of PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Board Manual No. 04/CH/KOM/III/2017 and KEP.U/KO.101/III/15/KA-2017 concerning Work Guidelines of the Board of Commissioners and Directors (Board Manual) of PT Kereta Api Indonesia (Persero).
3. Guidelines of Good Corporate Governance regulated in the Board of Directors Regulation PER.U/KC.202/XII/L/KA-2020 concerning Guidelines of Good Corporate Governance.
4. Behavioral Guidelines regulated in the Board of Directors Regulation No. PER.U/KC.202/III/1/KA-2022 concerning Behavioral Guidelines at PT Kereta Api Indonesia (Persero).
5. Guidelines of the Whistleblowing System Management regulated in the Board of Directors Regulation No. PER.U/KL.I04/XI/I/KA-2020 concerning Guidelines of Whistleblowing System.

6. Pedoman Manajemen Risiko diatur dalam Peraturan Direksi nomor PER.U/KL.104/I/1/KA-2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terpadu (Enterprise Risk Management).
7. Pedoman Sistem Informasi Perusahaan diatur dalam Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) nomor KEP.U/OT.003/IX/4/KA-2011 tentang Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) dan Keputusan Direksi Nomor: KEP.U/KK.101/VIII/1/KA-2016 tentang Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi.
8. Pedoman SPI diatur dalam Keputusan Direksi nomor: KEP.U/ PS.106/V/3/KA-2014 tentang Pedoman Pengelolaan Satuan Pengawasan Internal.
9. Peraturan internal yang terkait.
6. Risk Management Guidelines regulated in the Board of Directors Regulation number PER.U/KL.104/I/1/KA-2021 concerning Guidelines for Integrated Risk Management (Enterprise Risk Management) Implementation.
7. Guidelines for the Company's Information System regulated in the Decree of the Board of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KEP.U/OT.003/IX/4/KA-2011 concerning General Policy on Information Technology Governance (IT Governance) and Board of Directors Directors Decree No. KEP.U /KK.101/VIII/1/KA-2016 concerning Information Technology Policies and Procedures.
8. SPI guidelines regulated in the Board of Directors Decree No. KEP.U/PS.106/V/3/KA-2014 concerning Guidelines of the Internal Audit Unit Management.
9. Relevant internal regulations.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di dalam struktur tata kelola Perseroan. Atas hal itu, RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris ataupun Direksi, dengan batas-batas yang ditetapkan di dalam Undang-Undang ataupun Anggaran Dasar. RUPS sekaligus merupakan forum bagi pemegang saham untuk menyalurkan hak dalam mendapatkan informasi terkait KAI oleh Dewan Komisaris ataupun Direksi, sesuai pemenuhan kepentingan Perseroan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS memiliki sejumlah kewenangan, antara lain:

1. Melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the corporate governance structure. Thus, the GMS has authorities that are not given to the Board of Commissioners or the Board of Directors, with limits set in the Law or the Articles of Association. The GMS is also a forum for shareholders to channel their rights to obtain information related to KAI by the Board of Commissioners or the Board of Directors, in accordance with the fulfillment of the Company's interests.

Based on the laws and regulations and the Company's Articles of Association, the GMS has a number of powers, including:

1. Appoint and dismiss the Board of Directors and Board of Commissioners;
2. Make necessary decisions to safeguard the Company's business interests for long and short term in accordance with the laws and regulations and the Company's Articles of Association;
3. Give approval to the Annual Report including ratification of the Financial Statements in accordance with the laws and regulations and the Company's Articles of Association;
4. Make decisions through an open and fair and accountable process;
5. Implement Good Corporate Governance in accordance with its authority and responsibilities.

Berdasarkan penyelenggaraannya, RUPS terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). Penjelasan mengenai jenis-jenis RUPS tersebut adalah sebagai berikut:

RUPS Tahunan (RUPST)

RUPS Tahunan (RUPST) diselenggarakan setiap tahun, yang meliputi:

1. RUPS mengenai laporan tahunan dan perhitungan tahunan. Diadakan paling lambat bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan. Dalam RUPS Tahunan ini dibahas laporan Direksi mengenai Laporan Tahunan, perhitungan tahunan, keadaan dan jalannya Perseroan, usulan penggunaan laba bersih Perseroan serta hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS demi kepentingan Perseroan.
2. RUPS untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang bersangkutan). Dalam RUPS Tahunan ini dibahas Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan termasuk Proyeksi Laporan Keuangan, dan hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam RKAP.

RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

RUPS Luar Biasa (RUPSLB) diselenggarakan bila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB dilakukan melalui undangan tertulis dengan menginformasikan agenda pembahasannya.

Pelaksanaan RUPS Tahunan Pengesahan RKAP Tahun 2022

Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan Pengesahan RKAP Tahun 2022, pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 27 Januari 2022
Waktu : 10.05-11.00 WIB
Tempat : *Virtual Meeting* melalui *Video Conference* via *Zoom Meeting*

Based on the implementation, the GMS consists of 2 (two) types, namely the Annual GMS (AGMS) and the Extraordinary GMS (EGMS) with the following details:

Annual GMS (AGMS)

The Annual GMS (AGMS) is held every year, which includes:

1. GMS related to annual reports and annual calculations. Held no later than June after the end of concerned fiscal year. In this Annual GMS discusses the Directors' report related to the Annual Report, the annual calculation, current Company condition, the proposal of the Company's net profit usage and other matters that need GMS approval in the interest of the Company.
2. GMS to approve the Company's Work Plan and Budget. Held no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year (the fiscal year of the Work Plan and Budget of the concerned Company). This Annual GMS discusses the Company's Work Plan and Budget including the Projection of Financial Statements, and other matters that need GMS approval for the interests of the Company that have not been included in the RKAP..

Extraordinary GMS (EGMS)

The Extraordinary GMS (EGMS) is held if deemed necessary by the Board of Directors and/or Board of Commissioners and/or Shareholders. The EGMS invitation and implementation conducted through a written invitation by informing the discussion agenda.

Implementation of Annual GMS for the Ratification of the 2022 RKAP The Company's Annual General Meeting of Shareholders to ratify the 2022 RKAP was held on:

Date : Thursday, January 27, 2022
Time : 10.05-11.00 WIB
Venue : *Virtual Meeting* via *Video Conference* via *Zoom Meeting*

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun Buku 2022

Penyelenggaraan RUPS Tahunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2022 dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Keterangan / Attendance
Kuasa Pemegang Saham / Shareholder Proxy			
1	Desty Arliani	Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik / Assistant Deputy for Logistics Services	Hadir / Present
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
1	Said Aqil Siroj	Komisaris Utama / President Commissioner	Hadir / Present
2	Riza Primadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Hadir / Present
3	Endang Tirtana	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Hadir / Present
4	Freddy Harris	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
5	Chris Kuntadi	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
6	Diah Natalisa	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
7	Chairul Anwar	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
Direksi / Board of Directors			
1	Didiek Hartantyo	Direksi Utama / President Director	Hadir / Present
2	Dadan Rudiansyah	Direksi Niaga / Director of Commerce	Hadir / Present
3	Heru Kuswanto	Direksi Operasi / Director of Operations	Hadir / Present
4	Awan Hermawan Purwadinata	Direksi Pengelolaan Prasarana / Director of Infrastructure Management	Hadir / Present
5	Eko Purwanto	Direksi Pengelolaan Sarana / Director of Facility Management	Hadir / Present
6	John Robertho	Direksi Keselamatan dan Keamanan / Director of Safety and Security	Hadir / Present
7	Agung Yunanto	Direksi SDM dan Umum / Director of HC and General Affairs	Hadir / Present
8	Jeffrie N Korompis	Direksi Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha / Director of Strategic Planning and Business Development	Hadir / Present
9	Salusra Wijaya	Direksi Keuangan dan Manajemen Risiko / Director of Finance and Risk Management	Hadir / Present

Recapitulation of Attendance at the Annual General Meeting of Shareholders of PT Kereta Api Indonesia (Persero) Company Financial Accountability Report for the 2022 Fiscal Year

The Annual GMS of the Company's Financial Responsibility Report for the 2022 Fiscal Year was attended by members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders with details as follows:

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022

Keputusan dan realisasi dari masing-masing keputusan pada RUPS Tahunan Pengesahan RKAP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Resolutions and Realization of the Annual GMS endorsement Plan Company Work and Budget for 2022

Resolutions and realization of each decision at the Annual GMS Ratification of the 2022 RKAP is as follows:

Agenda Pertama / First Agenda	
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2022 / Ratification of the Company 2022 Work Plan and Budget (RKAP) including the Board of Commissioners 2022 Work Plan and Budget	

Keputusan

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2022 PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan pokok-pokok sebagai berikut.

Resolution

Ratified the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2022 including the Board of Commissioners 2022 Work Plan and Budget for PT Kereta Api Indonesia (Persero), with the following points:

a. Asumsi Penyusunan RKAP 2022

Uraian / Description	RKAP 2022
Nilai Tukar Rupiah/USD / Rupiah/USD Exchange Rate	Rp14.350/USD
Tingkat Inflasi (%) / Inflation Rate (%)	3,00%
Pertumbuhan Ekonomi (%) / Economic growth (%)	5,0%-5,5%
Suku Bunga / Interest rate	6,82%
PSO (Rp Triliun) / PSO (Rp Trillion)	Rp 3,5
IMO (Rp Triliun) / IMO (Rp Trillion)	455
Covid Recovery	TW II 2022

a. Assumption for the 2022 RKAP Preparation

b. Pokok-pokok Laporan Keuangan (Rp Miliar)

Uraian / Description	RKAP 2022
Pendapatan (di luar konstruksi) / Revenue (excluding construction)	20.512
Laba/(Rugi) Usaha / Profit/(Loss) Business	1.422
EBITDA	2.983
Laba/(Rugi) Bersih / Net Profit/(Loss)	104
Total Aset / Total Assets	75.359
Ekuitas / Equity	27.548
Interest Bearing Debt	36.601
Net Operating Cash Flow	1.624

b. Principal Financial Statements (Rp Billion)

c. Capital Expenditure/Investasi (Rp Miliar)

Uraian / Description	RKAP 2022
Investigasi Non Penugasan Pemerintah / Government Non-Assignment Investment	4.363
1. Program Investasi Bisnis Eksisting / Investment in Existing Business Program	2.324
2. Program Investasi Pengembangan / Development Investment Program	2.015
3. Program Penyertaan/Tambahan Modal / Investment/Additional Capital Program	24
Penugasan Pemerintah / Government Assignment	12.555
1. Program Investasi LRT Jabodetabek / Jabodetabek LRT Investment Program	7.488
2. Program Penyertaan MITJ / MITJ Inclusion Program	34
3. Program Penyertaan PSBI / PSBI Participation Program	5.033
Investasi Anak Perusahaan / Subsidiary Investment	1.185
Total Investasi / Total Investment	18.103

c. Capital Expenditure/Investment (Rp Billion)

Agenda Kedua / Second Agenda

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2022. / Ratification of the 2022 Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget (RKA-TJSL).

Keputusan

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2022 PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Resolution

Ratified PT Kereta Api Indonesia (Persero)'s 2022 Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget (RKA-TJSL).

Agenda Ketiga / Third Agenda

 Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2022. / Ratification of the Annual Management Contract containing the collegial Board of Directors and Board of Commissioners Key Performance Indicators (KPI) of 2022.

Keputusan

 Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Kolegial Tahun 2022, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Resolution

Ratified the Annual Management Contract containing the collegial Board of Directors and Board of Commissioners Key Performance Indicators (KPI) of 2022 with the following points:

Key Performance Indicators
Key Performance Indicators

No.	KPI	Satuan / Unit	Target RKAP	Polaritas / Polarity	Bobot / Value	Sub-Total
A. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia / Social-Economic Value for Indonesia						45
Finansial / Financial					15	
1	Ekspansi Berkelanjutan / Sustainable Expansion					
	EBITDA	Rp Miliar / Rp Billion	2.983	Maximize	6	
2	ROIC against WACC	%	-0,6	Maximize	3	
3	Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali / Time	12,3	Minimize	3	
	Interest Bearing Debt to Invested Capital	Kali / Time	57,1	Minimize	3	
Operasional / Operational					23	
4	Volume Angkutan KA Penumpang / Passenger Train Volume	Penumpang / Passenger	60.246.406	Maximize	8	
5	Ketepatan waktu angkutan (kedatangan) / Timeliness of transportation (arrival)	%	75,42	Maximize	8	
6	Safety/Accident Rate	%	0,13	Minimize	7	
Sosial / Social					7	
7	Pemenuhan pelaksanaan PSO / Fulfillment of PSO implementation	%	100	Maximize	7	
B. Inovasi Model Bisnis						14
8	Project milestone completion for TOD planned (KAI) TOD Stasiun Pondokranji-JRP / Project milestone completion for planned TOD (KAI) Pondokranji-JRP Station TOD	%	100	Maximize	7	
9	Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan Rel Kategori Baik (Kecepatan 80 - 120 km/jam) / Improved Quality of Rail Road Infrastructure in Good Category (Speed 80 - 120 km/hour)	Kmsp	5.103	Maximize	7	

No.	KPI	Satuan / Unit	Target RKAP	Polaritas / Polarity	Bobot / Value	Sub-Total
C. Kepemimpinan Teknologi / Technology Leadership						17
10	Peningkatan penggunaan KAI Access (diukur dari jumlah transaksi di KAI Access) / Increased use of KAI Access (measured by the number of transactions in KAI Access)	Jumlah transaksi / Total Transaction	886.046	Maximize	10	
11	Implementasi Big Data / Big Data Implementation	%	90	Maximize	7	
D. Peningkatan Investasi / Investment Increase						14
12	Project Milestone Penugasan Pemerintah (PSN) – LRT Jabodetabek / Government Assignment Project Milestone (PSN) – Jabodetabek LRT	%	100	Maximize	7	
13	Project Milestone Completion of Investment Initiative (Notes: KAI Proses Sertifikasi tanah –Legal) / Project Milestone Completion of Investment Initiative (Notes: KAI Land Certification Process – Legal)	Rp Miliar / Rp Billion	130	Maximize	7	
E. Pengembangan Talenta / Talent Development						10
14	% Rasio Perempuan dalam <i>nominated talent</i> / % Female ratio in <i>nominated talent</i>	%	4	Maximize	3	
	% Rasio milenial (<42 tahun) dalam <i>top talent</i> / % Millennial ratio (<42 years old) in <i>top talent</i>	%	10	Maximize	3	
15	Penyusunan Kebijakan Talent Development dan <i>Career Path System</i> di Lingkup Klaster / Preparation of Talent Development and Career Path System Policies in the Cluster Scope	%	50	Maximize	4	
TOTAL						100

Agenda Keempat / Fourth Agenda

Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan (*Key Performance Indicators*) Dewan Komisaris Tahun 2022 / Ratification of the Annual Management Contract (*Key Performance Indicators*) of the Board of Commissioners for 2022.

Keputusan

Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan (*Key Performance Indicators*) Dewan Komisaris Tahun 2022, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Resolution

Ratified the Annual Management Contract (*Key Performance Indicators*) of the Board of Commissioners for 2022, as attached as an integral part of the resolution.

Key Performance Indicators

Key Performance Indicators

No.	Aspek dan Parameter / Aspects and Parameters	KPI		Bobot / Value
		Target	Satuan / Unit	
I. ASPEK PENGAWASAN DAN PENASIHATAN / ASPECT OF SUPERVISION AND ADVICE-GIVING				55
1	Review/analisis kinerja perusahaan / Company performance review/analysis	8	Kali / Time	20
	• Penelaahan atas Rancangan RJPP / Review of the RJPP Draft			2
	• Penelaahan atas Rancangan RKAP / Review of the RKAP Draft			4
	• Evaluasi atas pelaksanaan RKAP 2020 / of the implementation of the 2020 RKAP			4
	• Pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham / Monitoring of performance of the Board of Directors and reporting to Shareholders			2
	• Perubahan lingkungan bisnis / Changes in the business environment			2
	• Tindak lanjut atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari pemangku kepentingan / Follow up on suggestions, expectations, concerns and complaints from stakeholders			2
	• Gejala menurunnya kinerja perusahaan yang signifikan / Symptoms of a significant decline in company performance			2
	• Penilaian atas usulan calon Direksi Anak Perusahaan dan Komisaris Anak Perusahaan / Assessment of the proposed candidates for the Board of Directors of the Subsidiaries and the Board of Commissioners of Subsidiaries			2

No.	Aspek dan Parameter / Aspects and Parameters	KPI		Bobot / Value
		Target	Satuan / Unit	
2	Pengawasan dan pemberian nasihat atas: / Supervision and providing advice on:	11	Kali / Time	15
	• Kebijakan rancangan Satuan Pengawas Internal / Internal Audit Unit draft policy			1
	• Kebijakan manajemen risiko / Risk management policy			2
	• Kebijakan sistem teknologi informasi / Information technology system policy			1
	• Kebijakan akuntansi dan penyusunan LK / Policy on accounting and preparation of financial statements			2
	• Kebijakan pengelolaan SDM / HC management policy			1
	• Kebijakan pengadaan barang dan jasa / Policy on procurement of goods and services			2
	• Kebijakan mutu dan pelayanan / Quality and service policy			1
	• Kepatuhan perusahaan terhadap Undang-undangan, Anggaran Dasar, perjanjian dan komitmen / Company compliance with laws, articles of association, agreements and commitments			2
	• Transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris dan RUPS / Transactions or actions within the scope of authority of the Board of Commissioners and the GMS			1
	• Kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan / Subsidiary/joint venture management policy			1
	• Kebijakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola / Policy on GCG principles implementation			1
	3	Pemantauan tindak lanjut temuan audit / Monitoring of the follow-up on audit findings	2	Kali / Time
• Penunjukan calon auditor / Appointment of prospective auditor				2,5
• Pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan internal serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan / Supervision of the effectiveness of the implementation of external and internal audits as well as the implementation of a review of complaints related to the Company				2,5
4	Monitoring Pekerjaan Project Director (PD) dan Penugasan Pemerintah dan Investasi Pengembangan Perusahaan / Monitoring of Project Director (PD) Work and Government Assignments and Company Development Investment	4	Kali / Time	5
5	Rapat / Meeting			10
	• Internal	12	Kali / Time	5
	• Gabungan / Joint	12	Kali / Time	5
II ASPEK PELAPORAN / REPORTING ASPECT				25
1	Program Kerja Tahunan (RKA Dewan Komisaris) / Annual Work Program (RKA Board of Commissioners)	1	Kali / Time	10
2	Laporan/pendapat saran kepada RUPS / Reports/advice suggestions to the GMS			10
	• Kinerja Direksi / Board of Directors Performance	1	Kali / Time	5
	• Remunerasi Direksi / Board of Directors Remuneration	1	Kali / Time	5
3	Laporan Manajemen (Audited) Tahun 2021 / 2021 Management Report (Audited)	1	Kali / Time	5
III ASPEK DINAMIS/LAIN-LAIN / DYNAMIC/OTHER ASPECTS				20
1	Peningkatan Kompetensi / Competency Improvement			10
	• Program pengenalan Komisaris baru / New Commissioner introduction program	100	%	5
	• Program pengembangan kompetensi melalui seminar, diklat, benchmark dan sejenisnya / Competency development programs through seminars, training, benchmarks and the like	5	Kali / Time	5
2	Rekomendasi/Tanggapan atas usul yang disampaikan Direksi / Recommendations/Responses to proposals submitted by the Board of Directors	100	%	10
TOTAL				100

Agenda Kelima / Fifth Agenda

Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2022. / Determination of Operational Aspect Indicator for Corporate Soundness Level Measurement

Keputusan

Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2022, sebagai berikut:

Resolution

Determined the Operational Aspect Indicator for Corporate Soundness Level Measurement of PT Kereta Api Indonesia (Persero) in 2022 as follows:

No.	Indikator / Indicator	Bobot / Value
Aspek Operasional / Operational Aspect		35,00
1	Tingkat keselamatan / Safety Level	10,00
2	Tingkat Pelayanan / Service Level	11,00
3	Efektivitas Pemeliharaan / Maintenance Effectiveness	8,00
4	Produktivitas SDM / HC Productivity	6,00
Total		35,00

Agenda Keenam / Sixth Agenda

Persetujuan Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi. / Approval for the Delegation of Authority to the Board of Commissioners to approve any actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of each investment program/item as long as it does not change the investment program/item and did not exceed the total investment value.

Keputusan

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi.

Resolution

Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to give approval if there were actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program/item as long as it did not change the investment program/item and does not exceed the total value investment.

Arahan RUPS

GMS Directives

No.	Arahan / Directives	Tindaklanjut / Follow-Up	Keterangan / Description
1	Monitoring dan evaluasi program Manajemen Risiko serta dilakukan cascading ke seluruh jajaran Perusahaan / Perform monitoring and evaluation the Risk Management program and cascading it to all levels of the Company	Manajemen Risiko telah dirinci menjadi program dan target bulanan dan triwulanan pada bab tersendiri pada buku RKAP 2022 dan telah dilaporkan secara triwulanan pada Laporan Manajemen. / The Risk Management has been detailed into monthly and quarterly programs and targets in a separate chapter in the 2022 RKAP book and has been reported quarterly in the Management Report.	Telah dilakukan / Done
2	Berkomitmen untuk mencapai target target RKAP 2022 dan Key Performance Indicators KPI tahun 2022 dengan tetap melaksanakan prinsip Good Corporate Governance (GCG) / Be committed to achieving the 2022 RKAP targets and 2022 KPI Key Performance Indicators while continuing to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG)	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Berkomitmen untuk mencapai target target RKAP 2022 dan Key Performance Indicators (KPI) tahun 2022 dengan tetap melaksanakan prinsip Good Corporate Governance (GCG). / The entire Board of Commissioners and Directors are committed to achieving the 2022 RKAP targets and 2022 Key Performance Indicators (KPI) while continuing to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG).	Telah dilakukan / Done

No.	Arahan / Directives	Tindaklanjut / Follow-Up	Keterangan / Description
3	Aksi korporasi yang memerlukan persetujuan RUPS agar diajukan tersendiri dengan dilengkapi sekurang-kurangnya tanggapan Dekom, Pakta Integritas, dan Kajian-kajian. / Corporate actions that require GMS approval must be submitted separately accompanied by at least the Board of Commissioners' responses, integrity pacts, and studies.	Telah diterbitkan Nota Dinas Internal kepada Para CDD dan EVP di PT KAI (Persero) Nomor: 3/KC.202/VI/US/KA/2021 tanggal 23 Juni 2021 Perihal Kelengkapan Dokumen Aksi Korporasi yang Memerlukan Persetujuan RUPS. Yang isinya adalah menghimbau kepada setiap Direktorat/Unit yang akan mengusulkan Aksi Korporasi dan memerlukan persetujuan tertulis dari RUPS untuk diajukan secara tersendiri dengan mengenkapi dokumenn sekurang-kurangnya: / Internal Service Note has been issued to CDD and EVP at PT KAI (Persero) WITH No. 3/KC.202/VI/US/KA/2021 dated June 23, 2021 OM the Completeness of Corporate Action Documents Requiring GMS Approval. The contents of which are to appeal to each Directorate/Unit that will propose Corporate Actions and require written approval from the GMS to be submitted separately by completing at least the following documents: a. Tanggapan Integritas Dewan Komisaris; / Integrity Response of the Board of Commissioners; b. Pakta Integritas Dewan Komisaris; / Board of Commissioners Integrity Pact; c. Pakta Integritas Dewan Direksi; / Board of Directors Integrity Pact; d. Kajian Teknis; / Technical Review; e. Kajian Hukum; / Legal Studies; f. Kajian Ekonomi; dan / Economic Studies; and g. Kajian Risiko. / Risk Assessment.	Telah dilakukan / Done
4	Penyelesaian secara tuntas temuan serta saran dan rekomendasi auditor, baik auditor eksternal maupun internal / Total completion of the auditor's findings and suggestions and recommendations, both external and internal auditors.	Direksi telah menindaklanjuti temuan, saran, dan rekomendasi baik dari Auditor Internal dan Eksternal. Progres tindak lanjut dari temuan-temuan auditor BPK telah dilaporkan kepada pemegang saham secara periodik dan telah dibahas bersama dengan Komite Audit sebagai perwakilan Dewan Komisaris. / The Board of Directors has followed up on the findings, suggestions and recommendations from both the Internal and External Auditors. The follow-up progress of BPK auditor findings has been reported to shareholders periodically and has been discussed together with the Audit Committee as a representative of the Board of Commissioners.	Telah dilakukan / Done
5	Melakukan langkah efisiensi di segala bidang dengan tetap menjaga produktivitas dan kualitas pelayanan / Perform efficiency measures in all areas while maintaining productivity and service quality.	Dalam Rapat Kerja, KAI menyanggupi bahwa Perusahaan harus menerapkan program efisiensi, reprioritisasi anggaran dan pengurangan biaya dengan fokus mengalokasikan dana untuk membiayai core activities yang penting bagi kelangsungan operasional perusahaan, program penanggulangan pandemic, dan penugasan strategis. / In the Working Meeting, KAI agreed that the Company must implement efficiency programs, reprioritize the budget and reduce costs with a focus on allocating funds to finance core activities that are important for the continuity of the company's operations, pandemic response programs, and strategic assignments.	Telah dilakukan / Done
6	Melakukan penilaian tingkat kematangan manajemen risiko RMI secara berkala dan melaprkan hasilnya pada Kementerian BUMN paling lambat pertengahan TW II 2022 / Conduct regular RMI risk management maturity level assessments and report the results to the Ministry of SOEs no later than the middle of Q2 2022.	Penilaian tingkat kematangan manajemen risiko/RMI sudah dilakukan dan disampaikan untuk periode penilaian tahun 2021 - Semester I tahun 2022 yg dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dengan pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); / Risk management/RMI maturity level assessment has been carried out and submitted for the 2021 - First Half of 2022 assessment period carried out by the Internal Audit Unit (SPI) with supervision from the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP);	Telah dilakukan / Done
7	Pelaksanaan Investasi agar memperhatikan skala prioritas kemampuan keuangan perusahaan dan berpedoman pada cost schedule / Implementation of Investment to pay attention to the priority scale of the company's financial capability and be guided by the cost schedule.	Pelaksanaan Investasi agar memperhatikan skala prioritas, kemampuan keuangan perusahaan dan berpedoman pada rencananya (cost & schedule) yang tertuang pada feasibility project (FS). Proyek-proyek yang mengalami cost overrun adalah proyek penugasan Pemerintah dengan factor keterlambatan dari eksternal. / Investment implementation should pay attention to priority scale, company's financial capability and be guided by the plan (cost & schedule) contained in the project feasibility (FS). Projects that experience cost overruns are projects assigned by the Government with external delays.	Selalu dilakukan / Always Done
8	Pemenuhan pelaporan Blueprint amanat Undang undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk Tahun 2021 serta menyusun dan melaksanakan strategi implementasinya pada tahun 2022 / Compliance of Blueprint reporting mandated by Law No. 8 of 2016 concerning People with Disabilities for 2021 and formulation and implementation of strategies for its implementation in 2022.	Bahwa target yang akan dipenuhi merupakan hasil kompilasi dari FHCI selaku PIC pemenuhan kebutuhan pekerja Disabilitas di BUMN secara berkelanjutan dalam rangka pemenuhan amanah undang undang No 8 Tahun 2016 sebanyak 225 orang utk seluruh BUMN KAI sudah memperoleh 11 orang pekerja disabilitas dengan sebaran sebagai berikut: / The target to be met is the result of a compilation from FHCI as the PIC of meeting the needs of workers with disabilities in SOEs in a sustainable manner in order to fulfill the mandate of law No. 8 of 2016 as many as 225 people for all SOEs KAI has obtained 11 workers with disabilities with the following distribution: 1. Daop 6 Yk, = 2 orang; / Daop 6 Yk, = 2 people; 2. Daop 1 Jakarta = 4 orang; / Daop 1 Jakarta = 4 people; 3. Daop 2 Bandung = 1 orang; / Daop 2 Bandung = 1 person; 4. Daop 4 Semarang = 3 orang; / Daop 4 Semarang = 3 people; 5. Divre III Palembang = 1 orang. / Divre III Palembang = 1 person. Program KAI Th 2022 sebanyak 3 org : untuk Pengisian kebutuhan : Pelaksana administrasi. / KAI Program of 2022 with 3 people: to fill needs: Administrative officials. Hal tersebut telah tertuang di Peraturan Direksi tentang Pengadaan Pekerja. / This has been stipulated in the Board of Directors Regulation concerning Worker Procurement.	Selalu dilakukan / Always Done

No.	Arahan / Directives	Tindaklanjut / Follow-Up	Keterangan / Description
9	Melengkapi Data Pengurus BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi BUMN serta Talent Pool pada portal Human Capital BUMN / Completion SOE Management Data, SOE Subsidiaries, and SOE Consolidated Affiliates and the Talent Pool on the SOE Human Capital portal	Telah dilakukan secara berkala / Has been carried out regularly	Selalu dilakukan / Always Done
10	Pembinaan anak perusahaan / Subsidiary development	a. Telah dilakukan evaluasi kinerja anak perusahaan setiap bulannya; / a. The performance evaluation of the subsidiary companies has been carried out every month; b. SK Penunjukkan langsung kepada anak perusahaan di lingkungan KAI. / Decree of direct appointment to a subsidiary within KAI.	Selalu dilakukan / Always Done
11	Menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat lambatnya akhir Februari 2022 / Submission of the Company's Annual Report including the 2021 Financial Statements which have been audited by the Public Accounting Firm no later than the end of February 2022.	Menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik pada akhir Februari 2022 dan telah release bursa dan koran pada tanggal 25 Februari 2022. / The Company's Annual Report including the Financial Statements for Fiscal Year 2021 which has been audited by a Public Accounting Firm at the end of February 2022 and has been released to stock exchanges and newspapers has been submitted on February 25, 2022.	Telah dilakukan / Done
12	Memastikan pelaksanaan dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) KAI terutama Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek sesuai dengan target yang telah ditentukan. / Ensure the implementation and completion of the KAI National Strategic Project (PSN), especially the Jakarta Bandung Fast Train (KCJB) Project and the Jabodebek Light Rail Transit (LRT) according to predetermined targets.	Komitmen dan monitoring untuk memastikan pelaksanaan proyek strategis nasional telah dan terus dilaksanakan melalui berbagai inisiatif, koordinasi, serta update progress secara rutin mengenai LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung oleh Kadiv LRT dan Dirut KCIC kepada Direksi KAI. Prinsip akuntabel dan kehati-hatian dalam menjalankan proyek strategis yang diselenggarakan oleh direktorat Pengembangan usaha (D7) dengan terus menerapkan prinsip GCG dibawah Pengawasan GCG unit Quality Control KAI. Komitmen Direksi KAI dalam melaksanakan proyek strategis telah tercermin dalam RJPP / Commitment and monitoring to ensure the implementation of national strategic projects has been and continues to be carried out through various initiatives, coordination, and regular progress updates regarding the Jabodebek LRT and the Jakarta Bandung Fast Train by the Head of LRT Division and the KCIC Managing Director to the KAI Directors. The principle of accountability and prudence in carrying out strategic projects organized by the Directorate of Business Development (D7) by continuing to apply GCG principles under the GCG Supervision of KAI's Quality Control unit. The commitment of the KAI Directors in implementing strategic projects has been reflected in the RJPP.	Selalu dilakukan / Always Done
13	Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak Kementerian Perhubungan perihal penyelesaian Infrastructure Maintenance Operation (IMO) - Track Access Charges (TAC). / Coordinate intensively with the Ministry of Transportation regarding the completion of Infrastructure Maintenance Operation (IMO) - Track Access Charges (TAC).	Komitmen dan koordinasi secara intensif telah dan terus dilaksanakan melalui berbagai inisiatif, koordinasi, serta update progress secara rutin dengan pihak Kementerian Perhubungan. / Commitment and intensive coordination have been and continue to be implemented through various initiatives, coordination, and routine progress updates with the Ministry of Transportation.	Selalu dilakukan / Always Done
14	Melakukan pemenuhan target KPI PMN TA 2021 sesuai dengan perencanaan yang telah diajukan oleh KAI. / Fulfill PMN KPI targets for the 2021 year in accordance with the plan that has been submitted by KAI.	KAI terus melakukan monitoring progress penyerapan PMN LRT Jabodebek dan telah dimasukkan sebagai komitmen Direksi dalam KPI Corporate yang di audit oleh auditor independen pada akhir tahun. / KAI continues to monitor the progress of absorption of the LRT Jabodebek PMN and has been included as a commitment by the Directors in the Corporate KPI which is audited by an independent auditor at the end of the year.	Selalu dilakukan / Always Done
15	Menyusun langkah yang tepat untuk peningkatan kinerja operasional terutama pada Daerah Operasi (DAOP) yang masih mengalami kerugian dari sisi finansial dengan mengurangi pengeluaran beban biaya yang tidak produktif dalam rangka melakukan efisiensi. / Formulate appropriate measures to improve operational performance, especially in Operational Areas (DAOP) which are still experiencing financial losses by reducing expenses that are unproductive in order to carry out efficiency.	Setiap bulannya dilakukan evaluasi kinerja dan Rapat Exkom yang dihadiri oleh beberapa Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Kepala Daop/Divre/ Balai Yasa untuk dilakukan evaluasi atas kinerja Daerah. / Performance evaluations and Exkom meetings are carried out every month which are attended by several Board of Commissioners, Board of Directors and Heads of Daop/Divre/Balai Yasa to evaluate regional performance.	Selalu dilakukan / Always Done
16	Menindaklanjuti dan melaksanakan hasil rekomendasi pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran TJSL dengan Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Nomor: Ris-54/DSI.MBU.B/12/2021. / Follow up and implement the recommendations for discussing the TJSL Work Plan and Budget with the Assistant Deputy for Social and Environmental Responsibility as stated in the Minutes of Meeting No. Ris-54/DSI.MBU.B/12/2021.	Program Kerja TJSL Tahun 2022 dijalankan sesuai dengan rekomendasi pembahasan RKA TJSL yang tertuang dari risalah rapat nomor : RIS-77/DSI.MBU.B/01/2021. Hal ini sejalan dengan program TJSL yang sudah berjalan sampai dengan semester 1 yaitu menjalankan program-program sesuai dengan TBB & SDGs. / The 2022 TJSL Work Program is carried out in accordance with the recommendations for discussing the TJSL RKA as contained in the minutes of meeting Number: RIS-77/DSI.MBU.B/01/2021. This is in line with the TJSL program which has been running until first half, namely running programs in accordance with TBB & SDGs.	Telah dilakukan / Done

Pelaksanaan RUPS Tahunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) Tahun Buku 2021

Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2021, pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 20 Mei 2022
 Waktu : 05.55 WIB
 Tempat : Ruang Ambassador Hotel Aryaduta Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 44-48, Jakarta Pusat

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun Buku 2021

Penyelenggaraan RUPS Tahunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2021 dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dengan perincian sebagai berikut:

Implementation of Annual GMS for Corporate Financial Accountability Report for the 2021 Fiscal Year

The Company's Annual GMS of Corporate Financial Accountability Report for the 2021 Fiscal Year was held on:

Date : Friday, May 20, 2022
 Time : 05.55 WIB
 Place : Ambassador Room, Hotel Aryaduta Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 44-48, Jakarta Pusat

Recapitulation of Attendance at the Annual General Meeting of Shareholders of Corporate Financial Accountability Report for the 2021 Fiscal Year

The holding of the Annual General Meeting of Shareholders for Corporate Financial Responsibility Report for the 2021 Fiscal Year was attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors, with the following details:

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan

Recapitulation of Attendance at the Annual GMS

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Keterangan / Attendance
Kuasa Pemegang Saham / Shareholder Proxy			
1	Desty Arliani	Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik / Assistant Deputy for Logistics Services	Hadir / Present
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
1	Said Aqil Siroj	Komisaris Utama / President Commissioner	Hadir / Present
2	Rochadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Hadir / Present
3	Riza Primadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Hadir / Present
4	Endang Tirtana	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Hadir / Present
5	Freddy Harris	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
6	Chris Kuntadi	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
7	Diah Natalisa	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
8	Chairul Anwar	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
Direksi / Board of Directors			
1	Didiek Hartantyo	Direksi Utama / President Director	Hadir / Present
2	Surya Palapa	Direksi Niaga / Managing Director of Commerce	Hadir / Present
3	Awan Hermawan Purwadinata	Direksi Operasi / Managing Director of Operations	Hadir / Present
4	Heru Kuswanto	Direksi Pengelolaan Prasarana / Managing Director of Infrastructure Management	Hadir / Present
5	Eko Purwanto	Direksi Pengelolaan Sarana / Managing Director of Facility Management	Hadir / Present
6	John Robertho	Direksi Keselamatan dan Keamanan / Managing Director of Safety and Security	Hadir / Present
7	Suparno	Direksi SDM dan Umum / Managing Director of HC and General Affairs	Hadir / Present
8	Sandry N Pasambuna	Direksi Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha / Managing Director of Strategic Planning and Business Development	Hadir / Present
9	Salusra Wijaya	Direksi Keuangan dan Manajemen Risiko / Managing Director of Finance and Risk Management	Hadir / Present

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun Buku 2021

Keputusan dan realisasi masing-masing keputusan RUPS Tahunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2021 adalah sebagai berikut:

Resolutions and Realization of Annual General Meeting of Shareholders of Corporate Financial Accountability Report for the 2021 Fiscal Year

Resolutions and realization of each agenda of the Annual GMS of the Corporate Financial Accountability Report for the 2021 Fiscal Year are as follows:

Agenda Pertama / First Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). / Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2021 (two thousand twenty one) Fiscal Year and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2021 (two thousand twenty one) Fiscal Year.

Keputusan

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00048/2.1030/AU.1/06/0501-1/1/II/2022 tanggal 18-02-2022 (delapan belas Februari dua ribu dua puluh dua) dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12 2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Resolution

Approved the Annual Report for the the 2021 (two thousand twenty one) Fiscal Year ncluding the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and ratified the Company's Financial Statements for the (two thousand twenty one) Fiscal Year which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, as contained in their report No. 00048/2.1030/AU.1/06/0501-1/1/II/2022 dated 02-18- 2022 (February eighteenth of two thousand and twenty-two) with the opinion of "fair in all material respects", as well as granted full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the Fiscal Year ending 12-31-2021 (December thirty first of two thousand twenty one) as long as the said action is not a criminal act and is reflected in the Company's report books.

Agenda Kedua / Second Agenda

Pengesahan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL") Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). / Ratification of the Annual Report of the Social and Environmental Responsibility ("TJSL") Program for the 2021 (two thousand twenty one) Fiscal Year and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program ("PUMK") for the 2021 (two thousand twenty one) Fiscal Year.

Keputusan

Menyetujui Laporan Tahunan TJSL Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan mengesahkan Laporan Keuangan Program PUMK Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00083/2.1030/AU.2/12/0501-1/1/II/2022 tanggal 18 -02 -2022 (delapan belas Februari dua ribu dua puluh dua) dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas

Resolution

Approved the TJSL Annual Report for the (two thousand twenty one) Fiscal Year and ratified the 2021 (two thousand twenty one) PUMK Program Financial Statements which has been audited by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan as contained in its report No, 00083 /2.1030/AU.2/12/0501-1/1/II/2022 dated 02-18-2022 (February eighteenth of two thousand and twenty two) with the opinion "fair in all material respects", as well as granted release and release responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the Directors and Board of Commissioners of the Company for

tindakan pengurusan dan pengawasan TJSL Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

the management and supervision of TJSL for the 2021 (two thousand and twenty one) Fiscal Year, as long as the action is not a crime and is reflected in the report.

Agenda Ketiga / Third Agenda

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). / Determination of the Use of the Company's Net Profits for the 2021 (two thousand and twenty one) Fiscal Year.

Keputusan

Tidak ada penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perusahaan karena Perusahaan mengalami laba minus/rugi bersih Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Resolution

There was no stipulation on the Use of the Company's Consolidated Net Profits as the Company experiences net profit minus/loss for the 2021 (two thousand and twenty one) Fiscal Year.

Agenda Keempat / Fourth Agenda

Penetapan Insentif Kinerja Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). / Determination of Performance Incentives for the 2021 (two thousand twenty one) Fiscal Year, Salary for the Board of Directors and Honorarium for the Board of Commissioners along with Facilities and Other Allowances for 2022 (two thousand twenty two).

Keputusan

Besaran Insentif Kinerja Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), akan ditetapkan secara tersendiri.

Resolution

The amount of Performance Incentives for the 2021 (two thousand twenty one) Fiscal Year, Salary for the Board of Directors and Honorarium for the Board of Commissioners along with Facilities and Other Allowances for 2022 (two thousand twenty two), will be determined separately.

Agenda Kelima / Fifth Agenda

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Kondolidasian Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). / Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2022 (two thousand and twenty-two) fiscal year, as well as the Financial Report and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2022 (two thousand twenty-two) fiscal year.

Keputusan

1. Menetapkan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan untuk melakukan audir umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

Resolution

1. Appointed KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan to conduct a general audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2022 (two thousand twenty-two) fiscal year and the Financial Statements of the Company's Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2022 (two thousand twenty-two) fiscal year.
2. Delegating authority to the Board of Commissioners to determine the amount of compensation for audit services, adding the required scope of work and other reasonable requirements for the KAP.

Agenda Keenam / Fourth Agenda

Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara / Ratification of Report on Realization of Additional Use of State Equity Participation Funds.

Keputusan

Mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN tahun anggaran 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Resolution

Ratified the Report on Realization of Additional Use of State Equity Participation Funds from the State Budget from 2021 (two thousand twenty-one).

Arahan RUPS

GMS Directives

No.	Arahan / Directives	Tindaklanjut / Follow-Up	Keterangan / Description																																																																
1	Direksi diminta untuk melanjutkan proses tindak lanjut terhadap arahan pemegang saham dalam Risalah RUPS PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun Buku 2020 mengenai: / The Board of Directors is required to continue the follow-up process on the shareholder directives in the minutes of PT Kereta Api Indonesia (Persero) GMS:	Telah diterbitkan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: PER.U/KM.101/VII/1/KA-2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER/08/MBU/12/2019 / PT Kereta Api Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. PER.U/KM.101/VII/1/KA-2022 concerning Guidelines for the Procurement of Goods and Services has been issued which is adjusted to the Minister of SOE Regulation No. PER/08/MBU/12/2019	Telah terealisasi / Realized																																																																
	<ul style="list-style-type: none"> Upaya efisiensi biaya secara masif terutama komponen biaya tetap untuk memperbaiki rasio BOPO; / Massive cost efficiency efforts, especially the fixed cost component to improve the BOPO ratio; 	<p>Efisiensi biaya telah dilaksanakan secara masif dengan memperbaiki rasio BOPO, hal tersebut terlihat pada penurunan rasio BOPO tahun 2021 yaitu 98,6% lebih baik dibanding pada tahun 2020 sebesar 105,6% (Perhitungan terlampir). Upaya yang dilakukan antara lain: / Cost efficiency has been carried out massively by improving the BOPO ratio, this can be seen in the decrease in the BOPO ratio in 2021, which is 98.6%, which is better than in 2020 of 105.6% (Calculation attached). Efforts made include:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi terhadap seluruh usulan rencana anggaran biaya di tahun 2021; / Evaluation of all proposed budget plans for 2021; Melakukan konservasi sarana idle; / Conservation of idle facilities; Penyesuaian biaya tenaga kerja (biaya yang variabelnya menyesuaikan perjalanan KA, pengurangan tenaga kerja outsourcing, perjalanan dinas pekerja); / Adjustment of labor costs (variable costs adjust to train trips, reduction of outsourced labor, business trips); Realokasi prioritas perawatan prasarana; / Reallocation of infrastructure maintenance priorities; 																																																																	
	<ul style="list-style-type: none"> Upaya memastikan arus kas terjaga dengan baik dan upaya-upaya sistematis agar persyaratan covenant dari para kreditur terpenuhi. / Efforts to ensure cash flow is well-maintained and systematic efforts to fulfill the covenant requirements of creditors. 	PT KAI (Persero) telah mengajukan relaksasi angsuran pokok, perpanjangan tenor pinjaman, waiver financial covenant, dan waiver pemenuhan Debt Service Coverage Ratio (DSCR), dan telah disetujui dengan adanya addendum perjanjian kredit. / PT KAI (Persero) has proposed relaxation of principal installments, extension of loan tenor, waiver of financial covenants, and waiver of fulfillment of the Debt Service Coverage Ratio (DSCR), and has been approved with an addendum to the credit agreement.																																																																	
2	Direksi diminta agar mengupayakan penagihan piutang terutama terhadap piutang yang telah memiliki umur piutang yang cukup panjang, bila diperlukan dapat membentuk tim task force yang bertanggung jawab untuk penagihan piutang. / The Board of Directors is requested to collect receivables, especially for receivables that have a fairly long receivable age, if necessary, they can form a task force team that is responsible for billing receivables.	<p>Kegiatan Task Force untuk meningkatkan penerimaan kas pada sektor pendapatan Optimalisasi Aset telah dilaksanakan oleh Daerah Operasi/Divisi Regional/Sub Divisi Regional dengan melibatkan Jajaran di Unit Keuangan, Komersial Non Angkutan, Penjagaan Aset, dan Keamanan dengan rincian sebagai berikut: / Task Force activities to increase cash receipts in the Asset Optimization revenue sector have been carried out by the Operational Areas/Regional Divisions/Regional Sub-Divisions involving staff in the Financial, Non-Transport Commercial, Asset Custody and Security Units with the following details:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Bisnis Area / Business Area</th> <th>SK Pembentukan Tim Task Force / Task Force Team Establishment Decree</th> <th>Keterangan / Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kantor Pusat / Head Office</td> <td>SK.U/KO.101/VIII/1/KA-2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Daop 1 Jakarta</td> <td>SK.EVP.DO.1/KO.101/III/1/DO.1-2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Daop 2 Bandung</td> <td>SK.EVP.DO.2/KO.101/VII/3/DO.2-2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Daop 3 Cirebon</td> <td>SK.VP.DO.3/KL.102/V/1/DO.3-2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Daop 4 Semarang</td> <td>SK.EVP.DO.4/KO.101/IV/3/DO.4-2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Daop 5 Purwokerto</td> <td>SK.VP.DO.5/KO.101/II/1/DO.5-2022</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Daop 6 Yogyakarta</td> <td>SK.EVP.DO.6/KO.101/X/3/DO.6-2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Daop 7 Madiun</td> <td>-</td> <td>Menginduk ke SK Kantor Pusat / Subject to Head Office Decree</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Daop 8 Surabaya</td> <td>SK.EVP.DO.8/KO.101/IV/2/DO.8-2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Daop 9 Jember</td> <td>SK.VP.DO.9/KO.101/VII/1/DO.9-2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Divre 1 Sumatera Utara</td> <td>-</td> <td>Menginduk ke SK Kantor Pusat / Subject to Head Office Decree</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Divre 2 Sumatera Barat</td> <td>SK.VP.DV.II/KO.101/XII/1/DV.2-2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Divre 3 Palembang</td> <td>-</td> <td>Menginduk ke SK Kantor Pusat / Subject to Head Office Decree</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Divre 4 Tanjungkarang</td> <td>-</td> <td>Menginduk ke SK Kantor Pusat / Subject to Head Office Decree</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Sub Divre 1.1 Aceh</td> <td>-</td> <td>Menginduk ke SK Kantor Pusat / Subject to Head Office Decree</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Bisnis Area / Business Area	SK Pembentukan Tim Task Force / Task Force Team Establishment Decree	Keterangan / Description	1	Kantor Pusat / Head Office	SK.U/KO.101/VIII/1/KA-2021	-	2	Daop 1 Jakarta	SK.EVP.DO.1/KO.101/III/1/DO.1-2020	-	3	Daop 2 Bandung	SK.EVP.DO.2/KO.101/VII/3/DO.2-2020	-	4	Daop 3 Cirebon	SK.VP.DO.3/KL.102/V/1/DO.3-2021	-	5	Daop 4 Semarang	SK.EVP.DO.4/KO.101/IV/3/DO.4-2021	-	6	Daop 5 Purwokerto	SK.VP.DO.5/KO.101/II/1/DO.5-2022	-	7	Daop 6 Yogyakarta	SK.EVP.DO.6/KO.101/X/3/DO.6-2021	-	8	Daop 7 Madiun	-	Menginduk ke SK Kantor Pusat / Subject to Head Office Decree	9	Daop 8 Surabaya	SK.EVP.DO.8/KO.101/IV/2/DO.8-2022		10	Daop 9 Jember	SK.VP.DO.9/KO.101/VII/1/DO.9-2022		11	Divre 1 Sumatera Utara	-	Menginduk ke SK Kantor Pusat / Subject to Head Office Decree	12	Divre 2 Sumatera Barat	SK.VP.DV.II/KO.101/XII/1/DV.2-2021		13	Divre 3 Palembang	-	Menginduk ke SK Kantor Pusat / Subject to Head Office Decree	14	Divre 4 Tanjungkarang	-	Menginduk ke SK Kantor Pusat / Subject to Head Office Decree	15	Sub Divre 1.1 Aceh	-	Menginduk ke SK Kantor Pusat / Subject to Head Office Decree	Telah terealisasi / Realized
	No.	Bisnis Area / Business Area	SK Pembentukan Tim Task Force / Task Force Team Establishment Decree	Keterangan / Description																																																															
	1	Kantor Pusat / Head Office	SK.U/KO.101/VIII/1/KA-2021	-																																																															
	2	Daop 1 Jakarta	SK.EVP.DO.1/KO.101/III/1/DO.1-2020	-																																																															
	3	Daop 2 Bandung	SK.EVP.DO.2/KO.101/VII/3/DO.2-2020	-																																																															
	4	Daop 3 Cirebon	SK.VP.DO.3/KL.102/V/1/DO.3-2021	-																																																															
	5	Daop 4 Semarang	SK.EVP.DO.4/KO.101/IV/3/DO.4-2021	-																																																															
	6	Daop 5 Purwokerto	SK.VP.DO.5/KO.101/II/1/DO.5-2022	-																																																															
	7	Daop 6 Yogyakarta	SK.EVP.DO.6/KO.101/X/3/DO.6-2021	-																																																															
	8	Daop 7 Madiun	-	Menginduk ke SK Kantor Pusat / Subject to Head Office Decree																																																															
	9	Daop 8 Surabaya	SK.EVP.DO.8/KO.101/IV/2/DO.8-2022																																																																
	10	Daop 9 Jember	SK.VP.DO.9/KO.101/VII/1/DO.9-2022																																																																
	11	Divre 1 Sumatera Utara	-	Menginduk ke SK Kantor Pusat / Subject to Head Office Decree																																																															
	12	Divre 2 Sumatera Barat	SK.VP.DV.II/KO.101/XII/1/DV.2-2021																																																																
	13	Divre 3 Palembang	-	Menginduk ke SK Kantor Pusat / Subject to Head Office Decree																																																															
	14	Divre 4 Tanjungkarang	-	Menginduk ke SK Kantor Pusat / Subject to Head Office Decree																																																															
15	Sub Divre 1.1 Aceh	-	Menginduk ke SK Kantor Pusat / Subject to Head Office Decree																																																																

No.	Arahan / Directives	Tindaklanjut / Follow-Up	Keterangan / Description
3	<p>Direksi diminta agar mengupayakan penugasan Pemerintah dilaksanakan dengan baik dan prudent serta tetap menjaga cashflow dan keuangan Perusahaan / The Board of Directors is asked to strive for Government assignments to be carried out properly and prudently and to maintain the Company's cash flow and finances</p>	<p>KCF: Sehubungan dengan penugasan Pemerintah (Proyek LRT Jabodebek dan KCJB), telah dilakukan analisa terkait kemampuan perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dukungan Pemerintah dalam bentuk Penyerahan Modal Negara (PMN) untuk mendukung struktur pendanaan dalam Proyek LRT Jabodebek dan KCJB. Perolehan PMN tersebut dapat terlaksana karena adanya pengukuran kemampuan keuangan perusahaan, dimana porsi pinjaman yang dilakukan perusahaan untuk proyek tersebut telah diukur dengan kemampuan keuangan perusahaan. Selain itu terdapat juga jaminan pemerintah terkait pinjaman sindikasi perbankan dan subsidi pada proyek LRT Jabodebek. Dukungan Pemerintah tersebut berdampak positif pada keberlangsungan kemampuan keuangan perusahaan. / In connection with the Government's assignment (LRT Jabodebek and KCJB Projects), an analysis has been carried out regarding the Company's capabilities. This is demonstrated by the Government's support in the form of State Capital Participation (PMN) to support the funding structure for the LRT Jabodebek and KCJB Projects. The PMN was obtained because of the measurement of the company's financial capacity, in which the portion of the loan made by the company for the project has been measured by the company's financial capacity. In addition, there are also government guarantees regarding syndicated banking loans and subsidies for the LRT Jabodebek project. This government support has a positive impact on the sustainability of the company's financial capacity.</p>	<p>Telah terealisasi / Realized</p>
4	<p>Direksi agar senantiasa melakukan pemeliharaan prasarana perkeretaapian dalam rangka menjaga tingkat keamanan perjalanan kereta, baik angkutan penumpang maupun angkutan barang. Dalam mengupayakan hal ini, Direksi agar berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. / The Board of Directors should always maintain railway infrastructure in order to maintain the safety level of train travel, both passenger and freight transport. In pursuing this, the Board of Directors should coordinate with the Ministry of Transportation.</p>	<p>TS: Pemeliharaan prasarana dalam hal ini fasilitas operasional kereta api khususnya, dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan keandalan dan ketersediaan untuk menjamin perjalanan kereta api yang aman dan nyaman. / Infrastructure maintenance, specifically train operational rolling stock in this case, is carried out on an ongoing basis to maintain reliability and availability to ensure safe and comfortable train travel.</p> <p>Koordinasi dengan Direktorat Prasarana DJKA Kemenhub telah dilaksanakan terakhir pada tanggal 29 Juni 2022 dalam rangka pembahasan lanjutan percepatan pekerjaan peningkatan sistem persinyalan dan telekomunikasi stasiun Kampung Bandan – Stasiun Kemayoran – Stasiun Pasar Senen. / Coordination with the Directorate of Infrastructure DJKA of the Ministry of Transportation was last carried out on June 29, 2022 in the context of continuing discussions on accelerating work on improving the signaling and telecommunication system at Kampung Bandan Station – Kemayoran Station – Pasar Senen Station.</p> <p>Berita Acara Pembahasan Lanjutan Percepatan Pekerjaan Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Stasiun Kampung Bandan – Stasiun Kemayoran – Stasiun Pasar Senen dan Pembahasan Issue Persiapan Kantor Nomor: 015/BA/PFOKAJ/K3/DJKA/2022 / Minutes of the Discussion on Continuation of Acceleration of Signaling and Telecommunication System Improvement at Kampung Bandan Station – Kemayoran Station – Pasar Senen Station and Discussion on Office Preparation Issues No. 015/ BA/PFOKAJ/K3/DJKA/2022</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-06-2022), telah dilaksanakan Pembahasan Lanjutan Percepatan Pekerjaan Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Stasiun Kampung Bandan – Stasiun Kemayoran – Stasiun Pasar Senen dan Pembahasan Issue Persiapan Rakor pada Ruang Rapat Graha Suite Lt. 2 Arion Suites Hotel Bandung Jl. Otto Iskandar Dinata No. 16, Pasir Kaliki, Kota Bandung, Berdasarkan Undangan Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor UM.207/17/8/K3/DJKA/2022 tanggal 23 Juni 2022 perihal Undangan Rapat. / On Wednesday June Twenty-Ninth Two Thousand and Twenty Two (6-29-2022), Discussion on Continuation of the Acceleration of Work on Improvement of Signaling and Telecommunication Systems at Kampung Bandan Station – Kemayoran Station – Pasar Senen Station was held along with Discussion on the Issue of Coordination Meeting Preparation on Graha Suite Meeting Room Lt. 2 Arion Suites Hotel Bandung Jl. Otto Iskandar Dinata No. 16, Pasir Kaliki, Bandung City, based on the Invitation of the Director of Railway Infrastructure Non UM.207/17/8/K3/DJKA/2022 dated June 23, 2022 regarding Invitation to the Meeting. Pembahasan Lanjutan Percepatan Pekerjaan Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Stasiun Kampung Bandan – Stasiun Kemayoran – Stasiun Pasar Senen dan Pembahasan Issue Persiapan Rakor dihadiri oleh: / Further discussion on the Acceleration of Signaling and Telecommunication System Improvement at Kampung Bandan Station – Kemayoran Station – Pasar Senen Station and Discussion on the Issue of Coordination Meeting Preparation were attended by: <ol style="list-style-type: none"> Plt. Kasubdit Fasilitas Operasi KA, Direktorat Prasarana Perkeretaapian; / Act. Head of Sub Directorate of Railway Operation Facilities, Directorate of Railway Infrastructure; Perwakilan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten; / Representative of the Head of the Jakarta and Banten Region Railway Engineering Center; PPK Peningkatan Fasilitas Operasi Kereta Api Jabodetabek; / PPK Improvement of Jabodetabek Railway Operation Facilities; PPK Pengembangan Double-Double Track (Paket A); / PPK Development of Double-Double Track (Package A); PPK Pengembangan Perkeretaapian IP-563; / PPK Railway Development IP-563; PPK Pengembangan Perkeretaapian Metropolitan dan Banten; / PPK for Development of the Metropolitan and Banten Railways; Plt. Corporate Deputy Director of Signalling, Telecommunication and Electricity, PT Kereta Api Indonesia (Persero); / Act. Corporate Deputy Director of Signaling, Telecommunications and Electricity, PT Kereta Api Indonesia (Persero); Perwakilan EVP Daerah Operasi 1 Jakarta, PT Kereta Api Indonesia (Persero). / Representative for EVP Operational Area 1 Jakarta, PT Kereta Api Indonesia (Persero). <p>Terlampir Berita Acara Pembahasan Lanjutan Percepatan Pekerjaan Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Stasiun Kampung Bandan- Stasiun Kemayoran- Stasiun Pasar senen oleh Dirjen Perkeretaapian. / Attached is the Minutes of Further Discussion on the Acceleration of Improvement of Signaling and Telecommunication Systems at Kampung Bandan Station – Kemayoran Station – Pasar Senen Station by the Director General of Railways.</p> <p>TJ: Dalam proses pemeliharaan telah dilakukan koordinasi dengan Dirjen KA antara lain: / In the maintenance process, coordination with the Director General of Railways has been carried out, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan pemeriksaan bersama dan rekonsiliasi data terkait lokasi penggantian rel R.54 di Divre IV Tanjungkarang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 019/BA/JJ Divre IV TNK-2022 tanggal 19 Mei 2022; / Joint inspection and data reconciliation has been carried out regarding the location of the replacement of the R.54 rail at the Divre IV Tanjungkarang as outlined in the Minutes No. 019/BA/JJ Divre IV TNK-2022 dated May 19, 2022; Permohonan material Rel R.54 untuk wilayah Divisi Regional IV Tanjungkarang sebagai tindaklanjut pemeriksaan bersama yang dituangkan dalam surat dinas nomor: KC.205/VII/1/KA-2022 tanggal 11 Juli 2022 / Request for Rail R.54 material for the Tanjungkarang Regional Division IV area as a follow-up to the joint inspection as outlined in the official letter number: KC.205/VII/1/KA-2022 dated July 11, 2022 	<p>Telah terealisasi / Realized</p>

No.	Arahan / Directives	Tindaklanjut / Follow-Up				Keterangan / Description
Daftar Koordinasi dengan Dirjen KA Tahun 2022 / List of Coordination with the Director General of Railways in 2022						
No.	Uraian / Description	Nomor / No.	Tanggal / Date	Perihal / Subject	Keterangan / Information	
1.	Surat EVP Daop 6 Yogyakarta yang dikirim kepada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah / EVP Daop 6 Yogyakarta letter sent to the Head of the Class 1 Railway Engineering Center for the Central Java Region	KI.204/II/1/D06-2022	5 Januari 2022 / January 5, 2022	Permohonan Dukungan Material Rel R.54 Baru / Request for New R.54 Rail Material Support		
2.	Surat Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Barat bagian Tengah yang dikirim kepada EVP Daop 6 Yogyakarta / Letter from the Head of the Class 1 Railway Engineering Center for the Central Region of West Java sent to EVP Daop 6 Yogyakarta	PL/301/1/3/BTP-JTGDII/2022	17 Januari 2022 / January 17, 2022	Pemberitahuan Terkait Permohonan Dukungan Material Rel R.54 Baru / Notice Regarding New R.54 Rail Material Support Request		
3.	Surat Kepala Divisi Regional IV Tanjungkarang yang dikirim kepada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatra Bagian Selatan / Letter from the Head of the Tanjungkarang Regional IV Division sent to the Head of the Class II Railway Engineering Center for the Southern Sumatra Region	KI.206.II/1/DV.4-2022	7 Februari 2022 / February 7, 2022	Permohonan Dukungan Peningkatan Kecepatan dan Keselamatan PERKA di wilayah Divre IV Tanjungkarang / Request for Railway Speed and Safety Improvement Support in the Tanjungkarang Divre IV area		
4.	Surat EVP Daop 6 Yogyakarta yang dikirim kepada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatra Bagian Selatan / EVP Daop 6 Yogyakarta letter sent to the Head of the Class II Railway Engineering Center for the Southern Sumatra Region	KI.101/II/1/DO.6-2022	9 Februari 2022 / February 9, 2022	Permohonan Rel R.54 Baru untuk Mendukung Keselamatan Operasional / Request for New R.54 Rail to Support Operational Safety		
5.	Surat EVP Daop 1 Jakarta yang dikirim kepada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatra Bagian Selatan / EVP Daop 1 Jakarta letter sent to the Head of the Class II Railway Engineering Center for the Southern Sumatra Region	KI.204/II/2/DO.4-2022	10 Februari 2022 / February 10, 2022	Permohonan Dukungan Rel R.54 untuk Mendukung Pekerjaan Penggantian Rel di Wilayah / Request for New R.54 Rail to Support Rail Replacement Works in the Region		
6.	Surat PLT EVP Daop 4 Semarang yang dikirim kepada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatra bagian Selatan / Act. EVP Daop 4 Semarang letter sent to the Head of the Class II Railway Engineering Center for the Southern Sumatra Region	KI.101/II/2/DO.4-2022	10 Februari 2022 / February 10, 2022	Permohonan Dukungan Material Rel R.54 Baru Milik DJKA di Wilayah Daop 4 Semarang / Request for Material Support for DJKA's New R.54 Rail in Daop 4 Semarang Region		
7.	Surat EVP Daop 8 Surabaya yang dikirim kepada Balai Teknik Perkeretaapian Sumatra Bagian Selatan wilayah II Sumatra Selatan / EVP Daop 8 Surabaya letter sent to the Head of the Class II Railway Engineering Center for the Southern Sumatra Region	KI.204/III/1/DO.8-2022	10 Februari 2022 / February 10, 2022	Permohonan Dukungan Material Rel R.54 / Request for R.54 Rail Material Support		
8.	Surat Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA yang dikirim kepada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatra Bagian Selatan / Letter from the DJKA Railway Infrastructure Director sent to the Head of the Class II Railway Engineering Center for the Southern Sumatra Region	KA.008/3/2/K3/DJKA/2022	1 Maret 2022 / March 1, 2022	Persetujuan Penggunaan Material Rel R.54 untuk Divre III Palembang dalam Mendukung Keamanan Struktur dan Keselamatan Operasional Kereta Api / Approval for the Use of R.54 Rail Material for Divre III Palembang in Supporting the Safety of Railway Structures and Operational Safety	Terlampir dalam surat yaitu dokumen Berita Acara Pemeriksaan Bersama dan Rekonsiliasi Data terkait Lokasi Penggantian Rel R.54 sesuai Usulan Divre III Palembang PT KAI (Persero) Nomor BA-BTPSBS 7 Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022 / Attached to the letter are the Minutes of Joint Inspection and Data Reconciliation related to the Location of Replacement of Rail R.54 according to the Proposal of Regional Division III Palembang PT KAI (Persero) Number BA-BTPSBS 7 of 2022 dated February 24, 2022	

No.	Arahan / Directives	Tindaklanjut / Follow-Up					Keterangan / Description
		No.	Uraian / Description	Nomor / No.	Tanggal / Date	Perihal / Subject	
		9.	Surat Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA yang dikirim kepada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatra Bagian Selatan / Letter from the DJKA Railway Infrastructure Director sent to the Head of the Class II Railway Engineering Center for the Southern Sumatra Region	UM.004/1/20/K3/DJKA/2022	8 April 2022 / April 8, 2022	Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Permintaan Material Rel R.54 dan Bantal Beton oleh Divre IV Tanjungkarang untuk Mendukung Peningkatan Kecepatan dan Keselamatan Perkeretaapian / Submission of the Results of the Follow-up Discussion Meeting on Requests for R.54 Rail Materials and Concrete Sleepers by Divre IV Tanjungkarang to Support Increasing Railway Speed and Safety	Terlampir dalam surat yaitu dokumen Risaiah Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Permintaan Material Rel R.54 dan Bantal Beton oleh Divre IV Tanjungkarang untuk Mendukung Peningkatan Kecepatan dan Keselamatan Perkeretaapian tanggal 1 April 2022 / Attached to the letter is the document of the Minutes of Follow-Up Discussion of the Request for R.54 Rail Materials and Concrete Sleepers by the Tanjungkarang IV Regional Division to Support Increases in Railway Speed and Safety dated April 1, 2022
		10.	Surat Managing Director of Infrastructure yang dikirim kepada Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA / Letter of the Managing Director of Infrastructure sent to the Director of Railway Infrastructure DJKA	KI.204/IV/3/KA-2022	27 April 2022 / April 27, 2022	Penyampaian Konfirmasi atas Persetujuan Dukungan Permintaan Material R.54 dan Bantal Beton untuk Mendukung Perawatan Prasarana dan Jalan Rel / Submission of Confirmation on Approval of Support Requests for Material R.54 and Concrete Sleepers to Support Infrastructure and Railroad Maintenance	
		11.	Berita Acara Pemeriksaan Bersama / Minutes of Joint Examination	019/BA/JJ DIVRE IV TNK-2022	19 April 2022 / April 19, 2022	Berita Acara Pemeriksaan Bersama dan Rekonsiliasi Data terkait Lokasi Penggantian rel R.54 Permohonan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang / Minutes of Joint Inspection and Data Reconciliation related to Rail Replacement Location R.54 Application of PT Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division IV Tanjungkarang	Pihak Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatra Bagian Selatan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) / The Class II Railway Engineering Center for the Southern Sumatra Region and PT Kereta Api Indonesia (Persero)
		12.	Surat Deputi Kepala Divisi Regional IV Tanjungkarang yang dikirim kepada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatra Bagian Selatan / Letter from the Deputy Head of the Tanjungkarang IV Regional Division sent to the Head of the Class II Railway Engineering Center for the Southern Sumatra Region	KL.205/VII/1/DV.4-2022	5 Juli 2022 / July 5, 2022	Permohonan Permintaan Bantal Beton Sebanyak 5.000 Batang Untuk Penggantian Bantalan Kondisi Kritis / Request for 5,000 Bars of Concrete Sleepers to Replace Sleepers in Critical Condition	
		13.	Surat Managing Director of Infrastructure yang dikirim kepada Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA / Letter of the Managing Director of Infrastructure sent to the Director of Railway Infrastructure DJKA	KC.205/VII/1/KA-2022	11 Juli 2022 / July 11, 2022	Permohonan Material Rel R.54 untuk Wilayah Divisi Regional IV Tanjungkarang / Request for Rail R.54 Material for Regional Division IV Tanjungkarang	
		14.	Surat Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA yang dikirim kepada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatra bagian Selatan / Letter from the DJKA Railway Infrastructure Director sent to the Head of the Class II Railway Engineering Center for the Southern Sumatra Region	KA.604/1/4/K3/DJKA/2022	22 Juli 2022 / July 22, 2022	Persetujuan Penggunaan Material Rel R.54 untuk Wilayah Divisi Regional IV Tanjungkarang dalam Mendukung Keamanan Struktur dan Keselamatan Operasional Kereta Api / Approval for the Use of R.54 Rail Material for the Tanjungkarang Regional Division IV Region in Supporting the Safety of Railway Structures and Operational Safety	
		15.	Surat Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatra Bagian Selatan yang dikirim kepada Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA / Letter from the Head of the Class II Railway Engineering Center for the Southern Sumatra Region sent to the Director of Railway Infrastructure DJKA	UM.202/13/15/BTP-SUMBAGSEL/2022	8 Agustus 2022 / August 8, 2022	Penyampaian Surat Permohonan bantal beton sebanyak 5.000 batang untuk menggantikan bantal beton kritis. / Submission of a Request for 5,000 pieces of concrete sleepers to replace concrete sleeper in critical concrete.	

No.	Arahan / Directives	Tindakanjnt / Follow-Up	Keterangan / Description
5	<p>Direksi agar memperkuat perlindungan terhadap aset-aset perusahaan melalui penguasaan dan pembaharuan dokumen legal sesuai peraturan yang berlaku dan terhadap aset yang bermasalah/dalam proses sengketa dimintakan bantuan penyelesaian kepada aparat penegak hukum, instansi pertanahan, dan Pemda setempat untuk dipulihkan bagi kepentingan Perusahaan. / The Board of Directors is to strengthen the protection of company assets through mastery and renewal of legal documents in accordance with applicable regulations and for assets that are in trouble/in the process of disputes are asked for assistance in solving them from law enforcement agencies, land agencies, and the local regional government to be recovered for the benefit of the company.</p>	<p>Kantor Pusat / Head Office</p> <ul style="list-style-type: none"> - MOU PT KAI (Persero) dengan POLRI No : KL.703/IX/8/KA-2019, No : B/121/IX/2019 Perihal Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 19/9/2019 masa perjanjian 3 tahun. / MOU of PT KAI (Persero) with the Indonesian Police No: KL.703/IX/8/KA-2019, No: B/121/IX/2019 on Security Assistance and Law Enforcement of PT Kereta Api Indonesia (Persero) dated 9/19/2019 3-year agreement. <p>DAOP 1 Jakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> - MOU PT KAI (Persero) dengan POLDA Banten No : KL.705/IV/13/Do.1-2022 No : PKS/2/IV/HUK.8.1.1./2022 Perihal Bantuan Pengamanan Penegakan Hukum Dalam Rangka Penertiban Aset di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta tanggal 13/4/2022 masa perjanjian 2 tahun. / MOU of PT KAI (Persero) with Banten Regional Police No: KL.705/IV/13/Do.1-2022 No: PKS/2/IV/HUK.8.1.1./2022 on Law Enforcement Security Assistance in Controlling Assets in Environment PT Kereta Api Indonesia (Persero) Operational Area 1 Jakarta dated 4/13/2022 2-year agreement. - MOU PT KAI (Persero) dengan TNI AD No : KL.705/III/20/DO.1-2022 No : 1/II/2022 Perihal Pertukaran Data dan Informasi Serta Bantuan Pengamanan tanggal 17/2/2022 masa Perjanjian 2 Tahun / MOU of PT KAI (Persero) with the Indonesian Army No: KL.705/III/20/DO.1-2022 No: 1/II/2022 on Exchange of Data and Information and Security Assistance dated 2/17/2022 2 Year Agreement Period - MOU PT KAI (Persero) dengan POLDA Metro Jaya No : KL.703/III/1/DO.1-2022 No : 8/2/3/2022 Perihal Bantuan Pengamanan dan Penertiban Serta Penegakan Hukum di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta tanggal 02/09/2022 sampai dD Pengan 31/1/2025 / MOU of PT KAI (Persero) with Greater Jakarta Metropolitan Area Police No: KL.703/III/1/DO.1-2022 No: 8/2/3/2022 on Security Assistance and Control and Law Enforcement of PT Kereta Api Indonesia (Persero) Operational Area 1 Jakarta 09/02/2022 to 1/31/2025 <p>DAOP 2 Bandung</p> <ul style="list-style-type: none"> - MOU PT KAI (Persero) dengan POLDA Jabar No : KL.705/VI/3/DO.2-2022 No : PKS/23/VI/HUK.8.1.1./2022 Perihal Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum Dalam Rangka Penertiban Aset di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung tanggal 30/6/2022 masa perjanjian 3 tahun. / MOU of PT KAI (Persero) with West Java Regional Police No: KL.705/VI/3/DO.2-2022 No: PKS/23/VI/HUK.8.1.1./2022 Regarding Security Assistance and Law Enforcement in Controlling Assets in PT Kereta Api Indonesia (Persero) Operational Area 2 Bandung on 6/30/2022 3-year agreement. - MOU PT KAI (Persero) dengan TNI AD KODAM III Siliwangi No : KL.705/IV/1/DO.2-2022 No : 06/IV/2022 Perihal Pendampingan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Pada Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Wilayah Daerah Operasi 2 Bandung tanggal 20/4/2022 masa Perjanjian 2 Tahun / MOU of PT KAI (Persero) with the Indonesian Army Military Area Command III Siliwangi No: KL.705/IV/1/DO.2-2022 No: 06/IV/2022 on Assistance of the Indonesian National Armed Forces in the Implementation of Duties and Functions of PT Kereta Api Indonesia (Persero) in the Bandung Operational Area 2 on 4/20/2022 2-year agreement. <p>DAOP 3 Cirebon</p> <ul style="list-style-type: none"> - MOU PT KAI (Persero) dengan POLDA Jateng No : KL.705/IV/4/DO.3-2022 No : 07/IV/2022 perihal Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum Dalam Rangka Penertiban Aset di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 3 Cirebon tanggal 04/07/2022 sampai dengan 19/9/2022 / MOU of PT KAI (Persero) with Central Java Regional Police No: KL.705/IV/4/DO.3-2022 No: 07/IV/2022 on Security Assistance and Law Enforcement in Controlling Assets of PT Kereta Api Indonesia (Persero) Operational Area 3 Cirebon from 7/4/2022 to 9/19/2022 - MOU PT KAI (Persero) dengan TNI AD KODAM III Siliwangi No : KL.705/IV/4/DO.3-2022 No : 07/IV/2022 Perihal Pendampingan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Pada Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Wilayah Daerah Operasi 3 Cirebon tanggal 20/4/2022 masa Perjanjian 2 Tahun / MOU of PT KAI (Persero) with the Indonesian Army Military Area Command III Siliwangi No: KL.705/IV/4/DO.3-2022 No: 07/IV/2022 on Assistance of the Indonesian National Armed Forces in the Implementation of Duties and Functions of PT Kereta Api Indonesia (Persero) in the Cirebon Operational Area 3 on 4/20/2022 2-year agreement - MOU PT KAI (Persero) dengan TNI AD KODAM IV Diponegoro No : KL.705/III/1/DO.3-2022 No : PKS/3/III/2022 Perihal Pertukaran Data dan Informasi di Bidang Transportasi Serta Bantuan Pengamanan Untuk Batas Wilayah Jateng tanggal 03/10/2022 masa Perjanjian 2 Tahun / MOU of PT KAI (Persero) with the Indonesian Army Military Area Command IV Diponegoro No: KL.705/III/1/DO.3-2022 No: PKS/3/III/2022 Regarding the Exchange of Data and Information on Transportation and Security Assistance for Regional Boundaries Central Java on 10/3/2022 2-year agreement <p>DAOP 4 Semarang</p> <ul style="list-style-type: none"> - MOU PT KAI (Persero) dengan POLDA Jateng No : KL.705/II/1/DO.4-2022 No : PKS/1/II/2022 perihal Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum Dalam Rangka Penertiban Aset di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang tanggal 24/1/2022 sampai dengan 19/9/2022 / MOU of PT KAI (Persero) with Central Java Regional Police No: KL.705/II/1/DO.4-2022 No: PKS/1/II/2022 on Security Assistance and Law Enforcement in Controlling Assets of PT Kereta Api Indonesia (Persero) Operational Area 4 Semarang 1/24/2022 to 9/19/2022 - MOU PT KAI (Persero) dengan TNI AD KODAM IV Diponegoro No: KL.705/III/1/DO.4-2022 No: PKS/4/III/2022 Perihal Pertukaran Data dan Informasi di Bidang Transportasi Serta Bantuan Pengamanan tanggal 03/10/2022 masa Perjanjian 2 Tahun / MOU of PT KAI (Persero) with the Indonesian Army Military Area Command IV Diponegoro No: KL.705/III/1/DO.4-2022 No: PKS/4/III/2022 Regarding Exchange of Data and Information on Transportation and Security Assistance dated 10/3/2022 2-Year Agreement <p>DAOP 5 Purwokerto</p> <ul style="list-style-type: none"> - MOU PT KAI (Persero) dengan POLDA Jateng No : KL.705/II/18/DO.5-2022 No : PKS/2/II/2022 perihal Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum Dalam Rangka Penertiban Aset di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 Purwokerto tanggal 24/1/2022 sampai dengan 19/9/2022 / MOU of PT KAI (Persero) with Central Java POLDA No: KL.705/II/18/DO.5-2022 No: PKS/2/II/2022 on Security Assistance and Law Enforcement in Controlling Assets of PT Kereta Api Indonesia (Persero) Operational Area 5 Purwokerto 1/24/2022 to 9/19/2022 - MOU PT KAI (Persero) dengan TNI AD KODAM IV Diponegoro No : KL.705/III/3/DO.5-2022 No : PKS/5/III/2022 Perihal Pertukaran Data dan Informasi di Bidang Transportasi Serta Bantuan Pengamanan tanggal 03/10/2022 masa Perjanjian 2 Tahun / MOU of PT KAI (Persero) with the Indonesian Army Military Area Command IV Diponegoro No: KL.705/III/3/DO.5-2022 No: PKS/5/III/2022 Regarding the Exchange of Data and Information on Transportation and Security Assistance dated 10/3/2022 2 Year Agreement 	<p>Telah terealisasi / Realized</p>

No.	Arahan / Directives	Tindaklanjut / Follow-Up	Keterangan / Description
		<p>DAOP 6 Yogyakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> - MOU PT KAI (Persero) dengan KEJATI D I Yogyakarta No : KL.703/X/1/DO.6-2020 No : B.05/H.4/GS/10/2020 perihal Kerjasama dan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi tanggal 14/10/2020 masa perjanjian 2 tahun / MOU of PT KAI (Persero) with High Court DI Yogyakarta No: KL.703/X/1/DO.6-2020 No: B.05/H.4/GS/10/2020 on Cooperation and Coordination in Supporting the Implementation of Duties and Function dated 10/14/2020 2-year agreement - MOU PT KAI (Persero) dengan KEJATI Jawa Tengah No : KL.705/II/1/DO.6-2021 No : B-509/M.3/Gs/02/2021 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara tanggal 02/04/2021 masa perjanjian 2 tahun / MOU of PT KAI (Persero) with High Court Central Java No: KL.705/II/1/DO.6-2021 No: B-509/M.3/Gs/02/2021 aims to increase the effectiveness of handling and resolving legal issues in field of civil and State Administration dated 4/2/2021 2-year agreement - MOU PT KAI (Persero) dengan POLDA Jateng No : KL.705/IV/2/DO.6-2022 No : PKS/2/IV/2022 perihal Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum Dalam Rangka Penertiban Aset di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta tanggal 04/07/2022 sampai dengan 19/9/2022 / MOU of PT KAI (Persero) with Central Java POLDA No: KL.705/IV/2/DO.6-2022 No: PKS/2/IV/2022 on Security Assistance and Law Enforcement in Controlling Assets of PT Kereta Api Indonesia (Persero) Operational Area 6 Yogyakarta from 7/4/2022 to 9/19/2022 - MOU PT KAI (Persero) dengan POLDA D I Yogyakarta No : KL.705/VI/2/DO.6-2022 No : PKS/3/VI/2022 perihal Bantuan Pengamanan, Penegakan Hukum dan Penertiban Aset di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta tanggal 27/6/2022 sampai dengan 19/9/2022 / MOU of PT KAI (Persero) with POLDA DI Yogyakarta No: KL.705/VI/2/DO.6-2022 No: PKS/3/VI/2022 regarding Security Assistance, Law Enforcement and Control of Assets of PT Kereta Api Indonesia (Persero) Operational Area 6 Yogyakarta on 6/27/2022 to 9/19/2022 <p>Divre II Padang</p> <ul style="list-style-type: none"> - MOU PT KAI (Persero) dengan POLDA SUMBAR No : KL.705/III/2/DV.2-2022 No : B/07/III/HUK.8.1.1./2022 perihal Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam rangka Penertiban Aset di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat tanggal 03/08/2022 sampai dengan 19/9/2022 / MOU of PT KAI (Persero) with West Sumatra Regional Police No: KL.705/III/2/DV.2-2022 No: B/07/III/HUK.8.1.1./2022 on Security Assistance and Law Enforcement in Controlling Assets in PT Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division II West Sumatra on 8/3/2022 to 9/19/2022 <p>Divre III Palembang & IV Tanjung Karang</p> <ul style="list-style-type: none"> - MOU PT KAI (Persero) dengan TNI AD KODAM II Sriwijaya No : KL.705/VII/12/DV.3-2022, No : KL.705/VII/5/DV.4-2022, No : 02/VII/2022 Perihal Bantuan Pengamanan dan Penertiban Aset tanggal 22/7/2022 masa Perjanjian 2 Tahun / MOU of PT KAI (Persero) with Indonesian Army KODAM II Sriwijaya No: KL.705/VII/12/DV.3-2022, No: KL.705/VII/5/DV.4-2022, No: 02/VII/ 2022 Regarding Asset Security and Control Assistance dated 7/22/2022 2 Year Agreement Period <p>Divre IV Tanjung Karang</p> <ul style="list-style-type: none"> - MOU PT KAI (Persero) dengan POLDA Lampung No : KL.705/V/2/DV.4-2022 No : B/PKS-09/V/2022 perihal Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum Dalam Rangka Penertiban Aset di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang tanggal 19/5/2022. / MOU of PT KAI (Persero) with Lampung POLDA No: KL.705/V/2/DV.4-2022 No: B/PKS-09/V/2022 on Security Assistance and Law Enforcement in Controlling Assets of PT Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division IV Tanjungkarang on 5/19/2022. 	
6	<p>Direksi agar melakukan evaluasi secara menyeluruh kerjasama pemanfaatan aset perusahaan dengan pihak ketiga untuk mendapatkan nilai tambah kepada perusahaan dan memitigasi risiko atas permasalahan yang timbul di kemudian hari pasca kerjasama terkait pengembalian aset dan potensi cedera janii yang dapat berujung menjadi sengketa. / The Board of Directors is required to thoroughly evaluate the cooperation in the utilization of company assets with third parties to obtain added value to the company and mitigate the risk of problems that may arise in the future after the collaboration regarding the return of assets and potential for fetal injury which can lead to disputes.</p>	<p>CCC: PT KAI Melalui Direktorat Niaga dan Direktorat Keselamatan & Keamanan telah melakukan upaya penyelesaian pemanfaatan aset dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait antara lain: / PT KAI through the Directorate of Commerce and the Directorate of Safety & Security has made efforts to resolve asset utilization by collaborating with relevant stakeholders, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian permasalahan aset bersama Tim JAMDATUN, KAJARI dan KAJATI setempat diantaranya : / Solving asset problems with the local JAMDATUN, KAJARI and KAJATI Teams including: <ul style="list-style-type: none"> i. Pertokoan di Purwokerto dan Semarang (Lip Bowo Group). / Shops in Purwokerto and Semarang (Lip Bowo Group). ii. Pertokoan di Jalan Agus Salim Semarang. iii. Komplek Rumah Perusahaan Pacar Keling Surabaya. / Pacar Keling company housing complex, Surabaya. iv. Permintaan Legal Opinion dan pendampingan untuk penyelesaian permasalahan ROW dengan DJKA, Stasiun yang dibangun DJKA, Sultan Ground, Pertokoan GBC, dan permasalahan Utilitas (Telkom dan PGN) / Request for Legal Opinion and assistance for resolving ROW issues with DJKA, Stations built by DJKA, Sultan Ground, GBC Shops, and Utilities issues (Telkom and PGN) b. Dukungan Deputy bidang hukum dan perundang – undangan BUMN beserta Tim Kawal atas penyelesaian backlog utilitas (Telkom dan PGN) / Support from the deputy in the field of law and legislation for SOEs and the escort team for the completion of the utility backlog (Telkom and PGN) c. Dukungan jajaran DJKA atas proses inventarisasi utilitas di area ROW / DJKA ranks support for the utility inventory process in the ROW area <p>Terlampir: / Attached:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berita Acara Penyerahan Uang Sewa Aset PT KAI (Persero) dan 5 sertifikat HGB di atas HPL No 23, 24, 25 Tahun 2006 Tanggal 13 September 2021 oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto kepada VP Daop 5 Purwokerto; / Minutes of PT KAI (Persero) Asset Rental Fees and 5 HGB certificates above HPL Nos 23, 24, 25 of 2006 on September 13, 2021 by the Purwokerto District Attorney to VP Daop 5 Purwokerto; b. Undangan pembahasan penyelesaian penempatan utilitas Telkom di lahan KAI. / Invitation to discuss the completion of Telkom's utility placement on KAI's land. <p>PA Untuk meminimalisasi risiko atas permasalahan yang timbul dikemudian hari pasca kerjasama, unit PA melakukan upaya terkait rencana pengelolaan dan evaluasi kerjasama jangka panjang aset milik KAI antara lain: / To minimize the risk of problems arising in the future after the collaboration, the PA unit has made efforts related to the management plan and evaluation of long-term collaboration of KAI's assets, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi dan pengawasan dalam bentuk permintaan laporan periodik kepada Mitra Mitra kerjasama jangka panjang setiap tahunnya sesuai dengan yg dituangkan dalam perjanjian kerja sama. / Conduct evaluation and supervision in the form of requesting periodic reports to long-term cooperation Partners every year in accordance with what is stated in the cooperation agreement. 2. Kerja sama dengan Jamdatun terkait rencana pengelolaan pertokoan Grand Boutique Center Empl Sta Kampung Bandan Daop 1 Jakarta. / Collaboration with Jamdatun regarding the plan to manage the Grand Boutique Center Empl Sta Kampung Bandan Daop 1 Jakarta. 	<p>Telah terealisasi / Realized</p>

No.	Arahan / Directives	Tindakanjnt / Follow-Up	Keterangan / Description
7	<p>Direksi diminta melakukan upaya-upaya untuk mendorong realisasi PM secara penuh dan tepat waktu antara lain melalui koordinasi dengan BPN terkait penyelesaian pengurusan sertifikat dan percepatan penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor/konsultan. / The Board of Directors is asked to make efforts to encourage the realization of PM in full and on time, including through coordination with BPN regarding the completion of certificate arrangements and acceleration of work completion by contractors/ consultants.</p>	<p>KC: Sehubungan dengan penyerapan PMN Tahun Anggaran 2015, 2017 dan 2018 yang telah terserap sepenuhnya dan dilaporkan secara final pada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Kereta Api Indonesia (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 No.KG.105/VII/4/KA-2020 tanggal 3 Juli 2020. Kemudian untuk penyerapan PMN Tahun Anggaran 2021, telah dilaporkan secara triwulanan (posisi pelaporan sampai dengan saat ini adalah laporan penyerapan PMN s.d Triwulan II Tahun 2022) kepada Kementerian BUMN sesuai dengan Peraturan BUMN Nomor PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Sisa dana PMN TA 2021 terus dikoordinasikan dengan Divisi LRT Jabodetabek sehubungan dengan penyelesaian konstruksi dan persiapan operasional. / In connection with the absorption of PMN for the 2015, 2017 and 2018 Fiscal Years which have been fully absorbed and reported in final form in the Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Kereta Api Indonesia (Persero) on Approval of the Annual Report for the 2019 Fiscal Year No.KG.105/VII/ 4/KA-2020 dated July 3, 2020. Then for the absorption of PMN for Fiscal Year 2021, it has been reported on a quarterly basis (reporting position to date is PMN absorption report up to Quarter II of 2022) to the Ministry of SOE in accordance with SOE Regulation Number PER-08 /MBU/06/2015 concerning Guidelines for Reporting the Realization of Additional Use of State Equity Participation Funds for State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies. The remaining PMN funds for FY 2021 continue to be coordinated with the LRT Jabodetabek Division in connection with the completion of construction and operational preparations.</p> <p>Terkait penyelesaian pengurusan sertifikat dan percepatan penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor/ konsultan melalui koordinasi dengan BPN akan dijawab oleh unit SN. / Regarding the completion of certificate processing and acceleration of work completion by contractors/consultants through coordination with BPN, the SN unit will respond.</p> <p>SN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan BPN Kota/Kabupaten dan BPN seluruh kanwil untuk proses Percepatan penyelesaian pensertipikatan tahun 2022 / Coordinate with City/Regency BPN and BPN of all regional offices for the process of accelerating the completion of certificates in 2022 • Berkoordinasi secara langsung, maupun pembuatan MoU dengan Kementerian Atr/Bpn RI dan setingkat kanwil & kantah, dengan nomor MoU / Coordinate directly, as well as draw up MoUs with the Ministry of Atrg/Bpn RI and regional offices & regional offices, with the MoU numbers • Berkoordinasi secara langsung baik berupa rapat-rapat, maupun dengan pembuatan MoU dengan Kementerian ATR/BPN RI dan setingkat Kanwil Prov DKI Jakarta & Kantah di seluruh wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta, antara lain sebagai berikut: / Coordinate directly either in the form of meetings, or by making an MoU with the Ministry of ATR/BPN RI and the DKI Jakarta & other Regional Offices in all areas of Operational Area 1 Jakarta, among others as follows: <ul style="list-style-type: none"> - MoU PT KAI (Persero) dengan ATR BPN Jakarta No : KL.703/XI/2KA-2019 / MoU of PT KAI (Persero) with ATR BPN Jakarta No: KL.703/XI/2KA-2019 No : 37/SKB.HK.03.01/2019 Perihal Pendaftaran Tanah dan Penanganan Tanah Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero); / No: 37/SKB.HK.03.01/2019 on Land Registration and Handling of Land Assets of PT Kereta Api Indonesia (Persero); - Surat EVP Daop 1 Jakarta kepada Kantah Pertanahan Kab. Karawang Nomor: A.302/VIII/1/DO.1-2022 tanggal 9 Agustus 2022 perihal Mohon dukungan percepatan proses pensertipikatan aset tanah PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta; / Letter of EVP Daop 1 Jakarta to the Land Office of Kab. Karawang No. A.302/ VIII/1/DO.1-2022 dated August 9, 2022 on Request for support to accelerate the process of certifying PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta land assets; <p>Terlampir Surat EVP Daop 1 Jakarta kepada Bupati Kab. Bogor Nomor: KA.302/VIII/2/DO.1-2022 tanggal 24 Agustus 2022 perihal Permohonan pembebasan BPHTB pensertipikatan aset tanah PT KAI (Persero). / Attached is the Letter of EVP Daop 1 Jakarta to the Regent of Kab. Bogor No. KA.302/VIII/2/DO.1-2022 dated August 24, 2022 regarding the request for BPHTB exemption for certificate of PT KAI (Persero) land assets</p>	<p>Telah terealisasi / Realized</p>
8	<p>Direksi agar melakukan upaya peningkatan nilai Key Performance Indicators/KPI khususnya terhadap indikator yang belum mencapai target pada tahun 2021 yaitu Angkutan Penumpang, Volume Angkutan Barang, Pemenuhan Pelaksanaan PSO, dan Peningkatan user KAI Access. / The Board of Directors shall make efforts to increase the Key Performance Indicators / KPI values, especially for indicators that have not reached the target in 2021, namely Passenger Transportation, Freight Transport Volume, Fulfillment of PSO Implementation, and Increasing KAI Access users.</p>	<p>KGP: Pemenuhan Pelaksanaan PSO Tahun 2021 / Fulfillment of 2021 PSO Implementation</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Realisasi pelaksanaan PSO Tahun 2021 tercapai 105% (Kontrak sebesar Rp. 3.362.424.024.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 3.527.374.109.559,-) / Realization of PSO implementation in 2021 reached 105% (Contract of Rp3,362,424,024,000 and Realization of Rp3,527,374,109,559) b. Angka realisasi sebesar Rp. 3.527.374.109.559,- didapat dari realisasi pencairan PSO Rp. 3.017.318.055.209,- dan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit BPK-RI atas pelaksanaan penugasan PSO Tahun 2021 Pemerintah kurang bayar kepada PT KAI sebesar Rp. 510.041.899.903,- / Realization of Rp3,527,374,109,559 obtained from the realization of the PSO disbursement of Rp3,017,318,055,209 and BPK-RI Audit Report on the implementation of the 2021 PSO assignment in which the government underpaid PT KAI in the amount of Rp510,041,899,903. <p>CPM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan meningkatkan load factor / kapasitas kereta dari 80% menjadi 100% kepada Menhub dan DirjenKA tanggal 3 Mei 2021 dan 8 Maret 2022, / Request to increase load factor/train capacity from 80% to 100% to the Minister of Transportation and the Director General of Railways on May 3, 2021 and March 8, 2022. 2. Atas surat poin 1 : / On letter point 1: <ol style="list-style-type: none"> a. Menhub mengeluarkan SE peningkatan kapasitas KA Antar Kota dari 80% menjadi 100% pada SE No 25 Tahun 2022 pada tanggal 9 Maret 2022 dan KAI mulai memberlakukan tanggal 9 Maret 2022, / The Minister of Transportation issued a Circular to increase the capacity of Intercity Railways from 80% to 100% in Circular No. 25 of 2022 on March 9, 2022 and KAI began to enforce it on March 9, 2022. b. Menhub mengeluarkan SE peningkatan kapasitas KA Perkotaan dari 70% menjadi 100% pada SE No 57 Tahun 2022 pada tanggal 18 Mei 2022 dan KAI mulai memberlakukan tanggal 18 Mei 2022. / The Minister of Transportation issued a Circular to increase the capacity of urban trains from 70% to 100% in Circular No 57 of 2022 on May 18, 2022 and KAI began to enforce it on May 18, 2022. 	<p>Telah terealisasi / Realized</p>

No.	Arahan / Directives	Tindaklanjut / Follow-Up	Keterangan / Description
		<p>Terlampir surat edaran Menhub. / Attached is the circular of the Minister of Transportation</p> <p>3. Maksimalisasi perjalanan KA komersial diluar program dan penambahan frekuensi KA s.d Juli 2022 sbb : / Maximization of commercial train trips outside the program and addition of train frequencies until July 2022 are as follows:</p> <p>a. Perjalanan KA diluar program, antara lain : / Train trips outside the program, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KA Ciremai • KA Lodaya • KA Sancaka • KA Kamandaka relasi Cp-Smt PP • KA Joglosmerkerto relasi Cp-Yk PP • KA Tegai Bahari • KA Pasundan • KA Fajar Utama Solo • KA Mataram • KA Fajar Utama Yk • KA Senja Utama Yk • KA Sindoro tambahan • KA Sembrani tambahan • KA Sribilah (tambahan 2 No KA / additional 2 train numbers) <p>b. Penambahan frekuensi KA, antara lain : / Additional train frequency, among others:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KA Argo Cheribon, program 4 No KA dijalankan menjadi 8 No KA / the 4 train number program has been implemented into 8 train numbers • KA Argo Parahyangan, program 4 No KA dijalankan menjadi 22 No KA / the 4 train number program was implemented into 22 train numbers <p>4. KAI menyediakan fasilitas vaksinasi dan layanan antigen di beberapa stasiun / KAI provides vaccination facilities and antigen test services at several stations</p> <p>CPD: Untuk peningkatan user KAI Access, terdapat beberapa fitur yang mendukung peningkatan user KAI Access / For increasing KAI Access users, there are several features that support increasing KAI Access users</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan fitur PPOB yaitu penjualan Pulsa, Paket data dan token listrik, (23 Desember 2021) / Addition of PPOB feature, namely sale of phone credit, data packages and electricity tokens, (December 23, 2021) 2. Intgerasi dengan Bus Bandara DAMRI untuk pemesanan First Miles dan Last Miles tiket kereta + Bus Bandara DAMRI di KAI Access. (19 Januari 2022) / Integration with the DAMRI Airport Bus for booking First Mile and Last Mile train tickets + DAMRI Airport Bus on KAI Access. (January 19, 2022) 3. Penambahan Fitur Conencting Train (20 Maret 2022) / Addition of Connecting Train Features (March 20, 2022) 4. Penambahan metode pembayaran di KAI Access: / Additional payment methods in KAI Access: <ul style="list-style-type: none"> • Virtual Account BCA (22 Februari 2022 / February 22, 2022) • E-Wallet OVO (27 Mei 2022 / May 27, 2022) <p>Penambahan Layanan QRIS di KAI Pay untuk pembayaran QRIS di merchant-merchant (20 Juni 2022) / Addition of QRIS Services at KAI Pay for QRIS payments at merchants (June 20, 2022)</p> <p>Terlampir dokumen pencapaian program KAI Access / Attached is the achievement document for the KAI Access program</p> <p>CFS: Kinerja Angkutan s.d 30 Juni 2022 sebagai berikut: / Transportation performance until June 30, 2022 as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Volume : 26.697.882 Ton meningkat dari realisasi Tahun 2021 sebanyak 23.336.927 Ton / Volume: 26,697,882 tons, an increase from the realization in 2021 of 23,336,927 tons 2. Pendapatan Rp4.195.397.459.676 meningkat dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp3.322.356.817.469 / Revenue of Rp4,195,397,459,676 increased from the 2021 realization of Rp3,322,356,817,469 3. Strategi untuk pencapaian target angkutan barang: / Strategy for achieving the target of freight transportation: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian tarif, target dan diskon angkutan; / Adjustment of transportation fares, targets, and discounts; b. Pengembangan kereta api eksisting dan pengoperasian kereta api baru; / Development of existing trains and operation of new trains; c. Optimalisasi bongkar muat batubara di Sumatera Selatan; / Optimization of loading and unloading of coal in South Sumatra; d. Optimalisasi kereta api barang masa Nataru; / Optimization of freight train during Christmas and New Year Holiday; <p>Penambahan dan optimalisasi sarana dan prasarana angkutan. / Adding and optimizing transportation facilities and infrastructure.</p>	

Penyelenggaraan RUPS di Tahun 2021

Di tahun 2021, Perseroan menyelenggarakan RUPS sejumlah 2 (dua) kali yaitu RUPST Pengesahan RKAP Tahun 2021 serta RUPST Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2020. Pengungkapan masing-masing penyelenggaraan RUPS tersebut adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan RUPS Tahunan Pengesahan RKAP Tahun 2021

Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan Pengesahan RKAP Tahun 2021, pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 29 Januari 2021

Waktu : 20.50 WIB-22.00 WIB

Tempat : *Virtual Meeting* melalui *Zoom Meeting*

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan Pengesahan RKAP Tahun 2021

RUPS Tahunan Pengesahan RKAP Tahun 2021 telah dihadiri oleh anggota manajemen Perseroan, dengan perincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Kehadiran / Attendance
1	Jusman Syafii Djamal	Komisaris Utama / President Commissioner	Hadir / Present
2	Rahmat Hidayat	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Hadir / Present
3	Pungky Sumadi	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
4	Basuki Purwadi	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
5	Cris Kuntadi	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
6	Freddy Harris	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
7	Suhono Harso Supangkat	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
8	Didiek Hartantyo	Direktur Utama / President Director	Hadir / Present
9	Maqin Uddin Norhadi	Direktur Niaga / Plt. Direktur Pengelolaan Sarana / Managing Director of Commerce / Act. Managing Director of Rolling Stock	Hadir / Present
10	Awan Hermawan Purwadinata	Plt. Direktur Operasi / Direktur Pengelolaan Prasarana / Act. Managing Director of Operations / Managing Director of Rolling Stock	Hadir / Present
11	John Robertho	Direktur Keselamatan dan Keamanan / Managing Director of Safety and Security	Hadir / Present
12	Agung Yunanto	Direktur SDM dan Umum / Managing Director of Human Capital and General Affairs	Hadir / Present
13	Jeffrie N. Korompis	Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha / Managing Director of Strategic Planning and Business Development	Hadir / Present
14	Salusra Wijaya	Direktur Keuangan / Managing Director of Finance	Hadir / Present

Implementation of GMS in 2021

In 2021, the Company held 2 (two) GMS, namely the 2021 RKAP Approval AGMS and the 2020 Corporate Financial Accountability Report AGMS. The disclosures for each of the GMS implementations are as follows:

Implementation of the Annual GMS for the Ratification of the 2021 RKAP

The Company's Annual General Meeting of Shareholders to ratify the 2021 RKAP, at:

Date : Friday, January 29, 2021

Time : 20.50 WIB-22.00 WIB

Venue : Virtual Meeting via Zoom Meeting

Recapitulation of Attendance at the Annual GMS for the Ratification of the 2021 RKAP

The Annual General Meeting of Shareholders for the Ratification of the 2021 RKAP was attended by members of the Company's management, with the following details:

Recapitulation of Attendance at the Annual GMS

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Pengesahan RKAP Tahun 2021

Keputusan dan realisasi dari masing-masing keputusan di dalam RUPS Tahunan Pengesahan RKAP Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Resolutions and Realization of the Annual General Meeting of Shareholders for the Ratification of the 2021 RKAP

The resolutions and realization of each resolution at the Annual General Meeting of Shareholders for the Ratification of the 2021 RKAP are as follows:

Agenda Pertama / First Agenda

Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020 - 2024 PT Kereta Api Indonesia (Persero). / Ratification of Company Long Term Plan (RJPP) for 2020 - 2024 of PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Keputusan

Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020-2024 PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia.

2. Misi

- Untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- Untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur dan teknologi.
- Untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur-infrastruktur penting terkait transportasi.

3. Inisiatif strategis sebagaimana tercantum dalam Buku RJPP 2020-2024 berserta penyesuaiannya, termasuk namun tidak terbatas pada beberapa contoh inisiatif strategis sebagai berikut:

- Secara terus menerus mengembangkan kegiatan promosi dan marketing melalui social media, kegiatan atau event dengan berkolaborasi dengan partner/mitra lainnya untuk meningkatkan engagement dengan pelanggan.
- Implementasi Big Data Analytic untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan bisnis strategis dengan memberikan insight hasil pengolahan data secara deskriptif dan atau prediktif untuk aspek komersial, finansial dan HR serta aspek pemeliharaan, logistik dan operasi.

Resolution

Ratified the 2020-2024 Company Long Term Plan (RJPP) of PT Kereta Api Indonesia (Persero) with the following points:

1. Vision

To be the best transportation ecosystem solution for Indonesia.

2. Mission

- To provide a safe, efficient, digital-based and rapidly growing transportation system to meet customer needs.
- To develop integrated mass transportation solutions through investments in people, infrastructure and technology.
- To promote national development through partnerships with stakeholders, including initiating and implementing the development of important infrastructure related to transportation.

3. Strategic initiatives as stated in the 2020-2024 RJPP Book and their adjustments, including but not limited to several examples of strategic initiatives as follows:

- Continuously developing promotional and marketing activities through social media, activities or events in collaboration with partners/other partners to increase engagement with customers.
- Implementing Big Data Analytics to assist the management in making strategic business Resolutions by providing insight into the results of data processing in a descriptive and/or predictive manner for commercial, financial and HC aspects as well as maintenance, logistics and operations aspects.

- Meningkatkan sistem pembayaran cashless dalam pembelian tiket di berbagai layanan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pelanggan dan pegawai.
- Melayani lebih banyak pertambangan batu bara di Sumatera.
- Melakukan pengembangan sarana dan meningkatkan ketersediaan kereta melalui pengurangan rasio pemeliharaan serta alternatif optimalisasi sarana lainnya.
- Mengevaluasi kemampuan pendanaan KAI untuk lima tahun ke depan dan mengembangkan strategi pembiayaan untuk proyek-proyek ekspansi.
- Melalui identifikasi atas kinerja struktur organisasi eksisting di masing-masing direktorat serta mengusulkan perubahan struktur organisasi yang lebih agile, dapat membangun kapabilitas baru.
- Improving cashless payment system for purchasing tickets in various services to increase protection for customers and employees.
- Serving more coal mining in Sumatra.
- Developing facilities and increasing the availability of trains by reducing maintenance ratios and optimizing other alternative facilities.
- Evaluate KAI's funding capability for the next five years and develop financing strategies for expansion projects.
- By identifying the performance of the existing organizational structure in each directorate and proposing changes to a more agile organizational structure, new capabilities can be built.

4. Pokok Laporan Keuangan Pokok

4. Principal Financial Statements

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR
Pendapatan Usaha (di luar konstruksi) / Revenues (excluding construction)	Rp Miliar / Rp Billion	14.397	17.397	23.295	28.813	35.051	24,91%
Laba/(Rugi) Usaha / Operating Profit (Loss)	Rp Miliar / Rp Billion	(996)	355	2.445	5.441	8.594	80,56%
EBITDA	Rp Miliar / Rp Billion	34	1.735	3.739	7.352	10.592	318,72%
Laba/(Rugi) Bersih / Net Profit (Loss)	Rp Miliar / Rp Billion	(1.737)	(732)	1.061	1.708	3.948	43,78%
Investasi / Investment	Rp Miliar / Rp Billion	6.191	9.676	13.127	5.136	1.907	-25,50%
Arus Kas Operasi / Operating Cash Flows	Rp Miliar / Rp Billion	(554)	(212)	1.610	3.694	6.517	92,63%
Total Aset / Total Assets	Rp Miliar / Rp Billion	53.037	60.995	83.237	89.533	90.393	14,26%
Total Liabilitas / Total Liabilities	Rp Miliar / Rp Billion	35.154	42.300	53.522	57.866	54.521	11,60%
Total Ekuitas / Total Equity	Rp Miliar / Rp Billion	17.883	18.695	29.716	31.667	35.872	19,01%

Agenda Kedua / Second Agenda

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2021 PT Kereta Api Indonesia (Persero). / Ratification of the Company 2021 Work Plan and Budget (RKAP) including the Board of Commissioners 2021 Work Plan and Budget of PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Keputusan

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2021 KAI, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Resolution

Ratified the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2021 including the Board of Commissioners 2021 Work Plan and Budget with the following points:

a. Asumsi Penyusunan RKAP 2021

Uraian / Description	RKAP 2021
Nilai Tukar Rupiah/USD / Rupiah/USD Exchange Rate	14,600
Tingkat Inflasi (%) / Inflation Rate (%)	3,00
Pertumbuhan Ekonomi (%) / Economic growth (%)	4,30
Suku Bunga / Interest rate	7,90
PSO (Rp Triliun) / PSO (Rp Trillion)	3,59
IMO (Rp Triliun) / IMO (Rp Trillion)	1,12
Covid Recovery	2022

a. Assumption for the 2021 RKAP Preparation

b. Pokok-pokok Laporan Keuangan (Rp Miliar)

Uraian / Description	RKAP 2021
Pendapatan / Revenue	21.018
Labar/(Rugi) Usaha / Profit/(Loss) Business	355
EBITDA	1.735
Labar/(Rugi) Bersih / Net Profit/(Loss)	(723)
Total Aset / Total Assets	60.995
Ekuitas / Equity	18.695
Interest Bearing Debt	32.288
Net Operating Cash Flow	(212)

b. Principal Financial Statements (Rp Billion)

c. Capital Expenditure/Investasi (Rp Miliar)

Uraian / Description	RKAP 2021
Investigasi Non Penugasan / Non-Assignment Investment	2.579
1. Investasi Bisnis Eksisting / Investment in Existing Business	1.878
2. Investasi Pengembangan / Development Investment	696
3. Penyertaan/Tambahan Modal / Investment/Additional Capital	5
Penugasan Pemerintah / Government Assignment	6.771
Investasi Anak Perusahaan / Subsidiary Investment	326
Total Investasi / Total Investment	9.676

c. Capital Expenditure/Investment (Rp Billion)

Agenda Ketiga / Third Agenda

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2021 PT Kereta Api Indonesia (Persero). / Ratification of the 2021 Partnership and Community Development Program Work Plan and Budget (RKA-PKBL) of PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Keputusan

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2021 KAI dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Resolution

Ratified KAI's 2021 Partnership and Community Development Program Work Plan and Budget (RKA-PKBL) with the following points:

Uraian / Description	RKAP 2022
Program Kemitraan / Partnership Program	
Dana Tersedia / Funds Available	8.222
Penyaluran Program Kemitraan / Partnership Program Distribution	8.222
Sisa Dana / Remaining Funds	-
Program Bina Lingkungan / Community Development Program	
Dana Tersedia / Funds Available	8.769
Penyaluran Program Kemitraan / Partnership Program Distribution	8.769
Sisa Dana / Remaining Funds	-

Agenda Keempat / Fourth Agenda

Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen Tahunan (*Key Performance Indicator*) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2021 PT Kereta Api Indonesia (Persero). / Approval and Ratification of the Annual Management Contract (*Key Performance Indicator*) for the Board of Directors and the Board of Commissioners with Shareholders of PT Kereta Api Indonesia (Persero) for 2021.

Keputusan

Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan (*Key Performance Indicator*) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2021, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Resolution

Established Annual Management Contracts (*Key Performance Indicators*) for the Board of Directors and Board of Commissioners with Shareholders for 2021, as attached as an integral part of this resolution.

Key Performance Indicators

Key Performance Indicators

No.	KPI	Satuan / Unit	Target RKAP	Polaritas / Polarity	Bobot / Value	Sub-Total
A. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia / Social-Economic Value for Indonesia						50
Financial / Financial					21	
1	Ekspansi Berkelanjutan / Sustainable Expansion				6	
	EBITDA	Rp Miliar / Rp Billion	1.735	Maximize	2	
	Cash from Operation (di luar pembayaran/ penerimaan bunga) / excluding interest payments/receipts)	Rp Miliar / Rp Billion	1.020	Maximize	2	
	Laba (Rugi) Bersih / Net Profit (Loss)	Rp Miliar / Rp Billion	(723)	Maximize	2	
2	ROIC	%	1,14%	Maximize	5	
3	Interest Bearing Debt to Invested Capital	Kali / Time	0,69	Minimize	5	
4	Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali / Time	18,61	Minimize	5	

No.	KPI	Satuan / Unit	Target RKAP	Polaritas / Polarity	Bobot / Value	Sub-Total
Operasional / Operational						
5	Volume Angkutan KA Penumpang / Passenger Train Volume	Penumpang / Passenger	214.547.283	Maximize	5	
6	Volume Angkutan KA Barang / Freight Rail Transport Volume	Ton	56.412.318	Maximize	8	
7	Ketepatan waktu angkutan (kedatangan) / Timeliness of transportation (arrival)	%	75,3	Maximize	5	
8	Peningkatan Pelayanan Konsumen / Improved Customer Service				8	
	a. Indeks Kepuasan Pelanggan KA Penumpang dan KA Barang / Passenger and Freight Train Customer Satisfaction Index	CSI	4,3	Maximize	3	
	b. Safety/Accident Rate	%	0,007	Minimize	3	
Sosial / Social						5
9	Pemenuhan pelaksanaan PSO / Fulfillment of PSO implementation	%	100	Maximize	5	
B. Inovasi Model Bisnis						15
10	Penyelesaian Buku Putih Holding Kereta Api PT Kereta Api Indonesia (Persero) – PT INKA (Persero) / Completion of PT Kereta Api Indonesia (Persero) – PT INKA (Persero) Railway Holding White Paper	%	100	Maximize	5	
11	Fitur Integrasi antar moda untuk layanan first mile & last mile di KAI Access / Intermodal integration features for first mile & last mile services on KAI Access	%	100	Maximize	5	
C. Kepemimpinan Teknologi / Technology Leadership						15
13	Peningkatan user PT Kereta Api Indonesia (Persero) Access / Increased users of PT Kereta Api Indonesia (Persero) Access	Pengguna / User	1.793.371	Maximize	5	
14	Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan Rel Kategori Baik (Kecepatan 80 – 120 km/jam) / Improved Quality of Rail Road Infrastructure in Good Category (Speed 80 – 120 km/hour)	Kmsp	4.871	Maximize	5	
15	Toleransi Gangguan Lokomotif / Locomotive Fault Tolerance	Kali / Time	930	Minimize	5	
D. Peningkatan Investasi / Investment Increase						10
16	Penyerapan anggaran investasi / Absorption of investment budget	%	75	Maximize	5	
17	Pelaksanaan investigasi penugasan pemerintah (reaktivasi Jalur KA Jawa Barat) / Implementation of government assignment investigations (reactivation of West Java Railway)	%	100	Maximize	5	
E. Pengembangan Talenta / Talent Development						10
18	% Rasio Perempuan dalam <i>nominated talent</i> / % Female ratio in <i>nominated talent</i>	%	16,06	Maximize	5	
19	% Rasio milenial (<40 tahun) dalam <i>top talent</i> / % Millennial ratio (<40 years old) in <i>top talent</i>	%	54,55	Maximize	5	
TOTAL						100

Agenda Kelima / Fifth Agenda

Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2021 PT Kereta Api Indonesia (Persero). / Approval and Ratification of the Management Contract (*Key Performance Indicator*) of the Board of Commissioners and Shareholders of PT Kereta Api Indonesia (Persero) for 2021.

Keputusan

Menetapkan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2021, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Resolution

Established the Management Contract (*Key Performance Indicator*) for the Board of Commissioners and Shareholders for 2021, as attached as an integral part of this Resolution.

Key Performance Indicators

Key Performance Indicators

No.	Aspek dan Parameter / Aspects and Parameters	KPI		Bobot / Value
		Target	Satuan / Unit	
I. ASPEK PENGAWASAN DAN PENASIHATAN / ASPECT OF SUPERVISION AND ADVICE-GIVING				55
1	Review/analisis kinerja perusahaan / Company performance review/analysis	8	Kali / Time	20
	• Penelaahan atas Rancangan RJPP / Review of the RJPP Draft			2
	• Penelaahan atas Rancangan RKAP / Review of the RKAP Draft			4
	• Evaluasi atas pelaksanaan RKAP 2020 / of the implementation of the 2020 RKAP			4
	• Pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham / Monitoring of performance of the Board of Directors and reporting to Shareholders			2
	• Perubahan lingkungan bisnis / Changes in the business environment			2
	• Tindak lanjut atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari pemangku kepentingan / Follow up on suggestions, expectations, concerns and complaints from stakeholders			2
	• Gejala menurunnya kinerja perusahaan yang signifikan / Symptoms of a significant decline in company performance			2
	• Penilaian atas usulan calon Direksi Anak Perusahaan dan Komisaris Anak Perusahaan / Assessment of the proposed candidates for the Board of Directors of the Subsidiaries and the Board of Commissioners of Subsidiaries			2
2	Pengawasan dan pemberian nasihat atas: / Supervision and providing advice on:	11	Kali / Time	15
	• Kebijakan rancangan SPI / SPI draft policy			1
	• Kebijakan manajemen risiko / Risk management policy			2
	• Kebijakan sistem teknologi informasi / Information technology system policy			1
	• Kebijakan akuntansi dan penyusunan LK / Policy on accounting and preparation of financial statements			2
	• Kebijakan pengelolaan SDM / HC management policy			1
	• Kebijakan pengadaan barang dan jasa / Policy on procurement of goods and services			2
	• Kebijakan mutu dan pelayanan / Quality and service policy			1
	• Kepatuhan perusahaan terhadap Undang-undang, Anggaran Dasar, perjanjian dan komitmen / Company compliance with laws, articles of association, agreements and commitments			2
	• Transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris dan RUPS / Transactions or actions within the scope of authority of the Board of Commissioners and the GMS			1
	• Kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan / Subsidiary/joint venture management policy			1
	• Kebijakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola / Policy on GCG principles implementation			1
3	Pemantauan tindak lanjut temuan audit / Monitoring of the follow-up on audit findings	2	Kali / Time	5
	• Penunjukan calon auditor / Appointment of prospective auditor			2,5
	• Pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan internal serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan / Supervision of the effectiveness of the implementation of external and internal audits as well as the implementation of a review of complaints related to the Company			2,5
4	Monitoring Pekerjaan Project Director (PD) dan Penugasan Pemerintah dan Investasi Pengembangan Perusahaan / Monitoring of Project Director (PD) Work and Government Assignments and Company Development Investment	4	Kali / Time	5

No.	Aspek dan Parameter / Aspects and Parameters	KPI		Bobot / Value
		Target	Satuan / Unit	
5	Rapat / Meeting			10
	• Internal	12	Kali / Time	5
	• Gabungan / Joint	12	Kali / Time	5
II ASPEK PELAPORAN / REPORTING ASPECT				25
1	Program Kerja Tahunan (RKA Dewan Komisaris) / Annual Work Program (RKA Board of Commissioners)	1	Kali / Time	10
2	Laporan/pendapat saran kepada RUPS / Reports/advice suggestions to the GMS			10
	• Kinerja Direksi / Board of Directors Performance	1	Kali / Time	5
	• Remunerasi Direksi / Board of Directors Remuneration	1	Kali / Time	5
3	Laporan Manajemen (Audited) Tahun 2021 / 2021 Management Report (Audited)	1	Kali / Time	5
III ASPEK DINAMIS/LAIN-LAIN / DYNAMIC/OTHER ASPECTS				20
1	Peningkatan Kompetensi / Competency Improvement			10
	• Program pengenalan Komisaris baru / New Commissioner introduction program	100	%	5
	• Program pengembangan kompetensi melalui seminar, diklat, benchmark dan sejenisnya / Competency development programs through seminars, training, benchmarks and the like	5	Kali / Time	5
2	Rekomendasi/Tanggapan atas usul yang disampaikan Direksi / Recommendations/Responses to proposals submitted by the Board of Directors	100	%	10
TOTAL				100

Agenda Keenam / Sixth Agenda

Penetapan Indikator Aspek Operasional Untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2021. / Determination of Operational Aspect Indicators for Measuring the Soundness Level of PT Kereta Api Indonesia (Persero) in 2021.

Keputusan

Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan KAI Tahun 2021, sebagai berikut:

Resolution

Establish Operational Aspect Indicators for KAI Soundness Level Measurement in 2021, as follows:

No.	Indikator / Indicator	Bobot / Value
Aspek Operasional / Operational Aspect		35
1	Tingkat keselamatan / Safety Level	10,00
2	Tingkat Pelayanan / Service Level	11,00
3	Efektivitas Pemeliharaan / Maintenance Effectiveness	8,00
4	Produktivitas SDM / HC Productivity	6,00
Total		35,00

Agenda Ketujuh / Seventh Agenda

Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari masing-masing program/item investasi sepanjang tidak mengubah program/ item investasi dan tidak melebihi total nilai investasi / Delegation of Authority to the Board of Commissioners to approve any actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of each investment program/item as long as it does not change the investment program/item and did not exceed the total investment value.

Keputusan

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program/item investasi sepanjang tidak mengubah program/item investasi dan tidak melebihi total nilai investasi.

Resolution

Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to give approval if there were actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program/item as long as it did not change the investment program/item and does not exceed the total value investment.

Arahan RUPS

GMS Directives

No.	Arahan / Directives	Tindakanlanj / Follow-Up	Keterangan / Description
1	Menyusun <i>cascading</i> langkah dan target pencapaian RJPP Tahun 2020-2024 yang terukur dengan penanggung jawab yang jelas serta melakukan evaluasi secara periodik. / Preparing cascading steps and targets for achieving the 2020-2024 RJPP that were measurable with clear responsibilities and conduct periodic evaluations.	<i>Cascading</i> inisiatif strategis dan target pencapaian RJPP 2020-2024 telah dimulai dan dilaksanakan melalui: / The cascading of strategic initiatives and targets for achieving RJPP 2020-2024 has been initiated and implemented through: a. Penyampaian buku penyesuaian RJPP melalui Nota dinas Nomor: 3/KP.102/IV/UPC/ KA/2021 tanggal 29 April 2021 / Submission of the RJPP adjustment book through official memo No. 3/KP.102/IV/UPC/KA/2021 dated April 29, 2021 b. Proses <i>cascading</i> inisiatif strategis RJPP telah dilakukan dengan Penyusunan buku strategi implementasi RJPP bersama Tim persiapan yang disampaikan kepada DU melalui Nota dinas Nomor: 3/KP.102/IV/UP/ KA/2021 tanggal 20 April 2021; / The cascading process of the RJPP strategic initiative has been carried out by compiling the RJPP implementation strategy book with the preparation team which was submitted to the DU through the official memorandum No. 3/KP.102/IV/UP/KA/2021 dated April 20, 2021; c. Rapat Koordinasi bersama para CDD, EVP dan VP melalui Nota dinas Nomor: 1/ KK.105/IV/UP/KA/2021 tanggal 12 April 2021 perihal Rapat Koordinasi Sosialisasi dan <i>Cascading</i> RJPP; / Coordination Meeting with CDD, EVP and VP through official Memorandum No. 1/KK.105/IV/UP/KA/2021 dated April 12, 2021 regarding the Coordination Meeting for Socialization and Cascading RJPP; d. Penyusunan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. PER.U/KP.102/ VIII/1/KA-2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Strategi Implementasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2020-2024; / Preparation of Regulations for the Board of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. PER.U/KP.102/ VIII/1/KA-2020 dated July 29, 2020 regarding the Strategy for the Implementation of the Company's Long-Term Plan for 2020-2024; Rapat Koordinasi pada tanggal 22 Juni 2021 membahas <i>Cascading</i> RJPP dan Reviu Implementasi Inisiatif Strategis RJPP 2020-2024 Bidang Niaga. Undangan melalui nota dinas Nomor: 1/ KK.105/VI/UPC/KA/2021 tanggal 17 Juni 2021. / The Coordination Meeting on June 22, 2021 discussed the RJPP Cascading and the Review on the Implementation of the 2020-2024 RJPP Strategic Initiatives in the Commercial Sector. Invitation via official memo No. 1/KK.105/VI/UPC/KA/2021 on June 17, 2021.	Telah Terealisasi / Realized
2	Memastikan seluruh insan perusahaan memahami dokumen RJPP Tahun 2020-2024 melalui sosialisasi, dan penerapan <i>Key Performance Indicators</i> agar diturunkan kepada unit-unit kerja sampai dengan target kinerja individual. / Ensuring that all company personnel understand the 2020-2024 RJPP document through socialization, and the application of <i>Key Performance Indicators</i> to be passed down to work units up to individual performance targets.	Sosialisasi substansi dokumen RJPP serta target <i>Key Performance Indicators</i> telah dilaksanakan melalui berbagai inisiatif sosialisasi, termasuk: / Dissemination of the substance of the RJPP document as well as the target of <i>Key Performance Indicators</i> was carried out through various dissemination initiatives, including: 1. Penyampaian buku penyesuaian RJPP melalui Nota dinas Nomor: 3/KP.102/IV/UPC/ KA/2021 tanggal 29 April 2021 kepada jajaran <i>top management</i> (CDD, EVP, VP, KADAOP, KADivire dan KA Balaiyasa); / Submission of the RJPP adjustment book through official memorandum No. 3/KP.102/IV/UPC/KA/2021 dated April 29, 2021 to top management (CDD, EVP, VP, KADAOP, KADivire and KA Balaiyasa); 2. Kegiatan Webinar melalui <i>Zoom Meeting</i> bersama seluruh pegawai PT KAI pada tanggal 15 April 2021 melalui undangan Nomor: 2/KE.202/IV/MT/KA/2021 tanggal 12 April 2021; / Webinar activity through zoom meeting with all PT KAI employees on April 15, 2021 through invitation No. 2/KE.202/IV/MT/KA/2021 on April 12, 2021; 3. Meluaskan Materi sosialisasi Penyesuaian RJPP melalui upload video sosialisasi di <i>E-learning web e-office</i> , Nota Dinas Nomor: 1/KP.102/IV/UPC/KA/2021 tanggal 19 Mei 2021; / Expanding the socialization materials for adjusting the RJPP through uploading socialization videos on the E-learning web e-office, Office Note No. 1/ KP.102/IV/UPC/KA/2021 dated May 19, 2021; 4. Rapat Koordinasi pada tanggal 22 Juni 2021 membahas proses <i>cascading</i> RJPP dan Reviu Implementasi Inisiatif Strategis RJPP 2020-2024 Bidang Niaga. Undangan melalui nota dinas Nomor: 1/ KK.105/VI/UPC/ KA/2021 tgl 17 Juni 2021. / The Coordination Meeting on June 22, 2021 discussed the cascading process of the RJPP and the Review of the Implementation of the 2020-2024 RJPP Strategic Initiatives in the Commercial Sector. Invitation via official memo No. 1/KK.105/VI/UPC/KA/2021 dated June 17, 2021.	Telah Terealisasi / Realized
3	RKAP Tahun 2021 agar di <i>breakdown</i> menjadi rencana bulanan untuk memudahkan monitorin dan evaluasi pencapaiannya / The 2021 RKAP to be broken down into a monthly plan to facilitate monitoring and evaluation of its achievements.	Setiap tahun RKAP Tahunan yang sudah disahkan oleh RUPS akan di- <i>breakdown</i> perbulan berdasarkan unit kantor pusat, dan daerah (Daop/Divre/Balai Yasa), kemudian akan dikompilasi dalam bentuk bulanan baik induk maupun konsolidasi. / Every year the Annual RKAP ratified by the GMS was broken down monthly based on the head office and regional units (Daop/Divre/Balai Yasa), then it was compiled in a monthly form, both parent and consolidated.	Telah Terealisasi / Realized
4	Operasi perusahaan agar diupayakan untuk terus meningkatkan pendapatan, namun tetap berpegang pada efisiensi beban-beban usaha, baik beban pokok pendapatan maupun beban administrasi dan umum. / The Company's operations should be strived to continue to increase revenue, but still adhere to the efficiency of operating expenses, both the cost of revenue as well as administrative and general expenses.	Telah dilakukan penyusunan prognosa setiap bulan berdasarkan data realisasi bulan sebelumnya dengan berkoordinasi dengan unit-unit lainnya dalam memperhitungkan operasional perusahaan khususnya dalam hal pencapaian target pendapatan, serta bersumber pada data monitoring efisiensi beban usaha tiap bulan dari unit dan daerah, dengan begitu, dapat diperhitungkan update prognosa bulanan hingga akhir tahun 2021, sehingga keyakinan pencapaian target sampai dengan akhir tahun dapat dimonitor secara bulanan. / Monthly prognoses were prepared based on the realization data of the previous month by coordinating with other units in calculating the company's operations, especially in terms of achieving revenue targets, and sourced from monthly operating expense efficiency monitoring data from units and regions, so updates could be calculated based on monthly prognosis until the end of 2021, so that confidence in achieving the target until the end of the year could be monitored on a monthly basis.	Telah Terealisasi / Realized

No.	Arahan / Directives	Tindaklanjuti / Follow-Up	Keterangan / Description
5	Direksi agar memastikan bahwa penarikan pinjaman/ pendanaa harus mempertimbangkan aspek timing, sizing, dan pricing serta skema dan proses terbaik sehingga dapat dilakukan efisiensi terhadap beban bunga (cost of fund) serta tidak memburakan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. / The Board of Directors to ensure that loan/ funding withdrawals had to consider the timing, sizing, and pricing aspects as well as the best schemes and processes so that the cost of funds was efficient and did not burden the company's financial performance in the future.	<p>Penarikan pinjaman jangka pendek dilakukan atas dasar <i>mismatch cash in</i> dan <i>cash out</i>. Sejak November 2020 sampai dengan awal April 2021 tidak dilakukan penarikan pinjaman baru, dan baru dilakukan penarikan pinjaman baru pada akhir bulan April dikarenakan: / Short-term loan withdrawals are made on the basis of cash in and cash out mismatches. Since November 2020 until early April 2021, no new loan withdrawals have been made, and new loan withdrawals have only been made at the end of April due to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebutuhan pembayaran THR di akhir April 2021 dan pembayaran gaji bulan April yang waktunya berdekatan. / There was a need for THR payments at the end of April 2021 and salary payments in April which are close in time. 2. Pendapatan yang ada tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan THR dan opex / The existing income is not sufficient to meet the needs of THR and opex 3. Tidak adanya pemasukan PTBA di bulan April karena masa transisi perubahan pembayaran dari Uang Muka yang diterima pada Januari untuk periode selama 3 bulan yaitu Januari, Februari dan Maret, menjadi pembayaran rutin bulanan yang diterima 30 hari kemudian / There was no PTBA income. in April due to the transition period of changing payments from Advances received in January for a period of 3 months, namely January, February and March, to regular monthly payments received 30 days later 4. Belum diterima dana PSD dari Pemerintah / PSD funds have not been received from the government 5. Nominal penarikan sebesar Rp250 Miliar disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan proyeksi diterimanya PSD dan pendapatan dari PTBA di bulan Mei 2021 / Withdrawal nominal of Rp250 billion is adjusted to existing needs and the projected receipt of PSD and income from PTBA in May 2021 6. Pricing penarikan pinjaman jangka pendek pada bulan akhir bulan April 2021 di rate 4,1% p.a dimana suku bunga ini lebih rendah dibandingkan rata-rata bunga di akhir tahun 2020 yaitu di rate 4,85% p.a / Pricing for short-term loan withdrawals at the end of April 2021 is at a rate of 4.1% p.a, where this interest rate is lower than the average interest rate at the end of 2020, which is at a rate of 4.85% p.a. <p>Berdasarkan kondisi di atas, bahwa penarikan pinjaman jangka pendek telah memperhatikan aspek <i>timing, sizing, dan pricing</i>. / Based on the above conditions, the withdrawal of short-term loans has taken into account the aspects of timing, sizing, and pricing</p>	Telah Terealisasi / Realized
6	Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, saran dan rekomendasi auditor, baik auditor eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun auditor internal (SPI) di tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan dilaporkan secara tertulis kepada Pemegang Saham. / The Board of Directors to follow up and complete the findings, suggestions and recommendations of the auditors, both external auditors (BPK RI and/or KAP) and internal auditors (SPI) in 2020 and previous years. Follow-up to the completion of the auditor's findings/suggestions to be discussed comprehensively with the Board of Commissioners and reported in writing to the Shareholders.	Direksi telah menindaklanjuti temuan, saran, dan rekomendasi baik dari Auditor Internal dan Eksternal. Progres tindak lanjut dari temuan-temuan auditor BPK telah dilaporkan kepada pemegang saham secara periodik dan telah dibahas bersama dengan Komite Audit sebagai perwakilan Dewan Komisaris. / The Board of Directors followed up on the findings, suggestions, and recommendations from both the Internal and External Auditors. The follow-up progress of the findings of the BPK auditors was reported to shareholders periodically and was discussed together with the Audit Committee as a representative of the Board of Commissioners.	Telah Terealisasi / Realized
7	Perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis dari RUPS diajukan secara tersendiri dengan dilengkapi sekurang-kurangnya tanggapan Dewan Komisaris, Pakta Integritas Direksi, kajian teknis, kajian hukum, kajian ekonomi dan kajian risiko. / The actions of the Board of Directors that required written approval from the GMS were submitted separately with at least the responses of the Board of Commissioners, the Board of Directors Integrity Pact, technical studies, legal studies, economic studies and risk studies.	<p>Telah diterbitkan Nota Dinas Internal kepada Para CDD dan EVP di PT KAI (Persero) Nomor: 3/KC.202/VI/US/KA/2021 tanggal 23 Juni 2021 Perihal Kelengkapan Dokumen Aksi Korporasi yang Memerlukan Persetujuan RUPS. Yang isinya adalah menghimbau kepada setiap Direktorat/Unit yang akan mengusulkan Aksi Korporasi dan memerlukan persetujuan tertulis dari RUPS untuk diajukan secara tersendiri dengan mengengkapi dokumen sekurang-kurangnya: / An Internal Service Memorandum was issued to CDDs and EVPs at PT KAI (Persero) No. 3/ KC.202/VI/US/KA/2021 dated June 23, 2021 Regarding Completeness of Corporate Action Documents Requiring GMS Approval. The contents of which were to appeal to each Directorate/Unit that proposed a Corporate Action and required written approval from the GMS to be submitted separately by completing at least the following documents:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggapan Integritas Dewan Komisaris; / Integrity Response of the Board of Commissioners; b. Pakta Integritas Dewan Komisaris; / Board of Commissioners' Integrity Pact; c. Pakta Integritas Dewan Direksi; / Board of Directors Integrity Pact; d. Kajian Teknis; / Technical Studies; e. Kajian Hukum; / Legal Studies; f. Kajian Ekonomi; dan / Economic Studies; and g. Kajian Risiko / Risk Assessment. 	Telah Terealisasi / Realized
8	Dewan Komisaris agar lebih meningkatkan pengawasan atas kebijakan dan tindakan Direksi terutama dalam bidang tata kelola perusahaan, operasional dan keuangan perusahaan yang sehat. / The Board of Commissioners was to improve supervision over the policies and actions of the Board of Directors, especially in the areas of corporate governance, operations and sound corporate finance.	Berdasarkan surat Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Nomor: 41/CG/KOM/VI/2021 Tanggal 4 Mei 2021 telah dilakukan pengawasan dan penasehatan Dewan Komisaris kepada jajaran Direksi dan Manajemen PT KAI (Persero). / Based on the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners No. 41/CG/KOM/VI/2021 dated May 4, 2021, the Board of Commissioners conducted supervision and advice to the Board of Directors and Management of PT KAI (Persero).	Telah Terealisasi / Realized

No.	Arahan / Directives	Tindaklanjut / Follow-Up	Keterangan / Description												
9	Direksi agar terus meningkatkan kemampuan dan kapabilitas SDM melalui program yang terukur untuk menciptakan lebih banyak calon suksesor dari kalangan milenial (termasuk di dalamnya memperhatikan keterwakilan perempuan). / The Board of Directors to continue to improve the capabilities of HR through measurable programs to create more prospective successors from the millennial circle (including paying attention to the representation of women).	<p>Kompetensi: Sedang dilaksanakan Penyesuaian Kamus kompetensi dan Profil Kompetensi dari model kompetensi KAI baru yang disesuaikan dengan tuntutan perusahaan seperti muncul beberapa kapabilitas – kapabilitas baru dalam membentuk SDM yang berdaya saing. / Competence: The competency dictionary and competency profile adjustments from the new KAI competency model were adapted to the company's demands, such as the emergence of several new capabilities in forming competitive human capital.</p> <p>Program Pengembangan Talent</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori Talent / Talent Category</th> <th>Jumlah Talent / Total Talents</th> <th>Jenis Pengembangan / Development Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Talent BUMN / SOE Talents</td> <td>10</td> <td rowspan="4"> <ul style="list-style-type: none"> Leadership Development Program / Leadership Development Program Coaching & Mentoring Rotasi/ Promosi / Rotation/ Promotion Pelatihan pengembangan kompetensi individual / Individual competency development training </td> </tr> <tr> <td>Talent Millenial / Millennial Talents</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Talent Perempuan / Female Talents</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Talent Fast Track / Fast Track Talents</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Asesmen Program Talent:/ Talent Program Assessment: Pelaksanaan Asesmen sebagai salah satu program Talent Management yang berjalan diprioritaskan pada pekerja Milenial dan Perempuan untuk memenuhi rasio talent dalam pencapaian KPI dari Kementerian BUMN. / Implementation of the Assessment as one of the Talent Management programs prioritized Millennial workers and Women to meet the talent ratio in achieving KPI from the Ministry of SOEs.</p>	Kategori Talent / Talent Category	Jumlah Talent / Total Talents	Jenis Pengembangan / Development Type	Talent BUMN / SOE Talents	10	<ul style="list-style-type: none"> Leadership Development Program / Leadership Development Program Coaching & Mentoring Rotasi/ Promosi / Rotation/ Promotion Pelatihan pengembangan kompetensi individual / Individual competency development training 	Talent Millenial / Millennial Talents	9	Talent Perempuan / Female Talents	4	Talent Fast Track / Fast Track Talents	50	Telah Terealisasi / Realized
Kategori Talent / Talent Category	Jumlah Talent / Total Talents	Jenis Pengembangan / Development Type													
Talent BUMN / SOE Talents	10	<ul style="list-style-type: none"> Leadership Development Program / Leadership Development Program Coaching & Mentoring Rotasi/ Promosi / Rotation/ Promotion Pelatihan pengembangan kompetensi individual / Individual competency development training 													
Talent Millenial / Millennial Talents	9														
Talent Perempuan / Female Talents	4														
Talent Fast Track / Fast Track Talents	50														
10	Memperkuat fungsi legal, pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan dalam rangka early warning system. Selanjutnya, Dewan Komisaris agar melakukan evaluasi atas efektivitas peran SPI dan manajemen risiko serta melaporkan hasilnya kepada Pemegang Saham. / Strengthening legal functions, internal control and corporate risk management within the framework of an early warning system. Furthermore, the Board of Commissioners was required to evaluate the effectiveness of the role of SPI and risk management and report the results to the Shareholders.	<p>Berdasarkan surat Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Nomor: 41/ CG/KOM/V/2021 Tanggal 4 Mei 2021 Bab VIII. Realisasi KPI Dewan Komisaris pada Aspek Pengawasan dan Penasihat, telah dilaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat atas: / Based on the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners No. 41/CG/KOM/V/2021 Dated May 4, 2021 Chapter VIII. The realization of the Board of Commissioners' KPI on the Supervision and Advisory Aspects carried out supervision and providing advice on:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan rancangan SPI; / SPI draft policy; Kebijakan manajemen risiko; dan / risk management policy; and Kepatuhan perusahaan terhadap UU, Anggaran Dasar, perjanjian dan komitmen. / Company compliance with laws, articles of association, agreements and commitments. 	Telah Terealisasi / Realized												
11	Memperhatikan saran dan pendapat Dewan Komisaris sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat Nomor 07/CF/KOM/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 (Mengenai RJPP) dan Nomor 05/CF/KOM/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 (mengenai RKAP). / Taking into account the suggestions and opinions of the Board of Commissioners as stated in letters No. 07/CF/KOM/II/2021 dated January 18, 2021 (regarding RJPP) and No. 05/CF/KOM/II/2021 dated January 18, 2021 (regarding RKAP).	<p>Efisiensi di segala bidang: / Efficiency in all areas: Telah dilakukan himbauan untuk melakukan efisiensi dengan nomor surat 1/KF.101/III/ DU/KA/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Arahan Efisiensi RKAP 2021 yang memberikan arahan untuk melakukan: / An appeal was made for efficiency with letter No. 1/KF.101/III/ DU/KA/2021 dated March 18, 2021 regarding the 2021 RKAP Efficiency Directive which provided directions for carrying out:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan inovasi model bisnis sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien; / Innovating business models as an effort to increase revenue and more efficient budget management; Mengutamakan prinsip efisiensi dalam melakukan aktivitas operasional; / Prioritizing the principle of efficiency in conducting operational activities; Membatasi penggunaan jasa konsultan untuk aktivitas perusahaan yang strategis; / Limiting the use of consulting services for strategic company activities; Mengoptimalkan penggunaan ruangan kantor sebagai fasilitas rapat internal dan pembinaan; / Optimizing the use of office space as an internal meeting and coaching facility; Mengendalikan biaya perjalanan dinas dan mengutamakan penggunaan fasilitas rapat secara teleconference; / Controlling business travel costs and prioritizing the use of meeting facilities by teleconference; Mengendalikan penggunaan biaya umum dan biaya pendukung masing-masing unit. / Controlling the use of general costs and support costs of each unit. <p>Dalam surat tersebut juga pemegang anggaran diwajibkan melakukan monitoring atas pengelolaan anggaran yang efisien sehingga dapat menekan biaya dan mengoptimalkan pencapaian pendapatan. / In the letter, budget holders were also required to monitor efficient budget management so that they could reduce costs and optimize revenue achievement.</p> <p>Saran dan pendapat Dewan Komisaris telah diperhatikan dan ditindaklanjuti, termasuk dalam hal penyusunan RKAP (telah dilaksanakan oleh Unit KC/Direktorat Keuangan (D8), termasuk RKAP tahun 2021), sosialisasi visi dan misi perusahaan misalnya melalui kegiatan webinar melalui zoom meeting bersama seluruh pegawai PT KAI pada tanggal 15 April 2021 melalui undangan Nomor : 2/KE.202/IV/MT/KA/2021 tgl 12 April 2021 dan upload video sosialisasi di E-learning web e-office dengan Nota Dinas Nomor : 1/KP.102/V/UPC/ KA/2021 tanggal 19 Mei 2021, program efisiensi telah dilaksanakan yang antara lain telah tercermin dalam laporan keuangan perusahaan tahun berjalan 2021 dari KC/D8, proses transformasi digital telah dimulai untuk dilaksanakan oleh KI/D8, upaya efektivitas pengorganisasian sumberdaya manusia telah ditingkatkan melalui proses evaluasi struktur organisasi perusahaan yang sedang dilaksanakan oleh D6 sejalan dengan dinamika dan kondisi bisnis saat ini, serta evaluasi atas RJPP melalui update secara berkelanjutan kepada Direksi. / The suggestions and opinions of the Board of Commissioners were considered and followed up, including in terms of preparing the RKAP (was carried out by the KC Unit/Directorate of Finance (D8), including the 2021 RKAP), socializing the company's vision and mission, for example through webinar activities through zoom meetings with all employees of PT KAI on April 15, 2021 by invitation No. 2/KE.202/IV/MT/KA/2021 on April 12, 2021 and uploading a socialization video on the E-learning web e-office with an Official Memorandum No. 1/KP.102/V/UPC/KA/2021 dated May 19, 2021, an efficiency program has been implemented which, among others, has been reflected in the company's current year 2021 financial report from KC/D8, the digital transformation process has begun to be implemented by KI/D8, efforts to effectively organize human resources have been improved through the evaluation process of the company's organizational structure being implemented by D6 in line with current business dynamics and conditions, as well as evaluation of the RJPP through continuous updates to the Board of Directors.</p>	Telah Terealisasi / Realized												

No.	Arahan / Directives	Tindaklanjut / Follow-Up	Keterangan / Description
12	Menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya akhir Februari 2021. / Submitting the Company's Annual Report including the Financial Statements for the 2020 Fiscal Year which has been audited by the Public Accounting Firm no later than the end of February 2021.	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan telah disampaikan kepada Kementerian pada tanggal 25 Maret 2021 melalui portal Sistem Laporan Berkala (Silaba), dan telah dikirimkan melalui email pada tanggal 30 Maret 2021. / The Annual Report and Financial Statements have been submitted to the Ministry on March 25, 2021 through the Periodic Report System (Silaba) portal, and have been sent via email on March 30, 2021.	Telah Terealisasi / Realized
13	Menyampaikan laporan secara tepat waktu melalui portal Kementerian BUMN dan senantiasa memperbaharui data/ informasi portal tersebut yang terdiri dari portal Sistem Laporan Berkala (http://silaba.bumn.go.id), Portal Aset (http://aset.bumn.go.id), Portal SDM (http://sdm.bumn.go.id), Portal PKBL (http://pkbl.bumn.go.id) dan Portal Publik (www.bumn.go.id) serta melaporkannya kepada unit pengelola portal. / Submitting reports in a timely manner through the Ministry of SOEs portal and constantly update the data/ information on the portal which consists of the Periodic Report System portal (http://silaba.bumn.go.id), Asset Portal (http://aset.bumn.go.id), HC Portal (http://sdm.bumn.go.id), PKBL Portal (http://pkbl.bumn.go.id) and Public Portal (www.bumn.go.id) and report it to the portal management unit.	<p>CDD of Information System telah mengkoordinasikan pengisian dan pemutakhiran data/ informasi pada portal Kementerian BUMN kepada Pejabat penanggung jawab masing-masing Portal Kementerian BUMN sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor: PER.U/ KK.301/III/1/KA-2019 tanggal 12 Maret 2019 perihal Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi. Data dukung terlampir, sebagai berikut: / The CDD of Information System coordinated the filling and updating of data/information on the Ministry of SOE portal to the Heads of Office in charge of each Ministry of SOE Portal in accordance with the Board of Directors Regulation No. PER.U/ KK.301/III/1/KA-2019 dated March 12, 2019 regarding the Management of Communication and Information Media. The supporting data are attached, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> RDS Penyampaian Pengisian dan Pemutakhiran Portal Kementerian BUMN Nomor: 1/KL.218/III/KI/KA/2021 tanggal 08 Maret 2021 perihal Pengisian dan Pemutakhiran Data/Infomasi pada Porta BUMN./ RDS Submission of Filling and Updating the Ministry of SOE Portal No. 1/KL.218/ III/KI/KA/2021 dated March 8, 2021 regarding Filling and Updating Data/Information on SOE Portal. <p>Selanjutnya dilakukan monitoring atas pengisian dan pemutakhiran konten pada Portal Kementerian BUMN dan dituangkan pada Laporan Pembaharuan Konten Portal Kementerian Badan Usaha Milik Negara. / Furthermore, monitoring was carried out on filling and updating content on the Ministry of SOE Portal and it is stated in the Content Update Report for the Ministry of State-Owned Enterprises Portal.</p>	Telah Terealisasi / Realized
14	Berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan TJSL agar: / With regard to the activities of implementing TJSL to: <ul style="list-style-type: none"> Diutamakan yang mendukung kegiatan bisnis perusahaan dan mampu melindungi serta meningkatkan kelangsungan usaha perusahaan, salah satunya denan cara <i>community development</i> pada masyarakat sekitar wikayah usaha perusahaan yang terkena dampak langsung perusahaan. / Give those who support the company's business activities and were able to protect and enhance the company's business continuity, one of which was through community development in the communities around the company's business areas directly affected by the company. Menindaklanjuti dan melaksanakan hasil rekomendasi pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran TJSL dengan Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Nomor RIS-77/ DSI. MBU.B/01/2021. / Follow up and implement the recommendations for discussing the TJSL Work Plan and Budget with the Assistant Deputy for Social and Environmental Responsibility as stated in the Minutes of Meeting No. RIS-77/DSI.MBU.B/01/2021. 	<ul style="list-style-type: none"> Program TJSL Tahun 2021 diutamakan bagi masyarakat yang berada di sekitar Proses Bisnis KAI serta <i>Community Development</i> yang dijalankan yaitu bekerjasama dengan Rail Fans serta komunitas-komunitas lain yang berada di sekitar wilayah dan terkena dampak langsung perusahaan. / The 2021 TJSL program was prioritized for communities around KAI's Business Process and Community Development that is being carried out, namely in collaboration with With regard to the activities of implementing TJSL to: Rail Fans and other communities around the area and directly affected by the company. Program Kerja TJSL Tahun 2021 dijalankan sesuai dengan rekomendasi pembahasan RKA TJSL yang tertuang dari risalah rapat Nomor: RIS-77/DSI.MBU.B/01/2021. Hal ini sejalan dengan program TJSL yang sudah berjalan sampai dengan semester 1 yaitu menjalankan program-program sesuai dengan TBB & SDGs. / The 2021 TJSL Work Program was carried out in accordance with the recommendations for the TJSL RKA discussion as stated in the minutes of the meeting No. RIS-77/DSI.MBU.B/01/2021. This was in line with the TJSL program running until the first half, namely running programs in accordance with TBB & SDGs. 	Telah Terealisasi / Realized
15	Menindaklanjuti arahan Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Surat Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan RKAP Tahun 2021 Nomor S-949/MBU/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020. / Following up on the direction of the Shareholders as stated in the Shareholders' Aspiration Letter for the Preparation of the 2021 RKAP No. S-949/MBU/10/2020 dated October 23, 2020.	KAI telah melakukan telah menyusun matriks dalam penyusunan RKAP untuk kesesuaian APS yang telah dikirimkan kepada Kementerian BUMN. / KAI compiled a matrix in the preparation of the RKAP for the suitability of the APS sent to the Ministry of SOEs.	Telah Terealisasi / Realized
16	Buku RJPP Tahun 2020-2024, Buku RKAP Tahun 2021, Buku dan Risalah Pembahasan RKA-PKBL Tahun 2021, Kontrak Manajemen dan Tanggapan Dewan Komisaris, serta Arahan Pemegang Saham merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risalah RUPS. / The 2020-2024 RJPP Book, 2021 RKAP Book, 2021 RKA-PKBL Discussion Book and Minutes, Management Contracts and Responses from the Board of Commissioners, and Shareholder Directions are an integral part of the minutes of the GMS.	Buku RJPP Tahun 2020-2024, Buku RKAP Tahun 2021, Buku dan Risalah Pembahasan RKA-PKBL Tahun 2021, Kontrak Manajemen dan Tanggapan Dewan Komisaris, serta Arahan Pemegang Saham. / RJPP Book for 2020-2024, RKAP Book for 2021, Book and Minutes of Discussion on RKA-PKBL for 2021, Management Contracts and Responses from the Board of Commissioners, as well as Shareholder Directives.	Telah Terealisasi / Realized

No.	Arahan / Directives	Tindaklanjut / Follow-Up	Keterangan / Description
17	Direksi agar meningkatkan kinerja keuangan sehingga lebih berkesinambungan dengan secara bertahap mempertahankan rasio-rasio hutang pendanaan pada level rasio <i>investment grade</i> . / The Board of Directors to improve financial performance so that it was more sustainable by gradually maintaining debt-funding ratios at the level of investment grade ratios.	Tahun 2021 ini KAI mengajukan permohonan relaksasi atas financial covenant atas pinjaman kepada perbankan sampai dengan Maret 2022 dikarenakan menurunnya kinerja keuangan yang diakibatkan dampak pandemic covid-19. / In 2021, KAI submitted a request for relaxation of the financial covenant on loans to banks until March 2022 due to the decline in financial performance due to the impact of the Covid-19 pandemic.	Telah Terealisasi / Realized
18	Pembinaan terhadap Anak Perusahaan agar menjadi concern sehingga di kemudian hari kinerja lebih baik (tidak merugi) dan dapat berkontribusi baik operasional dan keuangan induk. / Coaching for Subsidiaries to become a concern so that in the future they perform better (no loss) and can contribute to both the operations and finances of the parent.	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan evaluasi kinerja anak perusahaan setiap bulannya; / Monthly performance evaluation of subsidiaries has been carried out; Pengalihan Rail Express dari KAI untuk meningkatkan pangsa pasar dan mengembangkan bisnis KAI Logistik; / Transfer of Rail Express from KAI to increase market share and develop the business of KAI Logistik; Penugasan kepada anak perusahaan terkait pengelolaan call center kepada KAI Wisata dan tenaga alih daya kepada KAI Properti dan KAI Services; / Assignment to subsidiaries related to call center management to KAI Wisata and outsourcing to KAI Properti and KAI Services; SK Penunjukkan langsung kepada anak perusahaan di lingkungan KAI. / Decree of direct appointment to subsidiaries within KAI. 	Telah Terealisasi / Realized
19	Direksi agar mendukung program Holding BUMN Perkeretaapian dalam rangka meningkatkan value proposition dan skala usahanya untuk membangun ekosistem perkeretaapian yang lebih baik. / The Board of Directors to support the SOEs Railway Holding program in order to increase the value proposition and business scale to build a better railway ecosystem.	Direksi KAI telah dan terus mendukung secara aktif program Holding Perkeretaapian melalui inisiatif yang dilakukan oleh Unit PS, D7, dan D8 dengan menginisiasi kajian bersama antara KAI, INKA, dengan didukung oleh Mandiri Sekuritas, serta aktif menghadiri berbagai rapat koordinasi, termasuk rapat dengan DJKN dan Kementerian BUMN tanggal 16 Juli 2021. / The Board of Directors of KAI continued to actively support the Railway Holding program through initiatives carried out by Unit PS, D7, and D8 by initiating joint studies between KAI, INKA, supported by Mandiri Sekuritas, and actively attending various coordination meetings, including meetings with DJKN and Ministry of SOEs on July 16, 2021.	Telah Terealisasi / Realized
20	Direksi agar terus berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan proyek strategis nasional dengan berpegang pada prinsip akuntabel dan kehati-hatian. / The Board of Directors committed to completing the development of national strategic projects by adhering to the principles of accountability and prudence.	Komitmen dan monitoring untuk memastikan pelaksanaan proyek strategis nasional telah dan terus dilaksanakan melalui berbagai inisiatif, koordinasi, serta update progress secara rutin mengenai LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung oleh Kadiv LRT dan Dirut KCIC kepada Direksi KAI. Prinsip akuntabel dan kehati-hatian dalam menjalankan proyek strategis yang diselenggarakan oleh direktorat Pengembangan usaha (D7) dengan terus menerapkan prinsip GCG dibawah Pengawasan GCG unit USQ. Komitmen Direksi KAI dalam melaksanakan proyek strategis telah tercermin dalam RJPP, termasuk dalam buku Penyesuaian RJPP bab 5 halaman 44. / Commitment and monitoring to ensure the implementation of national strategic projects were implemented through various initiatives, coordination, as well as regular progress updates regarding the Jabodebek LRT and Jakarta Bandung Fast Train by the Head of the LRT Division and the Managing Director of KCIC to the KAI Directors. The principle of accountability and prudence in carrying out strategic projects organized by the Directorate of Business Development (D7) by continuing to apply GCG principles under the GCG Supervision of the USQ unit. The commitment of the Board of Directors of KAI in implementing strategic projects has been reflected in the RJPP, including the book Adjusting the RJPP chapter 5 page 44.	Telah Terealisasi / Realized

Pelaksanaan RUPS Tahunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) Tahun Buku 2020

Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2020, pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 19 Mei 2021

Waktu : 10.00 - 11.00 WIB

Tempat : Kementerian BUMN RI - Lantai 8 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) Tahun Buku 2020

Pelaksanaan RUPS Tahunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Tahun buku 2020 dihadiri oleh anggota manajemen Perseroan, dengan perincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Kehadiran / Attendance
1	Said Aqil Siroj	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	Hadir / Present
2	Riza Primadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Hadir / Present
3	Rochadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Hadir / Present
4	Freddy Harris	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present

Implementation of the Annual GMS of Corporate Financial Accountability Report for the 2020 Fiscal Year

The Company's Annual General Meeting of Shareholders for the 2020 Corporate Financial Accountability Report was held on:

Date : Wednesday, May 19, 2021

Time : 10.00 - 11.00 WIB

Place : Ministry of SOEs of SOEs - 8th Floor Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Central Jakarta

Recapitulation of Attendance at the Annual General Meeting of Shareholders of Corporate Financial Accountability Report for the 2020 Fiscal Year

The implementation of the Annual GMS of the Company's Financial Responsibility Report for the 2020 fiscal year was attended by members of the Company's management, with the following details:

Recapitulation of Attendance at the Annual GMS

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Kehadiran / Attendance
5	Cris Kuntadi	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
6	Pungky Sumadi	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
7	Diah Natalisa	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
8	Chairul Anwar	Komisaris / Commissioner	Hadir / Present
9	Didiek Hartantyo	Direktur Utama / President Director	Hadir / Present
10	Salura Wijaya	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Managing Director of Finance and Risk Management	Hadir / Present
11	Dadan Rudiansyah	Direktur Niaga / Managing Director of Commerce	Hadir / Present
12	Heru Kuswanto	Direktur Operasi / Managing Director of Operations	Hadir / Present
13	Awan Hermawan Purwadinata	Direktur Pengelolaan Prasarana / Managing Director of Infrastructure Management	Hadir / Present
14	Eko Purwanto	Direktur Pengelolaan Sarana / Managing Director of Rolling Stock	Hadir / Present
15	John Robertho	Direktur Keselamatan dan Keamanan / Managing Director of Safety and Security	Hadir / Present
16	Agung Yunanto	Direktur SDM dan Umum / Managing Director of Human Capital and General Affairs	Hadir / Present
17	Jeffrie N Korompis	Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha / Managing Director of Strategic Planning and Business Development	Hadir / Present

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) Tahun Buku 2020

Keputusan dan realisasi dari masing-masing keputusan yang diambil melalui RUPS Tahunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2020 adalah sebagai berikut:

Resolutions and Realization of the Annual General Meeting of Shareholders of Corporate Financial Accountability Report for the 2020 Fiscal Year

The Resolutions and realization of each Resolution taken through the Annual GMS of the Company's Financial Responsibility Report for the 2020 Fiscal Year are as follows:

Agenda Pertama / First Agenda
Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020. / Ratification of the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for the 2020 Fiscal Year and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2020 Fiscal Year.

Keputusan

- Mengesahkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00128/2.1030/AU.1/06/0181-3/III/2021 tanggal 05-03-2021 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Resolution

- Ratified the 2020 Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the 2020 Financial Year audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan as stated in its report No. 00128/2.1030/ AU.1/06/0181-3/III/2021 dated 03-05-2021 with the opinion "fair in all materials", as well as giving full discharge and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners The Company for the management and supervision actions carried out in the Financial Year ending on 12-31-2020 as long as these actions were not criminal acts and were reflected in the Company's report books.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Tidak ada penetapan penggunaan laba karena Perseroan mengalami kerugian.</p> | <p>2. No determination of the use of profit because the Company suffered a loss.</p> |
|--|--|

Agenda Kedua / Second Agenda

Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020. / Ratification of the Annual Report of the Company's Partnership and Community Development Program for the 2020 Fiscal Year.

Keputusan

Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2020 termasuk mengesahkan Laporan Keuangan PKBL Tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00100/2.1030/AU.2/12/0181-3/ II/2021 tanggal 05-03-2021 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

Resolution

Ratified the PKBL Annual Report for Fiscal Year 2020 including ratifying the 2020 PKBL Financial Report audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan as stated in his report No. 00100/2.1030/AU.2/12/0181- 3/II/2021 dated 03-05-2021 with the opinion "fair in all materials", as well as giving full discharge and release of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the PKBL for the 2020 Fiscal Year, as long as the act was not a criminal act and reflected in the report.

Agenda Ketiga / Third Agenda

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2020, Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2021. / Determination of Tantiem for the 2020 Fiscal Year, Salary for the Board of Directors and Honorarium for the Board of Commissioners along with Facilities and Other Allowances for 2021.

Keputusan

Penetapan Tantiem, Gaji untuk Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun Buku 2021, akan ditetapkan secara tersendiri.

Resolution

Determination of Tantiem, Salary for the Board of Directors and Honorarium for the Board of Commissioners along with other facilities and allowances for the 2021 Fiscal Year, will be determined separately.

Agenda Keempat / Fourth Agenda

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan serta Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun Buku 2021. / Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements as well as Implementation of the Micro and Small Enterprises Funding (UMK) Program for the 2021 Fiscal Year.

Keputusan

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan serta Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
- Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

Resolution

- Appointed Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan to conduct a general audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2021 Financial Year and Financial Statements as well as the Implementation of the Company's Micro and Small Business Funding Program (UMK) for the 2021 Financial Year.
- Delegated authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of compensation for audit services, additional scope of work required and other requirements reasonable for the KAP.

Arahan RUPS
GMS Directives

No.	Arahan / Directives	Tindak Lanjut / Follow-Up	Keterangan / Description
1	Dewan Komisaris diminta untuk memastikan dan mengawasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan <i>risk management process</i> . Perseroan menjalankan bisnis yang volatile sehingga proses bisnis baik operasional maupun investasi yang dilakukan Direksi harus mengedepankan hal-hal tersebut dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku. / The Board of Commissioners is asked to ensure and supervise Good Corporate Governance (GCG) and the risk management process. The Company runs a volatile business so that the business processes, both operational and investment carried out by the Board of Directors, must prioritize these matters by referring to the applicable rules and regulations.	<p>Kegiatan pengawasan terhadap pengukuran penerapan GCG telah dilakukan oleh Komite Audit setiap 1 bulan sekali. Unit US melaporkan matrix progres TL rekomendasi asesmen GCG kepada Komite Audit dan kemudian melakukan rapat koordinasi bersama untuk memonitoring, membahas dan memberikan arahan terkait progres Tindak Lanjut Rekomendasi Asesmen GCG. / Supervision activities on the measurement of GCG implementation were carried out by the Audit Committee once a month. The US Unit reports the TL progress matrix of the GCG assessment recommendations to the Audit Committee and then conducted a joint coordination meeting to monitor, discuss and provide direction regarding the progress of the Follow-up to the GCG Assessment Recommendations.</p> <ol style="list-style-type: none"> Saat ini telah dilakukan koordinasi secara berkala dengan Dewan Komisaris terutama yang membidangi manajemen risiko dan Komite Pemantau Risiko (KPMR). / Currently, regular coordination was carried out with the Board of Commissioners, especially those in charge of risk management and the Risk Monitoring Committee (KPMR). Selalu dilakukan pembahasa-pembahasan terkait pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan. / There were always discussions related to the implementation of risk management in the Company. 	Telah Terealisasi / Realized
2	Dalam rangka mendorong perekonomian Nasional khususnya pemberdayaan UMKM, Direksi diminta agar secara aktif mengoptimalkan pelibatan UMKM dalam transaksi pengadaan barang dan jasa BUMN termasuk anak perusahaan atau yang terafiliasi, terutama melalui platform PaDi UMKM sebagaimana surat Menteri BUMN Nomor S-1134/MBU/12/2020 tanggal 10 Desember 2020. / In order to encourage the national economy, especially the empowerment of MSMEs, the Board of Directors is asked to actively optimize the involvement of MSMEs in the procurement of goods and services for SOEs including subsidiaries or affiliated companies, especially through the MSME PaDi platform as stated in the SOE Minister's letter No. S-1134/MBU/12/2020 December 10, 2020.	<p>Telah dilakukan transaksi pengadaan barang dan jasa KAI bersama UMKM dalam platform PaDi UMKM setiap bulannya termasuk disampaikan rencana belanja triwulanan, untuk Anak Perusahaan telah dilakukan sosialisasi terkait platform PaDi UMKM. / Transactions for the procurement of goods and services by KAI and MSMEs were carried out on the PaDi MSME platform every month including the submission of a quarterly shopping plan. For Subsidiaries, socialization was carried out regarding the PaDi MSME platform.</p>	Telah Terealisasi / Realized
3	Direksi agar mengupayakan efisiensi biaya secara massif terutama komponen biaya tetap untuk memperbaiki rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) / The Board of Directors to strive for massive cost efficiency, especially the fixed cost component to improve the ratio of operating costs to operating income (BOPO)	<ol style="list-style-type: none"> Biaya pegawai secara YoY mengalami peningkatan sebesar 2,4% dari Rp5.763 miliar menjadi Rp5.900 miliar, namun jika dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp6.099 miliar perusahaan berhasil melakukan efisiensi sebesar 3,3%. Hal ini terutama dipengaruhi oleh penundaan rekrutmen pegawai pada tahun 2021 mengingat kondisi Pandemi Covid-19 yang sempat meningkat pada awal TW2-2021 dan efisiensi atas tunjangan pegawai terutama berkaitan dengan tunjangan yang berkaitan dengan operasional KA. / YoY employee costs increased by 2.4% from Rp5,763 billion to Rp5,900 billion, but when compared to the budget of Rp6,099 billion, the company managed to achieve efficiency of 3.3%. This was mainly influenced by the postponement of employee recruitment in 2021 given the conditions of the Covid-19 Pandemic which had increased at the beginning of Q2-2021 and the efficiency of employee benefits, especially related to allowances related to railway operations. Beban perawatan sarana sebesar terealisasi sebesar Rp2.041 miliar atau turun sebesar 16,9% dibanding realisasi tahun 2020 sebesar Rp2.455 miliar dan efisiensi sebesar 13% dari anggaran sebesar Rp2.347 miliar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh reschedule program perawatan yang disesuaikan dengan frekuensi perjalanan yang terdampak pandemic, namun dengan tetap memperhatikan keselamatan dan pelayanan untuk KA-ka yang dioperasionalkan. / The realized facility maintenance expense was Rp2,041 billion, a decrease of 16.9% compared to the realization in 2020 of Rp2,455 billion and an efficiency of 13% of the budget of Rp2,347 billion. This is mainly influenced by the rescheduling of the maintenance program which is adjusted to the frequency of trips affected by the pandemic, but by still paying attention to safety and services for operational trains. Beban perawatan prasarana perkeretaapian terealisasi sebesar Rp1.046 miliar atau meningkat sebesar 6,2% dari realisasi 2020 sebesar Rp985 miliar, namun jika dibandingkan dengan anggaran efisiensi sebesar 12% dari program sebesar Rp1.187 miliar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh reschedule program perawatan namun dengan tetap memperhatikan keselamatan dan pelayanan untuk KA-ka yang dioperasionalkan. / The railway infrastructure maintenance expense was realized at Rp1,046 billion, an increase of 6.2% from the 2020 realization of Rp985 billion, but compared to the 12% efficiency budget of the program of Rp1,187 billion. This was mainly influenced by the rescheduling of the maintenance program but by still paying attention to safety and services for the operational trains. 	Telah Terealisasi / Realized
4	Proyek penugasan Pemerintah agar dilaksanakan secara prudent dan melakukan mitigasi risiko secara berkala termasuk melakukan stress testing agar diketahui bentuk dukungan yang dibutuhkan dari Pemerintah. / Government-assigned projects to carry out prudently and risk mitigation on a regular basis including conducting stress testing to determine the form of support needed from the Government.	<p>KAI mendapatkan penugasan Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 50 Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Lintas Cibatu-Garut. Mitigasi risiko diupayakan untuk dilakukan secara berkala dari awal proyek hingga saat ini fisik proyek dan semua perijinan kewilayahan sudah 100% dilaksanakan. KAI sudah melakukan penyusunan FS melalui Yayasan LAPI ITB yang telah juga memetakan Kajian Risikonya. Saat ini, KAI sedang mengurus perjanjian konsesi penyelenggaraan prasarana di DJKA dan akan dilanjutkan dengan izin pembangunan, uji pertama dan izin operasi prasarana sehingga diharapkan prasarana KA Cibatu-Garut bisa digunakan untuk angkutan KA. Selain itu, KAI melalui unit KR sedang dalam pembahasan dengan DJKA terkait dukungan pemerintah dalam bentuk PSO untuk operasional angkutan KA ke Garut. / KAI received an assignment from the Government through the Decree of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. KM 50 of 2020 dated February 17, 2020 concerning Assignment to PT Kereta Api Indonesia (Persero) for the Implementation of Cibatu-Garut Public Railway Infrastructure. Risk mitigation was attempted to be carried out periodically from the beginning of the project until now, the physical project and all regional permits were 100% implemented. KAI prepared the FS through the LAPI ITB Foundation which had also mapped out its risk assessment. Currently, KAI was working on a concession agreement for the administration of infrastructure at DJKA and will proceed with a construction permit, first test and infrastructure operation permit so that it is hoped that the Cibatu-Garut railway infrastructure can be used for rail transportation. In addition, KAI through the KR unit is in discussion with DJKA regarding government support in the form of PSO for rail transportation operations to Garut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan update kajian risiko tentang risiko strategis: Proyek KCJB, Rencana Pembentukan MITJ, Proyek LRT Jabodetabek. / Carry out risk assessment updates on strategic risks: KCJB Project, MITJ Formation Plan, Jabodetabek LRT Project. Melakukan koordinasi dengan Risk Taking Unit (RTU) untuk pemantauan tindak lanjut mitigasi risiko. / Coordinate with the Risk Taking Unit (RTU) for monitoring the follow-up of risk mitigation. 	Telah Terealisasi / Realized

Informasi Penunjukkan Pihak Independen di dalam Mekanisme Pemungutan Suara RUPS

Masing-masing keputusan baik di dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan Pengesahan RKAP Tahun 2022 maupun RUPS Tahunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2021 ditentukan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Oleh sebab itu, tidak terdapat informasi mengenai keterlibatan pihak independen di dalam mekanisme pemungutan suara RUPS.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan Pengesahan RKAP Tahun 2022 dan RUPS Tahunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2021 dihadiri oleh pihak eksternal independen, yang terdiri dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, mawar, dan Rekan.

Information on Appointment of Independent Parties in the GMS Voting Mechanism

Each Resolution, both in the the Annual General Meeting of Shareholders for the Approval of the 2022 RKAP and the Annual General Meeting of Shareholders of Corporate Financial Accountability Report for the 2021 Fiscal Year was determined through a consensus deliberation. Therefore, there is no information regarding the involvement of independent parties in the GMS voting mechanism.

The holding of the Annual General Meeting of Shareholders for the Ratification of the 2022 RKAP and the Annual General Meeting of Shareholders of Corporate Financial Accountability Report for the 2021 Fiscal Year was attended by independent external parties, consisting of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., and Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan.

DIREKSI

Board of Directors

Direksi merupakan organ di dalam struktur tata kelola yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan Perseroan. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab melalui wewenang yang digunakan semata-mata demi kepentingan Perseroan, sesuai maksud dan tujuan Perseroan. Direksi sekaligus merupakan pihak yang mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar forum pengadilan.

The Board of Directors is an organ within the governance structure that has the duties and responsibilities to carry out the management of the Company. The Board of Directors carries out their duties and responsibilities through the authority used solely for the benefit of the Company, according to the purposes and objectives of the Company. The Board of Directors is also a representative of the Company, both inside and outside the court.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi [POJK E.1]

Mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab dengan perincian sebagai berikut:

Tugas Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors [POJK E.1]

Referring to laws and regulations and the Company's Articles of Association, the Board of Directors has duties and responsibilities with the following details:

Duties of the Board of Directors

1. The Board of Directors is in charge of carrying out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company and representing the Company both inside and outside the court on all matters and all events with restrictions as stipulated in laws and regulations, articles of association and / or GMS Resolution.

2. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta memastikan agar Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perseroan.
4. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Anak Perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perseroan dan Anak Perusahaan/perusahaan patungan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan.
5. Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perseroan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
2. Sifat dari tanggung jawab tersebut adalah tanggung renteng hingga harta pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan.
3. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
4. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
5. Tanggung jawab berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

2. The Board of Directors must carry out their duties in good faith for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company, and ensure that the Company carries out its social responsibilities and takes into account the interests of various stakeholders in accordance with statutory provisions.
3. A member of the Board of Directors is appointed by the Board of Directors Meeting as the party in charge of implementing and monitoring GCG in the Company.
4. The Board of Directors must submit information regarding identity, main duties, positions of the Board of Commissioners in Subsidiaries/joint ventures and/or other companies, including meetings held within one fiscal year (internal meetings and joint meetings with the Board of Commissioners), as well as salaries, facilities, and/or other allowances received from the Company and its Subsidiaries/joint ventures, to be included in the Company's Annual Report.
5. The Board of Directors must report to the Company regarding their share ownership and/or their families (spouse and their children) in the Company and other companies, including any changes thereto.

Responsibilities of the Board of Directors

1. The Board of Directors is a Company organ that is fully responsible for managing the Company for the interests and objectives of the Company and represents the Company both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.
2. This responsibility is a joint responsibility to personal property if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his/her duties for the benefit of the Company.
3. The Board of Directors is not authorized to submit bankruptcy requests on behalf of the Company to the commercial court before obtaining approval from the General Meeting of Shareholders, without prejudice to the provisions stipulated in the Law on Bankruptcy and the Suspension of Debt Payment Obligations.
4. In the event of bankruptcy due to an error or negligence of the Board of Directors and insolvency is not sufficient to pay all the liabilities of the Company in the bankruptcy, each member of the Board of Directors is jointly and severally liable for all liabilities that are not repaid from the bankruptcy.
5. Responsibilities also apply to members of the Board of Directors for error or negligence while serving as members of the Board of Directors for a term of 5 (five) years before the Resolution to declare bankruptcy was pronounced.

6. Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
7. Ketentuan berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Pembidangan Tugas Direksi

Guna meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, Perseroan menerapkan pembidangan tugas bagi masing-masing fungsi Direktur. Pembidangan tugas Direksi secara umum diatur dalam *Board Manual* dan secara berkala disesuaikan dengan perkembangan kondisi Perseroan dan pengembangan struktur organisasi sesuai arah kebijakan Perseroan.

Secara spesifik, pembidangan tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi Direktur diatur melalui Peraturan Direksi KAI Nomor: PER.U/KO.104/VIII/12/ KA-2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan Peraturan Direksi KAI No: PER.U/KO.104/XI/1/KA-2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi No. PER.U/KO.104/VIII/12/ KA-2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Direksi Organisasi dan Tata Laksana masing-masing direktorat. Uraian mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Direktur Utama

Direktur Utama menjalankan kegiatan kepengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Direktur Utama berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.
2. Menandatangani surat atas nama Direksi kepada RUPS, Dewan Komisaris dan/atau pihak lain.
3. Menandatangani Peraturan Direksi, Keputusan Direksi, Instruksi Direksi, Surat Edaran Direksi, dan/atau Maklumat Direksi untuk dan atas nama Direksi, terhadap hal yang menyangkut hubungan kerja lintas Direktorat.

Division of Duties of the Board of Directors

To further optimize the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, the Company assigns specific duties for each function of the Board of Directors. The general division of duties for the Board of Directors is regulated in the Board Manual and is periodically adjusted to developments in the Company's conditions and the development of the organizational structure in accordance with the Company's policy directions.

The division of duties and responsibilities for each function of the Director is specifically regulated through the KAI Board of Directors Regulation No PER.U/KO.104/VIII/12/KA-2019 dated August 22, 2019 and KAI Board of Directors Regulation No PER.U/KO.104/XI/1/KA-2021 on Amendment to Board of Directors Regulation No PER.U/KO.104/VIII/12/KA-2019 dated August 22, 2019 later derived as Board of Directors Regulation on Organization and Procedure with details as follows:

President Director

The President Director carries out the Company's management activities in accordance with the aims and objectives of the Company, and represents the Company both inside and outside the court. In carrying out its main duties and responsibilities, the President Director is authorized to:

1. Establish Company management policies;
2. Sign on behalf of the Board of Directors to the GMS, the Board of Commissioners and/or other parties.
3. Sign the Board of Directors Regulations, Decrees, Instructions, Circular, and/or Notices for and on behalf of the Board of Directors, related to cross-directorate work relations matters;

4. Menandatangani nota kesepahaman/nota kesepakatan/*Memorandum of Understanding* (MoU) antara Perseroan dengan pihak lain dengan lingkup menyangkut tugas dan wewenang beberapa anggota Direksi.
5. Menandatangani perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain, dengan lingkup perjanjiannya menyangkut tugas dan wewenang beberapa anggota Direksi.
6. Memimpin Rapat Direksi.
7. Mewakili Direksi sebagai pemegang saham pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
8. Melaksanakan diskresi yang menyangkut tugas dan wewenang beberapa anggota Direksi.
9. Menandatangani segala bentuk dokumen dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain sepanjang untuk keperluan pengurusan Perseroan.

Direktur Niaga

Direktur Niaga bertanggung jawab atas:

1. Penetapan kebijakan terkait fungsi perusahaan jasa angkutan penumpang dan barang yang terdiri dari *marketing planning, marketing research, marketing communication, product development, sales for corporate/retail customer, customer relationship management (customer care customer retention, call center)*, dan pengendalian kinerja pelayanan.
2. Komersialisasi aset produksi dan non-produksi di wilayah Jawa dan Sumatera.
3. Komersialisasi aset berupa benda dan bangunan cagar budaya peninggalan sejarah perkeretaapian Indonesia.
4. Melakukan pembinaan terhadap para *Corporate Deputy Director* dan *Vice President* di bawahnya.

Direktur Operasi

Direktur Operasi bertanggung jawab atas:

1. Penetapan program/kebijakan operasi lalu lintas perjalanan kereta api meliputi: perencanaan perjalanan kereta api dan perencanaan operasi sarana kereta api.
2. Penetapan program/kebijakan operasi sarana kereta api meliputi: pengendalian perjalanan kereta api, pengendalian operasi sarana kereta api, dan evaluasi kinerjanya serta evaluasi kinerja perjalanan kereta api.
3. Penetapan program/kebijakan pembinaan dan pengendalian petugas operasi prasarana kereta api meliputi: perencanaan dan evaluasi petugas operasi prasarana stasiun kereta api serta pembinaan dan pengendalian petugas operasi prasarana stasiun kereta api.
4. Penetapan program/kebijakan awak kereta api meliputi perencanaan awak kereta api, pengendalian dan evaluasi awak kereta api.

4. Sign Memorandum of Understanding (MoU) between the Company and other parties with a scope on the duties and authority of several members of the Board of Directors;
5. Sign agreements between the Company and other parties, with the scope of the agreement concerning the duties and authorities of several members of the Board of Directors;
6. Lead a Board of Directors Meeting;
7. Represent the Board of Directors as shareholders in a subsidiary and/or joint venture;
8. Carry out discretions regarding the duties and authorities of several members of the Board of Directors;
9. Sign all forms of documents and/or take other actions as long as the management needs of the Company.

Managing Director of Commerce

The Managing Director of Commerce is responsible for:

1. Issuance of policies related to the utilization of passengers and freight transportation services function consist of marketing planning, marketing research, marketing communications, product development, sales for the corporate/retail customer, customer relationship management (customer care customer retention, call center), and performance service control;
2. Commercialization of production and non-production assets in the Java and Sumatera regions;
3. Commercialization of assets as objects and cultural heritage buildings of Indonesian railways; and
4. Coordination with the Corporate Deputy Directors and Vice Presidents below.

Managing Director of Operations

The Managing Director of Operations is responsible for:

1. Establishment of programs/policies for train traffic operations including: planning of train travel and planning of operation of railroad facilities;
2. Establishment of the program/operational policy for rolling stock including: train trip control, railroad facilities operational control, and evaluating its train trip performance.
3. Establishment of train infrastructure operations officer programs/policies coordination including: planning and evaluating train station infrastructure operations officers and developing and controlling train station infrastructure operations officers;
4. Establishment of train crew program/policy related to their plans, control, and evaluation;

5. Perumusan dan penyusunan program/kebijakan pembinaan dan konseling petugas operasi prasarana stasiun kereta api dan awak kereta api.
6. Pengendalian operasi kereta api secara terpusat dan terpadu di seluruh lintas Sumatera Selatan.
7. Mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengkonsolidasikan unit organisasi di bawahnya.

Direktur Pengelolaan Prasarana

Direktur Pengelolaan Prasarana mempunyai tugas menetapkan kebijakan terkait pengelolaan teknik prasarana secara terpusat. Direktur Pengelolaan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

1. Penetapan program/kebijakan pengelolaan teknik prasarana secara terpusat.
2. Penetapan program/kebijakan fungsi penjagaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap aset produksi berupa prasarana kereta api.
3. Pemenuhan persyaratan teknis pengembangan dan penyusunan desain/spesifikasi teknis prasarana dan koordinasi teknis di bidang pengembangan yang relevan dengan pihak luar.
4. Pengendalian terhadap serah terima proyek pemerintah dan investasi bidang prasarana.

Direktur Pengelolaan Sarana

Direktur Pengelolaan Sarana mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan pengelolaan teknik sarana perkeretaapian secara terpusat yang mencakup penyelenggaraan fungsi pembangunan dan perawatan sarana perkeretaapian.
2. Menyelenggarakan rekayasa teknik sarana perkeretaapian.
3. Menyelenggarakan penjagaan aset produksi meliputi pendataan, pencatatan, dan validasi data aset produksi pendukung perawatan sarana perkeretaapian.
4. Menyelenggarakan serah terima proyek pemerintah dan investasi bidang sarana perkeretaapian.
5. Mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengkonsolidasikan satuan organisasi di bawahnya termasuk Unit Pelaksana Teknis Balai Yasa Sarana.

Direktur Keselamatan dan Keamanan

Direktur Keselamatan dan Keamanan mempunyai tugas:

1. Membuat kebijakan dan perencanaan strategis terkait sistem manajemen keselamatan.
2. Membuat kebijakan dan perencanaan strategis terkait pengamanan dan penertiban di atas kereta api, di lingkungan stasiun, dan objek vital Perseroan.

5. Formulation and preparation of programs/policies for the train station infrastructure operations officers and train crews training and counseling;
6. Centralized and integrated control of railroad operations through the entire South Sumatera crossing; and
7. Coordination, integration, and consolidation of organizational units under their scope.

Managing Director of Infrastructure

The Managing Director of Infrastructure is in charge of establishing policies related to the centralized management of infrastructure techniques. The Managing Director of Infrastructure carries out functions as follows:

1. Establishment of program/policy in managing technical infrastructure in the most orderly manner;
2. Establishment of programs/policies on the functions of security, controlling, and evaluating production assets as railroad infrastructure;
3. Fulfill the technical requirements for the design/technical specifications of infrastructure and technical coordination development and preparation relevant to third parties; and
4. Control over the handover of government's infrastructure projects and investment.

Managing Director of Rolling Stock

The Managing Director of Rolling Stock has the following duties:

1. Carrying out technical management of railway infrastructure centrally which includes the implementation of the construction and maintenance of rolling stock functions;
2. Implementing technical modification of railroad facility infrastructure;
3. Maintaining the assets of production including the data collection, recording, and validation of the maintenance of railways facility supporting assets production;
4. Held the handover of government rolling stock projects and investment; and.
5. Coordinating, integrating, and consolidating the organizational units under it including the Technical Implementation Unit for Balai Yasa Sarana.

Managing Director of Safety and Security

The Managing Director of Safety and Security has the following duties:

1. Preparing policies and strategic planning related to safety management systems;
2. Preparing policies and strategic planning related to security and control on the train, in the station environment, and in vital objects of the Company;

3. Membuat kebijakan dan perencanaan strategis terkait Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L).
4. Membuat kebijakan dan perencanaan strategis terkait perumusan dan penyusunan standarisasi keselamatan dan keamanan yang meliputi standar mutu keselamatan dan keamanan, operasi keselamatan dan keamanan, evaluasi dan inspeksi implementasi operasi keselamatan dan keamanan.
5. Mengendalikan dan mengevaluasi keselamatan, pengamanan dan penertiban di atas kereta api, di lingkungan stasiun, dan objek vital Perseroan, dan K3L secara berkelanjutan.
6. Membuat kebijakan dan perencanaan strategis terkait penjagaan, penertiban, pensertifikatan aset non-railway.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

Direktur SDM dan Umum mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab menyusun strategi/kebijakan serta pembinaan dan pengendalian di bidang:

1. Pengembangan Operasi.
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia secara terintegrasi.
3. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan sertifikasi/pengujian SDM.
4. Pengelolaan layanan kesehatan.
5. Pembinaan pengelolaan kegiatan kerumahtanggaan dan umum.

Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha

Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas:

1. Merencanakan dan mengembangkan bisnis sesuai strategi Perseroan secara terpusat meliputi perencanaan investasi, pengembangan dan pemantauan proyek-proyek termasuk proyek perkeretaapian dan non-perkeretaapian.
2. Merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan investasi strategis proyek-proyek baru dan proyek nasional perkeretaapian termasuk proyek Instruksi dari Kementerian.
3. Memantau kinerja proyek-proyek baru dan proyek-proyek strategis nasional perkeretaapian termasuk proyek Instruksi dari Kementerian.
4. Menyelenggarakan perumusan dan penyusunan program perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, pengendalian, evaluasi pengadaan serta pemantauan terhadap pengelolaan sediaan dan pergudangan.

3. Preparing policies and strategic planning related to Occupational Health, Safety, and Environment (HSE);
4. Preparing policies and strategic planning related to the formulation and compilation of safety and security standards that include safety and security quality standards, safety and security operations, evaluation and inspection of the implementation of safety and security operations;
5. Controlling and evaluating safety, security, and control on the train, in the station environment, and vital objects of the Company, and HSE on an ongoing basis; and
6. Preparing policies and strategic planning related to safeguarding, controlling, and non-railway assets certification.

Managing Director of Human Capital and General Affairs

The Managing Director of Human Capital and General Affairs has the main duties and responsibilities of formulating strategies/policies as well as guidance and control in the areas of:

1. Operational Development
2. Integrated Human Capital Management
3. Management of training and education, and also held HC certification/assessment
4. Management of health services
5. Guidance for managing household and general affairs.

Managing Director of Strategic Planning and Business Development

The Managing Director of Strategic Planning and Business Development has the following duties:

1. Planning and developing business according to the centralized Company's strategy within the investment planning, development and monitoring of projects including railways and non-railways projects.
2. Planning, controlling and evaluating the strategic investment activities of new projects and national railway projects including the Instruction project from the Ministry;
3. Monitoring the performance of new projects and national strategic railway projects including the Instruction project from the Ministry;
4. Organizing the formulation and preparation of procurement planning programs, procurement implementation, control, evaluation of procurement and monitoring of inventory and warehousing management;

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Membuat kebijakan dan perencanaan terkait pengelolaan administrasi dokumen-dokumen aset baik dokumen kepemilikan aset maupun permasalahan hukum. 6. Membuat kebijakan dan perencanaan strategis penataan ruang kawasan dan desain arsitektur bangunan stasiun dan non stasiun. 7. Membuat kebijakan dan perencanaan strategis terkait pelestarian, pengembangan, perbaikan, pemeliharaan, pemugaran serta penataan bangunan cagar budaya dan non-cagar budaya. 8. Menyusun perencanaan strategis terkait bisnis pemanfaatan tata ruang yang bersinergi dengan jaringan angkutan kereta api. | <ol style="list-style-type: none"> 5. Preparing policies and plans related to the administrative management of asset documents, both assets ownership documents and legal matters; 6. Preparing policies and strategic planning of regional spatial planning and architectural design of station and non-station buildings; 7. Preparing policies and strategic planning related to preservation, development, repair, maintenance, restoration and arrangement of buildings of cultural heritage and non-cultural heritage; and 8. Preparing strategic planning related to spatial use business that is synergized with the railroad transportation network. |
|---|---|

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Tugas Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan strategi dan kebijakan terkait penyelenggaraan fungsi pengelolaan keuangan secara terpusat
2. Menetapkan strategi kebijakan terkait pengelolaan Public Service Obligation (PSO), *Infrastructure Maintenance & Operation* (IMO) dan *Track Access Charge* (TAC)
3. Menetapkan strategi dan kebijakan terkait pengelolaan layanan sistem informasi dan data *enterprise*
4. Menetapkan strategi dan kebijakan terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta pergudangan
5. Menetapkan strategi dan kebijakan terkait pengelolaan risiko usaha Perseroan secara terpadu

Board Manual Direksi

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai tata laksana kerja yang termuat di dalam *Board Manual*. *Board Manual* merupakan tata laksana kerja yang menjelaskan tahapan aktivitas Direksi secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan secara konsisten, sehingga dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas bagi masing-masing Direktur. *Board Manual* disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham, serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

Board Manual Perseroan ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 04/CH/KOM/III/2017 dan Nomor KEP.U/KO.101/III/15/KA-2017 tentang Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 16 Maret 2017.

Managing Director of Finance and Risk Management

The duties of the Managing Director of Finance and Risk Management are as follows:

1. Issuing strategies and policies related to the implementation of a centralized financial management function
2. Issuing policy strategy related to the management of Public Service Obligation (PSO), *Infrastructure Maintenance & Operation* (IMO) and *Track Access Charge* (TAC)
3. Issuing strategies and policies related to the management of enterprise data and information system services
4. Issuing strategies and policies related to the management of procurement of goods and services and warehousing
5. Issuing strategies and policies related to the integrated management of the Company's business risks

Board Manual of the Board of Directors

The Board of Directors carries out their duties and responsibilities according to the work procedures contained in the *Board Manual*. The *Board Manual* is a work procedure that describes the stages of the Board of Directors' activities in a structured, systematic, easy-to-understand manner, and can be implemented consistently, so that they can serve as a guideline for carrying out the duties of each Director. The *Board Manual* was prepared based on the principles of corporate law, the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations, Shareholders' directives, as well as *Good Corporate Governance* best practices.

The *Board Manual* of the Company is stipulated through the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. 04/CH/KOM/III/2017 and No, KEP.U/KO.101/III/15/KA-2017 concerning Work Guideline of the Board of Commissioners and Board of Directors (*Board Manual*) PT Kereta Api Indonesia (Persero) dated March 16, 2017.

Board Manual memuat tata laksana kerja Direksi dengan perincian berikut:

1. Persyaratan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Direksi
2. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
3. Tanggung Jawab Direksi
4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi
5. Hak Direksi
6. Etika Jabatan
7. Pendelegasian Wewenang Di Antara Anggota Direksi
8. Pembagian Tugas Direksi
9. Penggunaan Saran Profesional
10. Rapat Direksi
11. Sekretaris Perusahaan
12. Hubungan Dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

Sesuai ketentuan di dalam Anggaran Dasar, Perseroan menerapkan kebijakan rapat Direksi dengan uraian sebagai berikut:

1. Direksi harus melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan sesuai rencana rapat yang disusun mengacu pada rencana kerja anggaran tahunan.
2. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
 - a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
3. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis melalui nota dinas elektronik oleh anggota Direksi yang berhak mewakili.
4. Dalam hal keadaan memaksa rapat Direksi dapat dilakukan tanpa panggilan. Rapat dianggap sah dalam hal rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.
5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
6. Rapat Direksi dapat dilakukan melalui tatap muka atau rapat virtual melalui sarana media elektronik yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Direksi.

The Board Manual contains the work procedures for the Board of Directors with the following details:

1. Requirements, Membership, and Term of Office of the Board of Directors
2. Introduction and Capability Improvement Program
3. Responsibilities of the Board of Directors
4. Duties, Authorities, and Obligations of the Board of Directors
5. Rights of the Board of Directors
6. Job Ethics
7. Delegation of Authority for Members of the Board of Directors
8. Division of Duties of the Board of Directors
9. Use of Professional Advice
10. Board of Directors Meeting
11. Corporate Secretary
12. Relationships with Subsidiaries and Joint Ventures

Board of Directors Meeting

Meeting Policy

In accordance with the provisions in the Articles of Association, policy on the Board of Directors meeting at the Company is as follows:

1. The Board of Directors must hold regular meetings at least once a month according to the meeting plan prepared in reference to the annual budget work plan.
2. The Board of Directors meeting can be held at any time if:
 - a. Deemed necessary by one or more members of the Board of Directors;
 - b. Provided with written request of one or more members of the Board of Commissioners; or
 - c. Provided with written request from the Shareholders
3. Invitation to Board of Directors meetings is made in writing via electronic official notes by members of the Board of Directors who are entitled to represent.
4. In the event of compelling circumstances, the Board of Directors meeting might be held without an invitation. The meeting was considered valid if the meeting is attended by all members of the Board of Directors.
5. The Board of Directors meeting is chaired by the President Director.
6. The Board of Directors meeting can be held face-to-face or virtual meetings through electronic media facilities that allow all participants of the Board of Directors meeting to see and hear each other directly and participate in the Board of Directors meeting.

7. Setiap anggota Direksi yang menghadiri rapat berhak menyampaikan tanggapan dalam rapat yang dicatat dalam risalah rapat termasuk pendapat berbeda (*dissenting opinions*) jika ada.
 8. Direksi berkewajiban menghadiri setiap rapat Direksi. Dalam hal terdapat Direksi yang berhalangan hadir harus memberikan alasan ketidakhadirannya dalam risalah rapat, Direksi yang tidak hadir dapat memberikan kuasa kepada salah satu anggota Direksi yang hadir sekaligus kewenangan pemegang kuasa tersebut untuk memberikan suara dalam rapat Direksi. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
 9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah seluruh anggota Direksi.
 10. Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali seluruh anggota Direksi hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
 11. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
 12. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
 13. Dalam hal jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat pimpinan rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban.
 14. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
 15. Direksi yang tidak memberikan suara maka dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
 16. Keputusan rapat Direksi adalah keputusan tertinggi yang tidak dapat diubah kecuali dengan rapat Direksi.
 17. Terkait dengan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dapat dilakukan atas undangan Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.
7. Each member of the Board of Directors attending the meeting has the right to submit responses at the meeting which are recorded in the minutes of the meeting including dissenting opinions if any.
 8. The Board of Directors must attend every meeting of the Board of Directors. In the event that a member of the Board of Directors is unable to attend, he/she must provide a reason for absence in the minutes of the meeting, the absent Board of Directors may grant power of attorney to one of the members of the Board of Directors present as well as the authority of the holder of the proxy to vote at the meeting of the Board of Directors. A member of the Board of Directors may only represent another member of the Board of Directors.
 9. The Board of Directors meeting is valid and has the right to make binding decisions if attended by more $\frac{1}{2}$ (half) of the total members of the Board of Directors.
 10. In other agendas, the Board of Directors meeting is not entitled to make decisions unless all members of the Board of Directors are present and agree to the addition of the agenda of the meeting.
 11. All decisions at the Board of Directors meeting are made by deliberation to reach consensus.
 12. In the event that a decision cannot be made by deliberation and consensus, then the decision is taken by majority vote.
 13. In the event that the number of votes that agree and disagree is the same, then the decision of the meeting is in accordance with the opinion of the chairman of the meeting with due regard to the provisions regarding accountability.
 14. In the event that there are more than two alternatives and the voting results have not received one alternative with more than (one-half) of the total votes cast, then a re-election will be conducted on the two proposals that received the most votes so that one of the proposals receives more than one vote. (one-half) of the total number of votes cast.
 15. The Board of Directors that does not vote will be deemed to have approved the proposal submitted at the meeting.
 16. The decision of the Board of Directors meeting is the highest decision that cannot be changed except by a Board of Directors meeting.
 17. The meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners can be held at the invitation of the Board of Commissioners or at the request of the Board of Directors.

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi Tahun 2022

Pada tahun 2022, Direksi menyelenggarakan rapat sejumlah 39 (tiga puluh sembilan). Pengungkapan agenda, tanggal pelaksanaan, serta peserta rapat Direksi untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Agenda, Tanggal, dan Peserta Rapat Direksi

Agenda, Date, and Participants of the 2022 Board of Directors Meeting

In 2022, the Board of Directors held 39 (thirty nine) meetings. Disclosure of the agenda, implementation date, and participants of the Board of Directors meeting in 2022 are as follows:

Agenda, Date, and Participants of the Board of Directors Meeting

No	Tanggal Undangan / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	Ket / Attendance
1	21/1/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU)	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Penyampaian Agenda dan Tindakanjnt Keputusan BOD sebelumnya (US) / Presentation for Previous BOD Agenda and Its Follow-Up (US)	2. Dadan Rudiansyah	Hadir / Present
		c. Kinerja Keuangan Desember 2021(D8) / December 2021 Financial Performance (D8)	3. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		d. Rencana penertiban lahan KAI di Gg Buntu Medan (D5) / KAI land control plan in Gg Buntu Medan (D5)	4. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		e. Pengalihan KA lokal kpd KCI dan KA Bandara YIA kepada Railink (D7) / Transfer of local trains to KCI and YIA Airport trains to Railink (D7)	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Usulan perubahan alokasi dana perawatan jalan rel & jembatan di Divre III & Divre IV Tahun 2022 (D3) / Proposal of changes to the allocation of funds for the maintenance of railroads & bridges in Divre III & Divre IV in 2022 (D3)	6. John Robertho	Hadir / Present
		g. Rekomendasi Pembina YAPUS sama YWKA (D6) / YAPUS Advisor and YWKA (D6) recommendation	7. Agung Yunanto	Hadir / Present
			8. Jeffrie N. Korompis	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
2	25/1/2022	a. Penyampaian Agenda dan Keputusan BOD sebelumnya (US) / Presentation for Previous BOD Agenda and Resolution (US)	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update RKAP 2022 (D8) / RKAP 2022 update (D8)	2. Dadan Rudiansyah	Hadir / Present
		c. Laporan Makassar Pare-pare (D1) / Makassar Pare-pare Report (D1)	3. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		d. Update Progres Konektivitas KCJB Padalarang – Bandung dan Dashboard Investasi (D7) / Update of KCJB Padalarang– Bandung Connectivity Progress and Investment Dashboard (D7)	4. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		e. Laporan Kajian Konsolidasi Project KCJB oleh PSBIdan Pembahasan Perubahan Perjanjian Pemegang Saham PSBI (D8,D7) / Report on the Study of the Consolidation of the KCJB Project by PSBI and Discussion of Changes to the PSBI Shareholders Agreement (D8, D7)	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		e. Laporan Kajian Konsolidasi Project KCJB oleh PSBIdan Pembahasan Perubahan Perjanjian Pemegang Saham PSBI (D8,D7) / Report on the Study of the Consolidation of the KCJB Project by PSBI and Discussion of Changes to the PSBI Shareholders Agreement (D8, D7)	6. John Robertho	Hadir / Present
		f. Penjelasan Assesmen BoD oleh PT Eshael (D6) / Explanation of BoD Assessment by PT Eshael (D6)	7. Agung Yunanto	Hadir / Present
			8. Jeffrie N. Korompis	Hadir / Present
	9. Salusra Wijaya	Hadir / Present		

No	Tanggal Undangan / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	Ket / Attendance
3	7/2/2022	a. Penyampaian Agenda dan Keputusan BOD sebelumnya (US) / Presentation for Previous BOD Agenda and Resolution (US)	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Rencana Penerbitan Obligasi (D8) / Bond Issuance Plan (D8)	2. Dadan Rudiansyah	Hadir / Present
		c. Konsolidasi PSBI - Perubahan Dokumen Pemegang Saham (D8 & D7) / PSBI Consolidation - Changes in Shareholder Documents (D8 & D7)	3. Heru Kuswanto	Hadir / Present
			4. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
			5. Eko Purwanto	Hadir / Present
			6. John Robertho	Hadir / Present
			7. Agung Yunanto	Hadir / Present
			8. Jeffrie N. Korompis	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
4	15/2/2022	a. Update tindak lanjut BOD sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US)	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Pembahasan Hasil Review BPKP KCIC (HU,D7,D8) / Discussion of BPKP KCIC Review Results (HU, D7, D8)	2. Dadan Rudiansyah	Hadir / Present
		c. Pembahasan Kajian Penyusunan Kebijakan dan Regulasi terkait IMO dan TAC dengan Delloite (D3) / Discussion of Policy and Regulation Formulation Study related to IMO and TAC with Delloite (D3)	3. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		d. KJPP Aset Kebon Kawung dan ROW (D5) / KJPP of Kebon Kawung and ROW Assets (D5)	4. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		e. Dashboard Niaga, Keuangan, Investasi (D8) / Dashboard of Commerce, Finance, Investment (D8)	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
			6. John Robertho	Hadir / Present
			7. Agung Yunanto	Hadir / Present
			8. Jeffrie N. Korompis	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
5	22/2/2022	a. Update tindak lanjut BOD sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US)	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Laporan Keuangan Januari 2022 (D8) / January 2022 Financial Statements (D8)	2. Dadan Rudiansyah	Hadir / Present
		c. KPI Direksi Individual 2022 (D6) / Individual Board of Directors KPI 2022 (D6)	3. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		d. Rekomendasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelatihan SDM LRT (D6) / Recommendations for the Implementation of LRT HC Training (D6)	4. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		e. Pembentukan Subholding KCI (D7) / Establishment of KCI Subholding (D7)	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
			6. John Robertho	Hadir / Present
			7. Agung Yunanto	Hadir / Present
			8. Jeffrie N. Korompis	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present

No	Tanggal Undangan / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	Ket / Attendance
6	1/3/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU)	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindakanlanjut BOD sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US)	2. Dadan Rudiansyah	Hadir / Present
		c. Evaluasi Program Keselamatan & Strategi Keselamatan s.d Akhir Tahun 2022 (D5) / Evaluation of the Safety Program and Safety Strategy until the end of 2022 (D5)	3. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		d. Evaluasi Realisasi dan Program Empowering People 2022 (D6) / Evaluation of Safety Program & Safety Strategy until the end of 2022 (D5)	4. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		e. Rencana Implementasi Transformasi Digital (D8) / Evaluation of Realization and Empowering People 2022 Program (D6)	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Report Issue SPKA (D6)	6. John Robertho	Hadir / Present
		g. Evaluasi Angkutan Penumpang dan Barang Strategi s.d Akhir Tahun 2022 (D1) / Evaluation of Strategic Freight and Passenger Transport until the End of 2022 (D1)	7. Agung Yunanto	Hadir / Present
		h. Evaluasi Optimalisasi Aset (D1,D5,D7) / Asset Optimization Evaluation (D1,D5,D7)	8. Jeffrie N. Korompis	Hadir / Present
		i. Evaluasi Efisiensi Biaya (Cost Leaderships) dan Strategy Cost Leaderships s.d Akhir Tahun 2022 (D8) / Evaluation of Cost Efficiency (Cost Leaderships) and Strategy Cost Leaderships until the end of 2022 (D8)	9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
7	8/3/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU)	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindakanlanjut BOD sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US)	2. Dadan Rudiansyah	Hadir / Present
		c. Update Progress IMO TAC (D3&D8)	3. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		d. Update Budaya Keselamatan (D2,D5&D6) / Safety Culture Update (D2,D5&D6)	4. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		e. Persiapan Angkutan Lebaran (D1&D2) / Eid Transportation Preparation (D1&D2)	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Persiapan Peresmian Lintas Cibatu - Garut (D1,D2,D5,&D7) / Preparation for the Inauguration of the Cibatu - Garut Crossing (D1, D2, D5, & D7)	6. John Robertho	Hadir / Present
		g. Pembahasan Laporan Manajemen Audited Tahun 2021 (D8) / Discussion of the 2021 Audited Management Report (D8)	7. Agung Yunanto	Hadir / Present
		h. Update Feeder Padalarang - Bandung (D3&D7)	8. Jeffrie N. Korompis	Hadir / Present
		i. Update Makassar - Parepare (D1&D4)	9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
		j. Pembahasan Update Transaksi KCI + Railink Basoetta (D7&D8) / Discussion of KCI + Railink Basoetta Transaction Updates (D7&D8)		
		k. KPI Direksi (D6) / Board of Directors KPI (D6)		
8	15/3/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU)	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindakanlanjut BOD sebelumnya / Update of previous BOD follow-up (US)	2. Dadan Rudiansyah	Hadir / Present
		c. Peningkatan Keselamatan - Dampak Perbedaan Back to Back terhadap Wesel (D3) / Improved Safety - Impact of Back to Back Differences on Bills (D3)	3. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		d. Laporan Update Budaya Keselamatan - Hasil Kunjungan Direksi (D5) / Safety Culture Update Report - Board of Directors Visit Results (D5)	4. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		e. Laporan Keuangan Akhir Februari 2022 (D8) / Final Financial Report February 2022 (D8)	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Hasil Evaluasi Jabatan dan Rencana Benchmarking Remunerasi (D6) / Position Evaluation Results and Remuneration Benchmarking Plan (D6)	6. John Robertho	Hadir / Present
		g. Pemanfaatan Aset Padalarang oleh KCIC & Permasalahan Kerjasama Laswi dengan WIKA (D7) / Utilization of Padalarang Assets by KCIC & Problems with Laswi's Cooperation with WIKA (D7)	7. Agung Yunanto	Hadir / Present
			8. Jeffrie N. Korompis	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present

No	Tanggal Undangan / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	Ket / Attendance
9	17/3/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU)	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Pemanfaatan Aset Padalarang oleh KCIC & Permasalahan Kerjasama Laswi dengan WIKA (D7) / Utilization of Padalarang Assets by KCIC & Problems with Laswi Cooperation with WIKA (D7)	2. Dadan Rudiansyah	Hadir / Present
			3. Heru Kuswanto	Hadir / Present
			4. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
			5. Eko Purwanto	Hadir / Present
			6. John Robertho	Hadir / Present
			7. Agung Yunanto	Hadir / Present
			8. Jeffrie N. Korompis	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
10	22/3/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU)	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindaklanjut BOD sebelumnya dan Persiapan KAIS Posko Angkutan Lebaran dan Peresmian Cibatu-Garut (US) / Update on previous BOD follow-up and KAIS Preparation for the Eid Transport Post and the Inauguration of Cibatu-Garut (US)	2. Dadan Rudiansyah	Hadir / Present
		c. Permasalahan Aset Kerjasama Laswi dengan WIKA (D5 dan D7) / Issues with Laswi Collaboration Assets with WIKA (D5 and D7)	3. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		d. Laporan Siklus Pengeluaran Biaya Perawatan Prasarana termasuk Penyerapan (D3) / Infrastructure Maintenance Expenditure Cycle Report including Absorption (D3)	4. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		e. Implementasi Transformasi Digital (D8) / Digital Transformation Implementation (D8)	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. KPI Direksi (D6) / Board of Directors KPI (D6)	6. John Robertho	Hadir / Present
			7. Agung Yunanto	Hadir / Present
			8. Jeffrie N. Korompis	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
11	5/4/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU)	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindaklanjut BOD sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US)	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Permasalahan Aset Kerjasama Laswi dengan WIKA (D5, D7) / Issues with Laswi Collaboration Assets with WIKA (D5, D7)	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Laporan Siklus Pengeluaran Biaya Perawatan Prasarana termasuk Penyerapan Anggaran (D3) / Report on Infrastructure Maintenance Expenditure Cycle including Budget Absorption (D3)	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		e. Update Progress Penyelesaian Inventarisasi ROW dengan DJKA dan Permasalahan Gang Buntu (D5) / Update on Completion Progress of ROW Inventory with DGKA and Dead End Problems (D5)	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Laporan Kinerja Safety TW 1 (D5) 01 / Safety Performance Report (D5)	6. John Robertho	Hadir / Present
		g. Management Meeting "Pemeriksaan atas Rencana Penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk PT KAI Tahun 2022" (D8) / Management Meeting "Rating of PT KAI Bonds and/or Sukuk Issuance Plan in 2022" (D8)	7. Suparno	Hadir / Present
			8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present

No	Tanggal Undangan / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	Ket / Attendance
12	12/4/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU)	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindakanlanjutan BOD sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US)	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Paparan Rencana ESG Survei (UP) / Presentation on ESG Survey Plan (UP)	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Laporan Keuangan Maret 2022 (D8) / March 2022 Financial Report (D8)	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		e. Valuasi Transaksi Railink Basoetta - KCI (D8,D7) / Railink Basoetta Transaction Valuation - KCI (D8, D7)	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		d. Update Transformasi Digital (D8) / Digital Transformation Update (D8)	6. John Robertho	Hadir / Present
		e. Usulan Pemberian THR Tahun 2022 (D6) / Proposal for THR in 2022 (D6)	7. Suparno	Hadir / Present
		f. Penunjukan Konsultan Kajian Ekonomi PMN Aset Lahan/Prasarana Pemerintah (Kajian Dukungan Penyelesaian Dispute ROW)(D5) / Appointment of PMN Economic Study Consultant on Land Assets/ Government Infrastructure (Study on Support for Dispute ROW Completion)(D5)	8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
		g. Update Kontrak IMO TA 2022 (D8,D3) / IMO Contract Update FY 2022 (D8,D3)	9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
13	19/4/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU)	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindakanlanjutan BOD sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US)	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Evaluasi Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang TW 1 Tahun 2022 dan penjualan tiket Masa Angkutan Lebaran (D1) / Evaluation of Passenger Transport and Freight Transportation Q1 2022 and ticket sales for the Eid Transport Period (D1)	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Update Kontrak IMO TA 2022 (D3&D8) / IMO Contract Update FY 2022 (D3&D8)	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		e. Usulan Pemberian THR Tahun 2022 / Proposal for THR in 2022 (D6)(D6)	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Update Transformasi Digital (D8) / Digital Transformation Update (D8)	6. John Robertho	Hadir / Present
		g. Evaluasi Program Investasi dan Kinerja Anak Perusahaan TW 1 Tahun 2022 (D7) / Investment Program Evaluation and Subsidiary Performance Q1 2022 (D7)	7. Suparno	Hadir / Present
			8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
14	26/4/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU)	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Penetapan Komisaris AP dan KCIC (D7 & D6) / Appointment of Subsidiary and KCIC Commissioners (D7 & D6)	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Rencana Pengadaan Sarana KCI (Kerjasama INKA dan Stadler)(D7&CU) / KCI Facility Procurement Plan (Inka and Stadler Collaboration)(D7&CU)	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
			4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
			5. Eko Purwanto	Hadir / Present
			6. John Robertho	Hadir / Present
			7. Suparno	Hadir / Present
			8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present

No	Tanggal Undangan / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	Ket / Attendance
15	10/5/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU)	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindaklanjut BOD sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US)	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Rekomendasi S0 LRT Jabodebek (D6) / Recommendation of S0 LRT Jabodebek (D6)	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Laporan Keuangan April 2022 (D8) / April 2022 Financial Report (D8)	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		e. Progress ATDO dan Program ATDO Berikutnya (D8) / ATDO Progress and Next ATDO Program (D8)	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Update IMO dan TAC (D3&D8) / IMO and TAC updates (D3&D8)	6. John Robertho	Hadir / Present
		g. Update Inventarisasi ROW (D5) / ROW Inventory Update (D5)	7. Suparno	Hadir / Present
		h. Realisasi Program Investasi dan Kinerja Anak Perusahaan (D7) / Investment Program Realization and Subsidiary Performance (D7)	8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
		i. Restrukturisasi Modal PSBI (D7&D8) / PSBI Capital Restructuring (D7&D8)	9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
16	17/5/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindaklanjut BOD sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Progres KCJB (D7&HU); / KCJB progress (D7&HU);	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Update Program Keselamatan, Budaya Patuh menuju Proactive (D5); / Update on Safety Program, Compliance Culture towards Proactive (D5);	4. Heru Kuswanto	Sakit / Sick
		e. Materi RUPS KA (D8); / KA GMS material (D8);	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Evaluasi Penyerapan Investasi Tahun 2022 (D7); / Evaluation of Investment Absorption in 2022 (D7);	6. John Robertho	Hadir / Present
		g. Progres LRT Jabodebek (D7&Kadiv LRT); / Jabodebek LRT Progress (D7&Kadiv LRT);	7. Suparno	Hadir / Present
		h. Update Progres Makassar Parepare (D1,D4&D7);	8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
		i. Progres ATDO dan Rencana Usulan Penghapusan ATDO 2022 (D8); / ATDO Progress and Proposal of ATDO Abolition Plan in 2022 (D8)	9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
		j. Evaluasi Angkutan Penumpang April 2022 (D1); / Evaluation of Passenger Transportation April 2022 (D1);		
		k. Evaluasi Angkutan Barang April 2022(D1); / Evaluation of Freight Transport April 2022 (D1);		
l. Pembayaran Penghasilan Non Upah (D6). / Payment of Non-Wage Income (D6).				
17	19/5/2022	a. Rencana Pengadaan Mobil Listrik (US); / Electric Car Procurement Plan (US);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Inventarisasi ROW (D5); / ROW inventory (D5);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Evaluasi Kinerja Aset (D1,D5,&D7); / Asset Performance Evaluation (D1,D5,&D7);	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Progres Perawatan Prasarana April 2022 (D3); / Infrastructure Maintenance Progress April 2022 (D3);	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		e. Progres Sumatera Barat (D1,D7&US) / West Sumatra Progress (D1, D7 & US)	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Progres Transaksi Railink Basoetta / Railink Basoetta Transaction Progress	6. John Robertho	Hadir / Present
			7. Suparno	Hadir / Present
			8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present

No	Tanggal Undangan / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	Ket / Attendance
18	24/5/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindaklanjut BOD sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Update Transaksi Railink Basoetta - KCI (D7&D8) / Railink Basoetta Transaction Update - KCI (D7&D8);	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Obligasi (D8) / Bonds (D8);	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		e. Update Kesiapan Switch Over ke 5 Stasiun Manggarai (D2,D3,CU&KD01); / Update on Switch Over Readiness to 5 Manggarai Stations (D2, D3, CU & KD01);	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Uji Coba Dinasan ASP 6 Jam (D2); / 6 Hour ASP Service Trial (D2);	6. John Robertho	Hadir / Present
		g. Penetapan Dividen Anak Perusahaan TA 2021(D7) / Determination of Subsidiary Dividends for FY 2021(D7)	7. Suparno	Hadir / Present
			8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
19	30/5/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindaklanjut BOD sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Update Persiapan Materi RDP (D1,D2,D5,D8&US); / RDP Material Preparation Update (D1,D2,D5,D8&US);	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Penetapan Dividen Anak Perusahaan TA 2021(D7); / Determination of Subsidiary Dividends FY 2021(D7);	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		e. Update Proses Obligasi (D8); / Bond Process Update (D8);	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Update Persiapan KA Makassar Pare-Pare (D1,D2,D4,D6&D7); / Update on Makassar Pare-Pare Train Preparation (D1, D2, D4, D6 & D7);	6. John Robertho	Hadir / Present
		g. Update Project LRT Jabodebek (D7&Kadiv LRT); / Jabodebek LRT Project Update (D7&Kadiv LRT);	7. Suparno	Hadir / Present
		h. Update Transformasi Digital (D8); / Digital Transformation Update (D8);	8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
		i. Update Parenting Strategy (D7).	9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
20	9/6/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindaklanjut BOD sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Peningkatan Pelayanan Kereta Kelas Luxury (D1&D2); / Improvement of Luxury Class Train Services (D1&D2);	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Update Kerjasama Angkutan Barang (Baja) - Rencana Tim PMO (D1); / Update on Cooperation in Freight Transport (Baja) - PMO Team Plan (D1);	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		e. Update Parenting Strategy (D7);	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Update Transformasi Digital (D8) / Digital Transformation Update (D8)	6. John Robertho	Hadir / Present
			7. Suparno	Hadir / Present
			8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present

No	Tanggal Undangan / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	Ket / Attendance
21	14/6/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindaklanjut BOD sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Update Parenting Strategy (D7);	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Kinerja Keuangan s.d Mei 2022 (D8); / Financial Performance up to May 2022 (D8);	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		e. Update Transaksi Railink Basoetta(D7&D8); / Railink Basoetta Transaction Update (D7&D8);	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Pembahasan RDP Komisi VI DPR RI (D8&HU); / Discussion on RDP Commission VI of DPR RI (D8&HU);	6. John Robertho	Hadir / Present
		g. Update Prasarana Makassar - Parepare (D2&D3). / Makassar Parepare Infrastructure Update (D2&D3).	7. Suparno	Hadir / Present
			8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
22	30/6/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindaklanjut BOD sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Update Rencana Public Expose Obligasi (D8); / Update on Bond Public Expose Plan (D8);	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Update Angkutan Barang dan Rencana Tim PMO Angkutan dengan KS (D1); / Update on Freight Transportation and Plans for the Transport PMO Team with KS (D1);	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		e. Update Persiapan Pengoperasian Makassar-Pare (D1); / Makassar-Pare Operation Preparation Update (D1);	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Pembahasan Design Seragam Frontliner - Anne Avantie (D1); / Discussion on Frontliner Uniform Design - Anne Avantie (D1);	6. John Robertho	Hadir / Present
		g. Update Permasalahan IMO dan TAC (D3&D8). / Update on IMO and TAC Issues (D3&D8).	7. Suparno	Hadir / Present
			8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
23	5/7/2022	a. Economic Outlook (BoC, BoD, Excom);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindaklanjut BOD sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Update Dinasan ASP 6 Jam (D2); / 6 Hour ASP Service Update (D2);	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Update Rencana Pengadaan (Replacement) Sarana (D4); / Update on Plan for Procurement (Replacement) of Facilities (D4);	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		e. Update Perawatan Prasarana (D3). / Infrastructure Maintenance Update (D3).	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
			6. John Robertho	Hadir / Present
			7. Suparno	Hadir / Present
			8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present

No	Tanggal Undangan / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	Ket / Attendance
24	12/7/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindakanlanjutan BOD sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Update Obligasi - Jadwal dan Book Building; (D8) / Bond Update - Schedule and Book Building; (D8)	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Update Perawatan Prasarana (D3). / Infrastructure Maintenance Update (D3).	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		e. Update Dispute ROW; (D5)	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Pembahasan SO DCOE & TO (D6) / SO DCOE & TO Discussion (D6)	6. John Robertho	Hadir / Present
			7. Suparno	Hadir / Present
			8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
25	29/7/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindakanlanjutan BOD sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Usulan Alternatif Desain Colorscheme Kereta Api Panoramic (D4); / Alternative Panoramic Train Colorscheme Design Proposal (D4);	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Pembahasan Rekomendasi Remunerasi KAI (D6); / Discussion on KAI's Remuneration Recommendations (D6);	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
			5. Eko Purwanto	Hadir / Present
			6. John Robertho	Hadir / Present
			7. Suparno	Hadir / Present
			8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
26	2/8/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindakanlanjutan BOD sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Update PMO Sumbagsel (D5); / PMO Souther Sumtra Update (D5);	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Update Progress Perawatan Sarana (D4); / Facility Maintenance Progress Update (D4);	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		e. Update Pengoperasian Kembali KA Sawahlunto - Muarakalaban (D1); / Update on the Re-Operation of the Sawahlunto - Muarakalaban Train (D1);	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Update Persiapan Nataru (D1,D2,D3,D4,D5); / Christmas and New Year Holiday Preparation Update (D1,D2,D3,D4,D5);	6. John Robertho	Hadir / Present
		g. Update Persiapan Raker Smt 1 Th 2022 (D8,US). / Update on the Preparation of 1st Half of 2022 Working Meeting (D8, US).	7. Suparno	Hadir / Present
			8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present

No	Tanggal Undangan / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	Ket / Attendance
27	16/8/2022	a. Arahan Direktur Utama (DU); / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindaklanjut BOD sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Laporan Keuangan Juli 2022 (D8); / July 2022 Financial Report (D8);	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Update Kesepakatan Tarif Angkutan Barang PT BA (D1,D8); / Update of PT BA Freight Transport Tariff Agreement (D1, D8);	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		e. Update Rencana Kerjasama Optimalisasi (D7). / Update on Optimization Collaboration Plan (D7).	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
			6. John Robertho	Hadir / Present
			7. Suparno	Hadir / Present
			8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
28	30/8/2022	a. Arahan Direktur Utama (DU); / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindaklanjut BOD sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Update <i>Masterschedule</i> dan Dampak Kemunduran Proyek LRT Jabodebek (D5,D7,D8); / <i>Masterschedule</i> Update and Impact of Deterioration of Jabodebek LRT Project (D5, D7, D8);	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Update Skema Pendanaan <i>Cost Overrun</i> Proyek KCJB (D7,D8); / KCJB Project Cost Overrun Financing Scheme Update (D7, D8);	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		e. KAI Expo 2022 (D1/D7);	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Persetujuan Penetapan Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris PT PSBI TA 2021 (D7); / Approval of the Determination of the Salary/Honorarium of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT PSBI FY 2021 (D7);	6. John Robertho	Hadir / Present
		g. Persetujuan Logo Hut KAI (US); / KAI Anniversary Logo Approval (US);	7. Suparno	Hadir / Present
		h. Program Strategis Prasarana Untuk Peningkatan Kecepatan dan Beban Gandar Perkeretaapian di Indonesia (D3). / Infrastructure Strategic Program for Increasing the Speed and Load of Railways in Indonesia (D3).	8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
29	13/9/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindaklanjut BOD sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Kinerja Keuangan Agustus 2022 (D8); / August 2022 Financial Performance (D8);	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Laporan Pencapaian KPI Direksi (D6); / Board of Directors KPI Achievement Report (D6);	4. Heru Kuswanto	Hadir
		e. Agenda dan Program HUT KAI 2022 (US,D1-D8); / KAI 2022 Anniversary Agenda and Program (US, D1-D8);	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Rencana Pengoperasian KA Barang Makassar-Pare-Pare (D1); / Makassar-Pare-Pare Freight Train Operation Plan (D1);	6. John Robertho	Hadir / Present
		g. Rencana Pengoperasian dan Design Interior KA Panoramic serta Pengajuan Design Kereta Sleeper dan KA Bima Reborn, serta Kereta Ekonomi, Eksekutif (D1&D4); / Plan for Operation and Interior Design of the Panoramic Train and Submission of Sleeper and Bima Reborn Train Designs, as well as Economy, Executive Trains (D1&D4);	7. Suparno	Hadir / Present
		h. Rencana Alokasi Penambahan KA Batu Bara Swasta (D1); / Plan of Allocation for the Addition of Private Coal Trains (D1);	8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
		i. Update Progress Transformasi Digital dan Rencana Sosialisasi (D5&D8). / Digital Transformation Progress Update and Outreach Plan (D5&D8).	9. Salusra Wijaya	Hadir / Present

No	Tanggal Undangan / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	Ket / Attendance
30	16/9/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Rencana Pengoperasian dan DesignInterior KA Panaromic serta Pengajuan Design Kereta Sleeper dan KA Bima Reborn, serta Kereta Ekonomi, Eksekutif (D1 & D4); / Plan for Operation and Interior Design of the Panaromic Train and Submission of Design for the Sleeper Train and the Bima Reborn Train, as well as the Economy, Executive Train (D1 & D4);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Update Pembahasan Program Strategis Untuk Peningkatan Kecepatan Prasarana Perkeretaapian Indonesia (D3). / Update on the Discussion of the Strategic Program for Increasing the Speed of Indonesian Railway Infrastructure (D3).	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
			4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
			5. Eko Purwanto	Hadir / Present
			6. John Robertho	Hadir / Present
			7. Suparno	Hadir / Present
			8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
31	4/10/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindakanjuz BOD Sebelumnya (US); / Update of previous BOD follow-up (US);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Pengadaan Jasa Layanan Revenue Management System (Multi Years)(D1); / Procurement of Revenue Management System Services (Multi Years) (D1);	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Update Progress Transformasi Digital (D5&D8); / Digital Transformation Progress Update (D5&D8);	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		e. Tantiem Dekom dan Direksi AP (D7); / Tantiem of Board of Commissioners and Board of Directors of Subsidiaries (D7);	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Update Pembahasan Program Strategis Peningkatan Kecepatan Prasarana Perkeretaapian Indonesia (D3); / Update on the Discussion of the Strategic Speed Improvement Program for Indonesian Railways Infrastructure (D3);	6. John Robertho	Hadir / Present
		g. Update KAI Access Revamp (D1);	7. Suparno	Hadir / Present
		h. Rencana Alokasi Penambahan KA Batu Bara Swasta (D1); / Plan of Allocation for the Addition of Private Coal Trains (D1);	8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
		i. Update Penyelesaian Permasalahan Aset Jogja - Sultan Ground (D7). / Update on Jogja- Sultan Ground Asset Problem Resolution (D7).	9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
32	10/10/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindakanjuz BOD Sebelumnya (US) / Update of previous BOD follow-up (US);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Program Keselamatan: Evaluasi Anjlogan Divre 3, Daop 8 dan Amblesan Daop 5 (D5/Daop/Divre); / Safety Program: Evaluation of Anjlogan Divre 3, Daop 8 and Subsidence Daop 5 (D5/Daop/Divre);	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Evaluasi Penanganan Tanggap Darurat di Daop 5 Purwokerto (D1,D2,D3,D5,KD0 5); / Evaluation of Emergency Response Handling in Daop 5 Purwokerto (D1, D2, D3, D5, KD0 5);	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		e. Kinerja Keuangan September 2022 (D8); / September 2022 Financial Performance (D8);	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Tantiem Dewan Komisaris dan DireksiAnak Perusahaan (D7); / Tantiem for the Board of Commissioners and Directors of Subsidiaries (D7);	6. John Robertho	Hadir / Present
		g. Rencana Pengalihan Struktur Organisasi KL ke Direktorat 6 (D6); / Plan for Transfer of KL Organizational Structure to Directorate 6 (D6);	7. Suparno	Hadir / Present
		h. Update Penyelesaian Permasalahan Aset Jogja - Sultan Ground (D7). / Update on Jogja- Sultan Ground Asset Problem Resolution (D7).	8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present

No	Tanggal Undangan / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	Ket / Attendance
33	25/10/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindaklanjut BOD Sebelumnya (US); / Update of previous BOD follow-up (US);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Permohonan keputusan pemenang lomba design kalender 2023 (US); / Request for decision on the winner of the 2023 calendar design competition (US);	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Update Investasi Sumbagsel – Progres PMO dan Rencana Konsesi (D7&D5); / Southern Sumatra Investment Update – PMO Progress and Concession Plans (D7&D5);	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		e. Update Transformasi Digital (D5&D8); / Digital Transformation Update (D5&D8);	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Kerjasama Pembangunan Coal Terminal Kramasan oleh KALOG (D7); / Cooperation in Kramasan Coal Terminal Development by KALOG (D7);	6. John Robertho	Hadir / Present
		g. Rencana RKAP KAI 2023 (ALL). / KAI 2023 RKAP plan (ALL).	7. Suparno	Hadir / Present
			8. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
34	14/11/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindaklanjut BOD Sebelumnya (US); / Update of previous BOD follow-up (US);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Laporan Hasil Invetigasi PLH di St. Rengas (D5); / PLH Investigation Report in Rengas Station (D5);	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Tindak Lanjut Penyelesaian Pending Issue Proyek KCJB – Risalah Rapat Menteri BUMN 30 September 2022 (D7&HU); / Follow-up to Settlement of KCJB Project Pending Issue – Minutes of SOE Ministerial Meeting 30 September 2022 (D7&HU);	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		e. Usulan Tunjangan Khusus Jabatan Struktural Tertentu dan Tambahan Penghasilan Bagian Makassar – Pare-pare (D6); / Proposal of Special Allowances for Certain Structural Positions and Additional Income for the Makassar – Pare-pare Section (D6);	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Update Kerjasama KALOG Coal Terminal Kramasan (D7); / Update on cooperation for KALOG Coal Terminal Kramasan (D7);	6. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
		g. Update Replacement Kereta 612 Multiyears (D4); / Update Replacement for Train 612 Multiyears (D4);	7. Suparno	Hadir / Present
		h. Update Kesiapan Pengoperasian Kembali KA Sawahlunto – Muarokalaban (D1); / Update on the Readiness to Re-Operate the Sawahlunto – Muarokalaban Train (D1);	8. John Robertho	Hadir / Present
		i. Update Penyelesaian Permasalahan Aset Jogja – Sultan Ground (D7). / Update on Jogja- Sultan Ground Asset Problem Resolution (D7).	9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
35	16/11/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Replacement Kereta 612 Multiyears (D4);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Update Kesiapan Pengoperasian Kembali KA Sawahlunto – Muarokalaban (D1); / Update on the Readiness to Re-Operate the Sawahlunto – Muarokalaban Train (D1);	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Update Penyelesaian Permasalahan Aset Jogja – Sultan Ground (D7). / Update on Jogja- Sultan Ground Asset Problem Resolution (D7).	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		e. Update Kinerja Oktober 2022 (D8); / October 2022 Performance Update (D8);	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Update Kesiapan Operasi KA Perintis Makassar Pare-Pare (D1). / Update on Operation Readiness of the Makassar Pare-Pare Perintis Train (D1).	6. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
			7. Suparno	Hadir / Present
			8. John Robertho	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present

No	Tanggal Undangan / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	Ket / Attendance
36	21/11/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindaklanjut BOD Sebelumnya (US); / Update of previous BOD follow-up (US);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Update Progress Transformasi Digital (CTO&Mckinsey);	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Update RKAP KAI 2023 (D8);	4. Heru Kuswanto	Perdin Luar Negeri
		e. Usulan Remunerasi KAI (D6). / KAI Remuneration Proposal (D6).	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
			6. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
			7. Suparno	Hadir / Present
			8. John Robertho	Hadir
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
37	29/11/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Update Tindaklanjut BOD Sebelumnya (US); / Update of previous BOD follow-up (US);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Evaluasi Kejadian PLH Kampung Bandan (D5&CU); / Evaluation of PLH events in Kampung Bandan (D5&CU);	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir
		d. Program Direktorat Keselamatan dan Keamanan Tahun Desember 2022 dan Update Persiapan Nataru 2022/2023 (D5); / Directorate of Safety and Security Program for December 2022 and Christmas and New Year Holiday 2022/2023 Preparation Update (D5);	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
		e. Evaluasi Kenaikan Tarif Angkutan Penumpang (D1); / Evaluation of Increase in Passenger Transportation Fares (D1);	5. Eko Purwanto	Hadir / Present
		f. Usulan Remunerasi KAI (D6); / KAI Remuneration Proposal (D6);	6. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
		g. Tindaklanjut Pendanaan Cost Overrun KCJB (D8); / KCJB Cost Overrun Financing Follow-up (D8);	7. Suparno	Hadir / Present
		h. IT Master Plan KAI (D8).	8. John Robertho	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present
38	22/12/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir
		b. Update Tindaklanjut BOD Sebelumnya; (US) / Update of previous BOD follow-up (US);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
		c. Kinerja Keuangan November 2022; (D8) / November 2022 Financial Performance; (D8)	3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
		d. Penyelesaian Permasalahan Aset Kebon Kawung - Bandung; (D5&D7) / Kebon Kawung - Bandung Asset Problem Resolution; (D5&D7)	4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
			5. Eko Purwanto	Hadir
			6. Sandry N Pasambuna	Hadir
			7. Suparno	Hadir / Present
			8. John Robertho	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present

No	Tanggal Undangan / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	Ket / Attendance
39	27/12/2022	a. Arahan DU (DU) / Directives from the President Director (DU);	1. Didiek Hartantyo	Hadir / Present
		b. Penerimaan PMN KAI TA 2022 dan Rencana Setoran Modal KAI kepada PSBI (D8&D7); / Receipt of PMN of KAI FY 2022 and KAI's Capital Deposit Plan to PSBI (D8&D7);	2. Hadis Surya Palapa	Hadir / Present
			3. Awan Hermawan Purwadinata	Hadir / Present
			4. Heru Kuswanto	Hadir / Present
			5. Eko Purwanto	Hadir / Present
			6. Sandry N Pasambuna	Hadir / Present
			7. Suparno	Hadir / Present
			8. John Robertho	Hadir / Present
			9. Salusra Wijaya	Hadir / Present

Agenda, Tanggal dan Kehadiran Rapat Gabungan Direksi Bersama Dewan Komisaris

Di tahun 2022, Direksi mengikuti sejumlah 21 (dua puluh satu) kali rapat gabungan bersama Dewan Komisaris. Agenda, tanggal penyelenggaraan, dan peserta rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Agenda, Date and Attendance of the Joint Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners

In 2022, the Board of Directors attended 21 (twenty one) joint meetings with the Board of Commissioners. The agenda, implementation date, and participants in the joint meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners are as follows:

Agenda, Tanggal, Peserta Rapat Gabungan Direksi Bersama Dewan Komisaris

Agenda, Date, Participants in the Joint Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat / Meeting Date	Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	Kehadiran / Attendance	Keterangan / Description
1	05/01/2022	Pembahasan Progres Tranformasi Digital KAI / KAI Digital Transformation Progress Discussion	Didiek Hartantyo Dadan Rudiansyah Heru Kuswanto Awan Hermawan Eko Purwanto john Robertho Agung Yunanto Jeffrie N Korompis Salusra Wijaya	100%	
2	26/01/2022	Pembahasan Kinerja Unaudited 2021 / Unaudited 2021 Performance Discussion	Didiek Hartantyo Dadan Rudiansyah Heru Kuswanto Awan Hermawan Eko Purwanto john Robertho Agung Yunanto Jeffrie N Korompis Salusra Wijaya	100%	
3	23/02/2022	Pembahasan Surat Serikat Pekerja Kereta Api / Railway Labor Union Letter Discussion	Didiek Hartantyo Dadan Rudiansyah Heru Kuswanto Awan Hermawan Eko Purwanto john Robertho Agung Yunanto Jeffrie N Korompis Salusra Wijaya	100%	

No	Tanggal Rapat / Meeting Date	Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	Kehadiran / Attendance	Keterangan / Description
4	09/03/2022	Kinerja LM Audited 2021 / Management Report Performance Audited 2021	Didiek Hartantyo Dadan Rudiansyah Heru Kuswanto Awan Hermawan Eko Purwanto john Robertho Agung Yunanto Jeffrie N Korompis Salusra Wijaya	100%	
5	06/04/2022	Rencana Penerbitan Obligasi Tahun 2022 / 2022 Bond Issuance Plan	Didiek Hartantyo Hadis Surya Palapa Awan Hermawan Heru Kuswanto Eko Purwanto john Robertho Suparno Sandry Pasambuna Salusra Wijaya	100%	
6	12/04/2022	Progres Pengalihan KA Basoetta / Basoetta Train Diversion Progress	Didiek Hartantyo Hadis Surya Palapa Awan Hermawan Heru Kuswanto Eko Purwanto john Robertho Suparno Sandry Pasambuna Salusra Wijaya	100%	
8	25/05/2022	Kinerja Perusahaan s.d April 2022 / Company Performance until April 2022	Didiek Hartantyo Hadis Surya Palapa Awan Hermawan Heru Kuswanto Eko Purwanto john Robertho Suparno Sandry Pasambuna Salusra Wijaya	100%	
9	07/06/2022	Surat Usulan Rencana Setoran Modal KAI kepada PSBI dalam rangka Penyelesaian Utang Piutang Bunga Pinjaman dan Penandatanganan Perubahan Perjanjian Pemegang Saham PT PSBI. / Letter of Proposal of KAI Capital Deposit Plan to PSBI for Settlement of Loan Interest Receivables and Signing of Changes to PT PSBI's Shareholders Agreement.	Didiek Hartantyo Hadis Surya Palapa Awan Hermawan Heru Kuswanto Eko Purwanto john Robertho Suparno Sandry Pasambuna Salusra Wijaya	100%	
10	29/06/2022	Kinerja Perusahaan s.d Mei 2022 / Company Performance until May 2022	Didiek Hartantyo Hadis Surya Palapa Awan Hermawan Heru Kuswanto Eko Purwanto john Robertho Suparno Sandry Pasambuna Salusra Wijaya	100%	
11	06/07/2022	Presentasi Konsultasi Mengenai Culture Health Index / Presentation of Consultation on Culture Health Index	Suparno	100%	
12	27/07/2022	Surat Direksi Tentang Usulan Transaksi Pengalihan Bisnis KA Bassoetta / Board of Directors Letter on Proposal of Transfer of Bassoetta Train Business Transaction	Didiek Hartantyo Hadis Surya Palapa Awan Hermawan Heru Kuswanto Eko Purwanto john Robertho Suparno Sandry Pasambuna Salusra Wijaya	100%	
13	11/08/2022	Surat Direksi tentang Permohonan Persetujuan Penetapan Struktur Organisasi 1(satu) Tingkat di Bawah Direksi / Board of Directors Letter on Proposal for Approval for Determination of Organizational Structure 1(one) Level below the Board of Directors	Suparno Salusra Wijaya	100%	

No	Tanggal Rapat / Meeting Date	Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	Kehadiran / Attendance	Keterangan / Description
14	14/09/2022	Laporan Progres dan Isu Strategis Proyek KCJB / Report on Progress and Strategic Issues of the KCJB Project	Didiek Hartantyo Hadis Surya Palapa Awan Hermawan Heru Kuswanto Eko Purwanto john Robertho Suparno Sandry Pasambuna Salusra Wijaya	100%	
15	05/10/2022	Progress Update PMO Pengembangan Sumbagsel / Update on PMO Progress of Development of Southern Sumatra	Didiek Hartantyo Hadis Surya Palapa Awan Hermawan Heru Kuswanto Eko Purwanto john Robertho Suparno Sandry Pasambuna Salusra Wijaya	100%	
16	19/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> Surat Usulan Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan / Letter of Proposal for Changes to the Company's Organizational Structure Center Of Excellence SDM pada KCIC / HR Center Of Excellence at KCIC Update Pengisian Jabatan pada Unit Transformasi Digital / Update on Position Filling in the Digital Transformation Unit 	Hadis Surya Palapa Suparno Sandry Pasambuna	100%	
17	26/10/2022	Pembahasan Kinerja Perusahaan s.d Triwulan III Tahun 2022 / Discussion of Company Performance up to Q3/2022	Didiek Hartantyo Hadis Surya Palapa Awan Hermawan Heru Kuswanto Eko Purwanto john Robertho Suparno Sandry Pasambuna Salusra Wijaya	100%	
18	23/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> Kesiapan Operasi LRT Juli 2022 / LRT Operation Readiness July 2022 Progress dispute lahan dengan perum Damri / Progress of land dispute with Perum Damri 	Didiek Hartantyo Hadis Surya Palapa Awan Hermawan Heru Kuswanto Eko Purwanto john Robertho Suparno Sandry Pasambuna Salusra Wijaya	100%	
19	30/11/2022	Pembahasan Kinerja Oktober 2022 dan RKAP 2023 / October 2022 Performance Discussion and 2023 RKAP	Didiek Hartantyo Hadis Surya Palapa Awan Hermawan Heru Kuswanto Eko Purwanto john Robertho Suparno Sandry Pasambuna Salusra Wijaya	100%	
20	14/12/2022	Pembahasan Surat Penasehatan Pembayaran TAC / Discussion of TAC Payment Advisory Letter	Didiek Hartantyo Hadis Surya Palapa Awan Hermawan Heru Kuswanto Eko Purwanto john Robertho Suparno Sandry Pasambuna	95%	Tidak Hadir / Absent • Salusra Wijaya
21	28/12/2022	Pembahasan Rencana Setoran Modal kepada PSBI untuk Penyelesaian Cost Overrun dan Tindaklanjut PMN 2022 / Discussion on Plan to Deposit Capital to PSBI for Cost Overrun Settlement and PMN Follow-up 2022	Didiek Hartantyo Hadis Surya Palapa Awan Hermawan Heru Kuswanto Eko Purwanto john Robertho Suparno Sandry Pasambuna Salusra Wijaya	100%	

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Frekuensi pelaksanaan rapat dan kehadiran masing-masing anggota Direksi di dalam rapat untuk tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance Rate of Board of Directors Members

The meeting frequency and attendance of each member of the Board of Directors at the 2022 meetings can be seen in the following table:

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Frequency and Attendance of Board of Directors Meetings

Nama / Name	Jabatan / Position	Rapat Direksi / Board of Directors Meeting			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris / Joint Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners			RUPS / GMS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran / Attendance Number and Percentage			Jumlah dan Persentase Kehadiran / Attendance Number and Percentage			Jumlah dan Persentase Kehadiran / Attendance Number and Percentage		
		Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Number of Attendance	Persentase / Percentage	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Number of Attendance	Persentase / Percentage	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Number of Attendance	Persentase / Percentage
Didiek Hartantyo	Direktur Utama / President Director	39	39	100%	17	17	100%	2	2	100%
Dadan Radiansyah	Direktur Niaga (31 Maret 2022) / Managing Director of Commerce (March 31, 2022)	10	9	90%	4	4	100%	1	1	100%
Hadis Surya Palapa	Direktur Niaga / Managing Director of Commerce	29	29	100%	15	15	100%	1	1	100%
Heru Kuswanto	Direktur Operasi (31 Maret 2022) / Managing Director of Operation (March 31, 2022)	10	10	100%	4	4	100%	1	1	100%
Awan Hermawan P.	Direktur Operasi / Managing Director of Operation	29	29	100%	14	14	100%	1	1	100%
Awan Hermawan P.	Direktur Pengelolaan Prasarana (31 Maret 2022) / Managing Director of Infrastructure (March 31, 2022)	10	10	100%	4	4	100%	1	1	100%
Heru Kuswanto	Direktur Pengelolaan Prasarana / Managing Director of Infrastructure	29	27	93%	14	14	100%	1	1	100%
Eko Purwanto	Direktur Pengelolaan Sarana / Managing Director of Rolling Stock	39	39	100%	18	18	100%	2	2	100%
John Robertho	Direktur Keselamatan dan Keamanan (26 Oktober 2022) / Managing Director of Safety and Security (26 October 26, 2022)	33	33	100%	17	17	100%	2	2	100%
Sandry N. Pasambuna	Direktur Keselamatan dan Keamanan / Managing Director of Safety and Security	23	23	100%	-	-	-	-	-	100%
Agung Yunanto	Direktur SDM dan Umum (Maret 2022) / Managing Director of Human Capital and General Affairs (March, 2022)	10	10	100%	4	4	100%	1	1	100%

Nama / Name	Jabatan / Position	Rapat Direksi / Board of Directors Meeting			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris / Joint Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners			RUPS / GMS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran / Attendance Number and Percentage			Jumlah dan Persentase Kehadiran / Attendance Number and Percentage			Jumlah dan Persentase Kehadiran / Attendance Number and Percentage		
		Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Number of Attendance	Persentase / Percentage	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Number of Attendance	Persentase / Percentage	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Number of Attendance	Persentase / Percentage
Suparno	Direktur SDM dan Umum / Managing Director of Human Capital and General Affairs	29	29	100%	17	17	100%	1	1	100%
Jeffrie N. Korompis	Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha (31 Maret 2022) / Managing Director of Strategic Planning and Business Development (March 31, 2022)	10	10	100%	4	4	100%	1	1	100%
Sandry N. Pasambuna	Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha (26 Oktober 2022) / Managing Director of Strategic Planning and Business Development (October 26, 2022)	23	23	100%	15	15	100%	1	1	100%
John Robertho	Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha / Managing Director of Strategic Planning and Business Development	6	6	100%	-	-	-	2	2	100%
Salusra Wijaya	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Managing Director of Finance and Risk Management	39	39	100%	19	18	95%	2	2	100%

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Kebijakan Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Perseroan mengatur kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bagi anggota Direksi melalui *Board Manual*, dengan uraian ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap anggota Direksi yang mengikuti program peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk menyajikan presentasi kepada anggota Dewan Komisaris lainnya dalam rangka berbagai informasi dan pengetahuan (*sharing knowledge*).
2. Anggota Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas, dan laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Competency Improvement and/or Training for the Board of Directors Members

Policy on Training and/or Competency Improvement for the Board of Directors Members

The Company policy on competency improvement and/or training for the Board of Directors members is regulated in the Board Manual with the following description:

1. Each member of the Board of Directors who participates in capability improvement programs such as seminars and/or training is required to present presentations to other members of the Board of Commissioners in order to share information and knowledge.
2. The member of the Board of Directors concerned is responsible for making a report on the implementation of the capability improvement program, and the report is submitted to the Board of Commissioners.

3. Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi.
4. Rencana untuk melakukan Program Peningkatan Kapabilitas harus dimasukkan dalam RKAP.
5. Setiap Anggota Direksi yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas seperti seminar diminta untuk berbagi informasi dengan anggota Direksi lainnya.

Program Peningkatan Kapabilitas dapat berbentuk Program Seminar, *Workshop*, *Training*, *In House Training*, Studi Banding dan program lainnya yang berkaitan dengan:

1. Pengetahuan terkait Prinsip hukum korporasi dan updating peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan;
2. Pengetahuan terkait Lingkungan Bisnis dan isu perekonomian terkini;
3. Pengetahuan terkait Manajemen Strategis;
4. Pengetahuan terkait Kepemimpinan efektif;
5. Pengetahuan terkait manajemen perubahan yang menuju pencapaian visi dan misi perusahaan;
6. Pengetahuan terkait tugas fungsi pengawasan Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Mutu, Internal Audit, *Good Corporate Governance*, Sistem Informasi Teknologi, Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengelolaan *Human Capital*, dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa; dan/ atau
7. Pengetahuan terkait *Competitor Company*, *Substitution Company*, *World Class Company/Benchmark Company*.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Diikuti Anggota Direksi di Tahun 2022

Pada tahun 2022, masing-masing anggota Direksi mengikuti pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama / Name	Jabatan / Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan / Types of Competency Development and Training /Training Materials	Waktu dan Tempat Pelaksanaan / Implementation Time and Place	Penyelenggara / Organizer
1.	Salusra Wijaya	<i>Managing Director of Finance and Risk Management</i>	<i>Chief Financial Officer School (CFO)</i>	23/02/2022- 25/05/2022	BLMI
2.	Hadis Surya Palapa	<i>Managing Director Of Commerce</i>	<i>Onboarding Directorship</i>	02/11/2022-21/12/2022	BLMI

3. The Capability Improvement Program is implemented in order to improve the effectiveness of the Board of Directors' duties.
4. The plan to carry out the Capability Improvement Program must be included in the RKAP.
5. Each member of the Board of Directors who participates in the Capability Improvement Program such as a seminar is asked to share information with other members of the Board of Directors.

Competency Improvement Programs can be conducted in the form of Seminars, Workshops, Training, In House Training, Comparative Studies and other programs related to:

1. Knowledge on the principles of corporate law and updating laws and regulations on the company's business activities;
2. Knowledge on latest business environment and economic issues;
3. Knowledge on Strategic Management;
4. Knowledge on Effective Leadership;
5. Knowledge on change management that leads to the achievement of the company's vision and mission;
6. Knowledge on supervisory functions of the Internal Control System, Risk Management, Quality Management System, Internal Audit, Good Corporate Governance, Information Technology Systems, Accounting Policies and Financial Reporting, Human Capital Management, and Policies for the Procurement of Goods and Services; and/ or
7. Knowledge on *Competitor Company*, *Substitution Company*, *World Class Company/Benchmark Company*.

Training and/or Competency Improvement Followed by Members of the Board of Directors in 2022

In 2022, each member of the Board of Directors attended competency improvement and/or training with the following details:

Program Pengenalan bagi Direksi Baru Tahun 2022

Perseroan menerapkan program pengenalan bagi anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kali. Program pengenalan bagi anggota Direksi dilaksanakan di bawah tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, atau pihak lain yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Program pengenalan diterapkan guna memberikan pemahaman mendasar bagi anggota Direksi baru, terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh BUMN;
2. Gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Materi-materi dalam program pengenalan bagi Direktur yang baru dapat disampaikan melalui presentasi, pertemuan, kunjungan ke lokasi-lokasi operasional Perseroan, pengkajian dokumen, serta program lain yang dianggap sesuai.

Untuk tahun 2022, Perseroan telah melaksanakan program pengenalan bagi anggota-anggota Direksi yang baru menjabat, yaitu Bapak Hadis Surya Palapa, Suparno, dan Sandry Pasambuna, yang dilaksanakan melalui agenda Pengenalan Direksi Baru pada tanggal 4 April 2022.

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Di tahun 2022, Direksi mengeluarkan 211 (dua ratus sebelas) keputusan berupa Peraturan Perusahaan, Surat Keputusan, SOP, Surat Edaran, Instruksi, serta Maklumat. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan Direksi di tahun 2022 antara lain:

- | | |
|-------------------------|------|
| 1. Peraturan Perusahaan | : 76 |
| 2. Surat keputusan | : 79 |
| 3. SOP | : 22 |
| 4. Surat Edaran | : 17 |
| 5. Instruksi | : 5 |
| 6. Maklumat | : 12 |

Introduction Program for New Directors in 2022

The Company implements introduction program for newly appointed Board of Directors members. The introduction program for the Board of Directors member is under the responsibility of the Corporate Secretary, or other parties who carry out the Corporate Secretary function.

The introduction program is implemented to provide a basic understanding for new members of the Board of Directors, regarding the following matters:

1. Implementation of GCG principles by SOEs;
2. Description of SOEs with regard to objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short- and long-term business plans, competitive position, risk, and other strategic issues;
3. Information on delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee; and
4. Information on duties and responsibilities of the Board of Commissioners/Supervisory Board and the Board of Directors as well as prohibitions.

Materials in the introduction program for new Directors can be delivered through presentations, meetings, visits to the Company's operational locations, document review, and other programs deemed appropriate.

In 2022, the Company has implemented an introduction program for newly appointed members of the Board of Directors, namely Mr. Hadis Surya Palapa, Suparno, and Sandry Pasambun, which was carried out through the agenda of Introduction to New Directors on April 4, 2022.

Resolutions and Implementation of Duties of the Board of Directors

In 2022, the Board of Directors issued 211 (two hundred eleven) decisions in the form of Company Regulations, Decrees, SOPs, Circulars, Instructions, and Notices. The decisions issued by the Board of Directors in 2022 include:

- | | |
|-----------------------|------|
| 1. Company Regulation | : 76 |
| 2. Decree | : 79 |
| 3. SOP | : 22 |
| 4. Circular Letter | : 17 |
| 5. Instruction | : 5 |
| 6. Notice | : 12 |

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai tata laksana kerja di dalam *Board Manual* serta rencana kerja tahun 2022, dengan perincian sebagai berikut:

1. Menjalankan kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan sesuai Anggaran Dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022 dan RUPS Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2021.
3. Membentuk komite di bawah Direksi dengan tugas membantu efektivitas pelaksanaan tugas Direksi.
4. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu, akurat, relevan dan lengkap yaitu Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
5. Direksi menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Anak Perusahaan/perusahaan patungan dan/atau Perseroan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perseroan dan Anak Perusahaan/perusahaan patungan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Penilaian terhadap Kinerja Komite Direksi dan Dasar Penilaiannya

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan dibantu oleh komite-komite di bawah Direksi. Penjelasan mengenai hal tersebut beserta penilaian kinerja masing-masing komite adalah sebagai berikut:

1. Komite Evaluasi Jabatan

Merupakan komite yang dibentuk guna mendukung penyederhanaan struktur remunerasi yang berkeadilan sesuai bobot jabatan dan berbasis kinerja. Diperlukan evaluasi jabatan untuk menghasilkan sistem penilaian (*grading system*) sesuai dengan organisasi terkini yang pelaksanaannya melibatkan konsultan eksternal.

2. Komite Verifikasi Kinerja Pekerja

Komite ini dibentuk guna mendukung percepatan progres verifikasi kinerja pekerja dan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja pekerja.

For the period ending on December 31, 2022, the Board of Directors has carried out their duties and responsibilities according to the work procedures set in the Board Manual and the 2022 work plan, with the following details:

1. Carrying out the interests of the Company in accordance with the aims and objectives of the Company to in accordance with the Articles of Association.
2. Organizing the 2022 RKAP Ratification GMS and Financial Accountability GMS for the 2021 Fiscal Year.
3. Establishing a committee under the Board of Directors assigned to assist the effectiveness of the duty implementation of the Board of Directors.
4. Submitting reports to the Board of Commissioners in a timely, accurate, relevant and complete manner, namely Quarterly Reports, Half Year Reports and Annual Reports.
5. The Board of Directors conveyed information regarding the identity, main jobs, positions of the Board of Commissioners in Subsidiaries/joint ventures and/or other companies, including meetings held in one financial year (internal meetings or joint meetings with the Board of Commissioners), as well as salaries, facilities, and/or other allowances received from the Company and its Subsidiaries/joint ventures, to be included in the Company's Annual Report.

Performance Assessment of Committees under the Board of Directors and the Basis of Assessment

The Board of Directors carries out their duties and responsibilities with the assistance of committees under the Board of Directors. Further description on this matter and the performance assessment of each committee is as follows:

1. Job Evaluation Committee

A committee established to support the simplification of fair remuneration structure according to position weight and performance. Job evaluation is needed to produce a grading system in accordance with the latest organizations whose implementation involves external consultants.

2. Employee Performance Verification Committee

A committee established to support the accelerated progress of employee performance verification and in order to realize the implementation of the employee performance management system.

3. Komite Keselamatan Tingkat Pusat

Merupakan komite yang mengatur mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Keselamatan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

4. Komite Teknologi Informasi

Merupakan komite yang dibentuk untuk mendukung strategi bisnis dalam keseluruhan upaya pengembangan Perseroan. Diperlukan adanya kerja sama dan koordinasi seluruh bagian KAI agar pengembangan teknologi informasi dapat selaras dengan kebutuhan bisnis.

5. Komite Penyelesaian dan Tindak Lanjut Hasil Investigasi dan Hasil CO/Pemeriksaan Daerah atas Kejadian Kecelakaan KA

Komite ini bertugas menindaklanjuti hasil investigasi dan CO atas terjadinya kecelakaan kereta api, menetapkan pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan penyebab yang tertulis di dalam hasil investigasi/CO, menetapkan sanksi, dan menetapkan penghargaan kepada pegawai/masyarakat yang dinilai telah ikut mencegah atau melakukan upaya sehingga kecelakaan KA dapat dihindari. Hasil kerja anggota komite ini dilaporkan kepada Direktur Utama.

6. Komite Eksekutif

Merupakan komite yang dibentuk untuk mengantisipasi perkembangan dan tuntutan perusahaan di masa depan, sehingga perlu dipersiapkan kader pimpinan yang kompeten. Komite Eksekutif bertugas untuk merumuskan, mengelola, dan melaksanakan, serta mempersiapkan kaderisasi pimpinan masa yang akan datang. Selain itu, juga membahas hal-hal strategis Perseroan.

Direksi melakukan penilaian terhadap kinerja masing-masing komite secara periodik, dengan prosedur penilaian yang diterapkan melalui pelaksanaan rapat kerja berlaka. Secara mendasar, Direksi melakukan penilaian terhadap kinerja masing-masing komite berdasarkan pelaksanaan tugas selama 1 (satu) periode penilaian, yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi peningkatan kinerja komite di periode selanjutnya.

Untuk tahun 2022, Direksi menilai masing-masing komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik. Melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, Direksi menilai, masing-masing komite telah secara efektif memberi dukungan bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

3. Central Level Safety Committee

A committee that regulates the Railway Safety Management System. In carrying out its duties, the Safety Committee is responsible to the President Director.

4. Information Technology Committee

A committee established to support the business strategy in the overall development efforts of the Company. Cooperation and coordination of all parts of KAI is required so that the development of information technology can be in line with business needs.

5. Committee for Settlement and Follow-up of Investigation Results and Results of CO/Regional Examination of Train Accidents

A committee in charge of following up on the results of investigations and CO on the occurrence of train accidents, assigning responsible officials according to the causes written in the results of the investigations/CO, imposing sanctions, and providing awards to employees/communities who are considered to have participated in preventing or making efforts for preventing accidents. The results of the work of these committee members are reported to the President Director.

6. Executive Committee

A committee established to anticipate future developments and demands of the company, so it is necessary to prepare competent leadership cadres. The Executive Committee is tasked with formulating, managing, and implementing, as well as preparing future leadership cadres. In addition, it also discusses the Company's strategic matters.

The Board of Directors evaluates the performance of each committee periodically, with the evaluation procedure implemented through regular work meetings. Fundamentally, the Board of Directors evaluates the performance of each committee based on duty implementation during 1 (one) assessment period, the results of which will serve as a basis for consideration for improving committee performance in the next period.

In 2022, the Board of Directors has assessed that each committee has properly carried out their duties and responsibilities. With the implementation of these duties and responsibilities, the Board of Directors considers that each committee has effectively provided support for the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ di dalam struktur tata kelola yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengurusan secara umum, baik terkait tata kelola maupun bisnis Perseroan, yang dilakukan oleh Direksi. Melalui tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris juga bertugas untuk memberikan nasihat kepada Direksi. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris mencakup penyusunan dan pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), sesuai Anggaran Dasar, keputusan pemegang saham melalui RUPS, serta peraturan perundang-undangan.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewajiban Dewan Komisaris [POJK E.1]

Mengacu pada peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan *Board Manual*, Dewan Komisaris memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewajiban sebagai berikut:

Tugas Dewan Komisaris

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi; dan
2. Memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
2. Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) anggota atau lebih maka tanggung jawab secara renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
3. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) apabila dapat membuktikan:

The Board of Commissioners is a governance organ with the duties and responsibilities to supervise the policies and implementation of management in general related to corporate governance and business carried out by the Board of Directors. Through this supervisory duty, the Board of Commissioners also has the duty of providing advice to the Board of Directors. The supervisory and advisory functions carried out by the Board of Commissioners include the preparation and implementation of the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Company's Work Plan and Budget (RKAP), in accordance with the Articles of Association, shareholder resolutions through the GMS, as well as laws and regulations.

Duties, Responsibilities, and Obligations of the Board of Commissioners [POJK E.1]

Referring to the laws and regulations, the Articles of Association and the Board Manual, the Board of Commissioners has the following duties, responsibilities, and obligations:

Duties of the Board of Commissioners

1. Supervise the management policies, the general management of the Company and the Company's business carried out by the Directors; and
2. Provide advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long Term Plan, Work Plan and Company Budget and the provisions of the Articles of Association and General Meeting of Shareholders, as well as the applicable laws and regulations, for the interests of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.

Responsibilities of the Board of Commissioners

1. Each member of the Board of Commissioners is personally responsible for the Company's losses if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties;
2. Being personally responsible for the Company's losses if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties. In the event that the Board of Commissioners consists of 2 (two) members or more, the responsibilities are jointly for each member of the Board of Commissioners.
3. Members of the Board of Commissioners cannot be held responsible for losses as referred to in number 2 (two) if they can prove:

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian;
- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki kewajiban:

1. Kewajiban terhadap Pemegang Saham dan RUPS:
 - a. Menyusun program kerja tahunan dan memasukkannya ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - b. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan setelah tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Mengajukan usulan indikator pencapaian kinerja Dewan Komisaris individu dan kumulatif untuk ditetapkan oleh (RUPS);
 - d. Menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi indikator pencapaian kinerja kepada Pemegang Saham;
 - e. Mengusulkan akuntan publik kepada RUPS;
 - f. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi;
 - g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan, apabila diminta;
 - h. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepentingan Perseroan;
 - i. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJP dan RKAP;
 - j. Menandatangani laporan manajemen dan laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris tidak bersedia menandatangani laporan tahunan, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.

- a. To have carried out supervision in good faith and prudence for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company;
- b. To have no personal interest, either directly or indirectly, in the actions of the management of the Board of Directors which result in losses;
- c. To have provided advice to the Board of Directors to prevent the loss from arising or continuing.

Obligations of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has the following obligations:

1. Obligation to Shareholders and GMS:
 - a. Prepare annual work program and include it in the Work Plan and Annual Budget;
 - b. Submit report on the supervisory duties that have been done after past financial year to the General Meeting of Shareholders;
 - c. Propose the indicators of achievement of the performance of individual and cumulative BOC to be adopted by the (AGM);
 - d. Submit quarterly report on the progress of performance realization indicators to Shareholders;
 - e. Propose a public accountant to the GMS;
 - f. Report immediately to the GMS if there is a symptom of a decline in the Company's performance as well as suggestions that have been submitted to the Board of Directors to handle current problems;
 - g. Provide statements, opinions and suggestions to the GMS regarding to annual reports, if requested;
 - h. Keep abreast of the development of the Company's activities, giving opinions, and suggestions to the GMS regarding to any issues deemed important towards the Company interests;
 - i. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding to the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Work Plan and Corporate Budget (RKAP) related to the reason for the Board of Commissioners to sign the RJP and RKAP; and
 - j. Sign management reports and annual reports. In specific matter if any member of the Board of Commissioners is unwilling to sign the annual report, the reason shall be written.

2. Kewajiban terhadap *Stakeholders*:
 - a. Membuat mekanisme menghimpun masukan dan keluhan *stakeholders*;
 - b. Membuat mekanisme pembahasan masukan dan keluhan *stakeholders*;
 - c. Membuat mekanisme komunikasi kepada Direksi terkait masukan dan keluhan *stakeholders*.

3. Kewajiban terkait Pencalonan Anggota Direksi (Nominasi) dan Remunerasi:
 - a. Mengusulkan calon anggota Direksi Perseroan kepada Pemegang Saham;
 - b. Melakukan penelaahan dan pengawasan untuk memastikan bahwa Perseroan telah memiliki strategi dan kebijakan nominasi yang meliputi proses analisis organisasi, prosedur dan kriteria rekrutmen, seleksi dan promosi;
 - c. Melakukan kajian atas sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mengajukan kepada RUPS;
 - d. Memastikan bahwa Perseroan memiliki sistem remunerasi yang transparan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variabel;
 - e. Menyusun kebijakan mengenai pengajuan usulan remunerasi Direksi kepada RUPS;
 - f. Menelaah usulan remunerasi Direksi bersama dengan komite terkait;
 - g. Mengusulkan insentif kinerja/tantiem, mempertimbangkan penilaian kinerja Direksi; dan
 - h. Menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan, dan fasilitas serta tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada RUPS.

4. Kewajiban Penilaian Kinerja
 - a. RUPS menetapkan indikator pencapaian kinerja (*Key Performance Indicator*) Dewan Komisaris berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
 - b. Indikator pencapaian kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, pengawasan serta pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) Tingkat kehadirannya dalam rapat internal, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Maupun Rapat dengan komite-komite yang ada;

2. Obligation to *Stakeholders*:
 - a. Structuring the gathering input and complaints mechanisms of *stakeholders*;
 - b. Structuring the discussion of feedback and complaints mechanisms of *stakeholders*;
 - c. Structuring a communication mechanism to the Board of Directors related to feedback and complaints of *stakeholders*.

3. Obligation related to Nomination and Remuneration of Members of the Board of Directors:
 - a. Propose candidates for members of the Company's Board of Directors to Shareholders;
 - b. Conduct review and supervision to ensure that the Company has policies and strategies nominations include organizational analysis processes, procedures, and criteria for recruitment, selection and promotion;
 - c. Conduct study on the appropriate remuneration system for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors and submitted to the GMS;
 - d. Ensure that the Company has a transparent remuneration system in as fixed salary or honorarium, allowances, and facilities and variable incentives;
 - e. Formulate policies regarding to the submission of Directors' remuneration proposals to the GMS;
 - f. Assess the proposal of Board Directors' remuneration along with the relevant committees;
 - g. Assess the performance incentives/bonuses, considering the Board of Directors' performance assessment; and
 - h. Propose the Board of Directors' remuneration (salary, benefits and facilities as well as bonuses/ incentive performance) to the GMS.

4. Obligation of Performance Assessment
 - a. The GMS set the Board of Commissioners' Key Performance Indicators based on the Board of Commissioners' recommendations.
 - b. The performance indicator achievement is assessment measurement of the successful duties and responsibilities implementation, supervision as well as the Board of Commissioners advices in accordance with statutory regulations and/or articles of association containing at least:
 - 1) The level of attendance in internal meetings, joint meetings of the Board of Commissioners and Directors, as well as meetings with existing committees;

- 2) Kehadiran dalam proses pengawasan Perseroan;
 - 3) Keterlibatan dalam tugas tertentu;
 - 4) Arahan-arahan terhadap Perseroan; dan
 - 5) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, ketentuan RUPS, serta kebijakan Perseroan.
- c. Melaksanakan *self-assessment*, evaluasi kinerja Dewan Komisaris, masing-masing anggota, dan komite yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Komisaris.
 - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham/ Menteri.
 - e. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris:
 - 1) Menyusun kebijakan mengenai penilaian kinerja Direksi dan pelaporannya kepada Pemegang Saham;
 - 2) Menelaah kriteria, target dan indikator kriteria utama yang tercakup dalam kontrak manajemen Direksi/rencana kerja dan anggaran Perseroan baik secara individu maupun kolegial dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham.
5. Kewajiban Pengawasan Sistem Pengendalian Internal
 - a. Membuat mekanisme pengawasan kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
 - b. Memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Internal;
 - c. Memastikan efektivitas Auditor Internal dan Eksternal dengan menilai kompetensi, independensi serta ruang lingkup Auditor Internal dan Eksternal;
 - d. Memastikan Auditor Internal, Eksternal, dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perseroan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. Membuat program pengawasan Sistem Pengendalian Internal dan memasukkannya ke dalam RKA Perseroan; dan
 - f. Memberikan arahan-arahan terkait perbaikan Kebijakan Sistem Pengendalian Internal.
 6. Kewajiban Pengawasan Sistem Manajemen Mutu dan Pelayanan
 - a. Membuat mekanisme pengawasan kebijakan Sistem Manajemen Mutu dan Pelayanan;
- 2) Attendance in the Company's monitoring process;
 - 3) Involvement in certain tasks;
 - 4) Advices for the Company; and
 - 5) Compliance with applicable laws and regulations, articles of association, GMS provisions, and Company policies.
- c. Conduct Self-assessment, Performance Evaluation of the Board of Commissioners, each member, and the committee carried out by the Secretariat of the Board of Commissioners and/or by a third party which further stipulated by the Decree of the Board of Commissioners.
 - d. The Board of Commissioners must submit quarterly progress reports on the achievement of Performance Achievement Indicators to the Shareholders/ Ministers.
 - e. In evaluating the performance of the Directors, the Board of Commissioners:
 - 1) Prepare the policy regarding to the performance assessment of the Board of Directors and its assessment to the Shareholders;
 - 2) Review the criteria, targets, and the main criteria indicators contained in the Directors' management contract/work plan and corporate budget both individually and collegially and submit them to the Shareholders in the semester or annual supervisory report.
5. Obligation of Internal Control System Supervision
 - a. Create a mechanism for the Internal Control System monitoring policy
 - b. Ensure the effectiveness of the Internal Control System;
 - c. Ensure the effectiveness of Internal and External Auditors by assessing the competence, independency, and Internal and External Auditors scope;
 - d. Ensure that Internal, External, and Audit Committee Auditors have access to necessary information about the Company to carry out their duties.
 - e. Create an Internal Control System Supervision program and adding it to the Company's RKA; and
 - f. Provide suggestions related to the improvement of the Internal Control Policy System
 6. Obligation of Quality Management and Service System Supervision
 - a. Create a mechanism for the policy of the Quality Management and Service System monitoring;

- | | |
|--|---|
| <p>b. Membuat program pengawasan Sistem Manajemen Mutu dan Pelayanan serta memasukkannya ke dalam RKAP/<i>Enterprise Risk Management</i> (ERM); dan</p> <p>c. Memberikan arahan-arahan terkait perbaikan Kebijakan Sistem Manajemen Mutu dan Pelayanan.</p> | <p>b. Create a quality management system and service supervision program and include it in the RKAP/<i>Enterprise Risk Management</i> (ERM); and</p> <p>c. Provide suggestions related to the Quality Management System Policy and Services improvement.</p> |
| <p>7. Kewajiban pengawasan Pengelolaan Manajemen Risiko Perseroan/<i>Enterprise Risk Management</i> (ERM).</p> <p>a. Membuat mekanisme pengawasan kebijakan Manajemen Risiko Perseroan;</p> <p>b. Membuat program pengawasan Manajemen Risiko Perseroan serta memasukkannya ke dalam RKAP; dan</p> <p>c. Memberikan arahan-arahan terkait perbaikan Kebijakan Manajemen Risiko Perseroan.</p> | <p>7. Obligation of <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM) Supervision.</p> <p>a. Create a mechanism for the Company's Risk Management monitoring policy;</p> <p>b. Create <i>Enterprise Risk Management</i> supervision program and include it in the RKAP; and</p> <p>c. Provide suggestions related to the Company's Risk Management Policy improvement.</p> |
| <p>8. Kewajiban pengawasan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi Perseroan;</p> <p>a. Membuat mekanisme pengawasan kebijakan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi Perseroan;</p> <p>b. Memastikan informasi tidak terbatas laporan keuangan dan laporan tahunan yang disampaikan perseroan kepada <i>shareholders</i> maupun <i>stakeholders</i> Perseroan dilakukan secara tepat waktu, lengkap, dan akurat;</p> <p>c. Memastikan data yang disampaikan ke publik sesuai peraturan perundangan yang berlaku;</p> <p>d. Membuat program pengawasan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi Perseroan serta memasukkannya ke dalam RKAP;</p> <p>e. Memberikan arahan-arahan terkait perbaikan Kebijakan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi Perseroan.</p> | <p>8. Obligation of Supervision to Disclosure and Confidentiality of Company Information;</p> <p>a. Develop a monitoring mechanism for the policy on the Transparency and of the Company Confidentiality Information;</p> <p>b. Ensure that financial reports and annual reports submitted by the Company to shareholders and stakeholders of the Company are not limited and delivered timely, packed, and accurately;</p> <p>c. Ensure the data provided to the public are in accordance with the applicable legal regulations;</p> <p>d. Develop a program to monitor the Transparency and Confidentiality of the Company Information and adding it to the RKAP;</p> <p>e. Provide suggestions in relation to the Company's Information Transparency and Confidentiality Policy.</p> |
| <p>9. Kewajiban pengawasan Sistem Teknologi Informasi:</p> <p>a. Membuat mekanisme pengawasan kebijakan Sistem Teknologi Informasi;</p> <p>b. Membuat program pengawasan Sistem Teknologi Informasi serta memasukkannya ke dalam RKA Perseroan; dan</p> <p>c. Memberikan arahan-arahan terkait perbaikan Sistem Teknologi Informasi.</p> | <p>9. Obligation of Information Technology System supervision:</p> <p>a. Develop an Information Technology System policy monitoring mechanism;</p> <p>b. Develop an Information Technology System supervision program and adding it to the Company's RKA; and</p> <p>c. Provide directions regarding the improvement of Information Technology Systems.</p> |
| <p>10. Kewajiban pengawasan pengelolaan sumber daya manusia:</p> <p>a. Membuat mekanisme pengawasan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia;</p> <p>b. Membuat program pengawasan pengelolaan sumber daya manusia serta memasukkannya ke dalam RKAP; dan</p> | <p>10. Obligation of human capital management supervision:</p> <p>a. Develop a mechanism in monitoring human capital management policies;</p> <p>b. Develop a human capital management monitoring program and include it in the RKAP; And</p> |

- | | |
|---|--|
| <p>c. Memberikan arahan-arahan terkait perbaikan pengelolaan sumber daya manusia.</p> | <p>c. Provide directions related to improving human capital management.</p> |
| <p>11. Kewajiban pengawasan Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:</p> <p>a. Membuat mekanisme pengawasan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan;</p> <p>b. Membuat program pengawasan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan serta memasukkannya ke dalam RKAP; dan</p> <p>c. Memberikan arahan-arahan terkait perbaikan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan.</p> | <p>11. Obligation of Accounting Policy and Financial Reporting supervision:</p> <p>a. Develop a mechanism for monitoring accounting policies and financial reporting</p> <p>b. Develop a supervisory program for accounting policies and financial reporting and include it in the RKAP; and</p> <p>c. Provide directions related to improvement of accounting policies and financial reporting.</p> |
| <p>12. Kewajiban pengawasan sistem kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan:</p> <p>a. Membuat mekanisme pengawasan kebijakan sistem kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan;</p> <p>b. Membuat program pengawasan kebijakan sistem kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan serta memasukkannya ke dalam RKAP; dan</p> <p>c. Memberikan arahan-arahan terkait perbaikan kebijakan sistem kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan.</p> | <p>12. Obligation of health, safety, security and environmental system supervision:</p> <p>a. Develop a mechanism for monitoring health, safety, security and environmental systems;</p> <p>b. Develop a health, safety, security and environmental system policy monitoring program and include it in the RKAP; And</p> <p>c. Provide directions regarding the improvement of health, safety, security and environmental system policies.</p> |
| <p>13. Kewajiban pengawasan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan:</p> <p>a. Membuat mekanisme pengawasan kebijakan tata kelola Perusahaan;</p> <p>b. Membuat program pengawasan kebijakan tata kelola Perusahaan serta memasukkannya ke dalam RKAP;</p> <p>c. Memberikan arahan-arahan terkait perbaikan kebijakan tata kelola Perusahaan; dan</p> <p>d. Melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.</p> | <p>13. Obligation of Corporate Governance practices supervision:</p> <p>a. Develop a monitoring mechanism for corporate governance policies;</p> <p>b. Develop a monitoring program for corporate governance policies and include them in the RKAP;</p> <p>c. Provide directions related to the improvement of corporate governance policies; And</p> <p>d. Report his/her assets to the Corruption Eradication Commission periodically in accordance with applicable regulations.</p> |
| <p>14. Kewajiban pengawasan mengenai perubahan Lingkungan Bisnis:</p> <p>a. Membuat mekanisme pengawasan perubahan lingkungan bisnis;</p> <p>b. Membuat program pengawasan perubahan lingkungan bisnis serta memasukkannya ke dalam RKAP; dan</p> <p>c. Memberikan arahan-arahan terkait perbaikan kebijakan terkait perubahan bisnis Perseroan.</p> | <p>14. Obligation of supervision on changes in the Business Environment:</p> <p>a. Develop a monitoring mechanism for changes in the business environment;</p> <p>b. Develop a monitoring program for changes in the business environment and including it in the RKAP; And</p> <p>c. Provide directions regarding policy improvements related to changes in the Company's business.</p> |

15. Kewajiban evaluasi kinerja Direksi, Komite, dan Sekretariat Dewan Komisaris:

- a. Membuat kebijakan mekanisme evaluasi kinerja Direksi, Komite, dan Sekretariat Dewan Komisaris;
- b. Menelaah kriteria, target, dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam kontrak manajemen Direksi/ rencana kerja/anggaran dasar baik individu maupun kolegal dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham;
- c. Membuat program evaluasi kinerja Direksi, Komite, dan Sekretariat Dewan Komisaris; dan
- d. Memberikan arahan-arahan terkait hasil evaluasi kinerja Direksi, Komite, dan Sekretariat Dewan Komisaris.

16. Kewajiban terkait Etika Berusaha dan Anti-Korupsi:

- a. Mendorong terciptanya perilaku etis dan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan Pekerja Perseroan;
- b. Bersikap dan bertindak berdasarkan unsur objektivitas, profesional, dan independen demi kepentingan perseroan yang seimbang dengan kepentingan *Stakeholders*;
- c. Mengedepankan prinsip-prinsip GCG dalam berhubungan dengan mitra, kreditur/investor, pejabat/pegawai pemerintah, pelanggan;
- d. Mematuhi pedoman peraturan perundangan dan peraturan Perseroan yang berlaku;
- e. Menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- f. Memberikan arahan-arahan terkait praktik-praktik etika bisnis dan anti korupsi di Perseroan.

17. Kewajiban terkait pengadaan barang dan jasa:

- a. Membuat kebijakan dan rencana mengenai pengawasan serta pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya;
- b. Melakukan pembahasan terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya; dan
- c. Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.

15. Obligation of performance assessment of the Board of Directors, Committees and Secretariat of the Board of Commissioners:

- a. Establish a policy on the performance evaluation mechanism for the Board of Directors, Committees and Secretariat of the Board of Commissioners;
- b. Examine the criteria, targets and key performance indicators included in the Directors' management contracts/work plans/articles of association, both individual and collegial, and submit them to Shareholders;
- c. Develop a performance assessment program for the Board of Directors, Committees and Secretariat of the Board of Commissioners; and
- d. Provide directions regarding the performance evaluation results of the Board of Directors, Committees and the Secretariat of the Board of Commissioners.

16. Obligation related to Business Ethics and Anti-Corruption:

- a. Encourage the creation of ethical behavior and setting oneself as a good role model for the Board of Directors and Employees of the Company;
- b. Behave and act based on elements of objectivity, professionalism and independence for the interests of the company which is balanced with the interests of stakeholders;
- c. Prioritize GCG principles in dealings with partners, creditors/investors, government officials/employees, customers;
- d. Comply with the applicable laws and regulations of the Company;
- e. Avoid practices of corruption, collusion and nepotism;
- f. Provide directions regarding business ethics and anti-corruption practices in the Company.

17. Obligation related to procurement of goods and services:

- a. Prepare policies and plans regarding supervision and providing advice on goods and services procurement policies and their implementation;
- b. Conduct discussions on procurement policies and their implementation; And
- c. Deliver the directions to the Board of Directors regarding procurement policies and their implementation.

18. Kewajiban terkait tindakan terhadap potensi benturan kepentingan:
- a. Membuat kebijakan mengenai potensi benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
 - b. Menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap Dewan Komisaris dan menyampaikannya kepada RUPS; dan
 - c. Melaporkan kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan untuk dicatat dalam Daftar Khusus mengenai kepemilikan saham Dewan Komisaris dan/ atau keluarganya pada perusahaan dan perusahaan lain.

Board Manual Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengacu pada tata laksana kerja yang termuat di dalam *Board Manual*. Lebih lanjut, *Board Manual* merupakan pedoman yang menjelaskan tahapan aktivitas kerja Dewan Komisaris secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan secara konsisten, sehingga dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris. *Board Manual* disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

Board Manual Perseroan ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 04/CH/KOM/III/2017 dan Nomor KEP.U/KO.101/III/15/KA-2017 tentang Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 16 Maret 2017.

Board Manual memuat pedoman kerja Dewan Komisaris, dengan perincian berikut:

1. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris
2. Masa Jabatan Dewan Komisaris
3. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris
5. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
6. Hak Dewan Komisaris
7. Komisaris Independen

18. Obligation related to action against potential conflicts of interest:
- a. Prepare policies regarding potential conflicts of interest that could interfere with the implementation of the duties of the Board of Commissioners;
 - b. Sign a statement of not having a conflict of interest and state in writing matters that have the potential to cause a conflict of interest against the Board of Commissioners and submit it to the GMS; And
 - c. Report to the Company through the Corporate Secretary to be recorded in the Special Register regarding the share ownership of the Board of Commissioners and/or their families in other companies and companies.

Board Manual of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners carries out their duties and responsibilities with reference to the work procedures contained in the Board Manual. Furthermore, the Board Manual is a guideline that explains the stages of the Board of Commissioners' work activities in a structured, systematic, easy-to-understand manner, and can be implemented consistently to serve as a guideline for carrying out the duties of each member of the Board of Commissioners. The Board Manual is prepared based on the principles of corporate law, provisions of the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations, Shareholders' directives and Good Corporate Governance best practices.

The Board Manual is stipulated through the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. 04/CH/KOM/III/2017 and No. KEP.U/KO.101/III/15/KA-2017 concerning the Working Procedures of the Board of Commissioners and Directors (*Board Manual*) PT Kereta Api Indonesia (Persero) dated March 16, 2017.

The Board Manual contains work guidelines for the Board of Commissioners, with the following details:

1. Requirements and Composition of the Board of Commissioners
2. Term of Office of the Board of Commissioners
3. Capabilities Recognition and Improvement Program
4. Duties, Authorities and Obligations of the Board of Commissioners
5. Responsibilities of the Board of Commissioners
6. Board of Commissioners Rights
7. Independent Commissioner

8. Etika Jabatan
9. Rapat Dewan Komisaris
10. Komite-komite Dewan Komisaris
11. Sekretaris Dewan Komisaris

Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, pengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham, pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.

Mengacu pada peraturan yang berlaku serta *Board Manual*, komposisi Dewan Komisaris wajib memuat keberadaan Komisaris Independen paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan Dewan Komisaris. Pada posisi 31 Desember 2022, Perseroan memiliki Komisaris Independen sejumlah 5 (lima) orang atau memenuhi sebanyak 55,56% dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi jumlah Komisaris Independen sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Kriteria Penentuan dan Pernyataan Komisaris Independen

Pengungkapan kriteria dan pernyataan independensi Komisaris Independen Perseroan untuk tahun 2022 dapat dilihat di dalam tabel berikut:

Kriteria dan Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Kriteria	Said Aqil Siroj	Rochadi	Riza Primadi	Endang Tirtana	Johan Sirait
Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, pengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. / Independent Commissioner is a Member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership and/or family relationship with other Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholder or relationship with the Company, which may affect their ability to act independently.	✓	✓	✓	✓	✓
Komisaris Independen memiliki misi mendorong terciptanya iklim yang lebih obyektif dan menempatkan kesetaraan (<i>fairness</i>) di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan Perusahaan dan kepentingan <i>Stakeholder</i> sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris atau dengan kata lain mendorong diterapkannya prinsip-prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>). / The Independent Commissioner has a mission to encourage the creation of a more objective climate and place fairness among various interests, including the interests of the Company and the interests of Stakeholders as the main principle in decision making by the Board of Commissioners or in other words encouraging the implementation of the principles and practices of corporate governance (<i>Good Corporate Governance</i>).	✓	✓	✓	✓	✓

8. Job Ethics
9. Board of Commissioners Meeting
10. Committees of the Board of Commissioners
11. Secretary to the Board of Commissioners

Independent Commissioner

Independent Commissioner is member of the Board of Commissioners with no financial, management, share ownership and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or shareholders, controllers or other relationships that may affect their ability to act independently.

Referring to the applicable regulations and the Board Manual, the composition of the Board of Commissioners must include the attendance of Independent Commissioners at least 20% of the total number of the Board of Commissioners. As of December 31, 2022, the Company has 5 (five) Independent Commissioners or fulfills 55.56% of the total members of the Board of Commissioners. Thus, the Company has fulfilled the number of Independent Commissioners according to the stipulated conditions.

Determination Criteria and Statement of Independent Commissioners

Disclosure of criteria and statements of independence of the Company's Independent Commissioners for 2022 can be seen in the following table:

Determination Criteria and Statement of Independent Commissioners

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat

Sesuai ketentuan di dalam peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar dan *Board Manual*, Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan uraian kebijakan sebagai berikut:

1. Umum

- a. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
- b. Dewan Komisaris harus menetapkan tata tertib rapat Dewan Komisaris.
- c. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
- d. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- e. Mekanisme pemanggilan rapat:
 - 1) Panggilan rapat gabungan disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - 2) Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
 - 3) Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi hadir dalam rapat.
- f. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/*dissenting opinion* anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.
- g. Risalah rapat harus menggambarkan jalannya rapat. Hal ini penting untuk dapat melihat proses pengambilan keputusan dan sekaligus menjadi dokumen hukum dan alat bukti yang sah untuk menentukan akuntabilitas dari hasil suatu keputusan rapat. Untuk itu risalah rapat harus mencantumkan:
 - i. Tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan;
 - ii. Agenda yang dibahas;
 - iii. Daftar hadir yang ditandatangani oleh setiap peserta rapat;

Board of Commissioners Meeting

Meeting Policy

In accordance with the provisions in the applicable regulations, the Articles of Association and the Board Manual, the Board of Commissioners holds meetings with the following policy descriptions:

1. General

- a. Meetings of the Board of Commissioners must be held regularly, at least once a month, and in these meetings the Board of Commissioners may invite the Directors.
- b. The Board of Commissioners must determine the rules for meeting the Board of Commissioners.
- c. All decisions of the Board of Commissioners are taken at the meeting of the Board of Commissioners.
- d. Decisions can also be taken outside the meeting of the Board of Commissioners as long as all members of the Board of Commissioners agree on the method and material to be decided.
- e. Meeting invitation mechanism:
 - 1) Invitation for joint meetings shall be delivered in writing by the President Commissioner or by a member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner and delivered within no later than 3 (three) days before the meeting is held or in a shorter time if it is urgent, with take into account the date of the call and no meeting.
 - 2) Invitation for meeting as referred to in letter must state the agenda, date, time and place of the meeting.
 - 3) Invitation for the meeting is not required if all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are present at the meeting.
- f. In each meeting of the Board of Commissioners, minutes of the meeting must be made containing matters discussed (including dissenting opinions of members of the Board of Commissioners, if any) and matters decided.
- g. The minutes of the meeting must describe the course of the meeting. This is important to be able to see the decision-making process and at the same time become a legal document and valid evidence to determine accountability for the results of a meeting decision. For this reason, the minutes of meeting must include:
 - i. Place, date and time of the meeting;
 - ii. Discussion agenda;
 - iii. Attendance list signed by each meeting participant;

- iv. Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat termasuk *dissenting opinion*;
 - v. Siapa yang mengemukakan pendapat;
 - vi. Proses pengambilan keputusan;
 - vii. Keputusan yang diambil; dan
 - viii. Pernyataan keberatan terhadap keputusan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat.
 - h. Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
 - i. Asli risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.
 - j. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.
 - k. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris agar dan/atau dapat mengundang Direksi.
 - l. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
 - m. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tempat rapat.
 - n. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal waktu dan tempat rapat.
 - o. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.
 - p. Rapat Dewan Komsaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.
 - q. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- iv. Various opinions contained in the meeting including dissenting opinion;
 - v. Parties expressing their opinions;
 - vi. Decision making process;
 - vii. Decisions taken; and
 - viii. Statement of objection to the decision of the meeting if there is no unanimity of opinion.
 - h. The minutes of the meeting are signed by the Chairperson of the Meeting and all members of the Board of Commissioners present at the meeting.
 - i. The original minutes of meetings of the Board of Commissioners are submitted to the Board of Directors for safekeeping and maintenance, while the Board of Commissioners keeps a copy.
 - j. Meetings of the Board of Commissioners are considered valid if they are held at the domicile of the Company or in other places within the territory of the Republic of Indonesia.
 - k. The Board of Commissioners holds a meeting at least once a month, in that meeting the Board of Commissioners invites and/or invites the Board of Directors.
 - l. The Board of Commissioners may hold meetings at any time at the request of 1 (one) or several members of the Board of Commissioners, at the request of the Board of Directors, or at a written request from 1 (one) or several Shareholders representing at least 1/10 (one tenth) of the total shares with voting rights, by specifying the matters to be discussed.
 - m. Invitation for the Board of Commissioners meeting shall be delivered in writing by the President Commissioner or by a member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner and delivered no later than 3 (three) days before the meeting is held or in a shorter time if in an urgent situation, without taking into account invitation date and meeting place.
 - n. The invitation for the meeting must state the event, date and place of the meeting.
 - o. Such invitation is not required if all members of the Board of Commissioners are present at the meeting.
 - p. Meeting of the Board of Commissioners is valid and has the right to make binding decisions if attended or represented by 1/2 (one half) of the members of the Board of Commissioners.
 - q. In other agendas, the Board of Commissioners meeting is not entitled to make a decision unless all members of the Board of Commissioners or their authorized representatives are present and approve the addition of the agenda of the meeting.

- r. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh satu anggota Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan ini.
- s. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- t. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
- u. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.
- v. Dalam hal anggota Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.
- w. Semua keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- x. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak.
- y. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
- z. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.
 - 1) Suara blangko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.
 - 2) Dalam hal usulan lebih dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah yang dikeluarkan.
 - 3) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- r. A member of the Board of Commissioners may be represented at a meeting by only one other member of the Board of Commissioners based on written authorization given specifically for this purpose.
- s. All meetings of the Board of Commissioners are chaired by the President Commissioner.
- t. If the President Commissioner is absent, the Board of Commissioners meeting shall be chaired by another Commissioner appointed by the President Commissioner.
- u. If the President Commissioner does not appoint a chairman, the Board of Commissioners Member with the longest term of office as a member of the Board of Commissioners acts as chairman of the Board of Commissioners meeting.
- v. In the event that the member of the Board of Commissioners who is the longest serving as a member of the Board of Commissioners is more than one person, the oldest member of the Board of Commissioners of the age shall act as leader of the meeting.
- w. All decisions of the Board of Commissioners' meetings are taken by deliberation to reach a consensus.
- x. If consensus is not reached through consensus, then the decision of the Board of Commissioners meeting is taken with the most votes.
- y. Each member of the Board of Commissioners has the right to cast 1(one) vote plus 1(one) vote for the member of the Board of Commissioners he represents.
- z. If the number of votes in agreement and disagreement is the same, then the decision of the meeting is the same as the opinion of the leader of the meeting, with due regard to the provisions regarding accountability except regarding oneself, the decision making of the meeting is carried out by a closed election
 - 1) Blank votes (abstain) are considered to approve the results of the meeting's decision.
 - 2) In the event of two or more alternative proposals and the results of the ballot have not yet received an alternative with more than 1/2 (one half) of the total votes cast, a re-election of two proposals which received more votes than 1/2 (one-half) part of the amount issued.
 - 3) Invalid votes are considered to be non-existent and are not counted in determining the number of votes cast in meetings.

- 4) Jumlah rapat Dewan Komisaris dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN.

2. Jenis Rapat

- a. Rapat Internal Dewan Komisaris
- 1) Rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
 - 2) Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
 - 3) Rapat Dewan Komisaris dan komite-komite Dewan Komisaris merupakan Rapat Dewan Komisaris dalam rangka membahas laporan-laporan periodik komite.
- b. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
- Rapat gabungan merupakan rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi dan/atau dapat juga dilakukan atas usulan Direksi berikut agenda yang akan dibahas dalam rapat.

3. Mekanisme Rapat

- a. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.
- b. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tempat rapat.
- c. Panggilan rapat harus mencantumkan agenda/acara, tanggal waktu dan tempat rapat.
- d. Agenda rapat mengacu pada dan menggunakan program kerja tahunan Dewan Komisaris yang telah disusun dan disahkan sebelumnya oleh Dewan Komisaris.

- 4) The number of meetings of the Board of Commissioners and the attendance of each member of the Board of Commissioners must be included in the SOE Annual Report.

2. Meeting Type

- a. Board of Commissioners Internal Meeting
- 1) Meetings of the Board of Commissioners must be held regularly, at least once a month, and in these meetings the Board of Commissioners may invite the Directors.
 - 2) The Board of Commissioners may hold meetings at any time at the request of 1 (one) or several members of the Board of Commissioners, at the request of the Board of Directors, or at the written request of 1 (one) or several Shareholders representing at least 1/10 (one tenth) of the total shares with voting rights, by stating the matters to be discussed.
 - 3) The meeting of the Board of Commissioners and the committees of the Board of Commissioners is a meeting of the Board of Commissioners in order to discuss periodic committee reports.
- b. Meetings of the Board of Commissioners and Directors
- A joint meeting is a meeting of the Board of Commissioners that invites the Directors and/or can also be held at the suggestion of the Directors along with the agenda to be discussed at the meeting.

3. Meeting Mechanism

- a. Meetings of the Board of Commissioners are held at the domicile of the Company or in other places within the territory of the Republic of Indonesia.
- b. Invitations for the meeting of the Board of Commissioners are submitted in writing by the Main Commissioner or by a member of the Board of Commissioners appointed by the Main Commissioner and submitted no later than 3 (three) days before the meeting is held or in a shorter time if it is urgent, excluding the date of the summons and meeting place.
- c. The invitations for the meeting must include the agenda/event, date, time and place of the meeting.
- d. The meeting agenda refers to and uses the annual work program of the Board of Commissioners which has been previously prepared and approved by the Board of Commissioners.

- e. Sebelum rapat dilangsungkan, Sekretaris Dewan Komisaris terlebih dahulu mengedarkan agenda rapat dan/atau bahan rapat untuk mendapatkan masukan dari para Anggota Dewan Komisaris mengenai agenda tersebut. Masukan tersebut dapat berupa penambahan/ pengurangan atau penajaman agenda rapat.
 - f. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengusulkan agenda rapat yang akan dilaksanakan.
 - g. Jika rapat tersebut mengundang pihak lain, Sekretaris Dewan Komisaris bertugas untuk membuat surat undangan kepada pihak yang dimaksud. Dalam hal pihak lain tersebut berasal dari bawah Direksi, maka untuk maksud tersebut harus sepengetahuan Direksi.
 - h. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh satu anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan ini.
 - i. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
 - j. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
 - k. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.
 - l. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.
- e. Prior to the meeting, the Secretary to the Board of Commissioners first circulates the meeting agenda and/or meeting materials to obtain input from Members of the Board of Commissioners regarding the agenda. This input can be in the form of adding/ removing or sharpening the meeting agenda.
 - f. Each Member of the Board of Commissioners has the right to propose the agenda for the meeting to be held.
 - g. If the meeting invites other parties, the Secretary to the Board of Commissioners is tasked with making an invitation letter to the party in question. In the event that the other party comes from under the Board of Directors, then for this purpose the knowledge of the Board of Directors must be known.
 - h. A member of the Board of Commissioners can be represented at a meeting only by one other member of the Board of Commissioners based on a written power of attorney specifically granted for this purpose.
 - i. All meetings of the Board of Commissioners are chaired by the President Commissioner.
 - j. In the event that the President Commissioner is absent or unable to attend, the meeting of the Board of Commissioners is chaired by another Commissioner appointed by the Main Commissioner.
 - k. In the event that the President Commissioner does not make an appointment, then the member of the Commissioner who has served the longest as a member of the Board of Commissioners acts as chairman of the meeting of the Board of Commissioners.
 - l. In the event that the member of the Board of Commissioners who has served the longest as a member of the Board of Commissioners is more than one person, then the oldest member of the Board of Commissioners in age acts as chairman of the meeting.

4. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- a. Semua keputusan Rapat Dewan Komisaris harus berdasarkan itikad baik, pertimbangan rasional dan telah melalui telaah atau kajian yang mendalam terhadap berbagai hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara independen oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab atas keputusan Dewan Komisaris.

4. Decision Making Mechanism

- a. All decisions of the Board of Commissioners Meetings must be based on good faith, rational considerations and have gone through an in-depth review or study of various relevant matters, sufficient information and free from conflicts of interest and made independently by each member of the Board of Commissioners.
- b. Each member of the Board of Commissioners is responsible for the decisions of the Board of Commissioners.

- c. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui Rapat Dewan Komisaris.
 - d. Semua keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
 - e. Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
 - f. Untuk menjaga independensi dan objektivitas, setiap anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak ikut serta dalam pemberian suara untuk pengambilan keputusan. Hal tersebut harus dicatat dalam risalah rapat.
 - g. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.
 - h. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.
 - i. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.
 - j. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
 - k. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - l. Suara blangko dan tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
 - m. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan 1 (satu) alternatif dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) alternatif yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah 1 (satu) alternatif memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- c. Decision making by the Board of Commissioners is carried out through a Board of Commissioners meeting.
 - d. All decisions of the Board of Commissioners meetings are taken by deliberation to reach a consensus.
 - e. All decisions in the Board of Commissioners Meetings are taken by deliberation to reach a consensus.
 - f. To maintain independence and objectivity, each member of the Board of Commissioners who has a conflict of interest is required not to participate in voting for decision-making. This must be recorded in the minutes of the meeting.
 - g. Meetings of the Board of Commissioners are valid and have the right to make binding decisions if attended or represented by $\frac{1}{2}$ (one half) of the members of the Board of Commissioners.
 - h. If a consensus is not reached through deliberation, then the decision of the Board of Commissioners Meeting is taken by voting in favor of more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the number of valid votes cast at the meeting.
 - i. If the number of votes agreeing and disagreeing is the same, then the decision of the meeting is the same as the opinion of the chairman of the meeting, with due observance of the provisions regarding accountability except for individuals, the decision making of the meeting is carried out by means of a closed election.
 - j. Each member of the Board of Commissioners has the right to cast 1(one)vote plus 1(one)vote for the member of the Board of Commissioners he represents.
 - k. Voting regarding individuals is carried out by means of closed ballots without a signature, while voting on other matters is carried out verbally unless the Chairperson of the Board of Commissioners meeting determines otherwise without any objections based on a majority vote of those present.
 - l. Blank and invalid votes are deemed non-existent and are not counted in determining the number of votes cast at the meeting.
 - m. In the event that there are more than 2 (two) alternatives proposed and the voting results have not yet obtained 1(one)alternative with votes of more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total votes cast, then a re-election shall be carried out for the 2 (two) alternatives that received the most votes so that one (1) alternative obtains a vote of more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total votes cast.

- n. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- o. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.
- p. Keputusan-keputusan yang menyangkut aspek-aspek strategis harus dilakukan melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris. Aspek-aspek strategis tersebut antara lain meliputi semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris serta semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris.
- q. Keputusan rapat yang diambil dalam forum rapat internal Dewan Komisaris dan/atau rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, diatur sebagai berikut:
- 1) Menyampaikan surat usulan asli yang diajukan oleh Direksi untuk mendapatkan keputusan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris dan/atau Komisaris Utama. Copy surat usulan disampaikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris kepada Anggota Dewan Komisaris yang membidangi materi/lingkup hal yang diusulkan;
 - 2) Dalam hal usulan Direksi bersifat "rahasia" dan terbatas, surat usulan disampaikan kepada Komisaris Utama;
 - 3) Waktu penyampaian usulan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jadwal rapat internal Dewan Komisaris untuk memberikan waktu yang cukup bagi Dewan Komisaris untuk mempelajari dan mengkaji usulan dan mengagendakan, membahas usulan dan menetapkan keputusan Dewan Komisaris;
 - 4) Dalam hal tertentu terhadap suatu usulan yang bersifat strategis dan berpotensi berdampak besar/signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, saran/rekomendasi/nasihat yang diputuskan dalam rapat internal Dewan Komisaris disampaikan dan dibahas kembali dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi;
- n. Invalid votes are considered absent and are not counted in determining the number of votes cast at the meeting.
- o. If the number of votes agreeing and disagreeing is the same, then the decision of the meeting is the same as the opinion of the chairman of the meeting, with due observance of the provisions regarding accountability except for individuals, the decision making of the meeting is carried out by means of a closed election.
- p. Decisions concerning strategic aspects must be made through the Board of Commissioners meeting mechanism. These strategic aspects include all actions of the Board of Directors which must obtain the approval of the GMS after obtaining a written response from the Board of Commissioners as well as all actions of the Directors which must obtain written approval from the Board of Commissioners.
- q. Meeting decisions taken in the internal meeting forums of the Board of Commissioners and/or joint meetings of the Board of Commissioners and Directors, are regulated as follows:
- 1) Delivering the original proposal letter submitted by the Board of Directors to obtain the decision of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners and/or Main Commissioner. Copy of the proposal letter submitted by the Secretary of the Board of Commissioners to the Member of the Board of Commissioners in charge of the material/ scope of the matter being proposed;
 - 2) In the event that the Board of Directors proposal is "confidential" and limited, the proposal letter is submitted to the President Commissioner;
 - 3) The time for submission of proposals is no later than 1 (one) month prior to the schedule of the internal meeting of the Board of Commissioners to provide sufficient time for the Board of Commissioners to study and review proposals and schedule, discuss proposals and determine decisions of the Board of Commissioners;
 - 4) In certain cases for proposal that is strategic and has the potential to have a major/significant impact on the sustainability of the Company's business, suggestions/recommendations/advice that are decided on in the internal meeting of the Board of Commissioners are conveyed and discussed again in the joint meeting of the Board of Commissioners and Directors;

- 5) Dalam proses untuk mengambil keputusan, Dewan Komisaris dapat dibuat atau menugasi Komite yang ada di bawah Dewan Komisaris untuk melakukan pemantauan, pengumpulan materi/dokumen/informasi yang diperlukan, serta untuk melakukan kajian dan evaluasi dan saran/masukan dalam laporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris;
 - 6) Dalam hal usulan yang diajukan Direksi memerlukan keputusan dan penetapan yang segera/mendesak (dalam waktu kurang dari satu bulan) dari Dewan Komisaris atau bersifat rahasia dan terbatas sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan rapat khusus Dewan Komisaris yang hasil keputusan rapat tersebut disampaikan kepada Direksi dalam bentuk surat Dewan Komisaris. Di mana surat tersebut mencantumkan rujukan atas hasil Rapat Dewan Komisaris tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh Komisaris Utama dan sekurang-kurangnya diketahui/ diparaf oleh 1 (satu) Anggota Dewan Komisaris yang menghadiri rapat Dewan Komisaris yang dimaksud. Dalam Hal Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama tidak dapat menandatangani surat tersebut, maka 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dapat menandatangani surat tersebut. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mendapatkan salinan surat tersebut;
 - 7) Seluruh anggota Dewan Komisaris dianggap menyetujui Surat Dewan Komisaris yang diterbitkan berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris;
 - 8) Surat Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi, disampaikan atau diberitahukan kepada Direksi dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat Dewan Komisaris ditandatangani, disampaikan/ dikomunikasikan kepada Direksi; dan
 - b. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat Dewan Komisaris ditandatangani, disampaikan secara tertulis kepada Direksi,
- 5) In the process of making decisions, the Board of Commissioners may create or assign Committees under the Board of Commissioners to carry out monitoring, collect the necessary materials/documents/information, as well as to conduct studies and evaluations and suggestions/input in reports submitted to the Board of Commissioners;
 - 6) In the event that the proposal submitted by the Board of Directors requires an immediate/urgent decision and stipulation (within less than one month) from the Board of Commissioners or is confidential and limited as referred to in number 2), the Board of Commissioners may hold a special meeting of the Board of Commissioners where the resolution of the meeting it is submitted to the Board of Directors in the form of a letter from the Board of Commissioners. Where the letter includes references to the results of the Board of Commissioners' Meeting. The letter is signed by the Main Commissioner and at least known/initialized by 1 (one) member of the Board of Commissioners who attended the intended meeting of the Board of Commissioners. In the event that the Main Commissioner or a member of the Board of Commissioners appointed by the Main Commissioner cannot sign the letter, then 2 (two) members of the Board of Commissioners can sign the letter. Each member of the Board of Commissioners is required to obtain a copy of the letter;
 - 7) All members of the Board of Commissioners are deemed to have approved the Letter of the Board of Commissioners issued based on the decision of the meeting of the Board of Commissioners;
 - 8) Letter of the Board of Commissioners regarding the proposal of the Board of Directors, submitted or notified to the Board of Directors with the following arrangements:
 - a. No later than 7 (seven) working days after the letter from the Board of Commissioners is signed, submitted/communicated to the Board of Directors; And
 - b. No later than 10 (ten) working days after the letter from the Board of Commissioners is signed, submitted in writing to the Board of Directors,

- 9) Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat;
- 10) Jumlah rapat Dewan Komisaris dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan.

5. Mekanisme Pengambilan Keputusan Secara Sirkuler

Dewan Komisaris mengakui bentuk rapat tanpa melalui kehadiran fisik, atau disebut Rapat Sirkuler, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keputusan yang diambil dalam bentuk Rapat Sirkuler bukanlah keputusan yang bersifat strategis;
- b. Bukan merupakan sebuah keputusan atas suatu tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris serta semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris;
- c. Permasalahan telah diketahui sebelumnya/pernah dibahas;
- d. Keputusan yang diambil disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris; dan
- e. Tanggal keputusan secara sirkuler yang berlaku adalah tanggal anggota Dewan Komisaris yang terakhir menandatangani keputusan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

6. Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*)

Perbedaan pendapat diatur sebagai berikut:

- a. Perbedaan pendapat yang terjadi dimasukkan dalam Keputusan Rapat, dan Anggota Dewan Komisaris yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut.
- b. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh Anggota Dewan Komisaris tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat.

- 9) In other agenda items, the Board of Commissioners meeting has no right to make decisions unless all members of the Board of Commissioners or their authorized representatives are present and approve the addition of meeting agendas;
- 10) The number of meetings of the Board of Commissioners and the number of attendance of each member of the Board of Commissioners must be included in the Company's Annual Report.

5. Circular Decision Making Mechanism

The Board of Commissioners recognizes the form of meeting without going through a physical attendance, called Circular Meeting, with the following conditions:

- a. Decisions taken in the form of Circular Meetings are not strategic decisions;
- b. Not a decision on an action of the Board of Directors that requires the approval of the GMS after obtaining a written response from the Board of Commissioners and all actions of the Board of Directors that must obtain written approval from the Board of Commissioners;
- c. The issue has been known before/has been discussed;
- d. The decisions taken are approved in writing and signed by all Members of the Board of Commissioners; And
- e. The valid circular resolution date is the date of the last member of the Board of Commissioners to sign the resolution.

Decisions taken in this method have the same power as decisions taken legally at a meeting of the Board of Commissioners.

6. Dissenting Opinion

Dissenting opinion is regulated as follows:

- a. Dissenting opinion that occur are included in the Meeting Resolutions, and Members of the Board of Commissioners with dissenting opinions must disclose the reasons for the differences of opinion regarding the results of the decision.
- b. Dissenting opinion does not mean giving the right to the member of the Board of Commissioners concerned not to carry out the resolutions of the meeting. Even though there are differences of opinion, all Members of the Board of Commissioners are still obliged to follow and implement the resolutions of the meeting.

- c. Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali Anggota Dewan Komisaris yang melakukan *dissenting opinion* dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- d. Perbedaan pendapat yang dicantumkan di dalam keputusan dan risalah rapat dapat menjadi bukti bahwa Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan telah melakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut dengan tidak menyetujui hasil keputusan rapat. Hal ini berarti bahwa Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat terbebas dari tuntutan atas timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut sebagai hasil pelaksanaan keputusan rapat.

7. Rapat Melalui Elektronik

- a. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan dengan cara konferensi antara Anggota Dewan Komisaris yang berada di tempat yang berbeda, melalui telepon konferensi, video konferensi, atau peralatan komunikasi lainnya yang memungkinkan setiap Anggota Rapat Dewan Komisaris dapat saling mendengar dan berpartisipasi dalam rapat.
- b. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang ikut serta dianggap hadir dalam Rapat untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum kehadiran dan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- c. Tempat di mana Ketua Rapat ikut serta dianggap sebagai tempat dilangsungkannya Rapat Dewan Komisaris.
- d. Risalah Rapat harus diedarkan serta ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Seluruh Anggota Dewan Komisaris yang ikut serta, sesuai dengan tanggal Rapat dilaksanakan.
- e. Penggunaan media elektronik dalam penyelenggaraan Rapat ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan mengacu pada perundang-undangan dan peraturan perseroan tentang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku.

- c. The Board of Commissioners is jointly and severally responsible personally if proven guilty or negligent in carrying out their duties for the interests and business of the Company, unless a member of the Board of Commissioners who has a dissenting opinion can prove that he has taken action to prevent the loss from arising or continuing.
- d. Dissenting opinion included in the resolutions and minutes of the meeting may serve as evidence that the member of the Board of Commissioners concerned has taken action to prevent the loss from arising or continuing by disapproving of the resolutions of the meeting. This means that the member of the Board of Commissioners concerned can be released from claims for the loss arising or continuing as a result of implementing the decision of the meeting.

7. Electronic Meeting

- a. Meetings of the Board of Commissioners can be held by means of a conference between Members of the Board of Commissioners who are in different places, by telephone conference, video conference, or other communication equipment that allows each Meeting Member of the Board of Commissioners to hear each other and participate in the meeting.
- b. Each member of the Board of Commissioners who participates is considered present at the meeting to determine the fulfillment of the attendance quorum requirements and resolutions of the meeting of the Board of Commissioners.
- c. The place where the Chairman of the Meeting participates is considered as the place where the Meeting of the Board of Commissioners is held.
- d. The minutes of the meeting must be circulated and signed by the chairman of the meeting and all participating members of the Board of Commissioners, according to the date the meeting was held.
- e. The use of electronic media in organizing this Meeting is determined by the Board of Commissioners with reference to applicable laws and company regulations regarding electronic information and transactions.

8. Prosedur Penyusunan Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris

Penyusunan risalah Rapat Internal Dewan Komisaris dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan atau Ketua Rapat bertanggung jawab untuk membuat, mengadministrasikan serta mendistribusikan risalah Rapat Dewan Komisaris.
- b. Dalam hal Rapat Dewan Komisaris tidak diikuti Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama, risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dari antara mereka yang hadir.
- c. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh pimpinan Rapat Dewan Komisaris dan oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- d. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.
- e. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rapat dilaksanakan.
- f. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau yang diwakili harus menyampaikan keberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas risalah rapat Dewan Komisaris tersebut.
- g. Perbaikan risalah Rapat Dewan Komisaris dimungkinkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman.
- h. Jika keberatan dan atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka disimpulkan tidak ada keberatan dan atau perbaikan terhadap risalah Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- i. Risalah asli rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.

8. Procedure for preparing minutes of internal meeting of the Board of Commissioners

The minutes of the Board of Commissioners Internal Meetings are prepared using the following procedure:

- a. The Secretary to the Board of Commissioners or other officials appointed by the President Commissioner and or the Chairman of the Meeting is responsible for preparing, administering and distributing the minutes of the Board of Commissioners' Meetings.
- b. In the event that the Board of Commissioners' Meeting is not attended by the Secretary to the Board of Commissioners or other officials appointed by the Main Commissioner, the minutes of the Board of Commissioners Meeting are prepared by a Member of the Board of Commissioners appointed from among those present.
- c. The minutes of the Board of Commissioners meeting must be signed by the chairman of the Board of Commissioners' meeting and by all members of the Board of Commissioners present.
- d. Each member of the Board of Commissioners is entitled to receive a copy of the minutes of the Board of Commissioners' meeting, even if the person concerned is not present at the meeting.
- e. The minutes of the Board of Commissioners' meeting must be submitted to all members of the Board of Commissioners no later than 7 (seven) days after the meeting is held.
- f. Each Member of the Board of Commissioners who is present and/or who is represented must convey his objections and/or suggestions for improvement, if any, to the minutes of the meeting of the Board of Commissioners.
- g. Corrections to the minutes of the Board of Commissioners' Meeting are possible within 14 (fourteen) days from the date of delivery.
- h. If objections and or suggestions for improvements are not accepted within this time period, it is concluded that there are no objections and or corrections to the minutes of the relevant Board of Commissioners' meeting.
- i. The original minutes of meetings of the Board of Commissioners are submitted to the Board of Directors for safekeeping and maintenance, while the Board of Commissioners keeps a copy.

Agenda, Tanggal, dan Peserta Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2022

Pada tahun 2022, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat internal sejumlah 23 (dua puluh tiga) kali. Jumlah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Dewan Komisaris telah memenuhi jumlah penyelenggaraan rapat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan agenda, tanggal pelaksanaan, serta peserta rapat internal Dewan Komisaris di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Agenda, Tanggal, dan Peserta Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	Kehadiran / Attendance	Alasan Ketidakhadiran / Reason of Absence
1	5 Januari 2022 / January 5, 2022	Pembahasan Pending Matters Tugas Dewan Komisaris / Discussion of Pending Matters of the Board of Commissioners Duties	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Rochadi Cris Kuntadi Freddy Harris Endang Tirtana Diah Natalisa Chairul Anwar 	88%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> Riza Primadi
2	12 Januari 2022 / January 12, 2022	Paparan Program Kerja Tahunan SPI oleh UI / Presentation of the SPI Annual Work Program by UI	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Cris Kuntadi Freddy Harris Diah Natalisa Endang Tirtana 	88%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> Chairul Anwar
3	26 Januari 2022 / January 26, 2022	Laporan Komite terkait Kinerja Unaudited 2021 / Committee Report on Unaudited Performance 2021	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Cris Kuntadi Freddy Harris Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana 	100%	-
4	9 Februari 2022 / February 9, 2022	Laporan Telaah Komite Dewan Komisaris / Board of Commissioners Committee Review Report	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Cris Kuntadi Freddy Harris Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana 	100%	-
5	2 Maret 2022 / March 2, 2022	Progres Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 dan Persiapan Kick Off ERM / Progress of Audit of Financial Statements for Fiscal Year 2021 and Preparation for ERM Kick Off	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Cris Kuntadi Freddy Harris Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana 	100%	-
6	9 Maret 2022 / March 9, 2022	a. Pembahasan Kinerja Laporan Manajemen Audited 2021 / Discussion on the Performance of the 2021 Audited Management Report b. Penilaian Akhlak Direksi Eksisting / Existing Board of Directors Akhlak Assessment	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Cris Kuntadi Freddy Harris Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana 	100%	-

Agenda, Date, and Participants of the Internal Meeting of the Board of Commissioners in 2022

In 2022, the Board of Commissioners held 23 (twenty three) internal meetings. This number also shows that the Board of Commissioners has complied with the number of meetings held in accordance with applicable regulations.

Disclosure of the agenda, implementation date, and participants of the Board of Commissioners' internal meetings in 2022 are as follows:

Agenda, Date, and Participants of the Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	Kehadiran / Attendance	Alasan Ketidakhadiran / Reason of Absence
7	30 Maret 2022 / March 30, 2022	a. Usulan Konversi SHL Raillink / Raillink SHL Conversion Proposal b. Usulan KAP Tahun Buku 2022 / KAP Proposal for the 2022 Fiscal Year c. Usulan Remunerasi Tahun Buku 2022 / Proposal of Remuneration for Fiscal Year 2022	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Cris Kuntadi Freddy Harris Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana 	100%	-
8	20 April 2022 / April 20, 2022	a. Pembahasan terkait Work Load Analysis / Discussion on Work Load Analysis b. Pembahasan Capaian Program Kerja Dekom 2022 / Discussion of Achievements of the 2022 Board of Commissioners Work Program	<ul style="list-style-type: none"> Riza Primadi Rochadi Cris Kuntadi Chairul Anwar Endang Tirtana Freddy Harris 	75%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Diah Natalisa
9	11 Mei 2022 / May 11, 2022	a. Usulan Perubahan Struktur Organisasi PT KAI (Persero) / Proposal of Changes to the Organizational Structure of PT KAI (Persero) b. Pembahasan Rencana Kunjungan Komite Pemantau Risiko, Pelatihan Dewan Komisaris dan Pending Matters / Discussion of the Risk Monitoring Committee Visit Plan, Board of Commissioners Training and Pending Matters	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Cris Kuntadi Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana 	88%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> Freddy Harris
10	25 Mei 2022 / May 25, 2022	Pembahasan Pending Matters Tugas Dewan Komisaris / Discussion of Pending Matters of the Board of Commissioners Duties	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Cris Kuntadi Freddy Harris Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana 	100%	-
11	15 Juni 2022 / June 15, 2022	a. Progres Persetujuan KPI Individu Direksi / Board of Directors Individual KPI Approval Progress b. Laporan Triwulan Pengawasan Intern / Internal Control Quarterly Report	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Cris Kuntadi Freddy Harris Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana 	100%	-
12	29 Juni 2022 / June 29, 2022	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris / Coordination of the implementation of the duties of the Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Cris Kuntadi Freddy Harris Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana 	100%	-
13	6 Juli 2022 / July 6, 2022	Presentasi Lembaga Survei KedaiKOPI terkait Riset Intercity Passenger Station Manggarai vs Gambir / Presentation by the KedaiKOPI Survey Institute on the Manggarai vs Gambir Intercity Passenger Station Research	<ul style="list-style-type: none"> Riza Primadi Rochadi Cris Kuntadi Freddy Harris Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana 	88%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj
14	13 Juli 2022 / July 13, 2022	Presentasi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik FISIP Universitas Indonesia terkait Riset Intercity Passenger Station Manggarai vs Gambir / Presentation by the Institute for Socio-Political Research and Development of FISIP, Universitas Indonesia on the Manggarai vs Gambir Intercity Passenger Station Research	<ul style="list-style-type: none"> Riza Primadi Rochadi Endang Tirtana Chairul Anwar 	50%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Cris Kuntadi Diah Natalisa Freddy Harris
15	20 Juli 2022 / July 20, 2022	Presentasi Alvara Research Center terkait Riset Intercity Passenger Station Manggarai vs Gambir / Presentation by Alvara Research Center on the Manggarai vs Gambir Intercity Passenger Station Research	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Cris Kuntadi Diah Natalisa Endang Tirtana 	75%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> Chairul Anwar Freddy Harris

No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants	Kehadiran / Attendance	Alasan Ketidakhadiran / Reason of Absence
16	27 Juli 2022 / July 27, 2022	a. Finalisasi Rencana Kajian Manggarai / Finalization of the Manggarai Study Plan b. Rencana Pengisian Anggota KPMR / KPMR Member Filling Plan c. Lain-lain / Others	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Diah Natalisa Chairul Anwar Freddy Harris Endang Tirtana Cris Kuntadi 	88%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> Rochadi
17	3 Agustus 2022 / August 3, 2022	a. Telaahan Komite tentang Kinerja Semester I 2022 / Committee Review on Performance of the 1st Half of 2022 b. Pembahasan lanjutan seleksi anggota KPMR / b. Follow-up discussion on the selection of KPMR members	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Freddy Harris Riza Primadi Rochadi Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana 	88%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> Cris Kuntadi
18	24 Agustus 2022 / August 24, 2022	Pembagian Tugas Dewan Komisaris dan Tindak lanjut seleksi anggota KPMR / Distribution of duties for the Board of Commissioners and follow-up to the selection of KPMR members	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Endang Tirtana Diah Natalisa Chairul Anwar Johan Sirait Sri Paduka Mangkoenagoro X 	100%	-
19	7 September 2022 / September 7, 2022	a. Tindak Lanjut Interview Calon Anggota KPMR / Follow-up Interview of Prospective KPMR Members b. Laporan Tindak Lanjut Monitoring ERM / ERM Monitoring Follow Up Report c. Lain-lain / Others	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Endang Tirtana Diah Natalisa Chairul Anwar Johan Sirait Sri Paduka Mangkoenagoro X 	100%	-
20	12 Oktober 2022 / October 12, 2022	a. Laporan Sosialisasi Permen BUMN tentang Manajemen Risiko oleh Komite PMR. / Dissemination Report of the Minister of State-Owned Enterprises on Risk Management by the PMR Committee. b. Pembahasan Kinerja UI dan USQ Triwulan III 2022 serta laporan terkait CGPI oleh Komite Audit / Discussion on UI and USQ Performance Q3 2022 and reports related to CGPI by the Audit Committee c. Pembahasan Salary Survey PT KAI (Persero) dan Transfer of Knowledge di KCJB oleh Komite NR / Discussion of Salary Survey of PT KAI (Persero) and Transfer of Knowledge at KCJB by the NR Committee	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Endang Tirtana Diah Natalisa Chairul Anwar Johan Sirait Sri Paduka Mangkoenagoro X Mohamad Risal Wasal 	89%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> Rochadi
21	26 Oktober 2022 / October 26, 2022	a. Surat Direksi Imbal Jasa KAP / Letter of Board of Directors Fee for Services of KAP b. Surat Direksi Setoran Modal MITJ / MITJ Capital Deposit Board of Directors Letter c. Kinerja Triwulan TW III 2022 / Q3 2022 Quarterly Performance	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Endang Tirtana Diah Natalisa Chairul Anwar Johan Sirait Sri Paduka Mangkoenagoro X Mohamad Risal Wasal 	100%	-
22	9 November 2022 / November 9, 2022	a. Pembahasan Surat Usulan Pengurus Anak Perusahaan / Discussion of Subsidiary Management Proposal Letter b. Rencana Kerja Dekom 2023 / 2023 BoC Work Plan c. Alat Ukur AKHLAK / AKHLAK Measuring Tool	<ul style="list-style-type: none"> Riza Primadi Rochadi Chairul Anwar Johan Sirait Sri Paduka Mangkoenagoro X Mohamad Risal Wasal Diah Natalisa 	78%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Endang Tirtana
23	14 Desember 2022	a. Pembahasan Surat Usulan Setoran Modal MITJ / Discussion of the MITJ Capital Deposit Proposal b. Lain-lain / Others	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana Sri Paduka Mangkoenagoro X Mohamad Risal Wasal 	89%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> Johan Sirait (ada agenda lain / has other agenda)

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Di tahun 2022, Dewan Komisaris mengikuti sejumlah 21 (dua puluh satu) kali rapat gabungan bersama Direksi. Agenda, tanggal penyelenggaraan, dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi adalah sebagai berikut:

Agenda, Tanggal, Peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi

No.	Tanggal Rapat / Meeting Date	Agenda	Peserta Rapat (Dewan Komisaris) / Meeting Participants (Board of Commissioners)	Kehadiran / Attendance	Keterangan / Description
1	5 Januari 2022 / January 5, 2022	Pembahasan Progres Transformasi Digital PT KAI (Persero) / PT KAI (Persero) Digital Transformation Progress Discussion	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana Cris Kuntadi Freddy Harris 	88%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> Johan Sirait
2	26 Januari 2022 / January 26, 2022	Pembahasan Kinerja Unaudited 2021 / Unaudited 2021 Performance Discussion	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana 	50%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> Riza Primadi Rochadi Cris Kuntadi Freddy Harris
3	23 Februari 2022 / February 23, 2022	Pembahasan Surat SPKA / SPKA Letter Discussion	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana Cris Kuntadi Freddy Harris 	100%	-
4	9 Maret 2022 / March 9, 2022	Pembahasan Kinerja LM Audited 2021 / Discussion of 2021 Performance of Audited Management Report	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana Cris Kuntadi Freddy Harris 	100%	-
5	6 April 2022 / April 6, 2022	Pembahasan Rencana Penerbitan Obligasi Tahun 2022 / Discussion of the 2022 Bond Issuance Plan	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana Cris Kuntadi Freddy Harris 	100%	-
6	12 April 2022 / April 12, 2022	Pembahasan Progres Pengalihan KA Basoetta / Discussion on the progress of the Basoetta train transfer	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana Cris Kuntadi Freddy Harris 	100%	-
7	20 April 2022 / April 20, 2022	Usulan Perubahan Struktur Organisasi dan Paparan WLA Konsultan / Proposal of Changes to the Organizational Structure and Exposure of the Consultant's WLA	<ul style="list-style-type: none"> Riza Primadi Rochadi Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana Cris Kuntadi Freddy Harris 	88%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj
8	25 Mei 2022 / May 25, 2022	Pembahasan Kinerja Perusahaan s.d April 2022 / Discussion on Company Performance until April 2022	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana Cris Kuntadi Freddy Harris 	100%	-

Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

In 2022, the Board of Commissioners attended 21 (twenty one) joint meetings with the Board of Directors. The agenda, date, and participants in the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:

Agenda, Date, Participants in the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

No.	Tanggal Rapat / Meeting Date	Agenda	Peserta Rapat (Dewan Komisaris) / Meeting Participants (Board of Commissioners)	Kehadiran / Attendance	Keterangan / Description
9	7 Juni 2022 / June 7, 2022	Pembahasan Surat Usulan Rencana Setoran Modal PT KAI (Persero) kepada PT PSBI dalam Rangka Penyelesaian Utang Piutang Bunga Pinjaman dan Penandatanganan Perubahan Perjanjian Pemegang Saham PT PSBI / Discussion of PT KAI (Persero)'s Proposal Letter of Capital Deposit Plan to PT PSBI Settlement of Loan Interest Receivables and Signing of Changes to PT PSBI Shareholders Agreement	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana Cris Kuntadi Freddy Harris 	100%	-
10	29 Juni 2022 / June 29, 2022	Pembahasan Kinerja Perusahaan s.d Mei 2022 / Discussion on Company Performance until May 2022	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana Cris Kuntadi Freddy Harris 	100%	-
11	6 Juli 2022 / July 6, 2022	Presentasi Konsultan mengenai <i>Culture Health Index</i> / Consultant presentation on the Culture Health Index	<ul style="list-style-type: none"> Riza Primadi Rochadi Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana Cris Kuntadi 		Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Endang Tirtana
12	27 Juli 2022 / July 27, 2022	Surat Direksi tentang Usulan Transaksi Pengalihan Bisnis KA Basoetta / Letter of the Board of Directors on the Proposal of Transfer of the Basoetta Train	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Chairul Anwar Endang Tirtana Cris Kuntadi Freddy Harris 	88%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> Diah Natalisa
13	11 Agustus 2022 / August 11, 2022	Surat Direksi tentang Permohonan Persetujuan Penetapan Struktur Organisasi 1(Satu) Tingkat di Bawah Direksi / Board of Directors Letter on Request for Approval for Determination of Organizational Structure 1(One) Level below the Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana Cris Kuntadi 	75%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> Rochadi Freddy Harris
14	14 September 2022 / September 14, 2022	Laporan Progres dan Isu Strategis Proyek KCJB / Progress Report and Strategic Issues of the KCJB Project	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana Johan Sirait Sri Paduka Mangkoenagoro X 	100%	-
15	5 Oktober 2022 / October 5, 2022	Progres Update PMO Pengembangan Sumbagsel / Update on Progress of PMO Development for Southern Sumatra	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Diah Natalisa Endang Tirtana Johan Sirait 	75%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> Chairul Anwar Sri Paduka Mangkoenagoro X
16	19 Oktober 2022 / October 19, 2022	a. Surat Usulan Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan / Letter of Proposal for Changes to the Company's Organizational Structure b. <i>Centre of Excellence</i> SDM pada KCIC / HC Center of Excellence of KCIC c. Update Pengisian Jabatan pada Unit Transfromasi Digital / Update on Position Filling in the Digital Transformation Unit	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Diah Natalisa Chairul Anwar Johan Sirait Sri Paduka Mangkoenagoro X Mohamad Risal Wasal 	88%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> Endang Tirtana
17	26 Oktober 2022 / October 26, 2022	Pembahasan Kinerja Perusahaan s.d Triwulan III Tahun 2022 / Discussion of Company Performance up to Q3 2022	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Chairul Anwar Johan Sirait Sri Paduka Mangkoenagoro X 	67%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> Diah Natalisa Endang Tirtana Mohamad Risal Wasal
18	23 November 2022 / November 23, 2022	a. Kesiapan Operasi LRT Juli 2023 / LRT Operation Readiness July 2023 b. Progres dispute lahan dengan Perum Damri / Progress of land dispute with Perum Damri	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana Johan Sirait Sri Paduka Mangkoenagoro X Mohamad Risal Wasal 	100%	-

No.	Tanggal Rapat / Meeting Date	Agenda	Peserta Rapat (Dewan Komisaris) / Meeting Participants (Board of Commissioners)	Kehadiran / Attendance	Keterangan / Description
19	30 November 2022 / November 30, 2022	a. Pembahasan Kinerja Oktober 2022 / October 2022 Performance Discussion b. Pembahasan RKAP 2023 / Discussion of RKAP 2023 c. Progres Proyek KCJB / KCJB Project Progress	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Diah Natalisa Endang Tirtana Johan Sirait Sri Paduka Mangkoenagoro X Mohamad Risal Wasal 	88%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: • Chairul Anwar
20	14 Desember 2022 / December 14, 2022	Pembahasan Surat Penasehatan Pembayaran TAC / Discussion of TAC Payment Advisory Letter	<ul style="list-style-type: none"> Said Aqil Siroj Riza Primadi Rochadi Diah Natalisa Chairul Anwar Endang Tirtana Johan Sirait Sri Paduka Mangkoenagoro X Mohamad Risal Wasal 	100%	-
21	28 Desember 2022 / December 28, 2022	Pembahasan Rencana Setoran Modal kepada PSBI untuk penyelesaian cost overrun dan tindak lanjut PMN 2022 / Discussion of plans to deposit capital to PSBI for the settlement of cost overrun and follow-up to PMN 2022	<ul style="list-style-type: none"> Riza Primadi (Kuasa) Rochadi Endang Tirtana Sri Paduka Mangkoenagoro X 	50%	Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, yaitu: / Absent Board of Commissioners: • Said Aqil Siroj • Johan Sirait • Chairul Anwar • Diah Natalisa • Mohamad Risal Wasal

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Frekuensi pelaksanaan rapat dan kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris di dalam rapat untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance

The frequency of meetings and attendance of each member of the Board of Commissioners at meetings for 2022 is as follows:

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Frequency and Attendance of Board of Commissioners Meetings

Nama / Name	Jabatan / Position	Rapat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Meeting			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi / Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors			RUPS / GMS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran / Number and Percentage of Attendance			Jumlah dan Persentase Kehadiran / Number and Percentage of Attendance			Jumlah dan Persentase Kehadiran / Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase / Percentage	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase / Percentage	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase / Percentage
Said Aqil Siroj	Komisaris Utama dan Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	23	19	83%	21	18	86%	2	2	100%
Rochadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner	23	21	91%	21	18	86%	2	2	100%
Riza Primadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner	23	22	96%	21	20	95%	2	2	100%
Endang Tirtana	Komisaris Independen / Independent Commissioner	23	22	96%	21	18	86%	2	2	100%

Nama / Name	Jabatan / Position	Rapat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Meeting			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi / Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors			RUPS / GMS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran / Number and Percentage of Attendance			Jumlah dan Persentase Kehadiran / Number and Percentage of Attendance			Jumlah dan Persentase Kehadiran / Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase / Percentage	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase / Percentage	Jumlah Rapat / Total Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase / Percentage
Johan Sirait*	Komisaris Independen / Independent Commissioner	6	5	83%	8	7	88%	0	0	0%
Mohamad Risal Wasal***	Komisaris / Commissioner	4	4	100%	7	6	86%	0	0	0%
Cris Kuntadi**	Komisaris / Commissioner	17	15	88%	13	12	92%	2	2	100%
Sri Paduka Mangkoenagoro X*	Komisaris / Commissioner	6	6	100%	8	7	88%	0	0	0%
Diah Natalisa	Komisaris / Commissioner	23	21	91%	21	18	86%	2	2	100%
Chairul Anwar	Komisaris / Commissioner	23	21	91%	21	18	86%	2	2	100%
Freddy Harris **	Komisaris / Commissioner	17	14	82%	13	11	85%	2	2	100%

*) Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 15 Agustus 2022 / Serving as Commissioner of the Company from August 15, 2022

**) Menjabat sebagai Komisaris Perseroan hingga 15 Agustus 2022 / Serving as Commissioner of the Company until August 15, 2022

***) Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 20 September 2022 / Serving as Commissioner of the Company until September 20, 2022

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris [POJK E.2]

Kebijakan Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Perseroan memahami bahwa program pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi merupakan sesuatu yang penting, agar Dewan Komisaris dapat selalu mendapatkan informasi perkembangan terkini dari *core business* dan bisnis penunjang Perusahaan, hingga perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan mengatur kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bagi anggota Dewan Komisaris di dalam *Board Manual*, dengan uraian ketentuan berikut:

1. Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
2. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris.

Training and/or Competence Development for Members of the Board of Commissioners [POJK E.2]

Policy on Training and/or Competency Development for Members of the Board of Commissioners

The Company understands that training programs and/or competency development are important for the Board of Commissioners to always receive the latest information from the Company's *core business* and supporting businesses, as well as developments in applicable laws and regulations.

The Company regulates training and/or competency improvement policies for members of the Board of Commissioners in the *Board Manual* with the following provisions:

1. The Capability Development Program is implemented in order to improve the effectiveness of the work of the Board of Commissioners and is included in the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners.
2. The plan to implement the capability development program must be included in the work plan and annual budget of the Board of Commissioners.

- | | |
|---|---|
| <p>3. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk menyajikan presentasi kepada Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam rangka berbagai informasi dan pengetahuan (<i>sharing knowledge</i>).</p> <p>4. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p> | <p>3. Each member of the Board of Commissioners who participates in capability improvement programs such as seminars and/or training is required to present presentations to other members of the Board of Commissioners in order to share information and knowledge.</p> <p>4. The member of the Board of Commissioners concerned is responsible for making reports on the implementation of the capability improvement program and submitted to the Board of Commissioners.</p> |
|---|---|

Program Peningkatan Kapabilitas dapat berbentuk Program Seminar, *Workshop*, *Training*, *In House Training*, Studi Banding dan program lainnya yang berkaitan dengan:

- | | |
|--|--|
| <p>1. Pengetahuan terkait prinsip hukum korporasi dan <i>updating</i> peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan.</p> <p>2. Pengetahuan terkait Lingkungan Bisnis dan issue perekonomian terkini.</p> <p>3. Pengetahuan terkait tugas fungsi pengawasan Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Mutu, Internal Audit, <i>Good Corporate Governance</i>, Sistem Informasi Teknologi, Kebijakan akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengelolaan Human Capital, research and development dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.</p> <p>4. Pengetahuan terkait <i>Competitor Company</i>, <i>Subtitution Company</i>, <i>World Class Company/Benchmark Company</i>.</p> | <p>Capability Development Programs can be held in the form of Seminars, Workshops, Training, In House Training, Comparative Studies and other programs related to:</p> <p>1. Knowledge of the principles of corporate law and updating of laws and regulations related to the company's business activities.</p> <p>2. Knowledge of the latest business environment and economic issues.</p> <p>3. Knowledge related to the supervisory functions of the Internal Control System, Risk Management, Quality Management System, Internal Audit, Good Corporate Governance, Information Technology Systems, Accounting Policies and Financial Reporting, Human Capital Management, research and development and Policies for the Procurement of Goods and Services.</p> <p>4. Knowledge related to Competitor Company, Substitution Company, World Class Company/Benchmark Company.</p> |
|--|--|

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Diikuti Anggota Dewan Komisaris Tahun 2022

Pada tahun 2022, masing-masing anggota Dewan Komisaris mengikuti pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dengan perincian sebagai berikut:

Training and/or Competency Development Attended by Members of the Board of Commissioners in 2022

In 2022, each member of the Board of Commissioners attended training and/or competency development with the following details:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan / Training Type and Material of Competency Development/Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan / Time and Place of Implementation	Penyelenggara / Organizer
Said Aqil Siroj	Komisaris Utama dan Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	<i>Onboarding Commissioner</i> Program Angkatan 4 Tahun 2022 / <i>Onboarding Commissioner</i> Program Batch 4 of 2022	17 Maret s.d. 21 April / Online / March 17 - April 21 / Online	FHCI BUMN
Rochadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner	BoC BoD Retreat : Peningkatan Kompetensi dengan Mengutamakan Olah 4 R (Rasa, Rasio, Ruh, dan Raga) / BoC BoD Retreat: Competency Improvement by Prioritizing the Management of 4R (Feel, Ratio, Spirit, and Body)	25 s.d. 26 November 2022/ Mason Pine, Bandung / November 25-26, 2022/ Mason Pine, Bandung	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Riza Primadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Program pelatihan "Audit Committees in New Era of Governance" / "Audit Committees in New Era of Governance" training program	16 s.d. 18 November 2022 / Boston, USA / November 16 - 18, 2022 / Boston, USA	Harvard Bussiness School
		BoC BoD Retreat : Peningkatan Kompetensi dengan Mengutamakan Olah 4 R (Rasa, Rasio, Ruh, dan Raga) / BoC BoD Retreat: Competency Improvement by Prioritizing the Management of 4R (Feel, Ratio, Spirit, and Body)	25 s.d. 26 November 2022/ Mason Pine, Bandung / November 25-26, 2022/ Mason Pine, Bandung	PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Nama / Name	Jabatan / Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan / Training Type and Material of Competency Development/Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan / Time and Place of Implementation	Penyelenggara / Organizer
Johan Sirait*	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Onboarding Commissioner Program Angkatan 6 Tahun 2022 / Onboarding Commissioner Program Batch 6 of 2022	1 November s.d. 21 Desember 2022/ Online / November 1 - December 21, 2022 / Online	FHCI BUMN
Mohamad Risal Wasal***	Komisaris / Commissioner	Onboarding Commissioner Program Angkatan 6 Tahun 2022 / Onboarding Commissioner Program Batch 6 of 2022	1 November s.d. 21 Desember 2022/ Online / November 1 - December 21, 2022 / Online	FHCI BUMN
Sri Paduka Mangkoenagoro X*	Komisaris / Commissioner	Onboarding Commissioner Program Angkatan 6 Tahun 2022 / Onboarding Commissioner Program Batch 6 of 2022	1 November s.d. 21 Desember 2022/ Online / November 1 - December 21, 2022 / Online	FHCI BUMN
		BoC BoD Retreat : Peningkatan Kompetensi dengan Mengutamakan Olah 4 R (Rasa, Rasio, Ruh, dan Raga) / BoC BoD Retreat: Competency Improvement by Prioritizing the Management of 4R (Feel, Ratio, Spirit, and Body)	25 s.d. 26 November 2022/ Mason Pine, Bandung / November 25-26, 2022/ Mason Pine, Bandung	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Chairul Anwar	Komisaris / Commissioner	BoC BoD Retreat : Peningkatan Kompetensi dengan Mengutamakan Olah 4 R (Rasa, Rasio, Ruh, dan Raga) / BoC BoD Retreat: Competency Improvement by Prioritizing the Management of 4R (Feel, Ratio, Spirit, and Body)	25 s.d. 26 November 2022/ Mason Pine, Bandung / November 25-26, 2022/ Mason Pine, Bandung	PT Kereta Api Indonesia (Persero)

*) Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 15 Agustus 2022 / Serving as Commissioner of the Company from August 15, 2022

**) Menjabat sebagai Komisaris Perseroan hingga 15 Agustus 2022 / Serving as Commissioner of the Company from August 15, 2022

***) Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 20 September 2022 / Serving as Commissioner of the Company from September 20, 2022

Program Orientasi bagi Komisaris Baru Tahun 2021

Perseroan menerapkan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kali. Program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris tersebut dilaksanakan di bawah tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, atau pihak lain yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Program pengenalan diterapkan dalam rangka memberikan pemahaman mendasar bagi anggota Dewan Komisaris baru, dengan muatan mencakup:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh BUMN.
2. Gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Orientation Program for New Commissioners in 2021

The Company conducts introduction program for members of the Board of Commissioners who are appointed for the first time. The introduction program for members of the Board of Commissioners is carried out under the responsibility of the Corporate Secretary, or other parties who carry out the function as Corporate Secretary.

The introduction program is implemented in order to provide a basic understanding for new members of the Board of Commissioners, with content covering:

1. Implementation of GCG principles by SOEs.
2. Overview of SOEs relating to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and other strategic issues.
3. Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee.
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners as well as things that are not allowed.

Materi dalam program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris disampaikan melalui presentasi, pertemuan, kunjungan ke lokasi-lokasi Perseroan, pengkajian dokumen, atau berupa penyampaian lain yang dianggap sesuai dengan Perseroan.

Untuk tahun 2022, Perseroan melaksanakan program pengenalan bagi anggota-anggota Dewan Komisaris baru, yaitu Bapak Johan Sirait dan Bapak Sri Paduka Mangkoenagoro X, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022. Materi yang disampaikan melalui forum tersebut mencakup informasi komprehensif terkait dengan tugas-tugas Dewan Komisaris, kewenangan, hak dan kewajiban Dewan Komisaris. Selain itu, diberikan pula informasi mengenai company profile perusahaan serta isu-isu strategis perusahaan.

Rekomendasi, Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris, Serta Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan

Sebagai bagian dari penerapan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat bagi Perseroan, Dewan Komisaris melaksanakan tugas melalui berbagai bentuk kegiatan. Pelaksanaan tugas tersebut mencakup pelaksanaan rapat, baik berupa rapat internal maupun rapat gabungan bersama Direksi. Dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam, Dewan Komisaris melaksanakan kunjungan langsung ke wilayah kerja/operasional Perseroan. Di samping itu, Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan melakukan korespondensi/surat tertulis, baik kepada Direksi maupun kepada pemegang saham, yang ditujukan sebagai pemberian laporan, tanggapan tertulis, serta pemberian nasihat.

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris untuk tahun 2022 terdiri atas kegiatan korespondensi, pelaksanaan rapat, serta kegiatan di luar kegiatan rutin, yang diuraikan sebagai berikut:

A. Surat-Menyurat

Untuk tahun 2022, Dewan Komisaris memberikan tanggapan, arahan, nasehat serta laporan yang diperlukan, baik kepada Direksi maupun kepada pemegang saham, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN Nomor 01/CF/KOM/I/2022, tanggal 5 Januari 2022 perihal Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Usulan RKAP Tahun 2022.

Material in the induction program for members of the Board of Commissioners is delivered through presentations, meetings, visits to Company locations, document review, or in other forms of submission deemed appropriate by the Company.

For 2022, the Company implemented induction program for new members of the Board of Commissioners, namely Mr. Johan Sirait and Mr. Sri Paduka Mangkoenagoro X, which is carried out at August 31, 2022. The material presented through the forum includes comprehensive information related to the duties of the Board of Commissioners, authorities, rights and obligations of the Board of Commissioners. In addition, information is also provided regarding the company profile and strategic issues of the company.

Recommendations, Implementation of the Duties of the Board of Commissioners, As well as Monitoring the Implementation of the Company's Strategy

As part of implementing the supervisory and advisory functions for the Company, the Board of Commissioners carries out its duties through various forms of activities. The implementation of these duties includes holding meetings, both in the form of internal meetings and joint meetings with the Board of Directors. In order to obtain more complete and in-depth information, the Board of Commissioners carries out direct visits to the Company's work/operational areas. In addition, the Board of Commissioners carries out its duties by conducting correspondence/written letters, both to the Board of Directors and to shareholders, which are intended for providing reports, written responses, and providing advice.

Implementation of the duties of the Board of Commissioners for 2022 consists of correspondence activities, holding meetings, as well as activities outside of routine activities, which are described as follows:

A. Correspondence

For 2022, the Board of Commissioners provided the necessary responses, directions, advice and reports, both to the Board of Directors and to shareholders, with the following details:

- 1) Letter of the Board of Commissioners to the Minister of SOEs No. 01/CF/KOM/I/2022, dated January 5, 2022 on the Board of Commissioners Responses and Suggestions on the 2022 RKAP Proposal.

- 2) Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN Nomor 02/CF/KOM/I/2022, tanggal 5 Januari 2022 perihal Usulan Indikator Aspek Operasional dalam RKAP Tahun 2022.
 - 3) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 11/CF/KOM/II/2022, tanggal 7 Februari 2022 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Setoran Modal kepada PT MITJ.
 - 4) Surat Dewan Komisaris kepada Ketua Cluster Talent Committee (CTC) BUMN Nomor 13/CH/KOM/II/2022, tanggal 16 Februari 2022 perihal Talent Pool PT Kereta Api Indonesia (Persero).
 - 5) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 15/CH/KOM/II/2022, tanggal 16 Februari 2022 perihal Pengurus Anak Perusahaan.
 - 6) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 20/CG/KOM/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 perihal Arahan Dewan Komisaris terkait dengan Tuntutan SPKA.
 - 7) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 23/CG/KOM/III/2022, tanggal 18 Maret 2022 perihal Persetujuan Pengurus Anak Perusahaan.
 - 8) Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN Nomor 24/CG/KOM/IV/2022, tanggal 4 April 2022 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT KAI (Persero) Tahun Buku 2021.
 - 9) Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN Nomor 25/CG/KOM/IV/2022, tanggal 4 April 2022 perihal Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Kinerja PT KAI (Persero) Tahun Buku 2021 (Audited).
 - 10) Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN Nomor 26/CG/KOM/IV/2022, tanggal 4 April 2022 perihal Usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022.
 - 11) Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN Nomor 27/CG/KOM/IV/2022, tanggal 4 April 2022 perihal Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2021.
 - 12) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 28/CG/KOM/IV/2022, tanggal 4 April 2022 perihal Tanggapan Tertulis Penerbitan Obligasi Tahun 2022.
- 2) Letter of the Board of Commissioners to the Minister of SOEs No. 02/CF/KOM/I/2022, dated January 5, 2022 on Proposal of Operational Aspect Indicators in the 2022 RKAP.
 - 3) Letter of the Board of Commissioners to the President Director of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. 11/CF/KOM/II/2022, dated February 7, 2022 on the Board of Commissioners' Response to the Plan of Capital Deposit to PT MITJ.
 - 4) Letter of the Board of Commissioners to the Chairman of the SOEs Cluster Talent Committee (CTC) No. 13/CH/KOM/II/2022, dated February 16, 2022 on PT Kereta Api Indonesia (Persero) Talent Pool.
 - 5) Letter of the Board of Commissioners to the President Director of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. 15/CH/KOM/II/2022, dated February 16, 2022 on Management of Subsidiaries.
 - 6) Letter of the Board of Commissioners to the President Director of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. 20/CG/KOM/III/2022, dated March 14, 2022 on Directions of the Board of Commissioners on the SPKA Demands.
 - 7) Letter of the Board of Commissioners to the President Director of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. 23/CG/KOM/III/2022, March 18, 2022 on the Approval of the Subsidiary Management.
 - 8) Letter of the Board of Commissioners to the Minister of SOEs No. 24/CG/KOM/IV/2022, April 4, 2022 on the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners of PT KAI (Persero) for Fiscal Year 2021.
 - 9) Letter of the Board of Commissioners to the Minister of SOEs No. 25/CG/KOM/IV/2022, April 4, 2022 on the Board of Commissioners' Responses and Suggestions on the Performance of PT KAI (Persero) for Fiscal Year 2021 (Audited).
 - 10) Letter of the Board of Commissioners to the Minister of SOEs No. 26/CG/KOM/IV/2022, April 4, 2022 on the Proposal to Appoint a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the 2022 Consolidated Financial Statements.
 - 11) Letter of the Board of Commissioners to the Minister of SOEs No. 27/CG/KOM/IV/2022, April 4, 2022 on the Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Performance of the 2021 Fiscal Year.
 - 12) Letter of the Board of Commissioners to the President Director No. 28/CG/KOM/IV/2022, April 4, 2022 on Written Response to the Issuance of Bonds in 2022.

- 13) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 29/CF/KOM/IV/2022, tanggal 4 April 2022 perihal Tanggapan Tertulis atas Rencana Setoran Modal PT Railink melalui mekanisme Konversi SHL.
- 14) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 36/CH/KOM/V/2022, tanggal 24 Mei 2022 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Perubahan Struktur Organisasi PT KAI (Persero).
- 15) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 39/CH/KOM/V/2022, tanggal 24 Mei 2022 perihal Persetujuan Pengurusan Anak Perusahaan.
- 16) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 40/CF/KOM/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 perihal Tanggapan Dewan Komisaris Atas Rencana Penghapusbukuan dan Persetujuan ATDO.
- 17) Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN Nomor 41/CF/KOM/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 perihal Tanggapan Dewan Komisaris PT KAI (Persero) Triwulan I Tahun 2022.
- 18) Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN Nomor 42/CF/KOM/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT KAI (Persero) Triwulan I Tahun 2022.
- 19) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 46/CF/KOM/VI/2022, tanggal 10 Juni 2022 perihal Tanggapan Dewan Komisaris Atas Rencana Setoran Modal PT KAI (Persero) kepada PT PSBI dalam rangka Penyelesaian Utang Piutang Bunga Pinjaman PT PSBI.
- 20) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 50/CG/KOM/VI/2022, tanggal 29 Juni 2022 perihal Persetujuan Dewan Komisaris atas KPI Individual Direksi Tahun 2022.
- 21) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 61/CF/KOM/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022 perihal Tanggapan Dekom Atas Rencanan Transaksi Pengalihan Bisnis KA Bandara Soetta.
- 22) Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN Nomor 62/CF/KOM/Viii/2022, tanggal 12 Agustus 2022 perihal Laporan Tanggapan Dekom PT KAI (Persero) Semester I Tahun 2022.
- 23) Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN Nomor 63/CF/KOM/Viii/2022, tanggal 12 Agustus 2022 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dekoma PT KAI (Persero) Semester I Tahun 2022.
- 13) Letter of the Board of Commissioners to the President Director No. 29/CF/KOM/IV/2022, dated April 4, 2022 on Written Responses to PT Railink's Plan of Capital Deposit through SHL Conversion.
- 14) Letter of the Board of Commissioners to the President Director No. 36/CH/KOM/V/2022, dated May 24, 2022 on the Board of Commissioners' Response to the Planned Change of the Organizational Structure of PT KAI (Persero).
- 15) Letter of the Board of Commissioners to the President Director No. 39/CH/KOM/V/2022, dated May 24, 2022 on the Approval for the Management of Subsidiaries.
- 16) Letter of the Board of Commissioners to the President Director No. 40/CF/KOM/V/2022, dated May 30, 2022 on the Board of Commissioners' Response to the Write-off Plan and ATDO Approval.
- 17) Letter of the Board of Commissioners to the Minister of SOEs No. 41/CF/KOM/V/2022, dated May 30, 2022 on the Response of the Board of Commissioners of PT KAI (Persero) in Q1 2022.
- 18) Letter of the Board of Commissioners to the Minister of SOEs No. 42/CF/KOM/V/2022, dated May 30, 2022 on the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners of PT KAI (Persero) in Q1 2022.
- 19) Letter of the Board of Commissioners to the President Director No. 46/CF/KOM/VI/2022, dated June 10, 2022 on the Board of Commissioners' Response to the Planned Capital Deposit of PT KAI (Persero) to PT PSBI for the Settlement of PT PSBI's Loan Interest Receivables.
- 20) Letter of the Board of Commissioners to the President Director No. 50/CG/KOM/VI/2022, dated June 29, 2022 on the approval of the Board of Commissioners for the Board of Directors Individual KPI for 2022.
- 21) Letter of the Board of Commissioners to the President Director No. 61/CF/KOM/VIII/2022, dated August 12, 2022 on the Board of Commissioners' Response to the Planned Business Transfer Transaction for Soetta Airport Railroad.
- 22) Letter of the Board of Commissioners to the Minister of SOEs No. 62/CF/KOM/Viii/2022, dated August 12, 2022 on the Response Report of the Board of Commissioners of PT KAI (Persero) in the First Half of 2022.
- 23) Letter of the Board of Commissioners to the Minister of SOEs No. 63/CF/KOM/Viii/2022, dated August 12, 2022 on the Report on the Implementation of Supervisory Duties of PT KAI (Persero) in the First Half of 2022.

- 24) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 68/CF/KOM/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022 perihal Persetujuan Dekom Atas Penetapan Struktur Organisasi 1(satu) Tingkat di Bawah Direksi.
- 25) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 70/CF/KOM/IX/2022, tanggal 9 September 2022 perihal Tindak Lanjut Catatan Dekom pada Persetujuan KPI Individual Direksi Tahun 2022.
- 26) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 77/CF/KOM/IX/2022, tanggal 21 September 2022 perihal Tanggapan Dekom Atas Rencana Transaksi Pemisahan Melalui Pengalihan Bisnis KA Bandara Soetta.
- 27) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 78/CF/KOM/IX/2022, tanggal 21 September 2022 perihal Persetujuan Dekom Atas Penetapan Struktur Organisasi Digitas Transformation Office.
- 28) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 81/CG/KOM/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022 perihal Penasehatan Dewan Komisaris terkait dengan Sistem Remunerasi Perusahaan.
- 29) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 82/CG/KOM/X/2022, tanggal 26 Oktober 2022 perihal Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan.
- 30) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 83/CF/KOM/XI/2022, tanggal 4 November 2022 perihal Penetapan Besaran Imbalan Jasa Pengadaan KAP.
- 31) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 84/CF/KOM/XI/2022, tanggal 4 November 2022 perihal Tambahan Setoran Modal kepada PT MITJ.
- 32) Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN Nomor 85/CF/KOM/XI/2022, tanggal 4 November 2022 perihal Tanggapan Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) Triwulan III Tahun 2022.
- 33) Surat Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN Nomor 86/CF/KOM/XI/2022, tanggal 4 November 2022 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) Triwulan III Tahun 2022.
- 34) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 87/CF/KOM/XI/2022, tanggal 4 November 2022 perihal Penyesuaian Draft RKAP 2023.
- 24) Letter of the Board of Commissioners to the President Director No. 68/CF/KOM/VIII/2022, dated August 30, 2022 on the Board of Commissioners' Approval for Determining Organizational Structure 1 (one) Level below the Board of Directors.
- 25) Letter of the Board of Commissioners to the President Director No. 70/CF/KOM/IX/2022, dated September 9, 2022 on the Follow-Up of the Board of Commissioners' Notes on the Approval of the Board of Directors Individual KPIs for 2022.
- 26) Letter of the Board of Commissioners to the President Director No. 77/CF/KOM/IX/2022, dated September 21, 2022 on the Board of Commissioners' Response to the Planned Separation Transaction through the Transfer of Soetta Airport Railway Business.
- 27) Letter of the Board of Commissioners to the President Director No. 78/CF/KOM/IX/2022, September 21, 2022 on the Board of Commissioners' Approval for the Determination of the Organizational Structure of the Digital Transformation Office.
- 28) Letter of the Board of Commissioners to the President Director No. 81/CG/KOM/X/2022, dated October 24, 2022 on the Board of Commissioners' Advise on the Company's Remuneration System.
- 29) Letter of the Board of Commissioners to the President Director No. 82/CG/KOM/X/2022, dated October 26, 2022 on the Approval of the Board of Commissioners for Proposal of Changes to the Organizational Structure of the Company.
- 30) Letter of the Board of Commissioners to the President Director No. 83/CF/KOM/XI/2022, dated November 4, 2022 on Determination of the Amount of KAP Procurement Services Fee.
- 31) Letter of the Board of Commissioners to the President Director No. 84/CF/KOM/XI/2022, November 4, 2022 on Additional Capital Deposits to PT MITJ.
- 32) Letter of the Board of Commissioners to the Minister of SOEs No. 85/CF/KOM/XI/2022, November 4, 2022 on the Response of the Board of Commissioners of PT Kereta Api Indonesia (Persero) in Q3 2022.
- 33) Letter of the Board of Commissioners to the Minister of SOEs No. 86/CF/KOM/XI/2022, dated November 4, 2022 on the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners of PT Kereta Api Indonesia (Persero) in Q3 2022.
- 34) Letter of the Board of Commissioners to the President Director No. 87/CF/KOM/XI/2022, November 4, 2022 on Adjustments to the 2023 RKAP Draft.

- 35) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 88/CF/KOM/XI/2022, tanggal 24 November 2022 perihal Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2023.
- 36) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 92/CF/KOM/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Penasehatan terkait Tagihan PNBP TAC Periode Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2022.
- 37) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 93/CF/KOM/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Penyertaan Modal Tambahan PT KAI (Persero) kepada MITJ.
- 38) Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 94/CF/KOM/XII/2022, tanggal 28 Desember 2022 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Setoran Modal PT KAI (Persero) kepada MITJ.

- 35) Letter of the Board of Commissioners to the President Director No. 88/CF/KOM/XI/2022, dated November 24, 2022 on Submission of the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners for 2023.
- 36) Letter of the Board of Commissioners to the President Director No. 92/CF/KOM/XII/2022, dated December 19, 2022 on Advice on TAC PNBP Claims in Q1 and Q2 2022.
- 37) Letter of the Board of Commissioners to the President Director No. 93/CF/KOM/XII/2022, December 19, 2022 on the Board of Commissioners' Response to PT KAI's (Persero) Additional Equity Participation Plan to MITJ.
- 38) Letter of the Board of Commissioners to the President Director No. 94/CF/KOM/XII/2022, dated December 28, 2022 on the Board of Commissioners' Response to PT KAI (Persero)'s Capital Deposit Plan to MITJ.

B. Rapat Internal Dewan

Rapat Internal Dewan Komisaris KAI diselenggarakan dalam rangka membahas permasalahan perusahaan yang memerlukan pengawasan dan penasehatan Komisaris. Pengungkapan mengenai pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris, mencakup tanggal pelaksanaan, agenda, serta peserta rapat telah disajikan di dalam subbagian Agenda, Tanggal, dan Peserta Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2022.

B. Internal Meeting of the Board

Internal meetings of the Board of Commissioners of KAI are held to discuss company issues that require the supervision and advice of the Commissioner. Disclosure regarding the implementation of internal meetings of the Board of Commissioners, including the date of implementation, agenda, and meeting participants has been presented in the sub-section Agenda, Dates, and Participants of the 2022 Board of Commissioners Internal Meetings.

C. Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi

Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi KAI diselenggarakan untuk membahas permasalahan perusahaan yang memerlukan pengawasan dan penasehatan Komisaris. Pengungkapan mengenai pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi, mencakup tanggal pelaksanaan, agenda, serta peserta rapat telah disajikan di dalam subbagian Agenda, Tanggal, dan Peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi Tahun 2022.

C. Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors of KAI are held to discuss company issues that require the oversight and advice of the Commissioner. Disclosure regarding the implementation of the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors, including the date of implementation, agenda, and meeting participants has been presented in the subsection Agenda, Dates and Participants of the 2022 Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors.

D. Kegiatan Dewan Komisaris di Luar Kegiatan Rutin

Di tahun 2022, Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan di luar kegiatan rutin, dengan perincian sebagai berikut:

D. Activities of the Board of Commissioners outside of Routine Activities

In 2022, the Board of Commissioners carried out activities outside of routine activities, with the following details:

No.	Tanggal / Date	Agenda
1	3-4 Januari 2022 / January 3-4, 2022	Kunjungan Kerja ke Daop 6 Yogyakarta / Work Visit to Daop 6 Yogyakarta
2	7-9 Januari 2022 / January 7-9, 2022	Kunjungan Kerja ke Divre III Kertapati / Work Visit to Divre III Kertapati

No.	Tanggal / Date	Agenda
3	18-19 Januari 2022 / January 18-19, 2022	Kunjungan Kerja ke Divre II Padang / Work Visit to Divre II Padang
4	20-21 Januari 2022 / January 20-21, 2022	Kunjungan Kerja ke Daop 5 Purwokerto dan Daop 6 Yogyakarta / Work Visit to Daop 5 Purwokerto and Daop 6 Yogyakarta
5	22 Januari 2022 / January 22, 2022	Kunjungan Kerja ke Daop 2 Bandung / Work Visit to Daop 2 Bandung
6	9-12 Maret 2022 / March 9-12, 2022	Kunjungan Kerja ke Daop 4 Semarang dan Daop 6 Yogyakarta / Work Visit to Daop 4 Semarang and Daop 6 Yogyakarta
7	23 - 25 Maret 2022 / March 23 - 25, 2022	KAIS Angkutan Lebaran Tahun 2022 / KAIS Eid Transportation in 2022
8	19 April 2022 / April 19, 2022	Kunjungan Kerja di Divre II Padang / Work Visit to Divre II Padang
9	22 April - 13 Mei 2022 / April 22 - May 13, 2022	Posko Angkutan Lebaran / Eid Transport Post
10	13-15 Juni 2022 / June 13-15, 2022	Kunjungan Kerja ke Daop 6 Yogyakarta / Work Visit to Daop 6 Yogyakarta
11	22 - 25 Juni 2022 / June 22-25, 2022	Kunjungan Kerja ke Divre III Kpt dan Divre IV Tnk / Work Visit to Divre III Kpt and Divre IV Tnk
12	21 - 22 Juli 2022 / July 21 - 22, 2022	Kunjungan Kerja ke BY Tegal / Work Visit to BY Tegal
13	26 Agustus 2022 / August 26, 2022	Kunjungan Kerja Ke BY Manggarai / Work Visit to BY Manggarai
14	8-10 September 2022 / September 8-10, 2022	Kunjungan Kerja ke BPTT Yk / Work Visit to BPTT Yk
15	5-7 Des 2022 / December 5-7, 2022	KAIS NATARU 2022-2023 / KAIS Christmas and New Year Holiday 2022-2023
16	22 Des 2022 - 8 Jan 2023 / December 22, 2022 - January 8, 2023	Posko Angkutan NATARU 2023 / Christmas and New Year Holiday Transportation Post

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan antara lain dengan mengacu kepada Kontrak Manajemen Tahunan (*Key Performance Indicator*) Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2022 PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang ditetapkan pada RUPS Tahunan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022.

Board of Commissioners Performance Assessment

The performance assessment of the Board of Commissioners is carried out, among others, by referring to the Annual Management Contract (*Key Performance Indicator*) of the Board of Commissioners and Shareholders for 2022 PT Kereta Api Indonesia (Persero), which was determined at the Annual General Meeting of Shareholders to ratify the Company's 2022 Work Plan and Budget.

No	Aspek dan Parameter / Aspects and Parameters	Satuan / Unit	Tahun / Year 2022		Bobot / Value	Skor / Score
			Target	Real		
I.	ASPEK PENGAWASAN DAN PENASIHATAN / ASPECT OF SUPERVISION AND ADVICE				55	50,00
1	Review/analisis kinerja perusahaan / Company performance review/analysis	Kali / Times	8	8	20	18
	a. Penelaahan atas Rancangan RJPP / Review of the RJPP Draft		1	0	2	0
	b. Penelaahan atas Rancangan RKAP / Review of the RKAP Draft		1	1	4	4
	c. Evaluasi atas pelaksanaan RKAP 2021 / Evaluation of the implementation of the 2021 RKAP		1	1	4	4
	d. Pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham / Monitoring the performance of the Board of Directors and reporting to Shareholders		1	1	2	2
	e. Perubahan lingkungan bisnis / Changes in the business environment		1	1	2	2
	f. Tindak lanjut atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari pemangku kepentingan / Follow up on suggestions, expectations, concerns and complaints from stakeholders		1	1	2	2
	g. Gejala menurunnya kinerja Perusahaan yang signifikan / Symptoms of a significant decline in Company performance		1	1	2	2
	h. Penilaian atas usulan calon Direksi Anak Perusahaan dan Komisaris anak perusahaan / Assessment of the proposed candidates for the Board of Directors of Subsidiaries and Board of Commissioners of Subsidiaries.		1	1	2	2

No	Aspek dan Parameter / Aspects and Parameters	Satuan / Unit	Tahun / Year 2022		Bobot / Value	Skor / Score
			Target	Real		
2	Pengawasan dan pemberian nasihat atas: / Supervision and advice on:	Kali / Times	11	11	15	15
	a. Kebijakan rancangan SPI / SPI draft policy		1	1	1	1
	b. Kebijakan manajemen risiko / Risk management policy		1	1	2	2
	c. Kebijakan sistem teknologi informasi / Information technology system policy		1	1	1	1
	d. Kebijakan akuntansi dan penyusunan LK / Accounting policies and preparation of financial statements		1	1	2	2
	e. Kebijakan pengelolaan SDM / HC management policy		1	1	1	1
	f. Kebijakan pengadaan barang dan jasa / Policy on procurement of goods and services		1	1	2	2
	g. Kebijakan mutu dan pelayanan / Quality and service policy		1	1	1	1
	h. Kepatuhan perusahaan terhadap UU, Anggaran Dasar, perjanjian dan komitmen / Company compliance with laws, articles of association, agreements and commitments		1	1	2	2
	i. Transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dekom dan RUPS / Transactions or actions within the scope of authority of the Board of Commissioners and the GMS		1	1	1	1
	j. Kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan / Subsidiary/joint venture management policy		1	1	1	1
	k. Kebijakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola / Policy on GCG principle implementation		1	1	1	1
3	Pemantauan Tindakan lanjut Temuan Audit / Monitoring of follow-up audit findings	Kali / Times	2	2	5	5
	a. Penunjukan calon auditor / Appointment of prospective auditor		1	1	2,5	2,5
	b. Pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan internal serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan / Supervision of the effectiveness of the implementation of external and internal audits as well as review of complaints related to the Company		1	1	2,5	2,5
4	Monitoring Pekerjaan Project Director (PD) dan Penugasan Pemerintah dan Investasi Pengembangan Perusahaan / Monitoring of Project Director (PD) Work and Government Assignments and Company Development Investment	Kali / Times	4	9	5	5
5	Rapat / Meeting	Kali / Times	24	44	10	10
	a. Internal		12	23	5	5
	b. Gabungan / Joint		12	21	5	5
II	ASPEK PELAPORAN / REPORTING ASPECT				25	25,00
1	Program kerja tahunan (RKA Dekom) / Annual Work Program (RKA Board of Commissioners)	Kali / Times	1	1	10	10
2	Laporan/ pendapat saran kepada RUPS / Reports/advice suggestions to the GMS	Kali / Times	3	3	10	10
	a. Kinerja Direksi / Board of Directors Performance		2	2	-	-
	b. Remunerasi Direksi / Board of Directors Remuneration		1	1	-	-
3	Laporan Manajemen (Audited) Tahun 2021 / Management Report (Audited) 2021	Kali / Times	1	1	5	5
III	ASPEK DINAMIS/ LAIN-LAIN / DYNAMIC/OTHER ASPECTS				20	20,00
1	Peningkatan Kompetensi / Competency Improvement	Kali / Times	5	-	10	-
	a. Program pengenalan Komisaris baru / New Commissioner introduction program		100%	100%	5	5
	b. Program pengembangan kompetensi melalui seminar, diklat, benchmark dan sejenisnya / Competency development programs through seminars, training, benchmarks and the like		5	5	5	5
2	Rekomendasi/Tanggapan atas usul yang disampaikan Direksi / Recommendations/Responses to proposals submitted by the Board of Directors	Tindak Lanjut / Follow-Up	100%	100%	10	10
TOTAL					100	98,00

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Untuk tahun 2022, penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui metode *self-assessment* yang hasilnya dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria yang digunakan di dalam proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris mengacu kepada indikator pencapaian dari *Key Performance Indicators* yang ditetapkan pada awal tahun. *Key Performance Indicators* untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners Performance Assessment Procedure

For 2022, the performance assessment of the Board of Commissioners is carried out through the self-assessment method, the results of which are reported to shareholders through the GMS.

Board of Commissioners Performance Assessment Criteria

The criteria used in the process of evaluating the performance of the Board of Commissioners refer to the achievement indicators of the Key Performance Indicators set at the beginning of the year. Key Performance Indicators for 2022 are as follows:

No	Aspek dan Parameter / Aspects and Parameters	Satuan / Unit	Triwulan IV Tahun 2022 / Q4 of 2022		Bobot / Value	Skor / Score
			Target	Real		
I.	ASPEK PENGAWASAN DAN PENASIHATAN / ASPECT OF SUPERVISION AND ADVICE				55	50,00
1	Review/analisis kinerja perusahaan / Company performance review/analysis	Kali / Times	8	8	20	18
	a. Penelaahan atas Rancangan RJPP / Review of the RJPP Draft		1	0	2	0
	b. Penelaahan atas Rancangan RKAP / Review of the RKAP Draft		1	1	4	4
	c. Evaluasi atas pelaksanaan RKAP 2021 / Evaluation of the implementation of the 2021 RKAP		1	1	4	4
	d. Pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham / Monitoring the performance of the Board of Directors and reporting to Shareholders		1	1	2	2
	e. Perubahan lingkungan bisnis / Changes in the business environment		1	1	2	2
	f. Tindak lanjut atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari pemangku kepentingan / Follow up on suggestions, expectations, concerns and complaints from stakeholders		1	1	2	2
	g. Gejala menurunnya kinerja Perusahaan yang signifikan / Symptoms of a significant decline in Company performance		1	1	2	2
	h. Penilaian atas usulan calon Direksi Anak Perusahaan dan Komisaris anak perusahaan / Assessment of the proposed candidates for the Board of Directors of Subsidiaries and Board of Commissioners of Subsidiaries.		1	1	2	2
2	Pengawasan dan pemberian nasihat atas: / Supervision and advice on:	Kali / Times	11	11	15	15
	a. Kebijakan rancangan SPI / SPI draft policy		1	1	1	1
	b. Kebijakan manajemen risiko / Risk management policy		1	1	2	2
	c. Kebijakan sistem teknologi informasi / Information technology system policy		1	1	1	1
	d. Kebijakan akuntansi dan penyusunan LK / Accounting policies and preparation of financial statements		1	1	2	2
	e. Kebijakan pengelolaan SDM / HC management policy		1	1	1	1
	f. Kebijakan pengadaan barang dan jasa / Policy on procurement of goods and services		1	1	2	2
	g. Kebijakan mutu dan pelayanan / Quality and service policy		1	1	1	1
	h. Kepatuhan perusahaan terhadap UU, Anggaran Dasar, perjanjian dan komitmen / Company compliance with laws, articles of association, agreements and commitments		1	1	2	2
	i. Transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dekom dan RUPS / Transactions or actions within the scope of authority of the Board of Commissioners and the GMS		1	1	1	1
	j. Kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan / Subsidiary/joint venture management policy		1	1	1	1
	k. Kebijakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola / Policy on GCG principle implementation	1	1	1	1	
3	Pemantauan Tindaklanjut Temuan Audit / Monitoring of follow-up audit findings	Kali / Times	2	2	5	5
	a. Penunjukan calon auditor / Appointment of prospective auditor		1	1	2,5	2,5
	b. Pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan internal serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan / Supervision of the effectiveness of the implementation of external and internal audits as well as review of complaints related to the Company		1	1	2,5	2,5

No	Aspek dan Parameter / Aspects and Parameters	Satuan / Unit	Triwulan IV Tahun 2022 / Q4 of 2022		Bobot / Value	Skor / Score
			Target	Real		
4	Monitoring Pekerjaan Project Director (PD) dan Penugasan Pemerintah dan Investasi Pengembangan Perusahaan / Monitoring of Project Director (PD) Work and Government Assignments and Company Development Investment	Kali / Times	4	9	5	5
5	Rapat / Meeting	Kali / Times	6	11	10	10
	a. Internal		3	4	5	5
	b. Gabungan / Joint		3	7	5	5
II	ASPEK PELAPORAN / REPORTING ASPECT				25	25,00
1	Program kerja tahunan (RKA Dekom) / Annual Work Program (RKA Board of Commissioners)	Kali / Times	1	1	10	10
2	Laporan/ pendapat saran kepada RUPS / Reports/advice suggestions to the GMS	Kali / Times	3	3	10	10
	a. Kinerja Direksi / Board of Directors Performance		2	2	-	-
	b. Remunerasi Direksi / Board of Directors Remuneration		1	1	-	-
3	Laporan Manajemen (Audited) Tahun 2021 / Management Report (Audited) 2021	Kali / Times	1	1	5	5
III	ASPEK DINAMIS/ LAIN-LAIN / DYNAMIC/OTHER ASPECTS				20	20,00
1	Peningkatan Kompetensi / Competency Improvement	Kali / Times	5	-	10	-
	a. Program pengenalan Komisaris baru / New Commissioner introduction program		100%	100%	5	5
	b. Program pengembangan kompetensi melalui seminar, diklat, benchmark dan sejenisnya / Competency development programs through seminars, training, benchmarks and the like		5	5	5	5
2	Rekomendasi/Tanggapan atas usul yang disampaikan Direksi / Recommendations/Responses to proposals submitted by the Board of Directors	Tindak Lanjut / Follow-Up	100%	100%	10	10
TOTAL					100	98,00

Pihak yang Melakukan Penilaian

Untuk tahun 2022, penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui metode *self-assessment*. Dengan demikian, Dewan Komisaris merupakan pihak yang melakukan penilaian dengan hasil penilaian dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

Penilaian Kinerja Direksi [GRI 2-18]

Perseroan melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi berdasarkan parameter KPI kolegal atau KPI Bersama serta KPI Direktorat (Individu), yang dilakukan sesuai ketentuan Permen BUMN Nomor PER-11/MBU/11/2020 tentang Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pelaksanaan penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui prosedur tertentu. Direksi menyampaikan usulan KPI Direksi secara kolegal kepada RUPS/Menteri untuk ditetapkan bersamaan dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Direksi wajib

Assessor

For 2022, the performance assessment of the Board of Commissioners was carried out through the self-assessment method. Thus, the Board of Commissioners is the party that carries out the assessment with the results of the assessment being reported to the shareholders through the GMS.

Board of Directors Performance Assessment [GRI 2-18]

The Company assesses the performance of the Board of Directors based on the parameters of collegial KPIs or Joint KPIs and Directorate (Individual) KPIs, which are carried out in accordance with the provisions of the Minister of SOEs Regulation No. PER-11/MBU/11/2020 concerning Management and Annual Management Contracts for Directors of State-Owned Enterprises.

Performance Assessment Procedure

The implementation of the performance assessment of the Board of Directors is carried out through certain procedures. The Board of Directors submits the Board of Directors' KPI proposals collegially to the GMS/Minister to be determined simultaneously with the submission of the Company's Work

menjabarkan KPI Direksi secara kolegal menjadi KPI Direksi individual dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan.

Pencapaian KPI Direksi secara kolegal dilaporkan dalam laporan berkala dan laporan tahunan. Perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegal dan individual di-review oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan Perseroan.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan kriteria di dalam KPI Kolegal dan KPI Individual, dengan uraian sebagai berikut:

KPI Kolegal

Penyusunan KPI Kolegal bagi Direksi dilakukan berdasarkan sejumlah perspektif, sebagai berikut:

1. Nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia;
2. Inovasi model bisnis;
3. Kepemimpinan teknologi;
4. Peningkatan investasi; dan
5. Pengembangan talenta.

KPI Individual

KPI Direksi secara individual merupakan penjabaran KPI Direksi secara kolegal sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. KPI Individual terdiri atas KPI Bersama dan KPI Individu. Adapun KPI Individual Direksi adalah sebagai berikut.

Plan and Budget. In its implementation, the Board of Directors is required to collegially translate the Directors' KPIs into individual Directors' KPIs and submit them to the Board of Commissioners/Supervisory Board for approval.

KPI achievements of the Board of Directors are collegially reported in periodic reports and annual reports. Calculations of the achievements of the Board of Directors' KPIs collegially and individually are reviewed by the Public Accounting Firm (KAP) which audits the Company's financial statements.

Board of Directors Performance Assessment Criteria

The Board of Directors performance assessment is carried out based on the criteria in the Collegial KPI and Individual KPI, with the following description:

Collegial KPIs

The preparation of Collegial KPIs for the Board of Directors is based on a number of perspectives, as follows:

1. Economic and social value for Indonesia;
2. Business model innovation;
3. technology leadership;
4. Increased investment; and
5. Talent development.

Individual KPIs

The individual Board of Directors KPI is a collegiate elaboration of the Board of Directors KPIs in accordance with the duties, functions and responsibilities of each member of the Board of Directors. Individual KPIs consist of Joint KPIs and Individual KPIs. The Directors' Individual KPIs are as follows.

KPI Individual Direksi

Direktur / Director	KPI Bersama / Joint KPIs	KPI Individu / Individual KPIs
Direktur Niaga / Managing Director of Commerce	1. EBITDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Total Corporate Culture Health Index 2. Peningkatan Penggunaan KAI Access / Increased usage of KAI Access 3. Pendapatan Angkutan KA Penumpang / Passenger Trains Revenue 4. Pendapatan Angkutan Barang / Freight Transport Revenue 5. Pendapatan Non Angkutan / Non-Transportation Revenue 6. Indeks Kepuasan Pelanggan PT. KAI (Pnp & Brg) / Passenger and Goods Customer Satisfaction Index 7. Volume Angkutan Penumpang / Passenger Transport Volume
Direktur Operasi / Managing Director of Operations	2. Interest bearing debt to invested capital 3. Volume Angkutan barang / Volume of cargo transportation 4. Safety/Accident Rate 5. Project milestone completion for TOD Plan (KAI) Stasiun Pondokkranji-JRP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Total Corporate Culture Health Index 2. Ketepatan Waktu Kedatangan Angkutan (Barang dan Penumpang) / Passenger and Goods Transport Arrival Time 3. Ketepatan Waktu Keberangkatan Angkutan (Barang dan Penumpang) / Passenger and Goods Transport Departure Time 4. Toleransi Gangguan Perjalanan Kereta Api Andil Operasi / Tolerance for Disruption to Train Travel Shares Operations 5. Perumusan Perencanaan Perjalanan Kereta Api / Formulation of Train Travel Planning 6. Perumusan dan Pemenuhan Dinasan Sarana / Formulation and Fulfillment of Service Facility 7. Pemenuhan Dinasan SDM Operasi / Fulfillment of HR Operations Service 8. Digitalisasi Operasi / Digitalization of operation
Direktur Pengelolaan Prasarana / Managing Director of Infrastructure		<ol style="list-style-type: none"> 1. Total Corporate Culture Health Index 2. Ketepatan Waktu Kedatangan Angkutan (Barang dan Penumpang) / Passenger and Goods Transport Arrival Time 3. Ketepatan Waktu Keberangkatan Angkutan (Barang dan Penumpang) / Passenger and Goods Transport Departure Time 4. Toleransi Gangguan Perjalanan Kereta Api Andil Operasi / Tolerance for Disruption to Train Travel Shares Operations 5. Perumusan Perencanaan Perjalanan Kereta Api / Formulation of Train Travel Planning 6. Perumusan dan Pemenuhan Dinasan Sarana / Formulation and Fulfillment of Service Facility 7. Pemenuhan Dinasan SDM Operasi / Fulfillment of HR Operations Service 8. Digitalisasi Operasi / Digitalization of operation

Individual Board of Directors KPIs

Direktur / Director	KPI Bersama / Joint KPIs	KPI Individu / Individual KPIs
Direktur Pengelolaan Sarana / Managing Director of Rolling Stock		<ol style="list-style-type: none"> Total Corporate Culture Health Index Kinerja Sarana / Facility Performance <ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan Sarana / Availability of Facilities Kehandalan Sarana / Reliability of Facilities Sertifikasi Sarana / Facility Certification <ul style="list-style-type: none"> Kelaikan Sarana / Feasibility of Facilities Fasilitas Kerja / Work Facilities Dokumen Standar Perawatan dan Teknik Sarana / Facility Maintenance and Technical Standard Procedure
Direktur Keselamatan dan Keamanan / Managing Director of Safety and Security	<ol style="list-style-type: none"> EBITDA Interest bearing debt to invested capital Volume Angkutan barang / Volume of cargo transportation Safety/Accident Rate Project milestone completion for TOD Plan (KAI) Stasiun Pondokkranji-JRP 	<ol style="list-style-type: none"> Total Corporate Culture Health Index Project Milestone Completion of Investment Initiative (Notes: KAI Proses sertifikasi tanah - legal) / Project Milestone Completion of Investment Initiative (Notes: KAI land certification - legal) Toleransi rasio kriminalitas di PT. KAI / Crime ration tolerance in PT KAI Toleransi jumlah kejadian Kecelakaan Kerja / Work accidents tolerance Jumlah Realisasi Pemenuhan Target Penyusunan atau Rancangan Reviu Regulasi/ Peraturan Direksi/ SOP/ Instruksi Kerja/ Kajian Teknik Keselamatan di Bidang Operasi, Sarana dan Prasarana Perkeretaapian / Total Realization of Fulfillment of Targets for Compilation or Draft of Regulatory Review/ Board of Directors Regulations/ SOP/ Work Instructions/ Study of Safety Engineering in the Field of Operations, Railway Facilities and Infrastructure Jumlah Realisasi Pencapaian Target Penertiban Aset Tanah, Bangunan dan Rumah Perusahaan / Number of Realized Target Achievements for Controlling Company Land, Building and House Assets Jumlah inovasi atau improvement teknologi dan digitalisasi untuk mendukung keselamatan perjalanan kereta api / Number of technological innovations or improvements and digitization to support the safety of train travel
Direktur SDM dan Umum / Managing Director of Human Capital and General Affairs		<ol style="list-style-type: none"> Total Corporate Culture Health Index Penyusunan Kebijakan Talent Development dan Career Path System di Lingkup Kluster / Compilation of Talent Development Policy and Career Path System in the Cluster Scope Ketersediaan Talent: / Talent Availability <ol style="list-style-type: none"> Rasio Perempuan dalam nominated talent / Female ratio in nominated talent Tersedianya Talent BOD BUMN /Availability of SOE BOD Talent Terlaksananya Sertifikasi Pegawai sesuai dengan keahlian yang dipersyaratkan regulasi untuk Operasional KA (termasuk persiapan pengoperasian Sumbagsel) / Implementation of Employee Certification in accordance with the expertise required by regulations for Railway Operations (including preparation for the operation of South Sumatra) Tersedianya Sistem Remunerasi berbasis remunerasi kinerja / Availability of a performance-based remuneration system Kesehatan Pekerja: / Workers Health <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya Vaksinasi Tahap 3 untuk Pekerja / Implementation of Phase 3 Vaccination for Workers Tersedianya Digitalisasi SIKESKA Terintegrasi (Mobile SIKESKA dan Personal Health Digital Assistance) / Availability of Integrated SIKESKA Digitalization (Mobile SIKESKA and Personal Health Digital Assistance) Terpenuhinya rekrut untuk kebutuhan Operasional dan Perawatan / Fulfillment of recruits for Operational and Maintenance needs Engagement Level
Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha / Managing Director of Strategic Planning and Business Development	<ol style="list-style-type: none"> EBITDA Interest bearing debt to invested capital Volume Angkutan barang / Volume of cargo transportation Safety/Accident Rate Project milestone completion for TOD Plan (KAI) Stasiun Pondokkranji-JRP 	<ol style="list-style-type: none"> Total Corporate Culture Health Index Project milestone Penugasan Pemerintah (PSN)- LRT Jabodebek / Government Assignment Milestone Project (PSN) - Jabodebek LRT Pembentukan Subholding commuter (PS) / Commuter subholding establishment Transformasi Stasiun Gambir Tahap 1 Sisi Timur sesuai target timeline - DED (PB) / Gambir Station Transformation Stage 1 East Side in accordance with the timeline target - DED (PB) Penyelesaian kajian finansial usulan investasi (PE) / Completion of Investment Proposal Financial Review Penyusunan rencana teknis investasi pengembangan (PE) / Preparation of development investment (PE) technical plans Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Project Konektivitas KCJB Bd-Pdl (PP, PE dan PB) / Completion of KCJB Bd-Pdl Construction (PP, PE and PB) Kerjasama Pendayagunaan Aset KAI, Pengembangan Aset KAI & Peningkatan Aksesibilitas (PA) / Collaboration of KAI Asset Utilization, KAI Asset Development and Accessibility Improvement (PA)
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Managing Director of Finance and Risk Management		<ol style="list-style-type: none"> Total Corporate Culture Health Index Transformasi Digital / Digital Transformation Service Level Agreement (SLA) Infrastruktur & Aplikasi Utama / Service Level Agreement (SLA) of Main Infrastructure and Application Optimalisasi kompensasi pemerintah (PSO, IMO, dan Perintis) / Optimization of government compensation (PSO, IMO, and pioneer) Penurunan Beban Bunga Pinjaman / Loan interest expenses reduction Pendanaan Investasi Strategis / Strategic Investment Funding Penyampaian Pelaporan Keuangan Tepat Waktu / Timely submission of financial statements <ol style="list-style-type: none"> RKAP / Work Plan and Budget Laporan Keuangan / Financial statements Pelaporan dan pembayaran pajak / Tax reports and payments Pengelolaan BBM Bersubsidi / Subsidized Fuel Management Pengelolaan penjualan barang bekas / Management of used goods Pencapaian Risk Maturity Index / Risk Maturity Index Efektivitas Monitoring dan Pengendalian Risiko Utama Perusahaan. / Company's Main Risks Monitoring and Controlling Effectiveness

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham sebagai pihak yang melakukan penilaian, melalui mekanisme RUPS.

Assessor

Assessment of the performance of the Board of Directors is carried out by the Board of Commissioners and shareholders as the party conducting the assessment, through the GMS mechanism.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners and the Basis for the Assessment

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan dibantu oleh komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Penjelasan mengenai fungsi masing-masing komite beserta penilaian kinerja komite untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit

Merupakan komite yang berperan dalam memonitor kinerja Audit Internal, memonitor Auditor Independen dalam melakukan audit laporan keuangan, menelaah laporan Perseroan kepada pihak luar, dan memonitor Sistem Pengendalian Intern. Lebih dari itu, Komite Audit juga berperan membantu Dewan Komisaris di dalam penugasan-penugasan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

2. Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR)

Merupakan komite yang membantu Dewan Komisaris dalam memonitor berbagai risiko yang dihadapi Perseroan, mencakup aspek, strategi, sistem, serta kebijakan manajemen risiko Perseroan. Di samping itu, KPMR membantu Dewan Komisaris dalam proses identifikasi risiko yang dihadapi KAI serta menyusun langkah mitigasi terhadap masing-masing risiko.

3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Merupakan komite yang membantu Dewan Komisaris dalam melakukan review atas kebijakan talenta Perseroan, evaluasi terhadap calon pengurus baik Perseroan maupun anak perusahaan, serta memberikan masukan dan rekomendasi terhadap remunerasi pengurus Perseroan.

Penilaian terhadap kinerja masing-masing komite dilakukan secara berkala sebagai bagian dari laporan Dewan Komisaris, dengan menggunakan prosedur dan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Penilaian dilakukan dengan kriteria tertentu sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat pemenuhan dari suatu aspek penilaian. Dewan Komisaris sebagai pihak

The Board of Commissioners carries out its duties and responsibilities with the assistance of committees under the Board of Commissioners. These committees consist of the Audit Committee, the Risk Management Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. An explanation of the function of each committee along with the evaluation of the committee's performance for 2022 is as follows:

1. Audit Committee

A committee with the duties to monitor the performance of the Internal Audit, monitor the Independent Auditors in auditing financial statements, review the Company's reports to external parties, and monitor the Internal Control System. In addition, the Audit Committee also assists the Board of Commissioners in other assignments given by the Board of Commissioners.

2. Risk Management Monitoring Committee (KPMR)

It is a committee that assists the Board of Commissioners in monitoring various risks faced by the Company, covering the Company's risk management aspects, strategies, systems and policies. In addition, KPMR assists the Board of Commissioners in the process of identifying risks faced by KAI and developing mitigation measures for each risk.

3. Nomination and Remuneration Committee

A committee that assists the Board of Commissioners in reviewing the Company's talent policies, evaluating prospective management of both the Company and its subsidiaries, as well as providing input and recommendations on the remuneration of the Company's management.

Performance assessment of each committee is carried out periodically as part of the Board of Commissioners' reports, using the procedures and methods determined by the Board of Commissioners. Assessment is carried out with certain criteria as a benchmark in assessing the level of fulfillment of an aspect of the assessment. The Board of Commissioners

yang melakukan penilaian kemudian memberi penilaian terhadap keseluruhan aspek dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, agar hasil penilaian terhadap masing-masing komite dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Hasil penilaian terhadap masing-masing komite merupakan dasar bagi upaya perbaikan untuk periode tahun berikutnya, guna mewujudkan peningkatan kinerja secara berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Untuk tahun 2022, Dewan Komisaris menilai, masing-masing komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik, sesuai pedoman dan rencana kerja. Melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris menilai, komite-komite telah secara efektif memberi dukungan bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, mencakup pengawasan terhadap aspek-aspek operasional dan strategis Perseroan.

as the party conducting the assessment then evaluates all aspects by taking into account the principle of accountability, so that the results of the assessment of each committee can be properly accounted for. The results of the assessment of each committee are the basis for improvement efforts for the following year's period, in order to achieve continuous performance improvement from year to year.

For 2022, the Board of Commissioners considers that each committee has carried out their duties and responsibilities properly, according to the guidelines and work plans. Through the implementation of these duties and responsibilities, the Board of Commissioners considers that the committees have effectively provided support for the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, including supervision of the Company's operational and strategic aspects.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI [GRI 405-1]

Policy on Board of Commissioners and Board of Directors Diversity

Perseroan memahami pentingnya pemenuhan aspek keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Hal tersebut dipenuhi guna menjaga kualitas pengambilan keputusan yang dilakukan masing-masing organ agar tetap objektif, komprehensif, optimal, serta berdampak positif khususnya bagi praktik pengawasan dan pengelolaan Perseroan. Terpenuhinya aspek keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan upaya Perseroan untuk memperkaya sudut pandang di dalam proses pengambilan keputusan, baik Dewan Komisaris maupun Direksi, sebagai nilai tambah yang dihadirkan di dalam kegiatan operasional dan manajemen Perseroan, mencakup pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Kebijakan keberagaman pada komposisi Dewan Komisaris dan Direksi diatur melalui *Board Manual*. Sesuai aturan itu, Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi sejumlah persyaratan, mencakup latar belakang pengetahuan dan keahlian yang dimiliki masing-masing anggota. Persyaratan bagi Dewan komisaris dan Direksi memperlihatkan bahwa komposisi Dewan Komisaris dan Direksi wajib disusun dengan memenuhi keberagaman pengetahuan dan keahlian, sesuai kebutuhan Perseroan.

The Company understands the importance of fulfilling diversity aspects in the composition of the Board of Commissioners and Directors. This is fulfilled in order to maintain the quality of decision-making carried out by each organ to remain objective, comprehensive, optimal, and has a positive impact, especially for the supervision and management practices of the Company. Fulfillment of the diversity aspect in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is the Company's effort to enrich the perspectives in the decision-making process, both the Board of Commissioners and the Board of Directors, as an added value that is presented in the Company's operational and management activities, including the implementation of corporate governance.

The diversity policy on the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is regulated through the Board Manual. In accordance with these regulations, the Board of Commissioners and the Board of Directors must fulfill a number of requirements, including the knowledge and expertise background of each member. The requirements for the Board of Commissioners and the Board of Directors show that the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors must be prepared to meet the diversity of knowledge and expertise, according to the needs of the Company.

Pengungkapan aspek keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat di dalam tabel sebagai berikut:

Disclosure of diversity aspects of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors can be seen in the following table:

Aspek Keberagaman pada Komposisi Dewan Komisaris

Aspects of Diversity in the Composition of the Board of Commissioners

Nama / Name	Jabatan / Position	Usia / Age	Jenis Kelamin / Gender	Pendidikan / Education	Pengalaman Kerja / Work Experience	Keahlian / Skill
Said Aqil Siroj	Komisaris Utama/ Komisaris Independen / President Commissioner/ Independent Commissioner	69 tahun / 69 years old	Laki-Laki / Male	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Ushuluddin dan Dakwah Fakultas Syari'ah, University King Abdul Aziz, Mekkah (1982) / Bachelor of Ushuluddin and Da'wah Faculty of Sharia from King Abdul Aziz University Mecca branch (1982). Master bidang Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin, University Umm al-Qura, Mekkah (1987) / Master in Comparative Religion, Faculty of Ushuluddin from Umm alQura University Mecca (1987). Doktor bidang Aqidah/ Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, University Umma al-Qura Mekkah (1994) / Doctor of Aqidah/ Islamic Philosophy, Ushuluddin Faculty from Umm al-Qura University, Mecca (1994) 	<p>Memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen, Anggota MPR dan Komisaris Independen di berbagai Perusahaan BUMN lainnya. / Has work experience as Lecturer, MPR Member and Independent Commissioner in various other SOEs.</p> <ol style="list-style-type: none"> Komisaris Utama/Komisaris Independen PT KAI (Persero)(2021-Sekarang). / President Commissioner/Independent Commissioner at PT KAI (Persero)(2021-Present). Komisaris Utama PT MNC Televisi Network (iNews) dan PT MNC Portal Indonesia (MPI) (2022-Sekarang). / President Commissioner at PT MNC Television Network (iNews) and PT MNC Portal Indonesia (MPI)(2022-Present). Ketua Umum PBNU (2010-2021). / Chairman of PBNU (2010-2021). Komisaris Independen PT Rumah Sakit Pelabuhan, Pelindo II Group (2019-2020). / Independent Commissioner at PT Rumah Sakit Pelabuhan, Pelindo II Group (2019-2020). Komisaris Independen PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pelindo II Group (2012-2019). / Independent Commissioner at PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pelindo II Group (2012-2019). 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen / Management Filsafat Islam / Islamic philosophy
Rochadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner	60 tahun / 60 years old	Laki-Laki / Male	<ul style="list-style-type: none"> Akademi Militer (1986). / Military Academy (1986). Sussarcab Infanteri (1986). / Sussarcab Infantry (1986). Suslapa I (1991). / Suslapa I (1991). Suslapa II (1995). / Suslapa II (1995). Seskoad (2000). / Seskoad (2000). Sarjana Ilmu Politik (Ilmu Politik), UT (Universitas Terbuka) / Bachelor of Political Science, UT (Universitas Terbuka) 	<p>Memiliki pengalaman kerja sebagai TNI:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero)(2021-Sekarang). / Commissioner at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2021-Present). Dankoopasus TNI, TNI AD (2019-2021). / Dankoopasus TNI, TNI AD (2019-2021). Direktur A BAIS TNI, TNI AD (2018-2019). / Director A BAIS TNI, TNI AD (2018-2019). Danpusdikter Pusterad, TNI AD (2016-2018). / Danpusdikter Pusterad, TNI AD (2016-2018). Paban Sahli Kasad Bidang Orkes Sahli Kasad, TNI AD (2015-2016). / Paban Sahli Kasad on Sahli Kasad Orchestra, TNI AD (2015-2016). Irdam III/Siliwangi, TNI AD (2014). / Has work experience in the National Military Irdam III/ Siliwangi, TNI AD (2014): 	<p>Ilmu Politik / Political Science</p>
Riza Primadi	Komisaris Independen / Independent Commissioner	61 tahun / 61 years old	Laki-Laki / Male	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Sains bidang Matematika dan IPA, Universitas Indonesia (1981-1986) / Bachelor of Science in Mathematics and Natural Sciences, Universitas Indonesia (1981-1986) Pascasarjana pada bidang Science Communication, University of London, Birbeck College (1993-1994) dan bidang Transitional Democracy, University of Birmingham (Chevening Awards)(2000) / Postgraduate Degree in Science Communication, University of London, Birbeck College (1993-1994) and Transitional Democracy, University of Birmingham (Chevening Awards)(2000) 	<p>Memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen, Direktur di beberapa perusahaan swasta, Staf Khusus Menteri BUMN. / Has work experience as a Lecturer, Director in several private companies, Special Staff to the Minister of SOEs.</p> <ol style="list-style-type: none"> Komisaris PT KAI (Persero)(2015-2020 dan 2021 - Sekarang) / Commissioner at PT KAI (Persero)(2015-2020 and 2021 - Present) Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi (2015-2017) / Special Staff for Communication of the Minister of SOES (2015-2017) CEO PT Content Creative Indonesia (2010 - Sekarang) / CEO of PT Content Creative Indonesia (2010 - Present) News Advisor Astro Awani Malaysia (2019-2010) / News Advisor at Astro Awani Malaysia (2019-2010) News Director PT Adi Karya Visi (2005-2008) / News Director at PT Adi Karya Visi (2005-2008) News and Corporate Affairs Director, Trans TV (2000-2005) / News and Corporate Affairs Director at Trans TV (2000-2005) 	<ul style="list-style-type: none"> Sains / Science Ilmu Komunikasi / Communications

Nama / Name	Jabatan / Position	Usia / Age	Jenis Kelamin / Gender	Pendidikan / Education	Pengalaman Kerja / Work Experience	Keahlian / Skill
Endang Tirtana	Komisaris Independen / Independent Commissioner	41 tahun / 41 years old	Laki-Laki / Male	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Aqidah Filsafat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Padang (2000) / Bachelor of Aqidah Philosophy, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Padang (2000) Magister bidang Ilmu Administrasi, Universitas Krisnadwipayana, Jawa Barat (2021) / Master of Administrative Science, Universitas Krisnadwipayana, Jawa Barat (2021) 	<p>Memiliki pengalaman kerja sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Peneliti Senior dan Komisaris Independen. / Has work experience as Muhammadiyah Central Executive, Senior Researcher and Independent Commissioner.</p> <ol style="list-style-type: none"> Komisaris Independen PT KAI (Persero) (2021-Sekarang) / Independent Commissioner at PT KAI (Persero) (2021-Present) Komisaris Independen PT Semen Baturaja (2020-2021) / Independent Commissioner at PT Semen Baturaja (2020-2021) Peneliti Senior Maarif Institute for Culture and Humanity (2019-Sekarang) / Senior Researcher at the Maarif Institute for Culture and Humanity (2019-Present) Direktur Indonesian Watch for Democracy (2017-Sekarang) / Director of Indonesian Watch for Democracy (2017-Present) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (2010-2015) / Central Executive of Muhammadiyah, Institute of Wisdom and Public Policy (2010-2015) 	Ilmu Administrasi / Administrative Science
Johan Srait*	Komisaris Independen / Independent Commissioner	46 tahun / 46 years old	Laki-Laki / Male	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Hukum, Atma Jaya University (1996) / Bachelor of Law, Atma Jaya University (1996) 	<p>Memiliki pengalaman sebagai pendiri dan Komisaris untuk PT Menara Medika Pratama / Has experience as founder and commissioner of PT Menara Medika Pratama</p>	Hukum / Law
Mohamad Risal Wasal***	Komisaris / Commissioner	55 tahun / 55 years old	Laki-Laki / Male	<ul style="list-style-type: none"> Diploma (D4) bidang Transportasi Darat, Sekolah Tinggi Transportasi Darat (1997) / Bachelor's Degree in Applied Sciences in Land Transportation, Sekolah Tinggi Transportasi Darat (1997) Pascasarjana (S2) bidang Ilmu Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Jakarta (2000) / Master's Degree in Management, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Jakarta (2000) 	<p>Memiliki pengalaman sebagai Direktur pada sejumlah Direktorat Kementerian Perhubungan, mencakup Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Saran Transportasi Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, serta Direktorat Pembinaan Keselamatan. / Has experience as Director in a number of Directorates of the Ministry of Transportation, including the Directorate of Traffic and Rail Transport, the Directorate of Road Transportation Suggestions, the Directorate of Road Transportation Infrastructure, and the Directorate of Safety Development.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Transportasi Darat / Land transportation Manajemen / Management
Cris Kuntadi**	Komisaris / Commissioner	53 tahun / 53 years old	Laki-Laki / Male	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Akuntansi / Bachelor of Accounting Profesi Akuntan / Accountant Profession Magister bidang Manajemen / Master of Management Doktor bidang Administrasi Bisnis / Doctor of Business Administration 	<p>Memiliki pengalaman kerja sebagai Kepala pusdiklat BPK, Komisaris dan Dosen. / Has work experience as Head of BPK training center, Commissioner and Lecturer.</p>	Akuntansi / Accounting
Sri Paduka Mangkoenagoro X*	Komisaris / Commissioner	25 tahun / 25 years old	Laki-Laki / Male	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia (2019) / Bachelor of Law, Universitas Indonesia (2019) 	<p>Memiliki pengalaman sebagai Corporate Lawyer. / Has experience as Corporate Lawyer.</p>	Hukum / Law
Freddy Harris	Komisaris / Commissioner	56 tahun / 56 years old	Laki-Laki / Male	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Hukum / Bachelor of Laws Master of Laws (LL.M.) / Master of Law (LL.M.) Diploma Accredited Cyber Crime Studies / Associate Degree in Accredited Cyber Crime Studies Doktor bidang Ilmu Hukum / Doctor of Law 	<p>Memiliki pengalaman kerja sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham dan Dekan. / Has work experience as the Director General of General Legal Administration of the Ministry of Law and Human Rights and Dean.</p>	Hukum / Law
Diah Natalisa	Komisaris / Commissioner	59 tahun / 59 years old	Perempuan / Female	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Manajemen, Universitas Sriwijaya (1987) / Bachelor in Management, Universitas Sriwijaya (1987) Master bidang Manajemen, University of Kentucky (1992) / Master of Management, University of Kentucky (1992) Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Airlangga (1999) / Doctor of Economics Study Program, Universitas Airlangga (1999) 	<p>Memiliki pengalaman kerja sebagai Ketua Program Studi Magister Manajemen, Deputy Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB serta Komisaris. / Has work experience as Chair of the Master of Management Study Program, Deputy for Public Service of the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform and Commissioner.</p>	Manajemen / Management

Nama / Name	Jabatan / Position	Usia / Age	Jenis Kelamin / Gender	Pendidikan / Education	Pengalaman Kerja / Work Experience	Keahlian / Skill
Chairul Anwar	Komisaris / Commissioner	60 tahun / 60 years old	Laki-Laki / Male	<ul style="list-style-type: none"> Akpol / Police Academy PTIK / PTIK SESPIMPOL / SESPIMPOL SESPATI POLRI / SESPATI POLRI LEMHANNAS RI / LEMHANNAS RI Sarjana Bidang Hukum Pidana, Universitas Syahkirti, Palembang / Bachelor's Degree in Criminal Law, Universitas Syahkirti, Palembang Master Bidang Hukum Pidana, IBLAM University, Jakarta / Master's Degree in Criminal Law, IBLAM University, Jakarta 	Memiliki pengalaman kerja sebagai penyidik utama, Asisten Deputi, dan Komisaris / Has work experience as main investigator, Assistant Deputy, and Commissioner. <ol style="list-style-type: none"> Komisaris PT Angkasa Pura Solusi (2020-2021) / Commissioner, PT Angkasa Pura Solusi (2020-2021) Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Kepolisian RI (2019) / Chief Executive of the Task Force for Handling Refugees from Abroad, Police of the Republic of Indonesia (2019) Asdep Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa, Kepolisian RI (2013-2016) / Assistant Deputy for Coordination of Handling Transnational Crime and Extraordinary Crime, Police of the Republic of Indonesia (2013-2016) 	Hukum Pidana / Civil Law

*) Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 15 Agustus 2022 / Serving as Commissioner of the Company from August 15, 2022

***) Menjabat sebagai Komisaris Perseroan hingga 15 Agustus 2022 / Serving as Commissioner of the Company from August 15, 2022

****) Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 20 September 2022 / Serving as Commissioner of the Company from September 20, 2022

Keberagaman Komposisi Direksi

Diversity in the Board of Directors Composition

Nama / Name	Jabatan / Position	Usia / Age	Jenis Kelamin / Gender	Pendidikan / Education	Pengalaman Kerja / Work Experience	Keahlian / Skill
Didiek Hartantyo	Direktur Utama / President Director	61 tahun / 61 years old	Laki-Laki / Male	Sarjana bidang Ekonomi Manajemen / Bachelor of Management Economics	Memiliki pengalaman kerja dxi bidang perbankan / Has work experience in banking	Manajemen / Management
Dadan Rudiansyah*	Direktur Niaga / Managing Director of Commerce	50 tahun / 50 years old	Laki-Laki / Male	Sarjana bidang Hukum Perdata / Bachelor of Civil Law	Memiliki pengalaman kerja di bidang transportasi / Has work experience in transportation	Hukum / Law
Hadis Surya Palapa**	Direktur Niaga / Managing Director of Commerce	57 tahun / 57 years old	Laki-Laki / Male	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Ekonomi / Bachelor of Economics Magister bidang Administrasi Bisnis / Master of Business Administration 	Memiliki pengalaman pada sejumlah posisi/jabatan, dengan bidang mencakup Pembangunan Barge Loading Conveyor, Pembangunan Infrastruktur Penanganan Batu Bara, manajemen pelabuhan, hingga operasi pertambangan sumber daya mineral / Has experience in a number of positions/titles, with fields ranging from Construction of Barge Loading Conveyors, Development of Coal Handling Infrastructure, port management, and mineral resource mining operations	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen / Management Administrasi Bisnis / Business Administration
Heru Kuswanto	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Operasi / - Managing Director of Operations Direktur Pengelolaan Prasarana / Managing Director of Infrastructure 	51 tahun / 51 years old	Laki-Laki / Male	Sarjana Ekonomi bidang Manajemen / Bachelor of Economics in Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang transportasi / Has work experience in transportation	Manajemen / Management
Awan Hermawan Purwadinata	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Pengelolaan Prasarana / - Managing Director of Infrastructure Direktur Operasi / Managing Director of Operations 	57 tahun / 57 years old	Laki-Laki / Male	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Teknik Sipil / Bachelor of Civil Engineering Master bidang Teknik Perkeretaapian / Master in Railway Engineering 	Memiliki pengalaman kerja di bidang transportasi / Has work experience in transportation	Teknik Perkeretaapian / Railway Engineering

Nama / Name	Jabatan / Position	Usia / Age	Jenis Kelamin / Gender	Pendidikan / Education	Pengalaman Kerja / Work Experience	Keahlian / Skill
Eko Purwanto	Direktur Pengelolaan Sarana / Managing Director of Rolling Stock	52 tahun / 52 years old	Laki-Laki / Male	Sarjana bidang Mesin Kapal / Bachelor of Ship Engineering	Memiliki pengalaman kerja di bidang transportasi / Has work experience in transportation	Teknik Mesin Kapal / Ship Engineering
John Robertho	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Keselamatan dan Keamanan / Managing Director of Safety and Security Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha / Managing Director of Strategic Planning and Business Development 	60 tahun / 60 years old	Laki-Laki / Male	Sarjana bidang Teknik Mesin / Bachelor of Mechanical Engineering	Memiliki pengalaman kerja di bidang transportasi / Has work experience in transportation	Teknik Mesin / Mechanical Engineering
Sandry Pasambuna***	Direktur Keselamatan dan Keamanan / Managing Director of Safety and Security	55 tahun / 55 years old	Laki-Laki / Male	<ul style="list-style-type: none"> Insinyur bidang Teknik Sipil / Engineer in Civil Engineering Magister jurusan Teknik Perminyakan / Master of Petroleum Engineering Program <i>Environmental Policy and Management</i> / Environmental Policy and Management Program 	Memiliki pengalaman menjabat pada sejumlah bidang, mencakup Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha, <i>Commissioning & Quality Control</i> , serta konstruksi infrastruktur energi dan sumber daya mineral. / Has experience in serving in a number of fields, including Strategic Planning and Business Development, Commissioning & Quality Control, as well as the construction of energy infrastructure and mineral resources.	<ul style="list-style-type: none"> Teknik Sipil / Civil Engineering Teknik Perminyakan / Petroleum Engineering Manajemen dan Kebijakan Lingkungan / Environmental Management and Policy
Agung Yunanto	Direktur SDM dan Umum / Managing Director of Human Capital and General Affairs	59 tahun / 59 years old	Laki-Laki / Male	Sarjana bidang Teknik Sipil Master bidang General Management / Bachelor of Civil Engineering, Master of General Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang konstruksi / Has work experience in construction	Teknik Sipil / Civil Engineering
Suparno	Direktur SDM dan Umum / Managing Director of Human Capital and General Affairs	55 tahun / 55 years old	Laki-Laki / Male	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Teknik Sipil / Bachelor of Civil Engineering Master bidang Teknik Perkeretaapian / Master of Railway Engineering 	Memiliki pengalaman menjabat pada sejumlah bidang, mencakup logistik, manajemen pengadaan barang dan jasa, <i>IT Planning and Governance</i> / Has experience in serving in a number of fields, including logistics, management of goods and services procurement, IT Planning and Governance	<ul style="list-style-type: none"> Teknik Sipil / Civil Engineering Teknik Perkeretaapian / Railway Engineering
Jeffrie N. Korompis****	Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha / Managing Director of Strategic Planning and Business Development	55 tahun / 55 years old	Laki-Laki / Male	Sarjana bidang Manajemen MA in Management / Bachelor of Management, Master of Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang / Has work experience in	Manajemen / Management
Salusra Wijaya	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Managing Director of Finance and Risk Management	59 tahun / 59 years old	Laki-Laki / Male	Sarjana bidang Akuntansi MBA in International Banking & Finance / Bachelor of Accounting MBA in International Banking & Finance	Memiliki pengalaman kerja di bidang transportasi / Has work experience in transportation	Akuntansi / Accounting

*) Menjabat sebagai Direktur Perseroan hingga 31 Maret 2022 / Serving as Director of the Company until March 31, 2022

**) Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 31 Maret 2022 / Serving as Director of the Company from March 31, 2022

***) Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 26 Oktober 2022 / Serving as Director of the Company from October 26, 2022

****) Menjabat sebagai Direktur Perseroan hingga 26 Oktober 2022 / Serving as Director of the Company until October 26, 2022

NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nomination and Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi [GRI 2-19, 2-20, 2-21]

Perseroan menerapkan proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan pada Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Bakal calon Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan melalui Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah seorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan formal, persyaratan materiil dan persyaratan lain serta lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Penetapan Direksi dan Dewan dilakukan melalui Keputusan RUPS.

Prosedur dan Pelaksanaan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris [GRI 2-19, 2-20]

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kewenangan pemegang saham melalui mekanisme RUPS, dengan formulasi yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, dengan perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 Tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Board of Commissioners and Board of Directors Nomination Procedure [GRI 2-19, 2-20, 2-21]

The Company implements the nomination process for the Board of Commissioners and Board of Directors with reference to the Minister of SOE Regulation PER-10/MBU/10/2020 dated October 9, 2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures Methods of Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises and in the Minister of SOE Regulation PER-03/MBU/02/2015 dated 17 February 2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises.

Prospective candidates for the Board of Commissioners and Directors are proposed through the Board of Commissioners who are assisted by the Remuneration and Nomination Committee. A candidate to be determined as a candidate for members of the Board of Commissioners and Board of Directors is a person who has been declared to have met the formal requirements, material requirements and other requirements and passed the Fit and Proper Test (UKK). Determination of the Board of Directors and the Board is carried out through GMS Resolution.

Procedures and Implementation of Remuneration for Directors and Board of Commissioners [GRI 2-19, 2-20]

Determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors is the authority of shareholders through the GMS mechanism, with the formulation referring to the Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 dated 10 March 2014 concerning Guidelines for Determining Income for Directors, Board of Commissioners and SOE Supervisory Board. with the latest amendment based on SOE Minister Regulation No. PER-13/MBU/09/2021 dated September 23, 2021 concerning Amendments to the Sixth Amendment to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Dalam proses penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris dengan dibantu Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan kajian dan evaluasi tentang besaran dana remunerasi yang akan diberikan. Selanjutnya, hasil kajian dan evaluasi disampaikan kepada RUPS untuk dikaji kembali hingga kemudian disahkan setelah mendapat kesepakatan.

Indikator Penetapan Remunerasi

Penetapan remunerasi berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator mencakup skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, serta faktor-faktor lain yang relevan, dengan batasan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur dan Besaran Remunerasi Masing-Masing Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan prosedur dan indikator penetapan remunerasi yang diuraikan sebelumnya, struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang berlaku untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Penghasilan / Type of Remuneration	Keputusan / Resolution		Keterangan / Description
	Dewan Komisaris / Board of Commissioners	Direksi / Board of Directors	
Honorarium/Gaji / Honorarium/Salary	<ul style="list-style-type: none"> Honorarium Komisaris Utama: 45% dari Direktur Utama / Honorarium of the President Commissioner: 45% from the President Director Anggota Dewan Komisaris: 90% dari Komisaris Utama / Members of the Board of Commissioners: 90% from the President Commissioner 	<ul style="list-style-type: none"> Gaji Direktur Utama: 100% dari gaji Direktur Utama / President Director's salary: 100% of the President Director's salary Anggota Direksi lainnya 85% dari gaji Direktur Utama / Other members of the Board of Directors are given 85% of the salary of the President Director 	Sesuai SR-47/Wk2.MBU.E/08/2022 Tanggal 31 Agustus 2022. / In accordance with SR-47/Wk2.MBU.E/08/2022 dated August 31, 2022
Tunjangan / Allowance			
Tunjangan Hari Raya Keagamaan / Religious Holiday Allowance	1(satu) kali honorarium / 1(one) time honorarium	1(satu) kali gaji / 1(one) time salary	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/ MBU/09/2021 / In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently with PER-13/MBU/09/2021
Asuransi Purna Jabatan / Post-Service Insurance	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun / The premium borne by the company is 25% of salary in 1 year	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun / The premium borne by the company is 25% of salary in 1 year	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/ MBU/09/2021 / In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently with PER-13/MBU/09/2021

Remuneration Determination Procedure

In the process of determining the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, the Board of Commissioners with the assistance of the Nomination and Remuneration Committee conducts a study and evaluation of the amount of remuneration to be given. Furthermore, the results of the review and evaluation are submitted to the GMS to be reviewed until later ratified after obtaining an agreement.

Remuneration Determination Indicator

Determination of remuneration in the form of salary or honorarium, allowances and facilities that are fixed in nature is carried out by taking into account a number of indicators including business scale, business complexity, inflation rate, condition and financial capacity of the Company, as well as other relevant factors, with limits stipulated in regulations current regulation.

Structure and Amount of Remuneration of Each Member of the Board of Directors and Member of the Board of Commissioners

Based on the procedures and indicators for determining remuneration previously described, the remuneration structure for the Board of Commissioners and Board of Directors that applies for 2022 is as follows:

Remuneration Structure for the Board of Commissioners and Board of Directors

Jenis Penghasilan / Type of Remuneration	Keputusan / Resolution		Keterangan / Description
	Dewan Komisaris / Board of Commissioners	Direksi / Board of Directors	
Tunjangan perumahan / Housing Allowance	-	Tunjangan perumahan diberikan secara bulanan / Housing allowances are given on a monthly basis	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021. Apabila menyediakan rumah jabatan wajib digunakan sampai masa jabatan Direksi berakhir dan yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan. / In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently with PER-13/MBU/09/2021. If providing a house of office, it must be used until the term of office of the Board of Directors ends and the person concerned is not given a housing allowance.
Tunjangan Transportasi / Transportation Allowance	20% dari honorarium per bulan / 20% of the honorarium per month	-	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 / In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently with PER-13/MBU/09/2021
Fasilitas / Facilities			
Fasilitas Kendaraan / Vehicle Facility	-	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. / 1 (one) unit of vehicle along with maintenance costs and operational costs, taking into account the company's financial condition.	Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc. Untuk kendaraan berbahan bakar minyak atau batas maksimal 100 kWh untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>) / The specifications and types of vehicles are regulated by the Board of Commissioners with a maximum limit of 3,500 cc for oil-fueled vehicles or a maximum of 100 kWh for battery-based electric vehicles
Fasilitas Kesehatan / Medical Facility	Dalam bentuk asuransi Kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (<i>at cost</i>) / In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (<i>at cost</i>)	Dalam bentuk asuransi Kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (<i>at cost</i>) / In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (<i>at cost</i>)	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 / In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently with PER-13/MBU/09/2021
Fasilitas Bantuan Hukum / Legal Aid Facility	Sebesar pemakaian (<i>at cost</i>)	Sebesar pemakaian (<i>at cost</i>)	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 / In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently with PER-13/MBU/09/2021
Tantiem/Insentif Kinerja / Tantiem/Performance Incentive	Pemberian Tantiem/IK diberikan secara proporsional berdasarkan capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan serta mempertimbangkan capaian kontribusi dividen kepada Negara atau indikator lainnya yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun yang bersangkutan. / Provision of of Tantiem/IK is given proportionally based on the achievement of performance in the year concerned and taking into account the achievement of dividend contributions to the State or other indicators determined by the GMS/Minister in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the year concerned.	Pemberian Tantiem/IK diberikan secara proporsional berdasarkan capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan serta mempertimbangkan capaian kontribusi dividen kepada Negara atau indikator lainnya yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun yang bersangkutan. / Provision of of Tantiem/IK is given proportionally based on the achievement of performance in the year concerned and taking into account the achievement of dividend contributions to the State or other indicators determined by the GMS/Minister in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the year concerned.	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 / In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently with PER-13/MBU/09/2021

Adapun, besaran remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut.

The amount of remuneration for each member of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors for 2022 is as follows.

Besaran Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2022

Amount of Remuneration for the Board of Commissioners in 2022

(Dalam rupiah)

(In rupiah)

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain / Types of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima / Amount Received			
	Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Direksi / Board of Directors	
	Jumlah Orang / Number of people	Nilai / Amount	Jumlah Orang / Number of people	Nilai / Amount
Honorarium/Gaji / Honorarium/ Salary	Dewan Komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2022) / Board of Commissioners (including those who retired in 2022)	14.060.280.000	Direksi (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2022) / Directors (including those who retired in 2022)	27.972.000.000
Tantiem/Insentif Khusus Dewan Komisaris / Tantiem/Special Incentive for the Board of Commissioners	Dewan Komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2022) / Board of Commissioners (including those who retired in 2022)	9.368.962.656	Direksi (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2022) / Directors (including those who retired in 2022)	27.816.896.266
Tunjangan / Allowance				
Tunjangan Hari Raya Keagamaan / Religious Holiday Allowance	Dewan Komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2022) / Board of Commissioners (including those who retired in 2022)	886.950.000	Direksi (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2022) / Directors (including those who retired in 2022)	2.106.000.000

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Committees under the Board of Commissioners

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai organ pengawas dan pemberi nasihat Perseroan, Dewan Komisaris didukung oleh sejumlah komite yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Manajemen Risiko. Masing-masing komite telah dibentuk dan difungsikan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar penerapan GCG yang berlaku, mencakup ketentuan di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

The Board of Commissioners is supported by several committees in carrying out its functions as the supervisory organ and advisor to the Company, namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration, as well as the Risk Oversight Committee. Each committee was established and functioned in accordance with the laws and regulations and the applicable GCG implementation standards, including the provisions in State Minister of BUMN Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang membantu Dewan Komisaris dalam menilai kecukupan sistem pengendalian internal, kecukupan pelaporan, dan pengungkapan laporan keuangan, serta tugas-tugas lain yang tercantum dalam Piagam Komite Audit.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is a supporting organ that assists the Board of Commissioners in assessing the adequacy of the internal control system, adequacy of reporting, disclosure of financial statements, and other duties as stated in the Audit Committee Charter.

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perseroan untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern serta pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

The establishment of the Audit Committee is inseparable from the Company's effort in ensuring the internal control system effectiveness as well as the good corporate governance implementation.

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam Komite yang mengatur organisasi, keanggotaan, pedoman perilaku, fungsi, tugas, kewenangan dan tanggung jawab, serta mekanisme kerja komite. Piagam Komite Audit pertama kali diterbitkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/KA/DEKOM/KAI/I/2013 tanggal 1 Januari 2013 tentang Pedoman Kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*). Pada tahun 2017, Piagam Komite Audit telah diperbaharui dengan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) Nomor: 01/KA/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit di antaranya adalah:

1. Menjadi fasilitator bagi Dewan Komisaris, untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal Perseroan telah dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar *auditing* yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
2. Komite Audit mengkaji ruang lingkup dan ketetapan Audit Eksternal, kewajaran biaya Audit Eksternal serta kemandirian dan objektivitas Auditor Eksternal.
3. Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal/ manajemen dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.
4. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan Internal Audit maupun auditor eksternal.
5. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
6. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
7. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
8. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.
9. Menyusun program kerja tahunan Komite Audit untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan membuat laporan periodik untuk disampaikan dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris.

Audit Committee Charter

The Audit Committee has a Committee Charter which stipulates the organization, membership, code of conduct, functions, duties, authorities, responsibilities, as well as the work mechanism of the committee. The Audit Committee Charter was issued based on the Board of Commissioners Decree Nomor 01/KA/DEKOM/KAI/I/2013 dated January 1, 2013, on Audit Committee Charter. In 2017, the Audit Committee Charter was updated to Audit Committee Charter Nomor: 01/KA/X/2017 dated October 11, 2017.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The duties and responsibilities of the Audit Committee are as follows:

1. Becoming the facilitator to the Board of Commissioners, in ensuring that the Company's internal control structure has been carried out properly and the implementation both internal and external audits has been carried out in accordance with applicable auditing standards and follow-up on audit findings carried out by management.
2. The Audit Committee examining the scope and provisions of the External Audit, the costs fairness of the External Audit and its independency and objectivity.
3. Ensuring the effectiveness of the internal control/ management system and the effectiveness of the performance of external auditors and internal auditors.
4. Assessing the implementation of activities and results of audits conducted by Internal Audit and external auditors.
5. Giving recommendations to the Board of Commissioners related to the improvement of the management control system and its implementation, appointment of an accountant based on independency, the scope of the assignment, and fees.
6. Providing independent opinion in the event of opinion difference between Management and the accountant for the services rendered.
7. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners and the duties of the Board of Commissioners.
8. Ensuring that there are satisfactory evaluation procedures for all information released by the Company.
9. Preparing an annual work program for the Audit Committee to obtain the approval of the Board of Commissioners and make periodic reports to be submitted and evaluated by the Board of Commissioners.

10. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan, seperti laporan keuangan, RJPP, RKAP, laporan Manajemen, dan informasi keuangan lainnya.
 - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
 - c. Melakukan penelaahan atas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan mengkaji kecukupan fungsi audit internal termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan.
 - d. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
 - e. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya.
 - f. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
 - g. Adanya potensi benturan kepentingan di Perseroan.
 - h. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
 11. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
 12. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
 13. Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam piagam Komite Audit.
10. Providing opinions to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Directors to the Board of Commissioners, and identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners, and carrying out other tasks related to the Board of Commissioners' task including:
 - a. Reviewing the financial information that will be released by the Company, such as financial statements, R JPP, RKAP, Management reports, and other financial information.
 - b. Reviewing the Company's compliance with the laws and regulations in the Capital Market and other laws and regulations relating to the Company's activities.
 - c. Assessing review toward the external auditor examination and reviewing the adequacy of the internal audit function including the number of auditors, the annual work plan and assignments that have been implemented.
 - d. Reviewing and reporting to the Board of Commissioners on complaints related to the Company.
 - e. Reviewing the adequacy of external audits including audit planning and the number of audits.
 - f. Reviewing the audit by the internal auditor and supervising the implementation of follow- up by the Board of Directors on the findings of the internal auditor.
 - g. Potential conflicts of interest within the Company.
 - h. Report to the Board of Commissioners related to the various risks that possibly affect the Company and conducting review of the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors, if they do not have any risk monitoring function under the Board of Commissioner.
 11. Reviewing complaints related to the accounting process and the Company's financial reporting.
 12. Maintaining the confidentiality of the Company documents, data, and information from both internal and external rights and is only used for the purpose of carrying out its duties.
 13. Board of Commissioners may provide other assignments to the Audit Committee stipulated in the Audit Committee Charter

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Informasi struktur, keanggotaan, dan keahlian Komite Audit di tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Nama / Name	Jabatan / Position	Keahlian / Expertise	Keterangan / Description
Riza Primadi*	Ketua / Chairman	Kuangan / Financial	Komisaris Independen / Independent Commissioners
Rochadi*	Anggota / Member	Operasional / Operational	Komisaris Independen / Independent Commissioners
Ernesto	Anggota / Member	Operasional / Operational	Pihak Independen / Independent Party
Amalia Setyanti	Anggota / Member	Kuangan / Financial	Pihak Independen / Independent Party

Profil Komite Audit

Profil masing-masing anggota Komite Audit Perseroan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Structure, Membership, and Expertise of Audit Committee

Information regarding the structure, membership, and expertise of the Audit Committee can be viewed in the table below:

Structure, Membership, and Expertise of Audit Committee

Audit Committee Profile

Profile of each Audit Committee Member in 2022 are as follows:

Riza Primadi Ketua Komite Audit / Head of the Audit Committee
Profil Riza Primadi sebagai ketua Komite Audit telah disajikan pada bab Profil Perusahaan bagian Profil Anggota Dewan Komisaris. / Riza Primadi's Profile as the Head of Audit Committee is presented in the Company Profile chapter, Board of Commissioners Members Section

ROCHADI Anggota Komite Audit / Audit Committee Member
Profil Rochadi sebagai ketua Komite Audit telah disajikan pada bab Profil Perusahaan bagian Profil Anggota Dewan Komisaris. / Rochadi's Profile as the member of Audit Committee is presented in the Company Profile chapter, Board of Commissioners Members Section

ERNESTO Anggota Komite Audit / Audit Committee Member	
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Bandung
Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Bukittinggi, 7 Juni 1959 / Bukittinggi, June 7, 1959
Usia / Age	63 tahun / 63 years old
Periode Menjabat / Term of Office	2021-2023 (Periode Pertama) / 2021-2023 (First Period)
Dasar Hukum Penunjukan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris PT. Kereta Api Indonesia Nomor: 01/CH/DEKOM/II/2021 Tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Periode 2021-2023 / PT Kereta Api Indonesia Board of Commissioners Decree Nomor: 01/CH/DEKOM/II/2021 dated January 4, 2021 on the Appointment of the 2021-2023 Audit Committee Members

Riwayat Pendidikan / Educational Background	
<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (1987) / Bachelor's Degree in Economics, Accounting Study Program from Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (1987) Magister Manajemen Akuntansi dari Universitas Padjajaran Bandung (2001) / Master's Degree in Accounting from Universitas Padjajaran Bandung (2001) 	
Sertifikasi / Certification	
<ol style="list-style-type: none"> Self Mastery Development Program Training Wisma Bahtera Cipayung Tahun 2015 / Wisma Bahtera Cipayung Self Mastery Development Program Training in 2015 In House Training Bimbingan Teknik Auditing BPKP Jawa Barat Tahun 2013 / In House Training of Auditing Technical Guidelines by BPKP of West Java in 2013 Pelatihan Audit Kinerja PPA UNPAD Tahun 2002 / PPA UNPAD Performance Audit Training in 2002 Diklat Pengawasan Keuangan Negara Pusdiklat BPKP Tahun 1994 / BPKP Pusdiklat State Financial Supervision Training in 1994 Penataran Pemeriksaan Operasional PPA STAN Tahu 1994 / Upgrading of Operational Examination of PPA STAN in 1994 Diklat Komputer/EDP Audit Pusdiklat BPKP Tahun 1993 / Computer Training/EDP Audit Pusdiklat BPKP in 1993 	

Pengalaman Kerja / Employment History
<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Satuan Pengawasan Intern PT PELNI (2014-2017) / Head of PT.PELNI Internal Control Unit (2014-2017) • Executive Vice President Internal Audit (2012-2014) • Vice President Revenue Verification (2009-2012) • Vice President Pajak, PSO, IMO dan TAC (2009-2009) / Vice President of Taxes, PSO, IMO and TAC (2009-2009) • Kepala Sub Direktorat Sediaan pada Direktorat Keuangan (2007-2009) / Head of Sub-Directorate of Inventory at Directorate of Finance (2007-2009) • Kepala Bagian Administrasi dan SDM Divisi Sarana (2002-2007) / Head of Administration and Human Resources Division of Facilities (2002-2007)
Rangkap Jabatan / Concurrent Positions
-

AMALIA SETYANTI Anggota Komite Audit / Audit Committee Member	
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Tangerang
Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Bandung, 4 Oktober 1963 / Bandung, October 4, 1963
Usia / Age	59 tahun / 9 years old
Periode Menjabat / Term of Office	2021-2023 (Periode Pertama) / 2021-2023 (First Period)
Dasar Hukum Penunjukan / Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT KAI (Persero) Nomor SK-01/CH/DEKOM/I/2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT KAI (Persero)
Riwayat Pendidikan / Educational Background	
<ul style="list-style-type: none"> • S1 (Sarjana Ekonomi) Universitas Indonesia / Bachelor's Degree in Economics from Universitas Indonesia 	
Sertifikasi / Certification	
<ol style="list-style-type: none"> 1. CIISA (International of Certified Information System Auditor) from AAFM - 2021 2. Certified in Audit Committee Practices from IKAI - 2017 3. Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat IV from BSMR/GARP - 2010 (last refreshed in 2016) / Risk Management Certification Grade IV from BSMR/GARP - 2010 (last refreshed in 2016) 	
Pengalaman Kerja / Employment History	
<ul style="list-style-type: none"> • Independent member of the Risk Monitoring Committee and Audit Committee, PT Bank JTrust Indonesia Tbk, 2016-2020/2019 • Independent member of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee, PT Rabobank International Indonesia, 2016-2018 • TS (Treasury Services) Compliance and MLRO (Money Laundering Reporting Officer), JP Morgan Chase, NA - Jakarta Branch, 2013-2015 • Head of Compliance, PT Bank Rabobank International Indonesia, 2010-2012 • Internal Audit Manager, PT Bank Rabobank International Indonesia, 1998-2009 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Positions	
<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Satuan Pengawas Internal Universitas Indonesia (2020-sekarang) 	

Independensi Komite Audit

Perseroan memastikan anggota Komite Audit di tahun 2022 telah memenuhi kriteria independensi sesuai peraturan yang berlaku. Pengungkapan pemenuhan kriteria independensi tersebut adalah sebagai berikut:

Independence of the Audit Committee

The Company ensures the Audit Committee members in 2022 has fulfilled the prevailing requirements. The disclosure of the independence criteria fulfilment is as follows:

Independensi Komite Audit

Independence of the Audit Committee

Kriteria Independensi / Independency Criteria	Riza Primadi	Rochadi	Ernesto	Amalia Setyanti
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi / Has no financial affiliations with the Board of Commissioners and the Board of Directors	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi / Has no managerial relations in the Company, Subsidiaries, or Affiliates.	✓	✓	✓	✓

Kriteria Independensi / Independency Criteria	Riza Primadi	Rochadi	Ernesto	Amalia Setyanti
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan / Has no affiliations with the Shareholders of the Company	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit / Has no familial affiliations with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Audit Committee member	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah / Is not concurrent as an administrators of political parties, officials, and government	✓	✓	✓	✓

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit

Pada tahun 2022, anggota Komite Audit Perseroan mengikuti pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dengan perincian sebagai berikut:

Nama dan Jabatan / Name and Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan / Training and Competency Development Material	Waktu dan Tempat Pelaksanaan / Date and Place of Event	Penyelenggara / Organizer
Riza Primadi Ketua / Head of the Committee	Informasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Riza Primadi di tahun 2022 telah disajikan pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris. / Information regarding trainings and/or competency developments participated by Riza Primadi in 2022 is presented in the Training and/or Competency Development for the Board of Commissioners.		
Rochadi Anggota / Member	Informasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Rochadi di tahun 2022 telah disajikan pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris. / Information regarding trainings and/or competency developments participated by Rochadi in 2022 is presented in the Training and/or Competency Development for the Board of Commissioners.		
Johan Sirait Anggota / Member	Informasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Johan Sirait di tahun 2022 telah disajikan pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris. / Information regarding trainings and/or competency developments participated by Johan Sirait in 2022 is presented in the Training and/or Competency Development for the Board of Commissioners.		
Ernesto Anggota / Member	Bincang SPI Dan Mukerwil FKSPI Jabar Banten Tahun 2022 pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan penyelenggara FKSPI. / SPI Talks and Regional Meeting of FKSPI West Java Banten of 2022 on August 31, 2023 organized by FKSPI		
Amalia Setyanti Anggota / Member	Webinar/Seminar: a. Key Audit Matters Communication - updates on standards on auditing by EY - 2022 b. IIA National Conference, Indonesia Chapter - 2022 c. National Anti-Fraud Conference 2022, ACFE Indonesia Chapter - 2022 d. Risk-based Internal Audit Training by EY - 2022		

Audit Committee Training and/or Competency Development

In 2022, the Company's Audit Committee member participated in trainings and/or competency developments with details as follows:

Rapat Komite Audit

Kebijakan Rapat Komite Audit

Sesuai Piagam Komite Audit, Perseroan menerapkan kebijakan rapat bagi Komite Audit dengan perincian sebagai berikut:

1. Frekuensi Rapat

- Rapat reguler Komite Audit minimal diadakan sekali setiap 1 (satu) bulan, yang diadakan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan rapat reguler Dewan Komisaris.
- Rapat reguler Komite Audit paling tidak harus dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Komite Audit.
- Pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota Komite Audit.
- Komite Audit dapat setiap saat mengadakan rapat untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan atau mendesak di luar agenda rapat reguler tersebut.

Audit Committee Meeting

Audit Committee Meeting Policy

Referring to the Audit Committee Charter, the Company implements the following meeting policy:

1. Meeting Frequency

- The Audit Committee Regular Meetings are held at least once in 1 (one) month, no later than 1 (one) week prior to the implementation of Board of Commissioners regular meeting.
- The Audit Committee Regular Meetings shall be attended by at least 2/3 (two-third) of the Audit Committee members.
- The decision made shall be approved by more than ½ (half) of the Audit Committee members.
- The Audit Committee can hold meetings anytime to discuss pressing matters outside the regular meetings agenda.

e. Komite Audit dalam pengambilan keputusan harus didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat.

2. Agenda Rapat

Agenda setiap rapat harus ditetapkan dengan jelas dan didistribusikan kepada anggota Komite Audit sebelum pelaksanaan rapat.

3. Peserta Rapat

Sesuai dengan wewenangnya, Komite Audit dapat mengundang Satuan Pengawasan Intern, akuntan publik/Auditor Eksternal, anggota Direksi, pejabat dan karyawan Perusahaan maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu dan terkait dengan agenda rapat yang hendak dibicarakan.

4. Notulen Rapat

Setiap rapat harus dibuatkan notulennya secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

e. Decision made by the Audit Committee shall be in the basis of consensus deliberation principles.

2. Meeting Agenda

Agenda of each meeting shall be clearly determined and distributed to the Audit Committee members prior to the meeting implementation.

3. Participants

The Audit Committee is authorized to invite the Internal Audit Unit, public accountants/External Auditors, members of the Board of Directors, officers and employees of the Company as well as other parties deemed necessary and related to the agenda of the meeting to be discussed.

4. Minutes of Meeting

Minutes of each meeting must be made in writing and signed by all members of the Audit Committee present.

Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Pada tahun 2022, Komite Audit menyelenggarakan rapat sejumlah 12 (dua belas) kali atau telah memenuhi jumlah rapat sesuai ketentuan di dalam Piagam Komite Audit. Pengungkapan mengenai tanggal pelaksanaan, agenda, serta peserta rapat Komite Audit di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Audit Committee Meeting Implementation

In 2022, the Audit Committee has held 12 (twelve) meetings, or as required by the provisions in the Audit Committee Charter. The disclosure of implementation date, agenda, and the participants of 2022 Audit Committee meetings are as follows:

Tanggal, Agenda, dan Peserta Rapat Komite Audit

Date, Agenda, and Participants of the Audit Committee Meeting

No.	Tanggal Rapat / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participant	
1	14 Februari 2022 / February 14, 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Struktur Organisasi, tupoksi dan proses bisnis yang terkait dengan pengadaan barang & jasa b. Capaian di tahun 2021 c. Kendala-kendala yang dihadapi dan rencana aksi yang terkait d. Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> - Progress status penyelesaian temuan & rekomendasi audit (internal & eksternal) yang terkait - Implementasi e-procurement 	<ul style="list-style-type: none"> a. Organizational Structure, duties and business processes related to the procurement of goods & services b. Achievements in 2021 c. Challenges faced and related action plans d. Others <ul style="list-style-type: none"> - Progress status of related audit findings & recommendations (internal & external). - Implementation of e-procurement 	<ul style="list-style-type: none"> - Riza Primadi - Rochadi - Ernesto - Amalia Setyanti
2	19 April 2022 / April 19, 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Capaian program Kerja UI Tahun 2022 di Triwulan I, 2022 b. Capaian penyelesaian tindak lanjut dan rekomendasi di Triwulan I, 2022 c. Tanggapan dan rencana aksi UI atas masukan Dekom terhadap program kerja UI tahun 2022 sebagaimana disampaikan melalui surat no. 09/CF/KOM/1/2022 tanggal 25 Januari 2022 d. Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian Komite Audit/ Dewan Komisaris 	<ul style="list-style-type: none"> a. Achievements of UI Work Program 2022 in Q1/2022 b. Achievement of follow-up and recommendation completion in Q1/2022 c. UI's response and action plan to the Board of Commissioners' input on UI's 2022 work program as conveyed by letter no. 09/CF/KOM/1/2022 dated January 25, 2022 d. Other matters that need attention from the Audit Committee/Board of Commissioners 	<ul style="list-style-type: none"> - Riza Primadi - Rochadi - Ernesto - Amalia Setyanti

No.	Tanggal Rapat / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participant	
3	20 Mei 2022 / May 20, 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan lebih lanjut terkait temuan-temuan penting hasil audit operasional dan hasil audit investigative UI di TW I 2022 sebagaimana telah disampaikan sebelumnya b. Program kerja audit UI terkait pemanfaatan PMN c. Program kerja audit UI terkait evaluasi tingkat maturitas manajemen resiko KAI d. Rencana implementasi <i>risk-based</i> audit e. Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian Komite Audit/Dewan Komisaris 	<ul style="list-style-type: none"> a. Further discussion regarding important findings from the operational audit results and UI investigative audit results in Q1 2022 as previously presented b. UI audit work program related to PMN utilization c. UI audit work program related to evaluating the maturity level of KAI's risk management d. Risk-based audit implementation plan e. Other matters that need attention from the Audit Committee/Board of Commissioners 	<ul style="list-style-type: none"> - Riza Primadi - Rochadi - Ernesto - Amalia Setyanti
4	22 Juni 2022 / June 22, 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan terkait laporan Hasil <i>self-assessment</i> GCG tahun Buku 2021 b. Pemaparan terkait status/progress tindak lanjut rekomendasi perbaikan dari USQ - Aspek Dewan Komisaris 	<ul style="list-style-type: none"> a. Presentation regarding the report on the results of the GCG self-assessment for the 2021 Fiscal Year b. Presentation regarding the status/ progress of following up on recommendations for improvement from USQ - Aspects of the Board of Commissioners 	<ul style="list-style-type: none"> - Riza Primadi - Rochadi - Ernesto - Amalia Setyanti
5	28 Juni 2022 / June 28, 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman tentang proses bisnis yang terkait WBS b. Pemahaman tentang proses pelaporannya (termasuk proses pelaporan adanya indikasi fraud) c. Pemahaman tentang program sosialisasi <i>anti-fraud, anti-bribery & corruption</i> (ABC) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Understanding of business processes related to WBS b. Understanding of the reporting process (including the process of reporting indications of fraud) c. Understanding of the anti-fraud, anti-bribery & corruption (ABC) outreach program 	<ul style="list-style-type: none"> - Riza Primadi - Rochadi - Ernesto - Amalia Setyanti
6	6 Juli 2022 / July 6, 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan terkait penyesuaian Regulasi/peraturan Direksi tentang PBJ; termasuk terkait status implementasi transformasi digital PBJ (RAPID) dan rencana aksinya b. Pemaparan terkait pengelolaan dan pengadaan BBM - permasalahan yang ada dan rencana aksi yang terkait c. Pemaparan terkait dukungan Persero terhadap P3DN & TKDN dan rencana aksi persiapannya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Presentation regarding adjustments to the Board of Directors Regulations regarding PBJ; including regarding the implementation status of PBJ digital transformation (RAPID) and its action plans b. Presentation regarding the management and procurement of fuel - existing problems and related action plans c. Presentation regarding Persero's support for P3DN & TKDN and its preparatory action plans 	<ul style="list-style-type: none"> - Riza Primadi - Rochadi - Ernesto - Amalia Setyanti
7	22 Juli 2022 / July 22, 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Capaian penugasan audit (dan lainnya) hingga TW 2, 2022 dibandingkan dengan PKT 2022 b. Temuan-temuan yang signifikan di TW2, 2022 yang perlu mendapatkan perhatian Komite Audit c. Hasil monitoring tindak lanjut temuan & rekomendasi dari hasil audit SPI maupun dari hasil audit pihak eksternal hingga TW2 2022 d. Progress Pengembangan dan sertifikasi SDM di UI e. Progress dari inisiatif lainnya yang tengah dilakukan UI di TW2 2022 f. Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari Komite Audit 	<ul style="list-style-type: none"> a. Audit (and other) engagement outcomes up to Q2, 2022 compared to PKT 2022 b. Significant findings in Q2, 2022 that require attention of the Audit Committee c. Monitoring results of follow-up on findings & recommendations from SPI audit results as well as from external party audit results up to Q2 2022 d. HC development and certification progress at UI e. Progress from other initiatives currently being carried out by UI in Q2 2022 f. Other matters that need attention from the Audit Committee 	<ul style="list-style-type: none"> - Riza Primadi - Rochadi - Ernesto - Amalia Setyanti
		<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan terkait capaian rencana kerja USQ di TW 2 2022 atas program GCG; termasuk progress persiapan dalam rangka penilaian BPKP atas GCG KAI untuk tahun 2022 serta progress tindak lanjut rekomendasi perbaikan GCG dari hasil penilaian BPKP di tahun 2020 b. Pemaparan terkait capaian rencana kerja USQ di TW2 2022 atas program Anti-Kecurangan (Anti-Fraud) serta program <i>Anti-Bribery & Corruption</i> (ABC); termasuk penerapan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) c. Pemaparan terkait capaian rencana kerja USQ di TW2 2022 atas program inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Presentation regarding the achievements of USQ's work plan in Q2 2022 for the GCG program; including the progress of preparations for BPKP's assessment of KAI's GCG for 2022 and the progress of following up recommendations for GCG improvement from the results of BPKP's assessment in 2020 b. Presentation regarding the achievements of USQ's work plan in Q2 2022 for the Anti-Fraud program and the Anti-Bribery & Corruption (ABC) program; including the implementation of the Whistleblowing System (WBS) c. Presentation regarding the achievements of the USQ work plan in Q2 2022 for the innovation program 	<ul style="list-style-type: none"> - Riza Primadi - Rochadi - Ernesto - Amalia Setyanti
8	5 Oktober 2022 / October 5, 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. GCG <ul style="list-style-type: none"> - Progress kesiapan Persero dalam menghadapi penilaian BPKP atas GCG KAI untuk tahun 2022; serta - Progress tindak lanjut rekomendasi perbaikan dari hasil penilaian GCG oleh BPKP di tahun 2020 b. Capaian program kerja tahunan USQ hingga TW3, 2022 khususnya terkait : <ul style="list-style-type: none"> - Program <i>Anti-Fraud</i> (anti kecurangan) - Program <i>Anti-Bribery & Corruption</i> (ABC) - Termasuk penerapan <i>Whistleblowing system</i> (WBS) c. Capaian program kerja tahunan USQ di TW3 2022 terkait program inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. GCG <ul style="list-style-type: none"> - Progress in preparing for BPKP's assessment of KAI's GCG for 2022; and - Progress of following up on recommendations for improvement from the results of the GCG assessment by BPKP in 2020 b. The achievements of USQ's annual work program up to Q3, 2022 are specifically related to: <ul style="list-style-type: none"> - Anti-Fraud Program - Anti-Bribery & Corruption Program (ABC) - Implementation of Whistleblowing system (WBS) c. Achievements of USQ's annual work program in Q3 2022 related to innovation programs 	<ul style="list-style-type: none"> - Riza Primadi - Rochadi - Ernesto - Amalia Setyanti

No.	Tanggal Rapat / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participant	
		a. Capaian penugasan audit (dan lainnya) hingga TW3, 2022 terhadap PKT 2022 b. Temuan-temuan yang signifikan di TW3, 2022 yang perlu mendapatkan perhatian Komite Audit c. Hasil monitoring tindak lanjut temuan & rekomendasi dari hasil audit SPI maupun dari hasil audit pihak eksternal hingga TW3 2022 d. Progress pengembangan dan sertifikasi SDM di Unit Internal Audit e. Progress dari inisiatif lainnya yang tengah dilakukan Unit Internal Audit di TW3 2022 f. Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari Komite Audit	a. Audit (and other) assignment achievements up to Q3, 2022 of PKT 2022 b. Significant findings in Q3, 2022 that require attention of the Audit Committee c. Monitoring results of follow-up findings & recommendations from SPI audit results as well as from external party audit results up to Q3 2022 d. HR development and certification progress in the Internal Audit Unit e. Progress from other initiatives being carried out by the Internal Audit Unit in Q3 2022 f. Other matters that need attention from the Audit Committee	- Riza Primadi - Rochadi - Ernesto - Amalia Setyanti
9	21 Oktober 2022 / October 21, 2022	Pembahasan tentang Penetapan Besaran Imbalan Pengadaan jasa KAP Untuk general Audit PT KAI Tahun Buku 2022 dengan KCC dan KL	Discussion on Determining the Amount of Fee for Procurement of KAP services for the general audit of PT KAI for the 2022 Fiscal Year with KCC and KL	- Riza Primadi - Rochadi - Ernesto - Amalia Setyanti
10	27 Oktober 2022 / October 27, 2022	a. Besaran tagihan bermasalah terhadap total tagihan per 30 September 2022 b. Upaya penagihan yang telah dan akan dilakukan; dan kendala yang dihadapi c. Arah kebijakan Persero dan /atau K-BUMN terkait hal ini	a. Amount of non-performing bills to total bills as of 30 September 2022 b. Billing efforts that have been and will be made; and the obstacles encountered c. Persero and/or K-SOE policy directions on this matter	- Riza Primadi - Rochadi - Ernesto - Amalia Setyanti
11	2 Desember 2022 / December 2, 2022	Pembahasan usulan Draft Program Kerja tahunan Unit Internal Audit Tahun 2023	Discussion on the proposed Draft of the Annual Internal Audit Unit Work Program for 2023	- Riza Primadi - Rochadi - Johan Sirait - Ernesto - Amalia Setyanti
12	20 Desember 2022 / December 20, 2022	a. Progress Transformasi Digital hingga TW3(TW4) 2022 b. Rencana pada phase berikutnya; khususnya di tahun 2023	a. Progress of Digital Transformation up to Q3 (Q4) 2022 b. Plan for the next phase; especially in 2023	- Riza Primadi - Rochadi - Johan Sirait - Ernesto - Amalia Setyanti

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Frekuensi pelaksanaan rapat dan kehadiran masing-masing anggota Komite Audit di dalam rapat untuk tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama dan Jabatan / Name and Position	Nama dan Jabatan / Name and Position		
	Jumlah dan Persentase Kehadiran / Total Attendance and Attendance Percentage		
	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase / Percentage
Riza Primadi Ketua / Head of the Audit Committee	12	12	100%
Rochadi Anggota / Member	12	12	100%
Johan Sirait Anggota / Member	2	2	100%
Ernesto Anggota / Member	12	12	100%
Amalia Setianty Lestari Anggota / Member	12	12	100%

Meeting Frequency and Attendance Rate of the Audit Committee

The frequency of meeting implementation and the attendance of each Audit Committee member in 2022 can be viewed in the table below:

Meeting Frequency and Attendance Rate of the Audit Committee

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Untuk tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan di dalam Piagam Komite Audit serta rencana kerja yang ditetapkan pada awal tahun. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tanggapan Dewan Komisaris Atas Usulan RKAP 2022.
2. Evaluasi Program Kerja Tahunan SPI.
3. Kinerja Triwulan SPI.
4. Pengelolaan dan pengusahaan aset non-produktif.
5. Persiapan pengadaan KAP.
6. Evaluasi Kinerja Perusahaan.
7. Progress Transformasi Digital.
8. Progress pengembangan dan sertifikasi SDM di Unit Internal Audit.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi bagi Perseroan, penugasan khusus dari Dewan Komisaris, serta tugas-tugas lain yang tercantum dalam Piagam Komite.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perseroan untuk memastikan efektivitas fungsi nominasi dan remunerasi, serta melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki Piagam Komite yang mengatur organisasi, keanggotaan, pedoman perilaku, fungsi, tugas, kewenangan dan tanggung jawab, serta mekanisme kerja komite. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/CH/DEKOM/ III/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT KAI (Persero).

Brief Report on the Audit Committee Activities Implementation

In 2022, the Audit Committee has carried out the duties and responsibilities in accordance with the provisions in the Audit Committee Charter and the work plan determined from the beginning of the year. The Brief Report on the Audit Committee Activities in 2022 are as follows:

1. Response of the Board of Commissioners to the Proposed RKAP 2021.
2. Evaluation of the SPI Annual Work Program.
3. SPI Quarterly Performance.
4. Management and exploitation of non-productive assets.
5. Preparation of KAP procurement.
6. Company Performance Evaluation.
7. Digital Transformation Progress.
8. Progress of HC development and certification in the Internal Audit Unit.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee is a supporting organ which assists the Board of Commissioners in carrying out its corporate nomination and remuneration functions, special assignments from the Board of Commissioners, as well as other duties listed in the Committee Charter.

The Nomination and Remuneration Committee is an inseparable part of the Company's effort in ensuring the effectiveness of the nomination and remuneration function, as well as the good corporate governance implementation.

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Nomination and Remuneration Committee has Committee Charter which stipulates organization, membership, code of conduct, functions, duties and responsibilities, as well as the work mechanism of the committee. The Nomination and Remuneration Charter was established based on the Board of Commissioners degree Nomor 05/CH/DEKOM/ III/2021 dated March 10, 2021, on PT KAI (Persero) Nomination and Remuneration Committee Charter.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku, mencakup Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/ POJK.04/2014 tanggal 18 Desember 2014, dengan perincian sebagai berikut:

1. Fungsi Nominasi

- a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2. Fungsi Remunerasi

- a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, berupa:
 - Gaji
 - Honorarium
 - Insentif
 - Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

The Company determined the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee by referring to the applicable regulations and standards, including Financial Services Authorities Regulations Nomor 34/ POJK.04/2014 dated December 18, 2014, with these following descriptions:

1. Nomination Functions

- a. Arrange the composition and nomination process for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
- b. Compile policies and criteria required in the Nomination process for candidates for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
- c. Support the performance evaluation of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
- d. Arrange capacity building programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
- e. Review and propose a candidate who meets the requirements as a member of the Board of Directors and/ or a member of the Board of Commissioners to be submitted to the Board of Commissioners to the GMS.

2. Remuneration Functions

- a. Prepare remuneration structure for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners, in the form of:
 - Wages
 - Honorarium
 - Incentive
 - Fixed and/or variable allowances.
- b. Develop policies on remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
- c. Prepare the amount of Remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Struktur, keanggotaan, dan latar belakang keahlian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama / Name	Jabatan / Position	Keterangan / Description	Keahlian / Expertise
Said Aqil Siroj	Ketua / Head	Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner/Independent Commissioner	Manajemen / Management
Diah Natalisa	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner	Manajemen / Management
Sri Paduka Mangkoenagoro X	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner	Hukum / Law
Corina D. Riantoputra	Anggota / Member	Pihak Independen / Independent Party	Psikologi / Psychology

Structure, Membership, and Expertise of the Nomination and Remuneration Committee

Structure, membership, and expertise background of the Company's Nomination and Remuneration Committee are as follows:

Structure, Membership, and Expertise of the Nomination and Remuneration Committee

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nomination and Remuneration Committee Profile

Profile of each Nomination and Remuneration Committee Member in 2022 are as follows:

SAID AQIL SIROJ Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi / Head of the Nomination and Remuneration Committee	
Profil Said Aqil Siroj sebagai ketua Komite Nominasi dan Remunerasi telah disajikan pada bab Profil Perusahaan bagian Profil Anggota Dewan Komisaris. / Said Aqil Siroj's Profile as the Head of Audit Committee is presented in the Company Profile chapter, Board of Commissioners Members Section	

DIAH NATALISA Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of the Nomination and Remuneration Committee	
Profil Diah Natalisa sebagai ketua Komite Nominasi dan Remunerasi telah disajikan pada bab Profil Perusahaan bagian Profil Anggota Dewan Komisaris. / Diah Natalisa's Profile as the Head of Audit Committee is presented in the Company Profile chapter, Board of Commissioners Members Section	

SRI PADUKA MANGKOENAGORO X Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of the Nomination and Remuneration Committee	
Profil Sri Paduka Mangkoenagoro X sebagai ketua Komite Nominasi dan Remunerasi telah disajikan pada bab Profil Perusahaan bagian Profil Anggota Dewan Komisaris. / Sri Paduka Mangkoenagoro X Profile as the Head of Audit Committee is presented in the Company Profile chapter, Board of Commissioners Members Section	

CORINA D. RIANTOPUTRA Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of the Nomination and Remuneration Committee	
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Tangerang Selatan / South Tangerang
Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Bandung, 14 Oktober 1967 / Bandung, October 14, 1967
Usia / Age	54 tahun / 54 years old
Periode Menjabat / Term of Office	2020-2023 (Periode Pertama) / 2020-2023 (First Period)
Dasar Hukum Penunjukan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris PT KAI Nomor 44/CH/DEKOM/ VI/2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi periode 2020-2023 / PT KAI Board of Commissioners Decree Nomor 44/CH/DEKOM/ VI/2020 on 2020-2023 Nomination and Remuneration Committee Member Appointment

Riwayat Pendidikan / Educational Background
<ul style="list-style-type: none"> S1: Psikologi Universitas Indonesia (1992) / Bachelor's Degree in Psychology from Universitas Indonesia (1992) S2: <i>Organizational Study</i>, University of New South Wales – Australia (2000) / Master's Degree in Organizational Study from University of New South Wales – Australia (2000) S3: <i>Organizational Behavior</i>, University of New South Wales – Australia (2010) / Doctorate in Organizational Behavior, University of New South Wales – Australia (2010)
Sertifikasi / Certification
-
Pengalaman Kerja / Employment History
<ul style="list-style-type: none"> <i>Specially Appointed Professor</i> – Institute for Global Leadership - Ochanomizu University Jepang (Oktober 2021-Februari 2022) Sekretaris Majelis Wali Amanat UI (2021-2024) Anggota Majelis Wali Amanat UI (2019-2024), (2012-2014) Wakil Dekan bidang Pengelolaan SDM dan Keuangan Fakultas Psikologi UI (2014-2018) Ketua bidang Riset dan Pengembangan Ilmu – Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi (2019-2022) Anggota <i>Board Editor</i> – Human Resource Development Review Anggota tim riset GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) (2020-2021) Anggota tim riset Global Work Design (2018-2019) Ketua tim National Capacity Building – SKK Migas (2013-2014) Dosen Fakultas Psikologi UI – (1992-Sekarang)
Rangkap Jabatan / Concurrent Positions
<ol style="list-style-type: none"> <i>Secretary of the University Board</i> (Majelis Wali Amanah/MWA), Universitas Indonesia Anggota editorial Board, jurnal internasional Human Resource Development Review, 2020 - 2024 / Member of Editorial Board, international Journal of Human Resource Development Review, 2020 - 2024

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan memastikan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di tahun 2022 telah memenuhi kriteria independensi sesuai peraturan yang berlaku. Pengungkapan pemenuhan kriteria independensi tersebut adalah sebagai berikut:

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

The Company ensures the Nomination and Remuneration Committee members in 2022 has fulfilled the prevailing requirements. The disclosure of the independence criteria fulfilment is as follows:

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

Aspek Independensi / Independency Aspect	Said Aqil Siroj	Diah Natalisa	Sri Paduka Mangkoenagoro	Corina D. Riantoputra
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi / Has no financial affiliations with the Board of Commissioners and the Board of Directors	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi / Has no managerial relations in the Company, Subsidiaries, or Affiliates.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan / Has no affiliations with the Shareholders of the Company	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit / Has no familial affiliations with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Audit Committee member	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah / Is not concurrent as an administrators of political parties, officials, and government	✓	✓	✓	✓

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada tahun 2022, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum melaksanakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi.

Nomination and Remuneration Committee Training and/or Competency Development

In 2022, members of the Company's Nomination and Remuneration Committee have not yet carried out training and/or competency improvement.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Kebijakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai Piagam Komite, Perseroan menerapkan kebijakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dengan uraian sebagai berikut:

1. Frekuensi Rapat

- Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diadakan sesuai dengan kebutuhan.
- Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi paling tidak harus dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi dalam pengambilan keputusan harus mendasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat.

2. Agenda Rapat

Agenda setiap rapat harus ditetapkan dengan jelas dan didistribusikan kepada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebelum pelaksanaan rapat.

3. Peserta Rapat

Sesuai dengan wewenangnya, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundang anggota Direksi, pejabat dan karyawan Perusahaan maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu dan terkait dengan agenda rapat yang hendak dibicarakan.

4. Notulen Rapat

Setiap rapat harus dibuatkan notulennya secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir.

Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Di tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan rapat sejumlah 7 (tujuh) kali, atau telah memenuhi jumlah pelaksanaan rapat sesuai ketentuan di dalam Piagam Komite. Perincian tanggal pelaksanaan, agenda, serta peserta rapat Komite Nominasi dan Remunerasi di tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Nomination and Remuneration Committee Meeting

Nomination and Remuneration Committee Meeting Policy

In accordance with the Committee Charter, the Company implements the Nomination and Remuneration Committee meeting policy with the following description:

1. Meeting Frequency

- The Nomination and Remuneration Committee Meetings are held as needed
- The Nomination and Remuneration Committee Meetings shall be attended by at least 2/3 (two-third) of the Nomination and Remuneration Committee members.
- The decision made shall be approved by more than ½ (half) of the Nomination and Remuneration Committee members.
- Decision made by the Nomination and Remuneration Committee shall be in the basis of consensus deliberation principles.

2. Meeting Agenda

Agenda of each meeting shall be clearly determined and distributed to the Nomination and Remuneration Committee members prior to the meeting implementation.

3. Participants

The Nomination and Remuneration Committee is authorized to invite the Internal Audit Unit, public accountants/External Auditors, members of the Board of Directors, officers and employees of the Company as well as other parties deemed necessary and related to the agenda of the meeting to be discussed.

4. Minutes of Meeting

Minutes of each meeting must be made in writing and signed by all members of the Nomination and Remuneration Committee present.

Nomination and Remuneration Committee Meeting Implementation

In 2022, the Nomination and Remuneration Committee has held 7 (seven) meetings, or as required by the provisions in the Audit Committee Charter. The disclosure of implementation date, agenda, and the participants of 2022 Nomination and Remuneration Committee meetings are as follows:

Tanggal, Agenda, dan Peserta Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi **Date, Agenda, and Participants of the Nomination and Remuneration Committee**

No.	Tanggal Rapat / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participant
1	6 Juni 2022 / June 6, 2022	Pembahasan Progress Internalisasi Budaya / Discussion on the Progress of Cultural Internalization	- Said Aqil Siroj - Diah Natalisa - Corrina D. Riantoputro
2	20 Juni 2022 / June 20, 2022	Pembahasan WLA / WLA Discussion	- Said Aqil Siroj - Diah Natalisa - Corrina D. Riantoputro
3	4 Juli 2022 / July 4, 2022	Pengembangan Talenta BoD, Millennials dan Perempuan / Development of BoD, Millennials, and Female Talents	- Said Aqil Siroj - Diah Natalisa - Corrina D. Riantoputro
4	12 September 2022 / September 12, 2022	Langkah D6 utk meningkatkan kemampuan inovasi di KAI, dan utk membuat hasil inovasi dapat diimplementasikan by zoom / Step D6 to increase innovation capabilities at KAI, and to make innovation results implementable by zoom	- Said Aqil Siroj - Diah Natalisa - Sri Paduka Mangkoenagoro X - Corrina D. Riantoputro
5	26 September 2022 / September 26, 2022	Update Progress Remunerasi : Sharing Hasil Salary Survey / Remuneration Progress Update: Sharing of Salary Survey Results	- Said Aqil Siroj - Diah Natalisa - Sri Paduka Mangkoenagoro X - Corrina D. Riantoputro
6	14 November 2022 / November 14, 2022	Pengukuran Tingkat Kesehatan Budaya Perusahaan (Akhlak) / Measurement of the Soundness Level of Corporate Culture (AKHLAK)	- Said Aqil Siroj - Diah Natalisa - Sri Paduka Mangkoenagoro X - Corrina D. Riantoputro
7	21 November 2022 / November 21, 2022	Pembahasan Konsultan Employee Engagement Survey / Discussion of Employee Engagement Survey Consultants	- Said Aqil Siroj - Diah Natalisa - Sri Paduka Mangkoenagoro X - Corrina D. Riantoputro

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di dalam pelaksanaan rapat untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance Rate of the Audit Committee

The frequency and attendance rate of each Nomination and Remuneration Committee member in the 2022 meeting implementation is as follows:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Meeting Frequency and Attendance Rate of the Audit Committee

Nama dan Jabatan / Name and Position	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee		
	Jumlah dan Persentase Kehadiran / Total Attendance and Attendance Percentage		
	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase / Percentage
Said Aqil Siroj Ketua / Head	7	7	100%
Diah Natalisa Anggota / Member	7	7	100%
Sri Paduka Mangkoenagoro X Anggota / Member	4	4	100%
Corina D. Riantoputra Anggota / Member	7	7	100%

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2022

Untuk tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan di dalam Piagam Komite, rencana kerja, serta ketentuan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon Anggota Direksi, yaitu Direktur Operasional, dan Direktur Sarana. Selain menyusun sistem yang lebih baik, KNR juga memperlengkapi Dewan Komisaris dengan Panduan untuk melakukan *Competency-Based Interview*, sehingga wawancara yang dilakukan bisa benar-benar mampu mengukur kompetensi dari kandidat, dan bukan sekedar kemampuan kandidat dalam berbicara. Sistem, kebijakan dan kriteria yang disusun oleh KNR telah berhasil menyaring calon terbaik untuk kedua posisi tersebut. Ketepatan seleksi dapat dilihat dari kinerja yang tinggi (dan lebih baik dari tahun sebelumnya) yang dilakukan oleh kedua Direksi baru tersebut.
2. Melaksanakan evaluasi atas kinerja anggota Direksi, yaitu dengan menetapkan kriteria dan sistem evaluasi yang objektif, terukur, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap Direksi. Sistem penilaian kinerja ini, dibangun di awal 2022, Ketika pengukuran *Key Performance Indicator* (KPI) Individual Direksi belum disepakati. Setelah KPI Individual Direksi disepakati di Desember 2022, maka pengukuran kinerja setiap anggota Direksi dilakukan berdasarkan capaian KPI Individualnya.
3. Menelaah dan merekomendasikan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan di Januari 2022, yaitu terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris KCIC dan PSBI Telaahan berpusat pada seberapa jauh usulan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tersebut telah memenuhi GCG, telah memperhatikan faktor formal (misalnya Riwayat penugasan dan kinerja sebelumnya), sudah memperhatikan faktor material (misalnya integritas, kepemimpinan, inovasi, dan lain-lain) yang diukur oleh lembaga independen, sudah mempertimbangkan unsur administratif (misalnya bahwa yang diusulkan bukan

Brief Report on the Nomination and Remuneration Committee Activities Implementation in 2022

In 2022, the Nomination and Remuneration Committee has carried out the duties and responsibilities in accordance with the provisions in the Committee Charter, the work plan, and Financial Services Authorities Regulations Nomor: 34/POJK.04/2014 dated December 18, 2014, on Issuer or Public Company Nomination and Remuneration Committee.

The Brief Report on the Nomination and Remuneration Committee Activities in 2022 are as follows:

1. Developing policies and criteria needed in the nomination process for candidates for members of the Board of Directors, namely the Director of Operations, and the Director of Facilities. In addition to developing a better system, KNR also provided the Board of Commissioners with guidelines for conducting *Competency-Based Interviews*, so that the interviews conducted could truly measure the competence of the candidate, and not just the candidate's ability to speak. The system, policies and criteria developed by the KNR has successfully screened the best candidates for the two positions. The accuracy of the selection could be seen from the high performance (and better than the previous year) by the two new Directors.
2. Carrying out evaluations on the performance of members of the Board of Directors, namely by establishing criteria and evaluation systems that were objective, measurable, and in accordance with the main duties and functions of each Board of Directors. This performance appraisal system was built in early 2022 when the measurement of the Individual Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Directors had not been agreed upon. After the Board of Directors' Individual KPIs were agreed in December 2022, the performance measurement of each Board of Directors members was carried out based on the achievements of their Individual KPIs.
3. Reviewing and recommending candidates for the Subsidiaries' Board of Directors and Board of Commissioners members in January 2022, namely related to KCIC and PSBI Board of Directors and Board of Commissioners. The study focuses on how far the proposals of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Subsidiary have complied with GCG, has paid attention to formal factors (e.g. history of assignments and previous performance), has paid attention to material factors (e.g. integrity, leadership, innovation, etc.) measured by independent institutions,

pengurus partai politik ataupun Kepala Daerah), serta telah memperhatikan kebutuhan dari Anak Perusahaan dan kepentingan jangka panjang PT KAI.

4. Membangun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses pemilihan *EVP Corporate Secretary*, yang penunjukannya membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris. Sistem pemilihan *EVP Corporate Secretary* yang dibangun memperhatikan rekam jejak kandidat yang ada, nilai *assessment centre*-nya, dan wawancara oleh 5 orang Dewan Komisaris, yang telah dibekali dengan panduan untuk melakukan *Competency-Based Interview*.
 5. Memonitor program pengembangan kemampuan BoD-1, dengan cara memberikan penasihat akan pentingnya (1) Direksi mengkomunikasikan hasil penilaian kinerja setiap BoD-1 yang menjadi bawahan langsungnya, agar yang bersangkutan mendapatkan input terkait kekuatan dan kelemahannya, serta mendapatkan input terkait cara pengembangan dirinya; (2) kesesuaian antara program pengembangan yang diberikan kepada BoD-1 dengan kebutuhan pengembangan tiap-tiap orang. KNR menegaskan bahwa program pengembangan BoD-1 tidak boleh bersifat generik, tetapi perlu spesifik dan terarah demi peningkatan kompetensi setiap anggota BoD-1.
 6. Membangun kebijakan, kriteria dan penilaian kinerja Organ Pendukung Dewan Komisaris. Sistem penilaian kinerja Organ Pendukung Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan (1) Kualitas pelaksanaan tugas pokok dari setiap anggota Komite yang telah ditetapkan di Peraturan Menteri, POJK, dan Piagam Komite; dan (2) sikap kerja dan kompetensi anggota komite. Keseluruhan kriteria ini kemudian diterjemahkan menjadi indikator perilaku dan kompetensi. Setiap anggota Organ Pendukung, dievaluasi oleh minimal 5 (lima) anggota Dewan Komisaris. Hasil penilaian kemudian didiskusikan di rapat Dewan Komisaris untuk menjadi keputusan bersama.
 7. Membantu Komisaris Utama, sebagai Ketua *Cluster Talent Committee* Logistik Darat, untuk mempersiapkan bahan dan pertimbangan yang diperlukan dalam rapat CTC tersebut. Salah satu materi kunci yang dipersiapkan adalah terkait proses kalibrasi penilaian kompetensi dari berbagai perusahaan yang masuk di kelompok logistik darat. Berdasarkan rekomendasi KNR, proses kalibrasi dapat dilakukan dengan lebih baik, karena diperkuat dengan *Subject Matter Expert* yang mempunyai keahlian di bidang penilaian kompetensi.
4. Developing policies and criteria needed in the *EVP Corporate Secretary* selection process, the appointment of which requires the approval of the Board of Commissioners. The *EVP Corporate Secretary* selection system that was built takes into account the track records of existing candidates, the value of the assessment center, and interviews by 5 members of the Board of Commissioners, who have been provided with guidelines for conducting *Competency-Based Interviews*.
 5. Monitoring the capacity development program of BoD-1, by providing advice on the importance of (1) The Board of Directors communicating the results of the performance appraisal of each BoD-1 that is their direct subordinate, so that they can get input regarding their strengths and weaknesses, as well as get input on how to develop themselves; (2) the suitability of the development program given to BoD-1 with the development needs of each person. KNR emphasized that the BoD-1 development program should not be generic in nature, but should be specific and directed to increase the competence of each member of the BoD-1.
 6. Developing policies, criteria, and performance appraisal of the Supporting Organs of the Board of Commissioners. The performance appraisal system for the Supporting Organs of the Board of Commissioners is carried out by taking into account (1) the quality of the implementation of the main tasks of each member of the Committee as stipulated in the Ministerial Regulation, POJK, and the Committee Charter; and (2) work attitude and competence of committee members. All these criteria are then translated into behavioral and competency indicators. Each member of the Supporting Organs is evaluated by a minimum of 5 (five) members of the Board of Commissioners. The results of the assessment are then discussed at the Board of Commissioners meeting to become a joint decision.
 7. Assisting the President Commissioner as Chair of the Land Logistics Talent Committee Cluster, to prepare materials and considerations needed for the CTC meeting. One of the key materials prepared is related to the process of calibrating competency assessments from various companies that are included in the land logistics group. Based on the KNR recommendation, the calibration process can be carried out better, because it is strengthened by Subject Matter Experts who have expertise in the field of competency assessment.

8. Membuat telaah dan merekomendasikan remunerasi bagi anggota Direksi. Dalam memberikan rekomendasi terkait remunerasi bagi Direksi, KNR bukan saja memperhatikan kinerja perusahaan, tetapi juga memperhatikan konteks pandemi yang menjadi tantangan besar bagi perusahaan logistik di tingkat nasional dan global. Dalam konteks tersebut, KNR memperhatikan keberhasilan Direksi untuk (1) mengurangi potensi kerugian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19; (2) memprioritaskan kesehatan dan keselamatan penumpang dan karyawan KAI. Dengan kata lain, proses telaah dan rekomendasi terkait remunerasi bagi anggota Direksi dilakukan secara komprehensif dan bertanggung jawab.
9. Membuat telaah dan merekomendasikan remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri BUMN PER-06/MBU/04/2021, maka KNR merekomendasikan remunerasi bagi anggota Organ Pendukung, dan rekomendasi tersebut mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
10. Mengevaluasi kinerja Direktorat SDM secara berkala, setiap triwulan, yaitu dengan memperhatikan seberapa jauh Direktorat SDM telah berhasil mencapai target KPI-nya. Secara khusus, KNR memberikan perhatian bagi kemajuan KAI terkait: (1) *Human Capital Transformation*; (2) Pengembangan BoD-1, termasuk di dalamnya ketepatan program pengembangan dan dilaksanakannya *coaching* oleh Direksi terhadap setiap BoD-1 yang menjadi bawahan langsungnya; (3) Pengembangan talenta *millennials* dan talenta perempuan; dan (4) Pengukuran kinerja yang lebih objektif, dan pembuatan aplikasi khusus terkait hal ini.

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite Pemantau Manajemen Risiko merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha, tata cara meminimalisasi risiko, investasi, hingga pelaksanaan *Enterprise Risk Management* (ERM) Perseroan.

Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perseroan untuk memastikan efektivitas fungsi manajemen risiko serta melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Reviewing and recommending remuneration for members of the Board of Directors. In providing recommendations regarding remuneration for the Board of Directors, KNR not only pays attention to the company's performance, but also pays attention to the context of the pandemic which is a big challenge for logistics companies at the national and global level. In this context, KNR pays attention to the success of the Board of Directors to (1) reduce potential losses caused by the COVID-19 pandemic; (2) prioritize the health and safety of passengers and employees of KAI. In other words, the review process and recommendations related to remuneration for members of the Board of Directors are carried out comprehensively and responsibly.
9. Reviewing and recommending remuneration for the Supporting Organs of the Board of Commissioners. By taking into account the Regulation of the Minister of SOEs per-06/ MBU/04/2021, the KNR recommends remuneration for members of the Supporting Organs, and the recommendation is approved by the Board of Commissioners.
10. Evaluating the HR Directors' performance periodically, tri-monthly, by observing how far the HR Directors had achieved the KPI Target. Specifically, KNR pays great attention to KAI developments relating to: (1) Human Capital Transformation; (2) BoD-1 Development, including the pertinence of the development program and the implementation of coaching by the Board of Directors for each BoD-1 which is the direct subordinate; (3) Development of millennial talents and female talents; and (4) More objective measurement of performance, and making specific applications in this regard.

RISK MANAGEMENT OVERSIGHT COMMITTEE

The Risk Management Oversight Committee is a supporting organ that assists the Board of Commissioner in conducting assessments and providing recommendations regarding business risks, procedures for minimizing risks, investments, to the implementation of the Company's *Enterprise Risk Management* (ERM).

The Risk Management Oversight Committee establishment is an inseparable part of the Company's effort to ensure the effectiveness of risk management functions as well as the implementation of good corporate governance principles in accordance with the applicable laws and regulations.

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko memiliki Piagam Komite yang mengatur organisasi, keanggotaan, pedoman perilaku, fungsi, tugas, kewenangan dan tanggung jawab, serta mekanisme kerja komite. Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko diterbitkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 09/CH/DEKOM/XI/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko PT KAI (Persero).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab yang termuat di dalam Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko serta *Board Manual* Perseroan. Tugas dan tanggung jawab tersebut disusun berdasarkan standar penerapan GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perincian tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap realisasi rencana investasi dan risiko usaha/pelaksanaan ERM (*Enterprise Risk Management*) yang tercantum dalam RJPP dan RKAP.
2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan investasi dan dan risiko usaha/pelaksanaan ERM (*Enterprise Risk Management*), kebijakan dan strategi investasi dan risiko usaha/pelaksanaan ERM (*Enterprise Risk Management*) yang ada dan memberikan masukan dalam rangka *me-review* dan menetapkan kebijakan dan strategi investasi serta risiko usaha yang baru.
3. Menyiapkan bahan, informasi, materi, analisis dan kajian terkait dengan pelaksanaan investasi dan dan risiko usaha/pelaksanaan ERM (*Enterprise Risk Management*), dalam rangka menekan dan/atau menghindarkan Perseroan dari terjadinya *cost overrun* dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas di bidang investasi usaha dan risiko usaha/pelaksanaan ERM (*Enterprise Risk Management*).
4. Masukan dan kajian tentang kelayakan investasi usaha serta risikonya dan risiko usaha/pelaksanaan ERM (*Enterprise Risk Management*), terkait dengan ketepatan proyeksi, rekayasa pembiayaannya, dan ketepatan penggunaan teknologi, kebutuhan SDM, serta inovasinya.
5. Menyusun program kerja tahunan Komite Pemantau Manajemen Risiko untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan membuat laporan periodik untuk disampaikan dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris.

The Risk Management Oversight Committee Charter

The Risk Management Committee has Committee Charter which stipulates organization, membership, code of conduct, functions, duties, authorities, responsibilities, as well as the work mechanism of the committee. The Risk Management Oversight Committee was issued based on the Board of Commissioners Decree No. 09/CH/DEKOM/XI/2022 dated November 23, 2022, on PT KAI (Persero) Risk Management Oversight Committee Charter.

Duties and Responsibilities of the Risk Management Oversight Committee

The Risk Management Oversight Committee bears duties and responsibilities comprised in the Risk Management Oversight Committee and the Company's Board Manual. The duties and responsibilities are prepared based on the GCG implementation standards and the applicable laws and regulations.

Details of the Risk Management Oversight Committee duties and responsibilities are as follows:

1. Monitoring and evaluating the realization of investment plan and business risk/ERM (*Enterprise Risk Management*) implementation included in the RJPP and RKAP.
2. Evaluating the investment and business risk/ERM (*Enterprise Risk Management*) implementation, existing investment and business risk/ERM implementation strategies and policies, and providing suggestions in reviewing and establishing the new investment and business risk strategies and policies.
3. Preparing materials, information, materials, analyses, and research related to the investment and business risk/ERM implementation to prevent the Company from experiencing cost overrun and improving efficiency and effectiveness in business investment and business risk/ERM implementation.
4. Providing inputs and conducting feasibility study on business investment as well as its risk and business risk/ERM implementation, relating to the projection accuracy, payment engineering, and the technology usage accuracy, human capital needs, as well as its innovations.
5. Arranging the annual work program of the Risk Oversight Committee to gain approval from the Board of Commissioners and preparing periodic reports to be submitted and evaluated by the Board of Commissioners.

6. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan dan pelaksanaan ERM (*Enterprise Risk Management*) sebagai bahan usulan kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya menjadi bahan arahan kepada Direksi.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.

6. Supervising and evaluating the implementation of ERM (*Enterprise Risk Management*) as a part of recommendations to the Board of Commissioners to become input for directives to the Board of Commissioners
7. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners
8. Preserving the confidentiality of the Company's documents, data, and information, both from internal or external parties and solely utilizing them for the purpose of carrying out their duties.
9. Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Manajemen Risiko

Struktur, keanggotaan, dan latar belakang anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Structure, Membership, and Expertise of Risk Management Oversight Committee

The structure, membership, and background of the Risk Management Oversight Committee are as follows:

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Manajemen Risiko

Structure, Membership, and Expertise of the Risk Management Oversight Committee

Nama / Name	Jabatan / Position	Keterangan / Description	Keahlian / Expertise
Chairul Anwar	Ketua / Head	Komisaris / Commissioner	Manajemen / Management
Endang Tirtana	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner	Ilmu Administrasi / Administration
Mohamad Risal Wasal	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner	Manajemen / Management
Miranti Gani	Anggota / Member	Pihak Independen / Independent Party	Manajemen Risiko / Risk Management
Handy Purnama	Anggota / Member	Pihak Independen / Independent Party	Manajemen Risiko / Risk Management

Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko

Profil anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko pada posisi 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Risk Management Oversight Committee Profile

Profile of each Risk Management Oversight Committee Member as of December 31, 2022, are as follows:

CHAIRUL ANWAR Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko / Head of the Risk Management Oversight Committee
Profil Chairul Anwar sebagai ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan bagian Profil Anggota Dewan Komisaris. / Chairul Anwar's Profile as the Head of Risk Management Oversight Committee is presented in the Company Profile chapter, Board of Commissioners Members Section

ENDANG TIRTANA Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Oversight Committee Member
Profil Endang Tirtana sebagai ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan bagian Profil Anggota Dewan Komisaris. / Endang Tirtana's Profile as the Risk Management Oversight Committee member is presented in the Company Profile chapter, Board of Commissioners Members Section

MOHAMAD RISAL WASAL Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Oversight Committee Member
Profil Mohamad Risal Wasal sebagai ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan bagian Profil Anggota Dewan Komisaris. / Mohamad Risal Wasal's Profile as the Risk Management Oversight Committee member is presented in the Company Profile chapter, Board of Commissioners Members Section

MIRANTI GANI Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Oversight Committee Member	
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Jakarta, 24 Maret 1963 / Jakarta, March 24, 1963
Usia / Age	60 tahun / 60 years old
Periode Menjabat / Term of Office	2021-2024 (Periode Pertama) / 2021-2024 (First Period)
Dasar Hukum Penunjukan / Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT KAI (Persero) Nomor SK-07/CH/DEKOM/V/2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko PT KAI (Persero) / Board of Commissioners Decree Nomor: 07/CH/DEKOM/V/2021 on PT KAI (Persero) Risk Management Oversight Committee Member Appointment.
Riwayat Pendidikan / Educational Background	
<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia / Bachelor's Degree in Economics from Faculty of Economics Universitas Indonesia 	
Sertifikasi / Certification	
<ul style="list-style-type: none"> International Certificate in Enterprise Risk Management by International Risk Management – UK (IRMCert) Certified Risk Management for Banker (BSMR) Level 1 to 4 Certified Audit Committee Practices (CACP) Certified Wealth Management (CWM) Securities and Investment Personnel conducted by Securities Institute, London (CSI) Shariah Banking Course – RBS Consumer Credit Course – RBS Operational Risk Management Certification – Standard Chartered Bank Global (ORMC) Islamic Banking Certification (IBC) Internal Audit Certification – Kuala Lumpur 	
Pengalaman Kerja / Employment History	
<ul style="list-style-type: none"> Komite Manajemen Risiko Lembaga Penjamin Simpanan (PS) 2020-2022 / Risk Management Committee of The Deposit Insurance Agency (LPS) (2020-2022) Komisaris Independen Sumberdaya Sewatama (Trakindo Group) 2018-2021. / Independent Commissioner of Sumberdaya Sewatama (Trakindo Group) 2018-2021 Independent Senior Management Advisor / Consultant for Business Process and Risk Control improvement Rabo Bank, Indonesia (2016-2018) Independent consultant for Risk based business process improvement PT Fors Fortis Indonesia (Bostinco) (2016) Operational Risk Management Head Standard Chartered Bank Indonesia 2010-2015 Head of Process and Control ABN-AMRO Bank Indonesia 2007-2010 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Positions	
-	

HANDY PURNAMA Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Oversight Committee Member	
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Bandung
Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Jakarta, 15 Juli 1966 / Jakarta, July 15, 1966
Usia / Age	56 tahun / 56 years old
Periode Menjabat / Term of Office	2022-2025 (Periode Pertama) / 2022-2025 (First Period)
Dasar Hukum Penunjukan / Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 06/CH/DEKOM/IX/2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Kereta Api Indonesia (Persero). / Board of Commissioners Decree No. 06/CH/DEKOM/IX/2022 on PT Kereta Api Indonesia (Persero) Risk Management Oversight Committee Member Appointment.
Riwayat Pendidikan / Educational Background	
<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik jurusan Teknik Fisika di Institut Teknologi Bandung (1996) / Bachelor of Engineering in Physics Engineering at Institut Teknologi Bandung (1996) Magister Teknik jurusan Teknik Perkeretaapian di Institut Teknologi Bandung (2000) / Master of Engineering in Railway Engineering at Institut Teknologi Bandung (2000) 	

Sertifikasi / Certification
<ul style="list-style-type: none"> Governance Risk Compliance For Executive Certified Strategy Execution Profesional Skema Pengelolaan Lembaga Pelatihan Kerja (PLPK)
Pengalaman Kerja / Employment History
<ul style="list-style-type: none"> Corporate Deputy Director of Training and Education - PT KAI (Persero)(2020-2022) Corporate Deputy Director of Revenue and Cost Consolidation - PT KAI (Persero)(2018-2020) Director of Parking and Technology Business - PT KAI Service (2017-2018) Vice President of PSO, IMO and TAC - PT KAI (Persero)(2015-2017) Vice President of Planning and Evaluation Training and Education - PT KAI (Persero)(2014-2015)
Rangkap Jabatan / Concurrent Positions
-

Independensi Komite Pemantau Manajemen Risiko

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko telah dipastikan memenuhi kriteria independensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengungkapan pemenuhan kriteria independensi tersebut adalah sebagai berikut:

Risk Management Oversight Committee Independence

The Risk Management Oversight Committee members have been ensured to fulfil the independency criteria as stipulated by the prevailing laws and regulations. Disclosure of the independency criteria fulfilment are as follows:

Independensi Komite Pemantau Manajemen Risiko

Risk Management Oversight Committee Independence

Aspek Independensi / Independency Aspect	Chairul Anwar	Endang Tirtana	Mohamad Risal Wasal	Miranti Gani	Handy Purnama
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi / Has no financial affiliations with the Board of Commissioners and the Board of Directors	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi / Has no managerial relations in the Company, Subsidiaries, or Affiliates.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan / Has no affiliations with the Shareholders of the Company	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit / Has no familial affiliations with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Audit Committee member	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah / Is not concurrent as an administrators of political parties, officials, and government	✓	✓	✓	✓	✓

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Kompetensi Komite Pemantau Manajemen Risiko

Pada tahun 2022, anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko mengikuti sejumlah kegiatan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dengan perincian sebagai berikut:

Risk Management Oversight Committee Training and/or Competency Development

In 2022, the Company's Risk Management Oversight Committee members have participated in several trainings and/or competency developments with the following details:

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Manajemen Risiko

Risk Management Oversight Committee Training and/or Competency Development

Nama dan Jabatan / Name and Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan / Training and Competency Development Materials	Waktu dan Tempat Pelaksanaan / Date and Place of Event	Penyelenggara / Organizer
Chairul Anwar Ketua / Head	Informasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Chairul Anwar di tahun 2022 telah disajikan pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris. / Information on training and/or competency development attended by Chairul Anwar in 2022 has been presented in the Board of Commissioners Training and/or Competency Development section		
Endang Tirtana Anggota / Member	Informasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Endang Tirtana di tahun 2022 telah disajikan pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris. / Information on training and/or competency development attended by Endang Tirtana in 2022 has been presented in the Board of Commissioners Training and/or Competency Development section		

Nama dan Jabatan / Name and Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan / Training and Competency Development Materials	Waktu dan Tempat Pelaksanaan / Date and Place of Event	Penyelenggara / Organizer
M Risal Wasal Anggota / Member	Informasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Mohamad Risal Wasal di tahun 2022 telah disajikan pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris. / Information on training and/or competency development attended by Mohamad Risal Wasal in 2022 has been presented in the Board of Commissioners Training and/or Competency Development section		
Miranti Gani Anggota / Member	Certified Risk Management for Bankers (BSMR) level 1,2.3 dan 4 (<i>refreshed</i> 26 November 2022)		
Handy Purnama Anggota / Member	Pelatihan Persiapan Ujian Sertifikasi Profesi Tata Kelola, Risiko dan Tingkat Kepatuhan Utama (<i>Certified Governance, Risk, and Compliance for Executive = GRCE</i>) pada tanggal 8 s.d. 10 Desember 2022 diselenggarakan secara Online oleh <i>Strategic Development Group</i> / Training on the Preparation for the Certified Governance, Risk, and Compliance for Executive (GRCE) Professional Certification Exam on December 8-10, 2022 online by the Strategic Development Group		

Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Kebijakan Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Perseroan menerapkan kebijakan rapat bagi Komite Pemantau Manajemen Risiko yang termuat di dalam Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko. Perincian mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Manajemen Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Setiap rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang hadir.
3. Risalah rapat disampaikan secara tertulis oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris.
4. Kehadiran anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Untuk tahun 2022, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat sejumlah 13 (tiga belas) kali. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sesuai jumlah yang ditentukan di dalam Piagam Komite. Tanggal pelaksanaan, agenda rapat, serta peserta rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Risk Management Oversight Committee Meeting

Risk Management Oversight Committee Meeting Policy

The Company implemented policy for the Risk Management Oversight Committee, comprised in Risk Management Oversight Committee Charter. Details regarding the policy are as follows:

1. Risk Management Oversight Committee shall at least hold the same minimum amount of meeting as the minimum meeting requirement of Board of Commissioners as stipulated in the articles of association.
2. Every Risk Management Oversight Committee meeting contained in the minutes of meeting will be undersigned by all Risk Management Oversight Committee Members who are present.
3. Minutes of meetings must be made in writing by the Risk Management Oversight.
4. The attendance of the Risk Management Oversight Committee members in the meeting will be reported in the Risk Management Oversight Committee's tri-monthly reports and the annual report.

Risk Management Oversight Meeting Implementation

In 2022, the Risk Management Oversight Committee has held 13 (thirteen) meetings. The implementation shows that the Risk Management Oversight Committee had held meetings as stipulated by the Committee Charter. The disclosure of implementation date, agenda, and the participants of 2022 Audit Committee meetings are as follows:

**Tanggal, Agenda, dan Peserta Rapat Komite Pemantau
Manajemen Risiko**

**Date, Agenda, and Participants of the Risk Management
Oversight Committee Meeting**

No.	Tanggal Rapat / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participant
1	13 Januari 2022 / January 13, 2022	Rapat Koordinasi Internal KPMR / KPMR Internal Coordination Meeting	- Freddy Harris - Cris Kuntadi - Chairul Anwar - Mokhamad Mahdum - Miranti Gani
2	21 Januari 2022 / January 21, 2022	a. Pembahasan Rencana kerja tim UR Tahun 2022 / Discussion of the 2022 UR team work plan b. Konsolidasi Persiapan <i>Risk Management kick-off meeting</i> / Consolidation of Risk Management kick-off meeting preparations	- Freddy Harris - Cris Kuntadi - Chairul Anwar - Mokhamad Mahdum - Miranti Gani
3	2 Februari 2022 / February 2, 2022	Tindak Lanjut Arahan RUPS untuk Penyusunan Program dan Target Bulanan Manajemen Risiko / Follow-up of GMS Directions for the Preparation of Monthly Risk Management Programs and Targets	- Freddy Harris - Cris Kuntadi - Chairul Anwar - Mokhamad Mahdum - Miranti Gani
4	7 Februari 2022 / February 7, 2022	Pembahasan Program Kerja Unit Manajemen Resiko / Discussion of the Risk Management Unit Work Program	- Freddy Harris - Cris Kuntadi - Chairul Anwar - Mokhamad Mahdum - Miranti Gani
5	21 Februari 2022 / February 21, 2022	a. <i>Update 15 Top Risk status</i> / Update of 15 Top Risk statuses b. Risiko <i>Entity</i> bulan Jan 2022 / Entity Risk for Jan 2022 c. Update persiapan pengukuran RMI / Update preparation for RMI measurements d. Update rencana bulanan / Monthly plan update e. Persiapan <i>kick off meeting</i> monitoring implementasi ERM / Preparation of kick off meeting for monitoring of ERM implementation	- Freddy Harris - Cris Kuntadi - Chairul Anwar - Mokhamad Mahdum - Miranti Gani
6	29 Maret 2022 / March 29, 2022	a. Update dua mingguan KPMR / KPMR bi-weekly updates b. Laporan kegiatan KPMR Bersama Unit KR / Report on KPMR activities with the KR Unit c. Pembahasan Usulan Perubahan Struktur Organisasi / Discussion on Proposed Changes in Organizational Structure d. Pembahasan Usulan konversi SHL Railink / Discussion of Railink's SHL conversion proposal	- Freddy Harris - Cris Kuntadi - Chairul Anwar - Mokhamad Mahdum - Miranti Gani
7	8 Juli 2022 / July 8, 2022	Pembahasan Permasalahan Litigasi Aset KAI / Discussion of KAI Asset Litigation Issues	- Freddy Harris - Cris Kuntadi - Chairul Anwar - Mokhamad Mahdum - Miranti Gani
8	19 Juli 2022 / July 19, 2022	Pembahasan Kinerja KR SMT I Tahun 2022 / Discussion of KR Performance in the First Half of 2022	- Freddy Harris - Cris Kuntadi - Chairul Anwar - Mokhamad Mahdum - Miranti Gani
9	25 Agustus 2022 / August 25, 2022	a. Pembahasan Kinerja KR Juli 2022 / Discussion on July 2022 KR Performance b. Monitoring Kinerja TW I 2022 / Performance Monitoring in Q1 2022 c. <i>Sharing Session</i> dengan KPMR : <i>Risk Description</i> / Sharing Session with KPMR : Risk Description	- Chairul Anwar - Johan Sirait - Miranti Gani
10	30 September 2022 / September 30, 2022	Review Kinerja KR bulan Agustus / August KR Performance Review	- Chairul Anwar - Endang Tirtana - Miranti Gani - Handy Purnama
11	4 Oktober 2022 / October 4, 2022	Rapat Internal KPMR / KPMR Internal Meeting	- Chairul Anwar - Endang Tirtana - Miranti Gani - Handy Purnama
12	26 Oktober 2022 / October 26, 2022	Konsolidasi Assesment Peraturan menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022 / Consolidated Assessment by SOEs Minister Regulation No. PER-5/MBU/09/2022	- Chairul Anwar - Endang Tirtana - Miranti Gani - Handy Purnama
13	27 Oktober 2022 / October 27, 2022	a. Assesment Peraturan menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022 / Assessment of Minister of SOEs Regulation No. PER-5/MBU/09/2022 b. Kinerja TW III Tim KR / Q3 Performance of KR Team	- Chairul Anwar - Endang Tirtana - Miranti Gani - Handy Purnama

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Frekuensi pelaksanaan dan tingkat kehadiran anggota di dalam rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Nama dan Jabatan / Name and Position	Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Oversight Committee Meeting		
	Jumlah dan Persentase Kehadiran / Total Attendance and Attendance Percentage		
	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	Persentase / Percentage
Chairul Anwar Ketua / Head	13	13	100%
Endang Tirtana Anggota / Member	4	4	100%
M Risal Wasal Anggota / Member	0	0	0%
Miranti Gani Anggota / Member	13	13	100%
Handy Purnama Anggota / Member	4	4	100%

Meeting Frequency and Attendance Rate of the Risk Management Oversight Committee

The frequency of meeting implementation and the attendance of each Risk Management Oversight Committee member in 2022 can be viewed in the table below:

Meeting Frequency and Attendance Rate of the Risk Management Oversight Committee

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2022

Untuk tahun 2022, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan di dalam Piagam Komite, melalui pembahasan yang dilakukan di dalam rapat komite. Sejumlah pembahasan Komite Pemantau Manajemen Risiko di dalam rapat di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan RKAP 2022.
2. Evaluasi Program Kerja Tahunan SPI.
3. Restrukturisasi AJS.
4. Kinerja Triwulan SPI.
5. Evaluasi Manajemen Risiko.
6. Pengelolaan dan pengusahaan aset non-produktif.
7. *Progress report* integrasi risiko keselamatan dalam ERM.
8. Evaluasi kinerja Perusahaan.
9. Kajian MITJ.
10. Konsolidasi Assesment Peraturan menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022.

Brief Report on the Risk Management Oversight Committee Activities Implementation

In 2022, the Risk Management Oversight Committee has carried out the duties and responsibilities in accordance with the provisions in the Committee Charter, through the discussion in the committee meetings. The Brief Report on the Risk Management Oversight Committee Activities in 2022 are as follows:

1. The Board of Commissioners Response to 2022 RKAP Suggestions.
2. SPI Annual Work Program Evaluation.
3. AJS Restructuration
4. SPI Tri-monthly Performance.
5. Risk Management Evaluation.
6. Non-productive assets management and leveraging
7. Integrated safety risk report progress in ERM.
8. Company Performance Evaluation.
9. MITJ Review.
10. Consolidated Assessment by SOEs Minister Regulation No. PER-5/MBU/09/2022

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Committee Under the Board of Directors

KOMITE EVALUASI JABATAN

Komite Evaluasi Jabatan merupakan komite yang dibentuk guna mendukung Direksi dalam melakukan penyederhanaan struktur remunerasi secara berkeadilan sesuai bobot jabatan dengan berbasis kinerja. Komisi Evaluasi Jabatan dibentuk dengan kesadaran bahwa Perseroan memerlukan praktik evaluasi jabatan dengan menghasilkan sistem penilaian (*grading system*) sesuai perkembangan organisasi, yang pelaksanaannya melibatkan konsultasi dengan pihak eksternal.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Evaluasi Jabatan

Sebagai organ pendukung Direksi, Komite Evaluasi Jabatan memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab yang terbagi ke dalam masing-masing fungsi dengan perincian sebagai berikut:

1. **Pengarah**, memiliki tugas:
 - a. Mengarahkan perumusan dan pelaksanaan proses evaluasi jabatan yang tepat dan akurat untuk menjadi input dalam penyusunan sistem penilaian (*grading system*) dan penataan remunerasi yang sesuai dengan organisasi terkini dan kebutuhan perusahaan; dan
 - b. Menetapkan hasil evaluasi jabatan untuk diimplementasikan di Perusahaan.
2. **Pengarah Harian**, memiliki tugas:
 - a. Memastikan perumusan dan pelaksanaan proses evaluasi jabatan berjalan sesuai kebutuhan perusahaan;
 - b. Mengarahkan sasaran dan target Komite;
 - c. Mengarahkan dan memastikan hasil evaluasi jabatan dapat diimplementasikan di perusahaan; dan
 - d. Mengarahkan dan memastikan hasil evaluasi jabatan dilakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
3. **Ketua**, memiliki tugas:
 - a. Menetapkan sasaran dan target Komite serta tata cara pelaksanaan evaluasi jabatan;
 - b. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan evaluasi jabatan agar sesuai dengan sasaran dan target Komite;
 - c. Mengupayakan pemecahan masalah jika terdapat kendala dalam proses evaluasi jabatan serta jika diperlukan mengatur pertemuan dengan pihak lain yang terkait;

JOB EVALUATION COMMITTEE

The Job Evaluation Committee is a committee established to support the Board of Directors in simplifying the remuneration structure fairly in accordance with the weight of the position based on performance. The Position Evaluation Commission was formed with the awareness that the Company needs the practice of position evaluation by producing a grading system according to organizational development, the implementation of which involves consulting with external parties.

Job Evaluation Committee Duties and Responsibilities

As the Board of Directors' supporting organ, the Job Evaluation Committee has several duties and responsibilities, divided into functions as described below:

1. **The Director** has the following duties:
 - a. Directing the formulation and implementation of appropriate and accurate job evaluation processes to be input in the preparation of the grading system and remuneration arrangement in accordance with the current organization and company needs; and
 - b. Determining the results of the job evaluation to be implemented in the Company.
2. **The Daily Director** has the following duties:
 - a. Ensuring the formulation and implementation of the job evaluation process runs according to company needs;
 - b. Directing the goals and objectives of the Committee;
 - c. Directing and ensuring the results of the job evaluation can be implemented in the company; and
 - d. Directing and ensuring that the results of the job evaluation are communicated with relevant parties.
3. **The Chairperson** has the following duties:
 - a. Determining the targets and targets of the Committee as well as procedures for the implementation of job evaluation;
 - b. Directing and controlling job evaluation activities so that they are in line with the goals and targets of the Committee;
 - c. Solving problems if there were obstacles in the job evaluation process and if necessary arrange meetings with other related parties;

- d. Memberikan persetujuan terhadap hasil evaluasi jabatan untuk menjadi rekomendasi kepada Pengarah;
- e. Melakukan komunikasi yang diperlukan dengan pihak-pihak terkait; dan
- f. Memfasilitasi dan mengoordinasikan penyusunan laporan akhir proses evaluasi jabatan serta melaporkan kepada Pengarah.

4. Wakil Ketua, memiliki tugas:

- a. Memberikan rekomendasi terhadap sasaran strategis dan target Komite;
- b. Mengoordinasikan penyiapan dan verifikasi data pendukung untuk proses evaluasi jabatan;
- c. Mengoordinasikan dan memastikan kegiatan evaluasi jabatan agar sesuai dengan sasaran dan target komite evaluasi jabatan;
- d. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap hasil akhir evaluasi jabatan;
- e. Menjembatani pelaksanaan komunikasi yang diperlukan dengan pihak-pihak terkait; dan
- f. Mengoordinasikan penyusunan laporan akhir proyek untuk disampaikan kepada Ketua dan Pengarah.

5. Anggota, memiliki tugas:

- a. Berkoordinasi dengan direktorat satuan organisasi masing-masing untuk melakukan verifikasi terhadap data pendukung yang akan digunakan sebagai sumber data dalam melakukan evaluasi jabatan;
- b. Melaksanakan seluruh proses evaluasi jabatan sesuai metode dan tata cara yang ditetapkan oleh ketua Komite;
- c. Melakukan kalibrasi terhadap draf hasil evaluasi jabatan yang dilakukan Sub-Komite *Human Capital*; dan
- d. Memberikan usulan dalam rangka penetapan rekomendasi Komite atas hasil evaluasi jabatan untuk dapat ditetapkan oleh pengarah.

6. Subkomite *Human Capital*, memiliki tugas:

- a. Melakukan verifikasi data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan evaluasi jabatan;
- b. Melakukan proses evaluasi jabatan dengan metode yang ditetapkan guna menghasilkan draf evaluasi jabatan;
- c. Melakukan rekapitulasi dan pengolahan data sistem penilaian (*grading system*); dan
- d. Menyusun draf laporan akhir hasil evaluasi jabatan.

- d. Approving the results of the job evaluation to become a recommendation to the Directors;
- e. Carrying out necessary communications with related parties; and
- f. Facilitating and coordinating the preparation of the final report on the job evaluation process and report to the Steering Committee.

4. The Vice Chair has the following duties:

- a. Provide recommendations on the strategic goals and targets of the Committee;
- b. Coordinate the preparation and verification of supporting data for the job evaluation process;
- c. Coordinate and ensure job evaluation activities are in line with the goals and targets of the job evaluation committee;
- d. Conduct evaluations and provide recommendations on the final results of job evaluations;
- e. Bridge the implementation of necessary communications with related parties; and
- f. Coordinate the preparation of the final project report to be submitted to the Chair and Steering Committee.

5. Members have duties to:

- a. Coordinate with the directorates of each organizational unit to verify the supporting data that will be used as a data source in conducting job evaluations;
- b. Carry out the entire process of job evaluation according to the methods and procedures determined by the chairman of the Committee;
- c. Calibrate the draft results of job evaluation conducted by the Human Capital Subcommittee; and
- d. Provide proposals in the context of determining the Committee's recommendations on the results of the job evaluation to be determined by the Steering Committee

6. The Human Capital Subcommittee has the following duties:

- a. Verifying the data needed for the implementation of the job evaluation;
- b. Carrying out the job evaluation process with the established method in order to produce a job evaluation draft;
- c. Performing recapitulation and data processing of the assessment system (*grading system*); and
- d. Preparing a draft of the final report on the results of the job evaluation.

7. Sekretariat, memiliki tugas:

- a. Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan evaluasi jabatan; dan
- b. Menyiapkan kelengkapan dan akomodasi yang diperlukan dalam melakukan kegiatan evaluasi jabatan.

7. The Secretariat has the following duties in:

- a. Collecting data needed for the implementation of job evaluation; and
- b. Preparing the completeness and accommodation needed in carrying out job evaluation activities.

Struktur Keanggotaan Komite Evaluasi Jabatan

Struktur keanggotaan Komite Evaluasi Jabatan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Job Evaluation Committee Membership Structure

The structure of Job Evaluation Committee in 2022 is as follows:

Struktur Keanggotaan Komite Evaluasi Jabatan

Job Evaluation Committee Membership Structure

Nama / Name	Jabatan / Position	Kedudukan dalam Komite / Position in the Committee
Didiek Hartantyo*	Direktur Utama / President Director	Pengarah / Director
Hadis Surya Palapa	Direktur Niaga / Managing Director of Commerce	Pengarah / Director
Awan Hemawan Purwadinata	Direktur Operasi / Managing Director of Operation	Pengarah / Director
Heru Kuswanto	Direktur Pengelolaan Prasarana / Managing Director of Infrastructure	Pengarah / Director
Eko Purwanto	Direktur Pengelolaan Sarana / Managing Director of Facilities	Pengarah / Director
Sandry Pasambuna	Direktur Keselamatan dan Keamanan / Managing Director of Safety and Security	Pengarah / Director
Suparno	Direktur SDM dan Umum / Human Capital and General Affairs Director	Pengarah Harian / Daily Director
John Robertho	Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha / Managing Director of Strategic Planning and Business Development	Pengarah / Director
Salusra Wijaya	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Managing Director of Financial and Risk	Pengarah / Director
Ida Hidayati	<i>Corporate Deputy Director of Personnel Care, Control and Development</i>	Ketua / President
Melyana Roswita	<i>Vice President Organization Development</i>	Wakil Ketua / Vice President
Bambang Respationo	<i>Corporate Deputy Director of Operation</i>	Anggota Komite / Committee Member
Idrus Fauzi	<i>Corporate Deputy Director of Rollingstock Maintenance</i>	Anggota Komite / Committee Member
Mohamad Nurul Huda Dwi Santoso	<i>Corporate Deputy Director of Non Railways Asset</i>	Anggota Komite / Committee Member
Vacant	<i>Corporate Deputy Director of Training and Education</i>	Anggota Komite / Committee Member
Roni Komar	<i>Corporate Deputy Director of Existing Business Development</i>	Anggota Komite / Committee Member
Emanuel Kurniawan Kriswijayanto	<i>Corporate Deputy Director of Subsidiary Management</i>	Anggota Komite / Committee Member
Jagatsyah Aminullah	<i>Corporate Deputy Director of Finance Consolidation</i>	Anggota Komite / Committee Member
Vacant	<i>Corporate Deputy Director of Information System</i>	Anggota Komite / Committee Member
Agustiawan	<i>Corporate Deputy Director of Logistic</i>	Anggota Komite / Committee Member
Dewi Aju Damajanti	<i>Vice President Digital Business</i>	Anggota Komite / Committee Member
Riyanta	<i>Vice President Freight Marketing, Sales and Customer Care</i>	Anggota Komite / Committee Member

Nama / Name	Jabatan / Position	Kedudukan dalam Komite / Position in the Committee
Dwi Sulistiyono	<i>Vice President Non Train Crew Management</i>	Anggota Komite / Committee Member
Sukamto	<i>Vice President Track</i>	Anggota Komite / Committee Member
Dony Pribadi	<i>Vice President Signalling Maintenance</i>	Anggota Komite / Committee Member
Alim Pratikno	<i>Vice President Legal Dispute Resolution</i>	Anggota Komite / Committee Member
Teri Alfian Subagja	<i>Manager Human Resources Planning / Human Resources Planning Manager</i>	Sub Komite Human Capital / Human Capital Sub-Committee
Rosiana Dewi	<i>Manager Business Process / Business Process Manager</i>	Sub Komite Human Capital / Human Capital Sub-Committee
Fajarwati Warnaningtyas	<i>Manager Organization Design / Organization Design Manager</i>	Sub Komite Human Capital / Human Capital Sub-Committee
Sulardi Wiyatman	<i>Manager Compensation and Benefit / Compensation and Benefit Manager</i>	Sub Komite Human Capital / Human Capital Sub-Committee
Anisa Yutrinanda	Staf Ahli Madya Direktorat SDM dan Umum (IDPosition: 92180524) / Expert Mid-Staff of the Directorate of Human Resources and General Affairs (IDPosition: 92180524)	Sub Komite Human Capital / Human Capital Sub-Committee
Chrisdiawan Satriyo Nugroho	<i>Junior Manager Workforce Analysis and Job Evaluation</i>	Sub Komite Human Capital / Human Capital Sub-Committee
Adi Cakra Wiguna	<i>Junior Manager Workforce Planning and Formation</i>	Sub Komite Human Capital / Human Capital Sub-Committee
Hendy Dwi Maryoko	<i>Junior Manager Business Process Implementation</i>	Sub Komite Human Capital / Human Capital Sub-Committee
Moh. Mahmud Ridlo	Organization Analyst (IDPosition: 92155804)	Sub Komite Human Capital / Human Capital Sub-Committee
Andika Gigih Prasetya	Pelaksana Workforce Analysis and Job Evaluation (IDPosition: 92194863) / Workforce Analysis and Job Evaluation Officer (ID Position: 92194863)	Sub Komite Human Capital / Human Capital Sub-Committee
Hervina	Organization Analyst (ID Position: 92101855)	Sub Komite Human Capital / Human Capital Sub-Committee
Angga Kapisa	Junior Organization Analyst (ID Position: 92101856)	Sub Komite Human Capital / Human Capital Sub-Committee
Vacant	Pelaksana Business Process Evaluation (ID Position: 92174698) / Business Process Evaluation Officer (ID Position: 92174698)	Sub Komite Human Capital / Human Capital Sub-Committee

*) informasi usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, periode dan masa jabatan dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan bagian Profil Direksi / information on age, citizenship, educational background, employment history, and term of office can be viewed in the Company Profile Chapter in the Board of Directors Profile Section.

Independensi Komite Evaluasi Jabatan

Perseroan telah memastikan bahwa seluruh anggota Komite Evaluasi Jabatan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun pemegang saham pengendali. Selain itu, anggota Komite Evaluasi Jabatan bukan merupakan bagian dari pemegang saham Perseroan. Dengan demikian, anggota Komite Evaluasi Jabatan dipastikan dapat bersikap independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta terbebas dari hal-hal yang berpotensi memengaruhi kemampuan untuk bekerja secara profesional, khususnya sebagai akibat adanya hubungan afiliasi dengan pengurus atau pemegang saham Perseroan.

Independence of the Job Evaluation Committee

The Company ensures the Job Evaluation Committee members have no affiliations with members of Board of Directors, Board of Commissioners, or controlling shareholder. Furthermore, the Job Evaluation Committee is not a part of the Company's shareholders. Therefore, Job Evaluation Committee members are ensured to act independently in carrying out their duties and responsibilities as well as liberated from matters that potentially their capacity to work professionally, particularly as a consequence from affiliations with the Company's management and shareholders.

Rapat Komite dan Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Evaluasi Jabatan Tahun 2022

Untuk tahun 2022, Komite Evaluasi Jabatan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui penyelenggaraan rapat, dengan materi membahas terkait pelaksanaan proses evaluasi jabatan yang tepat dan akurat. Hasil pembahasan rapat tersebut telah menjadi dasar pertimbangan bagi proses penyusunan sistem penilaian (*grading system*) dan penataan remunerasi, sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan Perseroan.

Committee Meeting and Brief Report on the Job Evaluation Committee Activities Implementation in 2022

In 2022, Job Evaluation Committee has carried out their duties and responsibilities through meeting implementations, with discussion material related to precise and accurate job evaluation process. The meeting resolutions have become the basis of consideration for the grading system and remuneration arrangements, based on the Company's organizational developments and needs

No.	Nota RDS / RDS Note	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Peserta Rapat / Meeting Participants
1	Nota RDS MC nomor 4/KO.105/XII/KA/2021 Tanggal 9 Desember 2021 / Note MC number 4/ KO.105/XII/KA/2021 dated December 9, 2021	13 Desember 2021 / December 13, 2021	Kalibrasi Job Benchmark (400 job) / Job Benchmark Calibration (400 jobs)	Online : 12 Peserta / Participants Offline : 4 Peserta / Participants Tidak Hadir / Absent : 1 Peserta / Participants
2		14 Desember 2021 / December 14, 2021	Kalibrasi Job Benchmark (400 job) / Job Benchmark Calibration (400 jobs)	Online : 8 Peserta / Participants Offline : 7 Peserta / Participants Tidak Hadir / Absent : 2 Peserta / Participants
3		15 Desember 2021 / December 15, 2021	Kalibrasi Job Benchmark (400 job) / Job Benchmark Calibration (400 jobs)	Online : 8 Peserta / Participants Offline : 6 Peserta / Participants Tidak Hadir / Absent : 3 Peserta / Participants
4		16 Desember 2021 / December 16, 2021	Kalibrasi Job Benchmark (400 job) / Job Benchmark Calibration (400 jobs)	Online : 3 Peserta / Participants Offline : 5 Peserta / Participants Tidak Hadir / Absent : 9 Peserta / Participants
5	Nota RDS MC nomor 9/KO.105/XII/KA/2021 Tanggal 31 Desember 2021 / RDS Note MC number 9/KO.105/ XII/KA/2021 dated December 31, 2021	4 Januari 2022 / January 4, 2022	Kalibrasi Job Slotting (950 job) / Job Slotting Calibration (950 jobs)	Online : 4 Peserta / Participants Offline : 8 Peserta / Participants Tidak Hadir / Absent : 5 Peserta / Participants
6		5 Januari 2022 / January 5, 2022	Kalibrasi Job Slotting (950 job) / Job Slotting Calibration (950 jobs)	Online : 4 Peserta / Participants Offline : 8 Peserta / Participants Tidak Hadir / Absent : 5 Peserta / Participants
7		6 Januari 2022 / January 6, 2022	Kalibrasi Job Slotting (950 job) / Job Slotting Calibration (950 jobs)	Online : 3 Peserta / Participants Offline : 2 Peserta / Participants Tidak Hadir / Absent : 12 Peserta / Participants
8		7 Januari 2022 / January 7, 2022	Kalibrasi Job Slotting (950 job) / Job Slotting Calibration (950 jobs)	Online : 3 Peserta / Participants Offline : 1 Peserta / Participants Tidak Hadir / Absent : 13 Peserta / Participants
9	RDS D6 nomor 7/KO.105/IV/KA/2022 Tanggal 17 April 2022 / RDS D6 number 7/KO.105/IV/KA/2022 dated 17 April 2022	20 April 2022 / April 20, 2022	Rekonsiliasi Hasil Evaluasi Jabatan dengan BOD-1 dan WTW / Reconciliation of Position Evaluation Results with BOD-1 and WTW	Online : 22 Peserta / Participants Offline : 36 Peserta / Participants

Untuk menghasilkan tingkat jabatan yang tepat dan mencerminkan bobot/nilai suatu jabatan, evaluasi jabatan dilaksanakan secara bertahap, yaitu oleh internal SDM dan dilanjutkan kalibrasi evaluasi jabatan oleh komite evaluasi jabatan yang dilaksanakan selama 3 kali yaitu:

- Kalibrasi evaluasi tingkat jabatan sebanyak 400 jabatan yang menjadi sample/anchor pada 13 – 16 Desember 2021.
- Kalibrasi evaluasi jabatan slotting (jabatan yang tidak menjadi sample) pada 4-7 Januari 2022.
- Kalibrasi evaluasi jabatan untuk seluruh jabatan pada 20 April 2022, yang juga dihadiri oleh BOD-1 dari setiap Direktorat.

Hasil dari kalibrasi evaluasi tingkat jabatan yaitu:

- Peta tingkat jabatan KAI dan Anak Perusahaan.
- Tingkat jabatan Kantor Pusat, Daerah dan Balaiyasa.

For appropriate position assignment that reflect the weight/value of a position, the job evaluation is carried out in stages, namely by internal HC followed by the calibration of job evaluation by the position evaluation committee which is carried out 3 times, namely:

- Calibration of position level evaluations of 400 sample/ anchor positions on December 13-16 2021.
- Calibration of slotting position evaluation (positions that are not sampled) on January 4-7 2022.
- Calibration of position evaluation for all positions on April 20, 2022, which was also attended by BOD-1 from each Directorate.

The results of the position level evaluation calibration are:

- KAI and Subsidiaries position level map.
- Head Office, Regional and Balaiyasa levels.

KOMITE VERIFIKASI KINERJA PEKERJA

Merupakan komite yang dibentuk guna mendukung Direksi dalam melakukan percepatan progres verifikasi kinerja pekerja dan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja pekerja.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Verifikasi Kinerja Pekerja

Sebagai organ pendukung Direksi, Komite Verifikasi Kinerja Pekerja secara khusus memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan hal-hal yang diperlukan oleh Direksi dalam pelaksanaan sistem manajemen kinerja pekerja Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Verifikasi Kinerja Pekerja

Struktur dan keanggotaan Komite Verifikasi Kinerja Pekerja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Struktur dan Keanggotaan Komite Verifikasi Kinerja Pekerja

EMPLOYEE PERFORMANCE VERIFICATION COMMITTEE

The Committee is established to support the Board of Directors in accelerating employee performance verification progress and to realize the employee performance management system implementation.

Employee Performance Verification Committee Duties and Responsibilities

As the Board of Directors' supporting organ, the Employee Performance Verification Committee has duties and responsibilities specifically in carrying out matters necessary for the Board of Directors in implementing the Company's employee performance management system.

Employee Performance Verification Committee Structure and Membership

The structure and membership of Employee Performance Verification Committee in 2022 are as follows:

Employee Performance Verification Committee Structure and Membership

Nama / Name	Jabatan / Position	Kedudukan dalam Komite / Position in the Committee
Suparno	Direktur SDM dan Umum / Managing Director of Human Capital & General Affairs	Pengarah / Director
Ida Hidayati	Corporate Deputy Director of Personnel Care, Control and Development	Pembina / Coach
Jagatsyah Aminullah	Corporate Deputy Director of Finance Consolidation	Pembina / Coach
Rika Rosita Ratnawati	Vice President Assessment and Human Resources Development	Ketua / President
Nugroho Dwi Sasongko	Vice President Budgeting	Wakil Ketua / Vice President
Adisty Ratna Miranti	Manager Competency Development and Evaluation	Sekretaris / Secretary
Yoga Bhirawa	Vice President Passenger Ticketing Sales	Anggota / Member
Riyanta	Vice President Freight Marketing, Sales and Customer Care	Anggota / Member
Iqbal T Iskandar	PLT Vice President Train Operation Control and Evaluation	Anggota / Member
Ari Novianto Aditomo	Vice President Infrastructure Assets	Anggota / Member
Surjono	Vice President Rollingstock Assets	Anggota / Member
Dicky Eka Priandana	Vice President Safety	Anggota / Member
Agus Fadillah	Vice President Development Planning	Anggota / Member
Isnan Nasrul Hadi	Vice President Dissemination and Risk Management Procedures	Anggota / Member
Krisna Arianto	Vice President Non-Transport Commercialization	Anggota / Member
Nathan Marihottua Siahaan	Vice President Evaluation, Monitoring and Administration	Anggota / Member
Astrid Anindita	PLT Vice President Quality Assurance and Good Corporate Governance	Anggota / Member
Agus Setjono	Vice President Corporate Social Responsibility	Anggota / Member
Zaenal Abidin	Junior Manager Performance and Competency Evaluation	Anggota / Member

*) informasi usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, periode dan masa jabatan dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan bagian Profil Direksi / information on age, citizenship, educational background, employment history, and term of office can be viewed in the Company Profile Chapter in the Board of Directors Profile Section.

Independensi Komite Verifikasi Kinerja Pekerja

Perseroan telah memastikan bahwa seluruh anggota Komite Verifikasi Pekerja tidak memiliki afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun pemegang saham pengendali. Selain itu, anggota Komite Verifikasi Pekerja bukan merupakan bagian dari pemegang saham Perseroan. Dengan demikian, anggota Komite Verifikasi Pekerja dipastikan dapat bersikap independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta terbebas dari hal-hal yang berpotensi memengaruhi kemampuan untuk bekerja secara profesional, khususnya sebagai akibat adanya hubungan afiliasi dengan pengurus atau pemegang saham Perseroan.

Rapat Komite Verifikasi Kinerja Pekerja

Pada tahun 2022, Komite Verifikasi Kinerja Pekerja melaksanakan rapat sejumlah 3 (tiga) kali. Informasi tanggal pelaksanaan dan agenda rapat Komite Verifikasi Kinerja Pekerja untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tanggal dan Agenda Rapat Komite Verifikasi Kinerja Pekerja

No.	Tanggal Rapat / Meeting Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda
1.	15-16 Febuari 2023 / February 15-16, 2023	Kegiatan Verifikasi (Tim KVKP dengan Tim Pembina Teknis) - Pengisian BA, TTD BA dan Evaluasi / Verification Activities (KVKP Team with Technical Development Team) - Completion of BA, TTD BA and Evaluation
2.	<ul style="list-style-type: none"> 29-30 Agustus 2022 / August 29-30, 2022 (BATCH 1) 31 Agustus - 01 September 2022 / August 31 - September 1, 2022 (BATCH 2) 	Pelatihan dan <i>Workshop</i> Pembakalan Verifikasi Kinerja Pekerja Tahun 2022 / Training and Workshop for Employee Performance Verification in 2022
3.	14-16 Juni 2022 / June 14-16, 2022	Verifikasi dan Konsinyering Perencanaan Tahun 2022 / Verification and Consignment Planning in 2022

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Verifikasi Kinerja Pekerja Tahun 2022

Komite Verifikasi Kinerja Pekerja melaksanakan kegiatan verifikasi penilaian kinerja terhadap pekerja berdasarkan Keputusan Direksi No. SK.U/KO.101/IX/5/KA-2018 tanggal 5 September 2018. Sesuai peraturan tersebut, verifikasi dilakukan oleh 13 (tiga belas) anggota verifikator yang telah ditetapkan. Anggota verifikator tersebut dibantu oleh Tim SDM Daerah, yang melakukan Verifikasi Awal Data Dukung Pekerja milik KADAOP-1/KADIVRE-1.

Kegiatan Verifikasi Kinerja Pekerja untuk tahun 2022 dilaksanakan secara *offline* dengan perincian *timeline* sebagai berikut:

1. Verifikasi dan Konsinyering Perencanaan Tahun 2022.
2. Verifikasi Kinerja Pekerja Tahun 2022.
3. Kegiatan Verifikasi (Tim KVKP dengan Tim Pembina Teknis) dan Pengisian BA, TTD BA dan Evaluasi.

Employee Performance Verification Committee Independence

The Company ensures the Employee Performance Verification Committee members have no affiliations with members of Board of Directors, Board of Commissioners, or controlling shareholder. Furthermore, the Employee Performance Verification Committee is not a part of the Company's shareholders. Therefore, Employee Performance Verification Committee members are ensured to act independently in carrying out their duties and responsibilities as well as liberated from matters that potentially their capacity to work professionally, particularly as a consequence from affiliations with the Company's management and shareholders.

Employee Performance Verification Committee Meeting

In 2022, the Employee Performance Verification Committee held 3 (three) meetings. Information on the Employee Performance Verification Committee meeting implementation date and meeting date in 2022 are as follows:

Employee Performance Verification Committee Meeting Date and Agenda

Brief Report on the Employee Performance Verification Committee Activities Implementation in 2022

The Employee Performance Verification Committee carried out employee performance verification activities based on Board of Directors Decree No. SK.U/KO.101/IX/5/KA-2018 dated September 5, 2018. Based on the regulations, the assigned verifactory members conducted 13 (thirteen) verifications. Verifactory members are assisted by the Regional Human Capital Team, who conducted Initial Employee Data Verification of KADAOP-1/KADIVRE-1.

Employee Performance Verification activities in 2022 were carried out offline with the following timeline description:

1. Verification and Consignment Planning for 2022.
2. Verification of Employee Performance in 2022.
3. Verification Activities (KVKP Team with Technical Development Team) and Filling in BA, TTD BA and Evaluation.

Verifikasi perencanaan dilakukan untuk memastikan indikator yang ditetapkan masing – masing jatan dan selanjutnya hasil pencapaian kinerja jabatan satu tingkat di bawah Direksi/ BOD-1 (untuk Kantor Pusat) dan satu tingkat di bawah Kepala Daerah/KADAOP/KADIVRE-1 (untuk Daerah), serta jabatan Kepala Daerah dan Kepala Balai Yasa. Untuk tahun 2022, Tim Verifikator melakukan verifikasi terhadap sejumlah 288 jabatan untuk Kantor Pusat dan Daerah. Metode pelaksanaan verifikasi kinerja pekerja untuk tahun 2022 didahului dengan Verifikasi Awal terhadap kelengkapan data dukung oleh Tim SDM Daerah kemudian dilanjutkan dengan verifikasi realisasi dan data dukung oleh Tim KVKP.

KOMITE KESELAMATAN TINGKAT PUSAT

Merupakan komite yang dibentuk untuk mendukung Direksi dalam mengatur Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian. Sebagai organ pendukung Direksi, Komite Keselamatan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Keselamatan Tingkat Pusat

Komite Keselamatan Tingkat Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab dengan perincian sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan keselamatan dan kebijakan keamanan Perusahaan;
2. Menentukan strategi keselamatan dan keamanan untuk mencapai target kinerja keselamatan dan keamanan Perusahaan;
3. Menetapkan rencana keselamatan dan keamanan Perusahaan tahunan;
4. Meninjau profil risiko keselamatan dan keamanan serta upaya pengendalian risikonya;
5. Mengambil keputusan terhadap permasalahan keselamatan dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan oleh Daerah Operasi, Divisi Regional, Sub Divisi Regional, dan/atau Balai Yasa;
6. Melakukan tinjauan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) dan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) untuk peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) dan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) secara berkelanjutan;
7. Meninjau program kerja dan kinerja keselamatan dan keamanan Perusahaan; dan
8. Melakukan pertemuan rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka melaksanakan tugas Komite Keselamatan.

Verification was carried out on the results of achieving the performance of positions one level below the Board of Directors/ BOD-1 (for the Head Office) and one level below the Regional Head/KADAOP/KADIVRE-1 (Regional Division), as well as the positions of the Regional Head and the Head of the Yasa Center. In 2022, the Verification Team verified 288 positions for the Central and Regional Offices. This year's method of implementing worker performance verification was preceded by Initial Verification of data completion by the Regional HR Team, then followed by verification of realization and supporting data by the KVKP Team.

CENTRAL LEVEL SAFETY COMMITTEE

The Committee is established to support the Board of Directors arranging Railway Safety Management System. As a supporting organ of the Board of Directors, the Central Level Safety Committee is directly responsible to the President Director.

Central Level Safety Committee Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of the Central Level Safety Committee are as follows:

1. Establish safety policies and Company security policies;
2. Determine the safety and security strategy to achieve the Company's safety and security performance targets;
3. Establish an annual Company safety and security plan;
4. Review the safety and security risk profile and risk control efforts;
5. Make decisions on safety and security issues that cannot be resolved by the Operational Area, Regional Division, Regional Sub-Division, and/or Yasa Center;
6. Conduct a review of the implementation of the Railway Safety Management System (SMKP) and Security Management System (SMP) for the continuous improvement of the Railway Safety Management System (SMKP) and Security Management System (SMP);
7. Review the work program and performance of the Company's safety and security; and
8. Conduct regular meetings at least 1 (one) time in 3 (three) months in order to carry out the duties of the Safety Committee.

Struktur dan Keanggotaan Komite Keselamatan Tingkat Pusat

Struktur dan keanggotaan Komite Keselamatan Tingkat Pusat adalah sebagai berikut:

Struktur dan Keanggotaan Komite Keselamatan Tingkat Pusat

Nama / Name	Jabatan / Position	Kedudukan dalam Komite / Position in the Committee
Sandry Pasambuna*	Direktur Keselamatan dan Keamanan / Managing Director of Safety and Security	Ketua / President
Suparno*	Direktur SDM dan Umum / Managing Director of Human Capital & General Affairs	Wakil Ketua / Vice President
Asdo Artiviyanto	Executive Vice President Corporate Secretary	Anggota Komite / Member of the Committee
Hadis Surya Palapa*	Direktur Niaga / Managing Director of Trade and Commerce	Anggota Komite / Member of the Committee
Awan Hermawan Purwadinata*	Direktur Operasi / Managing Director of Operations	Anggota Komite / Member of the Committee
Heru Kuswanto *	Direktur Pengelolaan Prasarana / Managing Director of Infrastructure	Anggota Komite / Member of the Committee
John Robertho*	Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha / Managing Director of Strategic Planning and	Anggota Komite / Member of the Committee
Salusra Wijaya*	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Director of Finance and Risk Management	Anggota Komite / Member of the Committee

*) informasi usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, periode dan masa jabatan dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan bagian Profil Direksi / information on age, citizenship, educational background, employment history, and term of office can be viewed in the Company Profile Chapter in the Board of Directors Profile Section.

Central Level Safety Committee Duties and Responsibilities Structure and Membership

The structure and membership of the Central Level Safety Committee are as follows:

Central Level Safety Committee Duties and Responsibilities Structure and Membership

Independensi Komite Keselamatan Tingkat Pusat

Perseroan telah memastikan bahwa seluruh anggota Komite Keselamatan Tingkat Pusat tidak memiliki afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun pemegang saham pengendali. Selain itu, anggota Komite Keselamatan Tingkat Pusat bukan merupakan bagian dari pemegang saham Perseroan. Dengan demikian, anggota Komite Keselamatan Tingkat Pusat dipastikan dapat bersikap independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta terbebas dari hal-hal yang berpotensi memengaruhi kemampuan untuk bekerja secara profesional, khususnya sebagai akibat adanya hubungan afiliasi dengan pengurus atau pemegang saham Perseroan.

Rapat Komite dan Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Keselamatan Tingkat Pusat Tahun 2022

Pada Tahun 2022, Komite Keselamatan Tingkat Pusat telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atas penyelenggaraan rapat yang membahas isu-isu terkait keselamatan, di antaranya sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan *Health, Safety, Security and Environment* (HSSE);
2. Penyusunan Kebijakan Larangan Penyalahgunaan NAPZA dan Alkohol;

Central Level Safety Committee Independence

The Company ensures the Central Level Safety Committee members have no affiliations with members of Board of Directors, Board of Commissioners, or controlling shareholder. Furthermore, the Central Level Safety Committee is not a part of the Company's shareholders. Therefore, Central Level Safety Committee members are ensured to act independently in carrying out their duties and responsibilities as well as liberated from matters that potentially their capacity to work professionally, particularly as a consequence from affiliations with the Company's management and shareholders.

Committee Meeting and Brief Report on the Central Level Safety Committee Activities Implementation in 2022

In 2022, the Central Level Safety Committee has carried out its duties and responsibilities through meeting implementations, with discussion material as follows:

1. Preparation of *Health, Safety, Security and Environment* (HSSE) Policy;
2. Preparation of Drug and Alcohol Abuse Prevention Policy;

3. Evaluasi terhadap kinerja keselamatan;
4. Evaluasi terhadap kejadian Kecelakaan Kereta Api (KKA), kecelakaan kerja, dan insiden lainnya;
5. Implementasi program budaya keselamatan menuju proaktif;
6. *Focus Group Discussion Safety and Security Awareness 2022*;
7. *Improvement* teknologi dan digitalisasi untuk mendukung keselamatan perjalanan kereta api.

KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Teknologi Informasi merupakan komite yang dibentuk untuk mendukung Direksi dalam penerapan strategi bisnis di dalam upaya pengembangan Perseroan. Pembentukan Komite Teknologi Informasi dilatarbelakangi oleh kebutuhan Perseroan atas adanya kerja sama dan koordinasi dari seluruh bagian KAI, agar pengembangan Teknologi Informasi dapat dilaksanakan secara selaras serta sesuai kebutuhan bisnis Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengevaluasi perencanaan strategis teknologi informasi yang disesuaikan dengan perencanaan strategis perusahaan dalam bentuk dokumen *IT Master Plan*.
2. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan tata kelola teknologi informasi.
3. Menentukan prioritas dan mengevaluasi rencana investasi teknologi informasi termasuk menetapkan proyek utama di lingkungan Perusahaan.
4. Melakukan *review* pelaksanaan investasi teknologi informasi.

Struktur dan Keanggotaan Komite Teknologi Informasi

Struktur dan keanggotaan Komite Teknologi Informasi untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Struktur dan Keanggotaan Komite Teknologi Informasi

Nama / Name	Jabatan / Position	Kedudukan dalam Komite / Position in the Committee
Didiek Hartantyo*	Direktur Utama / President Director	Ketua / President
	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Managing Director of Finance and Risk Management	Wakil Ketua / Vice President
Endro Rahardjo	Corporate Deputy Director of Information System	Sekretaris / Secretary

3. Evaluation of safety performance;
4. Evaluation of Train Accidents (KKA), work accidents, and other incidents;
5. Implementation of safety culture program towards being proactive;
6. Focus Group Discussion on Safety and Security Awareness 2022;
7. Technological improvement and digitalization to support train travel safety

INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE

The Information Technology Committee is established to support the Board of Directors in implementing business strategy in attempt to the Company's development. The establishment of the Information Technology Committee was driven by all parts of the Company's need to cooperate and coordinate, so that the Information Technology development can be harmoniously carried out according to the Company's business necessities.

Information Technology Committee Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Information and Technology Committee are as follows:

1. Determining and evaluating IT Master Plan in accordance with the corporate strategic plan.
2. Determining and evaluating the information technology governance policies.
3. Setting the priorities of and evaluating the information technology investment plan, including determining the main project in the Company's environment.
4. Reviewing the information technology investment implementation.

Information Technology Committee Structure and Membership

The Information and Technology Committee structure and membership in 2022 are as follows:

Information Technology Committee Structure and Membership

Nama / Name	Jabatan / Position	Kedudukan dalam Komite / Position in the Committee
Hadis Surya Palapa*	Direktur Niaga / Managing Director of Trade and Commerce	Anggota Komite / Committee Member
Awan Hermawan Purwadinata*	Direktur Operasi / Managing Director of Operations	Anggota Komite / Committee Member
Heru Kuswanto*	Direktur Pengelolaan Prasarana / Managing Director of Infrastructure	Anggota Komite / Committee Member
Eko Purwanto*	Direktur Pengelolaan Sarana / Managing Director of Facilities	Anggota Komite / Committee Member
Sandry Pasambuna*	Direktur Keselamatan dan Keamanan / Managing Director of Safety and Security	Anggota Komite / Committee Member
Suparno*	Direktur SDM dan Umum / Managing Director of Human Capital and General Affairs	Anggota Komite / Committee Member
John Robertho*	Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha / Managing Director of Business Strategic Plan and Development	Anggota Komite / Committee Member
Salusra Wijaya*	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Managing Director of Finance and Risk Management	Anggota Komite / Committee Member
	Corporate Deputy Director of Development	Anggota Komite / Committee Member
	Corporate Deputy Director of Risk Management	Anggota Komite / Committee Member

*) informasi usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, periode dan masa jabatan dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan bagian Profil Direksi / information on age, citizenship, educational background, employment history, and term of office can be viewed in the Company Profile Chapter in the Board of Directors Profile Section.

Independensi Komite Teknologi Informasi

Perseroan telah memastikan bahwa seluruh anggota Komite Teknologi Informasi tidak memiliki afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun pemegang saham pengendali. Selain itu, anggota Komite Teknologi Informasi bukan merupakan bagian dari pemegang saham Perseroan. Dengan demikian, Komite Teknologi Informasi dipastikan dapat bersikap independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta terbebas dari hal-hal yang berpotensi memengaruhi kemampuan untuk bekerja secara profesional, khususnya sebagai akibat adanya hubungan afiliasi antara anggota dengan pengurus atau pemegang saham Perseroan.

Rapat dan Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Teknologi Informasi Tahun 2022

Untuk tahun 2022, Komite Teknologi Informasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab melalui penyelenggaraan rapat, dengan materi pembahasan mencakup perencanaan strategis teknologi informasi, tata kelola teknologi informasi serta rencana investasi teknologi informasi.

Information Technology Committee Independence

The Company has ensured all members of the Information and Technology Committee are not affiliated with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or the controlling shareholders. Furthermore, the Information Technology Committee members are not the Company's shareholders. Therefore, the Information and Technology Committee is ensured to act independently in carrying out their duties and responsibilities and is liberated from matters that potentially impact their abilities to work professionally, particularly as a consequence to the members' affiliations with the Company's management and shareholders.

Meetings and Brief Reports on the Implementation of Information Technology Committee Activities in 2022

In 2022, the Information Technology Committee carried out their duties and responsibilities through meeting implementations, with discussion materials including the information technology strategic planning, governance, and investment plans.

KOMITE PENYELESAIAN DAN TINDAK LANJUT HASIL INVESTIGASI DAN HASIL CO/ PEMERIKSAAN DAERAH ATAS KEJADIAN KECELAKAAN KERETA API

Komite Penyelesaian dan Tindak Lanjut Hasil Investigasi dan Hasil CO/Pemeriksaan Daerah atas Kejadian Kecelakaan Kereta Api merupakan organ yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menindaklanjuti hasil investigasi dan CO atas kejadian kecelakaan kereta api, menetapkan pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan penyebab yang tertulis di dalam hasil investigasi/CO, menetapkan sanksi, dan menetapkan penghargaan kepada pegawai/masyarakat yang dinilai telah ikut mencegah atau melakukan upaya sehingga kecelakaan KA dapat dihindari. Komite ini melaporkan hasil kerja komite kepada Direktur Utama.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Komite ini memiliki tugas dan tanggung jawab dengan perincian sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti hasil investigasi dan CO atas terjadinya kecelakaan kereta api.
2. Menetapkan pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan penyebab yang tertulis di dalam hasil investigasi atau hasil CO.
3. Menetapkan sanksi bagi pejabat seperti yang dimaksud pada butir 2 di atas.
4. Menetapkan penghargaan kepada pegawai dan atau masyarakat yang dinilai telah ikut mencegah dan atau melakukan upaya sehingga kecelakaan kereta api tersebut dapat dihindari.

Struktur dan Keanggotaan Komite

Struktur dan keanggotaan Komite untuk tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Struktur dan Keanggotaan Komite Penyelesaian dan Tindak Lanjut Hasil Investigasi dan Hasil CO/Pemeriksaan Daerah atas Kejadian Kecelakaan Kereta Api

Nama / Name	Jabatan / Position	Kedudukan dalam Komite / Position in the Committee
Menyesuaikan kejadian / Adjusted to event	Para Direktur terkait / Relevant Directors	Pengarah / Director
Suparno*	Direktur SDM dan Umum / Managing Director of Human Capital & General Affairs	Ketua / President
Dicky Eka Priandana	Vice President Safety EVP Pembinaan SDM / HR Development EVP	Anggota Komite / Committee Member
Menyesuaikan kejadian / Adjusted to event	VP/Manager terkait / VP/Relevant Manager	Anggota Komite / Committee Member
Ono Sutikno	VP/Manager terkait / VP/Relevant Manager	Anggota Komite / Committee Member

INVESTIGATION RESULTS AND CO/REGIONAL INSPECTION RESULTS ON RAILWAY ACCIDENT COMMITTEE

Investigation Results and CO/Regional Inspection Results on Railway Accident Committee is an organ established to assist the Board of Directors in following up investigation results and CO/regional inspection on railway accidents, to determine the responsible officials based on the cause recorded in the investigation results/regional inspection results, to give sanctions, and to award employees/public who are considered to have prevented or attempted to prevent railway accident occurring. This committee reports the results of the committee's work to the President Director.

The Committee Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the committee are described as follows:

1. Following up the investigation and CO results of railway accidents.
2. Determining the responsible official(s) in accordance with the recorded cause of accident in the investigation or CO results.
3. Determining sanctions for the responsible official(s)
4. Awarding employees or public who are considered to have prevented or carried out efforts to prevent railway accidents.

The Committee Structure and Membership

The structure and membership of the Committee in 2022 can be viewed in the following table:

Investigation Results and CO/Regional Inspection Results on Railway Accident Committee Structure and Membership

Nama / Name	Jabatan / Position	Kedudukan dalam Komite / Position in the Committee
Ike Bella Rahayu	Manager Legal Corporate Commercial and Banking	Anggota Komite / Committee Member
Ariana	Manager Legal Investment and Project Financing	Anggota Komite / Committee Member
Arif Kurniawan	Manager Legal Procurement	Anggota Komite / Committee Member
I Ketut Pande Wikardo Mitra Yoga	Vice President Legal Dispute Resolution	Anggota Komite / Committee Member
Ramdhani Subagja	Manager of Public Law Litigation	Anggota / Member
	Manager of Private Law Litigation	Anggota / Member
Mochamad Satrio Faishal	PLT Vice President Policy and Regulations	Anggota / Member
Zainal Abidin	Manager of Institutions Relation	Anggota / Member
Detty Nurfatma Kusumah	Manager of Policy	Anggota / Member
Ganesha Patria Wicaksono	Manager of Regulations Analysis	Anggota / Member
Menyesuaikan kejadian / Adjusted to event	Pejabat lainnya yang ditunjuk / Other appointed officials	Anggota / Member
	Ketua Tim Investigasi / Investigation Team Leader	Anggota / Member
	Ketua Umum SPKA / General Chairperson of SPKA	Pendamping Anggota / Companion
Menyesuaikan kejadian / Adjusted to event	Tenaga Ahli / Experts	Apabila dibutuhkan Anggota / If needed

*) informasi usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, periode dan masa jabatan dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan bagian Profil Direksi / information on age, citizenship, educational background, employment history, and term of office can be viewed in the Company Profile Chapter in the Board of Directors Profile Section.

Independensi Komite

Perseroan telah memastikan bahwa seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun pemegang saham pengendali. Selain itu, anggota Komite bukan merupakan bagian dari pemegang saham Perseroan. Dengan demikian, Komite dipastikan dapat bersikap independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta terbebas dari hal-hal yang berpotensi memengaruhi kemampuan untuk bekerja secara profesional, khususnya sebagai akibat adanya hubungan afiliasi antara anggota dengan pengurus atau pemegang saham Perseroan.

Rapat Komite dan Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Tahun 2022

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022, Komite Penyelesaian dan Tindak Lanjut Hasil Investigasi dan Hasil CO/Pemeriksaan Daerah atas Kejadian Kecelakaan Kereta Api telah melaksanakan rapat komite serta menindaklanjuti hasil investigasi dan CO atas terjadinya kecelakaan kereta api.

The Committee Independence

The Company has ensured all members of the Committee are not affiliated with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or the controlling shareholders. Furthermore, the Committee members are not the Company's shareholders. Therefore, the Committee is ensured to act independently in carrying out their duties and responsibilities and is liberated from matters that potentially impact their abilities to work professionally, particularly as a consequence to the members' affiliations with the Company's management and shareholders.

Meeting and Brief Report on the Committee Activities Implementation in 2022

For the term ending in December 31, 2022, the Committee has implemented Committee Meetings and followed up investigation results and CO/regional inspection results of railway accidents.

KOMITE EKSEKUTIF

Komite Eksekutif merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengantisipasi perkembangan dan tuntutan di masa depan, yang membuat Perseroan perlu mempersiapkan kader-kader pemimpin yang kompeten. Komite Eksekutif bertugas untuk merumuskan, mengelola, melaksanakan, serta mempersiapkan proses kaderisasi pemimpin Perseroan untuk masa mendatang. Lebih dari itu, Komite Eksekutif juga membantu Direksi dalam membahas hal-hal strategis Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Eksekutif

Sebagai komite pendukung Direksi, Komite Eksekutif memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang diperlukan oleh Direksi dalam merumuskan, mengelola, melaksanakan, serta mempersiapkan kaderisasi dalam rangka menghasilkan pemimpin masa depan bagi Perseroan. Di samping itu, Komite Eksekutif melakukan penugasan-penugasan khusus dari Direksi, antara lain terkait pembahasan hal-hal strategis Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Eksekutif

Struktur dan keanggotaan Komite Eksekutif untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Struktur dan Keanggotaan Komite Eksekutif

Nama / Name	Jabatan / Position	Kedudukan dalam Komite / Position in the Committee
Didiek Hartantyo*	Direktur Utama / President Director	Ketua / President
Hadis Surya Palapa*	Direktur Niaga / Managing Director of Trade and Commerce	Anggota / Member
Heru Kuswanto*	Direktur Operasi / Managing Director of Operations	Anggota / Member
Awan Hemawan Purwadinata*	Direktur Pengelolaan Prasarana / Managing Director of Infrastructure	Anggota / Member
Eko Purwanto*	Direktur Pengelolaan Sarana / Managing Director of Facilities	Anggota / Member
Sandry Pasambuna	Direktur Keselamatan dan Keamanan / Managing Director of Safety and Security	Anggota / Member
Suparno*	Direktur SDM dan Umum / Managing Director of Human Capital and General Affairs	Anggota / Member
John Robertho	Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha / Managing Director of Business Strategic Plan and Development	Anggota / Member
Salusra Wijaya*	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Managing Director of Finance and Risk Management	Anggota / Member
Fredi Firmansyah	Corporate Deputy Director of Freight Marketing and Sales	Anggota / Member
Raden Agus Dwinanto	Corporate Deputy Director of Passenger Transport Marketing and Sales	Anggota / Member
Krisna Arianto	Vice President Non Transport Commercialization	Anggota / Member
Porwanto Handry Nugroho	Corporate Deputy Director of Operation	Anggota / Member
Beny Herbimawan	Corporate Deputy Director of Track and Bridge	Anggota / Member
Roni Komar	Corporate Deputy Director of Signalling, Telecommunication, and Electricity	Anggota / Member

EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee is a committee established to assist the Board of Directors in anticipating future development and demands, which encourages the Company to prepare regeneration of future competent leaders of the Company. The Executive Committee has the duties to formulate, manage, implement, as well as prepare the regeneration process in the future. Furthermore, the Executive Committee aids the Board of Directors in discussing the Company's strategic matters.

Executive Committee Duties and Responsibilities

As a supporting committee, the Executive Committee has the duties and responsibilities to take necessary actions for the Board of Directors in formulating, managing, implementing, as well as preparing regeneration for the future leadership in the Company. Additionally, the Executive Committee carries out special duties from the Board of Directors, among which are related to the Company's strategic matters discussion.

Executive Committee Structure and Membership

The structure and the membership of the Executive Committee in 2022 are as follows:

Executive Committee Structure and Membership

Nama / Name	Jabatan / Position	Kedudukan dalam Komite / Position in the Committee
Ari Novianto Aditomo	Vice President Infrastructure Assets	Anggota / Member
Idris Fauzi	Corporate Deputy Director of Rollingstock Maintenance	Anggota / Member
Faizal Muhtadi	Corporate Deputy Director of Technical Engineering and Rollingstock Asset	Anggota / Member
Irwansyah	Executive Vice President UPT Balai Yasa Manggarai	Anggota / Member
Eko Windu Widio Purnomo	Executive Vice President UPT Balai Yasa Yogyakarta	Anggota / Member
Deddy Hendrady	PLT Executive Vice President UPT Balai Yasa Lahat	Anggota / Member
Dwi Sulaksono	Corporate Deputy Director of Security	Anggota / Member
Mohamad Nurul Huda Dwi Santoso	Corporate Deputy Director of Non Railway Assets	Anggota / Member
Agus Barkah Nugraha	Vice President Safety Standard	Anggota / Member
Dicky Eka Priandana	Vice President Safety	Anggota / Member
Ida Hidayati	Corporate Deputy Director of Personnel Care, Control and Development	Anggota / Member
Welliyansyah	Vice President Health	Anggota / Member
Handy Purnama	Corporate Deputy Director of Training and Education	Anggota / Member
Yurish Birawa	Corporate Deputy Director of Assets Development	Anggota / Member
	Corporate Deputy Director of Development	Anggota / Member
	Corporate Deputy Director of Preservation, Architecture, and Building	Anggota / Member
Muh Sahli	Corporate Deputy Director of Existing Business Development	Anggota / Member
	Corporate Deputy Director of New Business Development and Strategic Projects	Anggota / Member
	Vice President Non-Railway Assets Administration	Anggota / Member
Emanuel Kurniawan Kriswijayanto	Corporate Deputy Director of Subsidiary Management	Anggota / Member
Jagatsyah Aminullah	Corporate Deputy Director of Finance Consolidation	Anggota / Member
Suparno	Corporate Deputy Director of Logistic`	Anggota / Member
Endro Rahardjo	Corporate Deputy Director of Information System	Anggota / Member
Januar Parlindungan	Corporate Deputy Director of Revenue and Cost Consolidation	Anggota / Member
Mochamad Purnomosidi	Executive Vice President Divisi Light Rail Transit Jabodebek	Anggota / Member
Dwi Erni Ratnawati	Executive Vice President Internal Audit	Anggota / Member
Ono Sutikno	Executive Vice President Legal	Anggota / Member
Taufikurrahman	Executive Vice President Project Management Office	Anggota / Member
	Executive Vice President Risk Management	Anggota / Member
Asdo Atriviyanto	Executive Vice President Corporate Secretary	Anggota / Member
Suryawan Putra Hia	Executive Vice President Daerah Operasi 1 Jakarta / Executive Vice President Operation Area 1 Jakarta	Anggota / Member
Joko Widagdo	PLT Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung / PLT Executive Vice President Operation Area 2 Bandung	Anggota / Member
Takdir Santoso	Vice President Daerah Operasi 3 Cirebon / Vice President Operation Area 3 Cirebon	Anggota / Member
Wisnu Pramudyo	PLT Executive Vice President Daerah Operasi 4 Semarang / PLT Executive Vice President Operation Area 4 Semarang	Anggota / Member
Daniel Johannes Hutabarat	Vice President Daerah Operasi 5 Purwokerto / Vice President Operation Area 5 Purwokerto	Anggota / Member
Iwan Eka Putra	Executive Vice President Daerah Operasi 6 Yogyakarta / Executive Vice President Operation Area 6 Yogyakarta	Anggota / Member

Nama / Name	Jabatan / Position	Kedudukan dalam Komite / Position in the Committee
Hendra Wahyono	Vice President Daerah Operasi 7 Madiun / Vice President Operation Area 7 Madiun	Anggota / Member
Heri Siswanto	Executive Vice President Daerah Operasi 8 Surabaya / Executive Vice President Operation Area 8 Surabaya	Anggota / Member
Broer Rizal	Vice President Daerah Operasi 9 Jember / Vice President Operation Area 9 Jember	Anggota / Member
Yuskal Setiawan	Vice President Divisi Regional 1 Sumatera Utara / Vice President Regional Division 1 North Sumatra	Anggota / Member
Mohamad Arie Fathurrochman	Vice President Divisi Regional 2 Sumatera Barat / Vice President Regional Division 2 West Sumatra	Anggota / Member
Junaidi Nasution	Vice President Divisi Regional 3 Palembang / Vice President Regional Division 3 Palembang	Anggota / Member
Muh. Saiful Alam	Kepala Divisi Regional IV Tangkarakang / Head of Regional Division IV Tangkarakang	Anggota / Member
Tamsil Nurhamed	PLT President Director KAI Services	Anggota / Member
Anggoro Triwibowo	President Director KAI Bandara	Anggota / Member
Roppiq Lutzfi Azhar	President Director KAI Commuter	Anggota / Member
Hendy Helmy	PLT President Director KAI Wisata	Anggota / Member
Yoseph Ibrahim	President Director KAI Properti	Anggota / Member
TLN Ahmad Malik Syah	PLT President Director KAI Logistik	Anggota / Member

*) informasi usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, periode dan masa jabatan dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan bagian Profil Direksi / information on age, citizenship, educational background, employment history, and term of office can be viewed in the Company Profile Chapter in the Board of Directors Profile Section.

Independensi Komite Eksekutif

Perseroan telah memastikan bahwa anggota Komite Eksekutif tidak memiliki afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun pemegang saham pengendali. Selain itu, anggota Komite Eksekutif bukan merupakan bagian dari pemegang saham Perseroan. Dengan demikian, Komite Eksekutif dipastikan dapat bersikap independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta terbebas dari hal-hal yang berpotensi memengaruhi kemampuan untuk bekerja secara profesional, khususnya sebagai akibat adanya hubungan afiliasi antara anggota dengan pengurus atau pemegang saham Perseroan.

Rapat dan Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Eksekutif Tahun 2022

Untuk tahun 2022, Komite Eksekutif telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui penyelenggaraan rapat sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Februari dan Agustus 2022, dengan materi pembahasan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan arahan strategis bertajuk "Dengan akselerasi dan ber-energy KAI Bangkit lebih cepat."
2. Pembahasan mengenai kinerja Perusahaan yang termasuk pada highlights, inovasi, dan progres proyek strategis nasional milik KAI di tahun 2022, serta proyeksi RKAP dan target 2023.

Executive Committee Independence

The Company has ensured all members of the Executive Committee are not affiliated with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or the controlling shareholders. Furthermore, the Executive Committee members are not the Company's shareholders. Therefore, the Executive Committee is ensured to act independently in carrying out their duties and responsibilities and is liberated from matters that potentially impact their abilities to work professionally, particularly as a consequence to the members' affiliations with the Company's management and shareholders.

Rapat dan Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Eksekutif Tahun 2022

In 2022, the Executive Committee carried out their duties and responsibilities through holding 2 (two) meetings in February and August of 2022 with the following discussion materials:

1. Stipulation of strategic directive with the title "With acceleration and energy for KAI's Swift Recovery".
2. Discussion on Company performance, covering highlights, innovations, and progress of KAI's national strategic projects in 2022 as well as RKAP projections and the 2023 targets.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan merupakan organ yang mendukung Perseroan dalam mengelola hubungan antar-organ Perseroan, hubungan antara Perseroan dengan seluruh pemangku kepentingan, serta pemenuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagai fungsi yang berada satu tingkat di bawah Direksi. Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan dilakukan dengan mengangkat pejabat Sekretaris Perusahaan, sesuai kriteria dan ketentuan khusus yang berlaku bagi BUMN. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama melalui persetujuan Dewan Komisaris, berdasarkan mekanisme internal Perseroan.

Fungsi Sekretaris Perusahaan dipimpin oleh seorang Executive Vice President (EVP) Corporate Secretary yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab dengan perincian sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan fungsi *corporate office* dalam hal pengelolaan informasi dan dokumen Perseroan, *Corporate Social Responsibility*, *corporate public information and communication*, *corporate office*, and *board of Directors Administration & Protocol*.
2. Memastikan kepatuhan atas pelaksanaan GCG melalui penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*).
3. Memastikan Perseroan mematuhi ketentuan tentang persyaratan keterbukaan dan pengungkapan dalam Laporan Tahunan.
4. Memastikan penerapan kebijakan manajemen mutu dan pemantauan implementasi KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul) di lingkungan Perseroan.
5. Mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan unit organisasi di bawahnya.

The Corporate Secretary is the Company's supporting organ in managing the relations between the organs of the Company, the relations between the Company and all stakeholders, as well as fulfilling the Company's compliance with the prevailing laws and regulations. The Company placed the Corporate Secretary as a function directly under the Board of Directors. The implementation of Corporate Secretary's functions is carried out through the appointment of a Corporate Secretary official, in accordance with the State-Owned Enterprise's criteria and specific requirements. Appointment and dismissal of Corporate Secretary are conducted through approval from the Company's Board of Commissioners, based on the Company's internal mechanisms.

The Corporate Secretary function is led by an Executive Vice President (EVP) Corporate Secretary, who is directly responsible to the Company's Board of Directors.

Corporate Secretary Functions, Duties, and Responsibilities

The functions, duties, and responsibilities of the Corporate Secretary are described as follows:

1. Carrying out corporate office functions in terms of managing Company information and documents, Corporate Social Responsibility, corporate public information and communication, corporate office, and board of Directors Administration & Protocol.
2. Ensuring compliance with GCG implementation through the whistleblowing system implementation.
3. Ensuring the Company's compliance with the provisions regarding disclosure and disclosure requirements in the Annual Report.
4. Ensuring the implementation of quality management policies and monitoring the implementation of Criteria for Superior Performance Assessment (KPKU) within the Company.
5. Integrating and consolidating the organizational units under the corporate secretary.

Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile

Profil pejabat Sekretaris Perusahaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The Corporate Secretary official profile in 2022 are as follows:

ASDO ARTRIVIYANTO EVP Corporate Secretary	
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Yogyakarta, 11 Desember 1971 / Yogyakarta, December 11, 1971
Usia / Age	51 tahun / 51 years old
Periode Menjabat / Term of Office	2021-2022 (Periode Pertama) / 2021 - 2022 (First period)
Dasar Hukum Penunjukan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Direksi Nomor: SK.U/KH.608/XII/1/SAP/ KA-2021 / Board of Directors Decree No: SK.U/KH.608/XII/1/SAP/ KA-2021
Riwayat Pendidikan / Educational Background	
<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas STIE-K Yogyakarta (1999) / Bachelor's Degree in Economic and Development Studies from Universitas STIE-K Yogyakarta (1999) 	
Sertifikasi / Certification	
<ul style="list-style-type: none"> Telkom Certified Trainer on Training Implementation (TCTTI)(2019) 	
Pengalaman Kerja / Employment History	
<p>Mulai berkarier di PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada 1 Desember 1994. Sebelum menjadi EVP Corporate Secretary, pernah menjabat sebagai: / Started his career at PT Kereta Api Indonesia (Persero) on December 1, 1994. Prior to becoming EVP Corporate Secretary, he served as:</p> <ul style="list-style-type: none"> Executive Vice President Daerah Operasi 6 Yogyakarta (2020); / Executive Vice President Operation Area 6 Yogyakarta (2020); Corporate Deputy Director of Passenger Transport Marketing and Sales (2019); Trainer Utama Training and Education Ir. H. Juanda (2019); / Main Trainer Training and Education Ir. H. Juanda (2019); Deputy Executive Vice President Daop 4 Semarang (2018); / Deputy Executive Vice President Operation Area 4 Semarang (2018); Deputy Executive Vice President Divre IV Tanjungkarang (2016); / Deputy Executive Vice President Regional Division IV Tanjungkarang (2016); Vice President Non-Train Crew Management (2016); dan / Vice President Non-Train Crew Management (2016); and Manager Train Operation Control (2015). / Train Operation Control Manager (2015) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	
-	

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Pada tahun 2022, EVP Corporate Secretary mengikuti sejumlah kegiatan peningkatan kompetensi dengan perincian sebagai berikut:

Corporate Secretary Competency Development Program

In 2022, the EVP Corporate Secretary attended several competency development activities, as detailed below:

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan / Type of Training and Competency Development Materials	Waktu dan Tempat Pelaksanaan / Implementation Time and Place	Penyelenggara / Organizer
Leadership for Continuous Improvement	15/06/2022- 16/06/2022	PQM

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2022

Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk tahun 2022, dengan perincian sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan mendokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2022 yaitu :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RKAP 2022 yang diselenggarakan pada 26 Januari 2022.
 - b. Laporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2022.
2. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Direksi pada tahun 2022 sebanyak 39 kali serta Rapat gabungan Direksi dengan Dewan komisaris pada tahun 2022 sebanyak 21 kali.
3. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat RKAP Tahun 2022 Sebanyak 2 kali.
4. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat Executive Commitee dengan Direksi, Jajaran CDD/EVP dan Anak Perusahaan sebanyak 2 kali.
5. Pembuatan hasil Notulen Rapat Direksi.
6. Mengkoordinasikan acara Kunjungan dari eksternal ke PT KAI (Persero).
7. Melaksanakan Kegiatan bersama Direksi yaitu Posko dan Cek Lintas Angkutan Natal dan Tahun Baru serta Posko Angkutan Lebaran.
8. Melaksanakan kegiatan TJSL (Bina Lingkungan dengan Program KAI Sehat Sejahtera, KAI Mengajar, KAI Pling Sarana Prasarana Umum dan Pelestarian Alam, KAI Sar-I, KAI Dungmas dan KAI Sahabat difabel dan sosial kemasyarakatan) mulai Januari hingga Desember 2022.
9. Melaksanakan Program TJSL Insidentil Tahap 1 s.d IV mulai Januari hingga Desember 2022.
10. Menyelenggarakan Sertifikasi Halal pada bulan Desember 2022.
11. Menyelenggarakan Pelatihan UMK Naik Kelas Bagi UMK Mitra Binaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada bulan Agustus 2022.
12. Menyelenggarakan UMK KAI Pameran KAI Expo, *Inacraft, Brand Operation*.
13. Pembinaan Jajaran CSR November pada 2022.
14. Melaksanakan pengelolaan olahraga dan seni pegawai perusahaan serta membina *Marching Band Locomotive*.

Corporate Secretary Duties Implementation In 2022

The Corporate Secretary has carried out his duties and responsibility in 2022, as described below:

1. Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders in 2022, namely:
 - a. Fiscal Year 2022 General Meeting of Shareholders (GMS) held on January 26, 2022.
 - b. RKAP 2021 General Meeting of Shareholders (GMS) held on May 20, 2022.
2. Organizing and attended 39 Board of Directors Meetings in 2022 as well as 21 joint meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2022 .
3. Organizing and attended 2 RKAP 2022 Meetings
4. Organizing and attending Executive Committee meetings with the Board of Directors, CDD/EVP and Subsidiaries 2 times.
5. Drawing up the Minutes of the Board of Directors Meeting.
6. Coordinating external visits to PT KAI (Persero).
7. Carrying out activities with the Board of Directors, namely Command Posts and Cross-Transport Checks for Christmas and New Year as well as Eid Transport Command Posts.
8. Carrying out TJSL activities (Environmental Development with KAI Healthy and Prosperous Program, KAI Teaching, KAI Pling for Public Infrastructure and Nature Conservation, KAI Sar-I, KAI Dungmas and KAI Friends with Disabilities and social communities) from January to December 2022.
9. Implementing the Incidental TJSL Program Phase 1 to IV from January to December 2022.
10. Organizing BNSP Training for KAI Fostered Partners in December 2022.
11. Organizing MSME Upgrading for Fostered MSME Partners of PT Kereta Api Indonesia (Persero) in August 2022.
12. Organizing KAI MSME Expo, *Inacraft, Brand Operation*
13. CSR Staff Development in November 2022.
14. Carrying out sports and arts management for Company employees and fostering the Locomotive Marching Band

15. Melaksanakan program hubungan komunitas bersama *Railfans* untuk kegiatan Sosialisasi Keamanan perjalanan Kereta Api/anti pelecehan terhadap wanita di atas KA dan kegiatan *sponsorship* kemasyarakatan Pada bulan Januari-Desember 2022
 16. Melaksanakan kegiatan penatausahaan arsip surat-menyurat dinas, dan dokumen perusahaan lainnya, melakukan pemantauan penata usahaan dokumen daerah serta pengelolaan sarana telekomunikasi dan penatausahaan warta dinas. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, Pelayanan dokumen kepemilikan aset sebanyak 24.032 Dokumen.
 17. Melaksanakan penatausahaan dokumen kepemilikan aset meliputi: tanah, bangunan, jalan rel, jembatan, sinyal, sarana, fasilitas pendukung sarana dan prasarana. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, Pelayanan dokumen kepemilikan aset sebanyak 14.738 Dokumen.
 18. Melakukan penatausahaan dokumen legal berupa Memorandum of Understanding (MoU), Kontrak/Perjanjian Kerjasama, Surat Perjanjian dan Dokumen Legal lainnya. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, Pelayanan dokumen legal sebanyak 182.310 Dokumen.
 19. Menerima kunjungan kearsipan dari berbagai instansi sebanyak 17 kali dan melakukan kunjungan sebanyak 3 kali
 20. Melakukan kegiatan supervisi / pendampingan penataan dokumen ke unit-unit di Kantor Pusat, unit dokumen daerah dan unit pelayanan warta daerah.
 21. Memastikan Kepatuhan Perusahaan atas Penerapan GCG dengan melakukan:
 - a. Kegiatan Asesmen GCG, merupakan Pengukuran terhadap penerapan GCG dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun oleh asesor independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi. Instansi Pemerintah dalam hal ini Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, yang melakukan asesmen pada tahun 2022 untuk Kinerja GCG 2021 dengan hasil skor 91,679.
 - b. Kegiatan monitoring tindak lanjut rekomendasi assessment GCG, Hasil monitoring tindak lanjut rekomendasi assessment GCG kinerja 2022, pada tahun 2022 terdapat 60 rekomendasi yang diberikan oleh BPKP (47) rekomendasi telah ditindaklanjuti 100%, 8 Rekomendasi telah ditindaklanjuti <100%, 5 rekomendasi belum ditindaklanjuti).
15. Implementing community relations program with *Railfans* for Railroad Safety Socialization activities/anti-harassment against women on trains and community sponsorship activities in January-December 2022.
 16. Carrying out administrative activities for archives of official correspondence, and other company documents, monitoring regional document administration as well as managing telecommunications facilities and administering official news. Based on the 2022 performance report, 24,032 asset ownership documents have been handled.
 17. Carrying out the administration of asset ownership documents including: land, buildings, rail roads, bridges, signals, facilities, supporting facilities and infrastructure. Based on the 2022 performance report, 14,738 asset ownership documents have been handled .
 18. Administering documents in the form of Memorandum of Understanding (MoU), Contracts/Cooperation Agreements, Letters of Agreement and other Legal Documents. Based on the 2022 performance report, 182,310 legal documents have been handled.
 19. Receiving 17 visits to archives from various agencies and holding 3 visits.
 20. Carrying out supervision/assistance on document arrangement to units at the Head Office, regional document units and regional news service units.
 21. Ensuring the Company's Compliance with GCG Implementation by performing:
 - a. GCG Assessment Activities, a Measurement of the implementation of GCG carried out every two years by an independent assessor appointed by the Board of Commissioners or a competent government agency in the field of GCG whose appointment is made by the Board of Directors. Government agencies in this case the Representatives of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) of West Java Province, which performed an assessment in 2022 for the 2021 GCG Performance with a score of 91.679.
 - b. Monitoring activities for follow-up to GCG assessment recommendations. Results of monitoring follow-up on recommendations for GCG performance assessment 2022, in 2022 there were 60 recommendations given by BPKP (47) recommendations have been followed up 100%, 8 recommendations have been followed up <100%, 5 recommendations have not been followed up).

- c. Kegiatan Monitoring Pengendalian Gratifikasi, dalam penyelenggaraan kegiatan monitoring pengendalian gratifikasi dan laporan gratifikasi yang telah diproses.
 - d. Kegiatan pengelolaan pelaporan dugaan pelanggaran (WBS), selama tahun 2022 terdapat 12 laporan terkait WBS yang telah diproses.
 - e. Kegiatan monitoring kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Dari hasil monitoring penyampaian LHKPN periodik 2020 per tanggal 31 Desember 2022 diketahui kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 100%
 - f. Monitoring Kepatuhan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).
 - g. Program implementasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Perusahaan telah mendapatkan dua sertifikat ISO 37001:2016 SMAP pada Unit Quality Assurance & GCG dan Unit Pengadaan Barang dan Jasa.
 - h. Sosialisasi GCG
22. Penerapan Sistem Manajemen Mutu dengan melakukan:
- a. Monitoring Implementasi SMM ISO 9001:2015 dilaksanakan melalui pendampingan implementasi di 6 Balai Yasa Sarana, 9 Daerah Operasi, 4 Divisi Regional, Unit Corporate Document Management, Unit Training and Education IR. H. Djuanda, Unit CC 121, Balai Yasa Jembatan Kiaracondong, dan Balai Yasa Mekanik Cirebon Prujakan.
 - b. Audit Mutu Internal ISO 9001:2015 dilaksanakan guna memastikan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu dan kesiapan unit dalam menghadapi Audit Mutu Eksternal guna mempertahankan sertifikat SMM ISO 9001:2015.
 - c. Pendampingan Audit Mutu Eksternal (Audit Sertifikasi, Audit Resertifikasi, Audit Surveillance) di 6 Balai Yasa Sarana, 9 Daerah Operasi, 4 Divisi Regional, Unit Corporate Document Management, Unit Training and Education IR. H. Djuanda, Unit CC 121, Balai Yasa Jembatan Kiaracondong, dan Balai Yasa Mekanik Cirebon Prujakan.
23. Melakukan Kegiatan Peningkatan Mutu dengan kegiatan beberapa hal antara lain:
- a. Menyenggarakan Kegiatan Award Internal, yaitu:
 - Innovation & Improvement Award pada tanggal 5-9 September 2022 dilaksanakan di BPTT Yogyakarta dengan jumlah peserta 194 orang/97 Tim.
 - b. Mengikuti Kegiatan Award Eksternal, yaitu:
 - Keikutsertaan Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN)
 - Keikutsertaan SNI Award dengan perolehan Peringkat Gold.
- c. Gratuity Control Monitoring Activities, in its implementation all gratuity reports that have been processed.
 - d. Management of Whistleblowing System (WBS), in 2022 there were 12 reports related to WBS that had been processed.
 - e. Monitoring of compliance with the submission of the State Administrators Assets Report (LHKPN), From the results of monitoring the submission of the 2021 periodic LHKPN as of December 31, 2022, 100% of LHKPN has been submitted.
 - f. Monitoring of Code of Conduct compliance.
 - g. Implementation of the ISO 37001:2016 program on the Anti-Bribery Management System (SMAP), the Company has received two ISO 37001:2016 SMAP certificates in the Quality Assurance & GCG Unit and the Goods and Services Procurement Unit.
 - h. GCG dissemination
22. Implementing Quality Management System through:
- a. Monitoring the implementation of QMS ISO 9001:2015 was carried out through implementation assistance in 6 Balai Yasa Sarana, 9 Operational Areas, 4 Regional Divisions, Corporate Document Management Unit, IR. H. Djuanda Training And Education Unit, CC 121 Unit, Balai Yasa Jembatan Kiaracondong, and Balai Yasa Mekanik Cirebon Prujakan
 - b. The ISO 9001:2015 Internal Quality Audit is carried out to ensure the effectiveness of the implementation of the Quality Management System and the readiness of the unit to face the External Quality Audit in order to maintain the ISO 9001:2015 QMS certificate.
 - c. External Quality Audit Assistance (Certification Audit, Recertification Audit, Surveillance Audit) in 6 Balai Yasa Sarana, 9 Operational Areas, 4 Regional Divisions, Corporate Document Management Unit, IR. H. Djuanda Training And Education Unit, CC 121 Unit, Balai Yasa Jembatan Kiaracondong, and Balai Yasa Mekanik Cirebon Prujakan
23. Conducting Quality Improvement Activities by:
- a. Organizing Internal Award Activities, namely:
 - Innovation & Improvement Award on September 5-9, 2022 at BPTT Yogyakarta with 194 participants/97 teams
 - b. Participating in External Award Activities, namely:
 - Participation in the National Quality and Productivity Work Meeting (TKMPN)
 - Participation in the SNI Award with the acquisition of a Gold Rank.

- Keikutsertaan CGPI Award dengan perolehan Trusted Companies.
 - c. Kegiatan Coaching kepada perwakilan auditor internal SMM ISO 9001:2015 berasal seluruh Daop, Divre, Balai Yasa Sarana, Balai Yasa Prasarana, Kantor Pusat dan Unit USQ.
24. Melaksanakan 7 aktivasi Internal.
 25. Penerbitan 12 Edisi E-Magz.
 26. Melaksanakan 35 kerjasama dengan media/komunitas media melalui program partnership dan sponsorship.
 27. Memproduksi 2 buku Perusahaan.
 28. Melakukan penerbitan siaran pers sebanyak 175 judul.
 29. Mengadakan 32 Kegiatan Media Relations.
 30. Mengadakan 24 Kegaitan dengan Komunitas Pecinta KA.
 31. Melayani 294 orang permintaan public.
 32. Memproduksi 85 Video Perusahaan.

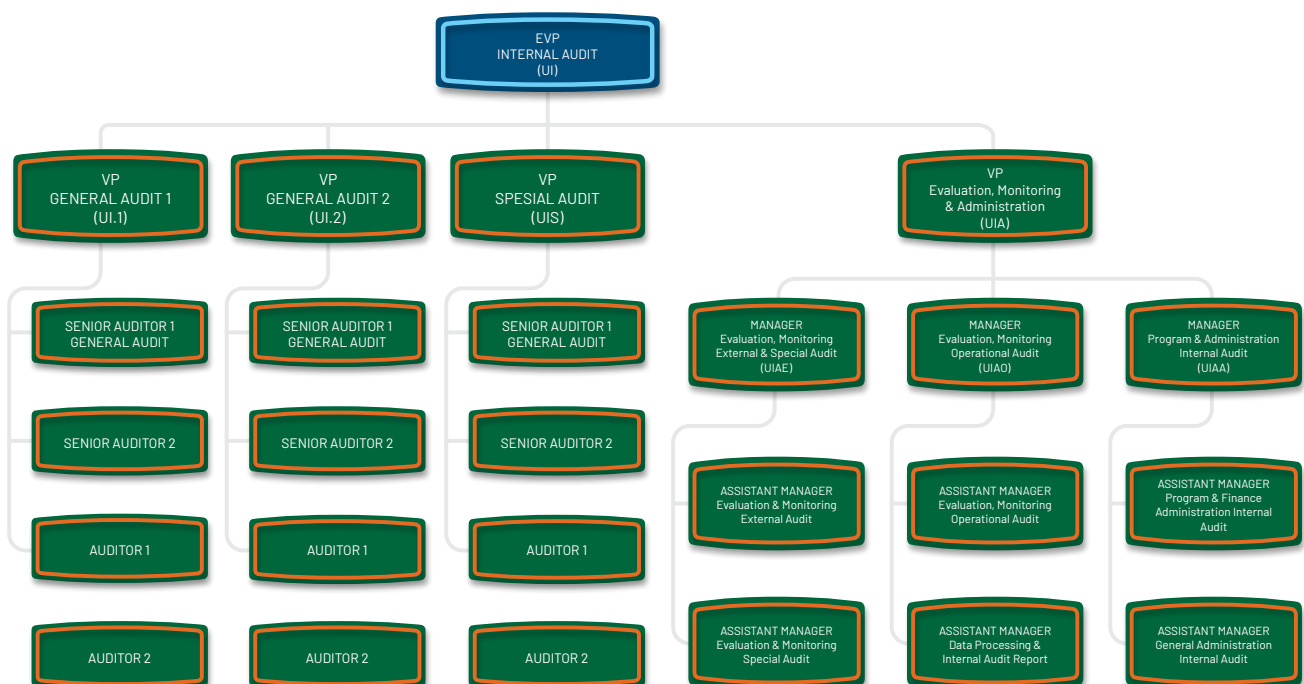
UNIT INTERNAL AUDIT

Internal Audit Unit

Struktur Organisasi Unit Internal Audit

Berdasarkan Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor: KEP.U/ KO.104/V/4/KA-2016 Tanggal 26 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Unit Internal Audit/Satuan Pengawasan Intern, Struktur Organisasi Unit Internal Audit adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Unit Internal Audit



Internal Audit Unit Organization Structure

The Internal Audit Unit Organization Structure according to the PT KAI (Persero) Board of Directors Decree No.: KEP.U/ KO.104/V/4/KA-2016 dated May 26, 2016, on Organization and Administration of the Internal Audit Unit/Internal Oversight Unit are as follows:

Internal Audit Unit Organization Structure

Kedudukan Unit Internal Audit dalam Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor KEP.U/ KO.104/V/4/KA-2016 Tanggal 26 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Unit Internal Audit/Satuan Pengawasan Intern, Unit Internal Audit berkedudukan di Kantor Pusat Perseroan, yaitu di Bandung. Secara struktural, Unit Internal Audit berada satu tingkat di bawah Direksi dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

Internal Audit Unit Position Within the Organization Structure

According to PT KAI (Persero) Board of Directors Decree No.: KEP.U/ KO.104/V/4/KA-2016 dated May 26, 2016, on Organization and Administration of the Internal Audit Unit/Internal Oversight Unit, the Internal Audit Unit operates in the Company's Head Office in Bandung. Structurally, the Internal Audit Unit is one level below the Board of Directors and is directly responsible to the President Director.

Profil Kepala Unit Internal Audit

Internal Audit Unit Profile

DWI ERNI RATNAWATI EVP Internal Audit	
Kewarganegaraan / Citizenship	Warga Negara Indonesia / Indonesian
Domisili / Domicile	Bogor
Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Pekalongan, 2 Oktober 1968 / Pekalongan, October 2, 1968
Usia / Age	54 tahun / 54 years old
Periode Menjabat / Term of Office	2018-sekarang / 2018-present
Dasar Hukum Penunjukan / Legal Basis of Appointment	SK.U/KH.608/VII/33/SAP/KA2018 tanggal 12 Juli 2018 / SK.U/KH.608/VII/33/SAP/KA2018 dated July 12, 2018
Riwayat Pendidikan / Educational Background	
<ul style="list-style-type: none"> • S1 Akuntansi Universitas Padjadjaran (1993) / Bachelor's Degree in Accounting from Universitas Padjadjaran (1993) • S2 Manajemen Keuangan Universitas Satyagama (2000) / Master's Degree in Finances Management from Universitas Satyagama (2000) 	
Sertifikasi / Certification	
<ul style="list-style-type: none"> • Chartered Accountant (CA) 	
Pengalaman Kerja / Employment History	
<ul style="list-style-type: none"> • EVP Daerah Operasi 4 Semarang PT KAI (2018) / EVP Operation Area 4 Semarang of PT KAI (2018) • VP Daerah Operasi 3 Cirebon PT KAI (2018) / VP Operation Area 3 Cirebon of PT KAI (2018) • VP Daerah Operasi 5 Purwokerto PT KAI (2016-2018) / VP Operation Area 5 Purwokerto of PT KAI (2016-2018) • Deputy EVP Daerah Operasi 6 Yogyakarta PT KAI (2016) / Deputy EVP Operation Area 6 Yogyakarta of PT KAI (2016) • CDD Training and Education PT KAI (2016) • EVP Training and Education IR. H. Djuanda PT KAI (2016) • EVP Internal Audit PT KAI (2014-2016) • Kasubaud Jatim III Perwakilan Jatim – BPK RI (2013-2014) / Head of Sub-dept. of East Java III Representative of East Java – BPK RI (2013-2014) • Kepala Seksi pada VII.C.3.2 AKN VII BPK RI (2010- 2011) / Section Head at VII.C.3.2 AKN VII BPK RI (2010- 2011) • Kepala Seksi pada VII.C.1.1 AKN VII BPK RI (2007- 2010) / Section Head at VII.C.1.1 AKN VII BPK RI (2007- 2010) • Pemeriksa pada AKN VII BPK RI (2005- 2007) / Examiner at AKN VII BPK RI (2005- 2007) • Pemeriksa Muda pada AKN VII BPK RI (1997-2005) / Junior Examiner at AKN VII BPK RI (1997-2005) • Pemeriksa Muda pada AKN V BPK RI (1996-1997) / Junior Examiner at AKN V BPK RI (1996-1997) 	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	
-	

Jumlah dan Komposisi Personil Unit Audit Internal

Pada posisi 31 Desember 2022, Unit Internal Audit memiliki personil sejumlah 63 orang terdiri dari 18 orang pekerja struktural dan pelaksana serta 45 auditor. Perincian mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Internal Audit Unit Person Number and Composition

As of December 31, 2022, the Internal Audit Unit consisted of 63 members which consisted of 18 structural staffs and officers and 45 auditors with the following details:

Jumlah dan Komposisi Personil Unit Audit Internal

Internal Audit Unit Person Number and Composition

No.	Jabatan / Position	Jumlah Pekerja / Number of Employees				Total
		Evaluation, Monitoring and Administration	General Audit 1	General Audit 2	Special Audit	
1	EVP	1	-	-	-	1
2	VP	1	1	1	1	4
3	Manager	3	-	-	-	3
4	Assistant Manager	6	-	-	-	6
5	Pelaksana	4	-	-	-	4
Jumlah Manajerial / Number of Managerial		15	1	1	1	18
6	Senior Auditor 1	-	4	3	3	10
7	Senior Auditor 2	-	6	4	4	14
8	Auditor 1	-	2	5	3	10
9	Auditor 1	-	4	3	4	11
Jumlah Auditor / Total Auditor		-	16	15	14	45
Total		15	17	16	15	63

Sertifikasi Profesi Personil Unit Audit Internal

Pada posisi 31 Desember 2022, Unit Audit Internal telah dilengkapi oleh sejumlah personil yang memiliki sertifikasi profesi, dengan perincian sebagai berikut:

Internal Audit Unit Professional Certification

As of December 31, 2022, the Internal Audit Unit was joined by several person with professional certifications, as detailed below:

Sertifikasi Profesi Personil Unit Audit Internal

Internal Audit Unit Personnel Professional Certification

Sertifikat / Certificate	Jumlah / Number of Personnels With Certification
Chartered Accountant (CA)	10 orang / 10 people
Qualified Internal Auditor (QIA)	18 orang / 18 people
Certified Fraud Examiner (CFE)	1 orang / 1 person
Certified Internal Audit Executive (CIAE)	1 orang / 1 person
Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)	6 orang / 6 people

Program Peningkatan Kompetensi Unit Audit Internal

Pada tahun 2022, personil Unit Audit Internal mengikuti program peningkatan kompetensi dengan perincian sebagai berikut:

Internal Audit Unit Competency Development Program

In 2022, the Internal Audit Unit participated in competency development programs as detailed below:

Nama / Name	Jabatan / Job	Nama / Training Name	Tanggal Pelaksanaan / Date	Penyelenggara / Organizer
Dwi Erni Ratnawati	Executive Vice President Internal Audit	Seminar: Cryptocurrency dalam Perspektif Akuntan / Seminar: Cryptocurrency in Accountant's Perspective	28 Mei 2022 / May 28, 2022	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Barat / Institute of Indonesia Chartered Accountants of West Java
		The Leader as Coach Program	30 Juni 2022 / June 30, 2022	LOOP Institute of Coaching
		Seminar: Internal Control Over Financial Reporting	16 Juli 2022 / July 16, 2022	SPA FEB UI
		Webinar: Effective Technique For Internal Audit	23 Juli 2022 / July 23, 2022	Ruang Seminar
		Webinar Perpajakan: Pajak Pertambahan Nilai UU HPP Serta 14 PMK Turunannya dan Restitusi / Tax Webinar: Value Added Tax of the HPP Law and 14 PMK Derivatives and Restitution	30 Juli 2022 / July 30, 2022	SPA FEB UI
		Executive Leadership Development	11 Agst - 6 Nov 2022 / August 11 - November 6,, 2022	IPMI Iternational Business School
		Webinar: Internal Control to Prevent Fraud	13 Agustus 2022 / August 13, 2022	Ruang Seminar
		Webinar: Effective Technique in Audit	17 September 2022 / September 17, 2022	Ruang Seminar
		Seminar: Digital Forensic in Investigative Auditing	18 September 2022 / September 18, 2022	SPA FEB UI
		Webinar: Laporan Keuangan Badan Layanan Umum / Webinar: Public Service Agency Financial Statements	1 Oktober 2022 / October 1, 2022	Ruang Seminar
		Webinar: Fungsi Finance Dalam Organization Change Management / Webinar: Function of Finance in Organizational Change Management	12 November 2022 / November 12, 2022	Ruang Seminar
Kongres Ikatan Akuntan Indonesia XIV / Institute of Indonesia Chartered Accountants Congress XIV	13 - 14 Desember 2022 / December 13 - 14, 2022	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) / Institute of Indonesia Chartered Accountants		
Bambang Purwadi Nugroho	Vice President General Audit 1	Pelatihan Sertifikasi Certified Internal Audit Executive (CIAE) / Certified Internal Audit Executive (CIAE) Certification Training	10 - 27 Oktober 2022 / October 10 - 27, 2022	BPKP
Bambang Purwanto Atmadji	Vice President General Audit 2	Talkshow Bertajuk Bincang SPI Tema "Sinergi Pandu Integritas" / Talk Show of SPI Talks with the Theme "Synergy Guides Integrity"	31 Agustus 2022 / August 31, 2022	FKSPI Wilayah Jabar & Banten / FKSPI of West Java and Banten
		Pelatihan Sertifikasi QIA Tk Manajerial / QIA Managerial Level Certification Training	14 - 23 Februari 2022 / February 4 - 23, 2022	YPIA
Abdul Karim	PLT Vice President Special Audit	Talkshow Bertajuk Bincang SPI Tema "Sinergi Pandu Integritas" / Talk Show of SPI Talks with the Theme "Synergy Guides Integrity"	31 Agustus 2022 / August 31, 2022	FKSPI Wilayah Jabar & Banten / FKSPI of West Java and Banten
		Certified Fraud Examiner (CFE)	24 Oktober 2022 / October 24, 2022	ACFE
		Webinar: Digital Forensic in Investigative Auditing	17 Desember 2022 / December 17, 2022	Ruang Seminar
Nathan Marihottua Siahaan	Vice President Evaluation, Monitoring and Administration	-	-	-
		-	-	-

Realisasi Pendidikan dan Seminar Tahun 2022

Realisasi kegiatan pendidikan dan seminar yang diikuti oleh personil Unit Audit Internal untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

2022 Training and Education and Seminar

Training and education activities and seminars participated by the Internal Audit Unit personnels in 2022 are as follows:

No	Nama Diklat/ Seminar/Workshop / Name of Training and Education/Seminar/Workshop	Jadwal Pelaksanaan / Implementation Schedule		Penyelenggara / Organizer	Keterangan / Description
		Tanggal / Date	Tempat / Venue		
Triwulan I / 1st Quarter					
1	Pelatihan Sertifikasi <i>Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)</i> / Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA) Certification Training	10 - 21 Januari 2022 / January 10 - 21, 2022	Online	YPIA	3 orang / 3 people
2	Pelatihan Sertifikasi QIA Tk Manajerial / QIA Managerial Level Certification Training	14 - 23 Februari 2022 / February 14 - 23, 2022	Online	YPIA	1 orang / 1 Person
3	Pelatihan Sertifikasi QIA Tk Manajerial / QIA Managerial Level Certification Training	21 - 30 Maret 2022 / March 21-30, 2022	Online	YPIA	2 orang / 2 people
4	Pelatihan Sertifikasi QIA Tk Lanjutan / QIA Advanced Level Certification Training	21 Maret - 2 April 2022 / March 21-April 2, 2022	Online	YPIA	2 orang / 2 people
Triwulan II / 2nd Quarter					
5	Ujian Sertifikasi CFE / CFE Certification Exam	12,13,19,20 April 2022 / April 12,13,19,20, 2022	Online	ACFE	1 orang / 1 Person
6	Workshop Internal COSO-2013	10-11 Mei 2022 / May 10-11, 2022	Online	YPIA	1 orang / 1 Person
7	<i>Certified Information Technology Auditor Professional (CITAP)</i>	14 Mei 2022 / May 14, 2022	Online	dilatih.co	1 orang / 1 Person
8	Pelatihan Sertifikasi <i>Certified Internal Audit Executive (CIAE)</i> / Certified Internal Audit Executive (CIAE) Certification Training	18 Mei - 21 Juni 2022 / May 18 - June 21, 2022	E-Learning Tatap Muka, dan Uji Kompetensi / Face-to-Face E-Learning, and Competency Test	BPKP	1 orang / 1 Person
9	Pelatihan Sertifikasi QIA Tk Lanjutan / QIA Advanced Level Certification Training	20 Juni - 2 Juli 2022 / 20 June - 2 July 2022	Online	YPIA	5 orang / 5 people
10	Pelatihan Sertifikasi QIA Tk Manajerial / QIA Managerial Level Certification Training	20 - 29 Juni 2022 / June 20-July 2, 2022	Online	YPIA	4 orang / 4 people
11	Konferensi Auditor Internal, Wisuda YPIA dan Munas FKSPI 2022	29 Juni - 1 Juli 2022 / June 29-July 1, 2022	Hotel Marriot Yogyakarta	YPIA	2 orang / 2 people
Triwulan III / 3rd Quarter					
12	Pelatihan Fraud Auditing 1 dan 2 / Training of Fraud Auditing 1 and 2	5 - 15 Juli 2022 / July 5 - 15, 2022	online	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA) / Fraud Auditing Development Institute (LPFA)	1 Orang / Person
13	Pelatihan Sertifikasi QIA Tk Lanjutan / QIA Managerial Level Certification Training	1 - 13 Agustus 2022 / August 1 - 13, 2022	Online	YPIA	5 Orang / People
14	Talkshow Bertajuk Bincang SPI Tema "Sinergi Pandu Integritas" / Talk Show of SPI Talks with the Theme "Synergy Guides Integrity"	31 Agustus 2022 / August 31, 2022	Graha PINDAD Bandung	FKSPI Wilayah Jabar & Banten / FKSPI of West Jave & Banten	3 Orang / People
Triwulan IV / 4th Quarter					
15	Pelatihan Sertifikasi <i>Certified Internal Audit Executive (CIAE)</i> / Certified Internal Audit Executive (CIAE) Certification Training	10 Oktober - 11 November 2022 / October 10 - November 11 2022	E-Learning Tatap Muka, dan Uji Kompetensi / Face-to-Face E-Learning, and Competency Test	BPKP	1 Orang / Person
16	Pelatihan Sertifikasi QIA Tk Manajerial / QIA Managerial Level Certification Training	17 - 26 Oktober 2022 / October 17 - 26, 2022	online	YPIA	3 orang / 3 people

No	Nama Diklat/ Seminar/ Workshop / Name of Training and Education/Seminar/Workshop	Jadwal Pelaksanaan / Implementation Schedule		Penyelenggara / Organizer	Keterangan / Description
		Tanggal / Date	Tempat / Venue		
17	Pelatihan Sertifikasi Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)/ Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA) Certification Training	31 Oktober - 11 November 2022 / October 31 - November 11, 2022	Online	YPIA	3 orang / 3 people
18	Kongres Ikatan Akuntan Indonesia XIV / Institute of Indonesia Chartered Accountants Congress XIV	13 - 14 Desember 2022 / December 13 - 14, 2022	Balai Sidang JCC, Jakarta	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) / Institute of Indonesia Chartered Accountants	6 orang / 6 people

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Unit Audit Internal

Mengacu pada Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor: SK.U/KG.210/II/1/KA-2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Penetapan Piagam Internal Audit, Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Unit Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala SPI/ Executive Vice President yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
2. Kepala Unit Internal Audit bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama, dapat berkomunikasi dengan Direksi dan Komisaris melalui Komite audit.

Internal Audit Charter

Satuan Pengawas Intern Perseroan memiliki Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) sebagai dasar acuan bagi tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab terkait aktivitas audit internal, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor: SK.U/KG.210/II/1/KA-2022 tanggal 10 Februari 2022.

Piagam Pengawasan Internal KAI berlaku sebagai pedoman yang menjelaskan posisi dan aktivitas Satuan Pengawasan Intern dalam organisasi, memberikan kewenangan akses terhadap catatan, personil, dan properti fisik yang relevan dengan praktik penugasan, serta mendefinisikan ruang lingkup aktivitas Satuan Pengawasan Intern. Lebih dari itu, Piagam Pengawasan Intern memuat pengakuan terhadap eksistensi dan komitmen pemimpin atas fungsi Unit Internal Audit/Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Piagam Pengawasan Internal KAI disusun dengan berdasarkan definisi audit internal, muatan Pedoman Perilaku Perseroan, hingga persyaratan aktivitas audit internal dan evaluasi kinerja aktivitas audit internal di dalam *International Standard for The*

Parties who Appointed and Dismissed the Head of The Internal Audit Unit

Referring to the PT KAI (Persero) Board of Directors Decree No. SK.U/KG.210/II/1/KA-2022 dated February 10, 2022 on Determination of Internal Audit Charter, the Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed with the following terms:

1. The Internal Audit Unit is led by a Head of SPI/Executive Vice President who is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners.
2. The Head of The Internal Audit Unit is structurally responsible to the President Director with the ability to communicate with the Board of Commissioners through the Audit Committee.

Internal Audit Charter

The Internal Audit Unit refers to Internal Audit Charter as its basis of objectives, authorities, and responsibilities related to the internal audit activities, as stipulated by PT KAI (Persero) Board of Directors Decree Number: SK.U/KG.210/II/1/KA-2022 dated February 10, 2022

KAI's Internal Audit Charter Piagam acts as the guidelines that describes the Internal Audit Unit's position and activities within the organization, authorizes to access to records, personnel, and physical property relevant to the assignment and defines the scope of the Internal Audit Unit's activities. Furthermore, the Internal Audit Charter contains an acknowledgment of the leadership's existence and commitment to the function of the Internal Audit Unit/Internal Oversight Unit (SPI) at PT Kereta Api Indonesia (Persero).

The Internal Audit Charter of the Internal Audit Unit of KAI was prepared with reference to the Definition of Internal Audit, the Code of Ethics, and the International Standard for The Professional Practice of Internal Auditing issued by the

Professional Practice of Internal Auditing yang diterbitkan International Audit Standard Board (IASB) The Institute of Internal Auditors (IIA). Dengan mengacu pada ketentuan dan standar tersebut, Piagam Pengawasan Internal KAI memuat butir-butir sebagai berikut:

1. Visi, Misi, Fungsi, dan Ruang Lingkup;
2. Struktur, Kedudukan, dan Hubungan Kerja;
3. Tanggung Jawab, Kewenangan, dan Larangan;
4. Independensi, Objektivitas, dan Profesional;
5. Kode Etik;
6. Program pengembangan dan peningkatan kualitas kepercayaan; dan
7. Lain-Lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Mengacu pada Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor: SK.U/KG.210/II/1/KA-2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Penetapan Piagam Internal Audit, Unit Audit Internal memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas audit internal, mencakup pemberian keyakinan dan masukan dengan penekanan pada aktivitas yang mempunyai risiko tinggi.
2. Mengembangkan sistem untuk memantau proses tindak lanjut atas aktivitas audit internal.
3. Melaporkan secara periodik atas aktivitas audit internal kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
4. Memastikan bahwa sumber daya Unit Internal Audit telah sesuai, memadai, dan dapat digunakan secara efektif dalam rangka pencapaian rencana yang telah ditetapkan.
5. Mengembangkan *quality assurance and improvement program* (QAIP) sebagai evaluasi kesesuaian aktivitas audit internal terhadap Standar IIA dan Kode Etik Internal Auditor.
6. Melakukan koordinasi dengan auditor eksternal dan penyedia jasa asuransi lainnya, untuk mencapai hasil yang komprehensif dan optimal.

Kewenangan Internal Audit

Berdasarkan Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor: SK.U/KG.210/II/1/KA-2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Penetapan Piagam Internal Audit, Unit Internal Audit memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan aktivitas audit internal terhadap semua unit kerja perusahaan, dan/atau anak perusahaan, sesuai tata kelola yang baik (*good governance*).
2. Melakukan aktivitas audit khusus/investigatif terhadap unsur kegiatan yang terindikasi fraud dan melanggar code of conduct.

International Audit Standard Board (IASB) The Institute of Internal Auditors (IIA) which outlines the detailed requirements for conducting the internal audit activity and in evaluating the performance of the internal audit activity. The Internal Audit Charter of KAI contains the following points:

1. Vision, Mission, Functions and Scope;
2. Structure, Position, and Work Relations;
3. Responsibilities, Authorities and Prohibitions;
4. Independence, Objectivity and Professionalism;
5. Code of Conduct;
6. Trust quality development and improvement program; and
7. Others.

Internal Audit Duties and Responsibilities

Referring to the Decree of the Board of Directors of PT KAI (Persero) No. SK.U/KG.210/II/1/KA-2022 dated February 10, 2022 on the Establishment of the Internal Audit Charter, the Internal Audit Unit has the following responsibilities:

1. Plan and carry out internal audit activities, including providing assurance and input with an emphasis on high-risk activities.
2. Develop a system to monitor the follow-up process on internal audit activities.
3. Report periodically on internal audit activities to the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.
4. Ensure that the resources of the Internal Audit Unit are appropriate, adequate, and can be used effectively in order to achieve the plans that have been set.
5. Develop a quality assurance and improvement program (QAIP) as an evaluation of the suitability of internal audit activities against the IIA Standards and the Internal Auditor's Code of Ethics.
6. Coordinate with external auditors and other insurance service providers, to achieve comprehensive and optimal results.

Internal Audit Authorities

Referring to the Decree of the Board of Directors of PT KAI (Persero) No. SK.U/KG.210/II/1/KA-2022 dated February 10, 2022 on the Establishment of the Internal Audit Charter, the Internal Audit Unit is authorized to:

1. Conduct internal audit activities on all work units of the Company, and/or subsidiaries, in accordance with good governance.
2. Conduct special/investigative audit activities on elements of activity indicated as fraud and violating the code of conduct.

3. Mengakses seluruh data dan informasi yang relevan tanpa pembatasan tentang perusahaan, dan/atau anak perusahaan, termasuk meminta keterangan kepada semua pekerja terkait.
4. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
5. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
6. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal, termasuk regulator dan/atau auditor eksternal.
7. Meminta atau mendapatkan bantuan tenaga ahli/profesional, jika dianggap perlu, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.
8. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

3. Access all relevant data and information without restrictions regarding the Company, and/or its subsidiaries, including asking for information from all relevant workers.
4. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or the Audit Committee.
5. Hold periodic and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or the Audit Committee.
6. Coordinate with external parties, including regulators and/or external auditors.
7. Request or obtain expert/professional assistance, if deemed necessary, both from within and from outside the company.
8. Participate in strategic meetings without voting rights.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2022

Program dan Realisasi Penugasan

Mengacu pada Program Kerja Tahunan (PKT) 2022, Unit Audit Internal memiliki program audit tahun 2022 sejumlah 36 penugasan yang terdiri dari 33 penugasan Audit Operasional, 1 Evaluasi Sistem Pengendalian Intern, 1 Evaluasi Pengelolaan Manajemen Risiko dan 1 Review Laporan Keuangan. Sampai dengan 31 Desember 2022, seluruh penugasan tersebut telah selesai dilaksanakan. Selain itu, pada tahun 2022, Unit Audit Internal juga telah melaksanakan audit investigatif, monitoring dan evaluasi, serta konsultasi kepada *auditee*.

Perincian program dan realisasi penugasan Unit Audit Internal tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Audit Operasional

Berdasarkan PKT Tahun 2022, Unit Audit Internal memprogramkan penerbitan Laporan Hasil Audit (LHA) sejumlah 33 LHA. Sampai dengan 31 Desember 2022, penugasan Audit Operasional untuk tahun 2022 telah terlaksana seluruhnya.

2. Penugasan Audit Investigatif/Khusus

- a. Sumber penugasan Audit Khusus atau Investigatif
 - 1) Penugasan dari Direktur Utama;
 - 2) Permintaan dari Dewan Komisaris setelah mendapat disposisi penugasan audit dari Direktur Utama; dan
 - 3) Tindak lanjut hasil temuan audit operasional dan hasil temuan audit eksternal setelah mendapat disposisi penugasan audit dari Direktur Utama.

Brief Report on the Internal Audit Committee Activities Implementation in 2022

Assignment Program and Realization

Referring to the 2022 Annual Work Program (PKT), the 2022 audit program of the Internal Audit Unit comprised of 36 assignments containing 33 Operational Audit assignments, 1 Internal Control System Evaluation, 1 Risk Management Evaluation and 1 Financial Statements Review. As of December 31, 2022, all of these assignments have been completed. In 2022, the Internal Audit Unit also carried out investigative audits, monitoring and evaluation, as well as consultation to *auditees*.

Perincian program dan realisasi penugasan Unit Audit Internal tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Operational Audit

Based on the 2022 Annual Work Program (PKT), the Internal Audit published 33 LHA. As of December 31, 2022, the 2022 Operational Audit assignment has been fully implemented.

2. Investigative/Special Audit Assignments

- a. Source of Special or Investigative Audit assignments
 - 1) Assignments from the President Director;
 - 2) Request from the Board of Commissioners after receiving an audit assignment disposition from the President Director; and
 - 3) Follow up on operational audit findings and external audit findings after receiving an audit assignment disposition from the President Director

- b. Penetapan Objek Audit Objek audit khusus atau investigatif disesuaikan dengan materi penugasan dari disposisi Direktur Utama.

3. Penugasan Evaluasi

Pada tahun 2022, terdapat 2 penugasan evaluasi, yaitu:

- a. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (Internal Control) atas Unit Tax (KCT) dan unit terkait lainnya. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terbit pada tanggal 20 Juli 2022 dengan Nomor: 01/UI/EV/IV/KA-2022;
- b. Evaluasi Pengelolaan Manajemen Risiko atas Unit Division of Risk Management (KR) dan unit terkait lainnya. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terbit pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan Nomor: 3/UI/EV/VII/KA-2022.
- c. Evaluasi Investasi Penanaman Modal Negara (PMN) pada *Division of Finance Consolidation* (KC), Divisi Light Rail Transit (LRT), PT KCI dan unit terkait lainnya. LHE terbit tanggal 16 Januari 2023 dengan Nomor: 01/UI/LHE/UIS/2023.
- d. Evaluasi Kesiapan Data Audit Backlog IMO pada *Division of Revenue and Cost Consolidation* (KG) dan unit terkait lainnya. LHE terbit tanggal 16 Januari 2023 dengan Nomor: 02/UI/EV/UI/KA-2022.

4. Penugasan Review

Sesuai PKT tahun 2022, Unit Internal Audit memprogramkan penugasan Review atas Laporan Keuangan KAI di Unit Finance Consolidation (KC). Pelaksanaan penugasan tersebut telah direalisasikan dengan SPT REV Nomor: 01/UI/REV/X/KA-2022 tanggal 07 Oktober 2022.

Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Keuangan PT KAI (Persero) terbit tanggal 9 Januari 2023 dengan Nomor: 01/UI/LHR/UIS/I/2023.

5. Penugasan Monitoring dan Evaluasi

Program pelaksanaan monitoring tindak lanjut terhadap hasil audit internal dan eksternal pada tahun 2022 dilakukan melalui daring by zoom, telepon, email, dan surat menyurat (RDS) ke D1, D5, D6, D8, Kantor Pusat (Unit UL, US, USS, USC, CP, CF, CPD, CPM, CCC, MC, MT, MCA, MCI, MCO, MMH, SN, PB, PA, PE, PS, PPA, TJ, TTA, KG, KI, KL, KR, KCW, KCC, KCA, RR, RT, LRT Jabodetabek), Daop 1 PT, Daop 2 Bandung, Daop 4 Semarang, Daop 5 Purwokerto, Daop 6 PT, Daop 7 Madiun, Daop 8 Surabaya, Daop 9

- b. Determination of Audit Object The object of a special or investigative audit is adjusted to the assignment material from the disposition of the President Director.

3. Penugasan Evaluasi

In 2022 there were 2 evaluation assignments, namely:

- a. Assessment of the Effectiveness of the Internal Control System for the Procurement of Goods and Services (PBJ) in the Logistics Unit (KG) and other related units. Evaluation Result Report (LHE) published on July 20, 2022 with Number: 01/UI/EV/IV/KA-2022; and
- b. Evaluation of Non-Permanent Government Investments in the context of the 2021 National Economic Recovery (PEN) at the Directorate of Finance (D8). The Evaluation Results Report (LHE) was published on October 24, 2022 with Number: 3/UI/EV/VII/KA-2022
- c. Evaluation of State Equity Participation (PMN) in the Division of Finance Consolidation (KC), Light Rail Transit (LRT) Division, PT KCI and other related units. LHE was issued on January 16, 2023 with No. 01/UI/LHE/UIS/2023.
- d. Evaluation of Readiness of IMO Backlog Audit Data in the Division of Revenue and Cost Consolidation (KG) and other related units. LHE was issued on January 16, 2023 with No. 02/UI/EV/UI/KA-2022.

4. Review Assignment

In accordance with the 2022 PKT, the Internal Audit Unit programmed the assignment of a Review on the Financial Statements of KAI in the Finance Consolidation Unit (KC). The implementation of the assignment has been realized with SPTREV Number: : 01/UI/REV/X/KA-2022 dated October 7, 2022

Report on the Result of the Review on the Financial Statements of PT KAI (Persero) issued on January 9, 2023 with Number: 01/UI/LHR/UIS/I/2023.

5. Monitoring and Evaluation Assignment

The follow-up monitoring program for internal and external audit results in 2022 was carried out via online by zoom, telephone, email, and correspondence (RDS) to D1, D5, D6, D8, Head Office (Units of UL, US, USS, USC, CP, CF, CPD, CPM, CCC, MC, MT, MCA, MCI, MCO, MMH, SN, PB, PA, PE, PS, PPA, TJ, TTA, KG, KI, KL, KR, KCW, KCC, KCA, RR, RT, LRT Jabodetabek), Daop 1 PT, Daop 2 Bandung, Daop 4 Semarang, Daop 5 Purwokerto, Daop 6 PT, Daop 7 Madiun, Daop 8 Surabaya, Daop 9 Jember, North Sumatra

Jember, Divre I Sumatera Utara, Divre II Sumatera Barat, Divre III Palembang, Divre IV Tanjungkarang, BY Tegal, BY Surabayagubeng, BY Lahat, dan Anak Perusahaan (PT KCI, PT KALOG, PT RAILINK, PT KAI Wisata, PT RMU, dan PT KAPM).

Pada Triwulan IV Tahun 2022 terdapat penugasan monitoring tindak lanjut hasil temuan audit dengan menggunakan Aplikasi Management System-TeamMate+ dengan Surat Tugas Monitoring Nomor 1/UI/MON/XI/KA-2022 tanggal 15 November 2022 di Daop 1 Jakarta.

6. Kegiatan Kompilasi

Program LHA Kompilasi Tahun 2022 adalah sejumlah 5 LHA Kompilasi. Hingga 31 Desember 2022 telah terealisasi seluruhnya.

7. Kegiatan Konsultasi dengan Unit Terkait

Peran konsultasi Internal Audit yang dilakukan pada tahun 2022 melalui permintaan/undangan adalah sejumlah 16 kegiatan konsultasi.

8. Kegiatan Pendampingan Auditor Eksternal dan Dewan Komisaris/Komite Audit Tahun 2022

1. Pendampingan Audit BPK RI atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi Tahun 2021 pada UAKPA BUN Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan D.I Yogyakarta.
2. Pendampingan Audit KAP RSM AAJ untuk Pelaksanaan Audit Kepatuhan Perusahaan Terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern atas General Audit Tahun Buku 2021 dengan pokok pembahasan yaitu Laporan Keuangan Konsolidasian (Audited), LK Induk, Laporan Evaluasi Kinerja, LK PUMK, Laporan PSA 62, Laporan Management Letter, Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit KAP, Laporan AUP KPPK, dan Laporan AUP KAI PEN.
3. Pendampingan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2022 dengan mengunjungi (onsite visit) Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Padalarang, Stasiun Tegalluar, Depo Tegalluar dan LRT Jabodebek yang memperoleh PMN Tahun 2021 dan Pembahasan Berita Acara Hasil Pengawasan di Kantor Pusat PT KAI (Persero) tanggal 21 s.d 25 Maret 2022.

Divre I, Divre II West Sumatra, Palembang III Regional Division, Tanjungkarang IV Regional Division, BY Tegal, BY Surabayagubeng, BY Lahat, and Subsidiaries (PT KCI, PT KALOG, PT RAILINK, PT KAI Wisata, PT RMU, and PT KAPM).

In Q4 2022, there was an assignment to monitor follow-up on audit findings by using the Management System-TeamMate+ Application with Monitoring Assignment Letter No. 1/UI/MON/XI/KA-2022 dated November 15, 2022 in Daop 1 Jakarta.

6. Compilation Activities

There were 5 LHA Program in 2022. As of December 31, 2022, in which all have been realized.

7. Consultation Activities with Related Units

The role of the Internal Audit consultation carried out in 2022 through requests/invitations as many as 16 consulting activities.

8. Assistance Activities for External Auditors and the Board of Commissioners / Audit Committee in 2022

1. BPK RI Audit Assistance on Inspections with Specific Purposes on the Implementation of Public Service Obligations for Economy Class Passenger Train Transport in 2021 at UAKPA BUN of the Ministry of Transportation and PT Kereta Api Indonesia (Persero), as well as Other Related Agencies in DKI Jakarta, West Java, East Java, and D.I. Yogyakarta.
2. Audit Assistance of KAP RSM AAJ for the Implementation of Company Compliance Audits Against Legislation and Internal Control General Audit for Fiscal Year 2021 with the subject matters of Consolidated Financial Statements (Audited), Main FS, Performance Evaluation Report, PUMK FS, PSA 62 Report, Management Report Letter, Monitoring Report on Follow-Up of KAP Audit Results, AUP KPPK Report, and AUP KAI PEN Report.
3. Assistance of the Inspectorate General of the Ministry of Finance in the framework of implementing the Inspectorate General's 2022 Supervision Policy and Supervision Work Program by visiting (onsite visit) Completion of the Jakarta-Bandung Fast Train Project at Padalarang Station, Tegalluar Station, Tegalluar Depot and LRT Jabodebek which received 2021 PMN and Discussion of the Minutes of Supervision Results at the Head Office of PT KAI (Persero) from 21 to 25 March 2022.

4. Pendampingan BPKP Pusat dan Daerah atas Pengelolaan Dana PEN di Lingkungan KAI.
5. Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Reviu atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN).

4. Central BPKP Assistance for Management of PEN Funds within KAI.
5. Review of Domestic Product Use (P3DN) and Review of National Strategic Project (PSN) Governance.

9. Kegiatan Penyusunan Pedoman Internal Audit

1. Pedoman Pengelolaan Satuan Pengendalian Intern;
2. Pedoman Pengelolaan Kertas Kerja Audit;
3. Pedoman Audit Investigatif;
4. Pedoman Evaluasi Penilaian Maturitas Manajemen Risiko;
5. Pedoman *Audit Management System* (TeamMate+).

9. Kegiatan Penyusunan Pedoman Internal Audit

1. Guidelines for the Management of the Internal Audit Unit;
2. Guidelines for Management of Audit Working Papers;
3. Investigative Audit Guidelines;
4. Guidelines for Risk Management Maturity Evaluation;
5. Guidelines for Audit Management System (TeamMate+).

Pelaksanaan dan Frekuensi Rapat Gabungan bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

Pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun 2022 telah mencakup pelaksanaan rapat gabungan bersama Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit yaitu sejumlah 14 kali. Perincian mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Joint Meeting Implementation with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee

Duties implementation of the Internal Audit Unit in 2022 includes 14 joint meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee. Details about the meetings are as follows:

Pelaksanaan Rapat Gabungan Bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

Joint Meeting Implementation with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee

No.	Tanggal Pelaksanaan / Implementation Date	Agenda Pembahasan / Discussion Agenda	Peserta Rapat
1.	28 Januari 2022 / January 28, 2022	Pembahasan Laporan Tahap 2 General Audit KAP RSM Tahun Buku 2021 / Discussion of Stage 2 General Audit KAP RSM Report for Fiscal Year 2021	Komite Audit, PT KCIC, PT RMU, PT KALOG, PT KAPM, PT KAWISTA, PT Railink, D8, PS, RT, KLS, General Manager UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Gudang Persediaan / Audit Committee, PT KCIC, PT RMU, PT KALOG, PT KAPM, PT KAWISTA, PT Railink, D8, PS, RT, KLS, General Manager UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng and Head of Supply Warehouse Technical Implementation Unit
2.	2 Februari 2022 / February 2, 2022	Undangan Entry Meeting Audit PSO TA 2021 BPK RI / Invitation to FY 2021 BPK RI PSO Audit Entry Meeting	Komite Audit, UL, TJ, UR, CP, TS, CF, OT, RR, RT, SN, MT, PA, PE, PS, KG, KC, KI / Audit Committee, UL, TJ, UR, CP, TS, CF, OT, RR, RT, SN, MT, PA, PE, PS, KG, KC, KI
3.	14 Februari 2023 / February 14, 2023	Pembahasan PBJ dengan Unit KL / PBJ discussion with KL Unit	Komite Audit, KLS, KLI, KLS, KLU / Audit Committee, KLS, KLI, KLS, KLU
4.	11 Februari 2022 / February 11, 2022	Pembahasan Pra Laporan Tahap 3 General Audit KAP RSM Tahun Buku 2021 / Discussion of Stage 3 Pre-Report General Audit KAP RSM Fiscal Year 2021	Komite Audit, KAP RSM, US, RR, MC, PS, KC, KL / Audit Committee, KAP RSM, US, RR, MC, PS, KC, KL
5.	22 Februari 2022 / February 22, 2022	Pembahasan Laporan Tahap 3 General Audit KAP RSM Tahun Buku 2021 / Discussion of Stage 3 General Audit KAP RSM Report for Fiscal Year 2021	Komite Audit, PT KCI, PT KALOG, PT RMU, PT KAPM, PT KAWISTA, PT RAILINK, KAP RSM, RR, PS, KL / Audit Committee, PT KCI, PT KALOG, PT RMU, PT KAPM, PT KAWISTA, PT RAILINK, KAP RSM, RR, PS, KL
6.	31 Maret 2022 / March 31, 2022	Perubahan Jadwal Exit Meeting General Audit KAP RSM Tahun Buku 2021 / Changes to the General Audit KAP RSM Exit Meeting Schedule for the Fiscal Year 2021	Komite Audit, PT KCI, PT KALOG, PT RMU, PT KAPM, PT KAWISTA, PT RAILINK, KAP RSM, CF, CP, SN, MC, KC, KG, PS, KI, KL / Audit Committee, PT KCI, PT KALOG, PT RMU, PT KAPM, PT KAWISTA, PT RAILINK, KAP RSM, CF, CP, SN, MC, KC, KG, PS, KI, KL
7.	1 April 2022 / April 1, 2022	Exit Meeting General Audit KAP RSM Tahun Buku 2021 / General Audit KAP RSM Exit Meeting for Fiscal Year 2021	Komite Audit, PT KCI, PT KALOG, PT RMU, PT KAPM, PT KAWISTA, PT RAILINK, KAP RSM, CF, CP, SN, MC, KC, KG, PS, KI, KL / Audit Committee, PT KCI, PT KALOG, PT RMU, PT KAPM, PT KAWISTA, PT RAILINK, KAP RSM, CF, CP, SN, MC, KC, KG, PS, KI, KL
8.	19 Mei 2022 / May 19, 2022	Pembahasan Lebih Lanjut Terkait Laporan Kinerja TW I 2022 / Further Discussion on Q1 2022 Performance Report	Komite Audit, Unit Internal Audit / Audit Committee, Internal Audit Unit
9.	21 Oktober 2022 / October 21, 2022	Pembahasan tentang Penetapan Besaran Imbalan Pengadaan Jasa KAP Untuk General Audit PT KAI Tahun Buku 2022 / Discussion on the Determination of Fees for the Procurement of KAP Services for General Audit PT KAI Fiscal Year 2022	Komite Audit, KAP RSM, KC, KL / Audit Committee, KAP RSM, KC, KL

No.	Tanggal Pelaksanaan / Implementation Date	Agenda Pembahasan / Discussion Agenda	Peserta Rapat
10.	10 November 2022 / November 10, 2022	Undangan Entry Meeting General Audit KAP Tahun Buku 2022 / Invitation to KAP General Audit Entry Meeting for Fiscal Year 2022	Komite Audit, PT KCI, PT KALOG, PT RMU, PT KAPM, PT KAWISTA, PT RAILINK, KAP RSM / Audit Committee, PT KCI, PT KALOG, PT RMU, PT KAPM, PT KAWISTA, PT RAILINK, KAP RSM
11.	21 November 2022 / November 21, 2022	Entry Meeting GA KAP TB 2022 / GA KAP TB Entry Meeting 2022	Komite Audit, EVP Internal Audit, SM Keuangan Daop 1 Jakarta / Audit Committee, EVP Internal Audit, SM Finance Daop 1 Jakarta
12.	20 Desember 2022 / December 20, 2022	Pra Pembahasan Laporan Tahap 1 General Audit KAP RSM Tahun Buku 2022 / General Audit KAP RSM Phase 1 Report for the 2022 Fiscal Year	Komite Audit, PT KCI, PT Kalog, PT RMU, PT KAPM, PT Kawista, PT Railink, Kantor Akuntan Publik (KAP) RSM, CFT, CFP, RR, RTA, PB, CFS, CFP / Audit Committee, PT KCI, PT Kalog, PT RMU, PT KAPM, PT Kawista, PT Railink, Public Accounting Firm (KAP) RSM, CFT, CFP, RR, RTA, PB, CFS, CFP
13.	23 Desember 2022 / December 23, 2022	Pembahasan Laporan Tahap 1 General Audit KAP RSM TB 2022 / Discussion of Stage 1 General Audit KAP RSM TB Report 2022	Komite Audit, D8, CF, TJ, RR, RTA, SN, PE, PS, KC, KG, TS, KL, PB, CCC / Audit Committee, D8, CF, TJ, RR, RTA, SN, PE, PS, KC, KG, TS, KL, PB, CCC
14.	28 Desember 2022 / December 28, 2022	Pembahasan Properti Investasi Aset yang Menjadi Objek Optimalisasi Aset Tahun 2022 di Daop 1 Jakarta / Discussion of Asset Investment Properties which are Objects of Asset Optimization in 2022 at Daop 1 Jakarta	Komite Audit, CCC, KCC, KNA Daop 1, Keuangan Daop 1, Aset Daop 1 / Audit Committee, CCC, KCC, KNA Daop 1, Finance Daop 1, Asset Daop 1

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Untuk tahun 2022, jumlah keseluruhan *monitoring* tindak lanjut temuan hasil audit internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

Audit Results Findings and Follow-ups

In 2022, the overall amount of internal and external audit findings and follow-ups monitoring are as follows:

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Audit Results Findings and Follow-ups

No	Uraian / Description	Jumlah / Total		Selesai						Sisa Temuan	
		T	R	T	R	% Tahun 2022		% Tahun 2021		T	R
						T	R	T	R		
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=6:4	9	10	11=3-5	12=4-6
1	Internal / Internal										
	a. Operasional / Operation	2.890	6.748	2.723	6.413	94%	95%	88%	90%	167	335
	b. Investigasi / Investigation	280	1.465	277	1.462	99%	100%	92%	97%	3	3
	c. Khusus / Special Findings	191	449	190	448	99%	100%	96%	98%	1	1
	Jumlah / Total	3.361	8.662	3.190	8.323	95%	96%	89%	92%	171	339
2	Eksternal										
	a. BPK RI / The Audit Board of the Republic of Indonesia	244	603	144	447	59%	74%	61%	74%	100	156
	b. KAP / Public Accounting Office	170	373	170	373	100%	100%	98%	98%	-	-
	Jumlah / Total	414	976	314	820	76%	84%	76%	83%	100	156
3	Arahan Pemegang Saham / Shareholder Intendance		109		109		100%		96%		-
	Jumlah / Total	3.775	9.747	3.504	9.252	93%	95%	87%	91%	271	495

Keterangan: / Information:

T = Temuan / Findings

R = Rekomendasi / Recommendations

AKUNTAN PUBLIK

Public Accountant

Dalam rangka menjaga penerapan prinsip independensi termasuk atas praktik pelaporan keuangan, Perseroan menggunakan jasa Auditor Eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam hal ini, Auditor Eksternal mengacu kepada auditor independen yang ditunjuk untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan.

KAP ditetapkan melalui mekanisme RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit.

Penunjukan Akuntan Publik

Perseroan menerapkan penunjukan akuntan publik berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-103/MBU/03/2021 Tanggal 26 Maret 2021 tentang Kriteria Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik dan Kantor Konsultan Aktuaria pada Badan Usaha Milik Negara.
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 3 tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Perseroan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun Buku 2020 Tanggal 19 Mei 2021 yang di dalamnya mencakup penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan serta Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun Buku 2021.
- Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor S-199/MBU/DKU/08/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 perihal Tabulasi Data Kantor Akuntan Publik (KAP) Pada BUMN.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, dan Fee Periode Lima Tahun Terakhir

Perseroan memastikan bahwa penunjukan Auditor Eksternal telah dilakukan sesuai peraturan serta standar penerapan yang berlaku, mencakup Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik serta Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik. Terkait hal tersebut, pengungkapan informasi Kantor Akuntan Publik yang digunakan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

To maintain independence in the financial reporting practices, the Company uses the services of an External Auditor, namely the Public Accounting Firm (KAP). In this case, the External Auditor refers to an independent auditor appointed to audit the Company's Financial Statements.

The KAP is determined through the GMS mechanism, based on the proposal of the Board of Commissioners on the recommendation of the Audit Committee.

Appointment of Public Accountant

The appointment of public accountant at the Company is based on the following provisions:

- Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-103/MBU/03/2021 dated March 26, 2021 concerning Criteria for Public Accounting Firms, Public Appraisal Services Offices and Actuarial Consulting Firms in State-Owned Enterprises.
- Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 3 concerning Financial Accountability Report of the Company of PT Kereta Api Indonesia (Persero) for the Fiscal Year of 2020 dated May 19, 2021 which include the appointment of Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2022 Fiscal Year and the Financial Statements and the Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (UMK) for the 2021 Fiscal Year.
- Letter from the Ministry of State-Owned Enterprises No. S-199/MBU/DKU/08/2021 dated August 31, 2021 concerning Tabulation of Data for Public Accounting Firms (KAP) of SOEs.

Public Accounting Firm, Name of Accountant, and Fees for the Last Five Years

The Company ensures that the appointment of External Auditor has been carried out in accordance with applicable regulations and implementation standards, including Minister of Finance Regulation No. 17/PMK.01/2008 concerning Public Accountant Services and OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 concerning Use of Public Accountant Services. In this regard, the disclosure of information from the Public Accounting Firm used to audit the Company's Financial Statements for the last 5 (five) years is as follows:

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Fee, dan Izin KAP Periode 2018-2022

Public Accounting Firm, Name of Accountant, and Fees for the Period of 2018-2022

Tahun / Year	Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm	Periode KAP / KAP Period	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab) / Name of Accountant (Partner in Charge)	Periode Penugasan / Assignment Period	Fee Jasa Audit / Audit Fee
2022	KAP RSM Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan	Periode ke 5 / 5 th Period	Dedy Sukrisnadi	Periode ke 1 / 1 st Period	Rp4,27 miliar / Rp 4.27 billion
2021	KAP RSM Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan	Periode ke 4 / 4 th Period	Rudi Hartono Purba	Periode ke 1 / 1 st Period	Rp3,55 miliar / Rp 3.55 billion
2020	KAP RSM Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan	Periode ke 3 / 3 rd Period	Benny Andria, CPA	Periode ke 3 / 3 rd Period	Rp3,712 miliar / Rp 3.712 billion
2019	KAP Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar dan Rekan	Periode ke 2 / 2 nd Period	Benny Andria, CPA	Periode ke 2 / 2 nd Period	Rp3,9 miliar / Rp 3.9 billion
2018	KAP Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar dan Rekan	Periode ke 1 / 1 st Period	Benny Andria, CPA	Periode ke 1 / 1 st Period	Rp4,22 miliar / Rp 4.22 billion
2017	KAP Rama Wendra Nengah	Periode ke 1 / 1 st Period	Rama Gautama, CPA	Periode ke 1 / 1 st Period	Rp1,937 miliar / Rp 1.937 billion

Jasa Lain yang Diberikan KAP

Di samping jasa audit terhadap Laporan Keuangan, Kantor Akuntan Publik RSM Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan tidak memberikan jasa lain.

Other Services Provided by KAP

In addition to audit on financial statements, the Public Accounting Firm RSM Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan did not provide other services.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

Perseroan memahami bahwa Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan secara efektif merupakan unsur penting dalam keseluruhan pengelolaan perusahaan serta menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan secara andal dan efektif merupakan tanggung jawab manajemen, dengan mempertimbangkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha Perseroan adalah adanya kelemahan dalam rancangan dan pelaksanaan pengendalian internal.

Dalam rangka menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang efektif, mencakup praktik pengamanan investasi dan aset Perseroan, KAI menetapkan Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Intern (Internal Control System) sesuai Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor: KEP.U/KC.202/I/1/KA-2017 tanggal 24 Januari 2017. Penerapan Sistem Pengendalian Internal mengacu pada standar The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) Internal Control Framework, dengan cakupan pengendalian terdiri atas 5 (lima) komponen yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Kegiatan Pemantauan.

The Company is aware that an effective Internal Control System is crucial for the overall management of the Company and also serves as the basis for sound and safe operational activities. Reliable and effective Internal Control System is the responsibility of management, considering that one of the challenges the Company's business is in the weaknesses of design and implementation of internal control.

In implementing an effective Internal Control System, including the practice of safeguarding the Company's investments and assets, KAI has established Guidelines for the Implementation of the Internal Control System in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT KAI (Persero) No. KEP.U/KC.202/I/1 /KA-2017 dated January 24 2017. Implementation of Internal Control System refers to The Committee of Sponsoring Organization of the Treadways Commission (COSO) standards of Internal Control Framework, with control coverage consisting of 5 (five) components, namely Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring Activities.

Masing-masing komponen tersebut terdiri dari beberapa prinsip dan *point of focus* yang dirancang dan dilaksanakan untuk dapat memenuhi tujuan implementasi Sistem Pengendalian Internal, dengan uraian sebagai berikut:

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian mengacu pada susunan standar, proses, dan struktur yang menyediakan dasar untuk terlaksananya pengendalian intern dalam organisasi. Dewan Komisaris dan Direksi menciptakan sistem pada level tertinggi organisasi (*tone of the top*) mengenai pentingnya pengendalian intern dan standar perilaku yang diharapkan.

Prinsip dan *point of focus* lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut.

1. Penegakkan terhadap integritas dan nilai etika.
2. Dewan Komisaris menunjukkan independensinya terhadap manajemen dan melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan kinerja pengendalian intern.
3. Dengan pengawasan dari Komisaris, Manajemen membentuk struktur, jalur pelaporan dan kewenangan, serta tanggung jawab yang sesuai dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.
4. Organisasi menunjukkan adanya komitmen untuk memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.
5. Organisasi mewajibkan setiap individu untuk mengemban akuntabilitas atas tanggung jawab pengendalian intern dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi.

Penilaian Risiko

Risiko merupakan suatu kemungkinan bahwa suatu hal tertentu akan terjadi dan memberi dampak yang merugikan bagi pencapaian tujuan Perseroan. Risiko yang dihadapi organisasi dapat bersifat internal (berasal dari dalam) ataupun eksternal (bersumber dari luar).

Pengendalian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang, sebagai upaya dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait pencapaian tujuan Perseroan. Risiko yang telah teridentifikasi kemudian dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang ditetapkan. Secara mendasar, penilaian risiko menjadi landasan bagi pengelolaan atau manajemen risiko.

Each of these components consists of several principles and points of focus that is designed and implemented to be able to fulfill the objectives of implementing the Internal Control System, with the following description:

Control Environment

Control Environment is a set of standards, processes and structures that provide the basis for the implementation of internal control within an organization. The Board of Commissioners and Directors create a tone at the highest level of the organization (*tone of the top*) on the importance of internal control and the expected standard of behavior.

The principles and points of focus of the control environment are as follows

1. Enforcement of integrity and ethical values, including:
2. The Board of Commissioners demonstrates its independence from management and supervises the development of internal control performance.
3. With supervision from the Commissioners, the Management establishes appropriate structures, reporting lines and authorities, as well as responsibilities in an effort to achieve organizational goals.
4. The organization demonstrates a commitment to acquiring, developing and retaining competent individuals in an effort to achieve organizational goals/
5. The organization requires each individual to assume accountability for internal control responsibilities in relation to the achievement of organizational goals.

Risk Assessment

Risk is the possibility that an event will occur and have an adverse impact on the achievement of objectives. The risks faced by the organization can be internal (originating from within) or external (sourced from outside).

Risk control involves a dynamic and iterative process to identify and analyze risks related to the achievement of objectives. The identified risks are then compared with the predetermined risk tolerance level. Thus, risk assessment serves as the basis for risk management.

Penilaian risiko mengharuskan manajemen untuk mempertimbangkan dampak perubahan lingkungan eksternal serta perubahan model bisnis perusahaan, yang berpotensi mengakibatkan gangguan terhadap efektivitas pengendalian internal yang ada. Prinsip dan *point of focus* penilaian risiko adalah sebagai berikut:

1. Organisasi menetapkan tujuan secara jelas yang memungkinkan dilakukannya proses identifikasi dan penilaian risiko terkait dengan tujuan.
2. Organisasi mengidentifikasi risiko terkait dengan pencapaian tujuan organisasi pada seluruh lingkup entitas dan menganalisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko-risiko tersebut harus dikelola.
3. Organisasi telah mempertimbangkan potensi terjadinya *fraud* dalam menilai risiko.
4. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Pengendalian Intern secara signifikan.

Kegiatan Pengendalian

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Kegiatan pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalisasi risiko terhadap pencapaian tujuan. Kegiatan pengendalian dilaksanakan pada semua tingkatan organisasi, pada berbagai tahap proses bisnis, dan dalam konteks lingkungan teknologi.

Kegiatan pengendalian terbagi 2 (dua) pengelompokan, yaitu yang bersifat preventif atau detektif dan yang bersifat manual atau otomatis. Dalam hal ini, kegiatan pengendalian mencakup praktik otorisasi dan persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan *review* kinerja. Dalam memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian diterapkan konsep pemisahan fungsi (*segregation of duties*). Jika pemisahan fungsi dianggap tidak praktis, manajemen wajib mengembangkan alternatif kegiatan pengendalian sebagai kompensasinya.

Prinsip dan *point of focus* kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut:

1. Organisasi telah menyeleksi dan membangun aktivitas pengendalian yang mendukung upaya mitigasi risiko sehingga risiko berada pada level yang dapat diterima.
2. Organisasi telah menyeleksi dan membangun aktivitas pengendalian umum dengan menggunakan teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.
3. Organisasi menerapkan kegiatan pengendalian sebagaimana tercermin pada kebijakan dan prosedur yang relevan.

Risk assessment requires the management to consider the impact of changes in the external environment as well as changes in the entity's own business model that have the potential to cause existing internal controls to become ineffective. The principles and points of focus of risk assessment are as follows:

1. The organization establishes clear objectives that enable the identification and risk assessment process in relation to the objectives to be carried out.
2. The organization identifies risks associated with achieving organizational goals across the entity and analyzes risks as a basis for determining how these risks should be managed.
3. The organization considers fraud potential in assessing risk.
4. The organization identifies and assesses changes that could significantly affect the Internal Control System.

Control Activities

Financial and Operational Control

Control activities include actions established through policies and procedures to help ensure the implementation of management directives in order to minimize risks to the achievement of objectives. Control activities are carried out at all levels of the organization, at various stages of the business process and in the context of the technology environment.

Control activities are divided into 2 (two) groups, namely those that are preventive or detective and those that are manual or automatic. In this case, control activities include practices of authorization and approval, verification, reconciliation, and performance reviews. In selecting and developing control activities, the concept of segregation of duties is usually attached. If separation of functions is deemed impractical, management should develop alternative control activities to compensate.

The principles and points of focus of control activities are as follows:

1. The organization has selected and developed control activities that support risk mitigation efforts so that risks are at an acceptable level.
2. The organization has selected and developed general control activities using technology to support the achievement of organizational goals.
3. The organization implements control activities as reflected in the relevant policies and procedures.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Pengendalian internal terkait kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan secara khusus dilakukan dengan mengevaluasi pemenuhan penerapan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, perusahaan juga melakukan pengujian terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum Perseroan, dilaksanakan di bawah tanggung jawab Pusat Hukum, khususnya bagian *Policy and Regulations*.

Di samping itu, sebagai peran lini ketiga (*third line roles*), Unit Internal Audit bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas Perseroan dalam praktik pemenuhan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tujuan yang menjadi fokus penilaian risiko dalam sistem pengendalian internal adalah tujuan kepatuhan. Terkait hal itu, Perseroan senantiasa mempertimbangkan toleransi terhadap risiko kepatuhan dalam pelaksanaan pengendalian internal terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Informasi dan Komunikasi

Perseroan menghimpun dan mengelola informasi demi terselenggaranya fungsi pengendalian intern yang secara efektif dapat mendukung pencapaian tujuan usaha. Manajemen wajib memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal. Hal tersebut diperlukan agar komponen pengendalian internal yang lain berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Adapun, komunikasi mengacu pada proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.

Prinsip dan *point of focus* informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung berfungsinya seluruh komponen pengendalian intern;
2. Organisasi mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab terhadap pengendalian intern yang penting untuk dapat mendukung berfungsinya seluruh komponen pengendalian intern;
3. Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal terkait dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi berfungsinya seluruh komponen pengendalian intern.

Compliance with Other Laws and Regulations

Internal control related to compliance with laws and regulations is specifically carried out by evaluating the adequacy of the implementation of existing laws and regulations. In addition, testing is carried out on the synchronization of laws and regulations and legal products of the Company which are the responsibility of the Legal Center, especially the Policy and Regulations section.

In addition, as the third third line roles, the Internal Audit Unit is responsible for ensuring the effectiveness of the Company in complying with applicable laws and regulations. One of the objectives that is the focus of risk assessment in the internal control system is the compliance objective, so that the Company always considers tolerance for compliance risk in the implementation of internal control related to compliance with laws and regulations.

Information and Communication

The Company collects and manages information in order to carry out internal control functions that can effectively support the achievement of business objectives. The management is required to obtain, produce, and use relevant and quality information, both from internal and external sources. This is necessary so that other components of internal control function properly as they should. Meanwhile, communication is an iterative and continuous process to obtain, share and provide information. Internal communication must be a means of disseminating information within the organization, from top to bottom, bottom to top, and across functions.

The principles and points of the focus of information and communication is as follows:

1. The organization obtains or produces and uses relevant and quality information to support the functioning of all components of internal control;
2. The organization communicates information internally, including the objectives and responsibilities for internal control that are important to support the functioning of all components of internal control;
3. The organization communicates with external parties regarding various matters that can affect the functioning of all components of internal control.

Kegiatan Pemantauan

Kegiatan pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya yang dimaksudkan untuk memastikan tiap-tiap komponen pengendalian internal dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Evaluasi berkelanjutan diterapkan di dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda-beda, guna menyajikan informasi yang valid secara tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, bervariasi lingkup dan frekuensinya, tergantung hasil penilaian risiko, efektivitas evaluasi berkelanjutan, dan pertimbangan lain oleh manajemen.

Prinsip dan *point of focus* kegiatan pemantauan adalah sebagai berikut:

1. Organisasi menyeleksi, membangun, dan melaksanakan evaluasi berkelanjutan dan terpisah untuk dapat meyakinkan bahwa seluruh komponen pengendalian intern telah berfungsi dengan baik.
2. Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan pengendalian intern dalam waktu yang tepat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan koreksi.

Kesesuaian Dengan Standar Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO)

Model Pengendalian Intern yang digunakan sebagai acuan kerangka konseptual dalam pengembangan pengendalian intern adalah Kerangka Kerja Pengendalian Internal yang Terintegrasi (*Internal Control-Integrated Framework*) oleh The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). Perseroan menerapkan sistem pengendalian intern sejalan dengan standar yang dikeluarkan oleh COSO, yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian internal di Perusahaan. Terkait hal tersebut, Perseroan melakukan penilaian mandiri atas penerapan sistem pengendalian internal sebagai proses yang dilaksanakan untuk menguji dan menilai efektivitas penerapan sistem pengendalian internal. Penilaian terhadap sistem pengendalian internal bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh tujuan kegiatan dapat dicapai/dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan penilaian mandiri atas penerapan sistem pengendalian internal dilakukan secara berkala.

Monitoring Activities

Monitoring activities include continuous evaluations, separate evaluations or a combination of the two which are intended to ensure each component of internal control is functioning properly. Continuous evaluation is built into business processes at different levels to provide timely information. Separate evaluations are carried out periodically, varying in scope and frequency depending on the results of the risk assessment, the effectiveness of the ongoing evaluation and other considerations of the management.

The principles and points of focus of monitoring activities are as follows:

1. The organization selects, develops, and carries out continuous and separate evaluations to ensure that all components of internal control are functioning properly.
2. The organization evaluates and communicates internal control in a timely manner to the party in charge of taking corrective action.

Compliance with the Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO)

The Internal Control Model used as a reference for the conceptual framework in developing internal control is the Internal Control-Integrated Framework by The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). The Company implement an Internal Control System in line with the COSO standards, which consist of 5 (five) components, namely control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities.

Evaluation of Internal Control System Implementation

The Board of Directors is responsible for the effectiveness of internal control system implementation at the Company. Self-assessment of the implementation of the internal control system is a process carried out to test and assess the effectiveness of the implementation of the internal control system. The internal control system assessment aims to provide adequate assurance that all activity objectives can be achieved/implemented properly. The self-assessment on the implementation of the internal control system is carried out periodically.

Unit Internal Audit melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan secara menyeluruh untuk mendukung asersi Direksi atas efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan sesuai Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor: PER.U/KC.202/III/2/KA-2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk tahun 2022 memperlihatkan bahwa sistem pengendalian internal KAI telah berjalan secara efektif dan baik.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Unit Internal Audit, Direksi, dan Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas keseluruhan pelaksanaan sistem pengendalian intern. Dalam pelaksanaannya, (1) Dewan Komisaris telah memberikan arahan untuk meningkatkan kecukupan sistem pengendalian internal, (2) Direksi telah memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, serta (3) Unit Internal Audit telah berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan dengan memberikan rekomendasi perbaikan penerapan sistem pengendalian internal Perseroan guna pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen. Secara keseluruhan, Unit Internal Audit, Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa efektivitas dan kecukupan sistem pengendalian internal Perusahaan untuk tahun 2022 telah berjalan dengan baik.

The Internal Audit Unit evaluates the adequacy and effectiveness of the Company's internal control system as a whole to support the Board of Directors' assertion on the effectiveness of the implemented internal control system in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT KAI (Persero) Number: PER.U/KC.202/III/2/KA-2018 dated March 5, 2018 on Guidelines for Evaluation of Internal Control Systems. Evaluation of the implementation of the internal control system for 2022 shows that KAI's internal control system has been implemented in effective and appropriate manner.

Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

The Internal Audit Unit, the Board of Directors and the Board of Commissioners have evaluated the adequacy and effectiveness of the overall implementation of the internal control system. In its implementation, (1) the Board of Commissioners has provided direction to improve the adequacy of the internal control system, (2) the Board of Directors has ensured that the internal control system is running well in accordance with the stated objectives and (3) the Internal Audit Unit has played an active role in increasing the effectiveness of the internal control system on an ongoing basis by providing recommendations for improving the implementation of the control system. internal company in order to achieve the targets set by the management. The Internal Audit Unit, the Board of Directors, and the Board of Commissioners consider that the Company's internal control system to be effective and adequate

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

Perseroan menerapkan manajemen risiko dengan tujuan untuk mengelola seluruh potensi risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan-tujuan Perseroan, mencakup tujuan jangka pendek di dalam RKAP ataupun tujuan jangka panjang di dalam RJPP. Penerapan manajemen risiko Perseroan secara mendasar mengacu pada peraturan perundang-undangan serta penerapan yang berlaku secara internasional, yaitu *International Standard ISO 31000: 2018 Risk Management – Guidelines*.

The Company's risk management aims to manage all potential risks that will be faced by the company in achieving the Company's short-term objectives in the RKAP and long-term objectives in the RJPP. Implementation of risk management at the Company refers to the laws and regulations as well as International Standard of ISO 31000: 2018 Risk Management – Guidelines.

Sebagai wujud komitmen Direksi dalam pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Risiko Terpadu, Perseroan menerbitkan Peraturan Direksi No. PER.U/KL/I/1/KA-2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terpadu pada tanggal 25 Januari 2021. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Risiko Terpadu menggunakan aplikasi SMARTKA yang telah Go Live pada tanggal 29 Maret 2021. Sistem Manajemen Risiko Terpadu melalui SMARTKA diterapkan guna mendukung pengelolaan risiko di seluruh unit bisnis/*risk entity* melalui *Risk Control and Self Assessment (RCSA)*.

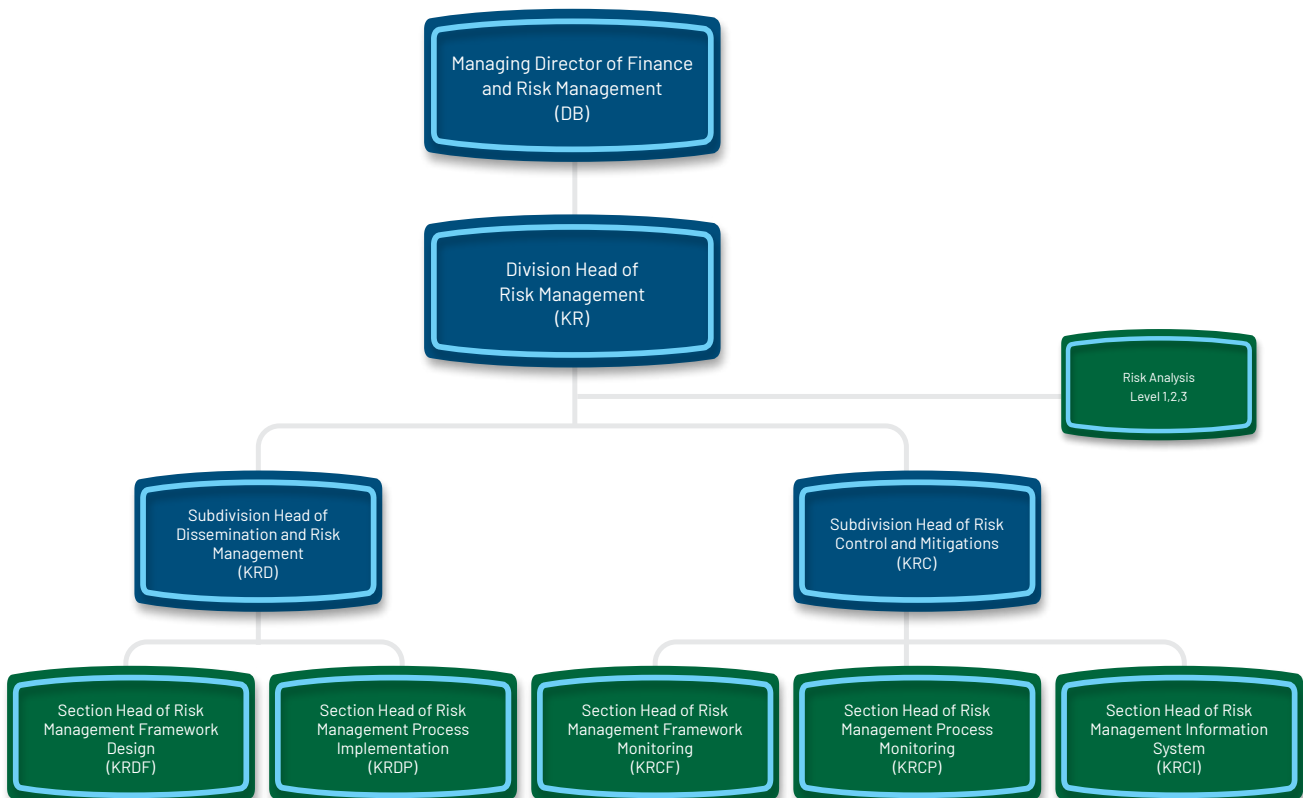
Unit Manajemen Risiko

Perseroan menerapkan fungsi manajemen risiko melalui Unit Manajemen Risiko, yang secara struktural berada di bawah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Fungsi Unit Manajemen Risiko dipimpin oleh seorang Executive Vice President (EVP) dan diatur berdasarkan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KO.104/I/3/KA-2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko.

Struktur Organisasi Unit Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Direksi Nomor: PER.U/KO.104/VIII/11/KA-2019, struktur organisasi Unit Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Unit Manajemen Risiko



As a manifestation of the commitment of the Board of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) in implementing the Integrated Risk Management System, the Company issued the Board of Directors Regulation No. PER.U/KL/I/1/KA-2021 concerning the Implementation of Integrated Risk Management on January 25, 2021. Implementation of the Integrated Risk Management System using the SMARTKA application which has gone live on March 29, 2021 to support risk management in all business units/*risk entity* through Risk Control and Self-Assessment (RCSA).

Risk Management Unit

The Company's risk management function is carried out by the Risk Management Unit which is structurally under the Managing Director of Finance and Risk Management and led by an Executive Vice President (EVP) based on the PT Kereta Api Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. PER.U/KO.104/I/3/KA-2022 dated January 27, 2022 on Organization and Procedure of the Directorate of Finance Risk Management.

Risk Management Unit Organizational Structure

In accordance with the Board of Directors Regulation No. PER.U/KO.104/VIII/11/KA-2019 dated August 19, 2019, the organizational structure of the Risk Management Unit is as follows:

Risk Management Unit Organizational Structure

Sistem Manajemen Risiko

Perseroan memahami bahwa komitmen dari semua level organisasi termasuk Dewan Komisaris dan Direksi merupakan sesuatu yang penting sebagai dukungan menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terpadu. Atas pemahaman tersebut, Perseroan menyusun dan menetapkan struktur tata kelola risiko (*risk governance structure*) yang sesuai, di samping menetapkan struktur akuntabilitas hingga level yang terendah. Penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Level Dewan Komisaris

Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kepenasihatannya atas kinerja manajemen dalam implementasi GCG Perusahaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPMR dapat berkoordinasi dengan Unit Manajemen Risiko.

2. Level Direksi

Unit Manajemen Risiko berada di bawah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko berperan menjalankan fungsi pembinaan langsung terhadap Unit Manajemen Risiko dan menerapkan komitmen untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko perusahaan secara terintegrasi.

3. Level Korporat

Unit Manajemen Risiko berperan sentral dalam menjalankan fungsi pengembangan sistem dan proses manajemen risiko, berikut diseminasi, pemantauan berkala maupun insidental dan pembinaan teknisnya kepada seluruh jajaran organisasi.

4. Level Proyek/Unit Pemilik Risiko (Risk Taking Unit/RTU)

Pimpinan RTU atau Unit Pengusul selaku Manajer Proyek berperan sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan dan pemantauan mitigasi risiko berikut pemantauan pergerakan level risiko sehingga seluruh dampak risiko yang akan dihadapi RTU akan terkelola sampai pada batas yang dapat diterima oleh RTU (*risk tolerance*) dan seluruh dampak risiko secara korporasi berada pada batas yang dapat diterima Perusahaan (*risk appetite*).

Risk Management System

The Company understands that the commitment from all levels of the organization, including the Board of Commissioners and the Board of Directors is necessary to provide full support for implementing integrated risk management. Thus, the Company prepares and establishes an appropriate risk governance structure and accountability structure to the lowest level which can be describe as follows:

1. Board of Commissioners Level

The Risk Management Monitoring Committee (KPMR) is a supporting organ for the Board of Commissioners that assists the Board of Commissioners in carrying out its supervisory and advisory functions on management performance in implementing the Company's GCG. In carrying out its duties, KPMR can coordinate with the Risk Management Unit.

2. Board of Directors Level

The Risk Management Unit is under the Managing Director of Finance and Risk Management. The Managing Director of Finance and Risk Management has a role in carrying out the direct guidance function of the Risk Management Unit and is committed to supporting the implementation of integrated corporate risk management.

3. Corporate Level

The Risk Management Unit plays a central role in carrying out the function of developing risk management systems and processes, dissemination, periodic and incidental monitoring, and technical guidance to all levels of the organization.

4. Project/Risk Taking Unit (RTU) Level

The head of the RTU or the Proposing Unit as the Project Manager acts as the party in charge of implementing and monitoring risk mitigation as well as tracking the movement of risk levels so that all risk impacts to be faced by the RTU will be managed to an acceptable level for the RTU (*risk tolerance*) and all enterprise risk impacts is within acceptable limits for the Company (*risk appetite*).

Proses Manajemen Risiko

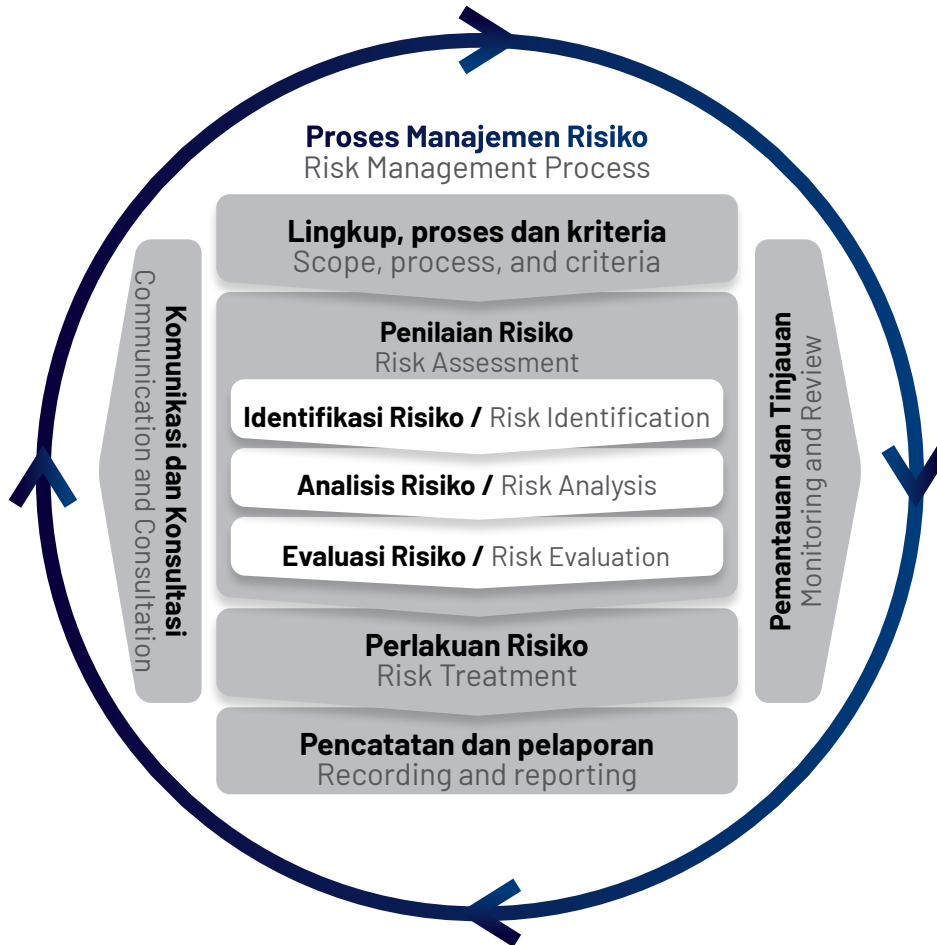
Perseroan menerapkan proses manajemen risiko dengan mengacu pada standar *ISO 31000:2018 Risk Management – Guidelines*. Penerapan sesuai standar tersebut diharapkan dapat membuat Perseroan mampu secara optimal menangkap peluang-peluang usaha serta melaksanakan praktik pengelolaan risiko dengan pelaksanaan mitigasi risiko yang efektif.

Proses Manajemen Risiko

Risk Management Process

The Company's risk management process is in accordance with *ISO 31000:2018 Risk Management – Guidelines*. This implementation is expected to optimally seize business opportunities and manage risks by implementing effective risk mitigation.

Risk Management Process



Sesuai standar ISO 31000:2018, proses manajemen risiko yang diterapkan oleh Perseroan terbagi dalam sejumlah tahapan dengan perincian sebagai berikut:

1. Komunikasi dan konsultasi.
2. Penetapan ruang lingkup, konteks, dan kriteria.
3. Penilaian risiko meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko;
4. Perlakuan risiko (mitigasi risiko);
5. Pemantauan dan tinjauan;
6. Pencatatan dan pelaporan.

Based on the ISO 31000:2018 standard, the risk management process of the Company is implemented in stages with the following details:

1. Communication and consulting.
2. Determination of scope, context, and criteria.
3. Risk assessment includes risk identification, risk analysis, and risk evaluation
4. Risk treatment (risk mitigation)
5. Monitoring and review
6. Recording and reporting

Secara umum, tahapan proses manajemen risiko Perseroan merupakan rangkaian siklus yang diawali dari kegiatan komunikasi dan konsultasi untuk mendapatkan informasi terbaik yang tersedia sebagai dasar dalam melakukan penentuan konteks dan asesmen risiko. Berdasarkan data dan informasi terbaik yang tersedia, Unit Manajemen Risiko melakukan identifikasi terhadap potensi-potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian strategi dan tujuan Perseroan, termasuk tujuan setiap paket investasi yang tertuang dalam RKAP. Data dan informasi terbaik yang tersedia untuk kegiatan asesmen risiko diperoleh dari proposal, *project minicharter*, justifikasi kebutuhan barang dan jasa, RAB, spesifikasi teknis, kajian finansial, studi kelayakan bisnis, dan kajian *highest and best use*, di samping diperoleh dari kegiatan survei lapangan ke lokasi objek-objek investasi.

Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi diterapkan dengan tujuan untuk membantu pemangku kepentingan dalam memahami risiko, dasar pengambilan keputusan, dan alasan mengapa tindakan tertentu diperlukan. Komunikasi bertujuan mendorong kesadaran dan pemahaman risiko, sedangkan konsultasi mencakup pencarian umpan balik dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Koordinasi yang kuat di antara keduanya akan memfasilitasi pertukaran informasi secara faktual, tepat waktu, relevan, akurat, dan dapat dipahami, dengan mempertimbangkan kerahasiaan dan integritas informasi dan juga hak privasi individu.

Penetapan Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria

Penetapan ruang lingkup, konteks, dan kriteria diterapkan dengan tujuan untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, mengaktifkan penilaian risiko yang efektif, serta perlakuan risiko yang memadai. Tahapan ini mencakup penentuan ruang lingkup proses dan pemahaman konteks eksternal dan internal.

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, Perseroan menentukan ruang lingkup aktivitas manajemen risiko. Proses manajemen risiko dapat diterapkan pada berbagai tingkat (misalnya strategis, operasi, program, proyek atau aktivitas lain). Karenanya, diperlukan kejelasan ruang lingkup yang menjadi cakupan, tujuan relevan yang perlu dipertimbangkan, serta keselarasan proses manajemen risiko dengan tujuan Perusahaan.

In general, the stages of the risk management process are a series of cycles that begin with communication and consulting activities to obtain the best available information as a basis for determining the context and risk assessment. Based on the best available data and information, the Risk Management Unit identifies potential risks that may affect the achievement of the Company's strategy and objectives, including the goals of each investment package contained in the RKAP. The best available data and information for risk assessment activities are obtained from proposals, *mini-charter projects*, justification of the need for goods and services, RAB, technical specifications, financial studies, business feasibility studies, and studies of highest and best use, as well as from field survey activities to investment object locations.

Communication and Consulting

Communication and consulting are implemented to assist relevant stakeholders in understanding the risks, the basis for decision making, and why specific actions are needed. Communication aims to promote awareness and understanding of risk, while consultation involves seeking feedback and information to support decision making. Close coordination between the two will facilitate the exchange of factual, timely, relevant, accurate, and understandable information, taking into account the confidentiality and integrity of information and individual privacy rights.

Determination of Scope, Context, and Criteria

Determination scope, context and criteria aims to adapt the risk management process, enable effective risk assessment and adequate risk treatment. This stage also determines the scope of the process and understanding the external and internal context.

As part of the risk management process, the Company determines the scope of its risk management activities. The risk management process can be applied at various levels (e.g., strategic, operations, programs, projects or other activities). Thus, clarity the scope to be covered, the relevant objectives must be considered along with the alignment to the Company's objectives.

Konteks proses manajemen risiko ditetapkan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan eksternal dan internal tempat organisasi beroperasi serta merefleksikan lingkungan spesifik dari aktivitas yang menjadi tujuan penerapan manajemen risiko. Perseroan menetapkan konteks eksternal dan internal dari proses manajemen risiko dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Perseroan menentukan jumlah dan jenis risiko yang dapat atau tidak dapat diambil, secara relatif terhadap tujuan. Selain itu, Perseroan menentukan kriteria untuk mengevaluasi signifikansi risiko dan mendukung proses pengambilan keputusan. Kriteria risiko selaras dengan kerangka kerja manajemen risiko dan disesuaikan dengan tujuan khusus dan ruang lingkup aktivitas yang dicakup. Kriteria risiko sebaiknya merefleksikan nilai, tujuan, dan sumber daya organisasi serta bersifat konsisten terhadap kebijakan dan pernyataan tentang manajemen risiko. Kriteria risiko sebaiknya ditentukan dengan mempertimbangkan kewajiban Perseroan dan pandangan pemangku kepentingan.

Penilaian Risiko

Penilaian risiko mengacu pada proses menyeluruh dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan secara sistematis, berulang, dan kolaboratif berdasarkan pengetahuan dan pandangan pemangku kepentingan.

Identifikasi risiko dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengenali, dan menguraikan risiko yang dapat membantu atau menghalangi organisasi dalam pencapaian tujuannya. Dalam proses identifikasi risiko, informasi yang relevan, memadai, dan mutakhir merupakan sesuatu yang penting.

Analisis risiko dilakukan dengan tujuan untuk memahami sifat risiko dan karakteristiknya termasuk, jika memungkinkan, tingkat risikonya. Analisis risiko melibatkan praktik pertimbangan terperinci terhadap ketidakpastian, sumber risiko, dampak, kemungkinan, kejadian, skenario, kendali, dan efektivitas kendali tersebut. Suatu kejadian dapat memiliki beragam sebab dan akibat serta dapat memengaruhi beberapa tujuan Perseroan. Analisis risiko memberikan masukan terhadap proses evaluasi risiko, untuk mendapat keputusan apakah risiko memerlukan perlakuan dan menentukan perlakuannya, serta keputusan strategi dan metode perlakuan risiko yang paling sesuai. Hasil analisis memberikan wawasan bagi pihak pengelola dalam penentuan keputusan. Pilihan diambil dengan melibatkan berbagai jenis dan tingkat risiko.

The context of the risk management process is determined from an understanding of the external and internal environment in which the organization operates and reflects the specific environment of the activities for which risk management is implemented. The Company determines the external and internal context of the risk management process by considering the influencing factors.

The Company determines the amount and type of risk that can or cannot be taken in a relative manner to the objectives. In addition, the Company determines the criteria to evaluate the risk significance and to support the decision-making process. The risk criteria are aligned with the risk management framework and adapted to the specific objectives and scope of activities covered. The risk criteria should reflect the values, objectives and resources of the organization and be consistent with policies and statements on risk management. The criteria should be determined taking into account the obligations of the Company and the views of stakeholders.

Risk Assessment

Risk assessment refers to a comprehensive process of risk identification, risk analysis and risk evaluation. Risk assessment is carried out in a systematic, iterative, and collaborative manner based on the knowledge and views of stakeholders.

Risk identification aims to find, identify and describe risks that can help or hinder the organization in achieving its objectives. In risk identification, relevant, adequate and up-to-date information is crucial.

Risk analysis aims to understand the nature of risk and its characteristics, including, if possible, the level of risk. Risk analysis involves a detailed consideration of the uncertainties, sources of risk, impacts, likelihood, events, scenarios, controls and the effectiveness of those controls. An event can have multiple causes and effects and can affect multiple objectives. Risk analysis provides input for risk evaluation, for decisions on whether risks require treatment and how to treat them, as well as on the most appropriate risk treatment strategies and methods. The results provide insight into decisions, where choices are made and those choices involve different types and levels of risk.

Evaluasi risiko digunakan untuk mendukung keputusan. Evaluasi risiko melibatkan perbandingan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan, untuk menentukan apakah diperlukan tindakan tambahan. Keputusan sebaiknya mempertimbangkan konteks yang lebih luas serta mempertimbangkan konsekuensi aktual yang dipersepsikan terhadap pemangku kepentingan eksternal dan internal. Hasil keluaran evaluasi risiko dicatat, dikomunikasikan, dan divalidasi pada tingkat yang tepat dalam organisasi.

Perlakuan Risiko

Perlakuan risiko dilakukan untuk memilih dan menerapkan opsi perlakuan risiko. Penerapan perlakuan risiko mencakup proses berulang dari:

1. Formulasi dan seleksi opsi perlakuan risiko.
2. Perencanaan dan implementasi perlakuan risiko.
3. Penilaian efektivitas perlakuan itu.
4. Pengambilan keputusan apakah risiko tersisa dapat diterima.
5. Pelaksanaan perlakuan lanjutan, jika opsi tidak diterima.

Pemilihan opsi perlakuan risiko yang paling tepat mencakup penyeimbangan potensi manfaat terkait pencapaian tujuan terhadap biaya, upaya, atau kerugian implementasi. Opsi perlakuan risiko tidak selalu sering berhubungan secara eksklusif atau tepat pada semua kondisi.

Justifikasi untuk perlakuan risiko lebih luas daripada sekadar pertimbangan ekonomi dan sebaiknya memperhitungkan semua unsur kewajiban, komitmen sukarela, dan pandangan pemangku kepentingan dari organisasi. Pemilihan perlakuan risiko dilakukan sesuai dengan tujuan organisasi, kriteria risiko, dan sumber daya yang tersedia.

Tujuan rencana perlakuan risiko adalah untuk menentukan bagaimana operasi perlakuan yang dipilih dapat diterapkan, sehingga pengaturannya dapat dipahami oleh pihak yang terlibat dan kemajuan rencananya dapat dipantau. Rencana perlakuan sebaiknya jelas mengidentifikasi urutan perlakuan risiko yang sebaiknya diterapkan. Rencana perlakuan sebaiknya terintegrasi dengan rencana dan proses manajemen Perusahaan, melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan yang sesuai.

Risk evaluation is used to support decisions. Risk evaluation involves comparing the results of the risk analysis with the established risk criteria to determine whether additional action is required. Decisions should take into account the wider context, as well as the actual perceived consequences for external and internal stakeholders. The results of the risk evaluation are recorded, communicated and validated at appropriate levels within the organization.

Risk Treatment

Risk treatment is carried out to select and implement risk treatment options. Risk treatment includes an iterative process of:

1. Formulation and selection of risk treatment options.
2. Risk treatment planning and implementation.
3. Assessment of the effectiveness of the treatment.
4. Decision making whether the remaining risk is acceptable.
5. Implementation of further treatment, if the option is not accepted.

Selection of the most appropriate risk treatment option involves balancing the potential benefits for the achievement of objectives against the costs, effort or costs of implementation. Risk treatment options are not always mutually exclusive or appropriate in all conditions.

Justification for risk treatment is broader than economic considerations and should take into account all elements of the organization's obligations, voluntary commitments and stakeholder views. The selection of risk treatment is made according to the organization's objectives, risk criteria and available resources.

The objective of the risk treatment plan is to determine how the selected treatment options can be implemented, so that the arrangements can be understood by the parties involved and the progress of the plan can be monitored. The treatment plan should clearly identify the sequence of risk treatments that should be applied. The treatment plan should be integrated with the Company's management plans and processes, in consultation with appropriate stakeholders.

Pemantauan dan Tinjauan

Pemantauan dan tinjauan kembali diterapkan dengan tujuan untuk memastikan dan meningkatkan mutu dan efektivitas desain, implementasi, dan hasil keluaran proses. Pemantauan yang sedang berlangsung serta tinjauan berkala terhadap proses dan hasil keluaran manajemen risiko menjadi bagian terencana dari proses manajemen risiko, dengan tanggung jawab yang ditentukan dengan jelas.

Pemantauan dan tinjauan sebaiknya dilaksanakan pada semua tahap proses. Pemantauan dan tinjauan mencakup perencanaan, pengumpulan dan analisis informasi, pencatatan hasil dan pemberian umpan balik. Hasil pemantauan dan tinjauan sebaiknya disertakan di seluruh aktivitas manajemen, pengukuran dan pelaporan kinerja Perseroan. Pemantauan dan peninjauan dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko.

Pencatatan dan Pelaporan

Proses dan hasil keluaran manajemen risiko didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai. Pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan tujuan (1) mengomunikasikan aktivitas manajemen risiko dan hasil keluaran dari pengelola manajemen risiko ke seluruh organisasi, (2) memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, (3) meningkatkan aktivitas manajemen risiko, dan (4) membantu interaksi dengan pemangku kepentingan termasuk pihak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk aktivitas manajemen risiko.

Pelaporan adalah bagian integral dari tata kelola organisasi dan diharapkan mampu meningkatkan mutu dialog dengan pemangku kepentingan serta mendukung manajemen puncak dan badan pengawas dalam memenuhi tanggung jawab mereka.

Profil Risiko Perusahaan

Risiko Utama Perusahaan

Unit Manajemen Risiko bersama dengan Unit Anggaran (KCA) telah melakukan penyusunan profil risiko perusahaan secara *top-down* berdasarkan usulan RKAP tahun 2022 yang hasilnya menjadi bagian dari RKAP Tahun 2022. Perincian mengenai hal tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

Monitoring and Review

Monitoring and review are implemented to ensure and improve the quality and effectiveness of the design, implementation and process outputs. Ongoing monitoring and periodic review of the risk management process and outputs become a planned part of the risk management process, with clearly defined responsibilities.

Monitoring and review should be carried out at all stages of the process. Monitoring and review includes planning, gathering and analyzing information, recording results and providing feedback. The results of monitoring and review should be included in all management activities, measurement and reporting of the Company's performance. Monitoring and review is carried out by the Risk Management Unit.

Recording and Reporting

Risk management processes and outputs should be documented and reported through appropriate mechanisms. Recording and reporting aim to (1) communicate risk management activities and the outputs of risk management throughout the organization, (2) provide information for decision making, (3) improve risk management activities, and (4) assist interaction with stakeholders, including those who have responsibility and accountability for risk management activities.

Reporting is an integral part of organizational governance and should enhance dialogue with stakeholders and support top management and regulatory bodies in fulfilling their responsibilities.

Types of Risk and Its Management

Key Risks of the Company

The Risk Management Unit and the Budget Unit (KCA) has prepared a Top-Down Company risk profile based on the 2022 RKAP proposal, which is part of the 2022 RKAP. Details on such matter can be seen in the following table

Jenis dan Pengelolaan Risiko Perseroan

Types of Risk and Its Management at the Company

No	Sasaran / Target	Peristiwa Risiko / Risk Event	Penyebab Risiko / Risk Cause	Level Inherent	Rencana Penanganan Risiko / Risk Mitigation Plan
1	Proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sustainable dalam operasional serta dampak cost overrun dapat di minimalisir / Projects can be completed on time and are sustainable in operations and the impact of cost overruns can be minimized	Potensi PT KAI sebagai Pimpinan Konsorsium tidak dapat memenuhi seluruh beban cost overrun sponsor Indonesia sesuai facility agreement / Potential for PT KAI as the Consortium Leader to not fulfill all of the cost overrun of Indonesian sponsors according to the facility agreement	1. CDB tidak menyetujui untuk memberikan loan sebesar 75% dari nilai cost overrun. / CDB does not approve the provision of loan of 75% of the value of the cost overrun 2. Komite kereta cepat menetapkan cost overrun dibiayai oleh penjaminan pemerintah atas kewajiban Pimpinan konsorsium dan bukan PMN. / The High Speed Rail Committee determines that the cost overrun is financed by government guarantees for the obligations of the consortium leaders and not PMN	Ekstrim / Extreme	1. Negosiasi dengan CDB untuk mendapat kepastian dari CDB bersedia memberikan loan tambahan untuk membiayai cost overrun setidaknya sama dengan porsi loan pada facility agreement awal sebesar 75% (amandemen facility agreement), apabila CDB setuju maka diusulkan: / Negotiation with CDB to obtain certainty that CDB is willing to provide an additional loan to finance cost overruns at least equal to the portion of the loan in the initial facility agreement of 75% (amendment to the facility agreement), if CDB agrees, it is proposed that: a. Cost overrun yang menjadi porsi Indonesia (25%) ditanggung oleh PT KAI berupa hutang yang dijamin pemerintah, atau / The cost overrun of Indonesia's portion (25%) is borne by PT KAI in the form of debt guaranteed by the government, or b. Cost overrun yang menjadi porsi Indonesia (25%) didukung oleh Pemerintah berupa PMN / The cost overrun of Indonesia's portion (25%) is supported by the Government in the form of PMN 2. Apabila CDB tidak menyetujui, maka dimintakan usulan PMN dan/atau penjaminan kepada Pemerintah dengan opsi: / If the CDB does not approve, then the government will ask for PMN and/or guarantee proposals with the following options: a. Pembiayaan seluruh cost overrun porsi Indonesia sebesar Rp14,673 T melalui dukungan Pemerintah berupa PMN / Financing the entire cost overrun for Indonesia's portion of Rp14,673 T through Government support in the form of PMN b. Pembiayaan cost overrun porsi Indonesia Rp14,673 T melalui: - sebesar 25% (Rp3,6 T) dengan pinjaman yang dijamin Pemerintah - sebesar 75% (Rp11 T) melalui PMN / Cost overrun financing for Indonesia's portion of Rp14,673 T through: - 25% (Rp3,6 T) with a loan guaranteed by the Government - 75% (Rp11 T) through PMN c. Pembiayaan cost overrun porsi Indonesia sebesar Rp14,673 T dilakukan setelah adanya kajian finansial untuk menentukan seberapa besar kemampuan PT KAI dan sisanya dicover melalui PMN / Indonesia's portion of cost overrun financing of Rp14,673 T was carried out after a financial review to determine how much PT KAI is capable of and the rest is covered through PMN
2	Tercapainya target volume angkutan penumpang 40,9 juta pnp dengan pendapatan Rp 3,9 T sehingga sasaran laba bersih sebesar Rp 595 M / Achieving the target volume of passenger transportation of 40.9 million passengers with a revenue of Rp3.9 T with target net profit of Rp595 Bn	Potensi terjadinya penerapan pembatasan kegiatan masyarakat sampai dengan level 4 akibat adanya gelombang ketiga pandemi covid-19 / Potential for the implementation of public restrictions up to level 4 due to the third wave of the covid-19 pandemic	Timbulnya varian baru covid-19 / Emergence of new variant of covid-19	Ekstrim / Extreme	Melakukan upaya efisiensi pembiayaan yang terkait dengan operasional KA angkutan penumpang dan mengupayakan TAC sesuai dengan PP 15 tahun 2016 agar target laba tetap tercapai / Making cost efficiency efforts related to the operation of passenger transport trains and strive for TAC in accordance with PP 15 of 2016 so that the profit target is still achieved
3	Kewajiban TAC sesuai dengan RKAP / TAC obligations in accordance with the RKAP	Potensi risiko kenaikan biaya TAC pada RKAP 2022 / Potential for risk of TAC cost increase in the 2022 RKAP	Adanya perbedaan penerapan perhitungan biaya TAC antara PMK No 138/PMK.02/2021 dengan PP No 15 tahun 2016 menyebabkan potensi kenaikan biaya TAC / Differences in the application of TAC cost calculations between PMK No. 138/PMK.02/2021 and PP No. 15 of 2016 causing a potential increase in TAC costs	Ekstrim / Extreme	1. Meminta kepada Kemenhub untuk tetap menerapkan PP 15 tahun 2016 sebagai dasar perhitungan TAC / Requesting the Ministry of Transportation to continue implementing PP 15 of 2016 as the basis for calculating the TAC 2. Apabila Kemenhub akan memberlakukan PMK No 138/PMK.02/2021, maka perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan/DJKA agar dibuat Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur terkait besaran Satuan Biaya Penggunaan Prasarana KA dibawah nilai yang ditetapkan pada PMK No 138/PMK.02/2021 / If the Ministry of Transportation implement PMK No 138/PMK.02/2021, it is necessary to coordinate with the Ministry of Transportation/DJKA so that a Minister of Transportation Regulation is issued to regulate the amount of the Rail Infrastructure Usage Fee Unit below the value set in PMK No 138/PMK.02/2021
4	Kontrak IMO sesuai dengan kebutuhan biaya perawatan dan pengoperasian prasarana / The IMO contract is in accordance with the cost requirements for the maintenance and operation of the infrastructure	Potensi meningkatnya beban usaha dari perawatan prasarana / Potential increase in operating expenses from infrastructure maintenance	kontrak IMO tidak sesuai dengan kebutuhan biaya perawatan / the IMO contract not meeting the maintenance cost requirements	Ekstrim / Extreme	Mengupayakan perolehan IMO sebesar beban perawatan, namun apabila tidak dapat dilakukan maka perlu mengupayakan perolehan IMO sebesar beban IMO tahun 2022 / Attempting to obtain IMO equal to the maintenance expense, but if this cannot be done, it is necessary to seek to obtain IMO equal to the IMO expense in 2022

No	Sasaran / Target	Peristiwa Risiko / Risk Event	Penyebab Risiko / Risk Cause	Level Inherent	Rencana Penanganan Risiko / Risk Mitigation Plan
5	Tercapainya target volume angkutan batu bara di Sumbagsel yaitu: / Achievement of the target volume of coal transportation in South Sumatra, namely: 1. PT BA Tarahan tahun 2022 sebesar 23,9 juta ton / PT BA Tarahan in 2022 of 23.9 million tons 2. PT BA Kertapati tahun 2022 sebesar 6,3 juta ton / PT BA Kertapati in 2022 of 6.3 million tons 3. Batubara lainnya tahun 2022 sebesar 18,5 juta ton / Other coal in 2022 of 18.5 million tons	Potensi terjadi KKA (rinja) yang berulang di petak jalan Muaraenim - Prabumulih yang mengakibatkan rinja / Potential for repeated KKA (road hurdles) occurrence on the Muaraenim - Prabumulih road patch which results in road hurdles	Faktor prasarana, sarana dan sdm / Factors of infrastructure, facilities and human resources	Tinggi / High	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan evaluasi bersama sebagai dasar untuk melakukan mitigasi risiko. / It is necessary to carry out a joint evaluation as a basis for carrying out risk mitigation. 2. Penyediaan <i>window time</i> untuk kecukupan waktu pemeliharaan / Provision of window time for sufficient maintenance time 3. Pengetatan kualitas perawatan sarana secara ketat dan pemenuhan fasilitas pemeliharaan / Strictly tightening the quality of facility maintenance and compliance with maintenance facilities 4. Pengawasan terhadap SDM Operasional dan kecukupan jumlah SDM. / Supervision of Operational HC and the adequacy of the number of HC.
6	Penugasan Pemerintah dapat dilaksanakan dan sustainable dalam operasional serta tidak membebani keuangan PT KAI / Government assignments can be carried out and are sustainable in operations and do not burden PT KAI's finances	Potensi terjadinya cash deficiency akibat tidak tercapainya pendapatan KCIC sesuai dengan target / Potential for cash deficiency due to KCIC's non-achievement of revenue according to the target	Jumlah volume penumpang tidak mencapai target proyeksi dari kajian FS dan biaya operasional yang lebih tinggi dari Kajian FS / Total passenger volume not reaching the projected target from the FS study and operational costs were higher from the FS Study	Tinggi / High	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan penjaminan kelangsungan usaha dari Pemerintah kepada KAI untuk mengcover <i>loan</i> CDS / Proposing business continuity guarantees from the Government to KAI to cover CDS loans 2. Sponsor Indonesia melalui PSBI melakukan negosiasi dengan CDB untuk memperoleh kredit pinjaman / Indonesian sponsors through PSBI negotiate with CDB to obtain credit loans 3. Mengusulkan kepada pemegang saham KCIC melalui PSBI terkait permintaan pendanaan <i>Cash Deficiency Support</i> (CDS) kepada kreditur (CDB) berupa pinjaman dengan jaminan oleh PT KAI / Proposing KCIC shareholders through PSBI regarding requests for Cash Deficiency Support (CDS) funding to creditors (CDB) in the form of guaranteed loans by PT KAI
7	Kontrak IMO sesuai dengan kebutuhan biaya perawatan dan pengoperasian prasarana / The IMO contract is in accordance with the cost requirements for the maintenance and operation of the infrastructure	Potensi risiko adanya permintaan setoran modal dari MITJ untuk menutup <i>cash deficiency</i> KCI / Potential risk of a request for capital injection from MITJ to cover KCI's cash deficiency	Tidak ada penerimaan PSO karena belum ada perubahan status KCI bukan lagi anak perusahaan KAI / No PSO receipt because there has been no change in the status of KCI, which is no longer a subsidiary of KAI	Tinggi / High	Mengupayakan skema PSO yang sesuai dengan kondisi KCI setelah pemisahan sebagai anak perusahaan BUMD yaitu melalui Dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI / Striving for a PSO scheme that is in accordance with KCI conditions after separation as a BUMD subsidiary, namely through the Central Government Special Allocation Fund to DKI Provincial Government
8	Tercapainya target volume angkutan batu bara di Sumbagsel yaitu: / Achievement of the target volume of coal transportation in Southern Sumatra, namely: 1. PT BA Tarahan tahun 2022 sebesar 23,9 juta ton / PT BA Tarahan in 2022 of 23.9 million tons 2. PT BA Kertapati tahun 2022 sebesar 6,3 juta ton / PT BA Kertapati in 2022 is 6.3 million tons 3. Batubara lainnya tahun 2022 sebesar 18,5 juta ton / Other coal in 2022 is 18.5 million tons	Potensi ketidakmampuan mitra/klien terutama PT Bukit Asam dalam memenuhi target kapasitas angkut yang telah disepakati / Potential inability of partners/clients, especially PT Bukit Asam, to meet the agreed transport capacity targets	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan pasar atas batubara turun / Decrease in coal market demand 2. Penurunan jumlah produksi dari internal mitra/klien / Decrease in production from internal partners/clients 	Tinggi / High	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kontrak jangka panjang dengan mitra/klien angkutan batubara agar memastikan adanya permintaan dalam periode waktu yang direncanakan / Developing long-term contracts with partners/clients of coal transportation to ensure there is demand within the planned time period
9		Potensi kekurangan sarana gerbong untuk pemenuhan tambahan target 24 KA/hari angkutan batubara PT BA ke Tarahan pada semester I tahun 2022 / Potential shortage of carriage facilities to fulfill the additional target of 24 trains/day of PT BA's coal transportation to Tarahan in the First Half of 2022	Kedatangan 8 trainset GB 50 Ton dari yang semula direncanakan awal tahun 2022 / Arrival of 8 GB 50 Ton trainsets from what was originally planned for early 2022	Tinggi / High	Percepatan kedatangan tambahan sarana gerbong di TW I 2022 / Accelerating the arrival of additional rolling stock in Q1 2022

No	Sasaran / Target	Peristiwa Risiko / Risk Event	Penyebab Risiko / Risk Cause	Level Inherent	Rencana Penanganan Risiko / Risk Mitigation Plan
10		Potensi kekurangan sarana gerbong untuk pemenuhan target 19,6 KA/hari angkutan batubara swasta / Potential shortage of rolling stock to fulfill the target of 19.6 trains/day for private coal transport	Terlambatnya kedatangan 225 GD 50 Ton dari yang semula direncanakan awal tahun 2022 / The delay in the arrival of 225 GD 50 Tons from what was originally planned for early 2022	Tinggi / High	Percepatan kedatangan tambahan sarana gerbong di TW III 2022 / Accelerating the arrival of additional rolling stock in Q3 2022
11	Penugasan Pemerintah pada pengoperasian LRT Jabodetabek dapat dilaksanakan dan tidak membebani keuangan PT KAI / The Government's assignment to the operation of the Jabodetabek LRT can be carried out and does not burden PT KAI's finances	Potensi terjadinya cash deficiency selama masa pengembalian pinjaman LRT melebihi batas maksimum subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah (Rp2 T) / Potential for cash deficiency during the loan repayment period of the LRT exceeds the maximum subsidy limit set by the Government (Rp2 T)	Jumlah volume penumpang tidak mencapai target proyeksi dari kajian FS sedangkan biaya operasional lebih tinggi dari Kajian FS sehingga cash deficiency yang terjadi lebih besar dari subsidi maksimum yang ditetapkan pemerintah (Rp2 T) / Total passenger volume not reaching the projected target from the FS study while operational costs were higher than the FS Study so that the cash deficiency that occurred was greater than the maximum subsidy set by the government (Rp. 2 trillion)	Sedang / Moderate	<ol style="list-style-type: none"> Meminta subsidi kepada Pemerintah atas seluruh cash flow gap/cash deficiency yang terjadi pada operasional penugasan tersebut / Requesting for subsidies from the Government for all cash flow gaps/cash deficiencies that occur in the assignment operations Cash deficiency yang melebihi batas maksimum subsidi pemerintah dipenuhi dengan bridging loan dan akan diperhitungkan kumulatif pada perhitungan subsidi tahun berikutnya / Cash deficiency that exceeds the maximum government subsidy limit is met with a bridging loan and will be calculated cumulatively in the following year's subsidy calculation
12	Aset perusahaan terjaga baik secara fisik maupun legal / Company assets are maintained both physically and legally	Potensi hilangnya aset Perusahaan / Potential loss of Company assets	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki status kepemilikan aset yang sama berdasarkan perundang-undangan yang berlaku / Having the same asset ownership status based on applicable laws Terdapat beberapa lahan milik perusahaan yang di okupasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab / A number of lands owned by the Company that are occupied by irresponsible parties Belum semua aset dilakukan penyertifikatan / Not all assets have been certified 	Sedang / Moderate	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan mediasi atau litigasi / Conducting mediation or litigation Dilakukan penertiban aset / Controlling assets Program penyertifikatan / Carrying out certification program
13	Tercapainya obligasi sebesar Rp3 T dan dapat dibayar pada saat jatuh tempo / The achievement of bonds amounting to Rp3 T and can be paid at maturity	Potensi tidak terjual habis obligasi yang diterbitkan oleh KAI / Potential of bonds issued by KAI not being sold out	Rating peringkat KAI menurun karena kinerja PT KAI tahun 2020 dan 2021 masih belum memperoleh laba bersih sehingga obligor meminta suku bunga tinggi akibat perolehan peringkat PT KAI dari PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) menurun rating nya menjadi AA+ sebagai dampak pandemi yang menimbulkan negative outlook pada catatan rating PT KAI, yang artinya berpotensi dampak lanjutan jika pandemi berkepanjangan hingga tahun depan / KAI's rating has decreased because PT KAI's performance in 2020 and 2021 has yet to earn a net profit, so the obligor asked for high interest rates as a result of obtaining PT KAI's rating from PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) whose rating was downgraded to AA+ as a result of the pandemic which gave rise to a negative outlook on the notes. PT KAI's rating, which means there is potential for a further impact if the pandemic drags on until next year	Sedang / Moderate	<ol style="list-style-type: none"> Penjelasan terkait dengan kondisi PT KAI pada tahun 2020 dan 2021 terpengaruh dampak pandemi, sedangkan untuk angkutan barang hanya terpengaruh apad awal pandemi. Diharapkan setelah pandemi angkutan penumpang akan kembali normal dan angkutan barang sesuai target dan dapat ditingkatkan / Explaining the condition of PT KAI in 2020 and 2021 affected by the impact of the pandemic, while freight transportation was only affected at the start of the pandemic. It is hoped that after the pandemic passenger transportation will return to normal and freight transportation will be on target and can be improved Memberikan bunga obligasi yang kompetitif agar menarik para obligor / Providing competitive interest on bonds to attract obligors Mencari pendanaan alternatif yaitu Kredit Investasi / Looking for alternative funding, namely Investment Loan
14	Tercapainya target Pendapatan Non angkutan KA sebesar Rp1,002 T / The achievement of the non-railway revenue target of Rp1.002 T	Potensi terjadinya penerapan pembatasan kegiatan masyarakat sampai dengan level 4 akibat adanya gelombang ketiga pandemi covid-19 / Potential for the implementation of public restrictions up to level 4 due to the third wave of the covid-19 pandemic	Timbulnya varian baru covid-19 / Emergence of new variant of covid-19	Sedang / Moderate	Negosiasi agar tetap menyewa dengan discount tidak lebih dari persentase tahun lalu dengan memberikan kompensasi masa angsuran / Negotiating to continue lease with a discount of no more than last year's percentage by providing compensation for the installment period

No	Sasaran / Target	Peristiwa Risiko / Risk Event	Penyebab Risiko / Risk Cause	Level Inherent	Rencana Penanganan Risiko / Risk Mitigation Plan
15	Rp 4,6 Triliun di bulan Mei s.d Desember (LRT Jabodebek) / Rp4.6 Trillion in May to December (LRT Jabodebek)	Potensi tidak bisa dicairkan pinjaman sebesar Rp4,6 T karena belum adanya penjaminan dari pemerintah atas tambahan pinjaman / Potential for non-disbursement of a loan of Rp4.6 T due to the absence of guarantees from the government for additional loans	belum adanya penjaminan dari pemerintah atas tambahan pinjaman / No guarantee from the government for additional loans	Sedang / Moderate	Pengajuan untuk penjaminan tambahan pinjaman Rp4,6 T untuk LRT Jabodebek / Submitting collateral for an additional loan of Rp4.6 T for the Jabodebek LRT

Profil Risiko Proyek (Investasi dan Non-Investasi)

Unit Manajemen Risiko melakukan kegiatan asesmen risiko secara rutin berdasarkan usulan investasi RKAP dan Non-RKAP, termasuk asesmen risiko atas permintaan khusus dari direktorat tertentu (*user*). Pengelolaan risiko investasi bertujuan untuk menjamin penciptaan nilai (*create value*) dari kegiatan investasi Perseroan dengan tingkat pengembalian investasi yang layak dan profitabilitas yang meningkat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis Perseroan.

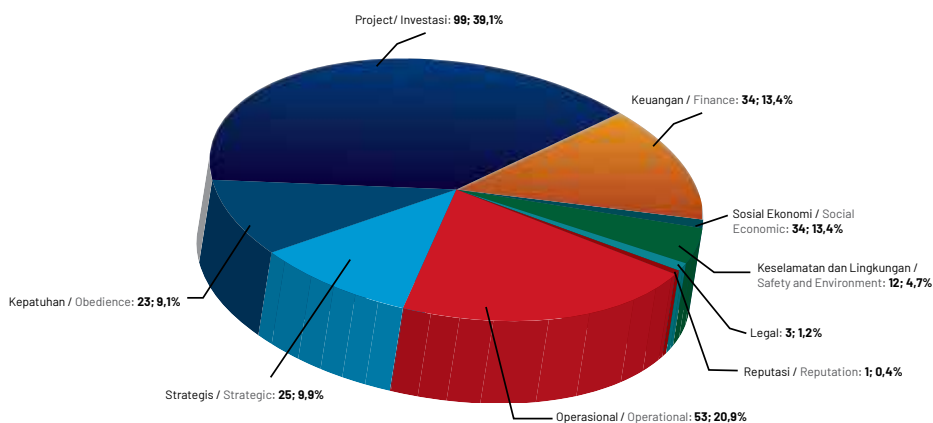
Untuk tahun 2022, pelaksanaan asesmen risiko oleh Unit Manajemen Risiko tidak hanya terbatas pada investasi tetapi juga melakukan asesmen risiko di luar investasi. Pada tahun 2022 telah dilakukan asesmen risiko sebanyak 50 (lima puluh) paket dengan rincian 20 (dua puluh) paket investasi RKAP 2022, 3 (tiga) paket usulan investasi RKAP 2023 dan 27 (dua puluh tujuh) paket Non RKAP 2022.

Project Risk Profile (Investment and Non-Investment)

The Risk Management Unit carries out risk assessment activities on a regular basis based on the proposed RKAP and Non-RKAP investments including risk assessments upon special requests from certain directorates (*users*). Investment risk management aims to ensure the creation of value from the company's investment activities with a reasonable rate of return on investment and increased profitability so that it is expected to increase the company's business growth.

For 2022, the Risk Management Unit carried out risk assessments not only limited to investment but also carried out risk assessments outside of investment. In 2022, 50 (fifty) risk assessment packages have been carried out with details of 20 (twenty) 2022 RKAP investment packages, 3 (three) 2023 RKAP investment proposal packages and 27 (twenty seven) Non 2022 RKAP packages.

PROFIL RISIKO PROJECT (INVESTASI DAN NON-INVESTASI) TAHUN 2022
PROJECT RISK PROFILE (INVESTMENT AND NON-INVESTMENT) IN 2022



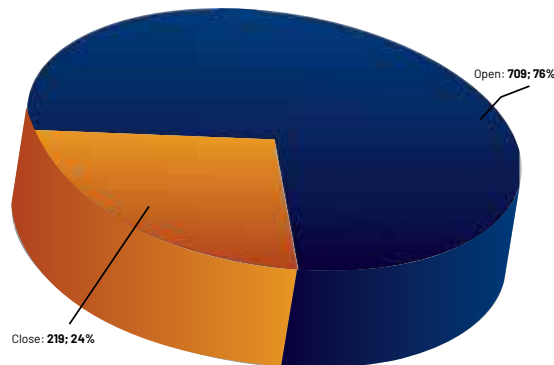
Risk Control Self Asesment (RCSA) Entity

Berdasarkan proses pengisian Risk Control Self Assessment (RCSA) entity yang telah dilakukan oleh risk owner pada aplikasi SMARTKA sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, entitas telah melakukan identifikasi risiko sebagai profil risiko sebanyak 928 risiko.

Risk Control Self Asesment (RCSA) Entity

Based on the entity Risk Control Self Assessment (RCSA) filling process that was carried out by the risk owner on the SMARTKA application up to December 31, 2022, the entity has identified 928 risks as a risk profile.

RCSA ENTITY PERIODE 2022



Risk Control Self Asesment (RCSA) Project

Berdasarkan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: PER.U/KL.104/I/1/KA-2021 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terpadu (*Enterprise Risk Management*) tanggal 25 Januari 2021, Divisi Manajemen Risiko berkewajiban terhadap pelaksanaan asesmen dan kajian risiko program investasi, program strategis, dan permintaan kajian risiko lainnya dari direktorat-direktorat di Kantor Pusat. Pengelolaan risiko program investasi, program strategis, program lain atas permintaan user pelaksanaan asesmennya dan pelaksanaan pengendalian risikonya difasilitasi dengan menggunakan aplikasi SMARTKA, yang disebut RCSA Project.

Risk Control Self-Assessment (RCSA) Project

Based on the Regulation of the Board of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. PER.U/KL.104/I/1/KA-2021 Concerning Guidelines for Implementing Integrated Risk Management (*Enterprise Risk Management*) dated January 25, 2021, the Risk Management Division is obliged to carry out the risk assessment and studies of investment programs, strategic programs, and requests for other risk studies from the directorates at the Head Office. Risk management of investment programs, strategic programs, other programs at the request of users, implementation of their assessments and implementation of risk controls is facilitated by the SMARTKA application, namely the RCSA Project.

Untuk RCSA Project periode 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 telah diinput sebanyak 73 project dan teridentifikasi sebanyak 341 risiko.

For the RCSA Project to December 31, 2022, 73 projects have been inputted and 341 risks have been identified.

Monitoring Pelaksanaan Mitigasi Risiko Utama RKAP 2022

Proses *monitoring* dan evaluasi dilaksanakan secara kontinu dengan cara mengirim form isian tindak lanjut mitigasi risiko dari paket-paket investasi ataupun dengan cara memantau secara langsung ke para *Risk Taking Unit* (RTU) baik di kantor pusat maupun di daerah (Daop/Divre) untuk melakukan diskusi tentang kemajuan tindak lanjut mitigasi risiko yang telah direkomendasikan sekaligus untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi terkait aktivitas investasi, hingga semua rekomendasi mitigasi ditindaklanjuti. Hasil *monitoring* tindak lanjut mitigasi risiko disampaikan dalam Laporan Manajemen Risiko triwulanan.

Monitoring the Implementation of the Key Risk Mitigation of the 2022 RKAP

Referring to the Company's 15 key risks in the 2022 RKAP which consist of 4 risks with extreme inherent levels, 6 risks with high inherent levels and 5 risks with moderate inherent levels, there are 28 risk mitigations that must be followed up. During 2022, follow-up on risk mitigation has been carried out with 10 mitigations having been completed, 13 mitigations still in process, 4 mitigations still not being followed up and 1 mitigation cannot be implemented.

Jumlah Risiko / Total Risks	Jumlah Mitigasi / Amount of Mitigation	Selesai / Settled	Proses / On Progress	Belum / Not Yet Handled	Tidak ditindaklanjuti / Not followed-up	Persentase / Percentage
15	28	10	13	4	1	62%

Berdasarkan hasil pelaksanaan mitigasi tersebut, profil risiko utama perusahaan (actual risk) menjadi 1 risiko dengan level actual ekstrim, 4 risiko dengan level actual tinggi, 5 risiko dengan level actual sedang, dan 5 risiko dengan level actual rendah. Hasil evaluasi profil risiko utama perusahaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 dimana dari 15 risiko terdapat 4 risiko yang mitigasinya telah selesai ditindaklanjuti sehingga level risiko actual residual sudah sama dengan level risiko expected residual-nya.

Based on the results of the mitigation, the Company's key risk profile (actual risk) becomes 1 risk with an actual extreme level, 4 risks with an actual high level, 5 risks with an actual moderate level, and 5 risks with low actual level. The results of the evaluation of the company's main risk profile up to Q4 2022 where out of 15 risks there are 4 risks whose mitigation has been completed so that the actual residual risk level is the same as the expected residual risk level.

No	Kode Risiko / Risk Code	Peristiwa Risiko / Risk Event	Risk Level						Quantitative Impact (Rp Miliar / Rp Billion)		
			Inherent		Expected Residual		Actual Residual		Inherent	Expected Residual	Actual Residual
			P	I	P	I	P	I			
1	K-1	Potensi PT KAI sebagai Pimpinan Konsorsium tidak dapat memenuhi seluruh beban cost overrun sponsor Indonesia sesuai facility agreement / Potential for PT KAI as the Consortium Leader to not fulfill all of the cost overrun of Indonesian sponsors according to the facility agreement	5	5	2	2	4	5	14.673	3.600	11.738
2	O-1	Potensi terjadinya penerapan pembatasan kegiatan masyarakat sampai dengan level 4 akibat adanya gelombang ketiga pandemi covid-19 / Potential for the implementation of public restrictions up to level 4 due to the third wave of the covid-19 pandemic	4	5	4	1	3	5	2.110	422	1.583
3	K-2	Potensi risiko kenaikan biaya TAC pada RKAP 2022 / Potential for risk of TAC cost increase in the 2022 RKAP	4	5	1	1	2	5	1.717	86	859
4	K-3	Potensi meningkatnya beban usaha dari perawatan prasarana / Potential increase in operating expenses from infrastructure maintenance	5	4	3	3	3	4	2.300	1.035	1.380
5	R	Potensi terjadi KKA (rinja) yang berulang di petak jalan Muaraenim - Prabumulih yang mengakibatkan rinja / Potential for repeated KKA (road hurdles) occurrence on the Muaraenim - Prabumulih road patch which results in road hurdles	4	4	2	2	3	4	200	50	150
6	K-4	Potensi terjadinya cash deficiency akibat tidak tercapainya pendapatan KCIC sesuai dengan target / Potential for cash deficiency due to KCIC's non-achievement of revenue according to the target	5	3	5	1	5	2	263	88	175
7	K-5	Potensi risiko adanya permintaan setoran modal dari MITJ untuk menutup cash deficiency KCI / Potential risk of a request for capital injection from MITJ to cover KCI's cash deficiency	3	4	1	1	3	4	540	45	540
8	O-2	Potensi ketidakmampuan mitra/klien terutama PT Bukit Asam dalam memenuhi target kapasitas angkut yang telah disepakati / Potential inability of partners/clients, especially PT Bukit Asam, to meet the agreed transport capacity targets	3	4	2	3	2	4	2.860	1.430	1.907
9	O-3	Potensi kekurangan sarana gerbong untuk pemenuhan tambahan target 24 KA/hari angkutan batubara PT BA ke Tarahan pada semester I tahun 2022 / Potential shortage of carriage facilities to fulfill the additional target of 24 trains/day of PT BA's coal transportation to Tarahan in the First Half of 2022	5	2	3	1	3	1	354	106	106

No	Kode Risiko / Risk Code	Peristiwa Risiko / Risk Event	Risk Level						Quantitative Impact (Rp Miliar / Rp Billion)		
			Inherent		Expected Residual		Actual Residual		Inherent	Expected Residual	Actual Residual
			P	I	P	I	P	I			
10	O-4	Potensi kekurangan sarana gerbong untuk pemenuhan target 19,6 KA/hari angkutan batubara swasta / Potential shortage of rolling stock to fulfill the target of 19.6 trains/day for private coal transport	5	2	3	1	3	1	479	144	144
11	K-6	Potensi terjadinya cash deficiency selama masa pengembalian pinjaman LRT melebihi batas maksimum subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah (Rp2 T) / Potential for cash deficiency during the loan repayment period of the LRT exceeds the maximum subsidy limit set by the Government (Rp2 T)	3	3	3	1	1	3	200	67	67
12	L	Potensi hilangnya aset Perusahaan / Potential loss of Company assets	3	3	2	2	2	3	400	178	267
13	K-7	Potensi tidak terjual habis obligasi yang diterbitkan oleh KAI / Potential of bonds issued by KAI not being sold out	3	3	2	2	2	3	1.000	500	667
14	K-8	Potensi terjadinya penerapan pembatasan kegiatan masyarakat sampai dengan level 4 akibat adanya gelombang ketiga pandemi covid-19 / Potential for the implementation of public restrictions up to level 4 due to the third wave of the covid-19 pandemic	4	2	4	1	2	2	350	60	175
15	K-9	Potensi tidak bisa dicairkan pinjaman sebesar Rp4,6 T karena belum adanya penjaminan dari pemerintah atas tambahan pinjaman / Potential for non-disbursement of a loan of Rp4.6 T due to the absence of guarantees from the government for additional loans	2	3	1	1	1	1	4.600	767	767

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Sesuai ISO 31000:2018 pengelolaan risiko perusahaan yang efektif dilakukan oleh seluruh unit bisnis di dalam perusahaan, diterapkan sebagai manajemen risiko terpadu (*Enterprise Risk Management/ERM*). Dalam rangka penerapan ERM, Perseroan telah memberlakukan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terpadu (Pedoman ERM) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang termuat di dalam Peraturan Direksi No. PER.U/KL/II/1/KA-2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terpadu pada tanggal 25 Januari 2021. Melalui pemberlakuan tersebut, lingkup penerapan manajemen risiko yang sebelumnya bersifat terbatas pada pengelolaan risiko investasi (*silos approach risk management*) menjadi lebih luas mencakup seluruh unit bisnis dan unit kerja Kantor Kerja Perusahaan.

Seiring diterapkannya Pedoman ERM, Perseroan menerapkan aplikasi SMARTKA sebagai platform yang memfasilitasi pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Risiko Terpadu. Aplikasi SMARTKA telah Go Live pada tanggal 29 Maret 2021 dan telah difungsikan untuk mendukung pengelolaan risiko di seluruh unit bisnis/unit kerja (*risk entity*) melalui pelaksanaan *Risk Control and Self Assessment* (RCSA).

Evaluation of the Effectiveness of Risk Management System

According to ISO 31000:2018, an effective company risk management is effective if it is carried out by all business units at the company or through an integrated risk management (*Enterprise Risk Management/ERM*). On January 25, 2021, in implementing ERM, the Company has issued the ERM Guidelines and *Standard Operating Procedures* (SOP) contained in the Board of Directors Regulation No. PER.U/KL/II/1/KA-2021 concerning Implementation of Integrated Risk Management. With this issuance, the previously applicable Risk Management Guidelines had a limited scope of application for investment risk management (*silos approach risk management*) with a wider scope of application to all business units and office work units of the Company.

After the issuance of the ERM Guidelines, the SMARTKA application serves to facilitate the implementation of the Integrated Risk Management System. The SMARTKA application, which went live on March 29, 2021, is intended to support risk management in all business units/work units (*risk entities*) through the implementation of Risk Control and Self-Assessment (RCSA).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja manajemen risiko, efektivitas Sistem Manajemen Risiko Terpadu direpresentasikan dari indikator berikut ini:

Based on the results of risk management performance measurement, the effectiveness of the integrated Risk Management System can be represented from the following indicators:

Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Terpadu

Effectiveness of integrated Risk Management System

KPI	Satuan	Realisasi
Pencapaian <i>Risk Maturity Index</i> Periode 2021 / Achievement of Risk Maturity Index for the 2021 Period	Index	2,22
Efektivitas Monitoring dan Pengendalian Risiko Utama Perusahaan / Effectiveness of Monitoring and Controlling the Company's Key Risks	%	37

Pada tahun 2022 telah dilakukan pengukuran tingkat maturitas perusahaan untuk periode tahun 2021 yang dilakukan bersama dengan Unit Internal Kontrol (SPI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penilaian ini dengan cara evaluasi dokumen di Divisi Manajemen Risiko, pengiriman kuesioner kepada seluruh *risk owner* dan sampling evaluasi di Divre 3 Palembang dan Daop 8 Surabaya. Berdasarkan hasil Assessment dapat disimpulkan bahwa capaian tingkat maturitas penerapan sistem manajemen risiko pada PT KAI (Persero) berada pada Level 2 (*repeatable*) menuju Level 3 (*Defined*) dengan skor 2,727.

In 2022, the company's maturity level measurement for the 2021 period was carried out jointly with the Internal Audit Unit (SPI) and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). This assessment is carried out by evaluating documents at the Risk Management Division, sending questionnaires to all risk owners, and evaluating samples at Divre 3 Palembang and Daop 8 Surabaya. Based on the results of the Assessment, the maturity level of risk management system implementation at PT KAI (Persero) is at Level 2 (*repeatable*) to Level 3 (*Defined*) with a score of 2.727.

Indikator kinerja Efektivitas Monitoring dan Pengendalian Risiko Utama Perusahaan merupakan ukuran kinerja perusahaan dalam melakukan pelaksanaan mitigasi risiko utama. Dari 15 risiko utama dengan 27 tindakan mitigasi yang direkomendasikan, Perseroan telah menindaklanjuti pelaksanaan mitigasi sebesar 62%. Hal tersebut mengindikasikan perlu ditingkatkannya *risk awareness* dari para *risk owner* untuk melaksanakan mitigasi risiko agar pengendalian risiko dapat berjalan efektif.

Performance indicators of the Company's Key Risk Monitoring and Control Effectiveness is a measure of the Company's performance in implementing the key risk mitigation. Of the company's 15 key risks with 27 recommended mitigation actions, 62% of the mitigation actions have been followed up. This indicates the need to increase risk awareness from risk owners to carry out risk mitigation so that risk control can run effectively.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit Atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners on the Adequacy of the Risk Management System

Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko senantiasa melakukan evaluasi atas pelaksanaan *Enterprise Risk Management* yang selanjutnya menjadi bahan arahan kepada Direksi. Berdasarkan arahan dari Dewan Komisaris, Direksi menindaklanjuti hasil evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan *Enterprise Risk Management*. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa kecukupan sistem manajemen risiko Perseroan telah memadai.

The Board of Commissioners through the Risk Management Monitoring Committee continuously evaluates the implementation of Enterprise Risk Management which will then be used as directives to the Board of Directors. Based on the direction of the Board of Commissioners, the Board of Directors follows up on the evaluation results in order to improve the effectiveness of the implementation of Enterprise Risk Management. The Board of Directors and Board of Commissioners state that the Company's risk management system is adequate.

PERKARA HUKUM [GRI 2-27]

Legal Case

Pada tahun 2022, Perseroan menghadapi perkara hukum dengan jumlah perkara perdata, pidana, dan hubungan industrial sebagai berikut:

In 2022, the Company faced a number of legal cases on civil, criminal, and industrial relations lawsuits as follows:

Perkara Hukum

No	Perkara Hukum / Legal Case	Jumlah / Amount		
		Perdata / Civil	Pidana / Criminal	Hubungan Industrial / Industrial Relationship
1	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) / Settled (with permanent legal force)	61	44	5
2	Dalam proses penyelesaian / On progress	55	34	4
Total		116	78	9

Legal Case

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Perincian perkara hukum yang dihadapi Perseroan di tahun 2022 dapat dilihat di dalam tabel berikut:

Legal Cases Faced by the Company

Details of legal cases faced by the Company in 2022 can be seen in the following table:

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

No	Pokok Perkara/Gugatan / Case Subject/Lawsuit	Status Penyelesaian / Settlement Status	Risiko dan Nominal Gugatan / Risk and Nominal Value of Lawsuit	Sanksi yang dikenakan / Sanction imposed	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan / Impact on the Company's Condition
1	PT KAI (Persero) digugat oleh Nani Sumarni, dkk terkait sengketa kepemilikan Tanah terletak di Jl. Garuda Kec. Andir, Kel. Garuda, Kota Bandung / PT KAI (Persero) was sued by Nani Sumarni, et al regarding a land ownership dispute located on Jl. Garuda Kec. Andir, Kel. Garuda, Bandung	Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung / Judicial Review at the Supreme Court	Rp4.660.315.785.000,-	-	Berpotensi kehilangan aset dan pendapatan dari pendayagunaan aset tersebut / Potential loss of assets and revenue from asset utilization
2	Gugatan perlawanan atas upaya Eksekusi putusan BANI Nomor 33/2018/BANI BANDUNG tanggal 23 Mei 2019 tentang PMH PTKAI atas Perjanjian Kerja Sama antara PT KAI dengan PT Pentasena tentang Pengembangan Dipo Kereta Api dan Pembangunan Pertokoan di Emplasemen Kampung Bandan yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi Jasin, S.H tanggal 18 Maret 2004 / Lawsuit against the effort to execute BANI ruling No. 33/2018/BANI BANDUNG dated May 23, 2019 on PMH PTKAI for the Cooperation Agreement between PT KAI and PT Pentasena regarding the Development of the Railway Depot and Construction of Shops at the Kampung Bandan Emplacement drawn up before Notary Surjadi Jasin, SH dated March 18, 2004	Kasasi di Mahkamah Agung / Cassation at the Supreme Court	Rp152.225.327.619,-	-	Berpotensi kehilangan aset dan pendapatan dari pendayagunaan aset tersebut / Potential loss of assets and revenue from asset utilization
3	Tengku Hamdy Osman Delikhan menggugat KAI karena tahun 1868 terjadi perjanjian konsesi antara Kesultanan Deli dan DSM selama 90 tahun yang seharusnya berakhir tahun 2002 / Tengku Hamdy Osman Delikhan sued KAI for the 1868 concession agreement between the Deli Sultanate and DSM for 90 years which should have ended in 2002	Banding di Pengadilan Tinggi / Appeal at the High Court	Rp707.340.000.000,-	-	Berpotensi kehilangan aset dan pendapatan dari pendayagunaan aset tersebut / Potential loss of assets and revenue from asset utilization
4	Sengketa pemutusan Perjanjian terkait persewaan aset di Kampung Bandan / Dispute on the termination of the agreement related to leasing assets in Kampung Bandan	Proses di Kantor BANI Jakarta / Being processed at the BANI Jakarta Office	Rp394.442.104.000,-	-	Berpotensi kehilangan aset dan pendapatan dari pendayagunaan aset tersebut / Potential loss of assets and revenue from asset utilization

Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Pada tahun 2022, tidak terdapat perkara hukum yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Pada tahun 2022, tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi oleh Anak Perusahaan.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Pada tahun 2022, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan baik kepada Perseroan, anggota Dewan Komisaris, maupun Direksi oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya.

Legal Cases Faced by the Incumbent Board of Commissioners and Board of Directors

During 2022, there were no legal cases faced by the incumbent Board of Commissioners and Board of Directors.

Legal Cases Faced by Subsidiaries

In 2022, there were no legal cases faced by Subsidiaries.

Administrative Sanction Imposed on the Company, Board of Commissioners Members, and Board of Directors Members by the Capital Market by Capital Market Authorities and Other Authorities

In 2022, there were no administrative sanctions imposed on the Company, Board of Commissioners members, and Board of Directors members by the capital market authorities and other authorities.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Access to Company Information and Data

Guna memberikan kemudahan pelayanan kepada pemangku kepentingan, Perseroan telah menyediakan informasi perusahaan melalui berbagai fasilitas mencakup fasilitas berbasis teknologi informasi agar bisa diakses masyarakat dengan mudah, murah, dan cepat.

Kebijakan Keterbukaan Informasi Perusahaan

Perseroan menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk menjaga efektivitas pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Perseroan membentuk unit organisasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP.U/OT.003/VI/3/ KA-2010 tentang Perubahan dan Tambahan (P&T) atas Keputusan Direksi Nomor: KEP.U/OT.003/VI/1/KA2009 tanggal 5 Juni 2009 tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Perusahaan di Lingkungan Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Standar Operasional Prosedur Keterbukaan Informasi Publik (SOP KIP) dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep.U.HK.003/XII/1/KA-2010, yang merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam melakukan pengelolaan informasi publik di lingkungan Perseroan. Peraturan tersebut kemudian diperbarui kembali melalui Peraturan Direksi Nomor: PER.U/ KL.104/ VI/1/KA-2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik.

To provide accessible services to stakeholders, the Company has provided various information technology-based information facilities that can be accessed by the public in a convenient, affordable, and quick manner.

Company Information Disclosure Policy

The Company has a public information disclosure policy based on Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. To ensure an effective Public Information Disclosure (KIP), the Company established an organizational unit based on the Decree of the Board of Directors No. KEP.U/OT.003/VI/3/KA-2010 concerning Amendments and Supplements (P&T) to the Decree of the Board of Directors Number: KEP.U/ OT.003/VI/1/KA2009 dated June 5, 2009, regarding the Organization and Management of the Corporate Secretariat in the Head Office of PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Standard Operating Procedures for Public Information Disclosure (SOP KIP) are stated in the Decree of the Board of Directors Number: Kep.U.HK.003/XII/1/KA-2010, implementation instructions, and technical instructions in managing public information of KAI. The regulation was then updated again through the Board of Directors Regulation No. PER.U/KL.104/VI/1/KA-2018 dated June 5, 2018, concerning Guidelines for Public Information Services.

Unit organisasi di bidang KIP dikelola oleh Manager *Public Information Care* yang berada di bawah *VP Public Relations* dengan tugas pokok dan bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik yang mencakup penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi terhadap pengguna informasi publik.

Media dan Jalur Layanan Informasi Publik

KAI sebagai salah satu badan publik berkomitmen untuk melaksanakan dan mengelola keterbukaan informasi publik dengan baik. Pengelolaan ini bertujuan untuk semaksimal mungkin memberikan kemudahan bagi masyarakat baik perorangan, kelompok orang, lembaga swasta, maupun instansi pemerintah yang membutuhkan informasi publik KAI.

Pengelolaan keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan adalah penyediaan informasi publik melalui berbagai media yang dimiliki oleh Perusahaan, diantaranya; website ppid.kai.id, aplikasi mobile PPID, dan media sosial Kereta Apikita. Selain itu melakukan pelayanan kepada pemohon informasi publik melalui berbagai jalur, diantaranya; datang langsung ke kantor PPID, melalui telepon, surat, email, dan WhatsApp.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kemudahan akses layanan informasi publik secara online dan praktis khususnya di tengah pandemi Covid-19, telah disediakan jalur permintaan informasi publik melalui website ppid.kai.id, dan aplikasi mobile PPID.

Penyediaan layanan informasi publik tidak hanya bagi orang normal saja. Untuk memberikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, KAI juga menyediakan media dan jalur layanan, seperti jalur jalan dengan guiding block, dan jalur kursi roda, Formulir Permintaan Informasi dengan huruf braille, serta website bersuara.

Media Penyampaian Informasi

Siaran Pers

Selama tahun 2022, KAI telah membagikan berita dalam bentuk siaran pers berjumlah 1.206 siaran pers yang terdiri dari 179 siaran pers yang diterbitkan kantor pusat, 790 siaran pers yang diterbitkan oleh Daop/Divre, dan 237 siaran pers yang diterbitkan oleh anak perusahaan. Siaran pers tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan khalayak sasaran terkait informasi berita yang telah dibagikan.

The organizational unit on KIP is led by the Manager of Public Information Care under the VP Public Relations with the main duty and responsibility of managing public information, which includes storage, documentation, provision, and/or service of information to user of public information.

Media and Public Information Service Line

KAI as a public agency is committed to properly implementing and managing public information disclosure. This aims to provide optimal convenience to the public, including individuals, groups, private institutions, and government agencies that require public information on KAI.

The management of public information disclosure that has been carried out include provision of public information through various media owned by the Company, namely; the ppid.kai.id website, PPID mobile application, and Kereta Apikita social media. The Company also provides services for the public to request information through various channels, including; coming directly to the PPID office, by phone, letter, email, and WhatsApp.

To meet the needs of the public for the convenience in accessing public information services online and practically, especially in the midst of the Covid-19 pandemic, public information request line has been provided through the ppid.kai.id website, and the PPID mobile application.

The provision of public information services is not only for regular people. As an effort of equality for people with disabilities, KAI also provides media and service lines, such as lanes with guiding blocks and wheelchair lanes, Information Request Forms in braille, and website with voice assistance.

Information Delivery Media

Press Conference

Throughout 2022, KAI has distributed news in the form of press releases amounting to 179 press releases by the head office, 790 press releases by Daop/Divre, and 237 press releases by subsidiaries. This is intended to increase awareness and knowledge of the target audience regarding the information of news that has been shared.

Media Sosial

KAI memiliki 2 *brand* media sosial Perseroan, yaitu Kereta Api Kita dan KAI 121 untuk tujuan penyebaran informasi yang berbeda. Akun KAI121 ditujukan untuk pelayanan pelanggan dan informasi seputar produk, sementara akun Kereta Api Kita lebih fokus pada dukungan bagi *brand image* Perseroan.

Platform media sosial yang digunakan adalah sebagai berikut:

Twitter	: KAI121 dan Kereta Api Kita
Facebook Fanpage	: KAI 121 dan Kereta Api Kita
Instagram	: KAI121_ dan Kereta Api Kita
YouTube	: Kereta Api Kita
Tiktok	: KAI121 dan Kereta Api Kita
Podcast	: Sahabat KAI

Website

Perseroan memiliki website dengan alamat <https://www.kai.id/> yang menyediakan informasi dan data-data terbaru, berita, siaran pers, artikel, informasi lowongan kerja, lelang, keterbukaan informasi publik, *heritage*, CSR hubungan investor, GCG, dan prestasi. Website Perseroan juga menyediakan fasilitas pemesanan tiket. Informasi dalam website disampaikan dalam Bahasa Indonesia.

Aplikasi KAI

KAI senantiasa menjaga pelayanan prima bagi seluruh penumpang, di antaranya dengan memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam genggamannya yaitu dalam bentuk aplikasi. Sampai dengan 2022, terdapat 2 (dua) aplikasi yang dikembangkan KAI dengan penjelasan sebagai berikut:

Aplikasi Mobile KAI Access

KAI Access terus diperkaya dengan berbagai fitur yang berguna bagi pelanggan. Selain dapat digunakan untuk membeli tiket perjalanan KA jarak jauh dan lokal, melalui KAI Access pengguna dapat memperoleh informasi terkait KRL, KAI logistik, KA wisata, berita terkait KAI, layanan pembatalan dan ubah jadwal perjalanan KA, pemesanan makanan di kereta, *first-last mile*, fasilitas uang elektronik KAI Pay, serta layanan *top-up* dan tagihan.

Social Media

KAI has two corporate social media brands, namely Kereta Api Kita and KAI 121 for disseminating different information. The KAI121 account is intended for customer service and product information, while the Kereta Api Kita account focuses more on the Company's image.

The Social media platforms used are as follows:

Twitter	: KAI121 and Kereta Api Kita
Facebook Fanpage	: KAI 121 and Kereta Api Kita
Instagram	: KAI121_ and Kereta Api Kita
YouTube	: Kereta Api Kita
Tiktok	: KAI121 and Kereta Api Kita
Podcast	: Sahabat KAI

Website

The Company has a website of www.kai.id which provides the latest information and data, news, press releases, articles, job vacancies, tenders, public information disclosure, *heritage*, CSR, investor relations, GCG, and achievements. The Company's website also provides ticket booking facilities. Information on the website is delivered in Indonesian.

KAI Application

KAI always maintains excellent service for all passengers, including by providing convenience to customers' mobility in the form of application. As of 2022, there are 2 (two) applications developed by KAI.

KAI Access Mobile Application

KAI Access is always updated with various useful features for customers. In addition to ticket purchasing for long-distance and local train travel, KAI Access users can also obtain information on KRL, KAI logistics, KA Wisata, news related to KAI, services for cancelling changing train travel schedules, food order on the train, *first-last mile*, KAI Pay electronic money facility as well as *top up* and billing services.

Aplikasi Mobile PPID KAI

KAI sebagai salah satu badan publik berkomitmen untuk melaksanakan dan mengelola keterbukaan informasi publik sebaik mungkin. Ini bertujuan untuk mengelola informasi dan dokumentasi yang bertugas membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi seputar KAI. Untuk mengikuti perkembangan zaman KAI berinovasi dengan menciptakan aplikasi *mobile* PPID. Selain memuat tentang Daftar Informasi Publik KAI dan peraturan-peraturan terkait Komisi Informasi Pusat (KIP), aplikasi PPID juga memuat menu khusus untuk permohonan informasi publik. Pengguna yang memakai menu tersebut akan langsung tersambung dan dilayani oleh admin atau staf PPID.

KAI PPID Mobile Application

KAI as a public agency is committed to implementing and managing public information disclosure as best as possible with the aim to manage information and documentation in charge of assisting the public in obtaining information on KAI. To keep up with the times, KAI conducted an innovation by creating a PPID mobile application. In addition to containing the KAI Public Information List and regulations related to the Central Information Commission (KIP), the PPID application also contains a special menu for requests for public information. Users who use this menu will be directly connected and served by the admin or PPID staff.

PEDOMAN PERILAKU

Code of Conduct

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari, yang diterapkan untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan. Pedoman perilaku juga dikenal sebagai Kode Etik Perseroan. KAI menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), salah satunya dengan menetapkan pedoman perilaku yang berisi uraian perilaku yang harus dipatuhi dan dijalankan Insan KAI, mencakup Komisaris, Direksi, dan seluruh pekerja, dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

KAI menjalankan bisnisnya secara etis dan mematuhi semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan bisnis, etika dan integritas harus menjadi dasar atas pelaksanaan semua hubungan Perseroan, termasuk dengan pelanggan, penyedia barang dan jasa, pekerja dan *stakeholders* lainnya.

The Code of Conduct is a guideline for attitudes, behavior, and actions in carrying out duties and interactions in daily life to realize the vision and mission of the Company. The Code of conduct can also be referred to as Code of Ethics. KAI runs its business following the principles of Good Corporate Governance (GCG), one of which is by establishing a code of conduct that contains a description of the behavior that must be obeyed and carried out by KAI personnel, namely the Commissioners, Directors, and employees in carrying out their responsibilities and authorities.

KAI conducts its business ethically and complies with all applicable laws and regulations. In running its business, ethics and integrity must underlie all of the Company's relationships, including with customers, providers of goods and services, workers, and other stakeholders.

Pokok-Pokok Pedoman Perilaku

Pedoman Perilaku Perseroan memuat pokok-pokok sebagai berikut:

1. Pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Nilai-nilai perusahaan (*values*).
3. Benturan kepentingan dan korupsi.
4. Penerimaan gratifikasi, pemberian donasi, dan pemberian hadiah

Code of Conduct Principles

The Company's code of conduct contains the following subjects:

1. Statement of commitment of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2. Corporate values.
3. Conflict of interest and corruption.
4. Giving and receiving of gratuities, donations, and gifts.

5. Kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta pelestarian lingkungan.
6. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi.
7. Integritas laporan keuangan.
8. Perlindungan informasi Perseroan.
9. Aset tak berwujud (*intangible asset*).
10. Informasi orang dalam.
11. Perlindungan harga/aset Perusahaan.
12. Kegiatan sosial dan politik.
13. Etika yang terkait dengan *stakeholders*.
14. Penegakan pedoman perilaku.
15. Pelanggaran dan sanksi.

Kepatuhan Terhadap Pedoman Perilaku

KAI memiliki pedoman perilaku yang merupakan nilai dasar bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Insan KAI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara profesional. Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Insan KAI telah menandatangani Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku sebagai wujud komitmen untuk patuh terhadap pedoman perilaku Perusahaan.

Penyebarluasan Pedoman Perilaku [GRI 2-24]

Perseroan memahami bahwa sosialisasi merupakan tahapan penting dari penerapan pedoman perilaku. Secara berkala, Perseroan memastikan bahwa Pedoman Perilaku Perusahaan telah dikomunikasikan, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh Insan KAI. Sosialisasi tersebut yang dilakukan antara lain melalui kegiatan:

1. Sosialisasi etika bisnis dan budaya perusahaan termasuk di dalamnya terkait gratifikasi kepada manajemen puncak, jajaran pelaksana, hingga kepada pemangku kepentingan yang dilakukan baik melalui tatap muka maupun pertemuan virtual.
2. Sosialisasi etika bisnis dan perilaku bisnis oleh manajemen puncak setiap unit di unitnya masing-masing.
3. Memuat etika bisnis dan perilaku bisnis di Media Internal Kontak yang merupakan sarana sosialisasi dan komunikasi keluarga besar Perseroan.
4. Sosialisasi melalui media *e-office*, *e-mail milis broadcast*, spanduk, media sosial, dan media massa.

5. Concern for occupational health and safety (OHS) and environmental conservation.
6. Equal opportunity of employment and promotion.
7. Integrity of Financial Statements.
8. Protection of the Company's information
9. Intangible assets.
10. Insider trading
11. Protection of the Company's assets/valuables.
12. Social and political activities.
13. Ethics related to stakeholders.
14. Code of Conduct enforcement.
15. Violations and sanctions.

Code of Conduct Compliance

KAI has a code of conduct which serve as the basic value for the Board of Commissioners, Board of Directors, and all personnel of KAI in carrying out their work professionally. The Board of Commissioners, Board of Directors, and all personnel of KAI has signed the Statement of Compliance with the Code of Conduct as a form of commitment in complying with the Company's code of conduct.

Code of Conduct Dissemination [GRI 2-24]

The Company is aware that dissemination is an important step in implementing the Company's policies. The Company ensures that the Company's Code of Conduct has been communicated, understood, and implemented by all KAI personnel. The dissemination that has been carried out, among others, was through:

1. Dissemination of business ethics and corporate culture including those related to gratuities to all top management to implementers and to stakeholders through face-to-face or virtual means.
2. Dissemination of business ethics and business behavior by the top management of each unit in their respective units.
3. Inclusion of business ethics and business behavior in the Contact Internal Media as a means of dissemination and communication for the Company's extended family.
4. Dissemination through *e-office* media, *e-mail broadcast* mailing lists, banners, social media, and mass media.

Upaya Penerapan dan Penegakan Pedoman Perilaku [OJK F.24]

Secara terus-menerus, Perseroan upaya penegakkan Pedoman Perilaku Perseroan yang dilakukan melalui berbagai ketentuan, kegiatan, komitmen, serta pembentukan tim penegakkan Pedoman Perilaku. Untuk menunjukkan komitmen menerapkan Pedoman Perilaku, setiap insan KAI diwajibkan membaca serta memahami dengan baik Pedoman Perilaku dan menandatangani Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku. Para mitra kerja/rekanan Perseroan juga diwajibkan menandatangani Pakta Integritas, terutama bagi rekanan Perseroan yang bekerja sama dalam pengadaan barang dan/atau jasa. Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap pekerja untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pedoman Perilaku melalui manajemen atau melalui sarana *Whistleblowing System*.

Jenis Sanksi Pelanggaran Pedoman Perilaku

Perincian jenis sanksi pelanggaran pedoman perilaku adalah sebagai berikut:

Jenis Sanksi Pelanggaran Pedoman Perilaku

Pelanggaran Disiplin / Disciplinary Violation	Jenis Hukuman Disiplin / Types of Disciplinary Sanctions
Tingkat I / Level I	<ul style="list-style-type: none"> Teguran tertulis yang berlaku selama 6 (enam) bulan. / Written warning valid for 6 (six) months. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 10% selama 6 (enam) bulan. / Performance allowance cut of 10% for 6 (six) months.
Tingkat II / Level II	<ul style="list-style-type: none"> Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 20% selama 6 (enam) bulan. / Performance allowance cut of 20% for 6 (six) months. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 30% selama 6 (enam) bulan. / Performance allowance cut of 30% for 6 (six) months. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 40% selama 6 (enam) bulan. / Performance allowance cut of 40% for 6 (six) months.
Tingkat III / Level III	<ul style="list-style-type: none"> Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 60% selama 6 (enam) bulan. / Performance allowance cut of 60% for 6 (six) months. Demosi / Demotion
Tingkat Berat / Severe Level	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) / Termination of Employment

Efforts of the Code of Conduct Implementation and Enforcement [OJK F.24]

The Company carries out continuous efforts to enforce its Code of Conduct through various provisions, activities, commitments, and the establishment of a Code of Conduct enforcement team. In manifesting the commitment to implementing the Code of Conduct, every employee of KAI is required to read, comprehend the Code of Conduct and sign a Statement of Compliance with the Code of Conduct. The Company's work partners/partners are also required to sign an Integrity Pact, especially for the Company's partners who cooperate in the procurement of goods and/or services. The Company provides an opportunity for every employee to submit a report on alleged violations of the Code of Conduct through the management or the Whistleblowing System.

Types of Sanctions for Code of Conduct Violation

Details on the types of sanctions for code of conduct violation are as follows:

Types of Sanctions for Violating the Code of Conduct

BUDAYA PERUSAHAAN

Corporate Culture

Informasi terkait Budaya Perusahaan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan.

Information on Corporate Culture can be seen in the Company Profile Chapter.

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA

Policy on Performance-Based Long-Term Compensation

Sampai dengan tahun 2022, Perseroan belum memiliki kebijakan terkait pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja. Selain itu, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh pegawai dan/atau manajemen (ESOP/MSOP) mengingat Perseroan bukan merupakan Perusahaan Terbuka.

As of 2022, KAI does not yet have a policy regarding the provision of performance-based long-term compensation. In addition, KAI does not have a Employee and/or Management Stock Option Plan (ESOP/MSOP) as the Company is not a Public Company.

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA PELAKSANAANNYA

Policy on Information Disclosure of Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors and Its Implementation

Perseroan bukan merupakan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, tidak terdapat pengungkapan informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi, mencakup informasi setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham perusahaan.

The Company is not a public company, thus, there is no policy on information disclosure of share ownership by the Board of Commissioners and the Board of Directors, including information after the ownership or any changes in share ownership of the Company.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System

Demi melaksanakan nilai-nilai utama Perseroan secara konsisten, di samping sebagai penjagaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan menetapkan Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) dengan tujuan-tujuan sebagai:

1. Membangun dan menerapkan WBS untuk mempermudah Perseroan dalam menangani laporan-laporan pelanggaran sekaligus melindungi kerahasiaan identitas Pelapor serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya.
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini atas kemungkinan terjadinya dampak buruk akibat suatu pelanggaran.
3. Memperkuat upaya preventif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak reputasi Perseroan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dan menjaga serta melindungi aset dan/atau kepentingan Perseroan.
4. Meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada Pelapor dalam rangka pencegahan dan penyelesaian pelanggaran di lingkungan internal Perseroan.

To consistently implement the Company's core values while also maintaining and improving good corporate governance implementation, the Company has established a Whistleblowing System which aims to:

1. Develop and implement the WBS to facilitate the Company in handling violation report while protecting the confidentiality of the Whistleblower's identity and maintaining this information in a special archive that is guaranteed to be safe.
2. Ensure the availability of early detection mechanism for the possibility of adverse impacts resulting from violation.
3. Strengthen preventive efforts and encourage reporting on matters that can cause financial losses, including things that can damage the Company's reputation in order to provide excellent service to customers and maintain and protect the assets and/or interests of the Company.
4. Improve the supervisory system providing protection to the Whistleblower in preventing and resolving violations at the Company's internal environment.

5. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran sebagai dampak dari pengawasan oleh semua pihak.
6. Meningkatkan reputasi Perseroan.

Penerapan *Whistleblowing System* di lingkungan Perseroan diatur dalam Peraturan Direksi Nomor PER.U/KL.104/XI/1/KA-2020 tanggal 11 November 2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*).

Terkait hal tersebut, guna mendukung upaya Pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Perseroan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta 26 BUMN lainnya. Penandatanganan PKS Nomor 70 Tahun 2021 dan KL.705/III/2/KA-2021 tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Didiek Hartantyo dan Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Mochamad Hadiyana pada tanggal 2 Maret 2021, disaksikan oleh Ketua KPK Firlil Bahuri serta Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Adapun, PKS tersebut meliputi lingkup penyusunan dan/atau penguatan aturan internal Perseroan terkait penanganan pengaduan, komitmen pengelolaan penanganan pengaduan, penanganan pengaduan melalui aplikasi, koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan serta pertukaran data dan/atau informasi.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Insan Perseroan dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas tindakan yang dilakukan oleh Insan Perseroan yang berkaitan dengan dugaan:

1. Tindak pidana Korupsi, yang meliputi kerugian keuangan Perseroan, pemberian suap, penerimaan suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan/atau gratifikasi.
2. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
3. Pelanggaran pedoman perilaku dan/atau pelanggaran pedoman perilaku Perusahaan.
4. Pelanggaran disiplin Pekerja.

Selain dugaan sebagaimana dimaksud di atas, pengaduan dapat disampaikan berdasarkan informasi dan/atau tindakan yang merugikan Perusahaan.

5. Emerge a reluctance to commit violations as a result of supervision by all parties.
6. Improve the Company's reputation.

The implementation of the *Whistleblowing System* in the Company is regulated in the Board of Directors Regulation No, PER.U/KL.104/XI/1/KA-2020 dated November 11, 2020 concerning *Whistleblowing System Guidelines*.

In this regard, to support the Government's efforts to eradicate corruption, the Company and the Corruption Eradication Commission (KPK) signed a Cooperation Agreement (PKS) for Handling Complaints in Efforts to Eradicate Corruption Crimes together with the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) and 26 other SOEs. The signing of PKS No. 70 of 2021 and KL.705/III/2/KA-2021 was carried out by the President Director Didiek Hartantyo and KPK Deputy for Information and Data Mochamad Hadiyana on March 2, 2021, witnessed by KPK Chair Firlil Bahuri and SOE Minister Erick Thohir at Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

The scope of the PKS includes the preparation and/or strengthening of the Company's internal regulations regarding the handling of complaints, commitment to managing complaints, handling complaints through applications, coordination, and joint activities for handling complaints and exchanging data and/or information.

Types of Violations that Can Be Reported

The Company's personnel and/or the public may submit a Complaint for the actions taken by the Company's Personnel related to allegations of:

1. Corruption crime, which includes the Company's financial losses, giving of bribes, accepting of bribes, embezzlement in office, extortion, fraudulent acts, conflicts of interest and/or gratuities.
2. Other criminal acts related to corruption.
3. Violation of the Company's code of conduct and/or code of ethics.
4. Employee Disciplinary Violation.

In addition to the aforementioned allegations, reports can be submitted based on information/acts that are detrimental to the Company.

Penyampaian dan Penanganan Pengaduan [OJK F.24]

Pihak pelapor dapat menyampaikan pengaduan melalui mekanisme dan media yang telah disediakan oleh Perseroan, sebagai berikut:

- a. Surat dengan alamat pengiriman unit pengelola WBS: Unit *Quality Assurance and Good Corporate Governance*, Kantor Pusat KAI, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung.
- b. Surat elektronik dengan alamat kai-bersih@kai.id.
- c. Telepon, SMS atau Whatsapp ke nomor resmi WBS di 081214455300.

Mekanisme penyampaian pengaduan beserta penanganannya yang dilakukan Penyelenggara WBS adalah sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan pengaduan melalui media *Whistleblowing System* yaitu secara lisan, melalui surat, dan/ atau surat elektronik dengan alamat kai-bersih@kai.id.
2. Dalam hal pengaduan dilakukan secara lisan, Pelapor datang menghadap sendiri kepada Unit Pengelola WBS atau menghubungi melalui telepon.
3. Pengaduan yang disampaikan paling sedikit memuat:
 - a. Identitas jelas Pelapor.
 - b. Identitas jelas Terlapor.
 - c. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi.
 - d. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan.
 - e. Menyertakan nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
4. Dalam hal Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap namun materi laporan logis dan memadai maka laporan pelanggaran dapat ditindaklanjuti.
5. Unit Pengelola WBS yang terdiri atas Petugas Administrasi, Petugas Verifikasi, dan Penelaah melakukan administrasi, verifikasi dan telaah terhadap pengaduan yang disampaikan.
6. Laporan hasil telaah beserta dokumen terkait penanganan pengaduan disampaikan kepada Penanggung Jawab oleh Penelaah WBS.

Complaint Submission and Handling [OJK F.24]

Whistleblowers can submit their complaints through the mechanism and media provided by the Company, namely:

- a. Letter addressed to the WBS management unit, Quality Assurance and Good Corporate Governance Unit, Head Office of KAI, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung.
- b. Email submission to kai-net@kai.id.
- c. Call, SMS or Whatsapp to the official WBS number at 081214455300.

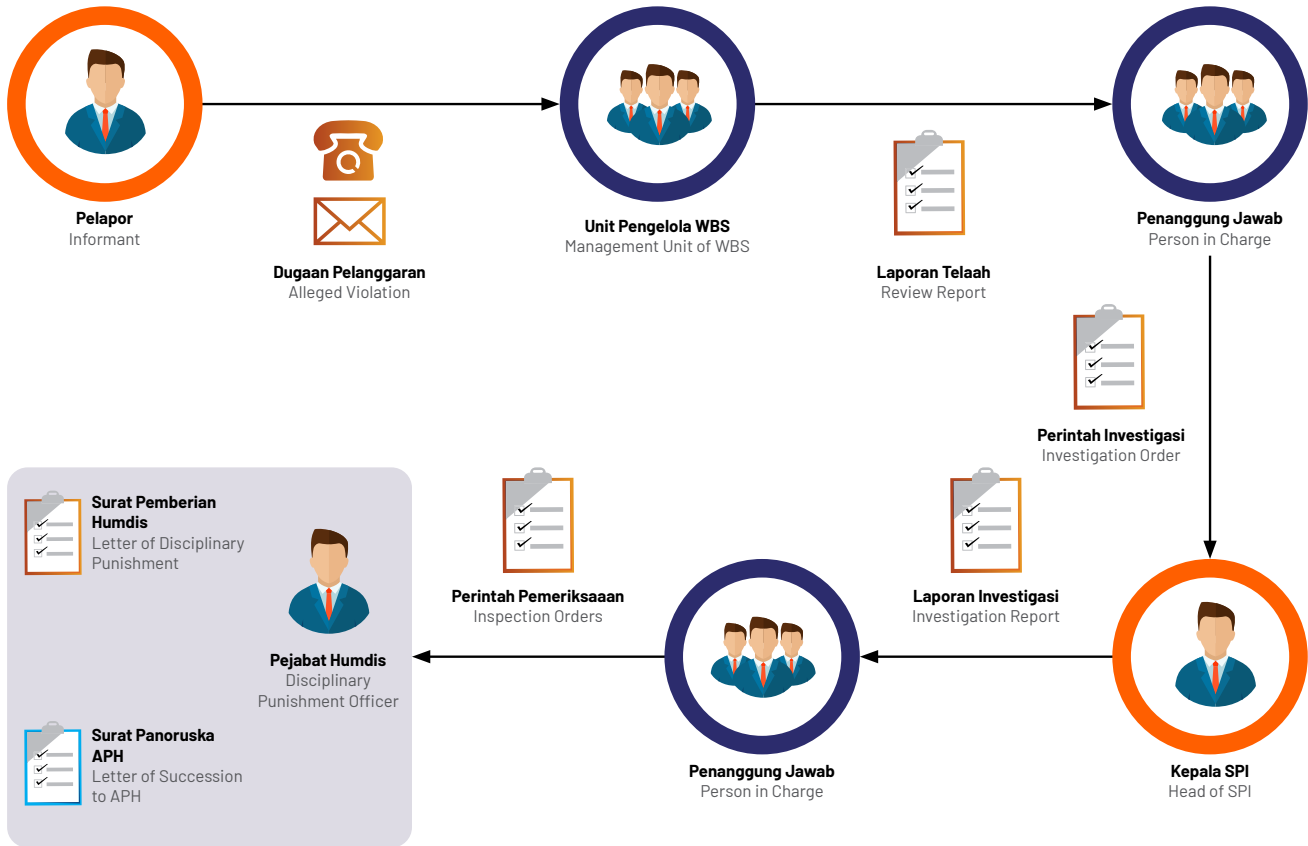
The mechanism of complaint submission and their handling carried out by the WBS Operator are as follows:

1. The whistleblower submits the complaint through the *Whistleblowing System* media verbally, by letter, and/or electronic to kai-net@kai.id.
2. In the event that the complaint is made verbally, the Whistleblower shall contact the WBS Management Unit in person or by telephone.
3. Complaint submitted must at least contain:
 - a. The Whistleblower's clear identity.
 - b. The Reported Party's clear identity.
 - c. Alleged violation must be accompanied by the time and place of the incident, reason for submitting the complaint, and how the violation occurred.
 - d. Evidence or information that can support the complaint submitted.
 - e. Name, address and contact number of other parties who can be asked for further information to strengthen the Whistleblower's complaint.
4. In the event that the Whistleblower does not include his/ her identity completely but the report material is logical and adequate, the violation report can be followed up.
5. The WBS Management Unit consisting of Administrative Officers, Verification Officers, and Reviewers conduct administration, verification and review of submitted complaints.
6. Report on the results of the review along with documents related to the handling of complaints is submitted to the Party in Charge by the WBS Reviewer.

7. Dalam hal Terlapor merupakan Direksi, Penelaah WBS menyampaikan laporan hasil telaah pengaduan kepada Dewan Komisaris.
 8. Dalam hal Terlapor merupakan Dewan Komisaris, Penelaah menyampaikan laporan hasil telaah pengaduan kepada pemegang saham Perseroan melalui penanggung jawab WBS.
 9. Berdasarkan laporan hasil telaah Penanggung jawab WBS meminta Kepala Satuan Pengawas Intern untuk melakukan audit investigatif. Dalam hal berdasarkan hasil audit investigatif disimpulkan terdapat dugaan penyimpangan dan/atau pelanggaran, penanggung jawab WBS selanjutnya meneruskan hasil audit investigatif kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin Pekerja.
 10. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin Pekerja melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin berdasarkan laporan hasil audit investigatif.
 11. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin perbuatan Terlapor diduga merupakan tindak pidana maka Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin Pekerja atau kuasanya melaporkan kepada APH.
 12. Tindak lanjut hasil telaah untuk pengaduan dengan Terlapor Direksi ditentukan oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Tindak lanjut hasil telaah untuk pengaduan dengan Terlapor Dewan Komisaris ditentukan oleh pemegang saham Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Pengawas WBS melakukan pengawasan penanganan dan tindak lanjut pengaduan pada setiap tahapan.
 15. Hasil verifikasi pengaduan sebagaimana harus disampaikan kepada pengawas WBS.
 16. Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada penanggung jawab WBS dan Unit Pengelola WBS.
7. In the event that the Reported Party is a Board of Directors member, the WBS Reviewer submits a report on the results of the complaint review to the Board of Commissioners.
 8. In the event that the Reported Party is a Board of Commissioners, the Reviewer shall submit a report on the results of the complaint review to the shareholders of the Company through the party in charge of WBS.
 9. Based on the report on the results of the review, the party in charge of WBS requests the Internal Audit Unit Head to conduct an investigative audit. In the event that the results of the investigative audit conclude that there are allegations of irregularities and/or violations, the party in charge of the WBS will then forward the results of the investigative audit to the official authorized to impose disciplinary sanctions on the Employee.
 10. Officials authorized to impose disciplinary sanctions. Employees carry out investigations of alleged disciplinary violations based on reports on the results of the investigative audit.
 11. In the event that the results of the audit conclude that the disciplinary action of the Reported Party is suspected to be a criminal act, the authorized official shall impose a disciplinary sanction on the Employee or his/her proxies shall to report to the APH.
 12. Follow-up on the results of the review for complaints with the Board of Directors member as the Reported Party is determined by the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the Company's articles of association and the laws and regulations.
 13. Follow-up on the results of the review for complaints with the Board of Commissioners member as the Reported Party is determined by the shareholders of the Company in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the laws and regulations.
 14. WBS supervisor shall supervise the handling and follow-up of complaints at each stage.
 15. The results of the complaint verification must be submitted to the WBS supervisor.
 16. The results of the supervision are submitted to the party in charge of WBS and the WBS Management Unit.

Penanganan pengaduan WBS dijelaskan melalui alur bagan sebagai berikut:

Penanganan Pengaduan WBS



The WBS complaint handling is described in the following flow chart:

The WBS complaint handling

Perlindungan Bagi Whistleblower

Melalui penerapan *Whistleblowing System*, Perseroan menjamin pemberian hak bagi pihak pelapor dengan uraian berikut:

1. Memantau perkembangan laporan pelanggaran.
2. Dirahasiakan dan/atau disamarkan identitasnya, dengan cara:
 - a. Membuat nama samaran yang hanya diketahui oleh Pelapor.
 - b. Menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas Pelapor.
 - c. Tidak memberitahukan data-data pribadi, seperti nama Pelapor, atau hubungan Pelapor dengan Terlapor.
 - d. Tidak memberitahukan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan.
3. Mendapat keringanan dalam hal turut terlibat dalam perkara yang dilaporkan.
4. Menghadirkan saksi yang mengetahui atau memiliki informasi tentang terjadinya pelanggaran.
5. Mendapat perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Whistleblower Protection

Through the implementation of the *Whistleblowing System*, the Whistleblower who submit complaint has the right to:

1. Monitor the progress of violation reports.
2. Maintain their confidentiality and/or disguised their identity, by:
 - a. Creating a pseudonym only known by the Whistleblower.
 - b. Using a unique name/identity and not disclosing the Whistleblower's identity
 - c. Not disclosing personal data, such as the name of the Whistleblower, or the relationship between the Whistleblower and the Reported Party.
 - d. Not disclosing data/information that enables other people to track them.
3. Obtain relief in case of being involved in the reported case.
4. Present witnesses with knowledge or information on the occurrence of violations.
5. Obtain protection according to the laws and regulations.

Akan tetapi, perlindungan dapat ditolak atau dihentikan dalam hal Pelapor, jika:

1. Tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas diri dan laporannya;
2. Terbukti laporan pelanggaran yang disampaikan fitnah atau mempunyai tujuan yang menyimpang dari tujuan penyelenggaraan WBS.

Pengelola Laporan Pelanggaran

Laporan pengaduan dikelola oleh unit pengelola WBS Perseroan yaitu *Unit Quality Assurance and Good Corporate Governance* (QA & GCG) yang melaksanakan fungsi untuk memastikan pengelolaan WBS terimplementasi secara menyeluruh dan efektif. Selain sebagai pengawas implementasi pengelolaan WBS perusahaan, Unit QA & GCG juga memiliki fungsi sebagai pengelola administrasi (pengelola laporan masuk) dan Verifikator Kasus untuk diserahkan kepada pihak penelaah.

Proses pengelolaan WBS terdiri dari proses awal laporan masuk (petugas administrasi dan verifikator oleh Unit *Quality Assurance & Good Corporate Governance* (QA & GCG), dan dilanjutkan ke penelaah di bawah Unit *Corporate Secretary*. Hasil telaah kemudian disampaikan kepada Direktur Utama sebagai Penanggung Jawab WBS. Berdasarkan laporan hasil telaah, Penanggung jawab WBS meminta Kepala Satuan Pengawas Intern untuk melakukan audit investigatif. Apabila berdasarkan hasil audit investigatif disimpulkan terdapat dugaan penyimpangan dan/atau pelanggaran, penanggung jawab WBS akan meneruskan hasil audit investigatif kepada pejabat yang berwenang untuk dapat memberikan hukuman disiplin pekerja. Masing-masing laporan pengaduan dan hasil investigasi akan didokumentasikan oleh petugas database WBS.

Proses Pengelolaan Kasus Dugaan pelanggaran melibatkan peran berbagai unit yang berfungsi sebagai Administrasi, Verifikator Kasus, Penelaah, Pengawas (Pemeriksaan Lanjut oleh Satuan Pengawas Internal), Pejabat Penindak Hukuman serta Penanggung Jawab (Direktur Utama). Unit QA & GCG memiliki fungsi sebagai pihak yang memastikan pengelolaan penerapan WBS korporasi diterapkan secara baik. Selain itu, Unit QA & GCG juga memiliki peran sebagai Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi. Adapun, fungsi sebagai pihak penelaah dilaksanakan oleh Unit *Corporate Secretary*.

However, protection can be refused or terminated in the event that the Whistleblower:

1. Does not perform their obligations in maintaining the confidentiality of their identity and report;
2. Is proven that their violation report is slanderous or has a purpose that deviates from the WBS implementation objectives.

Party in Charge of Violation Report

Complaint reports are managed by the WBS management unit, namely the Quality Assurance and Good Corporate Governance (QA & GCG) unit which function to ensure that WBS management is implemented. Apart from supervising the implementation of the Company's WBS management, the QA & GCG Unit also has functions as administrative officer (management of incoming reports) and Case Verifier to be submitted to the Reviewer.

The WBS management process consists of the initial process of incoming reports (administrative officers and verified by the Quality Assurance & Good Corporate Governance (QA & GCG) to be followed up by the reviewer under the Corporate Secretary Unit). The results of the review are submitted to the President Director as the Party in Charge of WBS. Based on the report on the results of the review, the party in charge of WBS shall request the Internal Audit Unit Head to conduct an investigative audit. In the event that the results of the investigative audit conclude that there are allegations of irregularities and/or violations, the party in charge of the WBS then forwards the results of the investigative audit to the official authorized to impose disciplinary sanction on the Employee. Each complaint report and result of the investigation will be documented by the WBS database officer.

The Process of Management of Cases of Alleged Violations involves the roles of various units that function as Administration, Case Verifier, Reviewer, Supervisor (Further Examination by Internal Audit Unit), Official Imposing the Sanction, and the Party in Charge (President Director). The QA & GCG Unit functions to ensure the corporate WBS is well-implemented. In addition, the QA & GCG Unit also has a role as: Administrative Officer and Verifier, while the Corporate Secretary Unit function as reviewer.

Sosialisasi Whistleblowing System

Perseroan akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui WBS sehingga dapat mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal itu, telah dilakukan langkah-langkah optimalisasi sebagai berikut:

1. Menyampaikan materi *Whistleblowing System* melalui *in-class training* kepada calon pegawai dan pegawai.
2. Melakukan sosialisasi *Whistleblowing System* kepada seluruh pegawai dan kepada mitra kerja di Lingkungan Perseroan.
3. Memasang poster dan banner *Whistleblowing System* di Daop, Divre dan Lingkungan Kantor Pusat KAI.
4. Perluasan pelapor dengan memberikan kesempatan pihak eksternal untuk melaporkan pengaduan.
5. Sosialisasi ke pihak eksternal atau *stakeholders* melalui media sosial, *website*, saat proses pengadaan barang dan jasa, proses perjanjian kontrak dan media massa.
6. Membangun dan mengembangkan Aplikasi WBS yang digunakan sebagai media pelaporan serta penanganan dugaan penyimpangan/pelanggaran bagi Perseroan.

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan [OJK F.24]

Jumlah pengaduan dan proses pengaduan WBS untuk tahun 2022 dapat dilihat di dalam tabel berikut:

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Tahun / Year	Jumlah Laporan WBS / Total WBS Reports	Media				Status			
		Email	Surat / Letter	Lisan / Verbal	Telepon/ Whatsapp / Telephone/ Whatsapp	Tidak Terbukti/ Bukan WBS/ / Not Proven/ Non-WBS	Proses Investigasi / Investigation Process	Ditutup dengan Rekomendasi / Closes with Recommendations	Penetapan Keputusan Sanksi / Sanction Imposed
2022	12	5	3	-	4	6	1	3	2

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan di Tahun 2022

Selama tahun 2022, unit pengelola WBS menerima 12 laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan melalui media WBS (email, surat dan nomor telepon). Dari laporan tersebut, sebanyak 5 item pengaduan yang terbukti, 1 item pengaduan dalam proses investigasi, dan 6 item pengaduan yang tidak terbukti atau bukan termasuk kategori pelanggaran WBS.

Whistleblowing System Dissemination

The Company always strives to improve employee understanding and concern for reporting violations through the WBS so as to create a work environment with integrity and sound condition. In this regard, the following optimization measures have been taken:

1. Delivering Whistleblowing System materials through *in-class training* to prospective employees and employees.
2. Disseminating the Whistleblowing System to all employees and partners of the Company.
3. Installing posters and banners for the Whistleblowing System in Daop, Divre and Head Office of KAI.
4. Expanding the scope of whistleblowers by providing opportunities for external parties to submit complaints.
5. Disseminating to external parties or *stakeholders* through social media, websites, during the process of procurement of goods and services, contract agreement processes and mass media.
6. Build and develop the WBS Application which is used as a media for reporting and handling alleged irregularities/ violations for the Company.

Number of Complaints and Complaints Processed [OJK F.24]

The number of complaints and complaints processed in 2022 can be seen in the following table:

Number of Complaints and Complaints Processed

Sanctions/Follow-Up on Complaints in 2022

During 2022, the WBS management unit received 12 reports of alleged violations submitted via WBS media (email, letter and phone). Of the report, 5 complaints were proven, 1 complaint was still under investigation, and 6 complaints were not proven or were not qualified as WBS violations.

Terhadap kasus yang terbukti, 3 item diantaranya telah ditutup dengan rekomendasi perbaikan terhadap pihak terkait, sedangkan terhadap 2 item pengaduan lainnya, petugas yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin telah melaporkan kepada Direktur Utama untuk diproses tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di Perusahaan.

Pada tahun 2022, terdapat 12 (dua belas) laporan dugaan pelanggaran dengan status:

1. 6 (enam) laporan dugaan pelanggaran tidak terbukti/ bukan WBS/dihentikan;
2. 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran dalam proses investigasi.
3. 3 (tiga) laporan dugaan pelanggaran ditutup dengan rekomendasi kepada Unit terkait.
4. 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran penetapan keputusan sanksi.

For proven cases, 3 items have been closed with recommendations for improvement to related parties, while for other 2 other complaint items, the officer authorized to impose disciplinary sanctions has reported to the President Director for follow-up processing in accordance with applicable regulations. Personnel of the Company who are proven to have committed a violation will be subject to sanctions in accordance with the provisions of the Company.

In 2022, there are 12 (twelve) reports of alleged violations with the following status:

1. 6 (six) reports of alleged violations not proven/not WBS/ not processed;
2. 1 (one) report of alleged violation in the investigation process.
3. 3 (three) reports of alleged violations were closed with recommendations to the relevant Unit.
4. 2 (two) reports of alleged violations imposed of sanctions.

PROGRAM ANTI KORUPSI

Anti-Corruption Program

Program dan Prosedur yang Dilakukan Dalam Mengatasi Praktik Korupsi

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Pada tahun 2016, International Organization for Standardization (ISO) secara resmi menerbitkan ISO 37001:2016 yaitu Sistem Manajemen Anti Suap (*anti-bribery*) yang dirancang untuk membantu organisasi menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program kepatuhan anti suap. Hal tersebut secara mendasar dilatarbelakangi oleh penilaian bahwa praktik penyuapan merupakan fenomena yang meluas, hingga dapat menghadirkan masalah serius pada lingkup sosial, moral, ekonomi, dan politik.

Kementerian BUMN mewajibkan seluruh BUMN untuk mengimplementasi Sistem Manajemen Anti-Suap (SMAP) berdasarkan SNI ISO 37001:2016. Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut, Perseroan mengimplementasikan SMAP dengan menerbitkan kebijakan SMAP dan menetapkan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor PER.U/KC.202/IV/1/ KA-2020 tanggal 14 April 2020 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Programs and Procedures to Overcome Corruption Practices

Anti-Bribery Management System

In 2016, the International Organization for Standardization (ISO) officially published ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System designed to support organizations establish, implement, maintain, and improve anti-bribery compliance programs. This is fundamentally motivated by the assessment that the practice of bribery is a widespread phenomenon, so that it can present serious problems in the social, moral, economic and political scope.

The Ministry of SOE requires all SOEs to implement an Anti-Bribery Management System (SMAP) based on SNI ISO 37001:2016. In this regard, the Company implemented SMAP by issuing an SMAP policy and establishing an Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) which is regulated in Board of Directors Regulation No. PER.U/KC.202/IV/1/KA-2020 dated April 14, 2020 concerning Anti-Bribery Management System.

Perseroan menerapkan SMAP dengan prinsip *zero tolerance* terhadap tindakan penyuapan. Perseroan melarang keras penyuapan dan korupsi dalam bentuk apa pun. Lebih dari itu, penerapan SMAP Perseroan juga memiliki sasaran untuk menanamkan budaya integritas dan mencegah terjadinya penyuapan dan tindak pidana korupsi lainnya.

Kebijakan SMAP Perseroan merupakan pedoman langkah-langkah yang wajar dan proporsional untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyuapan. Melalui penerapan kebijakan SMAP, Perseroan berkomitmen untuk berbisnis dan beroperasi dengan integritas setiap saat. Perseroan tidak memberi toleransi bagi praktik korupsi atau penyuapan, dan berkomitmen penuh membangun budaya AKHLAK untuk mewujudkan KAI Bersih, Bebas Suap, Bebas Korupsi.

Pada tahun 2021 Perusahaan melakukan pengembangan lingkup penerapan SMAP ISO 37001:2016 di lingkup korporasi dengan sampling yang diambil adalah Pusat (seluruh direktorat di Kantor Pusat) dan Daerah (Daop 3 Cirebon, Divre III Palembang, dan Balai Yasa Manggarai) untuk penerapan Lingkup Corporate.

Persiapan yang dilakukan mencakup 3 (tiga) Fase yaitu :

a. Fase/Tahap Perencanaan

Kick Off Meeting, Tinjauan Awal Penerapan, *Awariness*, Pengetahuan Risiko

b. Fase/Tahap Pengembangan dan Penerapan

Pengembangan dokumen yang diperlukan untuk persyaratan, uji kelayakan (*due diligent*)

c. Fase/Tahap Evaluasi

- i. Audit Internal (Sosialisasi dan pelatihan persiapan untuk Audit Internal, Pelaksanaan Audit Internal, Perbaikan Temuan Audit, Tinjauan Manajemen)
- ii. Audit Eksternal (Proses yang dilakukan di Tahun 2022 untuk kegiatan Persiapan dan Pelaksanaan Sertifikasi Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO SNI 37001:2016 di level korporasi)

Pada tahun 2020, Perusahaan telah mendapatkan sertifikasi SMAP pada 2 (dua) Unit yaitu Unit Quality Assurance and GCG dan unit Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan SNI ISO 37001:2016. Selanjutnya pada tahun 2022, Perseroan menerima Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan lingkup *Corporate* yang merupakan perluasan lingkup implementasi dari tahun sebelumnya. Sertifikasi lingkup *corporate* dengan sampling audit yang meliputi 20

The Company implements SMAP with the principle of zero tolerance for bribery. The Company strictly prohibits bribery and corruption in any form. In addition, the implementation of the Company's SMAP also aims to instill a culture of integrity and preventing bribery and other acts of corruption.

The Company's SMAP policy is a guideline for reasonable and proportionate measures to prevent, detect and respond to bribery. Through the implementation of the SMAP policy, the Company is committed to conduct business and operate with integrity at all times. The Company does not tolerate corruption or bribery, and is fully committed to building the AKHLAK culture to create a clean, bribe-free, corruption-free KAI.

In 2021, the Company developed the implementation scope of SMAP ISO 37001:2016 in the corporate sphere with samples taken from the Central scope (all directorates at the Head Office) and Regional scope (Daop 3 Cirebon, Divre III Palembang, and Balai Yasa Manggarai) for the implementation of the Corporate Scope.

The preparation includes 3 (three) phases, namely:

a. Planning Phase/Stage

Kick off Meeting, Initial Implementation Review, Awareness, Risk Knowledge

b. Development and Implementation Phase/Stage

Development of documents required for requirements, due diligence.

c. Evaluation Phase/Stage

- i. Internal Audit (Dissemination and preparatory training for Internal Audit, Implementation of Internal Audit, Improvement of Audit Findings, Management Review)
- ii. External Audit (Process carried out in 2022 for the preparation and implementation of ISO SNI 37001:2016 Anti-Bribery Management System Implementation Certification at the corporate level)

In 2020, the Company has obtained SMAP certification for 2 (two) units, namely the Quality Assurance and GCG Unit and the Goods and Services Procurement Unit based on SNI ISO 37001:2016. Furthermore, in 2022, the Company received an ISO 37001:2016 Certificate for the Corporate scope of the Anti-Bribery Management System, which is an expansion of the scope of implementation from the previous year. Corporate scope certification with audit sampling covering 20 (twenty)

(dua puluh) Unit Kantor Pusat, DAOP 3 Cirebon, DIVRE III Palembang, dan Balai Yasa Manggarai, diterima Perusahaan setelah melalui beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, pengembangan dan implementasi, serta evaluasi melalui audit internal dan audit eksternal oleh PT Tuv Nord Indonesia. Penyerahan sertifikat ini menjadi hadiah bagi KAI yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-77 pada 28 September 2022. Dengan bertambahnya usia, KAI akan terus wujudkan KAI Bersih, Bebas Suap, Bebas Korupsi untuk Indonesia.

Perseroan berupaya untuk mencegah terjadinya korupsi dengan melakukan kajian risiko terhadap segala potensi terjadinya korupsi di dalam bisnis KAI. Kajian risiko dilakukan melalui sampling yang meliputi 20 (dua puluh) Unit Kantor Pusat. Sedangkan sampling yang dilakukan di kantor dan daerah meliputi DAOP 3 Cirebon, DIVRE III Palembang, dan Balai Yasa Manggarai. Berdasarkan hasil kajian tersebut, ditemukan bahwa sebesar 16% total risiko signifikan berada di kantor pusat dan 2% berada di kantor daerah, atau mencakup 12% dibandingkan keseluruhan lingkup operasional KAI. KAI telah menetapkan rencana mitigasi untuk menurunkan tingkat risiko yang masuk dalam kategori signifikan tersebut.

KAI menerapkan rencana mitigasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan Anti Penyuapan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditandatangani oleh seluruh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penandatanganan *Code of Conduct* bagi seluruh Insan KAI setiap tahun sekali yang memuat kewajiban untuk:
 - a. Bertindak sesuai pedoman perilaku.
 - b. Menjalankan proses bisnis perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
 - c. Menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 - d. Tidak melakukan tindakan penyuapan yaitu menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, atau meminta keuntungan/sesuatu yang tidak semestinya dalam lingkup pekerjaan.
 - e. Melaporkan setiap pelanggaran yang kami saksikan kepada otoritas yang berwenang atau media *Whistleblowing System*.
 - f. Menolak dan melaporkan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban.
 - g. Menerima konsekuensi jika melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Head Office Units, DAOP 3 Cirebon, DIVRE III Palembang, and Balai Yasa Manggarai, received by the Company after going through several stages which include planning, development and implementation, as well as evaluation through internal audits and external audit by PT Tuv Nord Indonesia. Submission of this certificate was also in commemoration of KAI's its 77th Anniversary on September 28, 2022. With age, KAI will continue to make KAI Clean, Free of Bribery, Free of Corruption for Indonesia.

The Company strives to prevent corruption by conducting risk assessment of all potential corruption in KAI's business. The risk study was carried out through sampling which included 20 (twenty) Head Office Units as well as offices and regions including DAOP 3 Cirebon, DIVRE III Palembang, and Balai Yasa Manggarai. The assessment concluded that 16% of the total significant risks were at the head office and 2% were at the regional offices, or covering 12% of the overall operational scope of KAI. KAI has established a mitigation plan to reduce the level of risk that falls into the significant category.

KAI's mitigation plan covers the following:

1. Established the PT Kereta Api Indonesia (Persero) Anti-Bribery Policy which was signed by the entire Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
2. Implemented annual signing of the Code of Conduct for all KAI personnel which contains the obligation to:
 - a. Act according to the code of conduct.
 - b. Run the company's business processes based on the principles of Good Corporate Governance.
 - c. Avoid activities that may cause a conflict of interest.
 - d. Not take bribery, namely offering, promising, giving, receiving, or asking for benefits/something that is not appropriate within the scope of work.
 - e. Report any violations that we witness to the competent authorities or the Whistleblowing System media.
 - f. Refuse and report gratuities related to position and contrary to obligations.
 - g. Accept the consequences if you violate company regulations and applicable laws.

3. Kewajiban bagi seluruh Mitra Bisnis untuk menandatangani Pakta Integritas dan komitmen anti penyuapan pada seluruh proses kerja sama yang dilakukan dengan Perseroan, sesuai dengan standar ISO 37001:2016 Sisten Manajemen Anti Penyuapan yang telah diterapkan di Perseroan.
4. Secara kontinyu melakukan uji kelayakan kepada seluruh Mitra Bisnis yang melakukan kerja sama dengan Perseroan, sesuai dengan standar ISO 37001:2016 Sisten Manajemen Anti Penyuapan yang telah ditetapkan Perseroan.
5. Sosialisasi, diseminasi dan internalisasi tentang antikorupsi secara rutin dan menyeluruh bagi kepada *stakeholders* Perseroan.

Whistleblowing System TPK Terintegrasi

Untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Perseroan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta 26 BUMN lainnya. Penandatanganan PKS Nomor 70 Tahun 2021 dan KL.705/III/2/KA-2021 tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Didiek Hartantyo dan Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Mochamad Hadiyana pada tanggal 2 Maret 2021, disaksikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri serta Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Kerja sama ini mencakup integrasi penanganan pengaduan melalui *Whistleblowing System* antara KPK dan KAI, yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta menghindari adanya duplikasi pada penanganan pengaduan. Sinergi dengan KPK ini merupakan langkah KAI dalam memerangi praktik-praktik tindak pidana korupsi, yang berisiko terjadi di Perseroan. Hal ini juga menunjukkan komitmen KAI sebagai perusahaan publik yang senantiasa mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Di samping itu, integrasi ini akan memudahkan koordinasi dan *monitoring* penanganan pengaduan antara KAI dan KPK.

Adapun, lingkup penerapan PKS tersebut mencakup penyusunan dan/atau penguatan aturan internal Perseroan terkait penanganan pengaduan, komitmen pengelolaan penanganan pengaduan, penanganan pengaduan melalui aplikasi, koordinasi, dan kegiatan bersama penanganan pengaduan serta pertukaran data dan/atau informasi.

3. Obligation for all Business Partners to sign the Integrity Pact and anti-bribery commitment in all processes of cooperation carried out with the Company, in accordance with ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System standards that have been implemented in the Company.
4. Continuously conducting due diligence on all Business Partners who cooperate with the Company, in accordance with the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System standards set by the Company.
5. Conducting outreach, dissemination and internalization of anti-corruption regularly and comprehensively for the Company's stakeholders.

Integrated TPK Whistleblowing System

To support the Government's efforts to eradicate corruption, the Company and the Corruption Eradication Commission (KPK) signed a Cooperation Agreement (PKS) for Handling Complaints in Efforts to Eradicate Corruption Crimes together with the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) and 26 other SOEs. The signing of PKS No. 70 of 2021 and KL.705/III/2/KA-2021 was carried out by the President Director Didiek Hartantyo and KPK Deputy for Information and Data Mochamad Hadiyana on March 2, 2021, witnessed by KPK Chair Firli Bahuri and SOE Minister Erick Thohir at Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

This collaboration includes the integration of complaint handling through the *Whistleblowing System* between the KPK and KAI, which aims to build and improve effectiveness, efficiency, and avoid duplication in handling complaints. This synergy with the KPK is KAI's effort in combating corrupt practices at risk of occurring at the Company. This also shows KAI's commitment as a company that always prioritizes good corporate governance. In addition, this integration will facilitate coordination and monitoring of complaint handling between KAI and the KPK.

The scope of the PKS includes the preparation and/or strengthening of the Company's internal rules regarding the handling of complaints, commitment to managing complaints, handling complaints through applications, coordination and joint activities for handling complaints and exchanging data and/or information.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI [OJK F.24]

Gratuity Policy [OJK F.24]

Perseroan berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang bersih, bebas dari korupsi, dan melaksanakan nilai integritas bagi peningkatan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Salah satu perangkat untuk mendukung komitmen tersebut adalah kebijakan penanganan gratifikasi yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor PER.U/ KC.202/XI/1/ KA-2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi bertujuan untuk memberikan pedoman, pemahaman, dan sikap yang sama terhadap praktik-praktik gratifikasi di lingkungan Perseroan, mencegah insan KAI terjerat dalam praktik gratifikasi yang termasuk suap, serta memberi petunjuk dalam mengidentifikasi dan memetakan kerawanan penerimaan gratifikasi di lingkungan Perusahaan berdasarkan data pelaporan gratifikasi. Setiap bentuk gratifikasi yang diterima ataupun ditolak, wajib disampaikan dan dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Tindak pelanggaran terkait hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan Perseroan yang berlaku.

Kewajiban Insan Perusahaan Terhadap Gratifikasi

Insan Perusahaan memiliki kewajiban untuk:

- Menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan;
- Melaporkan penolakan Gratifikasi kepada UPG; dan
- Melaporkan penerimaan Gratifikasi yang tidak dapat ditolak melalui UPG atau secara langsung kepada KPK.

Gratifikasi yang tidak dapat ditolak merupakan gratifikasi yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
- Pemberi gratifikasi tidak diketahui;
- Penerima gratifikasi ragu dengan kategori gratifikasi yang diterima; dan/ atau
- Terdapat kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, antara lain dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri, karier penerima, dan/atau ada ancaman lain.

The Company is committed to realizing corporate management that is clean, free from corruption, and implementing integrity values to improve the implementation of Good Corporate Governance. One of the tools to support this commitment is the gratuity handling policy which is regulated in Board of Directors Regulation No. PER.U/KC.202/XI/1/KA-2020 concerning Gratuity Control Guidelines.

The Gratuity Control Guidelines aim to provide guidelines, understanding, and mutual attitude towards gratuity practices at the Company, prevent KAI personnel from being involved in gratuity practices that are considered bribes and provide instructions for identifying and mapping the vulnerability of gratuity acceptance at the Company based on gratuity reporting data. Every form of gratuity that is accepted or rejected, must be submitted and reported to the Gratuity Control Unit (UPG). Violations will be subject to sanctions in accordance with the applicable laws and regulations of the Company.

Obligation of Company Personnel Against Gratuity

Personnel of the Company is obliged to:

- Refuse Gratuity related to position and contrary to the obligations or duties concerned;
- Report Gratuity rejection to the UPG; and
- Report Gratuity receipts that cannot be refused through the UPG or directly to the KPK.

Gratuities that cannot be refused must meet the following conditions:

- Gratuity is not received directly;
- Gratuity giver is unknown;
- Gratuity recipients doubt the category of gratuity received; and/or
- Certain conditions causing gratuity to cannot be refused, among others, causing damage to good institutional relations, endangering oneself, the recipient's career, and/or other threats.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Perseroan menerapkan prosedur pengelolaan pengendalian gratifikasi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Insan KAI yang menerima atau menolak Gratifikasi menyampaikan laporan Gratifikasi kepada UPG melalui menu E-Gratifikasi pada situs web <https://eoffice.kai.id>.
2. Laporan Gratifikasi paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelapor Gratifikasi berupa nama, tempat dan tanggal lahir, nomor induk kependudukan, nomor induk Pekerja/Pekerja PKWT/Direksi, unit kerja, jabatan, alamat surel, dan nomor telepon;
 - b. informasi pemberi Gratifikasi serta hubungan antara pemberi dengan Pelapor yang menerima/menolak Gratifikasi;
 - c. nama kegiatan, tanggal, tempat, dan waktu penerimaan atau penolakan Gratifikasi;
 - d. bentuk gratifikasi serta uraian jenis Gratifikasi yang diterima atau ditolak;
 - e. alasan pemberian Gratifikasi;
 - f. kronologis peristiwa penerimaan atau penolakan Gratifikasi;
 - g. nilai Gratifikasi yang diterima atau ditolak; dan
 - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi. Dalam hal Pelapor tidak memiliki akses situs web <https://eoffice.kai.id>, dapat menyampaikan laporan Gratifikasi melalui surel dengan alamat lapor.gratifikasi@kai.id.
3. Laporan Gratifikasi yang telah diterima UPG, dilakukan verifikasi untuk pemeriksaan kelengkapan. Laporan Gratifikasi yang dinyatakan lengkap dilanjutkan ke tahap analisis laporan Gratifikasi. Dalam hal laporan Gratifikasi tidak lengkap, maka laporan Gratifikasi disampaikan kembali kepada Pelapor untuk dilengkapi. Apabila laporan Gratifikasi tidak dilengkapi paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak objek Gratifikasi diterima Pelapor, maka laporan Gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti.
4. Laporan Gratifikasi yang telah diverifikasi dilakukan analisis laporan Gratifikasi yang merupakan kegiatan menelaah informasi yang diperoleh dari proses verifikasi untuk memperoleh akurasi informasi dan menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan.
5. Hasil analisis laporan Gratifikasi digunakan untuk menentukan laporan Gratifikasi ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti.
6. Laporan Gratifikasi ditindaklanjuti dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan kepemilikan objek Gratifikasi. Sedangkan untuk laporan Gratifikasi tidak ditindaklanjuti, UPG menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor Gratifikasi.

Gratuity Control Management

The Company implements gratuity control management procedures with the following description:

1. KAI personnel who accept or reject gratuity shall submit a gratuity report to UPG through the E-gratuity menu on the <https://eoffice.kai.id> website
2. The Gratuity Report shall at least contain:
 - a. Identity of the gratuity Reporter in the form of name, place and date of birth, identification number, identification number of Employee /Directors, work unit, position, email address, and telephone number;
 - b. information on the gratuity giver and the relationship between the giver and the Reporting Party who accepts/rejects the Gratuity;
 - c. name of activity, date, place and time of acceptance or rejection of Gratuity;
 - d. form of gratuity and description of the type of gratuity received or rejected;
 - e. reason for granting Gratuity;
 - f. chronological events of acceptance or rejection of Gratuity;
 - g. Gratuity value received or rejected; and
 - h. evidence, documents or supporting data related to the Gratuity report. In the event that the Reporting Party does not have access to the website <https://eoffice.kai.id>, they can submit the Gratuity report via email to report.gratification@kai.id.
3. Gratuity report received by the UPG is verified for completeness inspection. The Gratuity Report that has been declared complete will proceed to the Gratuity report analysis stage. In the event that the Gratuity report is incomplete, the Gratuity report is submitted back to the Reporting Party to be completed. If the Gratuity report is not completed no later than 30 (thirty) Business Days from the time the Gratuity object is received by the Reporting Party, the Gratuity report will not be followed up.
4. Verified Gratuity report is analyzed for Gratuity reports, which are activities to review the information obtained from the verification process to obtain information accuracy and determine the follow-up actions to be taken.
5. Result of the Gratuity report analysis is used to determine whether the Gratuity report is followed up or not followed up.
6. Gratuity report is followed up with further analysis to determine the ownership of the Gratuity object. As for the Gratuity report not being followed up, the UPG submits a notification letter to the Gratuity Reporter.

7. Laporan Gratifikasi ditindaklanjuti dapat diproses oleh KPK atau UPG.
8. Penetapan status kepemilikan barang Gratifikasi untuk laporan Gratifikasi yang diproses KPK ditentukan oleh KPK sedangkan penetapan status kepemilikan barang Gratifikasi untuk laporan Gratifikasi yang diproses UPG ditetapkan oleh pengelola UPG.

Pengelola Pelaporan Gratifikasi

Dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi, Perseroan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang terdiri atas:

1. Koordinator UPG : *Executive Vice President Corporate Secretary*; dan
2. Pengelola UPG : *Unit Quality Assurance and Good Corporate Governance*.

UPG Perseroan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi;
2. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi;
3. Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
4. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada Direktur Utama melalui koordinator UPG;
6. Melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada Insan KAI dan Pemangku Kepentingan;
7. Melakukan pemeliharaan objek Gratifikasi sampai dengan adanya ketetapan dari KPK; dan
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perusahaan.

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Perseroan secara konsisten berupaya untuk terus meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai untuk melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban. Perseroan juga terus berupaya untuk mencegah insan KAI terjerat dalam praktik gratifikasi yang dianggap suap.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang kebijakan gratifikasi serta mekanisme pelaporannya secara daring kepada Insan Perusahaan di seluruh Daerah Operasional, Divisi Regional, dan Balai Yasa Sarana.

7. Gratuity report that can be followed up can be processed by the KPK or UPG.
8. Determination of the ownership status of Gratuity goods for the Gratuity report processed by the KPK is determined by the KPK, while the determination of the ownership status of the Gratuity goods for the Gratuity report processed by the UPG is determined by the UPG manager.

Party in Charge of Gratuity Reporting

In supporting the effectiveness of the implementation of Gratuity control, the Company has established a Gratuity Control Unit (UPG) which consists of:

1. UPG Coordinator: *Executive vice President Corporate Secretary*; and
2. UPG Manager: *Quality Assurance and Good Corporate Governance Unit*.

The Company's UPG has the following duties and responsibilities:

1. Receive, analyze, and administer Gratuity acceptance reports;
2. Receive and administer Gratuity rejection reports;
3. Forward the Gratuity acceptance report to the Corruption Eradication Commission;
4. Periodically report the recapitulation of acceptance and rejection of Gratuity reports to the KPK;
5. Delivering the results of the management of Gratuity acceptance and rejection reports to the President Director through the UPG manager;
6. Dissemination of Gratuity provisions to KAI Personnel and Stakeholders;
7. Carry out maintenance of Gratuity objects until there is a decision from the KPK; And
8. Perform monitoring and evaluation in order to control Gratuity within the Company.

Dissemination of Gratuity Policy

The Company consistently strives to continue to improve employee understanding and awareness to report gratuity receipt related to positions and contrary to obligations. The Company also continues to strive to prevent KAI personnel from being entangled in gratuity practices that are considered bribes.

In 2022, dissemination activities have been carried out regarding the gratuity policy and online reporting mechanism to Company personnel in all Operational Areas, Regional Divisions and Balai Yasa Sarana.

No	Waktu dan/atau Tanggal / Time and/or date	Kegiatan / Activity	Jumlah Peserta / Total Participants	Tempat dan/atau media / Place and/or media
1.	Setiap Bulan / Monthly	Komik Uus dan QiQi / Comic Uus and QiQi	-	Tabloid Kontak
2.	14 Januari / January 14	Sosialisasi Pengisian LHKPN di KAI Wisata / Dissemination of LHKPN Filling at KAI Wisata	17	Offline dan Aplikasi Zoom / Offline and Zoom App
3.	14 Januari / January 14	Sosialisasi Pengisian LHKPN di KAI Logistik / Dissemination of LHKPN Filling at KAI Logistik	39	Offline dan Aplikasi Zoom / Offline and Zoom App
4.	18 Januari / January 18	Sosialisasi Pengisian LHKPN di KAI Bandara / Dissemination of LHKPN Filling at KAI Bandara	21	Aplikasi Zoom / Zoom App
5.	16 Februari / February 16	Sosialisasi LHKPN "Kupas Tuntas LHKPN" / LHKPN Dissemination "Comprehensive Discussion of LHKPN"	200	Aplikasi Zoom / Zoom App
6.	13 Mei / May 13	Sosialisasi GCG dan Whistleblowing System Divre I / Dissemination of GCG and Whistleblowing System at Divre I	14	Offline
7.	28 Juni / June 28	Sosialisasi GCG dan IIA Balai Yasa Lahat / GCG and IIA Dissemination at Balai Yasa Lahat	30	Offline
8.	5 Juli / July 5	Sosialisasi GCG dan IIA Balai Yasa SGU / GCG and IIA Dissemination at Balai Yasa SGU	28	Offline
9.	19 Juli / July 19	Sosialisasi GCG dan Fraud di Daop 3 Cn / Dissemination of GCG and Fraud at Daop 3 Cn	33	Offline
10.	22 Juli / July 22	Sosialisasi GCG dan Sistem Manajemen Mutu BY Tegal / Dissemination of GCG and Quality Management System at BY Tegal	21	Offline
11.	13 September / September 13	Sosialisasi GCG Divre I SU / GCG Dissemination at Divre I SU	24	Offline
12.	20 September / September 13	Sosialisasi GCG Daop 1 Jak / GCG Dissemination at Daop 1 Jak	24	Offline
13.	4 Oktober / October 4	Sosialisasi GCG Daop 7 Mn / GCG Dissemination at Daop 7 Mn	30	Offline
14.	4 Oktober / October 4	Sosialisasi GCG Daop 2 Bd / GCG Dissemination at Daop 2 Bd	25	Offline
15.	11 Oktober / October 11	Sosialisasi GCG Divre IV Tnk / GCG Dissemination Divre IV Tnk at	32	Offline
16.	25 Oktober / October 25	Sosialisasi GCG Divre II SB / GCG Dissemination at v	34	Offline
17.	26 Oktober / October 26	Sosialisasi GCG Daop 5 Pwt / GCG Dissemination at Daop 5 Pwt	29	Offline
18.	1 November / November 1	Sosialisasi GCG Daop 9 Jr / GCG Dissemination at Daop 9 Jr	30	Offline
19.	8 November / November 8	Sosialisasi GCG Daop 8 SB / GCG Dissemination at Daop 8 SB	37	Offline
20.	8 November / November 8	Sosialisasi GCG Divre III PG / GCG Dissemination at Divre III PG	31	Offline
21.	16 November / November 16	Supervisi LHKPN KAI Grup / LHKPN Supervision of KAI Group	10	Offline
22.	13 Desember / December 13	Sosialisasi GCG Daop 4 Sm / GCG Dissemination at Daop 4 Sm	20	Offline
23.	15 Desember / December 15	Hakordia KAI / Commemoration of World Anti-Corruption Day at KAI	525	Luring
24.	20 Desember / December 20	Sosialisasi GCG Daop 6 Yk / GCG Dissemination at Daop 6 Yk	38	Offline
25.	20 Desember / December 20	Sosialisasi GCG Daop 3 Cn / GCG Dissemination at Daop 3 Cn	22	Offline
26.	28 Desember / December 28	Sosialisasi GCG Balai Yasa Kac / GCG Dissemination at Balai Yasa Kac	11	Offline

Selain kegiatan sosialisasi, Perusahaan juga menyebarkan sosialisasi kebijakan gratifikasi melalui media *e-office* yang merupakan portal kepegawaian Perseroan, *e-mail milis broadcast*, tabloid internal KAI, media sosial dan media massa.

In addition, the Company also disseminates the gratuity policy through *e-office* media which include the Company's employment portal, *e-mail mailing list broadcast*, KAI's internal tabloid, social media, and mass media.

Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA)

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi dengan cara yang luar biasa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sebagai bentuk penyadaran publik dan pelibatan masyarakat maka tanggal 9 Desember telah ditetapkan sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia.

Hakordia tahun 2022 ini Perusahaan mengusung tema "Peran KAI dalam Indonesia Pulih, Bersatu Lawan Korupsi". Perusahaan berpartisipasi dalam rangkaian Hakordia yang di selenggarakan oleh KPK, selain itu Perusahaan juga membuat kegiatan untuk internal Perusahaan, dengan rincian sebagai Berikut:

- 1) 29 - 30 November, KAI Berpartisipasi dalam Kegiatan Hakordia di GOR Indoor Pemprov Sumut, Sumatera Utara. pada kegiatan ini KAI memperoleh sertifikat penghargaan sebagai Stand Terbaik Kategori BUMN, BUMD dan Universitas;
- 2) 5 - 6 Desember, KAI Berpartisipasi dalam Kegiatan Hakordia di area Gedung Sate, Jawa Barat. pada kegiatan ini KAI memperoleh sertifikat penghargaan Stan Terbersih;
- 3) 9 - 10 Desember, KAI Berpartisipasi dalam Kegiatan Pameran Integrity Expo Hakordia 2022 di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta; dan

15 Desember, KAI Group menggelar Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022 di Ruang Integritas, Kantor Pusat KAI, Bandung dengan mengundang narasumber dari Perwakilan KPK dan Kementerian BUMN. Kegiatan yang digelar dalam rangka wujud dukungan KAI menentang tindak korupsi di berbagai lini bisnis perusahaan tersebut, diikuti oleh jajaran BOD dan BOC, Kadaop/Kadivire, Direksi Anak Perusahaan, CDD, EVP, VP serta jajaran stakeholder KAI lainnya yang tergabung luring dan daring.

Laporan Gratifikasi Tahun 2022

Perseroan membuka saluran untuk melaporkan gratifikasi secara daring melalui menu e-gratifikasi yang dapat diakses melalui portal kepegawaian *E-Office*. Laporan gratifikasi dikelola oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KC.202/ XI/1/ KA-2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

World Anti-Corruption Day (HAKORDIA)

Corruption is an extreme crime that must be dealt through extraordinary measures by involving all elements of society. To raise public awareness and community involvement, December 9 has been designated as the World Anti-Corruption Day.

The Company's Hakordia 2022 commemoration carries the theme "The Role of KAI in the Recovery of Indonesia, United Against Corruption". The Company takes part in the Hakordia events organized by the KPK in addition to organized internal activities with the following details:

- 1) November 29-30, KAI Participated in Hakordia Activities at the North Sumatra Provincial Government Indoor Sports Hall, North Sumatra. in this activity KAI received an award as the Best Stand in the State-Owned Entity, Regional-Owned Entity and University category;
- 2) December 5 - 6, KAI Participated in Hakordia Activities in the Gedung Sate area, West Java. in this activity KAI received an award for the Cleanest Booth;
- 3) December 9-10, KAI Participated in the 2022 Hakordia Expo Integrity Exhibition at the Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta; And

On December 15, KAI Group held a World Anti-Corruption Day (Hakordia) 2022 event in the Integritas Room, KAI Head Office, Bandung by inviting speakers from KPK representatives and the Ministry of SOEs. The activity which was held as KAI's support against corruption in various lines of the Company's business, was attended by the BOD and BOC, Kadaop/ Kadivire, Directors of Subsidiaries, CDD, EVP, VP and other KAI stakeholders offline and online .

Gratuity Report In 2022

The Company opened a channel to report gratuities online through the e-gratification menu which can be accessed through the E-Office staffing portal. Gratuity reports are managed by the Gratuity Control Unit (UPG) which is determined by the Board of Directors in accordance with Directors Regulation No. PER.U/KC.202/XI/1/KA-2020 concerning Gratuity Control Guidelines.

Selama tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) laporan gratifikasi yang telah diproses dengan hasil sebagai berikut:

During 2022, there were 7 (seven) gratuity reports that have been processed with the following results:

Laporan Gratifikasi Tahun 2022

No	Jenis Pelaporan Gratifikasi / Type of Gratuity Report	Jumlah Pelaporan / Total Reports	Pemenuhan Unsur Gratifikasi Sesuai Pasal 12B Undang-Undang No. 20/2001 / Fulfillment of the Elements of Gratuity to Article 12B Law No. 20 of 2001						
			Memenuhi / Fulfilled		Tidak Memenuhi / Not Fulfilled				
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penerimaan / Reception	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Penolakan / Rejection	7	0	0	7	0	0	0	0
Jumlah / Total		7	0	0	7	0	0	0	0

Gratuity Report in 2022

Keterangan:

- (1) Dikelola instansi untuk disumbangkan ke yayasan
- (2) Milik negara
- (3) Dikelola instansi untuk barang display
- (4) Dikelola instansi untuk menunjang
- (5) Milik pelapor
- (6) Salah pelaporan

Description:

- (1) Managed by institution to be donated to foundation
- (2) State owned
- (3) Managed by institution for display goods
- (4) Managed by institution to support performance
- (5) Belongs to the reporter
- (6) Incorrect reporting

Pelatihan/Sosialisasi Anti-Korupsi Kepada Karyawan

Perseroan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai mengenai anti-korupsi, sebagai upaya berkelanjutan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, Perseroan melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada insan KAI dengan perincian sebagai berikut:

Anti-Corruption Training/Dissemination for Employees

The Company is committed to improving employee understanding and competence on anti-corruption to work environment with integrity and sound condition. In this regard, dissemination and training activities have been carried out for the Company's Personnel as follows:

Pelatihan/Sosialisasi Anti-Korupsi Kepada Karyawan

Anti-Corruption Training/Dissemination for Employees

No.	Materi Pelatihan/Sosialisasi / Training/Dissemination Materials
1	Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan/ISO 37001:2016. / Anti-Bribery Management System Training/ISO 37001:2016.
2	Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Junior Management Development Program (JMDP) Angkatan I Tahun 2022 / Distance Learning (PJJ) of Junior Management Development Program (JMDP) Batch I of 2022
3	Seminar dan Pelatihan National Conference IGRC 2022 Seri 3 / IGRC 2022 National Conference Seminar and Training Series 3
4	Seminar dan Pelatihan National Conference IGRC 2022 Seri 4 / IGRC 2022 National Conference Seminar and Training Series 4
5	Webinar Gratifikasi Talk (G-Talk): "Manajemen Risiko dan Identifikasi Titik Rawan Penerimaan Gratifikasi" / Webinar Gratuity Talk (G-Talk): "Risk Management and Identification of Vulnerable Points of Gratuity Acceptance"
6	Webinar Gratifikasi Talk (G-Talk): "peran medsos dalam pencegahan praktik gratifikasi melalui penguatan partisipasi publik" / Webinar Gratuity Talk (G-Talk): "the role of social media in preventing gratuity practices by strengthening public participation"
7	Workshop Verifikasi KPI Batch I yang akan difasilitasi oleh Next Idea Consultant / KPI Verification Workshop Batch I organized by Next Idea Consultant
8	Pluit Integritas Integritas Bacth 3 / Whistle of Integrity Batch 3

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Dengan mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015, Perseroan menerapkan pedoman tata kelola perusahaan terbuka dengan penjabaran sebagai berikut:

Implementation of Good Corporate Governance Guidelines for Public Companies

Pursuant to OJK Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015, the Company implements guidelines for public company governance with the following elaboration:

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of Good Corporate Governance Guidelines for Public Companies

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi / Aspect; Principle; Recommendation	Comply or Explain
A.	Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham. / Aspect 1: Public Company Relations with Shareholders in Guaranteeing Shareholders Rights	
A.1	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). / Principle 1: Increasing the value of holding a General Meeting of Shareholders (GMS).	
A.1.1.	<p>Rekomendasi 1: Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. / Recommendation 1: The Public Company to have technical methods or procedures for both open and closed voting, which prioritize independence and the interests of shareholders.</p> <p>Penjelasan: Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. / Explanation: Each share with voting rights issued has one voting right (<i>one share one vote</i>). Shareholders can use their voting rights when making decisions, especially when making decisions by voting. However, the decision-making mechanism by means of open and closed voting has not been regulated in detail.</p> <p>Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>. / The Public Company are recommended to have a voting procedure in making decisions on a GMS agenda. The voting procedure must maintain the independence or freedom of shareholders. For example, in open voting, voting is carried out by raising hands in accordance with the choice instructions offered by the chairperson of the GMS. Meanwhile, closed voting is carried out on decisions that require secrecy or at the request of shareholders, by using a ballot card or by using electronic voting.</p>	<p>Kepemilikan Saham PT Kereta Api Indonesia (Persero) 100% hanya dimiliki oleh Kementerian BUMN sehingga Perusahaan tidak memiliki prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. / Shares of PT Kereta Api Indonesia (Persero) is 100% owned only by the Ministry of SOE so that the Company does not have technical procedures for either open or closed voting which prioritizes independence and the interests of shareholders.</p> <p>Pemegang Saham PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Negara Republik Indonesia (Pemerintah) dengan kepemilikan saham sebesar 100%, sehingga Perusahaan tidak memiliki prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. / Shareholders of PT Kereta Api Indonesia (Persero) are the Republic of Indonesia (Government) with 100% share ownership, thus, the Company does not have technical procedures for either open or closed voting which prioritizes independence and the interests of shareholders.</p>
A.1.2.	<p>Rekomendasi 2: Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. / Recommendation 2: All of the Board of Directors members and Board of Commissioners members of the Public Company to attend the Annual GMS.</p> <p>Penjelasan: Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS. / Explanation: The purpose of the attendance of all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Public Company is for each of the Board of Directors member and Board of Commissioners member to pay attention, explain, and answer directly the problems that occur or questions raised by shareholders regarding the agenda at the GMS.</p>	<p>Comply. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. / Comply. All of the Board of Directors members and Board of Commissioners members of the Public Company attended the Annual GMS</p> <p>Penentuan jumlah kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai arahan Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham / Determination of the number of attendance of members of the Board of Directors and Board of Commissioners according to the direction of the Ministry of SOE as the shareholder proxy.</p>
A.1.3.	<p>Rekomendasi 3: Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. / Recommendation 3: Summary of the GMS minutes to be available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.</p> <p>Penjelasan: Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut. / Explanation: Based on the provisions in Article 34 paragraph (2) of the No. Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of The Public Company, the Public Company is required to draw up a summary of the GMS minutes in Indonesian and foreign language (at least in in English), as well as announced in 2 (two) working days after the GMS is held to the public, one of which is through the Public Company Website. Availability of the GMS minutes summary on the Public Company Website provides an opportunity for shareholders who are not present to obtain important information on the GMS easily and quickly. Therefore, the provisions regarding the minimum timeframe for the availability of the GMS minutes summary on the Website are intended to provide sufficient time for shareholders to obtain such information.</p>	<p>Saat ini perusahaan menampilkan ringkasan risalah RUPS pada Laporan Tahunan dan Keberlanjutan KAI dimana laporan tersebut diupload di Situs Web Perusahaan. / Currently, the Company presents the GMS minutes summary in KAI's Annual and Sustainability Report uploaded on the Company Website.</p> <p>Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan pada Menu Hubungan Investor. / The GMS minutes summary is available on the Company's Website on the Investor Relations Menu.</p>

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi / Aspect; Principle; Recommendation	Comply or Explain
Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor / Principle 2: Improving Public Company Communication Quality with Shareholders or Investors		
A.2.1.	<p>Rekomendasi 4: Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Penjelasan: Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. / Recommendation 4: The Public Company to have a communication policy with shareholders or investors. Explanation: The existence of communication between a Public Company and shareholders or investors is intended so that shareholders or investors can obtain a clearer understanding of information that has been published to the public, such as periodic reports, information disclosure, business conditions or prospects and performance, as well as the implementation of corporate governance Open. Besides that, shareholders or investors can also submit input and opinions to the management of the Public Company.</p> <p>Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut. / The communication policy with shareholders or investors shows the Public Company's commitment to communicating with shareholders or investors. The policy may include strategies, programs and timing of communications, as well as guidelines that support shareholders or investors to participate in these communications.</p>	<p>Diatur Dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris Dan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: 04/CH/KOM/III/2017 Dan Nomor: KEP.U/ KP.101/III/15/KA-2017 TENTANG PANDUAN TATA KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (BOARD MANUAL) PT KERETA API INDONESIA Tahun 2017 Dan Peraturan Direksi Pedoman Perilaku NOMOR: PER.U/KC.202/II/L/KA-2019 TENTANG PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT). / Stipulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. 04/CH/KOM/III/2017 and No. KEP.U/KP.101/III/15/KA-2017 CONCERNING WORK GUIDELINES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS (BOARD MANUAL) OF PT KERETA API INDONESIA of 2017 And Regulation of the Board of Directors Code of Conduct No. PER.U/KC.202/II/L/KA-2019 CONCERNING CODE OF CONDUCT.</p> <p>Kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dapat diakses di situs perusahaan / The communication policy with shareholders or investors is contained in the Corporate Governance Guidelines which can be accessed on the Company website</p>
A.2.2.	<p>Rekomendasi 5: Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. / Recommendation 5: The Public Company to disclose their communication policy with shareholders or investors on the Website.</p> <p>Penjelasan: Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka. / Explanation: Disclosure of communication policy is a form of transparency of the Public Company's commitment to provide equality to all shareholders or investors in the implementation of communication. Disclosure of this information also aims to increase the participation and role of shareholders or investors in implementing the Public Company communication program.</p>	<p>Perusahaan menyediakan informasi yang terbuka bagi investor melalui website kai.id khususnya pada menu Hubungan Investor Komunikasi dengan pemegang saham dilakukan melalui penyelenggaraan RUPS dan surat menyurat karena pemegang saham 100% adalah Pemerintah. / The Company provides information that is open to investors through the kai.id website, especially on the Investor Relations menu. Communication with shareholders is carried out through the holding of GMS and correspondence as 100% of the shareholder os the Government.</p> <p>Komunikasi dengan investor (pemegang obligasi) dilakukan secara daring untuk mengetahui update kinerja Perusahaan. Kegiatan site visit Investor Obligasi juga dilakukan. Situs Perusahaan yang memuat keterbukaan informasi dan kontak merupakan bentuk komunikasi kepada investor. / Communication with investors (bondholders) is carried out online to gain information of updates on the Company's performance. Site visits of Bond Investor were also carried out. The Company's website which contains information disclosure and contacts is a form of communication to investors.</p>
B. Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris / Aspect 2: Functions and Roles of the Board of Commissioners		
B.1. Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. / Principle 3: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners		
B.1.1.	<p>Rekomendasi 6: Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. / Recommendation 6: Determination of the number of members of the Board of Commissioners to consider the condition of the Public Company.</p> <p>Penjelasan: Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, Jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris. Explanation: The number of members of the Board of Commissioners can affect the effectiveness of carrying out the duties of the Board of Commissioners. Determination of the number of members of the Public Company must refer to the provisions of the applicable laws and regulations, which consists of at least 2 members based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. In addition, it is also necessary to consider the condition of the Public Company which includes the characteristics, capacity and size, as well as the achievement of objectives and the fulfillment of different business needs among the Public Company. However, the number of members of the Board of Commissioners that is too large has the potential to disrupt the effectiveness of the implementation of the Board of Commissioners' functions.</p>	<p>Jumlah komposisi Dewan Komisaris maksimal sama dengan jumlah Direksi di Perusahaan. / The maximum composition of the Board of Commissioners is similar to the number of Directors in the Company.</p> <p>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan pemegang saham (Kementerian BUMN) / Determination of the number of members of the Board of Commissioners is determined by the shareholders (Ministry of SOE)</p>
B.1.2.	<p>Rekomendasi 7: Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. / Recommendation 7: Determination of the composition of members of the Board of Commissioners to consider the diversity of skills, knowledge and experience required.</p> <p>Penjelasan: Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. / Explanation: The composition of the Board of Commissioners is a combination of characteristics both in terms of the organs of the Board of Commissioners and individual members of the Board of Commissioners, in accordance with the needs of the Public Company. These characteristics can be reflected in the determination of the skills, knowledge and experience needed in carrying out supervisory and advisory duties by the Board of Commissioners of the Public Company. The composition that has taken into account the needs of the Public Company is a positive thing, especially regarding decision making in the context of implementing the supervisory function which is carried out by considering a wider variety of aspects.</p>	<p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan pembahasan keberagaman komposisi Dewan Komisaris pada bab sebelumnya. Keberagaman latar belakang dari anggota Dewan Komisaris dapat dilihat dari profil anggota Dewan Komisaris di Laporan Tahunan. / The composition of the members of the Board of Commissioners is determined by considering the diversity of skills, knowledge and experience needed in accordance with the discussion of the diversity of the composition of the Board of Commissioners in the previous chapter. The diversity of backgrounds of members of the Board of Commissioners can be seen from the profiles of members of the Board of Commissioners in the Annual Report.</p> <p>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan pemegang saham (Kementerian BUMN) / Determination of the number of members of the Board of Commissioners is determined by the shareholders (Ministry of SOE)</p>

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi / Aspect; Principle; Recommendation	Comply or Explain
B.2.	Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. / Principle 4: Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.	
B.2.1	<p>Rekomendasi 8: Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. / Recommendation 8: The Board of Commissioners to have self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolektif. <i>Self-assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolektif, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. / Explanation: The Board of Commissioners self-assessment policy is a guideline used as a form of accountability for assessing the performance of the Board of Commissioners collegially. The intended self-assessment is carried out by each member to assess the implementation of the performance of the Board of Commissioners collegially, and not to assess the individual performance of each member of the Board of Commissioners. With the self-assessment, it is hoped that each member of the Board of Commissioners can contribute to improving the performance of the Board of Commissioners on an ongoing basis. This policy include assessment activities carried out along with their aims and objectives, time for implementation on a regular basis, and benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration function of the Public Company, where this function is required in the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or The Public Company.</p>	<p>Ada / Exist Kebijakan penilaian sendiri diatur dalam Kontrak Manajemen Dewan Komisaris / The self-assessment policy is regulated in the Board of Commissioners Management Contract</p>
B.2.2	<p>Rekomendasi 9: Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. / Recommendation 9: Self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners to be disclosed through the Public Company's Annual Report.</p> <p>Penjelasan: Pengungkapan kebijakan <i>self-assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris. / Explanation: Self-assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is carried out not only to fulfill the aspect of transparency as a form of accountability for carrying out their duties, but also to provide confidence especially to shareholders or investors regarding the efforts that need to be made to improve the performance of the Board of Commissioners. With this disclosure, shareholders or investors know the check and balance mechanism on the performance of the Board of Commissioners</p>	<p>Diatur Dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris Dan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: 04/CH/KOM/III/2017 Dan Nomor: KEP.U/ KP.101/III/15/KA-2017 TENTANG PANDUAN TATA KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (BOARD MANUAL) PT KERETA API INDONESIA Tahun 2017 / Stipulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. 04/CH/KOM/III/2017 and No. KEP.U/KP.101/III/15/KA-2017 CONCERNING WORK GUIDELINES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS (BOARD MANUAL) OF PT KERETA API INDONESIA OF 2017</p> <p>KPI Dewan Komisaris secara kolektif sudah diungkapkan pada Laporan Tahunan / The collegial KPI of the Board of Commissioners has been disclosed in the Annual Report</p>
B.2.3.	<p>Rekomendasi 10: Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. / Recommendation 10: The Board of Commissioners to have a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercapai dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. / Explanation: The resignation policy of members of the Board of Commissioners who are involved in financial crimes is a policy that can increase stakeholder confidence in a Public Company, so that the integrity of the company will be maintained. This policy is needed to help smooth the legal process and so that the legal process does not interfere with the course of business activities. In addition, in terms of morality, this policy builds an ethical culture within the Public Company. These policies can be included in the Guidelines or Code of Conduct that apply to the Board of Commissioners. Furthermore, being involved in a financial crime means having a convict status as a member of the Board of Commissioners from the competent authority. Financial crimes include manipulation and various forms of embezzlement in financial service activities as well as money laundering as referred to in Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.</p>	<p>Diatur Dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris Dan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: 04/CH/KOM/III/2017 Dan Nomor: KEP.U/ KP.101/III/15/KA-2017 TENTANG PANDUAN TATA KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (BOARD MANUAL) PT KERETA API INDONESIA Tahun 2017 / Stipulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. 04/CH/KOM/III/2017 and No. KEP.U/KP.101/III/15/KA-2017 CONCERNING GUIDELINES FOR THE WORK OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS (BOARD MANUAL) PT KERETA API INDONESIA OF 2017</p> <p>Kebijakan khusus pengunduran diri belum dibuat secara tertulis, namun tersirat dalam Pedoman Perilaku dan Kontrak Manajemen, dimana Dewan Komisaris harus menandatangani kepatuhan terhadap pedoman perilaku yang isinya adalah berjanji menerapkan dan bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan. / Specific policy on resignation has not been made in writing, but it is implied in the Code of Conduct and Management Contract, whereby the Board of Commissioners must sign compliance with the code of conduct whose content is to promise to implement and be willing to be sanctioned according to the provisions.</p>
B.2.4	<p>Rekomendasi 11: Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. / Recommendation 11: The Board of Commissioners or Committees that carry out the Nomination and Remuneration functions to develop succession policy in the Nomination process for members of the Board of Directors.</p> <p>Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan. / Explanation: Based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, the committee that carries out the nomination function has the duty to develop the policies and criteria needed in the nomination process for candidates for members of the Board of Directors. One of the policies that can support the Nomination process as intended is the succession policy for members of the Board of Directors. The policy regarding succession aims to maintain the continuity of the process of regeneration or regeneration of leadership in the company in order to maintain business continuity and the company's long-term goals.</p>	<p>Sesuai dengan pembahasan sebelumnya pada sub bab profil Komite Nominasi dan Remunerasi, KAI memiliki komite tersebut yang menjalankan fungsi untuk menyusun kebijakan terkait proses nominasi anggota Direksi. / In accordance with the previous discussion in the Nomination and Remuneration Committee profile sub-chapter, KAI has a committee which carries out the function of formulating policies related to the nomination process for members of the Board of Directors.</p> <p>Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi. Kebijakan suksesi yang sedang dibangun berdasarkan panduan/ pedoman dari pemegang saham. / The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee has carried out the nomination and remuneration function. The succession policy that is being developed is based on the guidelines from the shareholders.</p>

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi / Aspect; Principle; Recommendation	Comply or Explain
C.	Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi / Aspect 3: Functions and Roles of the Board of Directors	
C.1	Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. / Principle 5: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.	
C.1.1	<p>Rekomendasi 12: Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. / Recommendation 12: Determination of the number of members of the Board of Directors to consider the condition of the Public Company and effectiveness in making decisions.</p> <p>Penjelasan: Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi / Explanation: As a company organ that is authorized to manage the company, determining the number of Directors greatly influences the performance of a Public Company. Thus, the determination of the number of members of the Board of Directors must be carried out through careful consideration and must refer to the provisions of the applicable laws and regulations, which are based on the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies at least consists of 2 (two) members. In addition, the determination of the number of Directors must be based on the need to achieve the goals and objectives of the Public Company and adjusted to the conditions of the Public Company which includes the characteristics, capacity and size of the Public Company as well as how the Board of Directors' decision-making effectiveness is achieved.</p>	<p>Comply. Penentuan jumlah anggota Direksi ditetapkan pemegang saham (Kementerian BUMN) / Comply. The number of members of the Board of Directors is determined by the shareholders (Ministry of SOE)</p>
C.1.2.	<p>Rekomendasi 13: Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. / Recommendation 13: Determination the composition of members of the Board of Directors to consider the diversity of skills, knowledge and experience required.</p> <p>Penjelasan: Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegiat. / Explanation: Similar to the Board of Commissioners, the diversity in the composition of the members of the Board of Directors is a combination of desired characteristics both in terms of the organs of the Board of Directors and individual members of the Board of Directors, in accordance with the needs of a Public Company. The combination is determined by taking into account the appropriate expertise, knowledge and experience in the division of duties and functions of the Board of Directors in achieving the goals of the Public Company. Thus, consideration of the combination of characteristics referred to will have an impact on the accuracy of the nomination process and collegial appointment of individual members of the Board of Directors or the Board of Directors.</p>	<p>Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan pembahasan keberagaman komposisi Direksi pada bab sebelumnya. Keberagaman latar belakang anggota direksi dapat dilihat dalam bab profil di Laporan Tahunan. / The composition of the members of the Board of Directors is determined by considering the diversity of skills, knowledge and experience needed in accordance with the discussion on the diversity of the composition of the Board of Directors in the previous chapter. The diversity of backgrounds of members of the board of directors can be seen in the profile chapter in the Annual Report.</p> <p>Penentuan komposisi anggota Direksi oleh pemegang saham telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor 11/MBU/07/2021 / The determination of the composition of the members of the Board of Directors by the shareholders has taken into account the diversity of expertise, knowledge and experience in accordance with the Minister of SOE Regulation No. 11/MBU/07/2021</p>
C.1.3	<p>Rekomendasi 14: Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/ atau pengetahuan di bidang akuntansi. / Recommendation 14: Member of the Board of Directors in charge of accounting or finance to have expertise and/or knowledge in accounting.</p> <p>Penjelasan: Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. / Explanation: The Financial Statements is a management accountability report on the management of resources owned by a Public Company, which must be prepared and presented in accordance with generally accepted Financial Accounting Standards in Indonesia as well as related OJK regulations, including laws and regulations in the Capital Market sector which regulates the presentation and disclosure of Public Company Financial Statements. Pursuant to laws and regulations in the Capital Markets sector governing the responsibilities of the Board of Directors for Financial Statements, the Directors are jointly and severally responsible for the Financial Statements, which are signed by the President Director and members of the Board of Directors in charge of accounting or finance.</p> <p>Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait. / Thus, the disclosure and preparation of financial information presented in the financial statements will depend heavily on the expertise and/or knowledge of the Board of Directors, particularly member of the Board of Directors in charge of accounting or finance. The qualifications of expertise and/or knowledge in accounting that at least belong to the members of the Board of Directors can provide confidence in the preparation of the Financial Statements, so that the Financial Statements can be relied upon by stakeholders as a basis for making economic decisions regarding the Public Company in question. Such expertise and/or knowledge can be proven by educational background, training certification, and/or related work experience</p>	<p>Comply. Direktur Keuangan KAI memiliki latar belakang pendidikan dan riwayat pekerjaan/ penugasan di bidang keuangan dan akuntansi. / Comply. KAI's Director of Finance has an educational background and professional/ position history in finance and accounting.</p> <p>Direktur Keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi atau keuangan / The Director of Finance has expertise and/or knowledge in accounting or finance</p>

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi / Aspect; Principle; Recommendation	Comply or Explain
C.2.	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. / Principle 6: Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.	
C.2.1	<p>Rekomendasi 15: Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi. / Recommendation 15: The Board of Directors have a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.</p> <p>Penjelasan: Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (self assessment) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. Self-assessment atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya self assessment ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. / Explanation: Similar the Board of Commissioners, the self-assessment policy of the Board of Directors is a guideline used as a form of accountability for assessing the performance of the Board of Directors collegially. The intended self-assessment or self-assessment is carried out by each member of the Board of Directors to assess the performance of the Board of Directors collegially, and not to assess the individual performance of each member of the Board of Directors. With self in this assessment, it is hoped that each member of the Board of Directors can contribute to improving the performance of the Board of Directors on an ongoing basis.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. / This policy may include assessment activities carried out along with their aims and objectives, time for implementation on a regular basis, and benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration function of the Public Company, where the formation of this function is required in the Regulations. Financial Services Authority No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or The Public Company.</p>	<p>Comply. Diatur dalam perdir Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Nomor PER.U/KH.104/X/1/KA-2021. / Comply. Regulated in the Board of Directors Regulation No. PER.U/KH.104/X/1/KA-2021. concerning Performance Assessment Management System</p> <p>Kebijakan penilaian sendiri diatur dalam Kontrak Manajemen Direksi / The self-assessment policy is regulated in the Directors' Management Contract</p>
C.2.2.	<p>Rekomendasi 16: Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. / Recommendation 16: Self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed through the Public Company's annual report.</p> <p>Penjelasan: Pengungkapan kebijakan self assessment atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Direksi. / Explanation: Disclosure of self-assessment policy of the performance of the Board of Directors is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of their duties, but also to provide important information on efforts to improve the management of the Public Company. This information is very useful in giving confidence to shareholders or investors that there is certainty that the management of the company will continue to be carried out in a better direction. With this disclosure, shareholders or investors know the check mechanism and balance on the performance of the Board of Directors.</p>	<p>Comply. KPI Direksi secara kolegal sudah diungkapkan pada Laporan Tahunan / Comply. The collegial KPI of the Board of Directors has been disclosed in the Annual Report</p>
C.2.3.	<p>Rekomendasi 17: Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. / Recommendation 17: The Board of Directors to have a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors for being involved in financial crimes.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. / Explanation: The resignation policy of members of the Board of Directors involved in financial crimes is a policy that can increase stakeholder confidence in a Public Company, so that the integrity of the company will be maintained. This policy is needed to help smooth the legal process and so that the legal process does not interfere with the course of business activities. In addition, in terms of morality, this policy will build an ethical culture within the Public Company. These policies can be included in the Guidelines or Code of Conduct that apply to the Board of Directors. Furthermore, what is meant by being involved in a financial crime is the existence of a convict status against a member of the Board of Directors from the competent authority. Financial crimes include manipulation and various forms of embezzlement in financial service activities as well as money laundering as referred to in Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.</p>	<p>Comply. Diatur Dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris Dan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: 04/CH/KOM/III/2017 Dan Nomor: KEP.U/KP.101/III/15/KA-2017 TENTANG PANDUAN TATA KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (BOARD MANUAL) PT KERETA API INDONESIA Tahun 2017 / Comply. Stipulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. 04/CH/KOM/III/2017 and No. KEP.U/KP.101/III/15/KA-2017 CONCERNING WORK GUIDELINES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD DIRECTORS (BOARD MANUAL) OF PT KERETA API INDONESIA OF 2017</p> <p>Kebijakan khusus pengunduran diri belum dibuat secara tertulis, namun tersirat dalam Pedoman Perilaku, dimana Direksi harus menandatangani kepatuhan terhadap pedoman perilaku yang isinya adalah berjanji menerapkan dan bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan. / Specific policy on resignation has not been made in writing, but it is implied in the Code of Conduct, where the Board of Directors must sign compliance with the code of conduct whose contents promise to implement and be willing to be sanctioned according to the provisions.</p>
D.	Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan / Aspect 4: Stakeholder Participation	
D.1.	Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. / Principle 7: Improving Corporate Governance Aspect through Stakeholder Participation.	
D.1.1.	<p>Rekomendasi 18: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. / Recommendation 18: The Public Company to have policy to prevent insider trading.</p> <p>Penjelasan: Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/ atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien. / Explanation: A person who has inside information is prohibited from engaging in a Securities transaction using inside information as referred to in the Law on Capital Markets. The Public Company can minimize the occurrence of insider trading through preventive policies, for example by strictly separating confidential data and/ or information from public ones, as well as dividing the duties and responsibilities for the management of said information proportionally and efficiently.</p>	<p>Kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan / Policy to prevent insider trading is contained in the Corporate Governance Guidelines</p>

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi / Aspect; Principle; Recommendation	Comply or Explain
D.1.2.	<p>Rekomendasi 19: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud. / Recommendation 19: The Public Company have anti-corruption and anti- fraud policies.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan anti-korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain. / Explanation: The anti-corruption policy is to ensure that the Public Company's business activities are carried out legally, prudently, and in accordance with the principles of good governance. The policy can be part of the code of ethics, or in a separate form. This policy may include, among other things, programs and procedures carried out in dealing with corruption practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities in a public company. The scope of the policy must describe the prevention of the Public Company against all corrupt practices, whether giving or receiving from other parties.</p>	<p>Dalam memastikan perusahaan bebas dari korupsi dan fraud, KAI memiliki Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Kebijakan Gratifikasi, Pedoman Perilaku, dan Kebijakan Whistleblowing System. / In ensuring the Company is free from corruption and fraud, KAI has an Anti-Bribery Management System Policy, a Gratuity Policy, a Code of Conduct, and a Whistleblowing System Policy.</p> <p>Kebijakan anti korupsi dan anti-fraud sudah tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan / The anti-fraud policy is contained in the Guidelines for Corporate Governance and Anti-Bribery Management System</p>
D.1.3.	<p>Rekomendasi 20: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. / Recommendation 20: The Public Company to have policy on the selection and capacity building of suppliers or vendors.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (supply chain) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/ memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman Procurement. / Explanation: Policy on supplier or vendor selection are for ensuring that Public Company obtains the necessary goods or services at competitive prices and of good quality. Meanwhile, supplier or vendor capacity building policies are useful for ensuring that the supply chain run efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors to supply/fulfill the goods or services required by the company will affect the quality of the company's output. Thus, the implementation of these policies can guarantee the continuity of supply, both in terms of quantity and quality required by the Public Company. The scope of this policy includes criteria for selecting suppliers or vendors, transparent procurement mechanisms, efforts to increase the capacity of suppliers or vendors, and fulfillment of rights related to suppliers or vendors. The Company has a policy regarding the procurement of goods and services which contains the selection and capacity building of suppliers or vendors as stipulated in the Procurement Guidelines standards.</p>	<p>Comply. Kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor sudah tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Juklak Pengadaan Barang dan Jasa / Comply. Policy regarding the selection and capacity building of suppliers or vendors are contained in the Guidelines for Corporate Governance and Guidelines for Procurement of Goods and Services</p>
D.1.4.	<p>Rekomendasi 21: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditor. / Recommendation 21: The Public Company to have policy on creditor rights fulfillment.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditor digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditor. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditor terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditor. / Explanation: The policy on fulfilling creditors' rights serve as a guide in making loans to creditors. The purpose of the intended policy is to maintain the fulfillment of rights and maintain creditors' trust in the Public Company. The policy includes considerations in entering into agreements, as well as follow-up in fulfilling the obligations of the Public Company to creditors.</p>	<p>Belum ada. Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditor sudah tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan / Not yet. Policy on the fulfillment of creditor rights is contained in the Corporate Governance Guidelines</p>
D.1.5.	<p>Rekomendasi 22: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing. / Recommendation 22: The Public Company to have whistleblowing system policy.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan sistem whistleblowing yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem whistleblowing mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem whistleblowing, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. / A well-developed whistleblowing system policy will provide assurance of protection for witnesses or reporters of an indication of violations committed by employees or management of the Public Company. The implementation of these system policies will have an impact on the formation of a culture of good corporate governance. The whistleblowing system policy includes, among other things, types of violations that can be reported through the whistleblowing system, methods of complaint, protection and guarantee of confidentiality of reporters, handling of complaints, parties managing complaints, and the results of handling and follow-up of complaints.</p>	<p>KAI memiliki kebijakan sistem WBS seperti yang telah dijelaskan pada bab/subbab sebelumnya / KAI has a WBS system policy as explained in the previous chapter/ subchapter</p> <p>Kebijakan sistem whistleblowing sudah tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) / The whistleblowing system policy is contained in the Corporate Governance Guidelines and Whistleblowing System Guidelines.</p>
D.1.6.	<p>Rekomendasi 23: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. / Recommendation 23: The Public Company to have policy of providing long-term incentives to the Board of Directors and employees.</p> <p>Penjelasan: Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. / Explanation: Long-term incentives are incentives based on achieving long-term performance. The long-term incentive plan has the premise that the company's long-term performance is reflected by the growth in the value of the company's shares or other long-term targets. Long-term incentives are useful in order to maintain loyalty and provide motivation to the Board of Directors and employees to improve their performance or productivity which will have an impact on increasing the company's performance in the long term.</p> <p>Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada. / The long-term incentive policy is a real commitment of the Public Company to encourage the implementation of long-term incentives for Directors and Employees with conditions, procedures and forms that are adjusted to the long-term objectives of the Public Company. The intended policy may include, among other things, the intent and purpose of providing long-term incentives, the conditions and procedures for granting incentives, and the conditions and risks that must be considered by the Public Company in granting incentives. This policy can also be included in the existing Public Company remuneration policy.</p>	<p>Kebijakan insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan telah dijelaskan dalam bab GCG dalam Laporan Tahunan. / Policy on long-term incentive for the Board of Directors and employees has been explained in the GCG chapter of the Annual Report.</p> <p>Kebijakan insentif jangka panjang tidak diatur, namun Perusahaan memiliki kebijakan jangka pendek yang diatur dalam Peraturan Direksi tentang Penghasilan Pekerja / The long-term incentive policy is not regulated, but the Company has a short-term policy which is regulated in the Board of Directors Regulation concerning Employee Income</p>

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi / Aspect; Principle; Recommendation	Comply or Explain
E.	Aspek 5: Keterbukaan Informasi / Aspect 5: Information Disclosure	
E.1.	Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. / Principle 8: Improving the Implementation of Information Disclosure.	
E.1.1.	<p>Rekomendasi 24: Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. / Recommendation 24: The Public Company to take advantage of the use of information technology more broadly aside from using Website as a medium for information disclosure.</p> <p>Penjelasan: Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan. / Explanation: The use of information technology can serve as a medium for information disclosure. The disclosure of information that is carried out is not only disclosure of information that has been regulated in laws and regulations, but also other information related to The Public Company that are felt to be useful for the knowledge of shareholders or investors. By using information technology more broadly besides the Website, it is hoped that the company can increase the effectiveness of disseminating company information. Even so, the use of information technology is carried out while still taking into account the company's benefits and costs.</p>	<p>Terkait penyediaan informasi, KAI memiliki beberapa channel baik dalam bentuk Situs Web, Media Sosial, maupun Aplikasi. KAI tentunya terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi agar perusahaan semakin informatif. / KAI has several channels for information disclosure in the form of Websites, Social Media, and Applications. KAI continues to adjust to technological developments so that the Company is more informative.</p>
E.1.2.	<p>Rekomendasi 25: Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. / Recommendation 25: The Public Company's Annual Report to disclose the ultimate beneficial owner in the Public Company share ownership of at least 5% (five percent), in addition to disclosure of the ultimate beneficial owner in the Public Company share ownership through the majority and controlling shareholders.</p> <p>Penjelasan: Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali. / Explanation: Laws and regulations in the Capital Market sector governing the submission of Public Company annual reports have regulated the obligation to disclose information regarding shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Public Company, as well as the obligation to disclose information regarding major and controlling shareholders Public Company either directly or indirectly up to the last beneficiary in the ownership of the shares. In this Governance Guidelines it is recommended to disclose the ultimate beneficial owner of share ownership of the Public Company of at least 5% (five percent), in addition to disclosing the ultimate beneficial owner of share ownership by the majority and controlling shareholders.</p>	<p>100% saham Perseroan dimiliki Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN / 100% of the Company's shares are owned by the Government, in this case the Ministry of SOE</p>

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

Good Corporate Governance Assessment

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian untuk penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di PT Kereta Api Indonesia Persero mengacu pada SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012, tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai kriteria tersebut, Penilaian dilakukan dengan mengukur 6 (enam) aspek penilaian untuk penerapan GCG di Perusahaan yaitu:

1. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara berkelanjutan;
2. Aspek Pemegang Saham;
3. Aspek Dewan Komisaris;
4. Aspek Direksi;
5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi
6. Aspek Faktor Lainnya

Assessment Criteria

Assessment criteria for the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at PT Kereta Api Indonesia Persero refers to SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State Owned Enterprises.

In accordance with these criteria, the Assessment is carried out by measuring 6 (six) aspects of the assessment of GCG Implementation in the Company, namely:

1. Aspect of Commitment to Good Corporate Governance (GCG) Implementation in a sustainable manner;
2. Aspect of Shareholders;
3. Aspect of the Board of Commissioners;
4. Aspect of the Board of Directors;
5. Aspect of Information Disclosure and Transparency
6. Aspect of Other Factors

Pihak yang Melakukan Assessment

Untuk penerapan GCG Tahun 2022, merupakan tahun pelaksanaan evaluasi secara mandiri (*Self-Assessment*) oleh BPKP Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan evaluasi dilakukan sendiri oleh Assesor *Self-Assessment* GCG PT Kereta Api Indonesia (Persero) / Tim Penilai BPKP.

Skor Penilaian

Mengacu pada hasil penilaian GCG, Perseroan memperoleh skor penerapan GCG untuk tahun 2022 sebesar **92,424** dengan kategori **Sangat Baik**. Perbandingan perolehan skor penilaian GCG Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Assessor

In 2022, GCG implementation in was assessed independently (*Self-Assessment*) / by the BPKP of West Java Province. The evaluation is carried out by the GCG *Self-Assessment* Assessor of PT Kereta Api Indonesia (Persero) / BPKP Assessment Team.

Assessment Score

Referring to the results of the GCG assessment, the Company obtained a GCG implementation score for 2022 of **92.424** with the category of **Excellent**. The comparison of the Company's GCG assessment scores for the last 5 (five) years are as follows:

Hasil GCG Assessment Tahun 2018-2022

GCG Assessment Results in 2018-2022

Tahun Buku Assessment GCG / Fiscal Year of GCG Assessment	Skor GCG Assessment / GCG Assessment Score	Kategori / Category	Pelaksana / Assessor
2022	92,424	Sangat Baik / Excellent	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat / Representative of the BPKP of West Java Province
2021	91,679	Sangat Baik / Excellent	Self-Assessment
2020	90,461	Sangat Baik / Excellent	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat / Representative of the BPKP of West Java Province
2019	90,215	Sangat Baik / Excellent	Self-Assessment oleh Assesor PT Kereta Api Indonesia (Persero) / Self-Assessment by the Assessor of PT Kereta Api Indonesia (Persero)
2018	90,02	Sangat Baik / Excellent	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat / Representative of the BPKP of West Java Province

Secara terperinci, skor dan capaian masing-masing aspek penilaian GCG Perseroan tahun 2022 dapat dilihat di dalam tabel berikut:

In detail, the scores and achievements of each aspect of the Company's GCG assessment in 2022 can be seen in the following table:

Hasil GCG Assessment Tahun 2022

GCG Assessment Results for 2022

Aspek	Bobot	Skor 2022	Capaian (%)
Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik / Commitment to good corporate governance implementation	7,00	6,905	98,641
Pemegang saham dan RUPS/pemilik modal / Shareholders and GMS/capital owners	9,00	8,315	92,387
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas / Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00	31,683	90,525
Direksi / Board of Directors	35,00	31,719	90,627
Pengungkapan dan keterbukaan informasi / Information disclosure and transparency	9,00	8,802	97,796
Faktor lainnya / Other factors	5,00	5,000	

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Bedasarkan penilaian GCG untuk tahun 2022, Perseroan memperoleh sejumlah rekomendasi dengan uraian serta tindak lanjut sebagai berikut:

Recommendations and Follow-Up

Based on the 2022 GCG assessment, the Company obtained a number of recommendations with the following descriptions and follow-ups:

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Penilaian GCG Tahun 2022 2022 GCG Assessment Recommendations and Follow-Up

No	Par	Rekomendasi / Recommendations	Tindak Lanjut / Follow-Up
ASPEK KOMITMEN / COMMITMENT ASPECT			
1.	4	Memasukkan materi substansi Pedoman Perilaku (CoC) dalam silabus program orientasi karyawan / Include material for the substance of the Code of Conduct (CoC) in the employee orientation program syllabus	Open
ASPEK PEMEGANG SAHAM / SHAREHOLDER ASPECT			
2.	25	Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawa di perusahaan swasta atau Perusahaan/badan lain misal BUMD/BLU / Determine the maximum number of positions for the Board of Commissioners and Supervisory Board that may be held by a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board in a private company or other company/entity, such as Regional-Owned Entity/BLU	Open
3.	28	Melakukan update atas KEP- 101/M-BUMN/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN dengan Kondisi terkini dan Best practice dalam pengelolaan Perusahaan / Update the KEP-101/M-BUMN/2002 dated June 4, 2002 on Preparation of SOE Work Plans and Corporate Budgets (RKAP) with the latest conditions and best practices in managing the Company	Open
4.	29	Mendokumentasikan Pembahasan usulan aksi korporasi Direksi dan memberikan Persetujuan usulan aksi korporasi Direksi secara tepat waktu yaitu paling lambat 30 hari untuk KSO/BOT dan maksimal 7 hari untuk pelepasan asset setelah dokumen usulan dan penjelasan diterima secara lengkap / Document the discussion of the Board of Directors corporate action proposals and giving Approval of the Board of Directors corporate action proposals in a timely manner, namely no later than 30 days for KSO/BOT and a maximum of 7 days for asset disposal after the proposal documents and explanations are received in full	Open
5.	30	Menetapkan KPI Direksi secara Individu dan melakukan penilaian pencapaian KPI Direksi yang hasilnya dituangkan dalam risalah RUPS / Establish individual KPIs for the Board of Directors and evaluate the achievements of the Board of Directors KPIs, the results of which are set forth in the minutes of the GMS	Open
6.	31	Mengintruksikan kepada Dewan Komisaris agar dalam pengusulan auditor eksternal yang akan mengaudit laporan keuangan selain memuat alasan pengusulan dan proses pencalonannya, memuat usulan penetapan besarnya honorarium / Instruct the Board of Commissioners so that when proposing an external auditor to audit the financial statements, in addition to including the reasons for the proposal and the nomination process, include a proposal to determine the amount of honorarium	Open
7.	33	Menetapkan Pedoman penyusunan KPI Dewan Komisaris dan Pedoman penyusunan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan./ Establish guidelines for preparing KPI for the Board of Commissioners and guidelines for preparing reports on the supervisory duties of the Board of Commissioners, as well as evaluating the performance of the Board of Commissioners in accordance with the established guidelines.	Open
8.	38	Mendokumentasikan pembahasan dan upaya-upaya menindaklanjuti area of improvement yang dihasilkan dari assessment tahun sebelumnya / Document the discussions and efforts to follow up on areas of improvement from the previous year's assessment	Open
ASPEK DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS ASPECT			
9.	41	Sekretaris Dewan Komisaris menyelenggarakan, mempersiapkan materi program pengenalan Dewan Komisaris minimal memuat pengenalan prinsip-prinsip GCG, gambaran umum BUMN, kewenangan yang didelegasikan, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, serta mendokumentasikannya. / The Secretary to the Board of Commissioners organizes, prepares material for the Board of Commissioners introductory program which contains at least an introduction to GCG principles, general description of SOEs, delegated authority, duties and responsibilities of the Board of Commissioners along with their documentation.	Open
10.	42	Konsisten dalam melaksanakan pelatihan/peningkatan kompetensi setiap anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan dalam Laporan Pelatihan Dewan Komisaris sesuai dengan RKA Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh RUPS / Be consistent in carrying out training/competence improvement for each member of the Board of Commissioners stated in the Board of Commissioners' Training Report in accordance with the Board of Commissioners' RKA approved by the GMS	Open
11.	44	Konsisten dalam memberikan persetujuan terhadap usulan Tindakan Direksi dalam jangka waktu berkisar 7 hari dan sampai dengan 14 hari / Be consistent in giving approval to proposed Board of Directors Action within a period ranging from 7 days to 14 days	Open
12.	45	Penyampaian RKA Dewan Komisaris ke Direksi dilakukan tepat waktu sebelum penyampaian Rancangan RKAP kepada Pemegang Saham tanggal 1 Oktober tahun / Submit the Board of Commissioners' RKA to the Board of Directors in a timely manner prior to the submission of the RKAP Draft to Shareholders on October 1 of the year	Open
13.	48	Menyajikan keselarasan/ketidakselarasan RKAP dengan RJPP dalam tanggapan RKAP kepada Pemegang Saham / Present the alignment/non-conformity of the RKAP with the RJPP in the RKAP responses to Shareholders	Open

No	Par	Rekomendasi / Recommendations	Tindak Lanjut / Follow-Up
14.	51	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong manajemen agar melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas, dan menyusun Internal Control Report; / Encourage the management to evaluate the effectiveness of internal control at the entity level, and prepare an Internal Control Report; Melakukan telaah atas hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan Internal Control Report. / Review the results of the evaluation of the effectiveness of internal control at the entity level and the Internal Control Report. 	Open
15.	53	Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasehat terhadap kebijakan dan pelaksanaan Sistem teknologi Informasi yang dihasilkan dari telaah atas ITMP 2020-2024 dan pelaksanaannya yang dilakukan Komite Komisaris / Supervise and provide advice on the policy and implementation of Information Technology System from the 2020-2024 ITMP review and its implementation by the Board of Commissioners Committees	Open
16.	65	Konsisten dalam memberikan penetapan tertulis/pemberian pendapat terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan dan mendokumentasikan proses terkait sehingga pemberian pendapat dapat dilakukan paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen dari Direksi / Be consistent in providing written determinations/providing opinions on the process of appointing the Directors and Board of Commissioners of subsidiaries/joint ventures and document the related processes so that opinions can be given no later than 15 calendar days from the date of receipt of documents from the Directors	Open
17.	67	Melakukan penilaian kinerja Direksi individu dan melaporkannya kepada Pemegang Saham / Conduct individual performance assessment of the Board of Directors and report it to Shareholders	Open
18.	73	Memerintahkan Sekretaris Dewan Komisaris agar mencantumkan alasan ketidakhadiran dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris baik rapat internal maupun rapat BOC BOD / Require the Secretary to the Board of Commissioners to state the reasons for absence in the Minutes of Meeting of the Board of Commissioners both internal meetings and BOC BOD meetings	Open
19.	74	Sekretaris Dewan Komisaris agar menuangkan pembahasan atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya pada bagian khusus sesuai dengan format Risalah Rapat dalam Peraturan yang berlaku di jajaran Dewan Komisaris. / The Secretary to the Board of Commissioners to include a discussion on the follow-up to the results of the previous meeting in a special section in accordance with the format of the Minutes of Meeting applicable for the Board of Commissioners.	Open
20.	82	Komite Komisaris dalam melaksanakan pertemuan berkala agar mendokumentasikan hasil pertemuan dalam Risalah Rapat sesuai dengan format Risalah Rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor PER.U/KC.202/X/1/KA-2020 tentang Tata Tertib Rapat Direksi, minimal memuat memuat hasil-hasil analisis, telaahan dan evaluasi serta menyampaikan kepada Sekretaris Dekom untuk disimpan sebagai arsip perusahaan / The Board of Commissioners Committee in conducting regular meetings should document the results of the meeting in the Minutes of Meeting in accordance with the format of the Minutes of Meeting as stipulated in the Directors Regulation Number PER.U/KC.202/X/1/KA-2020 on the Board of Directors Meeting Regulations, at least containing the results of analysis, review and evaluation as well as submitting to the Secretary to the Board of Commissioners to be kept as Company archives	Open
21.	83	Komite Komisaris melengkapi Laporan Triwulanan dan Tahunan dengan memuat perbandingan antara realisasi kegiatan dengan program kerja / The Board of Commissioners Committee completes the Quarterly and Annual Reports by including a comparison between actual activities and work programs	Open
ASPEK DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS ASPECT			
22.	84	Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan, mempersiapkan materi program pengenalan direksi minimal memuat pengenalan prinsip-prinsip GCG, gambaran umum BUMN, kewenangan yang didelegasikan, tugas dan tanggung jawab direksi dan komisaris, serta mendokumentasikan program pengenalan perusahaan bagi Direksi yang baru diangkat yang berasal dari Luar perusahaan / The Corporate Secretary organizes, prepares material for the Board of Directors introductory program which contains at least an introduction to GCG principles, general description of SOEs, delegated authority, duties and responsibilities of directors and commissioners, as well as documenting the company introduction program for newly appointed Directors from outside the Company	Open
23.	88	Melakukan update Kepdir PT KAI Nomor KEP.U/OT/104/IX/1/KA-2015 tentang Standar waktu pengambilan keputusan oleh direksi dalam pembuatan-pembuatan direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dekom atau tanggapan tertulis dari Dekom PT KAI dan Persetujuan dari RUPS dengan menambahkan ketentuan/batasan waktu pengkomunikasian keputusan direksi kepada level dibawah direksi / Update PT KAI Board of Directors Decree No. KEP.U/OT/104/IX/1/KA-2015 on the standard time for making decisions by the Board of Directors in the actions of the Board of Directors that require written approval from the Board of Commissioners or a written response from the Board of Directors of PT KAI and approval from the GMS by adding provisions/time limits for communicating the decisions of the Board of Directors to levels below the Board of Directors	Open
24.	89	Menetapkan prosedur dan penyusunan RJPP / Establish procedures and preparation of RJPP	Open
25.	91	Segera menetapkan pejabat definitif pada Jabatan Kosong yang dirangkap oleh pejabat lain (PYMT) / Immediately assign definitive officers to vacant positions concurrently with other officers (PYMT)	Open

No	Par	Rekomendasi / Recommendations	Tindak Lanjut / Follow-Up
26.	92	Melakukan update SK Direksi Nomor Kep.U/KU.401/XI/28/KA-2013 tanggal 29 November 2013 tentang Kebijakan Prosedur Pengelolaan Investasi serta pengeluaran yang dikapitalisasi (bersifat modal) di lingkungan PT KAI (Persero) dan menetapkan Mekanisme dalam Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen dibawah Direksi / Update the Decree of the Board of Directors No. Kep.U/KU.401/XI/28/KA-2013 dated November 29, 2013 on Policy Procedures for Investment Management and capitalized expenditures (capital in nature) at PT KAI (Persero) and establish a mechanism within the Board of Directors to respond to proposed business opportunities from management under the Board of Directors	Open
27.	99	Menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi / Prepare and submit performance incentive proposals for the Board of Directors to the GMS/Capital Owners	Open
28.	100	Menyampaikan Laporan pelaksanaan kinerja teknologi Informasi termasuk pelaksanaan Information Technology Master Plan (ITMP) & Information Technology Detail Plan (ITDP) Kepada Direksi dan Dekom / Submit report on the implementation of information technology performance including the implementation of the Information Technology Master Plan (ITMP) & Information Technology Detail Plan (ITDP) to the Board of Directors and Board of Commissioners	Open
29.	102	Melakukan update atas Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM.101/VIII/1/KA-2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sehingga Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa memuat secara tegas hak-hak dan kewajiban pemasok dan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku / Update the Regulation of the Board of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. PER.U/KM.101/VIII/1/KA-2022 dated 1 July 2022 on Procurement of Goods and Services so that the Guidelines for Procurement of Goods and Services clearly contain rights and obligations of suppliers and companies in accordance with applicable laws and regulations	Open
30.	107	Melaksanakan Control Self Assessment secara berkala atas efektivitas Struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku perusahaan / Carry out Control Self-Assessments regularly on the effectiveness of the internal control structure and financial reporting procedures at the end of the Company's fiscal year	Open
31.	112	Melaksanakan survey kepuasan pemasok/vendor secara berkala / Conduct supplier/vendor satisfaction survey regularly	Open
32.	113	Melaksanakan manajemen kas dan keuangan yang baik sehingga Tidak terjadi mismatch dalam penggunaan dan penyediaan dana dari penerbitan hutang jangka panjang untuk pembayaran bunga dan pokok hutang jangka panjang yang jatuh tempo / Carry out good cash and financial management to prevent mismatch in the use and provision of funds from the issuance of long-term debt for payment of interest and principal of maturing long-term debt	Open
33.	117	Menjaga Konsistensi pencapaian KPI Korporat / Maintain Consistency in achieving Corporate KPIs	Open
34.	127	Menetapkan batasan waktu pelaksanaan tindak lanjut arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris sehingga tindak lanjut yang dilaksanakan bukan tindak lanjut yang terlambat untuk dilaksanakan / Set a time limit for the follow-up to the Board of Commissioners' directions and/or decisions so that the follow-up is not too late to be implemented	Open
35.	129	SPI melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern baik dilakukan oleh Internal maupun Penilaian Oleh Eksternal yang dilakukan lima tahun sekali / SPI implements a quality assurance program and internal audit function improvement, which covers all aspects of the internal control function activities, both carried out by internal and external assessments which are carried out once every five years	Open
36.	132	Sekretaris Perusahaan agar: / The Corporate Secretary to: 1) menyelenggarakan, mempersiapkan materi program pengenalan direksi minimal memuat pengenalan prinsip-prinsip GCG, gambaran umum BUMN, kewenangan yang didelegasikan, tugas dan tanggung jawab direksi dan komisaris, serta mendokumentasikan program pengenalan perusahaan bagi Direksi yang baru diangkat yang berasal dari Luar perusahaan. / organize, prepare materials for the Board of Directors Introductory program which at least contain an introduction to the principles of GCG, general description of SOEs, delegated authority, duties and responsibilities of directors and commissioners, as well as documenting the company induction program for newly appointed Directors from outside the company. 2) menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan secara berkala./ prepare report on the implementation of the duties of the corporate secretary on a regular basis. 3) Menyusun laporan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku / prepare report on the level of Company compliance with applicable laws and regulations	Open
ASPEK INFORMASI DAN TRANSPARANSI / INFORMATION AND TRANSPARENCY ASPECT			
37	136	Melakukan revisi Peraturan Direksi Nomor PER.U/KL.104/VI/1/KA-2018 tanggal 05 Juni 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi RI No 1 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang standar layanan Informasi Publik / Revise the Board of Directors Regulation No. PER.U/KL.104/VI/1/KA-2018 dated June 5, 2018 on Guidelines for Public Information Services in accordance with Indonesian Information Commission Regulation No. 1 of 2021 dated June 25, 2021 on Public Information service standards	Open



PANORAMI

K109916

1

EKSEKUTIF

TS - 2000V
DK - 3000 KG

07

Laporan Keberlanjutan Sustainability Report



STRATEGI KEBERLANJUTAN KAI [OJK A.1, GRI 2-22]

KAI Sustainability Strategic



Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi dalam menyediakan jasa transportasi perkeretaapian, KAI memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan dedikasi terbaiknya dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yang antara lain dilaksanakan melalui penerapan pengelolaan keuangan berkelanjutan.

KAI melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara periodik sebagai bagian dari pemenuhan komitmen pencapaian SDGs, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. KAI memiliki unit khusus yang bertanggung jawab mengelola pelaksanaan TJSL Perseroan, yaitu Divisi *Vice President Corporate Social Responsibility (USS)*, di samping bertanggung jawab dalam pengelolaan *Community Relation* baik pada lingkup internal maupun eksternal KAI.

Komitmen KAI dalam upaya pencapaian SDGs diwujudkan secara konsisten dan berkesinambungan, melalui penetapan target pada masing-masing periode pelaksanaan. KAI menargetkan realisasi untuk masing-masing pilar TJSL

As a State-Owned Enterprise (SOE) engaged in providing rail transportation services, KAI is strongly committed to providing the best dedication in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) through the implementation of sustainable finance.

KAI implemented various Social and Environmental Responsibility (TJSL) program periodically in an effort to realize the SDGs in reference with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs. KAI appointed a dedicated unit in charge of the TJSL implementation, namely Vice President Corporate Social Responsibility (USS) Division that is also in charge of managing internal and external Community Relations.

KAI's commitment in realizing the SDGs is carried out consistently and sustainably by setting targets for each implementation period. The targets are set for every CSR pillar and achievement indicator to measure the implementation of

STRATEGI KEBERLANJUTAN KAI KAI Sustainability Strategy

“

KAI melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara periodik sebagai bagian dari pemenuhan komitmen pencapaian SDGs, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

KAI implemented various Social and Environmental Responsibility (TJSL) program periodically in an effort to realize the SDGs in reference with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs. ”

sebagai indikator pencapaian yang disusun dalam Rencana Kerja Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL). RKA TJSL KAI secara mendasar terbagi ke dalam 4 (empat) pilar prioritas pencapaian SDGs, yaitu pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi, serta pilar hukum dan tata kelola.

Secara lebih lanjut, KAI menerapkan strategi pencapaian pada pilar sosial dengan berfokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tanpa Kemiskinan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kota dan Pemukiman yang inklusif aman tangguh dan berkelanjutan, dan Ekosistem Darat. Dukungan KAI pada TPB Tanpa Kemiskinan diwujudkan dalam program KAI DungMas, seiring dukungan pada TPB Tanpa Kelaparan yang diwujudkan dalam program KAI-Quick Respon sebagai dukungan perlindungan bagi masyarakat khususnya yang tertimpa bencana alam. Adapun, program nyata dalam mendukung TPB Kehidupan Sehat dan Sejahtera diwujudkan dengan diadakan program KAI Sehat Sejahtera dan pelaksanaan sosialisasi pada perlintasan dan daerah rawan vandalisme. KAI mendukung penciptaan Pendidikan Berkualitas dengan berfokus untuk berkontribusi dalam TPB Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan dan Ekosistem Daratan melalui program KAI Go Green, program KAI-Pling (Peduli Lingkungan) dan program KAI Sar-i.

stated in the Social and Environmental Responsibility Budget Work Plan. In the Social and Environmental Responsibility Budget Work Plan (RKA TJSL) of KAI. The RKA TJSL of KAI contains 4 (four) pillars, namely social pillar, environmental pillar, economic pillar, as well as the legal and governance pillars.

KAI's sustainability strategy on social pillars focused on the Sustainable Development Goals: No Poverty, Zero Hunger, Good Health and Well-Being, Quality Education, and Gender Equality. The support of KAI for the SDGs of No Poverty, Sustainable Cities and Communities, and Life on Land is realized through KAI-DungMas program while the SDG of Zero Hunger is implemented in the KAI-Quick Respon program by providing protection for the community, especially in natural disasters. The program to support the SDG of Good Health and Well-Being at KAI is realized in the KAI Sehat Sejahtera program and dissemination on crossings and areas prone to vandalism. KAI supports Quality Education by focusing on contribution to the SDGs of Sustainable Cities and Communities and Life on Land through the KAI Go Green program, KAI-Pling (Environmental Care) program and the KAI Sar-i program.

Dalam pilar ekonomi, KAI berfokus pada TPB Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi yang diwujudkan melalui program (1) MiKA Hasanah, meliputi kegiatan Sertifikasi Halal dan Produk Halal, *Brand Operation*, dan *Online Single Submission (OSS)*, (2) MiKA Go Global, meliputi Kegiatan The 22nd Jakarta Internasional Handicraft Trade Fair (InaCraft) Tahun 2022, dan Kegiatan KAI EXPO Tahun 2022, (3) MiKA Next Class, meliputi Pelatihan Manajemen Keuangan, Pelatihan Penanganan Krisis Bagi UMKM, dan Pelatihan *Innovation and Improvement*, dan 30K UMK *Go Online*, (4) Teras MiKA merupakan Program untuk mendukung kegiatan bagi para umk guna meningkatkan kemampuan dan menambah pendapatan bagi mitra dengan menyediakannya space di area komersial perusahaan, (5) UMK *On Station and Train*, program yang meliputi Pameran mitra binaan di Stasiun KA dan museum lawang sewu serta membuat *digital catalog in train*, (6) Program Pendanaan UMK (PUMK) secara mandiri maupun kolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai program bantuan pinjaman modal usaha untuk UMK.

Terkait pilar hukum dan tata kelola, KAI berfokus dalam TPB Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Hal tersebut diwujudkan melalui program Terimakasih KAI berupa publikasi TJSL KAI di media awards.

Di samping program-program TJSL, KAI juga mewujudkan komitmen pencapaian TPB dengan melakukan sejumlah kegiatan rutin lainnya seperti pelatihan anti-korupsi, penggunaan material yang ramah lingkungan, menggunakan energi listrik dan air dengan efisien, memberikan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta pelatihan dan Pendidikan pegawai.

On the economic pillar, KAI focused on the SDGs of Decent Work and Economic Growth through the programs of (1) MiKA Hasanah, which includes Halal Certification and Halal Products, Brand Operations, and Online Single Submission (OSS), (2) MiKA Go Global, which include Activities of the 22nd Jakarta International Handicraft Trade Fair (InaCraft) in 2022, and KAI EXPO activities in 2022, (3) MiKA Next Class, including Financial Management Training, Crisis Handling Training for MSMEs, and Innovation and Improvement Training, and 30K UMK Go Online, (4) Teras MiKA is a program to support activities for UMK to increase capabilities and increase income for partners by providing space in the Company's commercial area, (5) UMK On Station and Train, a program that includes exhibitions of fostered partners at train stations and Lawang Sewu Museum and creating digital catalogs in train, (6) MSE Funding (PUMK) Program independently or in collaboration with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. as a venture capital loan assistance program for MSEs.

Meanwhile, on the pillar of legal and governance, KAI focused on the SDG of Peace, Justice, and Strong Institutions through the Thank You KAI program by publishing TJSL of KAI at awards.

In addition to the TJSL program, KAI is also committed to achieving SDGs through various other activities, including anti-corruption training, use of eco-friendly materials, implementation electricity and water energy efficiency, Occupational Safety and Health (OHS) training, and employee trainings and education.

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN [OJK B.]

Sustainability Performance Highlights

KINERJA ASPEK EKONOMI [OJK B.1]

ECONOMIC ASPECT PERFORMANCE [OJK B.1]

Uraian / Description	Satuan / Unit	2022	2021	2020
Kuantitas Produk/Jasa (sesuai jenis produk) / Product/Service Quantity (by product type)				
Angkutan Penumpang / Passenger Transportation	Penumpang / Customer	284.448.804	154.537.582	186.832.349
Angkutan Barang / Cargo	Ton	58.006.880	50.261.778	45.125.346
Komersialisasi Aset (Realisasi) / Asset Commercialization (Realization)	m ²	1.685.989.220	4.476.810,09	5.817.355,88
Pendapatan / Income	Jutaan Rupiah / In millions of Rupiah	25.577.639.010	17.916.776	18.074.851
Laba (Rugi) tahun berjalan / Income for the Year	Jutaan Rupiah / In millions of Rupiah	1.685.989.220	(425.196)	(1.736.238)
Produk Ramah Lingkungan: Kereta Rel Listrik / Eco-Friendly Product: Electric Rail Train	Unit Gerbong / Carriage Unit	1.064	1.060	1.074
Jumlah pemasok lokal / Number of local suppliers	Perusahaan/mitra / Company/partner	128	65	91

KINERJA ASPEK LINGKUNGAN HIDUP [OJK B.2]

ENVIRONMENTAL ASPECT PERFORMANCE [OJK B.2]

Uraian / Description	Satuan / Unit	2022	2021	2020
Pengurangan Energi / Energy Usage				
Penggunaan Energi Listrik / Electricity Usage	kWh	1.656.685	1.515.120	1.719.230
Penggunaan Air Tanah dari PDAM**) / Use of Groundwater from PDAM**)	m ³	9.100	6.000	7.200
Penggunaan Diesel / Diesel Usage	Liter	241.637	201.364	164.558
Penggunaan Diesel (Dexlite untuk Genset) / Diesel Usage (Dexlite for Generator)	Liter	1.550	2.000	3.000
Penggunaan BBM Biosolar (B30) / Use of Biodiesel Fuel (B30)	Liter	261.343.126	197.522.249	180.297.826
Pengurangan Emisi / Emission Reduction				
Bahan Bakar Minyak***) / Fuel Oil***)	Ton Co ² -eq	612.066	515.736	424.593
Listrik / Electricity	Ton Co ² -eq	1.547,34	1.415,12	1.605,76
Perjalanan Dinas / Business Trip	Ton Co ² -eq	319,620	86,201	105,722
Pengurangan Limbah dan Efluen / Waste and Effluent Reduction:				
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ¹⁾ / Wastewater Treatment Plant (WWTP) ¹⁾	Unit	38	38	Data belum tersedia
Pelestarian Keanekaragaman Hayati / Biodiversity Conservation				
Penanaman Pohon / Tree Planting	Pohon / Tree	64.157	13.023	5.776
Pengaduan Lingkungan / Environmental Complaint	Kasus / Case	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil

¹⁾ Banyaknya unit Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) menunjukkan upaya KAI dalam mengurangi limbah. Semakin banyak IPAL menunjukkan pengurangan limbah. / The number of Waste Water Treatment Plant (WWTP) units shows KAI's efforts in reducing waste. More WWTP means less waste.

²⁾ Penggunaan air di kantor pusat KAI / Water usage at KAI head office

³⁾ Penggunaan diesel pada aktivitas kantor KAI / Diesel usage in KAI's office activities.

KINERJA ASPEK SOSIAL [OJK B.3]

Dengan komitmen yang kuat untuk memberikan sarana dan prasarana yang terbaik untuk masyarakat di seluruh wilayah operasional kereta api, KAI berupaya untuk terus memberikan kemudahan akses transportasi secara luas bagi masyarakat. Lebih dari itu, seluruh kinerja operasional KAI pada masing-masing tahun diharapkan mampu ikut berkontribusi dalam memajukan perekonomian masyarakat khususnya di sekitar wilayah operasional.

Kami memahami bahwa di samping dampak positif, aktivitas operasional KAI juga menghadirkan dampak negatif antara lain berupa munculnya perlintasan sebidang jalur kereta api tanpa izin dan tanpa penjaga, dengan risiko terjadinya kecelakaan hingga menyebabkan kemacetan lalu lintas baik dari maupun menuju stasiun. KAI terus berupaya untuk meminimalisasi risiko tersebut dengan melakukan pengecekan berkala di sepanjang lintasan. Apabila dalam pengecekan ditemukan adanya perlintasan liar/tidak resmi, KAI akan berkoordinasi dengan perangkat masyarakat setempat untuk melakukan penutupan perlintasan sekaligus sosialisasi keselamatan perjalanan kereta api.

SOCIAL ASPECT PERFORMANCE [OJK B.3]

With a strong commitment to providing the best facilities and infrastructure for the public in all railroad operational areas, KAI strives to always provide easy and wide access to transportation for the public. Furthermore, all of KAI's operational performance in each year is expected to be able to contribute to advancing public economy, especially to those around the operational area.

We understand that our operations at KAI does not only generate positive impacts, but also negative impacts, including unlicensed and unguarded railroad crossing with the risk of accident causing traffic jams both to and from the station. KAI strives to minimize this risk by carrying out periodic checks along the track. If the inspection finds illegal/unofficial crossings, KAI will coordinate with local community officials to close the crossings as well as conduct dissemination on safe train travel.

Dampak Penerapan Kinerja Keuangan Berkelanjutan KAI bagi Masyarakat

Impact of KAI's Sustainable Financial Performance Implementation for the Community

Uraian / Description	Satuan / Unit	2022	2021	2020
Aspek Ketenagakerjaan / Labor Aspect				
Kepuasan Karyawan / Employee Satisfaction	%	83,40	84,40	83,60
Pengaduan Karyawan / Employee Complaint	Kasus / Case	304	409	403
Kecelakaan Kerja / Occupational Accident	Orang / Person	7	6	17
Aspek Pelanggan / Customer Aspect				
Pengaduan Pelanggan / Customer Complaint	Kasus / Case	29.106	15.818	24.132
Kepuasan Penumpang / Passenger Satisfaction	Skala (Kategori) / Scale (Category)	4,39 (High)	4,34 (High)	4,22 (High)
Aspek Sosial-Kemasyarakatan / Social-Community Aspect				
Penyaluran Dana Bina Lingkungan / Community Development Fund Distribution	Rupiah Penuh / Full Rupiah	9.645.348.012	8.769.074.128	17.538.148.867
Penyaluran Dana Kemitraan / Partnership Fund Distribution	Rupiah Penuh / Full Rupiah	7.066.650.000	7.070.575.000	7.091.700.000
Jumlah Mitra Binaan / Number of Fostered Partners	Perusahaan/Mitra / Company/ Partner	2.571	2.644	2.531

PROFIL PERUSAHAAN [OJK C]

Company Profile

VISI, MISI, DAN NILAI KEBERLANJUTAN KAI [OJK C.1]

Visi, misi, dan nilai keberlanjutan KAI diterapkan melalui fokus pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dengan penjabaran sebagai berikut:



Visi Vision

Menjadi perusahaan yang memberikan manfaat tinggi bagi masyarakat, lingkungan dan pemangku kepentingan melalui peningkatan aktivitas Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan *Community Relation* (CR).

To become a company that provides high benefits to the community, environment, and stakeholders through increased activities of the Community Development Partnership Program and Community Relations (CR).



Misi Mission

- Berperan aktif dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat serta kelestarian lingkungan.
- Membangun citra positif dan sinergi perusahaan dengan pemangku kepentingan guna terciptanya situasi kondusif bagi operasional perusahaan yang berkelanjutan.

- Taking an active role in realizing the improvement of the quality of life and community independence as well as environmental sustainability
- Building a positive image and synergy between the company and stakeholders in order to create a conducive situation for sustainable company operations



Nilai Keberlanjutan Sustainability Value

Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta lingkungan, sehingga masyarakat dapat menjadi mitra sejati dalam menciptakan situasi kondusif bagi kelangsungan usaha perusahaan.

Giving real contribution to the development and improvement of the quality of life of the community and the environment, so that the community can become a true partner in creating a conducive situation for the company's business continuity.

NAMA DAN ALAMAT KANTOR [OJK C.2, GRI 2-1, 2-3]

Informasi nama, alamat, nomor telepon alamat surat elektronik, situs web, serta alamat kantor cabang dan/atau kantor perwakilan KAI telah disajikan pada bab Profil Perusahaan.

STRUKTUR ORGANISASI [GRI 2-9]

Pengungkapan struktur organisasi KAI telah disajikan pada bab Profil Perusahaan.

OFFICE NAME AND ADDRESS [OJK C.2, GRI 2-1, 2-3]

The name, address, telephone number, email address, and website, as well as branch offices and/or representative offices of KAI can be seen in the Company Profile Chapter.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE [GRI 2-9]

The organizational structure of KAI can be seen in the Company Profile Chapter.

SKALA PERSEROAN [OJK C.3, GRI 102-7]

Skala usaha Perseroan pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

COMPANY SCALE [OJK C.3, GRI 102-7]

The Company's business scale as of December 31, 2022 can be seen in the table below:

Uraian / Description	Satuan / Unit	2022	2021	2020
Jumlah Pegawai / Number of Employees *)	Pegawai / Employee	27.365	26.897	27.665
Pendapatan / Income	Dalam Jutaan Rupiah / In Millions of Rupiah	25.577.639.010	15.529.530	14.413.374
Total Aset / Total Assets	Dalam Jutaan Rupiah / In Millions of Rupiah	71.581.229.723	62.768.827	53.207.069
Total Liabilitas / Total Liabilities	Dalam Jutaan Rupiah / In Millions of Rupiah	42.501.045.418	39.357.086	36.167.090
Total Ekuitas / Total Equity	Dalam Jutaan Rupiah / In Millions of Rupiah	29.080.184.305	23.441.740	17.039.980
Total Kapitalisasi (Liabilitas, Hak Minoritas, dan Ekuitas) / Total Capitalization (Liabilities, Minority Rights, and Equity)	Dalam Jutaan Rupiah / In Millions of Rupiah	71.581.229.723	62.768.827	53.207.069
Total Kepemilikan Saham / Total Share Ownership	Persentase / Percentage	Pemerintah Republik Indonesia (100%) / Government of the Republic of Indonesia (100%)	Pemerintah Republik Indonesia (100%) / Government of the Republic of Indonesia (100%)	Pemerintah Republik Indonesia (100%) / Government of the Republic of Indonesia (100%)
Jumlah Produk dan Jasa / Number of Products and Services	Produk dan Jasa / Products and Services	<ul style="list-style-type: none"> • Angkutan Penumpang / Passenger Transportation • Angkutan Barang / Cargo • Pendukung Angkutan Kereta Api / Rail Transport Support • Non Angkutan / Non-Transport 	<ul style="list-style-type: none"> • Angkutan Penumpang / Passenger Transportation • Angkutan Barang / Cargo • Pendukung Angkutan Kereta Api / Rail Transport Support • Non Angkutan / Non-Transport 	<ul style="list-style-type: none"> • Angkutan Penumpang / Passenger Transportation • Angkutan Barang / Cargo • Pendukung Angkutan Kereta Api / Rail Transport Support • Non Angkutan / Non-Transport

*) Data jumlah pegawai ini adalah jumlah pegawai KAI induk perusahaan, tidak termasuk anak perusahaan / This data on the number of employees is the number of employees of the parent company KAI, excluding subsidiaries

INFORMASI MENGENAI PEGAWAI [OJK C.3, GRI 2-7, 2-8]

Pada 31 Desember 2022, karyawan KAI adalah sejumlah 27.365 orang, yang terdiri dari pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Perincian komposisi pegawai KAI berdasarkan status kepegawaian, level jabatan, wilayah kerja, tingkat pendidikan, usia, dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

INFORMATION ON EMPLOYEES [OJK C.3, GRI 2-7, 2-8]

As of December 31, 2022, KAI had 27,365 employees consisting of Permanent Employees (PKWTT) and Non-Permanent Employees (PKWT). Details of KAI employee composition by employment status, position, work area, education, age, and gender are as follows:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

Employee Composition by Employment Status and Gender

Status Kepegawaian / Employment Status	2022			2021			2020		
	Pria / Male	Wanita / Female	Jumlah / Total	Pria / Male	Wanita / Female	Jumlah / Total	Pria / Male	Wanita / Female	Jumlah / Total
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) / Permanent Employees	25.889	1.470	27.359	25.446	1.447	26.893	26.189	1.472	27.661
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) / Non-Permanent Employees	6	-	6	4	-	4	4	-	4
Jumlah Pegawai / Total Employees	25.895	1.470	27.365	25.450	1.447	26.897	26.193	1.472	27.665

Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Jabatan dan Jenis Kelamin Employee Composition by Position Level and Gender

Level Jabatan / Position Level	2022			2021			2020		
	Pria / Male	Wanita / Female	Jumlah / Total	Pria / Male	Wanita / Female	Jumlah / Total	Pria / Male	Wanita / Female	Jumlah / Total
EVP	30	2	32	31	2	33	28	3	31
VP/GM	113	18	131	111	18	129	125	18	143
SM	50	2	52	44	3	47	45	5	50
Manager	501	87	588	493	87	580	517	87	604
Junior Manager	755	118	873	733	123	856	746	120	866
Assistant Manager	981	115	1.096	990	113	1103	980	110	1090
Senior Supervisor	827	32	859	833	29	862	829	27	856
Supervisor	1.067	95	1.162	1.080	91	1.171	1.092	85	1.177
Junior Supervisor	972	67	1.039	965	70	1035	973	70	1043
Pelaksana / Officer	19.819	922	20.741	20.165	909	21.074	20.849	944	21.793
Calon Pekerja / Prospective Employee	773	11	784	0	0	0	2	2	4
Cuti di Luar Tanggungan / Unpaid Leave	1	1	2	1	2	3	3	1	4
Staff-PKWT / Staff-Non-Permanent Employees	6	0	6	4	0	4	4	0	4
Jumlah Pegawai / Total Employees	25.895	1.470	27.365	25.450	1.447	26.897	26.193	1.472	27.665

Komposisi Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja dan Jenis Kelamin Employee Composition by Work Area and Gender

Wilayah Kerja / Work Area	2022			2021			2020		
	Pria / Male	Wanita / Female	Jumlah / Total	Pria / Male	Wanita / Female	Jumlah / Total	Pria / Male	Wanita / Female	Jumlah / Total
Kantor Pusat / Head Office	1.466	406	1.872	1.512	420	1.932	1.557	438	1.995
DAOP I Jakarta	2.864	180	3.044	2.892	171	3.063	3.028	169	3.197
DAOP II Bandung	1.790	97	1.887	1.759	90	1.849	1.831	93	1.924
DAOP III Cirebon	1.295	39	1.334	1.305	39	1.344	1.343	40	1.383
DAOP IV Semarang	1.743	68	1.811	1.768	74	1.842	1.809	70	1.879
DAOP V Purwokerto	1.730	58	1.788	1.753	56	1.809	1.822	55	1.877
DAOP VI Yogyakarta	1.839	100	1.939	1.868	89	1.957	1.873	93	1.966
DAOP VII Madiun	1.212	53	1.265	1.231	54	1.285	1.280	50	1.330
DAOP VIII Surabaya	2.247	134	2.381	2.283	137	2.420	2.368	141	2.509
DAOP IX Jember	951	33	984	978	36	1.014	1.022	39	1.061
DIVRE I Sumatera Utara	1.371	40	1.411	1.374	38	1.412	1.454	40	1.494
SUBDIVRE I.1 Aceh	16	1	17	16	1	17	11	1	12
DIVRE II Sumatera Barat	525	16	541	548	16	564	566	17	583
DIVRE III Palembang	2.791	89	2.880	2.484	86	2.570	2.469	87	2.556
DIVRE IV Tanjungkarang	2.023	57	2.080	1.881	53	1.934	1.936	54	1.990
Balai Yasa Manggarai	304	18	322	316	19	335	330	19	349

Wilayah Kerja / Work Area	2022			2021			2020		
	Pria / Male	Wanita / Female	Jumlah / Total	Pria / Male	Wanita / Female	Jumlah / Total	Pria / Male	Wanita / Female	Jumlah / Total
Balai Yasa Tegal	246	9	255	251	9	260	260	11	271
Balai Yasa Yogyakarta	365	12	377	373	13	386	395	14	409
Balai Yasa Surabaya Gubeng	252	13	265	264	11	275	269	11	280
Balai Yasa Lahat	329	6	335	321	6	327	341	6	347
Balai Yasa Pulbrayan	88	7	95	96	7	103	99	5	104
LRT JABODEBEK	448	34	482	177	22	199	130	19	149
Jumlah Pegawai / Total Employees	25.895	1.470	27.365	25.446	1.447	26.897	26.189	1.472	27.665

Komposisi Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja dan Status Kepegawaian Employee Composition by Work Area and Employment Status

Wilayah Kerja / Work Area	2022			2021			2020		
	PKWTT / Permanent	PKWT / Non- Permanent	Jumlah / Total	PKWTT / Permanent	PKWT / Non- Permanent	Jumlah / Total	PKWTT / Permanent	PKWT / Non- Permanent	Jumlah / Total
Kantor Pusat / Head Office	1.866	6	1.872	1.928	4	1.932	1.991	4	1.995
DAOP I Jakarta	3.044	-	3.044	3.063	-	3.063	3.197	-	3.197
DAOP II Bandung	1.887	-	1.887	1.849	-	1.849	1.924	-	1.924
DAOP III Cirebon	1.334	-	1.334	1.344	-	1.344	1.383	-	1.383
DAOP IV Semarang	1.811	-	1.811	1.842	-	1.842	1.879	-	1.879
DAOP V Purwokerto	1.788	-	1.788	1.809	-	1.809	1.877	-	1.877
DAOP VI Yogyakarta	1.939	-	1.939	1.957	-	1.957	1.966	-	1.966
DAOP VII Madiun	1.265	-	1.265	1.285	-	1.285	1.330	-	1.330
DAOP VIII Surabaya	2.381	-	2.381	2.420	-	2.420	2.509	-	2.509
DAOP IX Jember	984	-	984	1.014	-	1.014	1.061	-	1.061
DIVRE I Sumatera Utara	1.411	-	1.411	1.412	-	1.412	1.494	-	1.494
SUBDIVRE I.1 Aceh	17	-	17	17	-	17	12	-	12
DIVRE II Sumatera Barat	541	-	541	564	-	564	583	-	583
DIVRE III Palembang	2.880	-	2.880	2.570	-	2.570	2.556	-	2.556
DIVRE IV Tanjungkarang	2.080	-	2.080	1.934	-	1.934	1.990	-	1.990
Balai Yasa Manggarai	322	-	322	335	-	335	349	-	349
Balai Yasa Tegal	255	-	255	260	-	260	271	-	271
Balai Yasa Yogyakarta	377	-	377	386	-	386	409	-	409
Balai Yasa Surabaya Gubeng	265	-	265	275	-	275	280	-	280
Balai Yasa Lahat	335	-	335	327	-	327	347	-	347
Balai Yasa Pulbrayan	95	-	95	103	-	103	104	-	104
LRT JABODEBEK	482	-	482	199	-	199	149	-	149
Jumlah Pegawai / Total Employees	27.359	6	27.365	26.893	4	26.897	27.656	4	27.665

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin **Employee Composition by Education and Gender**

Tingkat Pendidikan / Education	2022			2021			2020		
	Pria / Male	Wanita / Female	Jumlah / Total	Pria / Male	Wanita / Female	Jumlah / Total	Pria / Male	Wanita / Female	Jumlah / Total
Golongan I / Group I	367	-	367	442	-	442	543	-	543
SLTP / Junior High School	575	1	576	679	1	680	802	3	805
SLTA / Senior High School	22.681	851	23.532	22.236	829	23.065	22.691	835	23.526
D3 / Associate Degree	787	213	1.000	613	202	815	619	205	824
S1 / Bachelor's Degree	1.445	385	1.860	1.437	397	1.834	1.495	414	1.909
S2 / Master's Degree	40	20	60	43	18	61	43	15	58
Jumlah Pegawai / Total Employees	25.895	1.470	27.365	25.450	1.447	26.897	26.193	1.472	27.665

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin **Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin**

Usia / Age	2022			2021			2020		
	Pria / Male	Wanita / Female	Jumlah / Total	Pria / Male	Wanita / Female	Jumlah / Total	Pria / Male	Wanita / Female	Jumlah / Total
< 30 tahun / <30 years old	7.197	427	7.624	7.530	469	7.999	9.377	569	9.946
31-40 tahun / 31-40 years old	10.515	539	11.054	9.502	487	9.989	8.056	428	8.484
41-50 tahun / 41-50 years old	5.761	464	6.225	5.967	457	6.424	6.194	436	6.630
51-55 > tahun / 51-55 > years old	2.422	40	2.462	2.451	34	2.485	2.566	39	2.605
Jumlah Pegawai / Total Employees	25.895	1.470	27.365	25.446	1.447	26.897	26.189	1.472	27.665

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin **Employee Composition by Gender**

Jenis Kelamin / Gender	2022	2021	2020
Pria / Male	25.895	25.450	26.193
Wanita / Female	1.470	1.447	1.472
Jumlah / Total	27.365	26.897	27.665

WILAYAH KERJA DAN PASAR YANG DILAYANI [OJK C.3]

Informasi wilayah kerja dan pasar yang dilayani oleh KAI telah disajikan pada bab Profil Perusahaan.

WORK AREA AND MARKETS SERVED [OJK C.3]

Information on work area and markets served by KAI can be seen in the Company Profile chapter.

PRODUK DAN JASA, LAYANAN SERTA KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN [OJK C.4]

Produk dan jasa, layanan, serta kegiatan usaha yang dijalankan KAI telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan.

PRODUCTS, SERVICES, AND BUSINESS ACTIVITIES [OJK C.4]

Products, services, and business activities of KAI can be seen in the Company Profile Chapter.

KEANGGOTAAN ASOSIASI [OJK C.5, GRI 2-28]

Informasi keanggotaan asosiasi KAI telah disajikan pada bab Profil Perusahaan.

ASSOCIATION MEMBERSHIP [OJK C.5, GRI 2-28]

Information on association membership of KAI can be seen in the Company Profile chapter.

PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA ORGANISASI DAN RANTAI PASOKAN [OJK C.6, GRI 2-6]

Di tahun 2022, tidak terdapat yang signifikan pada bisnis ataupun organisasi KAI, termasuk perubahan berupa pembukaan atau penutupan Daerah Operasi (DAOP), dan Divisi Regional (DIVRE).

Perubahan struktur organisasi KAI pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko (D8);
2. Perubahan Struktur Organisasi Operasional Division of Light Rail Transit Jabodebek;
3. Perubahan UPT Balai Yasa Tegal dan UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng;
4. Pembentukan Digital Transformation Office; dan
5. Beberapa perubahan pada Bagian di Daerah Operasi 2 Bandung, Daerah Operasi 3 Cirebon, Daerah Operasi 4 Semarang, Daerah Operasi 6 Yogyakarta, dan Daerah Operasi 8 Surabaya.

Meski demikian, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang dilakukan seiring keputusan RUPS untuk memberhentikan dan mengangkat anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dengan uraian sebagai berikut:

- Pada tahun 2022, komposisi Dewan Komisaris Perseroan mengalami 3 (tiga) kali perubahan yang dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perseroan No. SK-173/MBU/08/2022 dan No. SK-174/MBU/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 serta Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perseroan No. SK-240/MBU/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022, dengan alasan untuk penataan susunan anggota Dewan Komisaris Atas perubahan tersebut, komposisi Dewan Komisaris pada 31 Desember 2022 terdiri atas 9 (sembilan) anggota, yang seluruhnya telah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) oleh Kementerian BUMN.
- Di tahun 2022, komposisi Direksi Perseroan mengalami 2 (dua) perubahan yang dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perseroan Nomor SK-89/MBU/03/2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia tanggal 31 Maret 2022 serta Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perseroan Nomor SK-240/MBU/10/2022 tentang Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia tanggal 26 Oktober 2022, dengan alasan untuk penataan susunan anggota Direksi Perusahaan Atas perubahan tersebut,

SIGNIFICANT CHANGES IN ORGANIZATION AND SUPPLY CHAIN [OJK C.6, GRI 2-6]

In 2022, there were a number of significant changes in KAI's business or organization, including changes in the form of opening or closing Operational Areas (DAOP) and Regional Divisions (DIVRE).

Changes in the organizational structure of KAI in 2022 are as follows:

1. Directorate of Finance and Risk Management (D8);
2. Changes in the Organizational Structure of the Operational Division of Jabodebek Light Rail Transit;
3. Changes to UPT Balai Yasa Tegal and UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng;
4. Establishment of Digital Transformation Office; and
5. Several changes to the Sections in Operational Area 2 Bandung, Operational Area 3 Cirebon, Operational Area 4 Semarang, Operational Area 6 Yogyakarta, and Operational Area 8 Surabaya.

In addition, there were changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors which were made in line with the GMS resolution to dismiss and appoint members of the Board of Commissioners and Board of Directors, with the following description:

- In 2022, the composition of the Company's Board of Commissioners underwent 3 (three) changes which were made based on the Decree of the Minister of SOEs as the Company's GMS No. SK-173/MBU/08/2022 and No. SK-174/MBU/08/2022 dated August 15, 2022 and Decree of the Minister of SOEs as the Company's GMS No. SK-240/MBU/10/2022 dated October 26, 2022, for the arrangement of the composition of the Board of Commissioners. Due to these changes, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2022 consisted of 9 (nine) members, all of whom have passed the Fit and Proper Test (UKK) by the Ministry of SOEs.
- In 2022, the composition of the Company's Board of Directors underwent 2 (two) changes which were made based on the Decree of the Minister of SOEs as the Company's GMS No. SK-89/MBU/03/2022 concerning Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Kereta Api Indonesia dated March 31, 2022 and Decree of the Minister of SOEs as the Company's GMS No. SK-240/MBU/10/2022 concerning the Transfer of Duties of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Kereta Api Indonesia dated October 26, 2022, for the arrangement of the composition of the

komposisi Direksi pada 31 Desember 2022 terdiri atas 9 (sembilan) anggota, yang seluruhnya telah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) oleh Kementerian BUMN.

Board of Directors. Due to this change, the composition of the Board of Directors as of December 31, 2022 consisted of 9 (nine) members, all of whom have passed the Fit and Proper Test (UKK) by the Ministry of SOEs.

Kemudian, terdapat perubahan signifikan pada rantai pasokan KAI dengan bertambahnya jumlah pemasok barang dan jasa. Pada tahun 2022, KAI bekerja sama dengan sejumlah 128 mitra, atau meningkat dibanding pada tahun 2021 yang sejumlah 65 mitra. Pemasok KAI secara umum terdiri atas pemasok bidang sarana kereta api, prasarana kereta api, dan bidang umum.

Then, there was a significant change in KAI's supply chain with an increase in the number of suppliers of goods and services. In 2022, KAI worked with 128 partners, or an increase compared to 2021 with 65 partners. KAI's suppliers generally consist of suppliers in rail facilities, rail infrastructure, and general sectors.

Rantai Pasok Terintegrasi [GRI 2-6]

Dalam rangka menunjang kegiatan operasional, KAI menjalin hubungan kerja sama dengan sejumlah mitra penyedia barang dan jasa yang menjadi bagian dari rantai bisnis. KAI merupakan salah satu BUMN, dan karenanya, menerapkan praktik pengadaan barang dan jasa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Integrated Supply Chain [GRI 2-6]

In order to support operational activities, KAI works with a number of goods and service provider partners who are part of the business chain. As a SOE, KAI implements the practice of procuring goods and services by referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-08/MBU/12/2019 concerning General Guidelines for Implementation of Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises.

KAI melakukan praktik pengadaan secara terintegrasi sebagai upaya menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional, antara lain berupa suku cadang lokomotif kereta, gerbong, batu kricak, bantalan, penambat rel, jasa pengiriman dan jasa perbaikan lokomotif, kereta dan gerbong, dan jasa lainnya.

KAI carries out procurement practices in an integrated manner as an effort to provide goods and services needed in operational activities, including spare parts for locomotives, trains, carriages, bricks, bearings, rail moorings, delivery services and repair services for locomotives, trains and carriages and other services.

Secara keseluruhan, barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional telah dipenuhi melalui kerja sama KAI dengan 128 mitra penyedia barang dan jasa, sebagai pihak yang terlibat dalam rantai pasokan. Sebagian besar mitra penyedia barang dan jasa KAI merupakan pemasok lokal, yang berlokasi pada sejumlah wilayah di Indonesia.

Overall, the goods and services for operations have been fulfilled through KAI's collaboration with 128 provider partners of goods and services, as parties involved in the supply chain. Most of KAI's partners providing goods and services are local suppliers from various regions in Indonesia.

PROGRAM DAN KEBIJAKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA PADA RANTAI PASOKAN

KAI memahami bahwa keberadaan pemasok berorientasi lingkungan yang mengimplementasikan prinsip-prinsip keberlanjutan merupakan hal yang penting dalam keseluruhan upaya pemenuhan SDGs. Atas pemahaman tersebut, KAI melakukan proses seleksi terhadap pemasok yang digunakan dengan menggunakan pemenuhan prinsip keberlanjutan sebagai kriteria pemilihan. Di samping itu, KAI menerapkan kebijakan dalam meningkatkan kualitas kinerja pemasok dalam keseluruhan rantai pasokan, khususnya berkenaan

PROGRAMS AND POLICIES TO IMPROVE THE PERFORMANCE QUALITY OF SUPPLY CHAIN

KAI acknowledges the importance of environmentally-oriented suppliers applying sustainability principles to achieve SDGs. In light of this, KAI conducts a selection process for its suppliers by using the application of sustainability principles as the selection criteria. In addition, KAI implements policies on improving the suppliers' performance quality in the entire supply chain, especially related to the application of sustainability principles in its business, by referring to KAI's Goods and Services Procurement Policy (PBJ) regulated in

dengan pemenuhan prinsip keberlanjutan dalam proses bisnis yang dilakukan, berdasarkan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) KAI yang diatur di dalam Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM.101/VIII/1/KA-2022 pasal 31.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Directors Regulation No. PER.U/KM.101/VIII/1/KA-2022 article 31.

Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kinerja rantai pasokan, KAI telah melakukan peninjauan serta pemutakhiran Kebijakan PBJ secara berkala.

KAI has reviewed and updated the PBJ Policy periodically to improve the performance quality of the supply chain.

SINERGI KAI DENGAN ENTITAS ANAK DAN ENTITAS AFILIASI [GRI 2-6]

KAI melaksanakan aktivitas operasionalnya melalui sinergi bersama entitas anak dan entitas afiliasi. Uraian mengenai sinergi KAI dengan entitas anak dan entitas afiliasi untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

KAI SYNERGY WITH SUBSIDIARIES AND AFFILIATED ENTITIES [GRI 2-6]

KAI carries out its operational activities through synergy with its subsidiaries and affiliates. Description of KAI synergy with its subsidiaries and affiliated entities for 2022 is as follows:

No.	Entitas Anak / Subsidiaries	Sinergi / Synergy
1	PT Reska Multi Usaha (RMU)/KAI Services	PT Reska Multi Usaha (RMU)/KAI Services merupakan entitas anak yang mendukung kegiatan operasional KAI dalam bidang <i>on board services</i> (pengelolaan makanan & minuman dalam perjalanan kereta api dan <i>on train cleaning</i>), <i>integrated facility service</i> (penyediaan <i>security</i> di area kantor dan stasiun, <i>parking service</i> , <i>cleaning services</i> , dan <i>outsourcing</i>). / PT Reska Multi Usaha (RMU)/KAI Services is a subsidiary that supports KAI's operational activities in the areas of on board services (management of food & beverage during train travel and on train cleaning), integrated facility service (providing security in office and station areas, parking services, cleaning services, and outsourcing).
2	PT Railink (Railink)/KAI Bandara	PT Railink (Railink)/KAI Bandara merupakan entitas anak yang mendukung kegiatan operasional KAI dalam pengelolaan kereta api bandara. / PT Railink (Railink)/KAI Bandara is a subsidiary that supports KAI's operations for airport rail management.
3	PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) / KAI Commuter	PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)/KAI Commuter merupakan entitas anak yang mendukung kegiatan operasional KAI dalam mengelola KRL di Jabodetabek, Yogya, Solo, Kutoarjo, dan mengelola kereta api lokal di wilayah Daop 2 Bandung dan Daop 8 Surabaya. Pembentukan anak perusahaan ini berawal dari keinginan para <i>stakeholder</i> -nya untuk lebih fokus dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan menjadi bagian dari solusi masalah transportasi perkotaan yang semakin kompleks / PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)/KAI Commuter is a subsidiary that supports KAI's operational activities in managing KRL in Greater Jakarta, and Yogya, Solo, Kutoarjo, and managing local trains in the Daop 2 Bandung and Daop 8 Surabaya areas. The establishment of this subsidiary started from the desire of its stakeholders to focus more on providing quality services and become part of the solution to increasingly complex urban transportation problems.
4	PT KA Logistik (KALOG) / KAI Logistik	PT KA Logistik (KALOG)/KAI Logistik merupakan entitas anak yang mendukung kegiatan operasional KAI dalam bidang layanan distribusi logistic dengan berbagai produk diantaranya KALOG Express untuk layanan kurir dan kargo, KALOG Plus untuk mengakomodir kebutuhan pengiriman barang dalam jumlah yang lebih besar, serta layanan penunjang untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan logistik yang beragam seperti <i>Less than container load</i> , <i>Freight Forwarding</i> , <i>depot/warehousing</i> dan kegiatan <i>keterminalan</i> lainnya. Selain itu, KAI Logistik juga menghadirkan KALOG Pro untuk segmentasi logistik <i>business to business</i> dengan menawarkan keunggulan dan pelayanan prima serta menyediakan layanan <i>one stop solution/end to end services</i> guna mewujudkan layanan total <i>logistics solution</i> seperti layanan angkutan <i>multi commodity</i> , <i>keterminalan</i> dan <i>penanganan batubara</i> . / PT KA Logistik (KALOG)/KAI Logistik is a subsidiary that supports KAI's operational activities in the fields of logistics distribution services with various products including KALOG Express for courier and cargo services, KALOG Plus to accommodate the need for shipping goods in larger quantities, as well as supporting services to ensure the fulfillment of diverse logistics needs such as Less than container load, Freight Forwarding, depot/warehousing and other terminal activities. In addition, KAI Logistics also presents KALOG Pro for business to business logistics segmentation by offering excellence and excellent service and providing one stop solution/end to end services to realize total logistics solution services such as multi commodity transportation services, terminals and coal handling.
5	PT KA Properti Manajemen (KAPM) / KAI Properti	PT KA Properti Manajemen (KAPM)/KAI Properti merupakan entitas anak yang menyediakan jasa pendukung angkutan kereta api berupa pengadaan suku cadang, alat kerja, dan material-material yang dibutuhkan untuk operasional, pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian, serta pengadaan alat dan bahan bantu kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan mitra usaha. Di samping itu, KAI Properti juga memiliki lini bisnis perawatan jalan rel dan jembatan sebagai upaya dalam menghadirkan dukungan bagi KAI sebagai penyedia jasa perkeretaapian di Indonesia. / PT KA Properti Manajemen (KAPM)/KAI Properti is a subsidiary that provides rail transportation support services in procuring spare parts, working tools, and materials needed for operations, building railway facilities and infrastructure, and procuring work tools and materials. required by business partners. In addition, KAI Properti also has a rail and bridge maintenance business line as an effort to provide support for KAI as a provider of railway services in Indonesia.
6	PT KA Pariwisata (KAWIS) / KAI Wisata	PT KA Pariwisata (KAWIS)/KAI Wisata merupakan entitas anak yang mendukung kegiatan operasional KAI dalam penyediaan jasa/layanan meliputi paket perjalanan wisata untuk individu ataupun korporasi, dengan menggunakan kereta api khusus sebagai transportasi utama. KAI Wisata juga dipercaya untuk mengelola aset KAI yaitu Lawang Sewu dan Museum Ambarawa. Di samping itu, KAI Wisata memiliki lini bisnis pendukung seperti pengurusan dokumen perjalanan, Executive Anggrek Lounge, Keagenan Tiket, MICE, Paket Tour, Penyedia Jasa SDM, Shower n Locker, serta Umrah dan Haji. / PT KA Wisata (KAWIS)/KAI Wisata is a subsidiary that supports KAI's operational activities in the provision of services including tour travel packages for individuals or corporations, using special trains as the main transportation. KAI Wisata is also entrusted with managing KAI's assets, namely Lawang Sewu and the Ambarawa Museum. In addition, KAI Wisata has supporting business lines such as travel document management, Executive Anggrek Lounge, Ticket Agency, MICE, Tour Packages, HC Service Providers, Shower n Locker, as well as Umrah and Hajj.

No.	Entitas Afiliasi / Affiliated Entities	Sinergi / Synergy
1	PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh konsorsium BUMN yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara VIII dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang bergerak dalam bidang usaha transportasi, perdagangan, jasa, industri, pembangunan, perbengkelan, perkebunan dan pertanian untuk mendukung keberlangsungan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. / PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) is a joint venture company established by a consortium of BUMN, namely PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara VIII and PT Jasa Marga (Persero) Tbk which are engaged in the business sector of transportation, trade, services, industry, construction, workshops, plantations and agriculture to support the sustainability of the Jakarta-Bandung high-speed rail project.
2	PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (PT MITJ) merupakan perusahaan patungan antara KAI dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) dengan visi untuk menjadi solusi transportasi terintegrasi di Jabodetabek. MITJ bertugas mengelola transportasi perkeretaapian yang terintegrasi dan mengembangkan kawasan berbasis <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) dan melakukan pengawasan kawasan stasiun di Jakarta sesuai SK Sekda Provinsi DKI Jakarta No. 35 Tahun 2020. / PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (PT MITJ) is a joint venture between KAI and PT MRT Jakarta (Perseroda) with a vision to become an integrated transportation solution in Jabodetabek. MITJ is in charge of managing integrated rail transportation and developing Transit Oriented Development (TOD)-based areas in the Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) area and supervising the station area in Jakarta according to the Decree of the Regional Secretary of DKI Jakarta Province No. 35 of 2020.

INISIATIF EKSTERNAL [GRI 2-5]

KAI melaksanakan penerapan keuangan berkelanjutan dengan mengadopsi standar internasional ISO 26000 tentang *Guidance on Social Responsibility dan Sustainable Development Goals* (SGDs) yang dikembangkan oleh United Nation, di samping penerapan standar manajemen mencakup ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan. Secara khusus, penerapan Sistem Manajemen Lingkungan sesuai ISO 14001:2015 oleh KAI telah disertai inisiatif eksternal berupa pemerolehan sertifikasi dari PT Sucofindo (Persero) dengan masa berlaku hingga 27 September 2023.

Pengungkapan daftar penghargaan dan sertifikasi KAI untuk tahun 2022 telah disajikan pada bab Profil Perusahaan.

ETIKA DAN INTEGRITAS KAI

Budaya Perusahaan

KAI menerapkan budaya perusahaan sesuai *core values* BUMN berupa "AKHLAK", berdasarkan pemberlakuan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 Tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia BUMN.

Pengungkapan mengenai nilai-nilai budaya KAI telah disajikan pada bab Profil Perusahaan.

Kode Etik

KAI menerapkan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku bagi seluruh insan Perseroan. Informasi mengenai hal tersebut telah disajikan pada bab Tata Kelola Perusahaan.

EXTERNAL INITIATIVES [GRI 2-5]

KAI implements sustainable finance by adopting ISO 26000 international standards on Guidance on Social Responsibility and Sustainable Development Goals (SDGs) developed by the United Nations, in addition to implementing management standards including ISO 14001:2015 concerning Environmental Management Systems. In particular, the implementation of the Environmental Management System according to ISO 14001:2015 by KAI has been accompanied by external initiatives in the form of certification from PT Sucofindo (Persero) with a validity period of to September 27, 2023.

Disclosure of awards and certifications of KAI in 2022 can be seen in the Company Profile chapter.

KAI ETHICS AND INTEGRITY

Corporate Culture

KAI implements a corporate culture according to SOE core values of "AKHLAK" pursuant Minister of SOE Circular No. SE-7/MBU/07/2020 Concerning Core Values of SOE Human Capital

Information on KAI cultural values can be seen in the Company Profile chapter.

Code of Conduct

KAI implements a Code of Conduct that applies to all Company personnel. Information on this matter can be seen in the Good Corporate Governance chapter.

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Sustainable Governance



STRUKTUR TATA KELOLA DAN PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK E.1, GRI 2-9]

KAI menerapkan praktik keuangan berkelanjutan melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021.

KAI memiliki unit kerja khusus yang bertanggung jawab mengelola dan mengkoordinasi penerapan praktik keuangan berkelanjutan, yaitu Divisi *Corporate Social Responsibility*. Divisi *Corporate Social Responsibility* KAI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan program TJSL serta *Community Relations*, yaitu hubungan KAI dengan pihak internal serta eksternal pada seluruh aktivitas Perseroan.

GOVERNANCE STRUCTURE AND PARTY IN CHARGE OF SUSTAINABLE FINANCE IMPLEMENTATION [OJK E.1, GRI 2-9]

KAI implements sustainable financial practices through Social and Environmental Responsibility (TJSL) program pursuant to the Minister of SOE Regulation No. PER-05/MBU/04/2021.

KAI has a dedicated work unit in charge of managing and coordinating the implementation of sustainable financial practices, namely the Division of Corporate Social Responsibility. The Division of Corporate Social Responsibility has the duty and responsibility to manage the implementation of the TJSL and Community Relations program, including KAI's relationship with internal and external parties in all of the Company's activities.

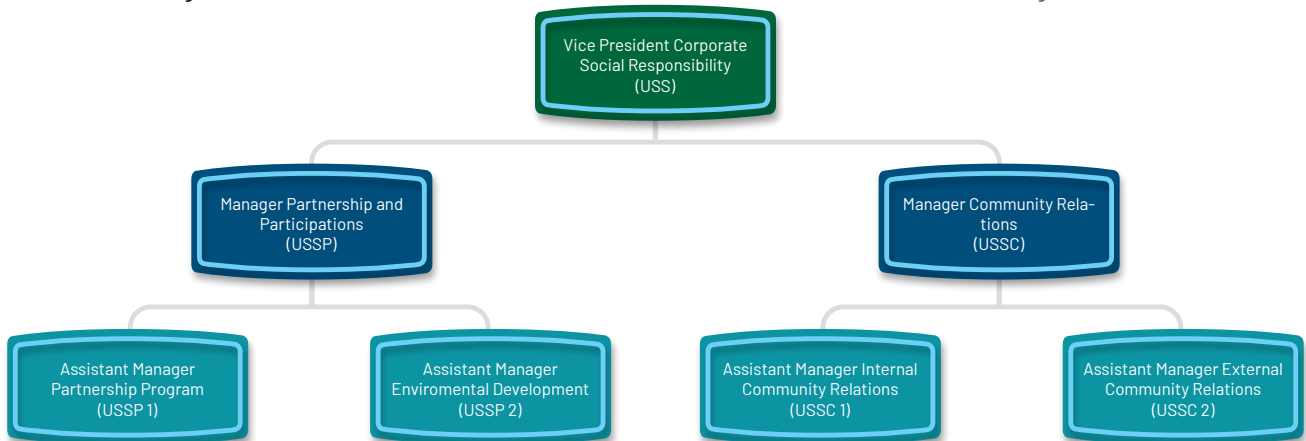
“

KAI memiliki unit kerja khusus yang bertanggung jawab mengelola dan mengkoordinasi penerapan praktik keuangan berkelanjutan, yaitu Divisi *Corporate Social Responsibility*.

KAI has a dedicated work unit in charge of managing and coordinating the implementation of sustainable financial practices, namely the Division of Corporate Social Responsibility. ”

Struktur Divisi *Corporate Social Responsibility* KAI dapat dilihat melalui bagan berikut:

The structure of KAI Division of Corporate Social Responsibility Division can be seen in the following chart:



Vice President Corporate Social Responsibility melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan didukung oleh 2 (dua) Manager, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Manager Partnership and Participations*

Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai dengan penugasan Perseroan, serta melaksanakan penyusunan program kerja Kemitraan untuk RUPS ke Kementerian BUMN dan melaksanakan pendampingan pembuatan laporan audit Program Kemitraan.

Implementation of Vice President Corporate Social Responsibility duties and responsibilities is supported by 2 (two) Managers, with the following description:

1. Manager of Partnership and Participations

Has the main duties and responsibilities of managing Social and Environmental Responsibility (TJSL) Program in accordance with the Company's assignment, preparing the Partnership work program for GMS to the Ministry of SOE. and supporting the preparation of Partnership Program audit reports.

Manager Partnership and Participations dibantu oleh 2 (dua) *Assistant Manager*, dengan uraian sebagai berikut:

a. *Assistant Manager Partnership Program*

Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melakukan survei lokasi dan kebenaran calon mitra binaan, pemantauan pelaksanaan Program Kemitraan (PK), melakukan rekapitulasi laporan daerah untuk laporan manajemen, rekonsiliasi laporan serta melakukan evaluasi atas pencapaian program kerja sesuai dengan penugasan perusahaan.

b. *Assistant Manager Environmental Development*

Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab untuk melakukan survei lokasi dan menganalisis pengajuan, pemantauan pelaksanaan program Bina Lingkungan (BL), melakukan rekapitulasi laporan daerah untuk laporan manajemen, rekonsiliasi laporan, serta melakukan evaluasi atas pencapaian program kerja sesuai dengan penugasan Perseroan.

2. *Manager Community Relations*

Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan *Community Relations*, baik secara internal maupun eksternal, guna mengatasi masalah sosial yang tumbuh akibat aktivitas Perseroan.

Manager Community Relations dibantu oleh 2 (dua) *Assistant Manager*, dengan uraian sebagai berikut:

a. *Assistant Manager Internal Community Relations*

Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab yaitu melaksanakan program pembinaan komunitas secara internal, termasuk penyiapan sarana dan prasarana olahraga pusat dan daerah untuk pencapaian prestasi olahraga Perseroan, serta melakukan pembinaan kesenian dan kegiatan keagamaan pada kantor pusat.

b. *Assistant Manager External Community Relations*

Memiliki tugas pokok dan tanggung jawab untuk melaksanakan program kegiatan eksternal berupa kegiatan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, bakti sosial dan kegiatan yang diperlukan guna turut mengatasi masalah sosial sebagai akibat dari kegiatan operasional Perseroan.

The Manager of Partnership and Participations is assisted by 2 (two) Assistant Managers, with the following description:

a. Assistant Manager of Partnership Program

Has the main duties and responsibilities of conducting surveys of sites and correctness of prospective partners, monitoring the implementation of the Partnership (PK) Program, recapitulating regional reports for management reports, drawing up reports, and evaluating the achievement of work programs in accordance with the Company's assignments.

b. Assistant Manager of Environmental Development

Has the main duties and responsibilities of conducting site surveys and analyzing submissions, monitoring the implementation of the Community Development (BL) program, recapitulating regional reports for management reports, reconciling reports, and evaluating the achievement of work programs in accordance with the Company's assignments.

2. Manager of Community Relations

Has the main duties and responsibilities of managing external and internal Community Relations to overcome social issues arising from the Company's activities.

The Manager of Community Relations is assisted by 2 (two) Assistant Managers, with the following description:

a. Assistant Manager of Internal Community Relations

Has main duties and responsibilities, namely carrying out community development programs internally, including preparing central and regional sports facilities and infrastructure in supporting the Company's sporting achievements, as well as conducting arts and religious activities at the head office.

b. Assistant Manager of External Community Relations

Has main duties and responsibilities to carry out external activity programs in the form of health service activities to the public, social services and activities to overcome social issues arising from the Company's operations.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERKAIT KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK E.2]

KAI secara konsisten menerapkan program pengembangan kompetensi bagi jajaran manajemen dan pegawai yang secara mendasar berperan penting sebagai dukungan bagi penerapan praktik keuangan berkelanjutan yang dijalankan Perseroan.

Pengembangan kompetensi itu dilakukan melalui sejumlah kegiatan pelatihan dengan tema terkait penerapan praktik keuangan berkelanjutan, antara lain pelatihan kebijakan *anti-fraud* atau anti-korupsi, peningkatan kapabilitas *Whistleblowing System*, pengendalian gratifikasi berupa pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Lebih dari itu, KAI memberikan pelatihan keselamatan khusus kepada pegawai dengan materi antara lain Ahli K3 Umum Kemnaker, *Safety Inspector* BNSP, Pelatihan Audit Internal ISO 17025:2017 Berdasarkan ISO 19011:2018, Pelatihan Internal Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian, Pelatihan *Ultrasonic Testing* Level II, Dasar Pertolongan Pertama Pada Kondisi Kegawatdaruratan, *Safety Management Training*, Pelatihan *Basic Safety* dan Pelatihan *Safety Champion*, Keselamatan & Kesehatan Kerja Diesel, serta Pendidikan Lapangan (Diklap) Keselamatan.

Pengembangan kompetensi terkait penerapan praktik keuangan berkelanjutan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah disajikan pada bab Tata Kelola Perusahaan, sedangkan program pengembangan kompetensi terkait penerapan praktik keuangan berkelanjutan yang diikuti oleh pegawai telah disajikan pada bab Profil Perusahaan dan Tinjauan Unit Pendukung Bisnis.

PENILAIAN RISIKO ATAS PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK E.3]

KAI memahami bahwa penerapan praktik keuangan berkelanjutan akan selalu dihadapkan pada situasi ketidakpastian dan faktor risiko yang menghadirkan pengaruh terhadap kinerja Perseroan, ataupun pengaruh terhadap keputusan manajemen. Atas pemahaman tersebut, KAI memiliki dan menerapkan sistem manajemen risiko yang secara mendasar berperan penting dalam keseluruhan penerapan praktik keuangan berkelanjutan, sesuai regulasi dan standar penerapan terbaik yang berlaku.

COMPETENCY DEVELOPMENT ON SUSTAINABLE FINANCE [OJK E.2]

KAI consistently implements competency development programs for the management and employees with significant role in supporting the implementation of sustainable financial practices at the Company.

This competency development is carried out through a number of training activities with themes related to the implementation of sustainable financial practices, including training on anti-fraud or anti-corruption policy and Whistleblowing System and gratuity control improvement in the form of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System training. In addition, KAI provides special safety training to employees with materials including the Ministry of Manpower General OHS Expert, BNSP Safety Inspector, ISO 17025:2017 Internal Audit Training Based on ISO 19011:2018, Railway Safety Management System Internal Audit Training, Ultrasonic Testing Level II Training, Basic First Aid in Emergency Conditions, Safety Management Training, Basic Safety Training and Safety Champion Training, Diesel Occupational Safety & Health, and Safety Field Education (Diklap).

Competency development related to implementation of sustainable financial practices attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors can be seen in the Good Corporate Governance chapter, while competency development programs related to the implementation of sustainable financial practices attended by employees can be seen in the Company Profile and Business Support Unit Overview chapters.

RISK ASSESSMENT OF SUSTAINABLE FINANCE IMPLEMENTATION [OJK E.3]

KAI is aware of the risks and uncertainties in the implementation of sustainable financial practices that could impact Company's performance or influence management decisions. Therefore, KAI has and implements a risk management system has a crucial and basic role in the overall implementation of sustainable financial practices according to applicable regulations and best practice standards.

Sistem manajemen risiko yang dimiliki dan diterapkan KAI di tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Sistem Manajemen Risiko

KAI menerapkan sistem manajemen risiko yang mengacu kepada ISO 31000:2018 *Risk Management – Guidelines*, terdiri atas sejumlah tahapan yaitu (1) kegiatan komunikasi dan konsultasi, (2) penetapan ruang lingkup, konteks dan kriteria, asesmen risiko meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko, (3) mitigasi risiko, (4) *monitoring* dan *review*, serta (5) pencatatan dan pelaporan terkait risiko-risiko bisnis.

Guna mencapai target kinerja keberlanjutan, KAI melakukan pengelolaan risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan yang terbagi ke dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Secara khusus, pada aspek ekonomi, KAI mengelola risiko investasi/non investasi dan risiko operasional melalui upaya mitigasi dengan *monitoring* risiko secara berkala, baik yang dilakukan secara manual maupun melalui penggunaan aplikasi Smartka. Kemudian, pada aspek lingkungan, KAI menerapkan upaya mitigasi dengan membuat desain perencanaan/kebijakan (proyek, investasi, proses bisnis, risiko terkait hukum dan sebagainya) antara lain dengan memberikan pengembangan wawasan kepada UPT-UPT dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Pada aspek sosial, khususnya terkait risiko keselamatan, KAI menerapkan mitigasi berupa pelaksanaan sosialisasi terkait penerapan manajemen risiko keselamatan di Daerah dan Pengembangan RCSA *Safety* (Terintegrasi dengan SAP).

Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2022

1. Kegiatan Diseminasi dan Pelatihan

Divisi Manajemen Risiko pada tahun 2022 dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terpadu *Enterprise Risk Management* (ERM) di lingkungan KAI dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut berikut:

- a. Divisi Manajemen Risiko bersama dengan Unit *Safety* dan Unit Anggaran menginisiasi implementasi *Risk Based Budgeting* (RBB) melalui penyusunan Rencana Kerja Anggaran/RKAD Berbasis Pengelolaan Risiko/Identifikasi Bahaya dan Penilaian Pengendalian Risiko (IBPR) pada RKAP 2023.
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN tanggal 2 September 2022 Nomor PER-5/MBU/09/2022 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 ayat 1 BUMN wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif. Merujuk pada

The risk management system owned and implemented by KAI in 2022 is as follows.

Risk Management System

KAI implements a risk management system that refers to ISO 31000:2018 *Risk Management – Guidelines*, which consist of a number of stages, namely (1) communication and consulting activities, (2) determination of scope, context and criteria, and risk assessment covering risk identification, risk analysis, and risk evaluation, (3) risk mitigation, (4) *monitoring* and *review*, and (5) recording and reporting of business risks.

In achieving its sustainability performance targets, KAI conducts risk management on the implementation of sustainable finance which is classified into economic, environmental and social aspects. On the economic aspect, KAI manages investment/non-investment risk and operational risk through mitigation efforts by monitoring risks periodically which can be carried out manually or through the Smartka application. For the environmental aspect, KAI implements mitigation efforts by making plans/policy (projects, investments, business processes, legal-related risks, etc), among others by providing insight development to the units in carrying out environmental management. On the social aspect, especially related to safety risk, KAI implements mitigation in the form of dissemination related to the safety risk management in the Regions and the Development of RCSA *Safety* (Integrated with SAP).

Risk Management Implementation in 2022

1. Dissemination and Training Activities

The Risk Management Division in 2022 in implementing Integrated Enterprise Risk Management (ERM) within KAI carries out the following activities:

- a. The Risk Management Division with the Safety Unit and Budgeting Unit initiated the implementation of *Risk Based Budgeting* (RBB) through the preparation of a Budget Work Plan/RKAD Based on Risk Management/Hazard Identification and Risk Control Assessment (IBPR) in the 2023 RKAP.
- b. Based on the Minister of SEOs Regulation dated September 2, 2022 No. PER-5/MBU/09/2022 concerning Implementation of Risk Management in State-Owned Enterprises Article 2 paragraph 1, SOEs are required to implement Risk Management

Peraturan Menteri BUMN tersebut, dalam rangka penerapan Manajemen Risiko diseluruh KAI Group, telah dilakukan asesmen oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko bersama Unit Manajemen Risiko terhadap seluruh Anak dan Cucu Perusahaan di KAI Group dengan terlebih dahulu diminta untuk mengirimkan dokumen implementasi Manajemen Risiko di masing-masing perusahaannya.

- c. Sosialisasi Dalam rangka peningkatan kepedulian (*awareness*) dalam pengelolaan risiko di Unit Bisnis dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan oleh Divisi Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR)

2. Asesmen Risiko Proyek (Investasi dan Non Investasi)

- a. Daftar Asesmen Risiko Proyek (Investasi dan Non-Investasi)

Divisi Manajemen Risiko melakukan kegiatan asesmen risiko secara rutin berdasarkan RKAP ataupun permintaan khusus dari Direktorat tertentu (*user*).

- b. Profil Risiko Proyek (Investasi dan Non-Investasi)
Divisi Manajemen Risiko mengidentifikasi risiko Proyek (Investasi dan Non-Investasi) yang dapat menghambat pencapaian tujuan investasi terdiri dari 9 kategori risiko yaitu Strategis, Kepatuhan, Keuangan, Operasional, Proyek/Investasi, Keselamatan & Lingkungan, Sosial ekonomi, Legal dan Reputasi.

3. Risk Control Self Assessment (RCSA) Entity

- a. RCSA Entity Periode 2022

Proses pengisian *Risk Control Self Assessment* (RCSA) entity yang dilakukan oleh risk owner pada aplikasi SMARTKA sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, entitas telah melakukan identifikasi risiko sebagai profil risiko.

- b. RCSA Entity Periode 2023

Periode pengisian RCSA 2023 oleh Risk Owner dimulai dari tanggal 28 November 2022 sampai dengan 9 Januari 2023. Berdasarkan proses pengisian *Risk Control Self Assessment* (RCSA) entity yang telah dilakukan oleh *risk owner* pada aplikasi SMARTKA sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, 49 Entity telah melakukan identifikasi risiko.

4. Risk Control Self Assessment (RCSA) Project

Berdasarkan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: PER.U/KL.104/I/1/KA-2021 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terpadu (*Enterprise Risk Management*) tanggal 25 Januari

effectively. Referring to the SOE Minister Regulation, in implementing Risk Management throughout the KAI Group, an assessment has been carried out by the Risk Management Monitoring Committee together with the Risk Management Unit for all Subsidiaries and Subsidiaries of Companies in the KAI Group by first being asked to send documents on the implementation of Risk Management in each his company.

- c. Dissemination to increase awareness in risk management in Business Units, socialization is carried out on an ongoing basis by the Risk Management Division and the Risk Management Monitoring Committee (KPMR).

2. Project Risk Assessment (Investment and Non-Investment)

- a. List of Project Risk Assessment (Investment and Non-Investment)

The Risk Management Division carries out routine risk assessment activities based on the RKAP or special requests from certain directorates (*users*).

- b. Project Risk Profile (Investment and Non-Investment)
The Risk Management Division identifies Project risks (Investment and Non-Investment) that can hinder the achievement of investment objectives consisting of 9 risk categories namely Strategic, Compliance, Financial, Operational, Project/Investment, Safety & Environment, Socioeconomic, Legal and Reputation.

3. Risk Control Self Assessment (RCSA) Entity

- a. RCSA Entity in 2022

From the process of filling in the *Risk Control Self Assessment* (RCSA) entity carried out by the risk owner on the SMARTKA application until December 31, 2022, the entity has identified risks as a risk profile.

- b. RCSA Entity in 2023

The period for filling out the RCSA 2023 by the Risk Owner starts from November 28, 2022 to January 9 2023. Based on the entity *Risk Control Self Assessment* (RCSA) filling process that has been carried out by the risk owner on the SMARTKA application up to December 31 2022, 49 Entities have completed risk identification.

4. Risk Control Self Assessment (RCSA) Project

Based on the Regulation of the Board of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. PER.U/KL.104/I/1/KA-2021 concerning Guidelines for Implementing Integrated Risk Management (*Enterprise Risk Management*) dated

2021, Divisi Manajemen Risiko berkewajiban terhadap pelaksanaan asesmen dan kajian risiko program investasi, program strategis, dan permintaan kajian risiko lainnya dari direktorat – direktorat di Kantor Pusat. Pengelolaan risiko program investasi, program strategis, program lain atas permintaan user pelaksanaan asesmennya dan pelaksanaan pengendalian risikonya difasilitasi dengan menggunakan aplikasi SMARTKA, yang disebut RCSA Project.

5. Profil Risiko Utama Perusahaan RKAP Tahun 2022

Hasil evaluasi atas identifikasi dan analisis risiko terhadap 15 risiko utama Perusahaan dan telah memberikan gambaran serta peta risiko dengan tingkatan Rendah, Sedang, Tinggi dan Ekstrim. Dari 15 risiko utama tersebut terdiri dari 4 kategori yaitu keuangan, reputasi, operasional dan legal.

6. Monitoring Pelaksanaan Mitigasi Risiko Utama RKAP 2022

Berdasarkan hasil pelaksanaan mitigasi tersebut, profil risiko utama perusahaan (*actual risk*) menjadi 1 risiko dengan level aktual ekstrim, 4 risiko dengan level aktual tinggi, 5 risiko dengan level actual sedang, dan 5 risiko dengan level actual rendah. Hasil evaluasi profil risiko utama perusahaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 dimana dari 15 risiko terdapat 4 risiko yang mitigasinya telah selesai ditindaklanjuti sehingga level risiko actual residual sudah sama dengan level risiko *expected residual*-nya.

Kebijakan Umum Manajemen Risiko Tahun 2023

Dalam penerapan Manajemen Risiko diseluruh lingkungan Perusahaan dalam rangka penerapan budaya sadar risiko pada tahun 2023 akan dilakukan rencana kegiatan sebagai berikut:

1. Penyesuaian kebijakan Manajemen risiko terhadap Peraturan Menteri BUMN tanggal 2 September 2022 Nomor PER-5/MBU/09/2022 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara;
2. Penguatan tingkat kematangan Manajemen Risiko dan Implementasi aplikasi Manajemen Risiko pada seluruh aspek aktivitas Perusahaan;
3. Penyempurnaan Aplikasi SMARTKA dengan Penambahan menu IBPR Safety dan RCSA serta penyiapan pembuatan aplikasi Manajemen Risiko di anak perusahaan;
4. Penerapan berkelanjutan Risk Based Budgeting untuk RKAP tahun 2024;
5. Peningkatan implementasi ERM secara berkelanjutan di seluruh entitas KAI Group dengan mengacu pada Pedoman pelaksanaan ERM di Induk;

January 25, 2021, the Risk Management Division is obliged to carry out the assessment and risk studies of investment programs, strategic programs, and requests for other risk studies from directorates at the Head Office. Risk management of investment programs, strategic programs, other programs at the request of users, implementation of their assessments and implementation of risk controls is facilitated by using the SMARTKA application, which is called the RCSA Project.

5. Key Risk Profile of RKAP 2022

The results of the evaluation of the identification and risk analysis of the Company's 15 key risks have provided an overview and risk maps with Low, Medium, High and Extreme levels. The 15 key risks are contained in 4 categories, namely financial, reputation, operational and legal.

6. Monitoring the Implementation of the Key Risk Mitigation of RKAP 2022

Based on the results of the mitigation implementation, the Company's key risk (*actual risk*) profile has 1 risk with an extreme actual level, 4 risks with high actual level, 5 risks with actual moderate level, and 5 risks with low actual level. The results of the evaluation of the Company's key risk profile up to Q4 2022 where out of 15 risks there are 4 risks whose mitigation has been completed so that the actual residual risk level is the same as the expected residual risk level.

Risk Management General Policy for 2023

In implementing Risk Management throughout the Company's environment in the context of implementing a risk awareness culture in 2023 the following activity plans will be carried out:

1. Adjustment of the risk management policy to the Minister of SOE Regulation dated 2 September 2022 Number PER-5/MBU/09/2022 concerning the Implementation of Risk Management in State-Owned Enterprises;
2. Strengthening of the maturity level of Risk Management and Implementation of Risk Management applications in all aspects of the Company's activities;
3. Improvement of the SMARTKA Application with the addition of the IBPR Safety and RCSA menus as well as preparation for the creation of Risk Management applications in subsidiaries;
4. Continuous implementation of Risk Based Budgeting for the 2024 RKAP;
5. Improvement in the implementation of ERM on an ongoing basis in all KAI Group entities with reference to the Guidelines for implementing ERM in the Main;

- | | |
|--|--|
| <p>6. Penentuan risiko-risiko utama yang bersumber dari kombinasi metode top down dan bottom up;</p> <p>7. Peningkatan level kematangan penerapan manajemen risiko dari kategori maturitas Level 2 (Repeatable) menuju Level 3 (Defined);</p> <p>8. Taksonomi/Kategori risiko Perusahaan terdiri dari Strategis (ST), Kepatuhan (KP), Keuangan (KE), Operasional (OP), Proyek/Investasi (PI), Keselamatan & Lingkungan (KL), Bencana Alam (BA), Sosial Ekonomi (SE), Legal (LE) dan Reputasi (RE).</p> | <p>6. Determination of key risks originating from a combination of top down and bottom up methods;</p> <p>7. Increase in the maturity level of risk management implementation from maturity category Level 2 (Repeatable) to Level 3 (Defined);</p> <p>8. Company risk taxonomy/Category consists of Strategic (ST), Compliance (KP), Finance (KE), Operational (OP), Project/Investment (PI), Safety & Environment (KL), Natural Disasters (BA), Social Economy (SE), Legal (LE) and Reputation (RE).</p> |
|--|--|

Dalam keseluruhan penerapan sistem manajemen risiko Perseroan, Direksi memiliki peran penting sebagai organ yang menjalankan fungsi pembinaan langsung kepada Unit Manajemen Risiko hingga penerapan komitmen mendukung pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi yang dimiliki Perseroan. Seiring hal tersebut, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat atas kinerja manajemen dalam praktik implementasi GCG, mencakup penerapan sistem manajemen risiko. Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dengan dibantu oleh Komite Manajemen Risiko (KPMR) yang dapat berkoordinasi dengan Unit Manajemen Risiko.

In the overall implementation of the Company's risk management system, the Board of Directors has an important role as an organ that carries out the direct guidance function to the Risk Management Unit to the implementation of commitments to support the implementation of integrated risk management of the Company. In this regard, the Board of Commissioners carries out the function of monitoring and providing advice on management performance in GCG implementation, including the implementation of risk management system. The Board of Commissioners carries out the supervisory and advisory duties assisted by the Risk Management Committee (KPMR) which can coordinate with the Risk Management Unit.

IDENTIFIKASI RISIKO ESG KAI

KAI telah melakukan identifikasi melalui pendekatan *Environment, Social, and Governance* (ESG) terhadap risiko-risiko yang dihadapi, dengan hasil sebagai berikut:

KAI ESG Risk Identification

KAI has identified through *Environment, Social, and Governance* (ESG) the risks it faces, with the following results:

Identifikasi Risiko ESG KAI

KAI ESG Risk Identification

Aspek / Aspect	Risiko dan Dampak dari Operasional / Operational Risk and Impact	Pengaruh pada Pemangku Kepentingan / Impact on Stakeholders	Mitigasi Risiko / Risk Mitigation
Lingkungan (E) / Environmental (E)	Risiko bencana alam dan perubahan iklim dapat mengganggu operasional bisnis dan memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan dan keuntungan, prospek usaha, serta harga pasar surat berharga / The risk of natural disasters and climate change can disrupt business operations and have a negative impact on financial performance and profits, business prospects, and market prices of securities	Pelanggan, Mitra, Masyarakat, Manajemen / Customers, Partners, Community, Management	Melakukan pengecekan berkala setiap hari terhadap infrastruktur / Conduct periodic checks every day of the infrastructure
Sosial (S) / Social (S)	Gangguan stabilitas politik, gejolak sosial, dan keamanan, baik di lingkup domestik maupun internasional, yang diakibatkan oleh isu-isu spesifik, seperti krisis geopolitik, perang dagang, dan lain sebagainya yang berdampak negatif bagi pertumbuhan bisnis, operasi, keadaan keuangan, hasil usaha, rantai pasok alat produksi / Disruptions to political stability, social unrest, and security, both domestically and internationally, caused by specific issues, such as geopolitical crises, trade wars, and so on that have a negative impact on business growth, operations, financial condition, operating results, production supply chain	Pelanggan, Mitra, Masyarakat, Manajemen / Customers, Partners, Community, Management	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring pengaruh gejolak sosial politik terhadap rantai pasok alat produksi / Monitor the influence of socio-political turmoil on the supply chain of means of production memperluas cakupan pangsa pasar baru mencari kemungkinan pangsa pasar baru, yang dapat menjadi alternatif pemasukan baru bagi perusahaan / Expand the scope of new market share to seek the possibility of new market share, which can be an alternative for new income for the Company
Tata Kelola (G) / Governance (G)	Risiko perubahan regulasi Indonesia atau Internasional yang berdampak terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional, dan prospek usaha / Risk of changes in Indonesian or international regulations that impact business, financial condition, operational performance and business prospects	Pelanggan, Mitra, Masyarakat, Manajemen / Customers, Partners, Community, Management	Analisis dampak rencana regulasi terhadap industri transportasi secara umum dan khususnya perkeretaapian / Analysis of the impact of the proposed regulation on the transportation industry in general and the railways in particular

HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN [OJK E.4]

Daftar, Metode Pendekatan dan Topik Utama Keterlibatan Pemangku Kepentingan [OJK E.4, GRI 2-29]

KAI mengidentifikasi pihak-pihak pemangku kepentingan melalui mekanisme *Focus Group Discussion* (FGD), dengan dihadiri oleh para penanggung jawab penyusunan Laporan Keberlanjutan pada masing-masing divisi. Sesuai FDG tersebut, identifikasi pemangku kepentingan, topik pembahasan, metode pendekatan, hingga frekuensi pelibatan pemangku kepentingan KAI adalah sebagai berikut:

Pemangku Kepentingan / Stakeholders	Topik Pembahasan / Discussion Topic	Metode Pendekatan / Engagement Method	Frekuensi / Frequency
Pegawai / Employees	Ketenagakerjaan/kesejahteraan / Employment/welfare	Pertemuan berkala / Regular meeting	Minimal 1 (satu) tahun sekali / At least once a year
Pemegang Saham / Shareholders	Kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan KAI / KAI's financial and non-financial performance	Rapat Umum Pemegang Saham / General Meeting of Shareholders	Minimal 1 (satu) tahun sekali / At least once a year
Penumpang / Passengers	Survei Kepuasan Penumpang / Passenger Satisfaction Survey	Gathering dan FGD / Gathering and FGD	Minimal 1 (satu) tahun sekali / At least once a year
Investor Obligasi / Bond Investor	Investors Site Visit	Presentasi dan kunjungan Kerja / Presentations and work visits	Minimal 1 (satu) tahun sekali / At least once a year
Pemasok / Supplier	Komunikasi 2 (dua) arah dalam rangka penyampaian strategi dan kebijakan termasuk proses pengadaan barang dan jasa, hubungan komersial maupun evaluasi kinerja. / Means of two-way communication in the context of delivering strategies and policies including the process of procurement of goods and services, commercial relations and performance evaluation.	Rekonsiliasi kebutuhan, Sosialisasi aturan baru (Jika ada) / Reconciliation of needs, Dissemination of new regulations (if any)	Sesuai kebutuhan / As needed
Pelanggan Angkutan Barang / Cargo Forwarding Customers	Upaya menjaga relasi antara KAI dengan pelanggan potensial serta masukan positif dari mitra usaha demi peningkatan kinerja. / Effort to maintain a strong rapport of KAI and potential customers as to obtain positive input from partners for performance improvement.	Gathering	Minimal 1 (satu) tahun sekali per komoditi / At least once a year for each commodity
	Pemantauan bersama mitra usaha terhadap progres realisasi pelaksanaan angkutan serta komunikasi terkait kendala pelaksanaan kegiatan di lapangan guna menentukan solusi atas kendala yang terjadi. / Joint monitoring of partners on the realization progress of the implementation of transportation and discussion on challenges in implementing activities in the field to provide solutions to such challenges	Task Force	Minimal 2 (dua) bulan sekali per komoditi / At least twice a year for each commodity
	Kunjungan ke mitra angkutan barang guna memberikan kesempatan untuk interaksi di antara para pihak untuk mencapai resolusi atau penyelesaian atas kendala yang terjadi seperti adanya keterlambatan pembayaran angkutan, turunnya volume angkutan dan berbagai kendala yang mungkin terjadi. / Visit to cargo transport partner to provide an opportunity for interaction between the parties to reach a resolution or settlement of the obstacles that occurred such as delays in payment of transportation, the decrease in the volume of transportation and various challenges that might occur.	Customers Site Visit	Minimal 1 (satu) bulan sekali per mitra / At least once a month for each partner
Media	Sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi guna membina hubungan baik antara manajemen KAI dengan media sebagai sarana untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan perusahaan kepada media. / Means to establish good between KAI management and the media to convey Company policies to the media.	Penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik KAI / KAI Journalism Award	1 tahun sekali / Once a year
	Media berperan sangat penting dalam membentuk <i>image</i> Perseroan ataupun mensosialisasikan kebijakan Perseroan kepada masyarakat. Sehingga diperlukan wadah untuk menjalin silaturahmi dan harmonisasi yang baik antara Manajemen KAI dengan Media melalui kegiatan Media Gathering. / The media has important role in shaping the Company's image or disseminating company policies to the public. Hence, a forum was needed to establish good relations and harmony between KAI Management and the Media through Media Gathering.	Media Gathering	1 tahun sekali / Once a year
	Sebagai ajang silaturahmi bagi <i>Board of Director</i> (BOD) KAI dengan Kantor Redaksi Media terseleksi, yang bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara KAI dengan media. / Meeting forum for the Board of Directors (BOD) of KAI and the selected Media Editorial Office in establishing good relations between KAI and the media.	Media Visit	2 bulan sekali / Every two months

STAKEHOLDER RELATIONS [OJK E.4]

List, Methods of Approach and Key Topics of Stakeholder Engagement [OJK E.4, GRI 2-29]

KAI identifies its stakeholders through a *Focus Group Discussion* (FGD) attended by the parties in charge of preparing the Sustainability Report from each division. In accordance with the FDG, stakeholder identification, discussion topics, engagement method, and frequency of KAI's stakeholder engagement are as follows:

Pemangku Kepentingan / Stakeholders	Topik Pembahasan / Discussion Topic	Metode Pendekatan / Engagement Method	Frekuensi / Frequency
Railfans (komunitas pecinta kereta api) / railway fan community)	Edukasi dan tukar pikiran antara manajemen KAI dengan para <i>railfans</i> , pembinaan berkala, penyampaian informasi terkait perkeretaapian kepada komunitas <i>railfans</i> se-Jawa Sumatera dengan pelaksanaan melalui media virtual Zoom. / Education and exchange of ideas between KAI management and railfans, regular coaching, and disclosure of information on railways to the railfan community throughout Java-Sumatra via Zoom virtual media.	Bincang Santai <i>Railfans</i> (diskusi/ talkshow via zoom) / Railfans Casual Talk (discussion/ talkshow via zoom)	1 bulan sekali / Once a month
	Silaturahmi serta penyampaian pembinaan dan pembekalan langsung kepada komunitas <i>Railfans</i> (dilaksanakan sebelum masa posko Angkutan Lebaran 2022). / Forum of gathering and providing direct guidance and debriefing to the railfans community (carried out before the 2022 led Mubarak Transport post period).	<i>Gathering Railfans</i>	1 tahun sekali / Once a year
	Silaturahmi Direksi KAI dengan komunitas <i>Railfans</i> se-Jawa Sumatera, bertujuan untuk memperkenalkan dan menjalin hubungan baik. / Forum of gathering for the Board of Directors of KAI and Railfans throughout Java-Sumatra for introduction and establishing good relations.	Silaturahmi BOD KAI dengan <i>Railfans</i> / Gathering for the BOD of KAI and Railfans	1 tahun sekali / Once a year
	Pengelolaan <i>Whatsapp Group</i> yang beranggotakan Humas Kantor Pusat dan perwakilan <i>Railfans</i> yang sudah terdaftar di Humas Daop Divre. <i>Whatsapp Group</i> diisi dengan pembinaan, penyebaran informasi kebijakan perusahaan dan diskusi mengenai KAI. / Management of <i>Whatsapp Group</i> which consisted of Head Office Public Relations and Railfans representatives registered with Public Relations Daop Divre. The <i>Whatsapp Group</i> contains coaching, dissemination of Company policy, and discussions on KAI.	Sosialisasi dan Komunikasi dengan <i>Railfans</i> se-Jawa Sumatera / Dissemination and Communication with Railfans throughout Java and Sumatra	Rutin setiap hari selama satu tahun / Daily throughout the year

PERJANJIAN KERJA BERSAMA SERTA PEMENUHAN HAK BERKUMPUL DAN BERSERIKAT BAGI PEGAWAI [GRI 2-30]

KAI memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 255/Men/2003 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit. Penyusunan dokumen tersebut dilakukan bersama Serikat Pekerja KAI (SPKA), dengan hasil dokumen mendapat tinjauan berkala setiap 2 (dua) tahun sekali. Penyusunan dan peninjauan dokumen PKB dilakukan seiring upaya KAI dalam meningkatkan hubungan komunikasi antara Manajemen dan Serikat Pekerja KAI melalui Lembaga Kerja Sama Bipatrit (LKS Bipatrit).

PKB yang berlaku di tahun 2022 adalah PKB perubahan dari periode 2020-2022 ke periode tahun 2022-2024 yang naskahnya ditandatangani pada 5 Juli 2022 oleh Direktur Utama sebagai pihak yang mewakili Manajemen KAI dan Ketua Umum Serikat Pekerja KAI yang mewakili SPKA. Dokumen PKB tersebut telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.4/HI.00.01/00.0000.220629007/B/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022.

Manajemen KAI berupaya semaksimal mungkin terhadap pemenuhan perlindungan hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam PKB guna keberlangsungan perusahaan untuk ke depannya serta memajukan perkeretaapian nasional menjadi moda transportasi yang paling diminati dan dipercaya oleh masyarakat.

COLLECTIVE LABOR AGREEMENT AND THE FULFILLMENT OF EMPLOYEES' RIGHT TO ASSOCIATE [GRI 2-30]

KAI has a Collective Labor Agreement (CLA) drawn up based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. Kep 255/Men /2003 concerning Procedures for Establishing and Composition of Bipartite LKS Membership. The preparation of the document is carried out together with the KAI Labor Union (SPKA) with the result of the document receiving periodic review in every 2 (two) years. The preparation and review of the CLA document is carried out in line with KAI's efforts to improve communication relations between the Management and KAI Labor Union through the Bipatrit Cooperation Institution (LKS Bipatrit).

The CLA for 2022 is the amended CLA from the 2020-2022 period to the 2022-2024 period which was signed on July 5, 2022 by the President Director as a representative of KAI Management and the Head of the KAI Labor Union representing SPKA. The CLA document has been registered with the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia with the Decree of the Director General for Development of Industrial Relations and Social Security for Employees No. KEP.4/HI.00.01/00.0000.220629007/B/VIII/2022 dated August 16, 2022.

KAI's management makes every effort to fulfill the protection of workers' rights in accordance with the provisions contained in the PKB for the future sustainability of the company and to advance the national railway to become the mode of transportation that is most in demand and trusted by the public.

PERMASALAHAN TERHADAP PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK E.5]

Berikut adalah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh KAI selama menjalankan kinerja keberlanjutan beserta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut:

1. Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Jumlah Signifikan Berimplikasi Negatif bagi Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial

KAI menyadari bahwa penggunaan BBM yang menjadi salah satu sumber energi utama untuk mengoperasikan kereta api memiliki berbagai implikasi bagi keberlanjutan. Karakteristik BBM sebagai sumber daya alam tak terbarukan berpengaruh terhadap jaminan ketersediaan pasokan di masa depan. Apabila BBM terus menerus digunakan, maka potensial terjadi kelangkaan akibat cadangan yang terus menipis.

Ketidakseimbangan *supply* dan *demand* BBM di tingkat global maupun nasional juga berpotensi menyebabkan harga BBM terus menunjukkan tren kenaikan dan berdampak pada harga tiket kereta api. Selain itu, pembakaran BBM sebagai sumber energi juga menghasilkan emisi gas buang yang menyebabkan degradasi lingkungan dan berpotensi mengganggu kesehatan manusia.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KAI beralih menggunakan bahan bakar alternatif sebagai sumber energi pengganti BBM untuk mengoperasikan armada kereta api. Salah satu bahan bakar alternatif yang telah digunakan adalah bahan bakar biodiesel B30 yang terdiri dari minyak solar dan biodiesel (sumber nabati) dengan perbandingan 70:30, sehingga lebih ramah lingkungan dan ketersediaannya lebih terjamin dibandingkan dengan penggunaan BBM. Di samping itu, KAI juga berinisiatif mengonversikan penggunaan BBM dengan bahan bakar LNG sebagai bahan bakar pembangkit kereta api.

2. Perubahan Iklim yang Ekstrem

KAI menyadari bahwa saat ini, perubahan iklim yang ekstrim semakin nyata terjadi dan dampaknya telah dirasakan oleh sebagian makhluk hidup di planet ini. Perubahan iklim tersebut terjadi karena lapisan ozon yang berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya semakin menipis, sehingga menyebabkan suhu bumi terus naik. Salah satu penyebab terjadinya fenomena tersebut adalah pelepasan gas emisi karbon ke udara semakin meningkat.

CHALLENGES IN SUSTAINABLE FINANCE IMPLEMENTATION [OJK E.5]

Challenges faced by KAI in carrying out its sustainability performance along with the efforts that have been made to overcome these problems are described as follows:

1. The Use of Fuel Oil (BBM) in Significant Amounts Has Negative Economic, Environmental, and Social Impacts

KAI realizes that the use of fuel, which is one of the main energy sources for operating trains, has various implications for sustainability. Fuel as a non-renewable natural resource adversely impact on future supply availability. Continuous use of fuel has a potential to create scarcity for the limited amount of resources.

Imbalance in supply and demand for fuel at global and national levels could also result in increasing fuel prices in impacting train ticket prices. In addition, burning fuel as an energy source also produces exhaust emissions which cause environmental degradation and have the potential to disrupt human health.

To overcome such challenges, KAI has switched to using alternative fuels as an energy source to replace fuel in operating its train fleet. One of the alternative fuels that has been used is biodiesel B30 fuel which consists of diesel oil and biodiesel (vegetable source) with a ratio of 70:30, making it eco-friendlier and has more guaranteed availability compared to the use of fuel. In addition, KAI also took the initiative to convert the use of BBM with LNG fuel as fuel for train generators.

2. Extreme Climate Change

KAI is aware that the ongoing climate change is becoming more extreme with its impact felt in a number of living creatures in this planet. Climate change occurs due to the depleting ozone layer which functions to protect the earth from harmful solar radiation, causing the earth's temperature to continue to rise. Such phenomenon was influenced by, among others, the increasing release of carbon emissions into the air.

Pembakaran bahan bakar sebagai sumber energi merupakan salah satu pemicu tingginya emisi karbon. Karenanya, salah satu program dekarbonisasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim berfokus pada transisi penggunaan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih bersih atau tidak menghasilkan karbon sama sekali pada proses pembakarannya.

Bentuk upaya dekarbonisasi yang telah dilakukan KAI adalah penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau Solar Panel di Stasiun Gambir, Stasiun Batang, dan Gedung Jakarta *Railway Center*. PLTS tersebut dioperasikan melalui sistem *Solar Panel On Grid* yang menggabungkan suplai listrik dari jaringan listrik PLN dan jaringan listrik Solar Panel untuk memenuhi kebutuhan listrik operasional di area operasional tersebut.

3. Tingginya Potensi Terjadinya Risiko Kecelakaan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, KAI menyadari tingginya potensi terjadinya risiko kecelakaan. Beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan umumnya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, di antaranya sarana tidak andal, prasarana tidak standar, human error, kondisi alam yang terkadang sulit diprediksi, hingga aktivitas dari beberapa oknum eksternal yang sengaja dilakukan untuk mengganggu, bahkan mencelakakan perjalanan kereta api.

Guna meminimalisasi potensi bahaya dari aspek sarana dan prasarana perkeretaapian, KAI membuat prosedur pemeriksaan rutin yang wajib dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk mengecek kelaikan prasarana dan sarana. Pengamatan langsung dengan cara berjalan kaki untuk mengecek jalur secara detail, *bordes-ride/lok-ride* juga rutin dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung terciptanya keselamatan perjalanan kereta api.

Dari sisi internal, KAI berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan disiplin pegawai, dimulai dari penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Pendidikan Lapangan (Diklap), *Workshop/Forum Group Discussion* (FGD), hingga melakukan sertifikasi SDM Perkeretaapian oleh lembaga yang berwenang. KAI juga telah membuat sebuah aplikasi bernama *Safety Railway Information* (SRI) untuk pelaporan potensi bahaya terkait dengan keselamatan operasional kereta api, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, baik unsafe action maupun unsafe condition yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

Burning of fuel as an energy source is one of the triggers for high carbon emissions. Therefore, decarbonization program is implemented to reduce the impact of climate change focuses on the transition to using New, Renewable Energy (NRE) sources that are cleaner or do not produce carbon at all in the combustion process.

Decarbonization efforts carried out by KAI include the use of Solar Power Plants (PLTS) or Solar Panels at Gambir Station, Batang Station, and the Jakarta Railway Center Building. The PLTS is operated through an On Grid Solar Panel system which combines electricity supply from the PLN electricity network and the Solar Panel electricity network to meet operational electricity needs in the operational area.

3. High Potential of Accident Risk

As a company engaged in the transportation sector, KAI is aware of the high potential for accidents to occur. Factors that may cause accidents are generally influenced by internal and external factors, including unreliable facilities, non-standard infrastructure, human error, natural conditions that are sometimes difficult to predict, and activities of several external elements that are deliberately carried out to disrupt, even harm train travel.

To minimize potential hazards of rolling stock and rail infrastructure, KAI has made routine inspection procedures that must be carried out within a certain period of time to ensure the adequacy of infrastructure and rolling stock. Direct observation by walking to check the track in detail, *landing-rides/lock-rides* are also routinely carried out to ensure the readiness of facilities and infrastructure to support the realization of safe train travel.

In terms of internal factor, KAI seeks to improve employee competence and discipline, starting from the implementation of Education and Training, Field Education (Diklap), Workshops/Forum Group Discussions (FGD), and Railway HC certification by authorized institutions. KAI has also developed Safety Railway Information (SRI) application for reporting potential hazards related to railroad operational safety, safety, occupational health and the environment, for unsafe actions and unsafe conditions that can endanger the safety of train travel.

Di sisi lain, untuk meminimalisasi potensi bahaya dari eksternal, KAI rutin melakukan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat, memetakan daerah-daerah yang rawan bencana alam dan rawan kejadian upaya mencelakakan perjalanan kereta api, serta berkoordinasi dan berkolaborasi dengan *stakeholder* terkait untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya aktivitas yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi perjalanan kereta api.

4. Perkembangan Industri yang Semakin Masif dan Kompetitif Mendorong Terciptanya Berbagai Inovasi

KAI menyadari bahwa perkembangan industri saat ini semakin masif dan kompetitif. Selain berkembangnya kebutuhan pelanggan atas pelayanan transportasi, kemajuan teknologi juga mendukung iklim perindustrian menjadi semakin kompleks dan kompetitif. Oleh sebab itu, selaras dengan komitmen KAI untuk memberikan pelayanan transportasi yang optimal dan bernilai tambah bagi para pelanggan, Perseroan terus mengembangkan sejumlah inovasi. Salah satunya adalah perbaikan prasarana dengan membangun jalur ganda kereta api, meningkatkan kualitas material jalan rel, meng-upgrade sistem persinyalan, merekayasa geometri lengkung, serta memperbaiki kualitas perawatan jalan rel dan jembatan dalam upaya mempersingkat waktu tempuh perjalanan kereta api.

Selain inovasi pada layanan, KAI juga mengencarkan transformasi digital sebagai semangat untuk menghadapi era yang semakin canggih dan menuntut digitalisasi di segala aspek. Salah satu wujud transformasi digital ini adalah dengan mengujicobakan fasilitas *face recognition boarding gate* di Stasiun Bandung. Hadirnya inovasi ini bertujuan untuk mempermudah pelanggan KA Jarak Jauh yang ingin naik kereta api, tanpa perlu repot-repot menunjukkan berbagai dokumen seperti boarding pass fisik, *e-boarding pass*, KTP, ataupun dokumen vaksinasi.

Sementara di sisi internal, Perseroan mengembangkan infrastruktur sistem KAISA (KAI Smart Assistant) dan RAPID (*Rail Procurement in Digital*). KAISA adalah assistant pintar dalam platform robotic process automation (RPA) yang mampu melakukan pekerjaan secara berulang, klerikal, rutin, manual, dan berjumlah banyak. Sementara RAPID merupakan sebuah aplikasi pengadaan end to end dan menjadi rantai pasok pengadaan dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi pada proses pengadaan barang dan jasa.

On the other hand, to minimize potential external hazards, KAI routinely conducts safety outreach to the public, maps areas that are prone to natural disasters and prone to incidents of efforts to harm train travel, and coordinates, and collaborates with relevant stakeholders to minimize and prevent activities that potential to pose a hazard to rail travel.

4. Increasingly Massive and Competitive Industrial Development Which Encourages the Creation of Various Innovations

KAI realizes that the ongoing industrial development is increasingly massive and competitive. In addition to the growing customer needs for transportation services, technological advances also support the industrial conditions to become increasingly complex and competitive. Therefore, in line with KAI's commitment to providing optimal and value-added transportation services for customers, the Company continues to develop a number of innovations, among others improving infrastructure with double track railroads, improving the quality of rail materials, upgrading signaling systems, engineering curved geometries, and improving the quality of rail and bridge maintenance in an effort to shorten train travel time.

In addition to innovation in services, KAI is also intensifying digital transformation in facing an era with increasingly sophisticated technologies and demands digitalization in all aspects. This digital transformation is carried out, among others by testing the face recognition boarding gate facility at Bandung Station. Such innovation aims to make facilitate Long Distance Train customers in taking train without the hassle of showing various documents such as physical boarding passes, e-boarding passes, KTPs, or vaccination documents.

For the internal position, the Company is developing the KAISA (KAI Smart Assistant) and RAPID (*Rail Procurement in Digital*) infrastructure systems. KAISA is a smart assistant in a robotic process automation (RPA) platform that is capable of performing repetitive, clerical, routine, manual, and large amounts of work. While RAPID is an end-to-end procurement application serving as procurement supply chain to increase efficiency, effectiveness and transparency in the process of procuring goods and services.

KEBIJAKAN INTERNAL PENERAPAN FAKTOR-FAKTOR ESG KAI

KAI telah memiliki dan menerapkan sejumlah kebijakan internal yang mengatur penerapan faktor-faktor *Environment, Social, and Governance* (ESG) pada lingkungan Perseroan, dengan perincian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Kebijakan Internal Penerapan Faktor-Faktor ESG KAI

INTERNAL POLICIES ON THE IMPLEMENTATION OF KAI'S ESG FACTORS

KAI has and implements several internal policies on the implementation of Environmental, Social, and Governmental (ESG) factors within the Company, described in the table below:

Internal Policies on the Implementation of KAI's ESG Factors

Ketentuan Perundang-Undangan / Statutory Provisions	Implementasi Dalam Ketentuan Perusahaan / Implementation within the Company's Provisions
Amdal/Izin Lingkungan / Environmental Impact Analysis/Environmental Permit	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup / Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan / Government Regulation No. 27 of 2012 Concerning Environmental Permits 	Peraturan Direksi Nomor PER.U/KL.104/X/2/KA-2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Izin Lingkungan / Board of Directors Regulation No. PER.U/KL.104/X/2/KA-2018 concerning Guidelines for Preparing Environmental Documents for Environmental Permits
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri LH Nomor 13 Tahun 2010 Tentang UKL-UPL dan SPPL / Minister of Environment Regulation No. 13 of 2010 concerning UKL-UPL and SPPL Peraturan Menteri LH No.16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup / Minister of Environment Regulation No. 16 of 2012 concerning Guidelines for Preparing Environmental Documents 	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Direksi Nomor PER.U/KL.104/X/2/KA-2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan / Board of Directors Regulation No. PER.U/KL.104/X/2/KA-2018 concerning Guidelines for Preparing Environmental Documents and Environmental Permits Instruksi Direksi Nomor 6/PR.904/KA-2011 tentang Pembuatan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) atau Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) / Board of Directors Instruction No. 6/PR.904/KA-2011 concerning the Preparation of Environmental Management Documents (DPLH) or Environmental Evaluation Documents (DELH)
Limbah / Waste	
Peraturan Pemerintah Nomor 101 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) / Government Regulation No. 101 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste (B3)	Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KS.101/IV/1/KA-2017 tentang Pengelolaan Limbah di Daerah Operasi, Divisi Regional, Balai Yasa, Gudang Persediaan dan Anak Perusahaan / Decree of the Board of Directors No. KEP.U/KS.101/IV/1/KA-2017 concerning Waste Management in Operational Areas, Regional Divisions, Balai Yasa, Supply Warehouses and Subsidiaries
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air / Government Regulation No. 82 of 2001 concerning Water Quality Management and Water Pollution Control	<p>Instruksi No. 2/KM.203/KA-2017 tentang Pengelolaan Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) / Instruction No. 2/KM.203/KA-2017 concerning Management of Wastewater Treatment Plant (IPAL) Works</p> <p>Keputusan Direksi No. KEP.U/PL/402/VII/2/KA-2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penghapusan dan Penjualan Barang Limbah di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) / Decree of the Board of Directors No. KEP.U/PL/402/VII/2/KA-2012 concerning Guidelines for the Implementation of Procedures for the Elimination and Sale of Waste Goods in the Environment of PT Kereta Api Indonesia (Persero)</p>
Emisi / Emission	
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional / Presidential Regulation No. 98 of 2021 concerning Implementation of Carbon Economic Value to Achieve Nationally Determined Contribution Targets and Control of Greenhouse Gas Emissions in National Development	
Governansi / Governance	
Peraturan Menteri BUMN Nomor 2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Kegiatan Korporasi Signifikan / Minister of SOEs Regulation No. 2/MBU/03/2023 concerning Guideliens for the Governance of Significant Corporate Activities	<p>Peraturan Direksi Nomor PER.KL/KL.104/VIII/1/KA-2022 tentang Pedoman Tata Kelola Data (<i>Data Governance</i>) / Board of Directors Regulation No. PER.KL/KL.104/VIII/1/KA-2022 concerning the Guidelines for Data Governance</p> <p>Peraturan Direksi Nomor PER.U/KC.202/XII/1/KA-2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) / Board of Directors Regulation No. PER.U/KC.202/XII/1/KA-2020 concerning the Guidelines for Good Corporate Governance</p>
Sosial / Social	
Peraturan Menteri BUMN Nomor 1/MBU/3/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan / Ministry of SOEs Regulation No. 1/MBU/3/2023 concerning Special Assignment and Social Responsibility and Community Development	Peraturan Direksi Nomor PER.U/KP.502/XII/1/KA-2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan / Board of Directors Regulations No. PER.U/KP.502/XII/1/KA-2022 concerning Corporate Social and Environmental Responsibilities

PRAKTIK PELAPORAN

Reporting Practices

ENTITAS YANG TERMASUK DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN [GRI 2-2]

Secara keseluruhan, Laporan Keberlanjutan ini menyajikan informasi kinerja keberlanjutan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan serta pengungkapan tata kelola keberlanjutan yang berlaku pada KAI bersama anak perusahaan.

MENETAPKAN ISI LAPORAN DAN BATASAN TOPIK [GRI 2-3]

Sebagai bagian dari tahapan penentuan isi Laporan Keberlanjutan, KAI melakukan survei uji materialitas pada 16-24 Januari 2023, diikuti oleh penanggung jawab penyusunan Laporan Keberlanjutan yang bekerja sama dengan tim penyusun *Sustainability Report* (SR). Survei tersebut dilakukan sebagai upaya mengukur tingkat materialitas masing-masing topik yang akan dilaporkan, diberikan kepada 4.310 responden yang terdiri dari pemangku kepentingan pada lingkup internal serta eksternal Perseroan.

KAI memastikan bahwa penentuan isi Laporan Keberlanjutan telah dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip pelaporan sebagai berikut:

a. Pelibatan Pemangku Kepentingan

Pelibatan pemangku kepentingan KAI yaitu dengan survei dalam bentuk kuesioner pada saat menentukan topik material.

b. Konteks Keberlanjutan

Laporan keberlanjutan KAI ditulis untuk menyajikan kinerja organisasi dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta sasaran pembangunan berkelanjutan, bagaimana organisasi memberikan kontribusi dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.

c. Materialitas

Pemilihan topik material mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial bisnis KAI yang relevan dan menjadi prioritas.

ENTITIES INCLUDED IN THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS [GRI 2-2]

The overall information presented in this Sustainability Report is on the sustainability performance covering economic, social, and environmental aspects as well as disclosure of sustainability governance of KAI and its subsidiaries.

DETERMINATION OF REPORT CONTENTS AND TOPIC BOUNDARIES [GRI 2-3]

In determining the contents of the Sustainability Report, KAI conducted a materiality test survey on January 16-24, 2023 by the party in charge of preparing the Sustainability Report in collaboration with the Sustainability Report (SR) drafting team. The survey was conducted as an effort to measure the materiality level of each reporting to 4,310 respondents consisting of internal and external stakeholders of the Company.

KAI ensures that the determination of the contents of the Sustainability Report has been carried out in accordance with the following reporting principles:

a. Stakeholder Inclusiveness

KAI's stakeholder inclusiveness is implemented through a survey in the form of a questionnaire for determining material topics.

b. Sustainability Context

KAI's sustainability report is prepared to present the organization's performance with reference to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies and Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No.16/SEOJK.04/2021 concerning Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies and sustainable development goals on the organization's contribution in the economic, social, and environmental aspects.

c. Materiality

The material topics selected reflect the relevant and prioritized economic, environmental and social impacts of KAI's business.

d. Kelengkapan

Kelengkapan dilakukan dengan memberikan gambaran yang memadai serta mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang signifikan guna membantu para pemangku kepentingan dalam menilai organisasi.

Laporan Keberlanjutan ini mengungkapkan informasi kinerja keberlanjutan KAI, terbagi ke dalam 3 (tiga) cakupan yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Informasi terkait kinerja keberlanjutan yang dimuat di dalam laporan ini mengacu pada kinerja yang telah dilakukan KAI pada rentang periode pelaporan, yaitu 1 Januari-31 Desember 2022. Adapun, informasi keuangan di dalam laporan ini secara keseluruhan bersumber pada Laporan keuangan Konsolidasian KAI bersama anak perusahaan untuk tahun buku 2022.

KAJIAN MANAJEMEN TERKAIT PENYUSUNAN TOPIK MATERIAL

Pada 2022, KAI telah melakukan kajian terkait topik-topik material penerapan praktik pengelolaan keuangan berkelanjutan, yang antara lain dilakukan melalui proses penyusunan peta jalan (*roadmap*) *Environment, Social, and Governance* PT KAI (Persero) 2023-2027.

DAFTAR TOPIK MATERIAL [GRI 3-1, 3-2]

Berdasarkan survei uji materialitas yang telah dilakukan, KAI mengidentifikasi sejumlah topik dengan tingkat materialitas sebagai berikut:

d. Completeness

Completeness is carried out by providing an adequate description and depiction of significant economic, environmental, and social impacts to assist stakeholders in assessing the organization.

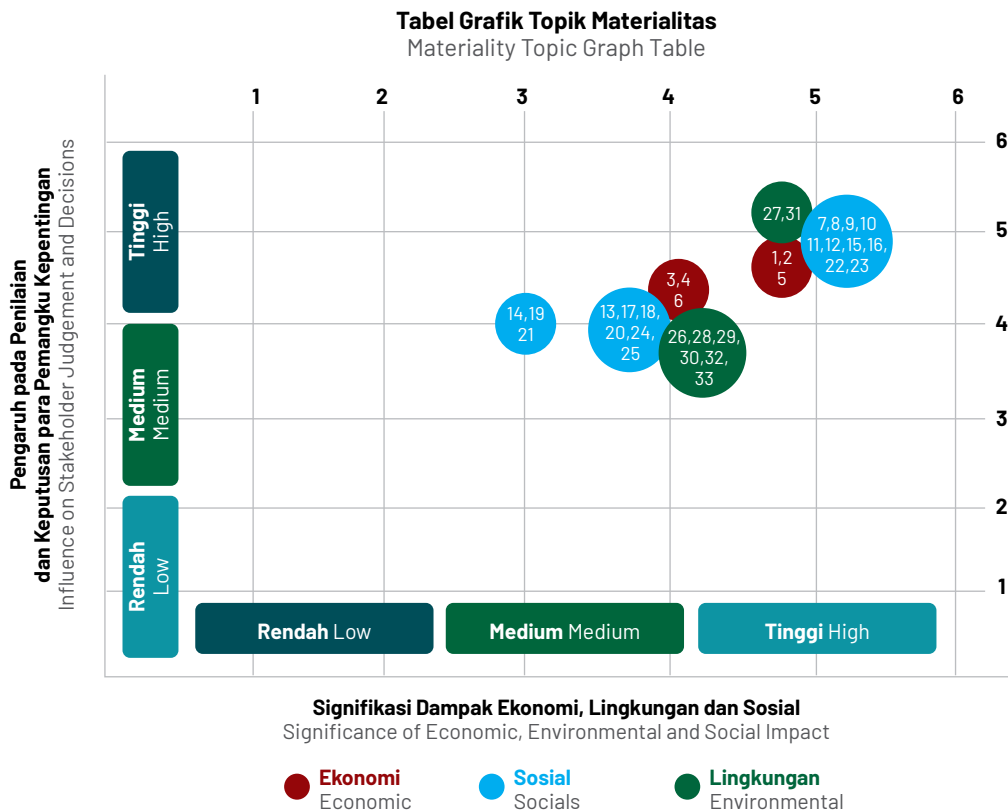
This Sustainability Report covers information on KAI's sustainability performance, divided into 3 (three) aspects, namely economic, social, and environmental aspects. Information on sustainability performance contained in this report refers to the performance that has been carried out by KAI in the reporting period of January 1-December 31, 2022. Meanwhile, the overall financial information in this report is sourced from the Consolidated Financial Statements of KAI and its subsidiaries for the 2022 fiscal year.

MANAGEMENT REVIEW REGARDING THE PREPARATION OF THE MATERIAL TOPICS

In 2022, KAI reviewed the material topics on the implementation of sustainable finance management practices through, among others, the preparation of roadmap for the Environmental, Social, and Governance Aspects of PT KAI (Persero) for 2023-2027.

LIST OF MATERIAL TOPICS [GRI 3-1, 3-2]

Based on the materiality test, KAI has identified a number of topics with the following materiality level :



Berdasarkan tingkat materialitas di atas, diketahui bahwa terdapat 16 (enam belas) topik yang secara dominan bersifat material dan berpengaruh signifikan terhadap pemangku kepentingan, dengan uraian sebagai berikut:

Based on the materiality level above, that there are 16 (sixteen) key material topics with significant impact on stakeholders as follows:

Topik Material / Material Topic	Batasan Pemangku Kepentingan yang Terdampak / Boundaries of Affected Stakeholders [GRI 3-1]		Alasan Bersifat Material / Materiality Reason [GRI 3-1]	Keterlibatan Perseroan / Engagement of the Company [GRI 3-3]
	Internal	Eksternal		
Aspek Ekonomi / Economic Aspect				
Kinerja Ekonomi / Economic Performance [GRI 201-1, 201-4]	Pegawai, Pemegang Saham / Employees, Shareholders	Pemasok, Mitra Usaha / Supplier, Business Partner	Kinerja ekonomi Perseroan memberi dampak signifikan terhadap pemangku kepentingan. / The Company's economic performance has a significant impact on stakeholders.	KAI berkomitmen menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan, sebagai upaya berkelanjutan dalam menghadirkan distribusi nilai ekonomi bagi pemangku kepentingan. / KAI is committed to maintaining and improving financial performance, as a sustainable effort in presenting the distribution of economic value to stakeholders.
Keberadaan Pasar / Market Presence	Pegawai, Pemegang Saham / Employees, Shareholders		Keberadaan pasar memberi dampak signifikan bagi pemangku kepentingan, melalui pemerolehan kinerja keuangan Perseroan. / The market presence has a significant impact on stakeholders through the Company's financial performance.	KAI menerapkan strategi pemasaran yang efektif sesuai arah pengembangan bisnis. / KAI implements an effective marketing strategy in accordance with the direction of business development.
Anti-Korupsi / Anti-Corruption [GRI 205]	Pegawai, Pemegang Saham / Employees, Shareholders	Regulator	Anti korupsi memiliki peran penting terhadap keberlangsungan kegiatan usaha untuk melawan segala bentuk korupsi termasuk suap menyuap dan pemerasan. / Anti-corruption has an important role in the sustainability of business activities to fight all forms of corruption including bribery and extortion.	KAI berkomitmen untuk melaksanakan nilai-nilai utama secara konsisten, hal ini diwujudkan dengan menetapkan Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System). / KAI is committed to implementing its core values consistently by establishing a Whistleblowing System.
Aspek Sosial / Social Aspect				
Kepegawaian / Employment [GRI 401]	Pegawai, Pemegang Saham / Employees, Shareholders	Penumpang, Pelanggan Angkutan Barang / Passenger, Cargo Forwarding Customer	Kepegawaian memberikan gambaran komitmen KAI terhadap pengelolaan pegawai atau sumber daya manusia. / Employment provides an overview of KAI's commitment to employee or human capital management	KAI melakukan perekrutan pegawai menggunakan website recruitment. kai.id. Website tersebut telah mencakup berbagai informasi seperti pengumuman rekrutmen, registrasi, seleksi, pengumuman kelulusan, dan job description. / KAI employee recruitment is conducted through the website recruitment. kai.id. The website includes various information such as announcements of recruitment, registration, selection, passing announcements, and jobs description.
Hubungan Tenaga Kerja dan Manajemen / Relationship of Employees and the Management	Pegawai / Employees		Hubungan tenaga kerja dan manajemen merupakan topik yang secara signifikan memberi pengaruh terhadap pemangku kepentingan. / Relationship of employees and the management has a significant impact on stakeholders	KAI melaksanakan komitmen untuk menjaga kualitas hubungan antara manajemen dan pegawai, antara lain melalui pemenuhan hak-hak pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB). / KAI has a commitment to maintaining the quality of relationship between the management and employees, including through fulfilling the rights of employees in accordance with applicable laws and regulations and the Collective Labor Agreement (CLA).
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) / Occupational Health and Safety (OHS)(K3) [GRI 403]	Pegawai / Employees	Penumpang, Pelanggan Angkutan Barang / Passenger, Cargo Forwarding Customer	Keselamatan dan Kesehatan kerja menggambarkan komitmen KAI dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan di tempat kerja. / Occupational Health and Safety reflects KAI's commitment to increasing comfort and safety at work.	KAI senantiasa menerapkan standarisasi keselamatan, kesehatan, dan keamanan bagi para pegawai di lingkungan kerja sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP). Seperti di masa pandemi seperti saat ini, KAI mewujudkan dengan memastikan penerapan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah penyebaran Covid-19. / KAI implemented standardization of safety, health, and security for employees in the work environment in accordance with the Company's Operating Standards (SOP). In the current pandemic, KAI realized this by ensuring the implementation of strict health protocols to prevent the spread of Covid-19.
Pelatihan dan Pendidikan / Education and Training [GRI 404]	Pegawai / Employees	Penumpang, Pelanggan Angkutan Barang, Masyarakat, Mitra Kerja / Passenger, Cargo Forwarding Customer, Public, Business Partner	Pelatihan dan pendidikan memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan maupun produktivitas pegawai yang akan memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang, masyarakat dan mitra kerja. / Training and education had the aim of increasing the ability and productivity of employees providing the best service for passengers, the community and business partners.	KAI memiliki program pelatihan dan pendidikan bagi para pegawai guna meningkatkan optimalisasi kinerja dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. / KAI conducts training and education programs for employees to improve performance optimization in producing excellent and highly competitive
Keanekaragaman dan Kesempatan Setara / Diversity and Equal Opportunity	Pegawai / Employees	Masyarakat / Public	Keanekaragaman dan kesempatan setara memiliki dampak yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. / Diversity and equal opportunity has a significant impact, both directly and indirectly.	KAI menerapkan pengelolaan SDM secara adil dengan memberi kesempatan yang setara bagi pegawai untuk mengembangkan karier dan kompetensi. / KAI implements fair HC management by providing equal opportunities of career development for employees

Topik Material / Material Topic	Batasan Pemangku Kepentingan yang Terdampak / Boundaries of Affected Stakeholders [GRI 3-1]		Alasan Bersifat Material / Materiality Reason [GRI 3-1]	Keterlibatan Perseroan / Engagement of the Company [GRI 3-3]
	Internal	Eksternal		
Praktik Non-Diskriminatif / Non-Discriminative Practices	Pegawai / Employees	Pemasok, Mitra Usaha, Pelanggan / Supplier, Business Partner, Customer	Praktik non-diskriminatif menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi pemangku kepentingan. / Non-discriminatory practices guarantee fair and equal treatment for stakeholders.	KAI berkomitmen untuk menjaga pengelolaan SDM agar terhindar dari praktik diskriminatif dalam bentuk apa pun, mencakup tahap rekrutmen serta pemberian kesempatan kerja dan pengembangan kompetensi. / KAI is committed to maintaining HC management to avoid discriminatory practices in any form, including the recruitment stage as well as providing job opportunities and competency development
Kerja Paksa atau Wajib Kerja / Forced Labor or Child Labor	Pegawai / Employees	Regulator	Insiden kerja paksa atau wajib kerja berdampak secara langsung terhadap pegawai sebagai bagian penting pemangku kepentingan Perseroan. / Incident of forced or compulsory labor has a direct impact on employees as an important part of the Company's stakeholders.	KAI memperhatikan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait pemberian hak cuti dan hari libur bagi pegawai, guna mencegah terjadinya insiden berupa pegawai yang bekerja di bawah paksaan. / KAI pays attention to compliance with applicable laws and regulations, particularly regarding the granting of leave and holiday rights for employees, in order to prevent incidents in the form of employees working under coercion.
Praktik Keamanan Kerja / Occupational Safety Practices	Pegawai / Employees	Masyarakat, Regulator / Public, Regulator	Praktik keamanan kerja memberi dampak signifikan bagi pegawai sebagai bagian penting pemangku kepentingan Perseroan. / Occupational safety has a significant impact on employees as an important part of the Company's stakeholders.	KAI menjamin terpenuhinya lingkungan kerja yang sehat dan aman pegawai, melalui praktik ketenagakerjaan yang diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan serta standar terbaik yang berlaku. / KAI guarantees the fulfillment of a healthy and safe work environment for employees, through employment practices that are implemented in accordance with laws and regulations and the best applicable standards.
Penilaian Hak Asasi Manusia / Human Rights Assessment	Pegawai / Employees	Regulator, Penumpang, Pemasok, Mitra Usaha / Regulator, Passenger, Supplier, Business Partner	Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap pemangku kepentingan memberi dampak signifikan, dan karenanya, perlu diiringi praktik evaluasi secara berkesinambungan. / Fulfillment of human rights for stakeholders has a significant impact, and therefore needs to be accompanied by continuous evaluation practices.	KAI memperhatikan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai peraturan perundang-undangan dan standar acuan yang berlaku, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap praktik ketenagakerjaan ataupun praktik bisnis secara umum. / KAI pays attention to the fulfillment of human rights in accordance with applicable laws and regulations and reference standards, as well as conducting periodic evaluations of employment practices or business practices in general.
Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan / Customer Health and Safety [GRI 416]	Pegawai / Employees	Penumpang, Pelanggan Angkutan Barang, Pemasok / Passenger, Cargo Forwarding Customer, Supplier	Kesehatan dan keselamatan pelanggan menggambarkan komitmen KAI dalam memberikan keamanan produk/jasa kepada para penumpangnya. / Customer health and safety illustrates KAI's commitment to providing product/service safety to its passengers.	KAI berkomitmen untuk mengutamakan dan menerapkan standarisasi keselamatan, kesehatan, dan keamanan bagi para mitra dan para penumpang. KAI secara rutin memastikan keamanan perjalanan kereta api, dan juga melakukan pengecekan berkala pada sarana dan prasarana. / KAI is committed to prioritizing and implementing safety, health and security standards for partners and passengers. KAI routinely ensures the safety of train travel, and also conducts periodic checks on facilities and infrastructure.
Privasi Pelanggan / Customer Privacy		Penumpang, Masyarakat, Pelanggan Angkutan Barang, Regulator / Passenger, Public, Cargo Forwarding Customer, Regulator	Perlindungan terhadap privasi pelanggan memberi dampak signifikan bagi upaya Perseroan dalam menjaga tingkat kepercayaan masyarakat. / Protection of customer privacy has a significant impact on the Company's efforts to maintain the level of public trust.	KAI menerapkan kebijakan perlindungan data pelanggan sesuai standar manajemen yang berlaku secara internasional. / KAI implements customer data protection policies in accordance with international management standards.
Aspek Lingkungan / Environmental Aspect				
Energi / Energy		Masyarakat, Regulator / Public, Regulator	Tingkat efisiensi energi memberi dampak signifikan sebagai nilai tambah Perseroan di tengah masyarakat. / The level of energy efficiency has a significant impact as the Company's added value in society.	KAI berupaya secara terus-menerus untuk menghadirkan kontribusi bagi pelestarian lingkungan hidup, antara lain melalui efisiensi penggunaan energi. / KAI continuously strives to make a contribution to environmental conservation, among others through the efficient use of energy.
Efluen dan Limbah / Effluent and Waste		Masyarakat, Mitra Usaha, Regulator / Public, Business Partner, Regulator	Pengelolaan efluen dan limbah memberi dampak signifikan bagi upaya pengurangan dampak buruk terhadap lingkungan. / Effluent and waste management has a significant impact on efforts to reduce negative impacts on the environment.	KAI menerapkan pengelolaan efluen dan limbah sesuai standar penerapan yang berlaku / KAI implements effluent and waste management in accordance with applicable standards

PENYAJIAN KEMBALI INFORMASI [GRI 2-4]

Laporan Keberlanjutan ini memuat informasi keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian KAI dan anak perusahaan tahun buku 2022. Tidak terdapat restatement atau pernyataan kembali informasi yang bersifat sebagai koreksi, baik pada penyajian data-data keuangan tersebut maupun terhadap informasi yang disajikan pada laporan di tahun sebelumnya.

RESTATEMENT OF INFORMATION [GRI 2-4]

This Sustainability Report contains financial information based on the consolidated financial statements of KAI and its subsidiaries for the 2022 fiscal year. There is no restatement of information as a correction, both in the presentation of the financial data and in the information presented in the previous year's report.

PERUBAHAN DALAM PELAPORAN [GRI 2-4]

Laporan Keberlanjutan ini memuat informasi yang mengacu pada kinerja KAI untuk periode 1 Januari-31 Desember 2022. Tidak terdapat perubahan periode pelaporan ataupun perubahan topik material Laporan Keberlanjutan yang dilakukan oleh KAI.

PERIODE DAN PEDOMAN LAPORAN [GRI 2-3]

Laporan Keberlanjutan ini merupakan laporan yang menyajikan kinerja keberlanjutan KAI dalam siklus pelaporan tahunan. Seluruh data yang diungkapkan melalui laporan ini merupakan informasi yang terjadi pada rentang periode pelaporan, yaitu 1 Januari-31 Desember 2022.

KAI memastikan bahwa Laporan Keberlanjutan ini telah disusun sesuai ketentuan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04.2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Lebih dari itu, Laporan Keberlanjutan ini menggunakan standar acuan yang berlaku secara internasional, yaitu *Global Reporting Initiative (GRI) Standard* yang dikeluarkan pada tahun 2021, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah pelaporan bagi pemangku kepentingan.

ALAMAT KONTAK UNTUK PERTANYAAN MENGENAI LAPORAN [GRI 2-3]

KAI memiliki harapan yang kuat agar Laporan Keberlanjutan ini dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam mempelajari serta menilai pelaksanaan kinerja keberlanjutan untuk tahun 2022. Lebih dari itu, KAI memiliki komitmen untuk mengupayakan adanya peningkatan kualitas laporan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun, melalui mekanisme timbal balik yang positif dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Atas dasar itu, KAI memastikan bahwa Laporan Keberlanjutan ini akan dapat diakses secara mudah bagi segenap pemangku kepentingan, di samping memastikan ketersediaan saluran komunikasi bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan umpan balik.

CHANGES IN REPORTING [GRI 2-4]

This Sustainability Report contains information that refers to KAI's performance for the period of January 1-December 31, 2022. There was no change in the reporting period or changes in the material topic of the Sustainability Report of KAI.

REPORTING PERIOD AND GUIDELINES [GRI 2-3]

This Sustainability Report presents KAI's sustainability performance in an annual reporting cycle. All data disclosed in this report is information occurred during the reporting period, namely January 1-December 31, 2022.

KAI ensures that this Sustainability Report has been prepared in accordance with the provisions in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. POJK 51/ POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies as well as Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 16/SEOJK.04.2021 concerning Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies. In addition, this Sustainability Report applies internationally accepted reference standards, namely *Global Reporting Initiative (GRI) Standard* issued in 2021, which is expected to increase the added value of reporting for stakeholders.

CONTACT POINT FOR REPORT QUESTIONS [GRI 2-3]

KAI expects that this Sustainability Report can become a reference for stakeholders in reviewing and assessing the implementation of sustainability performance in 2022. Furthermore, KAI is committed to continuously improving the reporting quality from year to year, through a mutually beneficial method by involving stakeholders.

On that basis, KAI ensures that this Sustainability Report is easily accessible to all stakeholders along with the availability of communication channels for stakeholders to submit feedback.

Laporan Keberlanjutan ini dipublikasikan terutama dalam edisi cetak, di samping juga tersedia dalam format elektronik pada situs web resmi KAI pada alamat <http://www.kai.id>. KAI menyediakan akses yang terbuka bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan umpan balik melalui alamat kontak sebagai berikut:

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1,
Bandung 40117 PO Box 1163
Bandung 40000
Telp : (022) 4230031, 4230039, 4230054
Fax : (022) 4203342 ext. 10039
E-mail : dokumen@kai.id

Media Sosial

Facebook : Kereta Api Kita, KAI121
Twitter : @Kereta Apikita, @kai121
Instagram : @Kereta Apikita, @kai121_
Youtube : Kereta Api Kita
TikTok : @kai121_
Podcast : Sahabat KAI

This Sustainability Report was published mainly in print edition and is also available in electronic format on KAI's official website at <http://www.kai.id>. KAI provides open access for stakeholders to submit feedback through the following contact point:

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Address : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1,
Bandung 40117 PO Box 1163
Bandung 40000
Telp : (022) 4230031, 4230039, 4230054
Fax : (022) 4203342 ext. 10039
E-mail : dokumen@kai.id

Social Media

Facebook : Kereta Api Kita, KAI121
Twitter : @Kereta Apikita, @kai121
Instagram : @Kereta Apikita, @kai121_
Youtube : Kereta Api Kita
TikTok : @kai121_
Podcast : Sahabat KAI



KINERJA KEBERLANJUTAN [OJK F]

Sustainability Performance



KEGIATAN MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN [OJK F.1]

KAI secara aktif melakukan upaya membangun budaya berkelanjutan melalui program pembinaan yang dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan-kegiatan sosial-kemasyarakatan, antara lain berupa program internalisasi spirit kegiatan KAI Peduli Lingkungan (KAI-Pling) pada pegawai. KAI-Pling merupakan program kepedulian KAI terhadap lingkungan berupa perbaikan sarana dan prasarana umum, pengelolaan sampah, serta kegiatan penanaman pohon di sekitar area usaha KAI. Melalui program tersebut, pegawai KAI didorong untuk berperan secara aktif dalam kegiatan penyaluran manfaat bagi lingkungan sekitar. Di samping itu, sebagai upaya membangun budaya keberlanjutan, KAI mengikutsertakan seluruh pegawai dalam pelatihan terkait kebijakan *anti-fraud* dan anti-korupsi, serta memastikan seluruh mitra bisnis memahami dan ikut mempraktikkan kebijakan anti-korupsi.

BUILDING A CULTURE OF SUSTAINABILITY [OJK F.1]

KAI actively makes efforts to build a sustainable culture through coaching programs that are implemented concurrently with social-community activities by instilling the spirit of KAI Environmental Care (KAI-Pling) for employees. KAI-Pling is KAI's concern for the environment in the form of repairing public facilities and infrastructure, waste management, and tree planting activities around KAI's business area. Through this program, KAI employees are encouraged to play an active role in providing benefits for the local environment. In addition, as an effort to build a culture of sustainability, KAI includes all employees in training related to anti-fraud and anti-corruption policies, and ensures that all business partners understand and participate in practicing anti-corruption policies.

“

KAI secara aktif melakukan upaya membangun budaya berkelanjutan melalui program pembinaan yang dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan-kegiatan sosial-kemasyarakatan, antara lain berupa program internalisasi spirit kegiatan KAI Peduli Lingkungan (KAI-Pling) pada pegawai.

KAI actively makes efforts to build a sustainable culture through coaching programs that are implemented concurrently with social-community activities by instilling the spirit of KAI Environmental Care (KAI-Pling) for employees. ”

KINERJA EKONOMI

Tahun 2022 ditandai dengan situasi pemulihan dari dampak pandemi Covid-19, khususnya pada sektor transportasi. KAI mendukung Pemerintah dalam menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan memberlakukan kewajiban untuk menaati protokol kesehatan bagi karyawan dan pelanggan, yang secara efektif membuat KAI mampu merealisasikan kinerja yang positif seiring pemenuhan tanggung jawab kepada masyarakat.

KAI memahami bahwa perkembangan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan bagi pencapaian kinerja, dan karenanya, menjadi dasar bagi manajemen dalam menentukan keputusan bagi Perseroan ataupun pemangku kepentingan.

ECONOMIC PERFORMANCE

2022 was marked by a recovery from the impact of the Covid-19 pandemic, especially in the transportation sector. KAI supports the Government in implementing the Public Restriction (PPKM) policy by imposing an obligation to comply with health protocols for employees and customers, which effectively enables KAI to realize positive performance while fulfilling its responsibilities to the public.

KAI understands that the development of the Covid-19 pandemic in Indonesia has a significant influence on performance achievement, and therefore, becomes the basis for management in making decisions for the Company or stakeholders.

Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi [OJK F.2]

Untuk tahun 2022, pencapaian target volume dan pendapatan angkutan penumpang KAI berhasil terealisasi melampaui target anggaran, dengan persentase masing-masing mencapai 104% dan 142,5%.

Comparison of Targets and Performance of Production, Portfolio, Financing or Investment, Income, and Profit (Loss) [OJK F.2]

In 2022, the achievement of KAI's passenger transport volume and revenue targets has been realized above the budget target, with percentages reaching 104% and 142.5% respectively.

Perbandingan Target dan Realisasi Angkutan Penumpang

Comparison of Targets and Realization of Passenger Transport

Tahun / Year	Perbandingan Target dan Realisasi Angkutan Penumpang (Dalam Orang) / Comparison of Target and Realization of Passenger Transport (In Person)			Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Angkutan Penumpang (Dalam Ribuan Rupiah) / Comparison of Target and Actual Passenger Transport Revenue (In thousands of Rupiah)		
	Target	Realisasi / Realization	Persentase Realisasi terhadap Target (%) / Percentage of Target Realization (%)	Target	Realisasi / Realization	Persentase Realisasi terhadap Target (%) / Percentage of Target Realization (%)
2022	274.437.174	284.448.804	104	4.887.198.501	6.964.495.288	142,5
2021	214.547.283	154.537.582	72,03	2.450.673.572	2.363.286.232	96,43
2020	175.106.283	186.832.349	106,70	2.645.310.404	2.864.386.074	108,28

Kemudian, realisasi volume angkutan barang juga telah mendekati pemenuhan target yaitu mencapai 58.006.880 ton atau sebesar 96% dibandingkan dengan target yang sebesar 60.246.406 ton. Atas realisasi tersebut, KAI mencatatkan pendapatan angkutan barang dengan persentase pemenuhan mencapai 112,8% terhadap target, dengan realisasi sejumlah Rp9,83 triliun.

The realization of cargo exceeded the target reaching 58,006,880 tons or 96% compared to the target 60,246,406 tons. For this realization, KAI recorded cargo revenue reaching 112.8% of the target with a realization of Rp9.83 trillion.

Perbandingan Target dan Realisasi Angkutan Barang

Comparison of Targets and Realization of Freight Transport

Tahun / Year	Perbandingan Target dan Realisasi Angkutan Barang (Dalam Ton) / Comparison of Targets and Realization of Freight Transportation (In Ton)			Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Angkutan Barang (Dalam Ribuan Rupiah) / Comparison of Targets and Realization of Freight Transportation Revenue (In thousands of Rupiah)		
	Target	Realisasi / Realization	Persentase Realisasi terhadap Target (%) / Percentage of Target Realization (%)	Target	Realisasi / Realization	Persentase Realisasi terhadap Target (%) / Percentage of Target Realization (%)
2022	60.246.406	58.006.880	96	8.716.752.845	9.833.032.266	112,8
2021	56.412.318	50.261.778	89,10	7.714.142.733	7.327.830.146	94,99
2020	40.928.412	45.125.346	110,25	5.816.892.167	6.287.906.261	108,10

Perbandingan target dan realisasi komersialisasi aset KAI untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Target dan Realisasi Komersialisasi Aset

Tahun / Year	Realisasi Komersialisasi Aset (Dalam m ²) / Realization of Asset Commercialization (In m ²)	Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Komersialisasi Aset (Dalam Ribuan Rupiah) / Comparison of Target and Realization of Asset Commercialization Revenue (In Thousands of Rupiah)		
		Target	Realisasi / Realization	Persentase Realisasi terhadap Target (%) / Percentage of Target Realization (%)
2022	7.768.939,11	718.275.332	630.197.305	88
2021	4.476.810,09	447.468.842	463.728.361	104
2020	5.817.355,88	546.623.579	433.311.820	79

Pada tahun 2022, KAI membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp1,69 triliun atau sebesar 1,525% terhadap target yang ditetapkan di awal tahun. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa KAI telah berhasil dalam menerapkan strategi untuk tahun 2022, antara lain melalui strategi percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, optimalisasi sarana dan kegiatan pemasaran serta efisiensi pola operasi untuk peningkatan volume angkutan.

Perbandingan target dan realisasi laba KAI tahun berjalan pada posisi 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Target dan Realisasi Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Tahun / Year	Perbandingan Target dan Realisasi Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Comparison of Target and Realization of Profit (Loss) for the Year		
	Target (Dalam Ribuan Rupiah) / Target (In Thousands of Rupiah)	Realisasi (Dalam Ribuan Rupiah) / Realization (In Thousands of Rupiah)	Persentase Realisasi terhadap Target (%) / Percentage of Target Realization (%)
2022	103.739.264	1.685.989.220	1.625
2021	(723.337.702)	(425.195.645)	141,22
2020	(3.427.388.935)	(1.736.237.692)	149,34

Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi Pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan [OJK F.3]

KAI berkomitmen untuk melaksanakan investasi pengembangan berkelanjutan yang pada jangka panjang diharapkan mampu menghadirkan dukungan signifikan bagi upaya pelestarian lingkungan.

Comparison of the target and realization of KAI assets commercialization for 2022 is as follows:

Comparison of Targets and Realization of Asset Commercialization

In 2022, KAI posted a profit for the year of Rp1.69 trillion or 1,525% of the target set at the beginning of the year. This showed that KAI implemented an effective strategy in 2022 by accelerating the development of supporting infrastructure, optimizing marketing facilities and activities as well as operating efficiency patterns to increase transportation volume.

Comparison of KAI's target and realization of profit for the year as of December 31, 2022 is as follows:

Comparison of Target and Realization of Profit (Loss) for the Year

Comparison of Targets and Performance of Portfolio, Funding, or Investments in Financial Instruments or Projects in Line with Sustainable Finance [OJK F.3]

KAI is committed to implementing sustainable development investments which in the long term are expected to be able to provide significant support for environmental conservation efforts.

Atas hal itu, KAI memastikan bahwa seluruh kereta api yang dipergunakan dalam aktivitas operasional KAI merupakan jenis kereta yang ramah lingkungan. Hal tersebut didasarkan pada penggunaan bahan bakar ramah lingkungan pada kereta api, yaitu BBM B30 serta tenaga listrik, yang mampu mengurangi emisi karbon (CO₂).

Therefore, KAI ensures that all trains used in KAI's operations are eco-friendly through the use of eco-friendly train fuels, namely B30 fuel and electricity, which can reduce carbon (CO₂) emissions.

Pengungkapan perbandingan target dan realisasi investasi pengembangan berkelanjutan KAI untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Information on comparison of targets and realization of KAI's sustainable development investment in 2022 is as follows:

Perbandingan Target dan Realisasi Investasi Pengembangan

Comparison of Targets and Realization of Development Investment

Tahun / Year	Perbandingan Target dan Realisasi Investasi Pengembangan / Comparison of Targets and Realization of Development Investment		
	Target (Dalam Miliar Rupiah) / Target (In Billions of Rupiah)	Realisasi (Dalam Miliar Rupiah) / Realization (In Billion Rupiah)	Persentase Realisasi terhadap Target (%) / Percentage of Target Realization (%)
2022	2.015	547	27,13
2021	7.177	3.848	53,62
2020	8.158	5.081	62,30

Nilai Ekonomi yang Dihasilkan dan Didistribusikan [GRI 201-1]

Generated and Distributed Economic Value [GRI 201-1]

Pada periode 2022, KAI menghasilkan nilai ekonomi sejumlah Rp22,56 triliun atau meningkat 45,27% dibanding pada 2021 yang sejumlah Rp15,53 triliun. Nilai ekonomi yang dihasilkan pada 2022 terdiri atas sejumlah komponen pendapatan KAI, yaitu pendapatan angkutan penumpang, angkutan barang, angkutan pendukung angkutan KA, pendapatan non-angkutan, serta kompensasi pemerintah. Dari nilai ekonomi yang dihasilkan tersebut, KAI telah mendistribusikan sejumlah Rp18,77 triliun pada 2022, memperlihatkan peningkatan 22,60% dari nilai ekonomi yang didistribusikan pada 2021 yang sejumlah Rp15,31 triliun. Distribusi nilai ekonomi tersebut dilakukan kepada pemangku kepentingan KAI, mencakup pemerintah, pegawai, pemilik modal, masyarakat, hingga pemasok.

In 2022, KAI generated economic value of Rp22.56 trillion, an increase of 45.27% compared to 2021 at Rp15.53 trillion. The economic value generated in 2022 consists of a number of KAI's revenue components, namely revenue from passenger transportation, freight transportation, supporting transportation for railroad transportation, non-transport revenue, and government compensation. Of the economic value generated, KAI has distributed a total of Rp18.77 trillion in 2022, showing a 22.60% increase from the economic value distributed in 2021 at Rp15.31 trillion. The distribution of economic value is carried out to KAI's stakeholders, including the government, employees, capital owners, the community, and suppliers.

Dampak Ekonomi bagi Pemangku Kepentingan dalam rupiah penuh

Generated and Distributed Economic Value in full rupiah

No	Uraian / Description	2022	2021	2020
1. Nilai Ekonomi yang dihasilkan / Generated Economic Value				
a.	Pendapatan Angkutan Penumpang / Revenues from Passenger Transportation	6.964.495.288.000	2.363.286.232.000	2.864.386.074.000
b.	Pendapatan Angkutan Barang / Revenues from Goods Transportation	9.833.032.266.000	7.456.829.637.000	6.301.587.852.000
c.	Pendapatan Pendukung Angkutan KA / Revenues from Transportation Support Train	713.611.039.000	672.143.192.000	661.780.925.000
d.	Pendapatan Non Angkutan / Revenues from Non-Transportation	1.575.688.038.000	1.134.200.352.000	1.163.317.509.000

No	Uraian / Description	2022	2021	2020
	e. Kompensasi Pemerintah / Government Compensation	3.880.245.033.000	3.903.070.707.000	3.422.301.613.000
Total Nilai Ekonomi yang Dihasilkan / Total Generated Economic Value		22.967.071.664.000	15.529.530.120.000	14.413.373.973.000
2. Nilai Ekonomi yang didistribusikan dalam bentuk: / Economic Value distributed in the form of:				
	a. Biaya Operasional / Operating Expenses	2.941.723.631.000	1.906.205.593.000	935.794.960.000
	b. Pembayaran Terhadap Pemerintah / Payments To Government			
	i. Penggunaan Prasarana / Infrastructure Usage	221.003.573.000	414.889.721.000	559.633.923.000
	ii. Pembayaran Pajak / Tax Payment	261.362.844.000	177.840.535.000	567.651.756.000
	c. Pembayaran Terhadap Pegawai / Payments to Employees	6.469.435.899.000	4.810.626.189.000	7.034.339.164.000
	d. Pembayaran Kepada Pemilik modal / Payment to Capital Owners	-	-	-
	e. Pembayaran Kepada Masyarakat (Penyaluran Dana TJSL) / Payment to Public (TJSL Fund Distribution)	9.792.154.012	8.769.074.128	17.538.148.867
	f. Pembayaran Kepada Pemasok / Payment to Suppliers	9.701.299.798.000	7.995.549.198.000	6.323.028.182.000
Total Nilai Ekonomi yang didistribusikan / Total Distributed Economic Value		19.594.825.745.000	15.305.111.236.000	15.420.447.985.000
3	Pendapatan dan (Beban) Lain-lain / Other Revenues and (Expenses)	-1.161.657.619.000	-771.399.410.000	-1.213.220.709.000
4	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan / Income Tax Benefit (Expense)	-524.599.080.000	121.784.883.000	484.057.029.000
5	Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Profit (Loss) for the Year	1.685.989.220.000	-425.195.643.000	-1.736.237.692.000
6	Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Nonpengendali / Profit (Loss) For The Year Attributable To Non-Controlling Interests	96.051.257.000	-62.735.570	-44.507.682.000
7	Nilai Ekonomi yang ditahan - Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Induk / Retained Economic Value - Profit (Loss) For The Year Attributable to the Parent	1.782.040.477.000	-425.132.907.430	-1.691.730.010.000

Dampak Ekonomi Tidak Langsung [GRI 203-1]

Sebagai perusahaan yang beroperasi pada bidang transportasi, KAI melaksanakan sejumlah inisiatif penyaluran nilai ekonomi sebagai wujud kontribusi bagi pemangku kepentingan. Inisiatif tersebut terlaksana melalui sejumlah program dan kegiatan pemberdayaan, berupa dukungan layanan bagi pemangku kepentingan serta pembangunan infrastruktur umum bagi masyarakat.

Pemetaan terhadap dukungan layanan bagi pemangku kepentingan yang telah dilakukan KAI pada 2022 diungkapkan sebagai berikut:

Dampak Ekonomi bagi Pemangku Kepentingan

Dalam ribuan rupiah

Uraian / Description	2022	2021*
Aktivitas Operasi / Operational Activities		
Pembayaran kepada Pemasok / Payment to Suppliers	(9.701.299.798)	(7.995.549.108)
Pembayaran kepada Karyawan / Payment to Employees	(6.469.435.899)	(4.810.626.189)
Pembayaran kepada Pemerintah / Payment to Government	(221.003.573)	(414.889.721)
Pembayaran Pajak Penghasilan / Income Tax Payment	(261.362.844)	(177.840.535)
Pembayaran Beban Keuangan / Financial Expenses Payment	(900.937.342)	(869.512.150)

Indirect Economic Impact [GRI 203-1]

As a Company operating in the transportation sector, KAI undertakes several initiatives of economic value distribution to contribute to the stakeholders. Such initiatives were undertaken through several empowerment programs and activities, as a support for the stakeholders and public infrastructure development for the public.

The mapping of service support for stakeholders that has been carried out by KAI in 2022 is disclosed as follows:

Economic Impact on the Stakeholders

In millions of rupiah.

Uraian / Description	2022	2021*
Aktivitas Pendanaan / Financing Activities		
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek / Payment of Short-Term Bank Loans	(14.606.472.528)	(7.657.502.999)
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Panjang / Payment of Long-Term Bank Loans	(941.505.589)	(381.327.501)
Pembayaran Liabilitas Sewa / Payment of Lease Liabilities	(37.190.355)	(26.886.581)
Pembayaran Dividen Entitas Anak / Subsidiary Dividend Payment	(298.264)	(198.294)

*) Disajikan kembali. / Restated.

Lebih dari itu itu, KAI menghadirkan dampak ekonomi tidak langsung berupa penyaluran dukungan infrastruktur bagi lingkungan. Pengungkapan mengenai hal tersebut akan disajikan pada subbagian Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan pada Laporan Keberlanjutan ini.

Implikasi Finansial, Risiko, serta Peluang Akibat Perubahan Iklim [GRI 201-2]

Perseroan memahami bahwa perubahan iklim yang berlangsung pada skala global telah memberikan dampak tidak langsung terhadap aktivitas operasi KAI, yang kemudian memiliki kemungkinan untuk menghadirkan implikasi finansial. Atas pemahaman tersebut, Perseroan telah melakukan identifikasi terhadap bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko bencana lingkungan secara berkala, dengan hasil identifikasi yang dilakukan pada periode 2022 dapat dilihat pada Lampiran 2 yang disertakan di akhir laporan ini.

Selama 2022, terdapat 100 kejadian gangguan perjalanan kereta api yang diakibatkan oleh kejadian alam, seperti genangan air, banjir, dan longsor.

Kebijakan dan Praktik Anti-Korupsi [GRI 205]

KAI memahami bahwa kebijakan dan praktik anti-korupsi memiliki peran penting terhadap kualitas keberlangsungan kegiatan usaha, dan karenanya, KAI berkomitmen secara konsisten menjalankan bisnis secara jujur, beretika, serta tidak mentolerir tindakan suap dan korupsi melalui gerakan "KAI Bersih, Bebas Suap, Bebas Korupsi, untuk Indonesia!". [GRI 3-1]

Gerakan "KAI Bersih, Bebas Suap, Bebas Korupsi, untuk Indonesia!" dilandasi dengan kebijakan anti-korupsi yang secara efektif telah diterapkan sebagai upaya mencegah dan memberantas tindak korupsi antara lain berupa kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Perilaku (*Code of Ethic*), serta Kebijakan *Whistleblowing System*.

Furthermore, KAI makes indirect economic impact by providing an infrastructure support for the environment. Disclosures regarding the matter is available in the Social and Environmental Responsibilities sub-chapter in this Sustainability Report.

Financial Implication, Risk, and Opportunities of Climate Change [GRI 201-2]

The Company is aware that global climate change has an indirect impact on KAI's operations, which can have financial implications. In light of this, the Company has identified the danger, assessment, and environmental disaster risk mitigation periodically, with the results of the identification carried out in 2022 available in Appendix 2 attached at the end of this report.

In 2022, there were 100 incidents of disruption to train trips caused by natural events, such as puddles, floods and landslides.

Anti-Corruption Policies and Practices [GRI 205]

KAI understands the importance of anti-corruption policies and practices for sustainable business activities, and therefore, is committed to consistently conducting business in an honest, ethical manner, and does not tolerate acts of bribery and corruption through the "KAI Clean, Free of Bribery, Free of Corruption, for Indonesia!" movement. [GRI 3-1]

The "KAI Clean, Free of Bribery, Free of Corruption, for Indonesia!" movement is based on an anti-corruption policy that has been effectively implemented as an effort to prevent and eradicate acts of corruption, among others, in the form of an Anti-Bribery Management System policy, Gratuity Control Policy, a Code of Ethics, and Whistleblowing System Policy.

KAI memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* (WBS) sebagai media untuk melaporkan indikasi pelanggaran terkait tindak pidana korupsi, pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku/Kode Etik serta pelanggaran disiplin Pekerja. Penerapan WBS di KAI telah dilaksanakan sejak tanggal 24 Februari 2014 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.U/HK.215/II/2/KA-2014 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kebijakan ini telah mengalami pemutakhiran, terakhir pada tanggal 11 November 2020 melalui Peraturan Direksi Nomor PER.U/KL.104/XI/1/KA-2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*), dengan menyesuaikan perkembangan bisnis dan perundang-undangan yang berlaku.

KAI menyediakan media pelaporan bagi Pelapor (*Whistleblower*) untuk menyampaikan indikasi dugaan pelanggaran yang terjadi di Perusahaan, melalui:

- email ke alamat kai-bersih@kai.id;
- telepon, SMS atau Whatsapp ke nomor resmi WBS di 081214455300; dan/atau
- surat kepada VP Quality Assurance and *Good Corporate Governance* KAI;

Praktik Pengendalian Gratifikasi diatur dalam Peraturan Direksi Nomor PER.U/KC.202/XI/1KA-2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Pedoman ini diantaranya mengatur tentang kewajiban dan sikap pegawai terhadap gratifikasi, serta mekanisme pelaporannya. **[GRI 3-2]**

Pegawai yang menerima atau menolak gratifikasi wajib menyampaikan laporan gratifikasi kepada UPG melalui menu E-Gratifikasi pada situs web <https://eoffice.kai.id>, untuk selanjutnya dilakukan penetapan atas kepemilikan gratifikasi melalui proses internal Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau diteruskan kepada KPK. Setiap laporan gratifikasi dilaporkan kepada KPK sebagai bentuk kepatuhan KAI terhadap Peraturan KPK No.2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. **[GRI 3-3]**

KAI memiliki komitmen untuk mendukung Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, diantaranya dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerja sama ini mencakup integrasi penanganan pengaduan melalui *whistleblowing system* antara KPK dan KAI yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta menghindari adanya duplikasi pada penanganan pengaduan, serta memudahkan koordinasi dan monitoring penanganan pengaduan antara KAI dan KPK.

KAI has a *Whistleblowing System* (WBS) as a medium for reporting indications of violations related to corruption, violations of the Code of Conduct and violations of employee discipline. The implementation of the WBS at KAI has been implemented since February, 24 2014 through the Decree of the Board of Directors No. KEP.U/HK.215/II/2/KA-2014 concerning *Whistleblowing System Guidelines* of PT Kereta Api Indonesia (Persero). This policy has been updated, most recently on November 11, 2020 through Board of Directors Regulation No. PER.U/KL.104/XI/1/KA-2020 concerning *Whistleblowing System Guidelines*, by adjusting business developments and applicable laws.

KAI provides reporting media for *Whistleblowers* to convey indications of alleged violations occurred at the Company, through:

- email to kai-clean@kai.id ;
- call, SMS or Whatsapp to the official WBS number at 081214455300; and/or
- letter to VP Quality Assurance and *Good Corporate Governance* of KAI;

Gratuity Control Practices are regulated in Board of Directors Regulation No. PER.U/KC.202/XI/1KA-2020 concerning *Gratuity Control Guidelines*. These guidelines, among others, regulate the obligations and attitudes of employees towards gratuity, as well as the reporting mechanism. **[GRI 3-2]**

Employees receiving or refusing gratuities must submit a gratuity report to the UPG through the E-Gratuity menu in the <https://eoffice.kai.id> website, for further determination of ownership of gratuities through the internal process of the Gratuity Control Unit (UPG) or forwarded to KPK. Each gratification report is reported to the KPK as a form of KAI's compliance with KPK Regulation No. 2 of 2019 concerning *Gratuity Reporting*. **[GRI 3-3]**

KAI is committed to supporting the Government in efforts to eradicate criminal acts of corruption, including by signing a Cooperation Agreement (PKS) with the Corruption Eradication Commission (KPK) regarding Complaint Handling to Eradicate Corruption Crimes. This collaboration includes the integration of complaint handling through a *whistleblowing system* between the KPK and KAI which aims to build and increase effectiveness, efficiency, and avoid duplication in complaint handling, as well as facilitate coordination and monitoring of complaint handling between KAI and KPK.

Perseroan juga telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor PER.U/KC.202/IV/II/KA-2020 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. SMAP diterapkan sebagai panduan yang wajar dan proporsional untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi penyuapan.

Perseroan telah memulai penerapan dan sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tahun 2020 di Unit *Quality Assurance and Good Corporate Governance* dan Unit PBJ Kantor Pusat. Selanjutnya pada tahun 2022, Perseroan menerima Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan lingkup *corporate* yang merupakan perluasan lingkup implementasi dari tahun sebelumnya. Sertifikasi lingkup *corporate* dengan sampling audit yang meliputi 20 (dua puluh) Unit Kantor Pusat, DAOP 3 Cirebon, DIVRE III Palembang, dan Balai Yasa Manggarai, diterima Perusahaan setelah melalui beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, pengembangan dan implementasi, serta evaluasi melalui audit internal dan audit eksternal oleh PT Tuv Nord Indonesia. Penyerahan sertifikat ini menjadi hadiah bagi KAI yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-77 pada 28 September 2022. Dengan bertambahnya usia, KAI akan terus wujudkan KAI Bersih, Bebas Suap, Bebas Korupsi untuk Indonesia.

Operasi-Operasi yang Dinilai Memiliki Risiko Terkait Korupsi [GRI 205-1]

KAI berupaya untuk mencegah terjadinya korupsi dengan melakukan kajian risiko terhadap segala potensi terjadinya korupsi di dalam bisnis KAI. Kajian risiko dilakukan melalui sampling yang meliputi 20 (dua puluh) Unit Kantor Pusat. Sedangkan sampling yang dilakukan di kantor daerah meliputi DAOP 3 Cirebon, DIVRE III Palembang, dan Balai Yasa Manggarai. Berdasarkan hasil kajian tersebut, ditemukan bahwa sebesar 16% total risiko signifikan berada di kantor pusat dan 2% berada di kantor daerah, atau mencakup 12% dibandingkan keseluruhan lingkup operasional KAI. KAI telah menetapkan rencana mitigasi untuk menurunkan tingkat risiko yang masuk dalam kategori signifikan tersebut.

KAI menerapkan rencana mitigasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan Anti Penyuapan KAI yang ditandatangani oleh seluruh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penandatanganan *Code of Conduct* bagi seluruh Insan KAI setiap tahun sekali yang memuat kewajiban untuk:
 - a. Bertindak sesuai pedoman perilaku.

The Company has also implemented an ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System which is regulated in Board of Directors Regulation No. PER.U/KC.202/IV/II/KA-2020 concerning Anti-Bribery Management System. SMAP is applied as a reasonable and proportionate guide to prevent, detect and respond to bribery.

The Company has started implementing and certifying SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in 2020 at the Quality Assurance and Good Corporate Governance Unit and the PBJ Head Office Unit. Furthermore, in 2022, the Company received an ISO 37001:2016 Certificate for the Corporate scope of the Anti-Bribery Management System, which is an expansion of the scope of implementation from the previous year. Corporate scope certification with audit sampling covering 20 (twenty) Head Office Units, DAOP 3 Cirebon, DIVRE III Palembang, and Balai Yasa Manggarai, received by the Company after going through several stages which include planning, development and implementation, as well as evaluation through internal audits and external audit by PT Tuv Nord Indonesia. This certificate is a gift for KAI's 77th Anniversary on September 28, 2022. As the Company becomes older and wiser, KAI will continue to make KAI Clean, Free of Bribery, Free of Corruption for Indonesia.

Operations with Risks of Corruption [GRI 205-1]

KAI strives to prevent corruption by conducting a risk assessment of all businesses at KAI with a potential of corruption. The risk assessment was carried out through sampling from 20 (twenty) Head Office Units as well as regional offices in DAOP 3 Cirebon, DIVRE III Palembang, and Balai Yasa Manggarai. Based on the assessment, 16% of the total significant risks were at the head office and 2% were at the regional offices, or covering 12% of the overall operational scope of KAI. Furthermore, KAI has established a mitigation plan to reduce the level of risk that could be included into the significant category.

KAI implemented the mitigation plan through:

1. Enforcing of the KAI Anti-Bribery Policy which was signed by the entire Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
2. Signing of the Code of Conduct for all KAI personnel every year which contains obligations to:
 - a. Act according to the code of conduct.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Menjalankan proses bisnis perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>). c. Menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. d. Tidak melakukan tindakan penyuapan yaitu menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, atau meminta keuntungan/sesuatu yang tidak semestinya dalam lingkup pekerjaan. e. Melaporkan setiap pelanggaran yang kami saksikan kepada otoritas yang berwenang atau media <i>Whistleblowing System</i>. f. Menolak dan melaporkan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban. g. Menerima konsekuensi jika melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku. <ol style="list-style-type: none"> 3. Kewajiban bagi seluruh Mitra Bisnis untuk menandatangani Pakta Integritas dan komitmen anti penyuapan pada seluruh proses kerja sama yang dilakukan dengan Perseroan, sesuai dengan standar ISO 37001:2016 Sisten Manajemen Anti Penyuapan yang telah diterapkan di Perseroan. 4. Secara kontinyu melakukan uji kelayakan kepada seluruh Mitra Bisnis yang melakukan kerja sama dengan Perseroan, sesuai dengan standar ISO 37001:2016 Sisten Manajemen Anti Penyuapan yang telah ditetapkan Perseroan. 5. Sosialisasi, diseminasi dan internalisasi tentang antikorupsi secara rutin dan menyeluruh bagi kepada <i>stakeholders</i> Perseroan. | <ul style="list-style-type: none"> b. Run the Company's business processes based on the principles of good corporate governance (<i>Good corporate governance</i>). c. Avoid activities that may cause a conflict of interest. d. Not take bribes, namely offering, promising, giving, receiving, or asking for benefits/something that is not appropriate within the scope of work. e. Report any violations witnessed to the competent authorities or the <i>Whistleblowing System</i>. f. Refuse and report gratuities related to his/her position and contrary to obligations. g. Accept the consequences for violating Company regulations and applicable laws. <ol style="list-style-type: none"> 3. All Business Partners must sign an Integrity Pact and an anti-bribery commitment in all cooperation processes carried out with the Company, in accordance with ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System standards that have been implemented in the Company. 4. Continuously conducting due diligence on all Business Partners who cooperate with the Company, in accordance with the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System standards set by the Company. 5. Socialization, dissemination and internalization of anti-corruption routinely and comprehensively for the Company's stakeholders. |
|---|---|

Komunikasi dan Pelatihan Tentang Kebijakan dan Prosedur Anti-Korupsi [GRI 205-2]

KAI memastikan bahwa seluruh insan KAI telah memahami kebijakan anti-korupsi, pedoman perilaku, benturan kepentingan, *anti-fraud*, pengendalian gratifikasi, dan *whistleblowing system* yang berlaku, dengan secara berkala menyelenggarakan forum komunikasi dan pelatihan terkait kebijakan dan prosedur anti-korupsi. Untuk tahun 2022, Perseroan menyelenggarakan pelatihan kebijakan *anti-fraud* atau anti korupsi kepada badan tata kelola sebagai berikut:

1. Peningkatan kapabilitas penanganan *Whistleblowing System* dan pengendalian gratifikasi kepada 100% personil UPG dan personil Unit Pengelola WBS Perseroan pegawai melalui *training* dan webinar series yang diselenggarakan oleh KPK secara daring.

Communication and Training on Anti-Corruption Policies and Procedures [GRI 205-2]

KAI ensures that all KAI personnel understand the policies on anti-corruption, code of conduct, conflict of interest, anti- fraud, gratuity control, and whistleblowing system by regularly holding communication forums and training related to anti-corruption policies and procedures. In 2022, the Company held anti- fraud or anti-corruption policy training for governance bodies as follows:

1. Increasing the capability of handling the *Whistleblowing System* and controlling gratuities for 100% of UPG personnel and the Company's WBS Management Unit personnel through online training and webinar series organized by KPK.

2. Pelatihan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan/ISO 37001:2016 kepada pegawai Unit Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dan kepada perwakilan seluruh Unit di Perseroan yang meliputi:
 - a. 160 pegawai dari Daerah
 - b. 96 pegawai dari Kantor Pusat

Di samping itu, pada tahun 2022, KAI juga menyelenggarakan forum komunikasi terkait kebijakan anti-*fraud* atau anti korupsi kepada seluruh insan KAI, meliputi:

1. Sosialisasi secara daring dan tatap muka tentang kebijakan anti-*fraud* atau anti korupsi kepada perwakilan 1038 pegawai yang tersebar di Kantor Pusat, Daerah Operasional, Divisi Regional, serta Balai Yasa.
2. Mendiseminasikan pesan anti-korupsi kepada seluruh pegawai (100%) dengan portal kepegawaian perusahaan atau *e-office*, email *broadcast*, tabloid internal, dan media sosial.
3. Penyampaian materi anti-*fraud* atau anti korupsi melalui program *induction training* untuk seluruh pegawai yang diterima di Perseroan.
4. Penyelenggaraan Hakordia tahun 2022 mengusung tema "Peran KAI dalam Indonesia Pulih, Bersatu Lawan Korupsi". Perusahaan berpartisipasi dalam rangkaian Hakordia yang di selenggarakan oleh KPK melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. 29 – 30 November, KAI Berpartisipasi dalam Kegiatan Hakordia di GOR Indoor Pemprov Sumut, Sumatera Utara. pada kegiatan ini KAI memperoleh sertifikat penghargaan sebagai Stand Terbaik Kategori BUMN, BUMD dan Universitas.
 - b. 5 – 6 Desember, KAI Berpartisipasi dalam Kegiatan Hakordia di area Gedung Sate, Jawa Barat. pada kegiatan ini KAI memperoleh sertifikat penghargaan Stan Terbersih.
 - c. 9 – 10 Desember, KAI Berpartisipasi dalam Kegiatan Pameran Integrity Expo Hakordia 2022 di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta.
 - d. 15 Desember, KAI Group menggelar Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022 di Ruang Integritas, Kantor Pusat KAI, Bandung dengan mengundang narasumber dari Perwakilan KPK dan Kementerian BUMN. Kegiatan yang digelar dalam rangka wujud dukungan KAI menentang tindak korupsi di berbagai lini bisnis perusahaan tersebut, diikuti oleh jajaran BOD dan BOC, Kadaop/Kadivreg, Direksi Anak Perusahaan, CDD, EVP, VP serta jajaran stakeholder KAI lainnya yang tergabung luring dan daring.

2. Training of Bribery Management System/ISO 37001:2016 for employees of the Anti-Bribery Compliance Function Unit and for representatives of all Units in the Company which includes:
 - a. 160 Regional employees
 - b. 96 Head Office employees

In 2022, KAI also held communication forum on anti-fraud or anti-corruption policies to all KAI personnel, including:

1. Online and offline dissemination of anti-fraud or anti-corruption policies to a 1038 employee representatives spread across the Head Office, Regional Operations, Regional Divisions, and Balai Yasa.
2. Dissemination anti-corruption messages to all employees (100%) through *e-office* company employment portals, email broadcasts, internal tabloids, and social media
3. Submission of anti-fraud or anti-corruption materials through induction training programs to all accepted employees in the company
4. Commemoration of the World Anti-Corruption Day (Hakordia) with the theme "The Role of KAI in Indonesia Recovering, United Against Corruption". The Company participated in the Hakordia activities organized by the KPK through the following activities:
 - a. November 29-30, KAI Participated in Hakordia Activities at the North Sumatra Provincial Government Indoor Sports Hall, North Sumatra. in this activity KAI received an award certificate as the Best Stand in the State-Owned Entities, Regional-Owned Entities and University Categories.
 - b. December 5 – 6, KAI Participated in Hakordia Activities in the Gedung Sate area, West Java. in this activity KAI received a certificate of the Cleanest Booth award.
 - c. December 9 – 10, KAI Participated in the 2022 Integrity Expo Hakordia Exhibition at the Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta.
 - d. December 15, KAI Group commemorated the 2022 World Anti-Corruption Day (Hakordia) in the Integrity Room, KAI Head Office, Bandung by inviting speakers from KPK representatives and the Ministry of BUMN. The activity, which was held as a form of KAI's support against corruption in various lines of the company's business, was attended by the ranks of BOD and BOC, Kadaop/Kadivreg, Directors of Subsidiaries, CDD, EVP, VP and other KAI stakeholders who are members of offline and online.

KAI secara berkala memastikan seluruh mitra bisnis memahami kebijakan anti-korupsi. KAI melakukan komunikasi mengenai anti-korupsi kepada seluruh (100%) mitra bisnis KAI, melalui:

1. Penyampaian larangan kepada mitra bisnis untuk memberikan gratifikasi kepada seluruh pegawai KAI pada proses pengadaan barang dan jasa.
2. Seluruh mitra bisnis diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas;
3. Seluruh mitra bisnis diwajibkan mematuhi kebijakan anti suap yang telah ditetapkan Perseroan.
4. Melakukan uji kelayakan kepada seluruh Mitra Bisnis yang akan melakukan kerja sama dengan Perseroan; dan
5. Mencantumkan pasal berkaitan dengan anti penyuapan dan anti korupsi pada setiap kontrak/ikatan kerja dengan mitra bisnis Perseroan.

Insiden Korupsi yang Terbukti dan Tindakan yang Diambil [GRI 205-3]

Untuk tahun 2022, KAI menerima sejumlah 12 laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan melalui media *Whistleblowing System* (WBS), terdiri dari 5 pengaduan melalui e-mail, 4 pengaduan melalui surat, dan 3 pengaduan melalui nomor resmi WBS. Seluruh laporan tersebut telah diproses oleh pengelola WBS KAI, dengan sejumlah 3 pengaduan terbukti, 4 pengaduan dengan status rekomendasi perbaikan kepada Unit terkait, dan sejumlah 5 pengaduan lainnya tidak terbukti atau tidak valid. Terhadap 3 kasus yang terbukti kemudian ditindaklanjuti oleh petugas yang berwenang untuk pemberian sanksi dan melaporkan kasus tersebut kepada direktur utama untuk diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KAI memastikan bahwa tidak terdapat kasus yang mengakibatkan berakhirnya kontrak dengan mitra bisnis, serta tidak terdapat kasus hukum terkait korupsi yang diajukan oleh publik terhadap KAI atau karyawannya selama periode pelaporan.

KINERJA LINGKUNGAN HIDUP

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, KAI menjalankan aktivitas operasional yang seluruhnya tidak berkaitan secara langsung hingga memberikan dampak buruk yang sangat signifikan terhadap lingkungan hidup. Atas hal tersebut, informasi mengenai kinerja lingkungan hidup pada bagian ini akan lebih ditekankan pada informasi terkait biaya lingkungan hidup, penggunaan material yang ramah lingkungan, jumlah dan intensitas energi yang digunakan, upaya dan pencapaian efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, serta penggunaan air. Selain itu, pada Laporan

KAI regularly ensures that all business partners understand the anti-corruption policy. KAI communicates anti-corruption to all (100%) of KAI's business partners, through:

1. Inform on the prohibitions to business partners to provide gratuities to all KAI employees in the process of procuring goods and services.
2. All business partners are required to sign an Integrity Pact;
3. All business partners are required to comply with the anti-bribery policy set by the Company.
4. Conduct due diligence on all Business Partners who will cooperate with the Company; and
5. Include articles relating to anti-bribery and anti-corruption in each contract/work engagement with the Company's business partners

Proven Incidents of Corruption and Actions Taken [GRI 205-3]

During 2022, KAI received 12 complaints submitted through the Whistleblowing System (WBS), namely 5 email complaints, 4 complaints by letter, and 3 complaints through the official WBS number. All of these reports have been processed by the KAI WBS manager, with a total of 3 proven complaints, 4 complaints with recommendation status for improvement to the relevant Unit, and a total of 5 other complaints not proven or invalid. The 3 proven cases were then followed up by the authorized officer to impose sanctions and report the case to the main director for processing and follow-up in accordance with applicable regulations.

KAI ensures that there were no cases resulting in the termination of contracts with business partners, and there were no legal cases related to corruption that were filed by the public against KAI or its employees during the reporting period.

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

As a company engaged in the transportation sector, KAI's operations are not directly related to significant adverse impact on the environment. Thus, information on environmental performance in this section will emphasize on information related to environmental costs, use of eco-friendly materials, amount and intensity of energy used, efforts and achievements of energy efficiency, use of renewable energy, and use of water. In addition, this Sustainability Report discloses information on impact reduction activities around operational areas or in conservation areas or biodiverse area,

Keberlanjutan ini, akan diungkapkan informasi kegiatan pengurangan dampak pada sekitar wilayah operasional atau area yang berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati, usaha konservasi keanekaragaman hayati, jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya, upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan, jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis, mekanisme pengelolaan limbah dan efluen, tumpahan yang terjadi, serta jumlah dan materi pengaduan lingkungan hidup yang diterima dan diselesaikan yang relevan dengan kegiatan usaha KAI.

ASPEK UMUM

Risiko terkait Lingkungan, Rencana Mitigasi Risiko, Rencana Aksi, dan Realisasinya

KAI menerapkan mekanisme identifikasi terhadap risiko yang ditimbulkan dari aktivitas operasional Perseroan terhadap lingkungan hidup, serta merumuskan rencana/tindakan yang akan dilakukan atas masing-masing risiko. Pengungkapan daftar risiko terhadap lingkungan, mitigasi, rencana aksi, dan realisasi yang dilakukan dapat dilihat melalui tabel pada Lahiran 1 yang disertakan pada akhir laporan.

Biaya Lingkungan Hidup [OJK F.4]

Pada tahun 2022, KAI melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan dengan realisasi biaya sejumlah Rp4.300.781.021,- dengan uraian sebagai berikut:

Biaya Lingkungan Hidup

No.	Kegiatan / Activity	Uraian / Description	Biaya (Rp) / Costs (Rp)
1	KAI Pling (Peduli Lingkungan)	Program Bantuan Sarana dan Prasarana Umum / Assistance Program for Public Facilities and Infrastructure	Rp1.607.610.237,-
2	KAI Sar-I (Sarana Ibadah)	Program Bantuan Sarana dan Prasarana Ibadah / Assistance Program for Worship Facilities and Infrastructure	Rp1.516.810.564,-
3	Penanaman Pohon / Green Station	Program Penanaman pohon di Wilayah Bisnis KAI / Tree Planting Program in KAI's Business Areas	Rp566.325.000,-
4	KAI Go Green	Program Pelestarian Lingkungan / Environmental Conservation Program	Rp610.035.220,-
Jumlah			Rp4.300.781.021,-

Sejak tahun 2018, KAI telah menerapkan komitmen untuk mendukung program Pemerintah dalam mengurangi sampah plastik, yang diwujudkan dengan penggunaan kemasan ramah lingkungan pada produk makanan dan minuman yang dijual dalam perjalanan kereta api. Kemasan ramah lingkungan tersebut menggunakan material kertas, serat jagung, dan serat tebu, sehingga sampah akan mudah terurai. Penggunaan kemasan tersebut diharapkan mampu berperan secara signifikan sebagai upaya meminimalisasi penggunaan plastik.

biodiversity conservation efforts, amount and intensity of emissions generated by type, efforts and achievements of emission reductions, amount of waste and effluent generated by type, waste and effluent management, spills occurred, as well as number and material of environmental complaints received and resolved that are relevant to KAI's business activities.

GENERAL ASPECT

Environmental Risks, Risk Mitigation Plan, Action Plan, and the Realization

KAI implements a mechanism to identify the risks from the Company's operational activities to the environment and formulates a plan/action to take on each risk. Disclosures of the list of risks to the environment, its mitigation, action plans, and realization are available on the table in Appendix 1 attached to the end of the report.

Environmental Costs [OJK F.4]

In 2022, KAI carried out various activities supporting environmental conservation at a cost of Rp4,300,781,021,- with the following description

Environmental Costs

Since 2018, KAI has implemented a commitment to support the Government's program to reduce plastic waste, which is manifested by the use of environmentally friendly packaging for food and beverage products sold on train trips. This eco-friendly packaging uses paper, corn fiber and sugarcane fiber, so that waste can easily decompose. The use of packaging is expected to play a significant role as an effort to minimize the use of plastic.

Di samping itu, pada tahun 2021-2022, dalam rangka menyukseskan program BUMN Hijaukan Indonesia, KAI turut berkontribusi dengan melakukan penanaman 77.180 pohon di stasiun, kantor, dan lingkungan masyarakat pada berbagai area kerja KAI.

Untuk tahun 2022, KAI melakukan kegiatan penanaman 58.381 Pohon yang terdiri dari pohon Mangrove, Tabebuaya, Trembesi, Buah-buahan, Pule, Aren dll. KAI juga mengikuti program Gerakan Kolaborasi "BUMN Hijaukan Indonesia" di wilayah Sekitar Proses Bisnis KAI serta penghijauan Sabuk Gunung Temanggaung.

ASPEK MATERIAL

Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan [OJK F.5]

KAI secara konsisten menerapkan sejumlah inisiatif strategi keberlanjutan sebagai upaya mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hal tersebut diterapkan antara lain dengan membangun dan mengembangkan sistem transportasi rendah emisi (*low carbon emission*) dan ramah lingkungan, berupa pengembangan dan pengoperasian moda transportasi umum berbasis listrik, termasuk pengembangan dan pengoperasian Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek, pengoperasian KRL Yogyakarta, pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek, serta pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Di samping itu, KAI secara berkala melakukan perbaikan hingga penggantian terhadap kereta yang berusia lebih dari 30 tahun, menggunakan lokomotif berbahan bakar B20, B30, hingga kajian bahan bakar B100, penggunaan panel surya di Stasiun Batang, Stasiun Gambir, dan Gedung Jakarta *Railway Centre*, uji statis dan uji dinamis konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar *Liquefide Natural Gas* (LNG) dengan menggunakan sistem *Diesel Dual Fuel* (DDF) untuk mengurangi emisi karbon. Terkait hal tersebut, penggunaan bahan bakar LNG pada kereta api memiliki sejumlah manfaat, antara lain efisiensi biaya bahan bakar, efisiensi biaya pemeliharaan, hingga potensi pemanfaatan lahan stasiun milik KAI terkait penyediaan energi ramah lingkungan (*green energy*).

In addition, in 2021-2022, for the success of BUMN Hijaukan Indonesia program, KAI also contributed by planting 77,180 trees at stations, offices and the community environment in various KAI work areas.

In 2022, KAI carried out planting activities of 58,381 trees consisting of Mangrove, Tabebuaya, Trembesi, Fruit, Pule, Aren etc. trees. KAI also participates in the "BUMN Hijaukan Indonesia" Collaboration Movement program in the area around KAI's Business Processes and the greening of the Mount Temanggaung Belt.

MATERIAL ASPECT

Use of Eco-Friendly Materials [OJK F.5]

KAI consistently implements a number of sustainability strategy initiatives as an effort to support sustainable development. This is implemented, among others, by building and developing a low carbon emission and eco-friendly transportation system in the form of developing and operating electricity-based public transportation modes, including the development and operation of the Jabodetabek Electric Rail Train (KRL), operation of the Yogyakarta KRL, construction of the Jabodebek Light Rail Transit (LRT), and construction of the Jakarta Bandung Fast Train.

In addition, KAI periodically repairs and replaces trains that are more than 30 years old, using locomotives fueled by B20, B30, and studying B100 fuel, using solar panels at Batang Station, Gambir Station, and the Jakarta Railway Center Building, static tests and dynamic tests of the conversion of fuel oil to Liquefied Natural Gas (LNG) fuel using the Diesel Dual Fuel (DDF) system to reduce carbon emissions. The use of LNG fuel on trains had a number of benefits, such as fuel cost efficiency, maintenance cost efficiency, to the potential use of station land owned by KAI related to the provision of eco-friendly energy (*green energy*).

ASPEK ENERGI

Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan [OJK F.6] [GRI 302-1]

KAI telah melakukan penghitungan terhadap jumlah energi yang digunakan pada masing-masing unit kerja pada wilayah operasional, dengan hasil sebagai berikut:

ENERGY ASPECT

Amount and Intensity of Energy Used [OJK F.6] [GRI 302-1]

KAI has calculated the amount of energy used in each work unit in the operational area, with the following results:

Pemakaian Energi

Energy Usage

No.	Uraian / Description	Listrik (kWh) / Electricity (kWh)			Diesel (liter)			Dexlite untuk genset (liter) / Dexlite for generator (liter)		
		2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
1.	DAOP 1	25.960.115	23.080.427	25.025.555	-	-	-	14.298	17.743	21.277
2.	DAOP 2	5.404.404	4.365.316	3.954.199	15.745.478	9.611.998	8.965.356	33.106	44.461	40.690
3.	DAOP 3	3.613.700	3.297.641	3.524.721	3.128.972	1.598.647	3.448.091	-	-	-
4.	DAOP 4	804.695	639.000	690.349	801	-	-	11.304	11.696	10.630
5.	DAOP 5	3.422.609	3.071.205	3.620.411	1.027.2736	6.581.724	6.070.926	-	-	-
6.	DAOP 6	5.472.197	4.421.981	4.495.274	12.072.623	7.099.983	6.984.403	2.830	2.840	2.785
7.	DAOP 7	2.684.659	2.340.744	2.434.717	4.421.119	2.656.093	1.535.278	7.560	11.153	2.240
8.	DAOP 8	6.724.053	6.393.778	6.125.687	40771271	30.210.771	30173477	15.689	5.283	9.010
9.	DAOP 9	1.282.235,56	1.248.154,89	1.452.223,89	4.436.439	2.669.664	2.492.542	51.005	51.759	51.872
10.	DIVRE I	3.030.027	3.000.961	3.144.563	-	-	-	2.340	2.167	2.565
11.	DIVRE II	1.376.017	1.286.668	1.248.902	2.262.605	2.196.407	1.976.646	-	-	-
12.	DIVRE III	4.916.942	3.877.374	3.872.754	-	-	-	11.162,4	8.811	7.824
13.	DIVRE IV	3.783.138	3.334.496	3.431.813	-	-	-	2.800	2.780	2.570
14.	BY Manggarai	1.035.296	1.008.960	1.181.188	-	-	-	-	-	-
15.	BY Yogya	807.605	814.608	782.096	112.218	120.503	89.039	-	-	-
16.	BY Lahat	945.948	969.408	963.840	63.628	89.244	87.316	500	500	500
17.	BY SGU	1.327.463	877.880	939.090	18.150	16.150	32.050	-	100	200
18.	BY Tegal	679.784	419.966	595.254	-	-	-	150	150	200
19.	BY Pulubrayan	1.138.712	352.625	913.087	1.800	1.600	1.600	1.000	1.000	1.000

Lebih dari itu, KAI melakukan perhitungan terhadap pemakaian energi pada scope 2 yaitu pada aktivitas dinas pada 2022, terdiri dari pemakaian BBM pada kendaraan dinas serta jumlah perjalanan dinas. Pengungkapan atas hal tersebut adalah sebagai berikut:

Moreover, KAI is calculating energy consumption in scope 2, namely in official activities in 2022, consisting of fuel consumption in official vehicles and the number of official trips. Disclosure of this matter is as follows:

Pemakaian Energi pada Perjalanan Dinas [GRI 302-2]

Energy Consumption on Business Trips [GRI 302-2]

No.	Uraian / Description	BBM untuk Perjalanan Dinas (liter) / Fuel Oil for Business Trip (liter)			Perjalanan Dinas dengan Pesawat (kali) / Business Trip by Plane (times)		
		2022	2021	2020	2022	2021	2020
1.	DAOP 1	24.081	23.140	12.140	3	-	-
2.	DAOP 2	31.897	30.792	32.184	-	-	-
3.	DAOP 3	25.601	22.913	22.664	-	-	1
4.	DAOP 4	25.240	28.531	27.076	-	-	-

No.	Uraian / Description	BBM untuk Perjalanan Dinas (liter) / Fuel Oil for Business Trip (liter)			Perjalanan Dinas dengan Pesawat (kali) / Business Trip by Plane (times)		
		2022	2021	2020	2022	2021	2020
5.	DAOP 5	17.008	17.458	17.665	-	-	-
6.	DAOP 6	49.027	45.107,6	43.679,2	3	-	-
7.	DAOP 7	5.350	6.108	6.461	-	-	-
8.	DAOP 8	30.745	31.175	36.763	69	-	-
9.	DAOP 9	7.610	7.915	6.925	2	-	-
10.	DIVRE I	8.640	8.640	8.640	728	310	326
11.	DIVRE II	8.800	7.608	6.120	271	63	192
12.	DIVRE III	39677,2	43.751,8	41.777,4	41	33	32
13.	DIVRE IV	49.550	44.150	38770	152	12	84
14.	BY Manggarai	6.533	7.285	5.822	1	-	1
15.	BY Yogya	6.813	3.650	4.715	4	-	-
16.	BY Lahat	13.335	15.150	10.080	119	8	112
17.	BY SGU	4.923,18	5.662,27	4.263.897	1	-	-
18.	BY Tegal	5.991	5.638	7.110	3	2	-
19.	BY Pulubrayan	5.091,54	4.288,22	3.277,13	140	105	101

Untuk tahun 2022, KAI mencatatkan intensitas pemakaian energi per penumpang sejumlah 26,865 gigajoule/penumpang, atau setara 61,056,82% dibandingkan dengan intensitas pemakaian tahun 2021 yang sebesar 0,044 gigajoule/penumpang. Sedangkan intensitas pemakaian energi per ton yaitu sebesar yaitu sebesar 126,839 gigajoule/ton setara 93,954,81% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 0,135 gigajoule/ton.

For 2022, KAI recorded an intensity of energy use per passenger of 26.865 gigajoules/passenger, or the equivalent of 61,056.82% compared to the intensity of usage in 2021 which amounted to 0.044 gigajoules/passenger. Meanwhile, the intensity of energy use per ton is 126.839 gigajoules/ton equivalent to 93,954.81% compared to 2021 of 0.135 gigajoules/ton.

Intensitas Energi [GRI 302-3]

Energy Intensity [GRI 302-3]

Energi / Energy	Satuan / Unit	2022	2021	2020
Penggunaan BBM Biosolar (B30) / Use of Biodiesel Fuel (B30)	Liter	261.343.226	197.522.249	180.297.826
	Gigajoules ¹⁾	7.641.614.700	6.755.261	6.166.186
Listrik ^{***)} / Electricity ^{***)}	kWh	1.656.685	1.515.120	1.719.230
	Gigajoules ^{**)}	5.964	5.454	6.189
Total	Gigajoules	7.641.620.664	6.760.715	6.172.375
Jumlah Produksi / Production Quantity	Penumpang Passenger	284.448.804	154.537.582	186.832.349
	Ton	60.246.406	50.261.778	45.125.346
Intensitas Pemakaian Energi / Energy Usage Intensity	Gigajoules/ Penumpang / Gigajoules/Passenger	26,865	0,044	0,033
	Gigajoules/Ton	126,839	0,135	0,137

¹⁾ Konversi liter ke Gigajoule / Conversion of liter to Gigajoule: / <https://hextobinary.com/unit/energy/from/gasoline/>

²⁾ Konversi liter ke Gigajoule / Conversion of kWh to Gigajoule: / <https://www.convertunits.com/from/kWh/to/gigajoule>

³⁾ Penggunaan listrik di Kantor Pusat KAI / Electricity usage at KAI Head Office

Kebijakan Penggunaan Energi Baru Terbarukan dan Implementasinya

Sebagai wujud kontribusi bagi pemenuhan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), KAI menerapkan kebijakan dalam penggunaan energi baru terbarukan di dalam aktivitas operasi Perseroan. Kebijakan tersebut diatur dalam Kebijakan Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Nomor KS.102/XII/1/KA-2022, yang secara khusus menyatakan tujuan KAI dalam mengadaptasi perubahan iklim dengan ikut berkontribusi menurunkan emisi karbon antara lain melalui penerapan penggunaan energi baru terbarukan.

Sampai dengan 31 Desember 2022, kebijakan HSSE KAI telah diimplementasikan antara lain melalui penggunaan bahan bakar B30, pemasangan panel surya di sejumlah stasiun, serta penggunaan kendaraan berbasis listrik pada aktivitas operasional.

Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan [OJK F.7] [GRI 302-4]

KAI melakukan upaya pencapaian efisiensi energi dengan cara penghematan listrik. Penggunaan listrik untuk kantor pusat KAI pada tahun 2022 tercatat mengalami peningkatan yang tidak signifikan sebesar 9,3% atau 141.565 kWh dibandingkan tahun 2021.

Selain itu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya efisiensi energi, KAI menerapkan inovasi berupa penggunaan energi terbarukan, yakni panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik. Penggunaan panel surya ini telah diimplementasikan di Stasiun Batang, Stasiun Gambir, dan area perkantoran KAI, Gedung Jakarta Railway Center, di Jakarta.

Untuk menunjang kegiatan operasional, KAI telah mengganti penggunaan bahan bakar solar dengan bahan bakar biosolar (B30), yang merupakan energi terbarukan yang terbuat dari 30% kelapa sawit dan 70% solar. Perincian penggunaan bahan bakar biosolar (B30) pada masing-masing wilayah operasional KAI untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Penggunaan Bahan Bakar Biosolar (B30)

No	Lokasi / Location	2022	2021
1	Daop 1 Jakarta	41.317.717	31.100.706
2	Daop 2 Bandung	15.615.478	9.500.738
3	Daop 3 Cirebon	3.908.020	2.187.592
4	Daop 4 Semarang	8.240.012	3.392.070

New and Renewable Energy Usage Policy and its Implementation

To contribute to the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs), KAI implements a policy on the new and renewable usage in the Company's operational activities. The policies are regulated in the Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Policy No. KS.102/XII/1/KA-2022, which specifically states KAI's goals in adapting to climate change by contributing to lower carbon emission by, among others, implementing new and renewable energy usage.

By December 31, 2022, KAI has implemented its HSSE policy by using B30 fuel, applying solar panels on several stations, and using electric vehicles for its operational activities.

Efforts and Achievements of Energy Efficiency and Use of Renewable Energy [OJK F.7] [GRI 302-4]

KAI's energy efficiency effort is carried out through electricity savings. The use of electricity for KAI's head office in 2022 was recorded to have increased by 9.3% or 141,565 kWh compared to 2021.

In addition, as an integral part of energy efficiency efforts, KAI implements innovations of the use of renewable energy, solar panels to meet electricity needs. The use of solar panels has been implemented at Batang Station, Gambir Station, and the KAI office area, Jakarta Railway Center Building, in Jakarta.

To support operational activities, KAI has replaced the use of diesel fuel with biodiesel fuel (B30), which is a renewable energy made from 30% palm oil and 70% diesel. Details of the use of biodiesel fuel (B30) in each of KAI's operational areas for 2022 are as follows:

Use of Biodiesel Fuel (B30)

No	Lokasi / Location	2022	2021
5	Daop 5 Purwokerto	10.519.322	6.581.724
6	Daop 6 Yogyakarta	16.062.287	8.589.444
7	Daop 7 Madiun	4.422.319	2.656.093
8	Daop 8 Surabaya	40.867.491	30.335.412
9	Daop 9 Jember	4.436.439	2.670.484
10	Divre 1 Sumatera Utara	5.274.862	4.101.035
11	Divre 2 Sumatera Barat	2.246.955	2.183.907
12	Divre 3 Palembang	58.137.737	49.454.837
13	Divre 4 Tanjung Karang	50.092.977	44.538.005
14	Sulawesi Selatan	8.000	-
15	Balai Yasa Manggarai	24.807	29.800
16	Balai Yasa Tegal	4.707	18.447
17	Balai Yasa Yogya	112.218	106.197
18	Balai Yasa Surabaya Gubeng	18.150	16.514
19	Dipo Mekanik Tebing Tinggi	-	-
20	Balai Yasa Lahat	33.628	59.244
Jumlah / Total		261.343.126	197.522.249

ASPEK AIR

Penggunaan Air [OJK F.8] [GRI 303-1, 303-3, 303-5]

Setiap tahunnya, KAI mencatatkan penggunaan air bersih untuk keperluan domestik karyawan, seperti kebutuhan di kamar kecil (toilet), wudu, dan lain sebagainya. Sumber air yang digunakan KAI sebagian besar berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pada kondisi tertentu, semisal saat pasokan air dari PDAM mengalami masalah, Perseroan menggunakan air tanah yang dipompa dengan mesin pompa air.

Untuk tahun 2022, KAI merealisasikan efisiensi penggunaan air bawah tanah sebesar 9.100 m³, atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 6.000 m³.

WATER ASPECT

Water Use [OJK F.8] [GRI 303-1, 303-3, 303-5]

Every year, KAI records the use of clean water for employee domestic needs, such toilets, wudhu, etc. The water used by KAI is mainly sourced from Regional Drinking Water Companies (PDAM). Under certain conditions, such as when the water supply from the PDAM is experiencing problems, the Company uses groundwater which is pumped with a water pump.

In 2022, KAI realizes an efficient use of underground water of 9,100 m³, or an increase compared to 2021 of 6,000 m³.

Penggunaan Air di Kantor Pusat KAI

Water Use at KAI Head Office

Energi / Energy	Satuan / Unit	2022	2021	2020
Air Permukaan / Surface Water	m ³	-	-	-
Air Bawah Tanah / Underground Water	m ³	9.100	6.000	7.200

KAI telah melakukan perhitungan secara terperinci atas penggunaan air pada seluruh unit di wilayah operasional, dengan hasil sebagai berikut:

KAI has carried out detailed calculations of water use for all units in the operational area, with the following results:

Penggunaan Air KAI

KAI Water Usage

No.	Uraian / Description	Air Permukaan (m ³) / Surface Water (m ³)			Air Bawah Tanah (m ³) / Groundwater			Ait PDAM (m ³) / PDAM Water (m ³)		
		2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
1.	DAOP 1	-	-	-	26.145	50.697	58.230	29.312	9.101	6.679
2.	DAOP 2	-	-	-	5.100	5.100	5.100	24.225	10.532	6.796
3.	DAOP 3	-	-	-	-	-	-	4276	4.101	3.437
4.	DAOP 4	-	-	-	80.000	50.000	40.000	2.908	2.032	2.804
5.	DAOP 5	-	-	-	6.207	6.207	6.207	3.339	4.126	3340
6.	DAOP 6	-	-	-	-	-	-	20.946	21.483	20.594
7.	DAOP 7	-	-	-	8.296	8.296	8.296	5.148	5.322	5.255
8.	DAOP 8	-	-	-	8.664	8.664	10.050	40.515	39.135	36.206
9.	DAOP 9	-	-	-	-	-	-	33.757	23.903	22.687
10.	DIVRE I	-	-	-	3.132	2.784	2.436	12.337	7.838	7.523
11.	DIVRE II	2.075	2.065	1.875	4786	4.856	5132	16.187	15.591	8800
12.	DIVRE III	960	1056	1152	382,8	421,08	459,36	10.2547	76.339	83.095
13.	DIVRE IV	-	-	-	-	-	-	3780	3.782	3.778
14.	BY Manggarai	-	-	-	2.153	9.023	9.103	-	-	-
15.	BY Yogya	-	-	-	3.300	4.035	4.035	-	-	-
16.	BY Lahat	172.800	172.800	172.800	-	-	-	-	-	-
17.	BY SGU	-	-	-	4.095	4.095	3980	4876	5.166	3.782
18.	BY Tegal	-	-	-	17.280	17.280	17.280	803	436	470
19.	BY Pulubrayan	-	-	-	1.245	1.241	1.250	1.064	1.107	363

Dampak Ekonomi dari Penghematan Air

Sesuai yang telah diungkapkan sebelumnya, terdapat peningkatan volume konsumsi air KAI pada 2022 terhadap 2021. Melalui pengukuran peningkatan itu, dapat diketahui bahwa sejumlah upaya penghematan air yang telah dilakukan selama 2022 belum menghadirkan dampak ekonomi yang diharapkan. Terkait hal tersebut, KAI memiliki komitmen yang kuat untuk terus menerapkan upaya penghematan air serta mengukur dampak ekonomi yang ditimbulkan pada tahun-tahun mendatang.

Economic Impact of Saving Water

As previously disclosed, there is an increase in the volume of KAI's water consumption in 2022 compared to 2021. Through the measurement of the increase, it is evident that various efforts to save water carried out throughout 2022 have not made any expected economic impacts. In light of this, KAI is strongly committed to continuously saving water and measuring the economic impact in the coming years.

ASPEK KEANEKARAGAMAN HAYATI

Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati [OJK F.9]

Sampai dengan 31 Desember 2022, KAI beroperasi pada wilayah-wilayah yang tidak berdampak secara langsung terhadap area konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati. Meski demikian, KAI tetap melaksanakan komitmen untuk dapat menghadirkan kontribusi positif terhadap upaya pelestarian lingkungan di sekitar area operasional.

KAI melaksanakan penyaluran kontribusi bagi lingkungan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), antara lain terwujud melalui program Kereta Api Peduli Lingkungan (KAI-Pling). Program KAI-Pling merupakan wujud nyata Perseroan dalam menyalurkan nilai manfaat terhadap lingkungan, sarana dan prasarana umum, pengelolaan sampah, serta penanaman pohon di wilayah operasional KAI.

Program penanaman pohon yang dilakukan KAI tidak hanya terbatas pada wilayah operasional, yaitu pada area stasiun, perkantoran, dan sepanjang lintasan rel keretapi, tetapi juga dilakukan di luar area bisnis KAI, yang merupakan wujud komitmen KAI dalam menjaga kelestarian lingkungan secara luas. Seiring hal tersebut, KAI memiliki komitmen yang kuat untuk secara konsisten melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, di antaranya dengan ikut menyukseskan program BUMN Hijaukan Indonesia.

Komitmen KAI dalam upaya peningkatan daya dukung ekosistem diwujudkan dengan memastikan pemenuhan seluruh persyaratan lingkungan mencakup Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Terkait dokumen UKL-UPL, KAI memiliki 34 (tiga puluh empat) dokumen yang dimiliki di 9 (sembilan) wilayah operasional. Sedangkan untuk kepemilikan dokumen AMDAL, KAI memiliki 9 (sembilan) dokumen yang berada di Daop 1, Daop 2, Daop 6 dan Kantor Pusat.

Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati [OJK F.10]

Untuk tahun 2022, seluruh aktivitas operasional KAI dilaksanakan pada area yang seluruhnya tidak berada di dekat ataupun masuk ke dalam daerah konservasi atau yang memiliki keanekaragaman hayati untuk dilestarikan. Atas hal tersebut, tidak terdapat informasi mengenai usaha konservasi keanekaragaman hayati untuk diungkapkan pada bagian ini.

BIODIVERSITY ASPECT

Impacts from Operational Areas Near or in Conservation or Biodiverse Areas [OJK F.9]

As of December 31, 2022, KAI operates in areas without direct impact on conservation or biodiverse areas. Nevertheless, KAI strives to carry out its commitment to be able to make a positive contribution to efforts of environmental conservation around the Company's operational area.

KAI provides contributions to the environment through the implementation of Environmental Social Responsibility (TJSL), which is realized through the Kereta Api Environmental Care (KAI-Pling) program. The KAI-Pling program is a concrete manifestation of the Company in giving beneficial values to the environment, public facilities and infrastructure, waste management, and tree planting in KAI's operational area.

The tree planting program carried out by KAI is not only limited to operational areas, such as in stations, offices, and areas along the railroad tracks, but is also carried out outside KAI's operation area as a manifestation of KAI's commitment to maintaining environmental sustainability in general. In this regard, KAI has a strong commitment to consistently implementing efforts of environmental and biodiversity conservation, among others by realizing the SOE Hijaukan Indonesia program.

KAI's commitment to increase ecosystem capacity is realized by ensuring the fulfillment of all environmental requirements including Environmental Management Efforts (UKL) and Environmental Monitoring Efforts (UPL), as well as Environmental Impact Analysis (AMDAL). For the UKL-UPL, KAI has prepared 34 (thirty four) documents for 9 (nine) operational areas. As for the AMDAL, KAI has prepared 9 (nine) documents for in Daop 1, Daop 2, Daop 6 and the Head Office.

Biodiversity Conservation Efforts [OJK F.10]

In 2022, all of KAI's operations were not carried out in conservation or biodiverse areas. Thus, information on biodiversity conservation efforts is not available to be disclosed in this section.

Meski demikian, KAI melakukan program penanaman pohon sebagai upaya terus-menerus dalam mendukung pelestarian keanekaragaman hayati, baik berupa penanaman pada area stasiun dan kantor KAI maupun penanaman untuk masyarakat eksternal di sekitar area operasional KAI. Pengungkapan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Nevertheless, KAI carried out tree-planting programs to continuously support the biodiversity conservation, both in the form of planting in the KAI station and office areas as well as planting for external communities around its operational areas. It is disclosed as follows:

Penanaman Pohon di Wilayah Operasi KAI 2021-2022
Tree-Planting in KAI's Operational Areas in 2021 - 2022

No.	DAOP/DIVRE	Jenis Pohon / Type of Tree	Jumlah Pohon / Total Trees
Penanaman pada Stasiun dan Kantor KAI / Planting at KAI Stations and Offices			
1	Daop 1 Jakarta / Jakarta Operational Area 1	Pohon Trembesi, Tabebuaya, Miana, dan Buah-buahan / Trembesi, Tabebuaya, Miana, and Fruit Trees	331
2	Daop 2 Bandung / Bandung Operational Area 2	Pohon Trembesi, Tabebuaya, Pule, Buah-buahan, Cemara, Pucuk Merah, Bambu, Anset dan Tanaman Hias / Trembesi Trees, Tabebuaya, Pule, Fruits, Fir, Red Shoots, Bamboo, Anset and Ornamental Plants	10.704
3	Daop 3 Cirebon / Cirebon Operational 3	Pohon Trembesi, Pucuk Merah dan Brokoli Kuning / Trembesi Tree, Red Shoots and Yellow Broccoli	867
4	Daop 4 Semarang / Semarang Operational Area 4	Pohon Pule, trembesi dan Pucuk Merah5 / Pule, Trembesi and Red Shoots	377
5	Daop 5 Purwokerto / Purwokerto Operational Area 5	Pohon Tabebuaya, Ketapang, Kencana, Tanaman Hias dan Bunga / Tabebuaya, Ketapang, Kencana Trees, Ornamental Plants, and Flowers	623
6	Daop 6 Yogyakarta / Yogyakarta Operational Area 6	Tanaman Hias, Pohon Pule, dan Pohon Buah-buahan / Ornamental Plants, Pule Trees, and Fruit Trees	1.437
7	Daop 7 Madiun / Madiun Operational Area 7	Pohon Jengkol, Pucuk Merah, Pisang-pisangan, dan Nusa Indah / Jengkol Tree, Red Shoots, Bananas, and Nusa Indah	1.602
8	Daop 8 Surabaya / Surabaya Operational Area 8	Pohon Ketapang, Pucuk Merah, Pule, Semarak, Tabebuaya, Buah-buahan dan Tanaman Hias / Ketapang Trees, Red Shoots, Pule, Semarak, Tabebuaya, Fruits and Ornamental Plants	12.028
9	Daop 9 Jember / Jember Operational Area 9	Pohon Pule / Pule Trees	307
10	Divre I Sumatera Utara / North Sumatra Divre I	Pohon Ketapang Mini, Pucuk merah, Buah-buahan dan Bunga / Mini Ketapang Tree, Red Shoots, Fruits and Flowers	326
11	Divre II Sumatera Barat / West Sumatra Divre II	Pohon Bonsai, Gading, Pucuk Merah, Asoka, Palm, Bougenville, janda Bolong, Brokoli Kuning dan Tanaman Air / Bonsai Trees, Ivory, Red Shoots, Ashoka, Palm, Bougenville, Bolong widows, Yellow Broccoli and Aquatic Plants	1.166
12	Divre III Palembang / Palembang Divre III	Penanaman Tanaman Hias Pucuk Merah, Pohon trambesi / Planting Red Shoots Ornamental Plants and Trembesi Trees	633
13	Divre IV Tanjung Karang / Tanjung Karang Divre IV	Pohon Mangga Harum Manis, Pohon Buah-buahan, Bibit Alpukat Aligator, Bibit Durian, Bibit Kelengkeng / Sweet Fragrant Mango Trees, Fruit Trees, Alligator Avocado Seeds, Durian Seeds, Longan Seeds	1.460
14	Balai Yasa Manggarai	Pohon Buah-buahan / Fruit Trees	394
15	Balai Yasa Tegal	Pohon Buah-buahan / Fruit Trees	1.044
16	Balai Yasa Surabaya Gubeng	Pohon Buah-buahan dan Tanaman Hias / Fruit Trees and Ornamental Plants	394
17	Balai Yasa Lahat	Pohon Buah-buahan / Fruit Trees	525
Subjumlah / Subtotal			34.218
Penanaman bagi Masyarakat Eksternal / Planting for External Communities			
1	Daop 1 Jakarta	Bantuan Pohon Buah-buahan, Petai dan Pala, Beringin, Trembesi, Mahoni, Nangka Buah untuk penghijauan Yayasan Hutan Lestari Indonesia / Donation of Fruit Trees, Petai and Nutmeg, Banyan, Trembesi, Mahogany, Jackfruit for reforestation Indonesian Sustainable Forest Foundation	800
2	Daop 4 Semarang	Anting Putri, Cemara Udang, Bonsai Dollar, Jasmine, Bromolia / Anting Putri, Udang Pine, Dollar Bonsai, Jasmine, Bromolia	12

No.	DAOP/DIVRE	Jenis Pohon / Type of Tree	Jumlah Pohon / Total Trees
3	Daop 6 Yogyakarta	Bantuan Bibit Pohon Bambu, Aren, dan Beringin untuk Penghijauan Sabuk Gunung Pemkab Temanggung / Donation of Bamboo, Palm and Banyan Tree Seeds for Greening the Mountain Belt of the Temanggung Regency Government	36.000
4	Divre I Sumatera Utara	Bantuan Pohon Mangrove untuk Kelompok Tani Cinta Mangrove Bambus Laut Batu Bara Sumatera Utara / Mangrove Tree Donation for the Cinta Mangrove Bambus Laut Batu Bara Farmer Group, North Sumatra	6.000
5	Divre IV Tanjung Karang	Bantuan Pohon Buah-buahan untuk Penghijauan Desa Belatung Ogan Komerling Ulu Lampung / Donation of fruit trees for the greening of Belatung Village, Ogan Komerling Ulu, Lampung	150
Subjumlah / Subtotal			42.962
Jumlah / Total			77.180

Kajian dan Mitigasi Dampak Aktivitas Operasi terhadap Keanekaragaman Hayati

Untuk tahun 2022, seluruh aktivitas operasional KAI dilaksanakan pada area yang seluruhnya tidak berada di dekat ataupun masuk ke dalam daerah konservasi atau yang memiliki keanekaragaman hayati untuk dilestarikan. Oleh sebab itu, KAI tidak melakukan kajian dan mitigasi dampak aktivitas operasi terhadap keanekaragaman hayati.

ASPEK EMISI

Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya [OJK F.11]

Dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya, KAI menghasilkan Gas Rumah Kaca (GRK) yaitu emisi GRK (Scope 1) langsung yang bersumber dari penggunaan bahan bakar diesel, seperti pengoperasian mesin diesel dan genset; serta emisi GRK (Scope 2) tidak langsung yang bersumber dari penggunaan listrik. Penghitungan emisi GRK (Scope 1) dilakukan dengan mengalikan data konsumsi energi dengan faktor emisi.

Sampai dengan 2022, KAI mengukur pengurangan emisi yang dihasilkan dengan membandingkan jumlah emisi pada periode pengukuran dengan hasil yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pengukuran dan pelaporan aspek emisi, KAI telah menetapkan tahun 2023 sebagai baseline pengukuran, dengan sasaran pencapaian *ESG Risk Ratings* yang terbaik (peringkat *low risk*) pada 2027.

Pada tahun 2022, KAI menghasilkan emisi GRK (Scope 1) dari penggunaan diesel yaitu sebesar 612.066Ton CO₂ -eq, atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2021.

Assessment and Mitigation of the Impact of Operational Activities on Biodiversity

All KAI's operational activities in 2022 were not carried out in the area adjacent to or within the conservation area or areas with biodiversity to conserve. Therefore, KAI did not review and mitigate the impact of its operational activities on biodiversity.

EMISSION ASPECT

Amount and Intensity of Emissions Generated by Type [OJK F.11]

In carrying out its business operations, KAI generates Green House Gas (GHG), namely direct GHG emission (Scope 1) generated directly from the use of diesel fuel, such as the operation of diesel engines and generators and indirect GHG emissions (Scope 2) generated from the use of electricity. The calculation of GHG emission (Scope 1) is carried out by multiplying the energy consumption data by the emission factor.

As of 2022, KAI measures the resulting emission reductions by comparing the total emissions in the measurement period with the results obtained in the previous year. As an effort to improve the quality of measurement and reporting of emission aspects, KAI has set 2023 as the measurement baseline, with the goal of achieving the best *ESG Risk Ratings* (low risk rating) in 2027.

In 2022, KAI produced GHG emissions (Scope 1) from the use of diesel, which is 612,066 tons of CO₂ -eq, or an increase compared to 2021.

Emisi GRK Scope 1 (BBM) yang Dihasilkan
GHG Emission Scope 1 (Fuel) Generated

Emisi GRK / GHG Emission (Ton CO ₂ -eq)				
Sumber Emisi GRK / GHG Emission Source	Satuan / Unit	2022	2021	2020
Scope 1 (BBM-Diesel) / Fuel-Diesel)	Liter	241.637	203.364	167.558
	Terajoule (TJ) ^{*)}	8,26	6,96	5,73
	kg CO/TJ ^{**)}	74.100	74.100	74.100
	Ton Co ² - eq	612.066	515,736	424,593

^{*)} Konversi liter ke Terajoule (TJ) / Conversion of liter to Terajoule (TJ): <https://hextobinary.com/unit/energy/from/>

^{**)} Sumber: Kajian Penggunaan Faktor Emisi Lokal (Tier 2) dalam Inventarisasi GRK Sektor Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2017) / Source: Study on the Use of Local Emission Factors (Tier 2) in the Energy Sector of GHG Inventory, Ministry of Energy and Mineral Resources (2017)

Emisi GRK yang dihasilkan dari penggunaan listrik KAI pada *baseline* tahun 2022 didapat melalui perkalian antara konsumsi listrik (dalam kWh per tahun) dengan average grid emission factor yang dikeluarkan Kementerian ESDM merujuk RUPTL PLN 2015-2024, yaitu sebesar 0,934 kgCO₂/kWh (2017). Berdasarkan perhitungan tersebut, maka emisi GRK scope 2 yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

GHG emissions generated from the use of KAI's electricity in 2022 baseline were obtained by multiplying electricity consumption (in kWh per year) with the average grid emission factor issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources referring to the 2015-2024 PLN RUPTL, which was 0.934 kgCO₂/kWh (2017). Based on these calculations, the resulting GHG emission scope 2 is as follows.

Emisi GRK Scope 2 (Listrik) yang Dihasilkan
GHG Emission Scope 2 (Electricity) Generated

Emisi GRK / GHG Emission (Ton Co ₂ -eq)				
Sumber Emisi GRK / GHG Emission Source	Satuan / Unit	2022	2021	2020
Scope 2 (Listrik / Electricity)	kWh	1.656.685	1.515.120	1.719.230
	Ton Co ² -eq	1.547,34	1.415,12	1.605,76

Sedangkan, intensitas emisi GRK scope 3 (perjalanan dinas) dihitung dengan kalkulator karbon ICAO (International Civil Aviation Organization/Asosiasi Penerbangan Sipil Internasional), dengan hasil perhitungan pada tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Meanwhile, the intensity of GHG emission scope 3 (business trip) is calculated using the ICAO (International Civil Aviation Organization) carbon calculator, with the 2020-2022 calculation as follows:

Jumlah Emisi GRK Scope 3 (Perjalanan Dinas) yang Dihasilkan
GHG Emission Scope 3 (Business Trip) Generated

Emisi GRK / GHG Emission (Ton Co ₂ -eq)				
Sumber Emisi GRK / GHG Emission Source	Satuan / Unit	2022	2021	2020
Scope 3 (Perjalanan Dinas menggunakan Pesawat Terbang) / Business Trips with Air Travel)	Perjalanan / Trips	6.333	1.708	2.508
	Ton Co ₂ -eq ^{*)}	319,620	86,201	105,722

Di dalam laporan ini, intensitas emisi GRK per pegawai diungkapkan berupa intensitas emisi GRK scope 2 (listrik) di Kantor Pusat KAI, dengan mempertimbangkan (1) tidak semua pegawai turut menyumbang emisi penggunaan BBM dan (2) perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang. Dengan pertimbangan tersebut, intensitas emisi GRK scope 2 (listrik) pada *baseline* tahun 2020-2022 diungkapkan dalam tabel berikut:

In this report, the intensity of GHG emissions per employee is disclosed in the form of GHG emission scope 2 (electricity) intensity at the KAI Head Office, taking into account that (1) not all employees contribute to emissions of fuel use and (2) business trips were carried out with air travels. With these considerations, the intensity of GHG emission scope 2 (electricity) in the 2020-2022 baseline is disclosed in the following table:

Jumlah dan Intensitas Emisi GRK Scope 2 (Listrik) yang Dihasilkan di Kantor Pusat

GHG Emission Scope 2 (Electricity) Generated at the Head Office

Emisi GRK / GHG Emission (Ton CO ₂ -eq)				
Sumber Emisi GRK / GHG Emission Source	Satuan / Unit	2022	2021	2020
Total Intensitas Emisi GRK Scope 2 (Listrik) / Total Intensity of GHG Emission Scope 2 (Electricity)	Ton CO ₂ -eq	1.547,34	1.415,12	1.605
Jumlah Pegawai di Kantor Pusat / Total Employees at the Head Office	Pegawai / Employee	27.365	28.897	26.665
Intensitas Emisi GRK/pegawai / Intensity of GHG Emission/employee	Ton CO ₂ -eq/ Pegawai / Ton CO ₂ -eq/ Employee	0,057	0,049	0,060

Sampai dengan 31 Desember 2022, KAI belum menggunakan jasa pihak eksternal independen untuk verifikasi perhitungan total emisi GRK.

As of December 31, 2022, KAI had not used the services of independent external party to verify the total GHG emission calculation.

Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan [OJK F.12]

KAI melaksanakan upaya pengurangan emisi antara lain melalui pemeliharaan kendaraan operasional dan pengujian emisi gas buang secara berkala. Selain itu, KAI secara rutin mengganti kendaraan operasional dengan usia kendaraan yang lebih muda, dengan emisi gas buangnya yang lebih ramah lingkungan, serta secara bertahap menggunakan kendaraan operasional dengan emisi yang lebih rendah. Untuk tahun 2022, emisi yang berasal dari penggunaan listrik KAI mengalami peningkatan secara tahunan sebesar 9,34% menjadi sebesar 1.547,34 Ton CO₂-eq dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 1.415.12 Ton CO₂-eq. Peningkatan penggunaan listrik tersebut terjadi seiring dengan mulai diberlakukannya kembali sistem kerja *Work From Office* (WFO) pascapandemi.

Efforts and Achievements of Emission Reduction Made [OJK F.12]

KAI's efforts of emission reduction are carried out, among others, through maintenance of operational vehicles and periodic testing of exhaust emissions. In addition, KAI regularly replaces older operational vehicles with younger vehicles of eco-friendlier exhaust emissions, and gradually uses operational vehicles with lower emissions. In 2022, emissions from KAI's electricity use has increased annually by 9.34% to 1,547.34 Tons of CO₂-eq compared to 2021 of 1,415.12 Tons of CO₂-eq. The increase in electricity use occurred in line with the post-pandemic *Work From Office* (WFO) system being reinstated.

Seiring hal tersebut, KAI terus melakukan pembangunan dan pengembangan sistem transportasi rendah emisi (*low carbon emission*) dan ramah lingkungan, seperti pengembangan moda transportasi umum berbasis listrik, termasuk KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, pembangunan LRT Jabodebek, dan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Usaha lain yang dilakukan KAI dalam mengurangi emisi dilaksanakan melalui pemakaian bahan bakar B30, penggunaan panel surya di Stasiun Batang, Gambir, dan gedung perkantoran Jakarta Railway Center, uji statis dan uji dinamis konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar LNG dengan menggunakan sistem DDF, serta KAI mengoptimalkan penggunaan aplikasi pemesanan tiket KAI Access dengan fitur e-boarding pass, sehingga mengurangi penggunaan kertas dalam proses *check in*.

In this regard, KAI continues to build and develop a low carbon emission and eco-friendly transportation system, such as through the development of electricity-based public transportation modes, including KRL Jabodetabek operations, KRL Yogyakarta operations, construction of Jabodebek LRT, and construction of the Jakarta - Bandung Fast Train. Other efforts carried out by KAI in reducing emissions are through the use of B30 fuel, use of solar panels at the Batang Station, Gambir Station, and the Jakarta Railway Center office building, static tests and dynamic tests of the conversion of fuel oil to LNG fuel using the DDF system, and KAI optimizes the use of the KAI Access ticket booking application with the e-boarding pass feature, thereby reducing the use of paper in the check-in process.

Dalam lingkup internal perusahaan, KAI juga mengembangkan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan para pegawainya melalui aplikasi *Rail Document System* (RDS) yang digunakan untuk mendukung surat menyurat secara elektronik, *Safety Railway Information System* (SRI) yang digunakan untuk memberikan informasi pelaporan temuan mengenai safety dan tindak lanjutnya, Raileo yang digunakan untuk memudahkan pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaan, serta aplikasi lainnya yang akan terus dikembangkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pekerjaan para pegawainya di era digital. Komitmen KAI sebagai wujud transformasi digital dilaksanakan dengan rutin melakukan perbaikan sarana dan prasarana serta melakukan perbaikan aplikasi perkantoran, guna mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik. Selain itu, KAI memberlakukan sistem parkir ganjil-genap bagi karyawan kantor pusat sebagai upaya mendorong karyawan agar menggunakan transportasi publik serta menambah penghijauan di area taman perkantoran.

Selain itu, untuk meminimalisir penggunaan bermotor dalam melakukan perjalanan dinas, KAI membuat imbauan bagi para pekerja di kantor pusat agar mengutamakan menggunakan moda transportasi kereta api dalam setiap perjalanan dinas. Hal ini tertuang dalam nota dinas internal No.5/KG.107/I/KA/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Operasional Dinas di Lingkungan Kantor Pusat KAI.

Selain itu, KAI berinovasi dengan mengganti kemasan plastik dengan kemasan ramah lingkungan pada produk makanan dan minuman yang dijual dalam perjalanan kereta api. Hal ini merupakan wujud dukungan pada program Pemerintah untuk mengurangi sampah plastik. KAI juga telah melakukan pengembangan moda transportasi umum berbasis listrik, termasuk pengoperasian Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek, pengoperasian KRL Yogyakarta, pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek, serta pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Kerja Sama atau Kegiatan Pengurangan Emisi GRK dengan Melibatkan Pihak Ketiga

Sampai 31 Desember 2022, KAI menerapkan kegiatan pengurangan emisi GRK secara mandiri. KAI memiliki komitmen yang kuat untuk secara terus-menerus meningkatkan kualitas pengurangan emisi GRK dari aktivitas operasi. Atas komitmen itu, KAI membuka peluang untuk dilakukannya kerja sama atau kegiatan pengurangan emisi GRK dengan melibatkan pihak ketiga pada tahun-tahun mendatang.

In the internal corporate scope, KAI also develop a number of applications to facilitate employees with the Rail Document System (RDS) application in supporting electronic correspondence, the Safety Railway Information System (SRI) to provide reporting information on findings regarding safety and follow-up, Raileo to facilitate employees in carrying out works, as well as other applications that will continue to be developed to provide better service. This aims to facilitate the work of its employees in the digital era. KAI's commitment as a form of digital transformation is carried out by routinely repairing facilities and infrastructure and improving office applications, in order to be able to provide faster and better services. In addition, KAI has implemented an odd-even parking system for head office employees as an effort to encourage employees to use public transportation and to add greenery to the office park area.

In minimizing the use of motorized vehicles during business trips, KAI made encourages workers at the head office to prioritize using rail transportation in all of their business trips. This is stated in the internal service note No.5/KG.107/I/KA/2022 concerning Use of Service Operational Vehicles in the KAI Headquarters.

In addition, KAI carries out innovation replacing plastic packaging with eco-friendly packaging for food and beverage products sold on trains. This is a form of support for the Government's program to reduce plastic waste. KAI has also carried out the development of electricity-based public transportation modes, including the operation of the Jabodetabek Electric Rail Train (KRL), the operation of the Yogyakarta KRL, the construction of the Jabodebek Light Rail Transit (LRT), and the construction of the Jakarta-Bandung Fast Train.

Cooperation or Activities to Reduce Emission by Involving Third-Parties

As of December 31, 2022, KAI conducted activities to reduce GHG emission independently. KAI is strongly committed to continuously improve the quality of cutting the GHG emission generated from its operations. In light of that commitment, KAI provides opportunities of cooperation or activities to cut GHG emission by involving third-parties in the upcoming years.

Pemenuhan Target Pengurangan Emisi GRK

KAI belum menetapkan target pengurangan emisi GRK. Meski demikian, sampai dengan laporan ini dipublikasikan, KAI telah menyusun dan memperlakukan Roadmap ESG periode 2023-2027 yang memuat target penghematan energi, yang akan berdampak pada pengurangan emisi GRK. KAI belum menetapkan target penurunan emisi pada Roadmap ESG periode 2023-2027. Adapun, Roadmap ESG periode 2023-2027 masih dalam proses evaluasi sebagai upaya penyempurnaan oleh KAI.

Target Penurunan Emisi Sebagai KPI Manajemen dan Evaluasinya

Sampai dengan 31 Desember 2022, KAI belum memasukkan target penurunan emisi sebagai bagian penilaian KPI manajemen. KAI juga belum menerapkan sistem evaluasi terhadap target penurunan emisi berdasarkan baseline perhitungan hingga tahun pelaporan Laporan Keberlanjutan.

ASPEK LIMBAH DAN EFLUEN

Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis [OJK F.13] [GRI 306-3]

Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan dari aktivitas operasional KAI untuk tahun 2022, beserta pembagian berdasarkan jenisnya, adalah sebagai berikut:

Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Tahun 2022

No	Jenis Limbah / Type of Waste	Satuan / Unit	Gudang Persediaan / Stock Warehouse				Sar Divre I	Total Volume
			Purwakarta	Yogyakarta	Surabaya	Lahat		
1	Minyak Pelumas Bekas / Used Oil Lubricants	Ltr	87.100	41.100	83.920	78.608	25.050	315.778
2	Drum Bekas / Used Drums	Bh	1.401	228	798	3.349	125	5.901
3	Gram Bubutan / Lathe Crumb	Kg	19.115	30.780	69.860	35.560	5.080	160.395
4	Potongan Besi < 1 Kg / Pieces of Iron < 1 Kg	Kg	31.910	37.705	353.558	416.260	8.000	847.433
5	Lain-lain / Others	Kg	39.391	35.009	338.852	3.393	250	416.895

Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen [OJK F.14]

Aktivitas operasional Perseroan menghasilkan limbah tertentu yang berpotensi memberi dampak buruk bagi upaya pelestarian lingkungan, terutama jika tidak dikelola atau secara langsung dibuang ke lingkungan tanpa prosedur pengelolaan yang benar. Untuk itu, KAI memiliki komitmen untuk terus menerapkan pengelolaan limbah sebagai upaya berkesinambungan dalam mengurangi potensi hadirnya dampak buruk dari aktivitas operasional kepada lingkungan.

Achievement of GHG Emission Reduction Targets

KAI had not set a GHG emission reduction target. However, up to the publication of this report, KAI has prepared and implemented the ESG Roadmap for the 2023-2027 period which contains energy saving targets, which will have an impact on reducing GHG emissions. KAI has not set an emission reduction target in the ESG Roadmap for the 2023-2027 period. Meanwhile, the ESG Roadmap for the 2023-2027 period is still in the process of being evaluated as an effort to improve it by KAI.

Emission Reduction Target as Management KPI and Evaluation

As of December 31, 2022, KAI has not included emission reduction targets as part of the management KPI assessment. In addition, KAI has not implemented an evaluation system for emission reduction targets based on calculation baselines until the Sustainability Report reporting year.

WASTE AND EFFLUENT ASPECT

Amount of Waste and Effluent Generated by Type [OJK F.13] [GRI 306-3]

The amount of waste and effluent generated from KAI's operational activities for 2022 by its type is as follows:

Waste and Effluent Generated in 2022

Waste and Effluent Management Mechanism [OJK F.14]

The Company's operations generate certain wastes which have the potential of negative impact on environmental conservation efforts, especially if they are not managed or directly disposed of into the environment without proper management procedures. Therefore, KAI is committed to always implementing waste management as a continuous effort to reduce the potential for adverse impacts from operational activities to the environment.

Berdasarkan jenisnya, limbah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, sebagai berikut:

a. Limbah Cair

Berupa tumpahan bahan bakar minyak atau oli, cecceran oli bekas, air cucian lokomotif, kereta, gerbong, dan komponen sarana, cairan kimia dan/atau cairan lainnya sisa produksi yang terbuang dari aktivitas proses produksi melalui proses pencucian, hasil pengurasan Toilet Ramah Lingkungan (TRL).

b. Limbah Padat

Seperti sisa pembubutan (serbuk besi atau scrap), barang atau suku cadang bekas, limbah kantor (kertas, plastik), limbah restorasi (kertas, plastik, sisa makanan).

c. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Berupa zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak/membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain seperti oli bekas, majun bekas, cairan kimia B3.

Pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasi Perseroan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan operasional sehari-hari. Hal itu dilaksanakan sesuai Keputusan Direksi KAI Nomor KEP.U/ KS.101/IV/1/ KA-2017 tanggal 4 April 2017 tentang Pengelolaan Limbah di Daerah Operasi, Divisi Regional, Balai Yasa, Gudang Persediaan, dan Anak Perusahaan. Melalui perangkat kebijakan internal tersebut, Perseroan mengupayakan pengelolaan limbah secara baik dan benar, terpelihara, terkontrol dan teruji dengan tujuan meminimalisasi dampak lingkungan.

Dalam mengelola limbah air, KAI sudah menerapkan mekanisme aturan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. KAI juga telah mendapatkan ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan pada 3 (tiga) area kerja, yaitu Balai Yasa Yogyakarta, Balai Yasa Cirebon Prujakan, dan Depo Lokomotif Cirebon.

Secara berkala, KAI melakukan pemantauan terhadap dampak yang ditimbulkan dari limbah operasi bisnis ataupun aktivitas rantai pasok, melalui penerapan life cycle perspective dengan uraian sebagai berikut **[GRI 306-2]**:

The waste generated can be grouped into 3 (three) types, as follows:

a. Liquid Waste

In the forms of fuel oil or oil spills, used oil spills, washing water for locomotives, trains, carriages, and facility components, residual chemical liquids and/or other liquids from production wasted from production process activities through the washing process, result of draining Eco-Friendly Toilets (TRL).

b. Solid Waste

In the forms of urning residue (iron powder or scrap), used goods or spare parts, office waste (paper, plastic), restoration waste (paper, plastic, food waste).

c. Hazardous and Toxic Waste (B3)

In the form of substances, energy, and/or other components which due to their nature, concentration and/or amount, either directly or indirectly, can pollute and/or damage/harm the environment, health, as well as the survival of humans and other living creatures such as used oil, used rags, B3 chemical fluids.

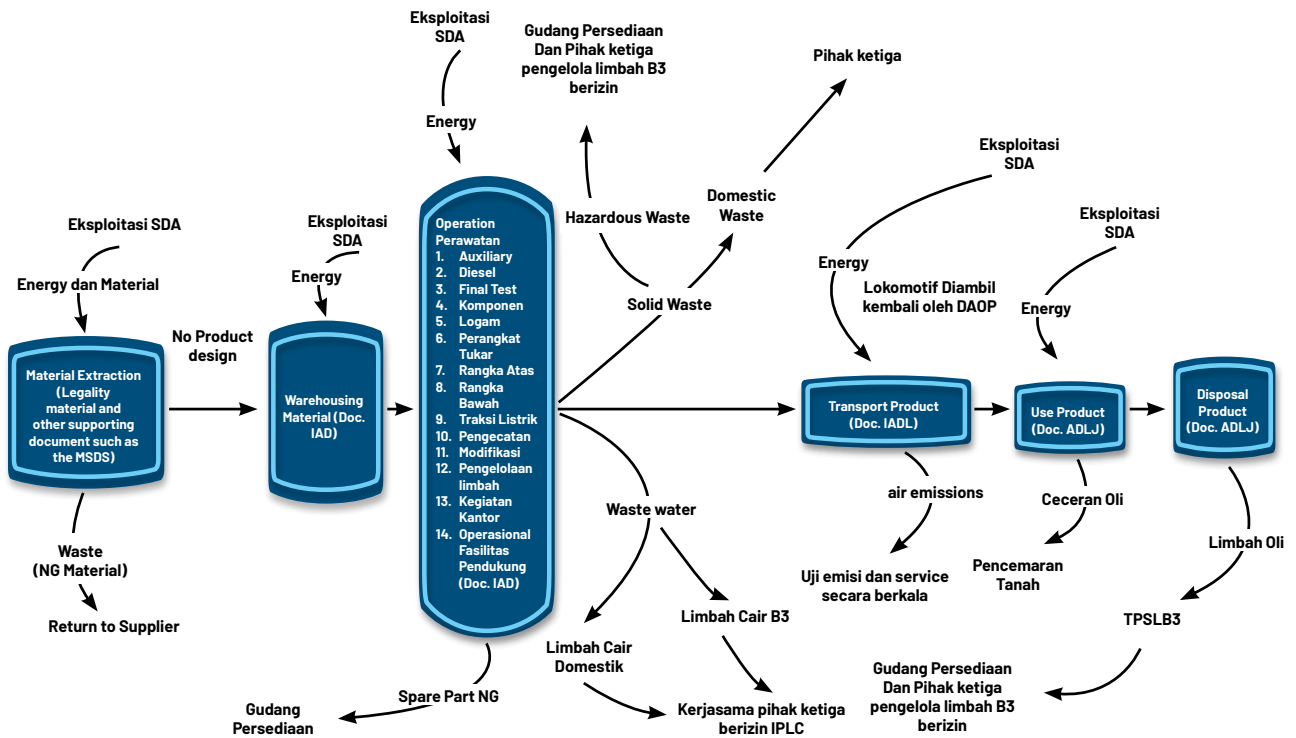
The management of waste generated from the Company's operations is an integral part of the daily operations in accordance with Board of Directors Decree of KAI No. KEP.U/ KS.101/IV/1/KA-2017 dated April 4, 2017 concerning Waste Management in Operational Areas, Regional Divisions, Balai Yasa, Stock Warehouses, and Subsidiaries. Through these internal policies, the Company strives for proper, appropriate, well-maintained, controlled, and tested waste management with the aim of minimizing environmental impacts.

KAI has implemented regulatory mechanisms in managing wastewater in accordance with the Minister of Environment of the Republic of Indonesia Regulation No. 5 of 2014 concerning Wastewater Quality Standards. KAI has also obtained ISO 14001:2015 concerning Environmental Management Systems in 3 (three) work areas, namely Yogyakarta Yasa Hall, Cirebon Prujakan Yasa Hall, and Cirebon Locomotive Depot.

Periodically, KAI monitors the impacts of waste from business operations or supply chain activities, through the application of a life cycle perspective with the following description **[GRI 306-2]**:

Life Cycle Perspective Pemantauan Dampak Limbah KAI

Life Cycle Perspective Monitoring the Impact of KAI's Waste

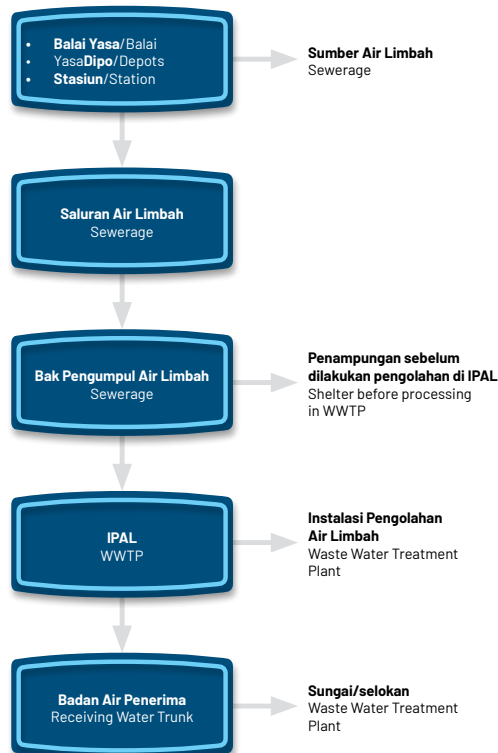


Alur pengelolaan limbah di lingkungan Perseroan diuraikan melalui skema berikut:

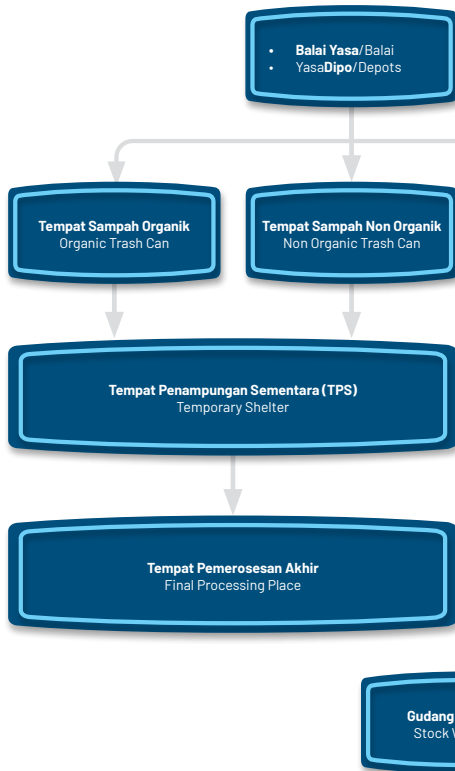
1. Bagan alur pengelolaan limbah cair:

The flow of waste management at the Company is described through the following scheme:

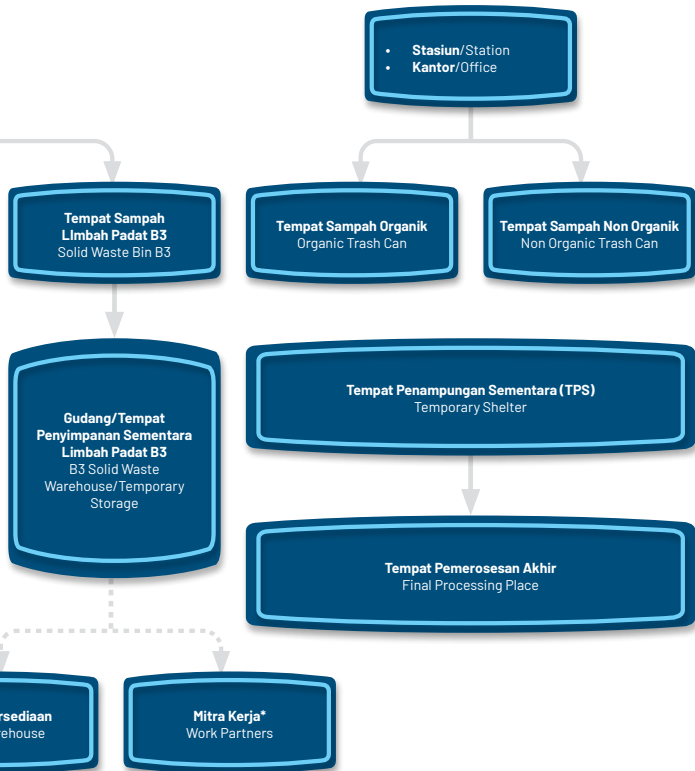
1. Liquid waste management flowchart:



2. Bagan alur pengelolaan limbah padat:



2. Solid waste management flowchart:



*) Harus sudah memiliki ijin penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 dari kantor/badan lingkungan hidup

*) Must be licensed for B3 waste management and storage from agency/department of environment

Dalam praktiknya, guna menunjang pengelolaan limbah yang dilakukan di Balai Yasa, Dipo, Kantor, dan Stasiun, Perseroan menerapkan kebijakan sebagai berikut:

In its implementation, to support waste management carried out in Balai Yasa, depots, offices, and stations, the following provisions were carried:

- Di setiap tempat kerja terbuka maupun tertutup yang berpotensi adanya limbah wajib disediakan tempat sampah organik dan non organik yang harus selalu dalam keadaan tertutup;
- Secara berkala sampah di Balai Yasa, dipo, kantor, dan stasiun dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) terdekat dan diangkut oleh dinas kebersihan setempat ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- Sampah tidak boleh dibakar dan ditimbun di dalam tanah;
- Setiap Balai Yasa, dipo, dan stasiun harus memiliki dokumen lingkungan kemudian mengurus izin lingkungan untuk kemudian memproses izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Menyediakan gudang/tempat penyimpanan sementara limbah padat B3 seperti komponen bekas, potongan besi, baterai, accu, lampu TL, dan lain-lain, untuk dikirim ke Gudang Persediaan/mitra kerja yang sudah memiliki izin penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 dari kantor/badan lingkungan hidup dan Bupati/Walikota;

- In every open or closed workplace with the potential for waste, it is mandatory to provide organic and non-organic waste bins that must always be closed;
- Waste at Balai Yasa, depots, offices, and stations is disposed to the nearest Temporary Disposal Site (TPS) and transported by the local cleaning service to the Final Processing Site (TPA);
- Waste should not be burned and buried in the ground;
- Every Balai Yasa, Depot, and Station must have environmental document, environmental permit, and environmental conservation and management permit;
- Provide a warehouse/temporary storage place for B3 solid waste such as used components, scrap metal, batteries, accumulator, TL lamps, etc., to be sent to the Stock Warehouse/partners with B3 waste storage and management permit from the environmental office/agency and Regent/Mayor;

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> f. Tempat penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan; g. Untuk limbah B3 yang dihasilkan lebih dari 50 kg penyimpanannya paling lama 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan, sedangkan untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg penyimpanannya paling lama 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan; h. Limbah B3 diberi label yang berisikan nama limbah B3, identitas penghasil limbah B3, tanggal dihasilkannya limbah B3 dan tanggal pengemasan limbah B3 serta simbol dan label limbah B3. | <ul style="list-style-type: none"> f. B3 waste storage sites must meet the necessary requirements; g. The B3 waste generated of more than 50 kg can only be stored for a maximum of 90 days since the B3 waste was generated, while for B3 waste generated of less than 50 kg, the storage was for a maximum of 180 days since the B3 waste was generated; h. B3 waste must have be labeled with the label containing the name of B3 waste, the identity of the producer of B3 waste, the date the B3 waste was generated and the date the B3 waste was packaged as well as the symbol and label of B3 waste. |
|---|--|

Selain itu, Perseroan menerapkan praktik pengelolaan limbah padat di atas kereta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sampah yang berasal dari restorasi kereta api dan penumpang dipisahkan antara sampah organik dan sampah non organik
- b. Setelah sampai stasiun tujuan sampah dibuang ke TPS stasiun.
- c. KAI telah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah dan mengontrol polusi dari kegiatan operasional perusahaan, tertuang dalam Kebijakan Health, Safety, Security & Environment Nomor KS.102/XII/1/KA-2022 tanggal 16 Desember 2022.

In addition, the Company implements solid waste management on board the train with the following conditions:

- a. Waste generated from the train restaurants and passengers is separated into organic waste and inorganic waste
- b. After arriving at the destination station, the waste is disposed at the station TPS.
- c. KAI has issued a policy to prevent and control pollution from the company's operational activities, as stated in the Health, Safety, Security & Environment Policy No. KS.102/XII/1/KA-2022 dated December 16, 2022.

Standar Minimum Kualitas Buangan Limbah Air (Efluen)

KAI melakukan pengelolaan limbah yang diturunkan dari regulasi sesuai Surat Keputusan Nomor KEP.U/KS.10I/IV/II/KA-2017. Sesuai peraturan tersebut, pengelolaan buangan limbah air dilakukan dengan menggunakan IPAL agar limbah air efluen dapat sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.

Minimum Standards for Quality of Wastewater (Effluent)

KAI carries out waste management derived from regulations according to Decree Number KEP.U/KS.10I/IV/II/KA-2017. In accordance with these regulations, the management of waste water is carried out using WWTP so that the effluent water can comply with the set quality standards.

Laporan Pemantauan Kualitas Buangan Limbah

Secara berkala, KAI melalui masing-masing unit penghasil limbah melakukan pemantauan dan pengelolaan limbah serta melakukan pelaporan pengelolaan limbah kepada dinas atau instansi terkait.

Waste Disposal Quality Monitoring Report

Periodically, KAI, through each waste-producing unit, monitors and manages waste and reports waste management to the relevant offices or agencies.

ASPEK POLUSI

Daftar Polusi yang Dihasilkan selama Proses Operasi Perusahaan

Sampai dengan 31 Desember 2022, KAI tidak pernah menerima laporan terkait adanya pencemaran lingkungan yang terjadi dari proses operasi Perseroan. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai daftar substansi dengan dampak pencemaran yang dihasilkan dari aktivitas operasi KAI.

POLLUTION ASPECT

List of Pollution Generated during the Company's Operations

As of December 31, 2022, KAI had never received a report regarding environmental pollution occurring from the Company's operational processes. Thus, there is no information regarding the list of substances with polluting effects resulting from KAI's operational activities.

Terkait hal tersebut, penghitungan emisi yang dihasilkan dari aktivitas operasi KAI telah diungkapkan pada subbagian Aspek Emisi di dalam laporan ini.

Kebijakan dalam Mencegah dan Mengontrol Polusi yang Dihasilkan

KAI memiliki komitmen kuat dalam mengurangi dampak buruk aktivitas operasi terhadap lingkungan, antara lain dengan mencegah dan mengontrol polusi yang dihasilkan. Hal tersebut diterapkan sebagai upaya Perseroan dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup, yang dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas pembuangan limbah cair, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non-B3, upaya mendorong penggunaan material ramah lingkungan, serta penggunaan sumber daya alam (termasuk air) secara efisien.

Secara spesifik, penerapan pencegahan dan upaya mengontrol polusi dari aktivitas operasional KAI diatur melalui ketentuan internal berupa Kebijakan *Health, Safety, Security, and Environment* (HSSE) Nomor KS.102/XII/1/KA-2022.

Pengungkapan Pencemaran Udara terhadap Lingkungan dan Masyarakat Sekitar

Sampai dengan 31 Desember 2022, tidak terdapat insiden pencemaran udara yang dihasilkan dari aktivitas operasi KAI terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar.

Sebagai upaya identifikasi terhadap insiden pencemaran udara, KAI telah menyediakan saluran pelaporan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar atau pemangku kepentingan lain guna menginformasikan adanya pencemaran berkenaan dengan aktivitas operasi Perseroan.

Tumpahan yang Terjadi [OJK F.15]

Selama tahun 2022, tidak terjadi tumpahan atau kebocoran limbah B3 yang terjadi dalam kegiatan operasional Perseroan.

ASPEK PENGADUAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan [OJK F.16]

Selama tahun 2022, KAI tidak menerima teguran dari masyarakat atau instansi terkait mengenai pencemaran yang diakibatkan dari operasional perusahaan.

In this regard, the calculation of emissions resulting from KAI's operating activities has been disclosed in the sub-chapter of Emissions Aspects of this report.

Policies in Preventing and Controlling Generated Pollution

KAI is strongly committed to reducing the negative impact of its operations on the environment, by preventing and controlling the pollution it produces. This is the manifestation of the Company's efforts to prevent environmental pollution, carried out through improving the quality of liquid waste disposal, handling Hazardous and Toxic (B3) and Non-B3 waste, efforts to encourage the use of environmentally friendly materials, and the use of natural resources (including water) efficiently.

Specifically, the implementation of prevention and efforts to control pollution from KAI's operational activities is regulated through internal provisions in the form of Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Policy No. KS.102/XII/1/KA-2022.

Disclosure of Air Pollution on the Environment and Surrounding Communities

As of December 31, 2022, there were no air pollution incidents resulting from KAI's operational activities on the environment and surrounding communities.

To identify incidents of air pollution, KAI has provided a reporting channel that can be utilized by the surrounding community or other stakeholders to inform them of pollution related to the Company's operational activities.

Spills Occurred [OJK F.15]

During 2022, there were no spills or leaks of B3 waste in KAI's operations.

ENVIRONMENTAL COMPLAINTS ASPECT

Number and Materials of Environmental Complaints Received and Resolved [OJK F.16]

Throughout 2022, KAI did not receive any complaints from the public or institutions regarding pollution resulting from the Company's operations.

KINERJA SOSIAL

Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara Kepada Konsumen [OJK F.17]

Dengan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang, KAI secara konsisten terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara menyempurnakan sejumlah aspek terkait pelayanan. KAI mengupayakan pemberian pelayanan secara maksimal antara lain dengan memberikan pelatihan kepada *frontliner*, demi meningkatkan kualitas pengalaman di dalam kereta bagi pelanggan. Selain itu, KAI melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala, yang hasilnya digunakan sebagai acuan bagi upaya penyempurnaan layanan ke depan.

Komitmen kuat KAI dalam meningkatkan kepuasan pelanggan juga diwujudkan dengan menyediakan *guiding block*, ruang laktasi, loket difabel dan toilet difabel, dan kursi roda bagi penumpang yang membutuhkan. Terdapat 65 *guiding block*, 116 ruang laktasi, 30 loket difabel, dan 106 toilet difabel yang tersebar di beberapa stasiun operasional KAI.

Jumlah *Guiding Block*, Ruang Laktasi, Loket Difabel, dan Toilet Difabel

Wilayah Operasional / Operational Area	<i>Guiding Block</i>	Ruang Laktasi / Lactation Room	Loket Difabel / Disabled Counter	Toilet Difabel / Disabled Toilet
Daop 1 Jakarta	2	6	3	5
Daop 2 Bandung	3	11	0	11
Daop 3 Cirebon	1	5	2	5
Daop 4 Semarang	7	8	4	6
Daop 5 Purwokerto	8	17	5	12
Daop 6 Yogyakarta	7	7	0	9
Daop 7 Madiun	12	15	3	6
Daop 8 Surabaya	9	14	8	15
Daop 9 Jember	2	11	1	12
Divre 1 Sumatera Utara	8	6	1	10
Divre 2 Sumatera Barat	1	8	1	6
Divre 3 Palembang	1	4	0	6
Divre 4 Tanjung Karang	4	4	2	3

Selain itu, KAI juga menunjukkan kepedulian akan isu pelecehan seksual di ruang publik, salah satunya pada moda transportasi massal. Berbagai sosialisasi anti pelecehan seksual dilakukan KAI bersama pihak terkait, baik dalam bentuk kegiatan *offline* di stasiun dan kereta maupun sosialisasi berupa imbauan di kereta melalui *announcer*, menayangkan *eflyer* di TV kereta api, memasang *banner/poster* di stasiun, dan mempublikasikan kampanye anti pelecehan sosial di akun media sosial KAI.

SOCIAL PERFORMANCE

Commitment to Providing Equal Products and/or Services to Consumers [OJK F.17]

With a commitment to providing the best service for passengers, KAI consistently improves its service quality by improving a number of service-related aspects. KAI strives to provide maximum service, including by providing training to frontliners in order to improve the quality of experience on the train for customers. KAI also conducts regular customer satisfaction surveys in which the serve as a reference for efforts to improve service in the future.

KAI's strong commitment to increasing customer satisfaction is also realized by providing guiding blocks, lactation rooms, disabled counters, disabled toilets, and wheelchairs for passengers who need them. There were 65 guiding blocks, 116 lactation rooms, 30 disabled counters, and 106 disabled toilets across several KAI operational stations.

Number of *Guiding Block*, Lactation Room, Disabled Counter, and Disabled Toilet

KAI also pays attention to the issue of sexual harassment in public spaces including in mass transportation. Various anti-sexual harassment campaigns are carried out by KAI and related parties, in the form of offline activities at stations and trains as well as dissemination in the form of announcements on trains, broadcasting e-flyers on train TV, placing banners/posters at stations, and publishing anti-social harassment campaigns on KAI's social media accounts.

KAI menyediakan berbagai saluran komunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelanggan, antara lain melalui komunikasi tatap muka/*face-to-face* (*Customer Service on-Station* dan *Customer Service on-Train*), via telepon, ataupun komunikasi melalui media sosial, termasuk untuk menangani komunikasi berupa keluhan, kritik, maupun saran.

Seluruh saluran pelayanan pelanggan tersebut telah dijalankan secara terintegrasi melalui CRM (*Customer Relationship Management*), sehingga setiap progres penanganan keluhan dapat dipantau sampai selesai. Semua keluhan yang diterima harus mendapat tanggapan dengan tolok ukur *Key Performance Indicators* (KPI) 90%.

Dalam waktu 30 menit, CRM harus segera direspons dan ditindaklanjuti. Penanganan keluhan pelanggan sejak masuk ke CRM sampai selesai dipantau hingga ke tingkat Manager. Jika petugas *Customer Relation* (petugas yang meneruskan dan menyelesaikan masalah) belum dapat menyelesaikan masalah dalam waktu 30 menit, maka notifikasi akan diteruskan ke *team leader*. Jika berlanjut sampai 60 menit, maka Manager yang bersangkutan akan mendapatkan notifikasi agar segera menyelesaikan keluhan yang diterima.

Prosedur tersebut dilakukan KAI sebagai upaya terus-menerus dalam menjaga kepuasan pelanggan.

KAI menyediakan layanan informasi publik terkait Perseroan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas melalui website ppid.kai.id. Website ini memiliki audio yang bisa mengarahkan pengunjung web dengan disabilitas tuna netra, karena setiap menu di dalam web ini dilengkapi telah dengan instruksi direktori melalui suara.

Selain itu, bagi para disabilitas tuna netra yang ingin mengajukan permohonan informasi publik dengan datang langsung ke kantor PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi) KAI baik di pusat maupun di Daop/Divre. KAI juga telah menyediakan formulir permohonan informasi dan brosur lengkap dengan menggunakan huruf Braille serta menyediakan prasarana berupa *guiding block* di pintu masuk Kantor Pusat KAI yang mengarahkan ke ruang PPID.

Bagi penyandang disabilitas lainnya yang menggunakan kursi roda, KAI juga menyediakan ramp atau jalan khusus untuk kursi roda dari depan pintu masuk Kantor Pusat KAI menuju ke ruang PPID.

KAI provides various communication channels that can be utilized by customers, including through face-to-face (*Customer Service on-Station* and *Customer Service on-Train*), via telephone, or through social media to handle information, complaints, critics or suggestions.

All customer service channels were integrated in CRM (*Customer Relationship Management*) so that all complaints handling progress could be monitored to completion. All complaints had to receive a response with a *Key Performance Indicators* (KPI) of 90%.

Within 30 minutes CRM had to be immediately responded and followed up. The handling of customer complaints from entering the CRM to completion was monitored up to the Manager level. If the *Customer Relations officer* (who forwards and resolves the problem) is not able to resolve the problem within 30 minutes, the notification is forwarded to the team leader. If it continues for 60 minutes, the Manager concerned would receive a notification to immediately resolve the complaint received.

This procedure is carried out by KAI to maintain customer satisfaction.

KAI provides public information services related to the Company which can be accessed by persons with disabilities through the ppid.kai.id website. This website has audio that can direct web visitors with visual impairments, because every menu on this website is equipped with directory instructions via sound.

In addition, for those with visual impairments who wish to apply for public information by coming directly to the KAI PPID (*Information Management & Documentation Officer*) office both at the center and Daop/Divre. KAI has also provided an information request form and a complete brochure using Braille letters and provided infrastructure in the form of a *guiding block* at the entrance to the KAI Head Office which leads to the PPID room.

For other persons with disabilities who use wheelchairs, KAI also provides a special ramp or ramp for wheelchairs from the front entrance of the KAI Head Office to the PPID room.

Sementara itu, untuk para pemohon informasi dengan disabilitas tuna rungu dan tuna wicara, KAI telah menyediakan fasilitas video tentang layanan informasi publik KAI di ruang PPID dan akun Youtube Kereta Api Kita yang dilengkapi dengan bahasa isyarat dan subtitle.

ASPEK KETENAGAKERJAAN

Kepegawaian [GRI 2-7]

KAI menerapkan kebijakan dan praktik kepegawaian dengan mempertimbangkan aspek penyaluran manfaat dan pemenuhan hak bagi pegawai. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar pemahaman yang kuat bahwa pegawai memiliki peran penting dalam keseluruhan upaya penyaluran pelayanan terbaik kepada pelanggan, serta segenap pemangku kepentingan lain, yang para akhirnya berperan terhadap pencapaian keberlanjutan pengembangan bisnis secara jangka panjang. [GRI 3-1]

KAI menerapkan pengelolaan sumber daya manusia secara menyeluruh, mencakup proses rekrutmen, pergantian pegawai, penerapan praktik ketenagakerjaan, hingga pemberian program pendidikan dan pelatihan, di bawah koordinasi divisi *Corporate Deputy Director of Personnel Care, Control and Development*. [GRI 3-2]

Lebih lanjut, penerapan prosedur rekrutmen pegawai yang dilaksanakan oleh KAI telah didukung keberadaan kebijakan internal, berupa Peraturan Direksi Nomor PER.U/KH.102/VII/1/KA-2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan perubahannya berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KH.102/IX/1/KA2017 tanggal 20 September 2017, yang telah dimutakhirkan kembali berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KH.102/V/1/KA-2021 tanggal 07 Mei 2021.

Proses rekrutmen KAI dilakukan antara lain melalui media internal, yaitu situs web resmi pada alamat <https://recruitment.kai.id/>. KAI memastikan bahwa situs web tersebut telah memuat informasi terkini dan akurat mengenai pengumuman rekrutmen, registrasi, seleksi, pengumuman kelulusan, hingga *job description* yang dibutuhkan oleh calon pegawai.

Untuk tahun 2022, KAI telah melakukan proses rekrutmen yang terbagi menjadi rekrutmen internal serta eksternal. Rekrutmen internal dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan di Direktorat Operasi, Direktorat Sarana dan Direktorat Prasarana, yaitu untuk mendukung kelancaran operasional perjalanan kereta api. Adapun, rekrutmen eksternal dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang tidak terpenuhi dari rekrutmen internal, di samping untuk memenuhi kebutuhan pada Direktorat lainnya.

Meanwhile, for information applicants with hearing and speech impairments, KAI has provided video facilities about KAI's public information services in the PPID room and Kereta Api Kita's YouTube account, which are equipped with sign language and subtitles.

LABOR ASPECT

Employment [GRI 2-7]

KAI implements employment policies and practices by considering the aspects to provide benefits and fulfil the rights of employees. This is carried out on the basis of a strong understanding that employees have an important role in the overall efforts to provide the best service to customers and all other stakeholders, which ultimately contributes to the achievement of long-term sustainable business development. [GRI 3-1]

Overall human capital management at KAI is carried out in the recruitment process, employee turnover, implementation of employment practices, and provision of education and training programs under the coordination of the Corporate Deputy Director of Personnel Care, Control and Development division. [GRI 3-2]

Furthermore, the implementation of employee recruitment at KAI is supported by an internal policy, namely the Board of Directors Regulation No. PER.U/KH.102/VII/1/KA-2017 dated July 14, 2017 with amendments based on Board of Directors Regulation No. PER.U/ KH.102/IX/1/KA2017 dated September 20, 2017 with another amendment on Board of Directors Regulation No. PER.U/KH.102/V/1/KA-2021 dated May 7, 2021.

KAI's recruitment process is carried out, among others, through internal media, namely the official website at <https://recruitment.kai.id/>. KAI ensures that the website contains up-to-date and accurate information on recruitment announcement, registration, selection, acceptance announcement, and job description required by the candidate.

In 2022, KAI has carried out a recruitment process of internal and external recruitment. Internal recruitment is carried out to meet the needs of the Directorate of Operations, namely to support the smooth operation of train travel. Meanwhile, external recruitment is carried out to meet the unmet needs of employees from internal recruitment so as to meet the needs of other Directorates.

Secara berkala, KAI melakukan evaluasi terhadap praktik kepegawaian dengan melakukan penilaian terdapat pemenuhan target dan tujuan, yang dilakukan baik bagi pegawai maupun satuan kerja. Penilaian hasil yang dicapai dilakukan dengan merujuk pada visi, misi, dan tujuan jangka panjang KAI, serta tolok ukur penilaian berdasarkan Key Performance Indicators (KPI) atau Performance Indicators (PI) Korporat. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keselarasan antara pencapaian kinerja pegawai ataupun satuan kerja dengan sasaran kinerja Perseroan. **[GRI 3-3]**

Perekrutan Pegawai Baru dan Pergantian Karyawan [GRI 401-1]

Guna mendukung aktivitas operasional dan pengembangan organisasi, KAI melakukan perekrutan pegawai baru dan pergantian (*turnover*) pegawai. Pengungkapan rekrutmen dan pergantian pegawai KAI selama periode tahun 2022 berdasarkan wilayah kerja dan usia adalah sebagai berikut:

KAI periodically evaluates employment practices by assessing the fulfillment of targets and objectives, which are carried out for employees and work units. Assessment of the results achieved is carried out by referring to KAI's vision, mission and long-term goals, as well as benchmarks based on the Key assessment performance Indicators (KPI) or Corporate Performance Indicators (PI). This is carried out to maintain harmony between the performance achievements of employees or work units with the Company's performance targets. **[GRI 3-3]**

New Employee Recruitment and Employee Turnover [GRI 401-1]

To support operational activities and organizational development, KAI conducts recruitment of new employees and employee turnover. Information on KAI's employee recruitment and turnover for the 2022 period based on work area and age is as follows:

Jumlah Pegawai Baru Berdasarkan Wilayah Kerja

Number of New Employees by Work Area

Wilayah Kerja / Work Area	2022			2021		
	Pria / Male	Wanita / Female	Total	Pria / Male	Wanita / Female	Total
Balai Yasa Manggarai	-	-	-	-	-	-
Balai Yasa Pulubrayan	-	-	-	-	-	-
Balai Yasa Tegal	4	-	-	-	-	-
Balai Yasa Lahat	14	-	-	-	-	-
Balai Yasa Yogyakarta	3	-	-	-	-	-
DAOP I Jakarta	97	10	107	1	3	4
DAOP II Bandung	84	7	91	1	-	1
DAOP III Cirebon	22	1	23	-	-	-
DAOP IV Semarang	19	2	21	2	-	2
Daop V Purwokerto	10	1	11	-	-	-
Daop VI Yogyakarta	10	7	17	31	-	31
Daop VII Madiun	9	-	9	-	1	1
Daop VIII Surabaya	24	4	28	-	-	-
Daop IX Jember	2	1	3	-	-	-
Divre I Sumatera Utara	40	1	41	-	-	-
Divre II Sumatera Barat	4	-	4	-	-	-
Divre III Palembang	379	4	383	-	-	-
Divre IV Tanjungkarang	199	3	202	-	-	-
Gudang Persediaan / Stock Warehouse	-	-	-	-	-	-
Kantor Pusat / Head Office	27	4	31	-	-	-
Kantor Pusat KAPM / Head Office KAPM	-	-	-	-	-	-
LRT Jabodebek	191	7	198	4	1	5

Wilayah Kerja / Work Area	2022			2021		
	Pria / Male	Wanita / Female	Total	Pria / Male	Wanita / Female	Total
Pendidikan & Latihan / Education & Training	-	-	-	38	2	40
PT Railink - Kantor Pusat / Head Office	-	-	-	-	-	-
Subdivre I.1 Aceh	-	-	-	-	-	-
Jumlah / Total	1.138	52	1.190	77	7	84

Jumlah Pegawai Baru Berdasarkan Usia

Number of New Employees by Age

Usia / Age	2022			2021		
	Pria / Male	Wanita / Female	Total	Pria / Male	Wanita / Female	Total
21-30	1.137	52	1.189	76	7	83
31-40	1	-	1	1	-	1
41-50	-	-	-	-	-	0
51-56	-	-	-	-	-	0
Jumlah / Total	1.138	52	1.190	77	7	84

Turnover Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja

Employee Turnover by Work Area

Wilayah Kerja / Work Area	2022			2021		
	Pria / Male	Wanita / Female	Total	Pria / Male	Wanita / Female	Total
Balai Yasa Lahat	7	-	7	15	-	15
Balai Yasa Manggarai	7	1	8	17	-	17
Balai Yasa Pulubrayan	4	-	4	2	-	2
Balai Yasa Surabaya Gubeng	5	-	5	5	-	5
Balai Yasa Tegal	5	-	5	8	2	10
Balai Yasa Yogyakarta	14	-	14	15	1	16
DAOP I Jakarta	112	2	114	116	1	117
DAOP II Bandung	46	1	47	58	1	59
DAOP III Cirebon	32	1	33	18	1	19
DAOP IV Semarang	30	2	32	26	1	27
Daop V Purwokerto	31	-	31	53	-	53
Daop VI Yogyakarta	40	-	40	41	3	44
Daop VII Madiun	24	-	24	33	-	33
Daop VIII Surabaya	57	3	60	76	2	78
Daop IX Jember	20	-	20	32	-	32
Divre I Sumatera Utara	27	-	27	42	-	42
Divre II Sumatera Barat	22	-	22	28	2	30
Divre III Palembang	70	-	70	69	1	70
Divre IV Tanjungkarang	59	-	59	59	-	59
Gudang Persediaan / Stock Warehouse	2	-	2	5	-	5
Kantor Pusat / Head Office	36	7	43	49	8	57

Wilayah Kerja / Work Area	2022			2021		
	Pria / Male	Wanita / Female	Total	Pria / Male	Wanita / Female	Total
KCI	12	-	12	7	-	7
Kantor Pusat KAPM / Head Office KAPM	2	-	3	5	-	5
Reska Multi Usaha	3	-	1	3	-	3
KA Logistik	2	-	2	1	-	1
KA Wisata	1	-	1	1	-	1
LRT Jabodebek	4	-	4	-	-	-
Pendidikan & Latihan / Education & Training	7	3	10	6	3	9
PT Railink - Kantor Pusat / Head Office	-	-	-	2	-	2
Subdivre I.1 Aceh	1	-	1	2	-	2
Subsidiaries	-	-	-	1	-	1
Jumlah / Total	682	20	702	795	26	821

Turnover Pegawai Berdasarkan Usia

Employee Turnover Based on Age

Usia / Age	2022			2021		
	Pria / Male	Wanita / Female	Total	Pria / Male	Wanita / Female	Total
21-30	23	3	26	12	3	15
31-40	46	7	53	16	1	17
41-50	84	5	89	62	5	67
51-56	529	5	534	48	1	49
Jumlah / Total	682	20	702	138	10	148
Persentase / Percentage	2,51%	0,07%	2,59%	0,48%	0,04%	0,52%

Kesetaraan Kesempatan Bekerja [OJK F.18]

KAI menjamin adanya kesetaraan kesempatan bekerja bagi calon pegawai. Hal tersebut dilaksanakan antara lain melalui Program Perekrutan Bersama BUMN Putra-Putri Terbaik Papua dan Papua Barat. Di samping itu, rekrutmen KAI juga telah mengakomodasi kategori pelamar dengan disabilitas, yaitu bersumber dari Program Prekrutan Bersama BUMN.

Kesetaraan kesempatan bekerja oleh KAI tidak hanya diberikan bagi calon pegawai, tetapi juga bagi pegawai, tanpa praktik diskriminatif. Guna menjamin kesempatan bekerja diberikan secara objektif, KAI menerapkan kebijakan *Job Grade* dan *Job Class* pada proses promosi pegawai, berdasarkan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor Per.U/KH.306/III/1/KA-2019 tentang Mutasi Jabatan. *Job grade* mengacu pada peringkat jabatan yang ditetapkan

Equal Employment Opportunity [OJK F.18]

KAI ensures equal employment opportunities for prospective employees. This is implemented, among others, through the SOE Joint Recruitment Program for the Best Youths of Papua and West Papua. In addition, KAI recruitment also accommodates applicants with disabilities in the SOE Joint Recruitment Program.

KAI provides equal employment opportunity not only for prospective employees but also for existing employees without any discriminatory practices. In ensuring that job opportunities are given objectively, KAI implements *Job Grade* and *Job Class* policy in the employee promotion process, based on The Regulation of the Board of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. Per.U/KH.306/III/1/KA-2019 concerning Position Changes. *Job grade* is the rank

sebagai pedoman untuk pengaturan jalur karier dan program pengembangan bagi pegawai. Adapun, *job class* merupakan peringkat jabatan dalam suatu tingkatan berdasarkan dimensi pekerjaan sebagai pedoman untuk penetapan penghasilan atau remunerasi pegawai.

Kesempatan Bekerja bagi Masyarakat Adat atau Komunitas Lokal

KAI menjamin bahwa proses rekrutmen yang dilakukan senantiasa memberikan kesempatan yang setara bagi masyarakat adat ataupun komunitas lokal di sekitar area operasi Perseroan. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen KAI untuk berkontribusi dalam pemenuhan SDGs, khususnya bagi target pengentasan kelaparan melalui upaya pemberdayaan ekonomi. Di samping itu, pemberian kesempatan bekerja bagi masyarakat adat maupun komunitas lokal merupakan wujud komitmen KAI dalam menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, sebagai pemangku kepentingan yang penting dan menerima dampak langsung dari aktivitas operasi Perseroan.

Pada 2022, KAI mengimplementasikan pemenuhan kesempatan bekerja bagi masyarakat adat atau komunitas lokal melalui rekrutmen pada daerah-daerah proyek pengembangan perkeretaapian, yang terselenggara pada job fair Divre III Palembang dan Divre IV Tanjung Karang, dengan prioritas penempatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di proyek perkeretaapian Sumbagsel. Rekrutmen tersebut dilaksanakan pada 20-22 September 2022, dengan sosialisasi yang dapat diakses pada alamat web <https://recruitment.kai.id> pada 13 September 2022.

Kesempatan Bekerja bagi Pegawai Penyandang Disabilitas

Kesempatan Bekerja bagi Pegawai Penyandang Disabilitas Sebagai bagian dari upaya menyeluruh dalam menghadirkan kesempatan bekerja yang inklusif, KAI telah memberikan kesempatan bekerja yang setara bagi pegawai penyandang disabilitas. Pemberian kesempatan bekerja bagi pegawai penyandang disabilitas untuk periode 2022 direalisasikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor SK.U/KH.102/VII/1/KA-2022 tentang Penetapan Kelulusan Pengadaan Pekerja Bersumber dari Program Perekrutan Bersama BUMN Kategori Disabilitas melalui Forum Human Capital Indonesia di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tahun 2022

of position that is determined as a guideline for setting career paths and development programs for employees. Meanwhile, *jobs class* is a ranking of positions in a level based on job dimensions as a guideline for determining employee salary or remuneration.

Job Opportunities for Indigenous Peoples or Local Communities

KAI ensures that the recruitment process always provides equal opportunities for indigenous peoples or local communities around the Company's operational areas. This is part of KAI's commitment to contributing to the SDGs achievement, especially for the target of alleviating hunger through economy empowerment. In addition, providing work opportunities for indigenous peoples and local communities is a manifestation of KAI's commitment to providing economic benefits to the surrounding community, as important stakeholders and receiving direct impacts from the Company's operating activities.

In 2022, KAI provided job opportunities for indigenous peoples or local communities through recruitment in the railway development project areas, which were held at the Divre III Palembang and Divre IV Tanjung Karang job fairs, with priority placement to meet the needs of employees in the Sumbagsel railway project. The recruitment was held on September 20-22, 2022, with dissemination that can be accessed at the web address <https://recruitment.kai.id> on September 13, 2022.

Job Opportunities for Employees with Disabilities

As part of a comprehensive effort to provide inclusive employment opportunities, KAI has provided equal employment opportunities for employees with disabilities. Provision of work opportunities for employees with disabilities in 2022 was realized based on the Decree of the Board of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. SK.U/KH.102/VII/1/KA-2022 concerning Determination of Acceptance for Procurement of Workers Sourced from the Joint SOEs Recruitment Program for Disabilities through the Indonesian Human Capital Forum within PT Kereta Api Indonesia (Persero) in 2022.

Pada 2022, KAI melakukan rekrutmen terhadap 3 (tiga) orang pegawai penyandang disabilitas dengan rincian sebagai berikut:

In 2022, KAI recruited 3 (three) employees with disabilities with the following details:

No.	Tempat Kedudukan / Assigned Area	Program Rekrutmen / Recruitment Program	Ragam Disabilitas / Type of Disabilities
1	DAOP II Bandung	PPB BUMN Kategori Penyandang Disabilitas Tahun 2022 / SOEs PPB for People with Disabilities in 2022	Kesulitan dalam menggunakan tangan kanan. / Difficulty in using the right hand.
2	DAOP II Bandung	PPB BUMN Kategori Penyandang Disabilitas Tahun 2022 / SOEs PPB for People with Disabilities in 2022	Disabilitas daksa, telapak tangan kiri menggepal dan sulit dibuka. / Physical disability, left palm clenched and difficult to open.
3	DAOP I Jakarta	PPB BUMN Kategori Penyandang Disabilitas Tahun 2022 / SOEs PPB for People with Disabilities in 2022	Kesulitan berkomunikasi secara verbal sehingga sering mengulang-ulang kata saat bicara (<i>stuttering</i>). / Difficulty in verbal communication with the tendency of repeating words (<i>stuttering</i>)

Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa [OJK F.19]

Sampai dengan 31 Desember 2022, tidak terdapat insiden penggunaan tenaga kerja anak serta tenaga kerja paksa di dalam aktivitas operasional Perseroan.

KAI memiliki komitmen menerapkan upaya preventif guna mencegah insiden penggunaan tenaga kerja anak terjadi di lingkungan Perseroan, melalui kebijakan dan pelaksanaan rekrutmen sesuai Keputusan Direksi Nomor PER.U/KH.102/V/1/KA-2021 tanggal 07 Mei 2021. Di dalam kebijakan tersebut telah disebutkan bahwa salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Pelamar Pengadaan Pekerja melalui jalur reguler tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) adalah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 25 (dua puluh lima) tahun.

Penerapan kebijakan tersebut sekaligus merupakan jaminan bahwa KAI tidak mempekerjakan tenaga kerja anak, dan karenanya, tiap-tiap tenaga kerja telah cukup usia untuk terhindar dari praktik tenaga kerja paksa.

Lebih dari itu, KAI melakukan upaya pencegahan atas terjadinya praktik kerja di bawah paksaan, antara lain dengan menjamin pemberian cuti dan hari libur bagi pegawai sesuai regulasi yang berlaku. Hak cuti dan hari libur yang diberikan antara lain berupa cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti keguguran, cuti membaptiskan anak, cuti menikah anak, cuti isteri melahirkan, cuti diluar tanggungan, cuti besar, cuti haid, cuti keagamaan, cuti menikah, cuti mengkhitan anak, cuti menghadiri wisuda anak dan cuti keluarga meninggal.

Child Labor and Forced Labor [OJK F.19]

As of December 31, 2022, there were no incidents of child labor or forced labor in the Company's operations.

KAI is committed to preventing incidents of child labor at the Company, through policies and implementation of recruitment in accordance with Board of Directors Decree No. PER.U/KH.102/V/1/KA-2021 dated May 7, 2021. The policy regulates that employee candidates with High School (SLTA) education must be at least of 18 (eighteen) years old and at most of 25 (twenty five) years old.

The implementation of this policy also ensures that KAI does not employ child labor, and therefore, each employee is in of a decent age to avoid forced labor practices.

In addition, KAI makes efforts to prevent work practices under coercion by guaranteeing the provision of leave and holidays for employees in accordance with applicable regulations. The rights of leave and holidays provided include annual leave, sick leave, maternity leave, miscarriage leave, child baptism leave, leave for marriage of own's children, leave for attending wife in giving birth, unpaid leave, sabbatical, menstruation leave, religious leave, marriage leave, leave for circumcision for child, leave for attending child's graduation and leave for family member passing.

Kebijakan Remunerasi Pegawai [GRI 2-19]

KAI menerapkan kebijakan remunerasi bagi seluruh pegawai Perseroan, sesuai standar pemenuhan kebutuhan hidup serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penetapan besaran gaji pegawai. Uraian kebijakan remunerasi yang berlaku bagi pegawai KAI dapat dilihat pada bab Tinjauan Fungsi Pendukung Bisnis, subbagian Sumber Daya Manusia.

Pemenuhan Kesejahteraan Pegawai setelah Berakhirnya Masa Kerja

KAI memiliki komitmen untuk menerapkan pemenuhan kesejahteraan pegawai secara menyeluruh, hingga setelah berakhirnya masa kerja. Uraian program pensiun bagi pegawai KAI dapat dilihat pada bab Tinjauan Fungsi Pendukung Bisnis, subbagian Sumber Daya Manusia.

Program Cuti Melahirkan [GRI 401-3]

Program cuti melahirkan bagi pegawai KAI diberikan sebagai upaya menyeluruh dalam memastikan pemenuhan hak-hak pegawai, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. KAI memberikan hak cuti melahirkan bagi pegawai, baik bagi pegawai perempuan maupun laki-laki. Pegawai perempuan yang melahirkan mendapatkan hak cuti sejumlah 3 (tiga) bulan, sedangkan pegawai laki-laki dengan istri melahirkan mendapatkan hak cuti sejumlah 3 (tiga) hari kerja. Pemberian cuti melahirkan bagi pegawai KAI diatur melalui Peraturan Direksi Nomor PER.U/KH.201/IX/1/KA-2022 tentang Izin Tidak Masuk Bekerja dan/atau Tidak Melakukan Pekerjaan.

Pada 2022, KAI memberikan hak cuti melahirkan bagi sejumlah 112 pegawai perempuan dan bagi sejumlah 1.365 pegawai laki-laki dengan istri yang melahirkan.

Upah Minimum Regional [OJK F.20]

KAI menjamin bahwa seluruh pegawai telah mendapatkan hak pemberian upah sesuai ketentuan upah minimum berdasarkan ketetapan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, tanpa praktik diskriminatif khususnya terkait latar belakang identitas pegawai. Atas hal itu, Perseroan memastikan bahwa upah yang diterima oleh pegawai pada tingkat paling rendah telah memenuhi atau melebihi besaran upah minimum, sebagai wujud komitmen KAI dalam menyalurkan nilai ekonomi bagi pegawai sebagai pemangku kepentingan.

Policy on Employee Remuneration [GRI 2-19]

KAI implements a remuneration policy for all of the Company's employees, based on the life standard and the applicable laws and regulations regarding the determination of the amount of employee salaries. The remuneration policy for KAI employees is described in the Business Support Functions Overview chapter, Human Resource sub-section.

Promoting Employee Welfare after the End of Working Period

KAI is committed to promoting employee welfare as a whole, until after the end of the working period. The pension program for KAI employees is described in the Business Support Functions Overview chapter, Human Resources sub-section.

Parental Leave Program [GRI 401-3]

The parental leave program for KAI employees is provided as a comprehensive effort to ensure the fulfillment of employee rights, in accordance with applicable laws and regulations. KAI provides employees with parental leave rights, both for female and male employees. Female employees in labor are entitled to 3 (three) months off, while male employees whose wives are in labor are entitled to 3 (three) days off. Provision of parental leave for KAI employees is regulated by Regulation of the Board of Directors No. PER.U/KH.201/IX/1/KA-2022 concerning Permission not to Work and/or not to do Work.

In 2022, KAI gave paternal leave for 112 female employees and 1,365 male employees whose wives are in labor.

Regional Minimum Wage [OJK F.20]

KAI guarantees that all employees have received appropriate wages in accordance with the minimum wage provisions based on the stipulations of the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia, without any discriminatory practices especially related to employee identity backgrounds. Thus, the Company ensures that the wages received by employees at the lowest level meet or exceed the minimum wage, as a form of KAI's commitment to distributing economic value to employees as stakeholders.

Perbandingan UMP dan Imbah Jasa Pegawai Tingkat Terendah Comparison of UMP and Lowest Level Employee Salary

No.	Unit Usaha / Business Unit	Provinsi/Daerah / Province/Region	Upah Minimum Provinsi / Provincial Minimum Wage	Imbah Jasa Pegawai Tingkat Terendah (Dalam Rupiah) / Lowest Level Employee Salary (In Rupiah)
1	Daop 1	Kota Jakarta / Jakarta City	4.416.186	5.536.351
2	Daop 2	Kota Bandung / Bandung City	3.742.276	5.019.375
3	Daop 3	Kota Cirebon / Cirebon City	2.271.201	5.048.229
4	Daop 4	Kota Semarang / Semarang City	2.810.025	5.019.375
5	Daop 5	Kab. Banyumas / Banyumas Regency	1.970.000	5.048.229
6	Daop 6	Kota Yogyakarta / Yogyakarta City	2.069.530	5.009.375
7	Daop 7	Kota Madiun / Madiun City	1.954.705	5.019.375
8	Daop 8	Kota Surabaya / Surabaya City	4.300.479	5.048.229
9	Daop 9	Kab. Jember / Jember Regency	2.355.662	5.030.881
10	Divre 1	Kota Medan / Medan City	3.222.556	5.048.229
11	Divre 2	Kota Padang / Padang City	2.484.041	5.048.229
12	Divre 3	Kota Palembang / Palembang City	3.270.093	5.048.229
13	Divre 4	Kota Bandar Lampung / Bandar Lampung City	2.739.983	5.048.229

Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman [OJK F.21]

KAI menjamin tersedianya lingkungan bekerja yang layak dan aman bagi seluruh pegawai. Hal tersebut dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas bagi pegawai, antara lain berupa fasilitas kesehatan yang memberikan layanan kesehatan bagi pegawai serta keluarga pegawai, yaitu Klinik Mediska. Lebih dari itu, KAI menyediakan sarana dan prasarana olahraga bagi pegawai pada kantor pusat dan daerah yang sekaligus dimanfaatkan sebagai sarana pencapaian prestasi olahraga perusahaan. KAI juga memberikan pembinaan kesenian dan kegiatan keagamaan bagi pegawai, khususnya di kantor pusat.

Perseroan menyediakan fasilitas kerja yang layak bagi pegawai dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang nyaman, bersih, dan aman, berupa ruang kerja, toilet, ruang makan, gedung dengan fasilitas deteksi asap, tempat parkir, tempat ibadah, serta fasilitas pembuangan sampah yang memadai dan dapat digunakan oleh seluruh pegawai. KAI menjaga kebersihan kantor secara terjadwal melalui penugasan *office boy*, yang bertugas mengelola kebersihan area kerja setiap harinya baik area dalam maupun luar ruangan.

Decent and Safe Work Environment [OJK F.21]

KAI ensures the availability of a decent and safe work environment for all employees through the provision of facilities for employees, including in the form of health facilities that provide health services for employees and their families, namely the Mediska Clinic. In addition, KAI provides sports facilities and infrastructure for employees at the head office and regional offices which are also used as a means to realize the Company's sporting achievements. KAI also provides training of arts and religious activities for employees, especially at the head office.

The Company provides similar work facilities for employees by providing comfortable, clean and safe facilities in the form of work spaces, toilets, dining rooms, buildings with smoke detection facilities, parking lots, places of worship, and proper waste disposal facilities which are adequate and accessible for all employees. KAI maintains office cleanliness on a scheduled basis through by assigning office boy in charge of managing the cleanliness of the work area daily for both indoor and outdoor areas.

Sebagai respons terhadap situasi pandemi Covid-19, KAI menyediakan sejumlah fasilitas kebersihan dan kesehatan, meliputi tempat cuci tangan, alat pengukur suhu, *disinfectant*, *handsanitizer*, serta membagikan masker sesuai standar bagi pegawai. Penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan dapat secara maksimal meminimalisasi penyebaran virus di area kerja, untuk melindungi pegawai dari risiko penularan. Seiring hal itu, pada ruang-ruang tertentu yang berpotensi terjadi keramaian, KAI memberikan tanda atau instruksi jaga jarak guna menghindari terjadinya kerumunan yang padat dan terlalu lama.

Aspek kenyamanan pegawai di tempat kerja merupakan salah satu perhatian manajemen KAI. Di samping memastikan tempat kerja pegawai senantiasa bersih dan aman dari risiko kesehatan, KAI menyediakan fasilitas lain bagi pegawai, berupa tempat ibadah, kantin, ruang makan/*pantry*, area terbuka hijau, serta tempat parkir yang luas dan nyaman.

Keberadaan Komunitas Pegawai Perempuan

KAI sudah memiliki komunitas yang menghimpun pegawai perempuan sebagai wadah inklusif pekerja dalam meningkatkan kemampuan dan kepemimpinan, berupa Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati Kereta Api (PIKKA). Sampai dengan saat laporan ini dipublikasikan, KAI telah menetapkan kepengurusan PIKKA Pusat melalui Surat Keputusan Ketua Umum Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati Kereta Api Nomor 003/PIKKA-P/SKEP/II/2023 tentang Pengangkatan Pengurus PIKKA Pusat Antar-Waktu Januari 2023-Desember 2024.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja [GRI 403]

KAI memiliki komitmen yang kuat untuk senantiasa menjaga serta meningkatkan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh pegawai. KAI menerapkan standarisasi yang menjamin terpenuhinya keselamatan, kesehatan, dan keamanan di lingkungan kerja sesuai Standar Operasional Perusahaan (SOP). Hal tersebut tercermin melalui penerapan program *promotive* dan *preventive* kepada pekerja berupa *Medical Check Up* Tahunan, Pemeriksaan kebugaran pekerja, pemeriksaan Awak Sarana Perkeretaapian sebelum berdinam, dan Sosialisasi terkait isu penyakit dan/atau Kesehatan untuk pekerja dan keluarga pekerja, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat, baik bagi pegawai maupun penumpang, sebagai upaya KAI dalam meminimalisasi penyebaran penyakit menular di area operasional.

As a response to the Covid-19 pandemic, KAI has provided a number of hygiene and health facilities, such as hand washing facilities, temperature gauges, disinfectants, hand sanitizers, and distribution of proper masks for employees. The provision of these facilities is expected to optimally minimize the spread of the virus at work and protect employees from the risk of transmission. Furthermore, in certain spaces with potential of crowds, KAI gives signs or instructions to keep a safe distance to avoid dense crowds for a long period of time.

The aspect of employee comfort at work is one of KAI's management concerns. In addition to ensuring that employees workplaces are always clean and safe from health risks, KAI provides other facilities for employees, in the form of places of worship, canteens, dining/*pantry* rooms, green open areas, as well as large and comfortable parking areas.

Female Employee Community

KAI has a community that brings together female employees as an inclusive forum for workers to improve their capabilities and leadership, in the form of the Railway Employees' Wives Association (PIKKA). By the time this report was published, KAI has determined the management of the Central PIKKA through the Decree of the Head of the Railway Employees' Wives Association No. 003/PIKKA-P/SKEP/II/2023 concerning the Appointment of the Central PIKKA Inter-time Management January 2023-December 2024.

Occupational Safety and Health [GRI 403]

KAI has a strong commitment to always maintain and improve the quality of occupational safety and health for all employees. KAI implements standards that ensure the fulfillment of safety, health and security at work according to the Company's Operating Standards (SOP). This is reflected through the implementation of promotive and preventive programs for workers in the form of annual medical check-ups, worker fitness checks, inspections for railway facility crews before serving, and outreach regarding disease and/or health issues for workers and their families, as well as implementing strict health protocols. both for employees and passengers, as KAI's efforts to minimize the spread of infectious diseases in operational areas.

Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kesehatan pegawai, KAI memiliki fasilitas kesehatan berupa Klinik Mediska yang memberikan layanan kesehatan bagi pegawai, keluarga pegawai, dan masyarakat. Pemberian fasilitas kesehatan tersebut diatur melalui Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.A/KL.104/I/1/KA-2019 tentang Standardisasi Minimum Fasilitas Klinik Mediska. Per 31 Des 2022, terdapat 54 Klinik Mediska yang dikelola KAI yang tersebar di seluruh wilayah operasional KAI. Di samping itu, KAI memberikan jaminan kesehatan bagi pegawai, keluarga pegawai, hingga calon pegawai, yang diatur melalui Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KH.405/XI/1/KA-2020 tentang Jaminan Kesehatan. Dengan mengacu pada Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KI.103/I/1/KA-2021 tanggal 19 Januari 2021 Tentang Standar Stasiun, setiap stasiun memiliki Fasilitas Pos Kesehatan atau P3K untuk penanganan pertama pada kecelakaan dan insiden gawat darurat yang terjadi pada penumpang maupun pegawai selama 24 jam. **[GRI 403-3]**

Seluruh aktivitas pelayanan kesehatan kerja KAI dilaksanakan di bawah tanggung jawab *Vice President Health*, sebagai unit khusus yang memastikan layanan kesehatan kerja dilaksanakan secara optimal, yaitu dengan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang baik, melalui penyusunan norma serta standar acuan, penetapan serta penerapan prosedur, hingga pemberian bimbingan serta supervisi bagi pihak pelaksana. KAI secara berkala melakukan penanganan yang sistematis, terarah, dan terukur terhadap kejadian luar biasa seperti adanya ancaman kesehatan akibat penyakit menular, wabah, epidemi, dan/atau pandemi dengan cara membuat perencanaan, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak terkait, memantau dan melakukan evaluasi.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja **[GRI 403-1]**

Sejak tahun 2020, KAI menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang mengacu pada (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian. Sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KS.102/III/1/KA-2020, SMKP wajib diterapkan secara berkelanjutan pada setiap satuan organisasi di Kantor Pusat dan Daerah. Ruang lingkup penerapan SMKP meliputi keselamatan perkeretaapian serta keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di seluruh lini bisnis KAI. Untuk mengevaluasi penerapan SMKP, KAI melakukan audit internal SMKP sesuai

As a manifestation of commitment to improving employee health, KAI has health facilities in the form of a Mediska Clinic which provides healthcare services for employees, families of employees, and the public. The provision of these health facilities is regulated through the Regulation of the Board of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. PER.A/KL.104/I/1/KA-2019 concerning Minimum Standardization of Mediska Clinic Facilities. As of December 31 2022, there were 54 Medical Clinics managed by KAI which were spread throughout KAI's operational areas. In addition, KAI provides health insurance for employees, families of employees, and prospective employees, which is regulated through Regulation of the Board of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. PER.U/KH.405/XI/1/KA-2020 concerning Health Insurance. With reference to the Regulation of the Board of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. PER.U/KI.103/I/1/KA-2021 concerning Station Standards, all stations must have Post Facilities or First Aid Posts for accidents and emergency incidents for passengers and employees, at the station for 24 hours. **[GRI 403-3]**

All healthcare services for KAI's occupational health and safety are under the responsibility of Vice President Health, as a special unit that ensures that occupational health services are carried out optimally by planning and coordinating the implementation of good policies, through the preparation of norms and reference standards, establishment and implementation of procedures, and provision of guidance and supervision for implementing parties. KAI regularly carries out systematic, directed and measurable management of extraordinary events such as health threats due to infectious diseases, outbreaks, epidemics and/or pandemics by planning, coordinating and collaborating with related parties, as well as monitoring and evaluating.

Occupational Health and Safety Management System **[GRI 403-1]**

Since 2020, KAI has been implementing a Railway Safety Management System (SMKP) which refers to (1) Government Regulation No. 50 of 2012 concerning Occupational Safety and Health Management System and (2) Minister of Transportation Regulation No. PM 69 of 2018. In accordance with Board of Directors Regulation No. PER.U/KS.102/III/1/KA-2020 which state that SMKP must be implemented on an ongoing basis in each organizational unit at the Head Office and Regional Offices. The scope of SMKP implementation includes railway safety and occupational safety and health that apply to all KAI business lines. To evaluate the implementation of the SMKP, KAI conducts an internal audit of the SMKP by the Directorate Safety and Security in 2022 in accordance with the Board

Peraturan Direksi Nomor PER.S/KS.102/IV/32/KA-2020 tentang Prosedur Audit Internal dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian yang telah dilakukan oleh Direktorat Keselamatan dan Keamanan pada tahun 2022. Di samping itu, KAI memastikan sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dimiliki telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012. Untuk tahun 2022, terdapat 3 (tiga) Balai Yasa yang telah mendapatkan sertifikasi bendera emas. KAI memastikan SMKPD telah diterapkan secara inklusif, yaitu dengan melibatkan perwakilan pegawai sebagai bagian dari panitia pengelola SMKPD.

Penanggulangan Keadaan Darurat dan Kecelakaan Besar pada Lingkungan Kerja

KAI menerapkan kebijakan penanggulangan keadaan darurat dan kecelakaan besar yang terjadi di lingkungan kerja. Penanganan awal pada kejadian kecelakaan mengacu pada Instruksi Direksi Nomor 13/KP.501/KA-2012 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di Lingkungan Kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero). Secara spesifik, kebijakan P3K di lingkungan KAI telah mengatur hal-hal terkait (1) petugas P3K di tempat kerja serta (2) fasilitas P3K di tempat kerja, mencakup persyaratan ruang dan kotak P3K.

Penanganan keadaan darurat dan kecelakaan besar di KAI dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/LL.507/VII/2/KA-2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Kondisi Darurat di Wilayah Stasiun, Depo, Balai Yasa dan Dalam Perjalanan Kereta Api serta Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KT.204/XII/1/KA-2018 tentang Standar Operasional Prosedur Tanggap Darurat Gangguan Operasional Kereta Api. Lebih dari itu, sebagai bagian dari penanggulangan keadaan darurat dan kecelakaan besar pada lingkungan kerja, KAI menerapkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Balai Yasa Sarana, Balai Yasa Prasarana, Dipo Sarana, Dipo Prasarana, dan Stasiun berdasarkan Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/ KS.101/XII/2/KA-2016.

Induksi Keselamatan kepada Pihak Internal ataupun Eksternal

KAI menerapkan induksi keselamatan sebagai kegiatan untuk mengomunikasikan informasi Keselamatan Perkeretaapian serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada SDM KAI, tamu, kontraktor, pengguna jasa, pemasok, dan pemangku kepentingan lain, yang diberikan pada saat baru bekerja dan/ atau baru pindah unit kerja. Penerapan induksi keselamatan tersebut diatur melalui Peraturan Direksi PT Kereta Api

of Directors Regulation No. PER.S/KS.102/IV/32/KA-2020 on Procedures of Interan Audit in Train Safety Management System. In addition, KAI ensures that the Occupational Health and Safety Management System certification is in accordance with Government Regulation No. 50 of 2012. In 2022, there were 3 (three) Balai Yasa that have received gold flag certification. KAI ensures that the SMKPD has been implemented inclusively by involving employee representatives as part of the SMKPD management committee.

Management of Emergency Situations and Major Accidents in the Work Environment

KAI implements a policy on dealing with emergencies and major accidents that occur within the work environment based on the Board of Directors' Instruction No. 13/KP.501/KA-2012 concerning First Aid in Accidents (P3K) in the Work Environment of PT Kereta Api Indonesia (Persero). Specifically, the first aid policy at KAI has regulated matters related to (1) first aid workers at work and (2) first aid facilities at work, including room requirements and first aid kits.

The handling of emergencies and major accidents at KAI is carried out in accordance with the PT Kereta Api Indonesia (Persero) Board of Directors Decree No. KEP.U/LL.507/VII/2/KA-2015 on Standard Operational Procedures for Handling Emergency Conditions in Station Areas, Depots, Balai Yasa and On Railroad Trips as well as PT Kereta Api Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. PER.U/KT.204/XII/1/KA-2018 on Standard Operational Procedures for Emergency Response to Train Operational Disruptions. Furthermore, as part of the management of emergencies and major accidents in the work environment, KAI carries out efforts to prevent and control fires at Balai Yasa Sarana, Balai Yasa Infrastructure, Dipo Sarana, Dipo Infrastructure, and Stations based on the Decree of the Board of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KEP.U/KS.101/XII/2/KA-2016.

Induction of Safety to Internal or External Parties

As of December 31, 2022, KAI implemented safety induction to provide information on Railway Safety and Occupational Safety and Health to KAI's HR, guests, contractors, service users, suppliers and other stakeholders, which was provided to new employees/employees transferred to new units. The application of safety induction is regulated through PT Kereta Api Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No.

Indonesia (Persero) Nomor PER-S/KS.102/IV/26/KA-2020 tentang Prosedur Induksi Keselamatan dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian.

Sesuai prosedur induksi keselamatan tersebut, materi yang diberikan pada kegiatan induksi mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan keselamatan perkeretaapian serta keselamatan dan kesehatan kerja Perusahaan;
2. Bahaya dan insiden yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan operasional perkeretaapian dan proses kerja SDM KAI;
3. Peran dan tanggung jawab SDM KAI, tamu, kontraktor, pengguna jasa, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya di dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian dan mengendalikan bahaya;
4. Persyaratan keselamatan perkeretaapian serta keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dipatuhi oleh SDM KAI, tamu, kontraktor, pengguna jasa, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya, seperti tanda/rambu yang harus dipatuhi, alat pelindung diri yang harus dikenakan, area kerja yang tidak boleh dimasuki, dan lain-lain;
5. Cara melaporkan jika ada bahaya, tindakan tidak aman, kondisi tidak aman, insiden dan/atau keadaan darurat;
6. Prosedur atau rencana tanggap darurat, seperti cara menyelamatkan diri, sarana jalan keluar dan evakuasi, titik kumpul dalam keadaan darurat, jenis alarm yang perlu diketahui (*audible* dan/atau *visual*), instruksi yang harus dipatuhi, serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika terjadi keadaan darurat;
7. Fasilitas yang disediakan oleh Perusahaan serta lokasinya, seperti kamar mandi, ruang ibu menyusui, kotak P3K, klinik atau layanan kesehatan, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pemadam api ringan, fasilitas ibadah, dan fasilitas lain yang dianggap perlu untuk diketahui; dan
8. Imbauan penyampaian saran, umpan balik, dan keluhan mengenai keselamatan perkeretaapian serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Pengungkapan Praktik Pelanggaran Ketentuan Ketenagakerjaan pada Karyawan pada Pihak Pemasok

KAI melakukan identifikasi terhadap praktik pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan pada karyawan pihak pemasok yang digunakan pada 2022. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tidak ditemukan adanya praktik pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan yang dilukan pihak pemasok atau mitra kerja KAI.

PER-S/KS.102/IV/26/KA-2020 concerning Safety Induction Procedures in the Railway Safety Management System.

In accordance with the safety induction procedure, the material provided in the induction activities includes the following:

1. Railway safety policies and the Company's occupational safety and health;
2. Hazards and incidents that may arise from the operational activities of the railways and KAI's HR work processes;
3. The roles and responsibilities of KAI's HR, guests, contractors, service users, suppliers and other stakeholders in implementing the Railway Safety Management System and controlling hazards;
4. Requirements for railway safety as well as occupational safety and health that must be complied with by KAI HR, guests, contractors, service users, suppliers and other stakeholders, such as signs/signs that must be obeyed, personal protective equipment that must be worn, work areas that are not may be entered, and others;
5. How to report any danger, unsafe acts, unsafe conditions, incidents and/or emergencies;
6. Emergency response procedures or plans, such as how to save yourself, means of exit and evacuation, gathering points in an emergency, types of alarms that need to be known (*audible* and/atau *visual*), instructions that must be obeyed, and what is allowed and what is not allowed carried out in the event of an emergency;
7. Facilities provided by the Company and their location, such as bathrooms, nursing rooms, first aid kits, clinics or health services, fire detection and alarm systems, light fire extinguishers, prayer facilities, and other facilities deemed necessary to know; And
8. Appeal for submission of suggestions, feedback and complaints regarding railway safety as well as occupational safety and health.

Disclosure of Practices Violating Employment Provisions on Employees on the Supplier

KAI has identified the practice of violating labor provisions for employees of suppliers used in 2022. Based on the results of this identification, no practices were found to violate labor provisions required by KAI's suppliers or work partners.

Daftar Pihak Pemasok Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Risiko Pekerjaan

Sampai dengan 2022, KAI belum melakukan klasifikasi terhadap pihak pemasok berdasarkan tingkat risiko pekerjaan. Dengan demikian, informasi mengenai daftar pihak pemasok berdasarkan klasifikasi tersebut tidak tersedia untuk diungkapkan pada bagian ini.

Pengidentifikasian Bahaya, Penilaian Risiko, dan Investigasi Insiden [GRI 403-2]

KAI menerapkan proses Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Keselamatan (IBPR) sebagai upaya preventif untuk memitigasi risiko kecelakaan kereta api, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan hidup. Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat Daerah diwajibkan melakukan proses IBPR, untuk selanjutnya diasesmen oleh Quality Controller sebelum disetujui oleh Manager unit terkait. Penerapan IBPR ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada dalam SMKP.

Secara lebih lanjut, bahaya yang telah diidentifikasi kemudian dinilai risikonya dan ditetapkan jenis pengendalian risikonya berdasarkan hierarki pengendalian risiko keselamatan, yang mencakup eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, dan alat pelindung diri. IBPR yang telah disetujui oleh *Manager* atau *Senior Manager* unit terkait akan dibahas di dalam Rapat Komite Keselamatan Tingkat Daerah yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan, yang hasilnya dikirim kepada Direktorat Keselamatan dan Keamanan.

Unit *Safety* Kantor Pusat secara berkala melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan proses IBPR yang berjalan di KAI. Melalui evaluasi tersebut, diambil keputusan-keputusan strategis yang dapat digunakan dalam upaya mitigasi risiko keselamatan ataupun perbaikan terhadap pelaksanaan proses BPR yang sedang berlangsung. Setiap tahunnya, Unit *Safety* menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, lokakarya, serta mendistribusikan materi IBPR di dalam pelatihan internal. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya terus-menerus dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kompetensi pegawai KAI terkait penerapan proses IBPR.

Selain upaya preventif melalui proses IBPR, Perseroan juga memfasilitasi pelaporan bahaya sebagai upaya korektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pelaporan bahaya tersebut difasilitasi melalui aplikasi *Safety Railway Information* (SRI), yang dapat diakses oleh seluruh pekerja. Untuk mengakomodir pelapor yang tidak memiliki akses ke aplikasi *Safety Railway Information* maka disediakan media pelaporan

List of Suppliers Based on Occupational Risk Classification

As of 2022, KAI has not classified suppliers based on the level of work risk. Thus, information regarding the list of suppliers based on this classification is not disclosed in this section.

Hazard Identification, Risk Assessment, and Incident Investigation [GRI 403-2]

KAI implements Hazard Identification Risk Assessment, and Risk Control (HIRARC) as a preventive measure to mitigate the risks of train accidents, work accidents, work-related illnesses and environmental pollution. All Heads of Technical Implementation Units (UPT) at the Regional level are required to carry out the IBPR process, to be further assessed by the Quality Controller before being approved by the Manager of the relevant unit. The application of IBPR has been carried out in accordance with the provisions in the SMKP.

Furthermore, the risks that have been identified are then assessed for their risk and type of risk control is determined based on the safety risk control hierarchy, which includes elimination, substitution, engineering, administration, and personal protective equipment. The HIRADC which has been approved by the Manager or Senior Manager of the related unit will be discussed at the monthly Regional Safety Committee Meeting, in which the meeting results are sent to the Directorate of Safety and Security.

The Head Office Safety Unit periodically conducts evaluations on the implementation of the HIRADC process at KAI. Strategic decisions for this evaluation are made as efforts to mitigate safety risks or improve the implementation of the ongoing BPR process. Every year, the Safety Unit organize disseminations, workshops, and distribution of HIRADC materials in internal training. This is done as a continuous effort to raise awareness, understanding, and competence of KAI employees on the implementation of the HIRADC process.

In addition to preventive efforts through the HIRARC, the Company also facilitates reporting of hazards as a corrective effort to prevent accidents from occurring. This hazard reporting is facilitated through the *Safety Railway Information* (SRI) application, which can be accessed by all workers. To accommodate reporters who do not have access to the *Safety Railway Information* application, media reporting is provided

melalui Whatsapp *Center Safety Raailway Information* yang nantinya akan diteruskan ke aplikasi SRI. KAI menerapkan kebijakan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan memberi jaminan bahwa tidak terdapat hukuman atau sanksi apa pun yang akan dikenakan bagi pelapor, berdasarkan Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/KK.301/XII/1/KA-2016.

Apabila terjadi insiden yang membahayakan keselamatan, Direktur Keselamatan dan Keamanan akan segera menetapkan tim khusus yang ditugaskan untuk melakukan proses investigasi terhadap insiden tersebut. Tim Investigasi tersebut kemudian akan segera menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan rangkaian proses investigasi meliputi pengumpulan bukti/data lapangan, pengumpulan keterangan saksi, pengolahan dan analisis data, penyusunan laporan hasil investigasi mencakup hasil kesimpulan penyebab terjadinya insiden, hingga penyusunan rekomendasi perbaikan dan pencegahan.

Dalam penerapan proses investigasi insiden kecelakaan kereta api, KAI menggunakan metode ORILIO (*Organisational Influences, Operational Risk Control, Local Factors, Individual Actions and Occurrence Events*). Adapun, terhadap insiden kecelakaan kerja, KAI menerapkan pendekatan SCAT (*Systematic Cause Analysis Techniques*).

Setelah seluruh proses investigasi selesai, Direktur Keselamatan dan Keamanan akan menyampaikan laporan hasil investigasi kepada seluruh pihak terkait. Selanjutnya, Unit *Safety* akan melakukan proses *monitoring* terhadap pelaksanaan *safety action* berdasarkan rekomendasi tindakan perbaikan dan pencegahan yang dihasilkan dari laporan hasil investigasi.

Layanan Kesehatan Kerja [GRI 403-3]

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, KAI memberikan layanan kesehatan kerja yang dapat diakses oleh seluruh pegawai. KAI menyediakan fasilitas kesehatan melalui Klinik Mediska, yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai, keluarga pegawai, hingga masyarakat. Klinik Mediska merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik KAI. Penyediaan layanan kesehatan kerja tersebut diatur berdasarkan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.A/KL.104/I/1/KA-2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Standardisasi Minimum Fasilitas Klinik Mediska.

through the Whatsapp Center for Safety Railway Information which will later be forwarded to the SRI application. KAI implements a policy to maintain the confidentiality of the reporter's identity and guarantees that no penalties or sanctions will be imposed on the reporter, based on the Decree of the Board of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KEP.U/KK.301/XII/1/KA- 2016.

In the event of an incident related to safety, the Director of Safety and Security immediately assigned a team assigned to carry out the investigation process of the incident. The assigned Investigation Team immediately went to the scene of the incident to carry out a series of investigative processes including collecting data evidence in the field, collecting witness statements, processing. and analyzing data, compiling a report on the results of the investigation which contained conclusions about the causes of the incident as well as recommendations for improvement and prevention.

In the investigation of incidents related to train accidents, KAI applied the ORILIO (Organizational Influences, Operational Risk Control, Local Factors, Individual Actions and Occurrence Events) method. Meanwhile, for the investigation of incidents related to occupational accidents, KAI applied the SCAT (Systematic Cause Analysis Techniques) approach.

After the entire series of investigation processes is completed, the Director of Safety and Security submitted a report on the results of the investigation to all relevant parties. Furthermore, the Safety Unit carried out a monitoring process related to the implementation of safety actions on recommendations for corrective and preventive actions provided based on the report on the results of the investigation.

Occupational Health Services [GRI 403-3]

In carrying out its operations, KAI provides occupational health services for its employee through employee facilities such as Mediska Clinic as healthcare facilities for employees, families of employees, and the public in accordance with the Regulation of the Board of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. PER.A/KL.104 /I/1/KA-2019 dated January 8, 2019 concerning Minimum Standardization of Mediska Clinic Facilities.

KAI juga melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja secara rutin melalui program *medical check up* tahunan, dan pemeriksaan Kesehatan pekerja sebelum berdinis kepada awak sarana perkeretaapian di Pos Pemeriksaan Kesehatan (POSRIKKES).

KAI also conducts routine employee health checks through an annual medical check-up program, and workers health checks before serving for railway facility crews at the Health Examination Post (POSRIKKES).

Kecelakaan Kerja dan Langkah Pencegahan Insiden Kematian [GRI 403-9]

KAI melakukan investigasi dan pendataan terhadap insiden kecelakaan kerja secara berkala, sebagai sebagai upaya berkesinambungan dalam meminimalisasi adanya risiko kecelakaan kerja serta risiko kematian berkenaan dengan aktivitas operasi Perseroan. Sebagai upaya preventif dalam memitigasi risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta insiden kematian di tempat kerja, KAI menerapkan proses Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Keselamatan (IBPR). Selain itu, KAI juga menerapkan SMKP, memastikan kehandalan peralatan kerja serta memberikan pelatihan K3 kepada pegawai secara berkala, sebagai upaya sistematis pencegahan insiden kecelakaan hingga kematian di tempat kerja.

Occupational Accidents and Measures to Prevent Fatal Incidents [GRI 403-9]

KAI conducts periodic investigations and data collection on incidents of work accidents, as a continuous effort to minimize the risk of work accidents and the risk of death related to the Company's operational activities. As a preventive measure in mitigating the risks of work accidents, occupational diseases and incidents of death at work, KAI implements a Hazard Identification, Safety Risk Assessment and Control (IBPR) process. In addition, KAI also implements SMKP. ensures work equipment adequacy, and provides OHS training to employees on a regular basis, as a systematic effort to prevent incidents of accidents and deaths in the workplace.

Pada 2022, terjadi kecelakaan kerja atas pegawai bukan dari kontraktor (pihak ketiga) yang melakukan pekerjaan di lingkungan KAI, dengan perincian sebagai berikut:

In 2022, there were work accidents for employees not from contractors (third parties) who do work at KAI, with the following details:

Rekapitulasi Kecelakaan Kerja

Recapitulation of Work Accidents

Uraian / Description	Satuan / Unit	2022	2021	2020
Kecelakaan Kerja / Work Accidents	Orang / Person(s)	7	6	17
Kematian / Death	Orang / Person(s)	-	-	-

Partisipasi, Konsultasi, dan Komunikasi Pegawai Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja [GRI 403-4]

KAI memiliki komite khusus yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai keselamatan perkeretaapian, keselamatan dan kesehatan kerja serta keamanan KAI di Daerah Operasi (Daop), Divisi Regional (Divre) dan Balai Yasa, yaitu Komite Keselamatan. Komite Keselamatan melaksanakan pertemuan secara berkala setiap bulan untuk membahas permasalahan terkait keselamatan dan keamanan pada wilayah-wilayah tersebut. Permasalahan yang tidak dapat diputuskan pada tingkat Komite Keselamatan Daop, Divre, dan Balai Yasa akan disampaikan kepada *Safety Action Group* (SAG) di Kantor Pusat untuk selanjutnya dilakukan pembahasan pada Rapat SAG.

Employee Participation, Consultation, and Communication Concerning Occupational Safety and Health [GRI 403-4]

KAI has a dedicated committee with duty and responsibility is to provide advice and considerations on railway safety, occupational safety and health as well as security for KAI in the Operations Area (Daop), Regional Division (Divre) and Balai Yasa, namely the Safety Committee. The Safety Committee holds monthly meetings to discuss issues on safety and security in these areas. Issues that cannot be resolved at the Safety Committee of Daop, Divre, and Balai Yasa will be submitted to Safety Action Group (SAG) at the Head Office for further discussion at the SAG Meeting.

Pelatihan Pegawai Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja [GRI 403-5]

KAI mengupayakan peningkatan kualitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan memberikan pelatihan internal dan pelatihan sertifikasi khusus bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan eksternal bagi pegawai. Pada pelatihan internal, KAI memberikan materi K3 sebagai materi wajib yang harus dikuasai pada penyelenggaraan pelatihan di *Training Center* KAI. Untuk pelatihan sertifikasi khusus, KAI bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan/ Sertifikasi eksternal yang sudah mendapatkan penunjukan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan lainnya sesuai kebutuhan. Daftar pelatihan K3 yang diberikan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Pelatihan K3 bagi Pegawai

No	Kode Diklat/ Diklap / Training Code	Jumlah Diklat/ Diklap / Number of Trainings	Jumlah Peserta / Total Participants	Keterangan / Description
1	Accident Review & Safety Awareness	14	301	DIKLAT
2	Ahli K3 Listrik Kemnaker / Electricity Expert of the Ministry of Manpower	1	1	DIKLAT
3	Ahli K3 Umum Kemnaker / General OHS Expert of the Ministry of Manpower	3	14	DIKLAT
4	K3 Kebakaran dan Prosedur Perawatan Pemeliharaan APAP sesuai SNI serta Penyulur Petir sebagai Proteksi Kebakaran / OHS on Fire and APAP Maintenance Maintenance Procedures according to SNI and Lightning Conductors as Fire Protection	1	6	DIKLAT
5	RAMS (<i>Reliability, Availability, Maintainability and Safety</i>)	1	9	DIKLAT
6	<i>Safety Champion</i>	2	97	DIKLAT
7	<i>Safety Inspector BNSP</i>	1	7	DIKLAT
8	Auditor Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja / Occupational Health and Safety Management System Auditor	1	5	DIKLAT
9	Teknisi K3 Bekerja Pada Ketinggian Level 1 / OHS Technician for Working at High Altitude Level 1	2	30	DIKLAT
10	Diklap <i>Basic Safety</i> / Basic Safety Training	17	280	DIKLAP
11	Diklap K3 Bekerja pada Ketinggian / OHS Training for Working at High Altitude	2	134	DIKLAP
12	Diklap K3L / OHS Training	5	142	DIKLAP
Jumlah / Total		47	980	

Pencegahan dan Mitigasi Dampak-Dampak Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang Secara Langsung Terkait Hubungan Bisnis [GRI 403-7]

KAI menerapkan proses Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Keselamatan (IBPR) sebagai upaya pencegahan dan mitigasi terhadap risiko keselamatan, meliputi risiko kecelakaan kereta api, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan hidup. IBPR telah diterapkan pada seluruh Daerah Operasional (DAOP), Divisi Regional (Divre) dan Balai Yasa Sarana. Hasil IBPR yang dilakukan pada level unit, kemudian dibahas secara

Employee Training pm Occupational Health and Safety [GRI 403-5]

KAI strives to improve the quality of Occupational Health and Safety (OHS) by providing internal training and special certification training in collaboration with external Training Institutes for employees. In internal training, KAI provides OHS material as mandatory material that must be mastered in conducting training at the KAI Training Center. For special certification training, KAI works with external Training/ Certification Institutions that appointed by the Ministry of Manpower, the National Professional Certification Agency (BNSP), and others as needed. The list of OHS training provided in 2022 can be seen in the following table:

OHS Training for Employees

No	Kode Diklat/ Diklap / Training Code	Jumlah Diklat/ Diklap / Number of Trainings	Jumlah Peserta / Total Participants	Keterangan / Description
1	Accident Review & Safety Awareness	14	301	DIKLAT
2	Ahli K3 Listrik Kemnaker / Electricity Expert of the Ministry of Manpower	1	1	DIKLAT
3	Ahli K3 Umum Kemnaker / General OHS Expert of the Ministry of Manpower	3	14	DIKLAT
4	K3 Kebakaran dan Prosedur Perawatan Pemeliharaan APAP sesuai SNI serta Penyulur Petir sebagai Proteksi Kebakaran / OHS on Fire and APAP Maintenance Maintenance Procedures according to SNI and Lightning Conductors as Fire Protection	1	6	DIKLAT
5	RAMS (<i>Reliability, Availability, Maintainability and Safety</i>)	1	9	DIKLAT
6	<i>Safety Champion</i>	2	97	DIKLAT
7	<i>Safety Inspector BNSP</i>	1	7	DIKLAT
8	Auditor Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja / Occupational Health and Safety Management System Auditor	1	5	DIKLAT
9	Teknisi K3 Bekerja Pada Ketinggian Level 1 / OHS Technician for Working at High Altitude Level 1	2	30	DIKLAT
10	Diklap <i>Basic Safety</i> / Basic Safety Training	17	280	DIKLAP
11	Diklap K3 Bekerja pada Ketinggian / OHS Training for Working at High Altitude	2	134	DIKLAP
12	Diklap K3L / OHS Training	5	142	DIKLAP
Jumlah / Total		47	980	

Prevention and Mitigation of Occupational Health and Safety Impacts Directly Linked by Business Relationships [GRI 403-7]

KAI implemented a Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control (HIRADC) to prevent and mitigate safety risks, such as the risk of train accidents, occupational accidents, occupational diseases, and environmental pollution. The HIRADC is implemented in all units, particularly in the Operational Areas (DAOP), Regional Divisions (Divre) and Balai Yasa Sarana. The HIRADC identified by the unit is routinely discussed in the monthly Regional Level Safety

rutin setiap bulan di dalam Rapat Komite Keselamatan Tingkat Daerah, untuk dilaporkan kepada Direktorat Keselamatan dan Keamanan. Proses IBPR diterapkan secara terintegrasi ke dalam sistem Manajemen Risiko Terpadu (*Enterprise Risk Management*) yang difasilitasi melalui aplikasi Sistem Manajemen Risiko Terpadu Kereta Api (SMARTKA).

KAI memiliki komitmen untuk terus menerapkan hingga mengembangkan proses IBPR melalui evaluasi serta perbaikan secara kontinu agar pengelolaan risiko keselamatan dapat tetap dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai [OJK F.22, GRI 404]

KAI memahami bahwa pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai merupakan investasi yang penting untuk dilakukan dalam keseluruhan upaya pengembangan sumber daya manusia, di samping sebagai wujud pemenuhan hak bagi pegawai untuk dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Atas dasar itu, secara periodik, KAI melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan dalam rangka meningkatkan kemampuan serta produktivitas pegawai, yang diharapkan mampu mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi pelanggan, hubungan kerja dengan mitra usaha, serta hubungan baik dengan masyarakat. Selain itu, pelatihan dan pendidikan bagi pegawai diharapkan mendorong penciptaan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif, yang akhirnya meningkatkan daya saing dan kinerja Perseroan bagi seluruh pemangku kepentingan. **[GRI 3-1]**

KAI memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai untuk dapat mengembangkan kompetensi tanpa praktik diskriminatif apa pun, dengan mengikutsertakan seluruh pegawai tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.

KAI melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan ketentuan internal berupa Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengembangan Karier. Sesuai ketentuan tersebut, pengembangan karier di dalam organisasi KAI diterapkan melalui program pendidikan dan pelatihan (Diklat), yang terdiri dari Diklat Pembentukan, Diklat Profesional, dan Diklat Managerial. Hal tersebut merupakan wujud upaya KAI dalam memberikan kesempatan yang terbuka dan setara bagi pegawai untuk dapat mengisi berbagai posisi jabatan, melalui sistem promosi, jenjang karier, serta jalur pengembangan karier yang objektif berdasarkan kompetensi yang dimiliki. **[GRI 3-2]**

Committee Meeting to be subsequently reported to the Directorate of Safety and Security. The HIRADC process is also integrated into the Enterprise Risk Management system facilitated through the application of the Railway Integrated Risk Management System (SMARTKA).

KAI is committed to always developing the HIRADC through evaluations for continuous improvement so that the management of safety risks could run effectively and efficiently.

Employee Capability Training and Development [OJK F.22, GRI 404]

KAI understands the importance of training and development of employee capabilities as an investment for the overall human capital development so as to fulfill the rights of employees to be able to develop their competencies. Thus, KAI regularly carries out training and education activities to improve employee capabilities and productivity, which is expected to be able to support the improvement of quality customer service, work relations with business partners, and good relations with the public. Training and education for employees is also expected to encourage the creation of excellent and competitive human capital, which ultimately increases the competitiveness and performance of the Company for all stakeholders. **[GRI 3-1]**

KAI provides equal opportunities for employees to be able to develop competencies without any discriminatory practices, by involving all employees without differentiating one from the other.

KAI implements employee competency training and development programs based on internal provisions in Decree of the Board of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) concerning Guidelines of Career Development System. In accordance with this policy, career development at KAI is implemented through an education and training programs (Diklat), which consists of Formation Training, Professional Training, and Managerial Training. This serves as KAI's efforts to provide open and equal opportunities for employees to be able to fill various positions, through a system of promotions, career paths, and objective career development paths based on their competencies. **[GRI 3-2]**

KAI memiliki divisi khusus yang bertanggung jawab dalam mengelola perencanaan program, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program, hingga merencanakan hasil pendidikan dan pelatihan, yaitu *Corporate Deputy Director of Training and Education*. Lebih dari itu, Divisi *Training & Education* bertugas memelihara fasilitas program, menyusun standarisasi kualitas dan sertifikasi/pengujian SDM sesuai kebutuhan Perseroan, serta melakukan pembinaan terhadap pengelolaan *Training Center*. **[GRI 3-2]**

Di tahun 2022, KAI melaksanakan program pengembangan kompetensi bagi pegawai yang dirancang dan dilaksanakan sejalan dengan pencapaian visi dan misi Perseroan tahun 2020-2024, di samping untuk mengakomodasi talenta baru bagi Perseroan. KAI telah melaksanakan program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh 14.404 pegawai, atau mencapai 52,30% dari keseluruhan pegawai. Untuk tahun 2022, KAI telah merealisasikan biaya pengembangan kompetensi pegawai mencapai Rp26,4 miliar atau meningkat dibanding realisasi pada tahun sebelumnya yang sejumlah Rp32,18 miliar.

Biaya Pengembangan Kompetensi

Untuk tahun 2022, KAI menganggarkan biaya program pengembangan kompetensi sejumlah Rp34,55 miliar atau meningkat sebesar 7,37% dibanding anggaran pada tahun sebelumnya. Dari biaya yang dianggarkan untuk tahun 2022, KAI merealisasikan biaya pengembangan kompetensi sejumlah Rp26,4 miliar atau meningkat sebesar 17,7% dibanding realisasi pada tahun sebelumnya, serta memenuhi 76,4% dari biaya yang dianggarkan.

No	Pos RKA / RKA Post	Program Biaya / Program Budget			Realisasi Biaya / Budget Realization		
		2022	2021	Persentase	2022	2021	Persentase
1	Pendidikan / Education	Rp34.553.559.000,-	Rp32.180.439.683,-	7,37%	Rp 26.399.080.000,-	Rp22.426.285.607,-	17,7%

Perseroan melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui survei kepuasan trainer, kepuasan program atau materi pelatihan, hingga kepuasan fasilitas pelatihan. Pengungkapan hasil evaluasi untuk tahun 2022 telah disajikan pada bab Profil Perusahaan, subbagian Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi. **[GRI 3-3]**

KAI has a dedicated division that is responsible for managing, planning, controlling and evaluating programs, as well as planning education and training results, namely the *Corporate Deputy Director of Training and Education*. In addition, the *Training & Education* division was also assigned to maintain the facilities; prepare quality standardization and certification/testing of HR in accordance with the needs of the Company as well as guidance on the *Training Center*. **[GRI 3-2]**

In 2022, KAI conducted competency development programs for employees that is designed and implemented in line with the achievement of the Company's vision and mission for 2020-2024, as well as to accommodate new talents for the Company. KAI has implemented a competency development program which is participated by 14,404 employees, or 52.30% of total employees. In 2022, KAI has realized employee competency costs of Rp26.4 billion, an increase compared to the previous year's realization of Rp32.18 billion.

Competency Development Costs

For 2022, KAI has allocated competency development program budget of Rp34.55 billion, an increase of 7.37% compared to the previous year's budget. From the 2022 budget, KAI realized competency development costs of Rp26.4 billion, an increase of 17.7% compared to the realization in the previous year, and fulfilled 76.4% of the budget.

The Company carries out periodic evaluations of the implementation of competency development through surveys of trainer satisfaction, satisfaction of training programs or materials, and satisfaction of training facilities. Information on the 2022 evaluation can be seen in the Company Profile chapter, *Competency Development Evaluation* sub-section. **[GRI 3-3]**

Rata-Rata Jam Pelatihan Per Tahun Per Pegawai [GRI 404-1]

Sebagai bagian dari upaya penerapan keuangan berkelanjutan, KAI menghitung dan mengungkapkan jumlah rata-rata jam pelatihan per tahun per pegawai. Hasil dari perhitungan tersebut akan menjadi dasar bagi upaya pengembangan program pelatihan untuk tahun selanjutnya. Untuk tahun 2022, KAI mengikutsertakan sejumlah 14.404 pegawai dalam program pelatihan, dengan rata-rata jam pelatihan mencapai 10 jam per pegawai.

Average Hours of Training Per Year Per Employee [GRI 404-1]

As an effort to implement sustainable finance, KAI calculates and discloses the average number of training hours per year per employee. The results of these calculations serve as the basis for efforts to develop training programs for the following year. In 2022, 14,404 employees of KAI participated in training programs, with an average training hour of 10 hours per employee.

Rata-rata Jam Pelatihan Pegawai Tahun 2022

Average Employee Training Hours in 2022

Uraian / Description	Jumlah Pegawai yang Memperoleh Pelatihan / Training Participants	Jam Pelatihan / Training Hours	Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Pegawai / Average Training Hours per Employee
Keseluruhan / Grand Total	14.404	144.040	10
Berdasarkan Jenis Kelamin / By Gender			
Laki-laki / Male	13.765	137.650	10
Perempuan / Female	639	6.390	10
Berdasarkan Kategori Jabatan / By Job Category			
EVP/CDD	19	190	10
VP/GM	69	690	10
SM/M	354	3.540	10
Assisstant Manager	1.243	12.430	10
Senior Supervisor	4	40	10
Supervisor	5.124	51.240	10
Pelaksana / Officer	7.591	75.910	10

Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan [GRI 416]

KAI memosisikan kesehatan dan keselamatan pelanggan sebagai aspek penting yang senantiasa dijaga, antara lain melalui komitmen untuk dapat memberikan keamanan produk dan jasa kepada seluruh pelanggan.

KAI memahami bahwa kesehatan dan keselamatan pelanggan merupakan aspek penting yang harus dijaga. Atas pemahaman tersebut, KAI berkomitmen untuk dapat memberikan jaminan keamanan produk dan jasa kepada seluruh pelanggan. KAI senantiasa mengutamakan penerapan standarisasi keselamatan, kesehatan, dan keamanan bagi seluruh pelanggan dan mitra usaha, dan secara terus-menerus mewujudkan peningkatan layanan kereta api baik pada angkutan kereta api jarak jauh, jarak menengah, maupun kereta api lokal. Lebih dari itu, KAI melaksanakan pengecekan berkala pada tiap-tiap sarana dan prasarana yang tersedia, sebagai upaya memastikan terpenuhinya aspek kesehatan dan keselamatan bagi pelanggan.

Customer Health and Safety [GRI 416]

For KAI, customer health and safety is an important aspect that is always maintained through a commitment to always being able to provide product and service safety to all customers.

KAI understands that customer health and safety is an important aspect that must be maintained. Thus, KAI is committed to being able to guarantee product and service safety to all customers. KAI always prioritizes the implementation of standardization of safety, health and security for all customers and business partners, and continuously improves rail services on long-distance, medium-distance and local trains. Furthermore, KAI carries out periodic checks on each available facility and infrastructure to ensure that the health and safety aspects of customers are met.

KAI menerapkan pemenuhan aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 355 Tahun 2020 tentang Penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun 2022, serta Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 346 Tahun 2020 tentang Penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan Angkutan Perintis Tahun 2022. **[GRI 3-1]**

Untuk tahun 2022, dengan kondisi pandemi yang berangsur membaik, KAI tetap menerapkan standar pelayanan bagi penumpang kereta api sesuai ketentuan Menteri Perhubungan beserta perubahannya, antara lain Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. 84 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

KAI secara serius memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan, khususnya di tengah situasi pandemi, melalui penerapan protokol kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Petugas KAI memastikan bahwa masing-masing penumpang telah mengenakan masker dengan benar serta sesuai standar yang ditentukan, di samping melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kerumunan baik di area stasiun maupun di dalam gerbong kereta. Sesuai Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. 84 Tahun 2022, KAI telah memastikan bahwa masing-masing pelanggan telah memenuhi persyaratan vaksinasi melalui penggunaan aplikasi PeduliLindungi, menyediakan fasilitas vaksinasi di stasiun, serta melaksanakan pengembalian tiket kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **[GRI 3-2]**

Komitmen KAI dalam mengupayakan kesehatan dan keselamatan pelanggan terbukti dengan tidak adanya insiden ketidakpatuhan terkait dampak kesehatan dan keselamatan produk/jasa. Sampai dengan 31 Desember 2022, KAI tidak mendapatkan peringatan, denda, atau hukuman apa pun akibat ketidakpatuhan terkait dampak kesehatan dan keselamatan produk/jasa. **[GRI 3-3]**

Penilaian Dampak Kesehatan dan Keselamatan dari Berbagai Kategori Produk dan Jasa **[GRI 416-1]**

Dengan situasi pandemi yang telah berangsur membaik, KAI menerapkan penilaian dampak kesehatan dan keselamatan penumpang sesuai kebijakan Menteri Perhubungan serta perubahannya. Petugas KAI yang bersinggungan secara langsung dengan pelanggan dipastikan telah mendapat

KAI implements the fulfillment of customer health and safety aspects based on the Decree of the Minister of Transportation No. KM 355 of 2020 concerning the Assignment to PT Kereta Api Indonesia (Persero) to Organize Public Service Obligations (PSO) for the Transport of People by Economy Class Trains in 2022, as well as Decree of the Minister of Transportation No. KM 346 of 2020 concerning Assignments to PT Kereta Api Indonesia (Persero) to Organize Pioneer Transportation in 2022. **[GRI 3-1]**

Along with the gradual improvement of pandemic in 2022, KAI continued to apply service standards for train passengers in accordance with the provisions of the Minister of Transportation and their amendments, including Circular Letter of the Minister of Transportation No. SE. 84 of 2022 concerning Guidelines for the Implementation of Domestic Travel by Rail Transportation during the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic.

KAI pays great attention to the health and safety of customers, especially during the pandemic by implementing health protocols in accordance with applicable regulations. KAI officers ensure that each passenger wears mask correctly and according to the specified standards, as well as prevent formation of crowds in the station area and in the train cars. According to the Circular Letter of the Minister of Transportation No. SE. 84 of 2022, KAI has ensured that each customer has met the vaccination requirements through using the PeduliLindungi application, provided vaccination facilities at stations, and carried out out return of train tickets in accordance with statutory provisions. **[GRI 3-2]**

KAI's commitment to customer health and safety is proven by the absence of incidents of non-compliance related to the health and safety as impacts of products/services. As of December 31, 2022, KAI did not receive any warnings, fines or penalties due to non-compliance on health and safety impacts of products/services. **[GRI 3-3]**

Assessment of the Health and Safety Impacts of Product and Service Categories **[GRI 416-1]**

With the gradual improvement of the pandemic, KAI has implemented an assessment health and safety impacts to passengers according to the Minister of Transportation policy and its amendments. KAI officers who have direct contact with customers are ensured to have been vaccinated up to the

vaksin serta vaksin *booster*, serta telah lulus penilaian Covid-19 sebelum bertugas. Adapun, pada angkutan kereta api barang, KAI mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan, dan Pembongkaran Barang dengan Kereta Api dan aturan perubahannya.

Insiden Ketidakpatuhan Sehubungan Dengan Dampak Kesehatan dan Keselamatan dari Produk dan Jasa [GRI 416-2]

Sampai dengan 31 Desember 2022, tidak terdapat insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi dan/atau peraturan yang menimbulkan peringatan, denda, atau hukuman kepada KAI.

ASPEK SOSIAL-KEMASYARAKATAN

Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar [OJK F.23]

Aktivitas operasional KAI secara umum menghadirkan sejumlah dampak positif berupa dukungan bagi peningkatan ekonomi daerah, antara lain disebabkan oleh aksesibilitas dan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Seiring hal tersebut, aktivitas operasional KAI menghadirkan dampak positif berupa dukungan terhadap percepatan pengembangan wilayah, penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan pemasok lokal, hingga berkontribusi dalam percepatan komunikasi penduduk antar-daerah. Aktivitas operasional KAI juga berkontribusi besar bagi pertumbuhan sektor logistik, seiring semakin mudahnya proses distribusi barang dari produsen menuju pihak konsumen. Sektor lain yang ikut menerima dampak positif adalah sektor pariwisata, karena moda transportasi kereta api mampu memenuhi kebutuhan wisatawan melalui kemudahan akses ke sejumlah destinasi wisata.

Sampai dengan tahun 2022, kereta api merupakan moda transportasi yang secara mendasar penting sebagai dukungan konektivitas antar-wilayah, dan telah menghadirkan kontribusi positif bagi aspek sosial dan ekonomi. Seiring situasi pandemi yang berangsur membaik di tahun 2022, KAI berkomitmen untuk tetap hadir sebagai solusi bagi kebutuhan masyarakat. Bagi KAI, berbagai keterbatasan pada situasi pandemi telah menghadirkan momentum untuk maju bersama. KAI menghadirkan kontribusi untuk ikut mendukung perputaran ekonomi masyarakat dengan membangun kolaborasi yang strategi dengan segenap pemangku kepentingan.

booster vaccines and have passed the Covid-19 assessment before being assigned. For freight transport, KAI refers to the provisions of the Minister of Transportation Regulation No. PM 48 of 2014 concerning Procedures for Loading, Arranging, Transporting and Unloading of Goods by Train and its amendments.

Incidents of Non-compliance concerning the Health and Safety Impacts of Products and Services [GRI 416-2]

As of December 31, 2022, there were no incidents of non-compliance with regulations and/or regulations that resulted in warnings, fines or penalties for KAI.

SOCIAL-COMMUNITY ASPECT

Impact of Operations on Local Communities [OJK F.23]

KAI's operations generally bring a number of positive impacts in improving the regional economy, partly for the increasing accessibility and mobility of the community. In this regard, KAI's operational activities have had a positive impact in accelerating regional development, absorbing local workers, using local suppliers, and accelerating inter-regional communication between locals. KAI's operations also contribute greatly to the growth of the logistics sector in line with the easier process of distributing goods from producers to consumers. Another sector that has received a positive impact is the tourism sector as rail transportation provides tourists with easy access to a number of tourism destinations.

As of 2022, rail transport is a fundamentally important mode of transportation to support inter-regional connectivity and has made a positive contribution to social and economic aspects. As the pandemic situation gradually improves in 2022, KAI is committed to continuing to be serve as a solution for public needs. For KAI, various limitations in the pandemic situation have provided momentum to move forward together. KAI contributes to the public economic cycle by building strategic collaborations with all stakeholders.

Aktivitas operasional KAI secara periodik menghasilkan nilai ekonomi yang kemudian disalurkan bagi pemangku kepentingan, antara lain melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). KAI melaksanakan program TJSL dengan orientasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan penyaluran manfaat yang terbagi ke dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program TJSL KAI antara lain KAI Sehat Sejahtera (bantuan peningkatan kesehatan dan percepatan penyaluran vaksin), KAI Pling (bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum serta pelestarian alam), KAI Sar-i (bantuan sarana ibadah), KAI Mengajar (bantuan pendidikan), KAI DungMas (bantuan korban bencana alam), KAI Sahabat Difabel dan Sosial Masyarakat, UMK Naik Kelas (pembinaan dan pendampingan UMK), Pelatihan dan Pendidikan UMK KAI, UMK On Station (pameran UMK), Pendanaan UMK, Sosialisasi Perlintasan dan Daerah Rawan Vandalisme, Semua Peduli Semua Terlindungi, serta Terimakasih KAI.

Lebih dari itu, KAI memiliki program TJSL lain berupa program *Rail Clinic* yang merupakan bakti sosial pelayanan pengobatan gratis dengan mengadakan sosialisasi tentang pandemi Covid-19 dan upaya-upaya pencegahannya, serta pembagian masker, *face shield*, dan vitamin kepada pelanggan di stasiun dan masyarakat di sekitar proses bisnis kereta api, dengan dilakukan di dalam kereta. *Rail Clinic* melayani kesehatan tingkat pertama seperti pemeriksaan umum, gigi, kehamilan, pemeriksaan laboratorium, pelayanan kefarmasian serta turut serta dalam penanganan tanggap bencana alam. *Rail Clinic* telah tersebar di 200 stasiun.

Meski demikian, aktivitas operasional KAI juga menghadirkan dampak negatif antara lain munculnya pelintasan sebidang jalur kereta api tanpa izin dan tanpa penjaga yang berpotensi menimbulkan kecelakaan serta kemacetan kendaraan akibat kendaraan yang dari ataupun menuju ke stasiun. Untuk memitigasi risiko timbulnya pelintasan liar atau tidak resmi di jalur kereta api, KAI selalu melakukan pengecekan rutin sepanjang lintasan. Ketika ditemukan adanya pelintasan liar atau tidak resmi, KAI berkoordinasi dengan perangkat masyarakat setempat untuk melakukan penutupan pelintasan sekaligus sosialisasi keselamatan perjalanan kereta api.

Pada tahun 2019-2022, KAI melakukan penutupan pelintasan sebidang sebanyak 1.240 pelintasan dengan pelaksanaan yang tersebar di setiap wilayah Daerah Operasi (Daop) dan Divisi regional (Divre). Selain itu, KAI juga telah melakukan

KAI's operations periodically generate economic value which is then distributed to stakeholders, including through the Social and Environmental Responsibility (TJSL) program. KAI implements the TJSL program with an orientation towards achieving Sustainable Development Goals (SDGs), manifested in benefit distribution activities which are divided into economic, social and environmental aspects. KAI's TJSL programs include KAI Sehat Sejahtera (assistance to improve health and accelerate the distribution of vaccines), KAI Pling (assistance for the development of public infrastructure and facilities as well as nature conservation), KAI Sar-i (assistance for worship facilities), KAI Mengajar (educational assistance), KAI DungMas (natural disaster victim assistance), KAI Friends of the Disabled People and Social-Community, MSE Upgrading (MSE coaching and mentoring), KAI MSE Training and Education, MSE On Station (MSE exhibition), MSE Funding, Dissemination on Crossing and Vandalism-Prone Area, / Care for All, All is Cared, and Thank You KAI.

Another TJSL program of KAI includes the *Rail Clinic* program as a social service for free medical services through dissemination of the Covid-19 pandemic and its prevention efforts, as well as distribution of masks, face shields, and vitamins to customers at stations and communities around the train business process in the carriage. *Rail Clinic* serves first-level health services such as general examinations, dentistry, pregnancy, laboratory examinations, pharmaceutical services as well as participating in natural disaster response management. *Rail Clinic* is available in over 200 stations.

However, KAI's operations also have a number of negative impacts, including the emergence of unlicensed and unguarded railroad crossings which have the potential to cause accidents and vehicle congestion due to vehicles going to or from the station. To mitigate the risk of illegal crossings on railroad tracks, KAI always conducts routine checks along the track. For any illegal or unofficial crossings are found, KAI coordinates with local community officials to close the crossings as well as disseminate the safety of train travel.

For the 2019-2022 period, KAI closed 1,240 illegal crossings in Operational Areas (Daop) and Regional Divisions (Divre). In addition, KAI has also conducted dissemination of safety at crossings every year. From 2019 to 2022, KAI has carried out

sosialisasi terkait keselamatan di pelintasan sebidang secara rutin setiap tahunnya. Untuk tahun 2019 sampai dengan 2022, sosialisasi yang telah dilakukan KAI adalah sejumlah 810 kali, dengan bekerja sama dengan komunitas, Dishub, Jasa Marga, Ditjenka, serta pihak kepolisian.

Identifikasi dan Strategi dalam Memenuhi Hak Masyarakat Adat atau Masyarakat Setempat [GRI 413-2]

KAI memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan pemenuhan hak-hak masyarakat di sekitar area operasional, sebagai unsur pemangku kepentingan yang berdampak secara signifikan bagi Perseroan. Secara khusus, pemenuhan hak-hak masyarakat sekitar juga mencakup pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat adat, sebagai wujud pengakuan KAI terhadap keberadaan tradisi dan warisan budaya dari berbagai komunitas etnis yang ada di wilayah Indonesia.

Sampai akhir 2022, seluruh aktivitas operasional KAI tidak memiliki persinggungan secara langsung dengan praktik ritual ataupun warisan budaya lokal masyarakat adat tertentu.

Pengaduan Masyarakat dan Konsumen [OJK F.24]

KAI memiliki sarana yang secara mudah dan terbuka dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk melaporkan atau menyampaikan pengaduan atas hal-hal yang bertentangan dengan etika, integritas, dan norma-norma yang dianut masyarakat; pengaduan atas dugaan pelanggaran peraturan atau tindakan yang mengganggu lingkungan hidup; hingga pengaduan-pengaduan lainnya. Pengaduan masyarakat tersebut dapat disampaikan melalui *Whistleblowing System* (WBS) yang dimiliki oleh KAI, di samping mekanisme lain seperti mekanisme pengaduan gratifikasi dan pelanggaran kode etik.

Pengungkapan mengenai mekanisme WBS, kebijakan gratifikasi, penegakan kode etik, serta seluruh pelanggaran yang masuk dan telah ditindaklanjuti untuk tahun 2022, telah disajikan pada bab Tata Kelola Perusahaan.

Selain itu, KAI memiliki saluran pengaduan untuk masyarakat mencakup konsumen jasa KAI berupa layanan *offline/onsite* di antaranya *Customer Service on Station* dan *Booth Penjualan Tiket* di Stasiun. Adapun, untuk layanan *online*, KAI memiliki layanan formal seperti alamat surat elektronik, telepon, dan pesan teks serta layanan melalui akun-akun resmi KAI pada media sosial, antara lain Instagram, Facebook, Twitter, hingga Tiktok.

810 disseminations, in collaboration with the community, the Transportation Agency, Jasa Marga, the Directorate General of Public Relations, and the Police.

Identification and Strategy in Fulfilling the Rights of Indigenous Peoples or Local Communities [GRI 413-2]

KAI is strongly committed to fulfilling the rights of the communities around its operational area, as a stakeholder element that has a significant impact on the Company. In particular, fulfilling the rights of local communities also includes fulfilling the rights of indigenous peoples, as a form of KAI's recognition of the existence of traditions and cultural heritage from various ethnic communities in Indonesia.

As of the end of 2022, all of KAI's operational activities did not have direct contact with ritual practices or the local cultural heritage of certain indigenous peoples.

Public and Consumer Complaints [OJK F.24]

KAI has facilities that can be easily and openly used by stakeholders to report or submit complaints on matters that are contrary to the ethics, integrity, and norms adopted by the community; complaints on the customer's allegations of regulations or actions that disturb the environment; and other complaints. Public complaints can be submitted through the *Whistleblowing System* (WBS) of KAI, in addition to other mechanisms such as gratuity complaint mechanisms and violations of the code of conduct.

Information on the mechanism of WBS, gratuity policies, enforcement of the code of conduct, as well as all incoming violation reports and followed up reports in 2022 can be seen in the Good Corporate Governance chapter.

KAI also has a complaint channel for the public including consumers of KAI services in the form of *offline/onsite* services including *Customer Service on Station* and *Ticket Sales Booth* at the Station. For *online* services, KAI has formal services of electronic mail address, telephone, and text messages as well as services through KAI's official accounts on social media, including Instagram, Facebook, Twitter, and Tiktok.

Untuk tahun 2022, KAI menerima sejumlah 29.106 pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan yaitu sejumlah 29.106. Angka tersebut menunjukkan bahwa KAI menindaklanjuti pengaduan yang masuk untuk tahun 2022 dengan tingkat penyelesaian mencapai 100%. Perincian mengenai hal tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

For 2022, KAI received 29,106 public complaints, most of which have been resolved in the amount of 29,106 complaints. This figure shows that KAI has followed up incoming complaints in 2022 with a completion rate of 100%. Details on this matter can be seen in the table below:

Jumlah Pengaduan yang Diterima Berdasarkan Media Pelaporan

Number of Complaints Received Based on Reporting Media

Media Pelaporan / Reporting Media	Jumlah Keluhan yang Diterima / Number of Complaints Received	Status
Customer Care Customer Service on Station	1.019	Close
Customer Care Direct (121)	24	Close
Customer Care Email (121)	8.716	Close
Customer Care Outbound (121)	1.758	Close
Customer Care Inbound Phone (121 Drc Bandung)	36	Close
Customer Care Inbound Phone (121 Jakarta)	747	Close
Customer Care Social Media (Facebook 121)	1.496	Close
Customer Care Social Media (Instagram 121)	1.963	Close
Customer Care Social Media (Twitter 121)	10.479	Close
Customer Care Web Lapor	50	Close
Customer Care Whatsapp Center (121)	2.818	Close
Jumlah	29.106	Close

*) Open Case adalah pengaduan yang masih dalam proses penyelesaian saat laporan dibuat. / Open Case is a complaint case that is still in progress during the preparation of this report
 **) Close Case adalah pengaduan yang sudah terselesaikan / Close Case is a complaint case that has been closed/completed

Insiden Pelanggaran Insiden Pelanggaran Hak-Hak Masyarakat Adat

Sampai dengan akhir 2022, tidak terdapat insiden pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang terjadi berkenaan dengan aktivitas operasional KAI. Tidak terdapat informasi mengenai mediasi yang tengah dilaksanakan atau insiden-insiden yang tidak lagi menjadi subjek tindakan untuk diungkapkan pada bagian ini.

Incidents of Violations of the Rights of Indigenous Peoples

As of the end of 2022, there were no incidents of violations of indigenous peoples' rights that occurred in connection with KAI's operational activities. There is no information regarding mediation being carried out or incidents that are no longer the subject of action to be disclosed in this section.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan [OJK F.25]

KAI melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan, dengan menyalurkan manfaat ekonomi, sosial, lingkungan, serta menerapkan pemenuhan pada aspek hukum dan tata kelola. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan yang terintegrasi, terarah, terukur dampaknya, serta bertanggung jawab, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan bisnis Perseroan.

Environmental Social Responsibility Activities [OJK F.25]

KAI implements the Social and Environmental Responsibility (TJSL) program as a form of commitment in supporting the achievement of sustainable development, by providing economic, social and environmental benefits, as well as compliance with legal and governance aspect. This is carried out based on the principles of management that are integrated, directed, measurable, and responsible, as an integral part of the Company's business approach.

Program TJSL KAI dilaksanakan dengan berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di Indonesia serta berpedoman pada ISO 26000, sebagai upaya menjaga pelaksanaan program tetap terukur, berdampak, dan berkelanjutan.

KAI's TJSL program is implemented with an orientation toward achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia and is guided by ISO 26000 to ensure that the program is measurable, impactful and sustainable.

KAI merupakan entitas BUMN, dan karenanya, melaksanakan program TJSL sesuai ketentuan di dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Sesuai ketentuan tersebut, program TJSL KAI diarahkan untuk memenuhi tujuan-tujuan sebagai berikut:





KAI is a SOE, and therefore, implements the TJSL program in accordance with the provisions in the Minister of SOE Regulation No. PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Program for State-Owned Enterprises. In accordance with this provision, the TJSL program KAI has the following objectives:








- Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.
- Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
- Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.





- Providing benefits for economic development, social development, environmental development as well as legal and corporate governance development.
- Contributing to the creation of added value for the company with principles that are integrated, directed, measurable, and accountable.
- Fostering micro and small businesses to be more resilient and independent as well as the community around the Company.

Untuk tahun 2022, KAI memetakan kegiatan-kegiatan TJSL ke dalam 17 butir Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs di Indonesia, dengan pengungkapan sebagai berikut:

In 2022, KAI has mapped TJSL activities into the 17 Sustainable Development Goals/SDGs in Indonesia, with the following details:

Jenis Kegiatan TJSL / TJSL Activity	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)	Penjelasan / Description	Capaian / Achievements
KAI DungMas (Perlindungan Masyarakat) / Community Protection)	TPB 1 	Bantuan untuk sosial kemasyarakatan. Alokasi Dana: Rp3.001.462.912,- Periode Pelaksanaan: Januari-Desember 2022. / Social-community assistance. Budget Allocation: Rp3,001,462,912 Implementation Period: January-December 2022	Telah dilaksanakan di seluruh Daop / Divre KAI / Telmplemented in all Daop/ Divre of KAI
KAI-Quick Respon (Bencana Alam / Natural Disaster)	TPB 2 	KAI Quick Respon program untuk melindungi masyarakat khususnya dalam bencana Alam. Alokasi Dana: Rp 42.000.000,- Periode Pelaksanaan: Januari-Desember 2022. / The KAI Quick Respond program to protect the community, especially in natural disasters. Budget Allocation: Rp42,000,000 Implementation Period: January-December 2022.	Telah dilaksanakan di Purwokerto, Pasaman Barat, Lumajang, Semarang, Garut dan Cianjur / Implemented in Purwokerto, West Pasaman, Lumajang, Semarang, Garut and Cianjur
KAI Sehat Sejahtera / KAI Health and Welfare	TPB 3 	Pemberian bantuan kesehatan kepada masyarakat disekitar proses bisnis Kereta Api dan mendukung program pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Alokasi Dana: Rp364.312.655,- Periode Pelaksanaan: Januari-Desember 2022. / Provision of health assistance to communities around the Railway business process and supporting government programs in dealing with the Covid-19 pandemic. Budget Allocation: Rp364,312,655 Implementation Period: January-December 2022.	Telah dilaksanakan di seluruh Daop / Divre KAI / Telmplemented in all Daop/ Divre of KAI
Sosialisasi Perlintasan dan Daerah Rawan Vandalisme / Dissemination on Crossing and Vandalism-Prone Areas	TPB 3 	Melakukan sosialisasi di sekitaran pintu perlintasan sebidang dengan memasang spanduk dan melalui pengeras suara kepada pengendara bermotor yang melintasi pintu perlintasan dan sosialisasi di Daerah Rawan sepanjang jalur KA. Alokasi Dana: Rp180.406.000,- Periode Pelaksanaan: Januari-Desember 2022. / Dissemination around crossing gates by installing banners and through loudspeakers to motorists crossing the gates and dissemination in Vulnerable Areas along railway tracks. Budget Allocation: Rp180,406,000,- Implementation Period: January-December 2022.	Telah dilaksanakan di seluruh Daop / Divre KAI / Telmplemented in all Daop/ Divre of KAI

Jenis Kegiatan TJSL / TJSL Activity	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)	Penjelasan / Description	Capaian / Achievements
KAI EduFriend / KA EduFriend	TPB 4 	Program peningkatan kualitas, pendampingan belajar, perbaikan sarana dan prasarana dalam belajar mengajar, memberikan beasiswa serta pelatihan-pelatihan untuk masyarakat. Alokasi Dana: Rp1.936.791.424,- Periode Pelaksanaan: Januari-Desember 2022. / Quality improvement programs, learning assistance, improvement of facilities and infrastructure in teaching and learning, providing scholarships and trainings for the community. Budget Allocation: Rp1,936,791,424,- Implementation Period: January-December 2022.	Telah dilaksanakan di seluruh Daop / Divre KAI / Templemented in all Daop/ Divre of KAI
Semua Peduli, Semua Terlindungi / Care for All, All is Cared	TPB 5 	Kampanye untuk mendorong upaya penghapusan kekerasan/ pelecehan seksual terhadap perempuan di atas KA melalui pembagian flyer/brosur dan pemasangan banner. Alokasi Dana: Rp23.250.000,- Periode Pelaksanaan: Januari-Desember 2022. / Campaign to encourage efforts to eliminate sexual violence/ harassment against women on trains through distribution of flyers/brochures and installation of banners. Budget Allocation: Rp23,250,000,- Implementation Period: January-December 2022.	Telah dilaksanakan di seluruh Daop / Divre KAI / Templemented in all Daop/ Divre of KAI
KAI-Pling (Peduli Lingkungan / Environmental Care)	TPB 11 	KAI - Pling (Kereta Api Peduli Lingkungan) program atas kepedulian KAI terhadap lingkungan, sarana dan prasarana umum, pengelolaan sampah, serta penanaman pohon yang berada di sekitar proses bisnis KA. Alokasi Dana: Rp1.607.610.237,- Periode Pelaksanaan: Januari-Desember 2022. / The KAI - Pling (Environmental Care) program is KAI's concern for the environment, public facilities and infrastructure, waste management, and planting trees around the railway business process. Budget Allocation: Rp1,607,610,237,- Implementation Period: January-December 2022.	Telah dilaksanakan di seluruh Daop / Divre KAI / Templemented in all Daop/ Divre of KAI
KAI Sar-i	TPB 11 	Program dukungan untuk masyarakat dalam meningkatkan kenyamanan dalam beribadah berupa pembangunan sarana ibadah. Alokasi Dana: Rp1.516.810.564,- Periode Pelaksanaan: Januari-Desember 2022. / Support programs for the community in increasing comfort in worship in the form of building worship facilities. Budget Allocation: Rp1,516,810,564,- Implementation Period: January-December 2022.	Telah dilaksanakan di seluruh Daop / Divre KAI / Templemented in all Daop/ Divre of KAI
KAI Go Green	TPB 11 	Program Pelestarian Alam, pengelolaan sampah, serta penanaman pohon yang berada di sekitar proses bisnis KAI. Alokasi Dana: Rp 1.176.360.220,- Periode Pelaksanaan: Januari-Desember 2022. / Program for Natural Conservation, waste management, and tree planting around KAI's business processes. Budget Allocation: Rp1,176,360,220 Implementation Period: January-December 2022.	Telah dilaksanakan di seluruh Daop / Divre KAI / Templemented in all Daop/ Divre of KAI
UMK Naik Kelas MiKA Next Class	TPB 8 	Pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada UMK KAI agar bisa naik kelas dengan memenuhi minimal 2 kriteria seperti Peningkatan jumlah pegawai, Peningkatan nilai pinjaman, Peningkatan kapasitas produksi, Peningkatan omzet, Pelibatan masyarakat sekitar untuk menghasilkan produk, Pemasaran produk diluar kota/negeri, dan atauMemperoleh sertifikat nasional/internasional. Alokasi Dana: Rp100.000.000,- Periode Pelaksanaan: Januari-Desember 2022. / Training and assistance provided to UMK KAI so to go to the next class by meeting at least 2 criteria such as increasing the number of employees; increasing loan value, increasing production capacity, increasing turnover, involving local communities to produce products, marketing products outside the city/country, and or obtaining certificates. national/international. Budget Allocation: Rp100,000,000 Implementation Period: January-December 2022.	Telah dilaksanakan kegiatan meliputi 30K UMK Go Online, Pelatihan Manajemen Keuangan, Pelatihan Penanganan Krisis Bagi UMKM, dan Pelatihan Innovation and Improvement Tahun 2022 sebanyak 23 mitra. Realisasi Dana : Rp118.738.000,- / Activities that have been implemented include 30K MSEs Go Online, Financial Management Training, Crisis Handling Training for MSMEs, and Innovation and Improvement Training in 2022 for 23 partners. Budget Realization: Rp118,738,000
Pelatihan dan Pendidikan UMK KAI MiKA Hasanah/ KAI MSE Training and Education MiKA Hasanah	TPB 8 	Pemberian Program sertifikasi mitra binaan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen kepada produk mitra binaan, program dimaksud meliputi kegiatan Sertifikasi Halal dan Produk Halal, Brand Operation dan Online Single Submission (OSS) kepada UMKM KAI. Alokasi Dana: Rp150.000.000,- Periode Pelaksanaan: Januari-Desember 2022. / Providing a fostered partner certification program that aims to increase the level of consumer confidence in the fostered partner's products, the program includes Halal Certification and Halal Products, Brand Operations and Online Single Submission (OSS) activities to KAI MSMEs. Budget Allocation: Rp150,000,000 Implementation Period: January-December 2022.	Telah dilaksanakan kegiatan meliputi Sertifikasi Halal dan Penyelia Halal Mitra Binaan KAI sebanyak 9 mitra, Sertifikasi Brand Operation BNSP LSP sebanyak 18 mitra. Realisasi Dana : Rp228.000.000,- / Activities that have been include Halal Certification and Halal Supervisors for KAI Fostered Partners of 9 partners, Brand Operation BNSP LSP Certification of 18 partners. Budget Realization: Rp228,000,000

Jenis Kegiatan TJSL / TJSL Activity	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)	Penjelasan / Description	Capaian / Achievements
UMK on Station / MSE on Station UMK On Station and Train	TPB 8 	Program yang diberikan bertujuan untuk mempromosikan produk mitra binaan dalam suatu event pameran yang rutin penyelenggaraannya setiap tahun di area bisnis KAI baik itu di stasiun KA atau museum lawang sewu. Alokasi Dana: Rp350.000.000,- Periode Pelaksanaan: Januari-Desember 2022. / This program aims to promote the products of fostered partners in an exhibition event which is held annually in the KAI business area at the train station or the Lawang Sewu Museum. Budget Allocation: Rp350,000,000 Implementation Period: January-December 2022.	Telah dilaksanakan pameran di 2 lokasi yaitu di Stasiun Madiun dan Festival Lawang Sewu serta dibuatkannya Digital Catalog Produk On Train. Realisasi Dana : Rp 302.920.270,- / Exhibitions have been held in 2 locations, namely at Madiun Station and Lawang Sewu Festival and the creation of a Digital Catalog of On Train Products. Budget Realization: Rp302,920,270
Pendanaan UMK / MSE Funding	TPB 8 	Program untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, Program dimaksud pemberian bantuan pinjaman modal usaha bagi UMK. Alokasi Dana: Rp8.350.000.000,- Periode Pelaksanaan: Januari-Desember 2022. / This program aims to improve the ability of micro and small business actors to become strong and independent. The program is intended to provide business capital loan assistance for MSEs. Budget Allocation: Rp8,350,000,000 Implementation Period: January-December 2022.	Realisasi penyaluran secara mandiri kepada mitra binaan baru sebanyak 75 Mitra Binaan sebesar Rp5.266.650.000,- / Realization of independent distribution to new fostered partners of 75 fostered partners in the amount of Rp. 5,266,650,000,- Realisasi penyaluran kolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebesar Rp. 1.800.000.000,- / Realization of distribution collaboration with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. was Rp1.800.000.000,-
MiKA Go Global	TPB 8 	Program yang mengikutsertakan mitra binaan dalam event pameran yang diselenggarakan oleh pihak eksternal dalam negeri maupun luar negeri yang bertujuan untuk memperkenalkan produk dari mitra binaan ke cakupan wilayah yang lebih luas. Alokasi Dana: Rp250.000.000,- Periode Pelaksanaan: Januari-Desember 2022. / This program involves fostered partners in exhibition events organized by domestic and foreign external parties that aim to introduce products from fostered partners to a wider area coverage. Budget Allocation: Rp250,000,000 Implementation Period: January-December 2022.	Telah dilaksanakan kegiatan The 22nd Jakarta Internasional Handicraft Trade Fair (InaCraft) Tahun 2022, dan Kegiatan KAI EXPO Tahun 2022. Realisasi Dana : Rp 126.361.250,- / The 22nd Jakarta International Handicraft Trade Fair (InaCraft) in 2022 and the KAI EXPO in 2022 have been held. Budget Realization: Rp126,361,250
Teras UMK / Teras UMK	TPB 8 	Program untuk mendukung kegiatan bagi para umk guna meningkatkan kemampuan dan menambah pendapatan bagi mitra dengan menyediakannya space di area komersial perusahaan/ Stasiun Besar KAI. Alokasi Dana : 150.000.000,- / This program is a support for MSEs to increase capabilities and increase income for partners by providing space in the commercial area of the Company/KAI Big Station. Budget Allocation: 150,000,000	Telah didirikan Teras UMK/Teras MiKA di Stasiun Bandung Selatan. Realisasi Dana: Rp 254.374.931,- / MSE Terrace/ MiKA Terrace has been established at South Bandung Station. Budget Realization: Rp254,374,931

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, program TJSL KAI dilaksanakan sebagai dukungan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs di Indonesia. KAI telah memetakan program TJSL tahun 2022 ke dalam 17 butir Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan skala 1 sampai 3, dengan 1 merepresentasikan tingkat “sedang” dan 3 merepresentasikan tingkat “sangat tinggi”. Hasil pengelompokan berdasarkan pemetaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

As previously mentioned, the KAI TJSL program is implemented to support the achievement of the Sustainable Development Goals/SDGs in Indonesia. KAI has mapped the 2022 TJSL program into 17 the Sustainable Development Goals based on a scale of 1 to 3, with 1 representing a "medium" scale and 3 representing a "very high" scale. The mapping results can be seen in the table below:

SDGs	Aksi / Action	Manfaat / Benefit	Dukungan KAI terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / KAI's Support for the Sustainable Development Goals	Dampak SDGs pada Bisnis KAI / Impact of SDGs in KA's Business	Prioritas SDGs KAI / KAI SDGs Priority
Tanpa Kemiskinan / No Poverty	• KAI Sahabat Difabel dan Sosial Masyarakat / KAI Friends of the Disabled People and Social-Community	Meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan masyarakat / Improving social welfare in the community.	**	**	**
Tanpa Kelaparan / Zero Hunger	• KAI-DungMas (Bencana Alam / Natural Disaster)	Memberikan bantuan kepada korban bencana serta memastikan kebutuhan pangan tercukupi / Providing assistance to disaster victims and ensure adequate food needs.	*	*	*

SDGs	Aksi / Action	Manfaat / Benefit	Dukungan KAI terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / KAI's Support for the Sustainable Development Goals	Dampak SDGs pada Bisnis KAI / Impact of SDGs in KAI's Business	Prioritas SDGs KAI / KAI SDGs Priority
Kehidupan Sehat dan Sejahtera / Good Health and Well-Being	<ul style="list-style-type: none"> KAI Sehat Sejahtera / KAI Health and Welfare Sosialisasi Perlintasan dan Daerah Rawan Vandalisme / Dissemination on Crossing and Vandalism-Prone Area 	Meningkatkan kesehatan penumpang, pegawai maupun masyarakat guna memutus tali penularan COVID-19 / Improving the health of passengers, employees and the public to break the transmission of Covid-19	***	***	***
Pendidikan Berkualitas / Quality Education	<ul style="list-style-type: none"> KAI Mengajar / KAI Teaching 	Memberikan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas guna meningkatkan semangat dan motivasi belajar / Providing equality in obtaining quality education in order to increase enthusiasm and motivation to learn	*	*	*
Kesetaraan Gender / Gender Equality	<ul style="list-style-type: none"> Semua Peduli, Semua Terlindungi / Care for All, All is Cared 	Mendorong upaya penghapusan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan di atas KAI / Encouraging efforts to eliminate sexual violence/harassment against women on trains	**	**	**
Pekerjaan Layak dan Petumbuhan Ekonomi / Decent Work and Economic Growth	<ul style="list-style-type: none"> UMK Naik Kelas / MSE Upgrading Pelatihan dan Pendidikan UMK KAI / KAI MSE Training and Education UMK On Station / MSE on Station Pendanaan UMK / MSE Funding 	Mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi mitra binaan KAI. / Supporting economic growth and welfare for KAI's foster partners.	***	***	***
Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan / Sustainable Cities and Communities	<ul style="list-style-type: none"> KAI-Pling (Peduli Lingkungan / Environmental Care) KAI Sar-I 	Meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal yang layak dan nyaman. / Improving the quality of a decent and comfortable living environment.	***	**	**
Ekosistem Daratan / Life on Land	<ul style="list-style-type: none"> KAI-Pling (Peduli Lingkungan / Environmental Care) 	Menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan / Preserving and protecting environmental sustainability.	**	*	**
Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Peace, Justice and Strong Insitutions	<ul style="list-style-type: none"> Terimakasih KAI / Thank You KAI 	Meningkatkan kerjasama dan hubungan baik antar pemangku kepentingan KAI. / Improving cooperation and good relations between KAI stakeholders.	**	**	**

Keterangan: / Description:

*) Sedang / Medium

**) Tinggi / High

***) Sangat tinggi / Very High

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN PRODUK DAN/ATAU JASA KEBERLANJUTAN

Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan [OJK F.26]

Dalam upaya menjalankan proses bisnis secara berkelanjutan, KAI terus melakukan inovasi bagi internal dan eksternal untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pandemi COVID-19 mendorong KAI untuk melakukan improvement dalam kegiatan bisnisnya melalui digitalisasi layanan yang bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam mengakses produk/jasa yang dimiliki KAI serta memudahkan proses kerja pegawai. KAI melakukan inovasi layanan berbasis digital menggunakan aplikasi KAI Access yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan untuk

RESPONSIBILITY FOR DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE PRODUCTS AND/OR SERVICES

Innovation and Development of Sustainable Financial Products/Services [OJK F.26]

In an effort to run business processes in a sustainable manner, KAI continued to innovate internally and externally to support the Sustainable Development Goals (SDGs). The Covid-19 pandemic has encouraged KAI to make improvements in its business activities through digitalization of services, which aimed to make it easier for customers to access KAI's products/services and facilitate employee work processes. KAI innovated digital-based services through the KAI Access application by providing convenience and comfort for customers to access KAI services. With this application,

mengakses layanan KAI. Dengan adanya aplikasi ini pelanggan tidak harus mencetak tiket yang dibeli, hal ini merupakan upaya KAI untuk mengurangi penggunaan kertas.

Kemudahan pelanggan dalam mengakses layanan diwujudkan oleh KAI dengan mengembangkan berbagai macam fitur dan layanan di aplikasi KAI Access dengan versi terbaru yaitu versi 5.0.9. Ada beberapa fitur dan layanan di dalam aplikasi KAI access seperti fitur membership dan *loyalty point* yang digunakan untuk menukar railpoin yang didapat melalui pembelian tiket kereta. Tidak hanya itu, KAI juga memberikan kemudahan dalam pembayaran yang bisa dilakukan melalui QRIS, *direct debit*, Kartu Kredit, Virtual Account (BCA) dan E-wallet (OVO dan Link Aja). Bahkan sekarang KAI memiliki e-wallet sendiri yang ada dalam aplikasi KAI Access yaitu KAI Pay. Di samping itu, aplikasi ini memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan tiket kereta api antar kota maupun KA lokal, melakukan pembatalan, reschedule, dan lainnya di manapun tanpa harus melakukan antri di stasiun. KAI juga mengintegrasikan aplikasi KAI Access dengan layanan anak perusahaan di antaranya pemesanan KA Lokal yang dioperasikan oleh KAI Commuter, pemesanan makanan dan minuman di atas KA (Railfood), informasi jadwal KRL, informasi terkait KAI Logistik Ekspres, serta pemesanan kereta wisata milik KAI Wisata.

Selain itu, pelanggan juga memiliki kemudahan dalam memilih moda transportasi yang digunakan untuk mengantar maupun menjemput pelanggan ke tempat tujuan. Hal ini dikarenakan KAI Access telah mengintegrasikan transportasi antar moda di KAI Access melalui pemesanan Taksi atau Bus melalui layanan *First Mile* dan *Last Mile* yang dapat dipesan pada aplikasi KAI Access. Dengan adanya aplikasi ini pelanggan tidak harus mencetak tiket yang dibeli, hal ini merupakan upaya KAI untuk mengurangi penggunaan kertas.

KAI Access memiliki fitur *connecting train*, dimana pelanggan dapat memesan tiket persambungan di KAI Access. Sebagai contoh penumpang ingin naik kereta dari Jakarta menuju Banyuwangi, saat ini belum tersedia kereta langsung yang menuju ke Banyuwangi, dengan adanya fitur *connecting train* maka sistem di KAI Acces akan mencari jadwal kereta persambungan yang dapat dipesan pelanggan agar dapat menuju ke Banyuwangi tersebut. Untuk mengakomodir penumpang yang berpergian secara berkelompok, saat ini di KAI Access dapat dilakukan pemesanan dimana dalam satu kode booking bisa memesan hingga 10 orang penumpang (sebelumnya hanya 4 orang).

customers did not have to print the purchased tickets, this became KAI's effort to reduce paper usage.

The convenience of customers in accessing services was realized by KAI through the development various features and services in the KAI Access application with the latest version 5.0.9. There are several features and services in the KAI Access application, such as membership features and loyalty points used to exchange railpoin obtained through purchasing train tickets. Not only that, KAI also provided convenience in payments that could be made via QRIS, direct debit, Credit Cards, Virtual Account (BCA), and E-wallet (OVO and Link Aja). Even now, KAI had its own e-wallet in the KAI Access application, namely KAI Pay. In addition, this application made it easy for customers to order tickets for inter-city trains and local trains, cancel, reschedule, and others anywhere without having to queue at the station. KAI also integrated the KAI Access application with subsidiary services, including ordering local trains operated by KAI Commuter, ordering food and beverages on the rail (Railfood), KRL schedule information, information related to KAI Logistik Express, and booking train tours of KAI Wisata.

In addition, customers also has the convenience of choosing the mode of transportation used to deliver or pick up customers to their destination as KAI Access has an integrated inter-mode transportation in KAI Access by booking Taxi or Bus. With this application, customers did not have to print the purchased tickets, and this became KAI's effort to reduce paper usage.

KAI Access has a connecting train feature, where customers can order connecting tickets at KAI Access. For example, a passenger wants to take a train from Jakarta to Banyuwangi, currently there is no direct train to Banyuwangi yet. With the connecting train feature, the KAI Access system is able to find a connecting train schedule to go to Banyuwangi. To accommodate passengers traveling in groups, currently at KAI Access enables reservations up to 10 passengers in one booking code (previously only 4 passengers).

Untuk memberikan kenyamanan pelanggan dalam melakukan perjalanan menggunakan kereta api di KAI Access ditambahkan beberapa fitur seperti *Entertainment on Board* (EoB), dimana penumpang dapat mengakses video seperti film atau serial secara daring saat terhubung dengan jaringan Intranet yang ada di dalam kereta. Apabila penumpang ingin isi ulang pulsa telepon, pembelian paket data internet atau pembelian token listrik, hal itu dapat dilakukan pelanggan di aplikasi KAI Access melalui fitur Top Up & Tagihan.

Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan [OJK F.27]

KAI selalu berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan keamanan terhadap seluruh (100%) layanan yang diberikan. KAI telah menerapkan standarisasi keselamatan, kesehatan, dan keamanan bagi para mitra dan para penumpang. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, kami mewujudkan hal ini terutama dengan memastikan penerapan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah penyebaran virus corona dengan melakukan desinfeksi area layanan publik dan office di stasiun, memberikan fasilitas wastafel *portable*, *hand sanitizer*, menerapkan batas antrian sebagai pembatasan jarak di antrian loket, antrian *Customer Service*, *Check In Counter* (CIC), dan di peron jalur Kereta Api, dan pembatasan/pengaturan jarak layanan fasilitas umum di area stasiun. Untuk memastikan keamanan perjalanan kereta api, KAI juga rutin melakukan pengecekan pada sarana dan prasarannya. Pada sarana misalnya, sebelum dapat beroperasi, kereta, gerbong dan lokomotif harus dicek dan dipastikan kelayakannya oleh petugas sarana. KAI melakukan pengecekan harian sebelum sarana digunakan, pengecekan enam bulanan, tahunan, dua tahunan, dan empat tahunan. Begitu juga dengan prasarannya seperti jalur kereta api. Pemeriksaan rutin setiap hari dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Jalur (PPJ) memastikan kondisi jalur yang akan dilewati kereta api aman.

KAI juga terus melakukan inovasi dan peningkatan keamanan angkutan barang yang bertujuan dapat meningkatkan pelayanan kepada mitra. Protokol kesehatan yang sudah dilakukan adalah memberikan fasilitas tempat cuci tangan dan hand sanitizer di wilayah Keterminalan terutama tempat pelayanan dengan mitra angkutan barang guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Peningkatan pengawasan juga telah dilakukan adalah memasang CCTV pada lokasi tempat muat dan bongkar, menambah petugas keamanan di wilayah yang dianggap rawan untuk memastikan keamanan barang terutama angkutan reefer, memastikan APAR tersedia di Kereta Bagasi serta ketersediaan timbangan yang sudah

To improve customer convenience on board KAI Access has added several features such as *Entertainment on Board* (EoB), where passengers can access videos such as movies or series online when connected to the Intranet network on the train. Passengers can also top up phone credit, purchase internet data packages or purchase electricity tokens at the KAI Access application through the Top Up & Billing feature.

Products/Services Evaluated for Customer Safety [OJK F.27]

KAI always committed to providing protection and security for all (100%) services provided. KAI implemented safety, health and security standards for partners and passengers. During the current COVID-19 pandemic, KAI made this happen, especially by ensuring the implementation of strict health protocols to prevent the spread of the corona virus by disinfecting public service areas and offices at stations, providing portable sink facilities, hand sanitizers, implementing queue limits as a precautionary measure of distance restrictions at the counter queues, Customer Service queues, Check In Counters (CIC), and on the railway line platforms, and distance restrictions/regulations for public facilities services in the station area. To ensure the safety of train travel, KAI also routinely checked its facilities and infrastructure. In facilities, for example, before they operated, trains, carriages and locomotives had to be checked and ensured by the facility staff. KAI conducted daily checks before the facilities were used, six-monthly, yearly, bi-annually, and four-yearly checks. Likewise with infrastructure such as railroads, routine inspections were carried out every day by the Track Checking Officer (PPJ) to ensure that the condition of the track to be passed by the train is safe.

KAI also continued to innovate and improve the security of goods transportation which aimed to improve services to partners. The health protocol carried out was to provide facilities for washing hands and hand sanitizers in the Terminal area, especially places of service with cargo transport partners to prevent the spread of the COVID-19 virus. Increased supervision was also carried out, namely installing CCTV at loading and unloading locations, adding security officers in areas considered vulnerable to ensure the safety of goods especially reefer transport, ensure Fire Extinguisher was available on Luggage Trains and the availability of scales calibrated to support security in retail transportation, ensure

ditera guna pendukung keamanan pada angkutan retail, memastikan petugas menggunakan APD dan melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP yang ada dan melakukan inovasi keamanan dalam pengangkutan rel yang sebelumnya KAI hanya mengangkut rel dengan jenis berat 54 dengan panjang 25 Meter dimana guna mendukung proyek strategis nasional telah berhasil mengangkut rel dengan jenis berat 60 dengan panjang 50 Meter dengan lancar, aman dan tepat waktu.

Dampak Produk/Jasa [OJK F.28]

KAI mengidentifikasi dampak operasional kereta api dan mengelompokkan dampak-dampak tersebut menjadi dampak positif dan negatif. Dampak positif dari kegiatan operasional kereta api antara lain berupa dukungan bagi peningkatan mobilitas masyarakat serta adanya distribusi nilai ekonomi yang memicu peningkatan ekonomi daerah, melalui penyerapan tenaga kerja dan penggunaan pemasok lokal. Adapun, dampak negatif dari kegiatan operasional kereta api antara lain berupa munculnya perlintasan sebidang jalur kereta api tanpa izin dan tanpa penjaga, yang menghadirkan risiko lebih besar akan terjadinya kecelakaan akibat lalu lintas kereta api. Di samping itu, perlintasan sebidang tanpa izin dan tanpa penjaga menghadirkan dampak lain berupa kemacetan kendaraan termasuk kendaraan yang melintas baik menuju ataupun dari arah stasiun.

KAI secara berkala melakukan upaya minimalisasi dampak negatif dari aktivitas operasional kereta api, antara lain dengan melakukan pengecekan pada area di sepanjang lintasan kereta api.

Insiden Ketidapatuhan terkait Keamanan atau Keselamatan atas Penggunaan Produk/Jasa [GRI 416-2]

Secara berkala, KAI melakukan penelaahan terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan dan standar best practices, mencakup terkait aspek keamanan atau keselamatan pelanggan dalam penggunaan produk/jasa Perseroan. Lebih dari itu, KAI juga menerapkan mekanisme yang diperlukan dalam memonitor penerapan peraturan perundang-undangan dan standar best practices keamanan atau keselamatan pelanggan di lingkungan Perseroan, serta memastikan bahwa regulasi yang berlaku senantiasa diterapkan secara efektif.

Tidak terdapat insiden ketidapatuhan berkenaan dengan keamanan dan keselamatan penggunaan produk/jasa KAI selama 2022.

that officers used PPE and carry out work in accordance with existing SOPs and carry out safety innovations in rail transportation, previously KAI only transported rails weighing 54 with a length of 25 meters, which in order to support national strategic projects succeeded in transporting rails with a heavy type of 60 with a length of 50 Meters smoothly, safely and timely.

Impact of Products/Services [OJK F.28]

KAI identifies the impacts of rail operations and classifies these impacts into positive and negative impacts. The positive impacts of rail operations include support for increasing public mobility and distribution of economic value which encourage regional economic growth, through employment and use of local suppliers. Meanwhile, the negative impacts of rail operations include the emergence of unlicensed and unguarded railroad crossings, which present a greater risk of accidents due to rail traffic. In addition, unlicensed and unguarded railroad crossings also has an impact in the form of vehicle congestion, including vehicles passing to and from the station.

KAI periodically makes efforts to minimize the negative impacts of rail operations, including checking areas along the railroad tracks.

Incidents of Non-Compliance related to Security or Safety for the Use of Products/Services [GRI 416-2]

Periodically, KAI conducts a review of the development of laws and regulations and best practice standards, including aspects related to security or customer safety in the use of the Company's products/services. More than that, KAI also implements the necessary mechanisms to monitor the application of laws and regulations and best practice standards for security or customer safety within the Company, and ensures that the applicable regulations are always implemented effectively.

There were no non-compliance incidents regarding the security and safety of using KAI's products/services throughout 2022.

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali [OJK F.29]

Selama tahun 2022, tidak terdapat produk atau jasa KAI yang ditarik kembali termasuk yang terjadi akibat insiden tertentu atau ketidakpatuhan terdapat regulasi yang berlaku.

Kebijakan dalam Menjaga Kerahasiaan Data Pelanggan [GRI 418-1]

KAI memahami data pribadi sebagai data, baik yang bersifat benar maupun tidak, tentang individu yang dapat diidentifikasi dari data tersebut, atau dari data dan informasi lainnya yang dapat atau kemungkinan dapat diakses oleh suatu organisasi. Dengan pemahaman tersebut, KAI menerapkan komitmen untuk dapat menjaga kerahasiaan data pribadi masing-masing pelanggan secara ketat, antara lain melalui penggunaan aplikasi KAI Access.

Penerapan kebijakan kerahasiaan data pelanggan dilakukan sebagai pemenuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Secara internal, KAI telah menyusun dan memiliki kebijakan yang mengatur penjagaan kerahasiaan data pelanggan, yang termuat di dalam Manajemen Keamanan Data berdasarkan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.K/KL.104/VIII/1/KA-2022 tentang Pedoman Tata Kelola Data (Data Governance) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Kebijakan terkait kerahasiaan data pelanggan yang diterapkan oleh KAI telah disosialisasikan secara luas melalui artikel "Kebijakan Privasi" yang tersedia pada aplikasi KAI Access.

Pengukuran Standar Layanan Penyediaan Produk/Jasa dan Publikasi Hasilnya

KAI memahami bahwa keberadaan standar layanan penyediaan produk/jasa merupakan aspek yang penting. Hal tersebut merupakan wujud komitmen KAI dalam memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan pelanggan dalam masing-masing layanan yang dihadirkan. Lebih dari itu, KAI juga memahami pentingnya praktik sosialisasi standar layanan kepada pelanggan agar pemenuhan standar layanan dapat terlaksana secara efektif, yang akhirnya berperan sebagai perangkat yang melindungi hak-hak pelanggan sebagai pemangku kepentingan dengan dampak signifikan bagi Perseroan.

Number of Products Recalled [OJK F.29]

During 2022, there were no KAI products or services that were recalled, including those that occurred as a result of certain incidents or non-compliance with applicable regulations.

Policy on Maintaining Confidentiality of Customer Data [GRI 418-1]

KAI acknowledges personal data as data, whether true or not, about individuals who can be identified from that data, or from other data and information that an organization can or may have access to. Based on this knowledge, KAI implements a commitment to strictly maintain the confidentiality of each customer's personal data, including through the use of the KAI Access application.

Fundamentally, the implementation of a customer data confidentiality policy is carried out in compliance with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Internally, KAI has developed and has a policy that regulates the confidentiality of customer data, which is contained in the Data Security Management based on the Regulation of the Board of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. PER.K/KL.104/VIII/1/KA-2022 concerning Guidelines for Data Governance (Data Governance) Director of Finance and Risk Management.

The policy regarding the confidentiality of customer data implemented by KAI has been disseminated widely through the article "Privacy Policy" which is available on the KAI Access application.

Measurement of Service Standards for Provision of Products/Services and Publication of the Results

KAI understands that the existence of product/service provision service standards is an important aspect. This is a form of KAI's commitment to prioritizing customer safety and comfort in each of the services provided. More than that, KAI also understands the importance of the practice of disseminating service standards to customers so that the fulfillment of service standards can be carried out effectively, which ultimately plays a role as a tool that protects the rights of customers as stakeholders with a significant impact on the Company.

Secara berkala, KAI meninjau atas standar layanan bagi pelanggan sebagai upaya berkesinambungan guna menjamin keamanan dan keandalan layanan. KAI juga telah mempublikasikan standar layanan yang diterapkan bagi pelanggan melalui media website kai.id, sosial media, *annual report* dan kanal keterbukaan informasi publik, sebagai media tempat masyarakat dapat memperoleh informasi apa saja yang diperlukan, kecuali data yang sifatnya dikecualikan menurut undang-undang.

Adapun, standar layanan angkutan penumpang di KAI diukur berdasarkan 2 aspek/objek utama yaitu stasiun dan kereta, dengan pengukuran standar layanan dilakukan pada dimensi fisik dan nonfisik. Dimensi fisik adalah layanan yang memiliki wujud atau bersifat tangible, sedangkan dimensi nonfisik adalah layanan yang tidak memiliki wujud atau bersifat intangible namun tetap memiliki dampak yang besar pada kepuasan pelanggan, dan seluruh aspek tersebut dilakukan pengukuran dalam bentuk Survei Kepuasan Pelanggan yang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun.

Dalam pembuatan standar layanan, KAI selalu memperhatikan seluruh lingkaran pelayanan atau *circle of service* yang dimiliki, seperti contohnya dalam layanan angkutan penumpang, KAI memiliki standar layanan bahkan sebelum pelanggan memulai perjalanan atau pra-perjalanan, selama perjalanan, sampai dengan purna-perjalanan. Contoh layanan yang dapat dinikmati oleh pelanggan sebelum memulai perjalanan adalah tersedianya web kai.id dan aplikasi KAI Access yang memuat informasi dan prosedur perjalanan dengan kereta api. Selain itu, KAI memiliki layanan *Contact Center 121* yang mencakup sosial media, email, telepon, dan pesan teks. Setelah itu, saat pelanggan akan melakukan perjalanan, KAI memiliki standar layanan mulai dari gate parkir stasiun keberangkatan, proses layanan di stasiun dan kereta, sampai dengan pelanggan tiba di tujuan dan meninggalkan area stasiun.

Selain itu, layanan purna-perjalanan pun tersedia bagi pelanggan. Saat pelanggan memiliki barang yang tertinggal di area stasiun atau kereta, pelanggan dapat menghubungi layanan pelanggan di stasiun ataupun *Contact Center 121* untuk melakukan penelusuran terhadap barang tersebut. Selain itu, terdapat sejumlah layanan lain yang disediakan KAI, dengan semuanya memiliki standar layanan atau *Service Level Guarantee* (SLA) yang terukur dan selalu dilakukan evaluasi.

Periodically, KAI reviews service standards for customers as a continuous effort to ensure service security and reliability. KAI has also published service standards that apply to customers through the media website kai.id, social media, annual reports and the public information disclosure channel, as a medium where the public can obtain whatever information is needed, except for data that is exempt according to law.

Meanwhile, passenger transportation service standards at KAI are measured based on 2 main aspects/objects, namely stations and trains, with service standard measurements carried out on physical and non-physical dimensions. The physical dimension is a service that has a form or is tangible in nature, while the non-physical dimension is a service that has no form or is intangible but still has a large impact on customer satisfaction, and all of these aspects are measured in the form of a Customer Satisfaction Survey conducted 2 times in 1 year.

In making service standards, KAI always pays attention to the entire circle of service it has, for example in passenger transportation services, KAI has service standards even before the customer starts the trip or pre-trip, during the trip, until after the trip. An example of a service that customers can enjoy before starting a trip is the availability of the kai.id website and the KAI Access application which contains information and procedures for traveling by train. In addition, KAI has a Contact Center 121 service which includes social media, email, telephone and text messages. After that, when customers are going to travel, KAI has service standards starting from the departure station parking gate, the service process at the station and train, until the customer arrives at the destination and leaves the station area.

In addition, after-trip services are also available for customers. When customers have items left behind in the station or train area, customers can contact customer service at the station or the Contact Center 121 to conduct a search for these items. In addition, there are a number of other services provided by KAI, all of which have service standards or Service Level Guarantees (SLA) that are measurable and are always being evaluated.

Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa [OJK F.30]

Sebagai BUMN yang beroperasi pada bidang jasa transportasi, KAI terus berupaya untuk dapat mengetahui dan melakukan evaluasi terhadap layanan yang diberikan bagi pelanggan. Hasil evaluasi merupakan dasar bagi KAI dalam menyusun prioritas perbaikan untuk tahun periode berikutnya. Hal tersebut dilaksanakan antara lain melalui *market research* yang dilakukan KAI secara berkala setiap semester pada beberapa stasiun kereta di kota-kota besar di Jawa dan Sumatra.

Market research dilaksanakan melalui wawancara langsung ataupun sambungan telepon kepada responden, untuk menilai sejumlah aspek terkait kereta api dan stasiun. Pada penilaian kereta api, sejumlah aspek yang dinilai meliputi aspek fisik kereta, aspek fisik makanan dan minuman, aspek non-fisik (keramahan dan kesiapan membantu dari petugas, serta informasi yang tersedia di atas kereta api), serta aspek non-fisik yaitu terkait ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan. Kemudian, pada penilaian stasiun, aspek yang dinilai meliputi aspek fisik stasiun, aspek fisik ruang tunggu, aspek fisik *boarding area*, aspek fisik *customer service*, aspek fisik lokasi pembelian tiket, aspek non-fisik keramahan petugas, aspek non-fisik akurasi informasi dan waktu pelayanan, hingga aspek non-fisik tarif dan tiket.

KAI melakukan survei kepuasan pelanggan pada semester I dan II tahun 2022, dengan hasil perolehan skor *Customer Satisfaction Index* (CSI) masing-masing sebesar 4,39 dan 4,39 dari skala 1 (sangat tidak puas) sampai skala 5 (sangat puas). Dengan mengacu pada hasil survei tersebut, KAI melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan untuk periode selanjutnya.

Customer Satisfaction Survey on Products and/or Services [OJK F.30]

As a SOE in the field of transportation services, KAI always strives to be able to identify and evaluate the services provided to customers. The results of the evaluation serve as the basis for KAI in setting improvement priorities for the following year. This is implemented, among others, through the market research conducted by KAI periodically every half year at several train stations in big cities in Java and Sumatra.

Market research is carried out through direct interviews or telephone calls to respondents, and assessment of a number of aspects related to trains and stations. In the train assessment, the aspects assessed include the physical aspect of the train, physical aspect of food and drink, non-physical aspect (friendliness and readiness, help from officers, and information available on the train) and non-physical aspects related to the punctuality of departure and arrival. Meanwhile, the aspects assessed at the station include the physical aspects of the station, physical aspect of the station waiting room, physical aspect of the boarding area, physical aspect of customer service, physical aspect of ticket purchase location, non-physical aspect (officer friendliness), non-physical aspect (accuracy of information and time services), and non-physical aspect (fare and tickets).

KAI conducted a customer satisfaction survey in the first and second half of 2022, with the results of a Customer Satisfaction Index (CSI) score of 4.39 and 4.39 respectively from a scale of 1 (very dissatisfied) to a scale of 5 (very satisfied). Based on the survey results, KAI constantly evaluated in order to improve service to customers for the following period.

ASSURANCE OLEH PIHAK EKSTERNAL [OJK G.1, GRI 2-5]

External Assurance [OJK G.1, GRI 2-5]

Sampai dengan tahun 2022, KAI tidak menggunakan jasa pihak eksternal independen sebagai pihak penjamin yang memastikan kualitas dan keandalan informasi di dalam Laporan Keberlanjutan. Meski demikian, manajemen KAI telah memastikan bahwa Laporan Keberlanjutan ini telah disusun sesuai standar dan prosedur pelaporan yang benar. Lebih dari itu, manajemen KAI juga telah memastikan bahwa seluruh informasi yang diungkapkan melalui Laporan Keberlanjutan ini merupakan data-data yang akurat, dan karenanya, bersifat kredibel dapat dipertanggungjawabkan.

KAI telah mempertimbangkan penggunaan *external assurance* sebagai pihak penjamin validitas dan kredibilitas Laporan Tahunan pada tahun-tahun mendatang, guna meningkatkan kualitas laporan yang dihasilkan.

As of 2022, KAI did not use the service of independent external parties to ensure the quality and reliability of the information in the Sustainability Report. However, KAI's management has ensured that this Sustainability Report has been prepared according to the appropriate reporting standards and procedures. In addition, KAI's management has also ensured that all information disclosed through this Sustainability Report are accurate data that is also credible and accountable.

KAI has considered the use of external assurance to ensure the validity and credibility of the Annual Report in the coming years in order to improve the quality of the reports produced.

LEMBAR UMPAN BALIK [OJK G.2]

Feedback Form

Kami sangat berharap pembaca ataupun pemangku kepentingan dapat memberikan umpan balik atas Laporan Keberlanjutan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tahun 2022, yang hasilnya akan digunakan sebagai acuan bagi upaya perbaikan dalam penyusunan Laporan Keberlanjutan di tahun mendatang. Umpan balik dapat disampaikan oleh pembaca dengan mengisi serta mengirim formulir berikut ini melalui surat elektronik, faksimile, ataupun pos.

We really hope that readers or stakeholders can provide feedback on the 2022 Sustainability Report of PT Kereta Api Indonesia (Persero), in which the results will be used as a basis for improving the preparation of the Sustainability Report for the following year. Readers can submit feedback by filling out and sending the following form via e-mail, facsimile, or post.

Pertanyaan / Question	Setuju / Agree	Tidak Setuju / Disagree
Laporan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan Perseroan. / This report has provided useful information regarding economic, social and environmental performance of the Company.		
Data dan informasi yang diungkapkan mudah dipahami, lengkap, transparan, dan berimbang. / Data and information disclosed are easy to understand, complete, transparent, and balanced.		
Data dan informasi yang disajikan berguna dalam pengambilan keputusan. / Data and information disclosed are useful in decision-making		
Laporan ini menarik dan mudah dibaca. / This report is interesting and easy to read.		
Mohon berikan nilai mengenai aspek yang terdapat dalam laporan ini / Please rate the aspects contained in this report (nilai 1 = paling penting, 2 = penting, 3 = tidak penting, 4 = sangat tidak penting). / (1 = most important, 2 = important, 3 = not important, 4 = very unimportant).		
(....) Anti Korupsi / Anti-Corruption		
(....) Kepegawaian / Employment		
(....) Kesehatan dan Keselamatan Kerja / Occupational Health and Safety		
(....) Pelatihan dan Pendidikan / Training and Education		
(....) Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan / Customer Health and Safety		

Mohon berikan komentar/saran/usulan bagi laporan ini.

Please provide comments/suggestions/suggestions for this report.

Nama:

Name:

.....

.....

Pekerjaan:

Profession:

.....

.....

Institusi/Perusahaan:

Institution/Company:

.....

.....

Kontak (Telepon, e-mail):

Contact (Phone, email):

.....

.....

LEMBAR UMPAN BALIK

Lembar Umpan Balik

Kategori Pemangku Kepentingan:

- ◊ Pemegang Saham
- ◊ Penumpang
- ◊ Pegawai
- ◊ Pemasok
- ◊ Pelanggan Angkutan Barang
- ◊ Media
- ◊ Railfans (Komunitas Pecinta Kereta Api)
- ◊ Lain-lain /

Stakeholder Category:

- ◊ Shareholders
- ◊ Passenger
- ◊ Employee
- ◊ Supplier
- ◊ Cargo Forwarding Customers
- ◊ Media
- ◊ Railfans (Community of Train Lovers)
- ◊ Others /

Saran dan tanggapan terhadap Laporan Keberlanjutan ini dapat Anda kirimkan melalui alamat berikut:

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Bandung 40117
PO Box 1163 Bandung 40000
Telp : (022) 4230031, 4230039, 4230054
Fax : (022) 4203342 ext. 10039
E-mail : dokumen@kai.id

Please send your suggestions and comments for this Sustainability Report to the following address:

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Bandung 40117
PO Box 1163 Bandung 40000
Telp : (022) 4230031, 4230039, 4230054
Fax : (022) 4203342 ext. 10039
E-mail : dokumen@kai.id

Media Sosial

Facebook : Kereta Api Kita, KAI121
Twitter : @Kereta Apikita, @kai121
Instagram : @Kereta Apikita, @kai121_
Youtube : Kereta Api Kita
TikTok : @kai121_
Podcast : Sahabat KAI

Social Media

Facebook : Kereta Api Kita, KAI121
Twitter : @Kereta Apikita, @kai121
Instagram : @Kereta Apikita, @kai121_
Youtube : Kereta Api Kita
TikTok : @kai121_
Podcast : Sahabat KAI

INDEKS REFERENSI OJK, ARA, DAN SK-16

OJK, ARA and SK-16 Reference Index

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
UMUM / GENERAL			
Laporan tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris. The annual report should be presented in good and correct Indonesian, and it is recommended to also present it in English.		ARA	✓
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca. The annual report should be printed in good quality and use an easy-to-read type and size.		ARA SK-16	✓
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas. The annual report clearly states the company's identity.	Nama perusahaan dan tahun <i>annual report</i> ditampilkan di: The company name and year of the annual report are displayed on:	ARA SK-16	✓
	1. Sampul muka. Front Cover.		✓
	2. Samping. Side.		✓
	3. Sampul belakang. Back cover.		✓
	4. Setiap halaman. Every page.		✓
Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan. The annual report should be displayed on the company website.		ARA SK-16	✓
KILAS KINERJA / PERFORMANCE HIGHLIGHTS			
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun. The summary of important financial data contains financial information presented in the form of a comparison for 3 (three) financial years or since starting its business if the Issuer or Public Company has been running its business activities for less than 3 (three) years.	Informasi memuat antara lain: Information includes:	SEOJK 16 ARA SK-16	15-16
	1. Pendapatan/penjualan. Revenue/sales.	SEOJK 9 SK-16	15
	2. Laba bruto. Gross profit.		15
	3. Laba Operasional. Operating Profit.	SEOJK 16 ARA SK-16	15
	4. Laba sebelum pajak. Profit before tax.		15
	5. Laba bersih. Net profit.		15
	6. Laba (rugi). Profit (loss).	SEOJK 9	15
	7. Total laba (rugi) komprehensif. Total comprehensive profit (loss).	SEOJK 16 ARA	15
	8. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Total profit (loss) attributable to owners of the parent entity and noncontrolling interests.	SEOJK 16	15
	9. Total laba (rugi) komprehensif. Total comprehensive profit (loss).		15
10. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-Pengendali. Total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests.	15		

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page	
	11. Laba (rugi) per saham. Earnings (loss) per share.	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK-16	15	
	12. Jumlah aset. Total assets.		15	
	13. Investasi pada entitas asosiasi. Investment in associates.		15	
	14. Jumlah liabilitas. Total liabilities.		15	
	15. Jumlah ekuitas. Total equity.		15	
	16. Dana pihak ketiga. Third-party funds.	SEOJK 9	n/a	
	17. Pinjaman yang diterima. Received Loans		n/a	
	18. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset. Ratio of profit (loss) to total assets.	SEOJK 16	16	
	19. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas. Ratio of profit (loss) to equity.		16	
	20. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan. Ratio of profit (loss) to revenue/sales.		16	
	21. Rasio lancar. Current ratio		16	
	22. Rasio liabilitas terhadap ekuitas. Liability to equity ratio.		16	
	23. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset. The ratio of liabilities to total assets.		16	
	24. Rasio KPMM. CAR ratio.		SEOJK 9	n/a
	25. Aset produktif. Productive assets.			n/a
	26. Rasio <i>Non-performing Loans</i> (NPL). Ratio of <i>Non-performing Loans</i> (NPL).			n/a
	27. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Ratio of Operating Expenses to Operating Income (BOPO).			n/a
	28. <i>Cost to Income Ratio</i> (CIR). Cost to Income Ratio (CIR).	n/a		
	29. <i>Rasio Net Interest Margin</i> (NIM). Net Interest Margin Ratio (NIM).	n/a		
	30. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Percentage of violations and exceeding the Maximum Lending Limit (BMPK).	n/a		
	31. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM). Statutory Reserves Ratio (GWM).	n/a		
	32. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN). Ratio of Net Open Position (GDP).	n/a		
	33. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya. Other information and financial ratios relevant to the issuer or public company and the type of industry.	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK-16	16	
Informasi Saham. Stock Information	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Stock information for a Public Company shall at least contain:	SEOJK 16 ARA SK-16	17	
	1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: Shares issued for each quarterly period should be presented in the form of a comparison for the last 2 (two) financial years, at least containing:		17	
	a. Jumlah saham yang beredar. Number of shares outstanding.		n/a	
	b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan. Market capitalization is based on the price on the stock exchange where the shares are listed.		n/a	
	c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan. The highest, lowest, and closing share prices are based on prices on the stock exchange where the shares are listed.		n/a	

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
	<p>d. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. Trading volume on the stock exchange where the shares are listed.</p> <p>Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek. Informasi disajikan dalam bentuk grafik dan tabel. Information in letter b), letter c) and letter d) should be only disclosed if the shares are listed on the stock exchange. Information is presented in the form of graphs and tables.</p>		n/a
	<p>2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: In the event of a corporate action that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as additions and subtractions of capital, share information as referred to in number 1) shall be added at least an explanation regarding:</p>	SEOJK 16 ARA	17
	a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi. Date of implementation of corporate action.		n/a
	b. Rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham. The ratio of stock splits, stock mergers (<i>reverse stock</i>), stock dividends, shares.		n/a
	c. bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham. bonuses, the number of convertible securities issued, and changes in the par value of shares.		n/a
	d. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi. The number of outstanding shares before and after the corporate action.		n/a
	e. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada). Number of conversion effects executed (if any).		n/a
	f. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi. Stock prices before and after corporate actions.		n/a
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut. In the event of a temporary suspension of share trading and/or delisting of shares during the financial year, the reasons for the suspension and/or delisting shall be explained.	SEOJK 16	n/a
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/ atau proses pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut. In the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, it should explain the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/or cancellation listing of the shares (<i>delisting</i>).	SEOJK 16	n/a
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Information on bonds, sukuk or convertible bonds that are still outstanding in the last 2 (two) financial years.	Informasi memuat: The information consists of:	ARA SK-16	18-19
	1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>). Number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds.		18-19
	2. Tingkat bunga/imbalan. Interest rate/yield.		18
	3. Tanggal jatuh tempo. Due date.		18-19
	4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2020 dan 2021. Bond/sukuk ratings for 2020 and 2021.		18-19
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan. Notes: if the company does not have bonds/sukuk/convertible bonds, it should be disclosed.		

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
Laporan Direksi Dan Dewan Komisaris / Report of The Board Of Directors and Board of Commissioners			
Laporan Direksi Directors' Report	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report shall at least contain a brief description of:		30-59
	1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: Performance of the Issuer or Public Company, at least contains:		32-36
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik (termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS). Issuer's or Public Company's strategy and strategic policies (including for UUS if the Bank owns UUS).	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK-16	34-35
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik. The role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies.	SEOJK 16	35
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik. The process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy.		35
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik. Comparison between the results achieved with those targeted by the Issuer or Public Company.	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK-16	35
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik. Constraints faced by Issuers or Public Companies.		36-37
	f. Struktur organisasi. Organizational structure.	SEOJK 9	n/a
	g. Aktivitas utama. Main activity.		n/a
	h. Teknologi informasi. Information Technology.		n/a
	i. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Types of products and services offered, including lending to micro, small and medium business debtors.		n/a
	j. Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana. Interest rates for raising and providing funds.		n/a
	k. Perkembangan perekonomian dan target pasar. Economic development and target market.		n/a
	l. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri. Network and business partners at home and/or abroad.		n/a
	m. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor. Number, type, and location of offices.		n/a
	n. Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank. Ownership of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders in the Bank's business group.		n/a
	o. Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan. Important changes occurring in the Bank and the Bank's business groups in the relevant year.		n/a
	p. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang. Important things expected to happen in the future.		n/a
	q. Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Human resources include the number, level of education, training, and human resource development.		n/a
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik. An overview of the business prospects of the Issuer or Public Company.	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK-16	37-41
	3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. Implementation of the governance of Issuers or Public Companies.		41-54
	4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. Changes in the composition of the members of the Board of Directors (if any) and the reasons for the changes.	SEOJK 9 ARA SK-16	57-58

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:		62-79
	1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi. Assessment of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors.	SEOJK 16 SEOJK 9 ARA SK-16	85-88
	2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi. A view on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors.		68-69
	3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. Views on the implementation of the governance of the Issuer or Public Company.		69-76
	4. Pandangan atas penerapan/pengelolaan Whistleblowing System (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut Views on the implementation/management of the Whistleblowing System (WBS) in the company and the role of the Board of Commissioners in the WBS	ARA	74-75
	5. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reasons for the changes.	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA	77-78
	6. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi. Frequency and method of providing advice to members of the Board of Directors.	SEOJK 9	64
	7. Penilaian kinerja Komite-komite yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Performance appraisal of the Committees under the supervision of the Board of Commissioners/Supervisory Board.	SK-16	76
Tanda tangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Signatures of members of the Board of Directors and Board of Commissioners	Memuat hal-hal sebagai berikut: Contains the following:	ARA SK-16	
	1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri. The signature should be written on a separate sheet.		692-693
	2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan. A statement that the Board of Commissioners and the Board of Directors are fully responsible for the correctness of the contents of the annual report.		692-693
	3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya. Signed by all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors stating their names and positions.		692-693
	4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. A written explanation in a separate letter from the person concerned in the event that a member of the Board of Commissioners or a member of the Board of Directors does not sign the annual report, or a written explanation in a separate letter from another member in the event that there is no written explanation from the person concerned.		n/a
PROFIL PERUSAHAAN/ COMPANY PROFILE			
Nama dan alamat lengkap Perusahaan Company name and full address	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: Access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices allowing the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including:	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16	84-85
	1. Alamat Address		84
	2. Nomor telepon Phone number		85
	3. Alamat surat elektronik Email address		85
	4. Alamat situs web Website address		85

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
Nama dan alamat entitas anak dan/ atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Name and address of subsidiary and/ or branch office or representative office (if any)	Memuat informasi antara lain: Contains information including:		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan alamat entitas anak, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Alamat b. Nomor telepon c. Alamat surat elektronik d. Alamat situs web 1. Name and address of subsidiaries, including: <ol style="list-style-type: none"> a. Address b. Phone number c. Email address d. Website address 	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16	86
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Alamat b. Nomor telepon c. Alamat surat elektronik d. Alamat situs web 2. Name and address of branch/representative office, including: <ol style="list-style-type: none"> a. Address b. Phone number c. Email address d. Website address <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan. Notes: if the company does not have a subsidiary, branch office, and representative office, it can be disclosed.</p>		86
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik Brief history of Issuer or Public Company	<p>Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Includes: date/year of establishment, name, change of company name (if any), and effective date of change of company name.</p> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan. Notes: if the company has never changed its name, it should be disclosed.</p>	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16	88-89
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission and Corporate Culture	Mencakup: It includes:		
	1. Visi Perusahaan Company Vision	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16	90
	2. Misi Perusahaan Company Mission		90
	3. Penjelasan Visi Vision Explanation		90
	4. Penjelasan Misi Mission Explanation		90
	5. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku Information that the vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Directors/Board of Commissioners for the financial year.		90
6. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki Perusahaan. Statement regarding the corporate culture of the Company.		91	
Kegiatan Usaha Business activities	Uraian mengenai antara lain: It contained description of:	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16	
	1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir. Company's business activities according to the latest articles of association.		92-95
	2. Kegiatan usaha yang dijalankan. Business Activities Undertaken.		92-95
	3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. Products and/or services produced.		95-99
Wilayah Operasional Operational Area	<p>Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik. Wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. The operational area of the Issuer or Public Company. The operational area is the area for carrying out operational activities or the range of the company's operational activities.</p>	SEOJK 16 ARA	100-101
Struktur Organisasi Organizational structure	<p>Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan. The organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions.</p>	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16	102-103

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
Keanggotaan Asosiasi Association Member	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. List of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance.	SEOJK 16	99
Profil Direksi Board of Directors Profile	Profil Direksi, paling sedikit memuat: Profile of the Board of Directors, at least contains:	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16	
	1. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Name and position in accordance with the duties and responsibilities.		104-115
	2. Foto terbaru. Latest photos.		104-115
	3. Usia. Age		104-115
	4. Kewarganegaraan. Citizenship		104-115
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi. Educational history and/or certification.		104-115
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan Legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned		104-115
b. Riwayat penunjukan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. History of appointment (period and position) as a member of the Board of Directors in the Company since the first appointment.	104-115		
c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, this can be disclosed.	104-115		
d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company.	104-115		
7. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank. Affiliate relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including the names of affiliated parties. In the event that the members of the Board of Directors have no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter. Financial and family relationships of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners with other members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and/or controlling shareholders of the Bank.	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA	116-117	
8. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this should be disclosed.	SEOJK 16	118	

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: Profile of the Board of Commissioners, at least contains:	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16	
	1. Nama dan jabatan. Name and title.		119-129
	2. Foto terbaru. Latest photos.		119-129
	3. Usia. Age		119-129
	4. Kewarganegaraan. Citizenship		119-129
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi. Educational history and/or certification.		119-129
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris Legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners		119-129
	b. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan. The legal basis for the appointment for the first time as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned.		119-129
	c. Riwayat penunjukan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. History of appointment (period and position) as a member of the Board of Commissioners in the Company since the first appointment.		119-129
d. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, this should be disclosed.	119-129		
e. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company.	119-129		
7. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank. Affiliated relationships with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers, either directly or indirectly, to individual owners, including the names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter. Financial and family relationships of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners with other members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and/or controlling shareholders of the Bank.	SEOJK 9 SEOJK 13 SEOJK 16 ARA SK 16	130	
8. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode. Statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served more than 2 (two) terms.	SEOJK 16	n/a	
9. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this should be disclosed.		131	
Profil singkat pejabat eksekutif Executive short profile	Termasuk susunan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan Riwayat hidup. Including the composition of executive officers along with positions and a summary of curriculum vitae.	SEOJK 9	n/a

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan. Number of employees and data on employee competency development.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku. Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the financial year.	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA	133-136
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.		✓
	Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan serta adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan. Data on employee competency development that has been carried out in the financial year consisting of parties (position level) who participated in the training, types of training, and training objectives as well as equal opportunities for all employees.	ARA SK 16	136-139
	Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku. Employee competency development costs that have been incurred in the financial year.		139
Komposisi pemegang saham Composition of shareholders	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: Name of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the financial year, which consists of information regarding:		140-141
	1. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik. Shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company.	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16	140
	2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares in Issuers or Public Companies. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, this should be disclosed.		141
	3. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Direktur dan komisaris yang memiliki Saham (Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan Sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya). Percentage of indirect ownership of shares of Issuers or Public Companies by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed. Directors and commissioners who own Shares (Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board are required to report to the company regarding the ownership of Shares and/or their families in the company concerned and other companies, including any changes thereto).		141
4. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik. Community shareholder group, namely the group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company.	SEOJK 16 ARA	140	

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
	<p>5. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: Number of shareholders and percentage of ownership at the end of the financial year based on classification:</p> <p>a. Kepemilikan institusi lokal. Ownership of local institutions.</p> <p>b. Kepemilikan institusi asing. Foreign institutional ownership.</p> <p>c. Kepemilikan individu lokal. Local individual ownership.</p> <p>d. Kepemilikan individu asing. Foreign individual ownership.</p> <p>Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information can be presented in tabular form.</p>	SEOJK 16	141 141 141 141 ✓
Pemegang saham utama dan Pengendali Major and controlling shareholders	<p>Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan.</p> <p>Information regarding the main and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, to the individual owners, and it should be presented in the form of a scheme or chart.</p> <p>Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.</p> <p>Notes: the main shareholder is the party who, directly or indirectly, owns at least 20% (twenty percent) of the voting rights of all shares with voting rights issued by a company, but is not the controlling shareholder.</p>	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA	141
Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi List of subsidiaries and/or associated entities	<p>Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama di mana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.</p> <p>The name of the subsidiary, associated company, joint venture company in which the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company. For a subsidiary, information about the address of the subsidiary should be added.</p>	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16	142
Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank Information related to the Bank Business	<p>Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, harus menambahkan dengan: Banks as the part of a business group and/or have a Subsidiary, must add:</p> <p>Struktur kelompok usaha Bank yang meliputi: The structure of the Bank's business group which includes:</p> <p>a. Struktur kelompok usaha Bank, antara lain terdiri dari Bank, Entitas Anak, perusahaan terelasi (<i>sister company</i>), Entitas Induk sampai dengan <i>ultimate shareholder</i>. The structure of the Bank's business group consists of the Bank, Subsidiaries, sister companies, Parent Entity to ultimate shareholder.</p> <p>b. Struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank. Management linkage structure within the Bank's business group.</p> <p>c. Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain. Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian. Shareholders acting on behalf of other shareholders. The definition of a shareholder acting on behalf of another shareholder is an individual shareholder or entity that has a common goal of controlling the Bank, based on or not based on an agreement.</p>	SEOJK 9	n/a n/a n/a n/a
Struktur grup perusahaan Company group structure	<p>Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i>, dan <i>special purpose vehicle</i> (SPV). Company group structure in the form of a chart depicting parent entities, subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose vehicles (SPV).</p>	SEOJK 16 ARA SK 16	143

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
Kronologis pencatatan saham Share listing chronology	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>), nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek di mana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividin saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada). Chronology of share listing, number of shares, number of registered shares after each corporate action, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the financial year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock split, stock merger (reverse stock), stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any).	SEOJK 16 ARA SK 16	144
Kronologis penerbitan efek (termasuk <i>private placement</i>) dan/ atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Chronology of securities issuance (including <i>private placement</i>) and/ or share listing from the beginning of issuance to the end of the financial year	Informasi pencatatan efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, jenis tindakan perusahaan (<i>corporate action</i>) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/ imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan, dan peringkat efek (jika ada). Other securities listing information that have not matured in the financial year at least contain the name of the securities, type of corporate action that causes changes in the number of other securities, year of issue, interest rate/ yield, maturity date, offering value, name of the stock exchange in which other securities are listed, and the rating of the effect (if any).	SEOJK 16 ARA SK 16	145-146
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) Information on the use of public accountants (AP) and public accounting firms (KAP)	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: Information on the use of public accounting services (AP) and public accounting firms (KAP) and their networks/associations/allies include:	SEOJK 16 SK 16	
	1. Nama dan alamat. Name and address.		147
	2. Periode penugasan. Assignment period.		147
	3. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan. Information on audit and/or non-audit services provided.		147
	4. Biaya jasa (<i>fee</i>) audit dan/atau non-audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku. Audit and/or non-audit service fees for each assignment given during the financial year.		147
	5. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut. In the event that the appointed AP and KAP and their network/ association/ alliance do not provide non-audit services, then the information should be disclosed.		147
	Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/ associations/allies can be presented in tabular form.		✓
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang. Name and address of the supporting institution and/or profession.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP. Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.	SEOJK 16 ARA SK 16	147-148
Penghargaan dan Sertifikasi. Awards and Certifications.	Informasi memuat antara lain: Information includes, among others:	SEOJK 9 ARA SK 16	
	1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi (berskala nasional dan internasional). Name of award and/or certification (national and international scale).		154-163
	2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi. Year of award and/or certification		154-163
	3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi. The awarding and/or certification body.		154-163
	4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). Validity period (for certification).		154-163

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
Informasi pada Website Perusahaan. Information on the Company's Website.	Meliputi paling kurang: Include at least:	ARA	164-165
	1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu. Shareholder information up to individual ultimate owners.		165
	2. Isi Kode Etik. Fill in the Code of Ethics.		165
	3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS) shall at least include material on the agenda discussed in the GMS, a summary of the minutes of the GMS, and information on important dates, namely the announcement date of the GMS, the date of the GMS summons, the date of the GMS, and the date on which the summary of the GMS minutes is announced.		165
	4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir). Separating annual financial statements (last 5 years).		165
	5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi. Profile of the Board of Commissioners and the Board of Directors.		165
	6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit.		165
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN / MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS OF COMPANY PERFORMANCE			
Rencana Strategis Bank Bank Strategic Plan	1. Rencana jangka panjang (<i>corporate plan</i>). Long term plan (<i>corporate plan</i>).	SEOJK 13	n/a
	2. Rencana jangka menengah dan pendek (<i>business plan</i>). Medium and short term plans (<i>business plans</i>).		n/a
Tinjauan operasi per segmen Usaha Operational review by business segment	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: Operational review per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16	220-237
	1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. Explanation of each business segment.		220-237
	2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: Performance per business segment, among others:		220-237
	a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya. Production including the process, capacity, and development.		220-237
	b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi. Increase/decrease in production capacity.		220-237
	c. Penjualan/pendapatan usaha. Sales/business income.		235-237
	d. Profitabilitas. Profitability.		235-237
Uraian atas kinerja keuangan Perusahaan Description of the company's financial performance	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (dalam bentuk narasi dan tabel), penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: Comprehensive financial performance including a comparison of financial performance in the last 2 (two) financial years (in the form of narratives and tables), an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding:	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16	237-269
	1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset. Current assets, non-current assets, and total assets.		240-249
	2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas. Short-term liabilities, long-term liabilities and total liabilities.		249-257
	3. Penanaman dana (investasi dan pemberian kredit/pembiayaan) dan total aset. Investments (investment and giving credit/financing) and total assets.		240-249
	4. Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain. Third party funds and other funding sources.		249-257
	5. Ekuitas. Equity		257-258
	6. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif. Revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss).		258-266

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
	7. Arus kas. Cash flow.		266-269
	8. Suku bunga dasar kredit. Interest rate on credit.		n/a
Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan. Analysis of the quality of earning assets and relevant financial ratios.		SEOJK 9	n/a
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan. Discussion and analysis of the ability to pay debts and the level of collectibility of the company's receivables, by presenting the relevant ratio calculations according to the type of company industry.	Penjelasan tentang: Explanation of:	SEOJK 16 ARA SK 16	
	1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek (likuiditas) maupun jangka panjang (solvabilitas). Ability to pay debts, both short term (liquidity) and long term (solvability).		269-271
	2. Tingkat kolektibilitas piutang. Accounts receivable collectibility level.		271-272
Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy). Discussion on capital structure and management policy on capital structure (capital structure policy).	Penjelasan atas: Explanation above:	SEOJK 16 ARA SK 16	272-274
	1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas. Details of the capital structure consisting of interest-based debt/sukuk and equity.		272-273
	2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies). Management policies on capital structure (capital structure policies).		273
	3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen. The basis for selecting management policies.		273-274
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir. Discussion on material commitments for capital goods investment (not funding commitments) in the last financial year.	Penjelasan tentang: Explanation of:		274-275
	1. Nama pihak yang melakukan ikatan. The name of the party making the bond.		274
	2. Tujuan dari ikatan tersebut. The purpose of the bond.		274
	3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut. Sources of funds are expected to fulfill these ties.		274
	4. Mata uang yang menjadi denominasi. The currency to be denominated.		274
	5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Measures the company plans to hedge the risk of its associated foreign currency positions.		274-275
	Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan. Notes: if the company has no commitments related to investment in capital goods in the last financial year, it should be disclosed.		
Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi. Discussion and analysis of financial information that has been reported containing extraordinary and rare events.		SK 16	276
Uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan. A description of the substantial components of other income and expenses, in order to be able to find out the results of the company's operations.		SK 16	276

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru. If the financial statements reveal a material increase or decrease in sales or net income, it must be accompanied by a discussion of the extent to which these changes can be related to the number of goods or services sold, and or the existence of new products or services.		SK 16	276
Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun. Discussion on the impact of price changes on the company's sales or net income as well as the company's operating profit for 2 (two) years or since the company started its business, if it has only started its business for less than 2 (two) years.		SK 16	276
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir. Discussion of investment in capital goods realized in the last financial year.	Penjelasan tentang: Explanation of:	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16	275
	1. Jenis investasi barang modal. Types of capital goods investment.		275
	2. Tujuan investasi barang modal. The purpose of capital goods investment.		275
	3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. The investment value of capital goods issued in the last financial year.		275
	Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan. Notes: if there is no realization of capital goods investment, it should be disclosed.		
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Information and Material Facts After the Accountant's Report Date	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan. Description of significant events after the date of the accountant's report including their impact on future business performance and risks. Note: if there is no significant event after the date of the accountant's report, it should be disclosed.		276-278
Uraian tentang prospek usaha perusahaan. A description of the company's business prospects.	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. The business prospects of the Issuer or Public Company are related to industrial conditions, the general economy and the international market along with quantitative supporting data from reliable data sources.	SEOJK 16 ARA SK 16	278-283
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang. Comparison information between the target at the beginning of the financial year with the results achieved (realization), and the targets or projections to be achieved for the coming year.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: Comparison between the target/projection at the beginning of the financial year with the results achieved (realization), regarding:		284-288
	1. Pendapatan/penjualan. Sales revenue.	SEOJK 16 ARA	285
	2. Laba (rugi). Profit and loss.		285
	3. Struktur modal (<i>Capital structure</i>). Capital structure	SEOJK 16	284-285
	4. Pemasaran. Marketing	ARA	-

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
	5. Pengembangan SDM. HR Development.	ARA	-
	6. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Other matters deemed important to the Issuer or Public Company.	SEOJK 16 ARA	286, 286-288
	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: Targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding:		284-288
	1. Pendapatan/penjualan. Sales revenue.	SEOJK 16 ARA	285
	2. Laba (rugi). Profit and loss.		285
	3. Struktur modal (<i>capital structure</i>). Capital structure.	SEOJK 16	285
	4. Kebijakan dividen. Dividend policy.		285
	5. Pemasaran. Marketing	ARA	-
	6. Pengembangan SDM. HR Development.	ARA	-
	7. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Other matters deemed important to the Issuer or Public Company.	SEOJK 16 ARA	286, 286-288
Uraian tentang aspek pemasaran. A description of the marketing aspect.	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar. The marketing aspect of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share.	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16	211-213
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Description of dividends for the last 2 (two) financial years.	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: Description of dividends for the last 2 (two) financial years, at least:	SEOJK 16 ARA SK 16	288
	1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih. Dividend policy contains information on the percentage of dividends distributed to net income.		288
	2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas. Cash dividend payment date and/or non-cash dividend distribution date.		288
	3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas). Total dividends per share (cash and/or non-cash).		288
	4. Jumlah dividen per tahun yang dibayar. Amount of dividends per year paid.		288
	Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya. Note: if there is no dividend distribution, the reasons should be disclosed		
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) Realization of the use of proceeds from the public offering (in the event that the company is still required to submit a report on the realization of the use of funds)	Memuat uraian mengenai: It contains a description of:	SEOJK 16 ARA SK 16	289-291
	1. Total perolehan dana. Total fundraising		289-291
	2. Rencana penggunaan dana. Fund use plan.		289-291
	3. Rincian penggunaan dana. Details of the use of funds.		289-291
	4. Saldo dana. Fund balance.		289-291
	5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). The date of approval of the GMS/RUPO for changes in the use of funds (if any).		-
	a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku. b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.		
	a. In the event that during the financial year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the financial year. b. In the event that there is a change in the use of funds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority regarding the report on the realization of the use of proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change.		
	Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan. Note: if there is no information on the realization of the use of proceeds from the public offering, it should be disclosed.		

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
<p>Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan.</p> <p>Material information (if any), including investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliate transactions, and conflict of interest transactions.</p>	<p>Memuat uraian mengenai: It contains a description of:</p>	<p>SEOJK 16 ARA SK 16</p>	292-298
	a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi. Date, value, and transaction object.		292
	b. Nama pihak yang melakukan transaksi. The name of the party conducting the transaction.		292, 295-296
	c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada). The nature of the affiliation relationship (if any).		295-296
	d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi. Explanation of the fairness of the transaction.		298
	e. Pemenuhan ketentuan terkait. Fulfillment of related provisions.		298
	f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka a) sampai dengan angka f), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: In the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in points a) to number f), the Issuer or Public Company also discloses information:		
	1. Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>armslength principle</i>). Statement of the Board of Directors that affiliate transactions have gone through adequate procedures to ensure that affiliate transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices by complying with the arms-length principle.		298
	2. Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms length principle</i>). The role of the Board of Commissioners and the audit committee is to carry out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices by complying with the arm's length principle.		298
	g. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. For affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously. In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements should be added.		
h. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/ atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut. For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions should be added.	<p>SEOJK 16 SEOJK 13 ARA SK 16</p>	293	
i. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, this matter shall be disclosed.		293	

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir. A description of changes in the laws and regulations of the company in the last financial year	Uraian memuat antara lain: The description includes, among others:	SEOJK 16 ARA SK 16	299-301
	1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan. Name of the legislation that has changed.		299-301
	2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. The impact (quantitative and/or qualitative) on the company (if significant) or a statement that the impact is not significant.		299-301
	Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. Note: if there are no changes to the laws and regulations in the last financial year, the information should be disclosed.		
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir. A description of changes in the laws and regulations of the company in the last financial year.	Uraian memuat antara lain: The description includes, among others:	SEOJK 16 ARA SK 16	302
	1. Perubahan kebijakan akuntansi. Changes in accounting policies.		302
	2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi. Reasons for changes in accounting policies.		302
	3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan Quantitative impact on financial statements.		302
Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. Note: If there is no change in accounting policy in the last financial year, it must be disclosed.			
Informasi kelangsungan usaha. Business continuity information	Pengungkapan informasi mengenai: Disclosure of information regarding:	ARA	303-305
	1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir. Things that have the potential to have a significant effect on the company's business continuity in the last financial year.		303
	2. <i>Assessment</i> manajemen atas hal-hal pada angka Management's assessment of the items in number 1.		303
	3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan <i>assessment</i> . Assumptions used by management in conducting the assessment.		305
Catatan: Apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir. Note: If there are no matters that have the potential to significantly affect the company's business continuity in the last financial year, the assumptions underlying management in believing that there are no matters that have the potential to significantly affect the company's business continuity in the last financial year.			
Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan. Information on Risk Exposure and Capital.	Eksposur risiko dan permodalan meliputi laporan eksposur risiko dan permodalan periode tahunan sebagaimana diatur dalam bagian II Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan. Risk and capital exposures include annual period risk and capital exposure reports as stipulated in Part II of the risk and capital exposure publication report.	SEOJK 9	n/a
TATA KELOLA PERUSAHAAN / CORPORATE GOVERNANCE			
RUPS GMS.	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1(satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the financial year and 1(one) year prior to the financial year includes:	SEOJK 16	312-349
	a. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1(satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku. GMS decisions in the financial year and 1(one) year before the financial year are realized in the financial year.		314-332
	b. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1(satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan. GMS resolutions for the financial year and 1(one) year before the financial year that have not been realized and the reasons for not being realized.		333-349
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independent dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, this matter shall be disclosed.		349

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
Direksi Directors.	1. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors. Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form.	SEOJK 13 SEOJK 16 ARA SK 16	349-355
	2. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi. A statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors.	SEOJK 16 ARA	355-356
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Informasi memuat antara lain: a. Tanggal Rapat. b. Peserta Rapat. c. Agenda Rapat. Policy and implementation of the frequency of Board of Directors meetings, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in these meetings including attendance at the GMS. Information on the level of attendance of members of the Board of Directors at the meeting of the Board of Directors, the meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS can be presented in tabular form. Information includes: a. Meeting Date. b. Meeting participants. c. Meeting agenda.	SEOJK 16 ARA SK 16	356-375
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: Training and/or competency improvement of members of the Board of Directors:	SEOJK 16 SK 16	375-376
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada). Policy on training and/or competency improvement for members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any).		375-377
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada). Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the financial year (if any).		376
	5. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: The Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the duties of the Board of Directors in the financial year shall at least contain:	SEOJK 16 ARA	378-379
	a. Prosedur penilaian kinerja. Performance appraisal procedure.		378-379
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat. The criteria used are performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings.		378-379
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.		
	6. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada: a. Bank yang bersangkutan. b. Bank lain. c. Lembaga keuangan bukan bank. d. Perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.	SEOJK 13	n/a
	6. Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners which reaches 5% (five percent) or more of the paid-up capital, which includes the type and number of shares in: a. The bank concerned. b. another bank. c. Non-bank financial institutions. d. Other companies located both at home and abroad.		

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
Dewan Komisaris. Board of Commissioners.	1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Duties and responsibilities of the Board of Commissioners	SEOJK 13 SEOJK 16 ARA SK 16	380-388
	2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris. A statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners.	SEOJK 16 ARA	387-388
	3. Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris). Meliputi antara lain: 1) Kriteria penentuan Komisaris Independen. 2) Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen Independent Commissioner (minimum 30% of the total Board of Commissioners). Include among others: 1. Criteria for determining the Independent Commissioner. 2. Statement on the independence of each Independent Commissioner.	ARA	388
	4. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Informasi memuat antara lain: a. Tanggal Rapat. b. Peserta Rapat. c. Agenda Rapat. Policy and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings, including attendance at the GMS. Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form. Information includes: a. Meeting Date. b. Meeting participants. c. Meeting agenda.	SEOJK 13 SEOJK 16 ARA SK 16	389-406
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	SEOJK 16	406-409
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada). Policy on training and/or improving the competence of members of the Board of Commissioners, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any).		406-409
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada). Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the financial year (if any).		407-408
	6. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:	SEOJK 16	414-419
	a. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja. Performance appraisal procedures.		414-419
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat. The criteria used are performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings.		416-417
	c. Pihak yang melakukan penilaian. The party conducting the assessment.		417
	7. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: The Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the financial year includes:	SEOJK 16 ARA	420-421
	a. Prosedur penilaian kinerja. Performance appraisal procedure.		420-421
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat. The criteria used are performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings.		420-421

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
<p>Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.</p> <p>Policy regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Description of the Company's written policies regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors in education (field of study), work experience, age, and gender.</p>	<p>Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya. Note: if there is no such policy, the reasons and considerations should be disclosed.</p>	ARA	
<p>Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners.</p>	<p>Paling sedikit memuat: At least it contains:</p>		426-429
	<p>1. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. The nomination procedure includes a brief description of the nomination policies and processes for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.</p>	SEOJK 16	426
	<p>2. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, such as:</p>	SEOJK 16 ARA SK 16	426-427
	<p>a. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Procedure for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners.</p>		427
	<p>b. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Disclosure of indicators for determining the remuneration of the Board of Directors</p>		427
	<p>c. Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan The remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners, such as salaries, allowances, bonuses and others; and</p> <p>Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan. Note: if there are no performance bonuses, non-performance bonuses, and stock options received by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors, they must be disclosed</p>		427-429
	<p>d. Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.</p>		429
<p>e. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan. Disclosure of performance bonuses, non-performance bonuses, and/or stock options received by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors (if any). Note: if there are no performance bonuses, non-performance bonuses, and stock options received by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors, they must be disclosed.</p>		426-429, 516	

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
<p>Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.</p> <p>Sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association.</p>	Paling sedikit memuat: At least it contains:	SEOJK 16	
	a. Nama. Name		n/a
	b. Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah. The legal basis for the appointment of the Sharia Supervisory Board.		n/a
	c. Periode penugasan Dewan Pengawas Syariah. The period of assignment of the Sharia Supervisory Board.		n/a
	d. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah The duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board.		n/a
	e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. Frequency and method of giving advice and suggestions as well as supervision of compliance with sharia principles in the capital market to Issuers or Public Companies.		n/a
<p>Komite Audit. Audit Committee.</p>	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite. Name and position in committee membership.	SEOJK 16 ARA SK 16	432-433
	2. Usia. Age	SEOJK 16 ARA	432-433
	3. Kewarganegaraan. Citizenship		432-433
	4. Riwayat pendidikan. Educational background.		432-433
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:	SEOJK 16 ARA SK 16	432-433
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite. Legal basis for appointment as committee member.		432-433
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada). Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the board of directors, and/or committee member as well as other positions (if any).		432-433
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik. Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company.		432-433
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit. Period and term of office of audit committee members.	SEOJK 16 ARA SK 16	432-433
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab. Description of duties and responsibilities.	SEOJK 13 ARA SK 16	430-431
	8. Pernyataan independensi komite audit. Statement of independence of the audit committee.	SEOJK 16 ARA SK 16	433-434
9. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada). Training and/or competency improvement that have been attended in the financial year (if any).	SEOJK 16	434	
10. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut. Policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in these meetings.	SEOJK 13 SEOJK 16 ARA SEOJK 13 SK 16	434-437	
11. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite audit. The implementation of the audit committee's activities in the financial year is in accordance with what is stated in the guidelines or charter of the audit committee.		438	

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
<p>Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Committee or function of nomination and remuneration of Issuers or Public Companies.</p>	Paling sedikit memuat: At least it contains:		440-441
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite. Name and position in committee membership.	SEOJK 16 ARA SK 16	440-441
	2. Usia. Age		440-441
	3. Kewarganegaraan. Citizenship		440-441
	4. Riwayat pendidikan. Educational background.		440-441
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:		440-441
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite. Legal basis for appointment as committee member.		440-441
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada). Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any).		440-441
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company.		440-441
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit. The period and term of office of the committee members.		440-441
	7. Pernyataan independensi komite.. Committee independence statement.		441
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada). Training and/or competency improvement that have been attended in the financial year (if any).		441-442
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab. Description of duties and responsibilities.		439
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>). A statement that has a guideline or charter (<i>charter</i>).		438
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut. Policy and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members in the meeting.		442-443
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku. Policy regarding the succession of the Board of Directors.		444-446
13. Kebijakan mengenai suksesi Direksi. Policy regarding the succession of the Board of Directors.	426		
Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: In the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:			
1) Alasan tidak dibentuknya komite Reason for not forming the committee		n/a	
2) Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi. The party carrying out the nomination and remuneration functions.		n/a	

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
<p>Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris.</p> <p>Other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners.</p>	<p>Paling sedikit memuat: At least it contains:</p>	SEOJK 16 ARA	448-450
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite. Name and position in committee membership.		448-450
	2. Usia. Age		448-450
	3. Kewarganegaraan. Citizenship		448-450
	4. Riwayat pendidikan. Educational background.		448-450
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite. Legal basis for appointment as committee member.		448-450
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada). Concurrent positions, either as a member of the board of commissioners, member of the board of directors, and/or committee member as well as other positions (if any).		448-450
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company.		448-450
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit. The period and term of office of the committee members.		448-450
	7. Pernyataan independensi komite audit. Committee independence statement.		450
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada). Training and/or competency improvement that have been attended in the financial year (if any).		450-451
9. Uraian tugas dan tanggung jawab. Description of duties and responsibilities.	447-448		
10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite. A statement that has a committee guideline or charter.	447		
11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut. Policy and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting.	451-453		
12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku. Brief description of the committee's activities for the financial year.	453		
<p>Sekretaris perusahaan. Company secretary.</p>	1. Nama. Name.	SEOJK 16 ARA	471
	2. Domisili. Domicile.		471
	3. Riwayat jabatan, meliputi : Position history, including information on:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan. Legal basis for appointment as Company Secretary.		471
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik. Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company.		471
	4. Riwayat pendidikan. Educational background.		471
5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku. Training and/or competency improvement that was followed during the financial year.	471		
6. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. A brief description of the implementation of the duties of the company secretary in the financial year.	472-475		

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
Unit Audit Internal. Internal Audit Unit.	1. Nama kepala unit audit internal. The name of the head of the internal audit unit.	SEOJK 16 ARA	476
	2. Riwayat jabatan, meliputi: Position history, including:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal. Legal basis for appointment as head of internal audit unit.		476
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik. Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company.		476
	3. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada). Qualification or certification as an internal audit profession (if any).		476, 477
	4. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal. Number of employees (internal auditors) in the internal audit unit.		477
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku. Training and/or competency improvement that was followed during the financial year.		478
	6. Struktur dan kedudukan unit audit internal. The structure and position of the internal audit unit.		475-476
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab. Description of duties and responsibilities.		481-482
8. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) unit audit internal. A statement that has a guideline or charter for the internal audit unit.	480-481		
9. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/ atau komite audit. A brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the financial year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the board of directors, board of commissioners, and/or audit committee.	482-486		
Akuntan Publik. Public Accountant.	1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir. Name and year of the public accountant who audited the annual financial statements for the last 5 years.	ARA	487-488
	2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir. Name and year of the Public Accounting Firm that has audited the annual financial statements for the last 5 years.		487-488
	3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir. The amount of the fee for each type of service provided by the Public Accounting Firm in the last financial year.		487-488
	4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan public selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Other services provided by Public Accounting Firms and public accountants in addition to auditing the annual financial statements for the last financial year.		488
	Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan. Note: if there is no other service, it should be disclosed.		
Uraian mengenai system pengendalian internal (<i>internal Control</i>) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik. A description of the internal control system implemented by the issuer or public company.	1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations.	SEOJK 13 SEOJK 16 ARA	490-491
	2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO - <i>internal control framework</i>). Explanation of the suitability of the internal control system with an internationally recognized framework (COSO - internal control framework).		492
	3. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal. Review of the effectiveness of the internal control system.		492
	4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan system pengendalian internal. Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system.	SEOJK 16	493

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
<p>Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. The risk management system implemented by the Issuer or Public Company.</p>	1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik. An overview of the risk management system of the Issuer or Public Company.	SEOJK 16 SEOJK 13 ARA	495-500
	2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya. Types of risks and how to manage them.		500-507
	3. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik. Review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system.		507-508
	4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko. Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system.	SEOJK 16	508
<p>Fungsi kepatuhan. Compliance function.</p>	<p>Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang. The level of the Bank's compliance with all provisions and laws and regulations as well as the fulfillment of commitments with the competent authorities.</p>	SEOJK 13	n/a
<p>Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada). Legal cases that have a material impact faced by issuers or public companies, subsidiaries, members of the board of directors and members of the board of commissioners (if any).</p>	1. Pokok perkara/gugatan. Subject matter/lawsuit.	SEOJK 16 ARA	509-510
	2. Status penyelesaian perkara/gugatan. Status of settlement of cases/lawsuits.		509-510
	3. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan. The effect on the condition of the issuer or public company. The risk faced by the company and the nominal value of the claim.		509-510
	4. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. The effect on the company's financial condition.	SK 16	509-510
	5. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling sedikit mencakup: a. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. b. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian. Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan. 5. Disclosures regarding legal issues include at least: a. the number of civil and criminal problems faced and have received decisions that have permanent legal force. b. the number of civil and criminal problems faced and still in the process of being resolved. Note: in the event that the company, subsidiaries, members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors do not have important matters, they must be disclosed.	SEOJK 13	✓
<p>Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang Dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota dewan komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada). Information on administrative sanctions/sanctions imposed on issuers or public companies, members of the board of commissioners and members of the board of directors, by the Financial Services Authority and other authorities in the financial year (if any).</p>		SEOJK 16 ARA	510
<p>Akses informasi dan data perusahaan: Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya. Access to company information and data: A description of the availability of access to company information and data to the public, for example through the website (in Indonesian and English), mass media, mailing lists, bulletins, meetings with analysts, and so on.</p>		ARA	510-513

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page	
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik. Information regarding the code of ethics of the Issuer or Public Company.	1. Pokok-pokok kode etik. Code of ethics points.	SEOJK 16 ARA	513-514	
	2. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi. A statement that the code of ethics applies to all levels of the organization.		514	
	3. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya. Forms of socialization of the code of ethics and efforts to enforce it		514	
	4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif). Sanctions for each type of violation are regulated in the code of ethics (normative).		515	
	5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. The number of violations of the code of ethics along with the sanctions given in the last financial year.		-	
	Catatan: Apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. Note: If there is no violation of the code of ethics in the last financial year, it must be disclosed.			
	6. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan. A statement regarding the company's corporate culture.	SK 16	515	
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank. Implementation of Good Corporate Governance in Providing Remuneration for Banks.	1. Komite Remunerasi a. Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab. b. Jumlah rapat yang dilakukan. c. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun.	POJK 45	n/a	
	1. Remuneration Committee a. Name of members, composition, duties and responsibilities. b. Number of meetings held. c. Remuneration that has been paid to members of the Remuneration Committee for 1 (one) year.			
	2. Proses penyusunan kebijakan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi. b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya. c. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.		n/a	
	2. Remuneration policy formulation process which includes: a. Overview of the background and objectives of the Remuneration policy. b. The implementation of a review of the Remuneration policy in the previous year, along with its improvements. c. Mechanisms to ensure that the remuneration for employees in the control unit is independent from the work units they supervise.			
	3. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri 3. Remuneration policy scope and implementation per business unit, per region and at subsidiaries or branch offices located overseas		n/a	
4. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi: a. Jenis risiko utama (<i>key risk</i>) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi. b. Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur. c. Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel. d. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada.		n/a		
4. Remuneration is associated with risks which include: a. The type of main risk (key risk) used in implementing the Remuneration. b. Criteria for determining the main types of risk, including those that are difficult to measure. c. The impact of determining the main risk on the Variable Remuneration policy. d. Changes in the determination of the main risk types compared to last year and the reasons, if any.				

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
	<p>5. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi. <p>5. Performance measurement is related to Remuneration which includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Overview of the Remuneration policy related to performance appraisal. Methods in linking individual remuneration with bank performance, work unit performance and individual performance. A description of the method used by the Bank to state that the agreed performance cannot be achieved so that it is necessary to make adjustments to the remuneration and the amount of remuneration adjustments if such conditions occur. 		n/a
	<p>6. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (<i>malus</i>), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (<i>clawback</i>). <p>6. Remuneration adjustments are related to Performance and Risk which include:</p> <ol style="list-style-type: none"> Policy regarding deferred Variable Remuneration, the amount, and the criteria for determining the amount. Bank Policy regarding Variable Remuneration which is deferred which is delayed in payment (<i>malus</i>), or withdrawn when it has been paid (<i>clawback</i>). 		n/a
	<p>7. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, apabila Bank menggunakan jasa konsultan eksternal</p> <p>The name of the external consultant and the consultant's duties related to the Remuneration policy, if the Bank uses the services of an external consultant</p>		n/a
	<p>8. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.</p> <p>The remuneration package and facilities received by the Board of Directors and the Board of Commissioners include the structure of the remuneration and details of the nominal amount.</p>		n/a
	<p>9. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut. dan Penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai. <p>9. Variable Remuneration, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> Variable forms of remuneration and the reasons for choosing this form. and Explanation if there are differences in the provision of Variable Remuneration among the Directors, Board of Commissioners and/or Employees. 		n/a
	<p>10. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya.</p> <p>The number of Directors, Board of Commissioners and Employees who receive Variable Remuneration for 1 (one) year, and the total nominal value.</p>		n/a
	<p>11. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material <i>risk takers</i>.</p> <p>Position and number of parties who are material risk takers.</p>		n/a
	<p>12. <i>Shares option</i> yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.</p> <p>Shares options owned by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Executive Officers.</p>		n/a
	<p>13. Rasio gaji tertinggi dan terendah</p> <p>Highest and lowest salary ratio</p>		n/a
	<p>14. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja</p> <p>The number of recipients and the total amount of Variable Remuneration guaranteed unconditionally will be given by the Bank to candidates for Directors, candidates for the Board of Commissioners, and/or prospective employees for the first 1 (one) year of work</p>		n/a
	<p>15. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan</p> <p>Number of employees affected by termination of employment and the total nominal amount of severance pay paid</p>		n/a

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
	16. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank. The total amount of deferred Variable Remuneration consisting of cash and/or shares or share-based instruments issued by the Bank.		n/a
	17. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun. The total amount of deferred Variable Remuneration paid for 1 (one) year.		n/a
	18. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi: a. Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. b. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan. c. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank. 18. Details of the amount of remuneration given in one year include: a. Fixed or variable remuneration. b. Deferred and non-deferred remuneration. c. The form of remuneration given in cash and/or shares or sharebased instruments issued by the Bank.		n/a
	19. Informasi kuantitatif mengenai: a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit. b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan. c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan. 19. Quantitative information regarding: a. Total remaining Remuneration that is still deferred, both those exposed to implicit and explicit adjustments. b. Total Remuneration reduction due to explicit adjustments during the reporting period. c. Total Remuneration reduction due to implicit adjustments during the reporting period.		n/a
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten Atau perusahaan public (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee Stock ownership program/ESOP</i>). A brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the issuer or public company (if any), including the management stock ownership program ownership program/MSOP) and/ or employee stock ownership program (ESOP).	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock Ownership program/MSOP</i>) dan/atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock Ownership program/ESOP</i>). Informasi yang diungkapkan Paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP). Information disclosed shall at least contain: 1. Jumlah saham dan/atau opsi. Number of shares and/or options. 2. Jangka waktu pelaksanaan. Implementation period. 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak. Requirements for eligible employees and/or management. 4. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan. Exercise price or determination of exercise price.	SEOJK 16	516
			516
			516
			516
Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi mengenai A brief description of the Information disclosure policy regarding	1. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka. Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a public company. 2. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud. Implementation of the mentioned policy.	SEOJK 16 ARA	516
			516

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
<p>Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik. A description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company.</p>	1. Cara penyampaian laporan pelanggaran. How to submit a violation report.	SEOJK 16 ARA	518-520
	2. Perlindungan bagi pelapor. Protection for whistleblowers.		520-521
	3. Penanganan pengaduan. The handling of complaints.		521
	4. Pihak yang mengelola pengaduan. The party that manages the complaint.		521
	5. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: The results of handling complaints, at least:		
	a. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Dalam tahun buku. Number of complaints received and processed in the financial year.		522
	b. Tindak lanjut pengaduan. Follow up complaints.		522-523
	Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the issuer or public company does not have a whistleblowing system, then this should be disclosed.		n/a
<p>Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik. A description of the anticorruption policy of the Issuer or Public Company.</p>	1. Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>Fraud</i> , suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik. Programs and procedures carried out in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities in Issuers or Public Companies.	SEOJK 16 ARA	523-532
	2. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik. Anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies.		532
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak Dimilikinya kebijakan dimaksud. In the event that the issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy should be explained.		n/a
<p>Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>). Provision of funds to related parties and provision of large funds (large exposure).</p>	<p>Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan kepada debitur inti (<i>individu atau grup</i>) per posisi laporan Information that needs to be disclosed is the total amount of debit balances providing funds to related parties and to core debtors (individuals or groups) per report position.</p>	SEOJK 13	n/a
<p>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lain. Transparency of the Bank's financial and non-financial conditions that have not been disclosed in other reports.</p>		SEOJK 13	n/a
<p>Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank. Other information related to Bank Governance, among others in the form of owner intervention, internal disputes or problems that arise as a result of the remuneration policy of the Bank.</p>		SEOJK 13	n/a
<p>Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>). Number of Deviations (Internal Fraud).</p>	<p>Pengungkapan mengenai penyimpangan (<i>internal fraud</i>) paling sedikit mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang telah diselesaikan. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang sedang dalam proses penyelesaian di internal bank. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang belum diupayakan penyelesaian di internal bank. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum. <p>Disclosure of irregularities (<i>internal fraud</i>) includes at least:</p> <ol style="list-style-type: none"> Number of irregularities (<i>internal fraud</i>) that have been resolved. The number of irregularities (<i>internal fraud</i>) that are in the process of being resolved at the internal bank. The number of irregularities (<i>internal fraud</i>) that has not been attempted to be resolved in the internal bank. Number of irregularities (<i>internal fraud</i>) that have been followed up through the legal process. 		n/a

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>) Saham dan/atau Obligasi Bank. Buy Back Bank Shares and/or Bonds.	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham atau obligasi Bank. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali. Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi. 	SEOJK 13	n/a
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan. Provision of Funds for Social Activities and/or Political Activities During the Reporting Period.	<p>Pengungkapan mengenai pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik paling sedikit meliputi pihak penerima dana dan jumlah dana yang diberikan.</p> <p>Disclosure regarding the provision of funds for social activities and/or political activities shall at least include the party receiving the funds and the amount of the funds given.</p>	SEOJK 13	n/a
Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik. Implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers who issue equity securities or Public Companies.	<ol style="list-style-type: none"> Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan dan/atau Statement regarding recommendations that have been implemented and/or 	SEOJK 16	533-539
	<ol style="list-style-type: none"> Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). Explanation of recommendations that have not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any). 		533-539
	<p>Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.</p>		✓
Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2021 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi. Assessment of GCG Implementation for the 2021 financial year which includes at least aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors.	<p>Memuat uraian mengenai: Contains a description of:</p>	SEOJK 16	
	<ol style="list-style-type: none"> Kriteria yang digunakan dalam penilaian Criteria used in the assessment 		539
	<ol style="list-style-type: none"> Pihak yang melakukan penilaian The party conducting the assessment 		540
	<ol style="list-style-type: none"> Skor penilaian masing-masing kriteria Assessment score for each criterion 		540
	<ol style="list-style-type: none"> Rekomendasi hasil penilaian. Recommended assessment results 		541-543
<ol style="list-style-type: none"> Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Reasons for not/not implementing recommendations. 			
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK / SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF THE ISSUER OR PUBLIC COMPANY			
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Corporate social responsibility.	<ol style="list-style-type: none"> Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: Information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, containing at least: 	SEOJK 16	
	<ol style="list-style-type: none"> Penjelasan strategi keberlanjutan. Sustainability strategy explanation. 		✓
	<ol style="list-style-type: none"> Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup). Summary of sustainability aspects (economic, social, and environmental). 		✓
	<ol style="list-style-type: none"> Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik. Brief profile of the Issuer or Public Company. 		✓
	<ol style="list-style-type: none"> Penjelasan Direksi. Explanation of the Board of Directors 		✓
	<ol style="list-style-type: none"> Tata kelola keberlanjutan. Sustainability governance. 		✓
	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja keberlanjutan. Sustainability performance. 		✓
	<ol style="list-style-type: none"> Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada. Written verification from an independent party, if any. 		✓
	<ol style="list-style-type: none"> Lembar umpan balik (<i>feedback</i>) untuk pembaca, jika ada. Feedback sheet for readers, if any. 		✓
	<ol style="list-style-type: none"> Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya. Issuer's or Public Company's response to the previous year's report feedback. 		-

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
	<p>2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.</p>		✓
	<p>3. Informasi Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) pada angka 1) dapat: Information on the Sustainability Report in number 1) can:</p>		
	<p>a) Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/ atau Be disclosed in other relevant sections outside of the social and environmental responsibility section, such as the Directors explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or</p>		✓
	<p>b) Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik. Refer to other sections outside the social and environmental responsibility section while still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as profiles Issuer or Public Company.</p>		✓
	<p>4. Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan. The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report.</p>		✓
	<p>5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the said Sustainability Report must:</p>		
	<p>a) Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan Contain all the information as referred to in number 1); and</p>		n/a
	<p>b) Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Be compiled according to the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.</p>		n/a
	<p>6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan. In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section contains information that information regarding social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report.</p>		n/a
	<p>7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the submission of the Annual Report.</p>		n/a

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
INFORMASI KEUANGAN / FINANCIAL INFORMATION			
Surat Pernyataan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Statement Letter of the Board of Directors and/or Board of Commissioners regarding Responsibility for Financial Statements.	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Compliance with related regulations regarding Responsibility for Financial Statements.	ARA	LK Halaman Surat Pernyataan Direksi FS Page Statement Letter of the Board Of Directors
Opini auditor independen atas laporan keuangan. Independent auditor's opinion on the financial statements.		ARA	LK Halaman Opini Auditor FS Page Auditor's Opinion
Deskripsi Auditor Independen di Opini. Description of the Independent Auditor in Opinion.	Deskripsi memuat tentang: The description contains about:	ARA	LK Halaman Opini Auditor FS Page Auditor's Opinion
	1. Nama dan tanda tangan. Name and signature.		LK Halaman Opini Auditor FS Page Auditor's Opinion
	2. Tanggal Laporan Audit Audit Report Date		LK Halaman Opini Auditor FS Page Auditor's Opinion
	3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. Public Accountant Office's license number and Public Accountant license number.		LK Halaman Opini Auditor FS Page Auditor's Opinion
Laporan keuangan yang lengkap. Complete financial reports.	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: Completely contains the elements of the financial statements:	ARA	
	1. Laporan posisi keuangan. Statement of financial position.		LK Hal. 1-2 FS Page 1-2
	2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Statement of profit or loss and other comprehensive income.		LK Halaman 3 FS Page 3
	3. Laporan perubahan ekuitas. Statement of Changes in Equity.		LK Halaman 4 FS Page 4
	4. Laporan arus kas. Cash flow statement.		LK Halaman 5-6 FS Page 5-6
	5. Catatan atas laporan keuangan. Notes to financial statements.		LK Halaman 7-194 FS Page 7-194
	6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Comparative information about the previous period.		LK Halaman 1-194 FS Page 1-194
	7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya Ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membunyah kembali pos-pos laporan keuangan, atau Ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). Statement of financial position at the beginning of the previous period when the entity applies an accounting policy retrospectively or restates financial statement items, or when the entity reclassifies items in its financial statements (if relevant).		

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
Perbandingan tingkat profitabilitas. Comparison of profitability levels.	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya Comparison of performance/profit (loss) for the current year with the previous year	ARA	LK Halaman 3 FS Page 3
Laporan Arus Kas. Cash flow statement.	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: It should meet the following conditions:	ARA	
	1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan. Grouping into three categories of activities: operating, investing, and financing.		LK Halaman 5-6 FS Page 5-6
	2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Use the direct method to report cash flows from operating activities.		LK Halaman 20 FS Page 20
	3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Separation of presentation between cash receipts and or cash disbursements during the year in operating, investing and financing activities.		LK Halaman 5-6 FS Page 5-6
	4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Disclosure of non-cash transactions must be included in the notes to the financial statements.		LK Halaman 179 FS Page 179
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi. Summary of Accounting Policies.	Meliputi sekurang-kurangnya: It includes at least:	ARA	
	1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK. Statement of compliance with Financial Accounting Standards.		LK Halaman 19-20 FS Page 19-20
	2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan. Basis of measurement and preparation of financial statements.		LK Halaman 20 FS Page 20
	3. Pajak penghasilan. Income tax.		LK Halaman 35 FS Page 35
	4. Imbalan kerja. Work benefits.		LK Halaman 41-42 FS Page 41-42
	5. Instrumen Keuangan. Financial Instruments.		LK Halaman 46-56 FS Page 46-56
Pengungkapan transaksi pihak berelasi. Disclosure of related party transactions.	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: The things that were disclosed included:	ARA	
	1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi. The name of the related party, as well as the nature and relationship with the related party.		LK Halaman 143-144 FS Page 161-164
	2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait. The transaction value and its percentage to the total related revenues and expenses.		LK Halaman 145-149 FS Page 145-149
	3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait. Total balance and its percentage to the total related assets or liabilities.		LK Halaman 145-149 FS Page 145-149

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan. Disclosures related to taxation.	Hal-hal yang harus diungkapkan: The matters should disclose:	ARA	
	1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini. Fiscal reconciliation and calculation of current tax burden.		LK Halaman 35-39 FS Page 35-39
	2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi. Explanation of the relationship between tax expense (income) and accounting profit.		LK Halaman 35-39 FS Page 35-39
	3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan. The statement that the taxable profit (LKP) resulting from the reconciliation is used as the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return.		LK Halaman 35-39, 73 FS Page 35-39, 73
	4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan. The details of deferred tax assets and liabilities recognized in the statement of financial position for each presentation period, and the amount of deferred tax expense (income) recognized in profit or loss if the amount is not reflected in the amount of deferred tax assets or liabilities recognized in the statement of financial position.		LK Halaman 73-74 FS Page 73-74
5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. Disclosure of whether or not there is a tax dispute.	LK Halaman 78-80 FS Page 78-80		
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap. Disclosures relating to fixed assets.	Hal-hal yang harus diungkapkan: The matters should disclose:	ARA	
	1. Metode penyusutan yang digunakan. The depreciation method used.		LK Halaman 29-31 FS Page 29-31
	2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya. A description of the accounting policy chosen between the revaluation model and the cost model.		LK Halaman 29-31 FS Page 29-31
	3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya). The significant methods and assumptions used in estimating the fair value of property, plant and equipment (for the revaluation model) or the disclosure of the fair value of property, plant and equipment (for the cost model).		LK Halaman 55-56 FS Page 55-56
4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. Reconciliation of the gross carrying amount and accumulated depreciation of property, plant and equipment at the beginning and end of the period by showing: additions, subtractions and reclassifications.	LK Halaman 89-93 FS Page 89-93		

Kriteria / Criteria	Penjelasan / Explanation	Regulasi / Regulation	Halaman / Page
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi. Disclosures relating to operating segments.	Hal-hal yang harus diungkapkan: The matters should disclose:	ARA	
	1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan. General information which includes the factors used to identify the reported segments.		LK Halaman 56 FS Page 56
	2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan. Information about the profit or loss, assets and liabilities of the reported segment.		LK Halaman 151-152 FS Page 151-152
	3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas. Reconciliation of total segment revenue, reportable segment profit or loss, segment assets, segment liabilities, and other material segment items to the related amounts within the entity.		LK Halaman 151-152 FS Page 151-152
	4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. Disclosure at the entity level, which includes information about products and/or services, geographic areas and key customers.		LK Halaman 166-167 FS Page 166-167
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan. Disclosures relating to Financial Instruments.	Hal-hal yang harus diungkapkan: The matters should disclose:	ARA	
	1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya. Details of financial instruments owned based on their classification.		LK Halaman 46-56 FS Page 46-56
	2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan. Fair values and their hierarchy for each group of financial instruments.		LK Halaman 154-155 FS Page 154-155
	3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Explanation of risks associated with financial instruments: market risk, credit risk and liquidity risk.		LK Halaman 153-157 FS Page 153-157
	4. Kebijakan manajemen risiko. Risk management policy.		LK Halaman 153-157 FS Page 153-157
	5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. Quantitative analysis of risks associated with financial instruments.		LK Halaman 153-157 FS Page 153-157
Penerbitan laporan keuangan. Issuance of financial statements.	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: The things that were disclosed include:	ARA	
	1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. The date the financial statements were authorized for issue.		LK Halaman Surat Pernyataan Direksi FS Page Statement Letter of the Board of Directors
	2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. The party responsible for authorizing the financial statements.		LK Halaman Surat Pernyataan Direksi FS Page Statement Letter of the Board of Directors

Keterangan / Information

SEOJK 16 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Financial Services Authority Circular No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies.

SEOJK 9 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Financial Services Authority Circular No. 9/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports.

SEOJK 13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Financial Services Authority Circular No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

POJK 45 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Financial Services Authority Regulation No. 45/POJK.03/2015 concerning Implementation of Good Corporate Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks.

ARA : Kriteria *Annual Report Award* / Annual Report Award Criteria

SK 16 : Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2021 tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

A copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2021 concerning Parameter Indicators for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

INDEKS POJK 51/2017 [OJK G.4]

Indeks POJK 51/2017 [OJK G.4]

No. Indeks / Index No.	Pengungkapan / Disclosure	Halaman / Page
STRATEGI KEBERLANJUTAN / SUSTAINABILITY STRATEGY		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan / Sustainability Strategy Explanation	546-548
IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN / SUSTAINABILITY PERFORMANCE HIGHLIGHTS		
B.1	Aspek Ekonomi / Economic Aspect	549
B.2	Aspek Lingkungan Hidup / Environmental Aspect	549
B.3	Aspek Sosial / Social Aspect	550
PROFIL PERUSAHAAN / COMPANY PROFILE		
C.1	Visi, misi, dan nilai keberlanjutan Perusahaan / Vision, mission, and values of sustainability of the Company	551
C.2	Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, email, dan situs resmi / Name, address, phone number, fax number, email, and official website	551
C.3	Skala Usaha (total aset atau kapitalisasi aset, total kewajiban, jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan), Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah), Wilayah operasional / Business Scale (total assets or assets capitalization, total liabilities, total employees by gender, position, age, education, and employment status), Share ownership percentage (public and government), Operational area	552
C.4	Penjelasan singkat produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan / Brief description of products, services, and business activities	92-99, 555
C.5	Keanggotaan pada asosiasi / Association membership	99, 555
C.6	Perubahan Perseroan yang bersifat signifikan misal terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan / Significant changes of the company, e.g., matters related to closing or opening of branches and ownership structure	556-557
PENJELASAN DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS EXPLANATION		
D.1	Penjelasan Direksi / Board of Directors Explanation	54-56
TATA KELOLA KEBERLANJUTAN / SUSTAINABLE GOVERNANCE		
E.1	Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan / Description of duties of the Board of Directors and Board of Commissioners, employees, officials, and/or work unit in charge of sustainable finance implementation	349-355
E.2	Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan / Explanation of competency development of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, employees, officials, and/or work unit in charge of sustainable finance implementation	406-409
E.3	Penjelasan mengenai prosedur Perusahaan Publik dalam mengendalikan risiko keberlanjutan / Explanation of procedures of Public Company in controlling sustainability risk	563-567
E.4	Penjelasan mengenai pemangku kepentingan (keterlibatan pemangku kepentingan dan pendekatan yang dilakukan Perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan baik berupa dialog, survei, seminar, dll) / Explanation of matters regarding stakeholders (stakeholder engagement and Company approach in engaging with stakeholders for Sustainable Finance implementation in the form of dialogues, surveys, seminars, etc.)	568-569
E.5	Permasalahan terhadap penerapan keuangan berkelanjutan / Issues on Sustainable Finance Implementation	570-572
KINERJA KEBERLANJUTAN / SUSTAINABILITY PERFORMANCE		
F.1	Kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal Perusahaan Publik / Efforts on building sustainability culture in the Public Company internal	580
KINERJA EKONOMI / ECONOMIC PERFORMANCE		
F.2	Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi / Comparison of target and performance of production, portfolio, payment target, or investment, revenues, and profit (loss)	582-583
F.3	Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan / Comparison of target and performance of production, portfolio, payment target, or investment on financial instruments or projects in line with Sustainable Finance implementation	583-584
UMUM / GENERAL ASPECT		
F.4	Biaya lingkungan hidup yang dikeluarkan / Environmental costs incurred	592-593
ASPEK MATERIAL / MATERIAL ASPECT		
F.5	Penggunaan material yang ramah lingkungan / Use of eco-friendly materials	593-594
ASPEK ENERGI / ENERGY ASPECT		
F.6	Jumlah dan intensitas energi yang digunakan / Total and intensity of energy used	594-596

No. Indeks / Index No.	Pengungkapan / Disclosure	Halaman / Page
F.7	Upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan / Effort and achievement of energy efficiency, including use of renewable energy	596-597
ASPEK AIR / WATER ASPECT		
F.8	Penggunaan air / Water usage	597-598
ASPEK KEANEKARAGAMAN HAYATI / BIODIVERSITY ASPECT		
F.9	Dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati / Impact of operational area in or near conservation or biodiverse area	599
F.10	Upaya konservasi keanekaragaman hayati / Biodiversity conservation efforts	599-601
ASPEK EMISI / EMISSION ASPECT		
F.11	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya / Total and intensity of emission generated by type	601-603
F.12	Upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan / Efforts and achievement of emission reduction	603-605
ASPEK LIMBAH DAN EFLUEN / WASTE AND EFFLUENT ASPECT		
F.13	Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenisnya / Total waste and effluent generated by type	605
F.14	Mekanisme pengelolaan limbah dan efluen / Waste and effluent management mechanism	606-609
F.15	Tumpahan yang terjadi (jika ada) / Spills occurred (if any)	610
ASPEK PENGADUAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP / COMPLAIN ON ENVIRONMENTAL ISSUES ASPECT		
F.16	Jumlah dan materi pengaduan lingkungan hidup yang diterima dan diselesaikan / Total and materials of environmental complaints received and resolved	610
KINERJA SOSIAL / SOCIAL PERFORMANCE		
F.17	Komitmen LJK, emiten, atau perusahaan publik untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen / Commitment of LJK, issuer, or public company to provide equal products/services to customers	611-613
ASPEK KETENAGAKERJAAN / LABOR ASPECT		
F.18	Kesetaraan kesempatan bekerja / Equal employment opportunity	616-618
F.19	Tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa / Child labor and forced labor	618-619
F.20	Upah Minum Regional / Regional Minimum Wage	619-620
F.21	Lingkungan bekerja yang layak dan aman / Safe and decent work environment	620-621
F.22	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai / Employee capability training and development	629-631
ASPEK MASYARAKAT / COMMUNITY ASPECT		
F.23	Dampak operasi terhadap masyarakat sekitar / Operational impact to local communities	633-635
F.24	Pengaduan masyarakat / Community complaint	635-636
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) / Social and Environmental Responsibility (ESR) activities	636-640
TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN PRODUK/ JASA BERKELANJUTAN / RESPONSIBILITY ON SUSTAINABLE PRODUCTS/SERVICES DEVELOPMENT		
F.26	Inovasi dan pengembangan produk/jasa keuangan berkelanjutan / Innovation and development of sustainable finance products/services	640-642
F.27	Produk/jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan / Products/services evaluated for customer safety	642-643
F.28	Dampak produk/jasa / Impact of products/services	643
F.29	Jumlah produk yang ditarik kembali / Total recalled products	644
F.30	Survei kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan / Customer satisfaction survey on sustainable finance products/services	646
LAIN-LAIN / OTHERS		
G.1	Verifikasi tertulis dari pihak independen (jika ada) / Written verification from independent party (if any)	647
G.2	Lembar umpan balik / Feedback sheet	648-649
G.3	Tanggapan terhadap umpan balik Laporan Tahun sebelumnya / Response to feedbacks of previous year's Annual Report	-
G.4	Daftar pengungkapan sesuai POJK 51/2017 / List of disclosures in accordance with POJK 51/2017	686-687

REFERENSI SILANG GRI STANDARD

Cross-Reference of GRI Standards

GRI STANDARDS		Halaman / Page
GRI 2: PENGUNGKAPAN UMUM / GENERAL DISCLOSURES		
ORGANISASI DAN PRAKTIK PELAPORANNYA / ORGANIZATION AND REPORTING PRACTICES		
GRI 2-1	Detail organisasi / Organizational details	84-85, 551
GRI 2-2	Entitas yang termasuk dalam pelaporan keberlanjutan organisasi / Entities included in the organization's sustainability reporting	574
GRI 2-3	Periode pelaporan, frekuensi dan narahubung / Reporting period, frequency and contact point	84-85, 551, 574-575, 578, 578-579
GRI 2-4	Pernyataan ulang informasi / Restatements of information	557, 558
GRI 2-5	Jaminan eksternal / External assurance	557
KEGIATAN DAN PEKERJA / ACTIVITIES AND EMPLOYEES		
GRI 2-6	Aktivitas, rantai pasokan, dan hubungan bisnis lainnya / Activities, value chain and other business relationships	557, 558-559
GRI 2-7	Karyawan / Employees	133-136, 613-616
GRI 2-8	Pekerja yang bukan karyawan / Workers who are not employees	133-136, 552-555
TATA KELOLA / GOVERNANCE		
GRI 2-9	Struktur dan komposisi tata Kelola / Governance structure and composition	551
GRI 2-10	Nominasi dan pemilihan badan tata kelola tertinggi / Nomination and selection of the highest governance body	426
GRI 2-11	Ketua badan tata kelola tertinggi / Chair of the highest governance body	312-419
GRI 2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi pengelolaan dampak / Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts	349-355
GRI 2-13	Pendelegasian tanggung jawab untuk mengelola dampak / Delegation of responsibility for managing impacts	560-562
GRI 2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan / Role of the highest governance body in sustainability reporting	349-355, 574-577
GRI 2-15	Benturan kepentingan / Conflicts of interest	293
GRI 2-16	Komunikasi terkait masalah kritis / Communication of critical concerns	622-623, 623, 625-626
GRI 2-17	Pengetahuan kolektif atas badan tata kelola tertinggi / Collective knowledge of the highest governance body	375-377, 407-409, 563
GRI 2-18	Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi / Evaluation of the performance of the highest governance body	414-419
GRI 2-19	Kebijakan remunerasi / Remuneration policies	184-185, 426-429
GRI 2-20	Proses penetapan remunerasi / Process to determine remuneration	426-429
GRI 2-21	Rasio kompensasi total tahunan / Annual total compensation ratio	-
STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PRAKTIK / STRATEGY, POLICY, AND PRACTICE		
GRI 2-22	Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan / Statement on sustainable development strategy	546-548
GRI 2-23	Komitmen kebijakan / Policy commitments	551, 546-547
GRI 2-24	Penanaman (internalisasi) komitmen kebijakan / Embedding policy commitments	514
GRI 2-25	Proses pemulihan atas dampak negatif / Processes to remediate negative impacts	599-601, 625-626, 626-627, 628-629
GRI 2-26	Mekanisme untuk mendapatkan saran dan menyampaikan kekhawatiran / Mechanisms for seeking advice and raising concerns	627-628
GRI 2-27	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan / Compliance with laws and regulations	509-510
GRI 2-28	Keanggotaan asosiasi / Membership associations	99, 555-556

GRI STANDARDS		Halaman / Page
KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN / STAKEHOLDER ENGAGEMENT		
GRI 2-29	Pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan / Approach to stakeholder engagement	568-569
GRI 2-30	Perjanjian kerja Bersama / Collective bargaining agreements	569
GRI 3 TOPIK MATERIAL / MATERIAL TOPICS		
3-1	Proses penentuan topik material / Process to determine material topics	575-577
3-2	Daftar topik material / List of material topics	575-577
3-3	Manajemen topik material / Management of material topics	575-577
GRI 201 KINERJA EKONOMI / ECONOMIC PERFORMANCE		
GRI 201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan / Direct economic value generated and distributed	584-585
GRI 201-2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lain akibat perubahan iklim / Financial implications and other risks and opportunities due to climate change	586
GRI 201-3	Kewajiban program imbalan pasti dan program pensiun lainnya / Defined benefit plan obligations and other retirement plans	185
GRI 201-4	Bantuan keuangan yang diterima dari pemerintah / Financial assistance received from government	-
GRI 203 DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG / INDIRECT ECONOMIC IMPACTS		
GRI 203-1	Investasi infrastruktur dan layanan yang didukung / Infrastructure investments and services supported	585-586
GRI 203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan / Significant indirect economic impacts	585-586
GRI 204 PRAKTIK PENGADAAN / PROCUREMENT PRACTICES		
GRI 204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal / Proportion of spending on local suppliers	584-585
GRI 205 ANTI KORUPSI / ANTI-CORRUPTION		
GRI 205-1	Operasi dinilai untuk risiko yang terkait dengan korupsi / Operations assessed for risks related to corruption	588-589
GRI 205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi / Communication and training about anti-corruption policies and procedures	589-591
GRI 205-3	Insiden korupsi yang dikonfirmasi dan tindakan yang diambil / Confirmed incidents of corruption and actions taken	591
GRI 206 PERILAKU ANTI KOMPETITIF / ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR		
GRI 206-1	Perbuatan hukum atas perilaku anti persaingan, anti trust, dan praktik monopoli / Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices	-
GRI 207 PAJAK / TAX		
GRI 207-1	Pendekatan pajak / Approach to tax	-
GRI 207-2	Tata kelola pajak, kontrol, dan manajemen risiko / Tax governance, control, and risk management	-
GRI 207-3	Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan masalah terkait pajak / Stakeholder engagement and management of concerns related to tax	-
GRI 207-4	Pelaporan pajak negara / Country-by-country reporting	289
GRI 301 MATERIAL / MATERIALS		
GRI 301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume / Materials used by weight or volume	289
GRI 301-2	Bahan daur ulang yang digunakan / Recycled input materials used	593
GRI 301-3	Produk reklamasi dan bahan kemasannya / Reclaimed products and their packaging materials	-
GRI 302 ENERGI / ENERGY		
GRI 302-1	Konsumsi energi dalam organisasi / Energy consumption within the organization	594
GRI 302-2	Konsumsi energi di luar organisasi / Energy consumption outside of the organization	594-595
GRI 302-3	Intensitas energi / Energy intensity	595
GRI 302-4	Pengurangan konsumsi energi / Reduction of energy consumption	596
GRI 302-5	Pengurangan kebutuhan energi produk dan jasa / Reductions in energy requirements of products and services	595-596

GRI STANDARDS		Halaman / Page
GRI 303 AIR DAN EFLUEN / WATER AND EFFLUENTS		
GRI 303-1	Penggunaan air sebagai sumber daya Bersama / Interactions with water as a shared resource	597-598
GRI 303-2	Pengelolaan dampak terkait pelepasan air / Management of water discharge-related impacts	-
GRI 303-3	Pengambilan air / Water withdrawal	597-598
GRI 303-4	Debit air / Water discharge	597-598
GRI 303-5	Konsumsi air / Water consumption	597-598
GRI 304 KEANEKARAGAMAN HAYATI / BIODIVERSITY		
GRI 304-1	Lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung / Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas	599
GRI 304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati / Significant impacts of activities, products and services on biodiversity	599
GRI 304-3	Habitat dilindungi atau dipulihkan / Habitats protected or restored	-
GRI 304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat di area yang terkena dampak operasi / IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations	-
GRI 305 EMISI / EMISSIONS		
GRI 305-1	Emisi GRK Langsung (Cakupan 1) / Direct (Scope 1) GHG emissions	602
GRI 305-2	Energi tidak langsung (Cakupan 2) emisi GRK / Energy indirect (Scope 2) GHG emissions	602, 603
GRI 305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya / Other indirect (Scope 3) GHG emissions	602
GRI 305-4	Intensitas emisi GRK / GHG emissions intensity	603
GRI 305-5	Pengurangan emisi GRK / Reduction of GHG emissions	603-604, 605
GRI 305-6	Emisi zat perusak ozon (BPO) / Emissions of ozone-depleting substances (ODS)	-
GRI 305-7	Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya / Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant air emissions	-
GRI 306 LIMBAH / WASTE		
GRI 306-1	Produksi limbah dan dampak signifikan terkait Limbah / Waste generation and significant waste-related impacts	605
GRI 306-2	Pengelolaan dampak signifikan terkait limbah / Management of significant waste-related impacts	605-609
GRI 306-3	Limbah yang dihasilkan / Waste generated	605
GRI 306-4	Limbah dialihkan dari pembuangan / Waste diverted from disposal	605-609
GRI 306-5	Limbah diarahkan ke pembuangan / Waste diverted to disposal	605-609
GRI 308 PENILAIAN LINGKUNGAN PEMASOK / SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT		
GRI 308-1	Pemasok baru yang disaring menggunakan kriteria lingkungan / New suppliers that were screened using environmental criteria	625
GRI 308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil / Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken	-
GRI 401 KETENGAKERJAAN / EMPLOYMENT		
GRI 401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan / New employee hires and employee turnover	614-616
GRI 401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan tetap yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu / Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	184-185
GRI 401-3	Cuti melahirkan / Parental leave	619
GRI 402 HUBUNGAN TENAGA KERJA/MANAJEMEN / LABOR/MANAGEMENT RELATIONS		
GRI 402-1	Periode pemberitahuan minimum mengenai perubahan operasional / Minimum notice periods regarding operational changes	-
GRI 403 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA / OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY		
GRI 403-1	Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan Kerja / Occupational health and safety management system	622-623
GRI 403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden / Hazard identification, risk assessment, and incident	625-626

GRI STANDARDS		Halaman / Page
GRI 403-3	Pelayanan kesehatan kerja / Occupational health services	626-627
GRI 403-4	Partisipasi pekerja, konsultasi, dan komunikasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja / Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety	627
GRI 403-5	Pelatihan pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja / Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety	628
GRI 403-6	Promosi kesehatan pekerja / Promotion of worker health	626-627
GRI 403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak kesehatan dan keselamatan kerja yang terkait langsung dengan hubungan bisnis / Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by business relationships	628-629
GRI 403-8	Pekerja yang dilindungi oleh sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja / Workers covered by an occupational health and safety management system	622-623
GRI 403-9	Cedera terkait pekerjaan / Work-related injuries	627
GRI 403-10	Kesehatan yang buruk terkait pekerjaan / Work-related ill health	-
GRI 404 PELATIHAN DAN PENDIDIKAN / EDUCATION AND TRAINING		
GRI 404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan / Average hours of training per year per employee	631
GRI 404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan / Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	629-630
GRI 404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier / Percentage of employees receiving regular performance and career development	-
GRI 405 KERAGAMAN DAN KESETARAAN KESEMPATAN / DIVERSITY AND EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY		
GRI 405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan / Diversity of governance bodies and employees	421-425
GRI 405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan terhadap laki-laki / Ratio of basic salary and remuneration of women to men	-
GRI 406 ANTI DISKRIMINASI / NON-DISCRIMINATION		
GRI 406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil / Incidents of discrimination and corrective actions taken	-
GRI 407 KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN BERSAMA / FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING		
GRI 407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama mungkin terancam / Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective bargaining may be at risk	-
GRI 408 PEKERJA ANAK / CHILD LABOR		
GRI 408-1	Operasi dan pemasok berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak / Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor	618
GRI 409 KERJA PAKSA / FORCED OR COMPULSORY LABOR		
GRI 409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau kerja wajib / Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor	618
GRI 410 PRAKTIK KEAMANAN / SECURITY PRACTICES		
GRI 410-1	Petugas keamanan dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia / Security personnel trained in human rights policies or procedures	-
GRI 411 HAK MASYARAKAT ADAT / RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE		
GRI 411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat / Incidents of violations involving rights of indigenous peoples	634
GRI 412 PENILAIAN HAK ASASI MANUSIA / HUMAN RIGHTS ASSESSMENT		
GRI 412-1	Operasi yang telah tunduk pada tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak / Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments	-
GRI 412-2	Pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia / Employee training on human rights policies or procedures	-
GRI 412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang mencakup klausul hak asasi manusia atau yang menjalani penyaringan hak asasi manusia / Significant investment agreements and contracts that include human rights clauses or that underwent human rights screening	-
GRI 413 MASYARAKAT SEKITAR / LOCAL COMMUNITIES		
GRI 413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan / Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	617
GRI 413-2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal / Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities	633-635, 635

Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2022 PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, Agustus 2023

Direksi
Board of Directors

Didiek Hartantyo
Direktur Utama
President Director

Hadis Surya Palapa
Direktur Niaga
Managing Director of Commerce

Awan Hermawan Purwadinata
Direktur Operasi
Managing Director of Operation

Heru Kuswanto
Direktur Pengelolaan Prasarana
Managing Director of Infrastructure

John Robertho
PYMT Direktur Pengelolaan Sarana
Act. Managing Director of
Rolling Stock

Sandry Fasambuna
Direktur Keselamatan dan Keamanan
Managing Director of Safety and
Security

Suparno
Direktur SDM dan Umum
Managing Director of Human Capital
and General Affairs

John Robertho
Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha
Managing Director of Strategic Planning and
Business Development

Salusra Wijaya
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Managing Director of Finance and Risk Management

The Board of Directors' and The Board of Commissioners' Statement of Responsibility for the 2022 Annual Report of PT Kereta Api Indonesia (Persero)

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2022 Annual Report of PT Kereta Api Indonesia (Persero) have been presented completely and we are thus fully responsible for the truthfulness of the contents in this Annual Report and Financial Report of the Company.

This statement has been made truthfully.

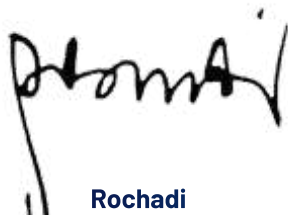
Bandung, August, 2023

Dewan Komisaris Board of Commissioners



Said Aqil Siroj

Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner




Rochadi
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Riza Primadi
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Endang Tirtana
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Johan Sirait
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Dian Natalisa
Komisaris
Commissioner



Chairul Anwar
Komisaris
Commissioner



Sri Paduka Mangkoenagoro X
Komisaris
Commissioner



Mohamad Risal Wasal
Komisaris
Commissioner



08

Laporan Keuangan
Financial Report



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Beserta Laporan Auditor Independen!**

*Consolidated Financial Statements For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
With Independent Auditor's Report*

Daftar Isi	<u>Halaman/ Pages</u>	<i>Table of Contents</i>
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We the undersigned:

1. Nama :	Didiek Hartantyo	Name
Alamat kantor :	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Bandung	Office address
Alamat rumah :	Taman Lebak Buius III No.5 Cilandak, Jakarta Selatan	Residential address
Telepon :	+62 22 4230031	Telephone
Jabatan :	Direktur Utama / President Director	Title
2. Nama :	Salusra Wijaya	Name
Alamat kantor :	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Bandung	Office address
Alamat rumah :	Jl. Turi III No 11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Residential address
Telepon :	+62 22 4230039	Telephone
Jabatan :	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Director of Finance and Risk Management	Title

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|--|---|
| 1 Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("Perusahaan") dan Entitas Anaknya; | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("Company") and its Subsidiaries; |
| 2 Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The consolidated financial statements of Company and its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3 a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. All information in consolidated financial statements of Company and its Subsidiaries have been disclosed in a complete and truthful manner; |
| b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The consolidated financial statements of Company and its Subsidiaries do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts; |
| 4 Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan Entitas Anaknya. | 4. We are responsible for the Company and its Subsidiaries's internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors

Bandung, 29 Mei 2023 / May 29, 2023



Didiek Hartantyo
Direktur Utama / President Director

Salusra Wijaya
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko /
Director of Finance and Risk Management

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00635/2.1030/AU.1/06/0645-1/1/V/2023

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
J. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tbk and its Subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Track Access Charge ("TAC") dan Infrastructure Maintenance Operation ("IMO")

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang transportasi khususnya perkeretaapian. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, Perusahaan menggunakan prasarana perkeretaapian milik Pemerintah. Sesuai peraturan yang berlaku, Grup memiliki liabilitas atas penggunaan prasarana tersebut kepada Pemerintah berupa biaya TAC.

Sebelum tahun 2022, biaya TAC tersebut dihitung mengikuti formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan ("PP 15/2016"). Pada akhir tahun 2021, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.138 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan ("PMK 138/2021") dan berlaku sejak 1 Januari 2022. Penerapan PMK 138/2021 tersebut menggunakan formula yang menyebabkan hasil perhitungan biaya TAC menjadi berbeda dibandingkan menggunakan PP 15/2016. Sebagai akibatnya, terdapat perbedaan nilai TAC yang signifikan antara hasil asesmen internal Grup dengan nilai yang ditagihkan oleh Kementerian Perhubungan (dalam hal ini Direktorat Jenderal Kereta Api – DJKA). Namun atas perbedaan ini, manajemen Grup telah dapat menyelesaikannya di periode setelah tanggal pelaporan keuangan.

Grup telah melakukan sejumlah analisis untuk pemenuhan persyaratan utama mengenai kriteria pengakuan dan pengukuran kewajiban, provisi atau liabilitas kontinjensi mengenai besaran TAC yang harus dibukukan pada periode berjalan. Selain itu, Grup, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi untuk memperbaiki tata kelola TAC dan IMO, sehingga tidak terjadi lagi perbedaan interpretasi dan perhitungan biaya TAC di periode mendatang.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Track Access Charge ("TAC") and Infrastructure Maintenance Operation ("IMO")

In accordance with the Company's Articles of Association, the purpose and objective of the Company are to conduct business in the transportation sector, especially railways. In conducting its activities, the Company uses government-owned railway infrastructure. In accordance with applicable regulations, the Group has an obligation for the use of the infrastructure to the Government in the form of TAC fees.

Before 2022, the TAC fee is calculated based on the formula set out in Government Regulation No. 15 year 2016 concerning Types and Tariffs for Eligible Types of Non-Tax State Revenue at the Ministry of Transportation ("PP 15/2016"). At the end of 2021, the Minister of Finance issued Minister of Finance Regulation No. 138 year 2021 concerning Types and Tariffs for Non-Tax State Revenues that are Volatile in Nature and for Urgent Needs that Applicable at the Ministry of Transportation ("PMK 138/2021") and effective from January 1, 2022. The implementation of PMK 138/2021 uses a formula which causes the results of calculating the TAC fee to be different compared to using PP 15/2016. As a result, there is a significant difference in the TAC value between the Group's internal assessment results and the value billed by the Ministry of Transportation (in this case the Directorate General of Railways – DJKA). However, for this difference, the Group's management has resolved it in the period after the financial reporting date.

The Group has conducted a number of analyzes to fulfill the main requirements regarding the criteria for recognition and measurement of liabilities, provisions or contingent liabilities regarding the amount of TAC fee that should be recorded in the current period. In addition, the Group, the Ministry of Transportation and the Ministry of Finance will continue to coordinate to improve the governance of TAC and IMO, therefore, there will be no more differences in interpretation and calculation of TAC fee in the coming period.

Prosedur audit kami mencakup, antara lain, melakukan:

- Pemahaman dan pengevaluasian desain dan implementasi pengendalian internal grup terkait proses pengestimasian biaya TAC;
- Pengujian substantif bagaimana manajemen menghitung biaya TAC berdasarkan peraturan yang berlaku, meliputi pengujian terhadap relevansi dan kehandalan data yang digunakan, ketepatan penggunaan metode dan konsistensi asumsi yang mendasari estimasi tersebut;
- Pengujian akurasi perhitungan biaya TAC;
- Diskusi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait mengenai perhitungan biaya TAC dan penerapan PMK 138/2021;
- Evaluasi perubahan keadaan dan kejadian setelah tanggal pengukuran biaya TAC hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan;
- Pengevaluasian kecukupan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Pengungkapan Grup mengenai TAC ini dijelaskan dalam Catatan 3.x, 23, 39, 41, dan 51.a atas laporan keuangan konsolidasian.

Pengukuran Investasi di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ("PSBI")

Pada 31 Desember 2022 Perusahaan memiliki investasi pada PSBI dengan net investasi sebesar Rp6,2 triliun, atau sekitar 8,6% dari total aset Grup. PSBI merupakan perusahaan patungan konsorsium 4 Badan Usaha Milik Negara Indonesia ("BUMN"), yang merupakan penugasan Pemerintah berdasarkan Perpres No. 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Dan Bandung. Lebih lanjut, PSBI bersama Beijing Yawan HSR Co.Ltd ("Beijing Yawan") telah mendirikan PT Kereta Cepat Indonesia China ("KCIC") dengan bisnis utama di sektor transportasi publik yaitu Kereta Cepat Jakarta – Bandung ("KCJB").

Nilai investasi awal proyek KCJB ditetapkan sebesar USD6,05 miliar atau sebesar Rp90,75 triliun. Pada tahun berjalan terdapat kondisi *rescheduling commercial operation date* ("COD") KCJB sehingga terjadi *cost overrun* sebesar USD1,21 milyar dan total investasi proyek KCJB meningkat menjadi USD7,26 miliar (ekuivalen Rp108,9 triliun, asumsi Rp15.000/USD). Selanjutnya, secara prinsip telah tercapai kesepakatan bersama atas skema pendanaan *cost overrun* tersebut diantaranya dengan Penyertaan Modal Negara ("PMN") melalui Perusahaan. Kondisi tersebut secara tidak langsung akan memengaruhi nilai tercatat investasi Perusahaan di PSBI.

Our audit procedures include, among others, conducting:

- *Understanding and evaluating the design and implementation of group internal controls regarding the process for estimating the TAC fee;*
- *Substantive testing of how the management calculates TAC fee based on applicable regulations, including testing of the relevance and reliability of the data used, the accuracy of the method used and the consistency of the assumptions on which the estimate are based;*
- *Testing the accuracy of TAC fee calculations;*
- *Discussions and consultations with relevant stakeholders regarding TAC fee calculations and implementation of PMK 138/2021;*
- *Evaluation of changes in circumstances and events after the TAC fee measurement date to the issuance date of these consolidated financial statements;*
- *Evaluation of the adequacy of disclosures in the notes to the consolidated financial statements.*

The Group's disclosures regarding the TAC are explained in Notes 3.x, 23, 39, 41 and 51.a to the consolidated financial statements.

Measurement of Investment in PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ("PSBI")

As of December 31, 2022 the Company has an investment in PSBI with a net investment of Rp6.2 trillion, or around 8.6% of the Group's total assets. PSBI is a joint venture company with a consortium of 4 Indonesian State-Owned Enterprises ("BUMN"), which is an assignment from the Government based on Presidential Decree No. 93 year 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 107 Year 2015 concerning the Acceleration of Implementation of High-Speed Train Infrastructure and Facilities Between Jakarta and Bandung. Furthermore, PSBI with Beijing Yawan HSR Co. Ltd ("Beijing Yawan") has established PT Kereta Api Indonesia China ("KCIC") with the main business in the public transportation sector, namely the Jakarta – Bandung High-Speed Train ("KCJB").

The initial investment value for the KCJB project is set at USD6.05 billion or Rp90.75 trillion. In the current year there is a condition of rescheduling the commercial operation date ("COD") resulting in a cost overrun of USD1.21 billion and the total KCJB project investment increased to USD7.26 billion (equivalent to Rp108.9 trillion, assuming IDR 15,000/USD). Furthermore, in principle a mutual agreement has been reached on the cost overrun funding scheme, including State Equity Participation ("PMN") through the Company. These conditions will indirectly affect the carrying value of the Company's investment in PSBI.

Prosedur audit kami mencakup, antara lain, melakukan:

- Pemahaman dan pengevaluasian desain dan implementasi pengendalian internal Perusahaan terkait pengukuran investasi PSBI;
- Pengujian substantif, dengan dibantu pakar auditor, terkait dengan bagaimana manajemen menghitung nilai wajar investasi PSBI yang meliputi pengujian terhadap relevansi dan kehandalan data yang digunakan, ketepatan penggunaan metode dan konsistensi asumsi yang mendasari estimasi tersebut;
- Pengujian akurasi pengukuran nilai wajar investasi PSBI;
- Evaluasi perubahan keadaan dan kejadian setelah tanggal pengukuran nilai wajar investasi PSBI hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan;
- Pengevaluasian kecukupan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Pengungkapan Grup mengenai investasi PSBI ini dijelaskan dalam Catatan 9, 12, 41, 44, 49, 52 dan 53 atas laporan keuangan konsolidasian.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan tepat yang akan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Our audit procedures include, among others, conducting:

- *Understanding and evaluating the design and implementation of the Company's internal controls related to PSBI investment measurement;*
- *Substantive testing, assisted by an auditor expert, related to how management calculates the fair value of the PSBI investment which includes testing the relevance and reliability of the data used, the accuracy of the method used and the consistency of the assumptions underlying the estimate;*
- *Testing the accuracy of measuring the fair value of PSBI investments;*
- *Evaluation of changes in circumstances and events after the date of measurement of the fair value of the PSBI investment to the issuance date of these consolidated financial statements;*
- *Evaluation of the adequacy of disclosure in the notes to the consolidated financial statements.*

The Group's disclosures regarding PSBI investments are explained in Notes 9, 12, 41, 44, 49, 52 and 53 to the consolidated financial statements.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information contained in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
 - Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
 - Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
 - Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
 - Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We Also:*
- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
 - *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
 - *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
 - *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
 - *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tahun kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Dedy Sukrisnadi

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0645/
Public Accountant License Number: AP.0645

Jakarta, 29 Mei 2023/May 29, 2023



**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION**
As of December 31, 2022, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021*)	2020*)	
ASET					ASSET
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	3.f, 3.g, 3.h, 3.y, 6, 41	5.695.720.193	3.808.203.932	6.609.296.498	Cash and Cash Equivalents
Dana Dibatasi Penggunaannya	3.f, 3.g, 3.i, 3.y, 7, 41	5.610.385.976	2.748.463.918	178.268.297	Restricted Funds
Piutang Usaha					Trade Receivables
Pihak Berelasi	3.f, 3.g, 3.j, 3.y, 8, 41	934.629.745	678.094.695	115.251.183	Related Parties
Pihak Ketiga	3.j, 3.y, 8	471.708.322	397.003.778	334.569.549	Third Parties
Piutang Lain-lain	3.g, 3.y, 9, 41	90.003.063	74.670.546	55.799.186	Other Receivables
Persediaan	3.k, 10	1.145.313.941	893.780.639	912.156.310	Inventories
Pendapatan Masih Akan Diterima	3.g, 3.y, 11, 41	939.616.971	239.054.610	242.183.243	Accrued Income
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	3.l, 12.a	120.303.174	278.955.141	229.092.824	Advances and Prepaid Expenses
Pajak Dibayar di Muka	3.s, 13.a	303.896.017	572.701.539	469.473.998	Prepaid Taxes
Aset Lancar Lainnya	14	26.370.549	15.752.718	18.409.323	Other Current Assets
JUMLAH ASET LANCAR		15.337.947.951	9.706.681.516	9.164.500.411	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Piutang Lain-lain	3.f, 3.g, 3.j, 3.y, 8, 41	--	--	2.155.464.293	Other Receivable
Uang Muka Jangka Panjang	12.b	20.640.157	6.772.694.898	--	Long-Term Advances
Investasi Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	3.d, 3.e, 15.a	6.315.362.037	108.436.459	123.614.046	Investment in Associates and Joint Ventures
Investasi Jangka Panjang	3.y, 15.b	24.176.000	54.853.000	53.080.000	Long Term Investment
Aset Pajak Tangguhan	3.s, 13.e	1.432.778.568	1.993.302.912	1.688.016.538	Deferred Tax Assets
Aset Tetap	3.n, 16	23.924.692.897	22.860.962.080	21.334.625.651	Fixed Assets
Properti Investasi	3.m, 17	126.085.555	96.379.618	94.421.989	Investment Properties
Hak Pengoperasian Aset Prasarana	3.p, 3.o, 18	23.736.944.016	20.503.150.402	17.816.065.535	Infrastructure Assets Operating Rights
Aset Takberwujud	3.aa, 19	422.760.902	366.773.277	347.477.934	Intangible Assets
Aset Hak Guna	3.u, 20	53.116.074	67.419.354	97.223.505	Right of Use Asset
Aset Tidak Lancar Lainnya	21	186.725.566	185.736.405	280.142.249	Other Non-Current Assets
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		56.243.281.772	53.009.708.405	43.990.131.740	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET		71.581.229.723	62.716.389.921	53.154.632.151	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha					Trade Payables
Pihak Berelasi	3.g, 3.y, 22, 41	880.714.681	473.426.130	254.842.738	Related Parties
Pihak Ketiga	3.f, 3.y, 22	1.578.171.487	1.192.602.860	1.002.751.153	Third Parties
Beban Akrual	3.cc, 3.y, 23	1.572.961.926	1.431.722.644	1.993.429.314	Accruals
Utang Pajak	3.s, 13.b	309.332.730	339.548.542	302.470.230	Taxes Payable
Liabilitas Sewa	3.u, 20	16.563.637	29.372.889	28.043.424	Lease Liabilities
Pendapatan Diterima di Muka	3.r, 24	1.144.639.451	832.780.956	713.582.398	Unearned Revenue
Liabilitas Imbalan Kerja	3.v, 27.a	962.743.057	586.133.884	254.538.317	Employee Benefits Liabilities
Pinjaman Bank Jangka Pendek	3.g, 3.y, 25, 41	1.760.000.000	2.659.962.173	3.415.206.865	Short-Term Bank Loans
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun					Current Maturities of Long-Term Liabilities
Pinjaman Jangka Panjang	3.f, 3.g, 3.y, 29, 41	1.196.958.601	934.991.570	1.219.934.024	Long Term Loans
Pinjaman Program PEN	3.y, 28	437.500.000	--	--	PEN Program Loan
Utang Obligasi	3.y, 30	--	999.447.166	--	Bonds Payable
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	26	98.538.290	94.310.944	96.817.882	Other Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		9.958.123.860	9.574.299.758	9.281.616.345	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Sewa	3.u, 20	44.599.263	52.772.546	77.113.909	Lease Liabilities
Pendapatan Diterima di Muka	3.r, 24	837.174.293	776.100.393	820.475.982	Unearned Revenue
Liabilitas Imbalan Kerja	3.v, 27.b	5.197.151.974	5.581.424.489	4.811.693.936	Employee Benefits Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun					Long-Term Liabilities - Net of Current Maturities
Pinjaman Jangka Panjang	3.f, 3.g, 3.y, 29, 41	18.282.631.817	16.501.746.512	13.212.721.025	Long-Term Loans
Pinjaman Program PEN	3.y, 28	3.062.500.000	3.500.000.000	3.500.000.000	PEN Program Loan
Utang Obligasi	3.y, 30	4.490.760.381	2.993.800.573	3.990.924.392	Bonds Payable
Sukuk	3.y, 31	498.307.111	--	--	Sukuk
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	32	129.796.719	138.592.858	234.194.593	Other Long-Term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		32.542.921.558	29.544.437.371	26.647.123.837	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS		42.501.045.418	39.118.737.129	35.928.740.182	TOTAL LIABILITIES

*) Disajikan Kembali, Catatan 54

*) As Restated, Note 54

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION (Continued)**
As of December 31, 2022, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021*)	2020*)	
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Entitas Induk					Equity Attributable to the Owner of the Parent Entity
Modal Saham					Share Capital
Nilai Nominal Rp1.000 per Saham					Rp1,000 Par Value per Shares
Modal Dasar Sebesar 40.000.000 Saham					Authorized Capital of 40,000,000 Shares
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar 19.168.743, serta per 1 Januari 2021/31 Desember 2020 sebesar 12.268.743 saham	33	19.168.743.000	19.168.743.000	12.268.743.000	Issued and Fully Paid as of December 2022 and 2021 amounted to 19,168,743, and as of January 1, 2021/ December 31, 2020 amounted to 12,268,743 shares, respectively
Tambahan Penyertaan Modal Negara	34.a	3.200.000.000	--	--	Additional of Government Capital Investment
Tambahan Modal Disetor		486.081	486.081	486.081	Additional Paid-in Capital
Saldo Laba	35	7.679.086.294	5.897.045.817	6.259.505.890	Retained Earnings
Komponen Ekuitas Lainnya					Other Components of Equity
Akumulasi Rugi Aktuarial atas Imbalan Kerja		(1.037.483.391)	(1.618.357.448)	(1.495.780.597)	Accumulated Losses on Employee Benefit
Selisih Likuidasi	36	968.135	968.135	968.135	Difference of Liquidation
Selisih Perubahan Ekuitas Entitas Anak	34.b	(24.069.720)	--	--	Difference in Transactions of Changes in Equity of Subsidiaries
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	3.c	28.987.730.399	23.448.885.585	17.033.922.509	Equity Attributable to Owner of the Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali	3.c, 37	92.453.906	148.767.207	191.969.460	Non-Controlling Interests
JUMLAH EKUITAS		29.080.184.305	23.597.652.792	17.225.891.969	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		71.581.229.723	62.716.389.921	53.154.632.151	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
PENDAPATAN				REVENUES
Pendapatan Angkutan dan Usaha Lainnya	3.g, 3.w, 3.x, 38, 41	22.967.071.664	15.529.530.120	Transportation and Other Operating Revenues
Pendapatan Konstruksi	3.w, 18	2.610.567.346	2.387.245.804	Construction Revenue
Jumlah Pendapatan		25.577.639.010	17.916.775.924	Total Revenues
BEBAN POKOK PENDAPATAN				COST OF REVENUES
Beban Angkutan dan Usaha Lainnya	3.w, 3.x, 3.g, 39, 41	(15.930.293.675)	(12.762.060.746)	Transportation and Other Operating Costs
Beban Konstruksi	3.w, 18	(2.610.567.346)	(2.387.245.804)	Construction Cost
Jumlah Beban Pokok Pendapatan		(18.540.861.021)	(15.149.306.550)	Total Cost of Revenues
LABA BRUTO		7.036.777.989	2.767.469.374	GROSS PROFIT
Beban Usaha	3.w, 40	(3.664.532.070)	(2.543.050.490)	Operating Expenses
LABA USAHA		3.372.245.919	224.418.884	OPERATING PROFIT
Penghasilan Keuangan	3.w, 42	139.514.944	108.444.334	Finance Income
Bagian Rugi Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	3.d, 15	(267.504.227)	(9.495.748)	Share in Net Loss of Associates and Joint Ventures
Beban Keuangan	3.w, 43	(980.572.153)	(900.712.325)	Finance Cost
Selisih Kurs	3.f	42.673.710	(567.340)	Foreign Exchanges
Keuntungan (Kerugian) Lain-lain - Bersih	3.w, 44	(95.769.893)	30.931.669	Other Gains (Losses) - Net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		2.210.588.300	(546.980.526)	INCOME (LOSS) BEFORE TAX
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan - Bersih	3.s, 13.d	(524.599.080)	121.784.883	(Expenses) Income Tax Benefit - Net
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		1.685.989.220	(425.195.643)	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain yang Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi pada Periode Berikutnya:				Other Comprehensive Income (Loss) Not to be Reclassified to Profit or Loss Subsequently:
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti		746.347.332	(156.953.700)	Remeasurement of Defined Benefit Obligation
Efek Pajak Penghasilan Terkait	3.s, 13.e	(165.506.775)	34.348.460	Income Tax Effect
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Setelah Pajak		580.840.557	(122.605.240)	Total Other Comprehensive Income (Loss) - Net of Tax
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2.266.829.777	(547.800.883)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME (LOSS) FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk	3.c	1.782.040.477	(362.460.073)	Owner of the Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali	3.c, 37	(96.051.257)	(62.735.570)	Non-Controlling Interest
JUMLAH		1.685.989.220	(425.195.643)	TOTAL
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk	3.c	2.362.914.534	(485.036.924)	Owner of the Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali	3.c, 37	(96.084.757)	(62.763.959)	Non-Controlling Interest
JUMLAH		2.266.829.777	(547.800.883)	TOTAL
Laba (Rugi) per Saham Dasar	3.z, 45	93	(29)	Basic Earning (Loss) per Share

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to the Owner of the Parent Entity													
Catatan/ Note	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Paid-up Capital Stock	Penyertaan Modal Negara dalam Proses Penerbitan Saham/ State Equity Participation in Issuance Process	Tambahannya Modal Disetor/ Additional Paid-in capital	Saldo Labanya/ Retained Earnings	Komponen Ekuitas Lain/ Other Components of Equity			Jumlah/ Total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-Controlling interest	Jumlah ekuitas/ Total Equity			
					Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti/ Remeasurement of Defined Benefit Obligation	Selisih Likuidasi/ Liquidating Differences	Selisih Perubahan Ekuitas Entitas Anak/ Difference in Transactions of Changes in Equity of Subsidiaries						
												Balance at December 31, 2020	
	12.268.743.000	--	486.081	6.085.704.817	(1.507.891.991)	968.135	--	16.848.010.042	191.969.460	17.039.979.502			
Penyesuaian atas Atribusi Imbalan pada Periode Jasa	54	--	--	173.801.073	12.111.394	--	--	185.912.467	--	185.912.467		Adjustment of Attribution of Benefits on Service Period	
	12.268.743.000	--	486.081	6.259.505.890	(1.495.780.597)	968.135	--	17.033.922.509	191.969.460	17.225.891.969		Balance at January 1, 2021*)	
Penambahan Penyertaan Modal Negara dalam Proses Penerbitan Saham	33	6.900.000.000	--	--	--	--	--	6.900.000.000	--	6.900.000.000		Additional on State Equity Equity Participation in Issuance Process	
Penambahan Modal pada Entitas Anak		--	--	--	--	--	--	--	19.760.000	19.760.000		Additional Capital in Subsidiaries	
Dividen Entitas Anak		--	--	--	--	--	--	--	(198.294)	(198.294)		Dividend of Subsidiaries	
Rugi Tahun Berjalan	35	--	--	(362.460.073)	--	--	--	(362.460.073)	(62.735.570)	(425.195.643)		Loss For the Year	
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti		--	--	--	(122.576.851)	--	--	(122.576.851)	(28.389)	(122.605.240)		Remeasurement of Defined Benefit Obligation	
		19.168.743.000	--	486.081	5.897.045.817	(1.618.357.448)	968.135	23.448.885.585	148.767.207	23.597.652.792		Balance at December 31, 2021*)	
Penambahan Penyertaan Modal Negara dalam Proses Penerbitan Saham	34.a	--	3.200.000.000	--	--	--	--	3.200.000.000	--	3.200.000.000		Additional on State Equity Equity Participation in Issuance Process	
Konversi Pinjaman Pemegang Saham		--	--	--	--	--	--	--	16.000.000	16.000.000		Conversion of Shareholders Loan	
Penyesuaian atas Kepentingan Nonpengendali	34.b	--	--	--	--	--	--	(24.069.720)	(24.069.720)	24.069.720	--	Adjustment of Non-Controlling Interest	
Dividen Entitas Anak		--	--	--	--	--	--	--	(298.264)	(298.264)		Dividend of Subsidiaries	
Labanya (Rugi) Tahun Berjalan		--	--	1.782.040.477	--	--	--	1.782.040.477	(96.051.257)	1.685.989.220		Income (Loss) For the Year	
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti		--	--	--	--	580.874.057	--	580.874.057	(33.500)	580.840.557		Remeasurement of Defined Benefit Obligation	
		19.168.743.000	3.200.000.000	486.081	7.679.086.294	(1.037.483.391)	968.135	(24.069.720)	28.987.730.399	92.453.906	29.080.184.305		Balance at December 31, 2022

*) Disajikan Kembali, Catatan 54

*) As Restated, Note 54

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements as a whole

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
Arus Kas dari				Cash Flows from
Aktivitas Operasi				Operating Activities
Penerimaan Kas dari Pelanggan		18.291.269.386	10.843.449.947	Cash Receipts from Customers
Pembayaran kepada Pemasok		(9.701.299.798)	(7.995.549.108)	Payments to Suppliers
Pembayaran kepada Karyawan		(6.469.435.899)	(4.810.626.189)	Payments to Employees
Penerimaan dari Pemerintah		4.043.803.506	4.034.214.207	Receipts from Government
Pembayaran kepada Pemerintah		(221.003.573)	(414.889.721)	Payments to Government
Penerimaan Bunga		139.527.011	102.331.945	Receipts from Interest Income
Penerimaan Kas dari Restitusi Pajak	13.g	240.700.252	11.693.921	Cash Receipt from Tax Restitution
Pembayaran Pajak Penghasilan		(261.362.844)	(177.840.535)	Payment of Income Tax
Pembayaran Beban Keuangan		(900.937.342)	(869.512.150)	Payment of Finance Cost
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi		5.161.260.699	723.272.317	Net Cash Flow Provided by Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				Cash Flows from Investing Activities
Perolehan Aset Tetap	16, 52	(2.666.090.431)	(2.510.730.937)	Acquisitions of Fixed Assets
Perolehan Hak Pengoperasian Aset Prasarana	18, 52	(2.708.416.050)	(2.490.943.964)	Acquisitions of Infrastructure Assets
Penambahan Aset Takberwujud	19	(79.721.528)	(57.402.694)	Addition of Intangible Asset
Penempatan Uang Muka Setoran Modal	12	(791.878.657)	(4.453.650.790)	Placement of Paid-up Capital Advance
Penempatan Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	15a	(4.900.000)	(4.276.046)	Placement Investment in Associate and Joint Venture
Penerimaan Bunga Pinjaman dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	9, 41, 52	791.878.657	--	Receipts Loan Interest from Associate and Joint Venture
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	15a	688.262	1.642.492	Dividend Receipts from Associate and Joint Venture
Penempatan Dana Dibatasi Penggunaannya	7	(2.860.752.138)	(2.625.063.819)	Placement of Restricted Fund
Penarikan Dana Dibatasi Penggunaannya	7	--	53.723.486	Drawdown of Restricted Fund
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(8.319.191.885)	(12.086.702.272)	Net Cash Flows Used in Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				Cash Flows from Financing Activities
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek	25, 52	13.706.510.355	6.902.258.308	Receipts from Short-Term Bank Loans
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Panjang	29, 52	2.654.659.751	2.806.736.985	Receipts from Long-Term Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek	25, 52	(14.606.472.528)	(7.657.502.999)	Payment from Short-Term Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Panjang	29, 52	(941.505.589)	(381.327.501)	Payment from Long-Term Bank Loans
Pembayaran Liabilitas Sewa		(37.190.355)	(26.886.581)	Payment of Lease Liabilities
Penerimaan Obligasi	30	1.500.000.000	--	Receipts from Bonds
Penerimaan Sukuk	31	500.000.000	--	Receipts from Sukuk
Pembayaran Obligasi	30	(1.000.000.000)	--	Repayment of Bonds
Pembayaran Biaya Emisi Obligasi	52	(5.041.083)	--	Payment of Issuance Costs Bonds
Pembayaran Biaya Emisi Sukuk	52	(1.785.917)	--	Payment of Issuance Costs Sukuk
Penerimaan Penyertaan Modal Negara	33, 34	3.200.000.000	6.900.000.000	Addition of Government Capital
Penerimaan Pinjaman Kepentingan Nonpengendali		33.897.363	--	Loans addition of Non-Controlling Interest
Tambahan Setoran Modal Kepentingan Nonpengendali		--	19.760.000	Capital Addition of Non-Controlling Interest
Pembayaran Dividen Entitas Anak		(298.264)	(198.294)	Payments of Dividends of Subsidiaries
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		5.002.773.733	8.562.839.918	Net Cash Flows Provided by Financing Activities

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the Years Ended Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas		1.844.842.547	(2.800.590.037)	Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas				Cash and Cash Equivalents at the
Awal Tahun		3.808.203.932	6.609.296.498	Beginning Year
Selisih Kurs				Foreign Exchange Rate
Kas dan Setara Kas		42.673.714	(567.340)	Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun		5.695.720.193	3.808.139.121	Cash and Cash Equivalents at the End Year
Rekonsiliasi Jumlah Kas dan Setara Kas				Reconciliation of Total Cash and Cash Equivalent
Jumlah yang Dilaporkan pada Laporan Arus Kas		5.695.720.193	3.808.139.121	Amount as Reported in Statement of Cash Flow
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai				Allowance for Impairment Losses of Cash and Cash Equivalent
Kas dan Setara Kas	6	--	64.811	
Jumlah yang Dilaporkan pada Laporan Posisi Keuangan	6	5.695.720.193	3.808.203.932	Amount as Reported in Statement of Financial Position

Informasi tambahan terkait arus kas disajikan pada Catatan 52.

Additional information related to cash flows is presented in Note 52.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("Perusahaan") mulanya merupakan bagian dari gabungan Perusahaan Asing Milik Belanda yang bergerak disektor perkeretaapian, didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1864 di wilayah Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1963 secara resmi didirikan/dibentuk Perusahaan Negara yang bergerak disektor perkeretaapian berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 tahun 1963, dari 12 Perusahaan Asing Kereta Api Milik Belanda yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. (Peraturan Pemerintah No 40 dan No 41 tahun 1959).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 1 Juni 1999 dengan Akta Notaris No. 2 dari Notaris Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang disempurnakan dengan Akta Notaris No. 14 tanggal 13 September 1999 dari notaris yang sama, akta-akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-17171 HT.01.01.TH.99 tanggal 1 Oktober 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 Tambahan No. 240/2000 tanggal 14 Januari 2000.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dicatat dalam Akta No. 278 tanggal 31 Desember 2021 dari Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Bandung tentang peningkatan modal dasar perusahaan. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-01.03-0494898 tanggal 31 Desember 2021.

Perusahaan berkantor pusat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Bandung.

Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. General

a. Establishment and General Information

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (the "Company") was originally part of combination Dutch-owned foreign company engaged in the railway sector, was established and operated commercially in 1864 in Java and Sumatra. In 1963 officially established/formed a State Company engaged in the railway sector based on Government Regulation No. 22 of 1963, from 12 Dutch-owned foreign railway companies nationalized by the Government of the Republic of Indonesia. (Government Regulation No. 40 and No. 41/1959).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (the Company), was established based on Notarial Deed No. 2 dated June 1, 1999 of Imas Fatimah, S.H., Notary in Jakarta, and amended with Notarial Deed No. 14 dated September 13, 1999 of Imas Fatimah, S.H., in Jakarta. These deeds were approved by the Minister of Law of Republic of Indonesia as stated on his Decision Letter No. C-17171 HT.01.01.TH.99 dated October 01, 1999 and was published in State Gazette of Republic of Indonesia No. 4 Supplement No. 240/2000 dated January 14, 2000.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Statement of Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) in lieu of the Company General Meeting of Shareholders of PT Kereta Api Indonesia (Persero) according to Deed No. 278 dated December 31, 2021 of Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notary in Bandung regarding increase of authorized capital. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decision Letter No. AHU-01.03-0494898 dated December 31, 2021.

The Company's head office is located at Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Bandung.

The Company's shares of stock are wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia.

1. Umum (Lanjutan)

b. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan adalah melakukan usaha di bidang transportasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyelenggaraan prasana perkeretaapian yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana perkeretaapian yang mencakup pada kegiatan usaha:
 - a) Konstruksi Gedung lainnya;
 - b) Konstruksi jalan rel;
 - c) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass;
 - d) Konstruksi Terowongan;
 - e) Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi;
 - f) Instalasi Listrik;
 - g) Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api; dan
 - h) Aktivitas Stasiun Kereta Api.
- 2) Melakukan penyelenggaraan sarana perkeretaapian meliputi pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan sarana perkeretaapian yang mencakup pada kegiatan usaha:
 - a) Reparasi lokomotif dan gerbong kereta;
 - b) Angkutan jalan rel untuk penumpang;
 - c) Angkutan jalan rel untuk barang;
 - d) Angkutan jalan rel untuk perkotaan; dan
 - e) Angkutan jalan rel untuk wisata;

1. General (Continued)

b. Purposes and Objectives

According to Article 3 of the Company's Articles of Association, the purposes and objectives of the company are to operate a business in transportation sector, as well as to optimize the resources which owned by the company in order to produce highly competitive and high quality goods and/or services to obtain profit/enhance company value through applications of Limited Liability Company principles.

To achieve the above purposes and objectives, the company may perform these following activities:

- 1) Carrying out railway infrastructure that includes the construction, operation, maintenance, and business of railway infrastructure that includes business activities:
 - a) Construction of other buildings;
 - b) Construction of the rail road;
 - c) Construction of Civil Building Bridges, Overpasses, Fly Over and Underpasses;
 - d) Tunnel Construction;
 - e) Construction of Telecommunication Civil Buildings for Transportation Infrastructure;
 - f) Electrical Installation;
 - g) Railway Signal installation and telecommunications; and
 - h) Train Station activity;
- 2) Conduct the implementation of railway advice which includes the procurement, operation, maintenance, and business of railway facilities that include business activities:
 - a) Repairment locomotives and wagon;
 - b) Rail road transportation for passengers;
 - c) Rail road transportation for goods;
 - d) Rail road transportation for urban areas; and
 - e) Rail road transportation for tours;

1. Umum (Lanjutan)

- 3) Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya;
- 4) Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (*scrap*);
- 5) Aktivitas konsultasi transportasi;
- 6) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
- 7) Kegiatan penunjang pendidikan;
- 8) Penanganan kargo (bongkar muat barang);
- 9) Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA dan EAD);
- 10) Angkutan multimoda;
- 11) Aktivitas agen perjalanan lainnya;
- 12) Pendidikan lainnya swasta;
- 13) Pendidikan kesehatan swasta;
- 14) Pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian;
- 15) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
- 16) Usaha jasa pertambangan;
- 17) *Real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa; dan
- 18) Kerjasama peningkatan akses stasiun kereta api yang bersinggungan dengan lahan milik pihak lain untuk dikembangkan dengan konsep terhubung dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dan mendukung peningkatan pelayanan penumpang.

Selain kegiatan usaha utama, perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

- 1) Pergudangan dan penyimpanan;
- 2) Aktivitas *cold storage*;
- 3) Aktivitas *bounded warehousing* atau wilayah kawasan berikat;
- 4) Pergudangan dan penyimpanan lainnya;
- 5) Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut;
- 6) Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau;
- 7) Angkutan melalui saluran pipa;
- 8) Konstruksi sentral telekomunikasi;
- 9) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya;
- 10) Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri;

1. General (Continued)

- 3) *Large trade in land transportation (exclude cars, motorcycles, and others), spare parts and equipment ;*
- 4) *Large trade in used and unused goods (scrap);*
- 5) *Transportation consulting activities;*
- 6) *Other management consulting activities;*
- 7) *Educational support activities;*
- 8) *Cargo handling (goods's loading and unloading);*
- 9) *Railway Cargo Expedition activities and Land Transport Expeditions (EMKA and EAD);*
- 10) *Multimode transportation;*
- 11) *Other travel agents's activities;*
- 12) *Other private education;*
- 13) *Private health education;*
- 14) *Education and training in the railways areas;*
- 15) *Supporting activities of mining and other excavations;*
- 16) *Mining services;*
- 17) *Self-owned or leased real estate; and*
- 18) *Improvement at access to railway stations that intersect by other parties with the concept of connecting in order to increase value added for the company and improvement of passenger services.*

Other than its core business, the company may perform its activities to optimize the resource which are owned by the Company to:

- 1) *Warehousing and storage;*
- 2) *Cold storage activities;*
- 3) *Bounded warehousing activities or bonded area areas;*
- 4) *Warehousing and other storage;*
- 5) *Marine service activities;*
- 6) *Service activities of river and lake facilities;*
- 7) *Transportation pipelines;*
- 8) *Central construction of telecommunications;*
- 9) *Construction of irrigation networks, communication and other waste;*
- 10) *Special telecommunication activities for internal purposes;*

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

- 11) Aktivitas pengolahan data;
- 12) *Portal web* dan/atau *platform* digital dengan tujuan komersial;
- 13) Konstruksi Gedung Hunian;
- 14) Konstruksi Gedung Perkantoran;
- 15) Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
- 16) Konstruksi Gedung Penginapan;
- 17) Instalasi Mekanikal;
- 18) Instalasi konstruksi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain;
- 19) Periklanan;
- 20) Aktivitas klinik swasta;
- 21) Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi;
- 22) Perdagangan eceran barang obat farmasi untuk manusia di apotik;
- 23) Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan;
- 24) Konstruksi gedung kesehatan;
- 25) Penyiapan lahan;
- 26) Museum yang dikelola swasta;
- 27) Aktivitas biro perjalanan wisata; dan
- 28) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan lain dalam rangka mengembangkan proses bisnis Perseroan.

- 11) *Data processing activities;*
- 12) *Web portals and/or digital platforms for commercial purposes;*
- 13) *Residential Building's construction;*
- 14) *Office building's construction;*
- 15) *Shopping building's construction;*
- 16) *Inn Building's construction;*
- 17) *Mechanical installation;*
- 18) *Unclassified Other construction installations;*
- 19) *Advertising;*
- 20) *Private clinic activities;*
- 21) *Health care activities carried out by health workers beside of doctors and dentists;*
- 22) *Pharmaceutical drug's retail trade in human's pharmacies;*
- 23) *Health support service activities;*
- 24) *Health building's construction;*
- 25) *Land preparation;*
- 26) *Private museums;*
- 27) *Travel agencies's activities; and*
- 28) *Capital investment other companies to develop the Company's business processes.*

Kegiatan utama Perusahaan saat ini adalah bergerak dalam bidang usaha pengangkutan penumpang dan/atau barang dengan kereta api, usaha pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian, serta usaha penyewaan sarana/prasarana/fasilitas yang meliputi sewa kios/gudang/ruang stasiun dan terminal peti kemas.

The Company's current main business activities are in railway transportation for passenger and/or freight, railway-based education and training services, and rolling stock/infrastructure/facility rental business including shops/warehouse/station space and container terminal.

c. Wilayah Kerja

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, perusahaan memiliki Daerah Operasi, Divisi Regional, Balai Yasa, dan Divisi Bertujuan Khusus sebagai berikut:

Daerah Operasi (Daop), terdiri dari:

- 1) Daop 1, berkedudukan di Jakarta
- 2) Daop 2, berkedudukan di Bandung
- 3) Daop 3, berkedudukan di Cirebon
- 4) Daop 4, berkedudukan di Semarang
- 5) Daop 5, berkedudukan di Purwokerto
- 6) Daop 6, berkedudukan di Yogyakarta
- 7) Daop 7, berkedudukan di Madiun
- 8) Daop 8, berkedudukan di Surabaya
- 9) Daop 9, berkedudukan di Jember

c. Operation Regions

In conducting its business, the company has Operating Region, Regional Division, Balai Yasa (Workshop), and Special Purpose Division as follow:

Operating Regions (Daop), consists of:

- 1) *Daop 1, located in Jakarta*
- 2) *Daop 2, located in Bandung*
- 3) *Daop 3, located in Cirebon*
- 4) *Daop 4, located in Semarang*
- 5) *Daop 5, located in Purwokerto*
- 6) *Daop 6, located in Yogyakarta*
- 7) *Daop 7, located in Madiun*
- 8) *Daop 8, located in Surabaya*
- 9) *Daop 9, located in Jember*

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Divisi Regional (Divre), terdiri dari:

- 1) Divre I, berkedudukan di Medan
- 2) Divre II, berkedudukan di Padang
- 3) Divre III, berkedudukan di Palembang
- 4) Divre IV, berkedudukan di Tanjung Karang

Regional Division (Divre), consists of:

- 1) *Divre I, located in Medan*
- 2) *Divre II, located in Padang*
- 3) *Divre III, located in Palembang*
- 4) *Divre IV, located in Tanjung Karang*

Balai Yasa, terdiri dari:

- 1) Balai Yasa Manggarai, berkedudukan di Jakarta
- 2) Balai Yasa Tegal, berkedudukan di Tegal
- 3) Balai Yasa Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta
- 4) Balai Yasa Gubeng, berkedudukan di Surabaya
- 5) Balai Yasa Lahat, berkedudukan di Lahat
- 6) Balai Yasa Pulubrayan, berkedudukan di Medan

Balai Yasa, consists of:

- 1) *Balai Yasa Manggarai, located in Jakarta*
- 2) *Balai Yasa Tegal, located in Tegal*
- 3) *Balai Yasa Yogyakarta, located in Yogyakarta*
- 4) *Balai Yasa Gubeng, located in Surabaya*
- 5) *Balai Yasa Lahat, located in Lahat*
- 6) *Balai Yasa Pulubrayan, located in Medan*

Divisi Bertujuan Khusus yaitu *Light Rail Transit* Jabodebek, berkedudukan di Jakarta.

Special Purpose Division is Light Rail Transit Jabodebek, located in Jakarta.

d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Beserta Karyawan

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, berdasarkan Akta No. 383 tanggal 30 September 2022 dan No. 277 tanggal 31 Desember 2021 dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Bandung yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0063053 tanggal 7 Oktober 2022 dan No. AHU-AH.01.03-0494849 tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

d. Board of Commisioners and Directors and Employees

The composition of the Company's Board of Commissioners changes as of December 31, 2022 and 2021, based on the Deed No. 383 dated September 30, 2022 and No. 277 dated December 31, 2021 made in presence of Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notary in Bandung that have approved by the Ministry of Law and Human Rights with Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0063053 dated October 7, 2022 and No. AHU-AH.01.03-0494849 dated 31 Desember 2021 are as follows:

	2022	2021	
Dewan Komisaris			Board of Commisioners
Komisaris Utama dan Komisaris Independen	Said Aqil Siroj	Said Aqil Siroj	<i>President Commissioner and Independent Commissioner</i>
Komisaris Independen	Riza Primadi	Riza Primadi	<i>Independent Commissioner</i>
Komisaris Independen	Rochadi	Rochadi	<i>Independent Commissioner</i>
Komisaris Independen	Endang Tirtana	Endang Tirtana	<i>Independent Commissioner</i>
Komisaris Independen	Johan Sirait	--	<i>Independent Commissioner</i>
Komisaris	Diah Natalisa	Diah Natalisa	<i>Commissioner</i>
Komisaris	Chairul Anwar	Chairul Anwar	<i>Commissioner</i>
Komisaris	Sri Paduka Mangkoenagoro X	Freddy Harris	<i>Commissioner</i>
Komisaris	Mohamad Risal Wasal	Cris Kuntadi	<i>Commissioner</i>

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Susunan Dewan Direksi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, berdasarkan Akta No. 09 tanggal 02 November 2022 dan No. 205 tanggal 31 Mei 2021 dibuat di hadapan Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Bandung yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-00072126 tanggal 2 November 2022 dan No. AHU-AH.01.03-0362913 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Board of Directors changes as of December 31, 2022 and 2021, based on the Deed No. 09 dated November 2, 2022 and No. 205 dated May 31, 2021 made in presence of Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., in Notary Bandung that have approved by the Ministry of Law and Human Rights with Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0072126 dated November 2, 2022 and No. AHU-AH.01.03-0362913 are as follows:

	2022	2021	
Direksi			Directors
Direktur Utama	Didiek Hartantyo	Didiek Hartantyo	<i>President Director</i>
Direktur Niaga	Hadis Surya Palapa	Dadan Rudiandiyah	<i>Director of Commercials</i>
Direktur Operasi	Awan Hermawan Purwadinata	Heru Kuswanto	<i>Director of Operations</i>
Direktur Pengelolaan Prasarana	Heru Kuswanto	Awan Hermawan Purwadinata	<i>Director of Infrastructure Management</i>
Direktur Pengelolaan Sarana	Eko Purwanto	Eko Purwanto	<i>Director of Facilities Management</i>
Direktur Keselamatan dan Keamanan	Sandry Pasambuna	John Robertho	<i>Director of Safety and Security</i>
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Suparno	Agung Yunanto	<i>Director of Human Capital and General Affairs</i>
Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan	John Robertho	Jeffrie N Korompis	<i>Director of Strategic Planning and Development</i>
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Salusra Wijaya	Salusra Wijaya	<i>Director of Finance and Risk Management</i>

Perubahan susunan anggota Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/CH/DEKOM/XI/2022 tanggal 23 November 2022 dan No. 02/CH/DEKOM/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

The composition changes of members of the Audit Committee as of December 31, 2022 and 2021, based on Decree of the Board of Commissioner No. 08/CH/DEKOM/XI/2022, dated November 23, 2022 and No. 02/CH/DEKOM/III/2021 March 10, 2021 are as follows:

	2022	2021	
Komite Audit			Audit Committee
Ketua	Riza Primadi	Riza Primadi	<i>Chairman</i>
Anggota	Rochadi	Rochadi	<i>Member</i>
Anggota	Johan Sirait	--	<i>Member</i>
Anggota	Ernesto	Ernesto	<i>Member</i>
Anggota	Amalia Setyanti Lestari	Amalia Setyanti Lestari	<i>Member</i>

Perubahan susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 09/CH/DEKOM/XI/2022 tanggal 23 November 2022 dan No. 07/CH/DEKOM/V/2021 bulan Mei 2021 adalah sebagai berikut:

The composition changes of the Risk Management Monitoring Committee as of December 31, 2022 and 2021, based on No. 09/CH/DEKOM/XI/2022 dated November 23, 2022 and No. 07/CH/DEKOM/V/2021 at May, 2021 are as follows:

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

	2022	2021	
Komite Pemantau Manajemen Risiko			Monitoring Risk Management Committee
Ketua (merangkap Anggota)	Chairul Anwar	Freddy Harris	Chairman (concurrently Member)
Anggota	Endang Tirtana	Cris Kuntadi	Member
Anggota	Mohamad Risal Wasal	Chairul Anwar	Member
Anggota	Miranti Gani	Miranti Gani	Member
Sekretaris/Anggota	Handy Purnama	Mokhammad Mahdum	Secretary/Member

Perubahan susunan Komite Pemantau Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 03/CH/DEKOM/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dan No. 04/CH/DEKOM/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

The composition changes of the Risk Management Nomination and Remuneration as of December 31, 2022 and 2021, based on No. 03/CH/DEKOM/VIII/2022 dated August 30, 2022 and No. 04/CH/DEKOM/III/2021 on March 10, 2021 are as follows:

	2022	2021	
Komite Nominasi dan Remunerasi			Nomination and Remuneration Committee
Ketua (merangkap Anggota)	Said Aqil Siroj	Said Aqil Siroj	Chairman (concurrently Member)
Anggota	Diah Natalisa	Diah Natalisa	Member
Anggota	Sri Paduka Mangkoenagoro X	--	Member
Anggota	Corina D. Riantoputra	Corina D. Riantoputra	Member
Satuan Pengendali Internal (SPI) dan Sekretaris Perusahaan			Internal Audit Unit (SPI) and Corporate Secretary
Ketua Satuan			Head of Internal Audit (SPI)
Pengendali Internal	Dwi Erni Ratnawati	Dwi Erni Ratnawati	Corporate Secretary
Sekretaris Perusahaan	Asdo Artriviyanto	Asdo Artriviyanto	

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 jumlah karyawan (tidak termasuk Direksi) Perusahaan dan entitas anak masing-masing sejumlah 48.564 pegawai (30.735 pegawai tetap, 17.829 pegawai tidak tetap dan alih daya) dan 40.570 orang (30.298 pegawai tetap, 10.272 pegawai tidak tetap dan alih daya) (tidak diaudit).

As of December 31, 2022 and 2021 the number of employees (excluding Directors) the Company and subsidiaries are 48,564 employees (30,735 permanent, 17,829 contracted and outsourcing) and 40,570 (30,298 permanent, 10,272 contracted and outsourcing) employees (unaudited), respectively.

e. Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Perusahaan

Pada tanggal 13 November 2017, Perusahaan telah mendapatkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-438/D.04/2017 atas Penawaran perdana penerbitan Obligasi I Kereta Api Indonesia tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000 dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 November 2017. Pada tanggal 18 November 2022, Perusahaan telah melunasi Obligasi I seri A Kereta Api Indonesia Tahun 2017 sebesar Rp1.000.000.000.

e. The Company's Bonds and Sukuk Public Offering

As of November 13, 2017, the Company obtained an effective statement from Financial Services Authority (OJK) No. S-438/D.04/2017 for Initial Public Offering on the issuance of bonds I Kereta Api Indonesia year 2017 with a principal amount of Rp2,000,000,000 and were listed on the Indonesia Stock Exchange on November 21, 2017. On November 18, 2022, The Company has paid off Kereta Api Indonesia 2017 Bond I series A year 2017 of Rp1,000,000,000.

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Pada tanggal 6 Desember 2019, Perusahaan telah mendapatkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No: S-189/D.04/2019 atas Penawaran umum penerbitan Obligasi II Kereta Api Indonesia tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000 dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Desember 2019.

As of December 6, 2019, the Company obtained an effective statement from Financial Services Authority (OJK) No: S-189/D.04/2019 for General Public Offering on the issuance of bonds II Kereta Api Indonesia year 2019 with a principal amount of Rp2,000,000,000 and were listed on the Indonesia Stock Exchange on December 16, 2019.

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan telah mendapatkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-148/D.04/2022 atas Penawaran perdana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap 1 Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000 dan Sukuk Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap 1 Tahun 2022 dengan sisa imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000 dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2022.

As of July 29, 2022, the Company obtained an effective statement from Financial Services Authority (OJK) No. S-148/D.04/2022 for Initial Public Offering on the issuance of Continuing Bonds I Kereta Api Indonesia Phase I Year 2022 with a principal amount of Rp1,500,000,000 and Continuing Sukuk I Kereta Api Indonesia Phase I Year 2022 with a remaining Ijarah benefit amount of Rp500,000,000 were listed on the Indonesia Stock Exchange on August 3, 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah utang obligasi dan sukuk yang belum jatuh tempo adalah sebesar Rp5.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2022, The amount of outstanding bonds payables and sukuk amounted to Rp5,000,000,000 with detail as follows:

No./ No.	Obligasi/ Bonds	Jumlah/ Amount	Bunga per Tahun/ Interest per Annum	Tahun/ Years	Tanggal Penerbitan/ Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date
1	Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017/ Kereta Api Indonesia Bond I Year 2017 Seri/ Serie B	1.000.000.000	8,25%	7	13 November 2017/ November 13, 2017	1 November 2024/ November 1, 2024
2	Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019/ Kereta Api Indonesia Bond II Year 2019 Seri/ Serie A	900.000.000	7,75%	5	6 Desember 2019/ December 6, 2019	16 Desember 2024/ December 16, 2024
	Seri/ Serie B	1.100.000.000	8,20%	7	6 Desember 2019/ December 6, 2019	16 Desember 2026/ December 16, 2026
3	Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022/ Kereta Api Indonesia Continuing Bond I Year 2022 Seri/ SerieA	634.000.000	7,10%	5	5 Agustus 2022/ August 5, 2022	5 Agustus 2027/ August 5, 2027
	Seri/ SerieB	866.000.000	8,00%	7	5 Agustus 2022/ August 5, 2022	5 Agustus 2029/ August 5, 2029

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

No./ No.	Sukuk/ Sukuk	Jumlah/ Amount	Cicilan Imbalan per Tahun/ Installment Benefit per Annum	Tahun/ Years	Tanggal Penerbitan/ Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date
1	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022/ Kereta Api Indonesia Continuing Sukuk Ijarah I Year 2022 Seri/ Serie A	117.350.000	8.331.850	5	5 Agustus 2022/ August 5, 2022	5 Agustus 2027/ August 5, 2027
	Seri/ Serie B	382.650.000	30.612.000	7	5 Agustus 2022/ August 5, 2022	5 Agustus 2029/ August 5, 2029

2. Entitas Anak

2. The Subsidiaries

Perusahaan memiliki entitas anak pada 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

The Company has subsidiaries as of December 31, 2022 and 2021 as follows:

No.	Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Kegiatan Pokok/ Main Activity	Tahun Pendirian/ Establishment Date	Tahun Operasi/ Year of Operation	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
						2022 (%)	2021 (%)	2022 Rp	2021 Rp
1	PT Reska Multi Usaha (RMU)	Jakarta	Restoran Kereta Api/ The Railways Restaurant	2003	2003	99,74	99,74	482.887.390	380.692.101
2	PT Railink (Railink)	Jakarta	Transportasi Kereta Api Bandara/ Airport Railways	2005	2014	60,00	60,00	564.519.459	1.000.068.687
3	PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)	Jakarta	Transportasi Kereta Commuter/ Commuter Railways	2008	2008	99,78	0,9978	3.278.464.511	2.304.822.460
4	PT KA Logistik (KALOG)	Jakarta	Distribusi Logistik berbasis Kereta Api/ Railway-Based Logistic Service	2009	2009	99,30	99,30	847.167.021	807.879.730
5	PT KA Properti Manajemen (KAPM)	Jakarta	Pengelolaan Aset Properti Perkeretaapian/ Railway Property Asset Management	2009	2009	99,63	99,63	905.134.224	908.690.000
6	PT KA Pariwisata (KAWIS)	Jakarta	Pariwisata Kereta Api/ Railways Tourism	2009	2010	99,90	99,90	152.859.992	96.339.586

PT Reska Multi Usaha (RMU)

RMU didirikan berdasarkan Akta No. 18 tanggal 2 Juli 2003 oleh Notaris Darwin Ginting, S.H., M.H., yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C - 21011 HT 01.01. Tahun 2003 tanggal 4 September 2003.

Anggaran Dasar RMU telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Nomor 6 tanggal 21 September 2019 oleh Notaris Silvia Anugrahwy, S.H., M.Kn. mengenai Perubahan Modal Dasar. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-0079549.AH.01.02 tanggal 7 Oktober 2019.

Modal dasar RMU sebesar Rp100.749.000 terbagi atas 100.749 saham dengan bernilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 100.749 saham atau sebesar Rp100.749.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,74% atau sebanyak 100.487 saham dengan nilai sebesar Rp100.487.000.

PT Reska Multi Usaha (RMU)

RMU was established based on Notarial Deed No. 18 dated on July 2, 2003 of Notary Darwin Ginting, S.H., M.H., which approved by the Minister of Law of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C - 21011 HT 01.01 Tahun 2003 dated September 4, 2003.

RMU's Articles of association has been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 6 dated September 21, 2019 of Notary Silvia Anugrahwy, S.H., M.Kn. concerning the Changes in the Authorized Capital. The amendments were approved by the Minister of Law and Human Rights in his Decision Letter No. AHU-0079549.AH.01.02 dated October 7, 2019.

The authorized capital of RMU amounted to Rp100,749,000 composed of 100,749 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp100,749,000 composed of 100,749 shares with share ownership as follows:

- The Company owns 99.74% or 100,487 shares amounting to Rp100,487,000.

2. Entitas Anak (Lanjutan)

- Yayasan Pusaka memiliki 0,26% atau sebanyak 262 saham dengan nilai sebesar Rp262.000.

PT Railink (Railink)

Railink didirikan berdasarkan Surat Persetujuan dari Menteri Negara BUMN No. S-108/MBU/2005 tanggal 8 Maret 2005 dan Akta Pendirian No. 34 tanggal 28 September 2006, dari Notaris Ny. Silvia Abbas Sudrajat, S.H., Notaris di Banten yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W29-00480HT.01.01. TH.2006, pada tanggal 7 Desember 2006.

Anggaran Dasar Railink telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah menurut Keputusan Para Pemegang Saham yang telah disahkan dengan Akta Notaris Ariani Lakhsmitjati Rachim, S.H., No. 6 tanggal 19 April 2021 mengenai Perubahan Modal Dasar dan Modal Disetor kepada Railink. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0248954 tanggal 21 April 2021.

Modal dasar Railink sebesar Rp839.400.000, ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 839.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 per saham atau sebesar Rp839.400.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 60,00% atau sebanyak 503.640 saham dengan nilai sebesar Rp503.640.000.
- PT Angkasa Pura II (Persero) memiliki 40,00% atau sebanyak 335.760 saham dengan nilai sebesar Rp335.760.000.

Berdasarkan surat No.KP.303/XII/2/KA-2022 dan No.KEP.08.03.01/00/12/2022/0635 tanggal 30 Desember 2022, para Pemegang Saham telah sepakat untuk mengonversi Pinjaman Pemegang Saham sebesar Rp40.000.000 menjadi Modal Disetor Lainnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 60,00% dengan nilai sebesar Rp24.000.000.
- PT Angkasa Pura II (Persero) memiliki 40,00% dengan nilai sebesar Rp16.000.000.

2. The Subsidiaries (Continued)

- Yayasan Pusaka owns 0.26% or 262 shares amounting to Rp262,000.

PT Railink (Railink)

Railink was established based on Letter of Approval from Minister of SOEs No. S-108/MBU/2005 dated March 8, 2005, and Notarial Deed No. 34 dated September 28, 2006 of Notary Ny. Silvia Abbas Sudrajat, S.H., Notary in Banten, which has been approved by the Minister of Law and Human Right of Republic of Indonesia in his Decision Letter No. W29-00480HT.01.01.TH.2006 dated December 7, 2006.

Railink's Article of Association has been amended several times, most recently by Agreement of Stockholders legalized by the Notarial Deed of Ariani Lakhsmitjati Rachim, S.H., No. 6 dated April 19, 2021 concerning the Changes in the authorized and paid in capital. These amendments have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. Decision Letter of Amended's articles No. AHU-AH.01.03-0248954 dated April 21, 2021.

The authorized capital of Railink amounted to Rp839,400,000, issued and fully paid capital amounted to Rp839,400,000 composed of 839,400 shares with par value of Rp1,000 per share with share ownership as follows:

- *The Company owns 60.00% or 503,640 shares amounting to Rp503,640,000.*
- *PT Angkasa Pura II (Persero) owns 40.00% or 335,760 shares amounting to Rp335,760,000.*

Based on letters No.KP.303/XII/2/KA-2022 and No.KEP.08.03.01/00/12/2022/0635 dated December 30, 2022, the Shareholders agreed to convert the Shareholder Loan of IDR 40,000,000 into Other Paid-in Capital through the General Meeting of Shareholders with the following composition:

- *The Company owns 60.00% amounting to Rp24,000,000.*
- *PT Angkasa Pura II (Persero) owns 40.00% amounting to Rp16,000,000.*

2. Entitas Anak (Lanjutan)

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)

KCI didirikan berdasarkan Akta Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H., pada tanggal 15 September 2008 No.457 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-74707.AH.01.01, tanggal 16 Oktober 2008.

Anggaran Dasar KCI telah mengalami beberapa perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 1 tanggal 7 Januari 2019 dari Notaris Tri Mulyahati, S.H., yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-0002753.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019.

Modal dasar KCI sebesar Rp542.000.000 terbagi atas 542.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 230.500 saham atau sebesar Rp230.500.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,78% atau sebanyak 230.000 saham dengan nilai sebesar Rp230.000.000.
- Yayasan Pusaka memiliki 0,22% atau sebanyak 500 saham dengan nilai sebesar Rp500.000.

PT KA Logistik (KALOG)

KALOG didirikan berdasarkan Surat Persetujuan dari Menteri Negara BUMN No. S-536/MBU/2009, tanggal 29 Juli 2009 dan berdasarkan Akta Pendirian No. 10, tanggal 8 September 2009 yang dibuat dihadapan Ny. Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-51175.AH.01.01, pada tanggal 22 Oktober 2009.

Anggaran Dasar KALOG telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Yoshsi, S.H., M.Kn. No. 30 tanggal 16 September 2022 mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan serta kegiatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 19 September 2022 No. AHU 0067267.AH.01.02.Tahun 2022.

2. The Subsidiaries (Continued)

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)

KCI was established based on Notarial Deed of Ilmiawan Dekrit S., S.H., No. 457 dated September 15, 2008 which is approved by the Minister of Law and Human Right of Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-74707.AH.01.01, dated October 16, 2008.

KCI's Article of Association has been amended several time, most recently by Notarial Deeds No. 1 on January 7, 2019 of Notary Mulyahati, S.H., which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0002753.AH.01.02 Year 2019 dated January 18, 2019.

The authorized capital of KCI amounted to Rp542,000,000 composed of 542,000 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp230,500,000 composed of 230,500 shares with share ownership as follows:

- *The Company owns 99.78% or 230,000 shares amounting to Rp230,000,000.*
- *Yayasan Pusaka owns 0.22% or 500 shares amounting to Rp500,000.*

PT KA Logistik (KALOG)

KALOG was established based on the Letter of Approval from the Minister of SOEs No. S-536/MBU/2009, dated July 29, 2009 and based on the Deed of Establishment No. 10, dated September 8, 2009 of Ny. Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta was approved by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia in his Decision Letter. No. AHU-51175.AH.01.01, dated October 22, 2009.

KALOG's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed of Yoshsi, S.H., M.Kn. No. 30 dated September 16, 2022 concerning amendments to Article 3 of the Articles of Association regarding the aims and objectives as well as business. This amendment has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a Decree dated September 19, 2022 No. AHU- 0067267.AH.01.02. Year 2022.

2. Entitas Anak (Lanjutan)

Modal dasar KALOG sebesar Rp99.100.000 terbagi atas 99.100 saham dengan bernilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 75.275 saham atau sebesar Rp75.275.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,30% atau sebanyak 74.750 saham dengan nilai sebesar Rp74.750.000.
- Yayasan Pusaka memiliki 0,70% atau sebanyak 525 saham dengan nilai sebesar Rp525.000.

PT KA Properti Manajemen (KAPM)

KAPM didirikan berdasarkan Surat Persetujuan dari Menteri Negara BUMN No. S-535/MBU/2009, tanggal 29 Juli 2009 dan berdasarkan Akta Pendirian No. 9, tanggal 8 September 2009 yang dibuat dihadapan Ny. Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-5150.AH.01.01, pada tanggal 26 Oktober 2009.

Anggaran Dasar KAPM telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir Akta No. 2 tertanggal 2 Oktober 2019 mengenai perubahan modal dasar yang dibuat oleh Notaris Agung Sri Wijayanti, S.H., M.Kn., telah dicatat dalam database Sistem Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai suratnya No. AHU-0079321.AH.01.02 Tanggal 7 Oktober 2019.

Modal dasar KAPM sebesar Rp273.575.000 terbagi atas 273.575 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 273.575 saham atau sebesar Rp273.575.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,63%, atau sebanyak 272.550 saham dengan nilai sebesar Rp272.550.000.
- Yayasan Pusaka memiliki 0,37% atau sebanyak 1.025 saham dengan nilai sebesar Rp1.025.000.

2. The Subsidiaries (Continued)

The authorized capital of KALOG amounted to Rp99,100,000 composed of 99,100 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted Rp75,275,000 composed of 75,275 shares with share ownership as follows:

- *The Company owns 99.30% or 74,750 shares amounting to Rp74,750,000.*
- *Yayasan Pusaka owns 0.70% or 525 shares amounting to Rp525,000.*

PT KA Properti Manajemen (KAPM)

KAPM was established under the Letter of Approval from the Minister of SOEs No. S-535/MBU/2009, dated July 29, 2009 and based on the Deed of Establishment No. 9 dated September 8, 2009 of Ny. Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. Deed of Establishment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-5150.AH.01.01, on October 26, 2009.

KAPM's Articles of Association have been amended several times, most recently by Deed No. 2 dated October 2, 2019 concerning the Changes in the authorized capital of Notary Agung Sri Wijayanti, S.H., M.Kn., have been recorded in the Legal Entity Database System of the Minister of Justice and Human Rights according to Decision Letter No. AHU-0079321.AH.01.02 dated October 7, 2019.

The authorized capital of KAPM amounted to Rp273,575,000 composed of 273,575 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp273,575,000 composed of 273,575 shares with share ownership as follows:

- *The Company owns 99.63% or 272,550 shares amounting to Rp272,550,000.*
- *Yayasan Pusaka owns 0.37% or 1,025 shares amounting to Rp1,025,000.*

2. Entitas Anak (Lanjutan)

PT KA Pariwisata (KAWIS)

KAWIS didirikan berdasarkan Surat Peretujuan dari Menteri Negara BUMN No. S-537/MBU/2009 tanggal 29 Juli 2009 dan berdasarkan Akta Pendirian No. 11, tanggal 8 September 2009, Notaris Ny. Fathiah Helmi, S.H., dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-04724.AH.01.01, tanggal 28 Januari 2010.

Anggaran Dasar KAWIS telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kereta Api Pariwisata No. 5, tanggal 14 Desember 2017 mengenai perubahan modal dasar yang dibuat dihadapan Notaris Agung Sri Wijayanti S.H., M.Kn., telah dicatat dalam database Sistem Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai suratnya AHU-0027019.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017.

Modal dasar KAWIS sebesar Rp99.100.000 terbagi atas 24.775 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 24.775 saham atau sebesar Rp24.775.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,90%, atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- Yayasan Pusaka memiliki 0,10% atau sebanyak 25 saham dengan nilai sebesar Rp25.000.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan–Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK–IAI) serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan

2. The Subsidiaries (Continued)

PT KA Pariwisata (KAWIS)

KAWIS was established within Letters of approval from the Minister of SOEs No. S-537/MBU/2009, dated July 29, 2009 and based on Notarial Deed No. 11 of Notary Ny. Fathiah Helmi, S.H., dated September 8, 2009 and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-04724.AH.01.01, dated on January 28, 2010.

The Articles KAWIS of Association have been amended by Deed of Statement of Shareholders Resolution of PT Kereta Api Pariwisata No. 5, dated December 14, 2017 concerning the Changes in the authorized capital of Notary Agung Sri Wijayanti S.H., M.Kn., have been recorded in the Legal Entity Database System of the Minister of Justice and Human Rights according to Decision Letter No. AHU-0027019.AH.01.02 Year 2017 dated December 20, 2017.

The authorized capital of KAWIS amounted to Rp99,100,000 composed of 24,775 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp24,775,000 composed of 24,775 shares with share ownership as follows:

- The Company owns 99.90% or 24,750 shares amounting to Rp24,750,000.
- Yayasan Pusaka owns 0.10% or 25 shares amounting to Rp25,000.

3. Significant Accounting Policies

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board–Indonesian Institute of Accountant (DSAK–IAI) and regulations in the Capital Market including Regulations of Financial Services Authority/Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

b. Basis of Measurement and Preparation of the Consolidated Financial Statements

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan perusahaan dan entitas anak (selanjutnya secara kolektif disebut sebagai "Grup").

The consolidated financial statements included the accounts of the Company and its subsidiaries (hereinafter collectively referred to as "the Group").

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for specific account certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

c. Principles of Consolidation

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 2.

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the company and subsidiaries as described in Note 2.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi pemilik kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The Group's financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the group are eliminated in full.

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

If the Group loses control, the Group:

- a. Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- b. Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
- c. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- d. Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- e. Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
- f. Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

- a. Derecognizes the assets (including *goodwill*) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;
- b. Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);
- c. Recognizes the fair value of the consideration received, from the transaction, event or circumstances that resulted the loss of control;
- d. Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;
- e. Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAK's, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary; and
- f. Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

d. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

d. Investments in Associates

Associates are entities which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies (significant influence).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi dan penghasilan atau kerugian komprehensif lain *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai tercatat investasi.

Investment in associates accounted using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognised at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of the profit or loss and other comprehensive income or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognised in profit or loss. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of fixed assets and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

The Group discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- (a) jika investasi menjadi entitas anak.
- (b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
- (c) ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

- (a) if the investment becomes a subsidiary.*
- (b) if the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measure the retained interest at fair value.*
- (c) when the Group discontinue the use of the equity method, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.*

e. Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu Pengaturan Bersama yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

e. Join Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of Joint Arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:

The Group classified joint arrangement as:

- 1) Operasi Bersama
Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

- 1) Joint Operation
Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operator.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

A joint operator recognize in relation to its interest in a joint operation:

- (a) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- (b) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- (c) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
- (d) Bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
- (e) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

- (a) Its assets, including its share of any assets held jointly;*
- (b) Its liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;*
- (c) Its revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;*
- (d) Its share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and*
- (e) Its expenses, including its share of any expenses incurred jointly.*

- 2) Ventura Bersama
Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

- 2) *Joint Venture*
Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control upon the agreement, have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

Joint venturers recognize its interest in a joint venture as an investment and accounts for that investment using the equity method.

f. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan seluruh entitas anak adalah Rupiah.

f. Foreign Currency Transaction and Balances

In preparing the financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Company and all subsidiaries is Indonesian Rupiah.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate of Bank of Indonesia at December 31, 2022 and 2021 as follows:

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Mata Uang Asing (Nilai Penuh)	2022	2021	Foreign Currency (Full Amount)
Dolar Amerika Serikat	15.731	14.269	United States Dollar
Yen Jepang	118	124	Japanese Yen
Euro	16.713	16.127	Euro

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

g. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

g. Transactions with Related Parties

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - i. *has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b) *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
 - iii. *Both entities are joint ventures of the same third party;*
 - iv. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 41.

- v. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity itself is the programme organizer, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*
- vi. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);*
- vii. *A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or*
- viii. *The entity, or any member of a group which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Entity related to the Government can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the Ministry of SOEs as a shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 41.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Dalam komponen setara kas tidak termasuk deposito berjangka yang dijadikan jaminan pada bank walaupun jatuh temponya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan. Deposito yang bersangkutan disajikan dalam kelompok aset lancar sepanjang penjaminan tersebut meliputi periode tidak lebih dari satu tahun dari tanggal laporan posisi keuangan.

i. Dana Dibatasi Penggunaannya

Rekening yang dibatasi penggunaannya dan atau digunakan sebagai jaminan diklasifikasi sebagai bagian aset lancar jika jatuh temponya kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

j. Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang akan diterima dari pelanggan atas layanan yang diberikan dari kegiatan usaha.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

k. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

h. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (current account) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of investment that are not used as collateral or are not restricted.

The components of cash equivalents does not include time deposit which was pledged as collateral for a bank, although the maturities are shorter than 3 (three) months. The mentioned deposit is presented in the current assets of the guarantee covers a period not exceeding one year from the balance sheet date.

i. Restricted Fund

Current accounts which are restricted and or used as security are classified as current assets when the maturities are less than 12 months after the end of reporting period.

j. Trade Receivables

Trade receivables are amounts due to customers for services rendered in the ordinary course of business.

Account and other receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

k. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make sales.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

l. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti investasi sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis (12-40 tahun).

3. Significant Accounting Policies (Continued)

The amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognised as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognised as a reduction in the amount of inventories recognised as an expense in the period in which the reversal occurs.

l. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized to operations using straight-line method over their beneficial periods.

m. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognized as an asset when, and only when there is a probability that the future economic benefits which are associated with the investment property, will flow into the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group may choose to use cost model and measure its investment property at acquisition cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Landrights are not depreciated and are carried at costs. Buildings are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives (12-40 years).

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Transfer to investment property made when, and only when, there is a change in usage, evidenced by end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Transfer from investment property made when, and only when, there is a change in usage, evidenced by commencement of owner-occupation and commencement of development with a view of sale.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

n. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

n. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Lands are recognized at its cost and are not depreciated.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets starts when available for use and was computed by using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)/ Useful Lives (Years)	Tarif Penyusutan Per Tahun/ Depreciation Rate Per Year	Type of Fixed Assets
Sarana			Rolling Stock
Lokomotif	30	3,33%	Locomotive
Kereta	15-30	3,33% - 6,67%	Train
Gerbong	30	3,33%	Wagons
Prasarana			Infrastructure
Bangunan	10-40	2,50% - 10%	Building
Prasarana dan Instalasi	5-20	5,00% - 20,00%	Infrastructure and Installation
Fasilitas			Facilities
Mesin dan Peralatan	3-40	2,50% - 33,33%	Machinery and Equipment
Kendaraan	4-8	12,50% - 25,00%	Vehicles
Inventaris	4-5	20,00% - 25,00%	Supplies

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "aset dalam pembangunan" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya.

Self-constructed of fixed assets are presented as part of the fixed assets under "assets under construction" and are stated at its cost.

Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan bersih, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

At the end of each reporting period, the Group made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

o. Perjanjian Konsesi Jasa

Grup telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22) sehubungan dengan hak pengoperasian aset.

o. Service Concession Arrangement

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22) related to operating rights of assets.

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik.

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator.

Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai aset takberwujud, aset konsesi dalam bentuk aset takberwujud yaitu hak pengoperasian akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian aset. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi aset diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset, concession assets which are under intangible asset which is operation rights of assets will be amortized over the remaining concession period from the date of operation of the assets. During the construction period, the accumulated cost of assets are recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Hak pengoperasian aset dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) tanpa syarat.

The operation rights of assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) for no consideration.

Hak pengoperasian aset yang diberikan kepada Grup dapat dialihkan dengan persetujuan Pemerintah/DJKA.

The operation rights of asset granted to the Group are transferrable with approval from the Government/DJKA.

Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/DJKA pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

These concession right assets will be transferred to the Government/DJKA at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

Selama periode konstruksi, Grup mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan penambahan aset konsesi.

During the construction period, the Group recognizes revenues and costs of construction in accordance with the addition of concession assets.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian, dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed.

Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount allowed to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any investment income earned from the temporary investment of such borrowings.

p. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

p. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

q. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari Unit Penghasil Kas dari aset tersebut.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred.

Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

q. Impairment of Assets Non-Financial

At the end of each reporting period, the Group assess whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if its is not possible, the Group determines the recoverable amount of the asset's Cash-Generating Unit.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau Unit Penghasil Kas.

Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur. Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

r. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka atas pemakaian lahan dan bangunan diamortisasi selama masa kontrak pemakaian dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian tidak lancar atas pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai bagian dari "liabilitas jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pendapatan diterima di muka atas angkutan penumpang merupakan pendapatan atas jasa angkutan penumpang pengguna kereta api yang realisasi keberangkatannya pada periode berikutnya.

Pendapatan diterima di muka angkutan barang merupakan pendapatan atas jasa angkutan barang yang terdiri dari angkutan peti kemas, batu bara, parcel, barang curah dan barang jenis lain yang realisasi keberangkatannya pada periode berikutnya.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or Cash Generating Unit.

Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured. If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.

An impairment loss recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

r. Unearned Revenues

Unearned revenues from usage of land and buildings are amortized over the usage term using the straight-line method. The non-current portion of unearned revenues is shown as part of "long-term liabilities" in the consolidated statement of financial position.

Unearned revenues from passenger transportation represent revenue as on passenger transport services by train which the travel realization departure is in next period.

Unearned revenue of freight transportation represents revenue generated from freight transport railway services consist of freight of containers, coal, parcel, bulk cargo and other types of goods of which the departure is realized in the following period.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

s. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

s. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax.

Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) *the initial recognition of goodwill; or*
- b) *the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Assets and liabilities deferred tax are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:

- a) *the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*

- b) *the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

- i. entitas kena pajak yang sama; atau
- ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

t. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling hapus). Selisih antara Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan Modal Disetor.

Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masih harus dibayarkan oleh Grup sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan Pajak.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Grup untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Grup.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

- i. the same taxable entity; or
- ii. different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

The Group offsets current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a) has legally enforceable right to set off the recognized amounts, and
- b) intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

t. Tax Amnesty Assets and Liabilities

Tax Amnesty Assets and Liabilities are recognized upon the issuance of Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) by the Ministry of Finance of Republic of Indonesia, and they are not recognized as net amount (offset). The difference between Tax Amnesty Assets and Tax Amnesty Liabilities are recognized as Additional Paid in Capital.

Tax Amnesty Assets are initially recognized at the value stated in SKPP.

Tax Amnesty Liabilities are initially measured at the amount of cash or cash equivalents to be settled by the Group according to the contractual obligation with respect to the acquisition of respective Tax Amnesty Assets.

The redemption money paid by the Group to obtain the tax amnesty is recognized as expense in the period in which the Group receives SKPP.

After initial recognition, Tax Amnesty Assets and Liabilities are measured in accordance with respective relevant SAKs according to the classification of each Tax Amnesty Assets and Liabilities.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Sehubungan dengan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak yang diakui, Grup telah mengungkapkan dalam laporan keuangannya:

- a. Tanggal SKPP;
- b. Jumlah yang diakui sebagai Aset Pengampunan Pajak sesuai SKPP; dan
- c. Jumlah yang diakui sebagai Liabilitas Pengampunan Pajak.

u. Sewa

Grup sebagai Penyewa (Lessee)

Pada tanggal inepsi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Grup menilai apakah:

- a. Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- b. Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- c. Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:

With respect to Tax Amnesty Assets and Liabilities recognized, the Group has disclosed the following in its financial statements:

- a. The date of SKPP;*
- b. Amount recognized as Tax Amnesty Assets in accordance with SKPP; and*
- c. Amount recognized as Tax Amnesty Liabilities.*

u. Leases

Group as Lessee

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

- a. The contract involves the use of an identified asset – this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;*
- b. The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits of the use of assets during the period of use; and*
- c. The Group has the right to direct the use of the identified asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Group has the right to direct the use of the asset if either:*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

- Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
- Grup mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal insepasi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks utang sewa meliputi: pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan atau penalti penghentian jika Grup cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut.

Grup mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak guna dengan model biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

- *The Group has the right to operate the asset; or*
- *The Group designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.*

At inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following: fixed payments, variable lease payments that depend on an index, amounts expected to be payable under a residual value guarantee and the exercise price under a purchase option, optional renewal period or penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

The Group recognizes a right of use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right of use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

After the commencement date, the Group measures the right of use assets under the cost model, which is cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, and adjusted for remeasurement of lease liabilities. Right of use asset depreciated using straight line method.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar, yang mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap. Jika tidak, maka aset hak guna disusutkan dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term or if the cost of the right of use asset reflects that the lessee will exercise a purchase option, the lessee shall depreciate the right of use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset, which refers to the terms of the useful life of the fixed asset. Otherwise, the lessee shall depreciate the right of use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right of use asset or the end of the lease term.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup. Umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, The Group incremental borrowing rate. Generally, The Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas sewa dengan:

After the commencement date, the Group shall measure the lease liability by:

- a. Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
- b. Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar;
- c. Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revision.

- a. *Increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability;*
- b. *Reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and*
- c. *Remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications, or to reflect revised in-substance fixed lease payments.*

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak guna telah berkurang menjadi nol.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right of use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right of use asset has been reduced to zero.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Selanjutnya, pembayaran atas kontrak yang termasuk ke dalam pengecualian, yakni pembayaran atas sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

Furthermore, payments associated with contracts included in the exception, which are payments associated with all short-term leases and certain leases of all low-value assets are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Grup sebagai Pemberi Sewa (Lessor)

Sewa dimana grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

Group as Lessor

Leases where the group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership are classified as operating leases. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as expense over the lease term on the same basis as rental income. Operating lease income is recognized as income on a straight-line basis over the lease term.

v. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

v. Employee Benefit

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service. Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the *Projected Unit Credit* method. Present value of benefit obligation is determined by discounting the benefit.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

The Group accounts not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- (a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut;
- (b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

- (a) *When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits;*
- (b) *When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.*

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen dan penghargaan *jubilee* dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui dalam laba rugi.

Other Long-Term Employee Benefits

Other long-term employee benefits such as long service leave, permanent disability benefit and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and change in actuarial assumption are charged and credited to profit or loss.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Terkait adanya siaran pers DSAK IAI "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa" pada bulan April 2022, Perusahaan mengubah kebijakan terkait atribusi imbalan pensiun pada periode jasa sesuai ketentuan dalam PSAK 24 untuk pola fakta umum dari program pensiun. Grup telah mengukur dampak atas perubahan tersebut seperti yang diungkapkan pada Catatan 54.

Regarding the press release of DSAK IAI "Attribution of Benefits on Service Period" in April 2022, the Company changed its policy regarding the attribution of pension benefits to the service period in accordance with the provisions in PSAK 24 for general fact patterns of pension plans. The Group has quantified the impact as disclosed in Note 54.

w. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
 - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
 - Kontrak memiliki substansi komersial; dan
 - Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

w. Revenue and Expenses Recognition

In determining revenue recognition, the Group perform analysis transaction through the following five steps of assessment:

1. *The contract has been agreed by the parties involved in the contract*
 - *The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred;*
 - *The contract has commercial substance; and*
 - *It is probable that the Group will receive benefits for the goods or services transferred.*
2. *Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, luxury sales tax, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.*
5. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang dapat diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi sepanjang waktu:

- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan Grup sebagaimana yang dilakukan Grup;
- Pelaksanaan Grup menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- Pelaksanaan Grup tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Grup dan Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk kinerja yang diselesaikan hingga saat ini.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual), kecuali merupakan aset yang terkait dengan aktivitas kontrak masa depan.

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan dicatat sebagai aset lancar lainnya. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

A performance obligation may be satisfied at the following:

- *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that can be recognized as the performance obligation is satisfied.*

A performance obligation is satisfied at a point in time unless it meets one of the following criteria, in which case it is satisfied over time:

- *The customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Group's performance as the Group performs;*
- *The Group's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced; and*
- *The Group's performance does not create an asset with an alternative use to the Group and the Group has an enforceable right to payment for performance completed to date.*

Expense Recognition

Expenses are recognized as incurred (accrual basis), unless they create an asset related to future contract activity.

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") or is incremental on obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered. These costs are therefore eligible for capitalization under PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers and recognized as other current assets. Such cost will be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

x. Pengakuan Pendapatan Kompensasi dan Beban Penggunaan Prasarana Pemerintah

- 1) Pendapatan kompensasi *Public Service Obligation (PSO)* yang diperoleh dari Pemerintah disajikan dalam laba rugi sebagai pendapatan jasa angkutan penumpang.
- 2) Pendapatan dari kompensasi PSO diakui secara akrual yang dibatasi oleh penyediaan anggaran yang tertuang di anggaran Pemerintah (berdasarkan DIPA).
- 3) Segala ketentuan mengenai PSO diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.
- 4) Beban pemeliharaan prasarana yang dibiayai oleh Pemerintah (IMO) yang pengerjaannya dilakukan oleh Perusahaan diperlakukan sebagai Pendapatan Usaha dan diakui saat terjadinya sesuai dengan nilai kontrak antara Pemerintah dan Perusahaan sebagai penyelenggara.
- 5) Beban penggunaan prasarana milik Pemerintah (TAC - *Track Access Charge*) yang dibiayakan menjadi penambah beban operasi tidak langsung dan diakui saat terjadinya.
- 6) Pendapatan kompensasi angkutan perintis yang diperoleh dari pemerintah disajikan sebagai pendapatan jasa angkutan dan diakui secara akrual.

x. The Recognition of Compensation Income and Expenses of Government's Infrastructure

- 1) *Compensation income of Public Service Obligation (PSO) received from the Government presented in the profit or loss as revenue passenger transportation service.*
- 2) *The PSO compensation income obtained from the Government is recognized in accrual method that limited by budget stipulated in the Government budget (based on DIPA).*
- 3) *All of the PSO arranged in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 84/PMK.02/2016 about Procedures for Procurement, Disbursement, and Accountability of the Public Service Obligation Fund or the Railway Transport Sector Economy Class.*
- 4) *The infrastructure maintenance expenses are funded by Government (IMO), which is performed by the Company and treated as Revenue and recognize when incurred in accordance with the contract between the Government and the Company as organizer.*
- 5) *The expenses of railroad infrastructure owned by government (TAC - Track Access Charge) which are financed become an indirect addition to operating expenses and are recognized when incurred.*
- 6) *Pioneer transportation compensation income received from the Government presented as revenue freight service and recognized on accrual basis.*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

y. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan menggunakan dua dasar yaitu: model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(i) **Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi**

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

y. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

The Group financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss. on the basis of both: the Group's business model for managing the financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial asset.

(i) **Financial Assets Measured at Amortized Costs**

Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met:

- (1) *The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and*
- (2) *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

(ii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

(ii) Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")

A financial asset shall be measured at fair value through other comprehensive income if both of the following conditions are met:

- (1) *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets; and*
- (2) *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

(iii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

(iii) Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designate an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- (a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- (b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- (c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - (i) Jumlah penyisihan kerugian dan
 - (ii) Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.
- (d) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- (a) Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

- (a) Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.
- (b) Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.
- (c) Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:
 - (i) the amount of the loss allowance
 - (ii) the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 72.
- (d) Contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss.

The Group may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

- (a) It eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

(b) Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

(b) A group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Group's key management personnel.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognizes a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement.

Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognizes separately as asset or liabilities any rights and obligations created or retained in the transfer. If the Group neither transfers not retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

The Group removes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain, sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. Nilai waktu uang; dan

Impairment of Financial Assets

The Group recognizes expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at FVTOCI.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12 months expected credit loss is recognized.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income, the expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

- i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;*
- ii. Time value of money; and*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

- iii. Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Grup menggunakan metode *roll rate* untuk mengukur penurunan nilai piutang usaha.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

- iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with "investment grade" according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

The Group is using the roll rate method to measure the provision for impairment of account receivable.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Jika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka diperlukan untuk menerapkan reklasifikasi secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi. Keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai) atau bunga yang sebelumnya diakui tidak disajikan kembali.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTPL, maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perbedaan antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi. Sebaliknya, jika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTPL menjadi biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi menjadi nilai tercatat bruto baru.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain. Tingkat suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit yang diharapkan tidak disesuaikan sebagai hasil dari reklasifikasi.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reclassification

The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group's business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTPL, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Sebaliknya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTOCI menjadi biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan tersebut direklasifikasi ke nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Namun, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihilangkan dari ekuitas dan disesuaikan dengan nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur dengan cara yang sama seperti biaya perolehan diamortisasi.

Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost.

This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

When the Group reclassifies its financial asset out of the FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2); dan
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

z. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
- (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2); and*
- (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

z. Earning per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

For the purpose of calculation of diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

aa. Aset Takberwujud

Lisensi dan perangkat lunak yang diperoleh dikapitalisasi berdasarkan biaya-biaya yang terjadi untuk memperoleh dan mempersiapkannya hingga siap digunakan. Biaya-biaya ini diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa pemanfaatan.

aa. Intangible Assets

Licenses and software are capitalized on the basis of the cost incurred to acquire and to prepare the assets for intended use. These costs are amortized using the straight-line method over the useful life.

Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

The cost of maintaining an extension or renewal of legal title to land is recognized as an intangible asset and amortized over the life of the legal entitlement.

bb. Segmen Operasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmetasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam Grup.

bb. Operating Segment

Group presented operating segments based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Group.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

An operating segment is a component of the entity:

- yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

- *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- *whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and*
- *for which separate financial information is available.*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

cc. Provisi

Provisi diakui bila Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah diakui sebagai provisi merupakan taksiran terbaik yang diharuskan menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan memperhatikan unsur risiko dan ketidakpastian yang melekat pada kewajiban tersebut. Provisi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan kewajiban kini dengan jumlah tercatatnya sebesar nilai kini dari arus kas tersebut.

Bila beberapa atau keseluruhan dari manfaat ekonomis mengharuskan penyelesaian provisi diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian tagihan dapat diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

dd. Bagian Hibah dari Pinjaman Pemerintah

Manfaat atas pinjaman pemerintah yang memiliki tingkat bunga di bawah tingkat bunga pasar diperlakukan sebagai hibah pemerintah. Pinjaman tersebut diakui dan diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal neraca. Manfaat pinjaman dengan tingkat bunga di bawah tingkat bunga pasar diukur sebagai perbedaan antara nilai tercatat awal pinjaman dan jumlah yang diterima. Manfaat tersebut diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama periode entitas mengakui beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah tersebut.

cc. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, the receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

dd. The Grants Portion of Government Loans

Benefits on government loans that bear interest rates below market rates are treated as government grants. These loans are recognized and measured at fair value at balance sheet date. Benefits bearing interest rates below market interest rates are measured as the difference between the original carrying amount of the loan and the amount received. These benefits are recognized as deferred income and amortized on straight line method over the period in which the entity recognizes expenses for the related costs it is intended to compensate for under the grant.

4. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022

4. New and Revised Statements of Financial Accounting Standard (“PSAK”) and Interpretations of Financial Accounting Standard (“ISAK”) effective for the year beginning on or after January 1, 2022

Berikut amendemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020): Agrikultur;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

The following are amendment and improvements to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendments PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks;*
- *Amendments PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Onerous Contracts – Cost of Fulfilling the Contracts;*
- *Amendments PSAK 16: Property, Plant and Equipment regarding Proceeds before Intended Use;*
- *PSAK 69 (Annual Improvement 2020): Agriculture;*
- *PSAK 71 (Annual Improvement 2020): Financial Instruments; and*
- *PSAK 73 (Annual Improvement 2020): Leases.*

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current year or prior financial year.

5. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

5. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Estimates and Judgments

Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Judgment

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimate and assumption that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

**5. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting
(Lanjutan)**

**5. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Estimates and
Judgments (Continued)**

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai

Grup menilai penurunan nilai pada aset keuangan dengan biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan *roll rate* dan *discounted cash flow* untuk menilai kas dan setara kas, dana yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lain-lain. Nilai tercatat aset keuangan telah diungkapkan dalam Catatan 6, 7, 8 dan 9.

Pensiun dan Imbalan Pascakerja

Penentuan kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun, dan tingkat kematian.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for impairment loss

The Group assesses its financial assets measured at amortized cost for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgement as to whether there is reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions. The Group applies simplified approach using *roll rate* and *discounted cash flow* to measuring cash and equivalents, restricted fund, trade receivables and other receivable. The carrying amounts of financial assets are disclosed in Notes 6, 7, 8 and 9.

Pension and Post-Employment Benefits

The determination of the Group's cost for pension and employee benefits liabilities is depended on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

**5. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting
(Lanjutan)**

**5. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Estimates and
Judgments (Continued)**

Pensiun dan Imbalan Pascakerja (Lanjutan)

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diperlakukan sesuai dengan kebijakan yang dijelaskan pada Catatan 3.t. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto (Catatan 27).

**Pension and Post-Employment Benefits
(Continued)**

Actual results that differ from the Group's assumptions are treated in accordance with the policies as mentioned in Note 3.t. While the Group believes that the assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's assumption may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense (Note 27).

**Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Hak
Pengoperasian Aset Prasarana**

Biaya perolehan aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya, sedangkan hak pengoperasian aset prasarana perkeretaapian diamortisasi berdasarkan metode garis lurus. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 40 tahun, sedangkan masa manfaat hak pengoperasian aset prasarana perkeretaapian sesuai dengan perjanjian pengelolaan aset prasarana. Umur masa manfaat ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan dan amortisasi masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat atas aset tetap dan hak pengelolaan aset pada tanggal-tanggal pelaporan masing-masing diungkapkan dalam Catatan 16 dan 18.

**Depreciation of Fixed Assets and
Amortization of Infrastructure Assets
Operating Rights**

The costs of fixed asset, except from land, are depreciated on the straight-line method over their estimated useful lives, while the railway infrastructure assets operating rights are amortized based on the straight-line method. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 5 to 40 years, while the useful life of the railway infrastructure assets accordance to the agreement of operating rights of assets. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation and amortization changes could be revised. The net carrying amounts of the Group's fixed assets and railways infrastructure assets operating rights at reporting dates are disclosed in Notes 16 and 18, respectively.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati, dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Impairment of Non-Financial Assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or a cash gain unit exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset.

**5. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting
(Lanjutan)**

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Proyeksi arus kas tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum ada perikatannya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari unit penghasil kas yang diuji.

Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

Pajak Penghasilan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya pendapatan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas pendapatan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atau kelebihan bayar atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui aset atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi bahwa nilai tambahan pajak penghasilan badan yang akan jatuh tempo lebih rendah dari kelebihan bayar pajak.

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan diakui atas seluruh beda temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

**Penentuan Nilai Wajar Liabilitas Program
Pemulihan Ekonomi Nasional ("PEN")**

Nilai wajar liabilitas PEN dihitung menggunakan metode *discounted cash flow* dengan suku bunga 5,07% per tahun selama 10 tahun masa pinjaman. *Projected cash flow* yang digunakan telah memperhitungkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi indikator pembayaran berdasarkan perjanjian pinjaman.

**5. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Estimates and
Judgments (Continued)**

The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The future cash flow projection does not include restructuring activities that the Group is not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the cash gain unit being tested.

The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes.

Income Tax

Uncertainties over the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, that could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Significant judgment is undertaken to determine the provision or overpayment of corporate income tax. There are certain transactions and computations which the ultimate tax determination is uncertain in the ordinary course of business. The Group recognized the assets on corporate income tax based on an estimate that any additional corporate income tax that will be due still lower than the amount of tax overpayment.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all of deductible temporary differences which is probable that the taxable profit will be available against thus the losses can be utilized. The significant estimation made by management are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based on the time of use and the level of future taxable profit and future tax planning strategies.

**Determination of the Fair Value of "Program
Pemulihan Ekonomi Nasional ("PEN")
Liability**

The fair value of PEN liabilities is calculated using the discounted cash flow method with an interest rate of 5.07% per annum for the 10 years of the loan period. The projected cash flow used has taken into account the Company's ability to meet the payment indicators based on the loan agreement.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

6. Kas dan Setara Kas

6. Cash and Cash Equivalents

	2022	2021	
Kas			Cash on Hand
Kas Kantor	10.139.476	7.855.065	Cash on Hand-Office
Kas Stasiun	2.863.194	4.275.466	Cash on Hand-Stations
Jumlah Kas	13.002.670	12.130.531	Total Cash on Hand
Bank			Banks
Pihak Berelasi (Catatan 41)	4.894.631.652	2.564.298.785	Related Parties (Note 41)
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Central Asia Tbk	203.210.705	44.053.016	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	104.957.952	4.728.146	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Permata Tbk	32.884.382	64.357.501	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	32.194.776	15.403.653	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.444.565	3.718.977	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	3.228.504	309.955	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank DKI	1.723.322	141.535	PT Bank DKI
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	548.401	692.302	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	383.264	378.148	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Standard Chartered Bank	--	64.526	Standard Chartered Bank
Sub Jumlah	389.575.871	133.847.759	Sub Total
Jumlah Bank	5.284.207.523	2.698.146.544	Total Bank
Deposito Berjangka			Time Deposit
Pihak Berelasi (Catatan 41)	398.510.000	1.097.991.668	Related Parties (Note 41)
Jumlah	5.695.720.193	3.808.268.743	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	--	(64.811)	Allowance for Impairment Losses
Neto	5.695.720.193	3.808.203.932	Net

Berdasarkan mata uang asing:

By currencies:

	2022	2021	
Kas			Cash
Rupiah	13.002.670	12.130.531	Rupiah
Bank			Banks
Rupiah	4.007.355.256	1.567.044.043	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	1.258.865.187	1.129.473.059	United States Dollar
Euro	17.243.459	1.155.031	Euro
Yen Jepang	743.621	474.411	Japanese Yen
Deposito Berjangka			Time Deposit
Rupiah	241.200.000	1.097.991.668	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	157.310.000	--	United States Dollar
Jumlah	5.695.720.193	3.808.268.743	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	--	(64.811)	Allowance for Impairment Losses
Neto	5.695.720.193	3.808.203.932	Net

6. Kas dan Setara Kas (Lanjutan)

6. Cash and Cash Equivalents (Continued)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

The movement of the allowance for impairment losses is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo Awal	(64.811)	(36.176)	Beginning Balance
Pemulihan (Penambahan)	64.811	(28.635)	Recovery (Addition)
Saldo Akhir	—	(64.811)	Ending Balance

Kisaran suku bunga per tahun dan jangka waktu deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Interest rates per annum and maturity period of time deposits are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Rupiah	2,50% - 5,00 %	2,20% - 7,25 %	Rupiah
Jangka Waktu	1-3 Bulan/ Months (ARO)	1-3 Bulan/ Months (ARO)	Maturity Period

7. Dana Dibatasi Penggunaannya

7. Restricted Funds

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pihak Berelasi (Catatan 41)	5.590.894.318	2.744.384.445	Related Parties (Note 41)
Pihak Ketiga			Third Party
PT Bank Central Asia Tbk	19.491.658	5.249.392	PT Bank Central Asia Tbk
Jumlah	5.610.385.976	2.749.633.837	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	—	(1.169.919)	Allowance for Impairment Losses
Neto	5.610.385.976	2.748.463.918	Net

Berdasarkan mata uang:

By currencies:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Rupiah	5.610.385.819	2.749.633.694	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	157	143	United States Dollar
Jumlah	5.610.385.976	2.749.633.837	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	—	(1.169.919)	Allowance for Impairment Losses
Neto	5.610.385.976	2.748.463.918	Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

The movement of the allowance for impairment losses is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo Awal	(1.169.919)	(25.207)	Beginning Balance
Pemulihan (Penambahan)	1.169.919	(1.144.712)	Recovery (Addition)
Saldo Akhir	—	(1.169.919)	Ending Balance

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

7. Dana Dibatasi Penggunaannya (Lanjutan)

7. Restricted Funds (Continued)

Rincian peruntukan dana dibatasi penggunaannya adalah sebagai berikut:

Details allocation of restricted funds are as follows:

No	Peruntukan Dana/ Allocation of Funds	2022	2021
1.	Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung/ Jakarta Bandung High Speed Railway Project	3.200.000.000	--
2.	Proyek LRT Jabodebek/ LRT Jabodebek Project	2.153.637.590	2.600.128.219
3.	Dana Floating Kartu Multi Trip (KMT)/ Floating Money Trip Card (KMT)	148.546.590	98.289.701
4.	Proyek KA Bandara Soekarno-Hatta/ Soekarno-Hatta Airport Train Railway Project	56.372.595	--
5.	Pembukaan L/C Impor Suku Cadang dan Peralatan Pemeliharaan Sistem Brake EMU 6000, EMU 8500/800, Pembelian Suku Cadang dan Jaminan Pinjaman Bank/ Opening the L/C Import Spare Parts and Maintenance Equipment Brake Systes EMU 6000, EMU 8500/800 and the Purchase of Spare Parts	50.937.864	50.937.864
6.	Pembelian Sarana KA Stasiun Soekarno-Hatta/ Purchasing of Rolling Stock for Soekarno-Hatta Station	458.871	5.237
7.	Pengadaan Sarana atas Penyelenggaraan Angkutan Jalur Trans Sumatera/8500/800 Procurement of Facilities for the Implementation of Trans Sumatera Transportation/8500/800	382.009	38.596
8.	Pemeliharaan Sarana KA Bandara Kualanamu, Medan/ Maintenance Agreement of Airport Rolling Stock in Kualanamu, Medan	38.674	222.465
9.	Proyek Commuter Jabodetabek/ Commuter Jabodebek Project	11.783	11.755
Jumlah/Total		5.610.385.976	2.749.633.837
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment Losses		--	(1.169.919)
Neto/Net		5.610.385.976	2.748.463.918

8. Piutang Usaha

8. Trade Receivables

	2022	2021	
Pihak Berelasi (Catatan 41)	963.280.644	711.351.610	Related Parties (Note 41)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(28.650.899)	(33.256.915)	Allowance for Impairment Losses
Pihak Berelasi - Neto	934.629.745	678.094.695	Related Parties - Net
Pihak Ketiga	709.101.183	669.070.351	Third Parties
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(237.392.861)	(272.066.573)	Allowance for Impairment Losses
Pihak Ketiga - Neto	471.708.322	397.003.778	Third Parties - Net
Neto	1.406.338.067	1.075.098.473	Net

Berdasarkan mata uang:

By currencies:

	2022	2021	
Rupiah	1.514.495.695	1.262.017.258	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	157.886.132	118.404.703	United States Dollar
Jumlah	1.672.381.827	1.380.421.961	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(266.043.760)	(305.323.488)	Allowance for Impairment Losses
Neto	1.406.338.067	1.075.098.473	Net

8. Piutang Usaha (Lanjutan)

8. Trade Receivables (Continued)

Berdasarkan umur:

By age:

	2022	2021	
0 - 30 Hari	1.190.788.301	834.132.042	0 - 30 Days
31 - 90 Hari	113.776.059	203.487.603	31 - 90 Days
91 - 360 Hari	103.240.557	99.884.863	91 - 360 Days
> 360 Hari	264.576.910	242.917.453	> 360 Days
Jumlah	1.672.381.827	1.380.421.961	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(266.043.760)	(305.323.488)	Allowance for Impairment Losses
Neto	1.406.338.067	1.075.098.473	Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

The movement of the allowance for impairment losses is as follows:

	2022	2021	
Saldo Awal	(305.323.488)	(238.894.688)	Beginning Balance
Pemulihan (Penambahan)	39.279.728	(66.428.800)	Recovery (Addition)
Saldo Akhir	(266.043.760)	(305.323.488)	Ending Balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover the possible losses on uncollectible accounts.

Tidak terdapat piutang usaha yang dijadikan jaminan atas pinjaman.

There are no trade receivables that pledged as collateral for the loan.

9. Piutang Lain-lain

9. Other Receivables

	2022	2021	
Piutang Lain-lain - Lancar:			Others Receivable - Current:
Pihak Ketiga	155.311.983	139.979.466	Third Parties
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(65.308.920)	(65.308.920)	Allowance for Impairment Losses
Pihak Ketiga - Neto	90.003.063	74.670.546	Third Parties - Net
Piutang Lain-lain - Tidak Lancar:			Other Receivables - Non Current:
Pihak Berelasi (Catatan 41)	109.925.523	1.040.701.195	Related Party (Note 41)
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(109.925.523)	(1.040.701.195)	Allowance for Impairment Losses
Pihak Berelasi - Neto	--	--	Related Parties - Net
Jumlah Piutang Lain-lain	90.003.063	74.670.546	Total Other Receivables

Piutang lain-lain tidak lancar per 31 Desember 2021 sebagian besar merupakan piutang bunga PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang No. KL.705/XII/8/KA-2021 pada bertanggal 24 Desember 2021 antara Perusahaan dan PSBI (Para Pihak), Para Pihak menyetujui hal-hal berikut:

Other non-current receivables as of December 31, 2021 mostly represent interest receivables from PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Based on the Debt Recognition Agreement No. KL.705/XII/8/KA-2021 on December 24, 2021 between the Company and PSBI (the Parties), the Parties agreed on the following matters:

9. Piutang Lain-lain (Lanjutan)

1. Jumlah kewajiban bunga yang masih harus dibayar oleh PSBI kepada Perusahaan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sejumlah Rp930.775.672;
2. Kewajiban pembayaran bunga ini tidak dikenakan bunga kembali;
3. PSBI harus membayar seluruh kewajiban pembayaran bunga secara tunai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2022.

Per 31 Desember 2022, Perusahaan telah menerima pelunasan pinjaman dari PSBI sebesar Rp930.775.672 (Catatan 41).

Berdasarkan umur:

	2022	2021
0 - 30 Hari	89.350.419	75.274.569
31 - 90 Hari	247.658	188.828
91 - 360 Hari	1.730.388	1.900.499
> 360 Hari	1.73.909.041	1.103.316.765
Jumlah	265.237.506	1.180.680.661
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(175.234.443)	(1.106.010.115)
Neto	90.003.063	74.670.546

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

	2022	2021
Saldo Awal	(1.106.010.115)	(175.236.773)
Reklasifikasi dari Akumulasi		
Perubahan Nilai Wajar	--	(930.775.672)
Pemulihan - Bersih	930.775.672	2.330
Saldo Akhir	(175.234.443)	(1.106.010.115)

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kerugian penurunan nilai atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori piutang yang disebutkan di atas. Grup tidak menguasai aset-aset sebagai jaminan piutang.

9. Other Receivables (Continued)

1. Total amount of interest that have to be paid by PSBI to the Company as of December 31, 2021 is Rp930,775,672;
2. The interest payment obligation is not subject to interest charged;
3. PSBI must pay all interest payments in cash no later than December 31, 2022.

As of December 31, 2022, the Company has received repayment of a loan from PSBI in the amount of Rp930,775,672 (Note 41).

By age:

0 - 30 Days
31 - 90 Days
91 - 360 Days
> 360 Days
Total
Less:
Allowance for Impairment Losses
Net

The movement of the allowance for impairment losses is as follows:

Beginning Balance
Reclassified from Accumulated
Changes of Fair value
Net Recovery
Ending Balance

Management believes that the allowance for impairment losses on receivables is adequate to cover possible losses on the uncollectible other receivables.

The maximum exposure to credit risk at the reporting date is the carrying amount of each class of receivables mentioned above. The Group does not recognize any asset as collateral for receivables.

10. Persediaan

10. Inventories

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Suku Cadang Sarana	1.065.426.895	902.493.791	Rolling Stock Spare Parts
Suku Cadang Prasarana	223.925.849	156.223.105	Infrastructure Spare Parts
Lain-lain	23.090.194	14.137.585	Others
Jumlah	1.312.442.938	1.072.854.481	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(167.128.997)	(179.073.842)	Allowance for Impairment Losses
Neto	1.145.313.941	893.780.639	Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

The movement of the allowance for impairment losses is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo Awal	(179.073.842)	(149.862.625)	Beginning Balance
Pemulihan (Penambahan)	11.944.845	(29.211.217)	Recovery (Addition)
Saldo Akhir	(167.128.997)	(179.073.842)	Ending Balance

Suku cadang sarana merupakan suku cadang yang digunakan untuk perawatan rutin/berkala armada lokomotif, kereta (penumpang, pembangkit, diesel, dan listrik) dan gerbong yang dilakukan di Balai Yasa dan Dipo Perusahaan yang tersebar di Daerah Operasi dan Divisi Regional.

Rolling stock spare parts represent spare parts used for routine/scheduled maintenance of locomotives, trains (passenger, generator, diesel, and electric) and wagons which are undertaken in the Company's Balai Yasa and Depots located in various Operational Regions and Regional Divisions.

Suku cadang prasarana digunakan untuk perawatan atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada prasarana pokok yang meliputi jalan rel kereta api, jembatan, perlintasan, persinyalan, instalasi listrik dan instalasi komunikasi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tanggal 25 April 2007 tentang Perkeretaapian, penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib merawat prasarana perkeretaapian agar tetap layak operasi.

Infrastructure spare parts are used to maintain or repair any damages occurred in the main infrastructures which comprise of railway-road, bridge, cross-bar-crossing, signal, electric installation and communication installation. According to Law No. 13 Year 1992 regarding Railways as replaced by Law No.23 Year 2007 dated April 25, 2007 regarding Railways, the operator of the railway infrastructure has obligation to maintain the operating feasible of railway infrastructures.

Jumlah persediaan yang telah digunakan dan diakui sebagai beban perawatan sarana dan prasarana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.554.174.318 dan Rp1.367.380.537.

Total of inventories which have been used and recognized as facility and infrastructure maintenance expenses for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp1,554,174,318 and Rp1,367,380,537, respectively.

Grup tidak mengasuransikan persediaan terhadap risiko kecelakaan, kebakaran dan jenis risiko kerugian lainnya.

The Group does not insure inventories against any risk of accidents, fire and other types of risk of losses.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai persediaan adalah cukup untuk menutupi kerugian penurunan nilai atas nilai persediaan usang.

Management believes that the allowance for impairment losses on inventories are adequate to cover possible losses on the obsolete inventories.

11. Pendapatan Masih akan Diterima

11. Accrued Income

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pihak Berelasi (Catatan 41)	884.228.974	250.856.413	Related Parties (Note 41)
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(164.662.291)	(164.662.291)	Allowance for Impairment Losses
Pihak Berelasi - Neto	<u>719.566.683</u>	<u>86.194.122</u>	Related Parties - Net
Pihak ketiga			Third parties
Jasa Angkutan Barang	137.680.851	122.555.436	Freight Transportation Services
Jasa Parkir	8.825.591	8.825.610	Parking Services
Konstruksi	3.595.759	2.907.488	Construction
Lainnya	71.424.186	19.775.184	Others
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.476.099)	(1.203.230)	Allowance for Impairment Losses
Pihak Ketiga - Neto	<u>220.050.288</u>	<u>152.860.488</u>	Third Parties - Net
Jumlah	<u>939.616.971</u>	<u>239.054.610</u>	Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

The movement of the allowance for impairment losses is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo Awal	(165.865.521)	(164.956.303)	Beginning Balance
Penambahan	(272.869)	(909.218)	Addition
Saldo Akhir	<u>(166.138.390)</u>	<u>(165.865.521)</u>	Ending Balance

Pendapatan masih akan diterima jasa angkutan barang merupakan tagihan atas angkutan barang yang sudah diantar namun belum ditagihkan yang meliputi angkutan batu bara, angkutan semen, angkutan peti kemas, angkutan parsel/hantaran, angkutan bahan bakar minyak, angkutan perkebunan, angkutan logam/besi baja, dan angkutan lainnya.

Accrued income of freight transportation service represents revenue generated from freight transportations which are already delivered but not billed yet, comprising of coal transportation, cement transportation, container transportation, parcel/delivery transportation, fuel transportation, plantation transportation, metal/steel transportation, and other transportations.

Pendapatan masih akan diterima lainnya merupakan pendapatan parkir, katering, jasa *outsourcing*, biaya pekerjaan, iklan, promosi dan konstruksi.

Other accrued income represents revenues generated from parking, catering, outsourcing service, service fee, promotion, advertisement and construction.

12. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

12. Advances and Prepaid Expenses

a. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka Jangka Pendek

a. Short-Term Advances and Prepaid Expenses

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Biaya Dibayar di Muka	62.652.603	204.129.707	Prepaid Expenses
Uang Muka Pihak Ketiga	53.798.799	74.767.155	Third Parties Advances
Uang Muka Dinas	3.851.772	58.279	Operating Advances
Jumlah	<u>120.303.174</u>	<u>278.955.141</u>	Total

**12. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka
(Lanjutan)**

**12. Advances and Prepaid Expenses
(Continued)**

Biaya dibayar di muka merupakan pembayaran di muka kepada sub kontraktor dan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Grup untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sedang dikerjakan, pembayaran jasa asuransi dan sewa.

Prepaid expenses represent advance payment to sub contractors and all costs incurred to complete Group's projects under construction, insurance premium and rent.

Uang muka pihak ketiga merupakan pembayaran di muka kepada pemasok dan pembelian barang.

Third parties advances represent the advance payments to suppliers and inventory purchases.

b. Uang Muka Jangka Panjang

b. Long-Term Advances

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Uang Muka Aset	20.640.157	163.579.815	Assets Advances
Uang Muka Setoran Modal	--	7.230.581.343	Paid in Capital Advances
Dikurangi:			Less:
Penurunan Nilai Wajar	--	(621.466.260)	Decrease in Fair Value
Jumlah	<u>20.640.157</u>	<u>6.772.694.898</u>	Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai wajar uang muka adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for decrease in fair value are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo Awal	621.466.260	--	Beginning Balance
Reklasifikasi dari			Reclassified from
Cadangan Penurunan Nilai	--	621.466.260	Allowance for impairment
Reklasifikasi ke Investasi			Reclassified to Investment
pada Entitas Ventura			in Joint Venture
Bersama (Catatan 15.a)	(621.466.260)	--	(Note 15.a)
Saldo Akhir	<u>--</u>	<u>621.466.260</u>	Ending Balance

Pada 31 Desember 2022, sebagian besar uang muka aset merupakan uang muka atas pembelian Kereta Diesel Bandara International Adi Soemarmo (BIAS).

As of December 31, 2022 most of the advances for assets represent advances for the purchase Diesel trainset Bandara International Adi Soemarmo (BIAS).

Uang muka setoran modal pada 31 Desember 2021 merupakan tambahan setoran modal Perusahaan pada PSBI yang terdiri dari:

Paid in capital advances as of December 31, 2021 represents the Company's additional capital in PSBI which consists of:

1. Restrukturisasi pokok pinjaman sebesar nilai wajar Rp2.155.464.293; dan
2. Setoran tunai dari PMN sebesar Rp4.300.000.000 dan tambahan modal untuk restrukturisasi sebesar Rp153.650.790.

1. Restructuring of principal loan amounting to its fair value of Rp2,155,464,293; and
2. Cash deposit from PMN of Rp4,300,000,000 and additional capital for restructuring of Rp153,650,790.

**12. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka
(Lanjutan)**

**12. Advances and Prepaid Expenses
(Continued)**

Restrukturisasi pokok pinjaman sebesar nilai wajar Rp2.155.464.293 berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Pinjaman No. KL.705/XII/7/KA-2021 dan Perjanjian Uang Muka Setoran Modal No. KL.705/XII/9/KA-2021 masing-masing bertanggal 24 Desember 2021 antara Perusahaan dan PSBI (Para Pihak), menyatakan bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan atas perlakuan *Operating Expenditure* ("opex") sebesar Rp3.450.000 dan *Capital Expenditure* ("capex") sebesar Rp2.773.480.553 ("pokok pinjaman") menjadi pembayaran uang muka setoran modal kepada PSBI.

Restructuring of the loan principal amounted to a fair value Rp2,155,464,293 based on Loan Restructuring Agreement No. KL.705/XII/7/KA-2021 and Capital Deposit Advance Agreement No. KL.705/XII/9/KA-2021 dated December 24, 2021, respectively, between the Company and PSBI ("the Parties"), stated that the Parties agreed to changed the treatment of Operating Expenditure ("opex") of Rp3,450,000 and Capital Expenditure ("opex") of Rp2,773,480,553 ("loan principal") into advance payment for capital deposit to PSBI.

Setoran tunai dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp4.300.000.000 dan tambahan modal untuk restrukturisasi sebesar Rp153.650.790 berdasarkan Perjanjian Uang Muka Setoran Modal No. KL.705/XII/15/KA-2021 tanggal 31 Desember 2021. Tambahan modal ini belum mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga belum efektif menjadi modal disetor Perusahaan di PSBI pada 31 Desember 2021.

Cash deposit from of Government Capital (PMN) amounting to Rp4,300,000,000 and additional capital for restructuring amounting to Rp153,650,790 based on Paid-in Capital Advance Agreement No. KL.705/XII/15/KA-2021 on December 31, 2021 between the Company and PSBI (the Parties). This additional capital was not approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia so that it is not yet effective as the Company's paid-in capital in PSBI as of December 31, 2021.

Berdasarkan Surat dari Menteri BUMN No. S-1051/MBU/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 terkait Persetujuan Tambahan Penyertaan Modal Perusahaan pada PT PSBI, menyatakan bahwa menyetujui penambahan modal berupa konversi pokok pinjaman sebesar Rp2.776.930.553 dan tambahan modal berupa uang sebesar Rp4.516.219.522, sebesar Rp62.568.732 belum dilakukan penyetoran oleh Perusahaan. Penambahan uang muka setoran modal tersebut telah tertuang dalam akta notaris Mala Mukti, S.H., LLM No. 113 tanggal 31 Desember 2021 terkait Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PSBI.

Based on the letter from the Minister of SOEs No. S-1051/MBU/12/2021 dated December 30, 2021 regarding Approval for Additional Company Equity Participation in PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, stated that it approved the additional capital in the form of loan principle conversion amounting to Rp2,776,930,553 and additional capital in the form of cash amounting to Rp4,453,650,790, amounting to Rp62,568,732 has not been paid by the Company. The additional paid-in capital advance has been stated in the notarial deed of Mala Mukti, S.H., LLM No. 113 dated December 31, 2021 regarding the Shareholders' Decision Statement PSBI.

Per 31 Desember 2022, Uang Muka Setoran Modal ini telah disahkan menjadi Setoran Modal (Catatan 15.a).

As of December 31, 2022, Paid in capital advances has been legalized to become Capital Deposit (Note 15.a).

13. Perpajakan

13. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Perusahaan			The Company
Pajak penghasilan			Income tax
Pasal 28a:			Article 28a
2022	98.709.717	--	2022
2021 (Catatan 53)	67.009.624	65.563.063	2021 (Note 53)
2020	--	236.879.766	2020
Pajak pertambahan nilai	103.540.737	114.791.811	Value added tax
Sub Jumlah	<u>269.260.078</u>	<u>417.234.640</u>	Sub Total
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak penghasilan			Income tax
Pasal 28a:			Article 28a:
2021	9.873.157	9.762.961	2021 (Note 53)
2020	--	9.116.997	2020
Pajak pertambahan nilai	24.762.782	136.586.941	Value added tax
Sub Jumlah	<u>34.635.939</u>	<u>155.466.899</u>	Sub Total
Jumlah	<u>303.896.017</u>	<u>572.701.539</u>	Total

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Perusahaan			The Company
Pajak penghasilan			Income tax
Pasal 21	64.991.629	31.505.527	Article 21
Pasal 22	5.868.954	2.195.091	Article 22
Pasal 23	21.845.785	7.738.113	Article 23
Pasal 4 (2)	12.367.793	46.228.694	Article 4 (2)
Pajak pertambahan nilai	141.624.718	135.943.997	Value added tax
Sub Jumlah	<u>246.698.879</u>	<u>223.611.422</u>	Sub Total
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak penghasilan			Income tax
Pasal 21	21.409.723	13.328.064	Article 21
Pasal 23	1.552.318	1.304.706	Article 23
Pasal 25	701.651	179.334	Article 25
Pasal 29	32.771.764	94.824.441	Article 29
Pasal 4 (2)	3.264.006	2.688.724	Article 4 (2)
Pajak pertambahan nilai	2.934.389	3.611.851	Value added tax
Sub Jumlah	<u>62.633.851</u>	<u>115.937.120</u>	Sub Total
Jumlah	<u>309.332.730</u>	<u>339.548.542</u>	Total

c. Perhitungan Taksiran Pajak Penghasilan Badan

c. Self-Assessment of Corporate Income Tax

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b, tarif pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2022 adalah sebesar 22% (dua puluh dua persen).

On October 29, 2021, The Government of the Republik of Indonesia established law No. 7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations in lieu of law No. 2 of 2020. In Accordance with the article 17 paragraph (1) point b, the corporate income tax rate for tax year 2022 establishment is 22% (twenty two percent).

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2.210.588.300	(546.980.526)	<i>Profit (Loss) Before Income Taxes According to Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Laba Entitas Anak- Bersih	361.975.997	444.621.878	<i>Subsidiaries Profit - Net</i>
Efek Eliminasi	(92.430.094)	(79.219.532)	<i>Elimination Effect</i>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.941.042.397	(912.382.872)	<i>Profit (Loss) Before Tax</i>
Beda Waktu:			<i>Timing Differences:</i>
Penyusutan	(272.496.267)	(252.109.080)	<i>Depreciation</i>
Amortisasi	(43.069.098)	(45.759.539)	<i>Amortization</i>
Imbalan Pascakerja	391.642.151	665.081.742	<i>Post-Employment Benefit</i>
Beban Akrual dan Provisi	--	(168.872.873)	<i>Accrued Expense and Provision</i>
Penurunan Nilai Aset Tetap	72.404.085	(58.451.223)	<i>Impairment of Fixed Assets</i>
Penurunan Nilai Persediaan	(11.944.845)	29.211.217	<i>Impairment of Inventories</i>
Penyisihan Penurunan Nilai Aset Keuangan	(59.983.706)	3.425.169	<i>Allowance for Impairment Losses Financial Assets</i>
Sub Jumlah	76.552.320	172.525.413	<i>Sub Total</i>
Beda Tetap:			<i>Permanent Differences:</i>
Beban Tidak Diperkenankan	431.356.098	318.777.130	<i>Non - Deductible Expenses</i>
Pendapatan Bunga	(97.885.674)	(80.488.846)	<i>Interest Income</i>
Pendapatan Sewa	(763.469.835)	(554.792.092)	<i>Rent Revenue</i>
Pendapatan Dividen dari Entitas Anak	(86.558.605)	(45.547.731)	<i>Dividend Income from Subsidiaries</i>
Sub Jumlah	(516.558.016)	(362.051.539)	<i>Sub Total</i>
Taksiran Penghasilan (Rugi) Kena Pajak	1.501.036.701	(1.101.908.998)	<i>Estimated Taxable Income (Loss)</i>
Rugi Fiskal Tahun Sebelumnya:			<i>Fiscal Losses Prior Year:</i>
2020 (Catatan 13.g)	(1.470.926.629)	(1.609.859.715)	<i>2020 (Note 13.g)</i>
2021 (Catatan 53)	(990.200.403)	--	<i>2021 (Note 53)</i>
Akumulasi Rugi Fiskal	(960.090.331)	(2.711.768.713)	<i>Accumulation Fiscal Losses</i>
Taksiran Pajak Kini Perusahaan	--	--	<i>Estimated Current Tax of the Company</i>
Kredit Pajak Penghasilan:			<i>Income Tax Deduction:</i>
Pasal 22	(2.680.982)	(4.509.691)	<i>Article 22</i>
Pasal 23	(96.028.735)	(61.053.372)	<i>Article 23</i>
Jumlah Kredit Pajak	(98.709.717)	(65.563.063)	<i>Total Tax Credit</i>
Lebih Bayar Pajak - Perusahaan	(98.709.717)	(65.563.063)	<i>Tax Over Payment - the Company</i>

Taksiran Penghasilan (Rugi) Kena Pajak hasil rekonsiliasi diatas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

Estimated Taxable Income (Loss) above is the basis for filling out the Annual Tax Return of Corporate Income Tax.

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Reconciliation between tax expense and results of multiplication of accounting profit before tax with prevailing tax rate, are as follows:

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2.210.588.300	(546.980.526)	<i>Profit (Loss) Before Income Taxes According to Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Laba Entitas Anak- Bersih Efek Eliminasi	361.975.997	444.621.878	<i>Subsidiaries Profit - Net Elimination Effect</i>
	(92.430.094)	(79.219.532)	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.941.042.397	(912.382.872)	Profit (Loss) Before Tax
Pajak yang Dihitung Sesuai Tarif yang Berlaku	427.029.327	(200.724.232)	<i>Tax Calculated at Applicable Tax Rate</i>
Koreksi Beda Tetap	(113.642.764)	(79.651.338)	<i>Permanent Difference Corrections</i>
Koreksi Rugi Fiskal	55.141.170	--	<i>Tax Loss Correction</i>
Penyesuaian Beban Pajak Kini	(1.446.561)	5.291.368	<i>Current Tax Expense Adjustment</i>
Penyesuaian Beban Pajak Tangguhan	(28.881.902)	--	<i>Deferred Tax Expense Adjustment</i>
Beban (Manfaat) Pajak Perusahaan	338.199.270	(275.084.202)	The Company's Tax Expense (Benefit)
Beban Pajak Kini Entitas Anak	186.399.810	153.299.319	<i>Subsidiary's Current Tax Expense</i>
Beban (Manfaat) Pajak Konsolidasian	524.599.080	(121.784.883)	Consolidated Tax Expense (Benefit)

d. Rincian Beban (Manfaat) Pajak

d. Details of Tax (Benefit) Expense

Perusahaan:			The Company:
Penyesuaian Pajak Periode Lalu	(1.446.561)	5.291.368	<i>Prior Period Tax Adjustment</i>
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	339.645.831	(280.375.570)	<i>Deferred Tax (Benefit) Expense</i>
Jumlah	338.199.270	(275.084.202)	Total
Entitas Anak:			Subsidiaries:
Beban Pajak Kini	129.815.754	143.642.469	<i>Current Tax Expense</i>
Penyesuaian Pajak Periode Lalu	1.212.318	219.194	<i>Prior Period Tax Adjustment</i>
Beban Pajak Tangguhan	55.371.738	9.437.656	<i>Deferred Tax Expense</i>
Jumlah	186.399.810	153.299.319	Total
Konsolidasian:			Consolidated:
Beban Pajak Kini	129.815.754	143.642.469	<i>Current Tax Expense</i>
Penyesuaian Pajak Periode Lalu	(234.243)	5.510.562	<i>Prior Period Tax Adjustment</i>
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	395.017.569	(270.937.914)	<i>Deferred Tax Expense (Benefit)</i>
Jumlah	524.599.080	(121.784.883)	Total

e. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

e. Deferred Tax

Deferred tax is estimated based on the effect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for the financial reporting with taxable bases of assets and liabilities. Details of deferred tax assets and liabilities are as follows:

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

	2021*)	Dibebankan (Dikreditkan) ke Laba Rugi/ Charged (Credited) to Profit or Loss	Dibebankan (Dikreditkan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charge (Credited) to Other Comprehensive Income	2022	
Perusahaan:					The Company:
Aset Tetap	(542.799.274)	(59.949.179)	--	(602.748.453)	Fixed Assets
Aset Takberwujud	(43.164.348)	(9.475.202)	--	(52.639.550)	Intangible Assets
Rugi Fiskal	596.589.117	(385.369.244)	--	211.219.873	Tax Loss
Liabilitas Imbalan Kerja	1.267.824.669	75.420.311	(168.267.041)	1.174.977.939	Employee Benefits Liabilities
Penurunan Nilai Aset Tetap dan Persediaan	120.039.089	13.301.033	--	133.340.122	Impairment of Fixed Assets and Inventories
Cadangan Kerugian					Allowance for Impairment
Penurunan Nilai Aset Keuangan	429.051.741	26.426.450	--	455.478.191	Losses of Financial Assets
Sub Jumlah	<u>1.827.540.994</u>	<u>(339.645.831)</u>	<u>(168.267.041)</u>	<u>1.319.628.122</u>	Sub Total
Entitas anak:					Subsidiaries:
Aset Tetap	20.637.645	4.841.900	--	25.479.545	Fixed Assets
Rugi Fiskal	58.886.632	(58.886.632)	--	--	Tax Loss
Liabilitas Imbalan Kerja	6.603.129	(7.052.560)	2.760.266	2.310.835	Employee Benefits Liabilities
Penurunan Nilai Aset Tetap	2.901.225	(247.892)	--	2.653.333	Impairment of Fixed Assets
Cadangan Kerugian					Allowance for Impairment
Penurunan Nilai Piutang	56.839.585	1.437.384	--	58.276.969	Losses of Receivables
Beban Pemeliharaan	19.897.351	4.532.413	--	24.429.764	Maintenance Expenses
Pencadangan Bonus	(1.237)	1.237	--	--	Bonus Provision
Cadangan Kerugian					Allowance for Impairment
Nilai Kas dan					Losses of Cash and
Setara Kas	(2.412)	2.412	--	--	Cash Equivalents
Sub Jumlah	<u>165.761.918</u>	<u>(55.371.738)</u>	<u>2.760.266</u>	<u>113.150.446</u>	Sub Total
Jumlah	<u>1.993.302.912</u>	<u>(395.017.569)</u>	<u>(165.506.775)</u>	<u>1.432.778.568</u>	Total
	2020*)	Dibebankan (Dikreditkan) ke Laba Rugi/ Charged (Credited) to Profit or Loss	Dibebankan (Dikreditkan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charge (Credited) to Comprehensive Income	2021*)	
Perusahaan:					The Company:
Aset Tetap	(487.335.276)	(55.463.998)	--	(542.799.274)	Fixed Assets
Rugi Fiskal	354.169.137	242.419.980	--	596.589.117	Tax Loss
Liabilitas Imbalan Kerja	1.087.476.549	146.317.983	34.030.137	1.267.824.669	Employee Benefits Liabilities
Beban Akrua	37.152.032	(37.152.032)	--	--	Accrued Expense
Aset Takberwujud	(33.097.249)	(10.067.099)	--	(43.164.348)	Intangible Assets
Penurunan Nilai Aset Tetap dan Persediaan	126.471.890	(6.432.801)	--	120.039.089	Impairment of Fixed Assets and Inventories
Cadangan Kerugian					Allowance for Impairment
Penurunan Nilai Piutang	428.290.026	750.619	--	429.040.645	Losses of Receivables
Cadangan Kerugian					Allowance for Impairment
Nilai Kas dan					Losses of Cash and
Setara Kas	8.178	2.918	--	11.096	Cash Equivalents
Sub Jumlah	<u>1.513.135.287</u>	<u>280.375.570</u>	<u>34.030.137</u>	<u>1.827.540.994</u>	Sub Total
Entitas anak:					Subsidiaries:
Aset Tetap	13.285.047	7.352.598	--	20.637.645	Fixed Assets
Rugi Fiskal	89.915.446	(31.028.814)	--	58.886.632	Tax Loss
Liabilitas Imbalan Kerja	6.092.422	192.384	318.323	6.603.129	Employee Benefits Liabilities
Penurunan Nilai Aset Tetap	49.184	2.852.041	--	2.901.225	Impairment of Fixed Assets
Cadangan Kerugian					Allowance for Impairment
Penurunan Nilai Piutang	42.856.238	13.983.347	--	56.839.585	Losses of Receivables
Beban Pemeliharaan	17.903.527	1.993.824	--	19.897.351	Maintenance Expenses
Pencadangan Bonus	4.780.919	(4.782.156)	--	(1.237)	Bonus Provision
Cadangan Kerugian					Allowance for Impairment
Nilai Kas dan					Losses of Cash and
Setara Kas	(1.532)	(880)	--	(2.412)	Cash Equivalents
Sub Jumlah	<u>174.881.251</u>	<u>(9.437.656)</u>	<u>318.323</u>	<u>165.761.918</u>	Sub Total
Jumlah	<u>1.688.016.538</u>	<u>270.937.914</u>	<u>34.348.460</u>	<u>1.993.302.912</u>	Total

*) Disajikan Kembali, Catatan 54

*) As Restated, Note 54

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

f. Surat Ketetapan Pajak

f. Tax Assessment Letter

Tahun Pajak/ Tax Year	Objek Pajak/ Tax Object	Nomor Hasil Pemeriksaan/ Examination Result Number	Tanggal Terbit/ Issued Date	Total Tagihan Pajak/ Total Tax Collection Rp*)
Perusahaan/ The Company				
2021	Surat Tagihan Pajak pajak pertambahan nilai masa Juli/ Tax Collection Letter of value added tax period July	00381/107/21/093/22	19-Dec-22	164.147
2022	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Maret/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period March	00141/101/22/093/22	22-Aug-22	100.000
2020	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pajak penghasilan badan/ Tax Overpayment Assessment Letter of corporate income tax	00017/406/20/093/22	20-Apr-22	(276.871.157.013)
2020	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pajak pertambahan nilai masa Januari/ Tax Overpayment Assessment Letter of value added tax period January	00035/407/20/093/22	20-Apr-22	(1.484.979.111)
2020	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pajak pertambahan nilai masa Februari/ Tax Overpayment Assessment Letter of value added tax period February	00036/407/20/093/22	20-Apr-22	(1.241.749.694)
2020	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pajak pertambahan nilai masa Maret/ Tax Overpayment Assessment Letter of value added tax period March	00037/407/20/093/22	20-Apr-22	(4.419.027.111)
2020	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pajak pertambahan nilai masa April/ Tax Overpayment Assessment Letter of value added tax period April	00038/407/20/093/22	20-Apr-22	(140.702.098)
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Desember/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period December	00013/287/20/093/22	20-Apr-22	1.775.925.442
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak penghasilan pasal 21 masa Januari-Desember 2020/ Tax Underpayment Assessment Letter of income tax article 21 period January-December 2020	00017/201/20/093/22	20-Apr-22	96.772.859
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Mei/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period May	00112/207/20/093/22	20-Apr-22	344.062.677
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Juni/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period June	00113/207/20/093/22	20-Apr-22	1.584.077.982
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Juli/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period July	00114/207/20/093/22	20-Apr-22	4.400.636.216
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Agustus/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period August	00115/207/20/093/22	20-Apr-22	4.041.802.315
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa September/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period September	00116/207/20/093/22	20-Apr-22	4.631.733.584
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Oktober/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period October	00117/207/20/093/22	20-Apr-22	6.131.763.213
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa November/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period November	00118/207/20/093/22	20-Apr-22	9.540.550.096
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Desember/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period December	00119/207/20/093/22	20-Apr-22	14.185.415.097
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 23 masa Februari/ Tax Collection Letter of income tax article 23 period February	00059/103/21/619/22	30-May-22	100.000
2019	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa September/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period September	00099/101/19/093/22	06-Oct-22	1.387.793
PT Reska Multi Usaha				
2020	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pajak penghasilan badan/ Tax Overpayment Assessment Letter of corporate income tax	00034/406/20/093/22	09-Mar-22	(6.254.308.829)
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan badan/ Tax Collection Letter of corporate income tax	00005/106/20/093/22	09-Mar-22	23.629.349
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Januari/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period January	00059/207/20/093/22	09-Mar-22	1.718.054.607
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Februari/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period February	00051/207/20/093/22	09-Mar-22	1.053.420.360
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Maret/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period March	00052/207/20/093/22	09-Mar-22	4.891.465.784
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa April/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period April	00062/207/20/093/22	09-Mar-22	400.983.514
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Mei/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period May	00060/207/20/093/22	09-Mar-22	253.083.990
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Juni/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period June	00061/207/20/093/22	09-Mar-22	118.947.720
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Juli/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period July	00053/207/20/093/22	09-Mar-22	315.924.196
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Agustus/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period August	00054/207/20/093/22	09-Mar-22	540.007.704
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa September/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period September	00055/207/20/093/22	09-Mar-22	246.399.771

*) Nilai Penuh

*) Full Amount

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

Tahun Pajak/ Tax Year	Objek Pajak/ Tax Object	Nomor Hasil Pemeriksaan/ Examination Result Number	Tanggal Terbit/ Issued Date	Total Tagihan Pajak/ Total Tax Collection Rp*)
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Oktober/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period October	00056/207/20/093/22	09-Mar-22	117.845.780
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa November/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period November	00057/207/20/093/22	09-Mar-22	615.494.936
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Desember/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period December	00058/207/20/093/22	09-Mar-22	4.036.166.906
2020	Surat Tagihan Pajak pajak pertambahan nilai masa Desember/ Tax Collection Letter of value added tax period December	00038/107/20/093/22	09-Mar-22	181.112.417
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak penghasilan pasal 23 masa Juni/ Tax Underpayment Assessment Letter of income tax article 23 period June	00003/203/20/093/22	09-Mar-22	3.714.219
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 23 masa Maret/ Tax Collection Letter of income tax article 23 period March	00023/103/20/093/22	09-Mar-22	10.362.744
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak penghasilan pasal 23 masa Desember/ Tax Underpayment Assessment Letter of income tax Article 23 period December	00004/203/20/093/22	09-Mar-22	55.161.857
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 23 masa April/ Tax Collection Letter of income tax article 23 period April	00024/103/20/093/22	09-Mar-22	470.143
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 23 masa Mei/ Tax Collection Letter of income tax article 23 period May	00025/103/20/093/22	09-Mar-22	386.736
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 23 masa Juni/ Tax Collection Letter of income tax article 23 period June	00026/103/20/093/22	09-Mar-22	1.780.320
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 23 masa Juli/ Tax Collection Letter of income tax article 23 period July	00027/103/20/093/22	09-Mar-22	761.919
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 23 masa Agustus/ Tax Collection Letter of income tax article 23 period August	00028/103/20/093/22	09-Mar-22	395.796
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak penghasilan pasal 21 tahun pajak 2020/ Tax Underpayment Assessment Letter of income tax article 21 tax period 2020	00009/201/20/093/22	09-Mar-22	2.722.746.396
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa April/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period April	00007/101/20/093/22	09-Mar-22	27.927.145
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Mei/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period May	00008/101/20/093/22	09-Mar-22	7.456.708
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juni/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period June	00009/101/20/093/22	09-Mar-22	12.981.249
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juli/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period July	00010/101/20/093/22	09-Mar-22	3.370.303
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Agustus/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period August	00011/101/20/093/22	09-Mar-22	5.853.189
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa September/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period September	00012/101/20/093/22	09-Mar-22	14.223.230
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 masa Desember/ Tax Underpayment Assessment Letter of income tax article 4 (2) period December	00014/240/20/093/22	09-Mar-22	1.603.594.932
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 4 ayat 2 masa Maret/ Tax Collection Letter of income tax article 4 (2) period March	00002/140/20/093/22	09-Mar-22	47.308.536
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 4 ayat 2 masa April/ Tax Collection Letter of income tax article 4 (2) period April	00003/140/20/093/22	09-Mar-22	4.018.062
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 4 ayat 2 masa Mei/ Tax Collection Letter of income tax article 4 (2) period May	00004/140/20/093/22	09-Mar-22	173.577
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 4 ayat 2 masa Juni/ Tax Collection Letter of income tax article 4 (2) period June	00005/140/20/093/22	09-Mar-22	1.533.982
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 4 ayat 2 masa Juli/ Tax Collection Letter of income tax article 4 (2) period July	00007/140/20/093/22	09-Mar-22	2.995.120
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 4 ayat 2 masa Agustus/ Tax Collection Letter of income tax article 4 (2) period August	00006/140/20/093/22	09-Mar-22	364.899
PT Railink				
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Maret/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period March	00133/101/21/093/22	13-Apr-22	62.680
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa April/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period April	00134/101/21/093/22	13-Apr-22	523.523
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Mei/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period May	00113/101/21/093/22	08-Apr-22	20.601.858
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juni/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period June	00135/101/21/093/22	13-Apr-22	245.217
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juli/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period July	00136/101/21/093/22	13-Apr-22	144.407

*) Nilai Penuh

*) Full Amount

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

Tahun Pajak/ Tax Year	Objek Pajak/ Tax Object	Nomor Hasil Pemeriksaan/ Examination Result Number	Tanggal Terbit/ Issued Date	Total Tagihan Pajak/ Total Tax Collection Rp*)
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Agustus/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period August	00137/101/21/093/22	13-Apr-22	119.073
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa September/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period September	00138/101/21/093/22	13-Apr-22	94.245
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Januari/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period January	00094/101/20/093/22	09-Aug-22	2.356.067
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Maret/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period March	00095/101/20/093/22	09-Aug-22	1.463.182
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa April/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period April	00096/101/20/093/22	09-Aug-22	5.762.551
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Mei/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period May	00097/101/20/093/22	09-Aug-22	2.035.017
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juni/ Tax Collection Letter of income tax article 21 Period June	00098/101/20/093/22	09-Aug-22	531.838
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juli/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period July	00099/101/20/093/22	09-Aug-22	1.085.113
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Agustus/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period August	00100/101/20/093/22	09-Aug-22	579.167
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa September/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period September	00101/101/20/093/22	09-Aug-22	514.503
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Oktober/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period October	00102/101/20/093/22	09-Aug-22	483.559
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa November/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period November	00103/101/20/093/22	09-Aug-22	979.663
PT Kereta Commuter Indonesia				
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Desember/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period December	00154/101/21/093/21	18-Apr-22	82.497
PT KA Pariwisata				
2022	Surat Tagihan Pajak pajak pertambahan nilai masa Juni/ Tax Collection Letter of value added tax period June	00226/107/22/093/22	22-Aug-22	500.000
2022	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juli/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period July	00191/101/22/093/22	06-Oct-22	2.400.898
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Februari/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period February	00139/101/21/093/22	13-Apr-22	277.062
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 23 masa Desember/ Tax Collection Letter of income tax article 23 period December	00123/103/21/093/22	07-Jun-22	470.456
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Desember/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period December	00210/101/21/093/22	07-Jun-22	100.000
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Desember/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period December	00209/101/21/093/22	07-Jun-22	2.157.263
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 23 masa Desember/ Tax Collection Letter of income tax article 23 period December	00122/103/21/093/22	07-Jun-22	39.655
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 26 Masa Oktober/ Tax Collection Letter of income tax article 26 period October	00017/104/21/093/22	19-Aug-22	621.321
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Oktober/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period October	00330/101/21/093/22	19-Aug-22	1.967.317
2021	Surat Tagihan Pajak pajak pertambahan nilai masa Desember/ Tax Collection Letter of value added tax period December	00236/107/21/093/22	19-Aug-22	16.147.436
2021	Surat Tagihan Pajak pajak pertambahan nilai masa Desember/ Tax Collection Letter of value added tax period December	00235/107/21/093/22	19-Aug-22	500.000
2021	Surat Tagihan Pajak pajak pertambahan nilai masa Agustus/ Tax Collection Letter of value added tax period August	00239/107/21/093/22	22-Aug-22	37.200
2021	Surat Tagihan Pajak pajak pertambahan nilai masa Oktober/ Tax Collection Letter of value added tax period October	00237/107/21/093/22	22-Aug-22	500.000
2021	Surat Tagihan Pajak pajak pertambahan nilai masa September/ Tax Collection Letter of value added tax period September	00337/107/21/093/22	26-Aug-22	1.663.723
2021	Surat Tagihan Pajak pajak pertambahan nilai masa Agustus/ Tax Collection Letter of value added tax period August	00238/107/21/093/22	22-Aug-22	500.000
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Agustus/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period August	00334/101/21/093/22	26-Aug-22	2.142.574
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juni/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period June	00335/101/21/093/22	26-Aug-22	3.110.314
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juli/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period July	00336/101/21/093/22	26-Aug-22	2.647.764
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa April/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period April	00343/101/21/093/22	26-Aug-22	4.114.432
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Maret/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period March	00338/101/21/093/22	26-Aug-22	3.240.599

*) Nilai Penuh

*) Full Amount

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

Tahun Pajak/ Tax Year	Objek Pajak/ Tax Object	Nomor Hasil Pemeriksaan/ Examination Result Number	Tanggal Terbit/ Issued Date	Total Tagihan Pajak/ Total Tax Collection Rp*)
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Januari/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period January	00341/101/21/093/22	26-Aug-22	3.506.040
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Februari/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period February	00342/101/21/093/22	26-Aug-22	3.282.648
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa April/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period April	00107/207/20/093/22	13-Apr-22	1.959.273
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa September/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period September	00108/207/20/093/22	13-Apr-22	793.114
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Desember/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period December	00109/207/20/093/22	13-Apr-22	1.939.636
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak penghasilan pasal 23 masa Desember/ Tax Underpayment Assessment Letter of income tax article 23 Period	00011/203/20/093/22	13-Apr-22	58.425.458
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak penghasilan pasal 21 masa Desember 2020/ Tax Underpayment Assessment Letter of income tax article 21 Period December 2020	00015/201/20/093/22	13-Apr-22	132.044.464
2020	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pajak penghasilan badan/ Tax Overpayment Assessment Letter of corporate income tax	00014/406/20/093/22	13-Apr-22	(1.540.174.699)
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Februari/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period February	00058/107/20/093/22	13-Apr-22	113.637
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Maret/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period March	00106/207/20/093/22	13-Apr-22	887.250
2020	Surat Tagihan Pajak pajak pertambahan nilai masa Desember/ Tax Collection Letter of value added tax period December	00059/107/20/093/22	13-Apr-22	136.364
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Mei/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period May	00035/101/20/093/22	13-Apr-22	1.986.835
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juli/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period July	00034/101/20/093/22	13-Apr-22	25.092
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 masa Desember/ Tax Underpayment Assessment Letter of income tax article 4 (2) period December	00019/240/20/093/22	18-Apr-22	178.634.878
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Februari/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period February	00110/207/20/093/22	18-Apr-22	1.632.728
2019	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Oktober/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period October	00094/101/19/093/22	06-Oct-22	1.993.634
2019	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Agustus/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period August	00103/101/19/093/22	06-Oct-22	2.013.774
2019	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juli/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period July	00100/101/19/093/22	06-Oct-22	1.398.952
2019	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa April/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period April	00101/101/19/093/22	06-Oct-22	1.484.111
2019	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa November/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period November	00107/101/19/093/22	06-Oct-22	1.546.121
2019	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Februari/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period February	00106/101/19/093/22	06-Oct-22	56.923.802
2017	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan badan/ Tax Collection Letter of corporate income tax	00021/106/17/093/22	29-Dec-22	1.000.000
Jumlah/Total				<u>(225.644.959.053)</u>

*) Nilai Penuh

*) Full Amount

g. Pemeriksaan Pajak

g. Tax Assessments

Pemeriksaan Pajak Tahun 2020

2020's Tax Assessment

- Pada tanggal 10 Agustus 2021, Perusahaan menerima surat dari Direktorat Jendral Pajak dengan No.PRIN00149/WPJ.19/KP.0404/RIK.SIS/2021 tentang Surat Perintah Pemeriksaan atas pajak tahun 2020 akibat rugi fiskal yang menyebabkan SPT PPh Badan lebih bayar sejumlah Rp236.879.766.

- On August 10, 2021, the Company received a letter from the Directorate of Tax General No. PRIN 00149/WPJ.19/KP.0404/RIK.SIS/2021 regarding the examination warrant for tax in 2020 due to fiscal loss which caused Over payment for Income Tax total of Rp236,879,766.

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan tahun 2020 dengan No.00017/406/20/093/22 tanggal 20 April 2022 sebesar Rp276.871.157. Rugi Fiskal Perusahaan juga mengalami koreksi sebesar (Rp138.933.086), sehingga menjadi (Rp1.470.926.629).

Pada tanggal 18 Mei 2022 Perusahaan telah menerima restitusi pajak penghasilan badan tahun 2020 sebesar Rp239.559.258 setelah dikurangi kurang bayar PPN tahun pajak 2020 sebesar Rp37.215.127 dan PPh pasal 21 tahun pajak 2022 sebesar Rp96.772.

Perusahaan juga menerima pengembalian atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN tahun 2020 sebesar Rp5.801.478 berdasarkan:

- a. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Februari 2020 pada tanggal 13 Mei 2022 senilai Rp1.241.749;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN April 2020 pada tanggal 13 Mei 2022 senilai Rp140.702;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Maret 2020 pada tanggal 25 Mei 2022 senilai Rp4.419.027.
- Pada tanggal 25 Juni 2021, RMU menerima surat dari Direktorat Jendral Pajak dengan No.PEMB-00115/WPJ.19/KP.0404/RIK. SIS/2021 tentang Surat Perintah Pemeriksaan atas pajak tahun 2020 akibat rugi fiskal yang menyebabkan SPT PPh Badan lebih bayar sejumlah Rp7.558.756.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, RMU menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan tahun 2020 dengan No.00003/406/20/093/22 tanggal 9 Maret 2022 sebesar Rp6.254.308 setelah dikurangi dengan kurang bayar Pajak Penghasilan, PPN dan sanksi sebesar Rp19.041.677.

Based on 2020's Tax Assessment, the Company received a Tax Assessment Letter for Over Payment Income Tax for the year 2020 with the No. 00017/406/20/093/22 dated April 20, 2022 amounting to Rp276,871,157. Company's Tax Loss also have corrected amount (Rp138,933,086), to (Rp1,470,926,629).

On May 18, 2022, the Company has received restitution of corporate income tax for fiscal year 2020 amounted to Rp239,559,258 after deducted by under payment of VAT tax year 2020 amounted to Rp37,215,127 and tax article 21 tax year 2022 amounted to Rp96,772.

The Company also received a restitution for the Tax Assessment Letter for Over Payment of VAT fiscal year 2020 amount Rp5,801,478 based on:

- a. *Tax Assessment Letter for Over payment of VAT period February 2020 on May 13, 2022 amounting to Rp1,241,749;*
 - b. *Tax Assessment Letter for Over payment of VAT period April 2020 on May 13, 2022 amounting to Rp140,702;*
 - c. *Tax Assessment Letter for Over payment of VAT period May 2020 on May 25, 2022 amounting to Rp4,419,027.*
- *On June 25, 2021, RMU received a letter from the Directorate of Tax General with the No. PEMB00115/WPJ.19/KP.0404/RIK.SIS/2021 regarding the examination warrant for tax in 2020 due to fiscal loss which caused Over payment for Income Tax total of Rp7,558,756.*

Based on 2020's Tax Assessment, RMU received a Tax Assessment Letter for Over Payment Income Tax for the year 2020 with the No. 00003/406/20/093/22 dated March 9, 2022 amounting to Rp6,254,308 after deducted by under payment of Income Tax, VAT and a penalty of Rp19,041,677.

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

Pada tanggal 27 April 2022, RMU menerima Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan No.KEP00003/ANGSUR/WPJ.19/Kp.040/2022 sampai dengan KEP 000012/ANGSUR/WPJ.19/KP.0404/2022 tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran kurang bayar Pajak Penghasilan, PPN dan sanksi selama 12 bulan dari 26 Mei 2022 hingga 26 April 2023 dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp515.155.

Sampai dengan laporan ini selesai dibuat, RMU masih dalam tahap proses angsuran dan pengajuan penghapusan sanksi perpajakan.

- Pada tanggal 25 Juni 2021, KAWIS menerima surat dari Direktorat Jendral Pajak dengan No.PEMB-00175/WPJ.19/KP.0404/ RIK.SIS/2021 tentang Surat Perintah Pemeriksaan atas pajak tahun 2020 akibat rugi fiskal yang menyebabkan SPT PPh Badan lebih bayar sejumlah Rp1.540.175.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, KAWIS menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00014/406/20/093/22 tanggal 13 April 2022 sebesar Rp1.540.175. Pada tanggal 7 Juni 2022, KAWIS telah menerima restitusi pajak penghasilan badan tahun 2020 sebesar Rp1.140.994 setelah dikurangi kurang bayar Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Masa Mei 2021.

Pemeriksaan Pajak Tahun 2021

- Pada tanggal 20 Juli 2022, Perusahaan menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak dengan No PRIN-00163/WPJ.19/ KP.0404/ RIK.SIS/2022 tentang Surat Perintah Pemeriksaan atas Tahun Pajak 2021 akibat rugi fiskal. Hasil pemeriksaan tanggal 23 Maret 2023 atas pajak lebih bayar PPh Badan 2021 sebesar Rp67.009.024 (Catatan 53).

On April 27, 2022, RMU received a letter from the Directorate of Tax General with the No. KEP 00003/ANGSUR/WPJ.19/Kp.0404/2022 until KEP 000012/ANGSUR/WPJ.19/KP.0404/2022 regarding Acceptance of Installment under payment of Income Tax, VAT and a penalty for 12 months from May 26,2022 until April 26, 2023 with installment amounted Rp515,155/month.

As of reporting date, RMU still in the process of installments and filing for the abolition of tax penalty.

- On June 25, 2021, KAWIS received a letter from the Directorate of Tax General with the No. PEMB-00175WPJ.19/KP.0404/RIK.SIS/2021 regarding the examination warrant for tax in 2020 due to fiscal loss which caused Over payment for Income Tax total of Rp1,540,175.

Based on 2020's Tax Assessment, KAWIS received Tax Assessment Letter for Over Payment of income Tax with the No. 00014/406/20/093/22 dated April 13, 2022 amounting Rp1,540,175. On June 7, 2022, KAWIS has received restitution of corporate income tax for fiscal year 2020 amounted to Rp1,140,994 after deducted by under payment of Tax Collection Letter of Income Tax Article 21 for the May 2021.

2021's Tax Assessment

- On July 20, 2022, the Company received a letter from the Directorate of Tax General No. PRIN 00163/WPJ.19/KP.0404/ RIK.SIS/2022 regarding the examination warrant for tax in 2021 due to fiscal loss. Tax Audit Result dated March 23, 2023 on the overpayment of Corporate Income Tax in 2021 amounting to Rp67.009.024 (Note 53).

13. Perpajakan (Lanjutan)

- Pada tanggal 21 Oktober 2022, RMU menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak dengan No. PRIN-00233/WPJ.19/KP.0404/RIK.SIS/ 2022 tentang Surat Perintah Pemeriksaan atas pajak tahun 2021 akibat rugi fiskal yang menyebabkan SPT PPh Badan lebih bayar sejumlah Rp9.873.157. Sampai dengan laporan ini selesai dibuat, proses pemeriksaan pajak masih berlangsung.
- Pada tahun 2022, KAPM menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dengan no KEP-00121/SKPPKP/ KPP.190403/ 2022 atas Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp131.151.683. KAPM telah menerima pembayaran SKPPKP ini pada tanggal 22 Desember 2022.

KAPM menyetujui berita acara kesepakatan pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan no BA-058/KPP.190409/KP.0409.2022 pada tanggal 1 Agustus 2022 yang menyimpulkan bahwa KAPM memiliki kurang bayar atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2018 sebesar Rp231.871, Pajak Penghasilan pasal 21 sebesar Rp79.416, dan Pajak Penghasilan pasal 23 sebesar Rp1.803.610.

h. Pengampunan Pajak

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak, KALOG telah melaksanakan pengampunan pajak ini.

Aset pengampunan pajak sebesar Rp486.081 dicatat sebagai tambahan modal disetor atas pengampunan pajak pada KALOG.

13. Taxation (Continued)

- On October 21, 2022, RMU received a letter from the Directorate of Tax General with the No. PRIN-00233/WPJ.19/KP.0404/RIK.SIS/2022 regarding the examination warrant for tax in 2021 due to fiscal loss which caused Over payment for Income Tax total of Rp9,873,157. Until the issuance of this report, examination for tax still in process.
- In 2022, KAPM received a Preliminary Refund of Tax Excess Decree (SKPPKP) with no KEP-00121/SKPPKP/KPP.190403/2022 for Value Added Tax amounting to Rp131,151,683. KAPM has received this SKPPKP payment on December 22, 2022.

KAPM approved the minutes of agreement on the implementation of requests for explanations of data and/or information with no BA-058/KPP.190409/KP.0409.2022 on August 1, 2022 which concluded that KAPM had an underpayment of 2018 Corporate Income Tax amounting to Rp231,871, Income Tax Article 21 amounting to Rp79,416, and Income Tax Article 23 amounting to Rp1,803,610.

h. Tax Amnesty

In accordance to the implementation of Regulation of the Minister of Finance No. 118/PMK.03/2016 on the Implementation of Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty, as amended by Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.03/2016 and Directorate General of Tax Regulation No. PER-18/PJ/2016 on Redemption Payment of Excess Refund in the framework of Tax Amnesty, KALOG was participated this tax amnesty.

Assets of tax amnesty amounting to Rp486,081 was recorded as additional paid-in capital of tax amnesty in subsidiary KALOG.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

14. Aset Lancar Lainnya

Aset lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp26.370.549 dan Rp15.752.718.

Saldo tersebut merupakan uang jaminan atas bank garansi, deposit keagenan, serta dana sehubungan dengan pemakaian jasa parkir yang menggunakan kartu multitrip.

14. Other Current Assets

Other current assets as December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp26,370,549 and Rp15,752,718, respectively.

This balance represents security deposit of bank guarantee, deposit for agent, and funds in connection with the use of parking services that use multitrip card.

15. Investasi

15. Investment

a. Investasi Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

a. Investment in Associates and Joint Ventures

	2022	2021	
Entitas Asosiasi			Associates
PT Moda Integrasi			PT Moda Integrasi
Transportasi Jabodetabek	17.307.401	21.561.289	Transportasi Jabodetabek
PT BPRS Baiturridha Pusaka	8.204.532	6.802.910	PT BPRS Baiturridha Pusaka
Ventura Bersama			Joint Ventures
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	6.208.789.974	--	PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia
KSO Bumi Kalog	59.698.827	59.430.042	JO Bumi Kalog
KSO B Kalog	16.175.849	15.458.451	JO B Kalog
KSO PT KAPM - PT Mega Dasa Semesta	5.185.454	5.183.767	JO PT KAPM - PT Mega Dasa Semesta
Jumlah	6.315.362.037	108.436.459	Total

		2022						
Nama Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama/ Name of Associates and Joint Venture	Aktivitas Utama/ Principal Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai Tercatat Penyeritaan Awal Tahun/ Carrying Value at Beginning of Year	Reklasifikasi/ Reclassification	Penambahan Tahun Berjalan/ Additions of Current Year	Bagian Laba (Rugi) Bersih/ Portion in Net Profit (Loss)	Pembayaran Dividen/ Dividend Payment	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Entitas Asosiasi/ Associates								
PT Moda Integrasi	Pengangkutan darat terintegrasi Jakarta-Bogor-Depok Tangerang-Bekasi ("Jabodetabek")	49,00%	21.561.288	--	4.900.000	(9.153.887)	--	17.307.401
PT BPRS Baiturridha Pusaka	Pembiayaan dan Jasa perbankan/ Financing and Banking services	20,00%	6.802.910	--	--	2.089.885	(688.263)	8.204.532
Ventura Bersama/ Joint Ventures								
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)	Pengangkutan darat, perdagangan, jasa industri, pembangunan/ Land transportation, trading, services, industry, development	51,37%	--	7.230.581.343	791.878.657	(261.428.094)	--	7.761.031.906
KSO Bumi Kalog	Pelayanan Logistik di kawasan Waru, Sungai Lagoa dan Kalimas/ Logistics services in Waru, Sungai Lagoa and Kalimas area	45,00%	59.430.042	--	--	268.785	--	59.698.827
KSO B Kalog	Pelayanan Logistik berbasis angkutan Kereta Api/ Logistics services with railway based	65,00%	15.458.451	--	--	717.398	--	16.175.849
KSO PT KAPM - PT Mega Dasa Semesta	Pembangunan, pemasaran dan pengelolaan perkantoran dan pertokoan/ Development, marketing, office management and shopping center	50,00%	5.183.768	--	--	1.686	--	5.185.454
Jumlah/ Total			108.436.459	7.230.581.343	796.778.657	(267.504.227)	(688.263)	7.867.603.969
Dikurangi/ Deducted Cadangan Penurunan Nilai Investasi pada PSBI/ Allowance for Impairment losses of Investment in PSBI			--	(621.466.260)	(930.775.672)	--	--	(1.552.241.932)
Jumlah/Total			108.436.459	--	--	--	--	6.315.362.037

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

15. Investasi (Lanjutan)

15. Investment (Continued)

		2021					
Nama Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama/ Name of Associates and Joint Venture	Aktivitas Utama/ Principal Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai Tercatat Penyerahan Awal Tahun/ Carrying Value at Beginning of Year	Penambahan (Pengurangan) Penyerahan Periode Berjalan/ Additions (Deductions) of Investment in	Bagian Laba (Rugi) Bersih/ Portion in Net Profit (Loss)	Pembayaran Dividen/ Dividend Payment	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Entitas Asosiasi/ Associates							
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)	Pengangkutan darat, perdagangan, jasa, industri, pembangunan/ Land transportation, trading, services, industry, development	25,00%	--	--	--	--	--
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	Pengangkutan darat terintegrasi Jakarta-Bogor-Depok Tangerang-Bekasi ("Jabodetabek")	49,00%	32.521.164	--	(10.959.876)	--	21.561.288
PT BPRS Baiturridha Pusaka	Pembiayaan dan Jasa perbankan/ Financing and Banking services	20,00%	7.166.975	--	1.278.427	(1.642.492)	6.802.910
Ventura Bersama/ Joint Ventures							
KSO Bumi Kalog	Pelayanan Logistik di kawasan Waru, Sungai Lagoa dan Kalimas/ Logistics services in Waru, Sungai Lagoa and Kalimas area	45,00%	59.199.475	--	230.567	--	59.430.042
KSO B Kalog	Pelayanan Logistik berbasis angkutan Kereta Api/ Logistics services with railway based	65,00%	15.279.174	--	179.277	--	15.458.451
KSO PT KAPM - PT PPBM (PT Pacific Prima Buana Mas)	Pembangunan, pengelolaan gedung parkir dan komplek pertokoan/ Development, building parking management and shopping center	50,00%	6.392.693	(6.392.693)	--	--	--
KSO PT KAPM - PT Mega Dasa Semesta	Pembangunan, pemasaran dan pengelolaan perkantoran dan pertokoan/ Development, marketing, office management and shopping center	50,00%	3.054.565	2.353.346	(224.143)	--	5.183.768
Jumlah/ Total			123.614.046	(4.039.347)	(9.495.748)	(1.642.492)	108.436.459

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai investasi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai investasi

Management believes that the allowance for impairment losses of investment is adequate to cover possible losses resulting from any decline in the investment value of the inventories

2022				
Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama/ Associates and Joint Ventures	Total Aset/ Total Asset	Total Liabilitas/ Total Liabilities	Total Pendapatan/ Total Revenue	Labanya (Rugi) Neto/ Net Income (Loss)
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	21.462.201.000	8.961.610.000	--	(508.912.000)
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	81.877.958	46.556.732	6.243.054	(18.681.402)
PT BPRS Baiturridha Pusaka	196.876.568	166.000.710	36.164.464	16.305.545
KSO Bumi Kalog	105.627.375	15.255.112	57.487.302	597.300
KSO B Kalog	36.660.604	11.757.247	20.287.459	1.121.125
KSO PT KAPM - PT Mega Dasa Semesta	14.240.856	3.494.666	--	3.373
2021				
Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama/ Associates and Joint Ventures	Total Aset/ Total Asset	Total Liabilitas/ Total Liabilities	Total Pendapatan/ Total Revenue	Labanya (Rugi) Neto/ Net Income (Loss)
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	21.539.853.000	12.109.162.000	--	(127.585.000)
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	59.417.249	15.414.621	3.222.525	(22.367.093)
PT BPRS Baiturridha Pusaka	134.300.451	108.046.702	21.644.790	8.453.083
KSO Bumi Kalog	122.139.271	32.354.308	53.599.476	512.370
KSO B Kalog	39.115.804	16.287.527	15.272.232	275.809
KSO PT KAPM - PT Mega Dasa Semesta	14.741.713	3.494.666	--	(448.285)

PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ)

MITJ didirikan oleh Perusahaan dan PT Mass Rapid Transit Jakarta ("MRTJ") berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 11 Februari 2020. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008856.AH.01.01.2020 tahun 2020.

PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ)

MITJ was established by the Company and PT Mass Rapid Transit Jakarta ("MRTJ") based on the MITJ's Deed of Establishment No. 11 dated February 11, 2020, as acceptance of company data change by Republic of Indonesia's Minister of Law and Human Rights No. AHU-0008856. AH. 01.01. year 2020.

15. Investasi (Lanjutan)

Anggaran Dasar MITJ telah mengalami perubahan dengan Akta No 84 tanggal 31 Mei 2022 oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., mengenai Perubahan Anggaran Dasar. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No.AHU-0103947.AH.01.11 tanggal 6 Juni 2022.

Modal dasar MITJ pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp90.000.000 yang terbagi atas 90.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 90.000 saham atau sebesar Rp90.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- MRTJ memiliki 51% atau sebanyak 45.900 saham dengan nilai sebesar Rp45.900.000
- Perusahaan memiliki 49% atau sebanyak 44.100 saham dengan nilai sebesar Rp44.100.000

Modal dasar MITJ pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp80.000.000 yang terbagi atas 80.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 80.000 saham atau sebesar Rp80.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- MRTJ memiliki 51% atau sebanyak 40.800 saham dengan nilai sebesar Rp40.800.000
- Perusahaan memiliki 49% atau sebanyak 39.200 saham dengan nilai sebesar Rp39.200.000

PT BPRS Baiturridha Pusaka

Berdasarkan Risalah Sirkuler keputusan Pemegang Saham RMU tentang Persetujuan Pembelian Saham PT BPRS Baiturridha Pusaka No. KP.303/IV/8/ KA-2019 tanggal 11 April 2019, RMU membeli 34.563 saham PT BPRS Baiturridha Pusaka sebesar Rp4.458.627. Komposisi penyertaan pendanaan dan pembagian biaya serta keuntungan (*cost & profit sharing*) masing-masing adalah sebagai berikut:

- 80% untuk Yayasan Pusaka
- 20% untuk RMU

15. Investment (Continued)

MITJ's Articles of association has been amended most recently by Notarial Deed No. 84 dated May 31, 2022 of Notary Aulia Taufani, S.H., concerning the Changes in the Authorized Capital. The amendments were approved by the Minister of Law and Human Rights in his Decision Letter No. AHU-0103947.AH.01.11 dated June 6, 2022.

The authorized capital of MITJ as of December 31, 2022 amounted to Rp90,000,000, consists of 90,000 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to 90,000 shares or equivalent to Rp90,000,000 with shares ownership compositions are as follows:

- *MRTJ owns 51% or 45,900 shares amounting to Rp45,900,000*
- *The Company owns 49% or 44,100 shares amounting to Rp44,100,000*

The authorized capital of MITJ as of December 31, 2021 amounted to Rp80,000,000, consists of 80,000 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to 80,000 shares or equivalent to Rp80,000,000 with shares ownership compositions are as follows:

- *MRTJ owns 51% or 40,800 shares amounting to Rp40,800,000*
- *The Company owns 49% or 39,200 shares amounting to Rp39,200,000*

PT BPRS Baiturridha Pusaka

*Based on Circular Minutes of RMU Shareholders' decision regarding the Approval of the Purchase of PT BPRS Baiturridha Pusaka's Shares No. KP.303/IV/8/ KA-2019 dated April 11, 2019 RMU bought 34,563 shares of PT BPRS Baiturridha Pusaka amounted to Rp4,458,627. The composition of the participation of funding and sharing costs and benefits (*cost & profit sharing*) is as follows:*

- *80% for Yayasan Pusaka*
- *20% for RMU*

15. Investasi (Lanjutan)

15. Investment (Continued)

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)

PSBI didirikan berdasarkan Akta No. 21 tanggal 2 Oktober 2015 dari Mala Mukti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-2460435.AH.01.01.11 Tahun 2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan Daftar Perusahaan No. AHU-3564963.01.11 Tahun 2015 tanggal 12 Oktober 2015.

Anggaran Dasar PSBI telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta No. 67 tanggal 21 November 2022 oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M di Jakarta. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan AHU-AH.01.03-0318397 tanggal 28 November 2022.

Para pemegang saham sepakat untuk mengubah anggaran dasar PSBI menjadi perusahaan patungan dan sepakat untuk mengkonversi uang muka setoran modal menjadi modal disetor, sehingga total uang muka setoran modal Perusahaan yang dikonversi menjadi setoran modal adalah sebesar Rp7.230.581.343 dan penyertaan melalui kas sebesar Rp791.878.657.

Modal dasar PSBI pada tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp50.000.000.000 yang terbagi atas 50.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 15.620.041 saham atau sebesar Rp15.620.041.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 51,37% atau sebanyak 8.023.585 saham dengan nilai sebesar Rp8.023.585.000.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki 39,12% atau sebanyak 6.110.596 saham dengan nilai sebesar Rp6.110.596.000.
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk memiliki 8,30% atau sebanyak 1.297.235 saham dengan nilai sebesar Rp1.297.235.000.
- PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) memiliki 1,21% atau sebanyak 188.625 saham dengan nilai sebesar Rp188.625.000.

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PSBI

PSBI was established based on Notarial Deed No. 21 dated October 2, 2015 of Mala Mukti, S.H., Notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-2460435.AH.01.01.11 Tahun 2015, dated October 12, 2015 and Company List No. AHU-3564963.01.11 Tahun 2015, dated October 12, 2015.

PSBI's Articles of association has been amended last most recently by Notarial Deed No. 67 dated November 21, 2022 of Notary Mala Mukti, S.H., LL.M in Jakarta. The amendments were approved by the Minister of Law and Human Rights in his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0318397 dated November 28, 2022.

Shareholders agreed to change the PSBI Articles of association into a joint venture and agreed to convert the additional paid-in capital advance into paid-in capital, so that total the additional paid-in capital advance of the Company's which is converted into paid-in capital amounting to Rp7,230,581,343 and investment through cash amounting to Rp791,878,657.

The authorized capital of PSBI as of December 31, 2022 amounted to Rp50,000,000,000 consists of 50,000,000 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to 15,620,041 shares or equivalent to Rp15,620,541,000 with shares ownership compositions are as follows:

- The Company owns 51,37% or 8,023,585 shares amounting to Rp8,023,585,000.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk owns 39,12% or 6,110,596 shares amounting to Rp6,110,596,000.
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk owns 8,30% or 1,297,235 shares amounting to Rp1,297,235,000.
- PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) owns 1,21% or 118,625 shares amounting to Rp188,625,000.

15. Investasi (Lanjutan)

Modal dasar PSBI pada tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp18.000.000 yang terbagi atas 18.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 4.500 saham atau sebesar Rp4.500.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki 38% atau sebanyak 1.710 saham dengan nilai sebesar Rp1.710.000.
- Perusahaan memiliki 25% atau sebanyak 1.125 saham dengan nilai sebesar Rp1.125.000.
- PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) memiliki 25% atau sebanyak 1.125 saham dengan nilai sebesar Rp1.125.000.
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk memiliki 12% atau sebanyak 540 saham dengan nilai sebesar Rp540.000.

Perusahaan telah mengabsorb rugi pada tahun berjalan sebesar Rp261.428.094, kerugian kumulatif yang tidak diakui sampai tahun 2021 sebesar Rp446.009.691 dan penurunan nilai penyertaan pada PSBI sebesar Rp1.552.241.932.

Tidak terdapat informasi kuotasi harga publikasian atas nilai wajar investasi di PSBI.

KSO Bumi Kalog

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasi No. 01 tanggal 23 Mei 2013, dari Notaris Yoshsi S.H., M.Kn., KALOG mengadakan perjanjian kerja sama operasi dengan PT Bumi Wijaya Indorail dalam usaha pelayanan logistik di kawasan Stasiun Waru, Stasiun Sungai Lagoa dan Stasiun Kalimas. Komposisi penyertaan pendanaan dan pembagian biaya serta keuntungan (*cost & profit sharing*) masing-masing adalah sebagai berikut:

- 51% untuk KALOG
- 49% untuk PT Bumi Wijaya Indorail

15. Investment (Continued)

The authorized capital of PSBI as of December 31, 2021 amounted to Rp18,000,000, consists of 18,000 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to 4,500 shares or equivalent to Rp4,500,000 with shares ownership compositions are as follows:

- *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk owns 38% or 1,710 shares amounting to Rp1,710,000.*
- *The Company owns 25% or 1,125 shares amounting to Rp1,125,000.*
- *PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) owns 25% or 1,125 shares amounting to Rp1,125,000.*
- *PT Jasa Marga (Persero) Tbk owns 12% or 540 shares amounting to Rp540,000.*

The company has absorbed losses in the current year amounting to Rp261,428,094 added to the cumulative loss that was not recognized until 2021 of Rp446,009,691 and the impairment of investment in PSBI amounting to Rp1,552,241,932.

There is no information of quoted published price on the fair value investment in PSBI.

JO Bumi Kalog

*Based on Joint Operation Agreement No. 01, dated May 23, 2013 by Notary Yoshsi S.H., M.Kn., KALOG entered into a joint operation with PT Bumi Wijaya Indorail for a cooperation in logistic activities in Waru Station, Sungai Lagoa Station and Kalimas Station areas. The composition of the participation of funding and sharing costs and benefits (*cost & profit sharing*) is as follows:*

- *51% for KALOG*
- *49% for PT Bumi Wijaya Indorail*

15. Investasi (Lanjutan)

Kerja sama ini berlaku selama berlakunya perjanjian persewaan/pengelolaan kawasan Stasiun Waru, Stasiun Kalimas, Stasiun Lagoa dan stasiun-stasiun lainnya. Perjanjian kerja sama operasi telah mengalami dua kali perubahan dan yang terakhir dengan Akta Notaris No. 2 Yoshsi S.H., M.Kn., tanggal 5 Juni 2014 untuk menambah kawasan Stasiun Sungai Lagoa (SAO 1 dan SAO 2 menjadi SAO Terpadu) dan perubahan komposisi penyertaan pendanaan dan pembagian biaya serta keuntungan masing-masing sebagai berikut:

- 45% untuk KALOG
- 55% untuk PT Bumi Wijaya Indorail

KSO B Kalog

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasi No. 3 tanggal 10 Agustus 2012 antara KALOG dengan PT Bintang Laut Platinum dengan Addendum II No. 0079.PJ/ KALOG-BLP/2016, tanggal 28 April 2016 dalam kegiatan usaha pelayanan logistik berbasis angkutan kereta api, komposisi keuntungan (*cost & profit sharing*) masing-masing adalah sebagai berikut:

- 65% untuk KALOG
- 35% untuk PT Bintang Laut Platinum

Jangka waktu perjanjian adalah selama kerja sama antara KALOG dengan PT Bintang Laut Platinum berlaku.

KSO Pengelolaan Aset

KAPM menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Mega Dasa Semesta dalam membangun dan mengelola aset yang berada di Waru Sidoarjo.

Nota kesepahaman No. 022/DIR.KAPM/PER/OPTWR/XII/2013 dan 019/KS.MDS/XII.2013 tanggal 20 Desember 2013 antara KAPM dengan PT Mega Dasa Semesta tentang perjanjian kerja sama pembangunan, pemasaran dan pengelolaan kompleks perkantoran dan pertokoan di Jl. Brigjen Katamso, Waru, Sidoarjo dengan komposisi penyertaan modal dan pembagian keuntungan sebagai berikut:

- 50% untuk KAPM
- 50% untuk PT Mega Dasa Semesta

Manajemen berpendapat bahwa penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul terhadap nilai investasi.

15. Investment (Continued)

The agreement is valid in accordance with the agreement of rental/management of Waru Station, Kalimas Station, Sungai Lagoa Station and other stations area. Joint operation agreement has been amended twice, and recently by Notarial Deed No. 2 dated June 5, 2014 of Yoshsi S.H., M.Kn., regarding to the expansion of Sungai Lagoa Station area (existing SAO 1 and SAO 2 become Integrated SAO) and changes in the composition of the participation of funding and sharing costs and benefits as follows:

- 45% for KALOG
- 55% for PT Bumi Wijaya Indorail

JO B Kalog

Based on Joint Operation Agreement No. 3 dated August 10, 2012 between KALOG and PT Bintang Laut Platinum with Addendum II No. 0079.PJ/KALOG-BLP/2016, dated on April 28, 2016, for the activities of railway-based logistic delivery services, the composition of profits (cost & profit sharing) is as follows:

- 65% for KALOG
- 35% for PT Bintang Laut Platinum

The cooperation is valid in accordance with the agreement between KALOG and PT Bintang Laut Platinum.

JO Asset Management

KAPM entered into the cooperation agreement with PT Mega Dasa Semesta to build and manage the assets in Waru Sidoarjo.

Memorandum of understanding No. 022/DIR.KAPM/PER/OPTWR/XII/2013 and 019/KS.MDS/XII/2013 dated December 20, 2013 between KAPM and PT Mega Dasa Semesta about joint operation for development, marketing and management office and shopping block at Jl. Brigjen Katamso, Waru, Sidoarjo with composition of fund deposits and profit sharing as follows:

- 50% for KAPM
- 50% for PT Mega Dasa Semesta

Management believes that the impairment is adequate to cover possible losses on the investment value.

15. Investasi (Lanjutan)

15. Investment (Continued)

b. Investasi Jangka Panjang

b. Long-term Investment

PT Fintek Karya Nusantara

PT Fintek Karya Nusantara

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo Awal Investasi	54.853.000	53.080.000	<i>Beginning Balance of Investment</i>
Perubahan Nilai Wajar	(30.677.000)	1.773.000	<i>Fair Value Changes</i>
Saldo Akhir Investasi	<u>24.176.000</u>	<u>54.853.000</u>	<i>Ending Balance of Investment</i>

Informasi tambahan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sehubungan dengan investasi pada PT Fintek Karya Nusantara adalah sebagai berikut:

Additional information as of December 31, 2022 and 2021 related to investment in PT Fintek Karya Nusantara are as follows:

<u>Keterangan</u>	<u>Jenis Usaha/ Type of Business</u>	<u>Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership 31 Desember 2022 dan 2021/ December 31, 2022 and 2021</u>
PT Fintek Karya Nusantara	Penyelenggara jasa sistem pembayaran/ <i>Payment system service providers</i>	1,84%

<u>Tahun/ Year</u>	<u>Total Aset/ Total Asset</u>	<u>Total Liabilitas/ Total Liabilities</u>	<u>Total Pendapatan/ Total Revenue</u>	<u>Laba (Rugi) Neto/ Net Income (Loss)</u>
2022	1.460.016.229	1.441.854.180	414.682.596	(369.045.035)
2021	1.989.612.941	1.682.388.641	89.841.945	(744.520.609)

Berdasarkan Risalah Sirkuler Keputusan Pemegang Saham No. PT KAI Persero KP.303/X/3/KA-2019 dan No. Yayasan Pusaka 09/RIS-KCI/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 menyatakan persetujuan penyertaan modal kepada PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) berupa penyeteroran saham sebesar 2,03% dari modal disetor dan ditempatkan PT Fintek Karya Nusantara atau ekuivalen dengan nilai setoran modal sebesar Rp37.000.000 yang terbagi atas 3.700 lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp10.000.

Based on Circular Minutes of Shareholder Decree No. PT KAI Persero KP.303/X/3/KA-2019 and No. Pusaka Foundation 09/RIS-KCI/X/2019 dated October 24, 2019 stated agreement for the capital investment to PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) in the form of a 2.03% share of paid-in capital and placed by PT Fintek Karya Nusantara or equivalent to a capital deposit of Rp37,000,000 which is divided into 3,700 shares, each with a par value of Rp10,000.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Fintek Karya Nusantara, terdapat kenaikan modal ditempatkan dan disetor pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.962.320.000 menjadi Rp2.016.300.000 pada 31 Desember 2021. Berdasarkan keputusan ini maka jumlah saham yang dimiliki oleh Perusahaan semula 1,89% menjadi 1,84%.

Based on the Circular Decision in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Fintek Karya Nusantara, there was an increase in capital placed and paid up on December 31, 2020 amounting to Rp1,962,320,000 to Rp2,016,300,000 on December 31, 2021. Based on this decision, the number of shares owned by the Company has changed from 1,89% to 1.84%.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

15. Investasi (Lanjutan)

Berdasarkan valuasi kembali dari Laporan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anas Karim Rivai dan Rekan dan Tobing Panuturi dan Rekan, pada 31 Desember 2022 dan 2021, nilai wajar investasi KCI di Finarya adalah masing-masing sebesar Rp24.176.000 dan Rp54.853.000.

15. Investment (Continued)

Based on the re-valuation of the Public Appraisal Service Office Report (KJPP), Anas Karim Rivai and Partners and Tobing Panuturi and Partners, as of December 31, 2022 and 2021, the fair value of KCI's investment in Finarya amounted to Rp24,176,000 and Rp54,853,000, respectively.

16. Aset Tetap

16. Fixed Assets

	2022					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Sarana:						<i>Rolling Stock:</i>
Lokomotif	8.762.204.836	578.661.640	--	103.044.280	9.443.910.756	<i>Locomotive</i>
Kereta	9.113.501.783	166.049.585	--	(1.184.055)	9.278.367.313	<i>Trains</i>
Gerbong	3.671.667.328	629.851.194	--	98.948.768	4.400.467.290	<i>Wagons</i>
Prasarana:						<i>Infrastructures:</i>
Tanah	122.526.652	--	--	13.104.177	135.630.829	<i>Land</i>
Bangunan	2.472.230.979	32.951.717	--	8.178.429	2.513.361.125	<i>Buildings</i>
Prasarana dan Instalasi	1.279.588.125	17.016.806	--	61.551.724	1.358.156.655	<i>Infrastructures and Installations</i>
Fasilitas:						<i>Facilities:</i>
Mesin dan Peralatan	1.983.575.299	373.285.448	--	49.456.615	2.406.317.362	<i>Machinery and Equipments</i>
Kendaraan	63.966.839	4.903.269	--	871.398	69.741.506	<i>Vehicles</i>
Inventaris	147.229.193	6.677.713	--	15.928.019	169.834.925	<i>Supplies</i>
Aset dalam Pembangunan	3.700.669.588	1.000.846.786	--	(778.240.504)	3.923.275.870	<i>Assets Under Construction</i>
Jumlah	31.317.160.622	2.810.244.158	--	(428.341.149)	33.699.063.631	<i>Total</i>
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Sarana:						<i>Rolling Stock:</i>
Lokomotif	2.685.662.618	346.718.698	--	--	3.032.381.316	<i>Locomotive</i>
Kereta	2.623.502.982	317.260.235	--	(623.130)	2.940.140.087	<i>Trains</i>
Gerbong	1.096.795.669	134.659.098	--	--	1.231.454.767	<i>Wagons</i>
Prasarana:						<i>Infrastructures:</i>
Bangunan	466.379.667	102.627.586	--	(6.990.738)	562.016.515	<i>Buildings</i>
Prasarana dan Instalasi	491.901.899	86.591.185	--	--	578.493.084	<i>Infrastructures and Installations</i>
Fasilitas:						<i>Facilities:</i>
Mesin dan Peralatan	886.961.041	210.326.353	--	(78.023)	1.097.209.371	<i>Machinery and Equipments</i>
Kendaraan	46.498.178	4.801.888	--	--	51.300.066	<i>Vehicles</i>
Inventaris	110.138.072	19.919.759	--	--	130.057.831	<i>Supplies</i>
Jumlah	8.407.840.126	1.222.904.802	--	(7.691.891)	9.623.053.037	<i>Total</i>
Penurunan Nilai Aset Tetap						Fixed Assets Impairment
Sarana:						<i>Rolling Stock:</i>
Lokomotif	47.912.089	92.074.332	--	--	139.986.421	<i>Locomotive</i>
Gerbong	446.327	10.884.949	--	--	11.331.276	<i>Wagons</i>
Jumlah	48.358.416	102.959.281	--	--	151.317.697	<i>Total</i>
Nilai Tercatat	22.860.962.080				23.924.692.897	Carrying Amount

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

16. Aset Tetap (Lanjutan)

16. Fixed Assets (Continued)

	2021					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Sarana:						<i>Rolling Stock:</i>
Lokomotif	7.607.779.321	1.154.425.515	--	--	8.762.204.836	<i>Locomotive</i>
Kereta	9.112.237.908	--	--	1.263.875	9.113.501.783	<i>Trains</i>
Gerbong	3.671.667.328	--	--	--	3.671.667.328	<i>Wagons</i>
Prasarana:						<i>Infrastructures:</i>
Tanah	123.764.518	--	--	(1.237.866)	122.526.652	<i>Land</i>
Bangunan	2.158.737.328	5.664.386	--	307.829.265	2.472.230.979	<i>Buildings</i>
Prasarana dan Instalasi	1.121.368.390	9.165.749	--	149.053.986	1.279.588.125	<i>Infrastructures and Installations</i>
Fasilitas:						<i>Facilities:</i>
Mesin dan Peralatan	1.479.051.988	208.615.187	--	295.908.124	1.983.575.299	<i>Machinery and Equipments</i>
Kendaraan	51.425.156	3.046.774	--	9.494.909	63.966.839	<i>Vehicles</i>
Inventaris	142.709.329	5.834.259	--	(1.314.395)	147.229.193	<i>Supplies</i>
Aset dalam Pembangunan	3.269.747.610	1.226.695.676	--	(795.773.698)	3.700.669.588	<i>Assets Under Construction</i>
Jumlah	28.738.488.876	2.613.447.546	--	(34.775.800)	31.317.160.622	<i>Total</i>
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Sarana:						<i>Rolling Stock:</i>
Lokomotif	2.395.763.089	289.899.529	--	--	2.685.662.618	<i>Locomotive</i>
Kereta	2.325.125.034	319.961.250	--	(21.583.302)	2.623.502.982	<i>Trains</i>
Gerbong	972.961.242	123.834.427	--	--	1.096.795.669	<i>Wagons</i>
Prasarana:						<i>Infrastructures:</i>
Bangunan	362.423.422	109.039.564	--	(5.083.319)	466.379.667	<i>Buildings</i>
Prasarana dan Instalasi	389.305.038	102.596.861	--	--	491.901.899	<i>Infrastructures and Installations</i>
Fasilitas:						<i>Facilities:</i>
Mesin dan Peralatan	720.078.000	169.367.495	--	(2.484.454)	886.961.041	<i>Machinery and Equipments</i>
Kendaraan	38.068.828	8.375.960	--	53.390	46.498.178	<i>Vehicles</i>
Inventaris	93.328.932	17.088.043	--	(278.903)	110.138.072	<i>Supplies</i>
Jumlah	7.297.053.585	1.140.163.129	--	(29.376.588)	8.407.840.126	<i>Total</i>
Penurunan Nilai Aset Tetap						Fixed Assets Impairment
Sarana:						<i>Rolling Stock:</i>
Lokomotif	--	47.912.089	--	--	47.912.089	<i>Locomotive</i>
Kereta	106.809.640	--	(106.809.640)	--	--	<i>Trains</i>
Gerbong	--	446.327	--	--	446.327	<i>Wagons</i>
Jumlah	106.809.640	48.358.416	(106.809.640)	--	48.358.416	<i>Total</i>
Nilai Tercatat	21.334.625.651				22.860.962.080	Carrying Amount

Penurunan nilai pada Aset Tetap dikarenakan beberapa aset tetap sarana mengalami kerusakan akibat adanya Kecelakaan Kereta Api di tahun 2022 dan 2021 serta beberapa sarana lainnya tidak dalam kondisi siap operasi sehingga nilai perolehannya harus diturunkan.

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, Grup melakukan reklasifikasi aset sebagai berikut (Catatan 17, 18, 19 dan 21):

Impairment of Fixed Assets was due to several fixed assets of rolling stock being damaged due to a Train Accident in 2022 and 2021, several other rolling stock not in a ready to operate condition so that their acquisition value had to be impaired.

On December 31, 2022 and 2021, the Group has reclassified of assets are as follows (Notes 17, 18, 19 and 21):

16. Aset Tetap (Lanjutan)

Penyusutan sebesar Rp1.222.904.802 dan Rp1.140.163.129 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dibebankan pada akun beban operasi langsung, tidak langsung dan beban umum dan administrasi.

Biaya perolehan bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.483.954.503 serta Rp1.414.970.201.

Perusahaan mengasuransikan aset sarana pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) untuk periode 3 tahun mulai 30 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2022, dengan kondisi semua risiko seperti gempa bumi, terorisme dan sabotase dengan nilai pertanggungan sebagai berikut:

1. Polis semua risiko properti, pada saat operasi adalah 10% dari kerugian atau minimal USD40,000 (nilai penuh) setiap kerugian. Pada saat di Depo atau Balai Yasa adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD400,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.
2. Polis gempa bumi, pada saat operasi adalah 10% dari kerugian atau minimal USD40,000 (nilai penuh) setiap kerugian. Pada saat di Depo atau Balai Yasa adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD400,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.
3. Polis terorisme dan sabotase sebesar USD250,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.

Perusahaan mengasuransikan aset sarana pada PT Asuransi Wahana Tata untuk periode 3 tahun mulai 30 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2025, dengan kondisi semua risiko seperti gempa bumi, terorisme dan sabotase dengan nilai pertanggungan sebagai berikut:

1. Polis semua risiko properti, pada saat operasi adalah 10% dari kerugian atau minimal USD35,000 (nilai penuh) setiap kerugian. Pada saat di Depo atau Balai Yasa adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD350,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.

16. Fixed Assets (Continued)

Depreciation amounted Rp1,222,904,802 and Rp1,140,163,129 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively, are charged as charged to direct and indirect operating expense accounts and general and administrative expense.

The acquisition costs of fixed assets which have been fully depreciated and are still in use as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp1,483,954,503 and Rp1,414,970,201, respectively.

The Company has insured rolling stock assets to PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) for 3 years started from October 30, 2019 until October 30, 2022 for all risks such as earthquake, terrorism and sabotage with the coverages are as follows:

- 1. All property risks insurance, while in operation is 10% of loss, at minimum USD40,000 (full amount) each loss. While in Depo or Workshop is 10% of loss, or at minimum USD400,000 (full amount) each loss.*
- 2. Earthquake insurance, while in operation 10% of loss, minimum USD40,000 (full amount) each loss. While in Depot or Workshop 10% of loss, or at minimum USD400,000 (full amount) each loss.*
- 3. Terrorism and sabotage insurance of USD250,000 (full amount) each loss.*

The Company has insured rolling stock assets to PT Asuransi Wahana Tata for 3 years started from October 30, 2022 until October 30, 2025 for all risks such as earthquake, terrorism and sabotage with the coverages are as follows:

- 1. All property risks insurance, while in operation is 10% of loss, at minimum USD35,000 (full amount) each loss. While in Depo or Workshop is 10% of loss, or at minimum USD350,000 (full amount) each loss.*

16. Aset Tetap (Lanjutan)

- Polis gempa bumi, pada saat operasi adalah 10% dari kerugian atau minimal USD35,000 (nilai penuh) setiap kerugian. Pada saat di Depo atau Balai Yasa adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD350,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.
- Polis terorisme dan sabotase sebesar USD250,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggung jawaban tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggung jawaban.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 aset dalam pembangunan terdiri dari:

16. Fixed Assets (Continued)

- Earthquake insurance, while in operation 10% of loss, minimum USD35,000 (full amount) each loss. While in Depo or Workshop 10% of loss, or at minimum USD350,000 (full amount) each loss.
- Terrorism and sabotage insurance of USD250,000 (full amount) each loss.

Management believes that the insurance coverages are adequate to cover possible losses over the insured assets.

As of December 31, 2022 and 2021, assets under construction consist of:

		2022				
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount Rp	Nilai Kontrak/ Total Contracts Rp	Persentase Penyelesaian/ Percentage of Completion	Estimasi Penyelesaian/ Estimated Completion		
Sarana Prasarana	3.125.471.746	3.964.844.427	78,83%	2023	Rolling Stock Infrastructure	
Proyek Jabodetabek	5.267.117	2.145.617.337	97,18%	2023	Jabodetabek Project	
Proyek Prasarana Lainnya	761.924.537	1.155.194.684	65,96%	2023	Other Infrastructure Project	
Fasilitas	30.612.470	30.623.800	99,96%	2023	Facilities	
Jumlah	3.923.275.870	7.296.280.248			Total	
		2021				
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount Rp	Nilai Kontrak/ Total Contracts Rp	Persentase Penyelesaian/ Percentage of Completion	Estimasi Penyelesaian/ Estimated Completion		
Sarana Prasarana	2.725.937.617	5.883.614.566	46,33%	2022	Rolling Stock Infrastructure	
Proyek Jabodetabek	39.749.340	2.145.617.337	96,92%	2022	Jabodetabek Project	
Proyek Prasarana Lainnya	816.970.695	2.427.777.281	72,47%	2022	Other Infrastructure Project	
Fasilitas	118.011.936	353.778.563	54,17%	2022	Facilities	
Jumlah	3.700.669.588	10.810.787.747			Total	

Proyek Jabodetabek merupakan proyek pengembangan prasarana perkeretaapian sehubungan dengan pengembangan kereta komuter untuk wilayah Jabodetabek, sedangkan proyek prasarana lainnya merupakan proyek pengembangan prasarana perkeretaapian sehubungan dengan pengembangan bangunan dan aktivitas-aktivitas pekerjaan penunjang lainnya seperti pekerjaan conveyor, infrastruktur pekerjaan e-ticketing dan pengembangan emplasemen stasiun.

The Jabodetabek project is a railway infrastructure development project in connection with the development of commuter trains for the Jabodetabek area, while other infrastructure project is a railway infrastructure development project related to the development of buildings and other supporting work activities such as conveyor work, e-ticketing work infrastructure and station emplacement development.

17. Properti Investasi

17. Investment Properties

		2022					
		Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan							Acquisition Cost
Tanah		21.383.153	--	--	(13.104.177)	8.278.976	Land
Bangunan		125.449.261	--	--	53.232.065	178.681.326	Buildings
Jumlah		146.832.414	--	--	40.127.888	186.960.302	Total
Akumulasi Penyusutan							Depreciation accumulated:
Bangunan		50.452.796	3.431.213	--	6.990.738	60.874.747	Buildings
Jumlah		50.452.796	3.431.213	--	6.990.738	60.874.747	Total
Nilai Tercatat		96.379.618				126.085.555	Carrying Amount
		2021					
		Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan							Acquisition Cost
Tanah		20.145.287	--	--	1.237.866	21.383.153	Land
Bangunan		116.787.597	--	--	8.661.664	125.449.261	Buildings
Jumlah		136.932.884	--	--	9.899.530	146.832.414	Total
Akumulasi Penyusutan							Depreciation accumulated:
Bangunan		42.510.895	148.616	--	7.793.285	50.452.796	Buildings
Jumlah		42.510.895	148.616	--	7.793.285	50.452.796	Total
Nilai Tercatat		94.421.989				96.379.618	Carrying Amount

Dasar pengklasifikasian properti investasi atas tanah dan bangunan adalah luas tanah dan bangunan pada aset tetap yang disewakan kepada pihak ketiga.

Investment properties of land and buildings are classified based on the amount of land and buildings leased to third parties.

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan melakukan reklasifikasi atas aset tetap yang disewakan ke dalam aset properti investasi (Catatan 16).

As of December 31, 2022 and 2021, the Company reclassifies the rental fixed assets into investment properties (Note 16).

Penyusutan sebesar Rp3.431.213 dan Rp148.616 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dibebankan pada akun beban usaha tidak langsung.

Depreciation amounted Rp3,431,213 and Rp148,616 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively, are charged as indirect operating expenses in general and administrative expenses account.

Pendapatan atas optimalisasi aset masing-masing sebesar Rp630.197.305 dan Rp448.525.147 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 38).

Income generated from optimization of assets amounted Rp630,197,305 and Rp448,525,147 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively (Note 38).

Beban atas optimalisasi aset masing-masing sebesar Rp648.309.642 dan Rp542.300.012 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 39).

Expenses generated from optimization of assets amounted to Rp648,309,642 and Rp542,300,012 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively (Note 39).

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**18. Hak Pengoperasian Aset Prasarana
(Lanjutan)**

**18. Infrastructure Assets Operating Rights
(Continued)**

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan melakukan reklasifikasi beberapa aset prasarana ke dalam hak pengoperasian aset Prasarana (Catatan 16).

As of December 31, 2022 and 2021, the Company reclassifies few infrastructures into infrastructure assets operating rights (Note 16).

Beban amortisasi yang dibebankan dalam laba rugi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp185.451.293 dan Rp182.718.531.

Amortization expenses charged to profit or loss for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp185,451,293 and Rp182,718,531, respectively.

Perusahaan mempunyai 4 (empat) hak pengoperasian aset prasarana yaitu:

The Company has 4 (four) infrastructure assets operating rights, i.e:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Nilai Tercatat Hak Pengoperasian Aset Prasarana			Carrying Amount of Infrastructure Assets Operating Rights
Hak Pengoperasian Aset Prasarana - Konsesi			Infrastructure Assets Operating Rights - Service Concession
Kereta Api Bandara Soekarno Hatta	2.030.005.989	2.111.336.720	Airport Railway Soekarno Hatta
Proyek LRT Jabodebek	19.041.688.791	16.366.186.678	LRT Jabodebek Project
Hak Pengoperasian Aset Prasarana - Non-Konsesi			Infrastructure Assets Operating Rights - Non-Service Concession
Jalur Ganda Sumatra Selatan	2.297.563.031	2.009.030.363	Double Track South Sumatra
Proyek Reaktivasi Cibatug-Garut	352.571.613	--	Proyek Reaktivasi Cibatug-Garut
Jalur KA Araskabu-Bandar Udara Kualanamu	15.114.592	16.596.641	Araskabu-Bandar Udara Kualanamu's Track
Jumlah	<u>23.736.944.016</u>	<u>20.503.150.402</u>	Total

KA Bandara Soekarno-Hatta

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 2011, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana perkeretaapian Bandar Udara Soekarno-Hatta via Tangerang serta prasarana dan sarana perkeretaapian Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek). Perusahaan memiliki hak konsesi atas penyelenggaraan prasarana perkeretaapian Bandar Udara Soekarno-Hatta selama 30 tahun terhitung sejak tanggal pengoperasian yaitu tanggal 14 Desember 2017.

Soekarno-Hatta Airport Train

Based on Presidential Regulation of Republic of Indonesia No. 83 in 2011, the Government assigned the Company to operate the rolling stock and railway infrastructure of Soekarno-Hatta Airport via Tangerang and also the rolling stock and railway infrastructure of Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) Circular Line. The Company has concession right to operate the railway infrastructure of Soekarno-Hatta Airport for 30 years since the date of operation date on December 14, 2017.

Pada tanggal 10 Juli 2014, Perusahaan selaku pemegang hak penyelenggara prasarana perkeretaapian umum Bandara Soekarno Hatta melalui kota Tangerang, telah menandatangani Perjanjian dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dengan No. HK.201/A.263/DJKA/7/14 dan HK.222/VII/2/KA-2014 dengan masa penyelenggaraan konsesi selama 30 tahun, masa konsesi sebagaimana dimaksud akan ditinjau kembali oleh instansi yang berwenang setelah ditetapkan tarif dan telah diketahui biaya pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian bandara.

On July 10, 2014, the Company as the right holder of infrastructure operating for Soekarno-Hatta Airport railways via Tangerang, had signed an agreement with Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) referred to Agreement No. HK.201/A.263/DJKA/7/14 and HK.222/VII/2/KA-2014 with period of concession operating for 30 years, which will be reviewed by related institution after ticket fare and operating and maintenance cost of rolling stock and infrastructure have been determined.

**18. Hak Pengoperasian Aset Prasarana
(Lanjutan)**

**18. Infrastructure Assets Operating Rights
(Continued)**

Tarif tiket ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan pedoman perhitungan dan penetapan tarif angkutan orang dengan kereta api yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan berlaku untuk penyelenggaraan KA Bandara.

Ticket fare is determined by the company according to guidance of calculation and determination of passenger transportation fare which is regulated by Minister of Transportation and applicable for Airport Railways project.

Kereta Api Ringan (LRT) Jabodebek

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 3 Mei 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2017. Dalam Peraturan yang terakhir ini, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk melakukan pengadaan sarana, penyelenggaraan pengoperasian sarana dan prasarana, perawatan sarana dan prasarana, serta pengusahaan sarana dan prasarana termasuk pendanaan pembangunan prasarana kereta api ringan terintegrasi. Perusahaan memiliki hak konsesi atas penyelenggaraan sarana dan prasarana selama 50 tahun terhitung sejak tanggal pengoperasian.

Light Rail Transit (LRT) Jabodebek

Based on Presidential Regulation No. 98 of 2015 regarding Acceleration of Integrated Light Rail Transit Operation in Jakarta, Bogor, Depok, and Bekasi Areas that has been amended several times, most recently on May 3, 2017, by Presidential Regulation No. 49 of 2017. In this amendment, the Government assigned the Company to perform procurement, operation of facilities and infrastructure, maintenance of rolling stock facilities and infrastructure, and commercialization of facilities and infrastructure including to raise funding of the construction of infrastructure for the integrated light rail transit. The Company has concession right to operate the rolling stock and railway infrastructure for 50 years since the date of operation.

Pada tanggal 19 Desember 2017, Perusahaan selaku pemegang hak penyelenggara prasarana kereta api ringan atau *Light Rail Transit* (LRT), telah menandatangani perjanjian dengan DJKA untuk menyediakan jasa pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur Lintas Rel Terpadu Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) dengan Nomor HK.201/A.566/DJKA/12/17 dan KL.705/XII/10/KA-2017 dengan masa penyelenggaraan konsesi selama 50 tahun berlaku efektif sejak tanggal beroperasi yang dibuktikan dengan ditandatanganinya berita acara tanggal operasi.

On December 19, 2017, the Company as the right holder of light rail transit infrastructure management, had signed an agreement with DJKA to provide services of development, operating and maintenance of light rail transit infrastructure Jakarta- Bogor- Depok- Bekasi (Jabodebek) route referred to Agreement Number HK.201/A.566/DJKA/12/17 and KL.705/XII/10/KA-2017. The period of concession management is 50 years, effectively applicable since the date of operation supported by the signing of minutes of operation date.

Terdapat empat jenis yang wajib dibangun, dioperasikan dan dipelihara Perusahaan terkait dengan proyek LRT Jabodebek yaitu prasarana, fasilitas perawatan prasarana, sarana dan fasilitas perawatan sarana. Pembangunan prasarana dan Dipo oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor yang ditugaskan berdasarkan Perpres LRT.

Four components related to the project of LRT Jabodebek which were required to be developed, operated, and maintained by the Company are infrastructure, infrastructure maintenance facility, rolling stock, and rolling stock maintenance facility. Development of infrastructure and depot is conducted by PT Adhi Karya (Persero) Tbk as the assigned contractor according to Presidential Regulation regarding LRT.

**18. Hak Pengoperasian Aset Prasarana
(Lanjutan)**

**18. Infrastructure Assets Operating Rights
(Continued)**

Saat ini LRT belum beroperasi dan masih dalam proses konstruksi.

At present the LRT is not yet operation and still under construction.

Sumatera Selatan dan Kualanamu

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. HK.601/SK.29/DJKA/9/2012 Tahun 2012, bahwa Perusahaan diberi kewenangan untuk membangun prasarana perkeretaapian di wilayah Sumatra Selatan, dan sesuai Surat Pernyataan dari Direktur Utama Perusahaan No. 001/VII/11/KA-2012 tanggal 31 Juli 2012 bahwa setelah pembangunan, aset prasarana tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah sehingga menjadi Barang Milik Negara (BMN). Selain itu sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.123 Tahun 2013, bahwa Perusahaan diberi kewenangan untuk membangun prasarana perkeretaapian umum untuk jalur kereta api umum dari Stasiun Araskabu ke Bandar Udara Internasional Kualanamu Sumatra Utara dan sesuai Surat Pernyataan dari Direktur Utama Perusahaan No. HK.237/VII/5/KA-2013 tanggal 10 Juli 2013 bahwa setelah pembangunan tersebut selesai, aset prasarana akan diserahkan kepada Pemerintah.

South Sumatera and Kualanamu

According to Decree of Minister of Transportations No. HK.601/SK.29/DJKA/9/2012 Year 2012, the Company is authorized to build railway infrastructure in South Sumatra, and according to Statement of the Company's President Directors No. 001/VII/11/KA-2012 dated July 31, 2012 that after the construction, the infrastructure assets will be transferred or assigned to the Government as the State Property (BMN). In addition, according to Decree of Minister of Transportations No. KP.123 Year 2013, the Company is authorized to build railway infrastructure for public railway from Araskabu Station to Kualanamu International Airport in North Sumatra, and according to Statement of the Company's President Directors No. HK.237/VII/5/KA-2013 dated July 10, 2013 that after the construction, the infrastructure assets will be transferred or assigned.

Berdasarkan UU No. 23/2007 tentang Perkeretaapian, Perusahaan diberi kewenangan (hak) untuk mengoperasikan aset prasarana, maka atas pengeluaran untuk pembangunan prasarana perkeretaapian di wilayah Sumatra bagian utara dan selatan, telah dicatat oleh Perusahaan sebagai hak pengoperasian aset prasarana.

Based on Law No. 23/2007 regarding Railways, the Company is given authorization (right) to operate infrastructure assets, therefore the expenditure for the construction of railway infrastructure in north and south of Sumatra regions, have been recorded by the Company as infrastructure assets operating rights.

Hak pengoperasian aset prasarana di wilayah Sumatra bagian utara dan selatan diamortisasi selama 20 tahun setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) diterima atau sesuai dengan kontrak yang berlaku. Masa umur hak pengoperasian ini ditentukan berdasarkan asumsi manajemen merujuk pada ketentuan perpajakan. Jalur Sumatra bagian utara dan selatan tersebut telah beroperasi masing-masing pada tanggal 23 Juli 2013 dan 28 Januari 2015.

Infrastructure assets operating rights in north and south of Sumatra regions are amortized within 20 years since the receipt of minutes of Hand Over (BAST) or in accordance with the prevailing contract. The period of the right to operate is determined based on management assumptions referred to tax provisions. The northern and southern Sumatra tracks were operate on July 23, 2013 and January 28, 2015, respectively.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**18. Hak Pengoperasian Aset Prasarana
(Lanjutan)**

**18. Infrastructure Assets Operating Rights
(Continued)**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, pekerjaan dalam proses konstruksi terdiri dari:

As of December 31, 2022 and 2021, construction in progress consists of:

	2022				
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount Rp	Nilai Kontrak/ Total Contracts Rp	Persentase Penyelesaian/ Percentage of Completion	Estimasi Penyelesaian/ Estimated Completion	
Hak Pengoperasian Aset Prasarana					Infrastructure Assets Operating Rights
Proyek LRT Jabodebek	19.041.688.791	28.245.111.967	88,07%	2023	LRT Jabodebek Project
Pembangunan Jalur Ganda - Sumatra Selatan	934.884.043	1.903.770.937	49,11%	2023	Double Track Construction South Sumatra
Reaktivasi Cibu-Garut	352.571.613	374.842.092	94,06%	2023	Reactivation Cibu Garut
Jumlah	20.329.144.447	30.523.724.996			Total
	2021				
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount Rp	Nilai Kontrak/ Total Contracts Rp	Persentase Penyelesaian/ Percentage of Completion	Estimasi Penyelesaian/ Estimated Completion	
Hak Pengoperasian Aset Prasarana					Infrastructure Assets Operating Rights
Proyek LRT Jabodebek	16.366.186.678	28.245.111.967	78,39%	2022	LRT Jabodebek Project
Pembangunan Jalur Ganda - Sumatra Selatan	543.712.862	767.468.027	70,85%	2022	Double Track Construction South Sumatra
Jumlah	16.909.899.540	29.012.579.994			Total

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai beban pinjaman yang dikapitalisasi masing-masing sebesar Rp600.973.362 dan Rp452.299.477.

As of December 31, 2022 and 2021, capitalized interest expense amounted to Rp600,973,362 and Rp452,299,477, respectively.

19. Aset Takberwujud

19. Intangible Assets

	2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Sertifikat Tanah	331.136.238	442.243	--	70.571.378	402.149.859	Land Certificate
Piranti Lunak	251.878.751	5.621.446	--	6.830.000	264.330.197	Software
Aset dalam Penyelesaian	64.393.646	89.853.662	--	(77.401.378)	76.845.930	Construction in Progress
Jumlah	647.408.635	95.917.351	--	--	743.325.986	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated Depreciation
Sertifikat tanah	64.273.786	16.785.812	--	--	81.059.598	Land Certificate
Piranti lunak	216.361.572	23.143.914	--	--	239.505.486	Software
Jumlah	280.635.358	39.929.726	--	--	320.565.084	Total
Nilai Tercatat	366.773.277				422.760.902	Carrying Amount

19. Aset Takberwujud (Lanjutan)

19. Intangible Assets (Continued)

	2021					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Sertifikat Tanah	283.305.495	30.394.635	--	17.436.108	331.136.238	Land Certificate
Piranti Lunak	249.798.413	557.338	--	1.523.000	251.878.751	Software
Aset dalam Penyelesaian	55.174.533	26.450.720	--	(17.231.607)	64.393.646	Construction in Progress
Jumlah	588.278.441	57.402.693	--	1.727.501	647.408.635	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated Depreciation
Sertifikat tanah	50.024.360	14.249.426	--	--	64.273.786	Land Certificate
Piranti lunak	190.776.147	25.585.425	--	--	216.361.572	Software
Jumlah	240.800.507	39.834.851	--	--	280.635.358	Total
Nilai Tercatat	347.477.934				366.773.277	Carrying Amount

Sertifikat tanah merupakan biaya atas pengelolaan peningkatan status hak atas tanah yang sebelumnya berbentuk *Grondkaart* ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan.

Land certificate represents the maintenance costs to improve the status of land rights that are previously in form of Grondkaart to be Building Use Rights Certificate.

Piranti lunak merupakan biaya atas pengembangan atau pembelian piranti lunak yang bersifat spesifik berdasarkan bisnis proses Grup.

Software represents the procurement or development costs for specific softwares according to the Group's business process.

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan melakukan reklasifikasi beberapa aset ke dalam aset takberwujud (Catatan 16).

As of December 31, 2022 and in 2021, the Company reclassifies few assets into intangible assets (Note 16).

Beban amortisasi yang dibebankan dalam laba untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp39.929.726 dan Rp39.834.851.

Amortization expenses charged to profit or loss for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp39,929,726 and Rp39,834,851, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, aset dalam penyelesaian terdiri dari:

As of December 31, 2022 and 2021, the construction in progress consists of:

	2022				
	Nilai Tercatat/ <i>Carrying Amount</i> Rp	Nilai Kontrak/ <i>Total Contracts</i> Rp	Persentase Penyelesaian/ <i>Percentage of Completion</i>	Estimasi Penyelesaian/ <i>Estimated Completion</i>	
Aset Takberwujud					Intangible Assets
Piranti Lunak	40.256.307	100.609.307	40,01%	2023	Software
Sertifikat Tanah	36.589.623	44.017.945	83,12%	2023	Land Certificate
Jumlah	76.845.930	144.627.252			Total
	2021				
	Nilai Tercatat/ <i>Carrying Amount</i> Rp	Nilai Kontrak/ <i>Total Contracts</i> Rp	Persentase Penyelesaian/ <i>Percentage of Completion</i>	Estimasi Penyelesaian/ <i>Estimated Completion</i>	
Aset Takberwujud					Intangible Assets
Piranti Lunak	25.100.308	42.456.856	59,12%	2022	Software
Sertifikat Tanah	39.293.338	136.199.721	45,41%	2022	Land Certificate
Jumlah	64.393.646	178.656.577			Total

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

20. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

20. Right of Use Assets and Lease Liabilities

Rekonsiliasi kelompok-kelompok utama aset hak guna dan liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The reconciliation of right-of-use assets and lease liabilities by major classifications was as follows:

2022				
1 Januari/ January 1, 2022	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 31, 2022	
Biaya Perolehan				Acquisition Cost
Prasarana:				Infrastructures:
Tanah	6.115.014	3.081.577	(2.997.825)	Land
Bangunan	17.700.543	1.086.500	--	Buildings
Instalasi Bergerak	25.183.819	9.864.366	--	Equipments
Fasilitas:				Facilities:
Kendaraan	14.408.147	1.350.591	(11.380.579)	Vehicles
Inventaris	63.467.867	--	--	Supplies
Jumlah	126.875.390	15.383.034	(14.378.404)	Total
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation
Prasarana:				Infrastructures:
Tanah	4.994.457	2.404.547	(2.997.825)	Land
Bangunan	12.093.889	4.157.013	--	Buildings
Instalasi Bergerak	18.078.398	11.675.221	--	Equipments
Fasilitas:				Facilities:
Kendaraan	11.463.429	4.135.350	(11.235.792)	Vehicles
Inventaris	12.825.863	7.169.396	--	Supplies
Jumlah	59.456.036	29.541.527	(14.233.617)	Total
Nilai Tercatat	67.419.354		53.116.074	Carrying Amount
2021				
1 Januari/ January 1, 2021	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 31, 2021	
Biaya Perolehan				Acquisition Cost
Prasarana:				Infrastructures:
Tanah	6.436.362	--	(321.348)	Land
Bangunan	14.951.797	2.774.233	(25.487)	Buildings
Instalasi Bergerak	30.221.540	--	(5.037.721)	Equipments
Fasilitas:				Facilities:
Kendaraan	15.162.981	446.744	(1.201.578)	Vehicles
Inventaris	63.467.867	--	--	Supplies
Jumlah	130.240.547	3.220.977	(6.586.134)	Total
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation
Prasarana:				Infrastructures:
Tanah	2.395.272	2.599.185	--	Land
Bangunan	5.741.665	6.377.711	(25.487)	Buildings
Instalasi Bergerak	12.813.688	10.302.431	(5.037.721)	Equipments
Fasilitas:				Facilities:
Kendaraan	6.081.685	6.355.892	(974.148)	Vehicles
Inventaris	5.984.732	6.841.131	--	Supplies
Jumlah	33.017.042	32.476.350	(6.037.356)	Total
Nilai Tercatat	97.223.505		67.419.354	Carrying Amount

**20. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa
(Lanjutan)**

**20. Right of Use Assets and Lease Liabilities
(Continued)**

Beberapa transaksi sewa gudang dan kantor dan kendaraan mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Grup sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Grup. Grup mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Grup mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Grup.

Some leases of warehouses and offices and vehicles contain extension options exercisable by the Group before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Group. The Group assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Group reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within the control of the Group.

Berikut ini ringkasan komponen liabilitas sewa berdasarkan jangka waktu:

The following summarizes the component of lease liabilities based on period:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Liabilitas Sewa			Lease liabilities
Jatuh tempo dalam satu tahun	20.566.599	36.612.729	Due within one year
Jatuh tempo lebih dari satu tahun	60.353.914	61.287.358	Due beyond one year
Jumlah	80.920.513	97.900.087	Total
Dikurangi bagian bunga	(19.757.613)	(15.754.652)	Less interest portion
Nilai kini Pembayaran Sewa	61.162.900	82.145.435	Present value of Lease Payments
Dikurangi: bagian jatuh tempo satu tahun	(16.563.637)	(29.372.889)	Less: Current portion
Bagian Jangka Panjang	44.599.263	52.772.546	Non-Current Portion

Berikut ini ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa:

The following summarizes the component of changes in the liabilities arising from leases:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo Awal	82.145.435	105.157.333	Beginning Balance
Arus Kas	(37.190.355)	(26.886.581)	Cash Flow
Perubahan Non Kas			Non-cash Movement
Penambahan	16.207.820	3.874.683	Additions
Saldo Akhir	61.162.900	82.145.435	Ending Balance

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Grup mencatat beban penyusutan atas aset hak guna masing-masing sebesar sebesar Rp29.541.527 dan Rp32.476.350, juga mencatat membebaskan bunga masing-masing sebesar Rp8.101.140 dan Rp5.313.503 (Catatan 43).

As of December 31, 2022 and 2021, the Group charge depreciation of right of use of asset amounted Rp29,541,527 and Rp32,476,350, also charge interest expense amounted Rp8,101,140 and Rp5,313,503, respectively (Notes 43).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 terdapat pengecualian untuk pengakuan sewa jangka pendek dan sewa atas barang masing-masing sebesar Rp77.767.595 dan Rp28.629.159.

As of December 31, 2022 there are exceptions for the recognition of the short-term leases and leases amounted Rp77,767,595 and Rp28,629,159, respectively.

21. Aset Tidak Lancar Lainnya

21. Other Non-Current Assets

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Aset Non-Keuangan			Non-Financial Assets
Aset Diberhentikan Operasi	268.605.543	267.343.465	Assets Discontinued from Operations
Persediaan <i>Scrap</i>	31.443.812	31.443.812	Scrap Inventories
Aset Lain-lain	--	30.555.196	Other Assets
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(300.049.355)	(329.342.473)	Allowance for Impairment Losses
Aset Non-Keuangan - Neto	<u><u>--</u></u>	<u><u>--</u></u>	Non-Financial Assets - Net
Aset Keuangan			Financial Assets
Pihak Berelasi (Catatan 41)			Related Parties (Note 41)
Dana Pensiun Pegawai	76.394.632	88.598.426	Pension Funds
Dana Kesehatan Pegawai	53.402.087	49.994.432	Employee Healthy Fund
Pihak Ketiga			Third Parties
Aset Keuangan Lainnya	56.928.847	47.720.711	Other Financial Assets
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	--	(577.164)	Allowance for Impairment Losses
Aset Keuangan - Neto	<u><u>186.725.566</u></u>	<u><u>185.736.405</u></u>	Financial Assets - Net
Neto	<u><u>186.725.566</u></u>	<u><u>185.736.405</u></u>	Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

Change in allowance for impairment losses:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo Awal	(329.919.637)	(318.281.954)	Beginning Balance
(Penambahan) Pemulihan			(Additional) Recovery
Cadangan Aset Keuangan	577.164	(495.174)	Allowance of Financial Assets
(Penambahan) Penghapusan Cadangan			(Additional) Write-offs of
Aset Non Keuangan	29.293.118	(11.142.509)	Non-Financial Assets
Saldo Akhir	<u><u>(300.049.355)</u></u>	<u><u>(329.919.637)</u></u>	Ending Balance

Aset diberhentikan operasi merupakan aset tetap Sarana Grup yang tidak dapat dioperasikan lagi baik dari sisi teknis maupun ekonomi (Catatan 16). Nilai atas aset diberhentikan operasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah dicadangkan seluruhnya.

Assets discontinued form operations represent Group's assets which cannot be technically and economically utilized (Note 16). Amount of assets discontinued form operations as of December 31, 2022 and 2021 have been fully impaired.

Dana pensiun pegawai merupakan dana yang dibentuk untuk menampung dana pensiun karyawan. Jumlah dana yang dikumpulkan sebesar 17,25% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dengan komposisi sebesar 4,75% dipotong dari penghasilan karyawan dan sebesar 12,5% dari kontribusi Perusahaan. Dana tersebut digunakan untuk pesangon pegawai Perusahaan yang diangkat sebelum tanggal 1 Agustus 2009 sebanyak 10.222 karyawan sebelum disetorkan ke pengelola program asuransi *saving plan* dengan pola pendanaan sistem *pooled fund*.

Pension funds represent funds raised to accommodate employees' pension funds. The amount collected is 17.25% of employee basic pension salary represented by 4.75% deducted from employee's salary and 12.5% of the Company's contribution. The funds are used for employee severance payment for those who were hired on the period started before August 1, 2009 amounted to 10,222 employees before it is deposited to insurance saving plan management by pooled fund systems.

21. Aset Tidak Lancar Lainnya (Lanjutan)

Aset lain-lain merupakan uang muka atas pembelian 10 *trainset* KRL dimana masing-masing *trainset* terdiri dari 4 sarana (total 40 sarana) yaitu nomor K311201 sampai dengan K311240 sehubungan dengan pembiayaan proyek Jabodetabek *Commuter Railways*. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-378/MK.06/2006 tanggal 4 September 2006, Kementerian Keuangan meneruskan pinjaman dari *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* sejumlah Rp36.600.000 kepada Perusahaan. Pinjaman tersebut merupakan penerusan pinjaman atas Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri tanggal 19 Januari 2005 antara Republik Indonesia dengan *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* dengan nilai pinjaman EUR51,000 untuk pembiayaan proyek Jabodetabek *Commuter Railways* (Catatan 28).

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. PL.108/1/3/DJKA/2022 tanggal 3 Oktober 2022 telah dilakukan serah terima aset antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku pelaksana proyek dengan Perusahaan selaku operator. Pada 31 Desember 2022, aset lain-lain senilai Rp30.555.196 tersebut telah direklasifikasi ke dalam aset tetap dan Perusahaan memulihkan seluruh cadangan kerugian yang telah dibentuk sebelumnya.

Aset Keuangan Lainnya merupakan uang jaminan pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp56.928.847 dan Rp47.720.711.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari estimasi nilai wajar aset tidak lancar lainnya.

21. Other Non-Current Assets (Continued)

Other assets represent advances of KRL rolling stocks related to purchase 10 KRL trainset, where each trainset consists of 4 facilities (a total of 40 facilities), namely numbers K311201 through K311240 related to financing of Jabodetabek Commuter Railways project. Based on the Ministry of Finance Letter No. S-378/MK.06/2006 dated September 4, 2006, the Ministry of Finance forwarded the loan from Kreditanstalt fur Wiederaufbau amounted of Rp36,600,000 to the Company. The loan is a two step loans of Foreign Loan Agreement dated January 19, 2005 between the Republic of Indonesia and Kreditanstalt fur Wiederaufbau amounting to EUR51,000 for financing the project of Jabodetabek Commuter Railways (Note 28).

Based on the Minutes of Handover of Work Results no PL.108/1/3/DJKA/2022 on October 3, 2022 have been hand over assets between Direktorat Jenderal Perkeretaapian as project implementer with the Company as operator. On December 31, 2022, other assets amounted to Rp30,555,196 has been reclassified into fixed assets and the Company recovers all allowance for impairment losses that have been previously formed.

Other Financial Assets represent security deposit as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp56,928,847 and Rp47,720,711, respectively

Management believes that the allowance for impairment is adequate to cover possible losses on fair value estimated of other non-current assets.

22. Utang Usaha

22. Trade Payables

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Utang Usaha			<i>Trade Payables</i>
Pihak Berelasi (Catatan 41)	880.714.681	473.426.130	<i>Related Parties (Note 41)</i>
Pihak Ketiga	1.578.171.487	1.192.602.860	<i>Third Parties</i>
Jumlah	<u>2.458.886.168</u>	<u>1.666.028.990</u>	Total

Berdasarkan mata uang:

By currencies:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Rupiah	2.361.525.615	1.566.240.261	<i>Rupiah</i>
Yen Jepang	86.831.596	28.401.914	<i>Japan Yen</i>
Euro	10.528.957	--	<i>Euro</i>
Dolar Amerika Serikat	--	71.386.815	<i>United States Dollar</i>
Jumlah	<u>2.458.886.168</u>	<u>1.666.028.990</u>	Total

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha.

There is no collateral pledged on trade payables.

23. Beban Akrual

23. Accruals

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Biaya Operasi Langsung	672.586.876	685.255.908	<i>Direct Operating Expenses</i>
Biaya Umum dan Administrasi	579.407.094	453.801.794	<i>General and Administratives Expenses</i>
Biaya Operasi Tidak Langsung	320.967.956	292.664.942	<i>Indirect Operating Expenses</i>
Jumlah	<u>1.572.961.926</u>	<u>1.431.722.644</u>	Total

Biaya operasi langsung yang masih harus dibayar merupakan biaya pemeliharaan sarana di lintas dan balai yasa, biaya pendukung operasi dan biaya pendukung angkutan dan lainnya.

Accrued direct operating expenses represents the costs of maintenance of rolling stocks in railroad and workshop, costs of operation supports and costs of transportation supports and others.

Biaya umum dan administrasi yang masih harus dibayar merupakan provisi atas restrukturisasi Jiwassraya, biaya bunga pinjaman, listrik, air, dan telepon.

Accrued general and administratives expenses represent provision of Jiwassraya restructurization, interest expenses of loan, electricity, water, and telephone.

Biaya operasi tidak langsung yang masih harus dibayar merupakan biaya perawatan dan operasi prasarana, serta sebagian biaya penggunaan prasarana milik Pemerintah (TAC) (Catatan 41), biaya keselamatan dan kesehatan kerja dan lainnya.

Accrued indirect operating expenses represent the costs of infrastructure operation and maintenance, and Track Access Charge (TAC) (Note 41), costs for safety and healthy work environment and others.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

24. Pendapatan Diterima di Muka

24. Unearned Revenue

	2022	2021	
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			Current Maturities
Non Angkutan	653.712.500	448.374.220	Non-Transportation
Angkutan Penumpang	445.814.913	358.775.110	Passenger Transportation
Angkutan Barang	45.112.038	25.631.626	Freight Transportation
Jumlah	1.144.639.451	832.780.956	Total
Jangka Panjang Lebih dari Satu Tahun			Long Term Maturity
Non Angkutan	837.174.293	776.100.393	Non-Transportation

Pendapatan diterima di muka atas pendapatan non angkutan merupakan penerimaan sewa properti di dalam dan di luar stasiun.

Unearned revenue of non-transportation represents revenue generated from property lease inside and outside of station area.

Pendapatan diterima di muka angkutan penumpang merupakan pendapatan atas jasa angkutan penumpang pengguna kereta api yang realisasi kedatangan pada periode berikutnya.

Unearned revenue of passenger transportation represents revenue generated from passenger transport railway services of which the arrive is realized in the following period.

Pendapatan diterima di muka angkutan barang merupakan pendapatan atas jasa angkutan barang yang terdiri dari angkutan peti kemas, batu bara, parcel, barang curah dan barang jenis lain yang realisasi keberangkatannya pada periode berikutnya.

Unearned revenue of freight transportation represents revenue generated from freight transport railway services consist of freight of containers, coal, parcel, bulk cargo and other types of goods of which the departure is realized in the following period.

25. Pinjaman Bank Jangka Pendek

25. Short-Term Bank Loans

	2022	2021	
Pihak Berelasi (Catatan 41)	760.000.000	709.962.173	Related Parties (Note 41)
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank HSBC Indonesia	1.000.000.000	1.000.000.000	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	--	950.000.000	PT Bank Central Asia Tbk
Sub Jumlah	1.000.000.000	1.950.000.000	Sub Total
Jumlah	1.760.000.000	2.659.962.173	Total

Informasi lain mengenai Pinjaman Bank Jangka Pendek pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Other Information about Short-Term Bank Loans as of December 31, 2022 as follow:

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Type	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date Of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest rate per annum	Agunan/ Collateral	Financial Covenant
Perusahaan/The Company					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Berulang/ Revolving	13 April 2023/ April 13, 2023	4,05% - 5,40%	-	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Berulang/ Revolving	14 Juni 2023/ June 14, 2023	4,00% - 5,40%	-	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Berulang/ Revolving	8 Maret 2024/ March 8, 2024	4,00% - 5,50%	-	Cash Flow Operation positif Debt to Equity Ratio Max 300% Ebitda to Interest min 1.5 x Cash Flow Operation positif

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

25. Pinjaman Bank Jangka Pendek (Lanjutan)

25. Short-Term Bank Loans (Continued)

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Type	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date Of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest rate per annum	Agunan/ Collateral	Financial Covenant
PT Bank HSBC Indonesia	Berulang/ Revolving	24 September 2023/ September 24, 2023	4,00% - 4,90%	-	-
PT Bank Central Asia Tbk	Berulang/ Revolving	1 Agustus 2023/ August 1, 2023	4,05% - 4,25%	-	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Reska Multi Usaha					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Berulang/ Revolving	8 September 2023/ September 8, 2023	7,75%	Fidusia Piutang/ Account receivable Fiduciary	Debt to Equity Ratio Max 200% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Berulang/ Revolving	16 Mei 2023/ May 16, 2023	8,00%	Fidusia Piutang/ Account receivable Fiduciary	Debt to Equity Ratio Max 300%
PT Bank Permata Tbk	Berulang/ Revolving	26 Mei 2023/ May 26, 2023	7,9% - 8,90%	Fidusia Piutang/ Account receivable Fiduciary	Debt to Equity Ratio Max 250% Current Ratio min 110% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT KA Properti Manajemen					
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Berulang/ Revolving	3 November 2023/ November 3, 2023	7,00%	Fidusia Piutang/ Account receivable Fiduciary	Debt to Equity Ratio Max 200% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
PT Bank Permata Tbk	Berulang/ Revolving	20 April 2023/ April 20, 2023	7,10%	Fidusia Piutang/ Account receivable Fiduciary	Debt to Equity Ratio Max 300%
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT KA Logistik					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Berulang/ Revolving	11 Juli 2022/ July 11, 2022	8,50%	Aset/ Assets	Debt to Equity Ratio Max 200% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x

Sampai dengan tanggal laporan, perjanjian pinjaman antara Perusahaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, masih dalam proses perpanjangan.

As of the reporting date, the Company's loan agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, is still in the process of renewal.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup telah memenuhi syarat dan *financial covenant* pinjaman.

As of December 31, 2022, the Group has complied with the terms and financial covenant of the loans.

Mutasi atas saldo fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Movement of the balance of this facilities are as follow:

2022					
Kreditur/ Creditor	Saldo Awal/ Beginning Balance	Pencairan/ Drawdown	Pembayaran/ Payment	Saldo Akhir/ Ending Balance	Beban Bunga/ Interest Expense
Perusahaan/ The Company					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	600.000.000	8.600.000.000	(8.700.000.000)	500.000.000	29.622.542
PT Bank Mandiri (Persero)	--	500.000.000	(500.000.000)	--	4.880.556
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	200.000.000	--	200.000.000	2.392.793
PT Bank HSBC Indonesia	1.000.000.000	3.350.000.000	(3.350.000.000)	1.000.000.000	38.612.667
PT Bank Central Asia Tbk	950.000.000	550.000.000	(1.500.000.000)	--	23.092.944
Subtotal	2.550.000.000	13.200.000.000	(14.050.000.000)	1.700.000.000	98.601.502

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

25. Pinjaman Bank Jangka Pendek (Lanjutan)

25. Short-Term Bank Loans (Continued)

2022					
Kreditur/ Creditor	Saldo Awal/ Beginning Balance	Pencairan/ Drawdown	Pembayaran/ Payment	Saldo Akhir/ Ending Balance	Beban Bunga/ Interest Expense
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Reska Multi Usaha					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	80.000.000	250.000.000	(270.000.000)	60.000.000	4.196.319
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	29.962.173	29.660.506	(59.622.679)	--	1.173.238
PT Bank Permata Tbk	--	204.900.000	(204.900.000)	--	2.162.953
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT KA Logistik					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	1.949.849	(1.949.849)	--	--
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT KA Properti Manajemen					
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	--	15.000.000	(15.000.000)	--	46.667
PT Bank Permata Tbk	--	5.000.000	(5.000.000)	--	4.931
Subtotal	109.962.173	506.510.355	(556.472.528)	60.000.000	7.584.108
Total	2.659.962.173	13.706.510.355	(14.606.472.528)	1.760.000.000	106.185.610

26. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

26. Other Current Liabilities

	2022	2021	
Titipan Pegawai	56.416.887	49.951.092	Employee Deposits
Uang Jaminan	5.538.030	2.275.634	Security Deposits
Lain-lain	36.583.373	42.084.218	Others
Jumlah	98.538.290	94.310.944	Total

Titipan pegawai merupakan kekurangan uang muka dinas yang belum dibayarkan kepada pegawai.

Employee deposits represent advances underpayment that have not been paid to employees.

Uang jaminan terdiri dari penerimaan uang jaminan yang berasal dari pelanggan atas jaminan pemasangan iklan di kereta dan jaminan tiket harian dari penumpang *commuter line*.

Security deposits consist of deposit received from customers for advertising in the train and daily ticket deposit from the commuter line passengers.

Utang lain-lain diantaranya merupakan utang atas penerimaan uang jaminan optimalisasi aset dari pelanggan sebagai jaminan atas aset yang disewa.

Others consist of deposit received from customers regarding optimization assets as warranty for rental assets.

27. Liabilitas Imbalan Kerja

27. Employee Benefits Liabilities

Grup mengakui liabilitas imbalan kerja untuk seluruh karyawan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 dan Perjanjian Kerja Bersama.

The Group recognizes employee benefits liabilities to eligible employees based on the provisions of Labour Law No.13/2003 and Collective Labour Agreement.

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

Total liabilitas imbalan kerja yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dihitung oleh aktuaris independen KKA Azwir Arifin dan Rekan.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program.

Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif lebih banyak pada instrumen properti dibandingkan dengan instrumen lainnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai aset program dapat terpulihkan.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program tersebut.

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menghitung beban dan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

	2022	2021	
Tingkat Diskonto	5,52% -7,44%	3,40-7,60%	Discount Rate
Tingkat Kenaikan Gaji per Tahun	7,00% - 9,00%	7,00% - 9,00%	Salary Increase Rate per Year
Usia Pensiun Normal	56 tahun/ years	56 tahun/ years	Normal Retirement Age
Tingkat Mortalitas	TMI IV/2019	TMI IV/2019	Mortality Rate
Tingkat Cacat per Tahun	1% - 10% dari Tingkat Kematian/	of Mortality Rate	Disability Rate per Year
Tingkat Pengunduran Diri:			Resignations Rate:
Umur Dibawah 20 - 29 Tahun	5,00% - 6,00%	5,00% - 6,00%	Age Under 20 - 29 Years Old
Umur Diatas 30 Tahun	Menurun secara linear hingga mencapai 0% saat usia pensiun normal/ Decrease linearly until it reaches 0% when the normal retirement age		Age Above 30 Years Old

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

The amounts of employee benefits liabilities presented in the consolidated statements of financial position and employee benefits expense recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the years ended on December 31, 2022 and 2021 were calculated by independent actuary KKA Azwir Arifin and Partners.

The defined benefit pension plan exposes the Group to actuarial risks such as investment risk, interest rate risk and salary risk.

Investment Risk

The present value of the defined benefit plan obligation is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit.

Currently the plan relatively has a more investment in property instrument compared to other instrument.

Management has believe the recoverable amount of plan assets.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Salary Risk

The present value of the defined benefit obligation is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The assumptions used to calculate employee benefits expenses and liabilities on December 31, 2022 and 2021 are as follows:

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

a) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Liabilitas imbalan kerja karyawan yang jatuh tempo dalam satu tahun sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Program Pensiun Eks PNS	154.922.880	164.250.543
Tantiem dan Bonus	807.820.177	421.883.341
Jumlah	<u>962.743.057</u>	<u>586.133.884</u>

a) Short-Term Employee Benefits Liabilities

Employee benefits liabilities which are due within one year as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pension Plan Ex-PNS	154.922.880	164.250.543
Bonuses and Tantiem	807.820.177	421.883.341
Total	<u>962.743.057</u>	<u>586.133.884</u>

b) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021*)</u>
Program Pensiun Eks PNS	1.098.808.740	1.167.401.051
Program Pensiun Eks Perum & Persero	4.037.598.131	4.337.122.922
Imbalan Kerja Lain	60.745.103	76.900.516
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	<u>5.197.151.974</u>	<u>5.581.424.489</u>

b) Long-Term Employee Benefits Liabilities

Long-term employee benefit liabilities after deducting the portion due in one year are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021*)</u>
Pension Plan Ex-PNS	1.098.808.740	1.167.401.051
Pension Plan Ex-Perum & Persero	4.037.598.131	4.337.122.922
Other Employment Benefits	60.745.103	76.900.516
Total Employee Benefit Liabilities	<u>5.197.151.974</u>	<u>5.581.424.489</u>

Total liabilitas imbalan kerja yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian yang timbul dari program pensiun imbalan pasti, jaminan kesehatan pensiun, pesangon dan imbalan kerja jangka panjang lainnya sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021*)</u>
Program Pensiun Eks PNS	1.253.731.620	1.331.651.594
Program Pensiun Eks Perum & Persero	4.037.598.131	4.337.122.922
Tantiem dan Bonus	807.820.177	421.883.341
Imbalan Kerja Lain	60.745.103	76.900.516
Jumlah	<u>6.159.895.031</u>	<u>6.167.558.373</u>

The amounts of employee benefits liabilities recorded in the consolidated statement of financial position arising from defined benefit pension plan, retirement healthcare, severance pay, and other long-term employee benefits are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021*)</u>
Pension Plan Ex-PNS	1.253.731.620	1.331.651.594
Pension Plan Ex-Perum & Persero	4.037.598.131	4.337.122.922
Bonuses and Tantiem	807.820.177	421.883.341
Other Employment Benefits	60.745.103	76.900.516
Total	<u>6.159.895.031</u>	<u>6.167.558.373</u>

Program Pensiun Imbalan Pasti

Karyawan Eks Pegawai Negeri Sipil (Eks-PNS)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Penyesuaian Pensiun Eks-PNS Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. 64 tanggal 29 November 2007, Eks-PNS tersebut berhak memperoleh pensiun pokok yang besarnya disesuaikan sama dengan pensiun pokok yang diterima oleh penerima pensiun PNS.

Defined Benefits Pension Plans

The Ex-Civil Service Employee (Ex-PNS)

In accordance with Government Regulation regarding the Adjustment of retirement of Ex-PNS of Department of Transportation at PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. 64 dated November 29, 2007, The Ex-Civil Service Employee (PNS) of Department of Transportation who work is entitled to receive the principle amount of pension of the PNS.

*) Disajikan Kembali, Catatan 54

*) As Restated, Note 54

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.02.2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks-PNS Departemen Perhubungan Perusahaan pada Pasal 3, sumber pendanaan pembayaran pensiun pegawai berasal dari: iuran pegawai, Perusahaan untuk kontribusi pendanaan bersama, *past service liability* yang dibayarkan oleh Perusahaan, hasil investasi dari akumulasi dana pensiun pegawai Perusahaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Based on the Regulation of Minister of Finance No. 105/PMK.02.2010 dated May 19, 2010 regarding Provision of Retirement Program Fund Adjustment for ex PNS Department of Transportation of the Company, in Article 3 stated that sources of financing for employee pension fund payment consists of employee contribution, the Company contribution, past service liability paid by the Company, results of investment and accumulation of employee pension funds of the Company, and Indonesian Government Budget (APBN).

Perusahaan diharuskan membayar *past service liability* sebesar Rp79.500.000 setiap tahun sampai dengan tahun 2024 kepada PT Taspen (Persero) yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pembayaran pensiun pegawai sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penyelenggaraan pembayaran pension karyawan Eks-PNS.

The Company is required to pay past service liability amounted to Rp79,500,000 for every year until 2024 to PT Taspen (Persero) whom is responsible for the payment of employee pension funds in accordance with the mechanism and law regulation for the implementation of ex PNS pension funds payment.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-927/MK.02/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Penetapan Pendanaan Bersama Pembayaran Manfaat Pensiun antara APBN dan Perusahaan menetapkan bahwa kontribusi pendanaan Perusahaan dan Pemerintah dalam Pendanaan Bersama masing-masing sebesar 22% dan 78%. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan tidak terdapat perubahan persentase Penetapan Pendanaan Bersama Pembayaran Manfaat Pensiun.

Based on Letter of the Minister of Finance No. S-927/MK.02/2012 dated December 26, 2012 concerning the Establishment of the Joint Funding Retirement Benefit Payments between the APBN and the Company states that the contribution is provided by joint funding the Company and Government of 22% and 78% respectively. The percentage has not change until the issuance of financial statement report.

Detail beban pensiun Eks-PNS yang diakui pada laba rugi konsolidasian sebagai berikut:

The details of benefit pension plan ex-PNS expense in the consolidated profit or loss are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Biaya Jasa Kini	4.282.372	6.040.360	Current Service Cost
Beban Bunga Bersih dari Liabilitas Manfaat Pasti	450.315.024	468.336.947	Net Interest on the Defined Benefit Obligation
Jumlah	454.597.396	474.377.307	Total
Bagian Pemerintah	(354.585.969)	(370.014.299)	Government Portion
Bagian Perusahaan	100.011.427	104.363.008	The Company Portion

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Liabilitas sehubungan dengan program pensiun imbalan pasti sebagai berikut:

Liability in respect of the defined benefits pension plan are as follows:

	2022	2021	
Nilai Kini Kewajiban	6.808.303.387	7.259.204.386	<i>Present Value of Obligation</i>
Nilai Wajar Aset			<i>Fair Value of Pension Fund</i>
Program Dana Pensiun	(1.109.523.297)	(1.206.242.595)	<i>Plan Assets</i>
Jumlah Liabilitas Bersih	5.698.780.090	6.052.961.791	<i>Net Liability</i>
Bagian Pemerintah	(4.445.048.470)	(4.721.310.197)	<i>Government Portion</i>
Bagian Perusahaan	1.253.731.620	1.331.651.594	<i>The Company Portion</i>
Dikurangi Bagian Jangka Pendek	154.922.880	164.250.543	<i>Less of Short-Term Portion</i>
Bagian Jangka Panjang	1.098.808.740	1.167.401.051	<i>Long-Term Portion</i>

Mutasi liabilitas sebagai berikut:

Movements in liabilities are as follows:

	2022	2021	
Awal Tahun	6.052.961.791	6.101.373.953	<i>Beginning of the Year</i>
Beban Laba Rugi	454.597.396	474.377.308	<i>Profit Loss Expenses</i>
Pembayaran Manfaat	(839.796.321)	(885.935.395)	<i>Benefits Payments</i>
Penghasilan Komprehensif Lain	31.017.224	363.145.925	<i>Other Comprehensive Income</i>
Akhir Tahun	5.698.780.090	6.052.961.791	<i>End of Year</i>
Bagian Pemerintah	(4.445.048.470)	(4.721.310.197)	<i>The Government Portion</i>
Bagian Perusahaan	1.253.731.620	1.331.651.594	<i>The Company Portion</i>
Dikurangi Bagian Jangka Pendek	154.922.880	164.250.543	<i>Less of Short-Term Portion</i>
Bagian Jangka Panjang	1.098.808.740	1.167.401.051	<i>Long-Term Portion</i>

Mutasi nilai wajar aset program dana pensiun sebagai berikut:

The movements in the fair value of pension plan assets are as follows:

	2022	2021	
Nilai Wajar Aset Program			<i>Fair Value of Pension Plan</i>
Dana Pensiun Awal Tahun	1.206.242.595	1.206.997.184	<i>Assets at Beginning of the Year</i>
Pengembalian Aset			<i>Expected Return on</i>
Dana yang Diharapkan	91.071.316	94.507.880	<i>Plan Assets</i>
Imbal Hasil Aset Program			<i>Return on Plan Assets</i>
Non Bunga Neto	(187.790.614)	(95.262.469)	<i>Non Interest - Net</i>
Akhir Tahun	1.109.523.297	1.206.242.595	<i>End of Year</i>
Bagian Pemerintah	(865.428.172)	(940.869.224)	<i>The Government Portion</i>
Bagian Perusahaan	244.095.125	265.373.371	<i>The Company Portion</i>

Mutasi penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The movements of other comprehensive income are as follows:

	2022	2021	
Saldo Awal	572.452.750	209.306.825	<i>Beginning Balance</i>
Tahun Berjalan	31.017.222	363.145.925	<i>Current Year</i>
Saldo Akhir	603.469.972	572.452.750	<i>Ending Balance</i>
Bagian Pemerintah	(470.706.578)	(446.513.145)	<i>The Government Portion</i>
Bagian Perusahaan	132.763.394	125.939.605	<i>The Company Portion</i>

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Komposisi penempatan investasi yang dilakukan atas aset program adalah sebagai berikut:

The composition of investment placement on plan asset are as follows:

	2022	2021	
	%	%	
Deposito	39,91	47,76	Time Deposits
Surat Utang Negara	38,21	30,82	Government Securities
Sukuk	21,88	21,42	Sukuk
Jumlah	100,00	100,00	Total

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

A quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of December 31, 2022 and 2021 as follows:

	2022	2021	
Analisa Sensitivitas			Sensitivity Analysis
Nilai Kini Kewajiban			Present Value of Defined
Imbalan Pasti			Benefit Obligation
Akhir Periode			End of Period
Tingkat Diskonto + 1%	1.804.026.574	1.486.902.562	Rate + 1%
Tingkat Diskonto - 1%	1.836.093.002	1.722.835.193	Rate - 1%
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	1.829.053.197	1.597.450.303	Salary Increase + 1%
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	1.810.697.372	1.596.604.710	Salary Increase - 1%

Program Pensiun Eks Perum dan Persero

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan Eks-Perum yang direkrut sebelum Agustus 2009. Manfaat pensiun dihitung berdasarkan TDPIP tahun 2012 dengan ketentuan perhitungan tanpa kenaikan Gaji Dasar Program yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Berdasarkan Perjanjian No. 161/HK/UM/2003 dan 099.SJ.U.0903 serta perjanjian No. 162/HK/UM/2003 dan No. 100.SJ.U.0903 tanggal 28 September 2003 tentang Pengelolaan program Anuitas Pensiun Bagi Pensiunan dan Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua Bagi Pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero). Sedangkan untuk karyawan Persero yang direkrut setelah Agustus 2009 diberikan pesangon sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003.

Pension Plan of Ex-Perum and Persero

The Company organize defined benefit pension plan for employees of ex-Perum which hired before August 2009. The pension benefits are calculated based TDPIP in 2012 with the provisions of zero increment of Basic Salary Program managed by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) based on Agreement No. 161/HK/UM/2003, and 099.SJ.U.0903 and 162/HK/UM/2003, and No. 100.SJ.U.0903 dated September 28, 2003 on the program management of the Annuity Pension Plan for Retirement and old Age Protection Program for Employees of PT Kereta Api Indonesia (Persero). Persero's employees hired after August 2009 is granted severance pay in accordance with the Employment No. 13 of 2003.

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Rincian beban pensiun karyawan Eks-Perum dan Persero yang diakui pada laba rugi sebagai berikut:

The details of the benefit pension ex-Perum and Persero employees expenses in profit or loss are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Biaya Jasa Kini	279.369.254	283.962.898	Current Service Cost
Beban Bunga Bersih dari Liabilitas Manfaat Pasti	299.946.436	278.234.197	Net Interest on the Net Defined Benefit Liability
Biaya Jasa Lalu	581.699.330	--	Past Service Cost
Penyelesaian Program atas Aset	--	293.135.099	Program Settlement on Assets
Jumlah	<u>1.161.015.020</u>	<u>855.332.194</u>	Total

Liabilitas sehubungan dengan program pensiun imbalan pasti sebagai berikut:

Liability in respect of the defined benefits pension plan are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021*)</u>	
Nilai Kini Kewajiban	6.332.375.492	5.706.353.933	Present Value of Obligation
Nilai Wajar Aset Program Dana Pensiun	(2.294.777.361)	(1.369.231.011)	Fair Value of Pension Fund Plan Assets
Jumlah Liabilitas Bersih	<u>4.037.598.131</u>	<u>4.337.122.922</u>	Net Liability

Mutasi liabilitas sebagai berikut:

Movements in liabilities are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021*)</u>	
Awal Tahun	4.337.122.922	3.596.695.039	Beginning of the Year
Beban Laba Rugi	1.161.015.020	855.332.194	Profit Loss Expenses
Penghasilan Komprehensif Lain	(774.472.696)	74.631.048	Other Comprehensive Income
Iuran Dibayar Perusahaan	(686.067.115)	(189.535.359)	Contribution Paid by the Company
Akhir Tahun	4.037.598.131	4.337.122.922	End of Year
Dikurangi Bagian Jangka Pendek	--	--	Less of Short-Term Portion
Bagian Jangka Panjang	<u>4.037.598.131</u>	<u>4.337.122.922</u>	The Long-Term Portion

Mutasi nilai wajar aset program dana pensiun sebagai berikut:

The movements in the fair value of pension plan assets are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Nilai Wajar Aset Program Dana Pensiun			Fair Value of Pension Plan Assets at
Awal Tahun	1.369.231.011	1.622.783.355	Beginning of the Year
Iuran Dibayar Perusahaan	686.067.114	189.535.359	Contribution Paid by the Company
Manfaat Dibayar Pihak Ketiga	(378.799.695)	(279.889.205)	Benefit Paid by Third Party
Pendapatan Bunga	51.777.401	56.162.789	Interest Income
Penyelesaian Program	--	(293.135.099)	Program Settlement
Imbal Hasil Aset Program Non Bunga Neto	566.501.530	73.773.812	Return on Plan Assets Non Interest - Net
Akhir Tahun	<u>2.294.777.361</u>	<u>1.369.231.011</u>	End of Year

*) Disajikan Kembali, Catatan 54

*) As Restated, Note 54

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Mutasi penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The movements of other comprehensive income are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021*)</u>	
Saldo Awal	1.945.277.658	1.870.646.610	Beginning Balance
Tahun Berjalan	(774.472.696)	74.631.048	Current Year
Saldo Akhir	<u>1.170.804.962</u>	<u>1.945.277.658</u>	Ending Balance

Komposisi penempatan investasi yang dilakukan atas aset program adalah sebagai berikut:

The composition of investment placement on plan asset program are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	%	%	
Saham	83,07	20,52	Shares
Properti	7,30	51,74	Property
Obligasi	5,22	17,89	Bonds
Pasar Uang	4,39	3,93	Money Market
Lain - lain	0,02	5,92	Others
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	Total

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

A quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of December 31, 2022 and 2021 as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Analisa Sensitivitas			Sensitivity Analysis
Nilai Kini Kewajiban			Present Value of Defined
Imbalan Pasti			Benefit Obligation
Akhir Periode			End of Period
Tingkat Diskonto + 1%	5.426.003.218	5.074.067.790	Rate + 1%
Tingkat Diskonto - 1%	7.468.412.583	7.038.284.410	Rate - 1%
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	6.801.813.768	6.435.074.948	Salary Increase + 1%
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	5.910.921.140	5.510.950.595	Salary Increase - 1%

*) Disajikan Kembali, Catatan 54

*) As Restated, Note 54

Imbalan Kerja Lainnya

Perusahaan juga memberikan imbalan kerja lainnya berupa uang pesangon, penghargaan masa bakti, tunjangan masa persiapan pensiun dan tunjangan cuti besar kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Imbalan program ini tidak didanai dan ditentukan berdasarkan penghasilan dan masa kerja karyawan.

Other Employment Benefits

The Group also provides other defined employment benefit plans such as severance pay, long-service award, pension preparation year and long leave allowance for their eligible employees based on the Group's policies. These other post employment benefits are unfunded and computed based on the salaries and service years of the employees.

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Detail beban imbalan kerja lainnya yang diakui pada laba rugi konsolidasian sebagai berikut:

The details of the other employment benefits expenses recognized to the consolidated statement of profit or loss are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Biaya Jasa Kini	(15.800.366)	16.066.176	Current Service Cost
Beban Bunga Bersih dari Liabilitas Manfaat Pasti	3.072.270	4.611.780	Net Interest on the Defined Benefit Liability
Biaya Jasa Lalu	(4.094.228)	38.303.985	Past Service Cost
Pengakuan Keuntungan Aktuari	--	(277.583)	Recognition on Actuarial Gain
Jumlah	<u>(16.822.324)</u>	<u>58.704.358</u>	Total

Liabilitas sehubungan dengan imbalan kerja lain sebagai berikut:

Liabilities in respect of other employment benefits are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Nilai Kini Kewajiban	101.117.886	121.095.552	Present Value of Obligation
Nilai Wajar Aset Program Dana Pensiun	(62.234.485)	(45.609.101)	Fair Value of Pension Fund Plan Assets
Surplus	<u>38.883.401</u>	<u>75.486.451</u>	Surplus
Pembatasan Aset	21.861.702	1.414.065	Restricted Assets
Jumlah Liabilitas Bersih	<u>60.745.103</u>	<u>76.900.516</u>	Net Liability

Mutasi liabilitas sebagai berikut:

Movements in liabilities are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Awal Tahun	76.900.516	35.787.410	Beginning of the Year
Beban Laba Rugi	(16.822.324)	58.704.358	Profit Loss Expenses
Pembayaran Manfaat	(3.883.812)	(3.528.907)	Benefits Payments
Penghasilan Komprehensif Lain	20.435.429	2.430.550	Other Comprehensive Income
Iuran Dibayar Perusahaan	(15.884.706)	(16.492.895)	Contribution Paid by the Company
Akhir Tahun	<u>60.745.103</u>	<u>76.900.516</u>	End of Year

Mutasi nilai wajar aset program liabilitas imbalan kerja lainnya sebagai berikut:

The movements in the fair value of other employment benefits plan assets are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Nilai Wajar Aset Program Dana Pensiun			Fair Value of Pension Plan Assets at
Awal Tahun	45.609.101	29.817.013	Beginning of the Year
Pengembalian Aset Dana yang Diharapkan	2.484.660	2.176.610	Expected Return on Plan Assets
Imbalan Hasil atas Aset Program yang tidak Termasuk dalam Bunga Neto	(1.338.719)	(2.333.755)	Return on Plan Assets Plan Assets, which are not Included in Net Interest
Iuran Dibayar Perusahaan	15.884.706	16.492.895	Contribution Paid by the Company
Iuran Dibayar Pihak Ketiga	(405.263)	(543.662)	Contribution Paid by Third Party
Akhir Tahun	<u>62.234.485</u>	<u>45.609.101</u>	End of Year

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Mutasi penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The movements of other comprehensive income are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo Awal	3.603.010	1.172.460	Beginning Balance
Tahun Berjalan	20.435.429	2.430.550	Current Year
Saldo Akhir	<u>24.038.439</u>	<u>3.603.010</u>	Ending Balance

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

A quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of December 31, 2022 and 2021 as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Analisa Sensitivitas			Sensitivity Analysis
Nilai Kini Kewajiban			Present Value of Defined
Imbalan Pasti			Benefit Obligation
Akhir Periode			End of Period
Tingkat Diskonto + 1%	89.675.423	104.726.895	Rate + 1%
Tingkat Diskonto - 1%	111.500.045	138.004.535	Rate - 1%
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	111.059.962	137.406.419	Salary Increase + 1%
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	89.856.188	104.922.443	Salary Increase - 1%

28. Pinjaman Program PEN

28. PEN Program Loan

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pokok Pinjaman (Catatan 41)	3.500.000.000	3.500.000.000	Principal of Loan (Note 41)
Penyesuaian Nilai Wajar	(572.443.093)	(590.105.644)	Fair Value Adjustment
Nilai Wajar Pinjaman	2.927.556.907	2.909.894.356	Fair Value of Loan
Pendapatan Hibah Ditangguhkan	572.443.093	590.105.644	Deferred Grant Income
Jumlah	<u>3.500.000.000</u>	<u>3.500.000.000</u>	Total
Jumlah Bagian Pinjaman			Total Portion of
Program PEN yang Jatuh			PEN Program
Tempo dalam Satu Tahun	<u>437.500.000</u>	<u>--</u>	Maturing within One Year
Bagian Jangka Panjang	<u>3.062.500.000</u>	<u>3.500.000.000</u>	Long Term Loans Portion

Perusahaan menandatangani perjanjian pemberian dana investasi Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam bentuk pinjaman dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional dengan Akta No. 17 tanggal 30 November 2020 yang di hadapan Pratiwi Handayani, Notaris di Jakarta. Keputusan Menteri Keuangan No. 531/KMK.06/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai Pelaksana Investasi Untuk Melaksanakan Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional serta Peraturan Menteri Keuangan No.118/PMK.06/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Investasi Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN.

The Company entered into an agreement with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) by Deed No. 17 dated November 30, 2020 by Notary in Jakarta regarding Providing Investment Fund of the Government of Republic Indonesia in the form of loan for the National Economic Recovery Program. Minister of Finance Decree No.531/KMK.06/2020 dated November 20, 2020 concerning the Assignment to the Limited Liability Company (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur as an Investment executor to Implement Government Investment in the order of the National Economic Recovery Program and Regulation of the Minister of Finance No.118/PMK.06/2020 dated September 2, 2020, concerning Investment in the order of the National Economic Recovery Program, hereinafter referred to as the PEN Program.

28. Pinjaman Program PEN (Lanjutan)

28. PEN Program Loan (Continued)

Syarat dan ketentuan dalam perjanjian sebagai berikut:

Terms and conditions of the agreement are as follows:

Pihak yang Berkontrak : - Pihak pertama: Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Pelaksana Investasi yang merupakan kuasa untuk dan atas nama Kementerian Republik Indonesia yang merupakan pemberi investasi dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional.
- Pihak Kedua: Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Penerima Investasi

- *First party: President Director of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) as Investor Implementer who is the power for and on behalf of the Ministry of the Republic of Indonesia which is the investor for national economic recovery program.*
- *Second party: President Director of PT Kereta Api Indonesia (Persero) as Investment Recipient.*

Tujuan kredit : Untuk mendukung likuiditas dan solvabilitas Perusahaan, khususnya digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional, diantaranya yaitu:
- Pembayaran kembali fasilitas kredit modal kerja yang telah ditarik oleh Perusahaan selama masa pandemi Covid-19.
- Pembiayaan kebutuhan modal kerja Perusahaan yang meliputi; bahan bakar, pegawai, perawatan sarana dan prasarana dan beban operasional Perusahaan.

To support the liquidity and solvency of the Company, it is used especially to operating expenditure, including:

- *Repayment of working capital credit facilities that were withdrawn by the Company during the Covid-19 pandemic.*
- *Financing the working capital needs of the Company, which includes; fuel, personnel, maintenance of facilities and infrastructure and operational expenses for the Company.*

Limit Kredit Rp3.500.000.000

Rp3,500,000,000

Credit Limit

Jatuh Tempo : 31 Oktober 2030

October 31, 2030

Due Date

Tingkat Bunga : - Periode pinjaman s.d 31 Desember 2027 sebesar Periode Repo rate dikurangi 100Bps per tahun;

- *Loan period up to December 31, 2027 is the Repo rate less 100Bps per annum;*

Interest Rate

- Periode pinjaman sejak 1 Januari 2028 hingga jatuh tempo sebesar Reference Rate setara SUN tenor 3 tahun dikurangi 100Bps per tahun.

- *Loan period starts January 1, 2028 until due date at the Reference Rate equivalent to the 3 years tenor SUN less 100Bps per annum.*

28. Pinjaman Program PEN (Lanjutan)

28. PEN Program Loan (Continued)

Pembayaran Pinjaman	: -	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan wajib membayar angsuran pada setiap tanggal pembayaran angsuran kredit; - Pembayaran pinjaman dilakukan ke rekening pembayaran pada pukul 11.00 WIB setiap tanggal pembayaran angsuran dalam mata uang Rupiah; - Jika perusahaan tidak memenuhi <i>Key Achievement Indicator</i> keuangan pembayaran pokok, maka debitur tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran dalam jadwal; - Perusahaan setuju dan mengakui kreditur memiliki hak opsi untuk meminta seluruh atau sebagian pinjaman dibayarkan dengan konversi menjadi saham baru (opsi konversi). 	-	<ul style="list-style-type: none"> <i>The Company is required to pay installments on each credit installment payment date;</i> <i>Loan payments are made to the payment account at 11.00 AM on each installment payment date in Rupiah;</i> <i>If the company does not meet the Key Achievement Indicator for principal installment payments on schedule;</i> <i>The Company agrees and acknowledges that the creditor has the option to request that all or part of the loan be paid by conversion to new shares (conversion option).</i> 	:	<ul style="list-style-type: none"> <i>Loan Payment</i>
Pernyataan dan Jaminan	: -	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan tunduk pada hukum yang berlaku dan setiap harta tidak mendapat kekebalan hukum; - Semua dokumen dan data keterangan yang diserahkan kepada kreditur harus lengkap, tepat, benar dan akurat; - Semua saham yang dikeluarkan oleh perusahaan telah disetor penuh oleh para pemegang sahamnya dan sedang tidak dijaminkan; - Perusahaan bertanggung jawab senantiasa menjaga dan memelihara usaha. 	-	<ul style="list-style-type: none"> <i>The Company is subject to the applicable law and every asset does not receive legal immunity;</i> <i>All documents and information submitted to creditors must be complete, precise, correct, and accurate;</i> <i>All shares issued by the company have been fully paid-up by the shareholders and are not being pledged as collateral;</i> <i>The Company is responsible to keep and maintaining the business.</i> 	:	<ul style="list-style-type: none"> <i>Representations and Warranties</i>
Batasan Penggunaan Dana	: -	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Public Service Obligation (PSO);</i> - <i>Infrastructure Maintenance and Operation (IMO);</i> - Kereta perintis yang dijalankan oleh KAI. 	-	<ul style="list-style-type: none"> <i>Public Service Obligation (PSO);</i> <i>Infrastructure Maintenance and Operation (IMO);</i> <i>Train in Trailblazer Route run by KAI.</i> 	:	<ul style="list-style-type: none"> <i>Limit of the use of Funds</i>

28. Pinjaman Program PEN (Lanjutan)

28. PEN Program Loan (Continued)

Ketentuan Bunga	: - Perusahaan wajib membayar bunga atas Pinjaman sebesar Suku Bunga pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga; - Perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar bunga atas Pinjaman pada Tanggal Pembayaran Bunga terkait, dalam hal, pada saat Tanggal Pembayaran Bunga tersebut Perusahaan tidak memenuhi Indikator Keuangan Pembayaran Bunga.	- <i>The Company is required to pay interest on the Loan at the Interest Rate on each Interest Payment Date;</i>	: <i>Interest Provision</i>
Opsi Konversi	: - Pembayaran Pinjaman Melalui Konversi Pinjaman Menjadi Saham; - Perusahaan setuju dan mengakui bahwa Pemberi Investasi memiliki hak opsi untuk meminta seluruh atau sebagian pinjaman dibayarkan dengan cara mengkonversi pinjaman tersebut menjadi saham-saham baru dalam permodalan Perusahaan ("Opsi Konversi") baik pada saat Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman, setelah terjadinya Kejadian Kelalaian, atau pada waktu lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pemberi Investasi. Untuk menghindari keraguan, konversi hanya dapat dilakukan terhadap pokok pinjaman dan tidak terhadap bunga yang masih terhutang atas pinjaman; - Perusahaan juga dapat mengajukan usulan kepada Pemberi Investasi agar Pinjaman dikonversi menjadi Saham Hasil Konversi dengan ketentuan hak atau diskresi untuk melaksanakan Opsi Konversi tetap berada pada Pemberi Investasi;	- <i>Loan Payment through Conversion of Loans into Shares;</i> - <i>The Company agrees and acknowledges that the Investor has the option right to ask all or part of the loan to be paid by converting the loan into new shares in the Company's capital ("Conversion Option") both on the Loan Maturity Date, after the occurrence of Negligence, or at other times as determined by the Investor. For the avoidance of doubt, conversion can only be made to the principal of the loan and not to the interest still payable on the loan;</i> - <i>The Company may also submit a proposal to the Investor so that the Loan is converted into Convertible Shares provided that the right or discretion to exercise the Conversion Option remains with the Investor;</i>	: <i>Conversion Option</i>

28. Pinjaman Program PEN (Lanjutan)

28. PEN Program Loan (Continued)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pengajuan usulan pelaksanaan Opsi Konversi, Perusahaan wajib menyampaikan usulan pelaksanaan Opsi Konversi melalui surat tertulis dalam bentuk Usulan Pelaksanaan Opsi Konversi; - Usulan Pelaksanaan Opsi Konversi disampaikan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman kepada Pemberi Investasi disertai dengan alasan dan dokumen pendukung diusulkannya konversi atas Pinjaman. | <ul style="list-style-type: none"> - For the submission of a proposal for the implementation of the Conversion Option, the The Company is obliged to submit a proposal for the implementation of the Conversion Option by means of a written letter in the form as Proposed Implementation of the Conversion Option; - The proposal to implement the Conversion Option is submitted not later than 2 (two) years before the Loan Maturity Date to the Investor, along with the reasons and supporting documents for the proposed conversion of the Loan. |
| <p>Denda :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak akan ada bunga atau denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman; - Pembayaran Pokok pinjaman dapat melalui konversi pinjaman "Opsi Konversi" menjadi Saham, hanya untuk pokok yang terhutang saja. Penyampaian untuk opsi konversi menjadi saham dapat disampaikan paling lambat 2 tahun sebelum jatuh tempo. | <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - There will be no interest or penalty for late payment of loan installments; - Payment of loan principal can be done by converting the loan "Conversion Option" into shares, only for the principal outstanding. Submission of the conversion option to shares can be submitted no later than 2 years before maturity. |

Mutasi atas liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Movement of the liability are as follow:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo awal	3.500.000.000	3.500.000.000	<i>Beginning Balance</i>
Pencairan Tahun Berjalan	--	--	<i>Drawdown for Current Year</i>
Pembayaran Tahun Berjalan	--	--	<i>Payment for Current Year</i>
Saldo Akhir	<u>3.500.000.000</u>	<u>3.500.000.000</u>	<i>Ending Balance</i>
Pembayaran Bunga	<u>88.715.278</u>	<u>14.583.333</u>	<i>Interest Expense Payment</i>

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

29. Pinjaman Jangka Panjang

29. Long-Term Loans

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pihak Berelasi (Catatan 41)	11.855.551.877	10.779.296.195	Related Parties (Note 41)
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Central Asia Tbk	3.187.005.145	2.939.959.037	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.020.370.749	1.606.521.251	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia	465.046.975	369.787.500	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank DKI	465.046.975	369.787.500	PT Bank DKI
PT Bank Mega Tbk	465.046.975	369.787.500	PT Bank Mega Tbk
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	286.151.843	--	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Export-Import Bank of United States	277.446.558	409.939.099	Export-Import Bank of United States
PT Bank Shinhan	232.523.488	184.893.750	PT Bank Shinhan
PT BPD Sumatera Utara	225.399.833	36.978.750	PT BPD Sumatera Utara
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd	--	369.787.500	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd
Sub Jumlah	7.624.038.541	6.657.441.887	Sub Total
Jumlah	19.479.590.418	17.436.738.082	Total
Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			Current Portion of Long-Term Loans Maturing
Pihak Berelasi (Catatan 41)	805.012.927	609.910.535	Related Parties (Note 41)
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Central Asia Tbk	217.450.982	166.803.390	PT Bank Central Asia Tbk
Export-Import Bank of United States	174.494.692	158.277.645	Export-Import Bank of United States
Jumlah Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	1.196.958.601	934.991.570	Total Current Portion of Long Term Loans
Bagian Jangka Panjang	18.282.631.817	16.501.746.512	Long Term Loans Portion
Berdasarkan mata uang:			Based on currencies:
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Berdasarkan Mata Uang:			By Currencies:
Rupiah	19.202.143.860	17.026.798.983	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	277.446.558	409.939.099	United States Dollar
Jumlah Pinjaman Jangka Panjang	19.479.590.418	17.436.738.082	Total Long Term Loans Portion
Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			Current Portion of Long-Term Loans Maturing
Rupiah	1.022.463.909	776.713.925	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	174.494.692	158.277.645	United States Dollar
Jumlah Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	1.196.958.601	934.991.570	Total Current Portion of Long Term Loans
Rupiah	18.179.679.951	16.250.085.058	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	102.951.866	251.661.454	United States Dollar
Bagian Jangka Panjang	18.282.631.817	16.501.746.512	Long-Term Loans Portion

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

29. Pinjaman Jangka Panjang (Lanjutan)

29. Long-Term Loans (Continued)

Informasi lain mengenai Pinjaman Bank Jangka Panjang pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Other Information about Long-Term Bank Loans as of December 31, 2022 as follow:

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Name	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date Of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest rate per annum	Agunan/ Collateral	Financial Covenant
Perusahaan/The Company					
Pinjaman Sindikasi Proyek Pengadaan 144 unit lokomotif, 1.200 unit gerbong (KKBW) dan 1.200 unit gerbong (PPCW) Syndicated Loan Project Procurement of 144 units of locomotives, 1,200 units of carriages (KKBW) and 1,200 units of carriages (PPCW)					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	Tahap I : 25 Juli 2025/ July 25, 2025 Tahap II : 8 Agustus 2026/ August 8, 2026	6,05% - 11,12%	Asset sarana yang dibiayai / Funded facility assets	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	Tahap I : 25 Juli 2025/ July 25, 2025 Tahap II : 8 Agustus 2026/ August 8, 2026	6,05% - 11,12%	Asset sarana yang dibiayai / Funded facility assets	Cash Flow Operation positif Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
Proyek Pengadaan 10 Set KRL Komuter Jabodetabek/ Procurement Project for 10 Sets of Jabodetabek Commuter KRL					
Kementerian Keuangan	Term Loan II Berulang/ Revolving	01 Desember 2047/ December 01, 2047	7,50% - 8,38%	-	-
Proyek Pengadaan 600 KKBW, 600 PPCW dan 1.213 KKBW/ Procurement Project of 600 KKBW, 600 PPCW and 1,213 KKBW					
PT Bank Central Asia Tbk	Term Loan II Berulang/ Revolving	Tahap I & II : 25 September 2026/ September 25, 2026 Tahap III : 4 Maret 2028/ March 4, 2028	6,00% - 10,26%	Asset sarana yang dibiayai / Funded facility assets	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
Pinjaman Sindikasi Commuterline (Jabodetabek) Commuterline Syndicated Loan (Jabodetabek)					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	Tahap I : 10 Mei 2028/ May 10, 2028 Tahap II : 25 Juni 2029/ Juny 25, 2029	3,00% - 11,66%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan / Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	Tahap I : 10 Mei 2028/ May 10, 2028 Tahap II : 25 Juni 2029/ Juny 25, 2029	3,00% - 11,66%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan / Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	Tahap I : 10 Mei 2028/ May 10, 2028 Tahap II : 25 Juni 2029/ Juny 25, 2029	3,00% - 11,66%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan / Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Central Asia Tbk	Sindikasi/ Syndicated	Tahap I : 10 Mei 2028/ May 10, 2028 Tahap II : 25 Juni 2029/ Juny 25, 2029	3,00% - 11,66%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan / Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
Proyek Pengadaan 50 Lokomotif General Electric/ Procurement Project for 50 General Electric Locomotives					
Export-Import Bank of United States	Term Loan II Berulang/ Revolving	Tarikan I : 15 Maret 2024/ May 15, 2024 Tarikan II : 15 Juni 2024/ Juny 15, 2024 Tarikan II : 15 Maret 2025/ May 15, 2025	2,54%	Asset sarana yang dibiayai / Funded facility assets	-
Perjanjian Sindikasi Bandara Soekarno Hatta (Basoetta) Soekarno Hatta Airport (Basoetta) Syndication Agreement					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	31 Oktober 2030/ October 31, 2030	6,75% - 11,69%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan / Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	31 Oktober 2030/ October 31, 2030	6,75% - 11,69%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan / Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	31 Oktober 2030/ October 31, 2030	6,75% - 11,69%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan / Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Central Asia Tbk	Sindikasi/ Syndicated	31 Oktober 2030/ October 31, 2030	6,75% - 11,69%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan / Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

29. Pinjaman Jangka Panjang (Lanjutan)

29. Long-Term Loans (Continued)

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Name	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date Of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest rate per annum	Agunan/ Collateral	Financial Covenant
Perjanjian Pinjaman Sindikasi Proyek Light Rail Transit (LRT)/ Light Rail Transit (LRT) Project Syndicated Loan Agreement					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Central Asia Tbk	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Shinhan Indonesia	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank KEB Hana Indonesia	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank DKI	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Mega Tbk	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT BPD Sumatera Utara	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

29. Pinjaman Jangka Panjang (Lanjutan)

29. Long-Term Loans (Continued)

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Name	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date Of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest rate per annum	Agunan/ Collateral	Financial Covenant
Perusahaan/The Company					
Pinjaman Transaksi Khusus/ Special Transaction Loans					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	26 Desember 2026/ December 26, 2026	7,25% - 10,15%	Negative Pledge	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor	Sindikasi/ Syndicated	26 Desember 2026/ December 26, 2026	7,25% - 10,15%	Negative Pledge	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Sindikasi/ Syndicated	26 Desember 2026/ December 26, 2026	7,25% - 10,15%	Negative Pledge	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Kereta Commuter Indonesia					
Proyek Pengembangan Commuterline Jabodetabek/ Jabodetabek Commuterline Development Project					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	19 Januari 2031/ January 19, 2031	4,00% - 7,00%	-Fiduciary of movable assets - Fiduciary on bills - Fiduciary over bank accounts	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	19 Januari 2031/ January 19, 2031	4,00% - 7,00%	-Fiduciary of movable assets - Fiduciary on bills - Fiduciary over bank accounts	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	19 Januari 2031/ January 19, 2031	4,00% - 7,00%	-Fiduciary of movable assets - Fiduciary on bills - Fiduciary over bank accounts	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100%
PT Bank Central Asia Tbk	Sindikasi/ Syndicated	19 Januari 2031/ January 19, 2031	4,00% - 7,00%	-Fiduciary of movable assets - Fiduciary on bills - Fiduciary over bank accounts	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100%
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Kereta Commuter Indonesia					
Proyek Pengadaan 10 Unit Rangkaian Kereta/ Procurement Project for 10 Train Series Units					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	25 Desember 2027/ December 25, 2027	6,75%	Sarana KRL/ rolling stock KRL	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	25 Desember 2027/ December 25, 2027	6,75%	Sarana KRL/ rolling stock KRL	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	25 Desember 2027/ December 25, 2027	6,75%	Sarana KRL/ rolling stock KRL	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100%
PT Bank Central Asia Tbk	Sindikasi/ Syndicated	25 Desember 2027/ December 25, 2027	6,75%	Sarana KRL/ rolling stock KRL	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100%
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT KA Properti Manajemen					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Tidak Berulang / Non Revolving	9 Maret 2027 / March 9, 2027	7,51%	- Tagihan dan pendapatan dari proyek AFC yang akan diikat fidusia/ Bills and revenues from the AFC project that will pay the - Omzet kontrak yang akan diikat cession/ Contract turnover that will pay cession - Rekening penerimaan kontrak yang akan diikat dengan pengikatan gadai/ Account acceptance of the contract to be taken with the binding of the pledge	Debt to Equity Ratio Max 2.00 Debt Service Coverage Ratio min 1.25

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

29. Pinjaman Jangka Panjang (Lanjutan)

29. Long-Term Loans (Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup telah memenuhi syarat dan *financial covenant* pinjaman.

As of December 31, 2022, the Group has complied with the terms and *financial covenant* of the loans.

Mutasi atas saldo fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Movement of the balance of this facilities are as follow:

	2022					
Kreditur/ Creditor	Saldo Awal/ Beginning Balance	Pencairan/ Drawdown	Pembayaran/ Payment	Non Kas/ Non-Cash	Saldo Akhir/ Ending Balance	Beban Bunga/ Interest Expense
Perusahaan/The Company						
Pinjaman Sindikasi Proyek Pengadaan 144 unit lokomotif, 1.200 unit gerbong (KKBW) dan 1.200 unit gerbong (PPCW)						
<i>Procurement of 144 units of locomotive, 1,200 units of the wagon (KKBW) and 1,200 units of wagon (PPCW)</i>						
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	727.577.481	--	(142.050.000)	--	585.527.481	42.173.103
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	727.577.481	--	(142.050.000)	--	585.527.481	42.173.103
Proyek Pengadaan 10 Set KRL Commuter Jabodetabek/						
<i>Procurement of 10 set KRL Jabodetabek Commuter Railways Project</i>						
Kementerian Keuangan	25.462.663	--	(1.018.507)	--	24.444.156	1.828.925
Proyek Pengadaan 600 KKBW, 600 PPCW dan 1.213 KKBW/						
<i>Procurement of 600 KKBW, 600 PPCW and 1,213 PPCW Project</i>						
PT Bank Central Asia Tbk	698.502.071	--	(100.432.685)	--	598.069.386	41.798.323
Pinjaman Sindikasi Commuterline (Jabodetabek)/						
<i>Syndicated Loan Agreement of Commuterline (Jabodetabek)</i>						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	133.070.254	--	(14.991.878)	--	118.078.376	9.059.480
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	133.070.254	--	(14.991.878)	--	118.078.376	9.059.480
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	132.386.023	--	(14.914.792)	--	117.471.231	9.012.897
PT Bank Central Asia Tbk	133.070.254	--	(14.991.878)	--	118.078.376	9.059.480
Proyek Pengadaan 50 Lokomotif General Electric/						
<i>Procurement of 50 General Electric Locomotives Piroject</i>						
Export-Import Bank of United States	409.939.099	--	(164.791.663)	32.299.122	277.446.558	8.498.874
Perjanjian Sindikasi Bandara Soekarno Hatta (Basoetta)/						
<i>Syndicated Loan Agreement os Soekarno Hatta Aripport (Basoetta)</i>						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	304.639.532	--	(26.111.960)	--	278.527.572	20.889.874
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	304.639.532	--	(26.111.960)	--	278.527.572	20.889.874
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	304.639.532	--	(26.111.960)	--	278.527.572	20.889.874
PT Bank Central Asia Tbk	304.639.532	--	(26.111.960)	--	278.527.572	20.889.874
Pinjaman Transaksi Khusus/						
<i>Spesial Transaction Loan (PTK)</i>						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	364.680.000	--	(47.160.000)	--	317.520.000	28.667.637
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor	283.640.000	--	(36.684.000)	--	246.956.000	22.296.937
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	324.160.000	--	(41.913.000)	--	282.247.000	25.482.543
Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi/						
<i>Unamortized transaction cost</i>						
	(4.009.348)	--	--	768.225	(3.241.123)	--
Perjanjian Pinjaman Sindikasi Proyek Light Rail Transit (LRT)/						
<i>Light Rail Transit (LRT) Syndicated Loan Agreement</i>						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.008.151.563	464.783.498	--	52.528.375	2.525.463.436	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.606.521.250	371.826.798	--	42.022.700	2.020.370.748	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.606.521.250	371.826.798	--	42.022.700	2.020.370.748	--
PT Bank Central Asia Tbk	1.606.521.250	371.826.798	--	42.022.700	2.020.370.748	--
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.606.521.251	371.826.798	--	42.022.700	2.020.370.749	--
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.204.890.938	278.870.100	--	31.517.024	1.515.278.062	--
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UfJ, Ltd	369.787.500	76.174.596	--	(445.962.096)	--	--
PT Bank Shinhan Indonesia	184.893.750	42.793.365	--	4.836.373	232.523.488	--
PT Bank KEB Hana Indonesia	369.787.500	85.586.730	--	9.672.745	465.046.975	--
PT Bank DKI	369.787.500	85.586.730	--	9.672.745	465.046.975	--
PT Bank Mega Tbk	369.787.500	85.586.730	--	9.672.745	465.046.975	--
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	--	5.425.339	--	280.726.504	286.151.843	--
PT BPD Sumatera Utara	36.978.750	12.545.471	--	175.875.612	225.399.833	--
Subtotal	16.647.834.362	2.624.659.751	(840.438.121)	329.698.174	18.761.754.166	332.670.279

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

29. Pinjaman Jangka Panjang (Lanjutan)

29. Long-Term Loans (Continued)

Kreditur/ Creditor	Saldo Awal/ Beginning Balance	Pencairan/ Drawdown	Pembayaran/ Payment	Non Kas/ Non-Cash	Saldo Akhir/ Ending Balance	Beban Bunga/ Interest Expense
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Kereta Commuter Indonesia						
Proyek Pengembangan Commuterline Jabodetabek/ Jabodetabek Commuterline Development Project						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	72.350.930	--	(14.860.617)	--	57.490.313	4.803.680
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	72.350.930	--	(14.860.617)	--	57.490.313	4.803.680
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	72.350.930	--	(14.860.617)	--	57.490.313	4.803.680
PT Bank Central Asia Tbk	72.350.930	--	(14.860.617)	--	57.490.313	4.803.680
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Kereta Commuter Indonesia						
Proyek Pengadaan 10 Unit Rangkaian Kereta/ Procurement of 10 trainset units						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	--	--	114.468.750	114.468.750	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	--	--	114.468.750	114.468.750	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	--	--	114.468.750	114.468.750	--
PT Bank Central Asia Tbk	--	--	--	114.468.750	114.468.750	--
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Railink						
Proyek Pengadaan 10 Unit Rangkaian Kereta/ Procurement of 10 trainset units						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	124.875.000	--	(10.406.250)	(114.468.750)	--	8.571.663
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	124.875.000	--	(10.406.250)	(114.468.750)	--	8.571.663
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	124.875.000	--	(10.406.250)	(114.468.750)	--	8.571.663
PT Bank Central Asia Tbk	124.875.000	--	(10.406.250)	(114.468.750)	--	8.571.663
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT KA Properti Manajemen						
Pengadaan Managed Service Automatic Fare Collection (AFC) LRT Jabodebek/ Procurement Managed Service Automatic Fare Collection (AFC) LRT Jabodebek						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	30.000.000	--	--	30.000.000	1.434.513
Subtotal	788.903.720	30.000.000	(101.067.468)	--	717.836.252	54.935.886
Total	17.436.738.082	2.654.659.751	(941.505.589)	329.698.174	19.479.590.418	387.606.165

30. Utang Obligasi

30. Bonds Payable

Rincian utang obligasi adalah sebagai berikut:

The details of bonds payable are as follows:

	2022	2021	
Obligasi I Kereta			Kereta Api
Api Indonesia:			Indonesia Bond I:
Seri A	--	1.000.000.000	Seri A
Seri B	1.000.000.000	1.000.000.000	Seri B
Sub Jumlah	1.000.000.000	2.000.000.000	Sub Total
Obligasi II Kereta			Kereta Api
Api Indonesia:			Indonesia Bond II:
Seri A	900.000.000	900.000.000	Seri A
Seri B	1.100.000.000	1.100.000.000	Seri B
Sub Jumlah	2.000.000.000	2.000.000.000	Sub Total
Obligasi Berkelanjutan I Kereta			Kereta Api Indonesia
Api Indonesia Tahun 2022:			Continuing Bond I Year 2022:
Seri A	634.000.000	--	Seri A
Seri B	866.000.000	--	Seri B
Sub Jumlah	1.500.000.000	--	Sub Total
Jumlah	4.500.000.000	4.000.000.000	Total
Biaya Penerbitan Obligasi yang belum Diamortisasi	(9.239.619)	(6.752.261)	Unamortized Bond Issuance Cost
Jumlah Utang Obligasi	4.490.760.381	3.993.247.739	Total Bonds Payable

30. Utang Obligasi (Lanjutan)

30. Bonds Payable (Continued)

Bagian Utang Obligasi yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun		Portion of Obligation Maturing within One Year
Obligasi I Kereta Api Indonesia: Seri A	-- 1.000.000.000	Kereta Api Indonesia Bond I: Seri A
Biaya Penerbitan Obligasi yang belum Diamortisasi	-- (552.834)	Unamortized Bond Issuance Cost
Jumlah Bagian Obligasi yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	-- 999.447.166	Total Portion of Obligation Maturing within One Year
Utang Obligasi Bagian Jangka Panjang	4.490.760.381	Long Term Bonds Payable Portion
	2.993.800.573	

Jumlah pembayaran kembali untuk utang obligasi menurut tahun jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The amounts of repayments of bond payable by years of maturity are as follow:

Tahun Jatuh Tempo/ Year of Maturity	Jumlah/ Total (Rp)
2024	1.900.000.000
2026	1.100.000.000
2026	634.000.000
2029	866.000.000
Total	4.500.000.000

a. Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017

Pada tanggal 13 November 2017, Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi I Kereta Api Indonesia tahun 2017 dengan 2 (dua) seri yaitu:

- a. Seri A senilai Rp1.000.000.000 dengan suku bunga 7,75% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 21 November 2022.
- b. Seri B senilai Rp1.000.000.000 dengan suku bunga 8,25% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 21 November 2024.

Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal 21 November 2017, dari hasil penerbitan perdana Obligasi I tahun 2017 adalah sebesar Rp2.000.000.000. Sesuai perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi Perusahaan, sekitar 55% dari dana yang diperoleh akan digunakan untuk penyelesaian proyek KA Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta) dan sekitar 45% akan digunakan untuk pembelian kereta.

a. Kereta Api Indonesia Bonds I year 2017

On November 13, 2017, the Company has received an effective statement from Chairman of the Financial Services Authority (OJK) for the issuance of Kereta Api Indonesia Bonds I year 2017 with 2 (two) series which are as follows:

- a. A Series amounting to Rp1,000,000,000 with a fixed interest rate of 7.75% per annum. The bonds payable will mature on November 21, 2022.
- b. B Series amounting to Rp1,000,000,000 with annual interest rate of 8.25%. The bonds payable will mature on November 21, 2024.

Total funds received by the Company on November 21, 2017, from the first issuance of Bonds I year 2017 was Rp2,000,000,000. Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee and the Company's prospectus for bonds payable, approximately 55% of funds received will be used for Soekarno-Hatta (Basoetta) Airport Train project and approximately 45% for purchasing trains.

30. Utang Obligasi (Lanjutan)

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi I Kereta Api Indonesia mendapatkan peringkat "AAA" untuk penerbitan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Peringkat tersebut menunjukkan kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan bunga.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- a. Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 5:1;
- b. Perbandingan Profit sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1.

Pada tanggal 10 Desember 2020, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) I Kereta Api Indonesia Tahun 2017. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPO No. 411/NOT/SK/PT KAI-RUPO I/XII/2020 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H.,M.P.A Notaris di Jakarta, RUPO diadakan dengan kuorum kehadiran para pemegang obligasi dan/atau kuasa pemegang Obligasi yang sah, seluruhnya mewakili pokok Obligasi yang bernilai Rp1.530.000.000 atau sebanyak 1.530.000.000.000 suara yang merupakan 76,50% dari jumlah pokok obligasi yang masih belum dilunasi, yang telah diterbitkan oleh Perusahaan yaitu keseluruhannya berjumlah Rp2.000.000.000 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Menyetujui untuk mengesampingkan kewajiban keuangan yaitu memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1:1 untuk periode laporan keuangan per 31 Desember 2020 dan 2021.

30. Bonds Payable (Continued)

The bonds were offered at 100% of the principal amount. Bond interest is paid quarterly.

Kereta Api Indonesia Bonds I is rated "AAA" for the issuance of bonds by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). The rating indicates the likelihood of timely payment of principal and interest.

The Company is also required to maintain certain financial ratios during the bonds payable period as follows:

- a. *Ratio of Total Debt to Total Equity is not more than 5:1;*
- b. *Ratio of Earning Before Income Tax and Depreciation and Amortization to Interest Expenses is not less than 1:1.*

On December 10, 2020, has been held the Trustee held a General Meeting of Bondholders (GMB) I Kereta Api Indonesia in 2017. Based on the Deed of Minutes of GMB No. 411/NOT/SK/PT KAI-RUPO I/XII/2020 of Dewantari Handayani, S.H.,M.P.A a Notary in Jakarta, the GMB is held with the quorum of the bondholders and/or its legitimate representatives, all of which represented the principal Bonds worth Rp1,530,000,000 or 1,530,000,000,000 votes which constitute 76.50% of the total outstanding principal Bond of a total of Rp2,000,000,000 issued by the Company with the results as follows:

- a. *Agreed to waiver of financial obligation to maintain the ratio between EBITDA and loan interest expenses is not less than 1: 1 for the financial reporting period as of December 31, 2020 and 2021.*

30. Utang Obligasi (Lanjutan)

30. Bonds Payable (Continued)

- b. Menyetujui memberikan kuasa kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan hasil RUPO.

- b. *Authorised the Trustee to amend the provisions of the Trustee Agreement in accordance with the results of the GMB.*

Pada 12 April 2022, Obligasi I Kereta Api Indonesia mendapatkan peringkat "AA+" dari PEFINDO untuk periode 11 April 2022 hingga 1 April 2023.

On of April 12, 2022, Kereta Api Indonesia Bonds I is rated "AA+" by PEFINDO for the period April 11, 2022 until April 1, 2023.

Pada tanggal 18 November 2022, Perusahaan telah melunasi Obligasi I seri A Kereta Api Indonesia Tahun 2017 sebesar Rp1.000.000.000.

On November 18, 2022, the Company has paid off Kereta Api Indonesia 2017 Bond I series A year 2017 of Rp1,000,000,000.

b. Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019

Pada tanggal 6 Desember 2019, Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi II Kereta Api Indonesia tahun 2019 dengan 2 (dua) seri yaitu:

b. Kereta Api Indonesia Bonds II year 2019

On December 6, 2019, the Company has received an effective statement from Chairman of the Financial Services Authority (OJK) for the issuance of Kereta Api Indonesia Bonds II year 2019 with 2 (two) series which are as follows:

- a. Seri A senilai Rp900.000.000 dengan suku bunga 7,75% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 16 Desember 2024.
b. Seri B senilai Rp1.100.000.000 dengan suku bunga 8,20% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 16 Desember 2026.

- a. *A Series amounting to Rp900,000,000 with a fixed interest rate of 7.75% per annum, will mature on December 16, 2024.*
b. *B Series amounting to Rp1,100,000,000 with annual interest rate of 8.20% per annum, will mature on December 16, 2026.*

Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal 13 Desember 2019, dari hasil penerbitan perdana Obligasi II tahun 2019 adalah sebesar Rp2.000.000.000. Sesuai perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi Perusahaan, sekitar Rp1.200.000.000 akan digunakan untuk *refinancing* fasilitas pada PT Bank HSBC Indonesia dan sisanya akan digunakan untuk pengadaan/perbaikan sarana.

Total funds received by the Company on December 13, 2019, from the first issuance of Bonds II year 2019 was Rp2,000,000,000. Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee and the Company's prospectus for bonds payable, around Rp1,200,000,000 that will be allocate for facility refinancing by PT Bank HSBC Indonesia and the rest will be used for procurement/maintenance.

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan.

The bonds were offered at 100% of the principal amount. Bond interest is paid quarterly.

Obligasi II Kereta Api Indonesia mendapatkan peringkat "AAA" untuk penerbitan obligasi dari PEFINDO. Peringkat tersebut menunjukkan kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan bunga.

Kereta Api Indonesia Bonds II is rated "AAA" for the issuance of bonds by PEFINDO. The rating indicates the likelihood of timely payment of principal and interest.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

The Company is also required to maintain certain financial ratios during the bonds payable period as follows:

- a. Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 5:1.

- a. *Ratio of Total Debt to Total Equity is not more than 5:1.*

30. Utang Obligasi (Lanjutan)

30. Bonds Payable (Continued)

- b. Perbandingan Profit sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1.

- b. *Ratio of Earning Before Income Tax and Depreciation and Amortization to Interest Expenses is not less than 1:1.*

Pada tanggal 10 Desember 2020, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) II Kereta Api Indonesia Tahun 2019. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPO No. 412/NOT/SK/PT KAI-RUPO I/XII/2020 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H.,M.P.A Notaris di Jakarta, RUPO diadakan dengan kuorum kehadiran para pemegang obligasi dan/atau kuasa pemegang Obligasi yang sah, seluruhnya mewakili pokok Obligasi yang bernilai Rp1.506.800.000 atau sebanyak 1.506.800.000.000 suara yang merupakan 75,34% dari jumlah pokok obligasi yang masih belum dilunasi, yang telah diterbitkan oleh Perusahaan yaitu keseluruhannya berjumlah Rp2.000.000.000 dengan hasil sebagai berikut:

On December 10, 2020, has been held the Trustee held a General Meeting of Bondholders (GMB) II Kereta Api Indonesia in 2019. Based on the Deed of Minutes of GMB No. 412/NOT/SK/PT KAI-RUPO I/XII/2020 of Dewantari Handayani, S.H.,M.P.A a Notary in Jakarta, the GMB is held with the quorum of the bondholders and/or its legitimate representatives, all of which represented the principal Bonds worth Rp1,506,800,000 or 1,506,800,000,000 votes which constitute 75.34% of the total outstanding principal Bond of a total of Rp2,000,000,000 issued by the Company with the results as follows:

- a. Menyetujui untuk mengesampingkan kewajiban keuangan yaitu memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1 untuk periode laporan keuangan per 31 Desember 2020 dan 2021.
- b. Menyetujui memberikan kuasa kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan hasil RUPO.

- a. *Agreed to waiver of financial obligation to maintain the ratio between EBITDA and Loan Interest Expenses is not less than 1: 1 for the financial reporting period as of December 31, 2020 and 2021.*

- b. *Authorised the Trustee to amend the provisions of the Trustee Agreement in accordance with the results of the GMB.*

Pada 12 April 2022, Obligasi II Perusahaan mendapatkan peringkat "AA+" dari PEFINDO untuk periode 11 April 2022 hingga 1 April 2023.

As of April 12, 2022, the Company Bonds II is rated "AA+" by PEFINDO for the period April 11, 2022 until April 1, 2023.

c. Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia tahun 2022 dengan 2 (dua) seri yaitu:

c. Kereta Api Indonesia Continuing Bonds I year 2022

On July 29, 2022, the Company has received an effective statement from Chairman of the Financial Services Authority (OJK) for the issuance of Kereta Api Indonesia Continuing Bonds I year 2022 with 2 (two) series which are as follows:

- a. Seri A senilai Rp634.000.000 dengan suku bunga 7,10% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 5 Agustus 2027.

- a. *A Series amounting to Rp634,000,000 with a fixed interest rate of 7.10% per annum. The bonds payable will mature on August 5, 2027.*

30. Utang Obligasi (Lanjutan)

30. Bonds Payable (Continued)

- b. Seri B senilai Rp866.000.000 dengan suku bunga 8,00% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 5 Agustus 2029.

- b. *B Series amounting to Rp866,000,000 with annual interest rate of 8.00% per annum. The bonds payable will mature on August 5, 2029.*

Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal 5 Agustus 2022, dari hasil penerbitan perdana Obligasi Berkelanjutan I tahun 2022 adalah sebesar Rp1.500.000.000. Sesuai perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi Perusahaan, sekitar Rp1.000.000.000 digunakan untuk pembayaran utang pokok Kereta Api Indonesia tahun 2017 Seri A sisanya akan digunakan untuk pengembangan angkutan perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan yang berupa prasarana perkeretaapian.

Total funds received by the Company on date August 5, 2022, the proceeds from the initial issuance of the 2022 Shelf-Registered Bonds I amounted to Rp1,500,000,000. In accordance with the agreement with PT Bank Mega Tbk as the Trustee and the prospectus of the Company's bonds payable, approximately Rp1,000,000,000 will be used for payment of the 2017 Series A Indonesian Railroad principal, the remainder will be used for the development of railway transportation in Southern Sumatra, in the form of railway infrastructure.

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan.

The bonds were offered at 100% of the principal amount. Bond interest is paid quarterly.

Obligasi Berkelanjutan I Perusahaan mendapatkan peringkat "AA+" untuk penerbitan obligasi dari PEFINDO. Peringkat tersebut menunjukkan kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan bunga.

The Company Continuing Bonds I is rated "AA+" for the issuance of bonds by PEFINDO. The rating indicates the likelihood of timely payment of principal and interest.

Grup juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

The Group is also required to maintain certain financial ratios during the bonds payable period as follows:

- a. Perbandingan total pinjaman terhadap total ekuitas tidak lebih dari 5:1;
b. Perbandingan profit sebelum beban pajak penghasilan dan penyusutan dan amortisasi terhadap beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1:1.

- a. *Ratio of total debt to total equity is not more than 5:1;*
b. *Ratio of earning before income tax and depreciation and amortization to interest expenses is not less than 1:1.*

Pada 12 April 2022, Obligasi Berkelanjutan I Perusahaan mendapatkan peringkat "AA+" dari PEFINDO untuk periode 11 April 2022 hingga 1 April 2023.

As of April 12, 2022, the Company Continuing Bonds I is rated "AA+" by PEFINDO for the period April 11, 2022 until April 1, 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dan memiliki saldo utang obligasi sebesar Rp4.500.000.000.

As of December 31, 2022, the Company has met the financial ratio requirements and has outstanding balance on this bond amounting to Rp4,500,000,000.

31. Sukuk

31. Sukuk

	2022	2021	
Sukuk Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022:			<i>Kereta Api Indonesia Continuing Sukuk I Year 2022:</i>
Seri A	117.350.000	--	<i>Seri A</i>
Seri B	382.650.000	--	<i>Seri B</i>
Jumlah	500.000.000	--	<i>Total</i>
Biaya Penerbitan Sukuk yang belum Diamortisasi	(1.692.889)	--	<i>Unamortized Sukuk Issuance Cost</i>
Jumlah Sukuk	498.307.111	--	<i>Total Sukuk</i>

Jumlah pembayaran kembali untuk sukuk menurut tahun jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The amounts of repayments of sukuk by years of maturity are as follow:

Tahun Jatuh Tempo/ Year of Maturity	Jumlah/ Total (Rp)
2027	117.350.000
2029	382.650.000
Total	500.000.000

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 dengan 2 (dua) seri yaitu:

- a. Seri A senilai Rp117.350.000 dengan dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp8.331.850 per tahun. Sukuk akan jatuh tempo tanggal 5 Agustus 2027.
- b. Seri B senilai Rp382.650.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp30.612.000 per tahun. Sukuk akan jatuh tempo tanggal 5 Agustus 2029.

Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal 5 Agustus 2022, dari hasil penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 adalah sebesar Rp500.000.000. Sesuai perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus obligasi berkelanjutan I dan sukuk ijarah berkelanjutan I Kereta Api Indonesia, sekitar 78% akan digunakan untuk pengembangan angkutan perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan yang berupa prasarana perkeretaapian dan sisanya akan digunakan untuk pengadaan sarana KA Bandara International Adi Soemarmo yang berupa sarana *trainset KRDE*.

On July 29, 2022, the Company has received an effective statement from Chairman of the Financial Services Authority (OJK) for the issuance of Kereta Api Indonesia Continuing Sukuk Ijarah I Phase I year 2022 with 2 (two) series which are as follows:

- a. *A Series amounting to Rp117,350,000 with Ijarah's installment benefit of Rp8,331,850 per annum. Sukuk will mature on August 5, 2027.*
- b. *B Series amounting to Rp382,650,000 with Ijarah's installment benefit of Rp30,612,000 per annum. Sukuk will mature on August 5, 2029.*

Total funds received by the Company on August 5, 2022, from the first issuance of Continuing Sukuk Ijarah I year 2022 was Rp500,000,000. Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee and prospectus for continuing bonds I and continuing sukuk ijarah I Kereta Api Indonesia, around 78% that will be allocate for developing railway transport in Southern Sumatera in form of railway infrastructure and the rest will be used for procurement of Adi Soemarmo International Airport Train facilities in form of KRDE trainset.

31. Sukuk (Lanjutan)

Sukuk ijarah ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Perusahaan mendapatkan peringkat "AA+" atas Sukuk dari PEFINDO. Peringkat tersebut menunjukkan kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan cicilan imbalan ijarah.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu selama periode sukuk ijarah sebagai berikut:

- a. Perbandingan total pinjaman terhadap total ekuitas tidak lebih dari 5:1;
- b. Perbandingan profit sebelum beban pajak penghasilan dan penyusutan dan amortisasi terhadap beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1:1.

Pada 12 April 2022, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Perusahaan mendapatkan peringkat "AA+" dari PEFINDO untuk periode 11 April 2022 hingga 1 April 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dan memiliki saldo sukuk sebesar Rp500.000.000.

32. Liabilitas Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban jangka panjang lainnya merupakan dana titipan dari iuran pensiun dana tambahan dari Pemerintah Republik Indonesia dan PT Taspen (Persero) sebagai pembayaran manfaat masa lalu para karyawan eks-Pegawai Negeri Sipil. Dana titipan ini termasuk titipan dana kesehatan pegawai akan dibayarkan sesuai perjanjian dengan pihak pengelola dana. Dana titipan disimpan dalam bentuk rekening bank dan deposito. Rincian liabilitas jangka panjang lainnya sebagai berikut:

31. Sukuk (Continued)

Sukuk ijarah were offered at 100% of the principal amount. Ijarah's installment benefit paid quarterly.

The Company Continuing Sukuk Ijarah I is rated "AA+" for the issuance of Sukuk by PEFINDO. The rating indicates the likelihood of timely payment of principal and ijarah benefit.

The Company is also required to maintain certain financial ratios during the Sukuk Ijarah period as follows:

- a. Ratio of total debt to total equity is not more than 5:1;*
- b. Ratio of earning before income tax and depreciation and amortization to interest expenses is not less than 1:1.*

As of April 12, 2022, the Company Continuing Sukuk Ijarah I is rated "AA+" by PEFINDO for the period April 11, 2022 until April 1, 2023.

As of December 31, 2022, the Company has met the financial ratio requirements and has outstanding balance on this sukuk amounting to Rp500,000,000.

32. Other Long-Term Liabilities

Other long-term liabilities represent deposit funds from pension contribution and additional funds from the Government of Republic of Indonesia and PT Taspen (Persero) for payment of past benefits of ex-Civil Servant employee. This funds include employee's healthy deposit which will be paid to the fund management party based on agreement. Deposit funds are kept in the form of bank accounts and time deposits. Details of other long-term liabilities are as follows:

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

32. Liabilitas Jangka Panjang Lainnya **32. Other Long-Term Liabilities (Continued)**
(Lanjutan)

	2022	2021	
Titipan Dana Iuran Pensiun			Pension Fund Deposits
Saldo Awal	88.598.426	234.194.593	Beginning Balance
Penerimaan:			Receipts:
Penerimaan Dana Iuran Pensiun	434.190.756	487.540.207	Pension Fund Receipts
Pengembangan Dana	2.104.723	2.520.554	Fund Development
Sub Jumlah	436.295.479	490.060.761	Sub Total
Pembayaran			Payments
BPJS Ketenagakerjaan	163.884.982	167.320.678	BPJS Ketenagakerjaan
PT Taspen (Persero)	113.195.726	114.716.493	PT Taspen (Persero)
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	171.418.565	353.619.757	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
Sub Jumlah	448.499.273	635.656.928	Sub Total
Saldo Akhir	76.394.632	88.598.426	Ending Balance
Titipan Dana Kesehatan Pegawai	53.402.087	49.994.432	Employee Healthy Deposits
Jumlah	129.796.719	138.592.858	Total

Kisaran suku bunga per tahun dan jangka waktu deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Interest rates per annum and maturity period of time deposits are as follows:

	2022	2021	
Rupiah	6,00% - 12,00%	6,00% - 12,00%	Rupiah
Jangka Waktu	1 Bulan/ Months (ARO)	1 Bulan/ Months (ARO)	Maturity Period

33. Modal Saham

33. Share Capital

Berdasarkan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. S-1041/MBU/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 dan Akta No. 278 tanggal 31 Desember 2021 dari Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH-01.03-0494898 tanggal 31 Desember 2021 tentang penambahan modal yang ditempatkan dan disetor Perusahaan semula sebesar Rp12.268.743.000 menjadi sebesar Rp19.168.743.000. Modal saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Based on Statement by Minister of State - Owned Enterprises in lieu of the Company General Meeting of Shareholders of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. S-1041/MBU/12/2021 dated December 30, 2021 and Deed No. 278 dated December 31, 2021 by Nining Puspitaningtyas, S.H., and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-AH-01.03-049488 dated December 31, 2021 regarding the additional of issued and paid-in capital of the Company from Rp12,268,743,000 to Rp19,168,743,000. The Company's share capital as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham/ Total Shares	Jumlah Nilai Saham/ Total Share Value	Persentase Kepemilikan Saham/ Percentage of Ownership	Shareholder
Pemerintah Republik Indonesia	19.168.743	19.168.743.000	100%	The Government of Republic of Indonesia

33. Modal Saham (Lanjutan)

33. Share Capital (Continued)

Mutasi saldo modal disetor sebagai berikut:

Movement on the balance of paid-in capital is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo Awal Tahun	19.168.743.000	12.268.743.000	<i>Beginning Balance</i>
Penambahan Modal Disetor	--	6.900.000.000	<i>Additional on Paid in Capital</i>
Jumlah	<u>19.168.743.000</u>	<u>19.168.743.000</u>	Total

Penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp6.900.000.000 tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021 yang dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana kereta api ringan terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi dan setoran modal pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.

The additional government's capital amounted to Rp6,900,000,000 is sourced from State's Budget Year 2021 which will be used for the development of integrated light rail transit's infrastructure and rolling stock in Jakarta, Bogor, Depok and Bekasi areas and capital injection to PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.

34. Tambahan Penyertaan Modal Negara dan Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak

34. Addition Of Government's Capital Investment and Difference in transactions of changes in equity of subsidiaries

a. Tambahan Penyertaan Modal Negara

a. Addition Of Government's Capital Investment

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 62 tahun 2022 tanggal 31 Desember 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia, disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia telah melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp3.200.000.000 (Catatan 53).

Based on Government Regulation of Republic of Indonesia No. 62 Year 2022 dated December 31, 2022 regarding Additional of Republic Indonesia's Capital into Share Capital of (Persero) PT Kereta Api Indonesia, it was stated that the State of Republic Indonesia had added up its capital investment to the Company's amounting to Rp3,200,000,000 (Note 53).

Penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp3.200.000.000 tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022 yang dipergunakan untuk penyelesaian proyek Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

The additional government capital placement amounting Rp3,200,000,000 came from State's Budget Years 2022 used for the completion of the fast train project between Jakarta and Bandung.

b. Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak

b. Difference in transactions of changes in equity of subsidiaries

Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak merupakan dampak transaksi peralihan KA Basoetta dari Railink ke KCI.

Difference in transactions of changes in equity of subsidiaries represent the effect of the Basoetta train transition transaction from Railink to KCI.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 10 antara PT Railink dengan PT Kereta Commuter Indonesia tanggal 30 Desember 2022, telah dilakukan jual beli bisnis Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta, harga jual beli yang disepakati adalah Rp329.800.000 dengan obyek jual beli:

Based on the Deed of Sale and Purchase No. 10 between PT Railink and PT Kereta Commuter Indonesia dated 30 December 2022, a sale and purchase of the Soekarno-Hatta Airport Railway business was carried out, the agreed sales price was Rp329,800,000 with the object of sales:

34. Tambahannya Penyertaan Modal Negara dan Modal Disetor (Lanjutan)

34. Addition Of Government's Capital Investment and Paid-in Capital (Continued)

1. 10 unit *train set* Kereta Rel Listrik (*Electrical Multiple Unit*);
2. 2 unit *double crane hoist*;
3. 2 unit kendaraan bermotor;
4. Peralatan kantor yang berada di kantor Railink yang berlokasi di gedung Kereta Bandara, Jl. Tanjung Karang No.1, RT.011/RW.020, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
5. *Gateway* penjualan tiket dengan *e-ticketing system* yang berada di Stasiun Manggarai, Stasiun Sudirman BNI City, Stasiun Batu Ceper, Stasiun Duri, dan Stasiun Bandara Soekarno-Hatta; dan
6. Interior *City Railway Station* yang berada di Stasiun Sudirman BNI City.

1. 10 units of electric train sets (*Electrical Multiple Units*);
2. 2 units of double crane hoists;
3. 2 units of vehicles;
4. Office equipment located at the Railink office located at the Airport Train building, Jl. Tanjung Karang No.1, RT.011/RW.020, Kebon Melati Village, Tanah Abang District, Central Jakarta City, DKI Jakarta Province;
5. Ticket sales gateway with e-ticketing system which are located at Manggarai Station, Sudirman BNI City Station, Batu Ceper Station, Duri Station, and Soekarno-Hatta Airport Station; and
6. Interior of the City Railway Station located at the Station Sudirman BNI City.

Selain aset tetap, beberapa Perjanjian Material juga dialihkan seperti:

Besides fixed assets, certain Material Agreements are also transferred such as:

1. Perjanjian Induk No. RL/DIR/PKS/028/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Perkeretaapian Bandara Soekarno-Hatta antara Perusahaan, PT AP II dan Railink;
2. Perjanjian antara Perusahaan dan Railink tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian di *City Railways Station* (CRS) dan Stasiun Perhentian KA Bandara Soekarno-Hatta No. RL/DIR/PKS/022/IV/ 2018 tanggal 18 April 2018;
3. Perjanjian Kredit Sindikasi No. 05 tanggal 20 April 2015 yang telah diperbaharui dengan Akta Adendum Perjanjian Kredit Sindikasi No. 16 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Julius Purnawan, S.H., M.Si, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Agen Fasilitas), PT Bank Central Asia Tbk (Agen Jaminan), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Peserta) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Peserta); dan
4. Perjanjian-perjanjian lain yang dimiliki oleh Perusahaan dan dibutuhkan oleh KCI untuk atau terkait operasional KA Bandara Soekarno-Hatta.

1. The Master Agreement No. RL/DIR/PKS/028/VII/2015 dated July 7, 2015 regarding the Cooperation of the Operational of Soekarno-Hatta Airport Railway between the Company, PT AP II and Railink;
2. The agreement between the Company and Railink regarding the Operational of Railway Infrastructure in City Railways Station (CRS) and the Stop Station of Soekarno-Hatta Airport Railway No. RL/DIR/PKS/022/IV/2018 dated April 18, 2018;
3. Deed of Syndicated Credit Agreement No. 05 dated April 20, 2015 which has been amended with Deed of Addendum for Syndicated Credit Agreement No. 16 dated October 20, 2015 made by Notary Julius Purnawan, S.H., M.Si, the Company obtained syndicated loan facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Facility Agent), PT Bank Central Asia Tbk (Fiducia Agent), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Member) and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Member); and
4. Other agreement owned by the Company and needed by KCI for or related to operational of Soekarno-Hatta Airport Railway.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

34. Tambahan Penyertaan Modal Negara dan Modal Disetor (Lanjutan)

34. Addition Of Government's Capital Investment and Paid-in Capital (Continued)

Persetujuan penambahan pengoperasian pada lintas pelayanan Manggarai-Bandara Udara Soekarno-Hatta oleh KCI sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian No. KA.005/1/4/DJKA/2022, pada tanggal 29 Juli 2022.

Approval of additional operations on the Manggarai-Soekarno-Hatta Airport service route by KCI in accordance with the Decree of the Ministry of Transportation through the Director General of Railways No. KA.005/1/4/DJKA/2022, on 29 July 2022.

35. Penggunaan Laba Bersih dan Saldo Laba Perusahaan

35. Distribution of the Company's Net Profit and Retained Earnings

Saldo laba Grup pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan sebagai berikut:

The Group retained earnings as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022	2021*)	
Ditentukan Penggunaannya (Cadangan Wajib dan Umum)	7.694.357.800	7.694.357.800	Appropriated (Statutory and General Reserve)
Belum Ditentukan Penggunaannya Penyesuaian Imbalan pada Periode Jasa	(189.072.579)	(1.971.113.056)	Unappropriated Adjustment of Attribution of Benefits On Service Period
Jumlah	7.679.086.294	5.897.045.817	Total

*) Disajikan Kembali, Catatan 54

*) As Restated, Note 54

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2021 dan 2020, Grup membukukan kerugian yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp333.428.124 dan Rp1.691.730.010 sehingga belum terdapat keputusan penggunaan laba bersih.

Based on General Meeting of Shareholders 2021 and 2020, the Group booked loss attributed to owner of the parent entity amounted to Rp333,428,124 and 1,691,730,010 so that there is no decision for distribution net profit.

36. Selisih Likuidasi

36. Difference of Liquidation

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998, Perusahaan berubah status dari Perusahaan Umum menjadi Persero terhitung mulai tanggal 1 Juni 1999.

Based on Government Regulation No. 19 of 1998, the Company changed its status from a Public Company to a Limited Company starting June 1, 1999.

Berdasarkan Laporan Auditor Independen atas Laporan Posisi Keuangan Likuidasi Perusahaan Umum Kereta Api per 31 Mei 1999 yang diaudit oleh

Based on the Independent Auditors' Report on Perusahaan Umum Kereta Api Financial Position of Liquidation as of May 31, 1999 which was audited by Representative Office of

36. Selisih Likuidasi (Lanjutan)

BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan No. LAP-02.02.05-12720/PW.10.5/99 tertanggal 9 November 1999, tercatat modal dan cadangan berupa sisa likuidasi sebesar Rp2.208.251.318.

Berdasarkan laporan posisi keuangan pembukaan Perusahaan per 1 Juni 1999 yang diaudit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan No. LAP-02.02.05-13026/PW.10.5/1999 tertanggal 18 November 1999, sisa likuidasi sebesar Rp2.208.251.318 diperhitungkan sebagai modal yang disetor sebesar Rp2.200.000.000, sisanya sebesar Rp8.251.318 menjadi cadangan modal.

Atas cadangan modal sebesar Rp8.251.318 telah dipindah bukukan sebagai berikut:

Saldo per 1 Juni 1999	8.251.318
Dipindahkan ke saldo laba	<u>(832.180)</u>
Saldo per 31 Desember 1999	7.419.138
Dipindahkan ke BPYBDS	<u>(187.293)</u>
Saldo per 31 Desember 2000	7.231.845
Dipindahkan ke BPYBDS	<u>(6.263.710)</u>
Jumlah	<u>968.135</u>

36. Difference of Liquidation (Continued)

BPKP of West Java Province, based on Report No. LAP-02.02.05-12720/PW.10.5/99 dated November 9, 1999, it was recorded that capital and its reserves in the form of remaining balance upon liquidation amounted to Rp2,208,251,318.

Based on the Company's opening balance report as of June 1, 1999 which was audited by Representative Office of BPKP of West Java Province, based on Report No. LAP-02.02.05-13026/PW.10.5/1999 dated November 18, 1999, the remaining of liquidation value amounted to Rp2,208,251,318 was taken into account as paid up capital of Rp2,200,000,000, where the remaining of Rp8,251,318 into capital reserves.

The capital reserves amounted to Rp8,251,318 has been transferred as follows:

	Balance as of June 1, 1999
	Balance as of December 31, 1999
	Transferred to Government Equity Participation
	Balance as of December 31, 2000
	Transferred to Government Equity Participation
	Total

37. Kepentingan Nonpengendali

37. Non-Controlling Interest

Kepentingan nonpengendali atas aset bersih:

Non-controlling interests in net assets:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
PT Angkasa Pura II (Persero)	84.717.926	142.071.011	PT Angkasa Pura II (Persero)
Yayasan Pusaka	<u>7.735.980</u>	<u>6.696.196</u>	Yayasan Pusaka
Jumlah	<u>92.453.906</u>	<u>148.767.207</u>	Total

Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) bersih:

Net income (loss) attributable to non-controlling interests:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Yayasan Pusaka	1.532.835	1.507.804	Yayasan Pusaka
PT Angkasa Pura II (Persero)	<u>(97.584.092)</u>	<u>(64.243.374)</u>	PT Angkasa Pura II (Persero)
Jumlah	<u>(96.051.257)</u>	<u>(62.735.570)</u>	Total

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

37. Kepentingan Nonpengendali (Lanjutan)

37. Non-Controlling Interest (Continued)

Kepentingan nonpengendali atas jumlah laba (rugi) komprehensif:

Total comprehensive income (loss) attributable to non-controlling interests:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Yayasan Pusaka	1.469.296	1.499.003	Yayasan Pusaka
PT Angkasa Pura II (Persero)	(97.554.053)	(64.262.962)	PT Angkasa Pura II (Persero)
Jumlah	<u>(96.084.757)</u>	<u>(62.763.959)</u>	Total

Kepentingan nonpengendali PT Angkasa Pura II (Persero) merupakan kepentingan nonpengendali atas penyertaan saham pada Railink dengan persentase kepemilikan sebesar 40,00% pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Non-controlling interest of PT Angkasa Pura II (Persero) is a non-controlling interest of investment in Railink with the ownership of 40.00% as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

Sedangkan untuk Yayasan Pusaka merupakan kepentingan nonpengendali atas penyertaan saham pada:

Meanwhile, Yayasan Pusaka is a non-controlling interest in this following ownership:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) PT Reska Multi Usaha | 1) PT Reska Multi Usaha |
| 2) PT Kereta Commuter Indonesia | 2) PT Kereta Commuter Indonesia |
| 3) PT KA Pariwisata | 3) PT KA Pariwisata |
| 4) PT KA Logistik | 4) PT KA Logistik |
| 5) PT KA Properti Manajemen | 5) PT KA Properti Manajemen |

38. Pendapatan Angkutan dan Usaha Lainnya

38. Transportation and Other Operating Revenues

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Angkutan			Passenger
Penumpang			Transportation Services
Kelas Eksekutif (Kelas 1)	3.327.981.793	1.030.348.908	Executive Class (First Class)
Kelas Bisnis (Kelas 2)	190.215.545	42.608.741	Business Class (Second Class)
Kelas Ekonomi (Kelas 3)	3.446.297.950	1.290.328.583	Economy Class (Third Class)
Sub Jumlah	<u>6.964.495.288</u>	<u>2.363.286.232</u>	Sub Total
Angkutan			Goods Transportation
Barang			Services
Batu Bara	8.404.397.301	6.180.811.096	Coal
Peti Kemas	422.235.968	332.870.511	Container
BBM	372.226.102	309.700.019	Fuel
Semen	270.912.109	309.975.129	Cement
Parcel/ Hantaran	213.228.156	155.232.901	Parcel/ Delivery
Perkebunan	128.083.622	111.154.024	Plantation
Lainnya	21.949.007	57.085.957	Other
Sub Jumlah	<u>9.833.032.265</u>	<u>7.456.829.637</u>	Sub Total
Pendukung Angkutan KA			Transportation Support
Prapurna dan Bongkar-Muat	414.245.336	399.495.915	Dooring and Loading-Unloading
Service on Train dan Restorasi KA	144.414.578	128.511.440	Service and Restaurant on Train
Angkutan KA Lainnya	154.951.124	144.135.837	Others Railway Transportation
Sub Jumlah	<u>713.611.038</u>	<u>672.143.192</u>	Sub Total

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**38. Pendapatan Angkutan dan Usaha Lainnya
(Lanjutan)**

**38. Transportation and Other Operating
Revenues (Continued)**

Non-Angkutan		Non-Transportation	
Pendapatan			<i>Assets Optimization</i>
Optimalisasi Aset (Catatan 17)	630.197.305	448.525.147	<i>Income (Note 17)</i>
Pekerjaan Pihak Ketiga	541.324.100	372.359.208	<i>Third Party Services</i>
Lainnya	404.166.635	313.315.996	<i>Others</i>
Sub Jumlah	1.575.688.040	1.134.200.351	Sub Total
Kompensasi Pemerintah		Government Compensation	
Pendapatan Pelayanan Publik (PSO)	3.242.766.866	3.290.978.357	<i>Public Service Obligation (PSO)</i>
Pemeliharaan			<i>Infrastructure Maintenance</i>
Infrastruktur (IMO)	461.331.527	454.545.455	<i>Operation (IMO)</i>
Angkutan Perintis	176.146.640	157.546.896	<i>Pioneer Transportation</i>
Sub Jumlah	3.880.245.033	3.903.070.708	Sub Total
Jumlah	22.967.071.664	15.529.530.120	Total

Pendapatan jasa angkutan penumpang merupakan pendapatan dari hasil penjualan tiket perjalanan kereta api jarak jauh dan jarak dekat.

Passenger transportation services revenue represents revenue generated from ticket sales of long and short distance trains.

Pendapatan jasa angkutan barang merupakan pendapatan atas jasa angkutan barang dengan menggunakan gerbong dan peti kemas.

Freight transportation services revenue represents revenue generated from freight transportation by carriages and containers.

Pendapatan pendukung angkutan merupakan pendapatan yang diperoleh selain jasa angkutan barang dan penumpang namun masih berhubungan dengan aktivitas pengangkutan, meliputi: suplesi, bagasi, angkutan KA lainnya serta pendapatan penunjang operasional, pendapatan jasa pengangkutan lanjutan (antara stasiun kereta api dengan gudang barang), jasa terminal peti kemas dan jasa pengawalan.

Revenue of transportation supports represents revenue generated from transportation activities beside of freight and passenger transportation services, such as: suplesi, baggage, operational supports, extended transportation service (connecting between railway station and warehouse), container terminal service and safeguard service.

Pendapatan optimalisasi aset merupakan pendapatan sewa menyewa properti di dalam dan di luar stasiun.

Assets optimization income represents income generated from property leases inside and outside of the station.

Pendapatan kompensasi Pemerintah merupakan pendapatan kompensasi yang diperoleh atas pelaksanaan penugasan dari Pemerintah untuk pelayanan umum, pemeliharaan infrastruktur, serta pengembangan jalur kereta perintis.

Government compensation income represents compensation income obtained for implementation of assignments from the Government for public services, infrastructures maintenance, and pioneer railways track development.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

39. Beban Angkutan dan Usaha Lainnya

39. Transportation and Other Operating Cost

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Beban Operasi Langsung			Direct Operating Expenses
BBM dan Listrik Aliran Atas	3.039.591.426	1.572.788.915	Fuel and Flux Over Electricity
Pegawai	2.668.857.831	2.279.158.613	Employees
Perawatan Sarana	2.358.031.804	2.070.988.622	Rolling Stock Maintenance
Pendukung Operasional dan Angkutan	976.944.133	823.546.916	Operational and Railway Support
Penyusutan Sarana	798.624.008	733.695.210	Rolling Stock Depreciation
Penyusutan Fasilitas Dipo dan Balai Yasa	119.015.433	81.816.292	Depot and Balai Yasa Facilities Depreciation
Asuransi	68.799.082	54.855.135	Insurance
Bongkar Muat	36.888.692	31.986.499	Loading-Unloading
Terminal Peti Kemas	19.007.906	8.423.789	Container Terminal
Sub Jumlah	<u>10.085.760.315</u>	<u>7.657.259.991</u>	Sub Total
Beban Operasi Tidak Langsung			Indirect Operating Expenses
Pegawai	2.103.473.439	1.842.440.917	Employee
Perawatan dan Operasi Prasarana	1.313.457.894	1.107.168.767	Infrastructure Operation and Maintenance
Beban Keamanan dan Kebersihan	704.827.257	701.830.935	Security and Cleaning Expense
Beban Optimalisasi Aset (Catatan 17)	648.309.642	542.300.012	Asset Optimization Expense (Note 17)
Beban Penggunaan Prasarana (TAC)	470.828.098	340.868.433	Track Access Charge (TAC)
Penyusutan Prasarana dan Amortisasi	434.188.506	447.519.493	Infrastructure Depreciation and Amortization
Beban Stasiun	104.459.793	91.458.228	Railway Station Expense
Perawatan Prasarana Pendukung Angkutan KA	64.988.731	31.213.970	Transportation Supporting Facility Maintenance
Sub Jumlah	<u>5.844.533.360</u>	<u>5.104.800.755</u>	Sub Total
Jumlah	<u>15.930.293.675</u>	<u>12.762.060.746</u>	Total

40. Beban Usaha

40. Operating Expenses

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pegawai	2.466.173.859	1.882.682.855	Employee
Kerumahtanggaan	252.746.617	104.768.528	Household
Pemasaran	177.515.152	48.653.540	Marketing
Pendidikan dan Pelatihan	142.533.291	51.717.214	Education and Training
Penyusutan Fasilitas	129.430.614	122.039.053	Facilities Depreciation
Penurunan nilai/ (Pemulihan) Aset Tetap	102.959.281	(58.451.223)	Fixed Aset Impairment (Recovery)
Administrasi	81.671.962	69.694.425	Administration
Pajak Bumi dan Bangunan	78.113.981	73.858.785	Land and Building Tax
Rapat/ Akomodasi	74.638.524	32.373.994	Meeting/ Accommodation
Konsultan, Penelitian dan Pengembangan	62.078.041	54.173.555	Consultant, Research and Development
Inventaris	50.002.559	28.151.818	Supplies
Perjalanan Dinas	44.116.746	14.096.328	Official Travel
Asuransi	32.068.195	31.115.342	Insurance
Listrik, Air dan Telepon (Pemulihan) Penurunan Nilai Aset Keuangan	22.669.682	19.172.067	Electricity, Water and Telephone (Recovery) Impairment Financial Assets
Jumlah	<u>3.664.532.070</u>	<u>2.543.050.490</u>	Total

41. Saldo dan Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi

41. Balance and Nature of Transaction with Related Parties

Perusahaan merupakan bagian dari suatu kelompok usaha sebagaimana dijelaskan di bawah, dalam menjalankan operasinya berhubungan dan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Mengenai hubungan tersebut, tidak terdapat perbedaan syarat dan kondisi atas transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

The Company is a part of a business group as described below in performing its operations and transactions with related parties. Regarding this relationship, there are no differences in terms and conditions of transactions made with third parties.

Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang berelasi sebagai berikut:

Nature of relationship with a related parties are as follows:

- a) Pemerintahan Republik Indonesia diwakili oleh Menteri BUMN merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN lain memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
- b) Perusahaan menempatkan dan meminjam dana pada bank-bank yang dimiliki Pemerintah dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
- c) Perusahaan yang menandatangani perjanjian dalam rangka usaha, dengan BUMN-BUMN lain merupakan entitas anak BUMN serta badan-badan lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang.
- d) Memiliki anggota pengurus yang sama dengan entitas anak, yaitu Direksi Perusahaan yang juga merupakan Komisaris pada entitas anak.
- e) Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Grup.

- a) *The Government of Republic of Indonesia represented by the Minister of State-Owned Enterprises is the Company's shareholder and other state affiliates through a capital investment of the Government of Republic of Indonesia.*
- b) *The Company places and borrows funds from banks owned by the Government with the terms and interest rates normally applicable to third parties.*
- c) *The Company entered into business agreement with other state-owned enterprises or its subsidiaries or other authorized government's agencies.*
- d) *Has the same management member in subsidiary, as the Company's Board of Directors who are also subsidiary's Commissioners.*
- e) *The Board of Commissioners and Directors are member of the key management of the Group.*

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

41. Saldo dan Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

41. Balance and Nature of Transaction with Related Parties (Continued)

Berikut adalah transaksi dengan pihak berelasi yang material:

Below are the material transactions with related parties:

Pihak Berelasi/ Related Parties	Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transaction
Pemerintah Republik Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Hak Konsesi atas Prasarana Kereta Api, Pemberian Pinjaman Jangka Panjang PEN, dan Perpajakan/ <i>Taxation</i>
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penerimaan Dana atas Penyelenggaraan angkutan PSO, Perintis, dan Perawatan IMO, Pembayaran Bunga, dan Pembayaran TAC/ <i>Receipts compensation for Public Service Liabilities, Pioneer Compensation and IMO, Interest Payment and TAC Payment</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Fasilitas Kredit Modal Kerja, Fasilitas Kredit Sindikasi/ <i>Placement Current Account, Time Deposit, Restricted Funds, Syndicated Loans Facility, Finance cost, Finance income and Pension Fund</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Fasilitas Kredit Modal Kerja, Fasilitas Kredit Sindikasi, Persewaan Lahan/ <i>Placement Current Account, Time Deposit, Restricted Funds, Working Capital Credit Facility, Syndicated Loans Facility, Land lease, Property lease, Finance cost, Interest income, Lease income, Pension Fund and Employee Health Fund</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Fasilitas Kredit Modal Kerja, Fasilitas Kredit Sindikasi, Persewaan Lahan, Biaya Keuangan, Pendapatan Bunga, Pendapatan Sewa, Dana Pensiun, dan Dana Kesehatan Pegawai <i>Placement Current Account, Time Deposit, Restricted Funds, Working Capital Credit Facility, Syndicated Loans Facility, Land lease, Property lease, Finance cost, Employee Insurance, Lease income, Pension Fund and Supporting Services</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan Giro dan Deposito Berjangka/ <i>Placement Current Account and Time Deposit</i>
PT BPRS Baiturridha Pusaka	Entitas Asosiasi/ <i>Associate Entity</i>	Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Jasa Pendukung/ <i>Receipts from Transportation Services and Supporting Services</i>
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembelian Bahan Bakar Minyak dan Jasa Pendukungnya, Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Sewa Lahan/ <i>Purchase of fuel and lubricants for infrastructure operations at maintenance stations and railway facilities</i>
PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Jasa Pendukung/ <i>Receipts from Transportation Services and Supporting Services</i>
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembelian Aset Sarana, Pembelian Suku Cadang, Jasa Perawatan Sarana, Penerimaan Jasa Teknis Sarana, dan Jasa Angkutan/ <i>Purchase of Rolling Stock Assets, Spare Parts, Rolling Stock Maintenance Services, Receipts Rolling Stock Technical Services, and Transportation Services</i>
PT Industri Kereta Api (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Persewaan Lahan/ <i>Land Lease</i>
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Jasa Pendukung/ <i>Receipts from Transportation Services and Supporting Services</i>
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Jasa Pendukung/ <i>Receipts from Transportation Services and Supporting Services</i>
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Persewaan Lahan/ <i>Land Lease</i>
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Persewaan Lahan, Pembayaran Listrik Operasional dan Listrik Aliran Atas/ <i>Land lease, Payment of Operation Electricity and Flux Over Electricity</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Jasa Pendukung/ <i>Receipts from Transportation Services and Supporting Services</i>
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penerimaan dari Persewaan Lahan/ <i>Receipts from Land Lease</i>
PT Biofarma (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kontraktor dalam Pembangunan Proyek LRT Jabodabek/ <i>Contractor for construction of Jabodabek Light Rail Transit infrastructure</i>
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembayaran Persewaan Lahan dan Fasilitas Bandara/ <i>Payment of Land Lease and Airport Utility</i>
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembayaran Jasa Konsultasi/ <i>Payment of Consultation Service</i>
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembelian Suku Cadang Sarana/ <i>Purchase of Spare Parts of Rolling Stock</i>
PT Barata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembelian Suku Cadang Prasarana/ <i>Purchase of Infrastructure spare parts</i>
PT LEN Industri (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembayaran Tiket Pesawat/ <i>Airline Ticket Payment</i>
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Fasilitas Kredit Sindikasi dan Biaya Keuangan/ <i>Syndicated Credit Facility and Finance Cost</i>
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Fasilitas Kredit Sindikasi dan Biaya Keuangan/ <i>Syndicated Credit Facility and Finance Cost</i>
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Fasilitas Pinjaman Subordinasi dan Biaya Keuangan/ <i>Subordination Loans Facility and Finance Cost</i>
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penerimaan dari Pekerjaan Alih Daya/ <i>Receipts from Outsourcing Employee</i>
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Asuransi Pegawai/ <i>Employee Insurance</i>
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Lain-lain/ Other Receivables <i>Payment for Printing Services</i>
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembayaran Jasa Telekomunikasi/ <i>Payment for Telecommunication Services</i>
PT Danareksa (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penerimaan Jasa Angkutan/ <i>Receipts from Transportation Services</i>
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	
Perum PPD	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

41. Saldo dan Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

41. Balance and Nature of Transaction with Related Parties (Continued)

	2022	2021	
<u>Bank (Catatan 6)</u>			<u>Bank (Note 6)</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.805.804.641	944.263.891	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.552.301.430	1.189.370.586	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.468.404.783	423.875.728	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	66.976.823	6.579.455	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT BPRS Baiturridha Pusaka	1.143.975	209.125	PT BPRS Baiturridha Pusaka
Jumlah Bank (Rupiah)	4.894.631.652	2.564.298.785	Total Bank (IDR)
% Terhadap Jumlah Aset	6,83%	4,09%	% to Total Assets
<u>Deposito (Catatan 6)</u>			<u>Time Deposits (Note 6)</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	207.310.000	173.791.668	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	80.200.000	871.200.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	55.000.000	2.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	50.000.000	50.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT BPRS Baiturridha Pusaka	6.000.000	1.000.000	PT BPRS Baiturridha Pusaka
Jumlah Deposito	398.510.000	1.097.991.668	Total Time Deposits
% Terhadap Jumlah Aset	0,56%	1,75%	% to Total Assets
<u>Dana Dibatasi Penggunaannya (Catatan 7)</u>			<u>Restricted Fund (Note 7)</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.219.724.534	5.471.842	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.173.167.815	2.605.416.100	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	198.001.969	133.496.503	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah Dana Dibatasi Penggunaannya	5.590.894.318	2.744.384.445	Total Restricted Fund
% Terhadap Jumlah Aset	7,81%	4,37%	% to Total Assets
<u>Piutang Usaha (Catatan 8)</u>			<u>Trade Receivables (Note 8)</u>
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) - PT Bukit Asam (Persero) Tbk	832.018.463	585.010.996	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) - PT Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Pertamina (Persero)	44.583.938	54.068.119	PT Pertamina (Persero)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	27.574.218	28.021.611	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Industri Kereta Api (Persero)	16.011.636	8.787.234	PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	13.382.380	13.382.380	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	9.521.422	401.336	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	3.069.913	3.619.505	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.885.589	2.670.900	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Biofarma (Persero)	1.782.455	--	PT Biofarma (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.549.691	547.012	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Pupuk Indonesia (Persero)	1.541.046	32.922	PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	1.507.915	--	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	8.851.978	14.809.595	Others (Each Under Rp1 Billion)
Jumlah Piutang Usaha	963.280.644	711.351.610	Total Trade Receivables
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(28.650.899)	(33.256.915)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah - Bersih	934.629.745	678.094.695	Total - Net
% Terhadap Jumlah Aset	1,30%	1,08%	% to Total Assets

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

41. Saldo dan Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

41. Balance and Nature of Transaction with Related Parties (Continued)

	2022	2021	
Piutang Lain-lain (Catatan 9)			Other Receivable (Note 9)
Tidak Lancar			Non-Current
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) -			PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)-
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	103.700.228	103.700.228	PT Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Pertamina (Persero)	3.808.156	3.808.156	PT Pertamina (Persero)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.917.139	1.917.139	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Perum PPD	500.000	500.000	Perum PPD
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	--	930.775.672	PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia
Jumlah Piutang Lain-lain	109.925.523	1.040.701.195	Total Other Receivables
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(109.925.523)	(1.040.701.195)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Tidak Lancar	--	--	Subtotal Non-Current
Jumlah Bersih	--	--	Total Net
% Terhadap Jumlah Aset	0,00%	0,00%	% to Total Assets

Piutang lain-lain kepada pihak berelasi merupakan piutang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan utama Grup.

Other receivables to related parties represent receivables that are not directly related to Group's operational activities.

Piutang pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia merupakan piutang atas bunga pinjaman yang diberikan Perusahaan.

Receivable to PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia are interest of shareholder's loan that given from the Company.

Atas piutang tersebut, Perusahaan telah menerima bukti potong PPh pasal 23 sebesar Rp138.896.858 dan pelunasan atas bunga pinjaman sebesar Rp791.878.814 sehingga pada 31 Desember 2022 tidak ada lagi piutang bunga dari PSBI.

Based on Receivable, The Company has received withholding evidence income tax article 23 amounting to Rp138,896,858 and interest payment amounted to Rp791,878,814 so as of December 31, 2022 there is no interest receivables from PSBI.

	2022	2021	
Pendapatan Masih Akan Diterima (Catatan 11)			Accrued Income (Note 11)
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) -			PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) -
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	719.566.683	--	PT Bukit Asam (Persero) Tbk
Kementerian Perhubungan RI - PSO	164.662.291	250.856.413	Ministry of Transportation RI - PSO
Sub Jumlah	884.228.974	250.856.413	Sub Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(164.662.291)	(164.662.291)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah-Bersih	719.566.683	86.194.122	Total-Net
% Terhadap Jumlah Aset	1,01%	0,14%	% to Total Assets

Pada tanggal 31 Desember 2022, pendapatan masih akan diterima dari PT Bukit Asam Tbk atas tarif angkutan batu bara relasi Tanjung Enim Baru-Tarahan dan Tanjung Enim Baru-Kertapati selama tahun 2022.

As of December 31, 2022, accrued income from PT Bukit Asam Tbk for coal transportation in the Tanjung Enim Baru-Tarahan and Tanjung Enim Baru-Kertapati relations during 2022.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

41. Saldo dan Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

41. Balance and Nature of Transaction with Related Parties (Continued)

Pendapatan yang masih akan diterima dari pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2021 diantaranya adalah kompensasi kewajiban pelayanan publik (PSO) yang merupakan tagihan kepada Pemerintah atas kompensasi PSO berdasarkan Perjanjian No. HK/201/1/3/DJKA/2021 dan No. KL.701/II/2/KA-2021 tanggal 15 Februari 2021 dengan perubahan terakhir addendum No. HK.201/1/24/DJKA/2021 dan No. KL.701/XII/7/KA-2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Perusahaan.

Accrued income from related parties on December 31, 2021 include compensation for public service obligations (PSO), which is a claim to the Government for PSO compensation based on Agreement No. HK/201/1/3/DJKA/2021 and No. KL.701/II/2/KA-2021 dated 15 February 2021 with the last amendment to addendum No. HK.201/1/24/DJKA/2021 and No. KL.701/XII/7/KA-2021 dated December 16, 2021 concerning the implementation of the Public Service Obligation (PSO) in the Field of Rail Transportation for Economy Class Services for the 2021 Fiscal Year between the Directorate General of Railways and Companies.

Rincian aset keuangan dari pihak berelasi sebagai berikut:

The details of Financial Assets from related parties are as follows:

	2022	2021	
Aset Keuangan			Financial Assets
(Catatan 21)			(Note 21)
Dana Pensiun Pegawai			Pension Funds
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	53.367.617	47.750.168	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.708.174	30.961.901	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.318.841	9.886.357	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Sub Jumlah	76.394.632	88.598.426	Sub Total
Dana Kesehatan Pegawai			Employee Healthy Fund
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	53.402.087	49.994.432	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	129.796.719	138.592.858	Total
% Terhadap Jumlah Aset	0,18%	0,22%	% to Total Assets
Utang Usaha (Catatan 22)			Trade Payables (Note 22)
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	432.514.749	--	Ministry of Transportation Republic of Indonesia
PT Pertamina (Persero)	138.011.384	115.931.605	PT Pertamina (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	106.089.280	58.825.468	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT LEN Industri (Persero)	55.985.708	47.833.009	PT LEN Industri (Persero)
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	53.128.122	16.935.832	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
PT Industri Kereta Api (Persero)	48.897.338	116.315.605	PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	15.603.669	--	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Barata Indonesia (Persero)	10.602.695	4.612.120	PT Barata Indonesia (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	9.178.664	42.300.086	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	4.781.184	2.480.849	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.004.765	--	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	2.917.123	68.191.556	Others (Each Under Rp1 Billion)
Jumlah Utang Usaha	880.714.681	473.426.130	Total Trade Payables
% Terhadap Jumlah Liabilitas	1,05%	1,20%	% to Total Liabilities

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

41. Saldo dan Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

41. Balance and Nature of Transaction with Related Parties (Continued)

**Pinjaman Jangka Pendek
(Catatan 25)**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	500.000.000	629.962.173
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	200.000.000	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	60.000.000	80.000.000
Jumlah Pinjaman Jangka Pendek	760.000.000	709.962.173
% Terhadap Jumlah Liabilitas	1,78%	1,80%

**Short-Term Loans
(Note 25)**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total Short-Term Loans

**Pinjaman Jangka Panjang
(Catatan 29)**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.441.548.447	3.007.767.279
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.174.463.240	2.969.034.447
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.173.856.095	2.968.350.216
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.797.525.062	1.529.050.938
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	246.956.000	283.640.000
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	24.444.156	25.462.663
Biaya Transaksi yang belum Diamortisasi	(3.241.123)	(4.009.348)
Jumlah Pinjaman Jangka Panjang	11.855.551.877	10.779.296.195
% Terhadap Jumlah Liabilitas	27,89%	27,56%

**Long-Term Loans
(Note 29)**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Ministry of Finance Republic of Indonesia
Unamortized Cost of Transaction
Total Long-Term Loans

**Pinjaman Program PEN
(Catatan 28)**

Pemerintah Republik Indonesia	3.500.000.000	3.500.000.000
% Terhadap Jumlah Liabilitas	8,25%	8,95%

**PEN Program Loan
(Note 28)**

Government of the Republic of Indonesia
% to Total Liabilities

Rincian pendapatan dari pihak berelasi sebagai berikut:

The details of revenues from related parties are as follows:

	2022	2021
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) - PT Bukit Asam (Persero) Tbk	6.671.067.104	4.850.221.016
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	3.880.245.033	3.903.070.708
PT Pertamina (Persero)	372.226.102	309.700.019
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	95.786.983	136.878.337
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	79.527.257	34.236.162
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	53.262.744	47.884.873
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	33.732.089	6.803.611
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	27.255.523	17.556.096
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	23.491.554	4.613.773
PT Industri Kereta Api (Persero)	21.918.326	28.201.339
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	11.877.300	24.497.276
PT Biofarma (Persero)	8.087.537	--
PT Pupuk Indonesia (Persero)	6.873.776	--
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	3.505.563	--
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	6.976.423	13.176.186
Jumlah Pendapatan	11.295.833.314	9.376.839.396
% Terhadap Jumlah Pendapatan	48,89%	59,96%

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) - PT Bukit Asam (Persero) Tbk
Misnistry of Transportation Republic of Indonesia
PT Pertamina (Persero)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Biofarma (Persero)
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Others (Each Under Rp1 Billion)
Total Revenues
% to Total Revenues

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

41. Saldo dan Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

41. Balance and Nature of Transaction with Related Parties (Continued)

Rincian beban dari pihak berelasi sebagai berikut:

The details of expenses from related parties are as follows:

	2022	2021	
PT Pertamina (Persero)	2.872.860.277	1.427.723.905	PT Pertamina (Persero)
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	470.828.098	340.868.433	Ministry of Transportation Republic of Indonesia
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	372.698.607	299.009.486	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	123.091.259	83.510.327	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	120.279.637	106.767.078	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	120.196.959	164.992.905	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	114.197.821	25.028.304	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	90.029.723	93.599.664	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Industri Kereta Api (Persero)	60.831.293	40.078.283	PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	46.349.527	1.214.361	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	44.084.270	810.349	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	22.296.937	22.751.867	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT LEN Industri (Persero)	9.344.217	2.816.547	PT LEN Industri (Persero)
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	4.321.147	1.306.473	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT Barata Indonesia (Persero)	3.537.234	--	PT Barata Indonesia (Persero)
PT Danareksa (Persero)	2.040.886	--	PT Danareksa (Persero)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1.512.705	1.791.383	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Lain-lain (Masing-masing dibawah Rp1 Milyar)	3.952.371	5.631.490	Others Under Rp1 Billion)
Jumlah Beban	4.482.452.966	2.617.900.855	Total Expenses
% Terhadap Beban	19,33%	14,08%	% to Cost of Revenues

Kompensasi manajemen kunci:

Key management compensation:

	2022	2021	
Direksi			Directors
Imbalan Kerja Jangka Pendek	70.758.141	41.366.431	Short-Term Benefits
Imbalan Pascakerja	4.973.657	3.673.756	Post-employment Benefits
Jumlah	75.731.798	45.040.187	Total
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Imbalan Kerja Jangka Pendek	28.614.604	17.689.460	Short-Term Benefits
Imbalan Pascakerja	2.369.877	1.543.337	Post-employment Benefits
Jumlah	30.984.481	19.232.797	Total

42. Penghasilan Keuangan

42. Finance Income

	2022	2021	
Jasa Giro	106.536.898	87.372.974	Interest on Current Accounts
Penyesuaian Nilai Kini PEN	17.662.552	11.134.069	PEN Present Value Adjustment
Deposito Berjangka	15.315.494	9.937.291	Time Deposits
Jumlah	139.514.944	108.444.334	Total

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

43. Beban Keuangan

43. Finance Cost

	2022	2021	
Kredit Investasi	385.003.065	411.889.005	<i>Investment Loans</i>
Obligasi	361.122.500	319.950.000	<i>Bonds</i>
Kredit Modal Kerja	103.741.014	137.842.415	<i>Working Capital Loans</i>
PEN	88.715.278	14.583.333	<i>PEN</i>
Sukuk	16.226.604	--	<i>Sukuk</i>
Penyesuaian Nilai Kini PEN	17.662.552	11.134.069	<i>PEN Present Value Adjustment</i>
Liabilitas Sewa (Catatan 20)	8.101.140	5.313.503	<i>Lease Liability (Note 20)</i>
Jumlah	980.572.153	900.712.325	Total

44. Keuntungan (Kerugian) Lain-lain - Bersih

44. Other Gains (Losses) – Net

	2022	2021	
Keuntungan Lain-lain			Other Gains
Pemulihan Cadangan			<i>Recovery Allowance for</i>
Penurunan Nilai Piutang			<i>Impairment of Interest</i>
Bunga PSBI	930.775.672	--	<i>Receivable PSBI</i>
Pendapatan PSO atas			<i>PSO Income from</i>
Penggantian TAC	142.889.592	--	<i>TAC Reimbursement</i>
Pendapatan Klaim Asuransi	58.259.725	23.363.980	<i>Insurance Claims Income</i>
Pendapatan Denda	35.930.529	34.396.746	<i>Penalty Income</i>
Keuntungan Penjualan Limbah	32.328.015	2.207.598	<i>Gains on Sales of Waste</i>
Pendapatan Non-Operasi	22.526.899	33.935.942	<i>Non-Operating Income</i>
Sub Jumlah	1.222.710.432	93.904.266	Sub Total
Kerugian Lain-lain			Other Losses
Penurunan Nilai Wajar Investasi	(930.775.672)	--	<i>Impairment of Fair Value Investment</i>
Beban Denda	(164.796.227)	(25.849.964)	<i>Penalty Expense</i>
Beban Penggantian TAC	(142.889.592)	--	<i>TAC Reimbursement Expense</i>
Beban Pajak dan			<i>Tax Expenses and</i>
Administrasi Bank	(80.018.834)	(34.233.622)	<i>Bank Administration</i>
Beban Lainnya	--	(2.889.011)	<i>Other Expense</i>
Sub Jumlah	(1.318.480.325)	(62.972.597)	Sub Total
Jumlah	(95.769.893)	30.931.669	Total

45. Laba (Rugi) Per Saham Dasar

45. Basic Earning (Loss) Per Share

	2022	2021	
Laba (Rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.782.040.477	(362.460.073)	<i>Profit (Loss) attributed to the owner's of the parent entity</i>
Rata-rata tertimbang saham beredar	19.168.743	12.287.647	<i>Weighted average number of shares</i>
Laba (Rugi) per Saham Dasar	93	(29)	Basic Earning (Loss) per share

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusi.

The Company did not have potential dilutive ordinary shares, thus basic earnings per share are the same as the dilutive earnings per share.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

46. Segmen Operasi

46. Operating Segment

Informasi menurut segmen usaha adalah sebagai berikut:

Information by business segments as follows:

	2022						
	Jasa Angkutan/ Transportation	Jasa Non Angkutan/ Non transportation	Konstruksi/ Construction	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminated	Konsolidasi/ Consolidated	
Pendapatan Usaha	21.391.383.626	1.575.688.038	2.610.567.346	25.577.639.010	--	25.577.639.010	Revenues
Antar Segmen	881.656.106	2.006.026.431	--	2.887.682.537	(2.887.682.537)	--	Inter Segment
Jumlah pendapatan	22.273.039.732	3.581.714.469	2.610.567.346	28.465.321.547	(2.887.682.537)	25.577.639.010	Total Revenues
Beban Operasi	(17.523.648.358)	(2.071.177.387)	(2.610.567.346)	(22.205.393.091)	--	(22.205.393.091)	Operating Expenses
Antar Segmen	(1.832.875.857)	(1.054.806.680)	--	(2.887.682.537)	2.887.682.537	--	Inter Segment
Jumlah Beban	(19.356.524.215)	(3.125.984.067)	(2.610.567.346)	(25.093.075.628)	2.887.682.537	(22.205.393.091)	Total Expenses
Hasil Segmen	2.916.515.517	455.730.402	--	3.372.245.919	--	3.372.245.919	Segment Result
Pendapatan (Beban) yang tidak dapat Dialokasikan							Revenues (Expenses) are not Allocated
Pendapatan Keuangan						139.514.944	Finance Incomes
Beban Keuangan						(980.572.153)	Finance Cost
Bagian Rugi Bersih Ventura						(267.504.227)	Net Loss of Joint Venture
Selisih Kurs						42.673.710	Foreign Exchanges
Lain-lain - Neto Manfaat (Beban)						(95.769.893)	Other - Net Tax Benefit
Pajak - Neto						(524.599.080)	(Expenses) - Net
Laba setelah Pajak Penghasilan						1.685.989.220	Income after Income Taxes
Kepentingan Nonpengendali						96.051.257	Non-Controlling Interest
Laba Diatribusikan Pemilik Induk						1.782.040.477	Income Attributable to Parent Entity
Laba Komprehensif Diatribusikan Pemilik Induk						2.362.914.534	Comprehensive Income Attributable to Parent Entity
Laporan Posisi Keuangan							Statement of Financial Position
Aset Segmen	46.416.809.741	905.134.224	26.875.623.658	74.197.567.623	(2.616.337.900)	71.581.229.723	Segmented Assets
Liabilitas Segmen	29.258.185.381	418.522.863	14.342.928.979	44.019.637.223	(1.518.591.805)	42.501.045.418	Segmented Liabilities

	2021*)						
	Jasa Angkutan/ Transportation	Jasa Non Angkutan/ Non transportation	Konstruksi/ Construction	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminated	Konsolidasi/ Consolidated	
Pendapatan Usaha	14.395.329.768	1.134.200.352	2.387.245.804	17.916.775.924	--	17.916.775.924	Revenues
Antar Segmen	843.714.815	1.121.736.698	--	1.965.451.513	(1.965.451.513)	--	Inter Segment
Jumlah pendapatan	15.239.044.583	2.255.937.050	2.387.245.804	19.882.227.437	(1.965.451.513)	17.916.775.924	Total Revenues
Beban Operasi	(13.474.622.480)	(1.830.488.756)	(2.387.245.804)	(17.692.357.040)	--	(17.692.357.040)	Operating Expenses
Antar Segmen	(1.562.734.591)	(402.716.922)	--	(1.965.451.513)	1.965.451.513	--	Inter Segment
Jumlah Beban	(15.037.357.071)	(2.233.205.678)	(2.387.245.804)	(19.657.808.553)	1.965.451.513	(17.692.357.040)	Total Expenses
Hasil Segmen	201.687.512	22.731.372	--	224.418.884	--	224.418.884	Segment Result
Pendapatan (Beban) yang tidak dapat Dialokasikan							Revenues (Expenses) are not Allocated
Pendapatan Keuangan						108.444.334	Finance Incomes
Beban Keuangan						(900.712.325)	Finance Cost
Bagian Rugi Bersih Ventura						(9.495.748)	Net Loss of Joint Venture
Selisih Kurs						(567.340)	Foreign Exchanges
Lain-lain - Neto Manfaat (Beban)						30.931.669	Other - Net Tax Benefit
Pajak - Neto						121.784.883	(Expenses) - Net
Rugi setelah Pajak Penghasilan						(425.195.643)	Loss after Income Taxes
Kepentingan Nonpengendali						62.735.570	Non-Controlling Interest
Rugi Diatribusikan Pemilik Induk						(362.460.073)	Loss Attributable to Parent Entity
Rugi Komprehensif Diatribusikan Pemilik Induk						(485.036.924)	Comprehensive Loss Attributable to Parent Entity
Laporan Posisi Keuangan							Statement of Financial Position
Aset Segmen	40.023.647.395	908.690.000	23.777.203.269	64.709.540.664	(1.993.150.743)	62.716.389.921	Segmented Assets
Liabilitas Segmen	28.080.645.019	478.778.144	11.460.520.378	40.019.943.541	(901.206.412)	39.118.737.129	Segmented Liabilities

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

47. Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing

47. Assets and Liabilities in Foreign Currencies

Aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Assets and liabilities in foreign currencies as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022			2021			
	Mata Uang Asing (Nilai Penuh/ Foreign Currency (Full Amount)		Rp	Mata Uang Asing (Nilai Penuh/ Foreign Currency (Full Amount)		Rp	
Aset							
Kas dan Setara Kas	USD	90.024.486	1.416.175.187	USD	79.155.671	1.129.473.059	Cash and Cash Equivalents
	EUR	1.031.762	17.243.459	EUR	71.622	1.155.031	
	JPY	6.325.102	743.621	JPY	3.829.298	474.411	
Dana Dibatasi Penggunaannya	USD	10	157	USD	10	143	Restricted Funds
Piutang Usaha	USD	10.036.624	157.886.132	USD	8.298.032	118.404.703	Trade Receivables
Jumlah Aset			1.592.048.556			1.249.507.347	Total Asset
Liabilitas							
Utang usaha	EUR	630.000	10.528.957	EUR	--	--	Trade Payables
	JPY	738.573.364	86.831.596	JPY	229.251.432	28.401.914	
	USD	--	--	USD	5.002.927	71.386.815	
Utang Jangka Panjang Jatuh Tempo 1 Tahun	USD	11.092.409	174.494.692	USD	11.092.405	158.277.645	Current Maturities of Long-Term Loans
Utang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Jatuh Tempo 1 Tahun	USD	6.544.521	102.951.866	USD	17.636.925	251.661.454	Long-Term Loans Net Of Maturities
Jumlah Liabilitas			374.807.111			509.727.828	Total Liabilities
Jumlah Bersih			1.217.241.445			739.779.519	Total Net

Kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan dan entitas anak beroperasi dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

The financial risk management policies of the Company and its subsidiaries are made to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of their business, and managing their exposure to market risks (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company and its subsidiaries operate within defined policies which approved by the Board of Directors.

Dalam pengelolaan risiko, Perusahaan membentuk Divisi Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan implementasi manajemen risiko tersebut di lingkungan Perusahaan. Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur Logistik dan Pengembangan.

In managing those risks, the Company established a Risk Management Division which is responsible for the preparation of the policies, the relevant frameworks, implementation guideline and the necessary risk management infrastructure to ensure the implementation of risk management in the Company's environment. The Risk Management Division is responsible to the Director of Logistic and Development.

48. Kebijakan Manajemen Risiko

48. Risk Management Policies

a. Risiko Pasar

1. Risiko mata uang asing

Risiko mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Grup terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang piutang usaha dari penjualan dalam mata uang asing dan utang usaha dari pembelian dalam mata uang asing.

Grup menanggung risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi dan saldo yang didenominasi dalam mata uang selain Rupiah. Mata uang yang menimbulkan risiko ini adalah terutama Dolar AS. Risiko nilai tukar mata uang asing dikelola sebaik mungkin dengan lindung nilai alami yaitu menyeimbangkan nilai kekayaan dan kewajiban masing-masing mata uang.

Untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko fluktuasi kurs terhadap Dolar AS, Grup mengusahakan, untuk memastikan bahwa sebagian besar pembelian dan penjualan dilakukan dalam mata uang yang sama serta dilakukan pada saat yang hampir bersamaan dan mengimplementasikan kebijakan dimana hutang dalam mata uang asing yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha dilakukan dalam mata uang yang sama (lindung nilai alami). Manajemen juga memantau untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan semaksimal mungkin.

Grup memantau secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Grup pada waktu yang tepat.

a. Market Risk

1. Foreign currency risk

Foreign currency risk is the risk where the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group exposure to exchange rate fluctuations results primarily from short-term loans, long-term loans, trade receivable from sales in foreign currencies and trade payables from purchases in foreign currencies.

The Group incurs foreign currency risk on the transactions dan balances that are denominated in currencies other than Indonesian Rupiah. The currency giving rise to this risk is US Dollar. Foreign currency risks are managed as far as possible by natural hedges of matching assets and liabilities in foreign currency.

In order to anticipate and mitigate the risk of exchange rate fluctuation against the US Dollar, the Group seeks, to ensure that significant portion of purchases and sales are carried out in the same currency as well as matching the timing of transactions and to implement a policy whereby debts in foreign currency used to finance business activities are made in the same currency (natural hedging). The management also ensures those policies are implemented to the maximum condition.

The Group closely monitors the foreign exchange rate fluctuation, so it can take useful actions to the Group in proper time.

48. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

48. Risk Management Policies (Continued)

Analisis Sensitivitas untuk Risiko Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jika mata uang asing melemah/menguat sebesar 5% terhadap Rupiah dengan asumsi semua variabel konstan, laba sebelum pajak dalam tahun berjalan akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar Rp98.342.783 (31 Desember 2021: Rp36.988.976) terutama disebabkan oleh penjabaran keuntungan/ kerugian translasi kas setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha dan utang bank jangka pendek.

2. Risiko Suku Bunga
Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup terhadap risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang dan utang obligasinya. Fluktuasi suku bunga memengaruhi biaya atas pinjaman baru dan bunga atas saldo pinjaman Grup yang dikenakan suku bunga mengambang.

Kebijakan Grup terkait dengan risiko suku bunga adalah sebagai berikut:

- 1) Mengelola biaya bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan variabel. Grup mengevaluasi rasio suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang dari utang pinjaman dan utang obligasi sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar keuangan. Berdasarkan penilaian manajemen, pembiayaan baru akan ditentukan berdasarkan suku bunga tetap atau mengambang.
- 2) Mengelola eksposur atas tingkat suku bunga yang berasal dari utang pinjaman dan utang obligasi dengan menandatangani kontrak *swap*, tingkat suku bunga tersebut ditujukan untuk lindung nilai atas suku bunga mengambang dalam pinjaman mata uang Dolar AS.

Sensitivity Analysis for Foreign Currency Risk

As of December 31, 2022 and 2021, if the foreign currency has weakened/strengthened by 5% against Rupiah with all other variables are constant, the profit before tax for the current year will lower/higher by Rp98,342,783 (December 31, 2021; Rp36,988,976), mainly as a result of foreign exchange gain/losses on translation of cash and cash equivalent, trade receivables, other receivables, trade payables and short-term bank loans.

2. Interest Rate Risk
Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in the market interest rates. The Group exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to its short-term loans, long-term loans and bonds payable. Interest rate fluctuations influence the cost of new loans and the interest on the outstanding floating rate loans of the Group.

The Group policies related to interest rate risk are as follows:

- 1) Managing interest cost through a mix of fixed and variable rate debts. The Group evaluates the fixed to floating rate ratio of its loans and bonds payable in line with movements of relevant interest rates in the financial markets. Based on management's assessment, new financing will be priced either on a fixed or floating rate basis.
- 2) Managing the interest rate exposure from loans and bonds payable by signing the interest rate swap contracts. The contract is aimed to hedge the floating interest in US Dollar currency.

48. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

48. Risk Management Policies (Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing lebih dari 16,78% dan 14,48% dari utang berbunga/pinjaman berbunga Grup adalah utang dengan suku bunga tetap.

As of December 31, 2022 and 2021, more than 16.78% and 14.48% respectively, of the Group interest debts/ interest loans are loans with fixed rate.

Grup menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga, di mana semua variabel lainnya dianggap tetap, terhadap laba Grup untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 (melalui dampak atas suku bunga suku bunga JIBOR untuk pinjaman dalam Rupiah).

The Group demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates, with all other variables are constant, of the Group profit for the years ended December 31, 2022 and 2021 (through the impact on the floating rate borrowings which is based on JIBOR for Rupiah borrowings).

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk non derivatif pada akhir tahun pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir tahun pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan sebesar 0,5% digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada manajemen kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

The sensitivity analysis below has been determined based on the exposure to interest rates for non-derivative instruments at the end of the reporting year. For floating rate liabilities, the analysis is prepared by assuming the amount of the liability outstanding for the whole year 0.5 % increase or decrease is used when report the interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonable possible changes in interest rates.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 jika tingkat suku bunga atas utang bank 0,5% lebih tinggi/lebih rendah dengan asumsi semua variabel konstan, maka:

As of December 31, 2022 and 2021, if interest rates on bank loans is 0.5% higher/lower with all other variables are constant, then :

- Pada 31 Desember 2022, laba setelah pajak pada periode berjalan akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar Rp44.895.553.
- Pada 31 Desember 2021, (rugi) setelah pajak pada periode berjalan akan menjadi lebih tinggi/rendah sebesar (Rp53.811.015).

- *As of December 31, 2022, profit after tax for the current period would be Rp44,895,553 lower/higher.*
- *As December 31, 2021, (loss) after tax for the current period would be (Rp53,811,015) higher/lower.*

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual.

b. Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will suffer loss that come from other parties that failed to fulfill the contractual responsibility

48. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

48. Risk Management Policies (Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah maksimum eksposur terhadap risiko kredit adalah Rp13.742.064.270 (31 Desember 2021: Rp7.945.491.479). Risiko kredit terutama berasal dari kas dan setara kas dan dana yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, pendapatan yang masih harus diterima dan piutang lain-lain.

As of December 31, 2022 the total of maximum exposure from credit risk was Rp13,742,064,270 (31 Desember 2021: Rp7,945,491,479). Credit risk arises from cash and cash equivalents and restricted cash, trade receivables, accrue revenue and other receivables.

Semua kas di bank dan deposito berjangka ditempatkan di bank yang memiliki kualitas kredit yang baik.

All the cash in banks and time deposits are placed in bank with good credit rating.

Pada tanggal 31 Desember 2022 piutang usaha Grup tidak terkonsentrasi pada pelanggan tertentu.

On December 31, 2022, Group's accounts receivable is not concentrated on certain customer.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Grup memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, perjanjian yang mengikat secara hukum untuk transaksi serta jasa lainnya yang telah dilakukan dan secara historis mempunyai tingkat yang rendah untuk piutang yang bermasalah.

Management is confident in its ability to continue to control and maintain the minimal exposure of credit risk, considering the Group has clear policies on the selection of customers, legally binding agreements in place for sales transactions and other services rendered and historically low levels of bad debts.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas (juga dikenal risiko pendanaan) adalah risiko di mana Grup akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Grup untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk (also known as funding risk) is a risk where the Group would be having a difficulty in obtaining funds to fulfill its commitments associated with financial instruments. Liquidity risk may rise from the incapability of the Group to sell assets immediately at prices close to its fair value.

Risiko likuiditas muncul dalam situasi Grup kesulitan memperoleh pendanaan. Kebijakan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati dilakukan dengan menjaga kecukupan kas dan setara kas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Liquidity risk arises in situations where the Grup struggles to obtain their financing. Risk management policy on liquidity was conducted carefully to maintain sufficient cash and cash equivalents. The Group manages liquidity risk by monitoring cash flow forecasts and actual cash flows and adjusts the maturity profile of financial assets and liabilities.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

48. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

48. Risk Management Policies (Continued)

	2022	2021	
Pinjaman			Debt
Pinjaman Bank Jangka Pendek	1.760.000.000	2.659.962.173	Short-Term Bank Loans
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			Current Maturities of Long-Term Liabilities
Pinjaman Jangka Panjang	1.196.958.601	934.991.570	Long Term Loans
Pinjaman Program PEN	437.500.000	--	PEN Program Loan
Utang Obligasi	--	999.447.166	Bonds Payable
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun			Long-Term Liabilities - Net of Current Maturities
Pinjaman Jangka Panjang	18.282.631.817	16.501.746.512	Long-Term Loans
Pinjaman Program PEN	3.062.500.000	3.500.000.000	PEN Program Loan
Utang Obligasi	4.490.760.381	2.993.800.573	Bonds Payable
Sukuk	498.307.111	--	Sukuk
Jumlah Liabilitas	29.728.657.910	27.589.947.994	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	29.080.184.305	23.597.652.792	Total Equity
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas	102,23%	116,92%	Total Debt to Equity

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

The Group actively and regularly examines and manages its capital structure to ensure optimum capital returns to shareholders, by consider the efficient usage of capital by operating cash flow and capital expenditures, and consideration of capital needs in the future.

49. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

49. Fair Value of Financial Instrument

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan, beserta nilai tercatatnya, adalah sebagai berikut:

The fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying amounts, are as follows:

	2022		2021		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan:					Financial assets:
Kas dan setara kas	5.695.720.193	5.695.720.193	3.808.203.932	3.808.203.932	Cash and cash equivalents
Dana dibatasi penggunaannya	5.610.385.976	5.610.385.976	2.748.463.918	2.748.463.918	Restricted fund
Piutang usaha	1.406.338.067	1.406.338.067	1.075.098.473	1.075.098.473	Trade receivables
Piutang lain-lain	90.003.063	90.003.063	74.670.546	74.670.546	Other receivables
Pendapatan Masih Akan Diterima	939.616.971	939.616.971	239.054.610	239.054.610	Accrued Income
Investasi Jangka Panjang	24.176.000	24.176.000	54.853.000	54.853.000	Long Term Investment
Jumlah	13.766.240.270	13.766.240.270	8.000.344.479	8.000.344.479	Total
Liabilitas keuangan:					Financial liabilities:
Utang usaha	2.458.886.168	2.458.886.168	1.666.028.990	1.666.028.990	Trade payables
Beban Akrua	1.572.961.926	1.572.961.926	1.431.722.644	1.431.722.644	Accrued expenses
Pinjaman jangka pendek	1.760.000.000	1.760.000.000	2.659.962.173	2.659.962.173	Short-term borrowings
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun	1.196.958.601	1.193.556.480	934.991.570	942.214.814	Current maturities of long-term loans
Utang Obligasi yang jatuh tempo satu tahun	--	--	999.447.166	921.416.128	Current maturities of Bonds Payable
Pinjaman Program PEN yang jatuh tempo satu tahun	437.500.000	437.500.000	--	--	Current maturities of PEN Program Loan
Utang jangka panjang: Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	18.282.631.817	18.271.820.560	16.501.746.512	16.493.900.395	Long-term debt: Long-term loans net off current maturity
Pinjaman Program PEN	3.062.500.000	2.653.951.168	3.500.000.000	3.181.740.333	PEN Program Loan
Utang Obligasi	4.490.760.381	4.633.482.471	2.993.800.573	2.970.790.377	Bonds Payable
Sukuk	498.307.111	516.209.186	--	--	Sukuk
Jumlah	33.760.506.004	33.498.367.959	30.687.699.628	30.267.775.854	Total

49. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (Lanjutan)

**49. Fair Value of Financial Instrument
(Continued)**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajarnya sebagai berikut:

As of Desember 31, 2022 and 2021 the carrying amounts of financial assets and liabilities approximate their fair value as follows:

1. Kas dan setara kas, investasi jangka pendek, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lain-lain. Aset keuangan tersebut merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.
2. Piutang Lain-Lain ke PSBI diukur pada nilai wajar menggunakan pengukuran level III.
3. Utang usaha, utang lain-lain, beban akrual dan pinjaman jangka pendek. Liabilitas keuangan tersebut merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.
4. Pinjaman bank jangka panjang, termasuk bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Liabilitas keuangan tersebut merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga variabel dan tetap yang disesuaikan dengan pergerakan suku bunga pasar sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut telah mendekati nilai wajar.
5. Nilai wajar obligasi sebesar nilai kini dari arus kas di masa datang, yang didiskontokan dengan tingkat suku bunga pasar.
6. Nilai wajar investasi jangka panjang diukur pada nilai wajar menggunakan pengukuran level III.

1. *Cash and cash equivalents, short-term investments, restricted cash, trade receivables and other receivables. That financial assets are due within 12 months, thus the carrying values of the financial assets approximate their fair values.*
2. *Others receivable to PSBI are measured at fair value using level III measurements.*
3. *Trade payables, other liabilities, accrued expenses and short-term loan. Those financial liabilities are due within 12 months, thus the carrying values of the financial liabilities approximately represent their fair values.*
4. *Long-term bank loans, including their current maturities. Those financial liabilities are liabilities with floating and fixed interest rates which are adjusted with the movements of market interest rates, so that the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values.*
5. *The fair values of the bond payable are estimated at the present value of future cash flows, discounted at market interest rate.*
6. *The fair values of the long term investment are measured at fair value using level III measurements.*

50. Perjanjian-perjanjian Penting

50. Significant Agreements

a. Perjanjian Penyerahan Jasa Angkutan Barang

Grup menandatangani perjanjian penyerahan jasa angkutan barang dengan beberapa perusahaan lain dengan ikhtisar sebagai berikut:

a. Freight Service Delivery Agreements

The Group has entered into an agreement for cargo delivery services with several other companies with a summary as follows:

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

1. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) – PT Bukit Asam (Persero) Tbk

- a) Perjanjian angkutan jangka panjang pengangkutan batu bara Sumatra Selatan rute Tanjung Enim Baru-Tarahan dan Tanjung Enim Baru-Kertapati, diatur dalam perjanjian No. 049/PKP/EKS-0500/HK.03/2009 dan No. 337/HK/D6/2009 tanggal 12 Oktober 2009. Beberapa hal penting yang diatur adalah sebagai berikut:
- Perjanjian berlaku mulai 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2029.
 - Para pihak menyusun target volume angkutan bulanan paling lambat 3 bulan sebelum tahun berjalan mengacu pada Rencana Angkutan Tahunan.
 - Jumlah volume batu bara yang diangkut untuk relasi Tanjung Enim Baru-Tarahan sebanyak 20.000.000 ton/tahun. Sedangkan untuk relasi Tanjungenim-Kertapati sebanyak 2.700.000 ton/tahun.
- b) Pengangkutan batu bara rute Tanjung Enim Baru-Tarahan dan Tanjung Enim Baru-Kertapati, diatur dalam Perjanjian No. 027/PJJ/EKS-0100/HK.03/2017 dan No. KL.701/VI/19/KA-2017 tertanggal 09 Juni 2017. hal penting yang diatur adalah sebagai berikut:
- Perjanjian berlaku mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2021.
 - Para pihak menyusun target volume angkutan bulanan paling lambat 3 bulan sebelum tahun berjalan mengacu pada Rencana Angkutan Tahunan.

1. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) – PT Bukit Asam (Persero) Tbk

- a) Long-term coal transportation agreement in South Sumatra Tanjung Enim Baru-Tarahan and Tanjung Enim Baru-Kertapati routes, as set in the agreement No. 049/PKP/EKS-0500/HK.03/2009 and No. 337/HK/D6/2009 dated October 12, 2009. Some important matters that were agreed are as follows:
- The agreement is started from January 1, 2010 until December 31, 2029.
 - All parties prepare transportation volume target at least 3 months before current year according to the Annual Transportation Plan.
 - Total volume of coal transported for Tanjung Enim Baru-Tarahan route is 20,000,000 tons/year. While for Tanjungenim-Kertapati route is 2,700,000 tons/year.
- b) Coal transportation for Tanjung Enim Baru-Tarahan and Tanjung Enim Baru-Kertapati routes, as set in the Agreement No. 027/PJJ/EKS-0100/HK.03/2017 and No. KL.701/VI/19/KA-2017 dated June 9, 2017. Some important matters that were agreed are as follows:
- The Agreement is started from January 1, 2017 until December 31, 2021.
 - Both parties prepare transportation volume target at least 3 months before next calendar year according to the Annual Transportation Plan.

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

- Berdasarkan perjanjian No. KL.701/VI/19/KA-2017 tanggal 9 Juni 2017 untuk tahun 2021 tarif angkutan batu bara relasi Tanjung Enim baru-Tarahan sebesar Rp511 (Rupiah penuh)/ton km dan relasi Tanjung Enim baru-Kertapati sebesar Rp680 (Rupiah penuh)/ton km belum termasuk PPN, namun sudah termasuk beban investasi pengembangan sebesar Rp25 (Rupiah penuh)/ton/kilometer.
- c) Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. KL.707/X/25/KA-2022 tanggal 31 Oktober 2022 antara Perusahaan dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (Para Pihak) menyatakan bahwa Para Pihak sepakat pelaksanaan angkutan batu bara tetap dijalankan untuk periode 1 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- 2. PT Pertamina (Persero) – PT Pertamina Patra Niaga**
Perjanjian ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2021 dengan No. KTR-008/PNA000000/2021-S0, No. KTR-185/PNE000000/2021-S0 dan No. KL.705/XI/4/KA-2021 yang merupakan Perjanjian Novasi atas perjanjian No. SP-003/R00000/2020-S0 dan No. KL.701/IV/1/KA-2020 tanggal 1 April 2020 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- Perjanjian berlaku surut mulai 1 Oktober 2015 sampai dengan 1 April 2025. Terhitung sejak tanggal 1 September 2021, PT Pertamina melakukan pengalihan hak dan kewajiban kepada PT Pertamina Patra Niaga.

- Based on agreement No. KL.701/VI/19/KA-2017 dated June 9, 2017 applied for 2021 the freight rates coal for Tanjung Enim Baru–Tarahan relation amounting to Rp511 (full amount)/ton kilometers and Tanjung Enim Baru-Kertapati relation amounting to Rp680 (full amount)/ton kilometers, those tariffs excludes VAT, but includes the cost of investment for development amounted to Rp25 (full amount)/ton/kilometers.
- c) Based on the Minutes of Agreement No.KL.707/X/25 /KA-2022 dated October 31, 2022 between the Company and PT Bukit Asam (Persero) Tbk (the Parties) stated that the Parties agreed that the implementation of coal transportation would continue for period November 1, 2022 until Desember 31, 2022.
- 2. PT Pertamina (Persero) – PT Pertamina Patra Niaga**
The agreement was signed on December 28, 2021 with agreement No. KTR-008/PNA000000/2021-S0, No. KTR-185/PNE000000/2021-S0 and No. KL.705/XI/4/KA-2021 which is Novation Agreement on No SP-003/R00000/2020-S0 and No.KL.701/IV/1/KA-2020 agreement dated April 1, 2020 with the terms and conditions as follows:
- The agreement is valid retrospectively from October 1, 2015 until April 1, 2025. Since September 1, 2021, PT Pertamina transfer rights and obligation to PT Pertamina Patra Niaga.

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

- Jasa yang diperjanjikan adalah pengangkutan bahan bakar minyak (meliputi premium, minyak tanah, solar, minyak diesel dan minyak bakar) dan bahan bakar minyak khusus (meliputi avtur, avgas, super TT, premix dan bensin biru) dengan menggunakan gerbong ketel.
- Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK) yang diangkut ditetapkan dalam rencana tahunan yang dikemudian dijabarkan secara definitif dalam rencana bulanan dan disetujui oleh kedua belah pihak.
- Tarif keseluruhan ditetapkan sebesar Rp694.40 KL/KM untuk semua jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahan Bakar khusus (BBK) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Apabila terdapat klaim atas susut atau kerusakan mutu BBM/BBK yang diangkut akan diterbitkan, nota debet tagihan dan tagihan selanjutnya akan diperhitungkan serta dipotong dari tarif keseluruhan.

3. PT Bara Alam Utama

Perjanjian kerja sama tentang angkutan batu bara dari Sukacinta ke Kertapati No. HK.221/XII/19/KA-2012 dan No. 001/BAU-KAI/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012 dan diadendum IV dengan Perjanjian No. KL.701/XI/12/KA-2021 tanggal 17 November 2021.

Beberapa hal penting yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah:

- Perjanjian berlaku mulai 14 Desember 2012 sampai dengan 13 Desember 2032.
- Setiap penambahan pengangkutan sebesar 1 juta MT/tahun, penyewa harus menyerahkan uang Jaminan sebesar Rp125.000.000, jika sepakat untuk menambah target volume angkutan maka harus memberikan:

- *Services included transportation for fuels (such as premium, kerosene, diesel fuel, diesel oil and fuel oil) and special fuels (such as aviation fuel, avgas, Super TT, premix and petrol blue) by using a kettle train.*

- *The amount of transported fuel oils and special fuel oils is determined in a yearly plan which subsequently detailed a monthly definitive plan and approved by both parties.*

- *The tariff is determined at Rp694,40 KL/KM for all types of fuel oils and special fuel oils, excluding value-added tax (VAT).*

- *If there is a claim for loss or damage of the quality of fuel, the invoice will be issued, debit bill and further bill will be calculate and deducted all in tariff.*

3. PT Bara Alam Utama

The Agreement of Coal Transportation for Sukacinta – Kertapati relation No. HK.221/XII/19/KA-2012 and No. 001/BAU-KAI/XII/2012 dated December 14, 2012 and amendment IV with the Agreement No. KL.701/XI/12/KA-2021 dated November 17, 2021.

Some important matters that were agreed were as follow:

- *The agreement is started from December 14, 2012 untill December 13, 2032.*

- *Additions of transportation volume by 1 million MT/year, the customer should give security deposit/bond amounted to Rp125,000,000, if agreed to increase the volume target, the customer should give:*

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

Target Volume Angkutan Tahunan (nilai penuh)/ Annual Transportation Target Volume (full amount)	Uang Jaminan/ Deposit Amount
500.000 – 1.500.000	Rp125.000.000
1.500.000 – 2.500.000	Rp125.000.000
2.500.000 – 3.500.000	Rp125.000.000
<ul style="list-style-type: none"> Tarif angkutan batu bara rute Sukacinta-Kertapati sebesar Rp660 (Rupiah penuh)/ ton km dan rute Sukacinta-Simpang sebesar Rp665 (Rupiah penuh)/ton km berdasarkan harga dasar BBM sebesar Rp4.814 (Rupiah penuh)/ liter. Pengembalian Uang Jaminan dilakukan selama 59 bulan sebesar Rp2.100.000 dan sisanya sebesar Rp1.100.000 dibayarkan pada bulan ke 60 atau senilai 20% dari tagihan biaya angkutan bulan berjalan apabila nilai tersebut melebihi Rp2.100.000. 	<ul style="list-style-type: none"> Coal transportation tariff for routes Sukacinta–Kertapati amounted to Rp660 (full amount)/ ton kilometer and for route Sukacinta - Simpang is Rp665 (full amount)/ton kilometer, based on fuel price at Rp4,814 (full amount)/ litre. The refund of security deposit should be made within 59 months totaling Rp2,100,000 and the remaining amounted of Rp1,100,000 be paid on the month of 60th or equivalent to the value of 20% of the transportation fee of the current month if the amount exceeds Rp2,100,000.
<p>4. PT Baramulti Sugih Sentosa Perjanjian kerja sama angkutan batu bara dari Sukacinta-Kertapati No. HK.221/IV/11/KA-2012 dan No. 075/LEG-BMSS/IV/2012 dan di Addendum VI dengan perjanjian No. KL.701/XI/1/KA-2021 tertanggal 5 November 2021.</p> <p>Beberapa hal penting yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perjanjian berlaku mulai 5 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2037. PT Baramulti Sugih Sentosa harus menyerahkan Jaminan dalam bentuk bank garansi sebesar Rp38.333.968 untuk periode 1 November 2021–31 Desember 2022. 	<p>4. PT Baramulti Sugih Sentosa The agreement of coal transportation from Sukacinta-Kertapati No.HK.221/IV/11/KA-2012 and No.075/LEG-BMSS/IV/2012 and amendment VI with agreement KL.701/XI/1/KA-2021 and dated November 5, 2021.</p> <p>Some important matters that were agreed were as follow:</p> <ul style="list-style-type: none"> The agreement is started from November 5, 2021 untill December 31, 2037. PT Baramulti Sugih Sentosa must give bank guarantee amounted to Rp38,333,968 for period November 1, 2021– December 31,2022.

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

- Berdasarkan Addendum VI No. KL.701/X/1/KA-2021 dan No. 098.B/BMSS-KAI/LEG/XI/2021 pertanggal 05 November 2021 tarif angkutan batu bara untuk relasi Sukacinta-Kertapati sebesar Rp667,50 (Rupiah penuh)/ton km, relasi Merapi-Kertapati sebesar Rp667,50 (Rupiah penuh)/ton km, relasi Sukacita-Simpang sebesar Rp672,50 (Rupiah penuh)/ton km dan relasi Merapi-Simpang sebesar Rp672,50 (Rupiah penuh)/ton km berdasarkan harga dasar BBM sebesar Rp5.941 (Rupiah penuh)/liter.

- Based on Amendment VI No. KL.701/X/1/KA-2021 and No. 098/BMSS-KAI/LEG/XI/2021 dated November 05, 2021 for relation Sukacinta-Kertapati amounted Rp667.50 (full amount)/ton kilometer, relation Merapi-Kertapati amounted Rp667.50 (full amount)/ton kilometer, relation Sukacinta-Simpang amounted Rp672.50 (full amount)/ton kilometer, and relation Merapi-Simpang amounted Rp672.50 (full amount)/ton kilometer based on fuel price at Rp5,941 (full amount)/litre.

5. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Perjanjian kerja sama tentang angkutan *Crude Palm Oil* (CPO) ditandatangani pada tanggal 01 Februari 2022 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

5. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

The agreement of *Crude Palm Oil* (CPO) transportation signed on February 1, 2022 with the terms and conditions as follows:

No/No	No Perjanjian / No Aggrement	Relasi / Relation	Tarif (Rp/Kg) / Fee (Rp/Kg)
1	KL.701/II/19/KA-2022	PKS Rambutan - PT INL Sei Mangkei	65,20
2	KL.701/II/20/KA-2022	PKS Aek Nabara Selatan - PT KPBN Unit Belawan	153,70
3	KL.701/II/21/KA-2022	PKS Rambutan - PT KPBN Unit Belawan	72,58
4	KL.701/II/22/KA-2022	PKS Sei Mangkei - PT KPBN Unit Belawan	110
5	KL.701/II/23/KA-2022	PKS Sei Silau - PT KPBN Unit Belawan	115
6	KL.701/II/24/KA-2022	PKS Sisumut - PT KPBN Unit Belawan	211,49

*) Nilai Penuh

*) Full Amount

Perjanjian berlaku mulai 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

The agreement is started from February 1, 2022 until December 31, 2022.

Sampai tanggal laporan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan.

As of the date of reporting, this agreement is still in the process of renewal

6. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)

Perjanjian ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2022 No.04.05/S.Perj/Pem/04/III/2022 dan No. KL.701/III/24/KA-2022 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

6. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)

The agreement was signed on March 1, 2022 No. 04.05/S.Perj/Pem/04/III/2022 and No. KL.701/III/24/KA-2022 with the terms and conditions as follows:

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

- Perjanjian berlaku mulai 1 Maret 2022 sampai 31 Desember 2022.
- Perjanjian kerja sama tentang Pengangkutan Produksi Minyak Sawit/ Crude Palm Oil (CPO) dengan menggunakan gerbong KKW ke Belawan dan Sei Mangkei.

Sampai tanggal laporan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan.

7. PT Bintang Cemerlang Sentosa

Perjanjian kerja sama tentang angkutan Batu Bara dengan menggunakan gerbong datar dari Banjarsari ke Simpang ditandatangani pada tanggal 01 Agustus 2019 dengan No. KL.701/VIII/20/KA-2019 dan No. 047/DIR-BCS/VIII/2019 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Perjanjian berlaku sejak tanggal efektif pelaksanaan perjanjian dengan jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang.
- Tarif angkutan batu bara rute Banjarsari - Simpang sebesar Rp662 (Rupiah penuh)/ ton km berdasarkan harga dasar BBM sebesar Rp5.650 (Rupiah penuh)/ liter.
- PT Bintang Cemerlang Sentosa akan memberikan uang jaminan atas biaya angkutan berupa bank garansi sebesar Rp9.830.700.

50. Significant Agreements (Continued)

- *The agreement is started from March 1, 2022 until December 31, 2022.*
- *The agreement of Crude Palm Oil (CPO) transportation use wagon KKW to Belawan and Sei Mangkei.*

As of the date of reporting, this agreement is still in the process of renewal

7. PT Bintang Cemerlang Sentosa

The agreement of transport with coal use flat wagon from Banjarsari to Simpang was signed on August 01, 2019 with No. KL.701/VIII/20/KA-2019 and No. 047/DIR-BCS/VIII/2019 with the terms and conditions as follows:

- *The agreement is started from the effective date of the implement the agreement for a period of 10 years can be extended.*
- *Coal transportation tariff for routes Banjarsari - Simpang amounted to Rp662 (full amount)/ ton kilometer based on fuel price at Rp5,650 (full amount)/ litre.*
- *PT Bintang Cemerlang Sentosa will provide a security deposit for transportation cost in the form of a bank guarantee amounted to Rp9,830,700.*

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

8. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk – PT Semen Padang

Perjanjian kerja sama tentang angkutan Barang dari Indarung ke Teluk Bayur ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2019 dengan No. KL.701/XII/30/KA-2019 dan No.0002149/PG.01/DP/50050629/200/12.2019 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Perjanjian berlaku mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.
- Semen Padang wajib memenuhi target minimal pengangkutan tahunan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Target/Tahun
1	2020	119.000 Gerbong/ Wagons
2	2021	105.000 Gerbong/ Wagons
3	2022	Akan disepakati Para Pihak, dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian/ Will be agreed by the Parties, and set forth in the Addendum

- Tarif angkutan Barang rute dari Indarung-Teluk Bayur sebesar Rp520,150 (Rupiah penuh)/ Gerbong km berdasarkan harga dasar BBM sebesar Rp5.150 (Rupiah penuh)/ liter.

Sampai tanggal laporan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan.

8. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - PT Semen Padang

The agreement of Freight Transport from Indarung – Teluk Bayur was signed on December 31, 2019 with No. KL.701/XII/30/KA-2019 and No.0002149/PG.01/DP/50050629/200/12.2019 with the terms and conditions as follows:

- The agreement is started from January 1, 2020 until December 31, 2022.
- Semen Padang is required to meet the minimum annual transportation target, with the following details:

- Freight transportation tariff for routes Indarung-Teluk Bayur amounted to Rp520,150 (full amount)/ Wagon km based on fuel price at Rp5,150 (full amount)/ litre.

As of the date of reporting, this agreement is still in the process of renewal

b. Perjanjian Asuransi

1. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Asuransi Jasa Raharja Putera

Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Asuransi Jasa Raharja Putera tentang Pengadaan Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang dan Awak Sarana Kereta Api untuk periode 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2023 dengan Perjanjian No. KL.702/III/9/KA-2021 tanggal 9 Maret 2021. Lingkup Jaminan Pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah penumpang KA, awak KA penumpang dan awak KA barang angkutan.

b. Insurance Agreement

1. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Asuransi Jasa Raharja Putera

The Company entered into an agreement with PT Asuransi Jasa Raharja Putera regarding to Procurement of Passengers and Officers Responsible Insurance for period January 1, 2021 until December 31, 2023 No. KL.702/III/9/KA-2021 dated March 9, 2021. Scope of Warranty Coverage as set in this agreement is train passengers, officers on duty, and goods.

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

	<u>Rp</u>	
A. Penumpang KA		A. Train Passenger
1) Meninggal dunia	40.000	1) Death
2) Cacat tetap (maksimum)	30.000	2) Permanent disability (Maximum)
3) Biaya perawatan (maksimum)	30.000	3) Recovery costs (maximum)
4) Biaya pemakaman	2.500	4) Funeral cost
B. Awak sarana Perkeretaapian		B. Officer on Train
I. Untuk masinis dan asisten masinis		I. Machinist and machinist assistant
1) Meninggal dunia	85.000	1) Death
2) Cacat tetap (maksimum)	95.000	2) Permanent disability (maximum)
3) Biaya perawatan (maksimum)	35.000	3) Recovery costs (maximum)
4) Biaya pemakaman	5.000	4) Funeral cost
II. Kondektur, kondektur pembantu dan manajer KA		II. Conductor, conductor assistant and train manager
1) Meninggal dunia	75.000	1) Death
2) Cacat tetap (maksimum)	85.000	2) Permanent disability (maximum)
3) Biaya perawatan (maksimum)	35.000	3) Recovery costs (maximum)
4) Biaya pemakaman	5.000	4) Funeral cost
III. Teknisi KA, petugas restorasi, petugas keamanan, dan lainnya		III. Train technicians, train restaurant officers, security officers, and others
1) Meninggal dunia	65.000	1) Death
2) Cacat tetap (maksimum)	75.000	2) Permanent disability (maximum)
3) Biaya perawatan (maksimum)	35.000	3) Recovery costs (maximum)
4) Biaya pemakaman	5.000	4) Funeral cost
C. Biaya transportasi korban kereta api dari TKP		C. Transport fee for Train victims from the accident place
Per kejadian :	1.000	per accident

Kewajiban Perusahaan adalah membayar premi asuransi kepada PT Jasa Raharja Putera melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bandung.

The Company's obligation to pay insurance premium PT Jasa Raharja Putera through PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bandung Branch.

Jumlah iuran wajib yang harus dibayar Perusahaan kepada PT Jasa Raharja Putera untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.134.782.300, Rp2.280.407.613 dan Rp2.436.170.803 (nilai penuh).

Total mandatory contribution to be paid by the Company to PT Jasa Raharja Putera for year 2021, 2022 and 2023 amounted to Rp2,134,782,300, Rp2,280,407,613 and Rp2,436,170,803 (full amount), respectively.

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

2. PT Asuransi Wahana Tata

Perusahaan telah menandatangani perpanjangan perjanjian dengan PT Asuransi Wahana Tata No. KL.702/II/18/KA-2020 dan 177/DIR/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pengadaan Asuransi Angkutan Barang Periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.

2. PT Asuransi Wahana Tata

The Company has entered into the addendum of agreement with PT Asuransi Wahana Tata No. KL.702/II/18/KA-2020 and 177/DIR/II/2020 on February 10, 2020 regarding Procurement of Insurance for Freight Transportation for Period January 1, 2020 until December 31, 2022.

	<u>Rp</u>	
1) Angkutan batu bara		1) Coal freight
Setiap Kejadian :	500.000	Per accident
Peti kemas per kejadian :	100.000	Container per accident
Jumlah ganti rugi periode :	6.500.000	Amount of the compensation for the period cover
pertanggungan		
2) Angkutan Non Peti kemas		2) Non - Container Goods
untuk setiap kejadian :	500.000	Per accident
Jumlah ganti rugi periode :	6.000.000	Amount of the compensation for the period cover
pertanggungan		
3) Angkutan Bahan Bakar Minyak dan CPO		3) Fuel and Crude Palm Oil Freight
Setiap kejadian :	350.000	Per Accident
Jumlah ganti rugi periode :	3.500.000	Amount of the compensation for the period cover
pertanggungan		
4) Angkutan Barang menggunakan kereta api dengan peti kemas dan multi komoditas:		4) Freight transportation by trains using containers and multi commodities:
Setiap kejadian :	450.000	Per accident
Peti kemas per kejadian :	100.000	Container per accident
Jumlah ganti rugi periode :	5.000.000	Amount of the compensation for the period cover
pertanggungan		

3. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Jasa Raharja (Persero)

Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan PT Jasa Raharja (Persero) tentang Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang Kereta Api untuk Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 No. KL.702/II/18/KA-2022 tanggal 28 Januari 2022. Lingkup jaminan pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah penumpang sah kereta api.

Perhitungan manfaat asuransi dengan rincian sebagai berikut:

3. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Jasa Raharja (Persero)

The Company has entered into the agreement with PT Jasa Raharja (Persero) regarding to Statutory Insurance Accident for Train Passenger for period January 1, 2022 until December 31, 2026 No. KL.702/II/18/KA-2022 dated January 28, 2022. Scope of train passenger insurance coverage as set forth in this agreement is legal passenger train.

The insurance benefits calculations are follows:

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

Penumpang KA	<u>Rp</u>	Passenger Train
Meninggal Dunia	50.000	: Death
1) Cacat tetap (maksimum)	50.000	: 1) Permanent disability (maximum)
2) Biaya perawatan (maksimum)	20.000	: 2) Recovery costs (maximum)
3) Biaya P3K (maksimum)	1.000	: 3) First aid kit cost (maximum)
4) Biaya ambulans	500	: 4) Ambulance cost
5) Biaya pemakaman	4.000	: 5) Funeral cost

Kewajiban Perusahaan adalah membayar premi kepada PT Jasa Raharja (Persero) serta menyetorkan ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung.

The Company was obligated to pay premium to PT Jasa Raharja (Persero) and deposit it to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung Branch.

Jumlah iuran wajib yang harus dipungut oleh Perusahaan adalah sebesar Rp120 (Rupiah penuh) per penumpang untuk setiap kali perjalanan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.

Total obligated of contributions that collected by Company from passenger in amount of Rp120 (full amount) for each Passenger in one trip, for period from January 1, 2022 until December 31, 2026.

4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

Perusahaan melakukan Perjanjian dengan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia tentang Pengadaan Asuransi Kesehatan Dewan Komisaris Beserta Keluarga, Direksi beserta Keluarga dan Organ Pendukung Dewan Komisaris periode 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2023 No. KL.702/V/5/KA-2022 tanggal 18 Mei 2022.

4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

The Company signed an agreement with PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia regarding Procurement for Insurance of Healthcare for Board of Commissioners and Board of Directors and Family, and Board of Commissioners Support Organization for period from March 1, 2022 through February 28, 2023 No. KL.702/V/5/KA-2022 dated May 18, 2022.

Lingkup Jaminan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah Dewan Komisaris Beserta Keluarga, Direksi Beserta Keluarga dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

The Scope of Insurance Coverage as set in this agreement was Board of Commissioners and Family, Board of Directors and Family, and Board of Commissioners Support Organization.

Kewajiban Perusahaan adalah membayar premi kepada PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia serta menyetorkan ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ahmad Yani.

The Company was obliged to pay insurance premium to PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia and deposit them to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Ahmad Yani Branch.

Jumlah total biaya premi yang dibayarkan sebesar Rp1.536.000 termasuk biaya polis dan premi.

The insurance premium paid amounted to Rp1,536,000 including policy fee and premium.

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

5. PT Asuransi Wahana Tata

Perusahaan melakukan Perjanjian dengan PT Asuransi Wahana Tata tentang Pengadaan Asuransi Aset Sarana PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KL.702/XII/6/KA-2022 dan No. 692/DIR/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2025. Lingkup Jaminan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah Aset Sarana Perusahaan dengan kondisi semua risiko properti, gempa bumi, dan terorisme dan sabotase. Premi yang telah disepakati sebesar Rp52.529.235 per periode.

Besaran klaim atas risiko sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Polis Semua Risiko Properti
 - a. Kerusakan Aset Sarana:
 - i. Pada saat operasi adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD35,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.
 - ii. Pada saat Depo atau Balai Yasa adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD350,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.
 - b. Gangguan Usaha
30 (tiga puluh) hari setiap kejadian
- 2) Polis Gempa Bumi
 - a. Kerusakan Aset Sarana
 - i. Pada saat operasi adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD35,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian
 - ii. Pada saat Depo atau Balai Yasa adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD350,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.
 - b. Gangguan Usaha
30 (tiga puluh) hari setiap kejadian, termasuk gangguan usaha yang disebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi, dan tsunami.

5. PT Asuransi Wahana Tata

The Company signed an agreement with PT Asuransi Wahana Tata regarding Procurement for Insurance on Means of Transportation Assets of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KL.702/XII/6/KA-2022 and No. 692/DIR/XII/2022 dated December 5, 2022 with the term of the agreement was effective from October 30, 2022 through October 30, 2025. The Scope of Insurance Coverage as set forth in this agreement was means of Transportation Assets of The Company for property all risks, earthquake, terrorism and sabotage. Premiums agreed amounted to Rp52,529,235.

The amount of claims as follows:

- 1) Property All Risks Policy
 - a. Transportation Assets Damage:
 - i. When operating is 10% of loss, or USD35,000 (full amount) in minimum for each loss occurred.
 - ii. When in depot or Workshop is 10% of loss, or USD350,000 (full amount) in minimum for each loss occurred.
 - b. Business Interruption
30 (thirty) days per incident
- 2) Earthquake Policy
 - a. Transportation Assets Damage
 - i. When operating is 10% of loss, or USD35,000 (full amount) in minimum for each loss occurred.
 - ii. While in depot or Workshop is 10% of loss, or USD350,000 (full amount) in minimum for each loss occurred.
 - b. Business Interruption
30 (thirty) days per incident includes business interruption caused by earthquake, volcano eruption, fire and explosion which followed by earthquake and/or volcano eruption, and tsunami.

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

- 3) Polis terorisme dan sabotase
- Kerusakan aset sarana sebesar USD250,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.
 - Gangguan usaha selama 30 hari setiap mengalami kerugian

Kewajiban Perusahaan adalah membayar premi kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) serta menyetorkan ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Wisma Tugu.

6. **PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Asuransi Jiwa IFG (Life)**
Perusahaan melakukan Perjanjian dengan PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) tentang Pengelolaan Program Asuransi JS Pendanaan Hari Tua Bagi Pegawai Perusahaan. Berdasarkan perjanjian No. KL.705/VI/10/KA-2021 dan No. 00056/SJ/T/HKM/0621 tanggal 2 Juni 2021 terhitung sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2026, PT Asuransi Jiwasraya melakukan pengalihan polis asuransi kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Premi asuransi untuk program JHT dikelola secara *Individual Account* dan *Pooledfund Account* ditetapkan sebagai berikut :

- Dana awal pada saat awal mulai berlakunya asuransi sebesar Rp1.578.127.345.410 (nilai penuh)
- Dana lanjutan berupa premi berkala bulanan sebesar 17,25% dari gaji dasar asuransi tiap bulan berjalan yang terdiri dari:
 - luran tertanggung/peserta sebesar 4,75% dari gaji dasar asuransi tiap bulan berjalan; dan
 - luran Perusahaan sebesar 12,5% dari gaji dasar asuransi tiap bulan berjalan.

- 3) *Terrorism and sabotage policy*
- Transportation Assets Damage of USD250,000 (full amount) for each loss occurred.*
 - Business Interruption for 30 days of each loss occurrence.*

The Company is obliged to pay insurance premiums to PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) and deposit them to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Jakarta Wisma Tugu Branch.

6. **PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Asuransi Jiwa IFG (Life)**
The Company signed an agreement with PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) regarding management of the JS Insurance program for old age funding for employee the Company. Based on Agreement No. KL.705/VI/10/KA-2021 and No. 00056/SJ/T/HKM/0621 dated June 2, 2021 as of May 1, 2021 through April 30, 2026, PT Asuransi Jiwasraya transferred the insurance policy to PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Insurance premium for JHT program managed with Individual Account and Pooledfund Account set as follows:

- The initial fund at the start of the insurance is Rp1,578,127,345,410 (full amount)*
- Continuation funds in the form of monthly periodic premiums is 17,25% from insurance basic salary each current month consisting of:*
 - The contribution of the insured/participant is 4.75% of the basic insurance salary each month; and*
 - The Company contribution is 12.5% of the basic insurance salary each month.*

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

Premi asuransi untuk program pascakerja dikelola secara *pooled fund account* ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dana awal pada saat awal mulai berlakunya asuransi sebesar Rp223.601.601.551 (nilai penuh); dan
- b. Dana lanjutan berupa premi berkala tahunan yang bersumber dari iuran perusahaan berdasarkan valuasi premi yang akan dilakukan setiap bulan Oktober, sebesar 5% dari gaji dasar asuransi tahun sebelumnya.

c. Perjanjian Pengadaan BBM

PT Pertamina (Persero) - PT Pertamina Patra Niaga

Perusahaan telah menandatangani Perjanjian dengan PT Pertamina Patra Niaga tentang Pengadaan BBM No. KL.702/III/1/KA-2022 dan No. KTR-014/PNC00000/2022-S0 tanggal 1 Maret 2022. Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Perjanjian berlaku mulai 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.
- Penyaluran BBM dilaksanakan atas dasar hasil pengukuran Alat Ukur/flowmeter yang sudah ditera oleh Dinas Metrologi.
- Harga BBM bersubsidi mengacu kepada Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Untuk harga BBM non subsidi PT Pertamina Patra Niaga memberikan potongan harga sebesar 5% (lima persen).
- Biaya Jasa *Handling/Vendor Held Stock* sebesar Rp438/liter yang dibebankan kepada Perusahaan.

Insurance premiums for post-employment programs managed by a pooled fund account are determined as follows:

- a. *The initial fund at the start of the insurance is Rp223,601,601,551 (full amount); and*
- b. *Continuation funds in the form of annual periodic premiums sourced from company contributions based on premium valuations which will be carried out every October, amounting to 5% of the previous year's basic insurance salary.*

c. Procurement of BBM Agreement

PT Pertamina (Persero) - PT Pertamina Patra Niaga

The Company has entered into agreement with PT Pertamina Patra Niaga regarding the Procurement of BBM No. KL.702/III/1/KA-2022 and No. KTR-014/PNC00000/2022-S0 on March 1, 2022 with the terms and conditions as follows:

- *The agreement is started from March 1, 2022 until December 31, 2023.*
- *The distribution of BBM implemented on the basis of the measurement results of /flowmeter that has been measured by the Metrology Service.*
- *The subsidized fuel price refers to Presidential Regulation No. 191/2014 concerning the Provision, Distribution and Selling Price of Retail Fuel Oil. For non-fuel prices subsidies PT Pertamina provides a discount of 5% (five percent).*
- *Handling/Vendor Held Stock Service Fee of Rp438/litre which is charged to the Company.*

51. Kontinjensi

a. Pada tanggal 6 Desember 2022 dan 27 Desember 2022, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan telah menerbitkan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas penggunaan *Track Access Charge* (TAC) kepada Grup dengan merujuk pada Peraturan Kementerian Keuangan nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan ("PMK 138/2021") dengan nilai tagihan untuk Grup sebagai berikut:

1. Surat Tagihan PNBP TAC tanggal 6 Desember 2022 atas Triwulan I dan II Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp588.985.461 dan Rp649.147.603 sehingga total tagihan Semester I sebesar Rp1.238.133.064.
2. Surat Tagihan PNBP TAC tanggal 27 Desember 2022 atas Triwulan III dan IV Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp590.696.273 dan Rp590.696.273 sehingga total tagihan semester II sebesar Rp1.181.392.546.

Tagihan tersebut ditujukan kepada Grup sebagai operator angkutan kereta yang terdiri dari Perusahaan, KCI dan Railink. Atas tagihan tersebut, KCI telah melakukan pembayaran sebagian tagihan TAC untuk triwulan I dan II sebesar Rp142.889.592 pada tanggal 14 Desember 2022. Sedangkan untuk selisih tagihan lainnya Grup mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Perusahaan mengajukan Permohonan Pembebasan PNBP TAC Tahun 2022 dengan surat Nomor KF.302/III/2/KA-2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan pokok permohonan pembebasan pokok PNBP terutang senilai Rp2.155.033.651 dan pembebasan denda keterlambatan pembayaran TAC senilai Rp151.128.445.

51. Contingencies

a. On December 6 2022 and December 27 2022, the Government through the Directorate General of Railways (DJKA) of the Ministry of Transportation has issued Non-Tax State Revenue (PNBP) bills for the use of *Track Access Charges* (TAC) to the Group by referring to Ministry of Finance Regulation number 138/PMK.02/2021 concerning Types and Tariffs for Non-Tax State Revenues that are Volatile and Urgent Needs Applicable to the Ministry of Transportation ("PMK 138/2021") with the bills amounted for the Group are as follows:

1. Bills of PNBP of TAC on December 6, 2022 for the 1st and 2nd quarter of 2022 amount of Rp588,985,461 and Rp649,147,603 respectively, so that the invoice total in 1st semester amount of Rp1,238,133,064.
2. Bills of PNBP of TAC on December 27, 2022 for the 3rd and 4th quarter of 2022 amount of Rp590,696,273 and Rp590,696,273 respectively, so that the invoice total in 2nd semester amount of Rp1,181,392,546.

The bills are directed to the Group as a train transport operator consisting of the Company, KCI and Railink. On that bill, KCI has made a partial payment of for the 1st and 2nd quarter amount of Rp142,889,592 on December 14, 2022. For other bills, the Group submitted the following request:

1. The Company applied for the bill relief of PNBP of TAC year 2022 by letter No.KF.302/III/2/KA-2023 dated March 21, 2023 with the bill relief amount of Rp2,155,033,651 and the exemption of the fines of Rp151,128,445.

51. Kontinjensi (Lanjutan)

51. Contingencies (Continued)

Atas permohonan tersebut, Kementerian Perhubungan telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor: KU.102/2/22/K2/DJKA/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang persetujuan keringanan pokok TAC terutang senilai Rp1.731.840.115 dan pembebasan denda senilai Rp151.128.445, sehingga nilai TAC terutang yang dibukukan pada 31 Desember 2022 oleh Perusahaan adalah Rp423.193.536.

2. KCI mengajukan Permohonan Pembebasan PNBPTAC Tahun 2022 dengan surat Nomor 57/CV.200/CU/KCI/IV/2023 tanggal 17 April 2023 dengan pokok permohonan Pembebasan pokok PNBPTAC Triwulan III dan IV senilai Rp112.359.598 dan denda keterlambatan pembayaran TAC senilai Rp6.741.576.

Atas permohonan tersebut, sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, masih terdapat sejumlah tagihan yang masih dalam proses revidan verifikasi dari Kementerian Perhubungan.

3. Railink mengajukan Permohonan Pembebasan PNBPTAC Tahun 2022 dengan surat Nomor RL/DIR/364/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan pokok permohonan pembebasan pokok PNBPTAC terutang senilai Rp9.242.770 dan pembebasan denda keterlambatan pembayaran TAC senilai Rp663.009.

Atas permohonan tersebut, sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, masih terdapat sejumlah tagihan yang masih dalam proses revidan verifikasi dari Kementerian perhubungan namun demikian Railink telah membukukan keseluruhan nilai tersebut pada beban tahun berjalan.

On that request, The Ministry of Transportation has provided approval by letter No. KU.102/2/22/K2/DJKA/2023 dated May 16, 2023 concerning the approval of the bill relief amount of Rp1,731,840,115 and the exemption of fines amount of Rp151,128,445, so that the Company record the payable of TAC on December 31, 2022 amount of Rp423,193,536.

2. *KCI applied for the bill relief of PNBPTAC year 2022 by letter No.57/CV.200/CU/KCI/IV/2023 dated April 17, 2023 with the bill relief of PNBPTAC 3rd and 4th quarter amount of Rp112,359,598 and the exemption of the fines amount of Rp6,741,576.*

On that request, until the issuance date of the consolidated financial statement, there are some number of bills that are in the process of review and verification from the Ministry of Transportation.

3. *Railink applied for the bill relief of PNBPTAC year 2022 by letter No RL/DIR/364/III/2023 dated March 21,2023 with the bill relief of PNBPTAC 3rd and 4th quarter amount of Rp9,242,770 and the exemption of the fines amount of Rp663,009.*

On that request, until the issuance date of the consolidated financial statement, there are some number of bills that are in the process of review and verification from the Ministry of Transportation, however the Railink has recorded the total as expense on the current year.

51. Kontinjensi (Lanjutan)

51. Contingencies (Continued)

Dalam hal belum adanya kepastian terhadap nilai TAC terutang pada KCI, KCI membukukan beban TAC per 31 Desember 2022 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BPK ("BA BPK") tanggal 27 April 2023 atas PSO Grup untuk tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp38.391.792. Selain itu, atas tagihan TAC Triwulan I dan II sebesar Rp142.889.592 yang telah dibayarkan oleh KCI, dalam BA BPK tersebut diperhitungkan sebagai penambah PSO dengan nilai yang sama, dan jumlah tersebut merupakan bagian jumlah yang akan ditagihkan atas kekurangan Pemerintah dalam pembayaran PSO ke KCI.

In the event that there is no certainty regarding the outstanding TAC at KCI, KCI recorded TAC expense as of December 31, 2022 based on the Minutes of Audit of the BPK ("BA BPK") dated April 27, 2023 concerning Group's PSO for the year 2022 amount of Rp38,391,792. In addition, for the 1st and 2nd quarter TAC invoices amounting to Rp142,889,592 which have been paid by the KCI, refer to the BA BPK that is calculated as an addition to PSO with the same value, and this amount is part of the amount that will be billed for the Government's underpayment related PSO payments to the KCI.

Sedangkan atas tagihan triwulan III dan IV sebesar Rp112.359.598, KCI berkeyakinan hal tersebut tidak akan menjadi beban KCI mengacu hasil perhitungan nilai TAC tahun anggaran 2022 sesuai dengan BA BPK. Dalam hal tidak adanya keringanan yang nantinya diterima, KCI akan melakukan upaya kompensasi pengembalian melalui mekanisme pertanggungjawaban PSO tahun anggaran selanjutnya, karena beban TAC merupakan salah satu komponen BIOP pembentuk tarif yang diperhitungkan dalam PSO sesuai dengan PM 17/2018.

Meanwhile on the 3rd and 4th bills amount of Rp112,359,598, KCI believes that will not be KCI's expense referring to the results of the calculation of the TAC for the year 2022 in accordance with the BA BPK. In case of there is no relief that will be received later, KCI will attempt to compensate through a PSO responsibility mechanism on the next year since the TAC is one of the operating expense components that calculated in PSO corresponds to PM 17/2018.

- b. Perusahaan merupakan tergugat 1 dalam gugatan yang diajukan oleh PT Pentasena Bina Wisesa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perwakilan Bandung yang terdaftar atas perkara No. 33/2018/BANI Bandung. Inti dari gugatan tersebut adalah Surat Keputusan kerja sama yang dikeluarkan oleh Perusahaan kepada PT Pentasena Bina Wisesa, dimana PT Pentasena Bina Wisesa tidak menerima surat keputusan kerja sama dimaksud kemudian tetap berdasarkan klausul kontrak.

- b. The Company constitute as the 1st defendant in the act against the law lawsuit as submitted by PT Pentasena Bina Wisesa through Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Bandung Representative submitted as the case No. 33/2018/BANI Bandung. The Essence of lawsuit is letter of cooperation termination which are issued by the company to PT Pentasena Bina Wisesa, which is not received by PT Pentasena Bina Wisesa, then remain based on the contract clause.*

51. Kontinjensi (Lanjutan)

51. Contingencies (Continued)

Pada tanggal 23 Mei 2019, BANI Bandung telah mengeluarkan putusan atas perkara No. 33/2018/BANI Bandung yang pada intinya menyatakan akta perjanjian kerja sama antara Perusahaan dan PT Pentasena Bina Wisesa adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta mengakibatkan Perusahaan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp152.225.328.

On May 23, 2019, BANI Bandung had been issued case verdict No. 33/2018/BANI Bandung which substantially stated the deed of cooperation agreement of PT Company with PT Pentasena Bina Wisesa was legitimate and had binding legal force that result the company must paid the compensation for Rp152,225,328.

Atas putusan tersebut Perusahaan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Juli 2019 dengan Register Perkara No. 256/Pdt.G/2019/PN.Bdg. Pada tanggal 10 Oktober 2019 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak permohonan banding Perusahaan.

Based on the decision of the BANI Bandung, the Company submitted an application for canceling the arbitration award to the Head of the Bandung District Court on July 12, 2019 with Case Register No. 256/Pdt.G/2019/PN.Bdg. On October 10, 2019 the Panel of Judges of Bandung District Court, which rejected the request to cancel the arbitration award submitted by the Company.

Pada tanggal 18 Maret 2020, Perusahaan melakukan gugatan perlawanan atas upaya Eksekusi atas putusan BANI Bandung Nomor 33/2018/BANI Bandung tanggal 23 Mei 2019 dengan Register 127/Pdt.Bth/2020/Pn.Bdg tentang Pertokoan di Emplasemen Kampung Bandan yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi Jasin, S.H tanggal 18 Maret 2004.

On March 18, 2020 the Company filed a counterclaim against the attempt to execute the decision of the BANI Bandung Nomor 33/2018/BANI Bandung on May 23, 2019 with Case Register 127/Pdt.Bth/2020/Pn.Bdg Regarding Shops in the emplacement of Kampung Bandan made in front of Notary Surjadi Jasin, S.H on March 18, 2004.

Pada tanggal 25 Maret 2021 diputuskan menolak perlawanan pelawan seluruh nya atas Emplasemen Kampung Bandan seluas 22.430m.

On March 25, 2021 was decided to reject the resistance of all opponents regarding emplacement of Kampung Bandan area of 22,430m.

Pada tanggal 3 Juni 2021, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan nomor pengajuan W11.U1/3239/HT.02.02/VI/2021.

On June 3, 2021, the Company submitted an appeal to the Jawa Barat High Court with filing number W11.U1/3239/HT.02.02/VI/2021.

Pada 14 Agustus 2021, Perusahaan menerima hasil Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 127/Pdt.Bth/e-court/2020/PN.Bdg Tanggal 25 Maret 2021.

On August 14, 2021, the Company received the results of the Appeal Decision by the Jawa Barat High Court which upheld the previous decision of the Bandung District Court number 127/Pdt.Bth/e-court/2020/PN.Bdg on 25 Maret 2021.

Sampai dengan laporan ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses pengajuan kasasi.

Until the issuance of this report, this case is still in the process of filing a cassation.

51. Kontinjensi (Lanjutan)

51. Contingencies (Continued)

- c. Perusahaan merupakan tergugat 1 dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Nani Sumarni, dkk melalui Pengadilan Negeri Bandung yang terdaftar dalam perkara No. 65/Pdt.G/e-court/2020/PN.Bdg tertanggal 7 Februari 2020. Inti dari gugatan tersebut adalah Perusahaan digugat terkait sengketa kepemilikan tanah terletak di Jl. Garuda Kec. Andir, Kel. Garuda, Kota Bandung. Penggugat mengklaim bahwa Perusahaan merugikan penggugat dan menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp4.660.315.785.

Hasil Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 65/Pdt.G/2020/PN.Bdg tanggal 9 Februari 2021 menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik tanah tersebut. Berdasarkan hasil putusan tersebut, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan nomor register 273/Pdt/2021/PT.Bdg.

Pada 13 Juli 2021, Perusahaan menerima hasil Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung sebelumnya.

Perusahaan mengajukan kasasi dengan nomor 1741K/PDT/2022 ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 29 Juni 2022, Perusahaan menerima hasil Putusan Tingkat Kasasi bahwa menolak permohonan kasasi dari Perusahaan dan Pekerja. Sampai dengan laporan ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses Peninjauan Kembali.

- c. *The Company is a first Defendant in the act against the law lawsuit as submitted by Nani Sumarni et al. through Bandung province high court submitted as the case No. 65/Pdt.G/e-court/2020/PN.Bdg on February 7, 2020. The point of lawsuit is the Company get sued about ownership dispute related land on Jalan Garuda, district Andir, Bandung City. The plaintiff claimed the Company for harm and sued compensation of Rp4,660,315,785.*

Results of the Bandung District Court Decision No. 65/Pdt.G/2020/PN.Bdg date February 9, 2021 stated that the plaintiff is the owner of the land. Based on the decision, the Company filed an appeal to the Bandung High Court with registration number 273/Pdt/2021/PT.Bdg.

On July 13, 2021, the Company received the results of the Appeal Decision by the Bandung High Court which upheld the previous decision of the Bandung District Court.

The Company submitted a cassation No.1741K/PDT/2022 to the Supreme Court. On the June 29, 2022 The Company received the results of the Cassation Decision which rejected the cassation request submitted by the Company and Workers. Until the issuance of this report, this case is still in the process of Judicial Review.

51. Kontinjensi (Lanjutan)

51. Contingencies (Continued)

- d. Perusahaan merupakan tergugat 1 dalam gugatan yang diajukan oleh Tengku Hamdy Osman Delikhan melalui Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dalam perkara 48/Pdt.G/2021/PN.Mdn pada tanggal 5 Februari 2021. Inti dari gugatan tersebut adalah Tengku Hamdy Osman Delikhan menggugat KAI karena tahun 1868 terjadi perjanjian konsesi antara Sultan Deli dan DSM selama 90 tahun yang seharusnya berakhir tahun 2002 dan aset tersebut dikembalikan ke Tengku Hamdy Osman Delikhan. Penggugat mengklaim bahwa perusahaan merugikan penggugat dan menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp707.340.000

Pada tanggal 23 November 2021, Pengadilan Negeri Medan telah mengeluarkan putusan atas perkara No. 48/Pdt.G/2021/PN.Mdn yang pada menyatakan menolak tuntutan penggugat.

Pada tanggal 14 Desember 2021, Tengku Hamdy Osman Delikhan al haj gelar Tengku Raja Muda Deli mengajukan banding. Sampai dengan laporan ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses.

- e. Perusahaan merupakan tergugat 1 dalam gugatan yang diajukan oleh PT Saribumi Eramaju Jaya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perwakilan Bandung yang terdaftar atas perkara No. 42/2022/BANI Bandung pada tanggal 5 September 2022. Inti dari gugatan tersebut adalah surat pemutusan perjanjian yang dikeluarkan oleh Perusahaan kepada PT Saribumi Eramaju Jaya tentang pemanfaatan tanah di Emplasemen Stasiun Jakarta Kota.

Penggugat mengklaim bahwa Perusahaan merugikan penggugat dan menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp394.442.104. Sampai dengan laporan ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses.

- d. The company constitute as the 1st defendant in the act against the law lawsuit as submitted by Tengku Hamdy Osman Delikhan through Medan District Court submitted as the case 48/Pdt.G/2021/PN.Mdn on February 5, 2021. The point of lawsuit is the Company get sued about in 1868 There was a concession agreement between Sultan Deli and DSM for 90 years which should have ended in 2002 and the assets were returned to Tengku Hamdy Osman Delikhan. The plaintiff claimed the Company for harm and sued compensation of Rp707,340,000.

On November 23, 2021, Medan District Court had been issued case verdict No. 48/Pdt.G/2021/PN.Mdn which substantially stated rejected the plaintiff's claim.

On December 14, 2021, Tengku Hamdy Osman Delikhan al haj with the title Tengku Raja Muda Deli filed an appeal. Until the issuance of this report, this case is still in the process.

- e. The Company constitute as the 1st defendant in the act against the law lawsuit as submitted by PT Saribumi Eramaju Jaya through Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Bandung Representative submitted as the case No. 42/2022/BANI Bandung on September 5, 2022. The Essence of lawsuit is letter of agreement termination which are issued by the company to PT Saribumi Eramaju Jaya regarding the use of land in the Jakarta Kota Station Emplacement.

Plaintiff claimed the loss caused by the company and sue the compensation of Rp394,442,104. Until the issuance of this report, this case is still in the process.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

52. Informasi Tambahan Terkait Arus Kas

52. Additional Information Related to Cash Flows

Tabel dibawah ini menunjukkan transaksi investasi yang tidak menggunakan kas:

The Table below represents non-cash investment transactions:

	2022	2021 *)	
Penambahan Aset melalui Utang Usaha:			Addition of Assets through Trade Payables:
Aset Tetap	211.276.760	125.434.851	Fixed Assets
Aset Takberwujud	16.195.823	--	Intangible Assets
Hak Pengoperasian			Infrastructure Assets
Aset Prasarana	54.746.697	--	Operating Rights
Hibah:			Grant:
Aset Tetap	256.775	--	Fixed Assets
Pinjaman Bank:			Bank Loans:
Aset Tetap	58.055.044	118.864.233	Fixed Assets
Hak Pengoperasian			Infrastructure Assets
Aset Prasarana	238.575.780	452.299.477	Operating Rights
Penambahan Investasi Pada Ventura Bersama melalui Reklasifikasi dari Uang Muka Setoran Modal	7.230.581.343	--	Addition of Investment in Joint Venture through Reclassification of Paid in Capital Advance
Penerimaan Bunga Pinjaman dari Ventura Bersama melalui Piutang Lain-lain PSBI	138.896.858	--	Receipt of Loan Interest from Joint Venture through Other Receivables of PSBI
Jumlah	7.809.688.222	696.598.560	Total

*) Utang usaha tahun 2021 terkait perolehan aset tetap dibayarkan seluruhnya di tahun 2022.

*) Trade payables in 2021 related acquisition of fixed assets is fully paid in 2022.

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sebagai berikut:

The table below represents a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2022 and 2021, as follows:

	2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Arus Kas/ Cash Flow		Non Kas/ Non-cash	Saldo Akhir/ Ending Balance	
		Penerimaan/ Receipt	Pembayaran/ Payment			
Pinjaman Jangka Pendek	2.659.962.173	13.706.510.355	(14.606.472.528)	--	1.760.000.000	Short-Term Loan
Pinjaman Jangka Panjang	17.436.738.082	2.654.659.751	(941.505.589)	329.698.174	19.479.590.418	Long-Term Loan
Utang Obligasi Jangka Pendek	999.447.166	--	(1.000.000.000)	552.834	--	Short-Term Bonds Payable
Utang Obligasi Jangka Panjang	2.993.800.573	1.500.000.000	(5.041.083)	2.000.891	4.490.760.381	Long-Term Bonds Payable
Sukuk	--	500.000.000	(1.785.917)	93.028	498.307.111	Sukuk
Liabilitas Sewa	82.145.435	--	(37.190.355)	16.207.820	61.162.900	Lease Liabilities
Pinjaman Program PEN	3.500.000.000	--	--	--	3.500.000.000	PEN Program Loan
	2021					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Arus Kas/ Cash Flow		Non Kas/ Non-cash	Saldo Akhir/ Ending Balance	
		Penerimaan/ Receipt	Pembayaran/ Payment			
Pinjaman Jangka Pendek	3.415.206.865	6.902.258.306	(7.657.502.999)	--	2.659.962.173	Short-Term Loan
Pinjaman Jangka Panjang	14.432.655.049	2.806.736.985	(381.327.501)	578.673.549	17.436.738.082	Long-Term Loan
Utang Obligasi Jangka Pendek	--	--	--	999.447.166	999.447.166	Short-Term Bonds Payable
Utang Obligasi Jangka Panjang	3.990.924.392	--	--	(997.123.819)	2.993.800.573	Long-Term Bonds Payable
Liabilitas Sewa	105.157.333	--	(26.886.581)	3.874.683	82.145.435	Lease Liabilities
Pinjaman Program PEN	3.500.000.000	--	--	--	3.500.000.000	PEN Program Loan

53. Kejadian Penting Setelah Periode Pelaporan

53. Events After Financial Reporting Period

- Berdasarkan Akta Perusahaan No. 122 tanggal 11 Januari 2023 dibuat oleh Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H. Notaris di Bandung dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0008225, penyertaan modal negara tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.200.000.000 telah disahkan menjadi setoran modal sehingga jumlah saham ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi 22.368.743 saham atau setara dengan Rp22.368.743.000 (Catatan 34.a)
- Pada tanggal 08 Februari 2023, Perusahaan dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk menandatangani berita acara kesepakatan No.KL.707/II/9/KA-2023 tentang penetapan tarif angkutan batu bara relasi Tanjung Enim Baru- Tarahan dan relasi Tanjung Enim Baru-Kertapati untuk periode tahun 2023 sampai 2027.
- Pada tanggal 15 Februari 2023, Direktur Pengelolaan Sarana Perusahaan Sdr. Eko Purwanto telah berakhir sesuai ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-7/MBU/09/2022.
- Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Line No (15) 43 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 08 Maret 2023 untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 24 Februari 2024.
- Pada tanggal 10 Maret 2023, Perusahaan memberikan penyertaan modal kepada PT PSBI sebesar Rp2.030.804.000 yang bersumber dari PMN TA 2022 dengan skema Uang Muka Setoran Modal (UMSM) dalam rangka pendanaan tahap pertama *cost overrun* proyek KCJB.
- Based on the Company Deed No. 122 dated January 11, 2023 made by Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H. Notary in Bandung and has been approved from the Ministry of Law and Human Rights with Decree No. AHU-AH.01.03-0008225, Additional of Republic Indonesia's Capital dated December 31, 2022 amounting to IDR 3,200,000,000 has been approved as a capital investment so the number of shares issued and paid by the Company becomes 22,368,743 shares or equivalent to Rp22,368,743,000 (Note 34.a)
- On February 8, 2023, the Company and PT Bukit Asam (Persero) Tbk signed the minutes of agreement No.KL.707/II/9/KA-2023 regarding the determination of coal transport rates for the Tanjung Enim Baru-Tarahan and Tanjung Enim Baru-Kertapati for the period 2023 to 2027.
- As of February 15 2023, Director of Facilities Management of the Company Mr. Eko Purwanto has ended in accordance with the provisions of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-11/MBU/07/2021 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Termination of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises as amended with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-7/MBU/09/2022.
- The company has signed an Amendment to the Working Capital Credit Agreement Line No (15) 43 with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk on March 8, 2023 to extend the term of the loan until February 24, 2024.
- As of March 10, 2023, the Company provided capital participation to PT PSBI amounting to Rp2,030,804,000 sourced from the Government's capital (PMN) in 2022 with the Capital Advances (UMSM) scheme in the context the first phase of funding of the KCJB project cost overrun.

**53. Kejadian Penting Setelah Periode Pelaporan
(Lanjutan)**

**53. Events After Financial Reporting Period
(Continued)**

- Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak No. S-00163/RIKSIS/KPP.1904/2023 tanggal 21 Maret 2023 dan surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar No. 00022/406/21/093/23 tanggal 17 April 2023 atas hasil pemeriksaan pajak badan tahun 2021 sebagai berikut:
 1. Akumulasi rugi fiskal tahun 2021 adalah sebesar Rp960.090.331; (Catatan 13.c);
 2. Lebih bayar PPh Badan tahun 2021 sebesar Rp67.009.624.
- Pada 12 April 2023, Obligasi I seri B, Obligasi II seri A dan B serta Obligasi Berkelanjutan I Perusahaan mendapatkan peringkat "AAA" dari PEFINDO untuk periode 11 April 2023 hingga 1 April 2024.
- Pada 12 April 2023, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Perusahaan mendapatkan peringkat "AAA" dari PEFINDO untuk periode 11 April 2023 hingga 1 April 2024.
- Perusahaan telah mengangkat Sdr. Raden Agus Dwinanto Budiadji ditugaskan sebagai *Plt. Executive Vice President of Corporate Secretary* menggantikan Sdr. Emanuel Kurniawan Kriswijayanto selaku Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) *Executive Vice President of Corporate Secretary*, efektif sejak 18 April 2023 sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor: SK.U/KH.608/IV/1/SAP/KA-2023 tanggal 18 April 2023.
- Anggaran Dasar Railink telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah menurut Keputusan Para Pemegang Saham yang telah disahkan dengan Akta Notaris Ariani Lakhsmitjati Rachim, S.H., No. 5 tanggal 27 Januari 2023 mengenai Perubahan Modal Dasar dan Modal Disetor kepada Railink. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dengan Surat Keputusan No. AHU-0006548.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023.
- The Company received Notification of Tax Audit Results No. S-00163/RIKSIS/KPP.1904/2023 dated 21 March 2023 and Tax Overpayment Assessment Letter No. 00022/406/21/093/23 dated 17 April 2023 on the results of the 2021 corporate tax audit as follows:
 1. Accumulated fiscal losses in 2021 amounting to Rp960,090,331; (Note 13.c);
 2. The Overpayment of Corporate Income Tax 2021 amounting to is Rp67,009,624.
- As of April 12, 2023, the Company Bond I series B, Bond II series A and B and Continuing Bonds I is rated "AAA" by PEFINDO for the period April 11, 2023 until April 1, 2024.
- As of April 12, 2023, Continuing Sukuk Ijarah I the Company is rated "AAA" by PEFINDO for the period April 11, 2023 until April 1, 2024.
- The Company has appointed Raden Agus Dwinanto Budiadji to be assigned as *Plt. Executive Vice President of Corporate Secretary* replacing Emanuel Kurniawan Kriswijayanto as Officer in Charge (PYMT) *Executive Vice President of Corporate Secretary*, effective from April 18, 2023 as in Decree Number: SK.U/KH.608/IV/1/SAP/KA-2023 dated April 18, 2023.
- Railink's Article of Association has been amended several times, most recently by Agreement of Stockholders legalized by the Notarial Deed of Ariani Lakhsmitjati Rachim, S.H., No. 5 dated January 27, 2023 concerning the Changes in the authorized and paid in capital. These amendments have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. Decision Letter of Amended's articles No. AHU-0006548.AH.01.02.Tahun 2023 dated January 31, 2023.

55. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amendemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2022.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tanggahan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal; dan
- Revisi PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

Standar baru yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi.
Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar tersebut.

56. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2023.

55. New Accounting Standard and Interpretation Standard has been Issued not Yet Effective

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2022.

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;
- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as a Current or Non Current;
- Amendments PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates;
- Amendments PSAK 46: Income Tax regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and
- Revised PSAK 107: Accounting for Ijara.

New standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 74: Insurance Contract.
Amendments PSAK 74: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 – Comparative Information.

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

56. Management's Responsibility and Approval of the Consolidated Financial Statements

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the management and were approved by the Directors for issuance on May 29, 2023.



PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

JL. Perintis Kemerdekaan No. 1
Bandung 40117
PO Box 1163 Bandung 40000
Telp : 022-4230031,4230039
Teleks : 28263, 28358
Fax : 022-4203342 Toka 10039

Website : www.kai.id
Email : kontak_pelanggan@kereta-api.co.id



2022

Laporan Tahunan dan Keberlanjutan
Annual and Sustainability Report

BERAKSELERASI MEMPERKUAT KONTRIBUSI BAGI NEGERI
Accelerating to Strengthen Contribution for the Nation



PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1,
Bandung 40117,
PO Box 1163 Bandung 40000

P : 022-4230031, 4230039, 4230054

F : 022-4203342 ext. 10039

E : dokumen@kai.id

www.kai.id

Laporan Tahunan dan Keberlanjutan
Annual and Sustainability Report

2022